PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY





Solid Integration

Towards a National Maritime Economic Gateway

Integrasi Kuat Menuju Gerbang Ekonomi Maritim Nasional





PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

2022 Annual Report
Laporan Tahunan

TEMA DAN ARTI TEMA
Themes and Explanation of Themes



INTEGRASI KUAT MENUJU GERBANG EKONOMI MARITIM NASIONAL

Pasca penggabungan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memiliki visi untuk menjadi pemimpin ekosistem maritim yang terintegrasi dan berkelas dunia, dan misi untuk mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut diwujudkan dengan menyediakan jasa kepelabuhan dan maritim yang handal dan terintegrasi dengan kawasan industri untuk mendukung jaringan logistik Indonesia dan global dengan memaksimalkan manfaat ekonomi Selat Malaka. Tahun 2022 merupakan fase *business alignment and integration* yaitu Perseroan akan berfokus pada penyelarasan bisnis paska integrasi melalui standardisasi dan integrasi operasional dan komersial untuk peningkatan kualitas pelayanan, melakukan investasi terintegrasi untuk pengembangan bisnis serta reorganisasi perusahaan dan pengembangan budaya terintegrasi.

STRONG INTEGRATION TOWARDS THE NATIONAL MARITIME ECONOMY GATEWAY

Following the merger, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) or Pelindo has a vision to become an integrated and world-class maritime ecosystem leader, and a mission to create a national maritime ecosystem network by increasing network connectivity and service integration to support Indonesia's economic growth. This will be realized by providing reliable and integrated ports and maritime services with industrial estates to support the Indonesian and global logistics network by maximizing the economic benefits of the Malacca Straits. 2022 was the business alignment and integration phase, where the Company focused on post-integration business alignment through operational and commercial standardization and integration to improve service quality, integrated investments for business development, and reorganized the Company to develop an integrated culture.

KESINAMBUNGAN TEMA
Theme Continuity

2021



United We Stand
Bersatu Kami Kuat



Inisiatif strategis pemerintah untuk mewujudkan jaringan koneksi nasional dan ekosistem logistik yang lebih kokoh diwujudkan melalui penggabungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan selanjutnya menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dengan penggabungan ini, diharapkan jaringan koneksi maritim, baik koneksi antara pelabuhan-pelabuhan dalam negeri maupun di luar negeri akan semakin meningkat. Melalui penggabungan ini, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), selanjutnya disebut Pelindo, memiliki kendali strategis yang lebih baik dan dukungan faktor finansial yang kuat sehingga operasional bisnis Pelindo akan lebih terkoordinasi, efisien, efektif, dan memiliki standar tertentu yang nantinya akan memberikan dampak baik bagi masyarakat, terutama pengguna jasa.

Penggabungan keempat entitas usaha tersebut merupakan terobosan bisnis pelabuhan yang sebelumnya bersifat regional, kini bertransformasi menjadi skala nasional. Dengan membentuk 4 (empat) korporasi *subholding* setara BUMN yaitu, *Subholding* Pelindo Terminal Petikemas, *Subholding* Pelindo Multi Terminal, *Subholding* Pelindo Jasa Maritim, dan *Subholding* Pelindo Solusi Logistik. Maka skema bisnis akan lebih terfokus pada tiap-tiap klaster sehingga dapat meningkatkan kapasitas pelayanan Pelindo dan efisiensi usaha. Integrasi juga membuat kendali strategis yang lebih baik dalam perencanaan keseluruhan untuk jaringan, pengurangan biaya logistik, dan meningkatkan infrastruktur serta kapasitas. Entitas usaha yang sebelumnya bergerak secara mandiri kini telah bertransformasi menjadi Pelindo yang terintegrasi dan mampu mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

The government's strategic initiative to create a stronger national connection network and logistics ecosystem was realized through the merger of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) that subsequently became PT Pelabuhan Indonesia (Persero). With this merger, it is hoped that the maritime connection network between domestic and international ports will grow. Through this merger, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), hereinafter referred to as Pelindo, will have better strategic control and strong financial support so that Pelindo's business operations will be more coordinated, efficient, effective, and standards that will have a good impact on the communities, especially service users.

The merger of the four business entities is a breakthrough in a port business that was previously regional in nature, to be transformed on a national scale. By establishing 4 (four) SOE-equivalent subholding corporations, Pelindo Terminal Petikemas Subholding, Pelindo Multi Terminal Subholding, Pelindo Jasa Maritim Subholding, and Subholding Pelindo Solusi Logistik Subholding. The business scheme will be more focused on clusters to increase Pelindo's service capacity and business efficiency. Integration will also provide better strategic control over overall planning for the network, reduce logistics costs, and improve the infrastructure and capacity. The previously independent business entities have been transformed into an integrated Pelindo to create a national maritime ecosystem network through increased network connectivity and service integration to support the country's economic growth now.

2020



OPERATIONAL AND COMMERCIAL EXCELLENCE FOR BUSINESS STABILIZATION

Keunggulan Operasi dan Komersial demi Stabilisasi Bisnis

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mulai bersiap untuk menjadi *World Class Maritime Ecosystem*. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tahapan yang ingin dicapai Perseroan pada tahun 2020 sebagai pijakan menuju visi di tahun 2024 adalah Stabilisasi Bisnis Perusahaan melalui Keunggulan Operasi dan Komersial.

Untuk mendukung stabilitas bisnis, Perseroan melakukan 5 (lima) *milestone* utama, yang meliputi kesehatan dan keselamatan lingkungan, improvisasi proses bisnis, optimalisasi pendapatan dan peningkatan efektivitas biaya, peningkatan kemampuan digital, serta optimalisasi *capital expenditure* guna menghadirkan nilai tambah.

Operational and Commercial Excellence for Business Stabilization PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is starting to prepare to become a World Class Maritime Ecosystem. In connection with this, the stage that the Company wants to achieve in 2020 as a stepping stone towards the vision for 2024 is the "Stabilization of the Company's Business through Operational and Commercial Excellence".

To support business stability, the Company has implemented 5 (five) main milestones, which include environmental health and safety, business process improvement, revenue optimization and cost effectiveness improvement, digital capability enhancement, and capital expenditure optimization to provide added value.

2019



BUSINESS EXPANSION FOR SUSTAINABLE SUPERIOR PERFORMANCE

Ekspansi Bisnis untuk Mencapai Kinerja Unggul yang Berkelanjutan

Pada tahun 2019, Perseroan memiliki target untuk meningkatkan laba dari pertumbuhan organik dan non-organik. Hal ini dicapai selain dengan meningkatkan performa 12 (dua belas) cabang yang telah dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Anak Perusahaan yang bergerak di bisnis pelabuhan, Perseroan juga akan berfokus pada kegiatan akuisisi pelabuhan baru di beberapa wilayah, seperti Patimban, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan lain-lain.

Untuk mendukung target ini, Perseroan juga bekerja sama dengan beberapa kawasan industri, perusahaan pelayaran serta akan meningkatkan performansi Anak Perusahaan khususnya yang bergerak di bisnis pendukung. Di samping itu, pada tahun 2019, Perseroan telah melakukan *National Connectivity Program* dengan mengimplementasikan proyek strategis yaitu Pembangunan *Container* Terminal 2 (CT 2) di New Priok, Pelabuhan Kijing di Pontianak, Jalan Tol Cilincing Cibitung dan beberapa proyek strategis lain. Sebagai langkah untuk mewujudkan *Global Expansion*, Perseroan melakukan kerja sama dengan beberapa *sister port*, ekspansi bisnis Anak Perusahaan, aktif dalam kegiatan atau organisasi internasional seperti *chainport*, ASEAN Ports Association (APA), International Association of Ports and Harbors (IAPH) serta beberapa kegiatan lain.

In 2019, the Company has a target to increase profit from organic growth and non-organic. This was achieved by improving the performance of 12 (twelve) branches managed by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and its subsidiaries engaged in the port business with the Company will also focus on the acquisition of new ports in several regions, such as Patimban, Kawasan Berikat Nusantara (KBN), and others.

To support this target, the Company also cooperated with several industrial estates, shipping companies and improved the performance of subsidiaries, especially those engaged in supporting businesses. Apart from that, in 2019 the Company has carried a National Connectivity Program by implementing the strategic projects, namely the Construction of Container Terminal 2 (CT 2) in New Priok, Kijing Port in Pontianak, Cilincing Cibitung Toll road and several other strategic projects. As a step towards realizing Global Expansion, the Company entered into cooperation with several sister ports, performed Subsidiaries' business expansion, and actively involved in international activities or organizations such as chainport, APA, IAPH and several other activities.

2018



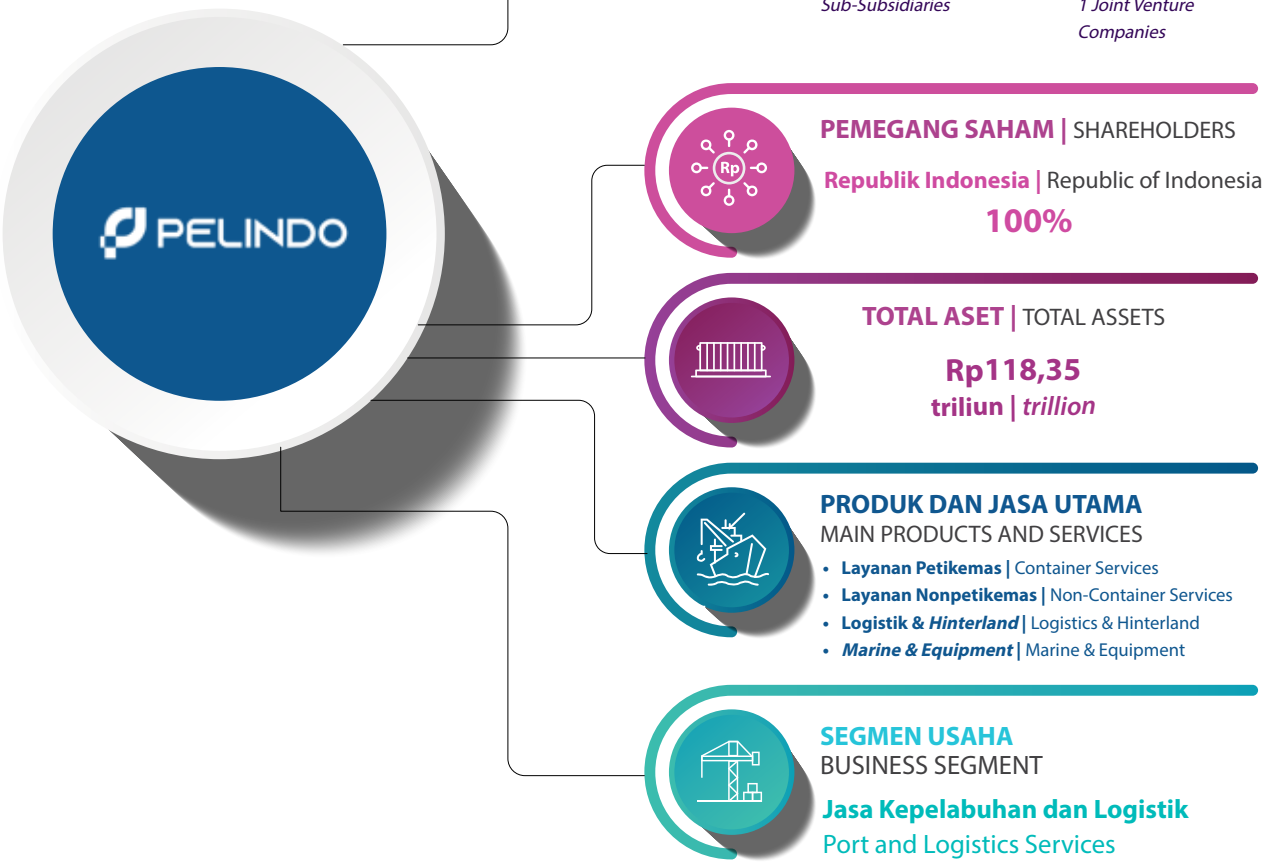
ESTABLISHMENT OF EXCELLENCE DIGITAL PORT

Membangun Pelabuhan Digital yang Unggul

Arah menuju *World Class Performance* di 2020 telah mampu dicapai sesuai dengan *roadmap* yang telah dicanangkan. Pada tahun 2018, PT Pelindo II (Persero) telah melalui fase *Establishment of Performance*. Kinerja Perseroan tahun 2018 telah mampu melampaui yang telah ditargetkan. Hal ini merupakan hasil dari diterapkannya aktivitas pelayanan dan operasional berbasis teknologi informasi (*Digital Port*). Bahkan, Perseroan merupakan *Digital Port* pertama di Indonesia. Perseroan telah menerapkan enam fitur digital pelayanan secara efektif, sehingga pelayanan yang diberikan telah mampu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan yang selanjutnya mampu meningkatkan kinerja Perseroan. Keenam fitur layanan tersebut, yaitu *Master Customer Data, Customer Profiling, Customer Service, Customer Visit Management, Customer Survey,* dan *Sales* dikemas dalam fitur aplikasi *Digital Customer Relationship Management* (CRM) di seluruh Kantor Cabang dan dua Anak Perusahaan IPC, yaitu PT Pelabuhan Tanjung Priok dan PT IPC Terminal Petikemas.

The direction towards World Class Performance in 2020 has been achieved in accordance with the planned roadmap. In 2018, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has gone through the phase of Establishment of Performance. The Company's performance in 2018 has been able to exceed the targets. This achievement is the result of the implementation of information technology-based service and operational activities (Digital Port). In fact, the Company is the first Digital Port in Indonesia. The Company has implemented the six (6) digital service features effectively, hence the services provided have succeeded in increasing customer satisfaction and loyalty, which in turn improving the Company's performance. The six service features, namely Master Customer Data, Customer Profiling, Customer Service, Customer Visit Management, Customer Survey, and Sales are contained in the Digital Customer Relationship Management (CRM) application feature in all Branch Offices and two Subsidiaries of IPC, i.e. PT Pelabuhan Tanjung Priok and PT IPC Terminal Petikemas.

SEKILAS TENTANG PERSEROAN
The Company at a Glance



4 SUBHOLDING

- **8 Entitas Anak**
  Subsidiaries
- **21 Entitas Cucu**
  Subsidiaries of Subsidiaries
- **13 Entitas Cicit**
  Sub-Subsidiaries
- **13 Perusahaan Asosiasi**
  Associated Companies
- **1 Perusahaan Ventura Bersama**
  1 Joint Venture Companies

PEMEGANG SAHAM | SHAREHOLDERS

Republik Indonesia | Republic of Indonesia

100%

TOTAL ASET | TOTAL ASSETS

Rp118,35

triliun | ***trillion***

PRODUK DAN JASA UTAMA
MAIN PRODUCTS AND SERVICES

- **Layanan Petikemas** | Container Services
- **Layanan Nonpetikemas** | Non-Container Services
- **Logistik & *Hinterland*** | Logistics & Hinterland
- ***Marine & Equipment*** | Marine & Equipment

SEGMEN USAHA
BUSINESS SEGMENT

Jasa Kepelabuhan dan Logistik
Port and Logistics Services

DAFTAR ISI
Table of Contents



2 **Tema dan Arti Tema**
Themes and Explanation of Themes

3 **Kesinambungan Tema**
Theme Continuity

5 **Sekilas Tentang Perseroan**
The Company at a Glance

6 **Daftar Isi**
Table of Contents

8 **Jejak Langkah**
Milestone

12 **Pelindo *Group* Pasca Penggabungan**
Pelindo Corporate Structure After The Merger

36 **Pencapaian Kinerja Penting Tahun 2022**
Important Performance Achievements In 2022

Kilas Kinerja 2022
2022 Performance Review

37 **Ikhtisar Data Keuangan Penting**
Important Financial Data Overview

49 **Informasi Saham**
Share Information

52 **Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi**
Information On Bonds, Sukuk, and/or Convertible Bonds

Laporan Direksi dan Dewan Komisaris
Board of Directors Report and Board of Commissioners Report

54 **Peristiwa Penting**
Important Events

60 **Laporan Direksi**
Board of Directors Report

76 **Laporan Dewan Komisaris**
Board of Commissioners' Report

Profil Perusahaan
Company Profile

88 **Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2022 PT Pelabuhan Indonesia (Persero)**
Statement By The Members of The Board of Directors and Members of The Board of Commissioners Concerning Responsibility for The 2022 Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

92 **Identitas Perusahaan**
Company Identity

94 **Nama dan Alamat Kantor Wilayah dan Kantor Cabang**
Names and Addresses of Regional Offices and Branch Offices

98 ***Brand* Perusahaan**
Company Brand

99 **Riwayat Singkat Perusahaan**
Brief History of The Company

101 **Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan**
Vision, Mission, and Corporate Culture

103 **Kegiatan Usaha**
Business Activities

108 **Wilayah Operasional**
Operating Areas

109 **Daftar Keanggotaan Asosiasi**
Association Membership

110 **Struktur Organisasi**
Organizational Structure

112 **Profil Direksi**
Board of Directors' Profiles

125 **Profil Dewan Komisaris**
Board of Commissioners' Profiles

142 **Profil Pekerja**
Employee Profiles

145 **Komposisi Pemegang Saham**
Composition of Shareholders

146 **Pemegang Saham Utama dan Pengendali**
Majority and Controlling Shareholder

148 **Daftar Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama**
List of Subsidiaries, Associate Companies and Joint Venture Companies

170 **Struktur Grup Perusahaan**
Company Group Structure

172 **Kronologi Penerbitan Saham**
Share Issuance Chronology



174 **Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya**
Issuance and/or Other Securities Listing Chronology

178 **Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)**
Accountant Public (AP) and Accountant Public Offices (KAP) Services

Analisis Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

179 **Lembaga dan/atau Profesi Penunjang**
Supporting Institutions and/or Professionals

180 **Penghargaan dan Sertifikasi**
Awards and Certification

Sumber Daya Manusia
Human Resources

196 **Informasi yang Tersedia di *Website***
Information Available on The Website

200 **Tinjauan Perekonomian**
Economic Review

216 **Tinjauan Operasional**
Operational Review

275 **Tinjauan Keuangan**
Financial Review

380 **Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia**
Human Resources Management Strategy

394 **Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia**
Human Resources Management Implementation and Policy

401 **Sistem Informasi Sumber Daya Manusia**
Human Resources Information System

Teknologi Informasi
Information Technology

404 **Internalisasi Budaya**
Culture Internalization

406 **Struktur Pengelola Sumber Daya Manusia**
Human Resources Management Structure

407 **Rencana Kerja Sumber Daya Manusia 2023**
Human Resources Work Plan For 2023

410 **Teknologi Informasi**
Information Technology

414 **Tata Kelola Teknologi Informasi**
Information Technology Governance

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

415 **Struktur Pengelola Teknologi Informasi**
Information Technology Management Structure

415 **Rencana Kerja Teknologi Informasi 2023**
Information Technology 2023 Work Plan

420 **Pencapaian Dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan**
Achievements In Corporate Governance

421 **Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan**
Basis of Corporate Governance Implementation

422 **Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan**
Structure and Mechanism of Corporate Governance

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Corporate Social Responsibility

692 **Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka**
Implementation of Public Company Governance Guidelines

706 ***Good Corporate Governance Assessment***
Good Corporate Governance Assessment

736 **Kinerja Program TJSL**
CSER Program Performance

744 **Realisasi Program TJSL Tahun 2022**
Realization of The CSER Program In 2022

752 **Dokumentasi Pelaksanaan Program**
Program Implementation Documentation

756 **Program Kolaborasi BUMN**
SOE Collaboration Program

763 **Pencapaian TJSL Tahun 2022**
CSER Achievements In 2022

764 **TJSL Pemenuhan Peraturan Menteri Bumn Nomor PER-06/MBU/09/2022**
TJSL Fulfillment of Soe Minister Regulation Number PER-06/MBU/09/2022

764 **TJSL Pemenuhan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021**
TJSL Fulfillment of Financial Services Authority Circular Number 16/SEOJK.04/2021

765 **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Lingkungan Hidup**
Corporate Social Responsibility Related To The Environment

770 **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Tanggung Jawab Kepada Konsumen**
Corporate Social Responsibility Related to Consumer Responsibility

Lampiran
Appendix

773 **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan**
Corporate Social Responsibility Related To Social Community Development

776 **Referensi Silang Seojk No. 16/SEOJK.04/2021: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik**
Cross-Reference No. 16/SEOJK.04/2021: Format and Completing The Annual Report of Issuers Or Public Companies

JEJAK LANGKAH
Milestone

1960

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan dengan status Perusahaan Negara (PN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1960 tentang pengelolaan pelabuhan umum yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP).

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established with the status of a State Enterprise (PN) in accordance to the 1960 Government Regulation No. 19 concerning the management of ports by the Port Management Agency (BPP).

1964-1969

Kegiatan operasional pelabuhan dikoordinasikan oleh lembaga Pemerintah yang disebut Otoritas Pelabuhan, meskipun PN masih menangani aspek komersial.

The port's operational activities were coordinated by a government agency called the Port Authority, though PN still handled its commercial aspects.

1969-1983

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18/1969, BPP dikelola masing-masing pelabuhan. BPP menggantikan PN setelah Otoritas Pelabuhan dibubarkan.

According to the Government Regulation No. 18/1969, The BPP managed each seaport. BPP replaced PN after the Port Authority was dissolved.

1985

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1983 *juncto* PP No. 5 tanggal 5 Februari 1985, Perum Pelabuhan dilebur dan dibagi menjadi 4 wilayah operasi, dengan nama Perum Pelabuhan I sampai IV. Keempat Perum itu merupakan BUMN yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Based on the Government Regulation No. 15/1983 juncto PP No. 5 dated February 5, 1985, Perum Pelabuhan was merged and divided into four operational areas, under the names of Perum Pelabuhan I to IV. The four Companies later on became State-Owned Enterprises under the supervision of Ministry of Transportation of Republic of Indonesia.

1992

Badan hukum Perum diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57/1991, yang sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan perubahan pada nama Perusahaan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, dan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN, sebagaimana diatur dalam Akta Notaris Nomor 3 tertanggal 1 Desember 1992.

The legal form of Perum was changed into Limited Liability Company (PT) based on the Government Regulation No. 57/1991, whose shares are fully owned by the Republic of Indonesia resulted in changes to the Company's name to Perseroan Company (Persero) of PT Pelabuhan Indonesia II, under the management of the Ministry of SOEs, stipulated in Notarial deed No. 3 dated December 1, 1992.

2012

Pada tanggal 22 Februari 2012, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) meluncurkan *branding* identitas baru dan bertransformasi menjadi IPC, sebuah perusahaan penyedia jasa pelabuhan terkemuka di Indonesia, yang lebih efisien dan modern dalam berbagai aspek operasional, dalam rangka mencapai tujuan menjadi operator pelabuhan kelas dunia.

On February 22, 2012, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) launched its new identity and transformed into IPC, a leading port services company in Indonesia, to be more efficient and modern in every aspect of operations in order to achieve its goal to become a world-class port operator.

2013

IPC fokus kepada pengembangan langkah strategis perusahaan. Melanjutkan keberhasilan transformasi, IPC harus bergerak lebih cepat, efektif dan efisien dalam melayani kebutuhan jasa pelanggan atau pengguna jasa kepelabuhanan. Dengan optimisme dan keyakinan yang sungguh-sungguh, IPC siap melangkah mencapai terobosan-terobosan usaha di tahun-tahun selanjutnya serta menyiapkan diri menjadi yang terdepan, terbaik dan tersehat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pelabuhan yang dipandang oleh dunia. Salah satu capaian terbesar di tahun ini adalah *Groundbreaking* Terminal New Priok oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.

IPC focused on developing Company's strategic steps. Continuing the success of corporate transformation, the Company must move faster, effectively and efficiently in serving the needs of customer service or port service user. Through optimism and confidence, the Company was ready to step into business breakthroughs in the next years and prepare to be the leader, the best and healthiest in supporting Indonesia's economic growth and the respected port of the world. One of biggest achievements in this year was New Priok Terminal Groundbreaking by President of Republic of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

2014

Pada tahun 2014, IPC melakukan banyak investasi pada Entitas Anak, yang nilainya sebesar Rp1,43 triliun, meningkat 33,64% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp1,07 triliun. Selain itu, IPC juga menanamkan investasi pada pengembangan sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan yang dilakukan di dalam dan luar negeri. Dalam rangka terus meningkatkan kinerja, IPC juga telah melakukan sejumlah studi dan riset terkait dengan industri maritim. Di antaranya dilakukan bersama World Bank tentang *"Implementation of reducing logistic cost in Indonesia & Port Development priority projects and financing strategy"*. Untuk mewujudkan pelayanan satu atap yang memuaskan bagi seluruh pelanggan, IPC melalui Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha bekerja sama dengan Direktorat Operasi dan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok sebagai *pilot project,* telah menyediakan tempat pelayanan dengan suasana yang nyaman, terbuka, fleksibel, dan modern.

In 2014, the Company invested Rp1.43 trillion in subsidiaries, increased 33.64% compared to to Rp1.07 trillion in 2013. In addition, the Company also invested in human resources development, particularly in domestic and overseas education. In order to perform better, the Company has also conducted several studies and researches related to maritime industry. Among them are jointly carried out with the World Bank on "Implementation of Reducing Logistic Cost in Indonesia & Port Development Priority Projects and Financing Strategy". To establish one stop service to meet customers' demand, the Company provides an open, convenient, flexible, and modern service area through cooperation between its Directorate of Commercial/Business Development and Directorate of Operations and Branches of Tanjung Priok Port.

2015

Di tahun ini, IPC berhasil menerbitkan obligasi di pasar modal internasional atau *global bond* sebesar USD1,6 miliar. Selain itu, IPC juga semakin menorehkan prestasi di jaringan komunitas pelabuhan dunia dengan menjalin kerja sama dalam rangka *sister port* dengan Port of Townsville Ltd, Australia dan Shenzhen Port Authority. Dari sisi operasional, IPC telah melakukan banyak pemanfaatan dan pembaharuan di seluruh aspek fasilitas kepelabuhan *eksisting* seperti penerapan sistem OPUS dalam pengelolaan terminal peti kemas di Tanjung Priok, Panjang, Pontianak dan Palembang. Salah satu Prestasi lainnya yang diukir oleh IPC di tahun 2015 adalah diresmikannya IPC Corporate University oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo. IPC Corporate University merupakan bagian dari program transformasi strategis dan visioner dalam rangka menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan *soft infrastructure*. Melalui IPC Corporate University, IPC berharap untuk dapat mencetak generasi gemilang yang berdaya saing tinggi dengan kompetensi teknis kepelabuhanan dan logistik, manajemen dan kepemimpinan yang dapat diandalkan.

In 2015, IPC successfully issued bonds in the international capital markets or the global bond amounted to USD1.6 billion. In addition, IPC also increasingly created some achievements in the world with a network port community and worked together as the sister port of the Port of Townsville Ltd, Australia and Shenzhen Port Authority. From the operational point of view, the Company did a lot of utilization and renewal in all aspects of port existing facilities such as the implementation of the OPUS system in the management of container terminal in Tanjung Priok, Panjang, Pontianak and Palembang. Another achievement made by IPC in 2015 was the launch of IPC Corporate University by the President of Republic of Indonesia Joko Widodo. IPC Corporate University is part of a strategic and visionary transformation program in order to prepare things related to soft infrastructure. Through IPC Corporate University, the Company expects to be able to produce a glorious generation of highly competitive with the technical competence of port and logistics, management and reliable leadership.

2016

Perusahaan memasuki fase pertama *Corporate Roadmap*, yaitu *Fit in Infrastructure* dengan fokus pada penataan tata kelola atau *governance* yang mencakup proses bisnis, SOP dan struktur; budaya perusahaan; restrukturisasi korporasi dan model bisnis; dan mendefinisikan kembali bisnis; yang disertai dengan penyelarasan (*fine-tuning*) dalam semua aspek. Salah satu pencapaian terbesar Perusahaan di tahun 2016 adalah peresmian pengoperasian Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok/New Priok Container Terminal 1 (NPCT1) oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 13 September 2016. Selain itu Perusahaan juga berhasil mencapai skor GCG dengan nilai 93,316 dan skor KPKU dengan nilai 532,25.

The Company began the first phase of the Corporate Roadmap, The Fit in Infrastructure phase with the focus to governance management that covers business process, SOP and structure; corporate culture, corporate and business model restructuring; and business redefinition; along with fine tuning in all aspects. One of the biggest achievements of the Company in 2016 was the inauguration of the Kalibaru Container Terminal at Tanjung Priok/PT New Priok Container Terminal 1 (PT NPCT1) by the President of the Republic of Indonesia Mr. Joko Widodo on September 13, 2016. In addition, the Company also managed to achieve 93.316 GCG score and 532.5 KPKU score.

2017

Pada Fase *Enhancement*, IPC menutup tahun 2017 dengan membukukan capaian kinerja keuangan dan operasional yang luar biasa. Hal ini disebabkan oleh karena untuk yang pertama kalinya dalam sejarah IPC didirikan, IPC mampu meraih pencapaian tertinggi yaitu untuk tahun buku 2017 pendapatan usaha dicatatkan sebesar Rp10,91 triliun dan laba bersih Rp2,21 triliun EBITDA Rp4,03 triliun, BOPO 70,15%. Sementara pada aspek operasional, realisasi trafik arus petikemas tercapai 6,93 juta TEUs, arus barang terealisasi 57,09 juta ton, kunjungan kapal pencapaiannya 34.662 unit serta arus penumpang sebanyak 612.680 orang.

IPC memberikan jasa layanan yang diberi nama *"Java South East Asia Express Services/Java SEA Express Services"* atau disingkat "JAX *Services*", dengan rute pelabuhan Tanjung Priok ke West Coast (LA dan Oakland) Amerika Serikat. Rute ini dilayani melalui perusahaan pelayaran CMA-CGM atau Compagnie Maritime d'Affrètement-Compagnie Gènèrale Maritime yang juga membuka akses langsung ke Eropa. Kehadiran kapal kontainer berkapasitas 10.000 TEUs di Pelabuhan Tanjung Priok itu merupakan kapal terbesar yang pernah sandar di pelabuhan tersebut.

In Enhancement Phase, IPC closed the year 2017 by posting outstanding financial and operational performance achievements. This is because for the first time in the history since IPC was established, IPC achieved the highest achievement for the fiscal year 2017. Revenue was recorded at Rp10.91 trillion and net profit was at Rp2.21 trillion, EBITDA was at Rp4.03 trillion, BOPO was at 70.15 percent. While operationally, the realization of container flow traffic reached 6.93 million TEUs, the flow of goods reached 57.09 million tons, ships visit reached 34,662 units and passengers were as much as 612,680 people.

IPC provides services under the Java South East Asia Express Services/ Java SEA Express Services, or abbreviated as "JAX Services", connecting Tanjung Priok Port to US West Coast ports at LA and Oakland. This route is served through the CMACGM (Compagnie Maritime d'Affrétement-Compagnie Générale Maritime) shipping company, which also opens direct access to Europe. The presence of the first 10,000 TEUs container vessel at the Tanjung Priok Port Branch signals the milestone of the largest ship ever to dock at the port.

2018

Tahun 2018 merupakan tahun "*Establishment*" dengan fokus tahun ini adalah *"volume growth", "profitability growth"* dan *"holding establishment"*.

2018 is the year of "Establishment" with the focus of "volume growth", "profitability growth" and "holding establishment".

2019

Capaian IPC di tahun 2019 adalah sebagai berikut:
- 12 cabang pelabuhan telah memiliki sistem operasi berbasis digital yang setara dengan tingkat kebutuhan masing-masing cabang pelabuhan.
- IPC memperkenalkan *Single Truck Identity Database* (TID) yang merupakan basis data truk yang hilir mudik di pelabuhan IPC. Tanjung Priok sebagai *pilot project* dan akan diimplementasikan secara penuh di cabang pelabuhan lainnya pada tahun 2020.
- IPC berhasil membangun kerja sama *sisterport* dengan 11 pelabuhan yaitu *Port of* Ningbo - China, *Port of* Guangzhou – China, *Port of* Shenzhen-China, *Port of* Baku - Azerbaijan, *Port of* Townsville - Australia, *Port of* Lazaro Cardenas – Mexico, *Port of* Hamad - Qatar, *Port of* Djibouti – Afrika Timur, *Port of* Sabah - Malaysia dan *Port of* Los Angeles – Amerika.
- Pertengahan tahun 2019, lembaga pemeringkat independen Standard & Poor's meningkatkan peringkat IPC menjadi BBB dari peringkat sebelumnya BBB- dengan *outlook stable* (prospek *stable*) yang menunjukan bahwa tren kinerja positif perusahaan.
- Penilaian KPKU dan skor GCG menunjukan tren peningkatan selama 4 tahun terakhir. Untuk *score* KPKU pada tahun 2019 IPC berhasil mencapai 616,75 dengan predikat *Emerging Industry Leader*. Sementara dari aspek GCG tahun 2019 kembali mencatat peningkatan signifikan dan mencapai skor 98,30 dengan kategori Sangat Baik.

IPC's achievements in 2019 are as follows:
- 12 Port Branches already have digital-based operating systems that are to the level of needs of each port branch.
- IPC introduced Single Truck Identity Database (TID), which is a database of trucks going back and forth at the ports of IPC. Tanjung Priok as a pilot project and will be fully implemented in other port branches in 2020.
- IPC succeeded in establishing sister port cooperation with 11 ports, namely Port of Ningbo-China, Port of Guangzhou-China, Port of Shenzhen-China, Port of Baku-Azerbaijan, Port of Townsville - Australia, Port of Lazaro Cardenas - Mexico, Port of Hamad-Qatar, Port of Djibouti - East Africa, Port of Sabah-Malaysia and Port of Los Angeles - America.
- In mid-2019, the independent rating agency Standard & Poor's upgraded IPC rating to BBB from the previous rating of BBB- with a stable outlook indicating a positive performance trend in the Company.
- KPKU assessment and GCG scores show an increasing trend over the past 4 years. For 2019 KPKU score, IPC reached 616.75 with the title of Emerging Industry Leader. While 2019 GCG aspect was recorded a significant increase once more and reached a score of 98.550 with the category of Very Good.
- Changes in Types of Share and Changes in Articles of Association Deed No. 09 dated August 21, 2019 by Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.,

2020

- Inisiatif Kerja Sama Awal (MoU) dengan 2 (dua) pelabuhan asing, yaitu *Port of* Rotterdam dan *Port of* Constantza, Romania.
- Akuisisi kepemilikan saham PT Multimedia Nusantara pada PT ILCS sebanyak 4.900.000 lembar saham atau setara dengan 49 persen porsi kepemilikan saham PT ILCS dengan nilai pengalihan sebesar Rp49.200.000.
- Mendukung pembentukan *Holding* Rumah Sakit BUMN atau Indonesia Health Corporation (IHC) melalui kepemilikan saham IPC di PT Pertamina Bina Medika IHC sebesar 2 persen.
- Progres pekerjaan konstruksi pembangunan fisik Terminal Kijing Tahap I per 31 Desember 2020 sebesar 80,01 persen, serta sedang dilaksanakan pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I dan Menara Maritim Indonesia.

- Initial Cooperation Initiatives (MoU) with two overseas ports, the Port of Rotterdam and Port of Constantza, Romania.
- Acquisition of shares by PT Multimedia Nusantara in PT ILCS amounting to 4,900,00 shares, equivalent to 49 percent of shares of PT ILCS with a transfer value amounting to Rp49,200,000.
- Supported the establishment of State-Owned Enterprise Hospital Holding, the Indonesia Health Corporation (IHC) by acquiring 2 percent of PT Pertamina Bina Medika IHC shares by IPC.
- Progress of physical construction work of Kijing Terminal Phase I as of December 31, 2020 reached 80.01 percent. At the same time, the construction of Kalibaru Utara Terminal Phase I, and Indonesia Maritime Tower was in progress.

2021

Pada tanggal 1 Oktober 2021, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) digabungkan ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disingkat Pelindo.

On October 1, 2021, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) were merged into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) with a name change to PT Pelabuhan Indonesia (Persero), abbreviated as Pelindo.

PELINDO GROUP PASCA PENGGABUNGAN

Pelindo Corporate Structure After The Merger

Kaleidoskop Pelindo Pasca Penggabungan hingga Tahun 2022

Post-Merger Pelindo Kaleidoscope until 2022



01

1 Oktober 2021 | October 1, 2021

- *Legal Merger Day* 1
- PP 101/2021 Penggabungan Pelindo
- RUPSLB Penggabungan
- Akta Penggabungan
- Legal Merger Day 1
- PP 101/2021 Pelindo Merger
- Merger Extraordinary GMS
- Merger Deed



02

14 Oktober 2021 | October 14, 2021

Peresmian Penggabungan Pelindo dan Terminal Multipurpose Way Kelambu Labuan Bajo oleh Presiden Republik Indonesia
Inauguration of Pelindo and Way Kelambu Labuan Bajo Multipurpose Terminal Merger by the President of the Republic of Indonesia



03

29 Desember 2021
December 29, 2021

Penetapan Nilai Kekayaan Definitif Pelindo oleh Menteri Keuangan
Determination of Pelindo's Definitive Asset Value by the Minister of Finance



04

Mei 2025 - 2021 | May 2021 - 2025

Standarisasi Layanan Operasional pada beberapa Pelabuhan (Sudah dimulai sejak Mei 2021 dan masih terus berlangsung hingga tahun 2025)
Standardization of Operational Services in several Ports (Started in May 2021 and will continue until 2025)



05

1 Januari 2022
January 1, 2022

Serah Operasi Bisnis Tahap I (SPTP, SPMT, SPJM, & SPSL)
Transfer of Phase I Business Operations (SPTP, SPMT, SPJM, & SPSL)



06

3 Januari 2022
January 3, 2022

Inbreng Saham *Subholding* SPTP, SPMT, dan SPJM
SPTP, SPMT, and SPJM Subholding Inbreng Shares



07

1 Maret 2022
March 1, 2022

Inbreng Saham *Subholding* (SPSL)
Subholding (SPSL) Inbreng Shares

08

4 April 2022
April 4, 2022

Penyampaian RJPP Pelindo Induk kepada Pemegang Saham
Submission of Pelindo Holding RJPP to Shareholders

Penggabungan Badan Usaha Milik Negara dalam bidang Kepelabuhanan yaitu PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2021, telah dilanjutkan dengan berbagai langkah tindak lanjut sinergi dan konsolidasi pasca integrasi/penggabungan yang terus dijalankan.

The merger of State-Owned Enterprises in the port sector, namely PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), which became effective on October 1, 2021, has been followed up with post-integration/merger synergy and consolidation that is ongoing.





10

7 April 2022 | April 7, 2022

Persetujuan Penggunaan Nilai Buku pada Transaksi Penggabungan oleh Ditjen Pajak
Approval of the Merger Transactions Book Value by the Directorate General of Taxes

09

7 April 2022
April 7, 2022

Dukungan Penegasan Fasilitas BPHTB 0%
BPHTB Facility Affirmation Support 0%





11

9 Agustus 2022 | August 9, 2022

Penandatanganan Kerja Sama Investasi & Pengoperasian Belawan New Container Terminal dengan INA
Inauguration of the Kijing Terminal Pontianak Port by the President of the Republic of Indonesia



12

24 Agustus 2022
August 24, 2022

Penandatanganan Kerja Sama Investasi & Pengoperasian Belawan New Container Terminal dengan INA
Signing of Cooperation Agreement for Investment & Operation of Belawan New Container Terminal with INA

13

20 September 2022
September 20, 2022

Peresmian Jalan Tol Cibitung Cilincing oleh Presiden Republik Indonesia
Inauguration of the Cibitung Cilincing Toll Road by the President of the Republic of Indonesia

14

1 Oktober 2022
October 1, 2022

Puncak Peringatan Hari Pelindo
Peak of Pelindo Commemoration Day

15

1 Oktober 2022
October 1, 2022

Go-live Shared Service Center Pelindo (SDM & Pengadaan)
Pelindo Shared Service Center Go-live (HR & Procurement)

16

1 Januari 2023
January 1, 2023

Go-live Single ERP
Single ERP Go-live

Hingga akhir tahun 2022, sejumlah pencapaian Aksi Korporasi dan Inisiatif Strategis dapat direalisasikan oleh Pelindo *Group*, antara lain:

By the end of 2022, a number of Corporate Actions and Strategic Initiatives have been realized by the Pelindo Group, including:

PENETAPAN ARAH STRATEGIS KORPORASI

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2021 – 2025 telah disampaikan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal 4 April 2022 dan 9 Desember 2022. Dalam level *Subholding*, telah dilakukan finalisasi penyusunan *Masterplan* PT Pelindo Terminal Petikemas, PT Pelindo Multi Terminal, PT Pelindo Solusi Logistik dan PT Pelindo Jasa Maritim yang kemudian diperkaya dan diformalkan dalam bentuk dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) masing-masing *Subholding*. Pada tanggal 30 September 2022, melalui Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing *Subholding*, telah ditetapkan dan disahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) masing-masing *Subholding*.

DETERMINATION OF CORPORATE STRATEGIC DIRECTION

The PT Pelabuhan Indonesia (Persero)Company Long Term Plan (RJPP) for 2021 – 2025 was submitted to the Ministry of State-Owned Enterprises as the Company's Shareholders on April 4, 2022 and December 9, 2022. At the Subholding level, the finalization of the Master Plan preparation for PT Pelindo Terminal Petikemas, PT Pelindo Multi Terminal, PT Pelindo Solusi Logistik and PT Pelindo Jasa Maritim was then enhanced and formalized in the form of a Corporate Long Term Plan (RJPP) document for each Subholding. On September 30, 2022, through the Shareholders outside the General Meeting of Shareholders Resolution in each Subholding, the Company's Long Term Plan (RJPP) for each Subholding was determined and ratified.

Rencana Jangka Panjang Perusahaan Pelindo dan *Subholding*
Pelindo and Subholding Long Term Company Plans



PENGALIHAN SAHAM (*INBRENG*) PELINDO PADA ANAK PERUSAHAAN KEPADA *SUBHOLDING*

Telah dilakukan *Inbreng* Saham Tahap 1 (satu) untuk *Subholding* Petikemas, Nonpetikemas dan *Marine Equipment & Port Services* pada tanggal 3 Januari 2022 serta *Inbreng* Saham Tahap 2 (dua) untuk *Subholding* Logistik & *Hinterland Development* pada tanggal 1 Maret 2022. Kedua tahap *Inbreng* Saham telah disempurnakan melalui penyesuaian nilai pengalihan saham

TRANSFER OF PELINDO SHARES (INBRENG) TO SUBHOLDING COMPANIES

Phase 1 (one) Inbreng Share was carried out for the Container, Non-Container and Marine Equipment & Port Services Subholding on January 3, 2022, and Phase 2 (two) Inbreng Share for Logistics & Hinterland Development Subholding on March 1, 2022. The two stages of Inbreng Shares had been perfected through adjustments to the value of the transfer of shares (inbreng)

(*inbreng*) yang dijadikan sebagai tambahan penyertaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada masing-masing *Subholding* berdasarkan valuasi nilai wajar dari konsultan independen sebagaimana Laporan Penilaian Saham Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Sehingga pelaksanaan pengalihan saham (*inbreng*) pada beberapa Anak Perusahaan ke dalam *Subholding* sesuai dengan klaster bisnisnya sebagai satu kesatuan pelaksanaan restrukturisasi BUMN Pelabuhan sebagaimana diamanatkan dalam Kajian Penggabungan Usaha Pelindo dan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 744/MBU/9/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Persetujuan Pendirian dan Penyertaan Modal Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah selesai dilaksanakan.

used as an additional investment in PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in each Subholding based on the fair value valuation from an independent consultant as stated in the Share Valuation Report of the Public Appraisal Services Office (KJPP). To ensure the transfer of Subsidiaries shares (inbreng) into Subholdings was in accordance with their business clusters as an integrated restructuring of Port BUMNs, as mandated in the Pelindo Business Merger Study and the Minister of State-Owned Enterprises Letter No. 744/MBU/9/2021 dated September 28, 2021 concerning the Approval for the Establishment and Equity Participation of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Subsidiary was completed.

Acara *Inbreng* Saham Pelindo pada *Subholding* SPTP, SPMT dan SPJM
Pelindo Inbreng Shares Event for SPTP, SPMT and SPJM Subholdings



Acara *Inbreng* Saham Pelindo pada *Subholding* SPSL
Pelindo Inbreng Shares Event for SPSL Subholding



SERAH OPERASI BISNIS DAN PENGALIHAN USAHA

Sebagai bagian dari keseluruhan usaha penguatan *Subholding*, sepanjang tahun 2022 telah dilaksanakan serah operasi bisnis dan pengalihan usaha antara Pelindo kepada *Subholding* PT Pelindo Terminal Petikemas, PT Pelindo Multi Terminal, PT Pelindo Solusi Logistik dan PT Pelindo Jasa Maritim yang dimulai semenjak tanggal 1 Januari 2022 dengan bentuk kerja sama skema *revenue sharing*. Hingga akhir tahun 2022, telah dilakukan serah operasi bisnis dan pengalihan usaha sebanyak 51 Cabang Pelabuhan kepada 4 (empat) *Subholding* Pelindo, yaitu 7 cabang/terminal di wilayah Regional 1; 18 cabang/terminal di wilayah Regional 2; 15 cabang/terminal di wilayah Regional 3; dan 13 cabang/terminal di wilayah Regional 4. Rinciannya tergambarkan pada diagram berikut.

HANDOVER OF BUSINESS OPERATIONS AND BUSINESS TRANSFER

As part of the overall efforts to strengthen the Subholding, during 2022 the handover of business operations and transfer of business was carried out between Pelindo and PT Pelindo Terminal Petikemas, PT Pelindo Multi Terminal, PT Pelindo Solusi Logistik and PT Pelindo Jasa Maritim Subholdings, beginning on January 1, 2022 in the form of a cooperation in the revenue sharing scheme. By the end of 2022, 51 Port Branches have handed over their business operations and business transfers to 4 (four) Pelindo Subholdings, namely 7 branches/terminals in Regional 1 area; 18 branches/terminals in Regional 2; 15 branches/terminals in Regional 3; and 13 branches/terminals in Regional 4. The details are shown in the following diagram.

Serah Operasi Bisnis per Wilayah Regional
Submission of Business Operations per Regional Area

Regional 1 Regional 1	**Regional 2** Regional 2	**Regional 3** Regional 3	**Regional 4** Regional 4
• TPK Belawan ke SPTP • TPK Perawang ke SPTP • Cabang Belawan ke SPMT • Cabang Dumai ke SPMT • PT Prima Indonesia Logistik ke SPSL	• PT IPC TPK - Tjg. Priok ke SPTP • PT IPC TPK - Jambi ke SPTP • PT IPC TPK - Palembang ke SPTP • PT IPC TPK - Panjang ke SPTP • PT IPC TPK - Teluk Bayur ke SPTP • PT IPC TPK - Pontianak ke SPTP • PT PTP - Tjg. Priok ke SPMT • PT PTP - Cirebon ke SPMT • PT PTP - Tjg. Pandan ke SPMT • PT PTP - Jambi ke SPMT • PT PTP - Bengkulu ke SPMT • PT PTP - Banten ke SPMT • PT PTP - Panjang ke SPMT • PT PTP - Palembang ke SPMT • PT PTP - Teluk Bayur ke SPMT • PT PTP - Pangkal Balam ke SPMT • PT PTP - Pontianak ke SPMT • PT Multi Terminal Indonesia ke SPSL	• TPK Nilam ke SPTP • TPK Semarang ke SPTP • TPK Banjarmasin ke SPTP • PT Terminal Teluk Lamong ke SPTP • PT Berlian Jasa Terminal Indonesia ke SPTP • PT Terminal Petikemas Surabaya ke SPTP • Cabang Bagendang ke SPTP • Cabang Tanjung Intan ke SPTP • Cabang Trisakti ke SPTP • Cabang Jamrud-Nilam-Mirah ke SPTP • Cabang Bumiharjo ke SPTP • Cabang Tg. Wangi ke SPTP • PT Terminal Teluk Lamong (Curah) ke SPTP • Cabang Mekar Putih ke SPTP • PT Berkah Multi Cargo ke SPSL	• TPK Bitung ke SPTP • Cabang Tarakan ke SPTP • TPK Makassar ke SPTP • Makassar New Port ke SPTP • TPK Kendari ke SPTP • Cabang Pantoloan ke SPTP • TPK Kupang ke SPTP • TPK Ambon ke SPTP • Cabang Jayapura ke SPTP • PT Kaltim Kariangau Terminal ke SPTP • Cabang Balikpapan ke SPMT • Cabang Makassar ke SPMT

PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU PENGGABUNGAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah mengajukan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha sebagaimana Surat Permohonan Wajib Pajak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KU.05.03/25/2/1/PRPJ/JUMR/PLND-22 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 32/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 56/PMK.010/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka

APPROVAL FOR THE USE OF THE BOOK VALUE OF THE MERGER BY THE DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) applied for the use of book value for the transfer of assets in the framework of a business merger as referred to in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Taxpayer Application Letter No. KU.05.03/25/2/1/PRPJ/JUMR/PLND-22 dated February 25, 2022 based on the Republic of Indonesia Minister of Finance of the Regulation No. 32/PMK.010/2017 concerning the Use of Book Value for the Transfer and Acquisition of Assets in the context of a Merger, Consolidation, Expansion, or Acquisition of Business, as last amended by Republic of Indonesia Minister of Finance Regulation No. 56/PMK.010/2017 concerning Second Amendment to the Minister of Finance Regulation No. 52/ PMK.010/2017 concerning the Use of Book Value for the Transfer and Acquisition of Assets in the context of a Merger,

Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha.

Atas pengajuan permohonan penggunaan nilai buku tersebut, telah diperoleh persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan Usaha PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagaimana dituangkan di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. KEP-148/WPJ.19/2022 tanggal 11 April 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha.

Consolidation, Expansion, or Acquisition of Business, and the Republic of Indonesia Director General of Taxes of the Ministry of Finance Regulation No. PER-03/PJ/2021 concerning Procedures for Submission and Issuance of Decisions Use of Book Value for the Transfer and Acquisition of Assets in the context of a Merger, Consolidation, Expansion, or Acquisition of Business.

Upon submission of the application for the use of the book value, the Director General of Taxes granted approval to use the book value for the transfer of assets in the context of the Business Merger of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as stated in the Republic of Indonesia Ministry of Finance Director General of Taxes Decree No. KEP-148/WPJ.19/2022 dated April 11, 2022 concerning Approval for the Use of Book Value for the Transfer of Assets in the Context of a Business Merger.

Rapat Pengajuan Nilai Buku Penggabungan Pelindo
Pelindo Merger Book Value Submission Meeting



IMPLEMENTASI PENGENAAN TARIF BPHTB 0% PADA PENGEMBANGAN SUPERHUB PENGGABUNGAN/INTEGRASI BUMN PELABUHAN

Penggabungan/integrasi BUMN Pelabuhan yang semula PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) merupakan salah satu program strategis pemerintah yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tanggal 10 September 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional *juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 109 Tahun 2020 tanggal 17 November

IMPOSITION OF 0% BPHTB RATES ON THE DEVELOPMENT OF SUPERHUB MERGER/ INTEGRATION OF PORT SOEs

Merger/integration of Port SOEs from originally PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is one of the government's strategic programs stipulated through a Republic of Indonesia Coordinator for Economic Affairs Ministerial Regulation No. 7 of 2021 dated September 10, 2021 concerning Changes to the List of National Strategic Projects in conjunction with Republic of Indonesia Presidential Regulation No. 109 of 2020 dated November 17, 2020 concerning the Third

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Amendment to Presidential Regulation No. 3 of 2016 concerning Acceleration of Implementation of National Strategic Projects.

Sesuai Pasal 3 ayat 3 dan 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 109 Tahun 2020 tanggal 17 November 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional *juncto* Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional atas Program Strategis Nasional (PSN), menyatakan:

In accordance with Article 3 paragraphs 3 and 4 of the Republic of Indonesia Presidential Regulation No. 109 of 2020 dated November 17, 2020 concerning the Third Amendment to Presidential Regulation No. 3 of 2016 concerning the Acceleration of Implementation of National Strategic Projects in conjunction with Government Regulation No. 42 of 2021 dated February 2, 2021 concerning Facilitation of National Strategic Projects in the National Strategic Program (PSN), stated:

Pasal 3

(3) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. tidak memungut; atau
   b. mengenakan tarif 0% (nol persen), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas Proyek Strategis Nasional.
(4) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pungutan atau pengenaan tarif 0% (nol persen) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas Proyek Strategis Nasional.

Article 3

(3) Governor of the Special Capital Region of Jakarta, regency head or mayor in accordance with their authority as referred to in paragraph (1):
   a. does not collect; or
   b. imposes a rate of 0% (zero percent), fees for acquisition of land and building rights for National Strategic Projects.
(4) The Minister of Home Affairs carries out guidance on the implementation of the levy or imposition of a 0% (zero percent) tariff on the acquisition of land and building rights for National Strategic Projects.

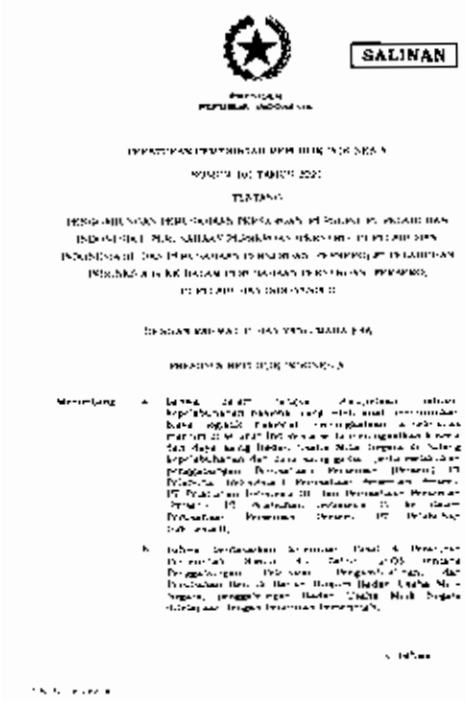
Untuk itu, pasca penggabungan BUMN Pelabuhan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia telah menyampaikan dukungan implementasi tarif BPHTB pada Pengembangan Superhub Penggabungan/Integrasi BUMN Pelabuhan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selaku Pembina Pemerintah Daerah melalui Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. S-948/MBU/12/2021 tanggal 13 Desember 2021.

In this regard, after the merger of SOE Ports, the Republic of Indonesia Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) conveyed their support for the implementation of a BPHTB tariff for the Development of the Superhub Merger/Integration of SOE Ports to the Republic of Indonesia Ministry of Home Affairs as the Trustee of Regional Governments through the Republic Indonesia Minister of State-Owned Enterprises Letter to the Republic of Indonesia Minister of Home Affairs No S-948/MBU/12/2021 dated December 13, 2021.

Selanjutnya, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) juga telah memperoleh dukungan penegasan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah Kotamadya/ Kabupaten di wilayah kerja dan/atau aset PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk tidak melakukan pungutan atau mengenakan tarif 0% (nol persen) atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas Proyek Strategis Nasional Pengembangan Superhub Penggabungan/Integrasi BUMN Pelabuhan sebagaimana disampaikan melalui Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 538/1772/SJ tanggal 07 April 2022 tentang Pengenaan Tarif BPHTB pada Pengembangan Superhub Penggabungan/Integrasi BUMN Pelabuhan.

Furthermore, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) also received support for the affirmation of the Republic of Indonesia Minister of Home Affairs to the Municipal/Regency Regional Governments in the work areas and/or assets of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) not to charge or charge a 0% (zero percent) rate on fees for acquiring land and building rights for the National Strategic Project for the Development of Port SOE Merger/Integration Superhub, as conveyed through the Republic of Indonesia Minister of Home Affairs Letter No. 538/1772/SJ dated April 07, 2022 concerning Imposition of BPHTB Tariffs on the Development of SOE Merger/Integration Superhub Port.

Surat Menteri Dalam Negeri Dukungan Implementasi Fasilitas BPHTB
Minister of Home Affairs Letter Supporting the Implementation of BPHTB Facilities


SALINAN

Seluruh Cabang regional 1, 3, dan 4 telah mengajukan surat permohonan Surat Keterangan Bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SKB BPHTB) 0% ke masing-masing Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) setempat di masing-masing wilayah Kotamadya/Kabupaten di wilayah kerja dan/atau aset PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Hingga akhir tahun 2022, sebanyak 521 sertifikat telah menerima SKB (Surat Keterangan Bebas) BPHTB dari BAPENDA setempat.

All regional 1, 3, and 4 branches submitted a letter of application for a Certificate of Free Acquisition of Land and Building Rights (SKB BPHTB) at 0% to each local Regional Revenue Agency (BAPENDA) in each municipality/regency for the work areas and/or assets of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). By the end of 2022, 521 certificate received BPHTB Free Certificates (SKB) from the local BAPENDA.

PERALIHAN STATUS TANAH/BALIK NAMA HAK TANAH HPL, HGB, & HP

Salah satu aksi korporasi hukum yang harus dilakukan Pelindo pasca penggabungan adalah proses balik nama atas tanah yang sebelumnya atas nama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ke nama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Untuk itu, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah mendapatkan Surat Edaran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah No. HR.02/558-400/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Karena Penggabungan Perusahaan (*Merger*), Ganti Nama Pemegang Hak dan Permohonan Hak Guna Bangunan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

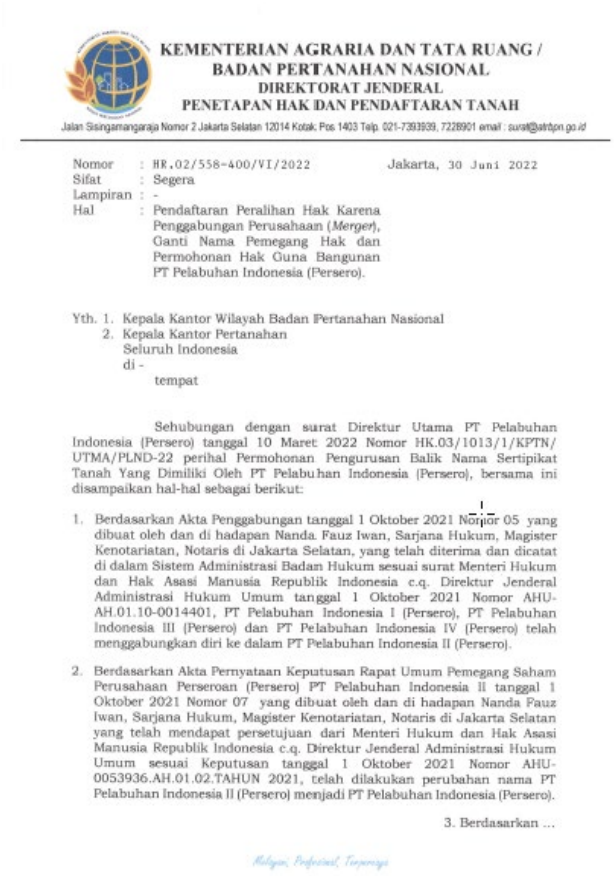
TRANSFER OF LAND STATUS/RETURN OF THE NAME OF HPL, HGB, & HP LAND RIGHTS

One legal corporate actions to be carried out by Pelindo after the merger was the process of transferring the names of land previously under the names of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV. (Persero) into the name PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

In this regard, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) obtained a Circular Letter from the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency, Directorate General of Title Determination and Land Registration No. HR.02/558-400/VI/2022 dated June 30, 2022 concerning Transitional Registration Rights Due to Merger, Change of Name of Rightsholders and Application for Building Use Rights of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Surat Edaran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait Penggabungan Perusahaan (*Merger*) Pelindo

Circular Letter from the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency regarding Pelindo Merger



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telp. 021-7393939, 7228901 email : surat@atrbpn.go.id

Nomor : HR.02/558-400/VI/2022 Jakarta, 30 Juni 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pendaftaran Peralihan Hak Karena Penggabungan Perusahaan (*Merger*), Ganti Nama Pemegang Hak dan Permohonan Hak Guna Bangunan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
2. Kepala Kantor Pertanahan
Seluruh Indonesia
di -
tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tanggal 10 Maret 2022 Nomor HK.03/1013/1/KPTN/UTMA/PLND-22 perihal Permohonan Pengurusan Balik Nama Sertipikat Tanah Yang Dimiliki Oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Penggabungan tanggal 1 Oktober 2021 Nomor 05 yang dibuat oleh dan di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 1 Oktober 2021 Nomor AHU-AH.01.10-0014401, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah menggabungkan diri ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II tanggal 1 Oktober 2021 Nomor 07 yang dibuat oleh dan di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai Keputusan tanggal 1 Oktober 2021 Nomor AHU-0053936.AH.01.02.TAHUN 2021, telah dilakukan perubahan nama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

3. Berdasarkan ...

Dalam proses peralihan status tanah/balik nama hak tanah, hingga akhir tahun 2022 telah dilakukan ganti nama dengan jumlah sertifikat yang sudah terbit SPS ZNT (Surat Perintah Setor Zona Nilai Tanah) sejumlah 434 sertifikat di Regional 1, 3, dan 4 (di luar sertifikat bermasalah). Sementara, jumlah sertifikat yang telah berhasil dilakukan ganti nama sebanyak 149 sertifikat.

During the process of transferring land status/renaming land rights, until the end of 2022, names have been changed with a number of certificates issued with SPS ZNT (Land Value Zone Deposit Orders) for 434 certificates in Regions 1, 3 and 4 (excluding problem certificates). Meanwhile, the number of certificates successfully renamed was 149 certificates.

AMANDEMEN PERIZINAN OPERASI

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2022 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, perlu dilakukan amandemen perjanjian konsesi, perizinan, dan dokumen hukum lainnya.

Hingga akhir tahun 2022, telah dilakukan proses amandemen dokumen perizinan pasca penggabungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di antaranya Perizinan Sarana dan Prasarana Pemanduan Kapal, Perizinan Izin Stasiun Radio (ISR) untuk stasiun pandu dan kapal, dan penyesuaian serta penataan Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Telekomunikasi Khusus untuk *Land Mobile* berupa penggabungan *Client* ID ISR menjadi *Client* ID PT Pelindo

AMENDMENT OF OPERATIONAL LICENSE

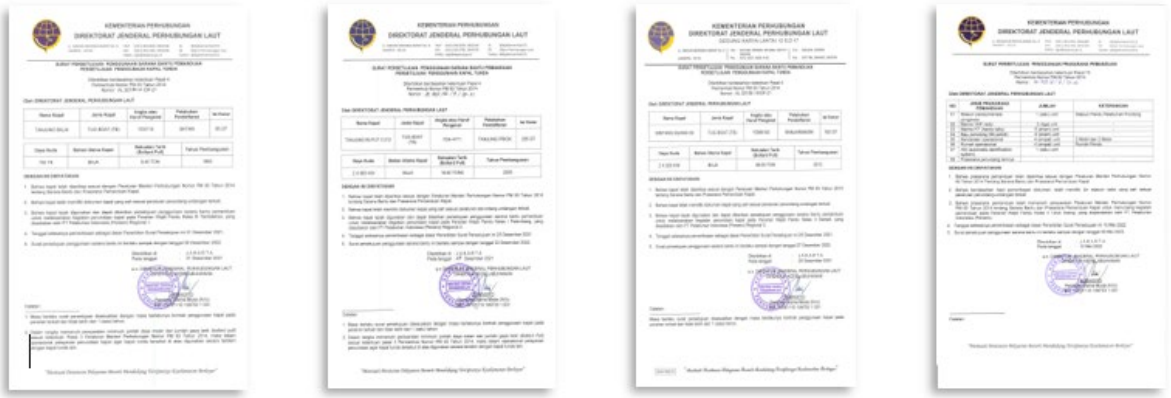
As part of the mandate of Government Regulation No. 101 of 2021 dated October 1, 2022 concerning the Merger of PT Pelabuhan Indonesia IV Companies, PT Pelabuhan Indonesia III Companies, and PT Pelabuhan Indonesia IV Companies (Persero) into a Limited Liability Company (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II, it was necessary to amend concession agreements, permits and other legal documents.

By the end of 2022, the process of amending the licensing documents after the merger of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) including Licenses for Ship Guidance Facilities and Infrastructure, Licenses for Radio Station Permits (ISR) for pilot stations and ships, and adjustment and arrangement of Radio Station Permits (ISR) and Special Telecommunications Permits for Land Mobile in the form of merging ISR Client IDs into PT Pelindo (Persero) Client

(Persero) di aplikasi SpectraWeb Kominfo dan Penambahan KBLI 61922 (Aktivitas Telsus) untuk Cabang Malahayati, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar ke dalam NIB PT Pelindo (Persero).

IDs in the Kominfo SpectraWeb application and Adding KBLI 61922 (Telsus Activities) for the Malahayati, Tanjung Priok, Tanjung Perak and Makassar Branches to the PT Pelindo (Persero) NIB). Ship Guidance Facility and Infrastructure Licensing.

Perizinan Sarana dan Prasarana Pemanduan Kapal
Ship Guidance Facility and Infrastructure Licensing



Perizinan Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Telekomunikasi Khusus untuk *Land Mobile*
Radio Station License (ISR) and Special Telecommunication License for Land Mobile



PENGEMBANGAN LAYANAN DI PELABUHAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PELABUHAN TUKS BUMN/SWASTA

Salah satu Inisiatif Strategis prioritas (*flagship initiatives*) Pelindo pasca penggabungan adalah kerja sama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan Pelabuhan Kementerian/Lembaga, TUKS/Tersus dari BUMN serta perusahaan swasta lain untuk mengoperasikan terminal dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan.

Hingga akhir tahun 2022, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengoperasian Pelabuhan K/L untuk 4 pelabuhan yaitu Labuan Bajo, Badas, Waingapu, dan Garongkong. Selain itu, telah dilakukan Perjanjian Kerja Sama dengan TUKS dalam bentuk layanan Pandu & Tunda, serta sedang dilakukan penjajakan pengoperasian terminal dengan PT Bukit Asam dan PT Petrokimia Gresik. Adapun yang masih berprogres hingga akhir Desember 2022 adalah untuk pengembangan kerja sama dengan Pelabuhan Ambon dan Pelabuhan Arar.

SERVICE DEVELOPMENT IN MINISTRY/ AGENCY PORTS AND SOE/PRIVATE TUKS PORTS

One of Pelindo's priority strategic initiatives (flagship initiatives) after the merger involved the cooperation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) with Port Ministries/Agencies, TUKS/Tersus of BUMN and other private companies to operate terminals with the aim of increasing revenue.

By the end of 2022, K/L Port Operation Cooperation Agreements have been signed for 4 ports, namely Labuan Bajo, Badas, Waingapu, and Garongkong. In addition, a Cooperation Agreement has been entered into with TUKS in the form of Pilot & Tugboat services, and exploration is currently underway to operate the terminal with PT Bukit Asam and PT Petrokimia Gresik. Still progressing at the end of December 2022 was the development of Cooperation with the Ambon Port and the Arar Port.

Lokasi Geografis Pengembangan Layanan di Pelabuhan K/L dan TUKS BUMN/Swasta
Geographical Location of Service Development at Port Ministries/Agencies and BUMN/Private TUKS



PERESMIAN TERMINAL KIJING PELABUHAN PONTIANAK

Presiden Joko Widodo meresmikan Terminal Kijing di Mempawah, 9 Agustus 2022. Terminal yang terletak di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, ini nantinya ditargetkan sebagai pengganti Pelabuhan Pontianak secara bertahap. Saat ini, pemanfaatan Pelabuhan Dwikora yang terletak di kawasan perkotaan sudah optimal. Dengan adanya keterbatasan lahan, maka perluasan Pelabuhan Dwikora juga sulit dilakukan.

Terminal Kijing merupakan Proyek Strategis Nasional yang dibangun berdasarkan Perpres No. 43/2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat. Pembangunan Terminal Kijing sejalan dengan salah satu target penggabungan Pelindo yang berperan untuk mendukung pengembangan infrastruktur yang lebih terkoordinasi, sehingga dapat menciptakan konektivitas maritim dan hilirisasi industri.

INAUGURATION OF THE KIJING TERMINAL, PONTIANAK PORT

President Joko Widodo inaugurated the Kijing Terminal in Mempawah on August 9 2022. The terminal, which is located in Mempawah Regency, West Kalimantan Province, is targeted to gradually replace the Pontianak Port. Currently, the Dwikora Port, which is located in an urban area, has been optimally utilized. Due to limited land, it is also difficult to expand Dwikora Port.

Kijing Terminal is a National Strategic Project built based on Presidential Decree No. 43/2017 concerning the Acceleration of Development and Operation of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan. The construction of the Kijing Terminal is in line with one of Pelindo's merger targets, whose role is to support more coordinated infrastructure development, so as to create maritime connectivity and downstream industry.

Peresmian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak
Inauguration of the Pontianak Port Kijing Terminal



PENANDATANGANAN KERJA SAMA INVESTASI DAN PENGOPERASIAN BELAWAN NEW CONTAINER TERMINAL (BNCT) DENGAN INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY (INA)

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah melakukan Penandatanganan kerja sama investasi dan pengoperasian Belawan New Container Terminal dengan INA pada tanggal 24 Agustus 2022. Acara penandatanganan ini dihadiri juga oleh perwakilan dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, serta Ambasador dari UAE H.E Husin Bagis. Implikasi atas pengembangan pelabuhan melalui kerja sama dengan mitra strategis diantaranya sebagai berikut:

- Peningkatan *traffic* untuk merealisasikan potensi BNCT secara penuh dengan optimasi rute jalur pelayaran yang akan meningkatkan penguasaan pasar serta pemanfaatan kapasitas potensial BNCT untuk ekspansi usaha dan peningkatan utilisasi BNCT sebesar 900 ribu TEUs dari kapasitas eksisting sebesar 500 ribu TEUs menjadi 1,4 juta TEUs.
- Pemenuhan investasi untuk meningkatkan skala bisnis mengingat BNCT masih membutuhkan Rp2 triliun untuk melanjutkan pengembangan Fase 1 yang lahannya sudah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan sehubungan dengan kondisi keuangan PT Prima Terminal Petikemas kurang memadai paska pembangunan BNCT Fase 2 dengan DER 1,55x.
- Peningkatan standar operasi terminal petikemas melalui transformasi pengelolaan bisnis yang efisien dan peningkatan kompetensi berstandar internasional untuk mewujudkan perbaikan kualitas layanan.

SIGNING OF INVESTMENT AND OPERATION COOPERATION FOR BELAWAN NEW CONTAINER TERMINAL (BNCT) WITH INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY (INA)

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) signed an investment and operation cooperation for the Belawan New Container Terminal with INA on August 24 2022. The signing event was attended by representatives from the Ministry of BUMN, Ministry of Finance, and Ambassador from the UAE H.E Husin Bagis. The implications for port development through cooperation with strategic partners includes the following:

- Increased traffic to fully realize BNCT's potential by optimizing shipping routes to increase market share and utilize BNCT's potential capacity for business expansion and increase BNCT utilization by 900 thousand TEUs from an existing capacity of 500 thousand TEUs to 1.4 million TEUs.
- Fulfillment of investment to increase business scale as BNCT still requires Rp2 trillion to continue the development of Phase 1, the land has been prepared by the Ministry of Transportation due to the inadequate financial condition of PT Prima Terminal Petikemas after the construction of BNCT Phase 2 with DER 1.55x.
- Improving container terminal operating standards through the transformation of efficient business management and increasing international standard competencies to realize service quality improvements.

Melalui kerja sama pengoperasian BNCT dengan Konsorsium INA, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan menerima proyeksi tambahan pendapatan mulai tahun 2023.

Through the joint operation of the BNCT with the INA Consortium, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) will receive projected additional revenue starting in 2023.

Penandatanganan Kerja Sama Investasi dan Pengoperasian BNCT dengan INA
Signing of BNCT Investment and Operation Cooperation with INA







PERESMIAN JALAN TOL CIBITUNG CILINCING (JTCC)

Pada tanggal 20 September 2022, Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) yang menghubungkan Jalan Tol Jakarta Cikampek di Cibitung dengan Jalan Tol Lingkar Luar 1 (JORR-1) di Cilincing.

Kehadiran Jalan Tol Cibitung-Cilincing ini diharapkan dapat mempercepat mobilitas barang, utamanya barang-barang yang berasal dari kawasan-kawasan industri di Bekasi bagian utara dan kawasan-kawasan logistik di Karawang dan Bekasi menuju pelabuhan yang ada di Jakarta wilayah utara. Dengan beroperasinya seksi 2 dan seksi 3 JTCC ini, Pelabuhan Tanjung Priok akan terhubung secara lebih baik dengan *hinterland*-nya dan kawasan industri di timur Jakarta. Hal ini diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh kendaraan angkutan, membantu menurunkan biaya logistik nasional, serta memberikan dampak *multiplier effect* berupa peningkatan daya saing Indonesia.

INAUGURATION OF THE CIBITUNG CILINCING TOLL ROAD (JTCC)

On September 20, 2022, President Joko Widodo inaugurated the Cibitung-Cilincing Toll Road (JTCC) that connects the Jakarta Cikampek Toll Road in Cibitung with the Outer Ring Road 1 in Cilincing.

The Cibitung-Cilincing Toll Road is expected to accelerate the movement of goods, especially goods originating from industrial areas in northern Bekasi and logistics areas in Karawang and Bekasi to ports in northern Jakarta. With the operation of sections 2 and 3 of the JTCC, Tanjung Priok Port will be better connected with its hinterland and industrial areas in eastern Jakarta. This is expected to reduce travel time for transportation vehicles, help reduce national logistics costs, and provide a multiplier effect in the form of increasing Indonesia's competitiveness.

Peresmian Jalan Tol Cibitung Cilincing
Inauguration of the Cibitung-Cilincing Toll Road



GO LIVE SINGLE ERP SAP REGIONAL 1, 3 & 4

Melalui implementasi *Single* ERP SAP, sejumlah manfaat yang akan diperoleh Pelindo antara lain kemudahan dengan *single system*, memudahkan interaksi data, adopsi bisnis menjadi lebih praktis, proses terstandarisasi di seluruh lokasi wilayah kerja Perusahaan, menjaga integritas data, efisiensi dan kemudahan dalam proses pelayanan keuangan, pelaporan dan konsolidasi. Sistem ini juga menjadi bukti nyata dijalankannya inisiatif - inisiatif strategis *enabler* yaitu inisiatif "Implementasi *Enterprise Architect* dan *IT Masterplan*".

Selain itu, bersamaan dengan implementasi *Single* ERP SAP, telah dilakukan juga implementasi Pelindo *Employee Self Service* (ESS), Pelindo Travel dan Pelindo CICO untuk wilayah Regional 1, 3 & 4 pada tanggal 1 Oktober 2022. Sementara di Regional 2 direncanakan untuk *Go Live* pada tanggal 1 Januari 2023.

- Pelindo ESS adalah portal yang dapat digunakan oleh seluruh pekerja untuk melakukan penyesuaian data personal seperti keluarga, Pendidikan, status perkawinan, agama, alamat, rekening bank, nomor kontak, dan lainnya.
- Pelindo Travel adalah sistem yang digunakan untuk mengelola perjalanan dinas mulai dari permohonan perjalanan dinas secara mandiri dari pekerja, *approval* pejabat yang berwenang, verifikasi perjalanan dinas hingga pertanggungjawaban perjalanan dinas.
- Pelindo CICO adalah portal perekaman presensi pekerja yang digunakan bagi seluruh pegawai. Dapat digunakan juga untuk memonitor kehadiran tim, melakukan permohonan *Work from Hom*e (WFH) dan *Work from Client* (WFC).
- *Portaverse* adalah aplikasi yang mendukung pengelolaan SDM dengan konsep pengembangan SDM bukan lagi sebagai kebutuhan tetapi keharusan untuk mendukung tujuan

GO LIVE SINGLE ERP SAP REGIONAL 1, 3 & 4

Through the implementation of the Single ERP SAP, a number of benefits will be obtained by Pelindo, including convenience by using a single system, facilitating data interaction, making business adoption more practical, standardized processes in all locations of the Company's work areas, maintaining data integrity, efficiency and convenience in the process of financial services, reporting and consolidation. This system is also clear evidence of the implementation of strategic enabler initiatives, namely the "Enterprise Architect and IT Masterplan Implementation" initiative.

In addition, with the implementation of the Single ERP SAP, Pelindo Employee Self Service (ESS), Pelindo Travel and Pelindo CICO were also implemented for Regional 1, 3 & 4 on October 1, 2022. Meanwhile in Regional 2 is planned to Go Live on January 1, 2023.

- Pelindo ESS is a portal that can be used by all employees to make adjustments to their personal data such as family, education, marital status, religion, address, bank account, contact number, and others.
- Pelindo Travel is a system used to manage business trips starting from requests for official travel independently from employees, approval from authorized officials, verification of official travel to accountability for official travel.
- Pelindo CICO is a portal for recording employee attendance to be used by all employees. It can also be used to monitor team attendance, and applications for Work from Home (WFH) and Work from Client (WFC).
- Portaverse is an application that supports HC management with the concept that HC development is no longer a nice-to-have but a necessity to support the Company's post-merger goals. After going live Portaverse services have been

Perusahaan pasca *merger*. Dengan *go live Portaverse*, maka telah terintegrasi layanan bagi pegawai untuk memenuhi kebutuhan *Learning* (Pembelajaran), *Talent Management* (Manajemen Talenta), *Performance Management* (Manajemen Kinerja), dan *Knowledge Management* (Manajemen Pengetahuan) di Pelindo.

integrated for employees to meet the needs of Learning, Talent Management, Performance Management, and Knowledge Management at Pelindo.

LAUNCHING SHARED SERVICE CENTER (SSC) TOWER SDM DAN PENGADAAN

Inisiatif pengembangan fungsi *shared services* memiliki tujuan untuk mengoptimalkan fungsi korporasi dengan membentuk fungsi *shared services* untuk aktivitas yang bersifat *general*, transaksional, rutin, dan menciptakan *economies of scale*. Inisiatif ini berpotensi mengurangi biaya SDM dengan menggabungkan beberapa fungsi menjadi *shared services*, serta standardisasi dan selarasnya proses pekerjaan yang dicakup dalam fungsi *shared services*. Pada tanggal 21 November 2022, telah dilakukan *Grand Launching Shared Service Center* (SSC) *Tower* SDM dan Pengadaan.

LAUNCHING HC AND PROCUREMENT TOWER SHARED SERVICE CENTER (SSC)

The objective of the shared services function development initiative is to optimize corporate functions by establishing shared services functions for general, transactional, routine activities and creating economies of scale. This initiative has the potential to reduce HC costs by combining several functions into shared services, as well as by standardizing and aligning the work processes included in the shared services function. On November 21, 2022, the Grand Launching of the HC and Procurement Tower Shared Service Center (SSC) was carried out.

Pengumuman *Grand Launching Shared Service Center* (SSC) *Tower* SDM dan Pengadaan
Announcement of HC and Procurement Tower Shared Service Center (SSC) Grand Launching



PENGHARGAAN DARI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi atas komitmen dan kontribusi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo dalam Pelaksanaan Aksi Pemangkasan Birokrasi dan Peningkatan Layanan di Kawasan Pelabuhan Tahun 2021 – 2022. Aksi Stranas PK yang turut didukung penuh oleh Pelindo pada tahun 2022 di empat pelabuhan utama – Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Makassar – berhasil menerapkan proses simplikasi layanan kapal, barang, *Delivery Order* (DO), SP2 *Online* serta transportasi dan pembayaran dengan diterapkannya *Truck Identification Data, Truck Booking System* dan *Single Billing Payment*.

AWARD FROM THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION

The Corruption Eradication Commission (KPK) showed its appreciation for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) or Pelindo commitment and contribution for their Actions to Reduce Bureaucracy and Improve Services in the Port Area in 2021 – 2022. The Stranas PK action was fully supported by Pelindo in 2022 at the four main ports - Belawan Port, Tanjung Priok Port, Tanjung Perak Port and Makassar Port – and has succeeded in simplifying the process for ship services, goods, Delivery Order (DO), SP2 Online as well as transportation and payment through the implementation of Truck Identification Data, Truck Booking System and Single Billing Payment.

Adanya perbaikan tata kelola ini berhasil memudahkan pelayanan hingga meningkatkan produktivitas yang berdampak tidak hanya pada kepuasan para pengguna jasa, tetapi juga pemangkasan birokrasi dan meminimalisir celah korupsi.

This governance improvement has succeeded in facilitating services to increase productivity, not only impacting service users satisfaction, but also cutting bureaucracy and minimizing corruption loopholes.

Apresiasi KPK kepada Pelindo dalam Aksi Pencegahan Korupsi
KPK's appreciation for Pelindo for its Anti-Corruption Actions



PENYESUAIAN STRUKTUR TIM KOMITE EKSEKUTIF IMPLEMENTASI INTEGRASI PASCA PENGGABUNGAN

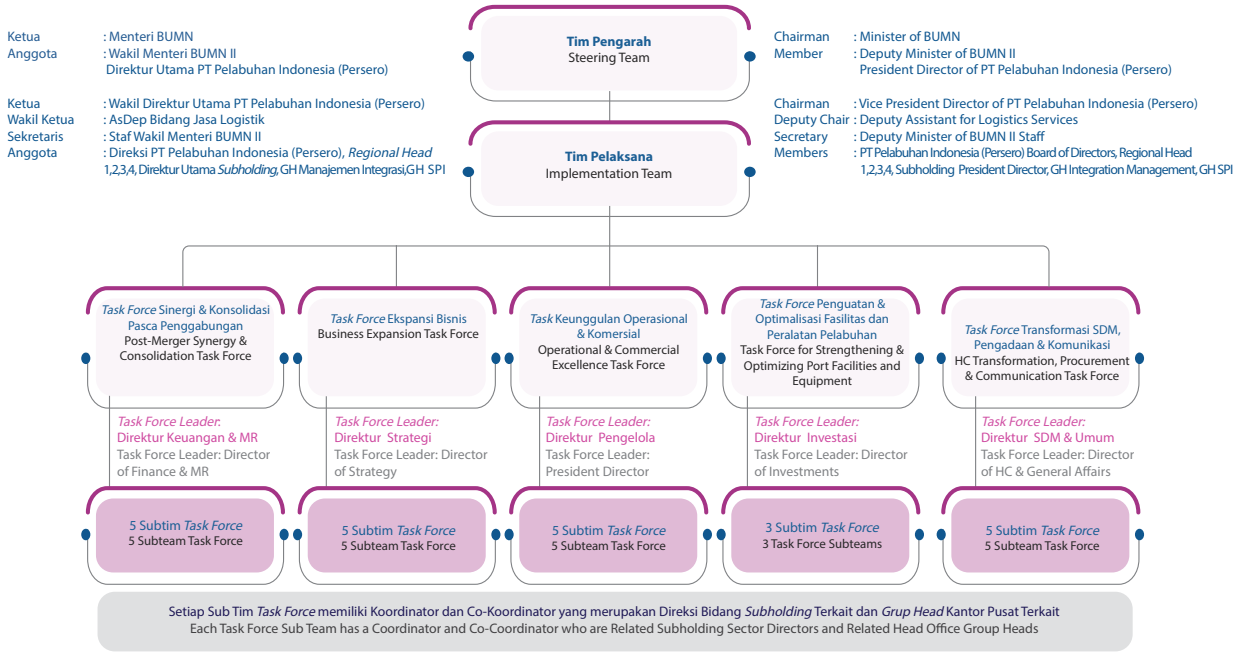
Pada tanggal 25 Juli telah dilakukan penyesuaian struktur Tim Implementasi Integrasi Pasca Penggabungan yang akan berfokus pada eksekusi *portfolio* strategis yang dilakukan *cross entity & cross function* untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi bisnis. Penyesuaian ini disahkan melalui Keputusan Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-161/MBU/07/2022 pada tanggal 25 Juli 2022 tentang Pembentukan Komite Eksekutif Implementasi Integrasi Pasca Penggabungan BUMN Pelabuhan.

ADJUSTMENT IN THE POST MERGER EXECUTIVE COMMITTEE TEAM STRUCTURE

On July 25, adjustments were made to the structure of the Post-Merger Integration Implementation Team to enable them to focus on executing strategic portfolios carried out cross entity & cross function to increase business synergy and collaboration. This adjustment was ratified through the Republic of Indonesia Minister of SOEs Decree No. SK-161/MBU/07/2022 on July 25, 2022 concerning the Establishment of the Executive Committee for Post-Merger SOE Integration Implementation in SOE Ports.

Tim Komite Eksekutif Implementasi Integrasi Pasca Penggabungan

Post-Merger Integration Executive Committee Team



CAPAIAN AKSI KORPORASI DAN INISIATIF STRATEGIS TAHUN 2022

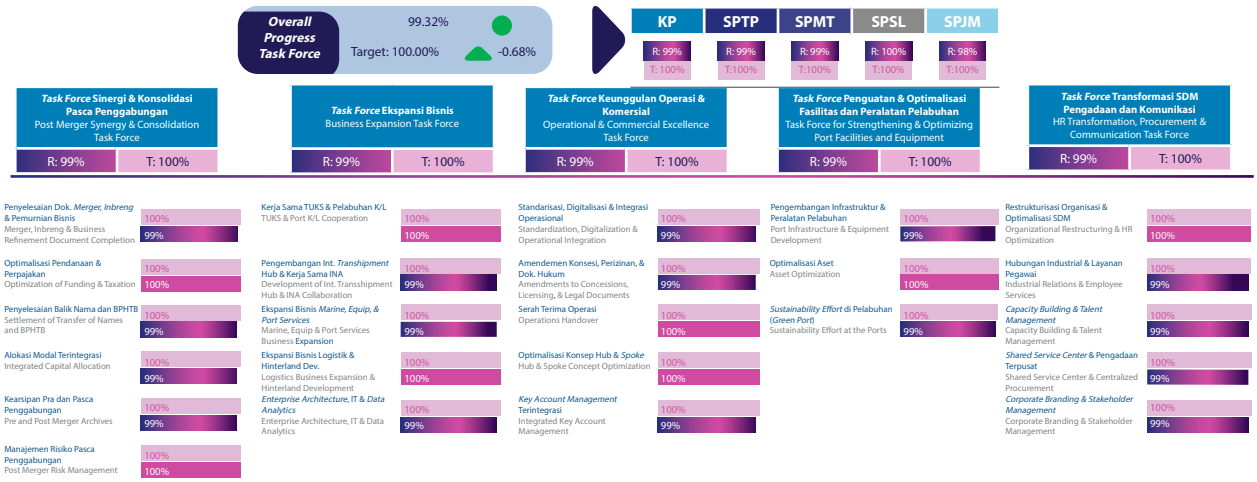
Progress Inisiatif Strategis Pelindo *Group* pada tahun 2022 telah mencapai 99,32%. Atas implementasi Inisiatif Strategis ini, Pelindo *Group* berhasil merealisasikan *Value Creation* tahun 2022 sebesar Rp1,3 triliun.

ACHIEVEMENTS OF CORPORATE ACTION AND STRATEGIC INITIATIVES IN 2022

Pelindo Group Strategic Initiative Progress in 2022 achieved 99.32%. Due to the implementation of its Strategic Initiatives, Pelindo Group succeeded in realizing a Value Creation in 2022 of Rp1.3 trillion.

Dashboard Pencapaian Progres Inisiatif Strategis Pelindo Tahun 2022

Pelindo Strategic Initiative Progress Achievement Dashboard in 2022

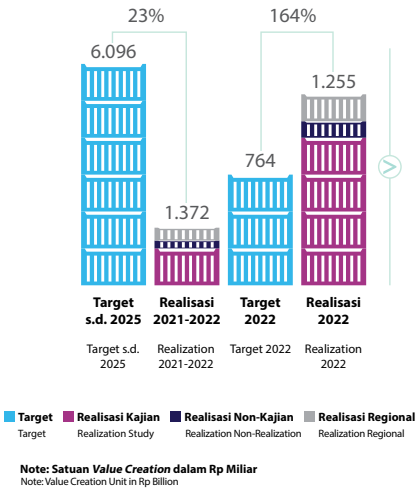


Legend:
- Percentage Baseline
- Overall Progress ≥ 90% Target Progress
- 75%* Target Progress ≤ Overall Progress < 90% * Target Progress
- Overall Progress < 75% Target Progress

1. *Progress* dihitung berdasarkan Program Kerja 1 Oktober 2021 s.d 31 Desember 2022
2. Satu Sub *Task Force* dapat terdiri dari satu atau lebih Inisiatif Strategis dan Aksi Korporasi

1. Progress is calculated based on the Work Program October 1, 2021 to December 31, 2022
2. One Sub Task Force may consist of one or more Strategic Initiatives and Corporate Actions

Realisasi Pelindo Grup
Pelindo Group Realization



Note: Satuan *Value Creation* dalam Rp Miliar
Note: Value Creation Unit in Rp Billion

Secara umum, progres implementasi inisiatif strategis dan realisasi target *value creation* seluruh *Task Force* masih dalam *traffic light* hijau atau masih sesuai dengan rencana. Sejumlah *highlight* pencapaian untuk masing-masing *Task Force* adalah sebagai berikut:

1. *Task Force* Sinergi dan Konsolidasi Pasca Penggabungan
   Task Force ini telah mencapai realisasi progres 99,3% dari target 100% dengan pencapaian yaitu:
   - Telah disusun Kajian Pemurnian Fokus Bisnis, dengan target mulai diimplementasi pada Tahun 2023.
   - Telah didapatkan persetujuan dari Pemegang Saham serta penyelesaian restrukturisasi keuangan PT PMT.
   - Telah diselesaikan kajian transformasi Rukindo.
   - Telah dilakukan sejumlah inisiatif optimalisasi *Financing Cost* di Kantor Pusat hingga November 2022 dengan *value creation* mencapai Rp501 miliar dari target Rp413,45 miliar, berasal pelunasan hutang di Induk dan Anak Perusahaan serta transaksi *buyback global bond*.

   - Telah dilakukan sejumlah inisiatif *Cost of Fund* di SPSL hingga November 2022 dengan *value creation* mencapai Rp54,18 miliar dari target Rp54,52 miliar, berasal dari optimalisasi pendanaan atas pinjaman CTP, PIL, dan API.
   - Implementasi aplikasi Pelindo *E-Office* (PEO) untuk Tata Naskah Dinas dan Kearsipan terintegrasi di Kantor Pusat, Regional, Cabang, *Subholding*, Anak Perusahaan, Cucu Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi Pelindo *Group*.
   - Dalam proses Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP Pelindo I, III, dan IV.

Overall, the progress of the strategic initiatives and the realization of the value creation target by all Task Forces is still in the green traffic light or according to plan. The highlight achievements for each Task force are as follows:

1. Post-Merger Synergy and Consolidation Task Force
   This Task Force's progress has realized 99.3% against the target of 100% with the following achievements:
   - A Business Focus Refining Study has been prepared, with a target of starting implementation in 2023.
   - Approval from Shareholders and completion of PT PMT's financial restructuring has been obtained.
   - Rukindo transformation study has been completed.
   - A number of Financing Cost optimization initiatives were carried out at the Head Office up to November 2022 with value creation reaching Rp501 billion from the target of Rp413.45 billion, made up of debt repayments at the Parent and Subsidiaries as well as global bond buyback transactions.
   - A number of Cost of Fund initiatives were carried out at in SPSL up to November 2022 with value creation reaching Rp54.18 billion from the target of Rp54.52 billion, made up by optimizing funding for CTP, PIL and API loans.
   - Implementation of Pelindo E-Office (PEO) application for Integrated Official Documents and Archives at the Head Office, Regional, Branches, Subholdings, Subsidiaries, Sub-Companies and Affiliated Companies in the Pelindo Group.
   - In the process of removing the NPWP and revoking PKP Pelindo I, III, and IV.

2. *Task Force* Ekspansi Bisnis
Task Force ini telah mencapai realisasi progres 99,8% dari target 100% dengan pencapaian yaitu:
   a. Telah dilakukan penandatanganan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) di Pelabuhan milik Kementerian dan Lembaga Negara yaitu Pelabuhan Labuan Bajo, Badas, Waingapu, Bima dan Garongkong.
   b. Telah dilakukan penandatanganan Kerja Sama Pemanfaatan TUKS BUMN yaitu penandatanganan *Head of Agreement* (HoA) dengan Pertamina, Bukit Asam, Semen Gresik dan PLN.
   c. Telah ditandatanganinya *Master Agreement* antara Pelindo dengan Konsorsium INA terkait Kerja Sama Investasi dan Pengoperasian BNCT pada tanggal 24 Agustus 2022.
   d. Telah disusun Kajian *Feasibility Study Konsesi Ship to Ship* (STS) Nipah dan disampaikan kepada Kementerian Perhubungan.
   e. Telah diinisiasi layanan tambahan *marine and port services* seperti layanan *docking, shore connection, barging, modifikasi crane*, pengelolaan limbah, pengerukan kolam, yang menghasilkan *value creation* hingga mencapai Rp29,21 miliar dari target Rp17, 6 miliar.
   f. Telah ditandatangani Kerja Sama dengan pelaku logistik BUMN antara lain Kerja Sama Pemanfaatan Kuala Tanjung PIE dan Sei Mangkei menggunakan moda Kereta Api bersama PTPN dan PT Kereta Api Indonesia, serta telah dilakukan operasional pengangkutan barang dari Sei Mangkei menuju Kuala Tanjung.
   g. Dari sisi *Enterprise Architecture*, IT & *Data Analytics*, telah selesai disusunnya IT *Master Plan* di Kantor Pusat, telah *Go Live* Sistem ERP untuk Regional 1, 3 dan 4, telah dilakukan pengembangan *dashboard* eksekutif untuk bidang operasi, telah dilakukan pengembangan produk PTOS untuk *Multipurpose* serta telah *Go Live* sistem *Single Service Desk* yaitu sebagai penerimaan keluhan dari pelanggan dan gangguan sistem sejak 1 Oktober 2022.
3. *Task Force* Keunggulan Operasi & Komersial
Task Force ini telah mencapai realisasi progres 99,4% dari target 100% dengan pencapaian yaitu:
   a. Pada *Subholding* Petikemas, telah dilakukan Standarisasi Terminal Petikemas di Terminal Petikemas Makassar, Nilam, Jayapura, Belawan dan Sorong. Saat ini, dalam proses Standarisasi Terminal Petikemas antara lain TPK Tarakan, Perawang, Pantoloan dan IPC TPK TP 1 Zona 3. Standarisasi operasi di SPTP telah mencapai realisasi *value creation* Rp20,5 miliar dari target Rp18,7 miliar.
   b. Pada *Subholding* Nonpetikemas, telah dilakukan *Assessment Maturity* di 6 (enam) Pelabuhan (Belawan, Dumai, Tanjung Intan dan Terminal Jamrud Nilam Mirah), Terminalisasi Curah Kering di Belawan, telah dilakukan penataan pola operasional pada cabang Dumai dan cabang Makassar. Terkait standarisasi komersial, telah dilakukan pembahasan Rencana Penerapan *Single Billing* dengan asosiasi dan Sosialisasi kepada seluruh PBM di Cabang Belawan. Standarisasi operasi di SPMT mencapai realisasi *value creation* Rp17,61 miliar dari target Rp5,8 miliar.

2. Business Expansion Task Force
This Task Force has realized 99.8% against the target of 100% with the following achievements:
   a. Signing of the Utilization Cooperation (KSP) was carried out at ports owned by Ministries and State Institutions, namely the Ports of Labuan Bajo, Badas, Waingapu, Bima and Garongkong.
   b. Signing of the SOE TUKS Utilization Cooperation, by signing the Head of Agreement (HoA) with Pertamina, Bukit Asam, Semen Gresik and PLN.
   c. Master Agreement was signed between Pelindo and the INA Consortium regarding BNCT Investment and Operation Cooperation on August 24, 2022.
   d. The Ship to Ship (STS) Concession Feasibility Study was prepared and submitted to the Ministry of Transportation.
   e. Additional marine and port services were initiated, such as docking, shore connection, barging, crane modification, waste management, pond dredging, which resulted in value creation of Rp29.21 billion against the target of Rp17.6 billion.
   f. Cooperation with state-owned logistics companies was signed, including the Kuala Tanjung PIE Utilization Cooperation and Sei Mangkei using the Railroad mode with PTPN and PT Kereta Api Indonesia, and goods transportation operations were carried out from Sei Mangkei to Kuala Tanjung.
   g. The Enterprise Architecture, IT & Data Analytics, IT Master Plan was completed at the Head Office, ERP Go Live System for Regions 1, 3 and 4 was developed, executive dashboards were developed for operations, PTOS products were developed for Multipurpose with a Go Live Single Service Desk system for receiving complaints from customers and system disturbances since October 1, 2022.
3. Operations & Commercial Excellence Task Force
This Task Force realized 99.4% of the target of 100% with the following achievements:
   a. For the Container Subholding, Container Terminal Standardization was carried out at Makassar, Nilam, Jayapura, Belawan and Sorong Container Terminals. Currently, in the process of Standardizing Container Terminals, including TPK Tarakan, Perawang, Pantoloan and IPC TPK TP 1 Zone 3. Standardization of operations at SPTP realized a value creation of Rp20.5 billion against the target of Rp18.7 billion.
   b. For the Non-Container Subholding, Maturity Assessments were carried out at 6 (six) Ports (Belawan, Dumai, Tanjung Intan and Jamrud Nilam Mirah Terminal), Dry Bulk Terminalization in Belawan, operational pattern arrangement was carried out at the Dumai branch and Makassar branch. For commercial standardization, discussions were held on the Single Billing Implementation Plan with associations and socialized to all PBMs in the Belawan Branch. Standardization of operations at SPMT realized a value creation of Rp17.61 billion against the target of Rp5.8 billion.

c. Digitalisasi dan integrasi operasional terus berprogres antara lain telah didapatkan pencapaian berupa *Go Live* MOS di Balikpapan, implementasi TOS Nusantara di Terminal Petikemas Makassar dan persiapan implementasi di TPK Belawan dan Ambon, implementasi *quick win* penerapan sistem operasi pada 11 cabang Pelabuhan, perubahan sistem ERP SPSL serta implementasi Centra untuk anak perusahaan, implementasi MOS di Balikpapan, serta *Go Live* Aplikasi Pemeliharaan.
d. Telah dilakukan amandemen konsesi yaitu Finalisasi SK Menteri (Penyesuaian Penugasan ke BUP Pelindo) dan *drafting addendum* perjanjian konsesi, telah dilakukan novasi Perizinan Operasi Kluster 1, Perizinan Sarana dan PraSarana, Perizinan Status Radio, serta telah dilakukan novasi Perizinan Lingkungan.
e. Terkait optimalisasi konsep hub dan *spoke*, telah disusun kajian hub dan *spoke* wilayah Barat Indonesia, dalam proses penyusunan kajian hub dan *spoke* wilayah Timur oleh Kantor Pusat, serta masih berprogres dalam penyusunan Kajian Pengembangan Pelabuhan Sorong sebagai Hub Domestik di Area Indonesia Timur oleh SPTP.
f. Telah dilakukan implementasi *Key Account Management* (KAM) terintegrasi antara lain pada *Subholding* Petikemas telah terealisasi pembukaan layanan baru pelayaran petikemas bekerja sama dengan perusahaan pelayaran serta rute tambahan (*ad hoc*) di IPC TPK, TTL, TPM, MNP, Makassar, Ambon, PTP dan pembukaan layanan baru pelayaran petikemas di dermaga Terminal Teluk Lamong serta pada *Subholding* Nonpetikemas berupa kerja sama dengan sejumlah pemilik kargo yang menghasilkan realisasi *value creation* sebesar Rp45,28 miliar dari target Rp2,53 miliar pada SPTP, serta di SPMT sebesar Rp19,43 miliar dari target Rp0,40 miliar

4. *Task Force* Penguatan dan Optimalisasi Fasilitas serta Peralatan Pelabuhan

Task Force ini telah mencapai realisasi progres 98,7% dari target 100% dengan pencapaian yaitu:

a. Terminal Kijing yang sudah diresmikan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 Agustus 2022, terus berprogres dalam pengembangannya, termasuk pekerjaan fisik Relokasi Jalan Nasional ruas Sei Duri – Mempawah dengan yang sudah mencapai progres 18,5%.
b. Telah disusun Kajian Bersama antara Pelindo dan KBN terkait Kompensasi Bisnis dan Model Kerja sama NPEA.
c. Pembangunan Terminal Kalibaru pekerjaan pengerukan alur dan kolam sudah mencapai 100% dan pembahasan awal perjanjian Pembangunan Terminal Kalibaru Tahap 1B.
d. *Subholding Marine, Equipment & Port Services* telah mengembangkan dan mengimplementasikan peningkatan Jaringan Distribusi Air di Pelabuhan Tanjung Priok, Cirebon, Sunda Kelapa dan Kijing hingga mencapai realisasi *value creation* sebesar Rp1,63 miliar.
e. Telah dilaksanakan optimalisasi aset dengan relokasi peralatan yang memberikan capaian *value creation* yaitu berupa CAPEX *optimization* sebesar Rp193,28 miliar dan EBT Uplift dari SPTP sebesar Rp25,53 miliar, SPMT sebesar Rp14,6 miliar, dan SPSL sebesar Rp0,52 miliar.

c. Digitalization and operational integration continued to progress, including Go Live MOS in Balikpapan, implementation of TOS Nusantara at the Makassar Container Terminal and preparation for implementation at TPK Belawan and Ambon, implementation of quick win implementation of operating systems at 11 port branches, changes to the ERP SPSL system and implementation of Centra for subsidiaries, implementation of MOS in Balikpapan, as well as the Go Live Maintenance Application.
d. Concession amendments were made, including the Ministerial Decree Finalization (Adjustment of Assignment to BUP Pelindo) and the drafting of concession agreement addendums, Cluster 1 Operational Licensing novations, Facility and Infrastructure Permits, Radio Status Permits, and Environmental Permit novations were carried out.
e. For the optimization of the hub and spoke concept, a hub and spoke study for the western region of Indonesia was prepared, in the process of compiling a hub and spoke study for the eastern region by the Head Office, and still progressing the preparation of the Study on the Development of Sorong Port as a Domestic Hub in the Eastern Indonesia Area by SPTP.
f. Implementation of integrated Key Account Management (KAM) has been carried out, including in Container Subholding. New container shipping services have been opened in collaboration with shipping companies and additional routes (ad hoc) at IPC TPK, TTL, TPM, MNP, Makassar, Ambon, PTP, and new container shipping services at Teluk Lamong Terminal as well in the Non-Container Subholding through collaboration with a number of cargo owners that realized value creation of Rp45.28 billion against the target of Rp2.53 billion in SPTP, and in SPMT with Rp19.43 billion against the target Rp0.40 billion.

4. Task Force for Strengthening and Optimizing Port Facilities and Equipment

This Task Force realized 98.7% of the target of 100% with the following achievements:

a. The Kijing Terminal, which was inaugurated by the President of the Republic of Indonesia on August 9 2022, continues to progress in its development, including physical work on the Relocation of the Sei Duri - Mempawah National Road section that has achieved 18.5% progress.
b. A Joint Study was prepared between Pelindo and KBN regarding Business Compensation and the NPEA Cooperation Model.
c. Construction of the Kalibaru Terminal, dredging work on the channel and pool reached 100%, and initial discussions on the Kalibaru Terminal Development Agreement Phase 1B.
d. Marine, Equipment & Port Services Subholding developed and implemented an increase in the Water Distribution Network at the Tanjung Priok, Cirebon, Sunda Kelapa and Kijing Ports to realize a value creation of Rp1.63 billion.
e. Asset optimization was carried out by relocating equipment that resulted in value creation in the form of CAPEX optimization of Rp193.28 billion and EBT Uplift from SPTP of Rp25.53 billion, SPMT with Rp14.6 billion, and SPSL with Rp0.52 billion.

f. Telah dilaksanakan optimalisasi lahan dan bangunan yang memberikan capaian *value creation* yaitu berupa EBT *Uplift* sebesar Rp41,68 miliar.
g. Telah dilaksanakan implementasi usaha keberlanjutan dengan elektrifikasi peralatan bongkar muat di Teluk Bayur, Pontianak dan Bitung yang dalam pelaksanaannya dieksekusi oleh SPJM *Group* dan SPTP yang memberikan capaian *value creation* sebesar Rp1,88 miliar.

5. *Task Force* Transformasi SDM, Pengadaan dan Komunikasi *Task Force* ini telah mencapai realisasi progres 99,4% dari target 100% dengan pencapaian yaitu:
   a. Telah terlaksananya 3 (tiga) proses perundingan PKB antara Manajemen dan Serikat Pekerja.
   b. Pada aspek pengembangan SDM, telah diterbitkannya kebijakan Pembelajaran Pekerja, Pengelolaan Tenaga Pengajar, Beasiswa dan Sertifikasi. Telah diimplementasikannya *roll out* Pelindo *Learning Wallet* Pelindo *Group* dan *Go Live Smart Learning Fase* 1 (*Portaverse Knowledge*) dan akan dilanjutkan fase 2 dan 3 (*Portaverse Learning, Performance & Talent*) di awal 2023. Termasuk telah dilakukan inisiasi standarisasi penyusunan modul bisnis Inti, dan akan dilanjutkan oleh *Subholding* di tahun 2023. Pada *Subholding* Petikemas, telah dilakukan pelatihan kepada pekerja di SPTP sebanyak 2.801 orang baik yang bersifat *mandatory* maupun substansial. Pada *Subholding* Nonpetikemas, telah dilakukan standardisasi kompetensi karyawan, modul pelatihan dan pengembangan kapabilitas SDM. Pada *Subholding* Logistik dan *Hinterland Development*, telah disusun Kamus Kompetensi Teknis Spesifik, ratifikasi kebijakan Pembelajaran Pekerja dan Magang dan pengiriman peserta untuk mengikuti pelatihan/sertifikasi. Pada *Subholding Marine*, telah dilaksanakan sertifikasi kompetensi teknis dan pelatihan peningkatan *skill* pada pekerja operasional dan non-operasional.
   c. Telah terlaksananya *Go Live* SSC pada tanggal 21 November 2022 dan saat ini sedang disusun proses *training* atas sistem dan proses bisnis SSC kepada pekerja. Sementara itu, *Tower* SDM dan Pengadaan saat ini dalam tahapan *post deployment* yaitu stabilisasi dan *training* kepada para *vendor* dan pekerja.
   d. Telah terlaksana inisiatif strategis pengadaan bersama/terpusat antara Kantor Pusat, Regional dan *subholding* atas 8 (delapan) kategori barang dan jasa antara lain untuk pengadaan TNO, jasa pengamanan, BBM, sewa kendaraan dinas, seragam, ATS SAP & Oracle, ATK dan APD melalui *e*-Katalog. Pada tahun 2022, pengadaan bersama/terpusat telah mendapatkan *value creation* sebesar Rp121,3 miliar dengan rincian sebesar Rp113,4 miliar untuk pengadaan yang diproses di Kantor Pusat dan sisanya pada SPTP, SPJM serta SPSL. Inisiatif strategis ini akan dilanjutkan pada tahun 2023 dengan penambahan kategori barang dan jasa yang masih berpotensi untuk dilakukan pengadaannya secara bersama/terpusat.

f. Optimization of land and buildings was carried out that realized value creation in the form of an EBT Uplift of Rp41.68 billion.
g. Sustainable business was carried out with the electrification of loading and unloading equipment in Teluk Bayur, Pontianak and Bitung, executed by the SPJM Group and SPTP that resulted in value creation of Rp1.88 billion.

5. HC Transformation Task Force, Procurement and Communication
This Task Force realized 99.4% against the target of 100% with the following achievements:
   a. 3 (three) CLA negotiation processes were carried out between the Management and the Trade Union.
   b. For HC development, policies on Employee Learning, Management of Teaching Staff, Scholarships and Certification have been issued. Pelindo Group's Pelindo Learning Wallet roll out has been implemented with Phase 1 of Go Live Smart Learning (Portaverse Knowledge), and phases 2 and 3 (Portaverse Learning, Performance & Talent) will continue in early 2023. This includes initiating standardization on the preparation of Core business modules, and will be continued by the Subholding in 2023. In the Container Subholding, training was carried out for 2,801 employees at SPTP, both mandatory and substantial. In the Non-Container Subholding, standardization of employee competencies, training modules and HC capability development was carried out. In the Logistics and Hinterland Development Subholding, a Specific Technical Competency Dictionary was prepared, Worker Learning and Apprenticeship policies were ratified and participants were sent to attend training/certification. At the Marine Subholding, technical competency certification and skills improvement training was carried out for operational and non-operational employees.
   c. SSC's Go Live was implemented on November 21, 2022 and currently training is underway for SSC's systems and business processes for employees. Meanwhile, the HC and Procurement Tower is currently in the post deployment stage, namely stabilization and training for vendors and employees.
   d. Joint/centralized procurement strategic initiatives was implemented in the Head Office, Regional and subholdings for 8 (eight) categories of goods and services, including the procurement of TNO, security services, fuel, official vehicle rental, uniforms, ATS SAP & Oracle, ATK and PPE through e-Catalog. In 2022, joint/centralized procurement realized a value creation of Rp121.3 billion, with Rp113.4 billion for procurement at the Head Office, and the remainder at SPTP, SPJM and SPSL. This strategic initiative will be continued in 2023 with additional categories for goods and services that still have the potential to be procured jointly/centralized.

e. Peraturan Direksi komunikasi telah diratifikasi oleh *Subholding* dan diimplementasikan melalui Program Komunikasi di Pelindo *Group*. Dari sisi komunikasi dengan media, perusahaan pun mencapai hasil yang sangat baik yaitu tercatat pemberitaan Pelindo *Group* per 1 Oktober 2022 hingga 30 November 2022 sebanyak total 24.917 berita dengan *totality* 81,1% berita positif, 17,7% berita netral dan 1,2% berita negatif.
f. Peraturan Direksi Identitas Visual dan *Brand* Pelindo telah diratifikasi oleh *Subholding*, logo dan identitas *monolithic* telah diimplementasikan di Pelindo *Group*. Kegiatan Hubungan Lembaga dan *Stakeholder Management* juga telah dilaksanakan dan dilakukan *mapping stakeholder* di Pelindo *Group*.

e. The Communication Directors Regulation was ratified by Subholding and implemented through the Communications Program in the Pelindo Group. For communication with the media, the Company also achieved very good results, namely reporting by the Pelindo Group from October 1, 2022 to November 30, 2022 totaling 24,917 news with 81.1% positive news, 17.7% neutral news and 1.2% negative news.
f. The Pelindo Visual and Brand Identity Directors Regulation was ratified by Subholding, the logo and monolithic identity was implemented at the Pelindo Group. Institutional Relations and Stakeholder Management activities were also carried out and stakeholder mapping was carried out at the Pelindo Group.



PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY



01

Kilas Kinerja 2022

2022 Performance Review

PENCAPAIAN KINERJA PENTING TAHUN 2022

Important Performance Achievements in 2022

1. Aset tahun 2022 sebesar Rp118,35 triliun, meningkat 1,83% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp116,23 triliun.
2. Ekuitas tahun 2022 sebesar Rp42,80 triliun, meningkat 1,79% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp42,05 triliun.
3. Pendapatan operasi tahun 2022 sebesar Rp29,70 triliun, meningkat 3,07% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp28,81 triliun.
4. Laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* tahun 2022 sebesar Rp3,91 triliun, meningkat 23,06% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp3,18 triliun.
5. Realisasi arus kapal dalam satuan unit tahun 2022 sebesar 290.970 unit, meningkat 14% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 254.669 unit.
6. Realisasi arus petikemas dalam satuan *box* tahun 2022 sebesar 13.292.102 *box*, meningkat 0,44% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 13.234.256 *box*.
7. Realisasi arus barang nonpetikemas dalam satuan ton tahun 2022 sebesar 159.727.836 ton, meningkat 9% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 146.200.809 ton.
8. Realisasi arus barang nonpetikemas dalam satuan MMBTU tahun 2022 sebesar 8.800.934 MMBTU, meningkat 12,53% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 7.820.960 MMBT.
9. Realisasi arus penumpang pada tahun 2022 sebesar 15.028.884 orang, meningkat 86,53% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8.056.905 orang.

1. Assets in 2022 stood at Rp118.35 trillion, an increase of 1.83% compared to Rp116.23 trillion in 2021.
2. Equity in 2022 stood at Rp42.80 trillion, an increase of 1.79% compared to Rp42.05 trillion in 2021.
3. Operating income in 2022 was Rp29.70 trillion, an increase of 3.07% compared to Rp28.81 trillion in 2021.
4. Profit for the year after the effect of merging entity profit adjustment in 2022 amounted to Rp3.91 trillion, an increase of 23.06% compared to Rp3.18 trillion in 2021.
5. Ship traffic in 2022 amounted to 290,970 units, an increase of 14% compared to 254,669 units in 2021.
6. Container traffic in 2022 amounted to 13,292,102 boxes, an increase of 0.44% compared to 13,234,256 boxes in 2021.
7. Non-container goods traffic in units in 2022 amounted to 159,727,836 tons, an increase of 9% compared to 146,200,809 tons in 2021.
8. Non-container goods traffic in units of MMBTU in 2022 amounted to 8,800,934 MMBTU, an increase of 12.53% compared to 7,820,960 MMBT in 2021.
9. Passenger traffic in 2022 amounted to 15,028,884 people, an increase of 86.53% compared to 8,056,905 people the previous year.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Important Financial Data Overview

IKHTISAR KEUANGAN DAN RASIO KEUANGAN

FINANCIAL OVERVIEW AND FINANCIAL RATIO

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020*	2019*
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION				
ASET ASSETS				
ASET LANCAR CURRENT ASSETS				
Kas dan setara kas Cash and cash equivalent	13.597.640.823	12.922.388.587	11.613.056.790	21.820.013.924
Investasi jangka pendek Short-term investment	3.943.051.999	5.718.525.973	11.094.379.218	2.624.641.107
Piutang usaha - neto Trade receivables - neto				
Pihak ketiga Third parties	1.130.425.885	1.253.132.841	1.277.605.993	1.427.409.151
Pihak berelasi Related parties	319.681.316	263.129.705	279.352.489	567.011.017
Piutang lain-lain - neto Other receivables, net				
Pihak ketiga Third parties	54.645.010	126.988.519	103.528.199	238.179.011
Pihak berelasi Related parties	392.181.781	1.153.378.016	1.316.074.276	1.432.457.049
Uang muka dan beban dibayar di muka Advances and prepaid expenses	225.480.260	258.677.724	192.477.003	254.756.941
Pendapatan masih akan diterima Accrued revenues				
Pihak ketiga Third parties	543.670.248	297.585.161	435.894.846	437.277.939
Pihak berelasi Related parties	107.559.957	33.383.321	67.889.867	123.414.505
Persediaan Inventories	276.990.511	217.674.563	187.041.439	201.270.798
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	972.176.643	1.080.535.298	1.161.817.240	1.662.075.285
Aset lancar lainnya Other current assets	56.662.961	55.194.659	154.078.392	117.794.047
Total Aset Lancar Total Current Assets	**21.620.167.394**	**23.380.594.367**	**27.883.195.752**	**30.906.300.774**

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020*	2019*
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS				
Investasi jangka panjang Long-term investments	4.118.791.190	3.751.638.877	3.518.317.017	3.635.325.634
Properti investasi – neto Investment properties - net	1.233.319.427	873.433.978	867.416.746	885.703.650
Aset tetap – neto Fixed assets - net	45.033.835.147	46.300.182.922	44.578.602.925	42.239.772.185
Aset kerja sama operasi - neto Joint operation assets - net	379.887.734	408.013.146	434.117.133	461.100.101
Aset hak guna - neto Right-of-use assets - net	453.988.347	452.002.189	516.020.761	-
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	632.879.439	587.268.838	753.558.421	241.393.302
Aset tak berwujud - neto Intangible assets - net	42.546.542.738	38.760.454.848	36.701.629.229	32.528.607.574
Taksiran tagihan restitusi pajak Estimated claims for tax refun	1.109.658.955	750.660.351	1.312.773.446	1.174.901.960
Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets	1.221.507.535	964.824.984	2.011.116.364	2.461.193.103
Total aset tidak lancar Total non-current assets	96.730.410.512	92.848.480.133	90.693.552.042	83.627.997.509
Total Aset **Total Assets**	**118.350.577.906**	**116.229.074.500**	**118.576.747.794**	**114.534.298.283**
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY				
LIABILITAS LIABILITIES				
LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES				
Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loans	105.361.831	138.493.774	4.000.000	34.193.914
Utang usaha Trade payables				
Pihak ketiga Third parties	976.563.635	1.338.142.064	1.686.203.358	3.044.115.352
Pihak berelasi Related parties	1.092.012.208	1.926.350.211	3.267.820.968	3.672.159.168
Pendapatan diterima di muka jangka pendek Short-term unearned revenues	1.594.355.077	1.298.045.484	1.379.039.522	1.207.043.755
Utang pajak Taxes payable	1.025.273.741	578.540.987	647.527.154	827.210.649
Beban akrual Accrued expenses	5.273.585.288	3.699.192.020	3.664.488.679	3.838.675.350

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020*	2019*
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang Current maturities of long-term liabilities				
Utang obligasi Bonds payable	8.637.804.928	-	499.768.052	-
Utang bank Bank loans	152.606.159	2.255.771.149	504.471.670	388.678.828
Liabilitas sewa Lease liabilities	49.907.726	76.345.578	75.354.511	-
Liabilitas jangka pendek lainnya Other current liabilities	**1.041.133.091**	**2.248.710.446**	**1.953.980.628**	**1.370.628.359**
Pihak ketiga Third parties	855.825.793	1.182.432.796	1.023.914.350	762.147.091
Pihak berelasi Related parties	185.307.298	1.066.277.650	930.066.278	608.481.268
Total Liabilitas Jangka Pendek **Total Current Liabilities**	**19.948.603.684**	**13.559.591.714**	**13.682.654.542**	**14.382.705.375**
LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES				
LIABILITAS JANGKA PANJANG - SETELAH DIKURANGI BAGIAN LANCAR LONG-TERM LIABILITIES - OF CURRENT MATURITIES				
Utang obligasi Bonds payable	34.116.829.197	40.176.176.480	39.699.180.499	39.615.134.308
Utang bank Bank loans	7.678.666.058	6.633.174.189	11.128.996.490	8.613.919.696
Liabilitas sewa Lease liabilities	385.228.086	257.540.134	319.371.402	-
Utang lembaga keuangan non-bank Loan from non-bank financial institution	**1.744.763.266**	**1.426.042.655**	**1.002.703.343**	**651.770.408**
Pihak ketiga Third parties		476.290.919	332.402.837	213.793.871
Pihak berelasi Related parties		949.751.736	670.300.506	437.976.537
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities	231.128.682	105.071.621	117.774.083	91.505.345
Pendapatan diterima di muka jangka panjang Long-term unearned revenue	4.544.771.276	4.495.055.535	4.620.448.208	4.604.082.256
Liabilitas jangka panjang lainnya Other long-term liabilities	1.126.588.038	962.389.202	792.645.412	702.551.614
Liabilitas imbalan kerja Employee benefit liabilities	5.769.306.844	6.560.923.531	6.938.142.497	4.822.593.130
Total Liabilitas Jangka Panjang **Total Non-current Liabilities**	**55.597.281.447**	**60.616.373.347**	**64.619.261.934**	**59.101.556.757**
TOTAL LIABILITAS **TOTAL LIABILITIES**	**75.545.885.131**	**74.175.965.061**	**78.301.916.476**	**73.484.262.132**

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020*	2019*
EKUITAS EQUITY				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk **Equity attributable to owners of the parent entity**				
Modal saham Share capital	40.575.584.000	8.475.067.000	1.444.029.000	1.444.029.000
Modal donasi Donated capital	26.825.982	26.825.982	26.825.982	26.825.982
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	(33.358.048.450)	(1.128.322.898)	(205.004.707)	(317.597.475)
Komponen ekuitas lainnya Other equity component	1.466.121	1.466.121	-	-
Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali Difference in value of transactions with non-controlling interest	836.905.071	836.072.934	836.072.934	836.072.934
Ekuitas *merging entity* Merging entity equity	-	-	21.516.406.212	21.050.900.765
Saldo laba Retained earnings				
Ditentukan penggunaannya Appropriated	31.900.794.522	29.925.514.788	15.021.058.681	13.273.514.540
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	4.915.321.447	4.434.909.230	993.019.548	2.455.762.802
Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income	(3.774.159.697)	(2.062.503.591)	(1.119.546.220)	(105.008.860)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - neto **Equity attributable to owners of the parent entity – net**	**41.124.688.996**	**40.509.029.566**	**38.512.861.430**	**38.664.499.688**
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	1.680.003.779	1.544.079.873	1.761.969.888	2.385.536.463
EKUITAS NETO **TOTAL EQUITY**	**42.804.692.775**	**42.053.109.439**	**40.274.831.318**	**41.050.036.151**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS **TOTAL LIABILITIES AND EQUITY**	**118.350.577.906**	**116.229.074.500**	**118.576.747.794**	**114.534.298.283**
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME				
Pendapatan operasi Operating revenues	29.700.604.135	28.814.806.337	26.591.131.827	-
Pendapatan konstruksi Construction revenues	2.397.701.575	3.195.512.405	3.924.471.433	-
Beban operasi Operating expenses	(23.154.429.191)	(22.541.521.255)	(20.675.933.360)	-

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020*	2019*
Beban konstruksi Construction expenses	(2.397.701.575)	(3.195.512.405)	(3.924.471.433)	-
Pendapatan (beban) operasi lainnya - neto Other operating income (expense) - net	568.645.497	266.912.544	(196.538.108)	-
LABA USAHA **INCOME FROM OPERATIONS**	**7.114.820.441**	**6.540.197.626**	**5.718.660.359**	**-**
Pendapatan keuangan Finance income	380.490.270	407.775.884	699.581.748	-
Beban keuangan Finance costs	(2.571.042.968)	(2.540.082.866)	(2.544.366.171)	-
Bagian laba entitas asosiasi Equity in income of associates	302.615.692	255.107.588	(39.998.707)	-
LABA SEBELUM PAJAK DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN **INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX**	**5.226.883.435**	**4.662.998.232**	**3.833.877.229**	**-**
Beban pajak final Final tax expense	(488.229.302)	(487.671.869)	(436.180.278)	-
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN **INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX**	**4.738.654.133**	**4.175.326.363**	**3.397.696.951**	**-**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN **CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)**				
Kini Current	(958.337.498)	(847.733.176)	(745.867.105)	
Tangguhan Deferred	128.153.222	(151.447.911)	307.112.625	
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* **INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME**	**3.908.469.857**	**3.176.145.276**	**2.958.942.471**	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN **OTHER COMPREHENSIVE INCOME**				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi **Item that will not be reclassified to profit or loss**				
Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto setelah pajak Remeasurements of defined benefit plans - net off tax	823.295.840	94.351.746	(1.643.196.940)	
Perubahan Nilai Wajar *Asset* Keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Change in Fair Value of Financial Assets at fair value through other comprehensive income	87.470.875	(47.180.224)		
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi **Item that will be reclassified to profit or loss**	**87.470.875**			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Exchange differences due to financial statements translation	198.045.650	13.379.913	(329.050.522)	

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020*	2019*
Bagian Efektif dari Keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas Effective Portion of Gains and losses of hedging instruments for cash flow hedging	(2.820.468.471)	-	108.347.081	
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* **TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME**	**2.196.813.751**	**3.236.696.711**	**1.095.042.090**	
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* **TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME**				
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	3.772.545.951	3.292.133.734	3.076.425.168	
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	135.923.906	(115.988.458)	(117.482.697)	
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* **INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME**	**3.908.469.857**	**3.176.145.276**	**2.958.942.471**	
Penyesuaian atas laba *merging entity*: Adjustment of merging entity's other income:				
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity		(2.280.313.686)	(1.805.995.892)	
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests		130.572.397	88.960.075	
		(2.149.741.289)	(1.717.035.817)	
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: **INCOME (LOSS) FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ATTRIBUTABLE TO:**				
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	3.772.545.951	1.011.820.048	1.270.429.276	
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	135.923.906	14.583.939	(28.522.622)	
LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* **INCOME FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME**	**3.908.469.857**	**1.026.403.987**	**1.241.906.654**	

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020*	2019*
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: **TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY INCOME ATTRIBUTABLE TO:**				
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	2.060.889.845	3.351.776.051	1.212.324.495	
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	135.923.906	(115.079.340)	(117.282.405)	
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* **TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME**	**2.196.813.751**	**3.236.696.711**	**1.095.042.090**	
Penyesuaian atas laba komprehensif lainnya *merging entity*: Adjustment of merging entity's other comprehensive income:				
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	-	(2.170.608.365)	(956.432.580)	
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	-	129.586.062	88.563.419	
	-	(2.041.022.303)	(867.869.161)	
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: **TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ATTRIBUTABLE TO:**				
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	2.060.889.845	1.181.167.686	255.891.915	
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	135.923.906	14.506.722	(28.718.786)	
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* **TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME**	**2.196.813.751**	**1.195.674.408**	**227.173.129**	
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh) **BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)**	**92.976**	**81.136**	**2.130.446**	
LABA PER SAHAM DILUSIAN (nilai penuh) **DILUTED EARNINGS PER SHARE (full amount)**	**91.783**	**80.095**	**1.560.716**	

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020*	2019*
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS				
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES				
Penerimaan kas dari pelanggan Cash receipts from customers	31.671.281.588	30.056.470.288	27.085.501.244	
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya Payment to contractors, suppliers and others	(14.592.877.976)	14.481.551.070	(14.473.317.581)	
Pembayaran kepada karyawan Payment to employees	(5.662.070.239)	(5.661.556.853)	(5.472.976.164)	
Pembayaran pajak penghasilan Payment for income taxes	(1.396.604.110)	(1.319.862.044)	(997.779.715)	
Penghasilan bunga Interest received	132.629.570	156.818.218	1.196.017.199	
Penerimaan Pajak Tax receipt	949.549.254	1.078.288.509	63.644.781	
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	**11.101.908.087**	**9.828.607.048**	**7.401.089.764**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES				

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020*	2019*
Penerimaan dividen Receipt of dividend	366.126.855	322.271.932	240.088.963	
Laba penjualan aset tetap Gain on disposal of fixed assets	37.117.004	(1.969.868)	2.941.075	
Perolehan aset tetap dan aset tak berwujud Acquisition of fixed assets and intangible assets	(6.511.011.701)	(6.908.699.330)	(9.290.836.817)	
Penerimaan (penempatan) investasi jangka pendek Receipt of (placement) short-term investments	2.245.190.808	5.742.520.260	(8.147.327.201)	
Penjualan (penambahan) pada penyertaan saham Sales (additional) of investment in shares	(395.591.435)	(2.674.308.254)	142.500.000	
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi **Net Cash Used in Investing Activities**	**(4.258.168.469)**	**(3.520.185.260)**	**(17.052.633.980)**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES				
Setoran modal saham Capital additional	-	1.201.500.000	84.100.000	
Penerimaan (pembayaran) pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya Receipt (payment) of bank and other financial institution loans	(4.221.618.857)	(4.345.416.914)	962.524.322	
Penerimaan pinjaman Receipt of loans	1.983.144.166	1.611.983.309	3.431.790.723	
Pembayaran bunga Interest payment	(2.512.723.161)	(2.752.569.073)	(3.537.254.879)	
Pembayaran liabilitas sewa Payments of lease liabilities	(138.892.333)	(162.741.729)	(153.938.339)	
Pembayaran dividen Payment of dividend	(1.316.854.000)	(560.000.000)	(1.377.043.949)	
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan **Net Cash Used in Financing Activities**	**(6.206.944.185)**	**(5.007.244.407)**	**(589.822.122)**	
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS **NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS**	**636.795.433**	**1.301.177.381**	**(10.241.366.338)**	
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	38.456.803	8.154.416	34.409.204	
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN **CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**	**12.922.388.587**	**11.613.056.790**	**21.820.013.924**	
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN **CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**	**13.597.640.823**	**12.922.388.587**	**11.613.056.790**	
RASIO KEUANGAN **FINANCIAL RATIOS**				
Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset Ratio of profit (loss) to total assets	0,03	0,03	0,01	0,02
Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas Ratio of profit (loss) to equity	0,09	0,08	0,02	0,06
Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan Profit (loss) to income ratio	0,13	0,09	0,03	0,10
Cash ratio	0,88	1,53	0,87	1,12
Current ratio	108,00	172,72	-	-
Quick ratio	95,20	148,66	-	-
Rasio liabilitas terhadap ekuitas Liability to equity ratio	0.57	1,76	1,98	1,44
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset Liabilities to total assets ratio	1,57	0,64	0,66	0,64

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020*	2019*
Operating ratio Operating ratio	0,78	78,48	78,29	76,45
Rasio modal sendiri terhadap total aset Equity to total assets ratio	2,76	0,36	0,34	0,36
Average payment period (app) (hari/day)	51	74	-	-
Average collection period (acp) (hari/day)	18	19	-	-
Collection period (hari/day)	18	19	-	-

*Disajikan kembali
* Restatement

Keterangan: Data Ikhtisar Keuangan mengikuti Laporan Keuangan Pasca *Merger*, sehingga hanya dapat menyampaikan informasi selama 4 (empat) tahun.
Note: Financial Summary Data following the Post-Merger Financial Report, so its only provide information for 4 (four) years.
Catatan untuk pembaca laporan: Tabel dan grafik pada laporan ini memaparkan data numerik dengan standar Bahasa Indonesia, sedangkan pemaparan numerik dalam teks menggunakan standar Bahasa Inggris dan Indonesia sesuai dengan konteksnya.
Note to report readers: The tables and graphs in this report present numerical data using standard Indonesian, while the numerical presentation in the text uses standard English and Indonesian according to the context.

IKHTISAR OPERASIONAL / OPERATIONAL OVERVIEW

Tabel Kinerja Operasional
Operational Performance

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021
OPERASI KEPELABUHAN **PORT OPERATIONS**			
Arus Kapal Ship Traffic			
Dermaga Umum General Wharves			
Internasional International	Unit	16.232	11.805
	GT	208.507.972	201.654.893
Domestik Domestic	Unit	120.335	121.331
	GT	338.489.677	365.275.148
Total Dermaga Umum **Total General Wharves**	**Unit**	**136.567**	**133.136**
	GT	**546.997.649**	**566.930.041**
Non-Dermaga Umum Non-General Wharves			
Internasional International	Unit	16.700	16.383
	GT	218.902.310	244.159.765
Domestik Domestic	Unit	137.703	105.150
	GT	435.914.575	335.932.191
Total Non-Dermaga Umum **Total Non-General Wharves**	**Unit**	**154.403**	**121.533**
	GT	**654.816.885**	**619.287.206**
Total Arus Kapal **Total Ship Traffic**	**Unit**	**290.970**	**254.669**
	GT	**1.201.814.534**	**1.186.217.247**
Arus Petikemas Container Traffic			
Pelayanan Luar Negeri Overseas Service	Box	5.250.679	5.230.284
	Teus	7.965.736	7.872.429
Pelayanan Dalam Negeri Domestic Service	Box	8.041.423	8.003.972
	Teus	9.254.576	9.184.207

Tabel Kinerja Operasional
Operational Performance

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	2020
Total Arus Petikemas **Total Container Traffic**	**Box**	**13.292.102**	**13.234.256**	**11.125.677**
	Teus	**17.220.312**	**17.056.636**	**14.032.351**
Arus Barang Nonpetikemas Non-Container Goods Traffic				
Dermaga Umum **General Wharves**				
General Cargo dan *Bag Cargo* *General Cargo and Bag Cargo*	Ton	29.821.190	15.198.974	9.874.741
	M^3	5.590.046	4.494.597	4.068.667
Curah Cair Liquid Bulk	Ton	38.430.116	37.182.559	28.878.398
Curah Kering Dry Bulk	Ton	63.439.570	60.314.892	50.339.692
Gas	Ton	-	19.155	-
	MMBTU	8.800.934	7.820.960	777.694
Kendaraan Vehicles	Ton	19.496	4.692.647	2.765.535
	Unit	2.441.155	1.520.794	11.520.303
Hewan Animals	Ton	1.465	205.041	247.792
	Ekor/Animals	503.694	635.120	367.924
Total Dermaga Umum **Total General Wharves**	**Ton**	**131.711.836**	**117.613.268**	**96.167.951**
	M^3	**5.590.046**	**4.494.597**	**4.068.667**
	Unit	**2.441.155**	**1.519.404**	**11.520.303**
	MMBTU	**8.800.934**	**7.820.960**	**777.694**
	Ekor/Animals	**503.694**	**635.120**	**367.924**
Non-Dermaga Umum Non-General Wharves				
General Cargo	Ton	219.590	298.316	55.152
	M3	14.472	21.040	-
Bag Cargo	Ton	81.314	-	-
Curah Cair Liquid Bulk	Ton	2.689.050	2.428.979	13.608.317
Curah Kering Dry Bulk	Ton	25.026.046	25.860.246	19.366.918
Gas	Ton	-	-	-
	MMBTU	-	-	-
Kendaraan Vehicles	Ton	-	-	-
	Unit	-	-	-
Hewan Animals	Ton	-	-	-
	Ekor/Animals	-	-	-
Total Non-Dermaga Umum **Total Non-General Wharves**	**Ton**	**28.016.000**	**28.587.541**	**33.030.387**
	M^3	**14.472**	**21.040**	**-**
	Unit	**-**	**-**	**-**
	MMBTU	**-**	**-**	**-**
	Ekor/Animals	**-**	**-**	**-**
Total Arus Barang Nonpetikemas **Total Non-Container Goods Traffic**	**Ton**	**159.727.836**	**146.200.809**	**129.198.339**
	M^3	**5.604.518**	**4.515.637**	**4.068.667**
	Unit	**2.441.155**	**1.519.404**	**11.520.303**
	MMBTU	**8.800.934**	**7.820.960**	**777.694**
	Ekor/Animals	**503.694**	**635.120**	**367.924**
ARUS PENUMPANG PASSENGER TRAFFIC				
Luar Negeri Overseas				
Embarkasi Embarkation	Orang People	383.533	338	185.421

Tabel Kinerja Operasional
Operational Performance

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	2020
Debarkasi Debarkation	Orang People	304.151	1.538	199.351
Jumlah Luar Negeri Total Overseas	**Orang** **People**	**687.684**	**1.876**	**384.772**
Dalam Negeri Domestic				
Embarkasi Embarkation	Orang People	7.201.720	4.085.873	3.421.322
Debarkasi Debarkation	Orang People	7.139.480	3.969.156	3.434.453
Jumlah Dalam Negeri Total Domestic	**Orang** People	**14.341.200**	**8.055.029**	**6.855.775**
Jumlah Total	**Orang** People	**15.028.884**	**8.056.905**	**7.240.547**
JASA LAINNYA OTHER SERVICES				
Pengusahaan Properti Property Operations				
Pengusahaan Lahan Land Concession				
Sewa Rental	M^2	15.952.232	33.742.879	18.534.151
Throughput Fee/Kontribusi Throughput Fee	Ton	8.043.234	9.178.471	3.474.643
	Unit	-	10	84
	M^3	-	-	-
	M^2	581.166	-	-
Pengusahaan Perairan Aquatic Concession	M^2	**381.963**	383.739	381.999
Pengusahaan Bangunan Building Concession	M^2	217.289	9.178.471	3.474.643
	M^3	4.462	10	84
	Ton	575.136	-	-
	Kali/Times	-	-	-
Konsolidasi dan Distribusi Barang Consolidation and Goods Distribution	Paket Package	**3.482.063**	**441.737**	**275.537**
Pengusahaan Air/Listrik Water/Electricity Business				
Pengusahaan Air Water Business		-	3.639.497	13.188.280
Pengusahaan Air Kapal Ship Water Business				
Sumber yang diusahakan Sources Worked on	Ton	2.423.122	2.318.058	882.457
Sumber yang dikerjasamakan Sources Collaborated on	Ton	349.144	25.767	571.082
Pengusahaan Air Umum Public Water Business		-	27.546	31.533
Sumber yang diusahakan Sources Worked on	Ton	567.840	571.421	313.498
Sumber yang dikerjasamakan Sources Collaborated on	Ton	328.117	213.065	216.443
Pengusahaan Listrik Electricity Business	KWh	58.805.557	43.806.538	45.400.979

INFORMASI SAHAM
Share Information

Modal ditempatkan dan disetor penuh tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebanyak 8.475.067 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham, sehingga total modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp8.475.067.000.000.

Sampai dengan 31 Desember 2022, Pelindo belum mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi harga saham, kapitalisasi pasar saham, dan volume perdagangan saham. Sedangkan informasi modal saham selama dua tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

The issued and fully paid capital as of December 31, 2022 and 2021 was 8,475,067 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share, so the total issued and fully paid capital was Rp8,475,067,000,000.

As of December 31, 2022, Pelindo had not listed its shares on the stock exchange. Therefore, there is no information to report on price information, stock market capitalization, and stock trading volume. The capital stock information for the past two years is presented as follows:

Tabel Informasi Saham
Share Information

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	2020	2019
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham per saham masing-masing untuk saham Seri A Dwiwarna dan Seri B	**40.575.584.000**	8.475.067.000	1.444.029.000	1.444.029.000
Modal dasar – 156.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, terdiri dari: 1 saham seri A Dwiwarna dan 155.999.999 saham seri B dan 33.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, terdiri dari: 1 saham seri A Dwiwarna dan 32.999.999 saham seri B				
Modal ditempatkan dan disetor penuh 40.575.584 saham pada tanggal 31 Desember 2022, terdiri dari: 1 saham seri A Dwiwarna dan 40.575.583 saham seri B dan 8.457.067 saham pada tanggal 31 Desember 2021, terdiri dari: 1 saham seri A Dwiwarna dan 8.457.066 saham seri B				
Capital Stock - Nominal value of Rp1,000,000 (full value) per share of each for Series A Dwiwarna and Series B				
Basic capital - 156,000,000 shares as at December 31, 2022, consisting of: 1 Dwiwarna series A share and 33,000,000 Series B shares as at December 31, 2021, consisting of: 1 Dwiwarna series A shares and 32,999,999 Series B shares				
The issued and fully paid-up capital - 40,575,584 shares as at December 31, 2022, consisting of 1 Dwiwarna series A share and 8,457,066 Series B shares, and as of December 31, 2021, consisting of 1 Dwiwarna series A share and 8,457,066 shares				

AKSI KORPORASI

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Negara No. S-38/MBU/01/2022 yang diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 02 tanggal 9 Februari 2022, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan struktur permodalan dan perubahan Anggaran Dasar. Dengan adanya perubahan struktur permodalan tersebut, modal dasar Perseroan adalah

CORPORATE ACTIONS

Based on the Minister of SOEs Decree No. S-38/MBU/01/2022, as notarized in the Notary Deed No. 02 dated February 9, 2022 before Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Minister of SOEs, made changes to the capital structure and changes to the Articles of Association. With the change in the capital structure, the Company's authorized capital became Rp156,000,000,000,

Rp156.000.000.000 yang terbagi atas 156.000.000 (nilai penuh) lembar saham yang terbagi atas 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 155.999.999 saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh). Modal yang telah diambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak Rp40.575.584.000 yang terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 40.575.583 saham seri B, masing-masing dengan nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).

divided into 156,000,000 (full amount) shares, and divided into 1 series A Dwiwarna share and 155,999,999 series B shares, each share with nominal value of Rp1,000,000 (full amount). The issued and fully paid up capital by the Republic of Indonesia is Rp40,575,584,000 consisting of 1 Series A Dwiwarna share with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) and 40,575,583 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount).

Tabel Perubahan Struktur Permodalan
Changes in Capital Structure

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Tanggal Pelaksanaan Date of Execution	Keterangan Description	Modal Dasar Basic Capital	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Up Capital	Nilai Nominal Nominal Value
9 Februari 2022 February 9, 2022	Sebelum Penambahan Modal (8.475.067 lembar saham) Before Capital Increase (8,475,067 shares)	33.000.000.000.000	8.475.067.000.000	1.000.000
	Sesudah Penambahan Modal (40.575.584 lembar saham) After Capital Increase (40,575,584 shares)	156.000.000.000.000	40.575.584.000.000	1.000.000

Sampai dengan 31 Desember 2022, Pelindo belum mencatatkan sahamnya di bursa saham dan tidak melakukan pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham.

As of December 31, 2022, Pelindo has not listed its shares on any stock exchange and therefore there is no information to report on stock splits, reverse stocks, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares

AKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (*SUSPENSION*) DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (*DELISTING*)

Sampai dengan 31 Desember 2022, Pelindo belum mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak mengalami Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*).

SHARE TRADING SUSPENSION AND/OR SHARE LISTING (DELISTING) ACTION

As of December 31, 2022, Pelindo has not listed its shares on the stock exchange. As such, there has been no Share Trading Suspension and/or Delisting.


PELINDO
PELINDO

INFORMASI OBLIGASI, SUKUK, DAN/ATAU OBLIGASI KONVERSI
Information on Bonds, Sukuk, and/or Convertible Bonds

INFORMASI OBLIGASI

INFORMATION ON BONDS

No.	Uraian Description	Tanggal Penerbitan Date Issued	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Jumlah Obligasi (miliar) Amount of Bonds (billion)	Harga Penawaran Offering Price
1	Obligasi Domestik (PIGN C) Domestic Bond (PIGN C)	21 Juni 2016 June 21, 2016	7 Tahun 7 years	IDR	400.000	100%
2	Obligasi Domestik (PIGN D) Domestic Bond (PIGN D)	21 Juni 2016 June 21, 2016	10 Tahun 10 years	IDR	50.000	100%
3	Obligasi Global Global Bond	5 Mei 2015 May 5, 2015	10 Tahun 10 years	USD	1.100	98,99%
4	Obligasi Global Global Bond	5 Mei 2015 May 5, 2015	30 Tahun 30 years	USD	500	98,17%
5	Obligasi Global Global Bond	2 Mei 2018 May 2, 2018	5 Tahun 5 years	USD	500	98,90%
6	Obligasi Global Global Bond	1 Oktober 2014 October 1, 2014	10 Tahun 10 years	USD	500	99,41%
7	Obligasi Domestik (PIKI A) Domestic Bond (PIKI A)	5 Juli 2018 July 5, 2018	5 Tahun 5 years	IDR	380.000	100%
8	Obligasi Domestik (PIKI B) Domestic Bond (PIKI B)	5 Juli 2018 July 5, 2018	7 Tahun 7 years	IDR	1.820.000	100%
9	Obligasi Domestik (PIKI C) Domestic Bond (PIKI C)	5 Juli 2018 July 5, 2018	10 Tahun 10 years	IDR	800.000	100%

INFORMASI SUKUK

Sampai dengan 31 Desember 2022 Pelindo belum menerbitkan sukuk.

INFORMATION ON SUKUK

As of December 31, 2022, Pelindo had not issued any sukuk.

OBLIGASI KONVERSI

Sampai dengan 31 Desember 2022, Pelindo belum menerbitkan obligasi konversi.

CONVERTIBLE BONDS

As of December 31, 2022, Pelindo has not issued any convertible bonds.

INFORMASI SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Per 31 Desember 2022, Pelindo tidak memiliki sumber pendanaan lainnya.

INFORMATION ON OTHER FUNDING SOURCES

As of December 31, 2021, Pelindo did not have any other funding sources.

	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Status Pembayaran Payment Status	Peringkat Rating		Wali Amanat Trustee
				2022	2021	
	21 Juni 2023 June 21, 2023	9,50%	Belum Lunas Not yet paid	idAAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero)
	21 Juni 2026 June 21, 2026	9,75%	Belum Lunas Not yet paid	idAAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero
	5 Mei 2025 May 5, 2025	4,25%	Belum Lunas Not yet paid	Moody's: Baa3(Positive outlook) Fitch: BBB (Stable)	Moody's: Baa3(Stable) Fitch: BBB-	The Bank of New york Mellon
	5 Mei 2025 May 5, 2025	5,38%	Belum Lunas Not yet paid	Moody's: Baa3(Positive outlook) Fitch: BBB (Stable)	Moody's: Baa3(Stable) Fitch: BBB (Stable) S&P: BBB-(Negative)	The Bank of New york Mellon
	2 Mei 2023 May 2, 2023	4,50%	Belum Lunas Not yet paid	Moody's: Baa3(Positive outlook) Fitch: BBB (Stable)	Moody's: Baa3(Stable) Fitch: BBB- (Stable) S&P: BBB-(Negative)	The Bank of New york Mellon
	1 Oktober 2024 October 1, 2024	4,88%	Belum Lunas Not yet paid	Moody's: Baa3(Positive outlook) Fitch: BBB (Stable)	Moody's: Baa3(Stable) Fitch: BBB- (Stable) S&P: BBB-(Negative)	The Bank of New york Mellon
	5 Juli 2023 July 5, 2023	8,00%	Belum Lunas Not yet paid	idAAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero
	5 Juli 2025 July 5, 2025	9,15%	Belum Lunas Not yet paid	idAAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero
	5 Juli 2028 July 5, 2028	9,35%	Belum Lunas Not yet paid	idAAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero

PERISTIWA PENTING
Important Events



4 Januari | *January*

Pelindo lakukan serah operasi dan *Inbreng* saham kepada *subholding*.
Pelindo hands over operations and inbreng shares to subholdings.



5 Januari | *January*

Subholding Pelindo Multi Terminal Resmi Beroperasi di Terminal Pelabuhan Dumai.
Pelindo Multi Terminal Subholding Officially Operates at Dumai Port Terminal.



9 Januari | *January*

Pelindo Sinergikan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung dengan PTPN III dan KAI.
Pelindo Synergizes Kuala Tanjung Multipurpose Terminal with PTPN III and KAI.



3 Februari | *February*

Subholding Pelindo Multi Terminal Resmi beroperasi di Pelabuhan Belawan dan Tanjung Intan.
Pelindo Multi Terminal Subholding Officially operates at Belawan and Tanjung Intan Ports.



8 Februari | *February*

Dukung Kelancaran Logistik, Akses tol Makassar New Port siap dibangun.
Support for Smooth Logistics, Access to the Makassar New Port toll road is ready to be built.



21 Februari | *February*

Pelindo, KAI dan Pos Indonesia sinergi Perkuat layanan logistik.
Pelindo, KAI and Pos Indonesia synergize to strengthen logistics services.



3 Maret | *March*

Pelindo Multi Terminal perluas wilayah operasi di Kalimantan Tengah dan Jawa Timur.
Pelindo Multi Terminal expands its operating area in Central Kalimantan and East Java.



22 Juni | *June*

Peningkatan Pelayanan Pelindo melalui Group Perusahaan PT JICT mendatangkan *2 unit Quay Container Crane Super Post Panamax* QCC generasi terbaru dan terbesar di Indonesia.
Pelindo Service Improvement through the PT JICT Group Companies delivered 2 of the newest and largest Post Panamax QCC generation Quay Container Super Cranes in Indonesia.



12 Juli | *July*

Peresmian Peluncuran Buku "Menuju Satu BUMN Pelabuhan".
Book Launch "Towards One SOE Port ".



29 Juli | *July*

Pelindo raih penghargaan Indonesia *Corporate Reputation Awards* 2022.
Pelindo receives 2022 Indonesia Corporate Reputation Awards.



9 Agustus | *August*

Peresmian Terminal Kijing oleh Presiden Joko Widodo.
Inauguration of the Kijing Terminal by President Joko Widodo.



29 Agustus | *August*

Pelindo Jalin Kerja Sama *Sister Port* dengan Johor Port Authority.
Pelindo Establishes Sister Port Collaboration with Johor Port Authority.



31 Agustus | *August*

Pelindo dan Port of LA perluas kerja sama pengembangan *"green port"*.
Pelindo and the Port of LA expand cooperation in developing "green ports".



7 September | *September*

SIG dan Pelindo Perkuat Sinergi Bidang Operasional dan Pengembangan Usaha.
SIG and Pelindo Strengthen Synergy in Operations and Business Development.



20 September | *September*

Peresmian Jalan Tol Cibitung-Cilincing oleh Presiden Jokowi.
Inauguration of the Cibitung-Cilincing Toll Road by President Jokowi.



24 September | *September*

Kerja Sama investasi dan pengoperasian Belawan New Container Terminal.
Investment cooperation and operation at the Belawan New Container Terminal.



1 Oktober | *October*

Peringatan Hari Pelindo.
Pelindo Commemoration Day.



18 Oktober | *October*

Penandatangan MoU penyediaan jasa *Onshore Power Supply* di Lingkungan Pelindo antara PT Pelindo Jasa Maritim dengan Indonesia National Shipowners Association.
Signing of an MoU for the provision of Onshore Power Supply services in Pelindo between PT Pelindo Jasa Maritim and the Indonesia National Shipowners Association.



31 Oktober | *October*

Terbesar di Indonesia, CMA CGM Alexander Von Humboldt bersandar di JICT.
The largest in Indonesia, CMA CGM Alexander Von Humboldt based at JICT.



2 November | *November*

Pelabuhan Pontianak terapkan STID Truk.
Pontianak Port applies Truck STID.



5 November | *November*

Pelindo resmikan terminal penumpang baru di Pelabuhan Waingapu.
Pelindo inaugurates new passenger terminal at the Port of Waingapu.



15 November| *November*

Perkuat Konektivitas Indonesia, Pelindo layani kapal besar kapasitas 14.000 Teus.
Strengthening Indonesia's Connectivity, Pelindo serves large ships with a capacity of 14,000 TEUs.



PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY



02

Laporan Direksi dan Dewan Komisaris

Board of Directors Report and Board of Commissioners Report

LAPORAN DIREKSI
Board of Directors Report



ARIF SUHARTONO
Direktur Utama
President Director

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,
Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, Pelindo mampu melalui tantangan di tahun 2022 dan mencatatkan kinerja yang baik meskipun perekonomian masih mengalami ketidakpastian. Direksi beserta seluruh jajaran manajemen dan pekerja senantiasa berkomitmen untuk memberikan kinerja yang terbaik sehingga dapat mewujudkan visi Perseroan untuk menjadi pemimpin ekosistem maritim yang terintegrasi dan berkelas dunia.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan jalannya kepengurusan Perseroan untuk Tahun buku 2022 yang meliputi kinerja Perseroan, analisis prospek Perseroan, perkembangan penerapan tata kelola perusahaan, penilaian kinerja Komite di bawah Direksi serta perubahan komposisi Direksi.

ANALISIS ATAS KINERJA PERSEROAN

Perekonomian global tumbuh sebesar 3,4% pada tahun 2022 setelah mencapai angka pertumbuhan sebesar 5,9% pada 2021. *Rebound* yang terjadi pada tahun 2021 tersebut kembali mengalami tekanan pasca pertumbuhan negatif 3,1% yang terjadi pada tahun 2020 yang dikarenakan pandemi COVID-19. Tren perlambatan pertumbuhan masih berlanjut pada Triwulan IV tahun 2022 pada beberapa negara. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tumbuh 1,0% (yoy), Tiongkok tumbuh 2,9% (yoy), Jepang tumbuh 0,6% (yoy), Korea Selatan tumbuh 1,4% (yoy), serta Singapura tumbuh 2,2% (yoy). Berdasarkan rilis terbaru *World Economic Outlook* April 2023, International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 sebesar 2,8%, atau turun dari *outlook* pada Januari 2023 yang lalu yaitu sebesar 2,9%. Angka prediksi pertumbuhan global tahun 2023 ini terus mengalami perubahan/koreksi dikarenakan ketidakpastian ekonomi pada tahun 2023.

Dari sisi perekonomian nasional, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada tahun 2022 tercatat berhasil tumbuh sebesar 5,31% (yoy). Perekonomian domestik tahun 2022 berhasil tumbuh berkat pertumbuhan pada Triwulan IV-2022 yang naik 5,01% (yoy). Dengan nilai pertumbuhan ini, maka tren *rebound* positif perekonomian nasional terus berlanjut sejak terjadinya pandemi COVID-19 yang memukul pertumbuhan ekonomi hingga negatif pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ini juga tertinggi sejak tahun 2014.

With praise and gratitude we pray to the presence of God Almighty, for the abundance of His grace upon all of us, which enabled Pelindo to overcome the challenges in 2022 and record a good performance even though the economy was still experiencing uncertainty. The Board of Directors and all levels of management and employees remain committed to providing their best performance to realize the Company's vision of becoming an integrated and world-class maritime ecosystem leader.

On this occasion, please allow us to submit a report on the Company's management for the 2022 fiscal year, which includes the Company's performance, analysis of the Company's prospects, developments in corporate governance implementation, performance evaluations of the Committees under the Board of Directors, and changes in the Board of Directors composition.

ANALYSIS OF COMPANY PERFORMANCE

The global economy grew by 3.4% in 2022 following the growth of 5.9% in 2021. The rebound that occurred in 2021 was again under pressure after the 3.1% negative growth in 2020 due to the COVID-19 pandemic. The trend of slowing growth continued in the fourth quarter of 2022 in several countries. The United States' economic growth grew 1.0% (yoy), China grew 2.9% (yoy), Japan grew 0.6% (yoy), South Korea grew 1.4% (yoy), and Singapore grew 2.2 % (yoy). Based on the latest release of the World Economic Outlook April 2023, the International Monetary Fund (IMF) predicted global economic growth in 2023 at 2.8%, down from its outlook of 2.9% in January 2023. The predicted global growth for 2023 still continues to experience changes/corrections due to economic uncertainty in 2023.

In terms of the national economy, based on data from the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia's economy in 2022 managed to grow by 5.31% (yoy), thanks to growth in the fourth quarter of 2022 by 5.01% (yoy). With this growth rate, the positive rebound trend for the national economy has continued since the COVID-19 pandemic hit economic growth negatively in 2020. Economic growth in 2022 was the highest since 2014.

Di sisi lain, Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2022 mengalami inflasi sebesar 5,51%, nilai ini lebih tinggi dari inflasi IHK 2021 sebesar 1,87% (yoy) dan lebih tinggi dari sasaran 3,0+1%. Inflasi yoy tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 8,65% dengan IHK sebesar 119,83 dan terendah terjadi di Sorong sebesar 3,26% dengan IHK sebesar 110,95. Inflasi yang tinggi pada tahun 2022 dipicu oleh peningkatan harga pada peristiwa seperti kelangkaan minyak goreng pada Januari 2022, kenaikan harga avtur yang mendorong kenaikan tarif angkutan udara pada April 2022, anomali cuaca di berbagai wilayah yang mengakibatkan gagal panen beberapa komoditas hortikultura sehingga memicu kenaikan harga pada Juni 2022, dan kenaikan harga BBM (Pertalite, Pertamax dan Solar) pada September 2022. Selain itu peningkatan harga pokok pada hari raya lebaran, serta natal dan tahun baru. Sepanjang 2022, Bank Indonesia (BI) berupaya menekan angka inflasi dengan menaikkan suku bunga acuan BI-7 *Days Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebanyak 5 kali. Total kenaikannya 200 *basis points* (bps) hingga BI7DRR mencapai level 5,5% pada akhir 2022.

On the other hand, the Consumer Price Index (CPI) Inflation in 2022 was 5.51%, higher than the 2021 CPI inflation of 1.87% (yoy) and higher than the target of 3.0 + 1%. The highest yoy inflation occurred in Kotabaru at 8.65% with a CPI of 119.83, and the lowest occurred in Sorong at 3.26% with a CPI of 110.95. The high inflation in 2022 was triggered by an increase in prices due to the scarcity of cooking oil in January 2022, an increase in avtur prices which prompted an increase in air transport fares in April 2022, weather anomalies in various regions that resulted in crop failures of several horticultural commodities, which triggering price increases in June 2022, and increases in fuel prices (Pertalite, Pertamax and Solar) in September 2022. In addition, basic prices increased during Eid holidays, as well as Christmas and New Year. Throughout 2022, Bank Indonesia (BI) sought to reduce the inflation rate by raising the BI-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) reference rate 5 times. The total increase was 200 basis points (bps) so that the BI7DRR reached the level of 5.5% at the end of 2022.

Dari sisi industri pelabuhan, saat ini terjadi *trend* penggabungan dan akuisisi pada operator pelabuhan dunia. Konsolidasi pelabuhan didorong oleh beberapa faktor pasar dan internal seperti adanya limitasi *organic growth* karena akses kepada lahan, *counteraction* dari meningkatnya *bargaining power shipping lines*, serta bertambahnya akses pendanaan dari investor untuk perusahaan pelabuhan. Penggabungan dan akuisisi juga dianggap sebagai strategi yang tidak terlalu berisiko jika dibandingkan dengan *greenfield growth* untuk mengembangkan pelabuhan.

From the port industry perspective, there is currently a trend of mergers and acquisitions among world port operators. Port consolidation is driven by a number of market and internal factors such as limitations to organic growth due to access to land, counteraction to increased bargaining power shipping lines, and increased access to funding from investors for port companies. Mergers and acquisitions are also considered a less risky strategy when compared to greenfield growth by developing ports.

Kondisi industri pelabuhan saat ini juga dipengaruhi oleh perubahan Aliansi *Shipping Line*. Aliansi *shipping line* dimulai pada tahun 1990-an, dan anggotanya terus meningkatkan pangsa pasar kumulatif global. Tiga aliansi terbesar adalah *Maersk* dan MSC (2M), Ocean Alliance (CMA CGM, Cosco dan Evergreen), dan The Alliance (Hapag-Lloyd, Yang Ming, dan Ocean Network Express). Aliansi *shipping line* didorong oleh kebutuhan dalam menghadapi persaingan dengan para pemain besar, perluasan area pelayanan dan ketersediaan kapal, dan memanfaatkan *economies of scale* serta menurunkan biaya. Namun peta global aliansi *shipping line* ini akan berubah menyusul rencana Maersk untuk mengakhiri aliansi 2M yang dipercaya saat ini sedang dalam tahap finalisasi. Hal ini dikarenakan *Maersk* memiliki fokus yang baru dalam strategi bisnisnya dari skala ekonomi menjadi *end-to-end solution* yang mengharuskan *Maerks* untuk dapat mengontrol jaringan distribusinya. Berakhirnya aliansi *shipping line* 2M akan merubah pangsa pasar *East-West shipping routes* dari 3 (tiga) aliansi besar dengan fokus skala ekonomi menjadi 4 (empat) *network* jaringan besar yang terdiri dasi MSC, *Maersk Line (2M), Ocean Alliance and The Alliance.*

The current condition of the port industry has also been affected by changes in the Shipping Line Alliances. Shipping line alliances began in the 1990s, and their members have continued to increase their global cumulative market share. The three largest alliances being Maersk and MSC (2M), Ocean Alliance (CMA CGM, Cosco and Evergreen), and The Alliance (Hapag-Lloyd, Yang Ming, and Ocean Network Express). Shipping line alliances are driven by the need to face competition from big players, expand service areas and ship availability, and take advantage of economies of scale and lower costs. However, the global map of the shipping line alliances will change following Maersk's plan to end the 2M alliance, which is believed to be currently in the finalization stage. This is due to Maersk pursuing a new focus in its business strategy from economies of scale to end-to-end solutions that requires Maersk controls its distribution network. The end of the 2M shipping line alliance will change the market share of East-West shipping routes from 3 (three) major alliances with a focus on economies of scale to 4 (four) large networks consisting of tie MSC, Maersk Line (2M), Ocean Alliance and The Alliance.

Meningkatnya *sustainability effort* yang dilakukan oleh operator pelabuhan dan *shipping lines* didorong oleh faktor internal dan eksternal seperti meningkatnya tekanan dari pemerintah, pemberian premium dari investor dan bank kepada perusahaan yang lebih *sustainable*, dan pengurangan biaya dari efisiensi bahan bakar. Beberapa pemain global seperti Maersk, CMA CGM, MSC, Cosco Shipping dan Wasa Line. Maersk berupaya untuk

The increasing sustainability efforts made by port operators and shipping lines are driven by internal and external factors such as increasing pressure from governments, premiums given by investors and banks to companies that are more sustainable, and reduced costs from fuel efficiency. Global players include Maersk, CMA CGM, MSC, Cosco Shipping and Wasa Line. Maersk strives to increase efficiency and reduce carbon fuels. CMA CGM replaces

meningkatkan efisiensi dan menurunkan penggunaan karbon. CMA CGM mengganti bahan bakar karbon menjadi biofuel. MSC menggunakan campuran 30% biofuel, dan menghasilkan pengurangan emisi CO2 sebanyak 15%-20%. Cosco Shipping mengoptimalisasi proses di pelabuhan dan navigasi untuk mengurangi waktu *turnaround*. Wasaline menggunakan baterai sebagai pengganti bahan bakar.

carbon fuels into biofuels. MSC uses a 30% blend of biofuels, which results in a 15%-20% reduction in CO2 emissions. Cosco Shipping optimizes port and navigation processes to reduce turnaround times. Wasaline uses batteries instead of fuel.

Meningkatnya sistem transportasi multimodal yang dilakukan oleh berbagai negara global didorong oleh upaya peningkatan infrastruktur, *sustainability*, dan *congestion* jalanan di pelabuhan. Semakin banyaknya pelabuhan yang terhubung dengan infrastruktur intermodal (kereta api, bandara, dan sistem transportasi lain) juga akan mendukung konektivitas pelabuhan dan menjadikan transportasi laut menjadi semakin menarik sebagai salah satu sarana perdagangan global. Sistem transportasi intermodal juga memberikan opsi yang lebih ramah lingkungan, terutama untuk kargo yang dikirimkan ke tempat dengan jarak yang panjang. Namun, sistem ini memadatkan jalanan dengan truk karena volume perdagangan yang kian membesar setiap tahunnya. Volume barang yang dikirimkan oleh intermodal diprediksi akan berkembang. *Forecast* terhadap volume intermodal akan naik sebesar 3% per tahun hingga 2024 dan pelabuhan akan menjadi titik utama intermodal terutama untuk *consumer goods, capital goods,* dan *industrial supplies*.

The increase in the multimodal transportation system in a number of global countries is driven by efforts to improve infrastructure, sustainability, and road congestion at ports. The increasing number of ports connected to intermodal infrastructure (railways, airports and other transportation systems) also supports port connectivity and makes sea transportation more attractive as a means of global trade. The intermodal transport system also provides a greener option, especially for cargo that is transported over long distances. However, this system blocks streets with trucks as the trading volume is growing every year. The volume of goods shipped by intermodal is predicted to grow. The forecast for intermodal volume is to increase by 3% per year until 2024 and ports will be the main intermodal point, especially for consumer goods, capital goods, and industrial supplies.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Dalam menghadapi kondisi perekonomian dan industri kepelabuhan tersebut, Perseroan telah menetapkan berbagai strategi usaha yang diperlukan. Dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perseroan, Direksi telah memimpin penyusunan strategi dan kebijakan strategis tersebut yang dituangkan dalam *Roadmap* Strategi Jangka Panjang periode 2021-2025. Direksi memastikan implementasi strategi dengan melakukan evaluasi untuk memastikan efektivitas penerapan strategi yang telah ditetapkan melalui evaluasi laporan-laporan yang dilakukan secara berkala. *Monitoring* implementasi strategi yang telah dilakukan oleh Direksi berhasil memenuhi target kinerja Perseroan.

STRATEGIES AND STRATEGIC POLICIES

In dealing with these economic conditions and the industry changes, the Company determined the necessary business strategies. When formulating the Company's strategy and strategic policies, the Board of Directors led the preparation of the strategies and strategic policies as outlined in the Long-Term Strategy Roadmap for 2021-2025. The Board of Directors assessed the strategy implementation to ensure the implementation of the strategies was effective through periodic evaluations of the reports. The Board of Directors' monitoring the of strategy implementation has helped the Company reach its performance targets.

Strategi bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan diturunkan dari visi dan misi, serta tujuan berdirinya PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Tema strategis yang telah teridentifikasi menjadi pilar-pilar utama bagi rumah strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk periode 2021-2025. Tema strategis juga menjadi acuan untuk mendefinisikan sub-tema strategis bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk 5 (lima) tahun ke depan yang akan menjadi basis dalam mendefinisikan inisiatif strategis bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

The PT Pelabuhan Indonesia (Persero) strategy is derived from the vision and mission, as well as the objectives of establishing PT Pelabuhan Indonesia (Persero). These identified strategic themes have become the main pillars for the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) strategic house for the 2021-2025 period. The strategic theme is also a reference for defining strategic sub-themes for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for the next 5 (five) years to form the basis for defining strategic initiatives for PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Untuk mendukung ketercapaian pilar strategis utama, telah dirancang juga *key enablers* yang harus dipenuhi. *Key enablers* merupakan sekumpulan tindakan dan aktivitas utama yang akan mendorong kelancaran implementasi strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan memperkuat fondasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam mencapai visinya sebagai pemimpin ekosistem maritim Indonesia yang berkelas dunia.

To support the achievement of the main strategic pillars, key enablers have also been designed that must be met. Key enablers are a set of main actions and activities that will encourage the smooth implementation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) strategy and strengthen the foundation for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) achieving its vision as a world-class leader of Indonesia's maritime ecosystem.

Penjelasan dari masing-masing komponen rumah strategis adalah sebagai berikut:

1. Rumah strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memiliki visi untuk menjadi pemimpin ekosistem maritim yang terintegrasi dan berkelas dunia, dan misi untuk mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Transformasi Pelabuhan Kelas Dunia. Pilar strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kapabilitas PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai perusahaan penyedia jasa kepelabuhan kelas dunia.
3. Penguatan Ekosistem Logistik. Pilar strategi kedua dilakukan untuk membuat hubungan dengan pemain ekosistem logistik laut dan darat agar dapat mengoptimalkan biaya logistik nasional.
4. Efisiensi *Supply Chain* Maritim. Pilar strategis ketiga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi *supply chain maritim* di Indonesia.
5. Peningkatan *Value* Perusahaan. Pilar strategis keempat dilakukan untuk meningkatkan *value* PT Pelabuhan Indonesia (Persero), dengan cara memperkuat struktur keuangan perusahaan agar dapat terciptanya sistem keuangan yang *prudent* dan stabil, mengoptimalkan pengelolaan *asset*, dan memfokuskan perusahaan untuk mengembangkan bisnis secara vertikal dan horizontal dengan memanfaatkan kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
6. *Enablers.* Seluruh pilar strategis didukung oleh adanya *enablers* yang harus direalisasikan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Untuk memastikan agar proses pencapaian sasaran sesuai dengan strategi dan visi yang telah ditetapkan untuk 2025, maka perlu disusun *roadmap* (peta jalan) yang berfungsi sebagai *guidance* (panduan) yang akan memberikan gambaran terkait proses, tahapan, dan capaian yang harus diprioritaskan untuk mencapai sasaran akhir atau visi perusahaan. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah menyusun *roadmap* yang digunakan sebagai kebijakan strategis hingga akhir periode RJPP dengan sasaran Perusahaan yang hendak diraih akan menjadi acuan dalam proses implementasi strategi pada setiap tahunnya. Adapun *roadmap* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. 2021 – 2022: *Business Alignment and Integration*. Setelah proses penggabungan Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di tahun 2021, maka tahun 2021 hingga 2022 akan menjadi fase *business alignment and integration*. Fase ini akan berfokus pada penyelarasan bisnis paska integrasi melalui standardisasi dan integrasi operasional dan komersial untuk peningkatan kualitas pelayanan, melakukan investasi terintegrasi untuk pengembangan bisnis, serta reorganisasi perusahaan dan pengembangan budaya terintegrasi.
2. 2023 – 2024: *Business Expansion and Partnership.* Pada tahun 2023 – 2024, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan mulai fokus untuk melakukan ekspansi dan menjalin kerja sama bisnis. Pada fase ini, Perseroan berfokus pada peningkatan

Each strategic house component can be explained as follows:

1. The PT Pelabuhan Indonesia (Persero) strategic house has a vision be a world-class integrated leader in the maritime ecosystem, and a mission to realize national maritime ecosystem network through the increment of network connectivity and service integration, to support Indonesian economic growth.
2. World Class Port Transformation. This strategic pillar is carried out to increase PT Pelabuhan Indonesia (Persero) capabilities as a world-class port service provider.
3. Strengthening the Logistics Ecosystem. The second strategy pillar is carried out to build relationships with marine and land logistics ecosystem players to optimize national logistics costs.
4. Maritime Supply Chain Efficiency. The third strategic pillar aims to improve the maritime supply chain efficiency in Indonesia.
5. Increasing Company Value. The fourth strategic pillar is to increase the value of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), by strengthening the Company's financial structure to create a prudent and stable financial system, optimize asset management, and focus the Company on developing its business vertically and horizontally by utilizing PT Pelabuhan Indonesia (Persero) existing capabilities and competencies.
6. Enablers. All strategic pillars are supported by enablers that must be realized by PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

To ensure the achievement of goals in accordance with the strategy and vision for 2025, a roadmap was developed as a guide to provide an overview of the processes, stages, and achievements that must be prioritized to achieve the Company's ultimate target or vision. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has compiled a roadmap used as a strategic policy until the end of this RJPP period where the Company's goals to be achieved will be a reference for the strategy implementation process each year. The PT Pelabuhan Indonesia (Persero) roadmap is as follows:

1. 2021 – 2022: Business Alignment and Integration. Following the merger of Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, and Pelindo IV to become PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in 2021, 2021 to 2022 will be the phase of business alignment and integration, which will focus on post-integration business alignment through standardization and operational and commercial integration to improve service quality, make integrated investments for business development, as well as Company reorganization and integrated culture development.
2. 2023 – 2024: Business Expansion and Partnership. In 2023 - 2024, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) will begin to focus on expanding and establishing business collaborations. In this phase, the Company will focus on improving business

pengembangan bisnis melalui *Strategic Partnership* (i.e. INA), kolaborasi dengan pelayaran domestik dan global untuk peningkatan konektivitas laut, serta pengembangan konektivitas dan ekosistem logistik melalui kerja sama dengan pelaku industri logistik darat.

3. 2025: *Word Class Port Ecosystem Integrator.* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan fokus mewujudkan *World Class Port Ecosystem Integrator* melalui, persiapan rencana ekspansi regional dan internasional PT Pelabuhan Indonesia (Persero), peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam bisnis kepelabuhan dan bisnis pendukungnya serta penguatan dukungan konektivitas dan ekosistem logistik melalui kerja sama dengan kawasan industri untuk peningkatan arus barang.

Mengingat semua *milestone* pada setiap *roadmap* yang telah direncanakan adalah "pijakan" untuk mencapai *World Class Port Ecosystem Integrator,* maka penting bagi Perseroan untuk memastikan dan mendayagunakan semua sumber daya yang ada untuk menjalankan semua *strategic pillars* beserta *key enablers* sehingga *milestone* dan sasaran perusahaan dapat tercapai. Pada tahun 2022, perusahaan berada pada tahun kedua fase *business alignment and integration*.

PENCAPAIAN TARGET DAN KINERJA PERSEROAN

Dengan menerapkan strategi bisnis tersebut, pada tahun 2022 Perseroan telah mampu bertahan di tengah kondisi perekonomian yang masih belum sepenuhnya pulih. Pencapaian tersebut terlihat dari terpenuhinya target kinerja operasional pada tahun 2022. Capaian arus kapal dalam satuan unit/*call* tahun 2022 mencapai 103,57%. Arus barang nonpetikemas dalam satuan ton tahun 2022 mencapai 110,67%. Arus barang nonpetikemas satuan M3 mencapai 125,87%. Arus barang nonpetikemas dalam satuan unit berhasil melampaui target yang mencapai 169,72%. Arus barang nonpetikemas dalam satuan MMBTU berhasil melampaui target, dengan capaian 116,82%. Kemudian, capaian arus penumpang tahun 2022 mencapai 214,18% berhasil melampaui target.

Pada tahun 2022, Perseroan berhasil mencatatkan kinerja operasional yang baik. Dari sisi operasi kepelabuhan, arus kapal dalam satuan unit tahun 2022 mencapai 290.970 unit, meningkat 14,25% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 254.669 unit. Demikian pula dengan realisasi arus kapal dalam satuan GT tahun 2022 mencapai 1.201.814.534 GT, meningkat 1,31% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 1.186.217.247 GT. Arus petikemas dalam satuan box tahun 2022 mencapai 13.292.102 *box*, meningkat 0,44% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 13.234.256 *box*. Demikian pula dengan arus petikemas dalam satuan *teus* yang meningkat sebesar 0,96%, dari 17.056.636 teus di tahun 2021 menjadi 17.220.312 *teus* di tahun 2022. Arus barang nonpetikemas dalam satuan ton tahun 2022 mencapai 159.727.836 ton, meningkat 9,25% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 146.200.809 ton.

development through Strategic Partnerships (i.e. INA), collaboration with domestic and global shipping to increase sea connectivity, as well as developing connectivity and logistics ecosystem through collaboration with land logistics industry players.

3. 2025: Word Class Port Ecosystem Integrator. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) will focus on becoming a World Class Port Ecosystem Integrator through, preparing regional and international expansion plans for PT Pelabuhan Indonesia (Persero), increasing the use of digital technology in the port business and supporting businesses as well as strengthening connectivity support and logistics ecosystem through collaboration with industrial estates to increase goods traffic.

As all milestones in each roadmap have been planned as the "steps" to achieve a World-Class Port Ecosystem Integrator, it is important for the Company to ensure and utilize all available resources to carry out all strategic pillars together with key enablers so the Company's milestones and goals can be achieved. In 2022, the Company was in the second year of the business alignment and integration phase.

TARGET ACHIEVEMENT AND COMPANY PERFORMANCE

By implementing this business strategy, in 2022 the Company survived despite economic conditions that have not fully recovered. This achievement can be seen in the operational performance targets achieved in 2022. Ship traffic in units/calls in 2022 reached 103.57%. In 2022, non-container goods traffic in tons reached 110.67%. Non-container goods traffic in units of M3 reached 125.87%, exceeding the target of 169.72%. Non-container goods traffic in units of MMBTU exceeded the target, with an achievement of 116.82%. Finally, in 2022 passenger traffic reached 214.18%, successfully exceeding the target.

In 2022, the Company managed to record good operational performance. In terms of port operations, ship traffic in units in 2022 reached 290,970, an increase of 6.76% compared to 272,538 in 2021. Likewise, the actual ship traffic in units of GT in 2022 reached 1,201,814,534 GT, an increase of 1.31% compared to 1,186,217,247 GT in 2021. Container traffic in box units in 2022 reached 13,292,102, an increase of 0.44% compared to 13,234,256 boxes in 2021. Likewise, container traffic in units of TEUs increased by 0.96%, from 17,056,636 TEUs in 2021 to 17,220,312 TEUs in 2022. Non-container goods traffic in tons in 2022 reached 159,727,836 tons, an increase of 9.25% compared to 146,200,809 tons in 2021.

Dari sisi arus penumpang, pada tahun 2022 mencapai 15.028.884 orang, meningkat 86,53% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8.056.905 orang. Selain itu, pada jasa lainnya, produksi pengusahaan air kapal untuk sumber yang diusahakan tahun 2022 dalam satuan ton mencapai 2.423.122 ton, meningkat 4,53% dibandingkan realisasi tahun 2021 yang mencapai 2.318.058. Demikian pula dengan pengusahaan air umum dari sumber yang dikerjasamakan tahun 2022 dalam satuan ton mencapai 328.117 ton, meningkat 54,00% dibandingkan realisasi tahun 2021 yang sebesar 213.065 ton. Produksi pengusahaan listrik di tahun 2022 dalam satuan KWH mencapai 58.805.557 KWH, meningkat 34,24% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 43.806.538 KWH.

Passenger traffic in 2022 reached 15,028,884 people, an increase of 86.53% compared to the previous year's 8,056,905 people. Also, in other services, the production of ship water exploitation for exploited sources in 2022 in tons reached 2,423,122 tons, an increase of 4.53% compared to 2,318,058 tons in 2021. Likewise with the exploitation of public water from cooperating sources in 2022 in tons reached 328,117 tons, an increase of 54.00% compared to 213,065 tons in 2021. Electricity business production in 2022 in KWH reached 58,805,557 KWH, an increase of 34.24% compared to 43,806,538 KWH in 2021.

Selain kinerja operasional, Perseroan juga telah mencatatkan kinerja keuangan yang baik. Pendapatan operasi tahun 2022 mencapai Rp29,70 triliun, meningkat 3,07% atau Rp885,80 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp28,81 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan pendapatan operasi yang berasal dari pelayanan jasa terminal sebesar Rp568,85 miliar, pelayanan jasa barang sebesar Rp268,77 miliar serta pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik sebesar Rp231,24 miliar. Seiring dengan peningkatan pendapatan tersebut, laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* juga mengalami peningkatan. Laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* tahun 2022 sebesar Rp3,91 triliun, meningkat 23,06% atau sebesar Rp732,32 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp3,18 triliun. Dengan meningkatnya laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity*, maka ekuitas Perseroan juga mengalami peningkatan. Ekuitas tahun 2022 mencapai Rp42,80 triliun, meningkat 1,79% atau Rp751,58 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp42,05 triliun. Kemudian, aset tahun 2022 mencapai Rp118,35 triliun, meningkat 1,83% atau Rp2,12 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp116,23 triliun.

In addition to operational performance, the Company also recorded a good financial performance. Operating income in 2022 reached Rp29.70 trillion, an increase of 3.07% or Rp885.80 billion compared to Rp28.81 trillion in 2021. The increase was mainly due to an increase in operating income originating from terminal services of Rp568.85 billion, goods services of Rp268.77 billion and land, building, water and electricity concessions of Rp231.24 billion. The increase in income, profit for the year after the effect of merging entity income adjustments also increased. Income for the year after the effect of adjusting the merging entity income in 2022 amounted to Rp3.91 trillion, an increase of 23.06%, or Rp732.32 billion compared to Rp3.18 trillion in 2021. With the increase in profit for the year after the effect of the merging entity profit adjustment, the Company's equity also increased. Equity in 2022 reached Rp42.80 trillion, an increase of 1.79%, or Rp751.58 billion compared to Rp42.05 trillion 2021. Finally, assets in 2022 reached Rp118.35 trillion, an increase of 1.83% or Rp2.12 trillion compared to Rp116.23 trillion in 2021.

KENDALA/TANTANGAN YANG DIHADAPI SERTA STRATEGI PENYELESAIANNYA

Berbagai capaian positif yang diperoleh di tahun 2022 tidak lepas dari kemampuan Perseroan dalam menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain, *gap* pengembangan SDM dan organisasi yang terlihat dari kurang cepatnya unit kerja untuk beradaptasi dengan perubahan model bisnis baru dan kompetensi SDM belum merata untuk semua pelabuhan ketika integrasi dilakukan. Dalam menghadapi kendala tersebut, Perseroan telah melakukan pengembangan kapabilitas dan kualitas SDM. Di samping itu, Perseroan juga menghadapi *gap* teknologi yaitu masih terbatasnya penerapan teknologi yang terintegrasi untuk mendukung proses operasional. Dalam menghadapi kendala tersebut, Perseroan telah melakukan penguatan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi (termasuk pengembangan integrasi sistem perusahaan (Ops dan Non-Ops) serta integrasi dengan sistem *stakeholders*/eksternal).

OBSTACLES/CHALLENGES FACED AND THE COMPLETION STRATEGY

The positive achievements in 2022 are thanks to the Company's ability to face various obstacles. These obstacles included gaps in HR and organizational development, as seen in the lack of speed in work units to adapt to changes in new business models, and the fact that HR competencies are not evenly distributed in all ports when integration is carried out. In facing these obstacles, the Company is developing the capabilities and quality of its HR. In addition, the Company is also facing a technology gap due to the limited application of integrated technology to support operational processes. To address this challenge, the Company has strengthened the use of technology and information systems (including the development of corporate system integration (Ops and Non-Ops) as well as integration with stakeholders/external systems).

Perseroan juga menghadapi *gap* kapabilitas bisnis yaitu belum berkembangnya, kapabilitas dan kemampuan layanan di segmen logistik, *hinterland development, marine*, serta *port services* dengan baik. Untuk menghadapi kendala tersebut, Perseroan melakukan kerja sama dan juga potensi integrasi sistem atau layanan dengan pemain logistik laut dan darat sehingga biaya logistik dapat dioptimalkan, serta menjalin kerja sama dengan kawasan industri/logistik untuk mendorong peningkatan arus barang. Kerja sama dengan kawasan industri/logistik ini dilakukan untuk mendukung konektivitas dengan bagian *hinterland*, serta mempermudah pemberian layanan logistik *end-to-end* bagi pelaku industri. Adanya hubungan dengan pelaku kawasan industri yang berada di satu daerah dengan pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berpotensi meningkatkan pelayanan bagi pelanggan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dari sisi kecepatan dan kemudahan.

The Company also faces a gap in business capabilities, namely underdeveloped capabilities and service capabilities in the logistics, hinterland development, marine and port services segments. To deal with these challenges, the Company cooperates, and also has the potential for system or service integration, with sea and land logistics companies so that logistics costs can be optimized, and has established cooperations with industry/logistics companies to encourage an increase in goods traffic. This collaboration with the industry/logistics companies is carried out to support connectivity with the hinterland, as well as facilitate providing an end-to-end logistics services for industry companies. The existence of relationships with industrial estate companies in the same area as the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) port has the potential to improve services for customers of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in terms of speed and convenience.

ANALISIS PROSPEK USAHA

Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi global 2023 dapat mencapai 2,6%, sejalan dengan dampak positif pembukaan ekonomi Tiongkok dan penurunan disrupsi suplai global. Perkembangan positif ekonomi global serta ekspektasi kenaikan upah karena keketatan pasar tenaga kerja di Amerika Serikat dan Eropa mengakibatkan proses penurunan inflasi global berjalan lebih lambat, sehingga mendorong kebijakan moneter ketat negara maju berlangsung lebih lama sepanjang 2023.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan ekspor. Konsumsi rumah tangga diprakirakan makin kuat sejalan dengan peningkatan mobilitas di seluruh wilayah, penjualan eceran, dan membaiknya keyakinan konsumen. Investasi juga solid ditopang penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan peningkatan aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA). Prospek permintaan domestik yang meningkat juga dipengaruhi dampak lanjutan perbaikan ekspor. Ekspor barang dan jasa diprakirakan lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya seiring perbaikan prospek ekonomi global. Perkembangan hingga Februari 2023 menunjukkan ekspor non-migas Indonesia tumbuh tinggi, termasuk dari peningkatan ekspor batu bara, bijih logam, dan CPO ke Tiongkok. Selain itu, kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara diprakirakan juga meningkat. Secara spasial, prospek ekspor yang lebih baik mendukung prospek ekonomi di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) yang lebih tinggi. Berdasarkan Lapangan usaha, prospek sektor Industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan diprakirakan tumbuh kuat. Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi pada 2023 diprakirakan dalam kisaran 4,5%-5,3%.

Untuk kargo nonpetikemas, pasar arus barang domestik masih memiliki potensi yang sangat besar dikarenakan pada saat ini Pelindo hanya memiliki pangsa pasar sebagian kecil dari pasar

BUSINESS PROSPECT ANALYSIS

Bank Indonesia projects global economic growth in 2023 to reach 2.6%, in line with the positive impact of China's economy opening, and reduced global supply disruptions. The positive developments in the global economy, and the expectations of wage increases due to the tight labor markets in the United States and Europe have resulted in a slower pace in global inflation reduction, pushing the tight monetary policies of developed countries to continue into 2023.

Indonesia's economic growth remains strong driven by increased domestic and export demand. Household consumption is predicted to strengthen in line with increased mobility across regions, retail sales and improving consumer confidence. Investment is also solid supported by the completion of the National Strategic Project (PSN) and increased inflows of Foreign Investment (PMA). The prospect of increasing domestic demand is also influenced by the continued impact of improving exports. Exports of goods and services are predicted to be higher than previously projected in line with the improvement in the global economic outlook. Developments up to February 2023 show that Indonesia's non-oil and gas exports are growing rapidly, resulting from increased exports of coal, metal ore and CPO to China. In addition, visits by domestic and foreign tourists are also expected to increase. Spatially, the better export prospects support the higher economic prospects in the Kalimantan, Sumatra and Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) regions. Based on business field, prospects for the manufacturing, wholesale and retail trade, as well as transportation and warehousing sectors are predicted to grow strongly. Thanks to these developments, economic growth in 2023 is predicted to be in the range of 4.5% -5.3%.

For non-container cargo, the domestic goods market still has enormous potential as currently Pelindo only has a small share of the national market. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) will

nasional. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dapat melakukan kerja sama dalam beberapa skema dengan pelabuhan nonpetikemas yang terdiri dari pelabuhan Terminal Khusus (Tersus)/Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan pelabuhan milik Kementerian/Lembaga (K/L) Pemerintah.

cooperate in several schemes with non-container ports including Special Terminal (Tersus)/Terminal for Own Interest (TUKS) ports and ports owned by Government Ministries/Institutions (K/L).

Dalam menghadapi tahun 2023, Perseroan melakukan analisis secara internal untuk mengidentifikasi peluang-peluang usaha yang dapat dicapai dengan berbekal keunggulan yang dimiliki. Pelindo memiliki beberapa kekuatan internal yang dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan bisnis pelabuhan di Indonesia, seperti portofolio yang terdiversifikasi, menguasai pasar petikemas di Indonesia, dan memiliki lokasi yang strategis untuk dijadikan *transshipment hub*. Namun, untuk dapat melakukan perencanaan strategi dan mencapai sasaran PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tahun 2021-2025, Perseroan tidak cukup mengandalkan kekuatan internalnya saja tetapi juga mengkalkulasi faktor eksternal yang menjadi ancaman sekaligus peluang yang dapat dioptimalkan guna keberlangsungan Perseroan, sehingga perlu dilakukan Analisis Lingkungan Bisnis Perseroan dengan menggunakan *framework Strengths Weaknesses Opportunities Threats* (SWOT). Analisis SWOT adalah bagian integral setiap proses perencanaan strategis dalam menangkap potensi dan memetakan hambatan yang ada. Analisis mencakup lingkungan internal Perseroan yang akan menghasilkan *strengths* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan), sedangkan analisis eksternal akan menghasilkan *opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman).

To face 2023, the Company conducted an internal analysis to identify business opportunities that can be achieved with the advantages it has. Pelindo has several internal strengths that can be used as a basis for developing the port business in Indonesia, such as a diversified portfolio, controlling the container market in Indonesia, and having a strategic location to become a transshipment hub. However, to carry out strategic planning and achieve the targets of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for 2021-2025, it is not sufficient for the Company to rely only on its internal strengths but also to external factors that are threats as well as opportunities that can be optimized for the sustainability of the Company, so it is necessary to carry out an Environmental Analysis The Company's business uses the Strengths Weaknesses Opportunities Threats (SWOT) framework. SWOT analysis is an integral part of every strategic planning process in capturing potential and mapping existing obstacles. An internal analysis will produce the Company's strengths and weaknesses, while an external analysis will produce the opportunities and threats.

Dengan melakukan analisis tersebut, Perseroan menilai bahwa kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) yang dimiliki oleh Perseroan melebihi kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) yang ada. Dengan dilakukannya penggabungan Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke dalam Pelindo II, Perseroan optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dengan kata lain, Perseroan memiliki prospek usaha yang baik yang juga didukung oleh kekuatan-kekuatan yang dimiliki Perseroan.

After conducting this analysis, the Company assessed that the Company's strengths and opportunities possessed outweighed the existing weaknesses and threats. With the merger of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV into Pelindo II, the Company is optimistic that it can continuously improve its performance in the short-term and in the-long term. In other words, the Company has good business prospects that are supported by the strengths of the Company.

Dengan penuh kewaspadaan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada tahun 2023, aksi korporasi dan langkah strategis Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Aksi Korporasi

a. Kajian Implementasi Aksi Korporasi Pemurnian Fokus Bisnis Pelindo *Group*.
b. Pemberian pinjaman pemegang saham kepada *subholding*/entitas anak untuk mendukung kelancaran operasional dan/atau kebutuhan investasi *subholding*/entitas anak dengan total nilai maksimal sebesar Rp1 triliun.
c. Optimalisasi kas dan pendanaan Pelindo *Group* untuk *prepayment/refinancing/buyback* atas seluruh hutang/sebagian hutang di level Pelindo dan/atau di level *subholding*/anak/cucu Pelindo (dengan skema pemberian pinjaman pemegang saham) dan juga untuk kebutuhan investasi modal kerja Pelindo *Holding* yang bersumber

With full awareness of the opportunities that could occur in 2023, the Company's corporate actions and strategic steps in 2023 are as follows:

1. Corporate Actions

a. Studying the Corporate Actions to Refine Pelindo Group's Business Focus.
b. Providing shareholder loans to subholdings/subsidiaries to support the smooth operation and/or investment needs of subholdings/subsidiaries with a maximum total value of Rp1 trillion.
c. Optimizing the of Pelindo Group cash and funding for prepayment/refinancing/buyback of all debts/part of debt at the Pelindo level, and/or at the Pelindo subholding/subsidiary/ sub-subsidiary level (with a shareholder lending scheme), and also for the working capital investment needs of Pelindo Holding to be sourced from internal cash and/or commercial loans/bonds/sukuk with a maximum

dari *internal cash* dan/atau pinjaman komersial/obligasi/sukuk dengan total nilai maksimal sebesar eq. USD1 miliar.
d. Penyesuaian perjanjian konsesi dan izin lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pasca *merger*, serta novasi izin operasi terminal PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
e. Pengurusan balik nama Hak Atas Tanah dan Bangunan pasca *merger*, serta pengurusan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

2. Langkah Strategis
a. Fokus pada penyelarasan bisnis pasca integrasi melalui standardisasi dan integrasi operasional dan komersial untuk peningkatan kualitas pelayanan.
b. Melakukan investasi terintegrasi untuk pengembangan bisnis.
c. Reorganisasi Perseroan dan pengembangan budaya terintegrasi.
d. Pengembangan bisnis melalui *Strategic Partnership* (i.e. INA).
e. Kolaborasi dengan pelayaran domestik dan global untuk peningkatan konektivitas laut.
f. Pengembangan konektivitas dan ekosistem logistik melalui kerja sama dengan pelaku industri logistik darat.
g. Persiapan rencana ekspansi regional dan internasional PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* (GCG) dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja Perseroan. Dalam menjalankan bisnisnya, Pelindo senantiasa menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas usahanya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran terimplementasi di lingkungan bisnis Perseroan. Kelima asas tersebut diimplementasikan melalui komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan, pemenuhan kepentingan pemegang saham, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta pengungkapan informasi dan transparansi.

Pelindo menyadari arti pentingnya implementasi prinsip-prinsip GCG sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Pengelolaan Pelindo selain harus mengikut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, juga harus menjunjung tinggi norma-norma perilaku dan nilai etik berbisnis untuk meningkatkan reputasi dan citra Perseroan. Untuk itu, Perseroan telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan pedoman perilaku/kode etik bisnis (*code of conduct*). Kode Etik ini diharapkan menjadi aspirasi bagi Insan Pelindo untuk mencapai visi dan misi Pelindo. Kode Etik Bisnis ini berlaku bagi seluruh Insan Pelindo yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan.

Sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam penerapan GCG, Perseroan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Jumlah wajib lapor di lingkungan Pelindo sebanyak 366 orang. Pada

total value of USD1 billion.
d. Adjusting PT Pelabuhan Indonesia (Persero) concession agreements and environmental permits after the merger, as well as replacing PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terminal operating permits.
e. Arranging post-merger land and building title transfers, as well as arranging Free Certificate (SKB) facilities resulting from the transfer of land and/or building rights.

2. Strategic Steps
a. Focusing on post-integration business alignment through operational and commercial standardization and integration to improve service quality.
b. Developing integrated investments for business development.
c. Reorganizing the Company and developing an integrated culture.
d. Developing the business through Strategic Partnership (i.e. INA).
e. Collaborating with domestic and global shipping to increase sea connectivity.
f. Developing logistics connectivity and ecosystem through collaboration with ground logistics industry companies.
g. Preparing PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional and international expansion plans.

APPLICATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The application of the good corporate governance (GCG) principles contributes to the Company's performance improvement. In running its business, Pelindo always applies GCG principles in all of its business activities, including transparency, accountability, responsibility, independence and fairness when running the Company's business. These five principles are followed through a commitment to implementing good corporate governance in a sustainable manner, fulfilling the interests of shareholders, the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as disclosure of information and transparency.

Pelindo understands the importance of applying GCG principles as a way to increase shareholder and stakeholder trust. As well as having to comply with applicable laws and regulations, Pelindo's management must also uphold the norms of behavior and ethical values in doing business to enhance the Company's reputation and image. For this reason, the Company has developed Guidelines for Good Corporate Governance and a code of conduct/business ethics. It is hoped that this Code of Ethics will inspire Pelindo personnel to achieve Pelindo's vision and mission. This Code of Business Ethics applies to all Pelindo personnel, from the Board of Commissioners, Board of Directors to all employees.

As a form of the Company's commitment to GCG, the Company coordinates the management and administration of the State Officials Wealth Report (LHKPN). The number of mandatory reports within Pelindo is 366 people. In 2022, there were 356

tahun 2022 wajib lapor yang telah melaporkan LHKPN sebanyak 356 orang dan sebanyak 10 orang belum melaporkan dan telah mendapatkan tindakan dari Manajemen.

people who have reported LHKPN and as many as 10 people have not reported and received action from the Management.

Perseroan juga melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pelindo menyadari bahwa dalam menjalin hubungan kerja dengan pihak ketiga, seringkali bersinggungan dengan praktik gratifikasi, sehingga dibutuhkan sebuah pedoman untuk mengendalikan praktik tersebut. Hal ini dilakukan agar seluruh Insan Pelindo memiliki pemahaman yang sama tentang perlakuan terhadap gratifikasi serta membantu Insan Pelindo untuk tidak terjerat dalam praktik gratifikasi yang termasuk tindak pidana suap. Dalam kondisi tertentu, saat insan Pelindo tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Pihak Ketiga dengan pemberian tersebut di luar ketentuan atau pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada/melalui orang lain tanpa sepengetahuan Insan Pelindo, maka yang bersangkutan wajib melaporkan baik secara langsung kepada KPK atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sesuai mekanisme yang telah diatur.

The Company has also established a gratification control program in accordance with applicable regulations. Pelindo understands that when establishing working relationships with third parties, it can lead to gratification practices, so guidelines are needed to control this practice. This was instigated so that all Pelindo personnel have the same understanding of the treatment of gratification, and helps Pelindo personnel not to become entangled in gratification practices such as bribery. Under certain conditions, when Pelindo personnel cannot avoid receiving gifts from third parties, and these gifts are outside the provisions, or the gifts have already been given to/through other people without the knowledge of Pelindo personnel, then the person concerned must report either directly to KPK or through the Gratification Control Unit (UPG) according to the regulated mechanism.

Selain itu, Perseroan telah memiliki kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perseroan yang bersangkutan (*whistleblowing system*). *Whistleblowing system* (WBS) atau yang disebut Pelindo Bersih diperkenalkan untuk memperkuat penerapan dalam rangka memberikan kesempatan kepada seluruh insan Pelindo dan *stakeholders* lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai–nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan serta dengan niat baik. Pelindo Bersih adalah sebuah program nyata dari manajemen Pelindo beserta seluruh cabang pelabuhan dan grup perusahaan untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi dan pemerasan.

In addition, the Company already has a policy for a reporting system for alleged irregularities in the Company (whistleblowing system). The Whistleblowing System (WBS) called "Pelindo Bersih" was introduced to strengthen and provide opportunities for all Pelindo personnel and other stakeholders to submit reports regarding indications of violations of applicable ethical values, based on accountable evidence and in good faith. Pelindo Bersih is a tangible program for Pelindo management and all port branches and company groups to create a workplace that is clean from fraud, corruption and extortion.

Terkait pemegang saham dan RUPS, Pelaksanaan RUPS telah melalui proses pengumuman dan pemanggilan RUPS yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan RUPS di Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan dilakukan Pelindo setiap tahun, yang meliputi RUPS Tahunan tentang Laporan Tahunan dan RUPS Tahunan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS RKAP). Sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Pada tahun 2022, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan secara tepat waktu yaitu pada tanggal 27 Januari 2022. Kemudian, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan tentang Pengesahan Laporan Tahunan tahun Buku 2020 secara tepat waktu yaitu pada tanggal 18 Mei 2022.

Related to the shareholders and the GMS, the holding of a GMS goes through a process of announcing and sending invitations for the GMS in accordance with applicable regulations. The Company GMS consists of an Annual GMS and Extraordinary GMS. The Annual GMS is held by Pelindo every year, and includes the Annual GMS on Annual Reports and the Annual GMS on the Company's Work Plan and Budget (RKAP GMS). While the Extraordinary GMS can be held at any time based on the need for the benefit of the Company. In 2022, the Company held the Annual GMS for the Company's Work Plan and Budget on January 27, 2022, and the Annual GMS for Ratification of the 2020 Fiscal Year Annual Report on May 18, 2022.

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya yaitu melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga melakukan tugas-tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris; serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan serta kebijaksanaan pemerintah, terutama di bidang-bidang yang berhubungan dengan tujuan dan lapangan usaha Perseroan.

Related to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners duties includes supervising the management of the Company by the Board of Directors. The Board of Commissioners also performs other tasks specifically assigned to the Board of Commissioners; as well as supervises the implementation of regulations and provisions as well as Government policies, especially in areas related to the objectives and business fields of the Company.

Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Komisaris Utama/Komisaris Independen melaksanakan tugas terkait koordinator Umum dan bidang remunerasi. Komisaris Independen melaksanakan tugas di bidang sosial, tanggung jawab sosial dan lingkungan, CSR dan kemasyarakatan serta bidang Audit. Komisaris melaksanakan tugas di bidang teknik, komersial, manajemen risiko, bidang transformasi dan pengembangan bisnis, bidang sumber daya manusia, hukum, pengadaan barang dan jasa, serta di bidang operasional dan sistem informasi.

The Board of Commissioners divides the duties and determines the factors needed to support the duties of the Board of Commissioners. The President Commissioner/Independent Commissioner carries out duties as a General coordinator and in the field of remuneration. Independent Commissioners carry out duties in the social, social and environmental responsibility, CSR and community sectors as well as the audit field. Other Commissioners carry out duties in the areas of engineering, commerce, risk management, business transformation and development, human resources, law, procurement of goods and services, as well as in operations and information systems.

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) Komite yaitu, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko. Komite Audit merupakan organ pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan IPC sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris bahwa Perusahaan telah melaksanakan proses nominasi dan remunerasi secara baik memadai. Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan maksud untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan penilaian atas kebijakan dan pelaksanaan Pemantau Manajemen Risiko. Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dibentuk dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris bahwa Perusahaan telah melaksanakan proses Risiko secara baik memadai.

To enhance the role of the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners has established 3 (three) Committees: the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and GCG and Risk Management Monitoring Committee. The Audit Committee is a supporting organ under the Board of Commissioners formed to assist the Board of Commissioners in supervising the management of IPC in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). The Nomination and Remuneration Committee was formed to provide input to the Board of Commissioners that the Company has carried out the nomination and remuneration process properly and adequately. The GCG and Risk Management Monitoring Committee was formed by the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) with the aim of assisting the Board of Commissioners in carrying out their obligation to carry out monitoring, supervision and evaluation of the policies and implementation of Risk Management Monitoring, and to provide input to the Board of Commissioners that the Company has carried out the Risk process properly and adequately.

Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris. Sekretariat Dewan Komisaris diangkat untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, khususnya di bidang kesekretariatan dan penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain, termasuk Direksi.

The Board of Commissioners has a Secretary to the Board of Commissioners who supports the secretarial duties of the Board of Commissioners. Their other duties include secretarial and liaison between the Board of Commissioners and other parties, including the Board of Directors.

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sewaktu-waktu, jika dianggap perlu oleh seorang atau lebih Dewan Komisaris; dan/atau Permintaan tertulis dari Direksi. Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 13 (tiga belas) kali. Selain itu, Dewan Komisaris juga telah melaksanakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali.

The Board of Commissioners organizes effective meetings and attends these meetings in accordance with statutory requirements. Board of Commissioners meetings can be held at any time, if deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners; and/or written request from the Board of Directors. During 2022, the Board of Commissioners has held 13 (thirteen) internal Board of Commissioners meetings, and also held 12 (twelve) Joint Meetings with the Board of Directors.

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab Direksi, tugas pokok Direksi adalah, memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan serta menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. Direksi telah menyelenggarakan Rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Related to the duties and responsibilities of the Board of Directors, the main duties of the Board of Directors are to lead and manage the Company in accordance with the Company's goals and to always strive to improve the efficiency and effectiveness of the Company, as well as to control, maintain and manage the Company's assets. The Board of Directors holds internal Board of Directors Meetings and attends joint meetings with the Board of

Direksi mengadakan rapat setiap kali apabila dianggap perlu oleh Direktur Utama atau atas usul dari sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Sepanjang tahun 2022, Direksi telah menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 21 (dua puluh satu) kali.

Commissioners in accordance with statutory requirements. The Board of Directors holds meetings whenever deemed necessary by the President Director, or at the suggestion of at least 1/3 (one third) of the Board of Directors' members, by stating the matters to be discussed. In 2022, the Board of Directors held 21 (twenty one) Board of Directors meetings.

Direksi telah menyelenggarakan fungsi Sekretariat perusahaan yang berkualitas dan efektif. Sekretariat Perusahaan merupakan organ tata kelola perusahaan yang memegang peran signifikan sebagai *Compliance Officer* yang membantu Direksi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG serta memenuhi ketentuan terhadap praktik GCG. *General Head President* Sekretariat Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bertugas mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui program komunikasi yang efektif kepada segenap *stakeholders*.

The Board of Directors has carried out a quality and effective corporate Secretariat function. The Corporate Secretariat is a corporate governance organ that plays a significant role as a Compliance Officer assisting the Board of Directors in applying GCG principles and complying with GCG practices. The General Head President Corporate Secretariat of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) reports directly to the President Director and is tasked with carrying out a mission to support the creation of a consistent and sustainable good corporate image through an effective communication program with all stakeholders.

Terkait pengungkapan informasi dan transparansi, Perseroan senantiasa menerapkan keterbukaan informasi yang dibutuhkan bagi para pemangku kepentingan. Informasi Perseroan dapat diakses melalui situs resmi maupun laporan-laporan yang diterbitkan secara berkala, baik Laporan Tahunan, Siaran Pers, maupun laporan dari media komunikasi lainnya. Situs resmi Pelindo di www.pelindo.co.id tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Perseroan juga senantiasa memutakhirkan Informasi yang disediakan dalam *website* Perseroan secara berkala.

For information disclosure and transparency, the Company implements the information disclosure required for stakeholders. Company information can be accessed through the official website as well as reports published regularly, including Annual Reports, Press Releases, and reports from other communication media. Pelindo's official website at www.pelindo.co.id is available in Indonesian and English. The Company also regularly updates the information on the Company's website.

Perseroan juga melaksanakan pengungkapan informasi penting melalui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara berdampingan. Laporan tahunan mencantumkan identitas Perseroan dengan jelas, yakni terdapat tahun Laporan Tahunan dan identitas Perseroan. Laporan Tahunan disajikan dalam *website* Perseroan dan dapat diunduh. Perseroan telah menyajikan informasi keuangan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku. Dalam Laporan Tahunan juga telah memuat antara lain, informasi saham; informasi obligasi; Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi; profil perusahaan secara lengkap; Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan; pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta Laporan Keuangan. Sepanjang tahun 2022, Perseroan juga telah memperoleh berbagai penghargaan di berbagai bidang. Informasi penghargaan yang telah diperoleh Perseroan disajikan dalam Bab Profil Perusahaan.

The Company also carries out important information disclosures through Annual Reports and Financial Reports. The annual report is presented in Indonesian and English. The annual report clearly states the identity of the Company, including the year of the Annual Report and the identity of the Company. The Annual Report is presented on the Company's website and can be downloaded. The Company presents financial information in comparative form for 5 (five) fiscal years. The Annual Report also includes: stock information; bond information; Board of Commissioners Report and Board of Directors Report; a complete Company profile; Management Discussion and Analysis of Company Performance; disclosure of Good Corporate Governance practices and Financial Reports. In 2022, the Company received awards in various fields. Information on the awards obtained by the Company can be found in the Company Profile Chapter.

Sepanjang tahun 2022, perkembangan penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, Perseroan telah melaksanakan kegiatan *assessment* GCG untuk tahun buku 2021. Dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, skor yang diperoleh sebesar 90,473 atau dengan predikat

Throughout 2022, for the development of the corporate governance implementation that has been carried out by the Company, the Company carried out a GCG assessment for the 2021 fiscal year using criteria in the Secretary of the Ministry of SOEs Decree No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of f Good Corporate Governance Implementation in SOEs, and obtained a score of 90.473 with the predicate "Very Good". The assessment results were followed to increase the effectiveness of

"Sangat Baik". Hasil asesmen ditindaklanjuti guna peningkatan efektivitas implementasi tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan. Perseroan telah menindaklanjuti hasil asesmen sebagai berikut:

1. Rancangan RJPP 2021-2025 telah disampaikan kepada Pemegang Saham.
2. Perseroan telah menetapkan anggaran pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris dengan penganggaran yang terpisah dari rencana pelatihan untuk karyawan di RKAP.
3. Perseroan telah menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris kepada Pemegang saham untuk mendapatkan pengesahan.
4. Perseroan telah memperbarui Piagam Komite Dewan Komisaris, SOP Komite Komisaris, Program Kerja Tahunan Komite dan rencana *self-assessment* kinerja, sesuai kondisi terkini pasca *merger*.
5. Perseroan telah menetapkan pedoman penyusunan RKAP.
6. Perseroan telah menetapkan pedoman tentang pola karir pegawai, *database* kompetensi pegawai yang terintegrasi dan ter-*update* pasca *merger*, serta melakukan sosialisasi atas pedoman tersebut kepada seluruh pegawai.
7. Perseroan telah menerbitkan Peraturan Direksi Tentang Pedoman Bina Pelanggan.
8. Perseroan telah melakukan publikasi terkait kebijakan pengadaan, baik melalui *email blast* ke penyedia yang terdaftar, maupun mengunduh peraturan Direksi pada *website* (*SECURE*), sehingga pemasok dapat mengakses secara mandiri informasi di dalamnya.
9. Perseroan telah membuat SOP Pengadaan Barang dan Jasa.
10. Perseroan telah melaksanakan survei kepuasan pelanggan oleh Regional 1, 2, 3 dan 4.
11. Perseroan telah menetapkan kebijakan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
12. Perseroan telah melaksanakan audit rutin pada Pelindo regional 1, Regional 4, Regional 3, dan Regional 2 yang mencakup pelaksanaan audit pada Kantor regional, cabang dan anak perusahaan secara *sampling* sesuai dengan PKPT Revisi.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh 2 (dua) Komite di bawah Direksi, yang terdiri dari Komite Pelindo Bersih dan Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi secara periodik dengan kriteria penilaian kinerja Komite di bawah Direksi berdasarkan rapat dan pelaksanaan tugas yang telah dijalankan selama tahun buku. Sepanjang tahun 2022, Direksi menilai bahwa Komite di bawah Direksi tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Komite Pelindo Bersih merupakan komite yang membantu Direksi dalam Melakukan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan WBS Perseroan serta menyelesaikan laporan WBS

the good corporate governance implementation in a sustainable manner. The Company followed up on the following assessment results:

1. The 2021-2025 RJPP draft was submitted to Shareholders.
2. The Company in the RKAP set a training budget for members of the Board of Commissioners separate to the budget for the training plan for employees.
3. The Company submitted the work plan and annual budget of the Board of Commissioners to the Shareholders for approval.
4. The Company updated the Committee Charter for the, SOP for the Board of Commissioners' Committees, the Committees' Annual Work Programs and performance self-assessment plans, according to the latest post-merger conditions.
5. The Company established guidelines for preparing the RKAP
6. The Company established guidelines regarding employee career patterns, integrated and updated the employee competency database post-merger, and disseminated these guidelines to all employees.
7. The Company issued a Board of Directors Regulation concerning Customer Development Guidelines.
8. The Company prepared publications related to procurement policies, through email blasts to registered providers, or by downloading the Board of Directors' regulations on the website (SECURE), so that suppliers can independently access the information contained therein.
9. The Company established SOP for Goods and Services Procurement.
10. The Company conducted customer satisfaction surveys in Regional 1, 2, 3 and 4.
11. The Company established a policy on corporate social and environmental responsibility.
12. The Company carried out routine audits at Pelindo regional 1, Regional 4, Regional 3 and Regional 2, which included audits at regional offices, branches and subsidiaries by sampling in accordance with the Revised PKPT.

ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

In carrying out its management duties, the Board of Directors is assisted by 2 (two) Committees under the Board of Directors, which consist of the Pelindo Bersih Committee and the Governance, Risk Management and Compliance Committee. The procedure for evaluating the performance of Committees under the Board of Directors is carried out by the Board of Directors periodically using criteria for evaluating the performance of Committees under the Board of Directors based on the meetings and implementation of duties carried out during the fiscal year. For 2022, the Board of Directors opinion is that the Committees under the Board of Directors have carried out their duties and responsibilities properly.

The Pelindo Bersih Committee is a committee that assists the Board of Directors in supervising the effectiveness of the Company's WBS and the completion of WBS reports submitted. In

yang telah masuk. Selama tahun 2022, Komite Pelindo Bersih telah melaksanakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali dan 4 (empat) laporan WBS yang masuk telah ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Direktur Utama.

2022, the Pelindo Bersih Committee held 9 (nine) meetings and 4 (four) incoming WBS reports were followed up and reported to the President Director.

Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan merupakan komite yang membantu Direksi dalam mendukung peningkatan kinerja dan transformasi bisnis yang memperhatikan aspek tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan terkait dengan pengelolaan investasi, kebijakan strategis operasional Perseroan dan pengendalian kegiatan strategis usaha grup Pelindo. Selama tahun 2022, Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan membahas rencana aksi korporasi restrukturisasi Entitas anak serta finalisasi usulan investasi.

The Governance, Risk Management and Compliance Committee is a committee that assists the Board of Directors in supporting performance improvement and business transformation that takes into account aspects of good corporate governance, risk management and compliance in the Company's decision-making process related to investment management, and the Company's strategic operational policies and control of strategic business activities in the Pelindo group. During 2022, the Governance, Risk Management and Compliance Committee held 2 (two) meetings to discuss corporate action plans for restructuring subsidiaries and finalizing investment proposals.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Selama tahun 2022, tidak terjadi perubahan komposisi Direksi, sehingga komposisi Direksi pada tahun 2022 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur sebagai berikut:

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERSHIP COMPOSITION

During 2022, there was no change in the Board of Directors composition, and the Board of Directors composition in 2022 totaled 7 (seven) people consisting of 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director and 5 (five) Directors as follows:

Arif Suhartono	:	Direktur Utama	President Director
Hambra	:	Wakil Direktur Utama	Vice President Director
Mega Satria	:	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Finance and Risk Management Director
Ihsanuddin Usman	:	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	Human Resources and General Affairs Director
Prasetyo	:	Direktur Strategi	Strategy Director
Boy Robyanto	:	Direktur Investasi	Investments Director
Putut Sri Muljanto	:	Direktur Pengelola	Managing Director

PENUTUP

Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan, komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepada seluruh insan Pelindo yang telah bekerja keras di tengah tantangan kondisi perekonomian. Atas dedikasi dari seluruh insan Pelindo, Direksi mengucapkan terima kasih sehingga Pelindo mampu memperoleh kinerja yang baik di tahun 2022.

Atas arahan yang telah diberikan oleh Dewan Komisaris yang sangat memberikan kontribusi dalam pencapaian kinerja Perseroan, Direksi memberikan mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Ke depannya, Direksi dan seluruh jajaran manajemen akan berkomitmen untuk merealisasikan visi dan tujuan penggabungan usaha Menjadi Pemimpin Ekosistem Maritim Terintegrasi dan Berkelas Dunia.

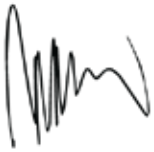
CLOSING

The Board of Directors would like to give its highest appreciation for the trust, commitment and cooperation given by all stakeholders, especially all Pelindo personnel who have worked hard during the challenging economic conditions. For the dedication of all Pelindo personnel, the Board of Directors would like to express its gratitude for helping Pelindo achieve a good performance in 2022.

For the directives given by the Board of Commissioners that have greatly contributed to the Company's performance achievement, the Board of Directors would like to express its gratitude and highest appreciation. Going forward, the Board of Directors and all levels of management will be committed to realizing the vision and goals following the business merger to Become a World Class Integrated Maritime Ecosystem Leader.

Jakarta, 30 Mei 2023
Jakarta, May 30, 2023

Atas Nama Direksi/On behalf of the Board of Directors



ARIF SUHARTONO
Direktur Utama
President Director

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners' Report



AGUS SUHARTONO
Komisaris Utama
President Commissioner

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,
Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Pelindo dapat mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2022. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi yang mampu memberikan kinerja yang baik di tengah kondisi perekonomian yang masih mengalami ketidakpastian.

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris akan menyampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sepanjang tahun 2022. Dalam laporan ini akan kami sampaikan antara lain penilaian kinerja Direksi, pandangan atas prospek usaha yang disusun Direksi, pandangan atas penerapan tata kelola perusahaan, serta susunan dan perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Berikut kami sampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap jalannya kepengurusan Perseroan untuk tahun buku 2022.

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS ATAS KINERJA DIREKSI

Sebelum menyampaikan pandangan Dewan Komisaris atas pencapaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris akan menyampaikan frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada Direksi serta pengawasan Dewan Komisaris terhadap perumusan dan implementasi strategi.

Dewan Komisaris memberikan nasihat kepada Direksi yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan utama. Kegiatan tersebut antara lain, rapat internal Dewan Komisaris untuk pengambilan keputusan kolegial, serta bila diperlukan Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi terkait untuk memberikan penjelasan atau tambahan data/informasi atas permasalahan atau usulan yang perlu mendapat rekomendasi persetujuan Dewan Komisaris. Selanjutnya, rekomendasi dan pendapat Dewan Komisaris disampaikan melalui surat kepada Direksi, di antaranya ditembuskan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara/Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN. Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali.

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan terhadap perumusan strategi dan implementasi strategi Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dewan Komisaris. Pengawasan terhadap perumusan strategi Perseroan dilaksanakan dengan melakukan telaah atas *roadmap* strategi jangka panjang 2021-2025 yang telah disusun oleh Direksi. Sedangkan pengawasan Dewan Komisaris terhadap implementasi strategi dilakukan dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis sebagai bentuk tugas pengawasan Dewan Komisaris.

With praise and gratitude we pray to the presence of God Almighty, for His blessings and grace upon all of us, which enabled Pelindo to overcome the challenges in 2022 and record a good performance even though the economy was still experiencing uncertainty.

On this occasion, the Board of Commissioners would like submit its supervisory and advisory report to the Board of Directors in 2022. In this report, we will present, a performance assessment of the Board of Directors, our view on business prospects prepared by the Board of Directors, and the implementation of corporate governance, as well as the composition and changes to the Board of Commissioners membership composition. We will also present the Board of Commissioners' supervisory and advisory report on the management of the Company for the 2022 fiscal year.

ASSESSMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS ON BOARD OF DIRECTORS› PERFORMANCE

Prior to reporting our view of the Board of Directors' performance achievements, the Board of Commissioners will report on the frequency and method of providing advice to the Board of Directors, as well as the supervision by the Board of Commissioners on the formulation and implementation of strategies.

The Board of Commissioners provides advice to the Board of Directors through several activities. These activities include internal meetings of the Board of Commissioners for collegial decision-making, and if necessary the Board of Commissioners holds internal Board of Commissioners meetings by inviting the relevant Directors to provide explanations or additional data/information on issues or proposals that require recommendation approval from the Board of Commissioners. The Board of Commissioners recommendations and opinions are submitted by letter to the Board of Directors, including a copy to the Minister of SOEs/Deputy for Construction Business and Transportation Facilities and Infrastructure of the Ministry of SOEs. During 2022, the Board of Commissioners held 12 (twelve) Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

During 2022, the Board of Commissioners carried out its supervisory duties on the formulation and implementation of the Company's strategies, and providing advice to the Board of Directors in accordance with the main duties and functions of the Board of Commissioners. Supervision on the formulation of the Company's strategies was carried out by reviewing the 2021-2025 long-term strategic roadmap prepared by the Board of Directors. Whilst supervision by the Board of Commissioners on strategy implementation was carried out by directing, monitoring and evaluating the implementation of strategic policies in line with the supervisory duties of the Board of Commissioners.

Dalam memberikan penilaian atas kinerja Direksi, Dewan Komisaris mempertimbangkan beberapa aspek sebagai dasar penilaiannya. Aspek tersebut antara lain, kondisi perekonomian, capaian kinerja yaitu kinerja operasional, kinerja keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan. Penilaian atas kinerja Direksi dapat disampaikan sebagai berikut.

When assessing the Board of Directors performance, the Board of Commissioners considers several aspects as the basis for their assessment. These aspects include economic conditions, performance achievements, operational performance, financial performance and the health of the Company. The Board of Directors performance assessment is submitted as follows.

Perekonomian global tumbuh sebesar 3,4% pada tahun 2022 setelah mencapai angka pertumbuhan sebesar 5,9% pada 2021. Tren perlambatan pertumbuhan yang masih berlanjut pada Triwulan IV tahun 2022 pada beberapa negara. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tumbuh 1,0% (yoy), Tiongkok tumbuh 2,9% (yoy), Jepang tumbuh 0,6% (yoy), Korea Selatan tumbuh 1,4% (yoy), serta Singapura tumbuh 2,2% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ekonomi global di antaranya disebabkan masih mewabahnya pandemi COVID-19 di Tiongkok meskipun pada tingkat ringan dan pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh sebagian besar negara termasuk di negara-negara maju. Kejadian-kejadian dan prediksi pada tahun 2023 yang akan mengakibatkan ketidakpastian ekonomi antara lain inflasi yang belum sepenuhnya terkontrol, kelanjutan efek invasi Rusia terhadap Ukraina, perkembangan COVID-19, serta kebijakan ekonomi luar negeri China. Inflasi global yang terjadi pada tahun 2022 adalah sebesar 8,7% dan diprediksi turun menjadi 7,0% pada tahun 2023 dan 4,9% di 2024.

The global economy grew by 3.4% in 2022 following the growth of 5.9% in 2021. The trend of slowing growth continued in the fourth quarter of 2022 in several countries. The United States' economic growth grew 1.0% (yoy), China grew 2.9% (yoy), Japan grew 0.6% (yoy), South Korea grew 1.4% (yoy), and Singapore grew 2.2 % (yoy). The slowdown in global economic growth was partly due to the ongoing outbreak of the COVID-19 pandemic in China even though it was at a mild level, and the tightening of monetary policy by most countries, including developed countries. Events and predictions in 2023 expected to cause economic uncertainty include inflation that has not been fully controlled, continuation of the effects of the Russian invasion of Ukraine, development of COVID-19, and China's foreign economic policy. Global inflation in 2022 was 8.7% and is predicted to decrease to 7.0% in 2023 and 4.9% in 2024.

Pada perekonomian nasional, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada tahun 2022 tercatat berhasil tumbuh sebesar 5,31% (yoy). Selaras dengan kinerja ekonomi yang baik pada tahun 2022, kinerja sektor perdagangan pada tahun 2022 juga mencatat rapor yang positif. Kinerja neraca perdagangan mencatatkan surplus sebesar USD54,53 miliar, yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Neraca perdagangan tersebut jauh di atas target tahun 2022 yang berkisar USD31,4 - USD31,7 miliar. Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa mencapai 16,28%, di atas target yang berkisar di angka 5,1%-5,5%. Pertumbuhan ekspor non-migas sebesar 25,8%, atau 21 kali di atas target 0,8% - 1,2%. Kinerja pada sektor perdagangan juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi pada sektor ekspor barang dan jasa terhadap PDB Indonesia yang mencapai 24,49% pada tahun 2022. Di sisi lain, meskipun berada di atas target tahun 2022 (2,1% – 4,1%), inflasi dalam negeri cukup berhasil dikendalikan sehingga relatif lebih rendah dari beberapa negara lainnya, yaitu sebesar 5,51%.

For the national economy, based on data from the Central Statistics Agency (BPS), the Indonesian economy in 2022 grew by 5.31% (yoy). In line with the good economic performance in 2022, the trade sector performance in 2022 also recorded a positive results. The trade balance performance recorded a surplus of USD54.53 billion, the highest record in history. This trade balance was above the 2022 target of around USD31.4 USD31.7 billion. Growth in real exports of goods and services reached 16.28%, above the target of around 5.1% -5.5%. Non-oil and gas export growth was 25.8%, or 21 times above the target of 0.8% - 1.2%. The trade sector performance also supported the national economic growth with the export of goods and services sector to Indonesia's GDP reaching 24.49% in 2022. On the other hand, despite being above the 2022 target (2.1% – 4.1%), domestic inflation was successfully being controlled so that it was relatively lower than several other countries, and stood at 5.51%.

Realisasi Investasi sepanjang tahun 2022 adalah sebesar Rp1.207 triliun. Realisasi tersebut mencapai 106% dari target 2022 sebesar Rp1.200 triliun dan naik 34% secara tahunan (yoy) sekaligus menjadi rekor tertinggi baru. Realisasi investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp654,4 triliun atau berkontribusi 54,2% terhadap jumlah total realisasi. Angka realisasi investasi PMA ini tumbuh 44,2% secara tahunan (yoy). Kemudian realisasi investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp552,8 triliun atau berkontribusi 23,6%. Angka realisasi investasi PMDN ini tumbuh 23,6% dari tahun sebelumnya (yoy). Berdasarkan wilayah, realisasi investasi di luar Jawa kembali lebih besar dibandingkan di pulau jawa seperti tahun 2021. Realisasi investasi di luar pulau jawa sebesar Rp636,3 triliun atau sebesar 52,7%, sedangkan realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp570,9 triliun atau sebesar 47,3%. Lebih rinci lagi berdasarkan wilayah, investasi paling dominan masuk ke Jawa Barat dengan nilai Rp174,6 triliun. Diikuti DKI Jakarta Rp143 triliun,

Investment realization in 2022 was Rp1,207 trillion, 106% of the 2022 target of Rp1,200 trillion and an increase of 34% on an annual basis (yoy), as well as being a new high record. Investment realization from Foreign Investment (PMA) reached Rp654.4 trillion or 54.2% of the total realization, and a growth of 44.2% on an annual basis (yoy). Investment realization from Domestic Investment (PMDN) reached Rp552.8 trillion, and contributed 23.6%. This PMDN investment realization grew 23.6% from the previous year (yoy). By region, investment realization outside Java was again greater than in Java, as in 2021. Investment realization outside Java was Rp636.3 trillion or 52.7%, while investment realization in Java was Rp570.9 trillion or 47.3%. By region, the most dominant investment was in West Java with Rp174.6 trillion. Followed by DKI Jakarta with Rp143 trillion, Central Sulawesi with Rp111.2 trillion, East Java with Rp110.3 trillion, and Riau with Rp82.5 trillion

Sulawesi Tengah Rp111,2 triliun, Jawa Timur Rp110,3 triliun, dan Riau Rp82,5 triliun.

Dari sisi industri pelabuhan, setelah adanya pandemi COVID-19 yang dimulai pada akhir tahun 2019, volume perdagangan global menurun pada tahun 2020. Hal ini berkaitan dengan menurunnya aktivitas ekonomi di seluruh dunia. Terdapat 2 skenario pemulihan terhadap volume perdagangan global di tahun 2021 yakni skenario *upside* atau *downside,* dan kedua skenario tersebut dipengaruhi oleh *key success factor* yakni keberhasilan program vaksinasi di seluruh dunia yang akan membantu bisnis untuk beroperasi kembali secara normal dan mendorong ekonomi kembali seperti semula. Skenario *upside* terjadi apabila produksi dan distribusi vaksin dipercepat sehingga volume perdagangan global diperkirakan akan mengalami *rebound* dan melewati volume pre-pandemi di 2021 serta akan bertumbuh dengan normal pada 2022 dan seterusnya. PDB secara global diperkirakan akan bertambah ±1% di 2021 dan volume perdagangan barang dunia akan tumbuh ±2,5%. Skenario *downside* terjadi apabila produksi vaksin tidak memenuhi permintaan dan terdapat potensi munculnya varian baru virus yang lebih resisten terhadap vaksin sehingga volume perdagangan global diperkirakan tidak akan mengalami *rebound* dan tidak melewati volume pre-pandemi di 2021 serta tidak bertumbuh dengan normal pada 2022 dan seterusnya. Hal ini berpotensi mengurangi 1% dari pertumbuhan PDB global di 2021 dan pertumbuhan volume perdagangan barang turun hampir 2%.

From the port industry side, following the COVID-19 pandemic, which started at the end of 2019, global trade volume decreased in 2020, due to the decline in economic activity around the world. There were 2 recovery scenarios for global trade volume in 2021, namely the upside or downside scenario and these two scenarios were influenced by a key success factor, namely the success of vaccination programs worldwide that helped businesses operate normally and encouraged the economy to rebound to normal. The upside scenario occurs if production and distribution of vaccines are accelerated so that global trade volume is expected to rebound and exceed the pre-pandemic volumes in 2021, and will grow normally in 2022 and beyond. Global GDP was expected to increase by ±1% in 2021 and the volume of world trade in goods to grow by ±2.5%. The downside scenario occurs if vaccine production does not meet demand and there is potential for the emergence of new variants of viruses that are more resistant to vaccines so that global trade volume is not expected to rebound and not exceed pre-pandemic volumes in 2021 and not grow normally in 2022 and so on. This has the potential to deduct 1% from global GDP growth in 2021 and growth in goods trade volumes to fall by almost 2%.

Di sisi lain, meningkatnya tingkat kontainerisasi komoditas didorong oleh perbaikan infrastruktur dan operasional pelabuhan. Saat ini, tingkat kontainerisasi komoditas di Indonesia hanya mencapai 14% dengan komoditas utama berupa produk manufaktur, sayuran, makanan siap saji, dan protein (hewan). Dengan pengembangan pelabuhan yang terus dilakukan, tingkat kontainerisasi diprediksi akan terus meningkat. Pertumbuhan kontainerisasi diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang tetap apabila pertumbuhan GDP berada pada prediksi *baseline* 5,2%. Namun, bila prediksi pertumbuhan GDP agresif 8,5%, maka akan terjadi peningkatan terhadap pertumbuhan kontainerisasi sebanyak 4%.

On the other hand, the increase in the level of commodity containerization was driven by improvements in port infrastructure and operations. Currently, the commodity containerization in Indonesia has only reached 14% with the main commodities being manufactured products, vegetables, ready-to-eat food, and (animal) protein. With the continuous port development, it is predicted that the level of containerization will continue to increase. Containerization growth is predicted to see steady growth if GDP growth is at the baseline prediction of 5.2%. However, if the prediction of aggressive GDP growth is 8.5%, there will be an increase in containment growth of 4%.

Volume arus kontainer dunia diperkirakan tumbuh sebesar 2,8% pada tahun 2023, turun dari proyeksi pertumbuhan tahun 2022 yang sebesar 4,1% (*Drewry' Forecart* - Agustus, 2022). Hal sejalan dengan prediksi ancaman resesi dan stagflasi global pada tahun 2023 yang diakibatkan inflasi dan masih belum stabilnya kondisi geopolitik global. Berdasarkan data yang bersumber dari DHL Tahun 2022 menunjukkan bahwa perdagangan (*container trade*) Intra-Asia dan yang melewati Asia (*Asia related throughput*) adalah sebesar 87,5% dari total perdagangan global. Dari proporsi tersebut, sebesar 41,5 juta Ton atau sekitar 30% merupakan perdagangan dengan jalur yang melewati Asia.

The volume of global container traffic is expected to grow by 2.8% in 2023, down from the 2022 projected growth of 4.1% (Drewry' Forecart - August, 2022). This was in line with predictions of the threat of global recession and stagflation in 2023 due to inflation and the still unstable global geopolitical conditions. Based on data sourced from DHL, 2022 shows that intra-Asian trade (container trade) and Asia related throughput was 87.5% of total global trade. Of this, 41.5 million tons or around 30% is trade through Asia.

Di tengah kondisi perekonomian dan industri pelabuhan tersebut, Direksi mampu menghadapi tantangan dan peluang yang terjadi dengan mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2022. Dari sisi operasi kepelabuhan, arus kapal dalam satuan unit tahun 2022 mencapai 290.970 unit, meningkat 14,25% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 254.669 unit. Demikian pula dengan realisasi arus kapal dalam satuan GT tahun 2022 mencapai 1.201.814.534 GT, meningkat 1,31% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai

During these economic and port industry conditions, the Board of Directors was able to face the challenges and opportunities that occurred by recording a good performance in 2022. From the port operations side, vessel traffic in units in 2022 reached 290,970, an increase of 14.25% compared to 254,669 in 2021. Likewise, the realization of vessel traffic in GT in 2022 reached 1,201,814,534 GT, an increase of 1.31% compared to 1,186,217,247 in 2021. Container traffic in boxes in 2022 reached 13,292,102

1.186.217.247 GT. Arus petikemas dalam satuan *box* tahun 2022 mencapai 13.292.102 *box*, meningkat 0,44% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 13.234.256 *box*. Demikian pula dengan arus petikemas dalam satuan *teus* yang meningkat sebesar 0,96%, dari 17.056.636 *teus* di tahun 2021 menjadi 17.220.312 *teus* di tahun 2022. Arus barang nonpetikemas dalam satuan ton tahun 2022 mencapai 159.727.836 ton, meningkat 9,25% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 146.200.809 ton. Dari sisi arus penumpang, pada tahun 2022 mencapai 15.028.884 orang, meningkat 86,53% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8.056.905 orang.

boxes, an increase of 0.44% compared to 13,234,256 in 2021. Likewise, the container traffic in units of TEUs increased by 0.96%, from 17,056,636 TEUs in 2021 to 17,220,312 TEUs in 2022. The non-container goods in tons in 2022 reached 159.727,836 tons, an increase of 9.25% compared to 146,200,809 in 2021. In terms of passenger traffic, in 2022 it reached 15,028,884 people, an increase of 86.53% compared to 8,056,905 the previous year.

Selain kinerja operasional, Perseroan juga telah mencatatkan kinerja keuangan yang baik. Pendapatan operasi tahun 2022 mencapai Rp29,70 triliun, meningkat 3,07% atau Rp885,80 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp28,81 triliun. Seiring dengan peningkatan pendapatan bunga tersebut, laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* juga mengalami peningkatan. Laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* tahun 2022 sebesar Rp3,91 triliun, meningkat 23,06% atau sebesar Rp732,32 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp3,18 triliun. Selain itu, ekuitas dan aset Perseroan pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan. Ekuitas tahun 2022 mencapai Rp42,80 triliun, meningkat 1,79% atau Rp751,58 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp42,05 triliun. Kemudian, aset tahun 2022 mencapai Rp118,35 triliun, meningkat 1,83% atau Rp2,12 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp116,23 triliun.

In addition to operational performance, the Company also recorded good financial performance. Operating revenue in 2022 reached Rp29.70 trillion, an increase of 3.07% or Rp885.80 billion compared to Rp28.81 trillion in 2021. Following the increase in interest revenue, profit for the year after the effect of adjusting the merging entity income also increased. Profit for the year after the effect of adjusting the merging entity income in 2022 amounted to Rp3.91 trillion, an increase of 23.06% or Rp732.32 billion compared to Rp3.18 trillion in 2021. In addition, the Company's equity and assets in 2022 also increased. Equity in 2022 reached Rp42.80 trillion, an increase of 1.79% or Rp751.58 billion compared to Rp42.05 trillion in 2021. Assets in 2022 reached Rp118.35 trillion, an increase of 1.83% or Rp2.12 trillion compared to Rp116.23 trillion in 2021.

Selain kinerja operasional dan keuangan, tingkat kesehatan Perseroan juga menjadi salah satu pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian atas kinerja Direksi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara terdapat tiga aspek penilaian yaitu aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi. Untuk indikator aspek keuangan dan aspek administrasi indikatornya sudah ditentukan di dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, sedangkan untuk aspek operasional disesuaikan dengan bisnis Perseroan. Hasil skor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk realisasi tahun 2022 sebesar 87,50 yang berada dalam kategori SEHAT dengan nilai AA.

In addition to operational and financial performance, the Company's health level is also one of the considerations for the Board of Commissioners when evaluating the Board of Directors performance. Based on the Minister of SOEs Decree No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning the assessment of the health level of SOEs, there are three aspects in the assessment, namely financial aspect, operational aspect and administrative aspect. For the financial aspects and administrative aspects, the indicators have been determined in the Minister of SOEs Decree No. KEP-100/MBU/2002, while the operational aspect is adjusted to the Company's business. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s score for the realization in 2022 was 87.50, in the HEALTHY category with an AA value.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

Pertumbuhan ekonomi global diprediksikan akan melanjutkan tren positif yang akan diikuti oleh pertumbuhan arus barang secara internasional. Kondisi pandemi telah menciptakan tren kebiasaan baru dimana salah satunya adalah terkait belanja daring (*online shopping*). Pertumbuhan bisnis *e-commerce* pun meningkat pesat sebagai jawaban akan kebutuhan belanja daring ini. Hampir sebagian besar barang-barang *e-commerce* diangkut dalam kemasan petikemas yang turut memberikan efek positif pada pertumbuhan arus petikemas global. Potensi pertumbuhan arus petikemas global ini dapat dioptimalkan dengan pengembangan international *transshipment* memanfaatkan lokasi wilayah pelabuhan Pelindo yang berada di jalur pelayaran dunia.

VIEW ON THE BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

Global economic growth is predicted to continue its positive trend, which will help grow the international goods traffic. The pandemic conditions created new habit trends, one of which was related to online shopping. The growth in e-commerce business increased rapidly in response to this online shopping need. Most of the e-commerce goods are transported in containers, which also had a positive effect on the growth of global container traffic. The growth potential for global container traffic can be optimized by developing international transshipment utilizing the location of the Pelindo port area on world shipping routes. Indonesia's economic growth remains strong driven by increased domestic and export demand. Household consumption is

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan ekspor. Konsumsi rumah tangga diprakirakan makin kuat sejalan dengan peningkatan mobilitas di seluruh wilayah, penjualan eceran, dan membaiknya keyakinan konsumen. Investasi juga solid ditopang penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan peningkatan aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA).

predicted to strengthen in line with increased mobility across regions, retail sales and improving consumer confidence. Investment is also solid supported by the completion of the National Strategic Project (PSN) and the increased inflow of Foreign Investment (PMA).

Untuk kargo nonpetikemas, pasar arus barang domestik masih memiliki potensi yang sangat besar dikarenakan pada saat ini Pelindo hanya memiliki pangsa pasar sebagian kecil dari pasar nasional. Pelindo dapat melakukan kerja sama dalam beberapa skema dengan pelabuhan nonpetikemas yang terdiri dari pelabuhan Terminal Khusus (Tersus)/Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan pelabuhan milik Kementerian/Lembaga (K/L) Pemerintah.

For non-container cargo, the domestic goods market still has enormous potential as currently Pelindo only has a small market share of the national market. Pelindo will cooperate in several schemes with non-container ports including Special Terminal (Tersus)/Terminal for Own Interest (TUKS) ports and ports owned by Government Ministries/Institutions (K/L).

Berdasarkan prediksi kondisi perekonomian dan industri pelabuhan serta kekuatan internal Perseroan, Dewan Komisaris berpendapat bahwa prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi sudah tepat. Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Perseroan akan dapat memanfaatkan peluang yang ada di antaranya adalah Visi/Program Pemerintah terkait pengembangan infrastruktur maritim dan intensifikasi program pemerintah di bidang maritim berpotensi mendukung rencana integrasi Pelindo. Potensi Pengembangan Layanan dan Rantai Nilai Kepelabuhan dapat mengembangkan penawaran jasa pelabuhan yang lebih terintegrasi dengan hadirnya layanan di segmen logistik, *hinterland development, marine*, serta *port services* pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Perseroan juga melakukan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi jasa layanan kepelabuhan. Selain itu, Perseroan juga melakukan peningkatan kerja sama usaha dengan mitra strategis dan strategi aliansi. Hal tersebut merupakan peluang bagi Pelindo di dukung oleh peningkatan sinergi dengan BUMN lain di segmen transportasi pelayaran dan logistik.

Based on the economic conditions and the port industry predictions as well as the Company's internal strength, the Board of Commissioners is of the opinion that the business prospects prepared by the Board of Directors are appropriate. The Board of Commissioners believes that the Company will take advantage of existing opportunities including the Government's Vision/ Program related to developing the maritime infrastructure and intensifying of Government programs in the maritime sector, which both have the potential to support Pelindo's integration plan. The potential for developing port services and value chains can develop a more integrated port service offering with services in the logistics, hinterland development, marine and port services segments at PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The Company is also utilizing technology and digitization to increase the effectiveness and efficiency of its port services. The Company has also increased its business cooperation with strategic partners and strategic alliances. This is seen as an opportunity for Pelindo, as is supported by increased synergies with other SOEs in the shipping and logistics transportation segments.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Pelindo senantiasa menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada setiap aspek bisnisnya dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelindo juga berkomitmen untuk terus menyempurnakan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) setiap tahun secara berkesinambungan. Pelindo meyakini bahwa unsur keterbukaan di lingkungan kerja dan proses kerja yang sesuai dengan tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan akan membantu Perseroan bergerak maju. Oleh karena itu, implementasi GCG menjadi perhatian utama bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

VIEW ON CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

In carrying out its business activities, Pelindo always applies the principles of Good Corporate Governance in every aspect of its business by referring to the applicable laws and regulations. Pelindo is also committed to continuing to improve the Good Corporate Governance (GCG) implementation every year. Pelindo believes that the element of openness in the work environment and work processes are in accordance with the goals and mechanisms, and have been set to help the Company move forward. Therefore, GCG implementation is a major concern for the Board of Commissioners when carrying out its supervisory and advisory functions to the Board of Directors.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah menerapkan GCG dengan efektif dan konsisten di 2022. Dalam menilai penerapan GCG di Pelindo, Dewan Komisaris memberikan penilaian terhadap sistem manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system*.

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors has implemented GCG effectively and consistently in 2022. When assessing the GCG implementation at Pelindo, the Board of Commissioners provided an assessment of the risk management system, internal control system and whistleblowing system.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko melibatkan penerapan sistematis dari kebijakan, prosedur dan praktik pada aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, serta penilaian, perlakuan, pemantauan, peninjauan, pencatatan dan pelaporan risiko. Komunikasi dan konsultasi membatu *risk owner* dalam memahami risiko, sebagai dasar dalam membuat keputusan dan alasan dilakukannya suatu aksi yang dipelukan. Komunikasi akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman risiko, sementara konsultasi mencakup umpan balik (*feedback*) dan informasi yang diperoleh untuk mendukung dalam pengambilan keputusan. Koordinasi harus memfasilitasi secara faktual, tepat waktu, relevan, akurat dan dapat dimengerti. Pertukaran informasi harus memperhatikan kerahasiaan dan integritas informasi, termasuk hak cipta individu. Tujuan penetapan ruang lingkup, konteks dan kriteria adalah untuk menyesuaikan proses manajemen risiko, mengaktifkan penilaian risiko yang efektif dan perlakuan risiko yang memadai. Ruang lingkup, konteks dan kriteria mencakup penentuan ruang lingkup proses dan pemahaman konteks eksternal dan internal.

Mekanisme pelaksanaan evaluasi Manajemen Risiko dilakukan secara berjenjang, mulai dari Cabang Pelabuhan ke Fungsi Manajemen Risiko Regional kemudian diteruskan ke Group Manajemen Risiko Kantor Pusat, sedangkan untuk anak perusahaan ke Divisi Manajemen Risiko *Subholding* kemudian dilaporkan ke Group Manajemen Risiko Kantor Pusat dan untuk anak perusahan di luar cluster bisnis, dilakukan evaluasi secara langsung oleh Group Manajemen Risiko Kantor Pusat. Evaluasi telah dilakukan dengan melihat data pada pengisian profil risiko pada kertas kerja *Risk Control Self Assessment* (RCSA) dengan pendekatan efektivitas tindakan mitigasi yang telah dilaksanakan oleh pemilik risiko (*Risk Owner*), kemudian divalidasi dan diverifikasi kembali dengan menunjukkan data-data kinerja operasional, keuangan, investasi dan data pendukung lainnya serta menggunakan data kejadian yang merugikan (*loss event).*

Hasil evaluasi disampaikan melalui Nota Dinas kepada Unit Kerja terkait ataupun dilakukan pembahasan secara langsung bersama dengan *risk owner* dengan mekanisme memberikan masukan, saran, dan *feed back* terkait pengisian RCSA. Rencana mitigasi yang sudah ada akan dilakukan *monitoring* dengan periode bulanan dan pelaporan dilakukan per triwulanan. Selanjutnya, laporan *monitoring* profil risiko triwulanan akan disusun dan disampaikan kepada *Group* Anggaran dan Pelaporan untuk dimuat dalam laporan manajemen triwulanan korporat.

Dewan Komisaris Perusahaan memiliki organ pendukung yakni Komite *Good Corporate Governance* dan Pemantau Manajemen Risiko yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Group Manajemen Risiko Kantor Pusat secara periodik selalu melakukan pertemuan dengan Komite GCG dan PMR dalam rangka melakukan koordinasi terkait rencana dan *monitoring* proses implementasi Manajemen Risiko Perusahaan. Hasil koordinasi dituangkan dalam bentuk notulen rapat untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh Group Manajemen Risiko. Koordinasi yang secara rutin telah dilakukan dengan Komite GCG dan PMR di tahun 2022 adalah Koordinasi Bulanan dan Koordinasi Triwulanan. Adapun topik yang dibahas dalam koordinasi tersebut di antaranya meliputi Usulan Profil Risiko RKAP,

RISK MANAGEMENT SYSTEM

The risk management process involves the systematic application of policies, procedures and practices for communication and consulting activities, setting the context, and assessing, treating, monitoring, reviewing, recording and reporting risks. Communication and consultation helps the risk owners understand the risk, as a forms the basis for making decisions and the reasons for carrying out any actions needed. Communication will increase risk awareness and understanding, while consultation includes feedback and information obtained to support decision-making. Coordination must facilitate in a factual, timely, relevant, accurate and understandable manner. The exchange of information must pay attention to the confidentiality and integrity of information, including individual copyrights The purpose of establishing scope, context and criteria is to adapt the risk management process, enable effective risk assessment and adequate risk assessment. The scope, context and criteria includes determining the scope of the process and understanding the external and internal context.

The mechanism for carrying out the Risk Management evaluation is in stages, starting from the Port Branches to the Regional Risk Management Function, and then forwarded to the Head Office Risk Management Group, while for subsidiaries to the Subholding Risk Management Division, then reported to the Head Office Risk Management Group. and for subsidiary companies outside the business cluster, evaluations are carried out directly by the Head Office Risk Management Group. Evaluations have been carried out by looking at the data in the risk profile in the Risk Control Self Assessment (RCSA) work paper, with the approach that the effectiveness of mitigation measures have been implemented by the risk owners, then validated and re-verified by providing data on operational, financial performance, investments, and other supporting data, as well as loss event data.

The evaluation results are submitted via official papers to the relevant work units, or discussed directly with the risk owners to provide input, suggestions and feedback regarding filling out the RCSA. The existing mitigation plan is monitored on a monthly basis and reported upon quarterly. In addition, a quarterly risk profile monitoring report is prepared and submitted to the Budget and Reporting Group to be included in the quarterly corporate management report.

The Company's Board of Commissioners has supporting organs, including the Good Corporate Governance and Risk Management Monitoring Committee that is tasked with monitoring and evaluating the implementation of Risk Management work unit duties in order to provide recommendations to the Board of Commissioners. The Head Office Risk Management Group regularly conducts meetings with the GCG and RMM Committee to coordinate plans and monitor the Company's Risk Management implementation process. The results of the coordination are contained in the meeting minutes to be followed up by the Risk Management Group. Coordination routinely carried out with the GCG and RMM Committees in 2022 is through Monthly Coordination and Quarterly Coordination. The topics discussed include the Proposed RKAP Risk Profile, Quarterly Risk

Hasil *Monitoring* Profil Risiko Triwulanan dan hal-hal lainnya yang menjadi perhatian Direksi dan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi berpandangan bahwa kecukupan sistem manajemen risiko telah berjalan memadai.

Profile Monitoring Results and other matters of concern to the Board of Directors and Board of Commissioners. The Board of Commissioners and Board of Directors are of the opinion that the risk management system is adequate.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal merupakan aspek yang sangat penting dalam penerapan GCG, karena dapat mendorong Perseroan menjadi lebih transparan, akuntabel, *responsible*, mandiri, adil, dan terpercaya. Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan andal mampu memberikan keyakinan bagi para *stakeholder* bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dikelola dengan baik dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif di Perseroan menjadi tanggung jawab dari Manajemen Perseroan. Guna mendukung pengembangan Sistem Pengendalian Internal di Perseroan.

Sistem Pengendalian Internal Perseroan telah mengacu ke *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission* (COSO) sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur efektivitas pengendalian internal terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*);
4. Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*);
5. Pemantauan dan Evaluasi (*Monitoring*).

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) secara rutin mengevaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai reliabilitas Sistem Pengendalian Internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) serta konsistensi implementasinya. Evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pada tahun 2021 telah dilakukan secara *self assessment* dengan hasil bahwa seluruh Sistem Pengendalian Internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terbukti dapat berjalan cukup efektif. Hal tersebut menunjukan bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah mematuhi elemen-elemen pengendalian internal yang telah disusun.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan sistem pengendalian intern sudah berjalan dengan baik. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas kinerja yang telah dicapai oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada tahun 2022. Kecukupan pengendalian internal tercermin dalam laporan hasil audit yang telah disampaikan oleh SPI kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Internal Control System is a very important aspect in GCG implementation, as it encourages the Company to be more transparent, accountable, responsible, independent, fair and trustworthy. An effective and reliable Internal Control System can provide confidence to stakeholders that all resources are managed properly in order to achieve the Company's goals. The implementation of a reliable and effective Internal Control System in the Company is the responsibility of the Company's Management, to support the development of the Internal Control System in the Company.

The Company's Internal Control System refers to the Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO) as a comprehensive framework for measuring the effectiveness of internal control, which consists of 5 (five) components, namely:

1. Control Environment;
2. Risk Assessment;
3. Control Activities;
4. Information and Communication;
5. Monitoring and Evaluation.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) routinely evaluates the effectiveness of the Internal Control System, with the aim of assessing the reliability of the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Internal Control System and the consistency of its implementation. The evaluation of the internal control system implementation in 2021 was carried out through a self-assessment, and the result showed that the entire PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Internal Control System was effective. This shows that PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has complied with the internal control elements prepared.

The Board of Commissioners is of the view that the internal control system implementation is functioning properly. The Board of Commissioners would like to express its appreciation for the performance achieved by the Internal Audit Unit (IAU) in 2022. The adequacy of internal control is reflected in the IAU audit report to the Board of Directors and Board of Commissioners.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing system (WBS) atau yang disebut Pelindo Bersih diperkenalkan untuk memperkuat penerapan dalam rangka memberikan kesempatan kepada seluruh insan Pelindo dan *stakeholders* lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai–nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik. Pelindo menyediakan aplikasi/sistem

WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Whistleblowing System (WBS) called Pelindo Bersih was introduced to strengthen implementation so that all Pelindo personnel and other stakeholders had the opportunity to submit reports regarding indications of violations of applicable ethical values, based on accountable evidence and in good faith. Pelindo provides an application/system for all stakeholders to report fraud, corruption and extortion information violations

untuk melaporkan tindakan curang, korupsi, dan pemerasan bagi seluruh *stakeholder* yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang dilakukan oleh insan Pelindo, cabang pelabuhan, dan grup perusahaan melalui sistem yang independen. Melalui sistem ini, Pelindo dapat menjadi perseroan yang lebih baik dan mempunyai daya saing baik di tingkat nasional dan internasional. Bagi insan Pelindo atau *stakeholder* yang melaporkan akan diberikan perlindungan, baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun dari kemungkinan tindakan balasan oleh si terlapor.

committed by Pelindo personnel, port branches and company groups through an independent system. With this system, Pelindo can become a better Company with increased competitiveness both at the national and international levels. Pelindo personnel or stakeholders who report are given protection, in terms of confidentiality of identity and from possible retaliation by the reported party.

Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor, kecuali apabila pengungkapan tersebut diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib. Pelaporan yang dilakukan tanpa identitas akan tetap di proses, namun demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu kesungguhan isi laporan, kredibilitas, dan bukti-bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk melakukan konfirmasi pelaporan. Perseroan menjamin terhadap pelapor dari segala tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, intimidasi, hukuman maupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun atas kesaksian dan/atau pelaporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian dan/atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Perseroan memberikan perlindungan kepada pelapor atas kemungkinan dilakukannya hal-hal antara lain, pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atas pangkat dengan alasan yang tidak jelas dan catatan yang merugikan dalam *file* data pribadinya (*personal file record*).

The Company guarantees the confidentiality of the whistleblower's identity, except when its disclosure is required in connection with a report or investigation conducted by the authorities. Reports made anonymously will still be processed, however, only after the seriousness of the contents of the report, credibility, and the evidence submitted has be considered, as well as the possibility of confirming the report. The Company protects the whistleblowers from all lawsuits, both criminal and civil, intimidation, punishment or unpleasant actions from any party for the evidence and/or report that will be, is being or has been given, unless the evidence and/or report has not been given in good faith. The Company provides protection to the whistleblowers against the possibility of unfair dismissal, demotion for reasons that are not clear, and detrimental information recorded in their personal file records.

Dewan Komisaris melalui Komite Audit berperan dalam me-*review* pelaksanaan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern terkait dengan penerapan WBS. Satuan Pengawasan Intern memiliki tanggung jawab menerima dan memonitor pengaduan baik internal dan eksternal serta membuat laporan bulanan kepada Tim Pelindo Bersih sebagai *counterpart*. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan WBS di Perseroan telah berjalan dengan baik. Namun demikian, Dewan Komisaris memberikan arahan agar ke depannya penerapan WBS lebih ditingkatkan lagi efektivitasnya.

The Board of Commissioners through the Audit Committee plays a role in reviewing the Internal Audit Unit's responsibilities related to the implementation of the WBS. The Internal Audit Unit has the responsibility of receiving and monitoring complaints both internally and externally as well as making monthly reports to the Pelindo Bersih Team as the counterpart. The Board of Commissioners is of the view that the WBS in the Company has functioned properly. However, the Board of Commissioners suggests that in the future the implementation of the WBS effectiveness be further enhanced.

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris meliputi Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko. Prosedur penilaian terhadap kinerja Komite dilakukan secara periodik. Kriteria penilaian atas kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris merupakan bagian dari KPI Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh Pemegang Saham. Adapun kriteria penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Pelaksanaan Rapat Internal Komite dan Laporan Penugasan Komite.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by committees under the Board of Commissioners including the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee and the GCG Committee and Risk Management Monitoring. Procedures for the performance assessments of the Committees are carried out routinely. The criteria for assessing the performance of Committees under the Board of Commissioners is one of the Board of Commissioners' KPI as approved by the Shareholders. The performance assessments criteria includes the Implementation of Committee Internal Meetings and Committee Assignment Reports.

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris menilai komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi aspek-aspek operasional dan strategis Perseroan dengan baik.

For 2022, the Board of Commissioners assessment is that these committees have carried out their duties and responsibilities in supervising the Company's operational and strategic aspects properly.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2022, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris sebagaimana penjelasan berikut:

CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

During 2022, there was a change in the Board of Commissioners membership composition as explained below:

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 1 JANUARI 2022 – 20 SEPTEMBER 2022

Komposisi Dewan Komisaris periode 1 Januari 2022 sampai dengan 20 September 2022 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Plt. Komisaris Utama/Komisaris Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris sebagai berikut:

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION FOR THE PERIOD JANUARY 1, 2022 – SEPTEMBER 20, 2022

The Board of Commissioners composition for the period January 1, 2022 to September 20, 2022 consisted of 7 (seven) people including 1 (one) Acting President Commissioner/Independent Commissioner, 3 (three) Independent Commissioners and 3 (three) Commissioners as follows:

Marsetio	:	Komisaris Independen (Plt. Komisaris Utama)	Commissioner (Acting President Commissioner)
R. Agus H. Purnomo	:	Komisaris	Commissioner
Didi Sumedi	:	Komisaris	Commissioner
Sudung Situmorang	:	Komisaris	Commissioner
Antonius Rainier Haryanto	:	Komisaris Independen	Independent Commissioner
Heru Sukanto	:	Komisaris Independen	Independent Commissioner
Muchtar Luthfi Mutty	:	Komisaris Independen	Independent Commissioner

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 20 SEPTEMBER 2022 – 22 FEBRUARI 2023

Pada tanggal 20 September 2022 Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memutuskan memberhentikan dengan hormat R. Agus H. Purnomo sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) serta mengangkat Arif Toha Tjahjagama sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris periode 20 September 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Plt. Komisaris Utama/Komisaris Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris sebagai berikut:

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION FOR THE PERIOD SEPTEMBER 20, 2022 – FEBRUARY 22, 2023

On September 20, 2022 the Ministry of SOE as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) decided to honorably dismiss R. Agus H. Purnomo as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and appoint Arif Toha Tjahjagama as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Thus, the composition of Board of Commissioners for the period of September 20, 2022 to December 31, 2022 is 7 (seven) people consisting of 1 (one) Acting President Commissioner/Independent Commissioner, 3 (three) Independent Commissioners and 3 (three) Commissioners as follows:

Marsetio	:	Komisaris Independen (Plt. Komisaris Utama)	Commissioner (Acting President Commissioner)
Arif Toha Tjahjagama	:	Komisaris	Commissioner
Didi Sumedi	:	Komisaris	Commissioner
Sudung Situmorang	:	Komisaris	Commissioner
Antonius Rainier Haryanto	:	Komisaris Independen	Independent Commissioner
Heru Sukanto	:	Komisaris Independen	Independent Commissioner
Muchtar Luthfi Mutty	:	Komisaris Independen	Independent Commissioner

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 22 FEBRUARI 2023 – 19 MEI 2023

Pada tanggal 22 Februari 2023 Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memutuskan memberhentikan dengan hormat Marsetio sebagai Komisaris Independen (Plt. Komisaris Utama) dan Antonius Rainier Haryanto sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Kemudian, Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) juga memutuskan untuk mengangkat Jodi Mahardi sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris periode komposisi Dewan Komisaris periode 22 Februari 2023 sampai dengan 19 Mei 2023 sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Plt. Komisaris Utama/Komisaris, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris sebagai berikut:

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION FOR THE PERIOD FEBRUARY 22, 2023 – MAY 19, 2023

On February 22, 2023 the Ministry of SOEs at a PT Pelabuhan Indonesia (Persero) GMS honorably dismissed Marsetio as Independent Commissioner (Acting President Commissioner), and Antonius Rainier Haryanto as an Independent Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Then, the Ministry of SOEs at a PT Pelabuhan Indonesia (Persero) GMS also decided to appoint Jodi Mahardi as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Thus, the Board of Commissioners composition for the period of February 22, 2023 to May 19, 2023 is 6 (six) people consisting of 1 (one) Acting President Commissioner/ Commissioner, 2 (two) Independent Commissioners and 3 (three) Commissioners as follows:

Sudung Situmorang	:	Komisaris (Plt. Komisaris Utama)	Commissioner (Acting President Commissioner)
Didi Sumedi	:	Komisaris	Commissioner
Arif Toha Tjahjagama	:	Komisaris	Commissioner
Jodi Mahardi	:	Komisaris	Commissioner
Heru Sukanto	:	Komisaris Independen	Independent Commissioner
Muchtar Luthfi Mutty	:	Komisaris Independen	Independent Commissioner

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 19 MEI 2023 – SAAT INI

Pada tanggal 19 Mei 2023 Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memutuskan untuk mengangkat Agus Suhartono sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris periode 19 Mei 2023 sampai dengan saat ini sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris sebagai berikut:

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION FOR THE PERIOD MAY 19, 2023 – PRESENT

On May 19, 2023 the Ministry of SOEs at a PT Pelabuhan Indonesia (Persero) GMS appointed Agus Suhartono as President Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Thus, the Board of Commissioners composition for the period May 19, 2023 to date comprised 7 (seven) people consisting of 1 (one) President Commissioner, 2 (two) Independent Commissioners and 4 (four) Commissioners as follows:

Agus Suhartono	:	Komisaris Utama	President Commissioner
Sudung Situmorang	:	Komisaris	Commissioner
Didi Sumedi	:	Komisaris	Commissioner
Arif Toha Tjahjagama	:	Komisaris	Commissioner
Jodi Mahardi	:	Komisaris	Commissioner
Heru Sukanto	:	Komisaris Independen	Independent Commissioner
Muchtar Luthfi Mutty	:	Komisaris Independen	Independent Commissioner

PENUTUP

Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja dan pelaksanaan usaha Perseroan di tahun 2022. Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi terhadap komitmen dan kerja keras Direksi, manajemen, dan seluruh Pekerja sehingga Pelindo telah mampu menghadapi tantangan dan telah menyajikan kinerja yang baik di tengah kondisi yang menantang di tahun 2022.

Kepada para pemangku kepentingan lainnya, Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Ke depannya, Dewan Komisaris sungguh berharap, seluruh jajaran Perseroan dapat terus memberikan yang terbaik bagi Perseroan di masa yang akan datang.

CLOSING

This concludes the report on the supervisory duties by the Board of Commissioners on the performance and implementation of the Company's business in 2022. On this occasion, the Board of Commissioners would like to give its high appreciation for the commitment and hard work shown by the Board of Directors, management and all Employees that enabled Pelindo to face the challenges, and to deliver a good performance during the challenging conditions in 2022.

To all other stakeholders, the Board of Commissioners would also to thank them for the trust they have given. Moving forward, the Board of Commissioners hopes that all levels of the Company will continue to provide the best for the Company in the future.

Jakarta, 30 Mei 2023
Jakarta, May 30, 2023

Atas Nama Dewan Komisaris/On behalf of the Board of Commissioners



AGUS SUHARTONO
Komisaris Utama
President Commissioner

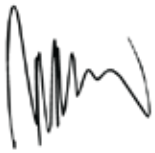
SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2022 PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Mei 2023
Jakarta, May 30, 2023

Anggota Direksi,
Members of the Board of Directors



ARIF SUHARTONO
Direktur Utama
President Director



HAMBRA
Wakil Direktur Utama
Vice President Director



MEGA SATRIA
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Finance and Risk Management Director



IHSANUDDIN USMAN
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
Human Resources and General Affairs Director



PRASETYO
Direktur Strategi
Strategy Director



BOY ROBYANTO
Direktur Investasi
Investment Director



PUTUT SRI MULJANTO
Direktur Pengelola
Managing Director

STATEMENT BY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS CONCERNING RESPONSIBILITY FOR THE 2022 ANNUAL REPORT OF PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)

We, the undersigned testify that all information disclosed, in the 2022 Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), is presented in its entirety. We are fully responsible for the accuracy of the contents in this Annual Report.

This Statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, 30 Mei 2023
Jakarta, May 30, 2023

Anggota Komisaris,
Members of the Board of Commissioners,

AGUS SUHARTONO
Komisaris Utama
President Commissioner

SUDUNG SITUMORANG
Komisaris
Commissioner

DIDI SUMEDI
Komisaris
Commissioner

HERU SUKANTO
Komisaris Independen
Independent Commissioner

MUCHTAR LUTHFI MUTTY
Komisaris Independen
Independent Commissioner

ARIF TOHA TJAHJAGAMA
Komisaris
Commissioner

JODI MAHARDI
Komisaris
Commissioner



PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY



03

Profil Perusahaan

Company Profile

IDENTITAS PERUSAHAAN
Company Identity

Nama Perusahaan | Initial Name

PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Nama Panggilan | Short Name

Pelindo

Bidang Usaha | Business Lines

Jasa Kepelabuhan dan Logistik
Port and Logistics Services

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

5 Februari 1960
February 5, 1960

Status
Status

Badan Usaha Milik Negara (Persero)
State-Owned Enterprise (Persero)

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

Akta Pendirian No. 3
tanggal 1 Desember 1992
Deed of Establishment dated No. 3
December 1, 1992

Kepemilikan | Ownership

100% Pemerintah Republik Indonesia
100% by the Government of the
Republic of Indonesia

Modal Dasar |Authorised Capital

Rp156.000.000.000.000
Rp156,000,000,000,000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully Paid Capital

Rp40.575.584.000.000
Rp40,575,584,000,000



Jumlah Pekerja |Number of Employees

7.204 orang per 31 Desember 2022*
*Pekerja Organik
7,204 people as of December 31, 2022*
*Organic Employees

Data Jaringan Kantor
Office Network

1 Kantor Pusat/Head Office
12 Pelabuhan Regional I/Regional I
12 Pelabuhan Regional II/Regional II
25 Pelabuhan Regional III/Regional III
22 Pelabuhan Regional IV/Regional IV

Alamat Kantor/Alamat Korespondensi
Office Address/Correspondence Address

Kantor Pusat
Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok
Jakarta Utara 14310, Indonesia
Telp: 021 4301080
Fax: -
Email: info@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Sekretariat Perusahaan
Ali Mulyono
Email: corp_sec@pelindo.co.id

Head Office
Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok
Jakarta Utara 14310, Indonesia
Telp: 021 4301080
Fax: -
Email: info@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Corporate Secretary
Ali Mulyono
Email: corp_sec@pelindo.co.id



Media Sosial
Social Media

Facebook: BUMN Pelabuhan Indonesia
Twitter: @indonesiaport
Instagram: @pelindo
Youtube: Pelindo

NAMA DAN ALAMAT KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG

Names and Addresses of Regional Offices and Branch Offices

REGIONAL I

Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1, Belawan
Medan, Indonesia 20411
Telp: (061) 41000055
Fax: -
Email: regional1@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Balai Asahan
Jl. Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai Asahan 21332
Telp: (0632) 92022
Fax: -
Email: tbasahan@pelindo1.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Belawan
Jl. Kapten R. Sulian No. 1 Belawan
Telp: (061) 6941919
Fax: -
Email: belawan@pelindo1.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Lhokseumawe
Pelabuhan Umum Krueng Geukeuh
Lhokseumawe, Aceh Utara 24354
Telp: (0645) 56816
Fax: -
Email: lhokseumawe@pelindo1.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Gunung Sitoli
Jl. Yos Sudarso, Gunungsitoli
Telp: (0639) 21662
Fax: -
Email: gunungsitoli@pelindo1.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Malahayati
Laksamana Malahayati KM. 32,5 Desa Lamreh Krueng Raya, Kec. Mesjid Raya Aceh Besar 23301
Telp: (0651) 56816
Fax: -
Email: malahayati@pelindo1.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Balai Karimun
Jl. Teluk Air No. 12, Tanjung Balai Karimun 29661
Telp: (0777) 23570
Fax: -
Email: tbkarimun@pelindo1.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Sibolga
Jl. Horas Pelabuhan Baru, Sibolga 22532
Telp: (0631) 327041
Fax:
Email: sibolga@pelindo1.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Pinang
Jl. Sri Bayintan Kijang No. 1 Bintan 29151
Telp: (0771) 21153
Fax: -
Email: tanjungpinang@pelindo1.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Dumai
Jl. Sultan Syarif Kasim No. 1 Dumai
Telp: (0765) 31469
Fax: -
Email: dumai@pelindo1.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tembilahan
Jl. Jend. Sudirman No. 76 Tembilahan 29121
Telp: (0768) 21050
Fax: -
Email: tembilahan@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Pekanbaru
Jl. Saleh Abbas No. 3 Pekanbaru
Telp: (0761) 22826
Fax: -
Email: pekanbaru@pelindo1.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Kuala Tanjung
Jl. Pelabuhan No. 1 Kuala Tanjung Kec. Sei Suka, Batubara 21257
Telp: (0622) 620282
Fax: -
Email: kualatanjung@pelindo1.co.id
Web: www.pelindo.co.id

REGIONAL II

Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok
Jakarta Utara, Indonesia 14310
Telp: (021) 214301080
Fax: -
Email: regional2@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Priok
Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
Telp: (021) 4301080
Fax: -
Email: priok@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Sunda Kelapa
Jl. Maritim No. 8 Sunda Kelapa, Jakarta, 14430
Telp: (021) 6928888
Fax: -
Email: sundakelapa@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Panjang
Jl. Yos Sudarso No. 337
Telp: (0721) 31149
Fax: -
Email: cs.panjangport@indonesiaport.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Banten Jl. Raya Pelabuhan No. 1 Ciwandan, Banten, 42446 Telp: (0254) 601221, 08119827778 Fax: - Email: banten@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id	Pelabuhan Cirebon Jl. Perniagaan No. 4 Cirebon, Jawa Barat 45112 Telp: (0231) 204109 Fax: - Email: cirebon@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id	Pelabuhan Palembang Jl. Belinyu No. 1, Boom Baru Pale,bang 30115 Telp: (0711) 710611 Fax: - Email: palembang@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id
Pelabuhan Teluk Bayur Jl. Semarang No. 3 Teluk Bayur, Sumatera Barat 25217 Telp: (0751) 61646 Fax: - Email: telukbayur@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id	Pelabuhan Jambi Raya Pelabuhan KM. 9 Talang Duku, Jambi 36363 Telp: (0741) 35070 Fax: - Email: cs.jambi@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id	Pelabuhan Pontianak Jl. Pak Kasih No. 11 Pontianak, Kalimantan Barat Telp: (0561) 732094 Fax: - Email: pontianak@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id
Pelabuhan Tanjung Pandan Jl. Pelabuhan No. 1 Belitung Telp: (0719) 21049 Fax: Email: tanjungpandan@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id	Pelabuhan Bengkulu Jl. Yos Sudarso No. 9 Pulau Bai, Bengkulu 38216 Telp: (0736) 51409 Fax: - Email: bengkulu@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id	Pelabuhan Pangkal Balam Jl. Yos Sudarso No. 1 Bangka Telp: (0717) 424990 Fax: - Email: pangkalanbalam@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id

REGIONAL III

Jl. Perak Timur No. 610, Perak Utara Surabaya, Indonesia 60165 Telp: (031) 329 8631 Fax: - Email: regional3@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id		
Pelabuhan Tanjung Perak Jl. Perak Timur No. 620 Surabaya Telp: (031) 3285311 Fax: - Email: tanjungperak@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id	Pelabuhan Gresik Jl. Yos Sudarso No. 1 Gresik Telp: (031) 3981941/3974542 Fax: - Email: gresik@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id	Pelabuhan Tanjung Wangi Jl. Raya Situbondo Ketapang, Banyuwangi Telp: (0333) 510636 Fax: - Email: tanjungwangi@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id
Pelabuhan Kalimas Jl. Perak Timur No. 620 Surabaya Telp: (031) 3285311 Fax: - Email: Dhany.Agustian@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id	Pelabuhan Tanjung Tembaga Jl. Tanjung Tembaga Timur No. 10 Probolinggo Telp: (0335) 421385 Fax: - Email: tanjungtembaga@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id	Pelabuhan Pelabuhan Tegal Jl. RE Martadinata No. 9 Tegal Telp: (083) 351488 Fax: - Email: tjms-rtgl@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id
Pelabuhan Pelabuhan Tanjung Emas Jl. Coaster No. 10 Semarang Telp: (024) 3545721 Fax: - Email: tanjungemas@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id	Pelabuhan Kalianget Jl. Raya Pelabuhan No. 06 Kali Anget Telp: (032) 8662447 Fax: - Email: kalianget@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id	Sub Regional Kalimantan Jl. Barito Hilir No. 6, Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Bar., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70119 Telp: (0511) 3353670 Fax: - Email: banjarmasin@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id
Sub Regional Bali Nusa Tenggara Jl. Raya Pelabuhan Benoa No. 1 Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80222 Telp: (0361) 720560 Fax: Email: benoa@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id	Pelabuhan Benoa Jl. Raya Pelabuhan Benoa Denpasar Telp: (0361) 720560 Fax: - Email: benoa@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id	Pelabuhan Badas Jl. Labuhan Badas No. 11 Sumbawa, Nusa Tenggara Timur Telp: (0371) 2706068 Fax: - Email: badas@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Sampit
Jl. Usman Harun No. 2 Sampit, Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
Telp: (0531) 21055
Fax: -
Email: sampit@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Waingapu
Jl. Nanga Mesi No. 16 Waingapu, Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Telp: (0381) 21150
Fax: -
Email: waingapu@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Bima
Jl. Martadinata No. 1 Kel. Tanjung Kec. Rasane Barat Kota Bima
Telp: (0374) 43726
Fax:
Email: bima@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Celukan Bawang
Jl. Pelabuhan Celukan Bawang No. 35 Buleleng Bali
Telp: (0362) 92333
Fax: -
Email: celukanbawang@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Lembar
Jl. Raya Pelabuhan No. 5 Lembar Lombok
Telp: (0370) 681260
Fax: -
Email: lembar@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Ende-IPPI
Jl. Hatta No. 1 Ende, Flores Nusa Tenggara
Telp: (0381) 21150
Fax: -
Email: ende@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Kalabahi
Jl. RE Martadinata No. 3 Kalabahi, Alor, Nusa Tenggara Timur
Telp: (0386) 21023
Fax: -
Email: ende@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Maumere
Jl. Kuneng No. 2 Maumere Nusa Tenggara Timur
Telp: (0382) 21054
Fax: -
Email: maumere@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Labuan Bajo
Pelabuhan Multipurpose Manjarite Kel. Wae Kelambu Kec. Komodo
Telp: 081237726018
Fax: -
Email: planner.bajo@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Batulicin
Jl. Pelabuhan Samudera No. 124 Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
Telp: (0518) 70305
Fax: -
Email: batulicin@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Kotabaru
Jl. Raya Stagen KM. 11 No. 9 Kotabaru, Stagen, Kalimantan Selatan
Telp: (0518) 21214
Fax: -
Email: kotabaru@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Pulang Pisang
Jl. Samudera No. 1 Kahayan Hilir, Pulang Pisau, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telp: (0513) 61128
Fax: -
Email: banjarmasin@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Kumai
Jl. Bendahara No. 248 Kumai Kotawaringin Barat
Telp: (0532) 61468
Fax: -
Email: kumai@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

REGIONAL IV

Jl. Soekarno No. 1
Makassar, Indonesia 90173
Telp: -
Fax: -
Email: regional4@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Sorong
Jl. A. Yani No. 13 Sorong
Telp: (0951) 333649, 321930, 321858
Fax: -
Email: sorong@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Makassar
Jl. Soekarno No. 1 Makassar Sulawesi Selatan 90173
Telp: (0411) 3616549
Fax: -
Email: makassar@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Jayapura
Jl. Koti II No. 21 Jayapura
Telp: (0967) 533030, 533330, 533035
Fax: -
Email: jayapura@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tolitoli
Jl. Yos Sudarso No.394, Kel. Sidoarjo, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli 94512
Telp: (0453) 21124
Fax: -
Email: toli-toli@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Nunukan
Jl. Pelabuhan Baru No. 10 Nunukan
Telp: (0556) 21495
Fax: -
Email: nunukan@pelindo.co.id
Web:www.pelindo.co.id

Pelabuhan Ambon
Jl. Yos Sudarso No. 1 Kodya Ambon
Telp: (0911) 311587
Fax: -
Email: ambon@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Kendari Jl. Jl. Pelabuhan Kontainer No. 2 RT 01/RW 01, Kel. Bungkutoko, Kec. Nambo Kota Kendari, 93234 Telp: (0401) 3121978 Fax: - Email: kendari@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id	Pelabuhan Ternate JL. A. Yani Kompleks Pelabuhan, Ternate Telp: (0921) 3121574 Fax: - Email: ternate@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id	Pelabuhan Parepare Jl. Tarakan No. 1, Parepare Sulawesi Selatan Telp: (0421) 21635 Fax: - Email: parepare.pelindoregional4@gmail.com Web:www.pelindo.co.id
Pelabuhan Gorontalo Jl. Mayor Dullan No. 176 Gorontalo Telp: (0435) 821216 Fax: (0435) 824808 Email: gorontalo@inaport4.co.id Web: www.pelindo.co.id	Pelabuhan Manokwari Jl. Banjarmasin No. 3, Kel. Manokwari Timur, Kec. Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat Telp: (0986) 211334 Fax: - Email: manokwari@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id	Pelabuhan Samarinda Jl. Niaga Timur No. 130, Pelabuhan Samarinda Kota, Samarinda 75112 Telp: (0541) 741615 Fax: - Email: samarinda@pelindo.co.id, inaport4.smr@gmail.com, samarindapelindo@gmail.com Web: www.pelindo.co.id
Pelabuhan Balikpapan Jl. Yos Sudarso No. 30 Balikpapan Telp: (0542) 737457 Fax: - Email: balikpapan@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id	Pelabuhan Bitung Jl. D. S. Sumolang No. 1 Bitung Telp: (0401) 3121978 Fax: - Email: Web: www.pelindo.co.id	Pelabuhan Tarakan Jl. Yos Sudarso No. 9 Tarakan Telp: (0551) 21527, 22142, 24437, 24037 Fax: - Email: tarakan@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id
Pelabuhan Pantoloan Jl. Bahari No. 23 Telp: (0451) 491078 Fax: - Email: pantoloan@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id	Pelabuhan Biak Jl. Jend. Sudirman No. 51 Biak Telp: (0981) 21135, 21812, 24070 Fax: - Email: biak@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id	Pelabuhan Fakfak Jl. Izak Telussa No. 5 Fakfak Telp: (0956) 2101508 Fax: - Email: pelindocab.fakfak@gmail.com Web: www.pelindo.co.id
Pelabuhan Manado Jl. Pelabuhan III No. 1 Manado Telp: (0431) 852138, 86364 Fax: - Email: - Web: www.pelindo.co.id	Pelabuhan Merauke Jl. Yos Sudarso No. 9 Merauke Telp: (0972) 321294 Fax: - Email: merauke@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id	Tanjung Redeb Jl. ST M Aminuddin No. 9 RT 10 Sambaliung Kel. Sambaliung 77371 Telp: - Fax: - Email: tanjungredeb@pelindo.co.id Web: www.pelindo.co.id
Pelabuhan Bontang Jl. Ir. H. Juanda No. 43 Kota Bontang Telp: (0548) 22786 Fax: - Email: uptbtg@yahoo.co.id Web: www.pelindo.co.id		

BRAND PERUSAHAAN
Company Brand

Penerapan *branding* yang benar merupakan bagian terpenting dari proses mencapai cita-cita Pelindo menjadi Pemimpin ekosistem Maritim Terintegrasi dan berkelas dunia.
Applying the right branding is an important part of the process of achieving Pelindo's goal to be a world-class integrated leader in the maritime ecosystem.

PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY

1. Mengambil inspirasi dari bentuk jalur atau rute yang sibuk, padat dan simpang siur, yang menggambarkan Pelindo sebagai penyedia jasa kepelabuhanan dan logistik terintegrasi yang selalu aktif dan berperan besar dalam transportasi laut - sebagai urat nadi perekonomian nasional - sekaligus mendukung terwujudnya tol laut Indonesia.

Takes inspiration from the busy, congested and confusing shape, and describes Pelindo as a provider of integrated port and logistics services that is always active and plays a major role in sea transportation - as the lifeblood of the national economy - as well as supports the realization of the Indonesian sea highway.

2. Mengambil huruf P yang menjadi inisial dari Pelindo sekaligus berbentuk ikan, yang menjadi lambang habitat makhluk hidup laut penting bagi Indonesia yang merupakan negara maritim. Ini juga menjadi simbol dari komitmen Pelindo untuk menjaga kekayaan alam Indonesia dengan terus berkontribusi dalam mendukung kelestarian ekosistem laut di wilayah operasinya.

The letter P is the first letter of Pelindo and takes the form of a fish, a symbol of important marine life for Indonesia, which is a maritime country. This is also a symbol of Pelindo's commitment to preserving Indonesia's natural wealth by continuing to contribute to supporting the preservation of marine ecosystems in its operational areas.

3. Warna biru adalah warna laut Indonesia, yang sangat dekat dengan Pelindo. Warna ini melambangkan stabilitas, kepercayaan, integritas, profesionalisme dan pengabdian. Warna ini juga melambangkan simbolisasi dari upaya Pelindo, sebagai bagian dari BUMN untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi seluruh *stakeholders*.

The blue color is the color of the Indonesian sea, which Pelindo is very close to. This color symbolizes stability, trust, integrity, professionalism and devotion. This color also symbolizes Pelindo's efforts, as a BUMN to always provide the best for all stakeholders.

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
Brief History of the Company

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (dahulu "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II" atau "Pelindo II") ("Perusahaan" atau "PT Pelabuhan Indonesia (Persero)") pada awalnya didirikan sebagai Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 15 Tahun 1983 juncto PP No. 5 Tahun 1985. Perum Pelabuhan II merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

The Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (formerly "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II" or "Pelindo II") ("Company" or " PT Pelabuhan Indonesia (Persero)") was initially established as a Public Company ("Perum") Pelabuhan II based on Government Regulation ("PP") No. 15 of 1983 in conjunction with PP No. 5 of 1985. Perum Pelabuhan II is a State-Owned Enterprise ("BUMN") under the guidance of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.



Berdasarkan PP No. 57 Tahun 1991, Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 3 tanggal 1 Desember 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 tanggal 17 Juni 1993. Sejak terbentuknya Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1998, Perusahaan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 07 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. tanggal 1 Oktober 2021 mengenai persetujuan perubahan nama, anggaran dasar dan logo Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-0053936.AH.01.02 tanggal 1 Oktober 2021.

Based on PP No. 57 of 1991, Perum Pelabuhan II underwent a change to become a Limited Liability Company (Persero). As a follow-up to this PP, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established based on a Notarial Deed No. 3 dated December 1, 1992 before Imas Fatimah, S.H.Notary. This deed of establishment was approved by the Republic of Indonesia Minister of Justice Decree No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 dated June 17, 1993. Since the formation of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) in 1998, the Company has been under the guidance of the Ministry of SOEs. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently based on a Company's General Meeting of Shareholders Resolution, which was notarized in Notarial Deed No. 07 before Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. Notary dated October 1, 2021 concerning the approval of the change of name, articles of association and logo of the Company. The Articles of Association amendment was approved by the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights letter No. AHU-0053936.AH.01.02 dated October 1, 2021.

Berdasarkan Akta No. 09 tanggal 21 Agustus 2019, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

Based on Deed No. 09 dated August 21, 2019, the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Minister of SOEs, changed the type of shares, which were originally without series, to Series A and Series B shares Dwiwarna shares.

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

The Company's purpose and objective is to conduct business in the field of port service operations as well as optimizing the use of the Company's resources to produce high quality and highly competitive goods and/or services to obtain/pursue profits to increase the value of the Company by applying the principles of a Limited Liability Company.

Selain lingkup usaha tersebut di atas, Perusahaan dapat pula mendirikan dan menjalankan usaha lain yang memiliki hubungan dengan usaha kepelabuhanan. Saat ini, Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Kelompok Usaha") bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi jasa kepelabuhanan, logistik, jasa informasi teknologi, jasa pengerukan, jasa kepelatihanan dan lainnya.

In addition to the business scope mentioned above, the Company can also establish and run other businesses related to the port business. Currently, the Company and its subsidiaries (hereinafter referred to as the "Business Group") are engaged in several business fields including port services, logistics, information technology services, dredging services, training services and others.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia. Entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

The Company's head office is located at Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia. The parent and ultimate parent entity of the Company is the Government of the Republic of Indonesia.

Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") melakukan penggabungan ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II), dengan Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebagai perusahaan hasil penggabungan.

On October 1, 2021, the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") and the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") merged into one Company (formerly Pelindo II), with the Company (formerly Pelindo II) as the resulting company.

KETERANGAN PERUBAHAN NAMA

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-756/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal Persetujuan Perubahan nama, Perubahan Anggaran dasar dan Logo Perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disingkat Pelindo.

EXPLANATION OF ANY NAME CHANGE

Based on the Republic of Indonesia Minister of SOEs Letter No. S-756/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 concerning Approval of Change of Name, Change of Articles of Association and Company Logo, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) changed its name to PT Pelabuhan Indonesia (Persero), abbreviated to Pelindo.

VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN
Vision, Mission, and Corporate Culture

VISI Vision

"Menjadi Pemimpin Ekosistem Maritim Terintegrasi dan Berkelas Dunia"

To be a world-class integrated leader in the maritime ecosystem"

Visi tersebut merupakan pernyataan cita-cita Perusahaan menjadi pintu gerbang utama jaringan logistik global di Indonesia. Cita-cita ini muncul dilandasi dengan potensi geografis, peluang bisnis serta kebijakan nasional yang membuka peluang bagi perusahaan untuk merealisasikan visi dimaksud.

This vision is a statement of the Company's aspiration to become the main gateway to the global logistics network in Indonesia. This aspiration is based on geographical potential, business opportunities and national policies that open up opportunities for companies to realize the intended vision.

MISI Mission

"Mewujudkan Jaringan Ekosistem Maritim Nasional Melalui Peningkatan Konektivitas Jaringan dan Integrasi Pelayanan Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Negara"

To realize national maritime ecosystem network through the increment of network connectivity and service integration, to support Indonesian economic growth"

Menyediakan jasa kepelabuhan dan maritim yang handal dan terintegrasi dengan kawasan industri untuk mendukung jaringan logistik Indonesia dan global dengan memaksimalkan manfaat ekonomi Selat Malaka.

Providing reliable port and maritime services that are integrated with industrial areas to support the Indonesian and global logistics network by maximizing the economic benefits of the Malacca Strait.

REVIU VISI DAN MISI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan kajian dan *review* terhadap visi dan misi Perseroan, dan menyatakan bahwa visi dan misi tersebut masih relevan untuk kondisi saat ini dan sesuai dengan tantangan dan peluang yang dihadapi Perseroan ke depan. Visi dan Misi Perseroan telah dibahas oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada pembahasan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) Tahun 2022.

VISION AND MISSION REVIEW BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners and Board of Directors conducted a study and reviewed the Company's vision and mission, and stated that the vision and mission were still relevant to the Company's current conditions and the challenges and opportunities it will face in the future. The Board of Commissioners and Board of Directors discussed the Company's Vision and Mission during the discussion of the 2022 RKAP (Company Budget Work Plan).

BUDAYA PERUSAHAAN

CORPORATE CULTURE



Amanah **Trustworthy**	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Uphold the trust given.	• Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan (berpegang teguh kepada nilai moral dan etika). • Responsible for the tasks, decisions and actions taken (stick to moral and ethical values).
Kompeten **Competent**	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Continue to learn and develop abilities.	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. • Membantu orang lain belajar (menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik). • Improve self-competence to respond to ever-changing challenges. • Help others learn (complete assignments of the highest quality).
Harmonis **Harmonious**	Saling peduli dan menghargai perbedaan. Caring for each other and respecting differences.	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. • Suka menolong orang lain (membangun lingkungan kerja yang kondusif). • Respect everyone regardless of their background. • Like helping others (build a conducive work environment).
Loyal **Loyalty**	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. Dedicated and prioritizing the interest of the Nation and State.	• Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara (rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etik). • Maintain the good name of fellow employees, leaders, SOEs, and the State (willing to sacrifice to achieve a greater goal, obey the leadership as long as not against law and ethics).
Adaptif **Adaptive**	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Continuing to innovate and be enthusiastic in driving or facing change	• Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. • Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. • Bertindak proaktif. • Quickly adjust to be better. • Continuously making improvements following technological developments. • Be proactive.
Kolaboratif **Collaborative**	Membangun kerja sama yang sinergis. Build synergistic collaboration.	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah (menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama). • Provide opportunities for various parties to contribute. • Be open in working together to generate added value (mobilizing the use of various resources for common goals).

KEGIATAN USAHA
Business Activities

KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR DAN YANG DIJALANKAN

Maksud dan tujuan Perseroan menurut Anggaran Dasar Perseroan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Utama

1. Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;
2. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal;
3. Penyediaan dan/atau pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat Petikemas, curah cair, curah kering, multi purpose, barang termasuk hewan (*general cargo*), dan fasilitas naik turunnya penumpang dan/atau kendaraan;
4. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat, Petikemas, curah cair, curah kering (*general cargo*), dan kendaraan;
5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering, *multi purpose*, penumpang, pelayanan rakyat, dan Ro-Ro;
6. Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
7. Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/ bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan multi moda;
8. Penyediaan dan/atau pelayanan penyediaan listrik, air minum dan instalasi limbah pembuangan sampah;
9. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian BBM untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan;
10. Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan;
11. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa konsultansi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhan;
12. Pengusahaan dan penyelenggaraan depo Petikemas dan perbaikan, *cleaning*, fumigasi serta pelayanan logistik;
13. Pengusahaan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara.

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE CURRENT ARTICLES OF ASSOCIATION

The Company's purpose and objective based on the Company's Articles of Association is to conduct business in the field of port service operations as well as optimizing the use of the Company's resources to produce high quality and highly competitive goods and/or services to obtain/pursue profits to increase the value of the Company by applying the principles of a Limited Liability Company. To achieve these aims and objectives, the Company carries out the following business activities:

Main Activities

1. Provision and/or service of harbor pools and waters for traffic and ships' berths;
2. Provision and/or services of ship pilotage and towing;
3. Provision and/or service of wharves and other facilities for mooring, loading and unloading containers, liquid bulk, dry bulk, multi purpose, goods including animals (general cargo), and facilities for boarding and dropping off passengers and/or vehicles;
4. Provision and/or loading and unloading services, containers, liquid bulk, dry bulk (general cargo), and vehicles;
5. Provision and/or service of container terminal services, liquid bulk, dry bulk, multi purpose, passengers, public services, and Ro-Ro;
6. Provision and/or service of warehouses and stacking yards and places for storing goods, airport transportation, loading and unloading equipment, and port equipment;
7. Provision and/or land services of buildings and fields, industries and buildings related to the interests of running smooth multi-modal transportation;
8. Provision and/or service of electricity supplies, drinking water and waste disposal installations;
9. Provision and/or fueling services for ships and vehicles in the port environment;
10. 10. Provision and/or service of consolidation and distribution of goods including animals;
11. Provision and/or consulting services, and education and training related to ports;
12. Operation and maintenance of container depots and repairs, cleaning, fumigation and logistics services;
13. Exploitation of customs area and temporary storage areas.

Kegiatan Pendukung

1. Jasa angkutan;
2. Jasa persewaan dan perbaikan fasilitas peralatan;
3. Jasa perawatan kapal dan peralatan di bidang kepelabuhan;
4. Jasa pelayanan alih muat dari kapal ke kapal (*ship to ship transfer*) termasuk jasa ikutan lainnya;
5. Properti di luar kegiatan utama kepelabuhan;
6. Kawasan industri;
7. Fasilitas pariwisata;
8. Perhotelan;
9. Jasa konsultan dan *surveyor* kepelabuhan;
10. Jasa komunikasi dan informasi;
11. Jasa konstruksi kepelabuhan;
12. Jasa *forwarding*/ekspedisi;
13. Jasa kesehatan
14. Perbekalan dan *catering*;
15. Tempat tunggu kendaraan bermotor dan *shuttle* bus;
16. Jas penyelaman (*salvage*);
17. Jasa *tally*;
18. Jasa pas pelabuhan;
19. Jasa timbangan.

Seluruh kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar sudah dijalankan oleh Perseroan pada tahun 2022.

Support activities

1. Transportation services;
2. Equipment rental and repair services;
3. Ship and equipment maintenance services in the port sector;
4. Ship-to-ship transfer services, including associated services;
5. Property outside the main port activities;
6. Industrial areas;
7. Tourism facilities;
8. Hospitality;
9. Port consultant and surveyor services;
10. Communication and information services;
11. Port construction services;
12. Forwarding services;
13. Health services
14. Supplies and catering;
15. Waiting area for vehicles and shuttle buses;
16. Diving suits (salvage);
17. Tally services;
18. Port pass service;
19. Weighing services.

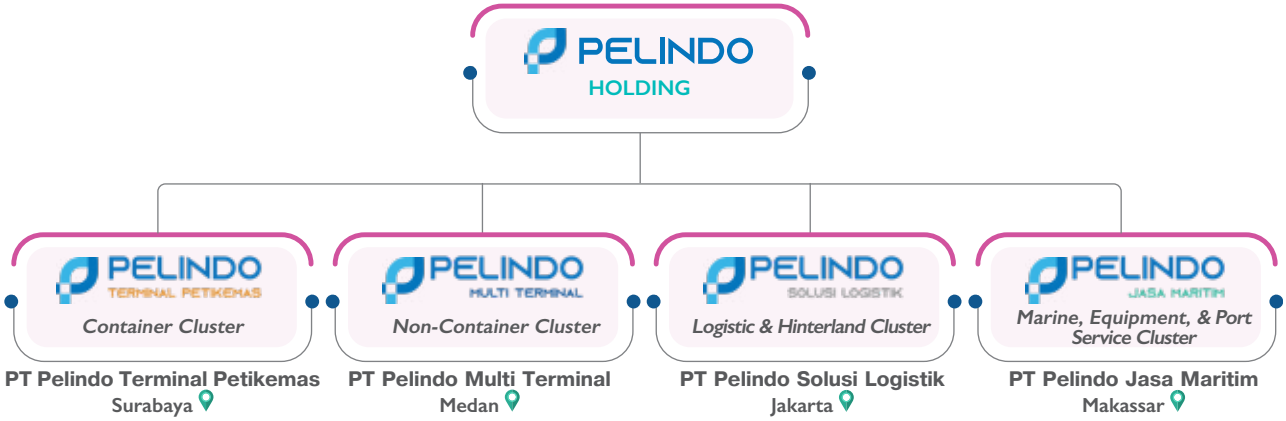
All business activities carried out by the Company are in accordance with the Articles of Association in 2022.

PRODUK DAN JASA

Pasca integrasi, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) merupakan perusahaan *holding* kepelabuhanan yang memiliki klaster bidang usaha sebagai berikut:

PRODUCTS AND SERVICES

Post-integration, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is a port holding company with the following business clusters:



Klaster Bidang Usaha Layanan Petikemas

Merupakan pelayanan bongkar muat barang petikemas mulai dari kapal hingga penyerahan kepada pemilik barang. PT Pelindo Terminal Petikemas merupakan perusahaan *subholding* dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang berperan sebagai *holding* dari sekelompok perusahaan subsidiari yang menjalankan bisnis operasi layanan terminal petikemas. Adapun lingkup bidang usaha meliputi:

1. ***Stevedoring***, Kegiatan membongkar petikemas dari kapal ke dermaga/*trailer* atau memuat petikemas dari dermaga/trailer ke dalam kapal;
2. ***Haulage***, Layanan pengangkutan petikemas dengan menggunakan *trailer/chassis* dalam daerah kerja pelabuhan dari lambung kapal ke lapangan penumpukan petikemas atau sebaliknya;

Container Service Business Cluster

A loading and unloading service for containerized goods from ships to delivery to the goods owners. PT Pelindo Terminal Petikemas is a subholding company of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) that acts as the holding for a group of subsidiary companies that run the business of operating container terminal services. The scope of business includes:

1. **Stevedoring**, the activity of unloading containers from ships to the wharf/trailer or loading containers from the wharf/trailer into the ships;
2. **Haulage**, container transportation services using trailer/chassis in the port work areas from the ship's hull to the container stacking fields or vice versa;

3. **Pelayanan Dermaga**, Pelayanan penanganan kapal di dermaga dengan mengatur kelancaran arus/barang di dermaga;
4. ***Receiving/Delivery***, *Receiving* merupakan kegiatan menerima petikemas dari luar area Terminal sampai tersusun di lapangan penumpukan; *Delivery* adalah kegiatan memindahkan petikemas dari lapangan penumpukan dan menyerahkannya sampai tersusun di atas kendaraan;
5. **Jasa Penumpukan**, Jasa penumpukan petikemas di lapangan penumpukan sampai dengan dikeluarkan dari lapangan penumpukan untuk dimuat atau diserahkan kepada pemilik; dan
6. **Jasa Lainnya**, Merupakan jasa layanan yang menunjang kegiatan yang ada di pelabuhan yang meliputi pemeriksaan karantina, pemeriksaan bea cukai, dan lain sebagainya.

Klaster Bidang Usaha Layanan Nonpetikemas

Merupakan pelayanan bongkar muat barang nonpetikemas mulai dari kapal hingga penyerahan kepada pemilik barang. PT Pelindo Multi Terminal merupakan perusahaan *subholding* dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang berperan sebagai *holding* dari sekelompok perusahaan subsidiari yang menjalankan bisnis operasi layanan terminal nonpetikemas. Adapun lingkup bidang usaha meliputi:

1. **Layanan Terminal Curah Cair,** layanan terminal terdedikasi untuk bongkar muat komoditas curah cair;
2. **Layanan Terminal Curah kering**, layanan terminal terdedikasi untuk bongkar muat komoditas curah kering;
3. **Layanan Terminal Kendaraan,** layanan terminal terdedikasi untuk bongkar muat kendaraan;
4. **Layanan Terminal Khusus**, kerja sama layanan operasional maupun terminal operator terminal khusus;
5. **Layanan Terminal Multipurpose**, layanan terminal terdedikasi untuk bongkar muat komoditas cargo umum; dan
6. **Layanan TUKS,** kerja sama layanan operasional terminal untuk kepentingan sendiri.

Klaster Bidang Usaha Layanan Logistik & Hinterland

Merupakan layanan pendukung terkait logistik dalam jasa kepelabuhanan. PT Pelindo Solusi Logistik merupakan perusahaan *subholding* dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang berperan sebagai *holding* dari sekelompok perusahaan subsidiari dengan lingkup bisnis operasi layanan logistik pendukung jasa kepelabuhanan. Adapun lingkup bidang usaha meliputi:

1. **Layanan Angkutan/Alat Transportasi Barang**, layanan pengangkutan barang umum untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri dan juga mencakup pengangkutan barang sewa khusus (*door-to-door*), pengangkutan barang melalui pelayaran rakyat dan pelayaran perintis dan lainnya.
2. **Layanan Ekspedisi**, layanan pengiriman dan pengepakan barang dalam volume besar baik yang diangkut melalui kereta/angkutan darat, angkutan laut, maupun angkutan udara.
3. **Pergudangan dan Penyimpanan**, layanan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir termasuk layanan *cold storage,* pengelolaan Gudang Sistem Resi Gudang (G-SRG), dan layanan pergudangan dan penyimpanan lainnya;

3. **Wharf Services**, ship handling services at the wharf by regulating the smooth flow of goods at the wharf;
4. **Receiving/Delivery,** picking up the containers from outside the Terminal area until they are arranged in the stacking field. Delivery is the activity of moving containers from the stacking field and handing them over until stacked on the vehicle;
5. **Stacking Service**, container stacking service in the stacking field until it is removed from the stacking field to be loaded or handed over to the owner; and
6. **Other services,** are services that support activities at the port including quarantine inspections, customs inspections, and other services.

Non-Container Service Business Cluster

A loading and unloading service for non-container goods from ships to delivery to the goods owners. PT Pelindo Multi Terminal is a subholding company of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) that acts as the holding of a group of subsidiary companies that run the business of operating non-container terminal services. The scope of business includes:

1. **Liquid Bulk Terminal Services,** a dedicated terminal service for loading and unloading liquid bulk commodities;
2. **Dry Bulk Terminal Services**, dedicated terminal services for loading and unloading dry bulk commodities;
3. **Vehicle Terminal Services**, dedicated terminal services for loading and unloading vehicles;
4. **Special Terminal Services**, operational service cooperation and special terminal operator terminals;
5. **Multipurpose Terminal Services**, dedicated terminal services for loading and unloading of general cargo commodities; and
6. **TUKS service**, cooperation in terminal operational services for own interest.

Logistics Services & Hinterland Business Cluster

A support service related to logistics in port services. PT Pelindo Solusi Logistik is a subholding company of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) that acts as the holding of a group of subsidiary companies that run the business of logistics support port services. The scope of business includes:

1. **Freight Services/Means of Transportation**, general goods transportation services for domestic and foreign destinations including the transportation of special rental goods (door-to-door), transportation of goods through public shipping and pioneer shipping and others;
2. **Expedition services**, delivery and packing services for large volumes of goods, whether transported by train/land transportation, sea transportation, or air transportation;
3. **Warehousing and Storage**, temporary goods storage services before the goods are sent to the final destination including cold storage services, Warehouse Receipt System (G-SRG) management, and other warehousing and storage services;

4. **Layanan Angkutan Multimoda**, layanan angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen;
5. **Layanan *Bounded Warehousing*/Kawasan Berikat**, layanan pergudangan dalam wilayah Kawasan Berikat;
6. **Layanan *Container Distribution Centre* (CDC)/*Cargo Consolidation Centre* (CCC)**, layanan kegiatan *stripping/stuffing* untuk selanjutnya diangkut dari dan ke kendaraan angkutan barang untuk selanjutnya didistribusikan dan layanan untuk menyimpan petikemas kosong *ex stripping/stuffing;*
7. **Layanan Keagenan Kapal**, layanan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan laut nasional selama berada di Indonesia; dan
8. **Layanan Dermaga Marina (*Marine Tourism*)**, layanan usaha penyediaan dan pengelolaan tempat untuk penambatan atau berlabuh kapal pesiar/wisata dan kegiatan lain yang terkait kelautan.

Klaster Bidang Usaha Layanan *Marine* dan *Equipment*

Merupakan pelayanan jasa operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan. PT Pelindo Jasa Maritim merupakan perusahaan *subholding* dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang berperan sebagai *holding* dari sekelompok perusahaan subsidiari dengan lingkup bisnis operasi layanan kapal, layanan peralatan, dan layanan pendukung kepelabuhanan lainnya. Adapun lingkup bidang usaha meliputi:

1. **Layanan Jasa kapal**, merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar Pelabuhan, adapun produk atau Jasa Utama Perusahaan dalam Pelayanan Jasa Kapal meliputi:
   a. **Jasa Tunda**, merupakan Produk atau Jasa Utama Perusahaan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal dan membantu kapal yang berolah-gerak dalam alur pelayaran, daerah labuh jangkar, maupun kolam untuk tambat atau untuk lepas dari dermaga. Proses Pelayanan Jasa Tunda Kapal wajib dilakukan terhadap seluruh kapal-kapal yang berada di wilayah perairan wajib Pandu dan Tunda di mana Perseroan mendapatkan wilayah pelimpahan wajib Pandu dan Tunda.
   b. **Jasa Pandu**, merupakan Produk atau Jasa Utama Perseroan yang wajib diberikan untuk melayani kapal masuk menuju dan keluar dermaga melalui alur Pelabuhan, agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
   c. **Layanan Jasa Pengangkutan Kapal**, merupakan kegiatan usaha perusahaan dalam bidang pelayanan pengangkutan material atau barang dan hasil produksi antar wilayah Pelabuhan.

4. **Multimodal Transportation Services**, goods transportation services using at least 2 (two) different modes of transportation under 1 (one) contract document;
5. **Bounded Warehousing / Bonded Zone Services**, warehousing services within the Bonded Zone area;
6. **Container Distribution Center (CDC), Cargo Consolidation Center (CCC) services**, services for stripping/stuffing activities for further transportation from and to goods transport vehicles for further distribution and services for storing empty containers ex stripping/stuffing;
7. **Ship Agency Service**s, business services to manage the interests of foreign sea transportation company ships and/or national marine company ships while in Indonesia; and
8. **Marina Wharf Services (Marine Tourism)**, business services for providing and managing places for mooring or anchoring cruise/tourism ships and other marine-related activities

Marine and Equipment Services Business Cluster

A ship operational services starting from entering to exiting the port. PT Pelindo Jasa Maritim is a subholding company of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) that acts as the holding of a group of subsidiary companies that run the business of operating ship services, equipment services, and other port support services. The scope of business includes:

1. **Ship servic**e, the ships' operational activities from entering to exiting the port, while the Company's main products or services in Ship Services includes:
   a. **Tugboat Service**, the Company's Main Product or Service including pushing and pulling, tugging, escorting and assisting ships moving in shipping lanes, anchorage areas, or ponds for mooring or leaving the wharf. The Tugboat Service process must be carried out for all ships in the Pilot and Tugboat water areas that the Company has delegated as Pilot and Tugboat areas;
   b. **Pilot Service**, is the Company's Main Product or Service to serve ships entering and leaving the wharf through the Port channel, so that shipping navigation can be carried out safely, orderly, and smoothly for the safety of the ships and the environment;
   c. **Ship Transportation Services,** a Company business activity for transportation of materials or goods and production between Port areas;

d. **Layanan Jasa Pengelolaan Kapal**, merupakan kegiatan usaha perusahaan bekerja sama dengan Perusahaan *Holding* dalam bidang pengelolaan dan perawatan kapal motor Pandu yang digunakan untuk mobilisasi petugas pandu dalam pelaksanaan tugas pelayanan pemanduan kapal di seluruh wilayah perairan.

2. **Layanan Jasa Peralatan**, merupakan kegiatan usaha perusahaan dalam hal penyediaan suku cadang, perbaikan mesin/alat, serta perdagangan besar mesin dan peralatan.
3. **Layanan Pendukung lainnya:**
   a. **Layanan Pengerukan**, merupakan kegiatan usaha pengerukan alur-alur pelayaran, kolam pelabuhan dan lokasi lain yang memerlukan jasa keruk, reklamasi transportasi hasil keruk, pengadaan/pengembangan lahan dan bangunan serta jasa lain yang terkait.
   b. **Layanan Penyediaan Utilitas dan Energi**, merupakan kegiatan usaha perusahaan dalam penyediaan air bersih, kelistrikan, serta jasa lainnya yang terkait.

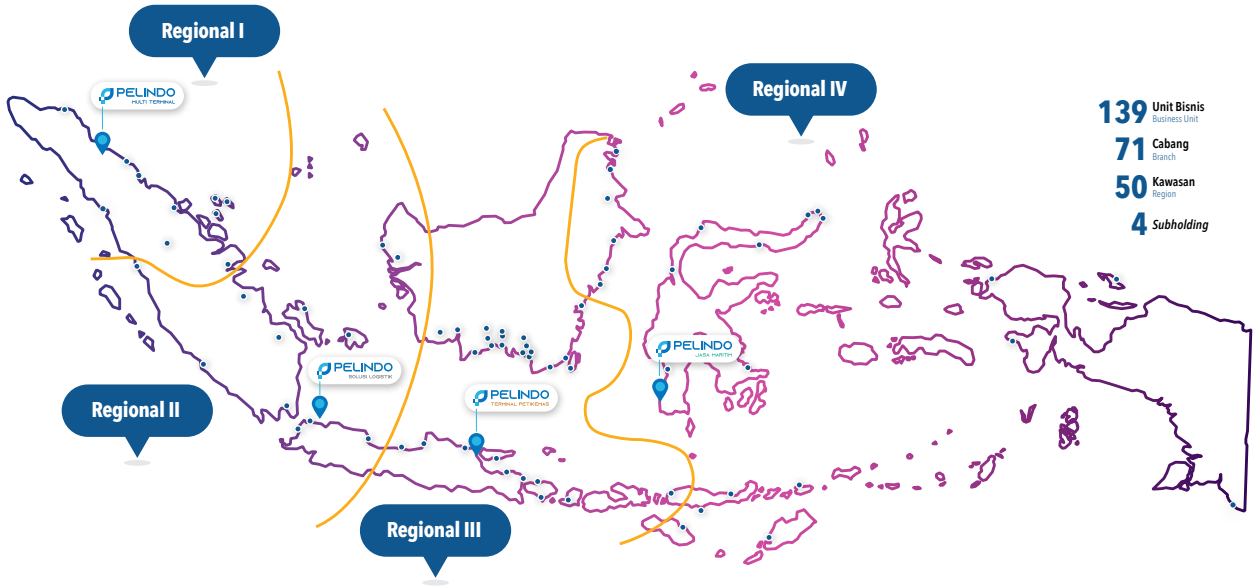
d. **Ship Management Services**, a Company business activity in cooperation with the Holding Company for management and maintenance of Piloting motor boats used to mobilize pilot officers in carrying out ship piloting services in the territorial waters.

2. **Equipment Services**, a Company business activity for supplying spare parts, repairing machines/tools, as well as wholesale trading of machinery and equipment.
3. **Other Support Services:**
   a. **Dredging Services**, a business activity of dredging shipping lanes, port pools and other locations that require dredging services, reclamation of dredged transportation, procurement/development of land and buildings and other related services,
   b. **Utilities and Energy Provision Services**, a Company business activity for providing clean water, electricity, and other related services.

WILAYAH OPERASIONAL
Operating Areas

Per 31 Desember 2022, Pelindo memiliki 71 Pelabuhan yang berada di 4 regional, 32 Provinsi dan 4 *Subholding*.

As of December 31, 2022, Pelindo operates in 71 ports in 4 regions, 32 provinces and 4 Subholding.



Tabel Wilayah Usaha Pelindo
Pelindo Business Regions

Wilayah Region	Kantor Pusat Head Office	Pelabuhan Ports
Regional I	-	12
Regional II	1	12
Regional III	-	25
Regional IV	-	22

DAFTAR KEANGGOTAAN ASOSIASI
Association Membership

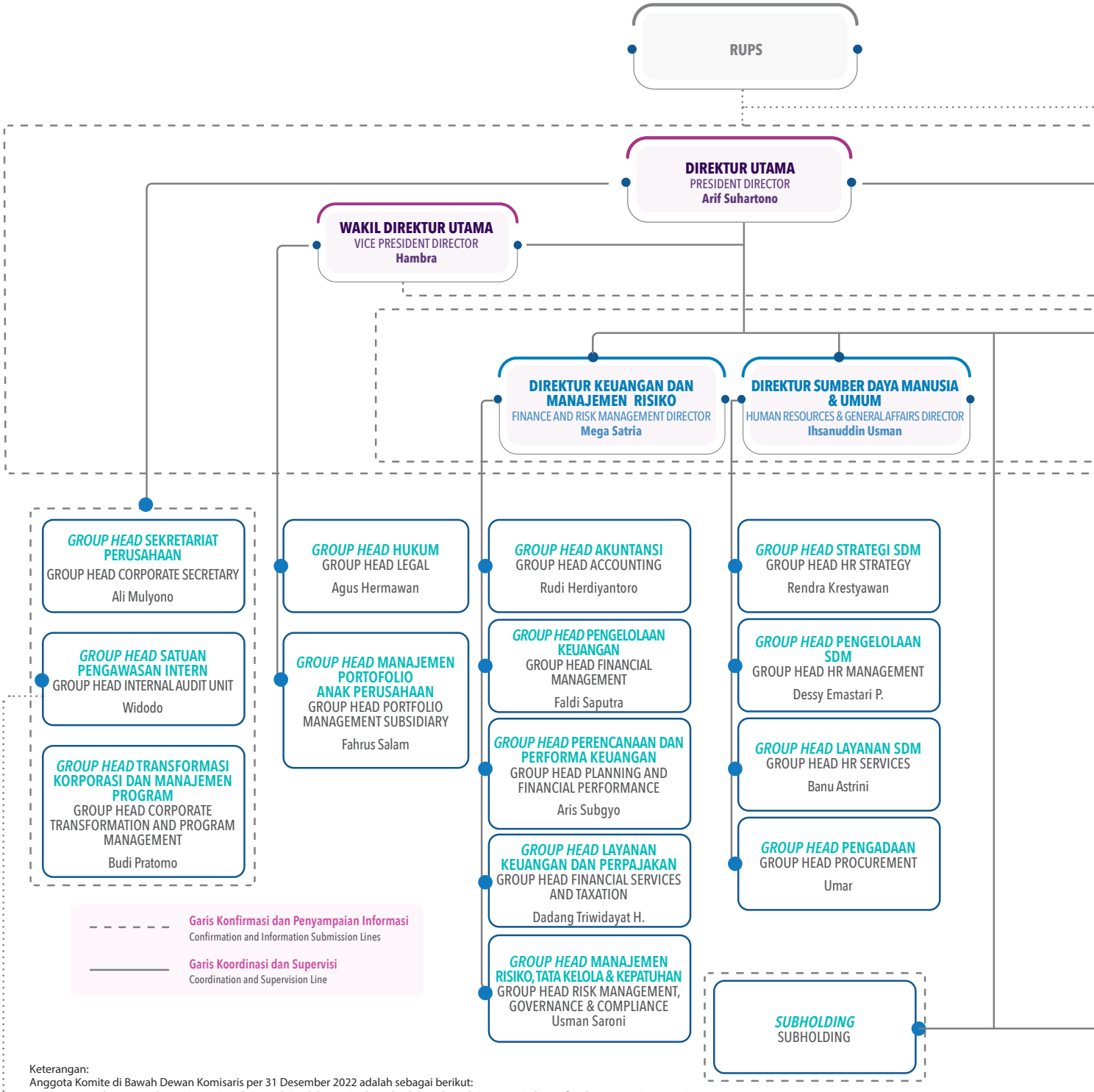
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pelabuhan, Pelindo turut serta berperan aktif di dalam berbagai organisasi. Hingga akhir 2022, Pelindo tercatat sebagai anggota maupun kepengurusan dalam organisasi atau asosiasi sebagai berikut:

As a Company engaged in the port sector, Pelindo takes an active role in various organizations. At the end of 2022, Pelindo was listed as a member or management in the following organizations or associations:

Organisasi Organization	**Peran/Dudukan** Role/Seat	**Manfaat Organisasi** Organization Benefits	**Biaya Tahunan** Annual Fee
International Association of Port and Harbors (IAPH) (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan dalam Industri Kepelabuhan) (Economic, Social and Environment in Industry port)	• IAPH adalah organisasi non-pemerintah yang merupakan aliansi pelabuhan global beranggotakan sekitar 168 pelabuhan dan 134 bisnis terkait pelabuhan di 87 negara yang berkedudukan di Jepang. • Pelindo adalah satu-satunya anggota IAPH di indonesia. • IAPH is a non-governmental organization as a global port alliance consisting of around 168 ports and 134 port-related businesses in 87 countries domiciled in Japan. • Pelindo is the only IAPH member in Indonesia.	• Mengetahui perkembangan dan teknologi pelabuhan terkini. • Mempromosikan perkembangan dan proyek-proyek Perseroan kepada dunia pelabuhan internasional. • Berperan aktif dalam pembahasan kerja sama lingkup Asia Oceania. • Partisipasi pada IAPH *World Port Conference* dan kegiatan-kegiatan turunan IAPH lainnya. • Understanding the latest port developments and technology. • Promoting the Company's developments and projects to the world of international ports. • Taking an active role in the discussion on cooperation within Asia Oceania. • Participating in the IAPH World Port Conference and other IAPH derivative activities.	USD7.615
ASEAN Port Association (APA) (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan dalam Industri Kepelabuhan) (Economic, Social and Environment in Industry port)	• APA adalah asosiasi perusahaan pelabuhan di Asia Tenggara. • Keanggotaan Indonesia dalam APA terdaftar atas PT Pelabuhan Indonesia (Persero). • APA is an association of port companies in Southeast Asia. • Indonesia's membership in the APA is registered under the name of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	• Membuka peluang kerja sama dengan pengusaha bisnis pelabuhan dalam lingkup ASEAN. • Pertukaran informasi pelabuhan dengan pelabuhan ASEAN lainnya. • Berpartisipasi pada acara-acara asosiasi, seperti seminar dan acara keolahragaan. • Opening up opportunities for cooperation with port business entrepreneurs within ASEAN. • Exchanging port information with other ASEAN ports. • Participating in association events, such as seminars and sporting events.	USD5.000

STRUKTUR ORGANISASI
Organizational Structure

Melalui Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/24/2/1/PSOG/UTMA/PLND-23 tanggal 24 Februari 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero), berikut susunan organisasi Pelindo.



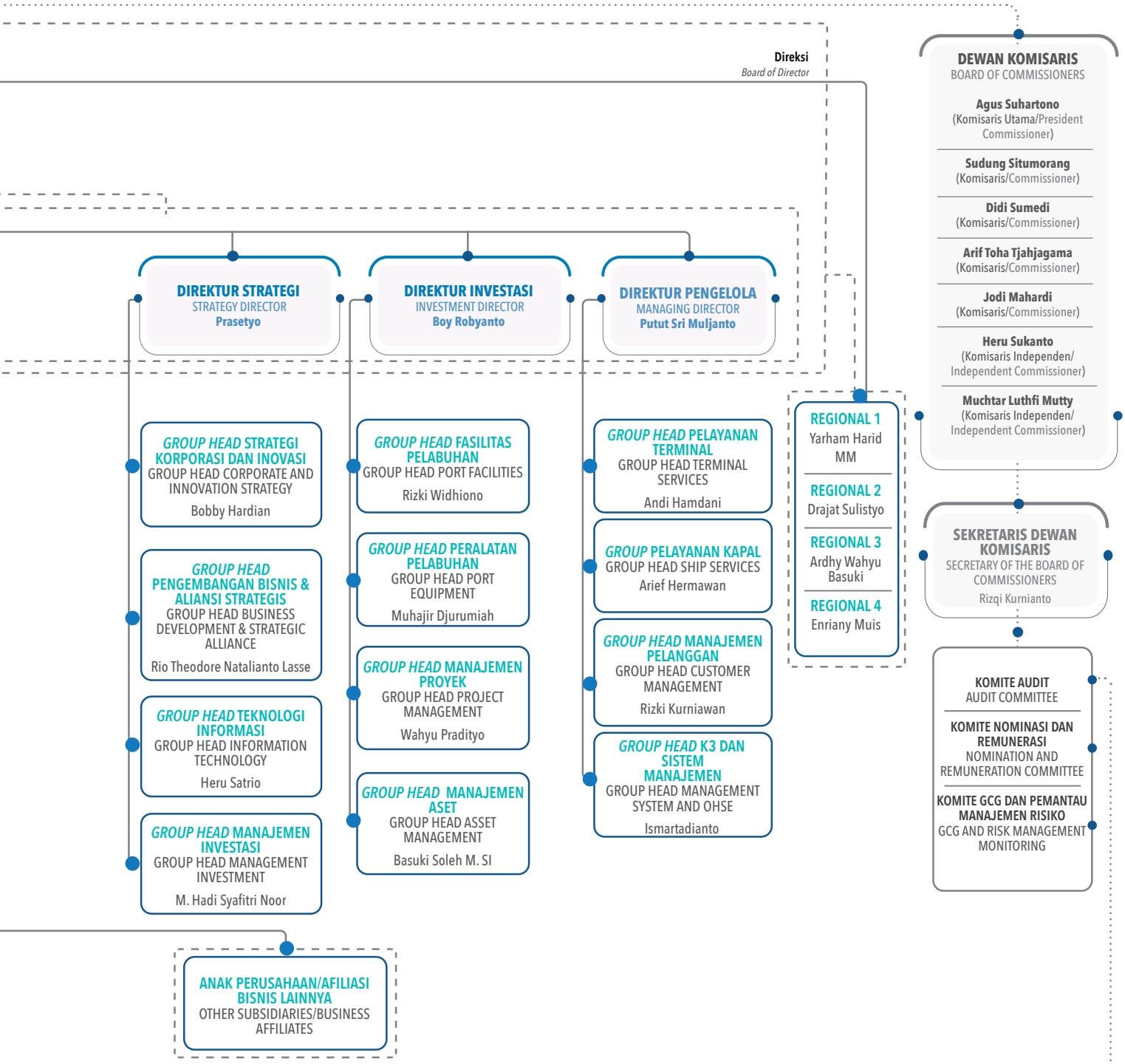
Keterangan:
Anggota Komite di Bawah Dewan Komisaris per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:
1. Komite Audit: Heru Sukanto (Ketua), Didi Sumedi (Wakil Ketua), Ahmad Zakie Mubarrok (Anggota), dan Sofia Chairunnisa (Anggota).
2. Komite Nominasi dan Remunerasi: Marsetio (Ketua), Arif Toha Tjahjagama (Wakil Ketua), Sudung Situmorang (Wakil Ketua), Agus Pambagio (Anggota), dan Mahbub Junaedi (Anggota).
3. Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko: Antonius Rainier Haryanto (Ketua), Muchtar Luthfi Mutty (Wakil Ketua), Aries Fikirman (Anggota) dan Sugiyono (Anggota).

Informasi Komite di bawah Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Information:
Committee members under the Board of Commissioners as of December 31, 2022 are as follows:
1. Audit Committee: Heru Sukanto (Chairman), Didi Sumedi (Deputy Chairperson), Ahmad Zakie Mubarrok (Member), and Sofia Chairunnisa (Member).
2. Nomination and Remuneration Committee: Marsetio (Chairman), Arif Toha Tjahjagama (Deputy Chairperson), Sudung Situmorang (Deputy Chairperson), Agus Pambagio (Member), and Mahbub Junaedi (Member).
3. GCG Committee and Risk Management Monitoring: Antonius Rainier Haryanto (Chairman), Muchtar Luthfi Mutty (Deputy Chairperson), Aries Fikirman (Member) and Sugiyono (Member).

Information on Committees under the Board of Directors can be seen in the Corporate Governance Chapter.

Pelindo's organizational structure was ratified through PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/24/2/1/PSOG/UTMA/PLND-23 dated February 24, 2023 concerning Organizational Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), the following shows Pelindo's organizational structure.



PROFIL DIREKSI
Board of Directors' Profiles



ARIF SUHARTONO

Direktur Utama
President Director

Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Domisili DKI Jakarta, Indonesia | Domicile in DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Place and Date of Birth/Age

Lahir di Banyumas, pada tahun 1970. Usia 52 tahun per Desember 2022.
Born in Banyumas in 1970. 52 years old as at December 2022.

Riwayat Pendidikan
Education History

- S1 bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1994).
- S2 bidang *Infrastructure Management* dari Yokohama National University Jepang (2001).
- S2 bidang *Business Administration* dari Nanyang Technological University Singapura (2017).
- Bachelor's degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Bandung (1994).
- Master's degree in Infrastructure Management from Yokohama National University Jepang (2001).
- Master's degree in Business Administration from Nanyang Technological University Singapore (2017).

Sertifikasi
Certification

-

Pengalaman Kerja
Work Experience

- Direktur Operasi PT Multi Terminal Indonesia (2010-2012).
- Direktur Komersial PT Multi Terminal Indonesia (2012-2013).
- Direktur Utama PT Terminal Peti Kemas Indonesia (2013-2014).
- Pj. PMO Leader PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2014).
- Direktur Utama Rukindo PT Pengerukan Indonesia (2014-2015).
- Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015-2017).
- Direktur Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017-2019).
- Direktur Komersial PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2020).
- Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020 - 2021).
- Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-sekarang).
- Director of Operations, PT Multi Terminal Indonesia (2010-2012).
- Director of Commercial, PT Multi Terminal Indonesia (2012-2013).
- President Director, PT Terminal Peti Kemas Indonesia (2013-2014).
- Act. PMO Leader, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2014).
- President Director, Rukindo PT Pengerukan Indonesia (2014-2015).
- President Director, PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015-2017).
- President Director, PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017-2019).
- Director of Commercial, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2019-2020).
- President Director, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2020 - 2021).
- President Director, Pelindo (2021- present).

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota–Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Appointed for the first time as President Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Periode Menjabat
Term of Office

April 2019 – 2024 (Periode Pertama).
April 2019 - 2024 (First Period).

Jabatan Rangkap
Concurrent Positions

Wakil Komisaris Utama PT Jakarta International Container Terminal (7 Juli 2020-sekarang).
Vice President Commissioner PT Jakarta International Container Terminal (Juli 7, 2020-present).

Kepemilikan Saham
Share Ownership

Tidak memiliki
Does not hold any shares in the Company



HAMBRA

Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Domisili DKI Jakarta, Indonesia | Domicile in DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Place and Date of Birth/Age

Lahir di Ketapang, pada tahun 1968. Usia 54 tahun per Desember 2022.
Born in Ketapang in 1968. 54 years old as at December 2022.

Riwayat Pendidikan
Education History

- S1 bidang Ilmu Hukum dari Universitas Pattimura Ambon (1994).
- S2 bidang Hukum Bisnis dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2010).
- Bachelor's degree in Legal Studies from Universitas Pattimura Ambon (1994).
- Master's degree in Business Law from Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2010).

Sertifikasi
Certification

Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat 19.
Risk Management Competency Test Level 19.

Pengalaman Kerja
Work Experience

- Kepala Bagian Penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN (2010-2012).
- Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN (2012-2015).
- Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industrial Kementerian BUMN (2015-2016).
- Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN (2016-2019).
- Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020-2021).
- Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-sekarang).
- Head of Corporate Governance and Legislation, Ministry of SOEs (2010-2012).
- Head of Legal Bureau, Kementerian BUMN (2012-2015).
- Staff Expert of Strategic Communication and Industrial Relations at the Ministry of BUMN (2015-2016).
- Deputy Business Infrastructure, Ministry of SOEs (2016-2019).
- Vice President Director, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2020-2021).
- Vice President Director, Pelindo (2021- present).

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-272/MBU/11/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan Wakil Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Appointed for the first time as Vice President Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-272/MBU/11/2019 dated November 18, 2019 concerning Appointment of Vice President Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Periode Menjabat
Term of Office

November 2019 – 2024 (Periode Pertama).
November 2019 – 2024 (First Period).

Jabatan Rangkap
Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.
Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.

Kepemilikan Saham
Share Ownership

Tidak memiliki
Does not hold any shares in the Company



MEGA SATRIA

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Finance and Risk Management Director

Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Domisili DKI Jakarta, Indonesia | Domicile in DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Place and Date of Birth/Age

Lahir di Pekanbaru, pada tahun 1977. Usia 45 tahun per Desember 2022.
Born in Pekanbaru in 1977. 45 years old as at December 2022.

Riwayat Pendidikan
Education History

- S1 bidang Administrasi Bisnis dari Wichita State University-USA (1998).
- S2 bidang Administrasi Bisnis dari Loyola University of Chicago-USA (1999).
- Bachelor's degree in Business Administration from Wichita State University-USA (1998).
- Master's degree in Business Administration from Loyola University of Chicago-USA (1999).

Sertifikasi
Certification

- *Certified Professional Management Accountant (CPMA).*
- *Certified Management Accountant (CMA).*
- *Certified Financial Manager (CFM).*

Pengalaman Kerja
Work Experience

- *Treasury Finance Head* HSBC Jakarta (1999-2000).
- *Assistance Vice Presiden Asset Product Manager* ABN-Bank Amro (2000-2004).
- Kepala Pengembangan Bisnis & Distribusi Penjualan Bank Danamon Syariah (2004-2006).
- *Head of Country Sales & Business Development* Deutsche Bank (2006-2008).
- *Executive Vice President Business Development & National Distribution* Sampoerna Strategic (2008-2012).
- *Corporate Treasurer* PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2012-2015).
- *Abacus Distribution System Indonesia* (Anak Perusahaan Garuda Indonesia) (2013-2015).
- *Chief Financial Officer* PT Citilink Indonesia (2015-2017).
- Direktur Keuangan dan SDM PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017-2018).
- Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Bukit Asam (2018-2021).
- Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021).
- Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-sekarang).
- Treasury Finance Head, HSBC Jakarta (1999-2000).
- Assistance Vice President Asset Product Manager, ABN-Bank Amro (2000-2004).
- Head of Business Development & Sales
- Distribution, Bank Danamon Syariah (2004-2006).
- Head of Country Sales & Business
- Development, Deutsche Bank (2006-2008).
- Executive Vice President Business Development & National Distribution, Sampoerna Strategic (2008-2012).
- Corporate Treasurer, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2012-2015).
- Abacus Distribution System Indonesia (Garuda Indonesia Subsidiary) (2013-2015).
- Chief Financial Officer, PT Citilink Indonesia (2015-2017).
- Director of Finance and HR, PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017-2018).
- Director of Finance and Risk Management, PT Bukit Asam Tbk (2018-2021).
- Director of Finance, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021).
- Finance and Risk Management Director, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021- present).

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-79/MBU/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Appointed for the first time as Finance and Risk Management Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-79/ MBU/03/2021 dated March 15, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Periode Menjabat
Term of Office

Maret 2021 – 2026 (Periode Pertama).
March 2021 - 2026 (First Period).

Jabatan Rangkap
Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.
Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.

Kepemilikan Saham
Share Ownership

Tidak memiliki
Does not hold any shares in the Company



IHSANUDDIN USMAN

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
Human Resources and General Affairs Director

Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Domisili DKI Jakarta, Indonesia | Domicile in DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Place and Date of Birth/Age

Lahir di Jakarta, pada tahun 1969. Usia 53 tahun per Desember 2022.
Born in Jakarta in 1969. 53 years old as at December 2022.

Riwayat Pendidikan
Education History

- S1 bidang Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung (1994).
- S2 bidang *Innovation & Technology Management* dari TSM Business School Twente University Belanda (2000).
- Bachelor's degree in Mining Engineering from Institut Teknologi Bandung (1994).
- Master's degree in Innovation & Technology Management from TSM Business School, Twente University, The Netherlands (2000).

Sertifikasi
Certification

-

Pengalaman Kerja
Work Experience

- Direktur PT Prima Kompetensi (2004-2008).
- *Recruitment Manager* PT Pertamina (Persero) (2008-2010).
- *Leadership & People Development Manager* PT Pertamina (Persero) (2010-2014).
- VP Pertamina *Corporate University* PT Pertamina (Persero) (2014-2017).
- VP HR & GA PT Pertamina Hulu Energi (2017).
- SVP *Human Capital Development* PT Pertamina (Persero) (2017- 2018).
- Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2018-2020).
- Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020-2021).
- Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-Sekarang).
- Director, PT Prima Kompetensi (2004-2008).
- Recruitment Manager, PT Pertamina (Persero) (2008-2010).
- Leadership & People Development Manager, PT Pertamina (Persero) (2010-2014).
- VP Pertamina Corporate University, PT Pertamina (Persero) (2014-2017).
- VP HR & GA, PT Pertamina Hulu Energi (2017).
- SVP Human Capital Development, PT Pertamina (Persero) (2017- 2018).
- Director of Business Transformation and Development, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2018-2020).
- Human Resources and General Affairs Director, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020-2021).
- Human Resources and General Affairs Director, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-present).

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Appointed for the first time as Human Resources and General Affairs Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-69/ MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Periode Menjabat
Term of Office

Maret 2020 – 2025 (Periode Pertama).
March 2020 – 2025 (First Period).

Jabatan Rangkap
Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.
Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.

Kepemilikan Saham
Share Ownership

Tidak memiliki
Does not hold any shares in the Company



PRASETYO

Direktur Strategi
Strategy Director

Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Domisili DKI Jakarta, Indonesia | Domicile in DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Place and Date of Birth/Age

Lahir di Mojokerto, pada tahun 1970. Usia 52 tahun per Desember 2022.
Born in Mojokerto in 1970. 52 years old as at December 2022.

Riwayat Pendidikan
Education History

- S1 bidang Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1994).
- S2 bidang *Business Administration* dari Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (2019).
- Bachelor's degree in Architectural Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1994).
- Master's degree in Business Administration from Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (2019).

Sertifikasi
Certification

-

Pengalaman Kerja
Work Experience

- *Manager* Teknik Cabang Gresik di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2009-2010).
- *Assistant Senior Manager* Perencanaan Usaha (2010-2011).
- *Assistant Senior Manager* Pemeliharaan Bangunan (2011).
- *Assistant* Kepala Biro Perencanaan (2011-2013).
- *General Manager* Pelabuhan Benoa (2013).
- *Senior Manager* Supervisi Teknik (2013-2014).
- Direktur Utama PT Pelindo Properti Indonesia (2014-2017).
- Kepala Biro Perencanaan Strategis dan Kinerja Korporat (2017-2020).
- Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2020-2021).
- Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2021).
- Direktur Strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-sekarang).
- Engineering Manager Gresik Branch, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), (2009-2010).
- Assistant Senior Business Planning Manager (2010).
- Assistant Senior Manager Building Maintenance (2011).
- Assistant Head of Planning Bureau, (2011-2013).
- General Manager, Pelabuhan Benoa (2013).
- Senior Manager Technical Supervision (2013-2014).
- President Director, PT Pelindo Properti Indonesia (2014-2017).
- Head of Strategic Planning and Corporate Performance Bureau (2017-2020).
- Director of Business Transformation and Development, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2020-2021).
- President Director, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2021).
- Strategy Director, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-present).

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-334/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota – Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Appointed for the first time as Strategy Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-334/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Periode Menjabat
Term of Office

Oktober 2021 – 2026 (Periode Pertama).
October 2021 – 2026 (First Period).

Jabatan Rangkap
Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.
Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.

Kepemilikan Saham
Share Ownership

Tidak memiliki
Does not hold any shares in the Company



BOY ROBYANTO

Direktur Investasi
Investment Director

Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Domisili DKI Jakarta, Indonesia | Domicile in DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Place and Date of Birth/Age

Lahir di Surabaya, pada tahun 1973. Usia 49 tahun per Desember 2022.
Born in Surabaya in 1973. 49 years old as at December 2022.

Riwayat Pendidikan
Education History

- D3 bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1994).
- S1 bidang Teknik Sipil dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2002).
- S2 bidang Manajemen dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (2019).
- D3 Diploma in Civil Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1994).
- Bachelor's degree in Civil Engineering from Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2002).
- Master's degree in Management from Universitas August 17, 1945 Jakarta (2019).

Sertifikasi
Certification

-

Pengalaman Kerja
Work Experience

- ASM Rancang Bangun PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2014-2015).
- ASM Perencanaan Teknik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2015-2016).
- General Manajer PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tenau Kupang (2016-2017).
- SVP *Port Facility* PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2017-2018).
- CEO Regional Kalimantan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2018-2020).
- Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2020).
- Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2021).
- Direktur Investasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-sekarang).
- ASM Design, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2014-2015).
- ASM Technical Planning, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2015-2016).
- General Manager, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tenau Kupang Branch (2016-2017).
- SVP Port Facility PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2017-2018).
- CEO Regional Kalimantan, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2018-2020).
- Technical Director, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2020).
- President Director, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2021).
- Investment Director, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-present)

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Investasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-334/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Appointed for the first time as Investment Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-334/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Periode Menjabat
Term of Office

Oktober 2021 – 2026 (Periode Pertama).
October 2021 – 2026 (First Period).

Jabatan Rangkap
Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.
Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.

Kepemilikan Saham
Share Ownership

Tidak memiliki
Does not hold any shares in the Company



PUTUT SRI MULJANTO

Direktur Pengelola
Managing Director

Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Domisili DKI Jakarta, Indonesia | Domicile in DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Place and Date of Birth/Age

Lahir di Magetan, pada tahun 1969. Usia 53 tahun per Desember 2022.
Born in Magetan in 1969. 53 years old as at December 2022.

Riwayat Pendidikan
Education History

- S1 bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Airlangga Surabaya (1993).
- S2 bidang Manajemen dari Universitas Airlangga Surabaya (2012).
- Bachelor's degree in Economic Management from Universitas Airlangga Surabaya (1993).
- Master's degree in Management from Universitas Airlangga Surabaya (2012).

Sertifikasi
Certification

- Sertifikasi SDM Kepelabuhanan (2010).
- *Certified Management Accountant* (2014).
- Port HR Certification (2010).
- Certified Management Accountant (2014).

Pengalaman Kerja
Work Experience

- Pjs. *Senior Manager* Peningkatan Usaha Pelindo III (2009 - 2010).
- *Senior Manager* Peningkatan Usaha Pelindo III (2010 - 2011).
- *Senior Manager* Pemasaran Pelindo III (2011 - 2013).
- Komisaris PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (2012 - 2013).
- Direktur Utama PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (2013 - 2018).
- Komisaris PT Berlian Manyar Sejahtera (2014 - 2017).
- Komisaris PT Berkah Industri Mesin Angkat (2017 - 2018).
- Direktur Utama PT Pelindo Marine Service (2018).
- SVP *Marketing* Pelindo III (2018).
- Direktur Utama PT Terminal Petikemas Surabaya (2018).
- Komisaris PT Pelindo Husada Citra (2018).
- ASM Perencanaan dan Kerja sama Usaha Pelindo III (2018 - 2019).
- Komisaris Utama PT Pelindo Daya Sejahtera (2018-sekarang).
- Komisaris Utama PT Berkah Multi Cargo (2018-sekarang).
- Direktur Operasi dan Komersial PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2018-2021).
- Direktur Pengelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-sekarang).
- Acting Business Development Senior Manager at Pelindo III (2009 - 2010).
- Senior Business Development Manager at Pelindo III (2010 - 2011).
- Senior Marketing Manager at Pelindo III (2011 - 2013).
- Commissioner at PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (2012 - 2013).
- President Director at PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (2013 - 2018).
- Commissioner at PT Berlian Manyar Sejahtera (2014 - 2017).
- Commissioner at PT Berkah Industri Lifting Machinery (2017 - 2018).
- President Director at PT Pelindo Marine Service (2018).
- SVP Marketing at Pelindo III (2018).
- President Director at PT Terminal Petikemas Surabaya (2018).
- Commissioner at PT Pelindo Husada Citra (2018).
- ASM Business Planning and Cooperation at Pelindo III (2018 - 2019).
- President Commissioner at PT Pelindo Daya Sejahtera (2018-present).
- President Commissioner at PT Berkah Multi Cargo (2018-present).
- Director of Operations and Commercial at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2018-2021).
- Managing Director at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-present).

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Pengelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-334/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Appointed for the first time as Managing Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-334/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Periode Menjabat
Term of Office

Oktober 2021 – 2026 (Periode Pertama).
October 2021 – 2026 (First Period).

Jabatan Rangkap
Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.
Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.

Kepemilikan Saham
Share Ownership

Tidak memiliki
Does not hold any shares in the Company



Prasetyo
Direktur Strategi
Strategy Director

Putut Sri Muljanto
Direktur Pengelola
Managing Director

Arif Suhartono
Direktur Utama
President Director

Boy Robyanto
Direktur Investasi
Investment Director



Ihsanuddin Usman
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
Human Resources and General Affairs Director

Hambra
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Mega Satria
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Finance and Risk Management Director

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' AFFILIATED RELATIONSHIPS

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi
Board of Director's Affiliated Relationships

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi Board of Directors' Financial, Familial and Management Relationships							
Nama **Name**	**Jabatan** **Position**	**Hubungan Keuangan Dengan** Financial Relationships with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors		**Pemegang Saham Pengendali** Controlling Shareholder	
		Ya Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director		√		√		√
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director		√		√		√
Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director		√		√		√
Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director		√		√		√
Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director		√		√		√
Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director		√		√		√
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director		√		√		√

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Selama tahun 2022, tidak terjadi perubahan komposisi Direksi, sehingga komposisi Direksi pada tahun 2022 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur. Seluruh Direksi berdomisili di wilayah kerja Pelindo. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERSHIP COMPOSITION

During 2022, there were no changes to the Board of Directors composition, so the Board of Directors composition in 2022 consisted of 7 (seven) people including 1 (one) President Director, 1 (one) Vice Main Director and 5 (five) Directors. All Directors were domiciled in the Pelindo working area. The composition and basis for the appointment of the Board of Directors can be seen in the table below.

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi Board of Directors' Financial, Familial and Management Relationships							
Hubungan Keluarga Dengan Familial Relationships with						Hubungan Kepengurusan Management Relationships	
Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder			
Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
	√		√		√		√
	√		√		√		√
	√		√		√		√
	√		√		√		√
	√		√		√		√
	√		√		√		√
	√		√		√		√

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi
Board of Directors Composition and Basis of Appointment

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-69/MBU/03/2020	2 Maret 2020 March 2, 2020
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-272/MBU/11/2019 Minister of SOEs Decree No. SK-272/MBU/11/2019	18 November 2019 November 18, 2019
Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-79/MBU/03/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-79/MBU/03/2021	15 Maret 2021 March 15, 2021
Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-69/MBU/03/2020	2 Maret 2020 March 2, 2020

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi
Board of Directors Composition and Basis of Appointment

Nama Name	**Jabatan** Position	**Pelaksana** Nominator	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Tanggal Efektif** Effective Date
Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-334/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-334/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-334/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021

PROFIL DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners' Profiles



AGUS SUHARTONO

Komisaris Utama
President Commissioner

Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Domisili DKI Jakarta, Indonesia | Domicile in DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Place and Date of Birth/Age

Lahir di Blitar, pada tahun 1955. Usia 67 tahun per Desember 2022.
Born in Blitar, in 1955. Aged 67 as of December 2022.

Riwayat Pendidikan
Education History

- Akademi Angkatan Laut (1978).
- S1 bidang Ekonomi dari Naval Academy (1978).
- Naval Academy (1978).
- Bachelor's degree in Economics from the Naval Academy (1978).

Sertifikasi
Certification

-

Pengalaman Kerja
Work Experience

- *Patrol Ship, Corvet Ship, dan Destroyer Ship* TNI Angkatan Laut (1978-2002).
- Gugus Tempur Laut Armada Timur (2003-2005).
- *Vice President to the Chief Planning and Budgeting* TNI Angkatan Laut (2005-2006).
- *Commander of the Naval Education and Training* (KODIKAL) (2006-2007).
- Komandan Panglima Angkatan Darat (2007-2008).
- *Assistant of the Chief Planning and Budgeting* TNI Angkatan Laut (2008-2009).
- *Inspector of the Defence Ministry* TNI Angkatan Laut (2009-2010).
- *Commander in Chief of the Indonesian Armed Forces* (2010-2013).
- Komisaris Utama PT Bukit Asam (Persero) Tbk (2013-2023).
- Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023 – sekarang).
- Patrol Ship, Corvet Ship, and Indonesian Navy Destroyer Ship (1978-2002).
- Eastern Fleet Sea Combat Group (2003-2005).
- Vice President to the Chief Planning and Budgeting of the Indonesian Navy (2005-2006).
- Commander of the Naval Education and Training (KODIKAL) (2006-2007).
- Commander in Chief of the Army (2007-2008).
- Assistant of the Chief Planning and Budgeting of the Indonesian Navy (2008-2009).
- Inspector of the Defense Ministry of the Indonesian Navy (2009-2010).
- Commander in Chief of the Indonesian Armed Forces (2010-2013).
- President Commissioner at PT Bukit Asam (Persero) Tbk (2013-2023).
- President Commissioner at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023 – present).

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia No. SK-101/MBU/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.
Appointed for the first time as President Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Minister of SOEs as the GMS of the Company PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Decree No. SK-101/MBU/05/2023 dated May 19, 2023 concerning Appointment of Member of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Periode Menjabat
Term of Office

19 Mei 2023 – 20 Mei 2028 (Periode Pertama).
May 19, 2023 – May 20, 2028 (First Term).

Jabatan Rangkap
Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.
Does not hold positions in other companies or institutions.

Kepemilikan Saham
Share Ownership

Tidak memiliki
Does not hold any shares in the Company



SUDUNG SITUMORANG

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Domisili DKI Jakarta, Indonesia | Domicile in DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Place and Date of Birth/Age

Lahir di Tapanuli Utara, pada tahun 1961. Usia 61 tahun per Desember 2022.
Born in Tapanuli Utara in 1961. 61 years old as at December 2022.

Riwayat Pendidikan
Education History

S2 bidang Hukum dari Universitas Indonesia.
Master's degree in Law from Universitas Indonesia.

Sertifikasi
Certification

-

Pengalaman Kerja
Work Experience

- Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu NTT (2002-2004).
- Kepala Kejaksaan Negeri Blora (2004-2009).
- Kepala Kejaksaan Negeri Medan (2009-2015).
- Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tanjung Pinang (2015-2016).
- Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2016-2017).
- Staf Ahli Jaksa Agung RI Bidang Tindak Pidana Khusus (2017-2021).
- Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021).
- Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (11 Juni 2021–sekarang).
- Plt. Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (22 Februari 2023-19 Mei 2023).
- Head State Attorney, Kefamenanu NTT (2002-2004).
- Head State Attorney, Blora (2004-2009).
- Head State Attorney, Medan (2009-2015).
- Chief Prosecutor, Riau islands, Tanjung Pinang (2015-2016).
- Chief Prosecutor, DKI Jakarta (2016-2017).
- Expert Staff for the Indonesian Attorney General for Special Crimes (2017-2021)
- Commissioner, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021)
- Commissioner, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (June 11, 2021–present).
- Acting President Commissioner PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (February 22, 2023-May 19, 2023).

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-192/MBU/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Diangkat menjadi Plt. Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia No. SK-34/MBU/02/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.
Appointed for the first time as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-192/MBU/06/2021 dated June 11, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Appointed as Acting Commissioner based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia No. SK-34/MBU/02/2023 dated February 22, 2023 concerning Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.

Periode Menjabat
Term of Office

11 Juni 2021–10 Juni 2026 (Periode Pertama).
June 11, 2021–June 10, 2026 (First Period).

Jabatan Rangkap
Concurrent Positions

Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Pelindo (2021–sekarang).
Deputy Chairman of Nomination and Remuneration Committee (2021–present).

Kepemilikan Saham
Share Ownership

Tidak memiliki
Does not hold any shares in the Company



DIDI SUMEDI

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Domisili DKI Jakarta, Indonesia | Domicile in DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Place and Date of Birth/Age

Lahir di Bogor, pada tahun 1964. Usia 58 tahun per Desember 2022.
Born in Bogor in 1964. 58 years old as at December 2022.

Riwayat Pendidikan
Education History

- S1 bidang Sosial Politik Administrasi Negara dari Universitas Padjajaran Bandung (1988).
- S2 bidang *Master of Business Administration* dari Saint Marys University, Kanada (1996).
- Bachelor's degree in Socio-Political State Administration from Universitas Padjajaran Bandung (1988).
- Master's degree in Business Administration from Saint Mary's University, Canada (1996).

Sertifikasi
Certification

- *English Preparatory For Master Program.*
- *Microeconomics Analysis For Domestic Trade Analysis.*
- Pelatihan *Marketing.*
- *Trade Related Aspect of Intelectual Property Rights.*
- *Logistic Renovation Strategy* Korea.
- *Young dan Profesional Training on Internasional Economics* dan *Trade Policy Analysis.*
- Diklat Analisa Perdagangan Internasional.
- *Workshop* Kebijakan & Implementasi *E-Commerce* Deperindag.
- Apec-Sccp *Trips Training.*
- English Preparatory for Master Program.
- Microeconomics analysis for domestic trade analysis.
- Marketing Training.
- Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights.
- Korean Logistics Renovation Strategy.
- Young and Professional Training on International Economics and Trade Policy Analysis.
- International Trade Analysis Training.
- Department of Industry and Commerce Workshop on E-Commerce Policy & Implementation.
- APEC-SCCP TRIPS Training.

Pengalaman Kerja
Work Experience

- Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (2020–2021).
- Komisaris Utama PT Perdagangan Indonesia (Persero) (2020).
- Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (2021–sekarang).
- Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021).
- Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (11 Juni 2021–sekarang).
- Director General of Foreign Trade, Ministry of Trade (2020–2021).
- President Commissioner, PT Perdagangan Indonesia (Persero)(2020).
- Director General for National Export Development (2021–present).
- Commissioner, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021).
- Commissioner, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (June 11, 2021–present).

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-192/MBU/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Appointed for the first time as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-192/MBU/06/2021 dated June 11, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Periode Menjabat
Term of Office

11 Juni 2021 – 10 Juni 2026 (Periode Pertama).
June 11, 2021 – June 10, 2026 (First Period).

Jabatan Rangkap
Concurrent Positions

- Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan (2021–sekarang).
- Wakil Ketua Komite Audit Pelindo (2021–sekarang).
- Director General for National Export Development, Ministry of Trade (2021–present).
- Deputy Chairperson of the Pelindo Audit Committee (2021–present).

Kepemilikan Saham
Share Ownership

Tidak memiliki
Does not hold any shares in the Company



HERU SUKANTO

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Domisili DKI Jakarta, Indonesia | Domicile in DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Place and Date of Birth/Age

Lahir di Surabaya, pada tahun 1957. Usia 65 tahun per Desember 2022.
Born in Surabaya in 1957. 65 years old as at December 2022.

Riwayat Pendidikan
Education History

- S1 bidang Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya (1982).
- S2 bidang Manajemen Pemasaran dari PPM Jakarta (2000).
- Bachelor's degree in Law from Universitas Airlangga Surabaya (1982).
- Master's degree in Marketing Management from PPM Jakarta (2000).

Sertifikasi
Certification

-

Pengalaman Kerja
Work Experience

- Direktur Utama Bank Argo BRI Tbk (2012-2016).
- Direktur Utama Bank Banten Tbk (2016-2017).
- Komisaris Bank Argo BRI Tbk, Jakarta (2017-2019).
- Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2020-2021).
- Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-sekarang).
- President Director, Bank Argo BRI Tbk (2012-2016).
- President Director, Bank Banten Tbk (2016-2017).
- Commissioner, Bank Argo BRI Tbk (2017-2019).
- Independent Commissioner, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2020–2021).
- Independent Commissioner, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-present).

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-335/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Appointed for the first time as Independent Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-335/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Periode Menjabat
Term of Office

1 Oktober 2021–30 September 2026 (Periode Pertama).
October 1, 2021–September 30, 2026 (First Period).

Jabatan Rangkap
Concurrent Positions

Ketua Komite Audit Pelindo (2021–sekarang).
Chairman of the Pelindo Audit Committee (2021–present).

Kepemilikan Saham
Share Ownership

Tidak memiliki
Does not hold any shares in the Company



MUCHTAR LUTHFI MUTTY

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Domisili DKI Jakarta, Indonesia | Domicile in DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Place and Date of Birth/Age

Lahir di Masamba, pada tahun 1956. Usia 66 tahun per Desember 2022.
Born in Masamba in 1956. 66 years old as at December 2022.

Riwayat Pendidikan
Education History

- Program Sarjana Muda APDN Makassar (1978).
- Program Sarjana Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta Tahun (1985).
- S2 bidang Kajian Ketahanan Nasional dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1994).
- S2 bidang Administrasi Negara dari STIA YAPPANN Jakarta (2012).
- APDN Baccalaureate Program, Makassar (1978).
- Institute of Government Sciences Undergraduate Program (IIP) Jakarta (1985).
- Master's degree in National Resilience Study from Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1994).
- Master's degree in State Administration from STIA YAPPANN Jakarta (2012).

Sertifikasi
Certification

-

Pengalaman Kerja
Work Experience

- Camat Wotu Kabupaten Luwu (1986-1989).
- Dosen Institute Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri (1989-1999).
- Bupati Luwu Utara (1999–2009).
- Staf Khusus Wakil Presiden RI (2009–2014).
- Komisaris PTPN XIV (2010–2014)
- Anggota DPR RI (2014–2019).
- Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI (2019–sekarang).
- Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Sulawesi Selatan (2020–2022).
- Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021–sekarang).
- Camat Wotu, Luwu Regency (1986-1989).
- Lecturer at the Institute of Government Science, Ministry of Home Affairs (1989-1999).
- North Luwu District Head (1999-2009).
- Special Staff to the Vice President of the
- Republic of Indonesia (2009-2014).
- Commissioner at PTPN XIV (2010-2014).
- DPR RI Member (2014-2019).
- Special Staff for the Deputy Chairperson at MPR RI (2019–present).
- Member of the Governor's Team for the Acceleration of Development (TGUPP) at South Sulawesi Province (2020–2022).
- Independent Commissioner at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021– present).

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia No. SK-396/MBU/12/2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Appointed for the first time as Independent Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK- 396/MBU/12/2021 dated December 9, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia Indonesia II (Persero).

Periode Menjabat
Term of Office

9 Desember 2021–8 Desember 2026 (Periode Pertama).
December 9, 2021–December 8, 2026 (First Period).

Jabatan Rangkap
Concurrent Positions

Wakil Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Pelindo (2021-sekarang).
Deputy Chairperson of Pelindo GCG and Risk Management Monitoring Committee (2021–present).

Kepemilikan Saham
Share Ownership

Tidak memiliki
Does not hold any shares in the Company



ARIF TOHA TJAHJAGAMA

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Domisili DKI Jakarta, Indonesia | Domicile in DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Place and Date of Birth/Age

Lahir di Sidoarjo, pada tahun 1967. Usia 55 tahun per Desember 2022.
Born in Sidoarjo in 1967. 55 years old as at December 2022.

Riwayat Pendidikan
Education History

- S1 bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (1991).
- S2 bidang Ekonomi Transportasi dari Universitas Lyon II Perancis (1996).
- Bachelor's degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (1991).
- Master's degree in Transportation Economics from the University of Lyon II, France (1996).

Sertifikasi
Certification

-

Pengalaman Kerja
Work Experience

- Kepala Seksi Penyusunan Rencana, Bidang Perencanaan dan Pembangunan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak (2010-2012).
- Kepala Seksi Rencana dan Program Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak (2012-2014).
- Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Kantor OP Utama Tanjung Perak (2014-2015).
- Kepala Sub Direktorat Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut (2015-2016).
- Kepala Sub Direktorat Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut (2016).
- Kepala Sub Direktorat Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan (2016-2017).
- Kepala Distrik Navigasi Kelas III Tarakan (2017-2018).
- Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (2018).
- Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (2018–sekarang).
- PLT Direktur Jenderal Perhubungan Laut (2021–Agustus 2022).
- Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (2022 – sekarang).
- Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2022 – sekarang).
- Head of Planning Section, Planning and Construction of Tanjung Perak Main Port Authority Office (2010-2012).
- Head of the Plans and Programs Section at the Tanjung Perak Main Port Authority Office (2012-2014).
- Head of Planning and Development at Tanjung Perak Main OP Office (2014-2015).
- Head of Sub-Directorate for Special and Supporting Sea Transportation at the Directorate of Traffic and Sea Transportation (2015-2016).
- Head of the Sub-Directorate for Special Sea Transportation and Related Service Businesses, at Traffic and Sea Transportation Directorate (2016).
- Head of Port Development Planning and Planning Sub-Directorate (2016-2017).
- Head of Tarakan Class III Navigation District (2017-2018).
- Head of Tanjung Priok Main Port Authority Office (2018).
- Secretary to the Directorate General of Sea Transportation (2018–present).
- Acting Director General of Sea Transportation (2021–August 2022).
- Director General of Sea Transportation, Ministry of Transportation (2022 – present).
- Commissioner at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2022–present).

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-206/MBU/09/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.
Appointed for the first time as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia No. SK-206/MBU/09/2022 dated September 20, 2022 concerning Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.

Periode Menjabat
Term of Office

20 September 2022-19 September 2027 (Periode Pertama).
September 20, 2022-September 19, 2027 (First Period).

Jabatan Rangkap
Concurrent Positions

- Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (2022 – sekarang).
- Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Pelindo (2022-sekarang).
- Director General of Sea Transportation, Ministry of Transportation (2022-present).
- Deputy Chairman of Pelindo's Nomination and Remuneration Committee (2022-present).

Kepemilikan Saham
Share Ownership

Tidak memiliki
Does not hold any shares in the Company



JODI MAHARDI

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Domisili DKI Jakarta, Indonesia | Domicile in DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Place and Date of Birth/Age

Lahir di Bandung, pada tahun 1977. Usia 45 tahun per Desember 2022.
Born in Bandung in 1970. 45 years old as at December 2022.

Riwayat Pendidikan
Education History

- S1 bidang Manajemen dari University of Massachusetts, Boston (2003).
- S2 bidang International Affairs dari University of St. Thomas, Houston (2011).
- Bachelor's degree in Management from the University of Massachusetts, Boston (2003).
- Master's degree in International Affairs from the University of St. Thomas, Houston (2011).

Sertifikasi
Certification

-

Pengalaman Kerja
Work Experience

- Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2021-2022).
- Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2022-sekarang).
- Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023-sekarang).
- Deputy for Maritime Resources Coordination at the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment (2021-2022).
- Deputy for Maritime Sovereignty and Energy Coordination at the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment (2022-present).
- Commissioner at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023-present).

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia No. SK-34/MBU/02/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.
Appointed for the first time as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Decree of the Minister of SOE No. SK-34/MBU/02/2023 dated February 22, 2023 concerning Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.

Periode Menjabat
Term of Office

22 Februari 2023-21 Februari 2028 (Periode Pertama).
February 22, 2023-February 21, 2028 (1st Period).

Jabatan Rangkap
Concurrent Positions

- Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2022 - Sekarang).
- Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Pelindo (2023-sekarang).
- Deputy for Maritime Sovereignty and Energy Coordination at the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment (2022 - Present).
- Chairman of Pelindo's GCG and Risk Management Monitoring Committee (2023-present).

Kepemilikan Saham
Share Ownership

Tidak memiliki
Does not hold any shares in the Company



MARSETIO

Plt. Komisaris Utama/Komisaris Independen
(Berhenti menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023)
Acting President Commissioner/Independent Commissioner
(no longer served since February 22, 2023)

Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Domisili DKI Jakarta, Indonesia | Domicile in DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Place and Date of Birth/Age

Lahir di Jakarta, pada tahun 1956. Usia 66 tahun per Desember 2022.
Born in Jakarta in 1956. 66 years old as at December 2022.

Riwayat Pendidikan
Education History

- Akademi Angkatan Laut (1981).
- S1 bidang Fisip/ADNE, Universitas Wijaya Putra, Surabaya (1997).
- S2 bidang MNGT dari Universitas Wijaya Putra, Surabaya (2001).
- S3 bidang Ilmu Budaya dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2002).
- Naval Academy (1981).
- Bachelor's degree in Fisip/ADNE from Universitas Wijaya Putra, Surabaya (1997).
- Master's degree in MNGT from Universitas Wijaya Putra, Surabaya (2001).
- Doctorate in in Cultural Studies from Gadjah Mada University, Yogyakarta (2002).

Sertifikasi
Certification

-

Pengalaman Kerja
Work Experience

- Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia (2012-2014).
- Guru Besar Bidang Ilmu Budaya Teknologi Kemaritiman di Universitas Pertahanan Indonesia (2018–sekarang).
- Penasihat Khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim (2021–sekarang).
- Plt. Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021 – 2023).
- Chief of Staff of the Indonesian Navy (2012-2014).
- Professor of Maritime Technology Cultural Sciences at Universitas Pertahanan Indonesia (2018–present).
- Special Advisor to the Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment in the Maritime Defense and Security Sector (2021–present).
- Independent Commissioner/Acting President Commissioner Pelindo (2021 – 2023).

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment

- Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-335/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
- Diangkat sebagai Plt. Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-335/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
- Appointed for the first time as Independent Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-335/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
- Appointed as Plt. The President Commissioner based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-335/ MBU/10/2021 dated October 1, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Periode Menjabat
Term of Office

1 Oktober 2021 – 22 Februari 2023 (Periode Pertama).
October 1, 2021 – February 22, 2023 (First Period).

Jabatan Rangkap
Concurrent Positions

- Guru Besar Bidang Ilmu Budaya Teknologi Kemaritiman di Universitas Pertahanan Indonesia (2018–sekarang).
- Penasihat Khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim (2021–sekarang).
- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Pelindo (2021–sekarang).
- Professor of Maritime Technology Cultural Sciences at Universitas Pertahanan Indonesia (2018–present).
- Special Advisor to the Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment in the Maritime Defense and Security Sector (2021–present).
- Chairman of the Nomination and Remuneration Committee Pelindo (2021–present).

Kepemilikan Saham
Share Ownership

Tidak memiliki
Does not hold any shares in the Company



ANTONIUS RAINIER HARYANTO

Komisaris Independen
(Berhenti menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023)
Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Domisili DKI Jakarta, Indonesia | Domicile in DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Place and Date of Birth/Age

Lahir di Jakarta, pada tahun 1978. Usia 44 tahun per Desember 2022.
Born in Jakarta in 1978. 44 years old as at December 2022.

Riwayat Pendidikan
Education History

- S1 bidang Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung (2001).
- S2 bidang Teknik Manajemen Lingkungan dari University of New South Wales Sydney (2003).
- Bachelor's degree in Civil Engineering from Universitas Katolik Parahyangan Bandung (2001).
- Master's degree in Environmental Management Engineering from University of New South Wales Sydney (2003).

Sertifikasi
Certification

- *Charter Profesional Engineer*
- PMP
- IPM
- *Fellow Engineers Australia*

Pengalaman Kerja
Work Experience

- Direktur (*Part time*) PT Deloitte Consulting Indonesia (Januari–April 2020).
- Direktur program di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2015–Juli 2019).
- Direktur Transformasi Bisnis PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika) IHC (24 Juni 2020–9 Juni 2021).
- Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021).
- Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (11 Juni 2021–sekarang).
- Director (Part time), PT Deloitte Consulting Indonesia (January–April 2020).
- Director program at the Coordinating Ministry for Economic Affairs (June 2015–July 2019).
- Director of Business Transformation, PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika) IHC (June 24, 2020–June 9, 2021).
- Independent Commissioner, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021).
- Independent Commissioner, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (June 11, 2021–present).

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II No. SK-192/MBU/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Appointed for the first time as Independent Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) based on Minister of SOEs PT Pelabuhan Indonesia II GMS Decree No. SK-192/MBU/06/2021 dated June 11, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Periode Menjabat
Term of Office

11 Juni 2021–22 Februari 2023 (Periode Pertama).
June 11, 2021–February 22, 2023 (First Period).

Jabatan Rangkap
Concurrent Positions

- *Head of Strategic Delivery Unit*, Kementerian BUMN (1 April 2021– sekarang).
- Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Pelindo (2021-sekarang).
- Head of Strategic Delivery Unit, Ministry of SOEs (April 1, 2021–present).
- Member of GCG and Risk Management Monitoring Committee (2021-present).

Kepemilikan Saham
Share Ownership

Tidak memiliki
Does not hold any shares in the Company



Jodi Mahardi
Komisaris
Commissioner

Agus Suhartono
Komisaris Utama
President Commissioner

Didi Sumedi
Komisaris
Commissioner



Arif Toha Tjahjagama
Komisaris
Commissioner

Muchtar Luthfi Mutty
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Heru Sukanto
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Sudung Situmorang
Komisaris
Commissioner

INFORMASI PERIODE JABATAN KOMISARIS INDEPENDEN

Tidak terdapat Komisaris Independen yang menjabat lebih dari 2 (dua) periode, sehingga tidak terdapat pernyataan Independensi Komisaris Independen.

INFORMATION ON THE INDEPENDENT COMMISSIONERS' TERM OF OFFICE

There are no independent commissioners who have served more than 2 (two) periods so there is no statement of independence from the Independent Commissioners

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS' AFFILIATED RELATIONSHIPS

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Affiliated Relationships

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris Board of Commissioners' Financial, Familial and Management Relationships					
		Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationships with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Agus Suhartono	Komisaris Utama President Commissioner		√		√		√
Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner		√		√		√
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner		√		√		√
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner		√		√		√
Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner		√		√		√
Arif Toha Tjahjagama	Komisaris Commissioner		√		√		√
Marsetio*	Komisaris Independen Independent Commissioner		√		√		√
Antonius Rainier Haryanto*	Komisaris Commissioner		√		√		√
Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner		√		√		√

*Berhenti menjabat sejak 22 Februari 2023.
*Stop serving since February 22, 2023.

	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris Board of Commissioners' Financial, Familial and Management Relationships							
	Hubungan Keluarga Dengan Familial Relationships with						Hubungan Kepengurusan Management Relationships	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder			
	Ya Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** **Yes**	**Tidak** **No**
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Komposisi Dewan Komisaris telah terjadi beberapa perubahan sesuai dengan kebutuhan Pemegang Saham sebagaimana penjelasan berikut:

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 1 JANUARI 2022 – 20 SEPTEMBER 2022

Komposisi Dewan Komisaris periode 1 Januari 2022 sampai dengan 20 September 2022 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Plt. Komisaris Utama/Komisaris Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Pelindo. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERSHIP COMPOSITION AND REASONS FOR THE CHANGES

The composition of Board of Commissioners has undergone several changes according to the needs of the Shareholders as explained below:

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION FOR THE PERIOD JANUARY 1, 2022 – SEPTEMBER 20, 2022

The Board of Commissioners composition for the period January 1, 2022 to September 20, 2022 consisted of 7 (seven) people, including 1 (one) Acting President Commissioner/Independent Commissioner, 3 (three) Independent Commissioners, and 3 (three) Commissioners. All Commissioners were domiciled in the Pelindo II Head Office working area. The Board of Commissioners composition and basis of appointment of can be seen in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 1 Januari 2022-20 September 2022
Board of Commissioners Composition and Basis of Appointment for the period January 1, 2022-September 20, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Marsetio	Komisaris Independen (Plt. Komisaris Utama) Independent Commissioner (Acting President Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-335/MBU/10/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-335/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-26/MBU/01/2018 Minister of SOEs Decree No. SK-26/MBU/01/2018	22 Januari 2018 January 22, 2018
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/MBU/06/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-192/MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021
Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/MBU/06/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-192/MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021
Antonius Rainier Haryanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/MBU/06/2021 Minister of SOEs Decree No. No. SK-192/MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-335/MBU/10/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-335/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-396/MBU/12/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-396/MBU/12/2021	9 Desember 2021 December 9, 2021

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 20 SEPTEMBER 2022 – 22 FEBRUARI 2023

Pada tanggal 20 September 2022 Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memutuskan memberhentikan dengan hormat R. Agus H. Purnomo sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) serta mengangkat Arif Toha Tjahjagama sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris periode 20 September 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Plt. Komisaris Utama/Komisaris Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Pelindo. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION FOR THE PERIOD SEPTEMBER 20, 2022 - FEBRUARY 22, 2023

On September 20, 2022 the Ministry of SOES at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) GMS honorably dismissed R. Agus H. Purnomo as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), and appoint Arif Toha Tjahjagama as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Thereby, the Board of Commissioners composition for the period September 20, 2022 to December 31, 2022 comprised 7 (seven) people consisting of 1 (one) Acting President Commissioner/Independent Commissioner, 3 (three) Independent Commissioners and 3 (three) Commissioners. All members of the Board of Commissioners are domiciled in the working area of the Pelindo Head Office. The composition and basis for the appointment of the Board of Commissioners can be seen in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 20 September 2022–22 Februari 2023
Board of Commissioners Composition and Basis of Appointment for the period September 20, 2022-February 22, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Marsetio	Komisaris Independen (Plt. Komisaris Utama) Independent Commissioner (Acting President Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-335/MBU/10/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-335/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/MBU/06/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-192/MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021
Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/MBU/06/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-192/MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021
Arif Toha Tjahjagama	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-206/MBU/09/2022 Minister of SOEs Decree No. SK-206/MBU/09/2022	20 September 2022 September 20, 2022
Antonius Rainier Haryanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/MBU/06/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-192/MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-335/MBU/10/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-335/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-396/MBU/12/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-396/MBU/12/2021	9 Desember 2021 December 9, 2021

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 22 FEBRUARI 2023 – 19 MEI 2023

Pada tanggal 22 Februari 2023 Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memutuskan memberhentikan dengan hormat Marsetio sebagai Komisaris Independen (Plt. Komisaris Utama) dan Antonius Rainier Haryanto sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Kemudian, Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) juga memutuskan untuk mengangkat Jodi Mahardi sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris periode 22 Februari 2023 sampai dengan 19 Mei 2023 sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Plt. Komisaris Utama/Komisaris, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Pelindo. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS OF PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIOD OF FEBRUARY 22, 2023 – MAY 19, 2023

On February 22, 2023 the Ministry of SOE as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) decided to honorably dismiss Marsetio as Independent Commissioner (Acting Commissioner) and Antonius Rainier Haryanto as Independent Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Then, the Ministry of SOE as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) also decided to appoint Jodi Mahardi as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Thus, the composition of Board of Commissioners for the period of February 22, 2023 to May 19, 2023 was 6 (six) people consisting of 1 (one) Acting President Commissioner/Commissioner, 2 (two) Independent Commissioners and 3 (three) Commissioners. All Board of Commissioners members are domiciled in the working area of the Pelindo Head Office. The composition and basis for appointment of Board of Commissioners can be seen in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 22 Februari 2023 – 19 Mei 2023
Composition and Basis of Appointment of Board of Commissioners for the Period of February 22, 2023 – May 19, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Executor	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Sudung Situmorang	Komisaris (Plt. Komisaris Utama) Commissioner (Acting President Commissioner)	Kementerian BUMN Ministry of SOE	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/MBU/06/2021 Decree of the Minister of SOE No. SK-206/MBU/09/2022	11 Juni 2021 June 11, 2021
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOE	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/MBU/06/2021 Decree of the Minister of SOE No. SK-192/MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021
Arif Toha Tjahjagama	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOE	Keputusan Menteri BUMN No. SK-206/MBU/09/2022 Decree of the Minister of SOE No. SK-206/MBU/09/2022	20 September 2022 September 20, 2022
Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOE	Keputusan Menteri BUMN No. SK-34/MBU/02/2023 Decree of the Minister of SOE No. SK-34/MBU/02/2023	22 Februari 2023 February 22, 2023
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOE	Keputusan Menteri BUMN No. SK-335/MBU/10/2021 Decree of the Minister of BUMN No. SK-335/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOE	Keputusan Menteri BUMN No. SK-396/MBU/12/2021 Decree of the Minister of SOE No. SK-396/MBU/12/2021	9 Desember 2021 December 9, 2021

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 19 MEI 2023 – SAAT INI

Pada tanggal 19 Mei 2023 Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memutuskan untuk mengangkat Agus Suhartono sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris periode 19 Mei 2023 sampai dengan saat ini sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Pelindo. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS OF PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIOD OF MAY 19, 2023 – PRESENT

On May 19, 2023 the Ministry of SOE as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) decided to appoint Agus Suhartono as President Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Thus, the composition of Board of Commissioners for the period of May 19, 2023 to date is 7 (seven) people consisting of 1 (one) President Commissioner, 2 (two) Independent Commissioners and 4 (four) Commissioners. All Board of Commissioners members are domiciled in the working area of Pelindo Head Office. The composition and basis for appointment of Board of Commissioners can be seen in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 19 Mei 2022 – Saat ini
Composition and Basis for Appointment of Board of Commissioners for the Period of May 19, 2022 – Present

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Executor	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Agus Suhartono	Komisaris Utama President Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOE	Keputusan Menteri BUMN No. SK-101/MBU/05/2023 Decree of the Minister of SOE No. SK-101/MBU/05/2023	19 Mei 2023 May 19, 2023
Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOE	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/MBU/06/2021 Decree of the Minister of SOE No. SK-192/MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOE	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/MBU/06/2021 Decree of the Minister of SOE No. SK-192/MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021
Arif Toha Tjahjagama	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOE	Keputusan Menteri BUMN No. SK-206/MBU/09/2022 Decree of the Minister of SOE No. SK-206/MBU/09/2022	20 September 2022 September 20, 2022
Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOE	Keputusan Menteri BUMN No. SK-34/MBU/02/2023 Decree of the Minister of SOE No. SK-34/MBU/02/2023	22 Februari 2023 February 22, 2023
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOE	Keputusan Menteri BUMN No. SK-335/MBU/10/2021 Decree of the Minister of SOE No. SK-335/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOE	Keputusan Menteri BUMN No. SK-396/MBU/12/2021 Decree of the Minister of SOE No. SK-396/MBU/12/2021	9 Desember 2021 December 9, 2021

PROFIL PEKERJA
Employee Profiles

JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NUMBER OF EMPLOYEES BY GENDER

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin
Number of Employees by Gender

(dalam satuan orang) (people)

Jenis Kelamin Gender	2022	2021
Pria Male	5.879	6.061
Wanita Female	1.325	1.309
Jumlah Total	**7.204**	**7.370**

JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN LEVEL JABATAN

NUMBER OF EMPLOYEES BY POSITION LEVEL

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Level Jabatan
Number of Employees by Position Level

(dalam satuan orang) (people)

Level Jabatan Position Level	2022	2021
1	9	9
2	41	43
3	67	90
4	117	130
5	131	138
6	275	273
7	356	379
8	415	409
9	553	594
10	1.103	784
11	1.091	1.141
12	1.067	793
13	795	1.006
14	415	802
15	158	161
16	156	157
17	117	118
18	127	127

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Level Jabatan
Number of Employees by Position Level

(dalam satuan orang) (people)

Level Jabatan Position Level	2022	2021
19	209	214
20	2	2
Jumlah Total	**7.204**	**7.370**

JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN GOLONGAN

NUMBER OF EMPLOYEES BY POSITION LEVEL

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Golongan
Number of Employees by Rank

(dalam satuan orang) (people)

Level Jabatan Position Level	2022	2021
IA	549	331
IIA	252	120
IIB	469	650
IIC	603	99
IID	706	416
IIIA	927	345
IIIB	1.066	418
IIIC	884	1.808
IIID	592	1.577
IVA	390	435
IVB	259	488
IVC	244	411
IVD	183	220
IVE	80	52
Jumlah Total	**7.204**	**7.370**

JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN RENTANG USIA

NUMBER OF EMPLOYEES BY AGE GROUP

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Rentang Usia
Number of Employees by Age Group

(dalam satuan orang) (people)

Level Jabatan Age Group	2022	2021
Di atas 55 tahun Above 55 years old	204	96
51 – 55 tahun/years old	845	1.066
46 – 50 tahun/years old	1.407	1.428

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Rentang Usia
Number of Employees by Age Group

(dalam satuan orang) (people)

Level Jabatan Age Group	2022	2021
36 – 45 tahun/years old	2.557	2.303
26 – 35 tahun/years old	2.168	2.273
Di bawah 26 tahun Under 26 years old	23	204
Jumlah Total	**7.204**	**7.370**

JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NUMBER OF EMPLOYEES BY AGE GROUP

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Number of Employees by Education Level

(dalam satuan orang) (people)

Level Jabatan Education Level	2022	2021
Pascasarjana Postgraduate	886	987
Sarjana Bachelor's degree	3.342	4.019
Sarjana Muda Baccalaureate	1.047	2.179
SLTA High School	1.925	176
SLTP Junior High School	4	9
Jumlah Total	**7.204**	**7.370**

JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON EMPLOYMENT STATUS

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian
Number of Employees Based on Employment Status

(dalam satuan orang) (people)

Status Kepegawaian Employment Status	2022	2021
Organik Organic	7.204	7.370
Non-Organik Non-Organic	16.169	15.580
Jumlah Total	**23.373**	**22.950**

Informasi mengenai kebijakan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pekerja terkait pelatihan, biaya pelatihan dan rencana pelatihan tahun 2023 disampaikan pada Bab Sumber Daya Manusia.

Information regarding the policy of providing equal opportunity to all employee regarding training, training costs and training plans for 2023 is presented in the Human Resources.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
Composition of Shareholders

Komposisi Pemegang Saham disajikan sebagai berikut:

The shareholder composition is as follows:

Tabel Komposisi Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) per 1 Januari 2022
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Shareholder Composition per January, 1 2022

Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham (lembar) Total Shares	Nominal (Rp) Nominal (Rp)	Kepemilikan Ownership
Negara Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	8.475.067	8.475.067.000.000	100%

Tabel Komposisi Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) per 31 Desember 2022
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Shareholder Composition per December, 31 2022

Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham (lembar) Total Shares	Nominal (Rp) Nominal (Rp)	Kepemilikan Ownership
Negara Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	40.575.584	40.575.584.000.000	100%

Per 31 Desember 2022, tidak terdapat kepemilikan saham institusi lokal, kepemilikan institusi asing, kepemilikan individu lokal, dan kepemilikan individu asing.

As of December 31, 2022, there were no local institutional ownership, foreign institutional ownership, local individual ownership, and foreign individual ownership.

KOMPOSISI 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

Sampai dengan 31 Desember 2022, Pelindo merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai komposisi 20 (dua puluh) pemegang saham terbesar.

COMPOSITION OF THE 20 LARGEST SHAREHOLDERS

As of December 31, 2022, Pelindo as a State-Owned Enterprise is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, there is no information to report on the composition of the 20 (twenty) largest shareholders.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM 5% ATAU LEBIH

Sampai dengan 31 Desember 2022, Pelindo merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Informasi mengenai komposisi pemegang saham 5% atau lebih Perseroan telah dijelaskan pada uraian komposisi pemegang saham.

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS WITH 5% OR MORE SHARE OWNERSHIP

As of December 31, 2022, Pelindo as a State-Owned Enterprise is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. Information regarding the composition of shareholders of 5% or more of the Company has been explained in the description of the composition of shareholders.

KOMPOSISI KELOMPOK PEMEGANG SAHAM KURANG DARI 5%

Sampai dengan 31 Desember 2022, Pelindo merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Informasi mengenai komposisi pemegang saham 5% atau lebih Perseroan telah dijelaskan pada uraian komposisi pemegang saham.

COMPOSITION OF THE SHAREHOLDER GROUPS WITH LESS THAN 5% SHARE OWNERSHIP

As of December 31, 2022, Pelindo as a State-Owned Enterprise is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. Information regarding the composition of shareholders of 5% or more of the Company has been explained in the description of the composition of shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN MANAJEMEN

Sampai dengan 31 Desember 2022, Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen Pelindo tidak mempunyai kepemilikan saham atas Pelindo. Kepemilikan saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia 100%. Dengan demikian, Pelindo tidak menyajikan menyajikan rincian anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang memiliki saham langsung maupun tidak langsung.

BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP

As of December 31, 2022, The Board of Commissioners, Board of Directors and Management of Pelindo do not own any shares in Pelindo. 100% of the shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia. So Pelindo does not report details of members of the Board of Directors or Board of Commissioners who own shares directly or indirectly.

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Majority and Controlling Shareholder

Kepemilikan saham mayoritas Pelindo dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 100%. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Pelindo adalah Negara Republik Indonesia sehingga tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung, sampai kepada pemilik individu serta tidak terdapat Pemegang Saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain.

The majority share ownership of Pelindo is the Government of the Republic of Indonesia with 100% share ownership. Thus, the Majority and Controlling Shareholders of Pelindo is the Government of the Republic of Indonesia, and there is no indirect Majority and Controlling Shareholders, down to individual owners and there are no Shareholders acting on behalf of other shareholders.




PORT OF SORONG
ORIENTAL GOLD

DAFTAR ENTITAS ANAK, PERUSAHAAN ASOSIASI DAN PERUSAHAAN VENTURA BERSAMA

List of Subsidiaries, Associate Companies and Joint Venture Companies

SUBHOLDING

SUBHOLDING

No	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address
1.	PT Pelindo Terminal Petikemas	Bongkar Muat Petikemas Loading and Unloading Containers	Pelindo Place Office Tower, Jl. Perak Timur No. 610 Surabaya Jawa Timur 60165 Telp: (031) 3298631 – 37 Fax: - Email: info.tpk@pelindo.co.id Web: pelindotpk.co.id
2	PT Pelindo Multi Terminal	Operator Terminal Multipurpose Multipurpose Terminal Operator	Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1, Belawan - Medan 20411 Telp: (061) 4100 0055 Fax: - Email: plmt@pelindomultiterminal.co.id Web: pelindomultiterminal.co.id
3	PT Pelindo Solusi Logistik	Logistik & *Hinterland Development* Logistics & Hinterland Development	Pelindo Tower, 15th Floor Jl. Yos Sudarso No 9, Kec. Koja Jakarta Utara 14230, Indonesia Telp: (021) 50918800 Fax: - Email: infosolusilogistik@pelindo.co.id Web: pelindosolusilogistik.co.id
4	PT Pelindo Jasa Maritim	*Marine, equipment* dan *port services* (pengerukan, energi dan utilitas) Marine, Equipment and Port Services (Dredging, Energy and Utilities)	Jl. Soekarno No. 1, Makassar 90173, Sulawesi Selatan Telp: (0411) 3616-549 ext. 6204 Fax: - Email: sekper.jasamaritim@pelindo.co.id Web: jasamaritim.co.id

	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset Total Assets
	• PT Pelindo (Persero) 99,997% • PT ILCS 0,003 %	2013	Beroperasi Operational	Rp14.986.840.229
	• PT Pelindo (Persero) 99,988% • PT ILCS 0,012 %	2021	Beroperasi Operational	Rp4.363.815.354
	• PT Pelindo (Persero) 99,9878% • PT ILCS 0,0036% • PT PII 0,0086%	2012	Beroperasi Operational	Rp19.141.172.800
	• PT Pelindo (Persero) 99,995% • PT ILCS 0,005%	2021	Beroperasi Operational	Rp4.810.657.731

ENTITAS ANAK

SUBSIDIARIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address
1	PT Prima Multi Terminal	Bongkar muat petikemas dan nonpetikemas (curah cair, curah kering, *general cargo*) Non-Container Loading and Unloading (liquid bulk, dry bulk, general cargo)	Jl. Pelabuhan No. 1 Kuala Tanjung Kec. Sei Suka Kab. Batubara Sumatera Utara 21657 Telp: (0622) 5341871Fax: - Email: corp@ktmt.co.id Web: www.primamultiterminal.co.id
2	PT Prima Husada Cipta Medan	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Klinik, dan Apotik Health Services for Hospitals, Clinics, and Pharmacies	Jl. Stasiun No. 92 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan, 20411 Telp: (061) 6941927 Fax: - Email: ptphcm@gmail.com Web: www.phcm.co.id
3	PT Pelabuhan Indonesia Investama	Perusahaan Investasi Kepelabuhanan Port Investment Company	Pelindo Tower Lt 11 Jl. Yos Sudarso No. 9, Koja, Jakarta Utara Telp: (021) 4301080 Fax: - Email: corsec@ipc-investco.com Web: www.ipc-investco.com
4	PT Integrasi Logistik Cipta Solusi	Teknologi Informasi Kepelabuhanan Port Information Technology	Pelindo Tower Lt 11 Jl. Yos Sudarso No.9, RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 Telp: (021) 80678250 Fax: - Email: customercare@ilcs.co.id Web: www.ilcs.co.id
5	PT Electronic Data Interchange Indonesia	• Jasa Konsultasi & Pengembangan Teknologi Informasi • Product & Project IT sektor Government • Product & Project IT sektor Private • Product & Project IT sektor BUMN • Mass IT Product • Jasa Infrastruktur IT • Information Technology Consulting • & Development Services • Government Product & Project IT • sector • Private IT products & projects • sector • SOE IT products & projects sector • Mass IT Products • IT Infrastructure Services	Wisma SMR Lantai 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Sunter, Jakarta Utara, 14360, Telp: (021) 650 5829 Fax: (021) 650 5987 Email: corporate@edi-indonesia.co.id Web: www.edi-indonesia.co.id

	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (dalam ribuan) Total Assets (in thousands)
	• PT Pelindo (Persero): 97,73% • PT PP (Persero) Tbk: 1,26% • PT Waskita Karya (Persero) Tbk: 1,01%	2019	Beroperasi Operational	Rp3.709.609.712
	• PT Pelindo (Persero): 99,69% • Koperasi Karyawan Kantor Pusat Pelindo I: 0,31%	2016	Beroperasi Operational	Rp57.903.895
	• PT Pelindo (Persero): 99,00% • PT Multi Terminal Indonesia: 1,00%	2017	Beroperasi Operational	Rp1.080.222.875
	• PT Pelindo (Persero): 99,00% • PT Pengembang Pelabuhan Indonesia: 1,00%	2012	Beroperasi Operational	Rp248.686.477
	• PT Pelindo (Persero): 51,00% • PT Sisindokom Teknologi: 49,00%	1995	Beroperasi Operational	Rp70.583.029.402

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address
6	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	• Jasa Konsultasi & Pengembangan Teknologi Informasi • *Product & Project* IT sektor *Government* • *Product & Project* IT sektor *Private* • *Product & Project* IT sektor BUMN • *Mass* IT *Product* • Jasa Infrastruktur IT • Information Technology Consulting & Development Services • Government Product & Project IT sector • Private IT products & projects sector • SOE IT products & projects sector • Mass IT Products • IT Infrastructure Services	Jl. Beringin I No. 1 Pandansari Gadog Kec. Ciawi - Kab. Bogor Jawa Barat 16720 Telp: (0251) 7555622/614 Marketing: 08111444601 Fax: - Email: marketing@pmli.co.id (Marketing), corpsec@pmli.co.id (Corporate Secretary) Web: www.pmli.co.id
7	PT Pelindo Daya Sejahtera	• Layanan Jasa Tenaga Kerja (alih daya, pemborongan, harian lepas) • Layanan Asesmen, Pelatihan dan Konsultasi (asesmen, psikotes, rekrutmen, sertifikasi, pelatihan, *e-learning*) • Layanan Pendukung Bisnis (sistem perparkiran, jasa kebersihan, jasa pertamanan) • Manpower Services (Outsourcing,Chartering, Freelance Daily) • Assessment, Training and Consulting Services Assessment, Psychological Test, Recruitment, Certification, Training, E-Learning • Business Support Services Parking System, Cleaning Service, Landscaping Service	Jl. Perak Timur 620, Surabaya Telp: 08113311711 Fax: - Email: tata.usaha@ptpds.co.id, marketing@ptpds.co.id Web: www.ptpds.co.id
8	PT Jakarta International Container Terminal	Pelayanan jasa terminal bongkar muat barang dan petikemas serta kegiatan yang berhubungan dengan konsolidasi dan distribusi barang Terminal Services for Loading and Unloading Goods and Containers and Activities related to the Consolidation and Distribution of Goods	Jl. Sulawesi Ujung No. 1 Tanjung-Priok Jakarta 14310 Telp: (021) 80678100 Faks: (021) 80678111 Email: corsec@jict.co.id Web: www.jict.co.id

	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (dalam ribuan) Total Assets (in thousands)
	• PT Pelindo (Persero): 99,00% • PT Pelabuhan Indonesia Investama: 1,00%	2013	Beroperasi Operational	Rp143.454.729
	• PT Pelindo (Persero): 90,00% • Koperasi Pegawai Pelindo III: 10,00%	2014	Beroperasi Operational	Rp284.695.735
	• PT Pelindo (Persero): 51,00% • Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd.: 48,90% • Koperasi Pegawai Maritim Tj. Priok: 0,10%	1999	Beroperasi Operational	Rp17.012.274.582.999

ENTITAS CUCU

SUBSIDIARIES OF SUBSIDIARIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address
1.	PT IPC Terminal Petikemas	Terminal Petikemas dan Konvensional Container and Conventional Terminal	Jl. Raya Pelabuhan, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310 Telp: (021) 4301080, 4003899/77 Fax: - Email: - Website: www.iptpk.co.id
2	PT Prima Terminal Petikemas	Terminal Petikemas (Jasa Kepelabuhanan/ BUP) Container Terminal (Port Services/ BUP)	Graha Pelindo Satu Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Telp: (061) 41000055 ext. 2216 Fax: - Email: prima@primatpk.com Web: www.primatpk.com
3	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	Terminal Petikemas (Jasa Kepelabuhanan/ BUP) Container Terminal (Port Services/ BUP)	Jl. Perak Barat 379, Surabaya Telp: (031) 3291596 – 97 Fax: - Email: info@bjtiport.co.id Web: www.bjtiport.co.id
4	PT Terminal Petikemas Surabaya	Terminal Petikemas Container Terminal	Jl. Tanjung Mutiara No. 1 Surabaya 60177 Customer Service: (031) 3202020 Humas: 031-3283269 Email: cs@tps.co.id, humas@tps.co.id Web: www.tps.co.id
5	PT Terminal Teluk Lamong	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut Marine Port Service Activities	Jl. Raya Tambak Osowilangun KM 12 Surabaya 60191 Telp: (031) 99001500 Fax: (031) 99001490 Email: terminal@teluklamong.co.id Web: www.teluklamong.co.id
6	PT Kaltim Kariangau Terminal	Pelayanan jasa terminal bongkar muat barang dan petikemas serta kegiatan yang berhubungan dengan konsolidasi dan distribusi barang Terminal Services for loading and unloading goods and containers and activities related to the consolidation and distribution of goods	Jl. Pulau Balang No. 1 KM. 13 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, Balikpapan Telp: 08115377044 Fax: - Email: callcenter@kariangauterminal.co.id Web: www.kariangauterminal.co.id
7	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Bongkar muat nonpetikemas (curah cair, curah kering, *general cargo*) Loading and unloading of containers and non-containers (liquid bulk, dry bulk, general cargo)	Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok - Jakarta Utara Telp: (021) 4301080Fax: - Email: ptpmultipurpose@ptp.co.id Web: www.ptp.co.id
8	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	Bongkar muat khusus kendaraan, alat berat, *sparepart* Non-Container Loading and Unloading (liquid bulk, dry bulk, general cargo)	Jl. Sindang Laut No. 100 Cilincing Jakarta Utara Telp: (021) 43932251 Fax: (021) 43932250 Email: indo@indonesiacarterminal.co.id Web: www.indonesiacarterminal.co.id
9	PT Terminal Curah Semarang	Terminal dan Persewaan Tangki Curah Cair Liquid Bulk Tank Terminal and Rental	Jl. Deli No. 8 Pelabuhan, Tj. Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang 50249 Telp: (024) 86578169 Fax: - Email: - Web: -

	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (dalam ribuan) Total Assets (in thousands)
	• PT Pelindo Terminal Petikemas: 99,00% • PT Pelabuhan Indonesia Investama:1,00%	2013	Beroperasi Operational	Rp1.504.153.461
	• PT Pelindo Terminal Petikemas: 99,70% • PT Integrasi Logistik Cipta Solusi: 0,30%	2021	Beroperasi Operational	Rp3.122.467.975
	• PT Pelindo Terminal Petikemas: 96,84% • Koperasi Pegawai Pelindo III: 3,16%	2002	Beroperasi Operational	Rp5.065.796.064
	• PT Pelindo Terminal Petikemas: 99,50% • Koperasi Pegawai Pelindo III: 0,50%	1999	Beroperasi Operational	Rp2.444.133.472
	• PT Pelindo Terminal Petikemas: 99,50% • Koperasi Pegawai Pelindo III: 0,50%	2014	Beroperasi Operational	Rp767.808.714
	• PT Pelindo Terminal Petikemas: 50,00% • Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya: 50,00%	2012	Beroperasi Operational	Rp193.975.904
	• PT Pelindo Multi Terminal: 99,00% • PT Pelabuhan Indonesia Investama: 1,00%	2013	Beroperasi Operational	Rp1.246.531.962
	• PT Pelindo Multi Terminal: 71,28% • PT Pelabuhan Indonesia Investama: 5,54% • PT Multi Terminal Indonesia: 0,72% • Publik: 22,46%	2012	Beroperasi Operational	Rp2.191.828.374
	PT Pelindo Multi Terminal: 100%	2016	Beroperasi Operational	Rp847.345.125

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address
10	PT Prima Pengembang Kawasan	• *Real Estate* • Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis • Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi • Konstruksi • Informasi dan komunikasi • Pengangkutan dan pergudangan • Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin • Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor • Real Estate • Scientific and technical professional activities water management, waste water management, waste recycling management and remedial activities • Construction • Information and communication • Transportation and warehousing • Procurement of electricity, gas, steam/ hot water and cold air • Wholesale and retail trade, repair and maintenance of cars and motorcycles	Graha Pelindo Satu Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan 20411 Telp: (061) 6628088 Fax: Email: primakawasan@ptppk.co.id Web: -
11	PT Prima Indonesia Logistik	Pengusahaan kegiatan bisnis logistik Logistics business activities	Jl. Raya Pelabuhan, Pos II Road VI, Ujung Baru Belawan Telp: 081397512125 Fax: (061) 6940113 Email: andilesmana@primaindonesialogistik.com, bisnislogistik@primaindonesialogistik.com Web: www.primaindonesialogistik.com
12	PT Multi Terminal Indonesia	Jasa logistik Logistics services	Jl. Pulau Payung No. 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara Telp: (021)-29104000 Fax: - Email: customercare.ipclogistic.co.id Web: www.ipclogistic.co.id
13	PT Nusantara Terminal Services	Perusahaan bongkar muat, usaha angkutan multimoda, trucking dan transportasi darat, project cargo marine services loading and unloading company, Multimodal transportation business, Trucking and land transportation, Project cargo marine services	Plasa Intan PT Pelindo (Persero) Lantai 1 Jl. H. I. A. Saleh Dg. Tompo No. 11, Makassar 90112 Telp: (0411) 3624453 Fax: (0411) 3624453 Email: pt.nts_makassar@yahoo.co.id, ptnts.memberofp4@gmail.com Web: -
14	PT Akses Pelabuhan Indonesia	Pengembangan jalan tol Toll road development	Maritime Tower Lantai 12 Jl. Yos Sudarso No. 9 Kec. Koja, Jakarta Utara 14230 Telp: (021) 6456310 Fax: - Email: adm.api@portaccess.co.id Web: www.portacsess.com/
15	PT Menara Maritim Indonesia	Properti, *real estate* Property, real estate	Maritime Tower Lt 8, Jalan Yos Sudarso No. 9, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara Telp: (021) 22444557 Fax: - Email: corporate@menara-maritim.co.id Web: -

	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (dalam ribuan) Total Assets (in thousands)
	• PT Pelindo Solusi Logistik: 90,00% • PT Prima Multi Terminal: 10,00%	2015	Beroperasi Operational	Rp902.349.549
	• PT Pelindo Solusi Logistik: 99,67% • Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Usaha TPK Kotamadya Medan: 0,33%	2015	Beroperasi Operational	Rp334.427.584
	• PT Pelindo Solusi Logistik: 99,00% • Koperasi Pegawai Maritim Tj. Priok: 1,00%	2002	Beroperasi Operational	Rp908.266.378
	• PT Pelindo Solusi Logistik: 99,16% • Koperasi Karyawan PT Pelabuhan Indonesia IV: 0,84%	2013	Beroperasi Operational	Rp92.070.639,-
	• PT Pelindo Solusi Logistik: 99,68% • PT Pelabuhan Tanjung Priok: 0,32%	2014	Beroperasi Operational	Rp12.501.172.605
	• PT Pelindo Solusi Logistik: 99,97% • PT Akses Pelabuhan Indonesia: 0,03%	2018	Beroperasi Operational	Rp988.433.484

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address
16	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	• *Equipment maintenance* • *Engineering project & consultancy* • *Equipment provider* • *Port equipment manufacture* • *Marine equipment maintenance* • *Spareparts & fuel supplies* • Equipment maintenance • Engineering project & consultancy • Equipment provider • Port equipment manufacture • Marine equipment • Maintenance • Spareparts & fuel supplies	Gedung Rukindo Lt. 4 Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur, Jakarta 14430 Telp: (021) 2243 4285 Fax: - Email: corpsec@jppi.co.id Web: www.ipcportequipment.co.id
17	PT Jasa Armada Indonesia Tbk	• Pelayanan jasa pandu • Pelayanan jasa tunda • Pelayanan jasa • Pengangkutan kapal • Pelayanan jasa pengelolaan kapal • Pilot services • Tug services • Services • Ship freight • Ship management services	Gedung Rukindo Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur, Jakarta 14430 Gedung Citra Towers North Tower Lantai 21 Jl. Benyamin Suaeb Kav. A6, Kemayoran, Jakarta 10630 Telp: (021) 4306789 Email: corsec@ipcmarine.co.id Web: www.ipcmarine.co.id
18	PT Energi Pelabuhan Indonesia	Pengelolaan utilitas yang meliputi ketenagalistrikan, kontraktor ketenagalistrikan, pelayanan air bersih dan pengelolaan limbah Utilities management including electricity, electricity contractors, clean water services and waste management	gedung PLN UP3 Tanjung Priok Jl. Yos Sudarso No. 30, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14320 Telp: (021) 4305047 Fax: (021) 4305052 Email: corsec@ecopowerport.co.id Web: www.ecopowerport.co.id
19	PT Pengerukan Indonesia	Pengerukan, reklamasi, galangan dan perbengkelan kapal Dredging, reclamation, shipbuilding And workshop	gedung PT Rukindo Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur, Jakarta 14430 Telp: (021) 4301380 Fax: - Email: corsec@rukindo.co.id, admin@rukindo.co.id Web: www.rukindo.co.id
20	PT Pelindo Marine Service	*Integrated marine services* dengan menyediakan ragam layanan maritim terintegrasi mulai dari jasa penundaan dan pemanduan kapal, pengerukan dan penyiapan lahan, manajemen alur pelayaran, logistik dan distribusi energi, hingga jaringan transportasi multimoda dan penanganan project cargo Integrated marine services providing integrated maritime services ranging from ship towing and pilotage services, dredging and land preparation, shipping channel management, logistics and energy distribution, to multimodal transportation networks and project cargo handling.	jl. Prapat Kurung Utara No. 58 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan Surabaya 60165 Telp: (031) 3282321, 3282278 Fax: - Email: info@pelindomarines.com Web: -
21	PT Equiport Inti Indonesia	Jasa perawatan dan pemeliharaan alat berat Heavy equipment maintenance and Maintenance services	jl. H. I. A. Saleh Dg Tompo No. 11 Makassar 90112 Telp: (0411) 8001649, 8002092 Fax: - Email: makassar.equiport@gmail.com Web: www.equiport.co.id

	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (dalam ribuan) Total Assets (in thousands)
	• PT Pelindo Jasa Maritim: 99,00% • PT Pelabuhan Indonesia Investama: 1,00%	2012	Beroperasi Operational	Rp227.340.887
	• PT Pelindo Jasa Maritim: 76,89% • PT Multi Terminal Indonesia: 0,11% • Publik: PT Pelabuhan Indonesia Investama 11,05%, Lain-lain11,80% • Treasury Stock: 0,15%	2012	Beroperasi Operational	Rp1.488.208.066
	• PT Pelindo Jasa Maritim: 55,00% • PT Haleyora Power: 45,00%	2013	Beroperasi Operational	Rp182.774.864
	• PT Pelindo Jasa Maritim: 99,91% • PT Pengembang Pelabuhan Indonesia: 0,09%	1983	Beroperasi Operational	Rp381.249.720
	• PT Pelindo Jasa Maritim: 98,23% • Koperasi Pegawai Pelindo III: 1,77%	2011	Beroperasi Operational	Rp2.135.806.427
	• PT Pelindo Jasa Maritim: 99,29% • Koperasi Karyawan PT Pelabuhan Indonesia IV: 0,71%	2012	Beroperasi Operational	Rp105.766.256

ENTITAS CICIT

SUBSIDIARIES OF SUBSIDIARIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address
1	PT New Priok Container Terminal 1	Pelayanan jasa terminal bongkar muat barang dan petikemas serta kegiatan yang berhubungan dengan konsolidasi dan distribusi barang Terminal services for loading and Unloading goods and containers, And activities related to the Consolidation and distribution of Goods	jl. Terminal Kalibaru Raya Kav. B No. 1 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Telp: (021) 29144888 Fax: (021) 29144888 Email: ccommercial@npct1.co.id Web: www.NPCT1.co.id
2	PT Berlian Manyar Sejahtera	Terminal nonpetikemas (jasa kepelabuhanan/bup) Non-container terminal (port Services/ bup)	**office** Gapura Surya Nusantara (GSN) Lt 2 Jl. Perak Timur 620, Surabaya Telp: (031)-99097788 Fax: - Email: office@bms.jiipe.co.id Web: www.jiipe.com **Port** Pelabuhan JIIPE Jl. Raya Manyar KM 11 Manyar - Gresik Jawa Timur
3	PT Pelindo Properti Indonesia	Pelaksana konstruksi, konstruksi bangunan komersial, konstruksi hotel, restoran dan bangunan serupa, konstruksi saluran air, pelabuhan, dam dan prasarana sumber daya air lainnya, konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara Construction, commercial building construction, hotel construction, restaurant and similar buildings, construction of waterways, ports, dams and other water resources infrastructure, road construction except flyovers, roads, railroads, and airport runways	jl. Perak Barat No. 379 RT. 02 RW. 03 Kel. Perak utara Kec. Pabean Cantian, Surabaya Telp: (031) 3568050 Fax: - Email: sekper@pelindoproperti.co.id Web: www.pelindoplace.com
4	PT Berkah Industri Mesin Angkat	*Port equipment services, heavy equipment services, general engineering,* dan *general supplier* Port equipment services, heavy equipment services, general engineering, and general supplier	jl. Perak Timur No. 428, Perak Utara, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya 60165 Telp: (031) 9909-3444 Fax: - Email: info@ptbima.id Web: www.ptbima.id
5	PT Lamong Energi Indonesia	Kelistrikan dan jasa penunjang lainnya (pengelola pembangkit listrik, penyedia tenaga listrik dan fasilitas yang berhubungan dengan kelistrikan serta utilitas di lingkungan pelabuhan dan kawasan industri) Electricity and other supporting Services (power plant managers, Providers of electricity and Facilities related to electricity And utilities	jl. Raya Tambak Osowilangon KM 12, Surabaya Telp: (031) 9900 1500 Fax: (031) 9900 1490 Email: info@lamongenergi.co.id Web: www.lamongenergi.co.id

	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (dalam ribuan) Total Assets (in thousands)
	• IPC TPK: 51% • Sea Terminal Management Service PTE.LTD: 49%	2016	Beroperasi Operational	US$255 Million
	• PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 60,00% • Usaha Era Pratama Indonesia: 40,00%	2016	Beroperasi Operational	Rp1.896.823.463
	• PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 99,93% • Koperasi Pegawai Pelindo III: 0,07%	2014	Beroperasi Operational	Rp198.356.022
	• PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 90,00% • Koperasi Pegawai Pelindo III: 10,00%	2015	Beroperasi Operational	Rp234.022.019
	• PT Terminal Teluk Lamong: 99% • Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia: 1%	2017	Beroperasi Operational	Rp189.725.126

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address
6	PT Prima Multi Peralatan	Layanan jasa pemeliharaan gedung, alat berat bongkar muat dan kapal. Layanan *engineering* mekanikal dan elektrikal. Building Maintenance Services, Loading and Unloading Heavy Equipment and Ships, Mechanical and Electrical Engineering Services	Jl. Beringin No. 88E Komplek Cemara Asri, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang 20371 Telp: 081262119880 Fax: - Email: info@p1-pmp.com Web: www.primamultiperalatan.com
7	PT Pelindo 3 Terminal Petikemas	Layanan bongkar muat pelabuhan Harbor loading and unloading services	Jl. Raya Manyar KM 11, Surabaya Telp: - Fax: - Email: - Web: -
8	PT Intan Sejahtera Utama	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (TKAD) Manpower Provider Services (TKAD)	Jl. H. I. A. Saleh Dg. Tompo No. 11, Makassar 90112 Telp: (0411) 8944074 Fax: - Email: intansejahterautam@gmail.com Web: -
9	PT Pelindo Energi Logistik	Jasa logistik baik bidang gas, Liquid/cair BBM dan Non-BBM, serta pengelolaan limbah Logistics Services for Gas, Liquid Fuel and Non-Fuel, as well as Waste Management	Jl. Prapat Kurung Utara No. 58 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan Surabaya 60165 Telp: (031) 328 4275 Fax: (031) 328 4456 Email: info@pel.co.id Web: www.pel.co.id
10	PT Alur Pelayaran Barat Surabaya	Jasa konstruksi bangunan pelabuhan dan dermaga, pengerukan dan penyiapan lahan Port and Wharf Construction Services, Dredging and Land Preparation	Jl. Prapat Kurung Utara No. 58 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan Surabaya 60165 Telp: (031) 3283971 Fax: (031) 3283972 Email: info@ptapbs.com Web: www.ptapbs.com
11	PT Berkah Multi Cargo	Usaha Logistik Multimoda: • Solusi Rantai Pasok Logistik • Angkutan Multimoda • Petikemas • Pengelolaan Pergudangan • *Project Cargo Handling* • Kepabeanan Angkutan Multimoda. Multimodal Logistics Business: • Supply Chain Logistics • Solutions - Multimodal • Transport • Containers • Warehousing Management • Project Cargo Handling • Multimodal Transport Customs.	Jl. Prapat Kurung Utara No. 58 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan Surabaya 60165 Telp: (031) 3282271 Fax: - Email: info@bmclogistic.co.id Web: www.pelindologistics.co.id

	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (dalam ribuan) Total Assets (in thousands)
	• PT Prima Indonesia Logistik: 99% • PT Prima Multi Terminal: 1%	2018	Beroperasi Operational	Rp67.893.872
	• PT Terminal Petikemas Surabaya: 99,00% • Koperasi Pegawai Pelindo III: 1,00%	2016	Tidak Beroperasi Not Operational	Rp675.207
	• PT Nusantara Terminal Services: 99,60% • PT Equipport Inti Indonesia: 0,40%	2019	Beroperasi Operational	Rp57.518.164
	• PT Pelindo Marine Service: 98,90% • PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 1,10%	2014	Beroperasi Operational	Rp611.636.947
	• PT Pelindo Marine Service: 93,00% • PT Gerbang Sarana Utama: 7,00%	2014	Beroperasi Operational	Rp555.094.927
	• PT Pelindo Marine Service: 99,80% • Koperasi Pegawai Pelindo III: 0,20%	2017	Beroperasi Operational	Rp117.567.958

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address
12	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	Badan Usaha Jalan Tol Toll Road Business Entity	Legalitas Domisili: Waskita Rajawali Tower Lantai 7 Jl. Mayor Jendral M. T. Haryono Kav. 12-13, Kel. Bidaracina, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur 13330 Alamat Korespondensi: Tamansari Hive Offive Building Lantai 6 Unit B Jl. Mayor Jenderal D. I. Panjaitan Kav. 2A, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur 13310. Telp: (021) 2286 4760 Fax: (021) 2286 4761 Email: ctptollways@gmail.com Web: www.ctptollways.co.id
13	PT Tanjung Emas Daya Sejahtera	Pengelolaan Jasa *Tally* Tally Service Management	Terminal Berlian Jl. Prapat Kurung Utara, Surabaya, 60165 Telp: (085331237838) Fax: - Email: tu@teds.co.id Web: www.teds.co.id

PERUSAHAAN ASOSIASI

ASSOCIATED COMPANIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address
1	PT Pelabuhan Patimban Internasional	Badan Usaha Pelabuhan, Pengelola Pelabuhan Patimban ref Terminal Kendaraan dan Terminal Petikemas Port Business Entity, Patimban Port Manager, Vehicle Terminal and Container Terminal	Menara Bank Mega, Lantai 24 Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790 Telp: (021) 79175533 Fax: (021) 79173300 Email: - Web: -
2	PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	Kawasan Industri, Pengadaan Listrik, Pengelolaan Air dan Limbah, Informasi dan Komunikasi Kawasan Industrial Estates, Electricity Procurement, Water and Waste Management, Regional Information and Communication	Jl. Raya Manyar KM. 11 – Manyar, Gresik Telp: (031) 98540999 Fax: (031) 98540998 Email: - Web: www.jiipe.com
3	PT Terminal Nilam Utara	Terminal dan Persewaan Tangki Curah Cair Liquid Bulk Tank Terminal and Rental	Jl. Nilam Utara No. 1, Pabean Cantian, Surabaya Telp: (031) 9909 4737 Fax: - Email: - Web: www.tnu.co.id

	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (dalam ribuan) Total Assets (in thousands)
	• PT Akses Pelabuhan Indonesia: 99,998% • PT Menara Maritim Indonesia: 0,002%	2021	Beroperasi Operational	Rp10.412.347.000.000
	• PT Pelindo Daya Sejahtera: 99,00% • Koperasi Pegawai Pelindo III: 1,00%	2014	Beroperasi Operational	Rp25.971.186

	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Pendirian Year of Operations	Status Operasi Status	Jumlah Aset Total Assets
	• PT Terminal Petikemas Surabaya: 10,00% • PT CT Corp Infrastruktur Indonesia: 37,00% • PT Indika Logistics and Support Services: 29,00% • PT U Connectivity Services: 29,00%	2021	Belum Beroperasi Not Yet Operational	-
	• PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 40,00% • PT Usaha Era Pratama Nusantara: 60,00%	Mulai Operasi secara Komersial pada tahun 2015 Commence Commercial Operations in 2015	Beroperasi Operational	Rp7.112.198.591.473
	• PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 40,00% • PT Andahanesa Abadi: 60,00%	2018	Beroperasi Operational	Rp392.373.648.758

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address
4	MKO Maspion Kendaraan Terminal Indonesia	Pelayanan Jasa Terminal Kendaraan Vehicle Terminal Services	Jl. Beta Kawasan Industri Maspion V, Manyarsidomukti, Manyar Sido Mukti, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik 61151 Telp: (031) 99006314, 39921490 Fax: - Email: info@maspioncarterminal.co.id, mko.mtki@gmail.com Facebook: Maspion Car Terminal Website: www.maspioncarterminal.co.id
5	PT Prima Tangki Indonesia	Jasa Sewa Tangki Timbun Storage Tank Rental Services	Jl. Rencong No. 1B, Pahlawan Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan 20233 Jl. Pelabuhan No. 3 Kuala Tanjung, Kec. Sei Suka, Kab. Batu bara 21257 Telp: (061) 4201 1470 Fax: - Email: Commercial@Primatangki.co.id Web: www.Primatangki.co.id
6	PT Jasamarga Bali Tol	Pengoperasian dan Pelayanan Jalan Tol Toll Road Operation and Service	Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 02, Pesanggaran Pedungan Denpasar Selatan Bali 80222 Telp: - Fax: - Email: - Web: -
7	PT Ambang Barito Nusapersada	Pengelolaan Alur Ambang Sungai Barito Barito River Threshold Management	Jl. Yos Sudarso No. 6 RT. 034/RW. 002 Telaga Biru, Banjarmasin Barat – Banjarmasin Telp: (0511) 4423345 Fax: (0511) 4423346 Email: - Web: www.ambapers.com
8	PT Lamong Nusantara Gas	Bisnis Bidang Logistik Baik Bidang Gas Logistics Business, in the Gas Sector	Kantor PGN Area Surabaya Lt. 4B Jl. Pemuda No. 56-58, Surabaya, 60271 Telp: (031) 5490555 Fax: - Email: info@ptlng.co.id Web: www.ptlng.co.id
9	PT Rumah Sakit Pelabuhan	Pelayanan Kesehatan Health services	Jl. Kramat Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14260 Telp: (021) 4403026 Fax: - Email: - Web: www.rspelabuhan.com
10	PT Pelindo Husada Citra	Pelayanan Kesehatan Health Services	Jl. Prapat Kurung Selatan No. 1 Tanjung Perak - Surabaya Telp: (031) 329 4801-3 Fax: (031) 329 4808 Email: - Web: www.phc.co.id
11	PT Prima Citra Nutrindo	Jasaboga Catering Services	Jl. Perak Barat No. 55, Surabaya Telp: (031) 99018755 Fax: Email: Web: www.pcn-food.com

	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Pendirian Year of Operations	Status Operasi Status	Jumlah Aset Total Assets
	• PT Indonesia Kendaraan Terminal: 45,00% • PT Maspion: 55,00%	2015	Beroperasi Operational	Rp3.048.669.251
	• PT Prima Indonesia Logistik: 20% • Charleston Logistic Pte Ltd: 49% • PT Tason Putra Mandiri: 22,80% • Tuan Gaotama Setiawan: 8,20%	2019	Beroperasi Operational	Rp196.490.516.635
	• PT Pelindo (Persero): 13,86% • PT Jasa Marga (Persero) Tbk: 64,44% • Pemerintah Provinsi Bali: 6,32% • Pemerintah Kabupaten Badung: 6,32% • PT Angkasa Pura I (Persero): 6,31% • PT Adhi Karya (Persero) Tbk: 0,79% • PT Hutama Karya (Persero): 0,79% • PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero): 0,79% • PT Wijaya Karya (Persero): 0,40%	2013	Beroperasi Operational	Rp1.827.452.099.164
	• PT Pelindo (Persero): 40,00% • PD Bangun Banua Kalimantan Selatan: 60,00%	2009	Beroperasi Operational	Rp133.854.826.759
	• PT Pelindo Energi Logistik: 49,00% • PT PGN LNG Indonesia: 51,00%	2019	Beroperasi Operational	Rp146.553.231.679
	• PT Pelindo (Persero) : 32,88% • Koperasi Pegawai Maritim Tj. Priok: 0,12% • PT Pertamina Bina Medika – IHC: 67,00%	1999	Beroperasi Operational	Rp572.443.946
	• PT Pelindo (Persero): 31,73% • PT Pertamina Bina Medika: 67,00% • Koperasi Pegawai Pelindo III: 1,27%	1999	Beroperasi Operational	Rp452.174.838
	• PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 30,00% • PT Pelindo Husada Citra: 70,00%	2016	Beroperasi Operational	Rp12.293.540.785

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	
12	PT Pertamina Bina Medika	Pelayanan Kesehatan Health Services	Jl. Kyaimaja No. 43 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 Telp: (021) 7219001 / (021) 7219299 Fax: Email: info.pbmihc@pertamedika.co.id Web: www.pertamedika.co.id	
13	PT Energi Manyar Sejahtera	Kelistrikan dan jasa penunjang lainnya (pengelola pembangkit listrik, penyedia tenaga listrik dan fasilitas yang berhubungan dengan kelistrikan serta konsultansi dan jasa pendukung bidang ketenagalistrikan) Electricity and other supporting services (power plant managers, providers of electricity and facilities related to electricity as well as consulting and supporting services in the electricity sector)	Perak Timur No. 246, Surabaya Telp: (031) 681169 Fax: Email: Web: www.pcn-food.com	

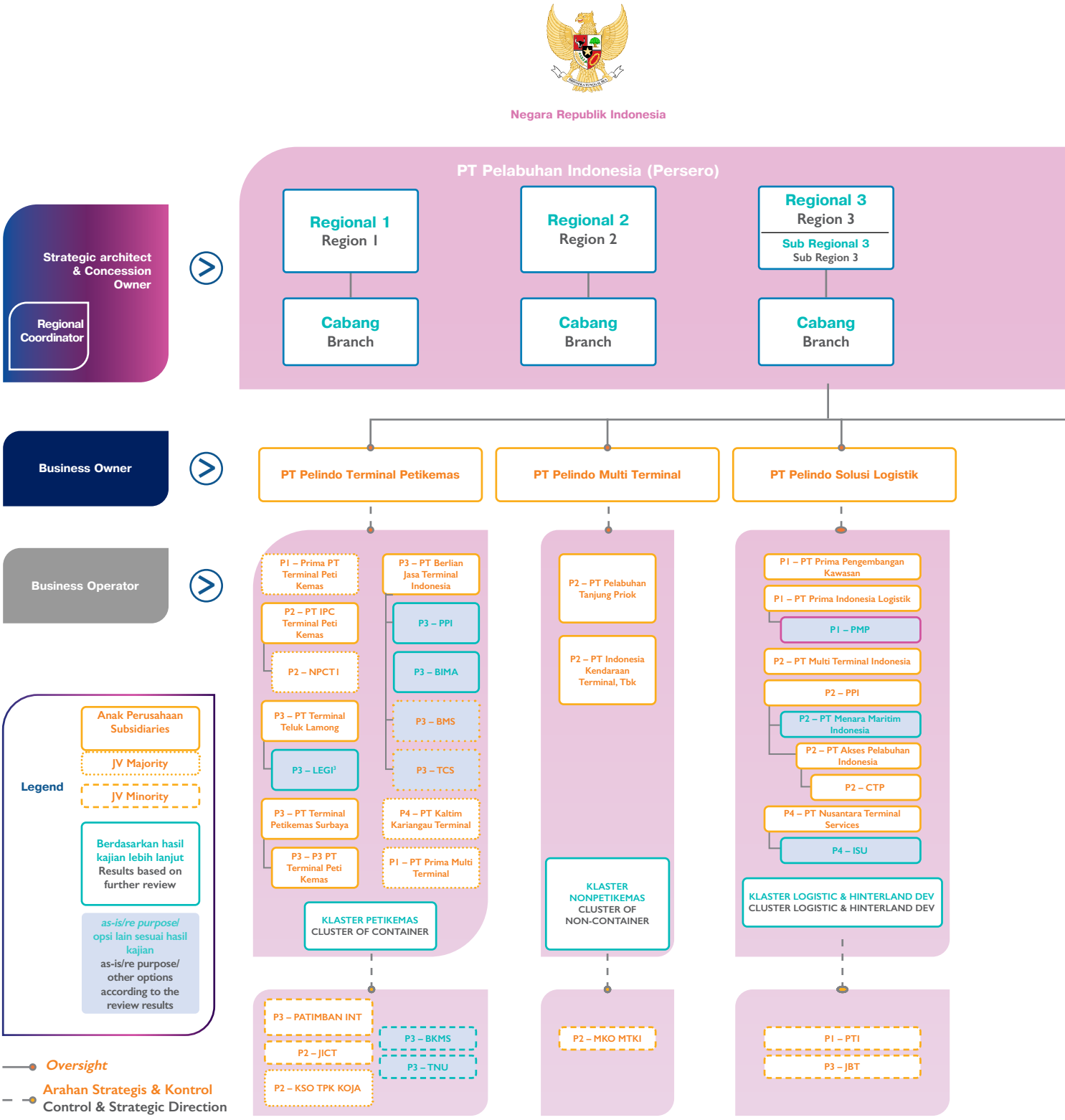
PERUSAHAAN VENTURA BERSAMA JOINT VENTURE COMPANY

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	
1	KSO Terminal Petikemas Koja	Layanan Bongkar Muat dan Penumpukan Petikemas Loading and Unloading Services and Container Stacking	Jl. Digul No. 1 Tanjung Priok Jakarta Utara 14210 Telp: (021) 4374142 Fax: (021) 437-4150 Email: - Web: www.tpkkoja.co.id	

	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Pendirian Year of Operations	Status Operasi Status	Jumlah Aset Total Assets
	• PT Pertamina (Persero): 81,12% • PT Pelindo (Persero): 6,00% • PT Perkebunan Nusantara X: 5,62% • PT Perkebunan Nusantara XI: 1,94% • PT Perkebunan Nusantara XII: 1,74% • PT Timah, Tbk: 1,78%	2008	Beroperasi Operational	Rp7.660.332.000
	• PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 30,00% • PT Usaha Era Pratama Nusantara: 45,00% • PT Santiniluwansa Lestari: 15,00% • PT Amanah Indo Invest: 10%	2015	Beroperasi Operational	Rp12.293.540.785

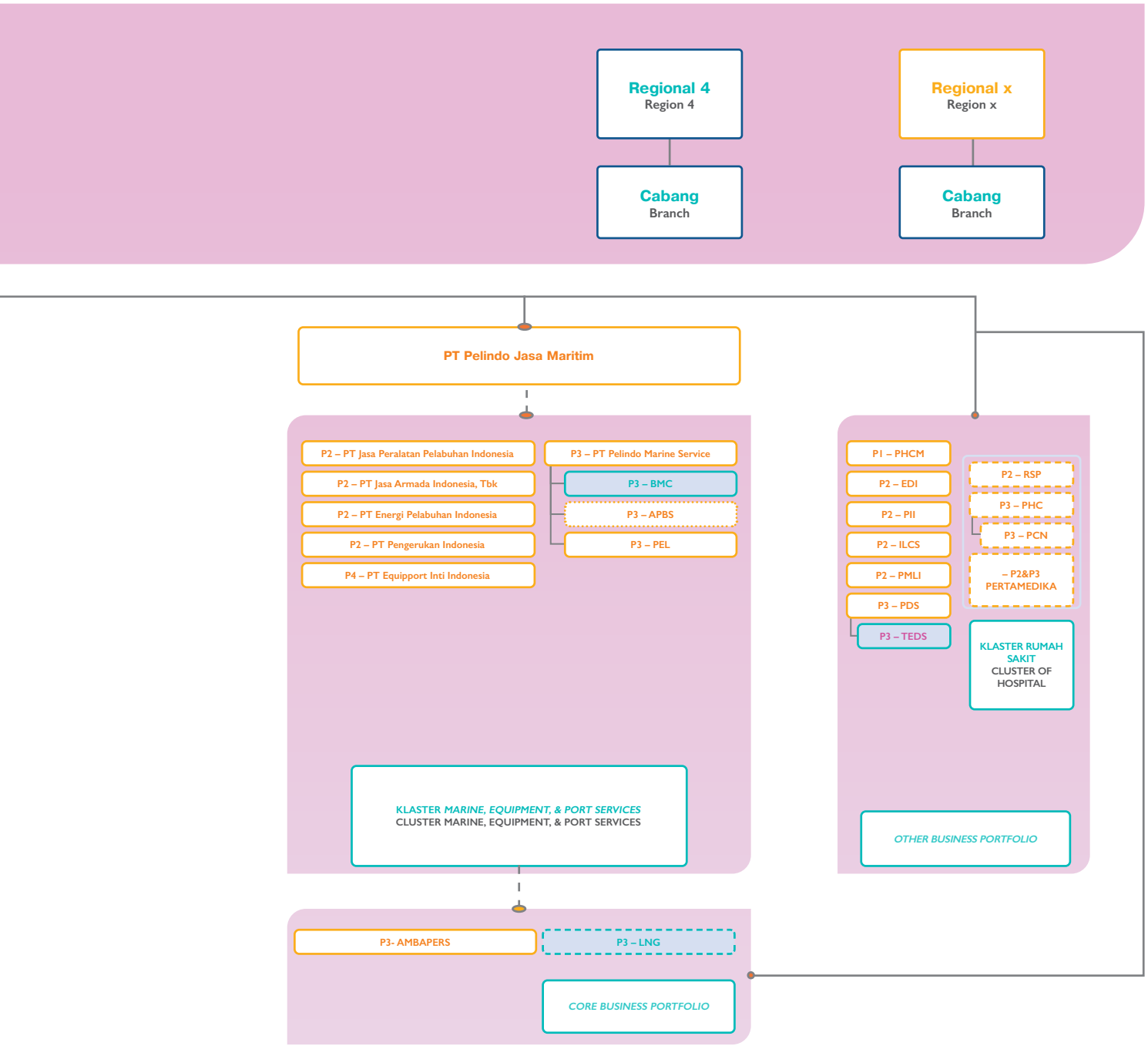
	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Pendirian Year of Operations	Status Operasi Status	Jumlah Aset Total Assets
	• PT Pelindo (Persero): 54,91% • PT Hutchison Port Indonesia: 45,09%	1998	Beroperasi Operational	Rp7.100.250.126

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN
Company Group Structure



Per 31 Desember 2022, Pelindo tidak memiliki *Special Purpose Vehicle* (SPV).

As of December 31, 2022, Pelindo does not have a Special Purpose Vehicle (SPV).


Regional 4
Region 4
Cabang
Branch
Regional x
Region x
Cabang
Branch
PT Pelindo Jasa Maritim
P2 – PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia
P2 – PT Jasa Armada Indonesia, Tbk
P2 – PT Energi Pelabuhan Indonesia
P2 – PT Pengerukan Indonesia
P4 – PT Equipport Inti Indonesia
P3 – PT Pelindo Marine Service
P3 – BMC
P3 – APBS
P3 – PEL
P1 – PHCM
P2 – EDI
P2 – PII
P2 – ILCS
P2 – PMLI
P3 – PDS
P3 – TEDS
P2 – RSP
P3 – PHC
P3 – PCN
– P2&P3 PERTAMEDIKA
KLASTER RUMAH SAKIT
CLUSTER OF HOSPITAL
KLASTER MARINE, EQUIPMENT, & PORT SERVICES
CLUSTER MARINE, EQUIPMENT, & PORT SERVICES
OTHER BUSINESS PORTFOLIO
P3- AMBAPERS
P3 – LNG
CORE BUSINESS PORTFOLIO

KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM
Share Issuance Chronology

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) per 31 Desember 2022 belum mencatatkan saham di Bursa Efek. Dengan demikian tidak terdapat informasi tentang jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek di mana saham dicatatkan, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as of December 31, 2022 has not listed its shares on any Stock Exchange.Therefore there is no information to report on the number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the fiscal year, or the name of the stock exchange where the shares are listed, including stock splits, reverse stock, share dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, stock conversions, or increases and decreases in capital.

Kronologis pendirian dan penerbitan saham Perseroan dapat dijelaskan sebagai berikut:

The Company's shares issuance chronology can be explained as follows:

No.	PP/ Akta No. dan Tanggal PP/Deed No. and Date	Notaris Notary	Pengesahan Endorsement	Keterangan Description
1	PP No. 57 Tahun 1991 PP No. 57 Year 1991	-	-	Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Perum Pelabuhan II changed its status to become a Limited Liability Company (Persero)
2	Akta Pendirian No. 3 tanggal 1 Desember 1992 Deed of Establishment No. 3 dated December 1, 1992	Imas Fatimah, S.H	Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01.TH.93 tanggal 17 Juni 1993 Republic of Indonesia Minister of Justice Decree No. C2-4754. HT.01.01. TH.93 dated June 17, 1993	Pendirian PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Establishment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
3	Akta No. 4 tanggal 5 Mei 1998 Deed No. 4 dated May 5, 1998	Imas Fatimah, S.H	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C2-17612.HT.01.04. TH.98 tanggal 6 Oktober 1998 Minister of Law and Human Rights No.C2-17612.HT.01.04.TH.98 dated October 6, 1998	Perubahan Anggaran Dasar Amendments to the Articles of Association
4	Akta No. 2 tanggal 15 Agustus 2008 Deed No. 2 dated August 15, 2008	Agus Sudiono Kuntjoro, S.H	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-80894.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 November 2008 Minister of Law and Human Rights No.AHU-80894.AH.01.02.Year 2008 dated November 3, 2008	Perubahan Anggaran Dasar. Telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 12 Desember 2008 Amendments to the Articles of Association Announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated December 12, 2008
5	Akta No. 3 tanggal 30 Juli 2009 Deed No. 3 dated July 30, 2009	Agus Sudiono Kuntjoro, S.H	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-04026 tanggal 16 Februari 2010 Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.10-04026 dated February 16, 2010	Perubahan Anggaran Dasar Amendments to the Articles of Association
6	Akta No. 12 tanggal 21 September 2012 Deed No. 12 dated September 21, 2012	Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Pua, S.H., M.Kn.,	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-35061 tanggal 27 September 2012 Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.10-35061 dated September 27, 2012	Perubahan Anggaran Dasar terakhir Last amendments to the Articles of Association

No.	PP/ Akta No. dan Tanggal PP/Deed No. and Date	Notaris Notary	Pengesahan Endorsement	Keterangan Description
7	Penambahan Modal Akta Notaris No. 03 tanggal 02 Agustus 2013 Additional Capital Deed No. 03 dated August 02, 2013	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.,		Penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-38219 tanggal 12 September 2013 The addition to the Company's issued and fully paid up capital was notified to the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights through Letter of Acceptance of Notification No. AHU- AH.01.10-38219 dated September 12, 2013
8	Penambahan Modal Akta Notaris No. 03 tanggal 02 Agustus 2013 Additional Capital Deed No. 03 dated August 02, 2012	-	-	• Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000.000 • Dengan adanya penambahan modal Negara Republik Indonesia tersebut, maka modal ditempatkan/disetor Perseroan yang semula sebesar Rp1.017.611.000.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.000 • The Government of the Republic of Indonesia, which in this case was represented by the Minister of State- Owned Enterprises, increased its capital participation in the Company to Rp426,418,000,000 • With the additional capital from the Government of the Republic of Indonesia, the issued/paid-up capital of the Company increased from Rp1,017,611,000,000 to Rp1,444,029,000,000
9	Penambahan Modal Akta No. 09 tanggal 21 Agustus 2019 Additional Capital Deed No. 09 dated August 21, 2019	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.,	-	Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Changes in Type of Shares and Changes in the Articles of Association
10	Akta No. 06 tanggal 1 Oktober 2021 Deed No. 06 dated October 1, 2021	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.,	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0053926.AH.01.02 tanggal 1 Oktober 2021 Minister of Law and Human Rights No. AHU-0053926.AH.01.0 dated October 1, 2021	Perubahan Anggaran Dasar dan Penambahan Modal yang semula sebesar Rp1.444.029.000.000 menjadi Rp8.475.067.000.000 Amendment to the Articles of Association, and Capital Increase from Rp1,444,029,000,000 to Rp8,475,067,000,000
11	Akta No. 07 tanggal 1 Oktober 2021 Deed No. 07 dated October 1, 2021	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.,	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0053936.AH.01.02 tanggal 1 Oktober 2021 Minister of Law and Human Rights No. AHU-0053936.AH.01.02 dated October 1, 2021	Perubahan Nama, Perubahan Anggaran Dasar dan Logo Perusahaan Change of Name, Change of Articles of Association and Company Logo
12	Penambahan Modal Akta No. 02 tanggal 9 Februari 2022 Additional Capital Deed No. 02 dated February 9, 2022	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.,	Keputusan Menteri BUMN Negara No. S-38/MBU/01/2022 Decree of the Minister of State Enterprises No. S-38/MBU/01/2022	Perubahan Anggaran Dasar dan Penambahan Modal yang semula sebesar Rp8.475.067.000.000 menjadi Rp40.575.584.000.000 Amendment to the Articles of Association, and Capital Increase from Rp8,475,067,000,000 to Rp40,575,584,000,000

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN EFEK LAINNYA

Issuance and/or Other Securities Listing Chronology

INFORMASI OBLIGASI

BONDS INFORMATION

Tabel Kronologi Penerbitan Obligasi
Bonds Issuance Chronology

No.	Uraian Description	Tanggal Penerbitan Date Issued	Tenor	Mata Uang Currency	Jumlah Obligasi (miliar) Amount of Bonds (billion)
1	Obligasi Domestik (PIGN A) Domestic Bond (PIGN A)	21 Juni 2016 June 21, 2016	3 Tahun 3 years	IDR	50.000
2	Obligasi Domestik (PIGN B) Domestic Bond (PIGN B)	21 Juni 2016 June 21, 2016	5 Tahun 5 years	IDR	500.000
3	Obligasi Domestik (PIGN C) Domestic Bond (PIGN C)	21 Juni 2016 June 21, 2016	7 Tahun 7 years	IDR	400.000
4	Obligasi Domestik (PIGN D) Domestic Bond (PIGN D)	21 Juni 2016 June 21, 2016	10 Tahun 10 years	IDR	50.000
5	Obligasi Global Global Bond	5 Mei 2015 May 5, 2015	10 Tahun 10 years	USD	1.100
6	Obligasi Global Global Bond	5 Mei 2015 May 5, 2015	30 Tahun 30 years	USD	500
7	Obligasi Global Global Bond	2 Mei 2018 May 2, 2018	5 Tahun 5 years	USD	500
8	Obligasi Global Global Bond	1 Oktober 2014 October 1, 2014	10 Tahun 10 years	USD	500

	Jumlah Obligasi per 31 Desember 2022 (miliar) Total Bonds per December 31, 2022 (billion)	Harga Penawaran Offering Price	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Status Pembayaran Payment Status	Peringkat Rating		Wali Amanat Trustee
						2021	2020	
		100%	21 Juni 2019 June 21, 2019	8,25%	Lunas Paid	idAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero)
		100%	21 Juni 2021 June 21, 2021	9%	Lunas Paid	idAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero)
		100%	21 Juni 2023 June 21, 2023	9,50%	Belum Lunas Not yet Paid	idAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero)
		100%	21 Juni 2026 June 21, 2026	9,75%	Belum Lunas Not yet Paid	idAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero
		98,99%	5 Mei 2025 May 5, 2025	4,25%	Belum Lunas Not yet Paid	Moody's: Baa3(*Stable*) Fitch: BBB-	Moody's: Baa3(Stable) Fitch: BBB-	The Bank of New york Mellon
		98,17%	5 Mei 2025 May 5, 2025	5,38%	Belum Lunas Not yet Paid	Moody's: Baa3(*Stable*) Fitch: BBB (Stable) S&P: BBB- (Negative)	Moody's: Baa3(*Stable*) Fitch: BBB (Stable) S&P: BBB- (Negative)	The Bank of New york Mellon
		98,90%	2 Mei 2023 May 2, 2023	4,50%	Belum Lunas Not yet Paid	Moody's: Baa3(*Stable*) Fitch: B B B - (Stable) S&P: BBB- (Negative)	Moody's: Baa3(*Stable*) Fitch: BBB- (Stable) S&P: BBB- (Negative)	The Bank of New york Mellon
		99,41%	1 Oktober 2024 October 1, 2024	4,88%	Belum Lunas Not yet Paid	Moody's: Baa3(*Stable*) Fitch: B B B - (Stable) S&P: BBB- (Negative)	Moody's: Baa3(*Stable*) Fitch: BBB- (Stable) S&P: BBB- (Negative)	The Bank of New york Mellon

Tabel Kronologi Penerbitan Obligasi
Bonds Issuance Chronology

No.	Uraian Description	Tanggal Penerbitan Date Issued	Tenor	Mata Uang Currency	Jumlah Obligasi (miliar) Amount of Bonds (billion)
9	Obligasi Domestik (PIKI A) Domestic Bond (PIKI A)	5 Juli 2018 July 5, 2018	5 Tahun 5 years	IDR	380.000
10	Obligasi Domestik (PIKI B) Domestic Bond (PIKI B)	5 Juli 2018 July 5, 2018	7 Tahun 7 years	IDR	1.820.000
11	Obligasi Domestik (PIKI C) Domestic Bond (PIKI C)	5 Juli 2018 July 5, 2018	10 Tahun 10 years	IDR	800.000

Seluruh obligasi Domestik Perseroan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan Obligasi Global Perseroan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange (SGX).

Per 31 Desember 2022, Pelindo tidak memiliki efek lainnya selain obligasi.

All of the Company's Domestic Bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange, and the Company's Global Bonds are listed on the Singapore Stock Exchange (SGX).

As of December 31, 2022, the Company has no other securities other than bonds.

	Jumlah Obligasi per 31 Desember 2022 (miliar) Total Bonds per December 31, 2022 (billion)	Harga Penawaran Offering Price	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Status Pembayaran Payment Status	Peringkat Rating		Wali Amanat Trustee
						2021	2020	
		100%	5 Juli 2023 July 5, 2023	8,00%	Belum Lunas Not yet Paid	idAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero
		100%	5 Juli 2025 July 5, 2025	9,15%	Belum Lunas Not yet Paid	idAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero
		100%	5 Juli 2028 July 5, 2028	9,35%	Belum Lunas Not yet Paid	idAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero

INFORMASI PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK (AP) DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

Accountant Public (AP) and Accountant Public Offices (KAP) Services

Nama KAP **KAP Name**	Purwantoro, Sungkoro & Surja
Jaringan Asosiasi **Association Network**	Ernst Young
Alamat KAP **KAP Address**	CEO SUITE Indonesia Stock Exchange Jl. Jenderal Sudirman No.5, RW. 3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 Telp: (021) 52895000 Email: Mochamad.D.Syachruna@id.ey.com Web: ey.com/id
Nama AP **AP Name**	Mochamad Dadang Syachruna
Periode Penugasan KAP **Assignment Period KAP**	Periode ke 9 9th Period
Periode Penugasan AP **Assignment Period AP**	Periode ke 3 3th Period
Jasa Audit **Audit Services**	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit
***Fee* Audit** **Audit Fee**	Rp10.000.010.917
Jasa Non-Audit **Non-Audit Services**	-
***Fee* Non-Audit** **Non-Audit Fee**	-

LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG
Supporting Institutions and/or Professionals

Pemeringkat Efek Securities Rating	Fitch Ratings Singapore Pte Ltd. One Raffles Quay South Tower #22-11 Singapore 048583 Web: www.fitchratings.com
	Moody's Investors Service Singapore Pte. Ltd. 50 Raffles Place #23-06 Singapore Land Tower Singapore 048623 Web: http://www.moodys.com
	PEFINDO Equity Tower 30th floor Sudirman Central Business District Lot 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Web: www.pefindo.com
Kustodian Custodian	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building - Tower I, 5th Floor Jakarta 12190 -Indonesia Web: www.ksei.co.id
Wali Amanat Trustee	BNY Mellon One Temasek Avenue #04-01 Millenia Tower, Singapore 039192 Web: www.bnymellon.com
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Pusat Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No. I Jakarta Pusat 10130 Indonesia Web: www.btn.co.id
Notaris Notary	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Royal Palace Blok C/16 Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 178A Jakarta Selatan Telp: (021) 8313356, 8313383 Fax: (021) 8313408 Email: nanda.fauz@gmail.com Web: -
Konsultan Hukum Law Consultan	Kiagus Ahmad & Associates Menara Rajawali, Lt.8 Mega Kuningan Jakarta Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot 51, Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan 12950 Telp: (021) 5762722
	KSR & Partners Graha Naysila, Jl. Pal Putih Nomor 194, Kramat, Senen, Jakarta Pusat Telp: 0813 6796 0170
	Binsar Hutadjulu & Partners Epicentrum Walk Komplek Rasuna Epicentrum, 5 Floor Suite Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan Telp: (021) 29910090
	Ginting & Reksodiputro The Energy Building 15th Floor SCBD Lot 11A Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp: (021) 29951700
	Assegaf Hamzah & Partners Capital Palace Level 36 dan 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710 Telp: (021) 25557800
	Hadiputranto, Hadinoto & Partners The Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, 21st Floor, Sudirman Central Business District, Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Telp: (021) 29608889

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
Awards and Certification

PENGHARGAAN AWARDS



No.	Nama Penghargaan Award Name	Acara Event	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
1	BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2021 - 2022 kategori Internal Communication Implementation Juara ke 2 BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2021 - 2022 Internal Communication Implementation Category 2nd Place	BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2021 - 2022	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	24 Maret 2022 March 24, 2022
2	Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Sektor BUMN Kategori Gold Corporate Emission Calculation Transparency SOE Sector Gold Category	Penghargaan Transparasi Emisi Korporasi 2022 Corporate Emission Calculation Transparency 2022	Berita Satu Media Holding	22 April 2022 April 22, 2022
3	Kategori Transparansi Perhitungan Emisi Sekper BUMN Gelar Gold Emission Calculation Transparency SOE Corporate Secretary Category Gold	Penghargaan Transparansi Emisi Korporasi 2022 Corporate Emissions Transparency Awards 2022	Berita Satu Media Holding	22 April 2022 April 22, 2022
4	Penghargaan Indonesia CSR & TJSL Awards 2022 Indonesia CSR & TJSL Award 2022	Indonesia CSR & TJSL Awards 2022	ICONOMICS	10 Juni 2022 June 10, 2022



No.	Nama Penghargaan Award Name	Acara Event	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
5	Most Popular Brand (Best Brand Awareness Best Brand Image in Port Category)	Indonesia's Most Popular Digital Financial Brands	ICONOMICS	26 Juni 2022 June 26, 2022
6	Corporate Reputation Awards Kategori Port Operator Corporate Reputation Awards Port Operator Category	Corporate Reputation Awards 2022	ICONOMICS	29 Juli 2022 July 29, 2022
7	Kategori Terpopuler di Media Cetak 2021 Subkategori BUMN NonTbk. Most Popular in Print Media Category Sub Category BUMN Non Tbk. 2021	PR Indonesia Award	PR Indonesia	29 Juli 2022 July 29, 2022
8	Annual Report Competition Category Top 8 Asia Pacific	LACP Vision Awards	LACP	29 Agustus 2022 August 29. 2022
9	Best TJSL 2022 with Outstanding Social Economic Empowerment and Community Impact Category Logistics and Transportation Industry	Indonesia TJSL Awards 2022	Warta Ekonomi	29 September 2022 September 29, 2022



No.	Nama Penghargaan Award Name	Acara Event	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
10	Establishing Business Responsibility Development Goals	Indonesia Best TJSL Award 2022	Warta Ekonomi	29 September 2022 September 29, 2022
11	Predikat Commitment C Commitment C Predicate	ESG Disclosure Awards 2022	Berita Satu Media Holding	26 Oktober 2022 October 26, 2022
12	Dukungan dalam pelaksanaan KTT G20 Kategori Sarana prasarana Transportasi Support for the G20 Summit in the Transportation Infrastructure Category	KTT G20	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	15 November 2022 November 15, 2022
13	The Best Human Capital Team of The Year (Port and Logistic Industries)	Human Capital & Performance Award 2022	BusinessNews	30 November 2022 November 30, 2022
14	The Best Digital Transformation Strategy (Port & Logistic Industries)	Human Capital & Performance Award 2022	BusinessNews	30 November 2022 November 30, 2022
15	The Best Chief Executive Oficer of The Year	Human Capital & Performance Award 2022	BusinessNews	30 November 2022 November 30, 2022
16	The Best Human Capital Director of The Year	Human Capital & Performance Award 2022	BusinessNews	30 November 2022 November 30, 2022
17	Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 Kategori "Informatif" Public Agency Information Disclosure 2022 Category "Informative"	Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 Public Agency Information Disclosure 2022	Komisi Informasi Publik Public Information Commission	14 Desember 2022 December 14, 2022

No.	Nama Penghargaan Award Name	Acara Event	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
18	Humas Korporasi Corporate Public Relations	Anugerah PERHUMAS dan PERHUMAS PR Excellence Awards 2022	PERHUMAS	15 Desember 2022 December 15, 2022
19	Pelaksanaan Aksi Pemangkasan Birokrasi dan Peningkatan Layanan di Kawasan Pelabuhan Tahun 2021-2022 Bureaucracy Reduction Actions and Service Improvement in the Port Area 2021-2022	Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) National Strategy for Prevention of Corruption (Stranas PK)	KPK - Stranas PK	20 Desember 2022 December 20, 2022
20	Award in Recognition for Contributing and Helping to Overcome Humanitarian Problems (Especially for COVID-19 Pandemic)	-	Kemenko Marves Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment	-

SERTIFIKASI

CERTIFICATION

Area	ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Quality Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	**Badan Sertifikasi** Certification Body	**Tanggal Mulai Berlaku** Effective Date	**Tanggal Selesai Berlaku** Expiration Date
Kantor Regional 1 **Regional I Branches**	1	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 **January 18, 2021**	17 Januari 2024 **January 17, 2024**
Batam	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Belawan	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Dumai	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Gunung Sitoli	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Kuala Tanjung	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Lhokseumawe	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Malahayati	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Pekanbaru	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Sibolga	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Sungai Pakning	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Tanjung Balai Asahan	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Tanjung Balai Karimun	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Tanjungpinang SKK	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Tembilahan	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
TPK Belawan	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Kantor Regional 2 **Regional 2 Branches**	**1**	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023
Banten	1a	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023
Bengkulu	1a	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023
Cirebon	1a	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023
Jambi	1a	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023

Area	ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Quality Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	**Badan Sertifikasi** Certification Body	**Tanggal Mulai Berlaku** Effective Date	**Tanggal Selesai Berlaku** Expiration Date
Palembang	1a	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023
Pangkal Balam	1a	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023
Panjang	1a	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023
Pontianak	1a	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023
Sunda Kelapa	1a	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023
Tanjung Pandan	1a	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023
Tanjung Priok	1a	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023
Teluk Bayur	1a	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023
Kantor Regional 3 **Regional 3 Branches**	**1**	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Sub Regional Jawa **Sub Regional Java**	**1a**	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Terminal Kalimas dan GSN Kalimas and GSN Terminal	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Gresik	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Tanjung Tembaga	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Kalianget	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Tanjung Emas	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Sub Regional Kalimantan	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Banjarmasin	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Kotabaru	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Sampit	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Kumai	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Batulicin	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Sub Regional Bali Nusra	**1a**	**TUV Rheinland**	**10 Februari 2022** **February 10, 2022**	**9 Februari 2025** **February 9, 2025**

Area	ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Quality Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	**Badan Sertifikasi** Certification Body	**Tanggal Mulai Berlaku** Effective Date	**Tanggal Selesai Berlaku** Expiration Date
Benoa	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Kupang	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Lembar	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Bima	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Maumere	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Celukan Bawang	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Kantor Regional 4 Regional 4 Branches	**2**	**Sucofindo**	**09 Januari 2020** January 09, 2020	**08 Januari 2023** January 08, 2023
Balikpapan	2	URS	06 Oktober 2021 October 06, 2021	05 Oktober 2024 October 05, 2024
Biak	2	URS	14 Januari 2023 January 14, 2023	13 Januari 2026 January 13, 2026
Bitung	2	URS	30 Agustus 2020 August 30, 2020	29 Agustus 2023 August 29, 2023
Fakfak	2	URS	01 September 2020 September 01, 2020	30 Agustus 2023 August 30, 2023
Gorontalo	2	URS	25 Januari 2023 January 25, 2023	24 Januari 2026 January 24, 2026
Jayapura	2	URS	07 Oktober 2021 October 07, 2021	07 Agustus 2021 August 07, 2021
Kendari	2	URS	11 Desember 2022 December 11, 2022	10 Desember 2025 December 10, 2025
Makassar	2	URS	29 Desember 2021 December 29, 2021	28 Desember 2024 December 28, 2024
Manokwari	2	URS	13 Januari 2020 January 13, 2020	12 Januari 2023 January 12, 2023
Merauke	2	URS	10 Januari 2022 January 10, 2022	09 Januari 2025 January 09, 2025
Nunukan	2	URS	25 September 2020 September 25, 2020	24 September 2023 September 24, 2023
Pantoloan	2	URS	06 Juni 2021 June 06, 2021	05 Juni 2024 June 05, 2024
Parepare	2	URS	08 November 2022 November 08, 2022	07 November 2025 November 07, 2025
Samarinda	2	URS	17 Februari 2021 February 17, 2021	16 Februari 2022 February 16, 2022
Sorong	2	URS	16 Januari 2023 January 16, 2023	15 Januari 2026 January 15, 2026

Area	ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Quality Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	**Badan Sertifikasi** Certification Body	**Tanggal Mulai Berlaku** Effective Date	**Tanggal Selesai Berlaku** Expiration Date
Tarakan	2	URS	27 Februari 2020 February 27, 2020	26 Februari 2023 February 26, 2023
Ternate	2	URS	30 Desember 2022 December 30, 2022	29 Desember 2025 December 29, 2025

Area	ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 Environmental Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	**Badan Sertifikasi** Certification Body	**Tanggal Mulai Berlaku** Effective Date	**Tanggal Selesai Berlaku** Expiration Date
Kantor Regional 1 **Regional 1 Branches**	**1**	**TUV Nord Indonesia**	**18 Januari 2021** January 18, 2021	**17 Januari 2024** January 17, 2024
Belawan	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Dumai	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Lhokseumawe	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Malahayati	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Pekanbaru	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Sibolga	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Tanjung Balai Karimun	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Tanjungpinang SKK	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
TPK Belawan	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Kantor Regional 2 Regional 2 Branches	**2**	**CBQA GLOBAL**	**27 September 2022** September 27, 2022	**26 September 2025** September 26, 2025
Tanjung Priok	2	TUV Nord Indonesia	29 Desember 2021 December 29, 2021	28 Desember 2024 December 28, 2024
Kantor Regional 3 **Regional 3 Branches**	**1**	**TUV Rheinland**	**10 Februari 2022** February 10, 2022	**09 Februari 2025** February 09, 2025
Sub Regional Jawa **Sub Regional Java**	**1a**	**TUV Rheinland**	**10 Februari 2022** **February 10, 2022**	**09 Februari 2025** **February 09, 2025**
Terminal Kalimas dan GSN Kalimas and GSN Terminal	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	09 Februari 2025 February 09, 2025
Gresik	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	09 Februari 2025 February 09, 2025

Area	ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 Environmental Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	**Badan Sertifikasi** Certification Body	**Tanggal Mulai Berlaku** Effective Date	**Tanggal Selesai Berlaku** Expiration Date
Tanjung Emas	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	09 Februari 2025 February 09, 2025
Sub Regional Kalimantan	**1a**	**TUV Rheinland**	**10 Februari 2022** **February 10, 2022**	**09 Februari 2025** **February 09, 2025**
Banjarmasin	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	09 Februari 2025 February 09, 2025
Kotabaru	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	09 Februari 2025 February 09, 2025
Sub Regional Bali Nusra	**1a**	**TUV Rheinland**	**10 Februari 2022** **February 10, 2022**	**09 Februari 2025** **February 09, 2025**
Benoa	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	09 Februari 2025 February 09, 2025
Kupang	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	09 Februari 2025 February 09, 2025
Kantor Regional 4 **Regional 4 Branches**	**2**	**Sucofindo**	**09 Januari 2020** **January 09, 2020**	**08 Januari 2023** **January 08, 2023**
Balikpapan	2	URS	04 Oktober 2021 October 04, 2021	03 Oktober 2024 October 03, 2024
Bitung	2	URS	29 Januari 2021 January 29, 2021	28 Januari 2024 January 28, 2024
Jayapura	2	URS	15 Desember 2020 December 15, 2020	14 Desember 2023 December 14, 2023
Makassar	2	URS	20 Desember 2021 December 20, 2021	19 Desember 2024 December 19, 2024
Sorong	2	URS	30 Januari 2022 January 30, 2022	29 Januari 2025 January 29, 2025
Ternate	2	URS	12 Maret 2020 March 12, 2020	11 Maret 2023 March 11, 2023

Area	ISO 45001:2018 Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018 OHS Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	**Badan Sertifikasi** Certification Body	**Tanggal Mulai Berlaku** Effective Date	**Tanggal Selesai Berlaku** Expiration Date
Kantor Regional 1 **Regional 1 Branches**				
Batam	2	TUV Nord Indonesia	30 November 2020 November 30, 2020	29 November 2023 November 29, 2023
Dumai	2	TUV Nord Indonesia	21 Desember 2020 December 21, 2020	20 Desember 2023 December 20, 2023
Kantor Regional 2 **Regional 2 Branches**				
Jambi	2	SUCOFINDO	07 Januari 2021 January 07, 2021	06 Januari 2024 January 06, 2024
Tanjung Priok	2	TUV Nord Indonesia	29 Desember 2021 December 29, 2021	28 Desember 2024 December 28, 2024

Area	ISO 45001:2018 Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018 OHS Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	**Badan Sertifikasi** Certification Body	**Tanggal Mulai Berlaku** Effective Date	**Tanggal Selesai Berlaku** Expiration Date
Teluk Bayur	2	SCK Certifications Pvt. Ltd	15 Agustus 2021 August 15, 2021	15 Agustus 2024 August 15, 2024
Kantor Regional 4 Regional 4 Branches	**2**	**Sucofindo**	**09 Januari 2020** January 09, 2020	**08 Januari 2023** January 08, 2023
Balikpapan	2	URS	24 Desember 2022 December 24, 2022	23 Desember 2025 December 23, 2025
Bitung	2	URS	07 Januari 2021 January 07, 2021	06 Januari 2024 January 06, 2024
Jayapura	2	URS	03 Desember 2020 December 03, 2020	02 Desember 2023 December 02, 2023
Ternate	2	URS	12 Maret 2020 March 12, 2020	11 Maret 2023 March 11, 2023

Area	ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	**Badan Sertifikasi** Certification Body	**Tanggal Mulai Berlaku** Effective Date	**Tanggal Selesai Berlaku** Expiration Date
Kantor Regional 1 Regional 1 Branches	**2**	**TUV Nord Indonesia**	**30 November 2020** November 30, 2020	**29 November 2023** November 29, 2023
Kantor Regional 2 Regional 2 Branches	**2**	**BSI**	**26 November 2020** November 26, 2020	**25 November 2023** November 25, 2023
Kantor Regional 3 Regional 3 Branches	**2**	**BSI**	**04 Agustus 2020** August 04, 2020	**03 Agustus 2023** August 03, 2023
Sub Regional Jawa	**2**	**BSI**	**02 Maret 2022** March 02, 2022	**01 Maret 2025** March 01, 2025
Sub Regional Kalimantan	**2**	**BSI**	**02 Maret 2022** March 02, 2022	**01 Maret 2025** March 01, 2025
Sub Regional Bali Nusra	**2**	**BSI**	**02 Maret 2022** March 02, 2022	**01 Maret 2025** March 01, 2025
Kantor Regional 4 Regional 4 Branches	**2**	**Mutu Hijau Indonesia**	**13 Agustus 2020** August 13, 2020	**12 Agustus 2023** August 12, 2023

Area	ISO 22301:2019 Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis ISO 22301:2019 Business Continuity Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	**Badan Sertifikasi** Certification Body	**Tanggal Mulai Berlaku** Effective Date	**Tanggal Selesai Berlaku** Expiration Date
Kantor Regional 3 Regional 3 Branches	**1**	**ICA**	**14 Desember 2021** December 14, 2021	**14 Desember 2022** December 14, 2022
Tanjung Emas	1a	ICA	14 Desember 2021 December 14, 2021	14 Desember 2022 December 14, 2022
Benoa	1a	ICA	14 Desember 2021 December 14, 2021	14 Desember 2022 December 14, 2022

Area Sertifikat Certification Area	ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001 Information Security Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Kantor Regional 3 **Regional 3 Branches**	**1**	**Sucofindo**	**10 Agustus 2021** **August 10, 2021**	**9 Agustus 2024** **August** 9, 2024

Keterangan:
1:Area tersebut sebagai induk sertifikat
1a:Area tersebut sebagai yang diintegrasikan ke induk sertifikat
2:Area tersebut sebagai *single* sertifikat
Note:
1: The area is the parent of the certificate
1a: The area as integrated into the parent certificate
2: The area as a single certificate

Area	Nama Sertifikasi Name of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Regional 1				
Batam	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024 April 21, 2024
Dumai	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024 April 21, 2024
Gunung Sitoli	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024 April 21, 2024
Kuala Tanjung	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024 April 21, 2024
Sei Pakning	SMK3 PP NO 50 2013	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024 April 21, 2024
Sibolga	SMK3 PP NO 50 2014	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024 April 21, 2024
Tanjung Balai Asahan	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024 April 21, 2024
Tanjung Balai Karimun	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024 April 21, 2024
Tembilahan	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024 April 21, 2024
TPK Belawan	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024 April 21, 2024

Area	Nama Sertifikasi Name of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Regional 2				
Banten	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2021 April 22, 2021	22 April 2024 April 22, 2024
Bengkulu	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	29 Maret 2019 March 29, 2019	28 Maret 2022 March 28, 2022

Area	Nama Sertifikasi Name of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Cirebon	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	17 September 2020 September 17, 2020	17 September 2023 September 17, 2023
Jambi	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2022 April 22, 2022	21 April 2025 April 21, 2025
Palembang	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	17 Desember 2020 December 17, 2020	16 Desember 2023 December 16, 2023
Panjang	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	17 September 2020 September 17, 2020	17 September 2023 September 17, 2023
Pontianak	SMK3 PP NO 50 2012	PT Sucofindo	17 September 2020 September 17, 2020	17 September 2023 September 17, 2023
Sunda Kelapa	SMK3 PP NO 50 2012	PT Sucofindo	29 Maret 2019 March 29, 2019	19 Maret 2022 March 19, 2022
Tanjung Priok	SMK3 PP NO 50 2012	Biro Klasifikasi Indonesia	17 September 2020 September 17, 2020	17 September 2023 September 17, 2023
Teluk Bayur	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	13 Maret 2022 March 13, 2022	13 Maret 2025 March 13, 2025

Area	Nama Sertifikasi Name of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Regional 3				
Benoa	SMK3 PP NO 50 2012	TUV Rheinland	29 Maret 2019 March 29, 2019	28 Maret 2022 March 28, 2022
Bima	SMK3	TUV Rheinland	17 September 2020 September 17, 2020	16 September 2023 September 16, 2023
Celukan Bawang	SMK3	TUV Rheinland	17 September 2020 September 17, 2020	16 September 2023 September 16, 2023
Gresik	SMK3 PP NO 50 2012	TUV Rheinland	13 Mei 2022 May 13, 2022	12 Mei 2025 May 12, 2025
Kantor Pusat Regional III	SMK3 PP NO 50 2012	TUV Rheinland	29 Maret 2019 March 29, 2019	28 Maret 2022 March 28, 2022
Kotabaru	SMK3 PP NO 50 2012	TUV Rheinland	17 September 2020 September 17, 2020	16 September 2023 September 16, 2023
Kumai	SMK3 PP NO 50 2012	TUV Rheinland	17 September 2020 September 17, 2020	16 September 2023 September 16, 2023
Lembar	SMK3 PP NO 50 2012	TUV Rheinland	29 Maret 2019 March 29, 2019	28 Maret 2022 March 28, 2022
Maumere	SMK3	TUV Rheinland	17 September 2020 September 17, 2020	16 September 2023 September 16, 2023
Tanjung Emas	SMK3 PP NO 50 2012	TUV Rheinland	29 Maret 2019 March 29, 2019	28 Maret 2022 March 28, 2022

Area	Nama Sertifikasi Name of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Tanjung Perak	SMK3 PP NO 50 2012	TUV Rheinland	29 Maret 2019 March 29, 2019	28 Maret 2022 March 28, 2022
Tanjung Tembaga	SMK3 PP NO 50 2012	TUV Rheinland	17 September 2020 September 17, 2020	16 September 2023 September 16, 2023
Tanjung Wangi	SMK3 PP NO 50 2012	TUV Rheinland	29 Maret 2019 March 29, 2019	28 Maret 2022 March 28, 2022
Tenau	SMK3 PP NO 50 2012	TUV Rheinland	29 Maret 2019 March 29, 2019	28 Maret 2022 March 28, 2022
Trisakti	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of M!npower	17 September 2020 September 17, 2020	16 September 2023 September 16, 2023

Area	Nama Sertifikasi Name of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Regional 4				
Ambon	SMK3 PP No. 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024 April 21, 2024
Balikpapan	SMK3 PP No. 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	17 September 2020 September 17, 2020	16 September 2023 September 16, 2023
Bitung	SMK3 PP No. 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	17 September 2020 September 17, 2020	16 September 2023 September 16, 2023
Makassar	SMK3 PP No. 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	17 September 2020 September 17, 2020	16 September 2023 September 16, 2023

Area	*Statement of Compliance of a Port Facility* (SoCPF)		
	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Regional 1			
Belawan		23 Maret 2018 March 23, 2018	11 Maret 2023 March 11, 2023
Dumai		18 Maret 2021 March 18, 2021	18 Januari 2026 January 18, 2026
Lhokseumawe		21 Oktober 2021 October 21, 2021	05 September 2026 September 05, 2026
Malahayati		06 Oktober 2021 October 06, 2021	06 September 2026 September 06, 2026
Pekanbaru (TPK Perawang)		06 Oktober 2021 October 06, 2021	07 September 2026 September 07, 2026
Tanjung Balai Asahan		16 Maret 2021 March 16, 2021	16 Desember 2024 December 16, 2024

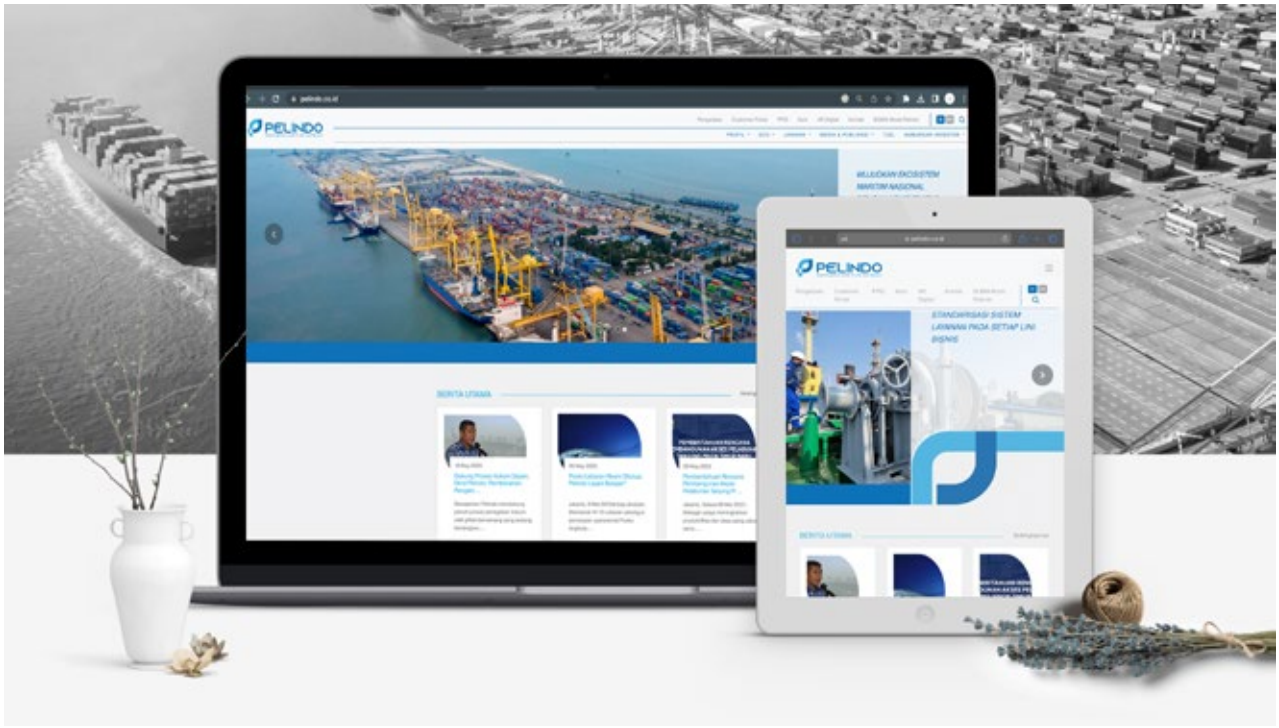
Area	*Statement of Compliance of a Port Facility* (SoCPF)		
	Badan Sertifikasi Certification Body	**Tanggal Mulai Berlaku** Effective Date	**Tanggal Selesai Berlaku** Expiration Date
Tanjung Balai Karimun		20 September 2021 September 20, 2021	25 Agustus 2026 August 25, 2026
Tanjung Pinang 1		08 Oktober 2020 October 08, 2020	23 Mei 2024 May 23, 2024
Tanjung Pinang 2		23 Mei 2018 May 23, 2018	08 Mei 2023 May 08, 2023
TPK Belawan		18 Januari 2021 January 18, 2021	22 Desember 2025 December 22, 2025
PT Prima Multi Terminal		15 Mei 2019 May 15, 2019	13 Mei 2024 May 13, 2024
PT Prima Terminal Petikemas		18 Januari 2021 January 18, 2021	22 Desember 2025 December 22, 2025
Regional 1			
Banten		16 Desember 2019 December 16, 2019	02 November 2024 November 02, 2024
Bengkulu		08 Oktober 2019 October 08, 2019	13 Oktober 2024 October 13, 2024
Cirebon		14 Oktober 2019 October 14, 2019	01 Oktober 2024 October 01, 2024
Jambi		16 September 2019 September 16, 2019	19 Agustus 2024 August 19, 2024
Palembang		29 Desember 2019 December 29, 2019	20 Oktober 2024 October 20, 2024
Pangkalbalam		30 November 2020 November 30, 2020	08 Juli 2025 July 08, 2025
Tanjung Pandan		05 September 2019 September 05, 2019	28 Agustus 2024 August 28, 2024
Pontianak		21 Agustus 2019 August 21, 2019	14 September 2024 September 14, 2024
Panjang		23 April 2019 April 23, 2019	13 Agustus 2024 August 13, 2024
Tanjung Priok		31 Desember 2018 December 31, 2018	19 Desember 2023 December 19, 2023
Teluk Bayur		17 Februari 2020 February 17, 2020	05 April 2025 April 05, 2025
PT Indonesia Kendaraan Terminal		23 April 2019 April 23, 2019	13 Agustus 2024 August 13, 2024
Terminal Kijing (Pontianak)		23 Maret 2022 March 23, 2022	21 Oktober 2026 October 21, 2026
Regional 3			
Begadneg		19 November 2018 November 19, 2018	15 November 2023 November 15, 2023
Benoa		24 Maret 2020 March 24, 2020	21 Oktober 2024 October 21, 2024
Celukan Bawang		02 Mei 2018 May 02, 2018	25 April 2023 April 25, 2023

Area	*Statement of Compliance of a Port Facility* (SoCPF)		
	Badan Sertifikasi Certification Body	**Tanggal Mulai Berlaku** Effective Date	**Tanggal Selesai Berlaku** Expiration Date
Gersik		10 Desember 2018 December 10, 2018	03 Februari 2024 February 03, 2024
Kota Baru		27 Januari 2021 January 27, 2021	28 Desember 2025 December 28, 2025
Lembar		27 Maret 2018 March 27, 2018	07 Maret 2023 March 07, 2023
Tanjung Mas		17 September 2021 September 17, 2021	23 Agustus 2026 August 23, 2026
Tanjung Intan		19 November 2021 November 19, 2021	11 Agustus 2026 August 11, 2026
Tanjung Perak		25 November 2019 November 25, 2019	24 November 2024 November 24, 2024
Tanjung Wangi		16 Maret 2018 March 16, 2018	20 Maret 2023 March 20, 2023
Tenau		07 Oktober 2019 October 07, 2019	22 Agustus 2024 August 22, 2024
Trisakti		16 Januari 2020 January 16, 2020	31 Desember 2024 December 31, 2024
Jamrud		13 November 2019 November 13, 2019	27 November 2024 November 27, 2024
TKP Banjarmasin		28 Januari 2019 January 28, 2019	23 Februari 2024 February 23, 2024
TPK Semarang		25 November 2019 November 25, 2019	17 Agustus 2024 August 17, 2024
TPK Surabaya		24 Oktober 2019 October 24, 2019	09 Oktober 2024 October 09, 2024
Regional 4			
Biak		05 April 2019 April 05, 2019	01 Oktober 2023 October 01, 2023
Bitung		27 Oktober 2021 October 27, 2021	28 Juni 2026 June 28, 2026
Fakfak		06 Februari 2019 February 06, 2019	07 Mei 2023 May 07, 2023
Gorontalo		13 Juli 2015 July 13, 2015	24 Juni 2025 June 24, 2025
Makassar		06 Juli 2015 July 06, 2015	15 April 2025 April 15, 2025
Makassar New Port		16 Maret 2020 March 16, 2020	16 Februari 2025 February 16, 2025
Manokwari		19 Agustus 2019 August 19, 2019	14 Juli 2024 July 14, 2024
Nunukan		02 Oktober 2018 October 02, 2018	14 Mei 2023 May 14, 2023

Area	*Statement of Compliance of a Port Facility* (SoCPF)		
	Badan Sertifikasi Certification Body	**Tanggal Mulai Berlaku** Effective Date	**Tanggal Selesai Berlaku** Expiration Date
Parepare		15 Agustus 2022 August 15, 2022	31 Januari 2027 January 31, 2027
KKT		29 Mei 2019 May 29, 2019	04 Maret 2024 March 04, 2024
Samarinda		11 September 2019 September 11, 2019	08 Agustus 2024 August 08, 2024
Tarakan		20 April 2022 April 20, 2022	14 Februari 2027 February 14, 2027
Ternate		05 Desember 2022 December 05, 2022	10 Juli 2027 July 10, 2027
TPK Makassar		15 Juni 2015 June 15, 2015	02 Juni 2025 June 02, 2025
TPK Bitung		27 Oktober 2021 October 27, 2021	21 Juni 2026 June 21, 2026

INFORMASI YANG TERSEDIA DI *WEBSITE*

Information Available on The Website



Ketersediaan informasi pada *website* mengacu pada Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Pelindo telah melengkapi *website* perusahaan dengan beberapa informasi penting seperti Informasi dengan alamat www.pelindo.co.id. Informasi pada *website* Pelindo terdiri dari:

- *Home*, berisi informasi terkait Berita Pelindo, Grup Pelindo, Wilayah Operasional Pelindo, alamat perusahaan, serta informasi media sosial perusahaan.
  - » Profil, berisi informasi terkait Tentang Pelindo; Visi, Misi dan nilai-nilai Perusahaan; Entitas Bisnis dan Grup Usaha; Manajemen yang berisi profil Dewan Komisaris dan Direksi; Sejarah Pelindo; Struktur Organisasi Pelindo; Organ Perusahaan; serta profil Komite-Komite.
  - » GCG, berisi informasi terkait Pedoman GCG; Organ GCG yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Hak Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Internal; Kode Etik Bisnis; serta *Whistleblowing System.*
  - » Layanan, berisi informasi terkait Wilayah Kerja dan Kegiatan Utama Perseroan.
  - » Hubungan Investor, berisi informasi terkait Laporan Tahunan selama 5 (lima) tahun yang dapat diunduh, Laporan Keberlanjutan, Laporan Keuangan, Investor Memo, Laporan RUPS, Obligasi, Peringkat Utang dan *Outlook*.
  - » Media & Publikasi, berisi informasi terkait Kabar Terbaru dan Siaran Pers.
  - » TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan).

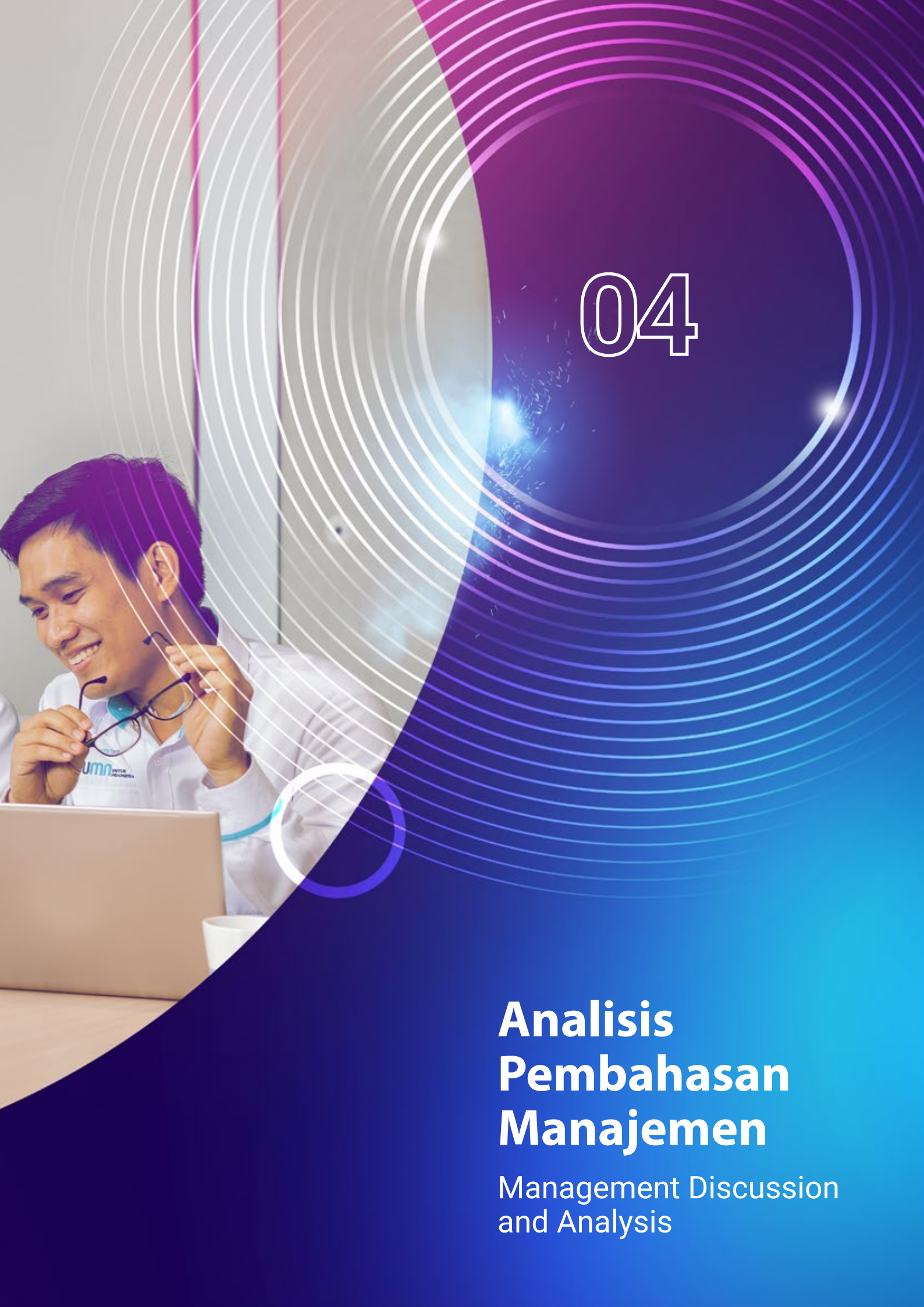
The information available on the website refers to OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning Websites of Issuers or Public Companies. Pelindo has established the Company's website at www.pelindo.co.id containing the following Information:

- Home: information related to Pelindo News, Pelindo Group, Pelindo Operational Areas, company addresses, and company social media information.
  - » Profile: information related to Pelindo; Company Vision, Mission and Values; Business Entities and Business Groups; Management with the Board of Commissioners and Board of Directors profiles; History of Pelindo; Pelindo Organizational Structure; Company Organs; and profiles of the Committees.
  - » GCG: information related to GCG Guidelines; The GCG organs including the General Meeting of Shareholders (GMS), Shareholders' Rights, Board of Commissioners, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Monitoring Committee, Corporate Secretary and Internal Audit Unit; Code of Business Ethics; and Whistleblowing System.
  - » Services: information related to the Company's Work Areas and Main Activities.
  - » Investor Relations: information related to the Annual Reports for the past 5 (five) years that can be downloaded, Sustainability Reports, Financial Reports, Investor Memo, GMS Reports, Bonds, Debt Ratings and Outlook.
  - » Media and Publications: information related to Latest News and Press Releases.
  - » SER (Social Environmental Responsibility).


PELINDO
PELINDO



PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY



04

Analisis Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

TINJAUAN PEREKONOMIAN
Economic Review



ANALISIS PEREKONOMIAN GLOBAL

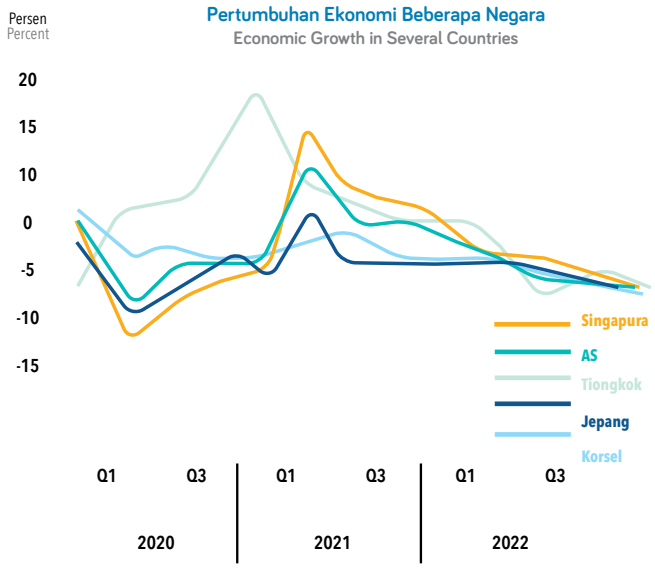
Perekonomian global tumbuh sebesar 3,4% pada tahun 2022 setelah mencapai angka pertumbuhan sebesar 5,9% pada 2021. *Rebound* yang terjadi pada tahun 2021 tersebut kembali mengalami tekanan pasca pertumbuhan negatif 3,1% yang terjadi pada tahun 2020 yang dikarenakan pandemi COVID-19. Tren perlambatan pertumbuhan yang masih berlanjut pada Triwulan IV tahun 2022 pada beberapa negara. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tumbuh 1,0% (yoy), Tiongkok tumbuh 2,9% (yoy), Jepang tumbuh 0,6% (yoy), Korea Selatan tumbuh 1,4% (yoy), serta Singapura tumbuh 2,2% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ekonomi global di antaranya disebabkan masih mewabahnya pandemi COVID-19 di Tiongkok meskipun pada tingkat ringan dan pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh sebagian besar negara termasuk di negara-negara maju. Meskipun kebijakan moneter tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan mengontrol inflasi, hal ini ikut mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Secara keseluruhan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura masing-masing tumbuh sebesar 2,1%, 3,0%, 1,0%, 2,6%, dan 3,8%.

sumber: Kementerian Keuangan dan International Monetary Fund, Tahun 2023

GLOBAL ECONOMIC ANALYSIS

The global economy grew by 3.4% in 2022 following the growth of 5.9% in 2021. The rebound that occurred in 2021 was again under pressure after the 3.1% negative growth in 2020 due to the COVID-19 pandemic. The trend of slowing growth continued in the fourth quarter of 2022 in several countries. The United States' economic growth grew 1.0% (yoy), China grew 2.9% (yoy), Japan grew 0.6% (yoy), South Korea grew 1.4% (yoy), and Singapore grew 2.2 % (yoy). The slowdown in global economic growth was partly due to the ongoing outbreak of the COVID-19 pandemic in China even though it was at a mild level and the tightening of monetary policy by most countries, including developed countries. Although the monetary policies were implemented to maintain price stability and control inflation, it contributed to a slowdown in global economic growth. Overall in 2022, the economic growth of the United States, China, Japan, South Korea and Singapore grew by 2.1% each; 3.0%; 1.0%; 2.6%; and 3.8%.

source: Ministry of Finance and International Monetary Fund, 2023



	2022	2023	2024
World Output	**3.4**	**2.8**	**3.0**
Advanced Economies	**2.7**	**1.3**	**1.4**
United States	2.1	1.6	1.1
Euro Area	3.5	0.8	1.4
Germany	1.8	-0.1	1.1
France	2.6	0.7	1.3
Italy	3.7	0.7	0.8
Spain	5.5	1.5	2.0
Japan	1.1	1.3	1.0
United Kingdom	4.0	-0.3	1.0
Canada	3.4	1.5	1.5
Other Advanced Economies	2.6	1.8	2.2
Emerging Market and Developing Economies	**4.0**	**3.9**	**4.2**
Emerging and Developing Asia	4.4	5.3	5.1
China	3.0	5.2	4.5
India	6.8	5.9	6.3
Emerging and Developing Europe	0.8	1.2	2.5
Russia	-2.1	0.7	1.3

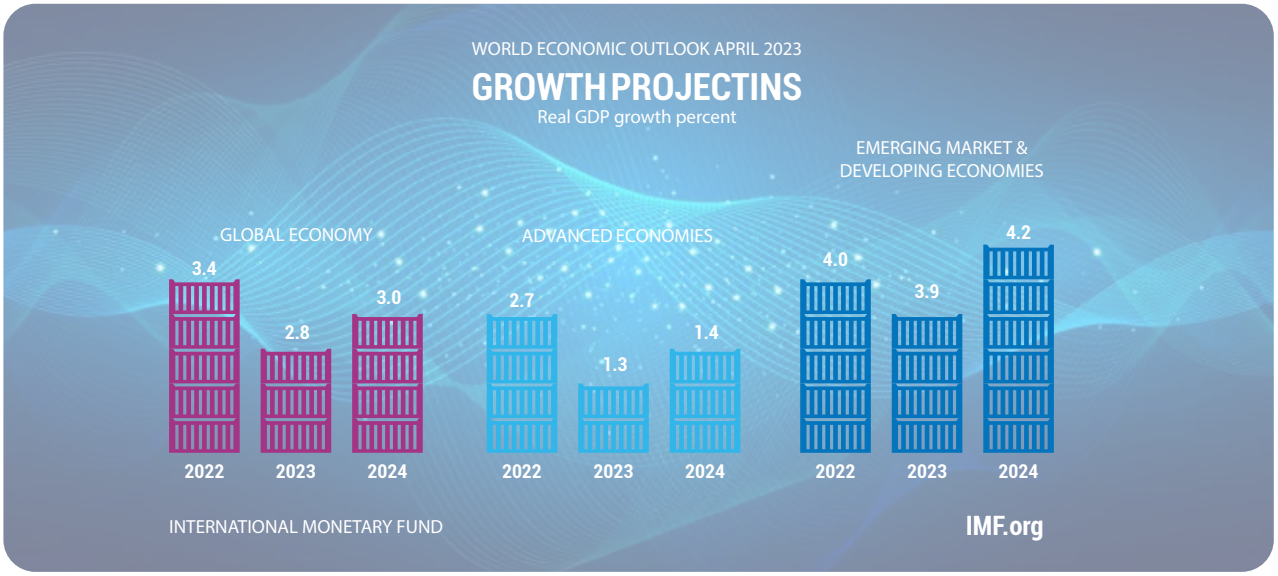
Sumber: CEIC, Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022, worldbank.org
Source: CEIC, National Development Planning 2022, worldbank.org

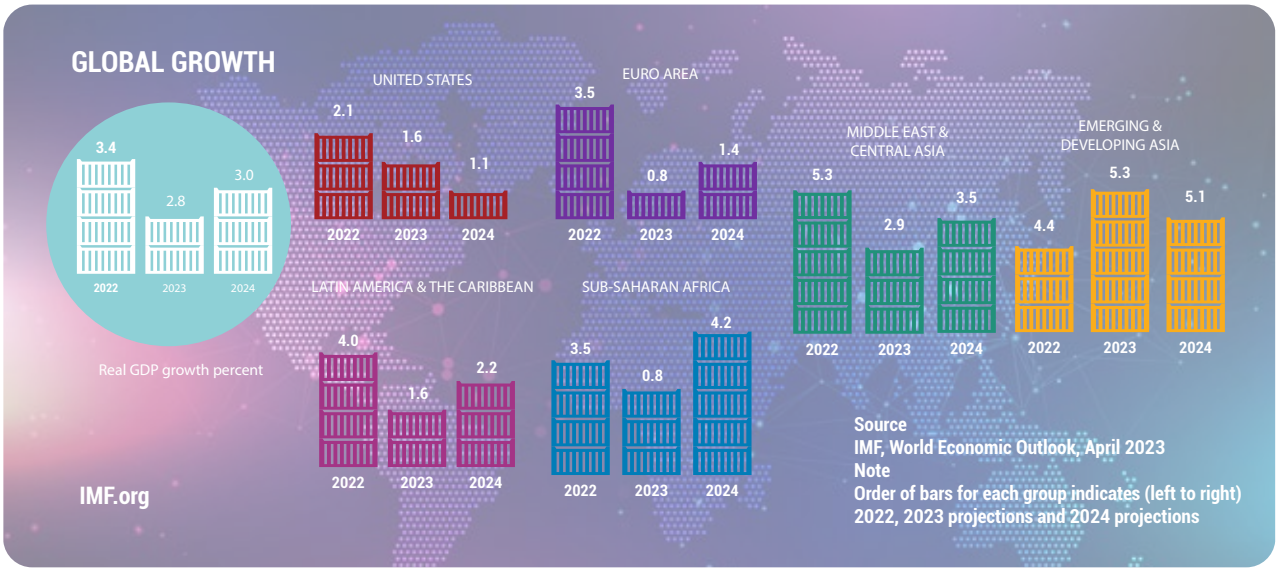
Berdasarkan rilis terbaru *World Economic Outlook* April 2023, International Monetery Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 sebesar 2,8%, atau turun dari outlook pada Januari 2023 yang lalu yaitu sebesar 2,9%. Angka prediksi pertumbuhan global tahun 2023 ini terus mengalami perubahan/koreksi dikarenakan ketidakpastian ekonomi pada tahun 2023.

Based on the latest release of the World Economic Outlook April 2023, the International Monetary Fund (IMF) predicted global economic growth in 2023 at 2.8%, down from its outlook of 2.9% in January 2023. The predicted global growth for 2023 still continues to experience changes/corrections due to economic uncertainty in 2023.

Kejadian-kejadian dan prediksi pada tahun 2023 yang akan mengakibatkan ketidakpastian ekonomi antara lain inflasi yang belum sepenuhnya terkontrol, kelanjutan efek invasi Rusia terhadap Ukraina, perkembangan COVID-19, serta kebijakan ekonomi luar negeri China. Inflasi global yang terjadi pada tahun 2022 adalah sebesar 8,7% dan diprediksi turun menjadi 7,0% pada tahun 2023 dan 4,9% di 2024.

The events and predictions in 2023 that may cause economic uncertainty include inflation that has not yet fully controlled, the continuing effect of the Russian invasion of Ukraine, the development of COVID-19, and China's foreign economic policy. Global inflation in 2022 was 8.7% and is predicted to decrease to 7.0% in 2023 and 4.9% in 2024.





Sumber: *World Economic Outlook*, International Monetary Fund (IMF), April 2023

ANALISIS PEREKONOMIAN NASIONAL

PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada tahun 2022 tercatat berhasil tumbuh sebesar 5,31% (yoy). Perekonomian domestik tahun 2022 berhasil tumbuh berkat pertumbuhan pada Triwulan IV-2022 yang naik 5,01% (yoy). Dengan nilai pertumbuhan ini, maka tren *rebound* positif perkonomian nasional terus belanjut sejak terjadinya pandemi COVID-19 yang memukul pertumbuhan ekonomi hingga negatif pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ini juga tertinggi sejak tahun 2014.

NATIONAL ECONOMIC ANALYSIS

GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP)

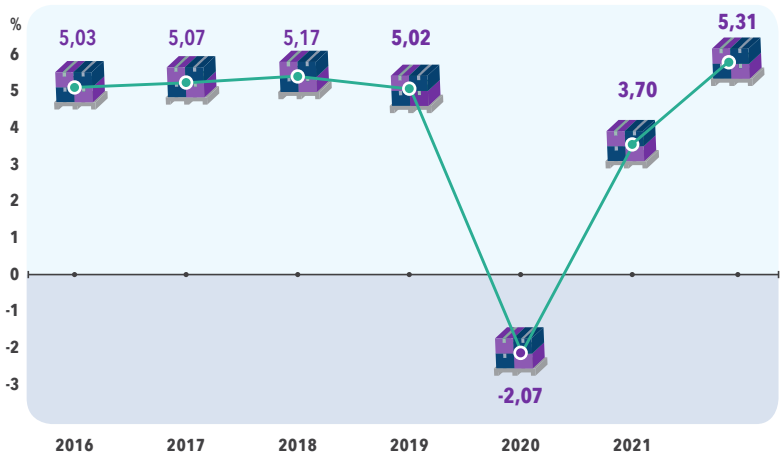
Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia's economy in 2022 managed to grow by 5.31% (yoy), thanks to growth in the fourth quarter of 2022 by 5.01% (yoy). With this growth rate, the positive rebound trend for the national economy has continued since the COVID-19 pandemic hit economic growth negatively in 2020. Economic growth in 2022 was the highest since 2014.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2022
Indonesian Economic Growth Quarter IV-2022

Berita Resmi Statistik No.15/02/Th. XXVI, 6 Februari 2023
Official Statistical News No.15/02/Th. XXVI, February 6, 2023

Q-TO-Q	Y-ON-Y	C-TO-C	Produk Domestik Bruto (PDB) Harga Berlaku 2022 Gross Domestic Product (GDP) Current Prices 2022
0,36%	5,01%	5,31%	Rp19.588,4 Triliun

PDB Per Kapita 2022/PDB Per Capita 2022
Rp71.030.850 (US$ 4.783,9)



Sumber: Berita Resmi Statistik No. 15/02/Th.XXVI, Badan Pusat Statistik, 6 Februari 2023
Source: Statistical News No. 15/02/Th.XXVI, Central Bureau of Statistics, February 6, 2023

Perekonomian Indonesia tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau USD4.783,9. Kontributor utama dari PDB adalah konsumsi. Sektor konsumsi ini tumbuh 4,48% (*yoy).* Dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) itu tumbuh 3,33% dan konsumsi rumah tangga sebesar 5,7%. Pulau Jawa sebagai kontributor perekonomian nasional mampu tumbuh tinggi 56,48% (yoy) diikuti oleh Pulau Sumatera 22,04% (yoy) dan Kalimantan 9,23% (yoy). Lebih lanjut, Pulau Sulawesi 7,03% (yoy) serta Maluku dan Papua juga tumbuh 2,50% (yoy). Permintaan domestik tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional pada tahun 2023, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih tinggi menggambarkan optimisme ekonomi Indonesia ke depan.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. HM.4.6/40/SET.M.EKON.3/02/2023, Februari 2023.

The Indonesian economy in 2022, calculated based on the Gross Domestic Product (GDP), at current prices reached Rp19,588.4 trillion, and GDP per capita reached Rp71.0 million or USD4,783.9. The main contributor to GDP was consumption, which grew by 4.48% (yoy). investments or Gross Fixed Capital Formation (PMTB) grew 3.33% and household consumption was 5.7%. Java was the highest contributor to the national economy with 56.48% (yoy), followed by Sumatra with 22.04% (yoy) and Kalimantan with 9.23% (yoy), Sulawesi Island with 7.03% (yoy) and Maluku and Papua with 2.50% (yoy). Domestic demand will remain the main pillar of the national economy in 2023, as reflected in the still high Customer Confidence Index (IKK) that shows optimism for the Indonesian economy going forward.

Source: Ministry of Coordinating Ministry for Economic Affairs Press Release No. HM.4.6/40/SET.M.EKON.3/02/2023, February 2023.

INFLASI

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2022 mengalami inflasi sebesar 5,51%, nilai ini lebih tinggi dari inflasi IHK 2021 sebesar 1,87% (yoy) dan lebih tinggi dari sasaran 3,0+1%. Inflasi yoy tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 8,65% dengan IHK sebesar 119,83 dan terendah terjadi di Sorong sebesar 3,26% dengan IHK sebesar 110,95. Inflasi yang tinggi pada tahun 2022 dipicu oleh peningkatan harga pada peristiwa seperti kelangkaan minyak goreng pada Januari 2022, kenaikan harga avtur yang mendorong kenaikan tarif angkutan udara pada April 2022, anomali cuaca di berbagai wilayah yang mengakibatkan gagal panen beberapa komoditas hortikultura sehingga memicu kenaikan harga pada Juni 2022, dan kenaikan harga BBM (Pertalite, Pertamax dan Solar) pada September 2022. Selain itu peningkatan harga pokok pada hari raya lebaran, serta natal dan tahun baru. Sepanjang 2022, Bank Indonesia (BI) berupaya menekan angka inflasi dengan menaikkan suku bunga acuan BI-7 *Days Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebanyak 5 kali. Total kenaikannya 200 *basis points* (bps) hingga BI7DRR mencapai level 5,5% pada akhir 2022.

INFLATION

The Consumer Price Index (CPI) Inflation in 2022 was 5.51%, higher than the 2021 CPI inflation of 1.87% (yoy) and higher than the target of 3.0 + 1%. The highest yoy inflation occurred in Kotabaru at 8.65% with a CPI of 119.83, and the lowest occurred in Sorong at 3.26% with a CPI of 110.95. The high inflation in 2022 was triggered by an increase in prices due to the scarcity of cooking oil in January 2022, an increase in avtur prices which prompted an increase in air transport fares in April 2022, weather anomalies in various regions that resulted in crop failures of several horticultural commodities, which triggering price increases in June 2022, and increases in fuel prices (Pertalite, Pertamax and Solar) in September 2022. In addition, basic prices increased during Eid holidays, as well as Christmas and New Year. Throughout 2022, Bank Indonesia (BI) sought to reduce the inflation rate by raising the BI-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) reference rate 5 times. The total increase was 200 basis points (bps) so that the BI7DRR reached the level of 5.5% at the end of 2022.

KINERJA PERDAGANGAN

Selaras dengan kinerja ekonomi yang baik pada tahun 2022, kinerja sektor perdagangan pada tahun 2022 juga mencatat rapor yang positif. Kinerja neraca perdagangan mencatatkan surplus sebesar USD54,53 miliar, yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Neraca perdagangan tersebut jauh di atas target tahun 2022 yang berkisar USD31,4-USD31,7 miliar. Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa mencapai 16,28%, di atas target yang berkisar di angka 5,1%-5,5%. Pertumbuhan ekspor non-migas sebesar 25,8%, atau 21 kali di atas target 0,8%-1,2%. Kinerja pada sektor perdagangan juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi pada sektor ekspor barang dan jasa terhadap PDB Indonesia yang mencapai 24,49% pada tahun 2022. Di sisi lain, meskipun berada di atas target tahun 2022 (2,1%–4,1%), inflasi dalam negeri cukup berhasil dikendalikan sehingga relatif lebih rendah dari beberapa negara lainnya, yaitu sebesar 5,51%.

TRADE PERFORMANCE

In line with the good economic performance in 2022, the trade sector performance in 2022 was also positive. The trade balance performance recorded a surplus of USD54.53 billion, the highest record in history. This trade balance is far above the 2022 target of around USD31.4-USD31.7 billion. Growth in real exports of goods and services reached 16.28%, above the target of around 5.1% -5.5%. Non-oil and gas export growth was 25.8%, or 21 times above the target of 0.8%-1.2%. The trade sector performance also supported the national economic growth with the export of goods and services sector to Indonesia's GDP reaching 24.49% in 2022. On the other hand, despite being above the 2022 target (2.1%–4.1%), domestic inflation was successfully being controlled so that it was relatively lower than several other countries, and stood at 5.51%.

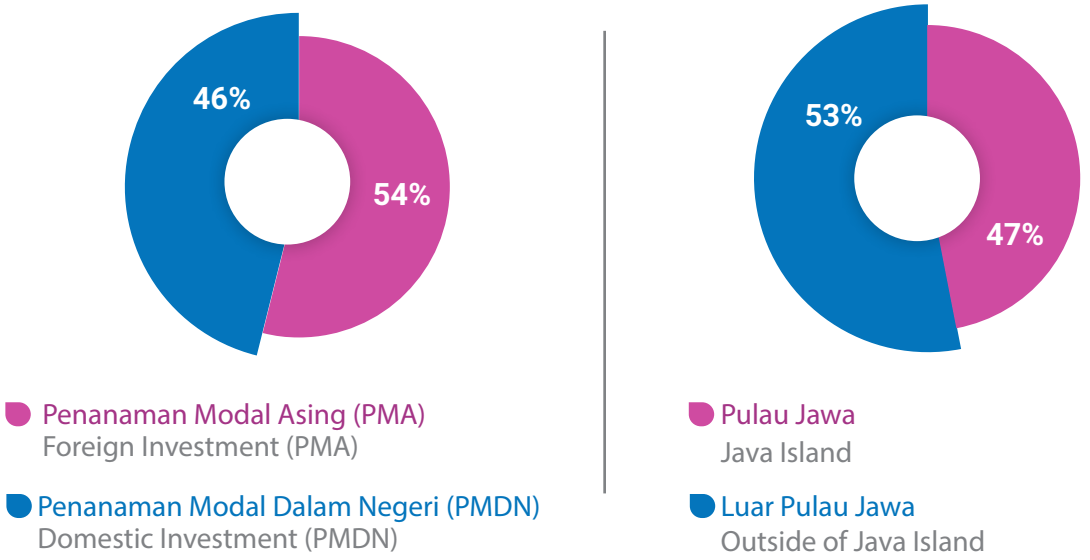
No.	Sasaran Strategis Strategic Goals	Indikator Kinerja Performance Indicator	Target 2021 2021 Target	Realisasi 2021 2021 Realization	Capaian (%) Achievements (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-migas yang Bernilai Tambah Increasing Export Growth Non-oil and Gas Goods Value Added	1. Neraca Perdagangan Barang Goods Trade Balance	31,4-31,7 USD miliar/ USD billion	54,53 USD miliar/ USD billion	172,02
		2. Pertumbuhan Ekspor Riil Barang dan Jasa Real Export Growth Goods and services	5,1-5,5 Persen/ Percent	16,28 Persen/ Percent	295,6
		3. Pertumbuhan Ekspor Non-migas Export Growth Non-oil and Gas	0,8-1,2 Persen/ Percent	25,8 Persen/ Percent	2.150
		4. Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB Ratio of Service Exports to GDP	1,6-2,0 Persen/ Percent	2,0 Persen/ Percent	100
		5. PTA/FTA/CEPA yang disepakati PTA/FTA/CEPA agreed	30 Kesepakatan (kumulatif)/ Agreement (cumulative)	34 Kesepakatan (kumulatif)/ Agreement (cumulative)	113,33

INVESTASI

Realisasi investasi sepanjang tahun 2022 adalah sebesar Rp1.207 triliun. Realisasi tersebut mencapai 106% dari target 2022 sebesar Rp1.200 triliun dan naik 34% secara tahunan (yoy) sekaligus menjadi rekor tertinggi baru. Realisasi investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp654,4 triliun atau berkontribusi 54,2% terhadap jumlah total realisasi. Angka realisasi investasi PMA ini tumbuh 44,2% secara tahunan (yoy). Kemudian realisasi investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp552,8 triliun atau berkontribusi 23,6%. Angka realisasi investasi PMDN ini tumbuh 23,6% dari tahun sebelumnya (yoy). Berdasarkan wilayah, realisasi investasi di luar Jawa kembali lebih besar dibandingkan di pulau jawa seperti tahun 2021. Realisasi investasi di luar pulau jawa sebesar Rp636,3 triliun atau sebesar 52,7%, sedangkan realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp570,9 triliun atau sebesar 47,3%. Lebih rinci lagi berdasarkan wilayah, investasi paling dominan masuk ke Jawa Barat dengan nilai Rp174,6 triliun. Diikuti DKI Jakarta Rp143 triliun, Sulawesi Tengah Rp111,2 triliun, Jawa Timur Rp110,3 triliun, dan Riau Rp82,5 triliun.

INVESTMENTS

Investment realization in 2022 was Rp1,207 trillion, 106% of the 2022 target of Rp1,200 trillion and an increase of 34% on an annual basis (yoy), as well as being a new high record. Investment realization from Foreign Investments (PMA) reached Rp654.4 trillion, or 54.2% to the total realization, and a growth of 44.2% on an annual basis (yoy). investment realization from Domestic Investment (PMDN) reached Rp552.8 trillion, and contributed 23.6%. The PMDN investment realization grew 23.6% from the previous year (yoy). By region, investment realization outside Java was again greater than in Java, as in 2021. Investment realization outside Java was Rp636.3 trillion or 52.7%, while investment realization in Java was Rp570.9 trillion or 47.3%. By region, the most dominant investment was in West Java with Rp174.6 trillion. Followed by DKI Jakarta with Rp143 trillion, Central Sulawesi with Rp111.2 trillion, East Java with Rp110.3 trillion, and Riau with Rp82.5 trillion



Sumber: Laporan Realisasi Investasi Tahun 2022, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Source: Investment Realization Report 2022, Ministry of Investment/Investment Coordinating Board (BKPM),

Berdasarkan sektornya, realisasi investasi terbesar pada 2022 disumbangkan oleh sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya dengan nilai Rp171,2 triliun. Kemudian investasi pada sektor industri pertambangan sebesar Rp136,4 triliun, transportasi, gudang, dan telekomunikasi Rp134,3 triliun, perumahan, kawasan industri, dan perkantoran Rp109,4 triliun, serta industri kimia dan farmasi Rp93,6 triliun. Realisasi investasi sepanjang 2022 telah mencapai 100,6% dari target awal yang besarnya Rp1.200 triliun. Adapun untuk tahun 2023 pemerintah Indonesia menargetkan realisasi investasi bisa naik 16,66% (yoy) dari target tahun lalu menjadi Rp1.400 triliun. Realisasi investasi ini pun berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 1.305.001 orang sepanjang tahun 2022.

Based on sector, the largest investment realization in 2022 came from the basic metals, metal goods, non-machinery and equipment industry sectors with a value of Rp171.2 trillion, followed by investments in the mining industry sector of Rp136.4 trillion, transportation, warehouse and telecommunications with Rp134.3 trillion, housing, industrial areas and offices with Rp109.4 trillion, and the chemical and pharmaceutical industry with Rp93.6 trillion. Investment realization in 2022 reached 100.6% of the initial target of Rp1,200 trillion. For 2023, the Indonesian government is targeting investment realization to increase by 16.66% (yoy) from last year's target to Rp1,400 trillion. This investment realization also absorbed a workforce of 1,305,001 people in 2022.

ANALISIS INDUSTRI PELABUHAN

TREN KEPELABUHAN GLOBAL

Saat ini terdapat sebelas tren global dalam industri kepelabuhan yang dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, seperti yang diilustrasikan pada gambar 3.1. Pengembangan ekosistem terdiri dari konsolidasi operator pelabuhan, pembentukan aliansi *shipping lines* untuk meningkatkan *bargaining power*, ekspansi *shipping lines* sebagai operator terminal, serta ekspansi *port operator* pelabuhan ke bisnis logistik. Perkembangan teknologi terdiri dari *sustainability effort* dari operator terminal dan *shipping lines,* adopsi *smart ports* di negara maju, serta meningkatnya sistem *multimodal transport*. Lalu aspek terakhir yaitu evolusi *supply* dan *demand* terdiri dari *rebound* dari *volume* perdagangan global paska pandemi, meningkatnya ukuran kapal peti kemas dan nonpetikemas, meningkatnya kontainerisasi berbagai komoditas, serta meningkatnya volume *transhipment* dunia.

PORT INDUSTRY ANALYSIS

GLOBAL PORT TREND

Currently there are eleven global trends in the port industry, divided into three main categories, as illustrated in figure 3.1. Ecosystem development consisting of consolidating port operators, forming shipping lines alliances to increase bargaining power, expanding shipping lines as terminal operators, and expanding port operators into the logistics business. Technological developments consisting of sustainability efforts by terminal operators and shipping lines, the adoption of smart ports in developed countries, and an increase in multimodal transport systems. The last aspect involves the evolution of supply and demand consisting of a rebound in post-pandemic global trade volumes, increasing the size of container and non-container ships, increasing containerization of various commodities, and increasing world transhipment volumes.

Gambar 3.1 Sebelas Tren Kepelabuhan Global yang Ada
Figure 3.1 Eleven Existing Global Port Trends



Sumber: Analisis BCG untuk *Masterplan* Pelindo 2021-2025
Source: BCG Analysis for the Pelindo Master Plan 2021-2025

KONSOLIDASI DARI OPERATOR PELABUHAN

Saat ini terjadi *trend* penggabungan dan akuisisi pada operator pelabuhan dunia. Penggabungan dan akuisisi (M&A) yang terjadi di seluruh dunia, baik di Asia, Eropa, maupun Afrika diilustrasikan pada gambar 3.2. Konsolidasi pelabuhan didorong oleh beberapa faktor pasar dan internal seperti adanya limitasi *organic growth* karena akses kepada lahan, *counteraction* dari meningkatnya *bargaining power shipping lines*, serta bertambahnya akses pendanaan dari investor untuk perusahaan pelabuhan. Penggabungan dan akuisisi juga dianggap sebagai strategi yang tidak terlalu berisiko jika dibandingkan dengan *greenfield growth* untuk mengembangkan pelabuhan.

CONSOLIDATION OF PORT OPERATORS

Mergers and acquisitions of port operators have also taken place in recent years. The number of M&A worldwide continued to increase from 2019 to Q1 2020, in Asia, Europe and Africa as illustrated in Figure 3.2. Port consolidation is driven by a number of market and internal factors such as limitations to organic growth due to access to land, counteraction to increased bargaining power shipping lines, and increased access to funding from investors for port companies. Mergers and acquisitions are also considered a less risky strategy when compared to greenfield growth by developing ports.

Gambar 3.2 Konsolidasi Pelabuhan di Asia, Eropa dan Afrika dari Tahun 2019
Figure 3.2 Consolidation of Ports in Asia, Europe and Africa from 2019



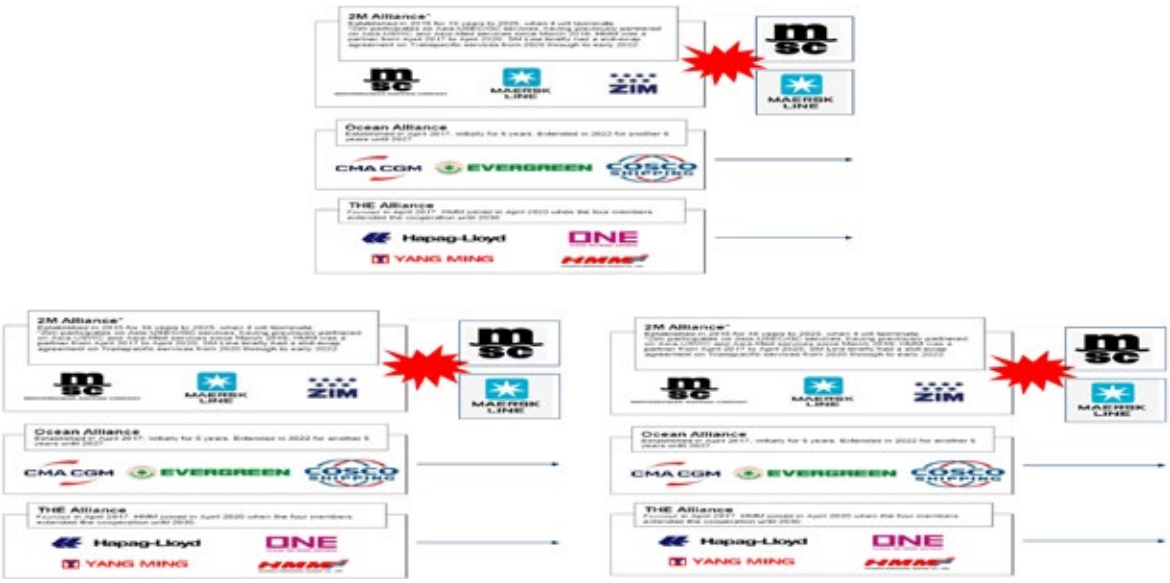
Sumber: *Drewry*, Analisis BCG untuk *Masterplan* Pelindo 2021-2025
Source: Drewry, BCG Analysis for the Pelindo Master Plan 2021-2025

PERUBAHAN ALIANSI *SHIPPING LINE*

Aliansi *shipping line* dimulai pada tahun 1990-an, dan anggotanya terus meningkatkan pangsa pasar kumulatif global. Tiga aliansi terbesar adalah Maersk dan MSC (2M), *Ocean Alliance* (CMA CGM, Cosco dan Evergreen), dan *The Alliance* (Hapag-Lloyd, Yang Ming, dan *Ocean Network Express*). Aliansi *shipping line* didorong oleh kebutuhan dalam menghadapi persaingan dengan para pemain besar, perluasan area pelayanan dan ketersediaan kapal, dan memanfaatkan *economies of scale* serta menurunkan biaya. Namun peta global aliansi *shipping line* ini akan berubah menyusul rencana Maersk untuk mengakhiri aliansi 2M yang dipercaya saat ini sedang dalam tahap finalisasi. Hal ini dikarenakan Maersk memiliki fokus yang baru dalam strategi bisnisnya dari skala ekonomi menjadi *end-to-end solution* yang mengharuskan Maerks untuk dapat mengontrol jaringan distribusinya. Berakhirnya aliansi *shipping line* 2M akan merubah pangsa pasar *East-West shipping routes* dari 3 (tiga) aliansi besar dengan fokus skala ekonomi menjadi 4 (empat) *network* jaringan besar yang terdiri dasi MSC, Maersk Line (2M), *Ocean Alliance and The Alliance*.

ESTABLISHMENT OF SHIPPING LINE ALLIANCE

Shipping line alliances began in the 1990s, and their members have continued to increase their global cumulative market share. The three largest alliances are Maersk and MSC (2M), Ocean Alliance (CMA CGM, Cosco and Evergreen), and The Alliance (Hapag-Lloyd, Yang Ming, and Ocean Network Express). Shipping line alliances are driven by the need to face competition from big players, expand service areas and ship availability, and take advantage of economies of scale and lower costs. However, the global map of the shipping line alliance will change following Maersk's plan to end the 2M alliance, which is believed to be currently in the finalization stage. This is because Maersk has a new focus in its business strategy from economies of scale to end-to-end solutions that require Maersk to be able to control its distribution network. The end of the 2M shipping line alliance will change the market share of East-West shipping routes from 3 (three) major alliances with a focus on economies of scale to 4 (four) large networks consisting of tie MSC, Maersk Line (2M), Ocean Alliance and The Alliance.



Sumber: Drewry, *Container Shipping Market Outlook* 2023
Source: Drewry, Container Shipping Market Outlook 2023

EKSPANSI *PORT* OPERATOR KE BISNIS LOGISTIK

Untuk turut meningkatkan kontrol dari kualitas pelayanan di pelabuhan, para operator pelabuhan global juga sudah masuk ke bisnis logistik darat dan hal ini sedang menjadi tren yang sedang terjadi, seperti DP *World*, *Hutchison Ports*, PSA dan *Evergreen*. DP *World* memiliki bisnis *trucking* dan *distribution centres* di seluruh dunia untuk mendukung bisnis kepelabuhan. *Hutchison Ports* menyediakan jasa *freight forwarding*, *warehousing*, *project logistics*, serta *intermodal management*. PSA menyediakan jasa *internet of logistics* yang dapat meng-*trace* perpindahan barang di seluruh aspek *value chain* logistik dan menyediakan jasa *analytics* untuk logistik yang diberikan. Evergreen Logistics menyediakan jasa *freight forwarding*, *project logistics*, *warehousing*, dan juga jasa logistik udara. Tren masuknya operator pelabuhan global ke dalam bisnis logistik darat ini juga didorong oleh berbagai sisi internal dan eksternal, yaitu untuk meningkatkan kontrol terhadap performa *end-to-end* dari *value chain* logistik, mengambil bagian dari pasar logistik darat yang merupakan bagian besar dari pasar logistik, dan didorong oleh kemampuan investasi yang besar sebab bisnis pelabuhan cukup *profitable*.

PORT OPERATOR EXPANSION INTO LOGISTICS BUSINESS

To help improve the control of service quality at ports, global port operators have also entered the land logistics business and this is becoming an ongoing trend in areas such as DP World, Hutchison Ports, PSA and Evergreen. DP World has trucking businesses and distribution centers around the world to support its port business. Hutchison Ports provides freight forwarding, warehousing, project logistics and intermodal management services. PSA provides an internet of logistics services that can trace the movement of goods in all aspects of the logistics value chain and provides analytics services for the logistics provided. Evergreen Logistics provides freight forwarding services, project logistics, warehousing, and also air logistics services. The trend of global port operators' entry into the land logistics business is also driven by internal and external factors, namely to increase control over the end-to-end performance of the logistics value chain, take part in the land logistics market which is a large part of the logistics market, and is driven by large investment capabilities as the port business is quite profitable.

SUSTAINABILITY EFFORT DARI OPERATOR TERMINAL DAN *SHIPPING LINES*

Meningkatnya *sustainability effort* yang dilakukan oleh operator pelabuhan dan *shipping lines* didorong oleh faktor internal dan eksternal seperti meningkatnya tekanan dari pemerintah, pemberian premium dari investor dan bank kepada perusahaan yang lebih *sustainable*, dan pengurangan biaya dari efisiensi bahan bakar. Beberapa pemain global seperti Maersk, CMA CGM, MSC, *Cosco Shipping* dan *Wasa Line*. Maersk berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan penggunaan karbon. CMA CGM mengganti bahan bakar karbon menjadi *biofuel*. MSC menggunakan campuran 30% *biofuel*, dan menghasilkan pengurangan emisi CO_2 sebanyak 15%-20%. *Cosco Shipping* mengoptimalisasi proses di pelabuhan dan navigasi untuk mengurangi waktu *turnaround*. Wasaline menggunakan baterai sebagai pengganti bahan bakar.

SUSTAINABILITY EFFORT OF TERMINAL OPERATORS AND SHIPPING LINES

The increased sustainability efforts made by port operators and shipping lines are driven by internal and external factors such as increasing pressure from governments, premiums given by investors and banks to companies that are more sustainable, and reduced costs from fuel efficiency. Global players include Maersk, CMA CGM, MSC, Cosco Shipping and Wasa Line. Maersk strives to increase efficiency and reduce carbon usage. CMA CGM replaces carbon fuels with biofuels. MSC uses a 30% blend of biofuels, which results in a 15%-20% reduction in CO2 emissions. Cosco Shipping optimizes port and navigation processes to reduce turnaround times. Wasaline uses batteries instead of fuel.

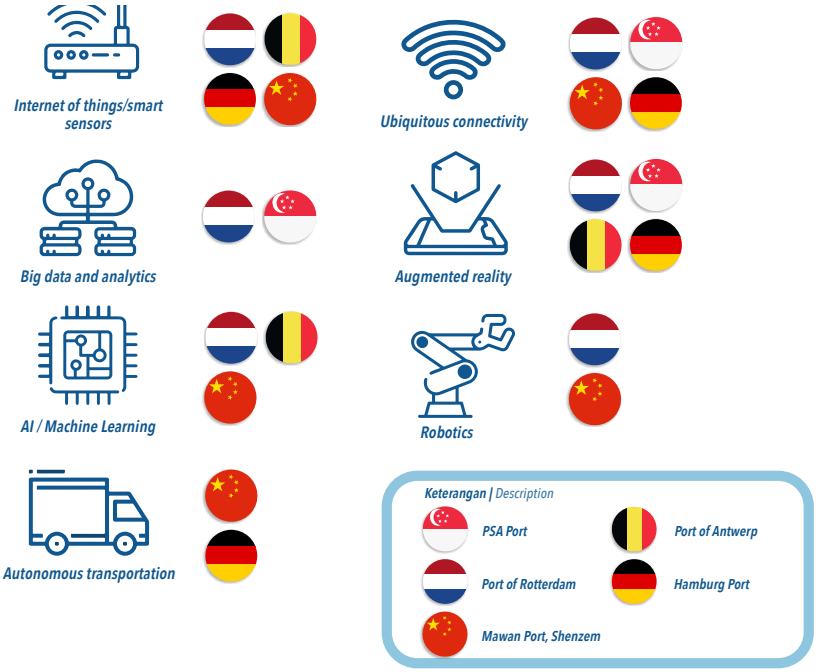
ADOPSI *SMART PORTS* DI NEGARA MAJU

Adopsi *smart ports* terus menjadi semakin populer, terutama di negara maju. Beberapa contoh *digital tools* yang digunakan oleh *smart ports* adalah penggunaan *internet of things* dan *smart sensors*, *big data analytics*, AI dan *machine learning*, *ubiquitous connectivity*, *augmented reality*, *autonomous transportation* serta *robotics*. Salah satu contoh *smart ports* yang ada saat ini adalah *Port of Antwerp* di Belgia yang menggunakan teknologi *blockchain*, *augmented reality*, dan sensor untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi. Gambar 3.3 memperlihatkan secara lengkap *smart ports* di beberapa negara serta *digital tools* yang digunakan di masing-masing *smart ports*.

ADOPTION OF SMART PORTS IN ADVANCED COUNTRIES

The adoption of smart ports continues to become increasingly popular, especially in developed countries. Examples of digital tools used by smart ports are the use of the internet of things and smart sensors, big data analytics, AI and machine learning, ubiquitous connectivity, augmented reality, autonomous transportation and robotics. One example of a smart port that exists today is the Port of Antwerp in Belgium that uses blockchain technology, augmented reality, and sensors to increase security and efficiency. Figure 3.3 shows a complete list of smart ports in several countries as well as the digital tools used in each smart port.

Gambar 3.3 *Smart Ports* di Beberapa Negara serta *Digital Tools* yang Digunakan
Figure 3.3 Smart Ports in Several Countries and the Digital Tools Used



Sumber: Orbis Research, Press research, Analisis BCG untuk *Masterplan* Pelindo 2021-2025
Source: Orbis Research, Press research, BCG Analysis for the Pelindo Master Plan 2021-2025

MENINGKATNYA SISTEM TRANSPORTASI MULTIMODAL

Meningkatnya sistem transportasi multimodal yang dilakukan oleh berbagai negara global didorong oleh upaya peningkatan infrastruktur, *sustainability*, dan *congestion* jalanan di pelabuhan. Semakin banyaknya pelabuhan yang terhubung dengan infrastruktur intermodal (kereta api, bandara, dan sistem transportasi lain) juga akan mendukung konektivitas pelabuhan dan menjadikan transportasi laut menjadi semakin menarik sebagai salah satu sarana perdagangan global. Sistem transportasi intermodal juga memberikan opsi yang lebih ramah lingkungan, terutama untuk kargo yang dikirimkan ke tempat dengan jarak yang panjang. Namun, sistem ini memadatkan jalanan dengan truk karena volume perdagangan yang kian

INCREASING MULTIMODAL TRANSPORTATION SYSTEM

The increase in the multimodal transportation system in a number of global countries is driven by efforts to improve infrastructure, sustainability, and road congestion at ports. The increasing number of ports connected to intermodal infrastructure (railways, airports and other transportation systems) also supports port connectivity and makes sea transportation more attractive as a means of global trade. The intermodal transport system also provides a greener option, especially for cargo that is transported over long distances. However, this system blocks streets with trucks as the trading volume is growing every year. The volume of goods shipped by intermodal is predicted to grow. The forecast for intermodal volume is to increase by 3% per year until 2024 and

membesar setiap tahunnya. Volume barang yang dikirimkan oleh intermodal diprediksi akan berkembang. *Forecast* terhadap volume intermodal akan naik sebesar 3% per tahun hingga 2024 dan pelabuhan akan menjadi titik utama intermodal terutama untuk *consumer goods, capital goods*, dan *industrial supplies*.

REBOUND VOLUME PERDAGANGAN PASCA PANDEMI

Setelah adanya pandemi COVID-19 yang dimulai pada akhir tahun 2019, volume perdagangan global menurun pada tahun 2020. Hal ini berkaitan dengan menurunnya aktivitas ekonomi di seluruh dunia. Terdapat 2 skenario pemulihan terhadap volume perdagangan global di tahun 2021 yakni skenario *upside* atau *downside* seperti yang diilustrasikan pada gambar 3.4, dan kedua skenario tersebut dipengaruhi oleh *key success factor* yakni keberhasilan program vaksinasi di seluruh dunia yang akan membantu bisnis untuk beroperasi kembali secara normal dan mendorong ekonomi kembali seperti semula. Skenario *upside* terjadi apabila produksi dan distribusi vaksin dipercepat sehingga volume perdagangan global diperkirakan akan mengalami *rebound* dan melewati volume pre-pandemi di 2021 serta akan bertumbuh dengan normal pada 2022 dan seterusnya. PDB secara global diperkirakan akan bertambah ±1% di 2021 dan volume perdagangan barang dunia akan tumbuh ±2,5%. Skenario *downside* terjadi apabila produksi vaksin tidak memenuhi permintaan dan terdapat potensi munculnya varian baru virus yang lebih resisten terhadap vaksin sehingga volume perdagangan global diperkirakan tidak akan mengalami *rebound* dan tidak melewati volume pre-pandemi di 2021 serta tidak bertumbuh dengan normal pada 2022 dan seterusnya. Hal ini berpotensi mengurangi 1% dari pertumbuhan PDB global di 2021 dan pertumbuhan volume perdagangan barang turun hampir 2%.

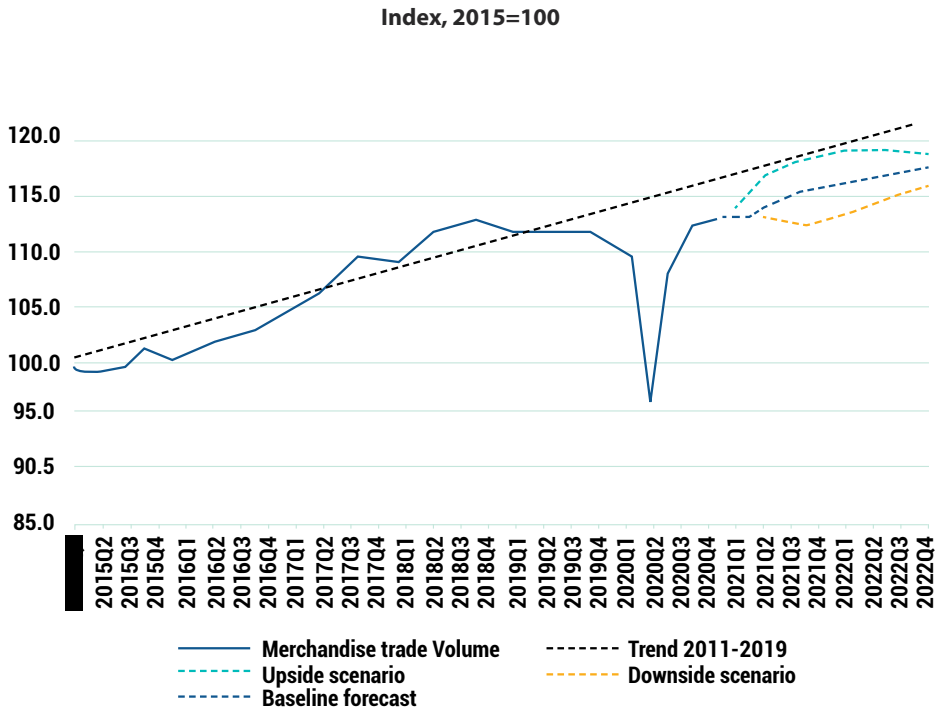
ports will be the main intermodal point, especially for consumer goods, capital goods, and industrial supplies.

POST-PANDEMIC TRADE VOLUME REBOUND

Following the COVID-19 pandemic, which started at the end of 2019, global trade volume decreased in 2020, due to the decline in economic activity around the world. There were 2 recovery scenarios for global trade volume in 2021, namely the upside or downside scenario as illustrated in Figure 3.4, and these two scenarios were influenced by a key success factor, namely the success of vaccination programs worldwide that helped businesses operate normally and encouraged the economy to rebound to normal. The upside scenario occurs if production and distribution of vaccines are accelerated so that global trade volume is expected to rebound and exceed the pre-pandemic volumes in 2021, and will grow normally in 2022 and beyond. Global GDP was expected to increase by ±1% in 2021 and the volume of world trade in goods to grow by ±2.5%. The downside scenario occurs if vaccine production does not meet demand and there is potential for the emergence of new variants of viruses that are more resistant to vaccines so that global trade volume is not expected to rebound and not exceed pre-pandemic volumes in 2021 and not grow normally in 2022 and so on. This has the potential to deduct 1% from global GDP growth in 2021 and growth in goods trade volumes to fall by almost 2%.

Gambar 3.4 Grafik Volume Perdagangan Dunia Kuartal 1 Tahun 2015 – Kuartal IV Tahun 2022

Figure 3.4 Graph of World Trade Volume 1st Quarter 2015 – 4th Quarter 2022



Sumber: *World Economic Forum, World Trade Organization*, Analisis BCG untuk *Masterplan* Pelindo 2021-2025

Source: World Economic Forum, World Trade Organization, BCG Analysis for the Pelindo Master Plan 2021-2025

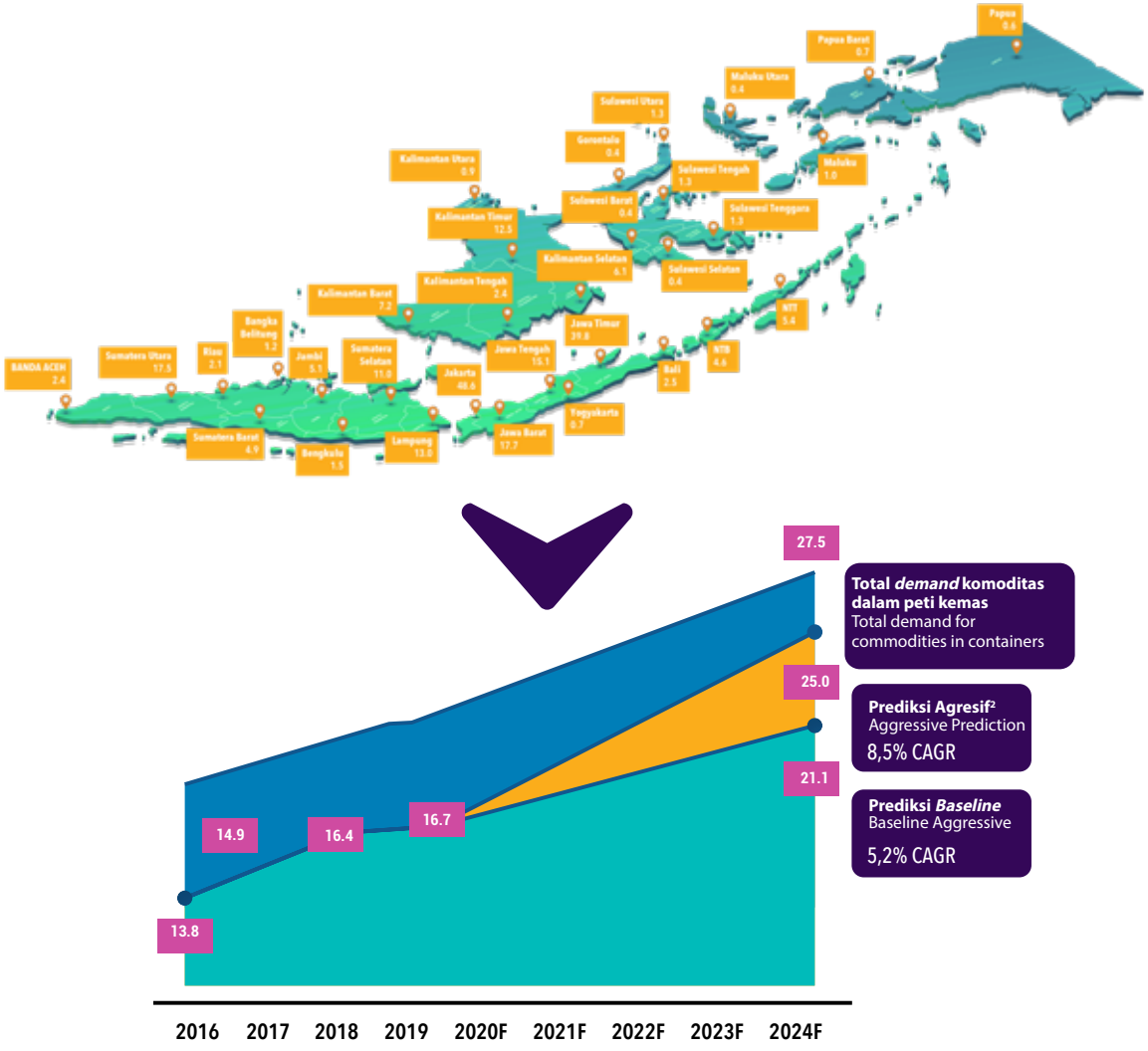
MENINGKATNYA KONTAINERISASI BERBAGAI KOMODITAS

Meningkatnya tingkat kontainerisasi komoditas didorong oleh perbaikan infrastruktur dan operasional pelabuhan. Saat ini, tingkat kontainerisasi komoditas di Indonesia hanya mencapai 14% dengan komoditas utama berupa produk manufaktur, sayuran, makanan siap saji, dan protein (hewan). Dengan pengembangan pelabuhan yang terus dilakukan, tingkat kontainerisasi diprediksi akan terus meningkat, seperti yang diilustrasikan pada gambar 3.5. Pertumbuhan kontainerisasi diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang tetap apabila pertumbuhan GDP berada pada prediksi *baseline* 5,2%. Namun, bila prediksi pertumbuhan GDP *agresif* 8,5%, maka akan terjadi peningkatan terhadap pertumbuhan kontainerisasi sebanyak 4%.

INCREASING CONTAINERIZATION OF VARIOUS COMMODITIES

The increase in the level of commodity containerization has been driven by improvements in port infrastructure and operations. Currently, the level of commodity containerization in Indonesia only reaches 14% with the main commodities being manufactured products, vegetables, ready-to-eat food, and protein (animals). With the continuous development of ports, it is predicted that the level of containerization will continue to increase, as illustrated in Figure 3.5. Containerization growth is predicted to see steady growth if GDP growth is at the baseline prediction of 5.2%. However, if the prediction of aggressive GDP growth is 8.5%, there will be an increase in containerization growth of 4%.

Gambar 3.5 Kontainerisasi Komoditas di Indonesia dan Prediksi Tingkat Kontainerisasi
Figure 3.5 Commodity Containerization in Indonesia and Prediction of Containerization Levels



Sumber: Kajian Integrasi BUMN Pelabuhan, Badan Pusat Statistik (BPS), MoT, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Analisis BCG untuk *Masterplan* Pelindo 2021-2025
Source: Port BUMN Integration Study, Central Bureau of Statistics (BPS), MoT, National Medium Term Development Plan (RPJMN), BCG Analysis for Pelindo Masterplan 2021-2025

MENINGKATNYA VOLUME *TRANSHIPMENT* DUNIA

Meningkatnya proporsi volume *transhipment,* seperti yang diilustrasikan pada gambar 3.6, didorong oleh infrastruktur dan pola pelayaran *shipping lines*. Faktor-faktor yang mendorong peningkatan volume ini antara lain:

1. Meningkatnya terminal khusus *transhipment* di dunia, para pelaku operator pelabuhan mengembangkan *transhipment hub* sebagai tempat menaruh petikemas di tengah agar dapat menciptakan rute baru dan koneksi bagi *shipping lines* yang telah menempuh jarak pelayaran jauh.
2. Efisiensi rute yang dilakukan *shipping network* untuk mengoptimalkan biaya operasi.
3. Meningkatnya perdagangan global dan hubungan antar negara dengan jarak jauh.

INCREASING WORLD TRANSHIPMENT VOLUME

The increase in the proportion of transhipment volume, as illustrated in Figure 3.6, is driven by infrastructure and shipping patterns of shipping lines. Factors driving this increase in volume include:

1. The increase in special transhipment terminals in the world, port operators are developing transhipment hubs as a area to place containers enroute so they can create new routes and connections for shipping lines that travel long shipping distances.
2. Route efficiency by the shipping network to optimize operating costs.
3. Increased global trade and long.

Gambar 3.6 Volume Petikemas yang Dikirim melalui *Transhipment*

Figure 3.6 Volume of Containers Sent Via Transhipment



Sumber: Drewry, *The Geography of Transport Systems* 2020

Source: Drewry, The Geography of Transport Systems 2020

ARUS PERDAGANGAN GLOBAL *(GLOBAL CONTAINER TRADE THROUGHPUT)*

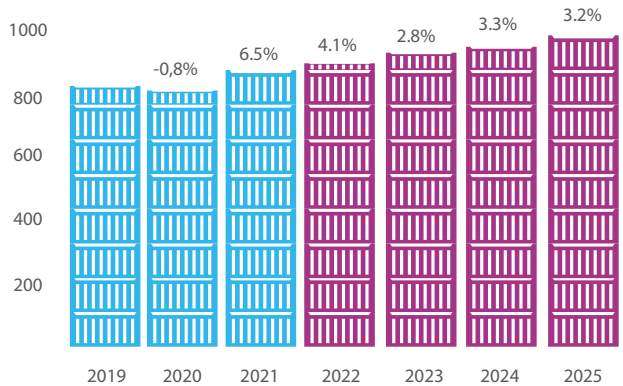
Volume arus kontainer dunia diperkirakan tumbuh sebesar 2,8% pada tahun 2023, turun dari proyeksi pertumbuhan tahun 2022 yang sebesar 4,1%(Drewry' *Forecart* - Agustus, 2022). Hal sejalan dengan prediksi ancaman resesi dan stagflasi global pada tahun 2023 yang diakibatkan inflasi dan masih belum stabilnya kondisi geopolitik global.

GLOBAL TRADE TRAFFIC (GLOBAL CONTAINER TRADE THROUGHPUT)

The volume of global container traffic is expected to grow by 2.8% in 2023, down from the 2022 projected growth of 4.1% (Drewry' Forecast - August, 2022). This is in line with predictions of the threat of global recession and stagflation in 2023 due to inflation and the still unstable global geopolitical conditions.

Gambar Proyeksi Arus Kontainer Global

Global Container Traffic Projection



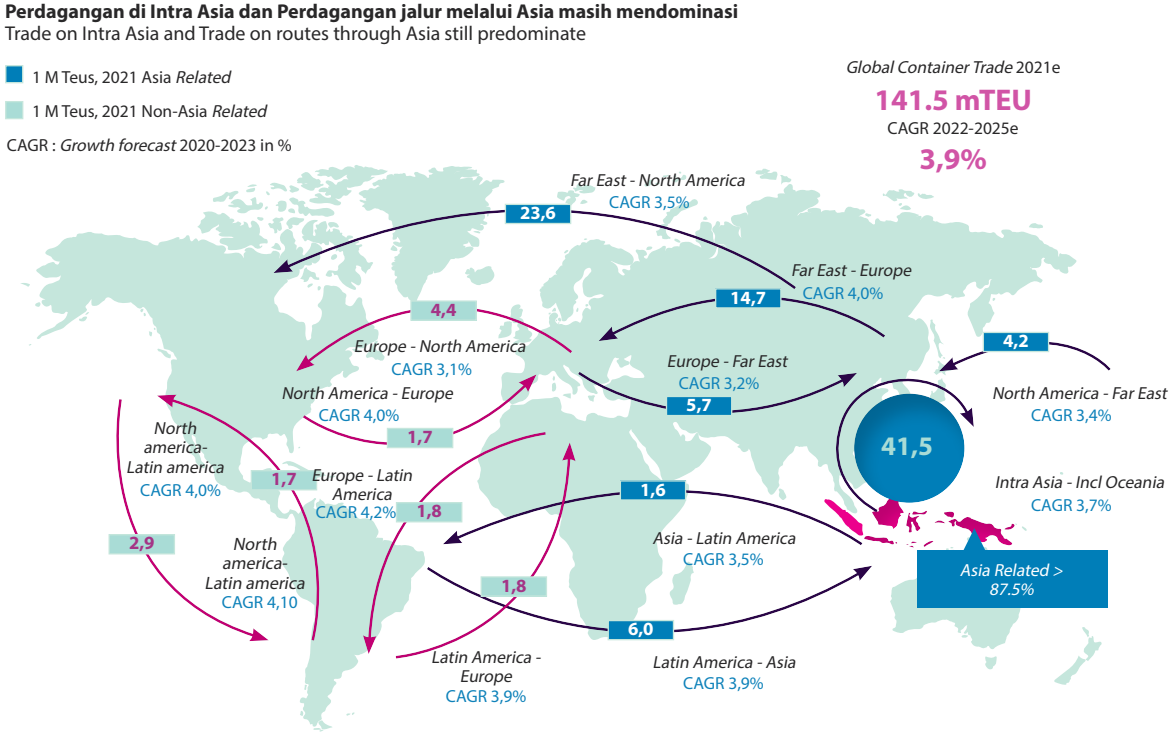
Sumber: Drewry, Agustus 2022

Source: Drewry, August 2022

Berdasarkan data yang bersumber dari DHL Tahun 2022 menunjukkan bahwa perdagangan (*container trade*) Intra-Asia dan yang melewati Asia (*Asia related throughput*) adalah sebesar 87,5% dari total perdagangan global. Dari proporsi tersebut, sebesar 41,5 juta Ton atau sekitar 30% merupakan perdagangan dengan jalur yang melewati Asia.

Based on data sourced from DHL, 2022, intra-Asian trade (container trade) and through Asia (Asia related throughput) is 87.5% of total global trade. Of this proportion, 41.5 million tons or around 30% is trade through Asia.

Gambar *Global Container Trade and Throughput*
Global Container Trade and Throughput



ANALISIS POSISI PELINDO DALAM INDUSTRI

POSISI PELINDO SEBAGAI OPERATOR PETIKEMAS GLOBAL

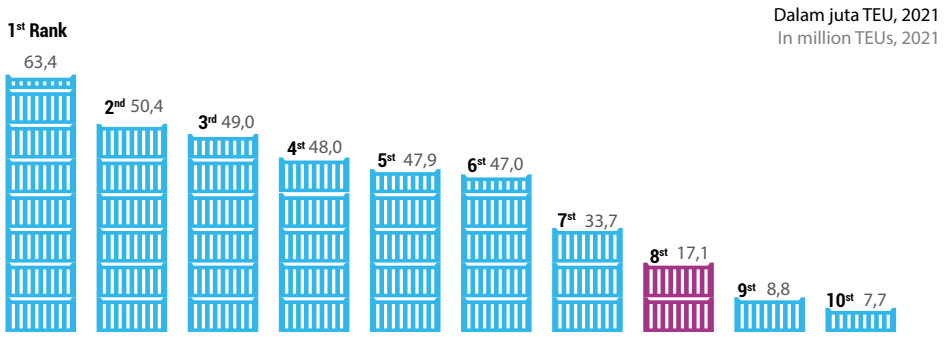
Penggabungan keempat Pelindo menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan menghasilkan operator petikemas terbesar nomor 8 di dunia dengan *throughput* sebesar 17,1 juta pada tahun 2021. Peningkatan skala PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ini diharapkan akan meningkatkan *brand awareness* pelabuhan di Indonesia yang berdampak secara positif terhadap peningkatan trafik di masa datang.

PELINDO'S POSITION IN THE INDUSTRY ANALYSIS

PELINDO'S POSITION AS A GLOBAL CONTAINER OPERATOR

The merger of the four Pelindos into PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has produced the 8th largest container operator in the world with a throughput of 17.1 million in 2021. The increased scale of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is expected to increase brand awareness of ports in Indonesia, which will have a significant impact positive for increasing traffic in the future.

Gambar *Top* 10 Operator Terminal Global dan Internasional
Top 10 Global and International Terminal Operators



Sumber: Data *Drewry* 2022, Data *throughput* Pelindo
Source: Drewry data 2022, Pelindo throughput data

DAYA TARIK PELABUHAN PELINDO SEBAGAI *TRANSHIPMENT HUB* DI ASIA TENGGARA

Dibandingkan dengan *transhipment hub* Asia Tenggara lainnya, daya tarik pelabuhan Pelindo masih harus ditingkatkan jika ingin dikembangkan untuk dapat bersaing dengan pelabuhan yang menguasai pasar seperti PSA Singapura dan Tanjung Pelepas. Terdapat empat pelabuhan Pelindo yang mempunyai potensi sebagai pelabuhan *transhipment hub* Asia Tenggara yaitu Tanjung Priok, Tanjung Perak, Kuala Tanjung, dan Belawan. Dari keempat pelabuhan tersebut, Kuala Tanjung dan Belawan berada pada route perdagangan utama di Selat Malaka. Tanjung Priok memiliki keunggulan dibandingkan pelabuhan Pelindo lainnya dalam hal pengalaman bekerja sama dengan operator pelabuhan lainnya pada Terminal NPCT1 (Dengan PSA) serta JICT dan Koja (dengan HPH). Pelabuhan-pelabuhan Pelindo pun masih perlu meningkatkan beberapa aspek untuk dapat bersaing dengan PSA Singapura dan Pelabuhan Tanjung Pelepas antara lain kerja sama dengan *shipping lines*, produktivitas dan reliabilitas operasional, ketersediaan *feeder network* yang luas, biaya yang kompetitif, dan insentif-insentif perpajakan serta cukai.

ATTRACTION OF PELINDO PORT AS A TRANSHIPMENT HUB IN SOUTHEAST ASIA

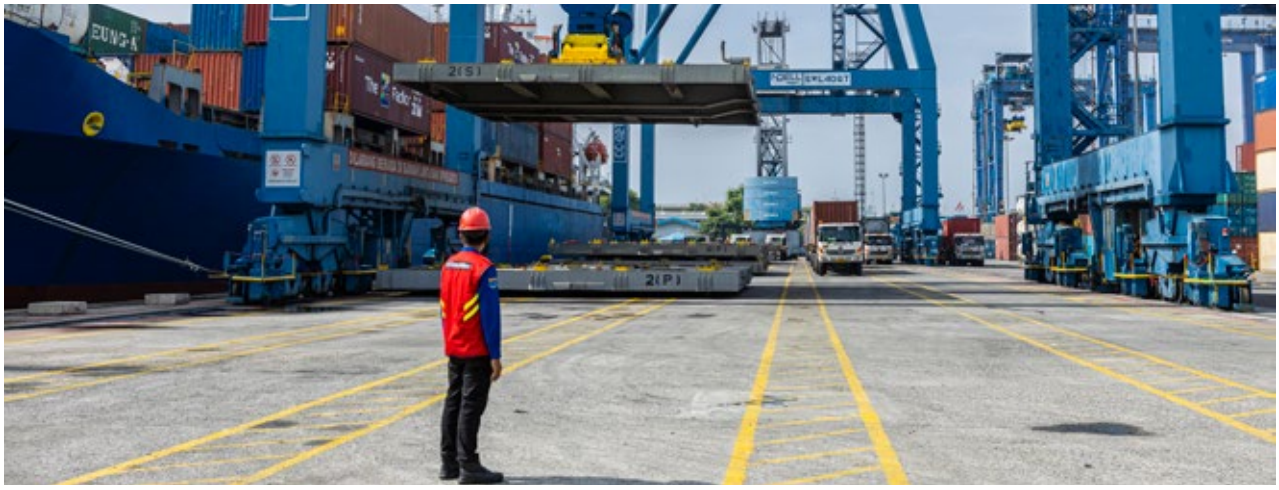
Compared to other transhipment hubs in Southeast Asia, the attractiveness of Pelindo's ports still needs to be increased if it is to be developed to compete with ports that dominate the market such as PSA Singapura and Tanjung Pelepas. There are four Pelindo ports that have the potential to become transhipment hub ports for Southeast Asia, namely Tanjung Priok, Tanjung Perak, Kuala Tanjung and Belawan. Of the four ports, Kuala Tanjung and Belawan are on the main trading routes in the Malacca Strait. Tanjung Priok has an advantage over other Pelindo ports in terms of experience working with other port operators at Terminal NPCT1 (With PSA) as well as JICT and Koja (with HPH). Pelindo ports still need to improve several aspects to compete with PSA Singapura and Tanjung Pelepas Port, including cooperation with shipping lines, operational productivity and reliability, availability of a broad feeder network, competitive costs, and tax and excise incentives.

No	Uraian Description	PSA Singapura	Tanjung Pelepas	Tanjung Priok	Tanjung Perak	Kuala Tanjung	Belawan
1	Kedekatan dengan jalur utama Proximity to the main routes	Dekat dengan main route Proximity to the main routes	Dekat dengan main route Proximity to the main routes	Tidak dilewati main route Does not pass the main routes	Tidak dilewati main route Does not pass the main routes	Dekat dengan main route Proximity to the main routes	Dekat dengan main route Proximity to the main routes
2	Kerja sama dengan *shipping lines* Cooperation with shipping lines	JV dengan CMA CGM dan Cosco JV with CMA CGM and Cosco	Kepemilikan APM (afiliasi Maersk) 30% APM ownership (Maersk affiliate) 30%	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Produktivitas dan reliabilitas operasional Operational productivity and reliability	*Turnaround* time: 26 jam Turnaround time: 26 hours	*Turnaround* time: N/A Turnaround time: N/A	*Turnaround* time: 33 jam Turnaround time: 33 hours	*Turnaround* time: 20 jam Turnaround time: 20 hours	*Turnaround* time: 44 jam Turnaround time: 44 hours	*Turnaround* time: 44 jam Turnaround time: 44 hours

No	Uraian Description	PSA Singapura	Tanjung Pelepas	Tanjung Priok	Tanjung Perak	Kuala Tanjung	Belawan
		Berth movement: 54 Berth movement: 54	*Berth movement*: 32 Berth movement: 32	*Berth movement*: 8 Berth movement: 8	*Berth movement*: 10 Berth movement: 10	*Berth movement*: N/A Berth movement: N/A	*Berth movement*: 2 Berth movement: 2
4	Kedalaman draft Draft depth	18 m 18 m	15-19 m 15-19 m	12-16 m 12-16 m	9.7-12 m 9.7-12 m	16-17 m 16-17 m	8-10 m 8-10 m
5	Ketersediaan layanan bunkering Availability of bunkering services	Ketersediaan layanan bunkering Availability of bunkering services	Ketersediaan layanan bunkering Availability of bunkering services	Ketersediaan layanan bunkering Availability of bunkering services	Ketersediaan layanan bunkering Availability of bunkering services	Sedang dalam pembangunan Availability of bunkering services	Ketersediaan layanan bunkering Availability of bunkering services
6	Ketersediaan *feeder network* Availability of network feeders	*Feeder network* yang tersambung dengan 600 global ports Feeder network connected to 600 global ports	*Feeder network* yang luas dan terpusat di Kuching, Kulu, dan KK Wide and centralized feeder network in Kuching, Kulu, and KK	Terdapat *feeder network* ke Sumatera, Kalimantan, dan Bangka There is a feeder network to Sumatra, Kalimantan, and Bangka	Terdapat *feeder network* ke Sulawesi, Maluku, dan Papua There is a feeder network to Sulawesi, Maluku, and Papua	N/A	N/A
7	Kerja sama dengan pelabuhan lain Cooperation with other ports	PSA memiliki banyak pelabuhan secara global PSA has multiple ports globally	APM mengoperasi 76 pelabuhan global APM operates 76 ports globally	NPCT1 (dengan PSA) JICT & Koja (dengan HPH) NPCT1 (with PSA) JICT and Koja (with HPH)	N/A	N/A	N/A
8	Konektivitas hinterland Hinterland connectivity	Tersambung dengan rel kereta dan *trucking* Connected to railroads and trucking	Tersambung dengan rel kereta dan jalan tol Connected to railroads and toll roads	Tersambung dengan jalan tol dan kawasan industri Connected to toll roads and industrial areas	Tersambung dengan jalan tol dan kawasan industri Connected to toll roads and industrial areas	Tersambung dengan jalan tol dan kawasan industri Connected to toll roads and industrial areas	Tersambung dengan jalan tol dan kawasan industri Connected to toll roads and industrial areas
9	Biaya yang kompetitif Competitive costs	Biaya/petikemas: 62 USD Cost/container: 62 USD	Biaya/petikemas: 81 USD Cost/container: 81 USD	Biaya/petikemas: 112.5 Cost/container: 112,5 USD	Biaya/petikemas: 53.1 USD Cost/container: 53,1 USD	Biaya/petikemas: 155 USD Cost/container: 155 USD	Biaya/petikemas: 155 USD Cost/container: 155 USD
10	Volume di gateway Volume on the gateway	4.48 juta TEU 4,48 million TEU	1.39-9.00 juta TEU 1,39-9,00 million TEU	4.76 juta TEH (int'l) 4,76 million TEU (int'l)	3.86 TEU 3,86 TEU	24 ribu TEU 24 thousand TEU	706 ribu TEU 706 thousand TEU
11	Insentif perpajakan dan cukai Tax and excise incentives	Adanya *free trade zone* bebas cukai dan pajak impor Free trade zone free of excise and import taxes	Pelepas *Free Zone* dengan pembebasan cukai Free Zone with tax exemption	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Analisis BCG untuk *Masterplan* Pelindo 2021-2025
Source: BCG Analysis for the Pelindo Master Plan 2021-2025

TINJAUAN OPERASIONAL
Operational Review



STRATEGI PERUSAHAAN

RUMAH STRATEGI PERUSAHAAN

Strategi bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan diturunkan dari visi dan misi, serta tujuan berdirinya PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Kami telah memformulasikan tema strategis dari tujuan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), 4 tema strategis telah teridentifikasi yaitu:

1. Transformasi Pelabuhan Kelas Dunia
2. Penguatan Ekosistem Logistik
3. Efisiensi *Supply Chain* Maritime
4. Peningkatan *Value* Perusahaan

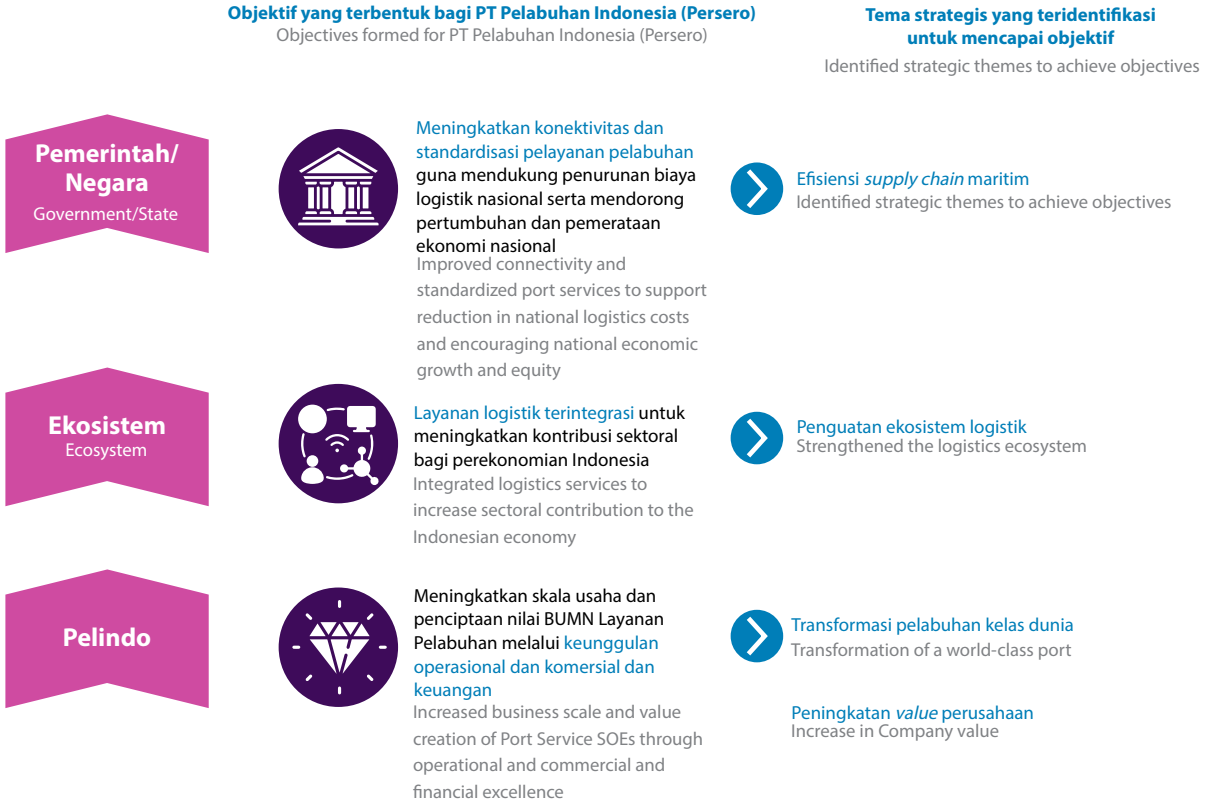
CORPORATE STRATEGY

CORPORATE STRATEGY HOUSE

The PT Pelabuhan Indonesia (Persero) strategy is derived from its vision and mission, as well as the objectives for establishing PT Pelabuhan Indonesia (Persero). We have formulated a strategic theme from the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) goals, with 4 strategic themes being identified, namely:

1. World-class port transformation
2. Strengthening the logistics ecosystem
3. Maritime supply chain efficiency
4. Increasing Company value

Gambar Objektif dan Tema Strategis yang Terbentuk
Figure Strategic Objectives and Themes Formed



Sumber: Analisis BCG, 2021 | Source: BCG Analysis, 2021

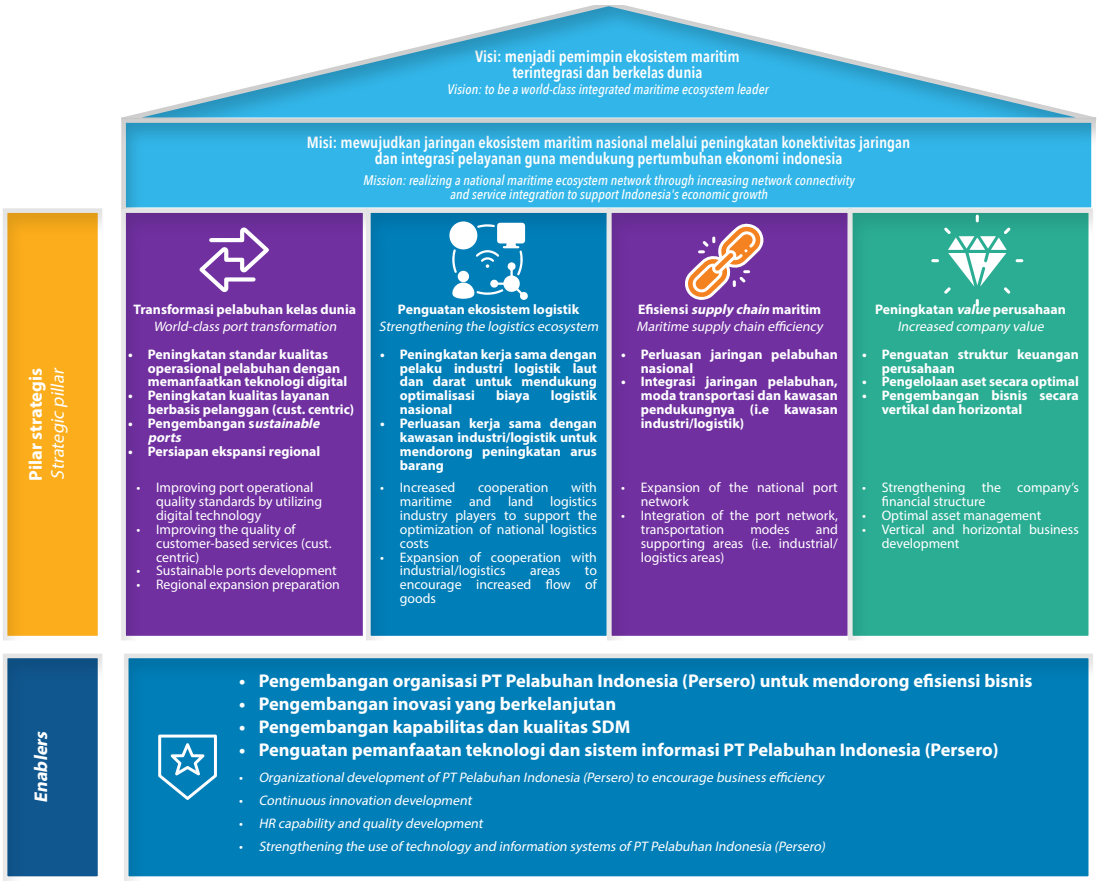
Tema strategis yang telah teridentifikasi menjadi pilar-pilar utama bagi rumah strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk periode 2021-2025. Tema strategis juga menjadi acuan untuk mendefinisikan sub-tema strategis bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk 5 (lima) tahun ke depan yang akan menjadi basis dalam mendefinisikan inisiatif strategis bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

These identified strategic themes have become the main pillars for the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) strategic house for the 2021-2025 period. The strategic theme is also a reference for defining strategic sub-themes for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for the next 5 (five) years to form the basis for defining strategic initiatives for PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Untuk mendukung ketercapaian pilar strategis utama, telah dirancang juga *key enablers* yang harus dipenuhi. *Key enablers* merupakan sekumpulan tindakan dan aktivitas utama yang akan mendorong kelancaran implementasi strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan memperkuat fondasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam mencapai visinya sebagai pemimpin ekosistem maritim Indonesia yang berkelas dunia.

To support the achievement of the main strategic pillars, key enablers have also been designed that must be met. Key enablers are a set of main actions and activities that will encourage the smooth implementation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) strategy and strengthen the foundation for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) achieving its vision as a world-class leader of Indonesia's maritime ecosystem.

Gambar Rumah Strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 2021-2025
Figure PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Strategic House 2021-2025



Sumber: Analisis BCG, 2021
Source: BCG Analysis, 2021

Penjelasan dari masing-masing komponen rumah strategis adalah sebagai berikut:

1. **Visi dan Misi**
   Rumah strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memiliki visi untuk menjadi pemimpin ekosistem maritim yang terintegrasi dan berkelas dunia, dan misi untuk mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Each strategic house component can be explained as follows:

1. **Vision and Mission**
   The PT Pelabuhan Indonesia (Persero) strategic house has a vision be a world-class integrated leader in the maritime ecosystem, and a mission to realize national maritime ecosystem network through the increment of network connectivity and service integration, to support Indonesian economic growth.

2. Transformasi Pelabuhan Kelas Dunia

Pilar strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kapabilitas PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai perusahaan penyedia jasa kepelabuhan kelas dunia. Fokus pilar strategi ini adalah peningkatan performa operasi dan pelayanan pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), melalui peningkatan standar kualitas operasional pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan cara memanfaatkan teknologi digital, sedangkan peningkatan kualitas pelayanan pelabuhan dilakukan melalui pemberian jasa layanan yang bersifat *customer centric* (berbasis pelanggan). Selain itu, peningkatan performa juga dilakukan dengan dimulainya pengembangan *sustainable ports* bagi pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Fokus terakhir dari pilar ini adalah mempersiapkan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk berekspansi secara regional di Kawasan Asia Tenggara.

3. Penguatan Ekosistem Logistik

Pilar strategi kedua dilakukan untuk membuat hubungan dengan pemain ekosistem logistik laut dan darat agar dapat mengoptimalkan biaya logistik nasional. Fokus dari pilar strategis ini adalah menjalin kerja sama dan juga potensi integrasi sistem atau layanan dengan pemain logistik laut dan darat sehingga biaya logistik dapat dioptimalkan, serta menjalin kerja sama dengan kawasan industri/logistik untuk mendorong peningkatan arus barang.

Kerjasama dengan kawasan industri/logistik dibutuhkan untuk mendukung konektivitas dengan bagian *hinterland*, serta mempermudah pemberian layanan logistik *end-to-end* bagi pelaku industri. Adanya hubungan dengan pelaku kawasan industri yang berada di satu daerah dengan pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berpotensi meningkatkan pelayanan bagi pelanggan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dari sisi kecepatan dan kemudahan.

Kerja sama dengan pelaku logistik darat juga sangat penting karena peran transportasi darat dalam membawa barang keluar dari pelabuhan dan menuju ke *end-user* dari barang tersebut. Adanya kerja sama dengan pelaku logistik darat akan meningkatkan performa operasi pelabuhan karena berpotensi meningkatkan *flow throughput*. Logistik darat yang dimaksud juga tidak terbatas pada truk saja, tapi juga mencakup angkutan kereta-api sebagai solusi logistik darat keluar dari pelabuhan.

4. Efisiensi *Supply Chain* Maritim

Pilar strategis ketiga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi *supply chain maritim* di Indonesia. Fokus dari pilar strategi ini ialah memperluas jaringan pelabuhan nasional. Walaupun PT Pelabuhan Indonesia (Persero) merupakan pemain utama dan tulang punggung kepelabuhan di Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) hanya memiliki sebagian kecil pelabuhan yang ada di Indonesia. Pelabuhan lain dimiliki pihak swasta dan juga yang masih dioperasikan pemerintah merupakan potensi besar untuk menjadi target pengembangan konektivitas bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Selain itu, integrasi antar jaringan pelabuhan, moda transportasi dan kawasan pendukung (i.e. kawasan industri/logistik) juga menjadi fokus pilar.

2. World Class Port Transformation

This strategy pillar is carried out to increase PT Pelabuhan Indonesia (Persero) capabilities as a world-class port service provider. This strategy pillar's focus is to improve the operation and service performance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ports, by improving the operational quality standards of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ports by utilizing digital technology, while improving the quality of port services is carried out by providing customer-centric services. In addition, performance improvement is also carried out by starting the development of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sustainable ports. The final focus of this pillar is to prepare PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to expand regionally in the Southeast Asian Region.

3. Strengthening the Logistics Ecosystem

The second strategic pillar is carried out to build relationships with marine and land logistics ecosystem players to optimize national logistics costs. The focus of this strategic pillar is to establish cooperation and also the potential for system or service integration with sea and land logistics players so that logistics costs can be optimized, as well as establishes cooperation with industrial/logistics areas to encourage increased goods traffic.

Cooperation with industrial/logistics areas is needed to support connectivity with the hinterland, as well as facilitate the provision of end-to-end logistics services for industrial players. Relationships exist with industrial estate players in the same area as the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) port who have the potential to improve services for customers of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in terms of speed and convenience.

Cooperation with land logistics businesses is also very important due to the role played by land transportation for bringing goods out of ports and delivering the goods to the end-users. Cooperation with land logistics businesses will improve the port operations performance as it has the potential to increase flow throughput. The land logistics in question are not limited to trucks, but also includes rail transportation as a land logistics solution out of ports.

4. Maritime Supply Chain Efficiency

This third strategic pillar aims to improve the maritime supply chain efficiency in Indonesia. The focus of this strategic pillar is to expand the national port network. Although PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is a major player and the backbone of ports in Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) only owns a small portion of ports in Indonesia. Other ports are owned by the private sector and also by the government and have the potential to become a target for connectivity development for PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Integration between port networks, transportation modes and supporting areas (i.e. industrial/logistics areas) is also this pillar's focus.

5. Peningkatan *Value* Perusahaan

Pilar strategis keempat dilakukan untuk meningkatkan *value* PT Pelabuhan Indonesia (Persero), dengan cara memperkuat struktur keuangan perusahaan agar dapat terciptanya sistem keuangan yang *prudent* dan stabil, mengoptimalkan pengelolaan aset, dan memfokuskan perusahaan untuk mengembangkan bisnis secara vertikal dan horizontal dengan memanfaatkan kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

6. *Enablers*

Seluruh pilar strategis didukung oleh adanya *enablers* yang harus direalisasikan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Sub-pilar strategis *enablers* mencakup bidang-bidang pendukung keberjalanan bisnis utama, yaitu pengembangan organisasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk mendorong efisiensi bisnis, pengembangan inovasi yang berkelanjutan, pengembangan kapabilitas dan kualitas SDM, serta penguatan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi (termasuk pengembangan integrasi sistem perusahaan (Ops dan Non-Ops) serta integrasi dengan sistem *stakeholders*/eksternal i.e. NLE).

ALIGNMENT AGENDA PRIORITAS BUMN

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ini disusun selaras dengan Rencana Strategis Kementerian BUMN tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/08/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Rencana strategis Kementerian BUMN. Proses *alignment* antara RJPP perusahaan dengan RJPP Kementerian BUMN dilakukan dengan menyelaraskan komponen pilar strategis dengan agenda prioritas Kementerian BUMN dapat dilihat sebagai berikut.

5. Increasing Company Value

The fourth strategic pillar is to increase the value of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), by strengthening the Company's financial structure to create a prudent and stable financial system, optimize asset management, and focus the Company on developing business vertically and horizontally by utilizing PT Pelabuhan Indonesia (Persero) existing capabilities and competencies.

6. Enablers

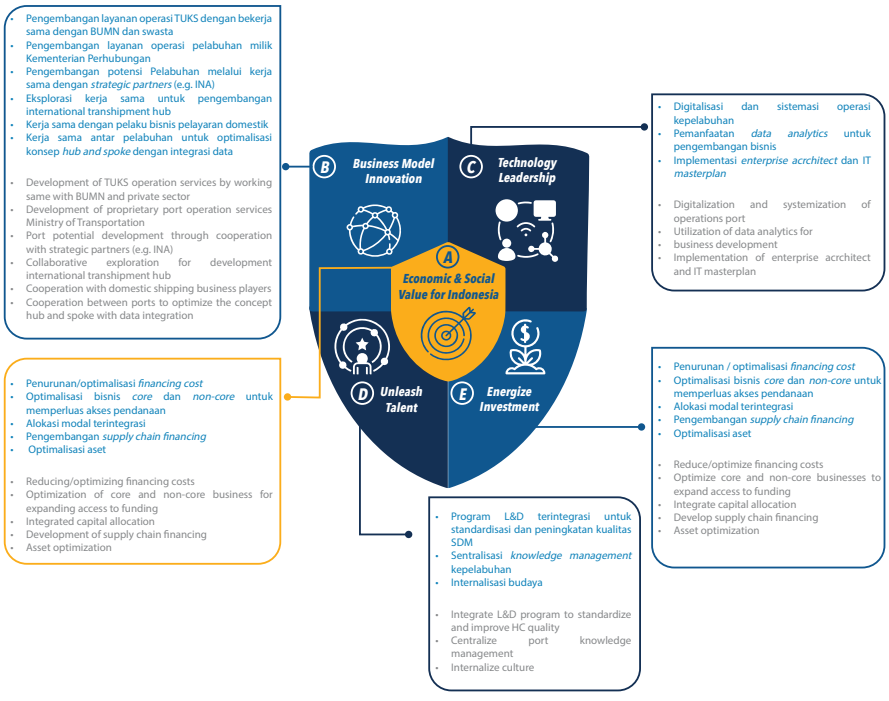
All strategic pillars are supported by enablers that must be realized by PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The strategic sub-pillars for enablers include areas of support for the main business operations, namely the development of the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) organization to promote business efficiency, development of sustainable innovations, development of HC capabilities and quality, as well as strengthening the use of technology and information systems (including development of integration company systems (Ops and Non-Ops) and integration with stakeholder/ external systems i.e. NLE).

SOE PRIORITY AGENDA ALIGNMENT

The PT Pelabuhan Indonesia (Persero) RJPP was prepared in line with the Ministry of SOEs Strategic Plan for 2020-2024 as stated in the Minister of SOEs Regulation No. PER-08/MBU/08/2020 dated August 7, 2020 concerning the Ministry of SOEs Strategic Plan. The alignment process between the Company's RJPP and the Ministry of SOEs RJPP is carried out by aligning the strategic pillars components with the Ministry of SOEs priority agenda, is shown as follows.

Gambar Matriks Keterkaitan Sub-Pilar Strategis PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan Agenda Prioritas Kementerian BUMN

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Strategic Sub Pillar Linkage Matrix with the Priority Agenda of the Ministry of SOEs



Sumber: Analisis BCG 2021 | Source: BCG Analysis, 2021

ROADMAP PERUSAHAAN

Untuk memastikan agar proses pencapaian sasaran sesuai dengan strategi dan visi yang telah ditetapkan untuk 2025, maka perlu disusun *roadmap* (peta jalan) yang berfungsi sebagai *guidance* (panduan) yang akan memberikan gambaran terkait proses, tahapan, dan capaian yang harus diprioritaskan untuk mencapai sasaran akhir atau visi perusahaan.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah menyusun *roadmap* hingga akhir periode RJPP ini di mana sasaran perusahaan yang hendak diraih akan menjadi acuan dalam proses implementasi strategi pada setiap tahunnya. Adapun *roadmap* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

COMPANY ROADMAP

To ensure the achievement of goals in accordance with the strategy and vision for 2025, a roadmap was developed as a guide to provide an overview of the processes, stages, and achievements that must be prioritized to achieve the Company's ultimate target or vision.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has compiled a roadmap until the end of this RJPP period where the Company's goals to be achieved will be a reference for the strategy implementation process each year. The PT Pelabuhan Indonesia (Persero) roadmap is as follows:

Gambar *Roadmap* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk tahun 2021-2025
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Roadmap for 2021-2025



Sumber: Analisis BCG, 2021
Source: Analisis BCG, 2021

Berikut penjelasan untuk masing-masing *roadmap* pada setiap tahun:

1. **2021 – 2022: *Business Alignment and Integration***
   Setelah proses penggabungan Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di tahun 2021, maka tahun 2021 hingga 2022 akan menjadi fase *business alignment and integration* yang akan berfokus pada:
   a. Fokus pada penyelarasan bisnis pasca integrasi melalui standardisasi dan integrasi operasional dan komersial untuk peningkatan kualitas pelayanan;

The following explains the roadmap for each period:

1. **2021-2022: Business Alignment and Integration**
   Following the merger of Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, and Pelindo IV to become PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in 2021, 2021 to 2022 will be the phase of business alignment and integration which will focus on:
   a. Post-integration business alignment through standardization and operational and commercial integration to improve service quality;

b. Melakukan investasi terintegrasi untuk pengembangan bisnis; dan
c. Reorganisasi perusahaan dan pengembangan budaya terintegrasi.

2. **2023 – 2024: *Business Expansion and Partnership***
Pada tahun 2023 – 2024, setelah penyelarasan dan integrasi berjalan lancar maka PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan mulai fokus untuk melakukan ekspansi dan menjalin kerja sama bisnis yang akan fokus pada:
a. Peningkatan Pengembangan bisnis melalui *Strategic Partnership* (i.e. INA);
b. Kolaborasi dengan pelayaran domestik dan global untuk peningkatan konektivitas laut; dan
c. Pengembangan konektivitas dan ekosistem logistik melalui kerja sama dengan pelaku industri logistik darat.

3. **2025: *Word Class Port Ecosystem Integrator***
Setelah melakukan ekspansi dan kerja sama dalam rangka pengembangan bisnis, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan fokus mewujudkan *World Class Port Ecosystem Integrator* melalui:
a. Persiapan rencana ekspansi regional dan internasional PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
b. Peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam bisnis kepelabuhan & bisnis pendukungnya; dan
c. Penguatan dukungan konektivitas dan ekosistem logistik melalui kerja sama dengan kawasan industri untuk peningkatan arus barang.

Mengingat semua *milestone* pada setiap *roadmap* yang telah direncanakan adalah "pijakan" untuk mencapai *World Class Port Ecosystem Integrator,* maka penting bagi perusahaan untuk memastikan dan mendayagunakan semua sumber daya yang ada untuk menjalankan semua *strategic pillars* beserta *key enablers* sehingga *milestone* dan sasaran perusahaan dapat tercapai. Pada tahun 2022, perusahaan berada pada tahun kedua *fase business alignment and integration*.

PROYEK STRATEGIS

Berdasarkan Daftar Investasi Strategis Perusahaan di bawah ini, sebagian ada yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sedangkan sebagian yang lain masuk kategori Investasi Strategis Perusahaan.

b. Integrated investments for business development; and
c. Company reorganization and integrated culture development.

2. **2023-2024: Business Expansion and Partnership**
In 2023-2024, after the alignment and integration runs smoothly, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) will begin to focus on expanding and establishing business partnerships that will focus on:
a. Improved business development through Strategic Partnerships (i.e. INA);
b. Collaboration with domestic & global shipping for increased sea connectivity; and
c. Development of connectivity and logistics ecosystem through collaboration with land logistics industry players.

3. **2025: World-Class Port Ecosystem Integrator**
After expanding and collaborating for its business development, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) will focus on becoming a World Class Port Ecosystem Integrator through:
a. Preparing regional and international expansion plans for PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
b. Increasing the use of digital technology in the port business & supporting businesses; and
c. Strengthening connectivity support and logistics ecosystem through cooperation with industrial estates to increase goods traffic.

As all milestones in each roadmap have been planned as the "steps" to achieve a World-Class Port Ecosystem Integrator, it is important for the Company to ensure and utilize all available resources to carry out all strategic pillars together with key enablers so the Company's milestones and goals can be achieved. In 2022, the Company was in the second year of the business alignment and integration phase.

STRATEGIC PROJECTS

Based on the List of Company Strategic Investments below, some have become National Strategic Projects (PSN) as stated in the Republic of Indonesia Presidential Regulation (Perpres RI) No. 109 of 2020 concerning the Third Amendment to Presidential Regulation No. 3 of 2016 concerning Acceleration of National Strategic Projects Implementation, while others fall into the category of Strategic Corporate Investments.

Tabel Proyek Strategis Perusahaan, Proyek Strategis Nasional dan Penyertaan Modal Negara

Corporate Strategic Projects, National Strategic Projects and State Equity Participation

(dalam miliar) | (in billions)

No.	Nama Aktiva Activity	Realisasi Tahun 2021 2021 Realization	RKAP 2022 2022 RKAP	Realisasi Tahun 2022 2022 Realization	Perbandingan (%) Comparison		Keterangan Explanation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)	(8)
1	Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I North Kalibaru Terminal Phase I Development	480,05	968,75	462,03	96,24	47,69	PS
2	Pembangunan Pelabuhan Kijing, Kalbar *Phase* I Construction of the Kijing Port, West Kalimantan Phase I	411,22	389,50	303,66	73,84	77,96	PSN
3	Pengembangan Kapasitas Terminal Teluk Lamong Teluk Lamong Terminal Capacity Development	76,61	530,00	2,88	3,76	0,54	PS
4	Pembangunan Jalan Akses Timur Terminal Kalibaru Construction of Kalibaru Terminal East Access Road	0,88	10,34	14,85	1,687,5	143,6	PSN
5	Pengembangan Pelabuhan Benoa Development of Benoa Port	327,94	918,77	405,30	123,5	44,11	PSN
6	Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan 1C Development of Makassar New Port Work Phase 1B and 1C	930,97	939,25	231,22	24,83	24,62	PSN
7	Pembangunan Jalan Tol Cilincing Cibitung Construction of the Cilincing-Cibitung Toll Road	1.540,12	2.794,89	1.603,68	104,12	57,38	PSN
8	Pembangunan Terminal Multipurposes Labuan Bajo Construction of the Labuan Bajo Multipurpose Terminal	-	-	-	-	-	PSN
9	Pembangunan *Fly Over* dari dan menuju Terminal Teluk Lamong Construction of Fly Over from and to Teluk Lamong Terminal	-	-	-	-	-	PSN
10	Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Dredging of Channels and Pools in Benoa Port	28,48	875,51	375,58	1,318,75	42,90	PMN
11	Pengembangan Pelabuhan Kupang Development of Kupang Port	0,35	22,60	24,52	7,005,71	108,48	PSN
12	Pengembangan Pelabuhan Sorong Eksisting-Arar Development of the Existing Sorong-Arar Port	45,92	54,80	2,99	6,51	5,45	PSN
13	Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung Development of Kuala Tanjung Port	-	-	-	-	-	PSN

Tabel Proyek Strategis Perusahaan, Proyek Strategis Nasional dan Penyertaan Modal Negara
Corporate Strategic Projects, National Strategic Projects and State Equity Participation

(dalam miliar) | (in billions)

No.	Nama Aktiva Activity	Realisasi Tahun 2021 2021 Realization	RKAP 2022 2022 RKAP	Realisasi Tahun 2022 2022 Realization	Perbandingan (%) Comparison		Keterangan Explanation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)	(8)
14	Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung Development of the Kuala Tanjung Industrial Area	-	303,71	271,09	-	89,26	PSN
	JUMLAH TOTAL	**3.842,54**	**7.808,11**	**3.697,80**	**96,23**	**47,36**	

Keterangan:
- PS : Proyek Strategis Perusahaan
- PSN : Proyek Strategis Nasional
- PMN : Penyertaan Modal Negara

Note:
- PS : Corporate Strategic Projects
- PSN : National Strategic Project
- PMN : State Equity Participation

PEMBANGUNAN TERMINAL KALIBARU UTARA TAHAP I

Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I tahun 2022 Triwulan IV Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp462,03 miliar atau terserap 47,69% dari nilai RKAP Tahun 2022 sebesar Rp968,75 miliar. Realisasi pekerjaan terdiri dari penyelesaian Pembangunan CY 57m dan *Breakwater Type* C *Disposal* B oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk berdasarkan Kontrak *Addendum* VII, di mana sejak Triwulan III Tahun 2022 telah mencapai progres sebesar 100% dan Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Terminal Kalibaru Tahap 1B telah mencapai progres 100% pada Triwulan IV Tahun 2022. Adapun hal-hal yang mempengaruhi besaran serapan RKAP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan perhitungan pada Berita Acara Final *Quantity* Pekerjaan *Breakwater* Tipe C Disposal B terdapat pekerjaan kurang dengan nilai biaya kurang sebesar Rp78,7 miliar dan USD400.914,51 belum termasuk PPN, sehingga mengurangi nilai realisasi serapan RKAP Tahun 2022;
2. Bahwa terkait dengan Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok direncanakan pada saat penyusunan RKAP Tahun 2022 diperkirakan pekerjaan akan dimulai di awal Triwulan II Tahun 2022, dengan target serapan sebesar Rp396,5 miliar. Namun, pelaksanaan pekerjaan baru dimulai pada bulan November 2022 sesuai dengan penerbitan Surat Perjanjian, sehingga target realisasi serapan RKAP Tahun 2022 tidak dapat tercapai sesuai rencana. Adapun kronologis proses pengadaan sebagai berikut:
   a. Proses pengadaan Kelanjutan Pembangunan Terminal Kalibaru Tahap 1B baru dapat dilaksanakan setelah ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan Direksi No. PD.05.01/16/6/1/MPS/UT/PI.II-21 tanggal 16 Juni 2021 tentang Tindak Lanjut Pekerjaan Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap 1B (*Container Terminal* 2 dan *Reserved Area*);

CONSTRUCTION OF KALIBARU UTARA TERMINAL PHASE I

Construction of Kalibaru Utara Terminal Phase I of 2022 Quarter IV of 2022 amounted to Rp462.03 billion, or 47.69% of the 2022 RKAP of Rp968.75 billion. The work realization consisted of the completion of the CY 57m Construction and Breakwater Type C Disposal B by PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk based on the Addendum VII Contract, which since Quarter III 2022 has achieved 100% progress, and the Kalibaru Terminal Drain and Pond Dredging Work Phase 1B, which achieved 100% progress in Quarter IV of 2022. The matters affecting the amount of absorption of the 2022 RKAP were as follows:

1. Whereas based on calculations in the Minutes of Final Quantity Work for Breakwater Type C Disposal B, there is insufficient work with a cost value of less than Rp78.7 billion and USD400,914.51 excluding VAT, thereby reducing the realized value of the 2022 RKAP absorption;
2. Whereas in relation to the Kalibaru Terminal Design Work Phase 1B, Tanjung Priok Port, it was planned that during the preparation of the 2022 RKAP, it estimated that the work would begin at the start of the second quarter of 2022, with an absorption target of Rp396.5 billion. However, the new work began in November 2022 following the issuance of the Letter of Agreement, so the 2022 RKAP absorption target could not be achieved as planned. The chronology of the procurement process was as follows:
   a. The procurement process for the Continuation of Kalibaru Terminal Development Stage 1B could only be carried out after the signing of the Minutes of Agreement of the Board of Directors No. PD.05.01/16/6/1/MPS/UT/PI.II-21 dated June 16, 2021 concerning Follow-Up of Kalibaru Terminal Construction Work North Phase 1B (Container Terminal 2 and Reserved Area);

b. Penetapan pemenang Pekerjaan Pembangunan Terminal Kalibaru Tahap 1B sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Pemenang No. PD.01/29/6/1/PGTK/SDMA/PLND-22 tanggal 29 Juni 2022;
c. Surat Perjanjian No. PD.01/18/11/1/ADPG/UTMA/PLND-22 tanggal 18 November 2022 tentang Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok; dan
d. Bahwa berdasarkan perhitungan *Final Quantity* Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Terminal Kalibaru Tahap 1B terdapat pekerjaan kurang dengan nilai biaya kurang sebesar sebesar Rp26,5 Miliar belum termasuk PPN, sehingga mengurangi nilai realisasi serapan RKAP Tahun 2022.

Penjelasan progres pekerjaan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Progres fisik konstruksi Pembangunan Terminal Kalibaru Tahap I yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) VII No. PD.01/18/8/1/PBT/UT/PI.II-20 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Pekerjaan Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap I Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk pada Triwulan III Tahun 2022 telah mencapai progres pekerjaan sebesar 100%, yang mencakup:
   a. Telah selesainya Pembangunan CY 57 Meter dan telah dilakukan serah terima pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) No. PD.05.01/13/1/1/MNPK/UTMA/PLND-22 tanggal 13 Januari 2022;
   b. Telah selesai Pekerjaan Pembangunan *Breakwater* dan telah dilakukan serah terima pekerjaan sesuai dengan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) No. PD.05.01/17/6/1/PMO1/UTMA/PLND-22 tanggal 17 Juni 2022.
2. Pekerjaan Konsultan Supervisi Penyelesaian Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap IA Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT Haskoning Indonesia sesuai Surat Perjanjian No. PD.01/16/10/1/PBT/TEK/PI.II-20 tanggal 16 Oktober 2020 telah selesai 100% pekerjaan supervisi untuk masa pelaksanaan konstruksi fisik pada bulan Mei 2022 sesuai dengan Berita Acara No. PD.05.01/10/6/2/KPKB/KPKB/PLSL-22 tanggal 10 Juni 2022 dan saat ini sedang berjalan pengawasan untuk masa pemeliharaan;
3. Progres fisik Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) II No. PD.01/7/11/1/ADPG/INVS/PLND-22 tanggal 7 November 2022 antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan PT Pengerukan Indonesia telah selesai 100% pada Triwulan IV Tahun 2022, sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan *Final Sounding* No. PD.05.01/14/11/1/KPKB/KPKB/PLSL-22 tanggal 14 November 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. PD.05.01/16/11/11/KPKB/PLSL-22 tanggal 16 November 2022.
4. Pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi Pengerukan Alur dan Kolam Terminal Kalibaru Tahap 1B oleh PT Prosys Bangun Persada sesuai Surat Perjanjian No. PD.01/5/1/1/PBT/TEK/PI.II-21 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pekerjaan Jasa

b. Determination of the winner of the Phase 1B Kalibaru Terminal Construction Work as stated in the Winner Determination Letter No. PD.01/29/6/1/PGTK/SDMA/PLND-22 dated June 29, 2022;
c. Letter of Agreement No. PD.01/18/11/1/ADPG/UTMA/PLND-22 dated November 18, 2022 concerning the Design Work for Kalibaru Terminal Phase 1B of Tanjung Priok Port; and
d. Whereas based on the calculation of the Final Quantity for Dredging the Channels and Ponds of the Kalibaru Terminal Phase 1B, there was less work with less cost of Rp26.5 billion excluding VAT, thus reducing the realized value of the 2022 RKAP absorption.

Explanation of work progress up to Quarter IV of 2022, as follows:

1. The physical progress of the Phase I Kalibaru Terminal Development construction, which was carried out based on the Letter of Additional Agreement (Addendum) VII No. PD.01/18/8/1/PBT/UT/PI.II-20 dated August 18, 2020 concerning Work on the Construction of the North Kalibaru Container Terminal Phase I Port of Tanjung Priok with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk in the third quarter of 2022 achieved 100% work progress, which included:
   a. The construction of the 57-meter CY has been completed and the handover of work has been carried out in accordance with the Minutes of Handover (BAST) No. PD.05.01/13/1/1/MNPK/UTMA/PLND-22 dated January 13, 2022;
   b. The Breakwater Construction Work has been completed and the handover of work has been carried out in accordance with the Minutes of Handover (BAST) No. PD.05.01/17/6/1/PMO1/UTMA/PLND-22 dated June 17, 2022.
2. The work of the Supervision Consultant for the Completion of the Construction of the North Kalibaru Container Terminal Phase IA of Tanjung Priok Port by PT Haskoning Indonesia in accordance with the Letter of Agreement No. PD.01/16/10/1/PBT/TEK/PI.II-20 dated October 16, 2020 has been 100% completed for the supervision work for the implementation period of physical construction in May 2022 in accordance with Minutes No. PD.05.01/10/6/2/KPKB/KPKB/PLSL-22 dated June 10, 2022 and is currently ongoing supervision for the maintenance period;
3. The physical progress of the Dredging Works on the Channels and Ponds of Kalibaru Terminal Phase 1B of Tanjung Priok Port based on the Letter of Additional Agreement (Addendum) II No. PD.01/7/11/1/ADPG/INVS/PLND-22 dated November 7, 2022 between PT Pelabuhan Indonesia (Persero) with PT Pengerukan Indonesia was completed 100% in Quarter IV of 2022, in accordance with the Minutes of Implementation of Final Sounding No. PD.05.01/14/11/1/KPKB/KPKB/PLSL-22 dated November 14, 2022 and Minutes of Physical Inspection No. PD.05.01/16/11/11/KPKB/PLSL-22 dated November 16, 2022.
4. Dredging Supervision Consultant Service Work for Kalibaru Terminal Channel and Pond Phase 1B by PT Prosys Bangun Persada in accordance with Agreement Letter No. PD.01/5/1/1/PBT/TEK/PI.II-21 dated February 5, 2021 concerning Dredging

Konsultan Supervisi Pengerukan Alur dan Kolam Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok telah selesai 100% pada tanggal 16 November 2022 sesuai dengan Berita Acara No. PD.05.01/16/11/12/KPKB/KPKB/PLSL-22 tanggal 16 November 2022;

5. Pelaksanaan Kerja Sama Khusus Manajemen Proyek Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I Periode 2021-2022 oleh PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (atau saat ini menjadi PT Pelindo Solusi Logistik) sebagai *Owner Representative*/Manajemen Proyek sesuai dengan Surat Perjanjian No. PD.05.01/29/9/10/MPS/TEK/PI.II-21 dan PJK-621-29092021-006 tanggal 29 September 2021 telah selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. PD.05.01/2/12/1/PMO1/PMO1/PLND-22 tanggal 2 Desember 2022;
6. Pelaksanaan Kerja Sama Khusus Manajemen Proyek Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I Periode 2022-2023 oleh PT Pelindo Solusi Logistik sebagai *Owner Representative*/Manajemen Proyek sesuai dengan Surat Perjanjian No. PD.05.01/3/11/1/PMO1/INVS/PLND-22 dan PD.05.01/3/11/1/KPKB/DIUT/PLSL-22 tanggal 3 November 2022, saat ini masih berjalan dengan serapan sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp2,42 miliar;
7. Bahwa Progres Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok adalah sebagai berikut:
   a. Telah diterbitkan Surat Perjanjian No. PD.01/18/11/1/ADPG/UTMA/PLND-22 pada tanggal 18 November 2022;
   b. Telah diterbitkan Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) No. PD.05.01/22/11/3/PMO1/INVS/PLND-22 tanggal 22 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Lahan (BASTL) No. PD.05.01/22/11/1/PMO1/INVS/PLND-22 tanggal 22 November 2022;
   c. Progres Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok s.d. 30 Desember 2022 adalah sebesar 0,053%. Pekerjaan yang sedang berlangsung adalah pekerjaan persiapan, pekerjaan pengembangan desain (DED), pekerjaan penyelidikan tanah, pembangunan fasilitas sementara dan pekerjaan persiapan untuk pematangan tanah.
8. Pekerjaan Jasa Konsultansi *Review* DED dan Supervisi Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT Haskoning Indonesia sesuai dengan Surat Perjanjian No. PD.01/23/9/1/ADP/TEK/PI.II-21 tanggal 29 September 2021 saat ini masih berjalan dengan nilai serapan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar Rp2,53 miliar.

Supervision Consultant Services Work Kalibaru Terminal Flow and Pond Stage 1B Tanjung Priok Port was 100% completed on November 16, 2022 in accordance with Minutes No. PD.05.01/16/11/12/KPKB/KPKB/PLSL-22 November 16, 2022;

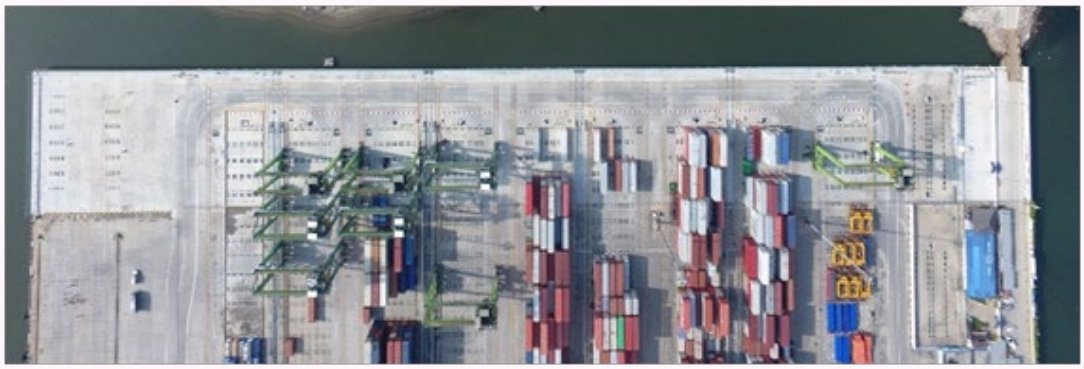
5. Implementation of Special Cooperation in Management of North Kalibaru Terminal Development Phase I for the 2021-2022 period by PT Developer Pelabuhan Indonesia (or currently PT Pelindo Solusi Logistik) as Owner Representative/Project Management in accordance with Letter of Agreement No. PD.05.01/29/9/ 10/MPS/TEK/PI.II-21 and PJK-621-29092021-006 dated September 29, 2021 was 100% completed in accordance with the Minutes of Handover No. PD.05.01/2/12/1/PMO1/PMO1/PLND -22 December 2, 2022;
6. Implementation of Special Cooperation in the Management of North Kalibaru Terminal Development Phase I for the 2022-2023 period by PT Pelindo Solusi Logistik as the Owner Representative/Project Management in accordance with the Letter of Agreement No. PD.05.01/3/11/1/PMO1/INVS/PLND-22 and PD.05.01/3/11/1/KPKB/DIUT/PLSL-22 dated November 3, 2022, is currently still running with an up to Quarter IV absorption of Rp2.42 billion;
7. Whereas the progress of the Kalibaru Terminal Phase 1B Design Work at Tanjung Priok Port is as follows:
   a. Letter of Agreement No. PD.01/18/11/1/ADPG/UTMA/PLND-22 was issued on November 18, 2022;
   b. The Minutes of Commencement of Work (BAMK) Np. PD.05.01/22/11/3/PMO1/INVS/PLND-22 dated November 22, 2022 and Minutes of Land Handover (BASTL) No. PD.05.01/22/11/1/PMO1/INVS/PLND-22 have been issued on November 22, 2022;
   c. Progress of Kalibaru Terminal Phase 1B Design Work at Tanjung Priok Port up to December 30, 2022 is 0.053%. Ongoing work includes preparatory work, design development work (DED), soil investigation work, construction of temporary facilities and preparatory work for soil preparation.
8. DED Review Consultancy Services and Supervision of Kalibaru Terminal Design Phase 1B Tanjung Priok Port by PT Haskoning Indonesia in accordance with the Letter of Agreement No. PD.01/23/9/1/ADP/TEK/PI.II-21 dated September 29, 2021 is still ongoing with an absorption value up to the Fourth Quarter of 2022 of Rp2.53 billion.

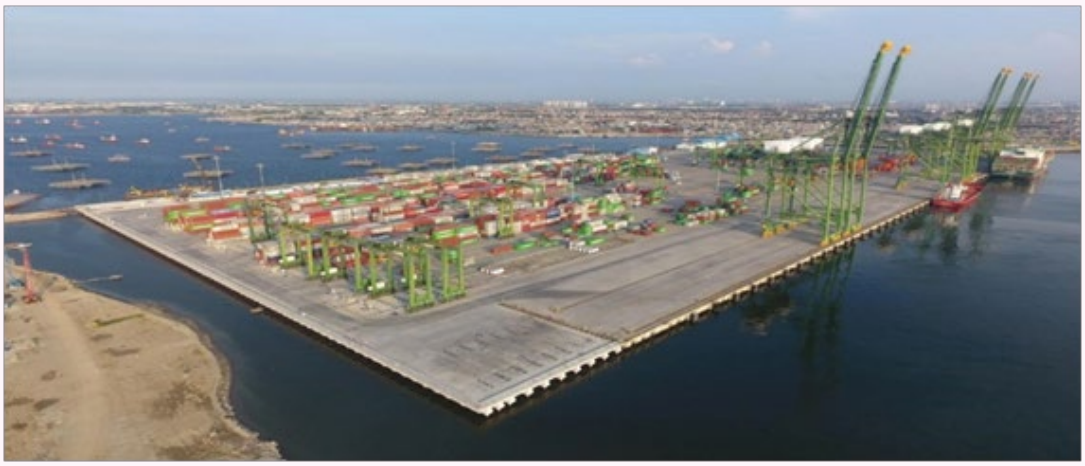
Berikut ini dokumentasi Pengembangan Pelabuhan Kalibaru:

The following shows the documentation for Kalibaru Port Development:

Telah Selesainya Pembangunan *Container Yard* 57 Miliar

Container Yard Construction Has Been Completed 57 Billion





Gambar Progres Pekerjaan Pembangunan *Container Yard* 57 Miliar Terminal Kalibaru

Construction Work Progress for Container Yard 57 M Kalibaru Terminal









Gambar Progres Pekerjaan Pembangunan *Breakwater Type* C *Disposal* B
Breakwater Type C Disposal B Work Progress





Gambar Progres Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok. (a) Final *Sounding internal*, (b) Final Sounding eksternal
Progress of Kalibaru Terminal Phase 1B Dredging Channels and Pools at Tanjung Priok Port. (a) Internal Final Sounding, (b) External Final Sounding



Gambar Pekerjaan Penyelidikan Tanah Kalibaru 1B
Kalibaru Land Investigation Work 1B

PEMBANGUNAN TERMINAL KIJING *PHASE* I

Pembangunan Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat *Phase* 1 Triwulan IV tahun 2022 terealisasi sebesar Rp303,66 miliar, terserap 77,96% dari nilai RKAP Tahun 2022 sebesar Rp389,50 miliar. Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 di antaranya adalah untuk pembangunan fisik Terminal Kijing tahap inisial di mana telah mencapai progres 100% pada 17 Juni 2022, realisasi pekerjaan pembangunan pagar pengaman, menara pengawas dan *container office* serta pekerjaan *land clearing* di lahan Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Kalimantan Barat telah mencapai progres 100% pada pada 10 Juni 2022, serta realisasi pekerjaan Relokasi Jalan Nasional ruas Sei Duri-Mempawah dengan progres fisik 17,56% per akhir

KIJING TERMINAL DEVELOPMENT PHASE I

The construction of the Kijing Port, West Kalimantan Phase 1 in Quarter IV 2022 realized Rp303.66 billion, or 77.96% of the 2022 RKAP of Rp389.50 billion. Realization up to Quarter IV of 2022 included the physical construction of the Kijing terminal for the initial stage that achieved 100% progress on June 17, 2022, the realization of work on the construction of security fences, control towers and container offices as well as land clearing work on the Development and Development of the Kijing Terminal in Kalimantan Barat that achieved 100% progress on June 10, 2022, and the realization of the Sei Duri-Mempawah National Road Relocation work that achieved physical progress of 17.56% as of the end of December 2022. For land procurement for national

Desember 2022. Terkait pengadaan lahan pekerjaan relokasi jalan nasional, pengadaan lahan dimaksud sedang berlangsung serta terdapat beberapa pekerjaan akibat pengadaan lahan dimaksud yaitu pekerjaan relokasi aset Barang Milik Daerah (BMD), Tanah Wakaf dan Desa.

road relocation work, the land procurement is ongoing and there is extra work due to the land acquisition referred to includes relocating assets of Regional Property (BMD), Waqf Land and Villages.

	Pemerintah Pusat Central Government	**Pemerintah Daerah** Local Government
Dasar Pelaksanaan. ***(Legal Standing)***	• Peraturan Presiden No. 43 tahun 2017 Percepatan Pembangunan dan Pegoperasian Terminal Kijing • Kepmen Perhubungan No. KP 787 tahun 2016 Rencana Induk Pelabuhan Pontianak • Kepmen LHK No. SK.621/Menlhk/Setjen/PLA.4.11.2017 İzin Lingkungan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing • Presidential Regulation Number 43 of 2017 Accelerating the Development and Operation of the Kijing Terminal • Minister of Transportation Decree No. KP 787 of 2016 Pontianak Port Master Plan • Minister of Environment and Forestry Decree No. SK.621/ Menlhk/Setjen/PLA.4.11.2017 Environmental Permit for Development and Operation of Kijing Terminal	• Perjanjian Konsesi No. PP.008/1/3/KSOP.PTK.2018 Pembangunan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing • Keputusan Gubernur Kalbar No. 511/PEM/2017 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanag untuk Pembangunan Terminal Kijing • Surat KSOP No. PP 008/2/7/KSOPPTK-18 Pemberian Lisensi Pembangunan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak kepada BUPPT Pelabuhan Indonesia II (Persero) • Concession Agreement No. PP.008/1/3/KSOP.PTK.2018 Development and Business of Kijing Terminal Port Services • Governor of West Kalimantan Decree No. 511/PEM/2017 Determination of Soil Procurement Locations for the Development of Kijing Terminal • KSOP Letter No. PP 008/2/7/KSOPPTK-18 Granting a license for the construction of Pontianak Port Kijing Terminal to BUPPT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Overall Project	**Tanah** Land Pengadaan Tanah Land Procurement **Lahan/** Land **198 ha** Relokasi Aset Asset Relocation	**Konstruksi Terminal** Terminal Construction	**Operasional** Operational
On-Going Project	Makam TiongHoa 3.1 ha Relokasi Aset BMN, BMD, Desa & Wakaf 5.8 ha Land Clearing & Pemagaran Chinese Tombs 3.1 ha Relocation of BMN, BMD, Village & Waqf Assets 5.8 ha Land Clearing & Fencing Relokasi Tahap 1 Phase 1 relocation Relokasi Tahap 2 Phase 2 relocation Relokasi Tahap Phase 3 relocation Relokasi Jalan Nasional National Road Relocation	**Pembangunan Terminal Kijing Tahap Inisial** Initial Development of Kijing Terminal	
Next Project	**Struktur Penahan Abrasi** Abrasion Resistance Structure **Relokasi Jalan dan Gang Desa** Relocation of Village Roads and Alleys	**Dermaga Pandu Tunda** **Struktur Proteksi dan Wave Attenuator Tambahan untuk Mitigasi Insiden Kijing** **Pembangunan Terminal Tahap I (Curah Cair & Curah Kering)** Pilot and Tugboat wharf Additional Protection Structures and Wave Attenuators for Mitigation of Kijing Incidents Terminal Development Phase I (Liquid & Dry Bulk)	**Fasilitas ISPS CODE, Furniture** ISPS CODE facilities, Furniture

Adapun penjelasan progres pekerjaan Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan fisik Pelabuhan Kijing dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Terminal Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat antara Perusahaan dan PT Wijaya Karya (Persero) No. PD.01/17/5/1/ADP/UT/PI.II -18 tanggal 17 Mei 2018 dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp2,7 triliun, kemudian di-*addendum* berdasarkan Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) No. PD.01/27/1/1/ ADP/UT/PI.II-2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pekerjaan Pembangunan Terminal Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat untuk mengakomodir penambahan waktu pekerjaan selama 177 hari kalender.

The explanation of the work progress in the 4th Quarter of 2022 is as follows:

1. The physical construction of the Port of Kijing was carried out based on the Work Agreement for the Construction of the Kijing Terminal, Mempawah, West Kalimantan between the Company and PT Wijaya Karya (Persero) No. PD.01/17/5/1/ ADP/UT/PI.II -18 dated May 17, 2018 with a work contract value of Rp2.7 trillion, then based on the Additional Agreement Letter (Addendum) No. PD.01/27/1/1/ADP/UT/PI.II-2020 dated January 27, 2020 concerning Work on the Development of the Kijing Terminal, Mempawah, West Kalimantan to accommodate additional work time of 177 calendar days.

Selanjutnya, untuk mengakomodir permintaan pelayanan bongkar muat curah cair dari mitra kerja sama di mana telah disepakati oleh Direksi dan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk menambah lingkup pekerjaan *Piperack* sehingga nilai kontrak pekerjaan menjadi sebesar Rp2,9 Triliun maka dilakukan *addendum* berdasarkan Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) II No. PD.01/15/6/1/ PBT/UT/PI.II-2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pekerjaan Pembangunan Terminal Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT Wijaya Karya (Persero), Tbk ("WIKA").

Furthermore, to accommodate requests for liquid bulk loading and unloading services from cooperation partners was agreed by the Board of Directors and Management of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to increase the scope of Piperack work so that the work contract value became Rp2.9 trillion, and an addendum was carried out based on the Supplementary Agreement Letter (Addendum) II No. PD.01/15/6/1/PBT/UT/PI.II-2020 dated June 15, 2020 concerning Work on the Construction of the Kijing Terminal, Mempawah, West Kalimantan between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT Wijaya Karya (Persero), Tbk ("WIKA").

Selanjutnya, dikarenakan masih terdapat wabah COVID-19 dan adanya kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran wabah COVID-19 serta terdapat insiden runtuhnya sebagian struktur PMA, *Trestle* dan *Piperack* akibat tertabrak tongkang konstruksi pada saat terjadi kondisi cuaca ekstrim telah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan sehingga dibutuhkan penambahan waktu pelaksanaan. Dilakukan *addendum* untuk mengakomodir penambahan waktu pelaksanaan berdasarkan Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) VI No. PD.01/15/10/1/ ADPG/ UTMA/PLND-21 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Pekerjaan Pembangunan Terminal Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat untuk mengakomodir penambahan waktu 15 Mei 2022. Untuk selanjutnya akibat pelaksanaan *recovery* area yang mengalami keruntuhan, WIKA telah mengajukan usulan perubahan termin pembayaran dan telah disetujui serta telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) VII No. PD.02/24/12/1/ADPG/UTMA/PLND-21 tanggal 24 Desember 2021 tentang Pekerjaan Pembangunan Terminal Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat.

Furthermore, due to the ongoing COVID-19 outbreak and the existence of government policies in efforts to prevent the spread of COVID-19, and incidents related to the collapse of part of the PMA, Trestle and Piperack structures due to being hit by a construction barge when extreme weather conditions occurred, which caused delays in the completion of the work as a whole thus requiring additional execution time. An addendum was carried out to accommodate the additional time based on the Letter of Additional Agreement (Addendum) VI No. PD.01/15/10/1/ADPG/UTMA/PLND-21 dated October 15, 2021 concerning the Kijing Terminal Construction Work, Mempawah, West Kalimantan to accommodate additional time on May 15, 2022. Henceforth due to the recovery area which had collapsed, WIKA submitted a proposed change in payment terms that was approved and stated in the Additional Agreement Letter (Addendum) VII No. PD.02/24/12/1/ADPG/ UTMA/PLND-21 dated December 24, 2021 concerning the Construction Work for the Kijing Terminal, Mempawah, West Kalimantan.

Pekerjaan tersebut telah selesai 100% dan dilakukan Serah Terima Pertama dari WIKA kepada Pelindo per tanggal 17 Juni 2022.

The work has been 100% completed, and the First Handover was carried out from WIKA to Pelindo as of June 17, 2022.

2. Sehubungan dengan telah dilakukan *Addendum* pembangunan fisik untuk mengakomodir penambahan waktu tersebut, maka Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing dengan PT Atrya Swascipta Rekayasa dilakukan *Addendum* untuk mengakomodir penambahan waktu pekerjaan pembangunan hingga 15 Mei 2022, dan dilanjutkan dengan masa pemeliharaan selama 12 bulan, sebagaimana Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) VII No. PD.02/15/10/1/ ADPG/ INVS/PLND-21 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat.
3. Terhadap relokasi aset BMN, aset Pemkab Mempawah, aset milik desa dan wakaf yang telah tervalidasi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dimana kedua tahap tersebut progres fisiknya telah selesai 100%. Progres fisik 100% pekerjaan dimaksud dituangkan ke pada:
   a. Berita Acara No. PD.05.01/26/11/1/MNPK/MNPK/PLND-21

2. In connection with the physical construction Addendum to accommodate the additional time, the Kijing Terminal Construction and Development Supervision Supervision Services Work with PT Atrya Swascipta Rekayasa was carried out by an Addendum to accommodate the additional construction work time until May 15, 2022, and continued with a maintenance period of 12 months, as stated in the Letter of Additional Agreement (Addendum) VII No. PD.02/15/10/1/ ADPG/INVS/PLND-21 dated October 15, 2021 concerning the Work of Consultancy Services for the Supervision of the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan.
3. The relocation of BMN assets, Mempawah Regency Government assets, village-owned assets and validated waqf was carried out in 2 (two) stages where the physical progress of the two stages was 100%. The physical progress of 100% of the intended work was recorded in:
   a. Meeting Minutes No. PD.05.01/26/11/1/MNPK/MNPK/

tanggal 26 November 2021 tentang Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Bangunan Pengganti Milik Pemerintah Daerah, Desa dan Wakaf yang Terkena Dampak Pembangunan Terminal Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat Tahap I;

b. Berita Acara No. PD.05.01/4/4/5/MNPK/MNPK/PLND-22 tanggal 4 April 2022 tentang Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Bangunan Pengganti Kantor Desa Sungai Bundung Laut, Masjid Jami'atul Khair, dan Kantor BPTP (Balai Proteksi Tanaman Perkebunan) yang Terkena Dampak Pembangunan Terminal Kijing, Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat.

4. Proses validasi pembayaran ganti rugi lahan di Desa Sungai Kunyit Laut dan Sungai Bundung Laut Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat telah selesai adalah seluas 191,99 Ha atau sebesar Rp779,36 miliar dari luasan tanah 198,58 Ha. Pekerjaan yang perlu ditindaklanjuti terhadap pengadaan tanah 198,5 Ha adalah sebagai berikut:
   a. Pengadaan Tanah 3,15 Ha atas bidang tanah yang belum dibayar melalui mekanisme Penetapan Lokasi dari Bupati Kabupaten Mempawah;
   b. Relokasi aset Barang Milik Negara (BMN), aset Barang Milik Daerah (BMD), aset desa dan aset wakaf (masjid dan makam muslim);
   c. Sertifikasi tanah.

5. Pelaksanaan konstruksi Pekerjaan Pembangunan Pagar Pengaman dan *Land Clearing* Lahan 200 Ha area pengembangan Terminal Kijing dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian No. PD.01/17/3/1/PBT/ TEK/PI.II-2020 tanggal 17 Maret 2020 ("Perjanjian Induk") pekerjaan dimaksud berakhir pada 31 Mei 2021 di mana progres pekerjaan telah selesai 100% dan telah dilakukan serah terima pekerjaan sesuai dengan. Berita Acara No. PD.05.01/10/6/1/PMO2/INVS/PLND-22 tanggal 10 Juni 2022 tentang Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Pagar Pengaman, Menara Pengawas dan *Container Office* Pekerjaan *Land Clearing* di Lahan Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
6. Progres detail terkait Relokasi Aset Jalan Nasional ruas Sungai Duri Mempawah antara lain:
   a. Telah ditandatangani Perjanjian antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. 07/PKS/SJ/2022 dan No. PP.01/20/5/1/MPT/INVS/PLND-22 tanggal 20 Mei 2022 tentang Tukar Menukar Barang Milik Negara (BMN) berupa Sebagian Tanah, Jalan Nasional Arteri, dan Jembatan pada Jalan Nasional Arteri Ruas Sei Duri-Bts. Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
   b. Realisasi progres fisik sampai dengan akhir Desember 2022 sebesar 17,56%.

7. Terhadap pekerjaan yang telah selesai 100% telah ditindaklanjuti antara lain:
   a. Dilakukan pencatatan dan pengasuransian aset terkonstruksi yang telah selesai 100%;
   b. Telah disampaikan surat kepada Direktur Pengelola untuk komersialisasi dan pengelolaan aset terminal kijing tahap inisial.

PLND-21 dated November 26, 2021 concerning the First Hand Over of Work on the Construction of Replacement Buildings Owned by Local Governments, Villages and Endowments Affected by the Construction of the Kijing Terminal, Mempawah Regency, West Kalimantan Phase I;

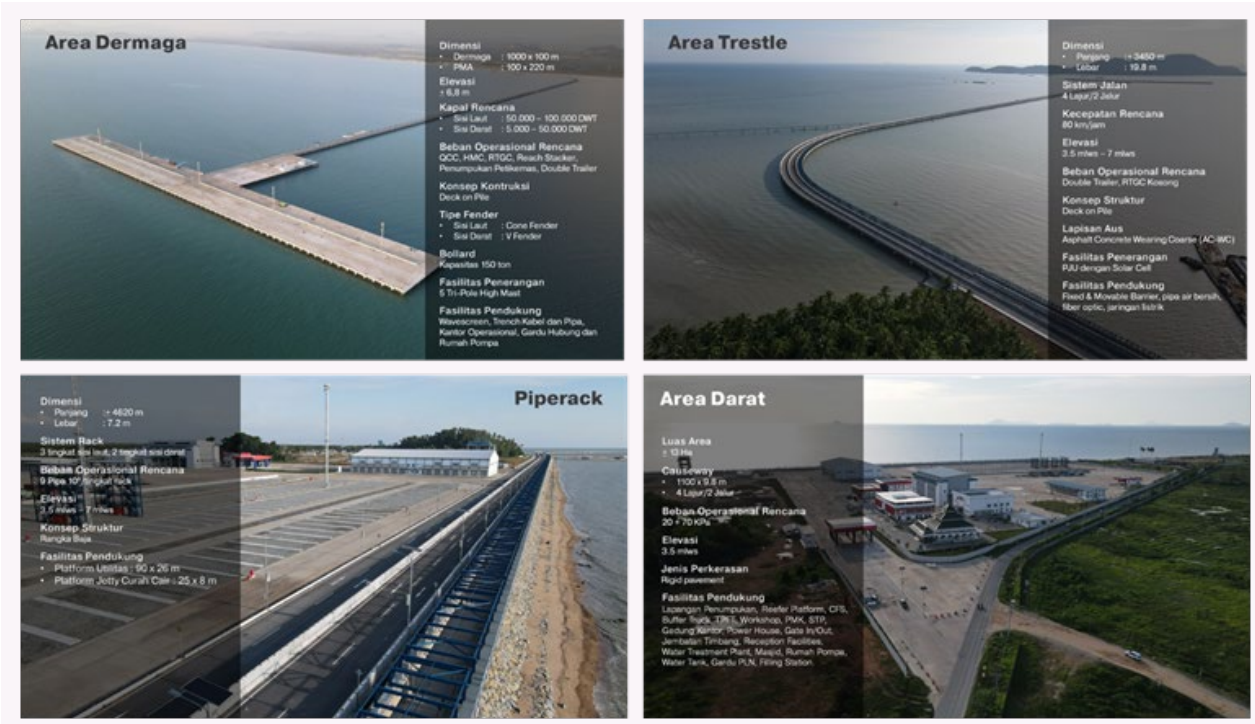
b. Meeting Minutes No. PD.05.01/4/4/5/MNPK/MNPK/PLND-22 dated April 4, 2022 concerning the Handover of the First Construction Work to Replace the Sungai Bundung Laut Village Office, Jami'atul Khair Mosque, and BPTP Office (Plantation Plant Protection Agency) affected by the Construction of the Kijing Terminal, Mempawah Regency, West Kalimantan.

4. The validation process for payment of compensation for land in Sungai Kunyit Laut and Sungai Bundung Laut Villages, Mempawah Regency, West Kalimantan, was completed for an area of 191.99 Ha at Rp779.36 billion out of a land area of 198.58 Ha. The work that needs to be followed up is land acquisition of 198.5 Ha as follows:
   a. Land Acquisition of 3.15 Ha of land parcels that have not been paid for through the Location Determination mechanism from the Mempawah District Head;
   b. Relocation of State Property assets (BMN), Regional Property assets (BMD), village assets and waqf assets (mosques and Muslim graves);
   c. Land certification.

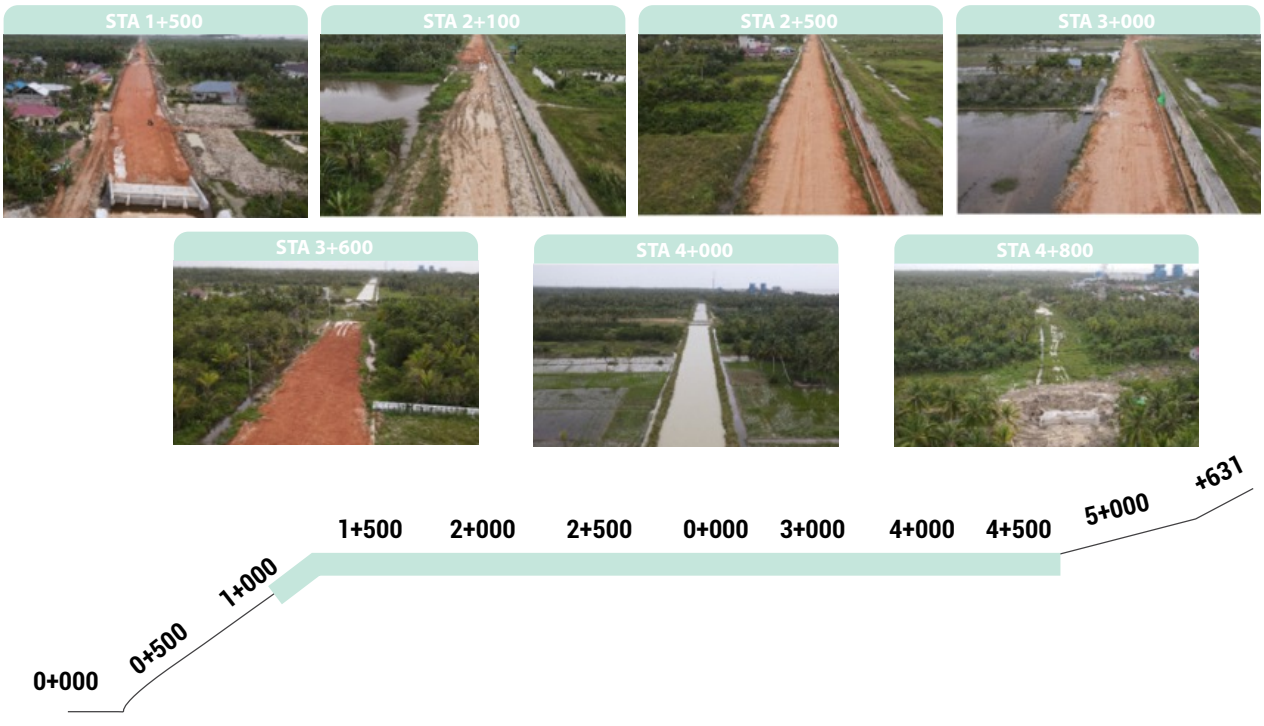
5. The Construction of the Safety Fence and Land Clearing of the 200 Ha Land in the Kijing Terminal development area was carried out based on Agreement Letter No. PD.01/17/3/1/PBT/ TEK/PI.II-2020 dated March 17, 2020 ("Master Agreement") with the intended work to end on May 31, 2021 and the work progress has been completed 100% and the work has been handed over in accordance with Meeting Minutes No. PD.05.01/10/6/1/PMO2/INVS/PLND-22 dated June 10, 2022 concerning Handover of the First Work on the Construction of the Safety Fence, Watchtower and Container Office for the Land Clearing Work on the Construction and Development of the Kijing Terminal, Mempawah Regency, West Kalimantan.

6. Detailed progress on the Relocation of the National Road Assets of the Sungai Duri Mempawah section includes:
   a. An Agreement signed between the Ministry of Public Works and Public Housing and PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. 07/PKS/SJ/2022 and No. PP.01/20/5/1/ MPT/INVS/PLND-22 dated May 20, 2022 concerning the Exchange of State Property (BMN) in the form of Land, Arterial National Roads, and Bridges on the Sei Duri-Bts. Arterial National Road, Mempawah Regency, West Kalimantan Province;
   b. Realization of physical progress up to the end of December 2022 of 17.56%.

7. The work that has been completed 100% and followed up, includes:
   a. Recording and insurance of construction assets that has been completed 100%;
   b. A letter has been sent to the Managing Director regarding the commercialization and management of the initial stage of Kijing terminal assets.



Gambar Progres Pekerjaan Terminal Kijing Tahap Inisial dan Progres *Recovery* Area Terdampak Cuaca Ekstrim
Progress of Work at Kijing Terminal Initial Stage and Progress of Recovery in Areas Affected by Extreme Weather



Gambar Progres Pekerjaan Relokasi Jalan Nasional
National Road Relocation Work Progress



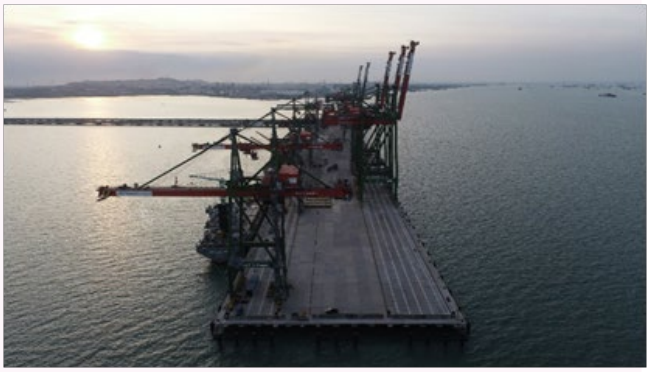
Gambar Progres Relokasi Aset BMN, Aset Desa, Pemkab Mempawah dan Wakaf
Progress of Relocation of BMN Assets, Village Assets, Mempawah Regency Government and Waqf

PENGEMBANGAN KAPASITAS TERMINAL TELUK LAMONG

Pengembangan Kapasitas Terminal Teluk Lamong Triwulan IV Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2,88 miliar, terserap 0,54% dari nilai RKAP Tahun 2022 sebesar Rp530 miliar. Realisasi tersebut di antaranya adalah untuk pekerjaan Fisik Perpanjangan Dermaga Petikemas 150x80 di Terminal Teluk Lamong beserta pengawasannya, untuk pelaksanaan fisik lapangan dikerjakan oleh PT Krakatau Engineering – PT. Amarta Karya (Persero), KSO dengan pengawasan pekerjaan oleh PT Atrya Swascipta Rekayasa, yang saat ini sudah mencapai progres 100% serta belum terlaksananya Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) unit *Container Crane* (CC) dan 10 (unit) unit ASC yang saat ini masih dalam tahap penyesuaian kajian. Dengan berbagai fasilitas saat ini yang dimiliki Dermaga Petikemas Terminal Teluk Lamong dalam menunjang aktivitas B/M domestik dan internasional, selanjutnya Keandalan Instalasi Listrik Terminal Teluk Lamong guna mendukung implementasi sebagai *green port* melalui pengembangan instalasi *shore connection* di Terminal Teluk Lamong yang telah selesai 100%. Diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kegiatan ekspor ke depannya dengan panjang keseluruhan tambatan domestik 600 meter dan internasional 650 meter. Tambatan tersebut disebut mampu menyandari empat kapal sekaligus atau maksimal kapal dengan ukuran maksimal 50.000 DWT. Kedalaman kolam dalam dermaga domestik mencapai -11 mLWS dan internasional -14 mLWS. Sedangkan untuk menunjang kualitas dan kecepatan pelayanan bongkar muat, telah didukung dengan peralatan bongkar berupa 10 unit STS dengan produktivitas bongkar muat dari rata-rata 25 *box per crane per hour* (BCH).

TELUK LAMONG TERMINAL CAPACITY DEVELOPMENT

The Teluk Lamong Terminal Capacity development in the fourth quarter of 2022 was realized at Rp2.88 billion, or 0.54% of the 2022 RKAP value of Rp530 billion. This realization included the Physical work of the 150x80 Container Pier Extension at Teluk Lamong Terminal and its supervision, the physical implementation of the field carried out by PT Krakatau Engineering - PT. Amarta Karya (Persero), KSO with work supervision by PT Atrya Swascipta Rekayasa, which has now reached 100% progress, and the Procurement Work of 1 (one) Container Crane (CC) and 10 (ten) ASC units, which is currently still in the study adjustment stage. With the facilities currently owned by the Teluk Lamong Terminal Container Pier to support domestic and international B/M activities, the Reliability of the Teluk Lamong Terminal Electrical Installation to support implementation as a green port through the development of a shore connection installation at Teluk Lamong Terminal which has been completed 100%. It is expected this will encourage the growth of export activities in the future as it has a total mooring length of 600 meters for domestic and 650 meters for international. This mooring is capable of berthing four ships at once, or a maximum of ships with a size of 50,000 DWT. The depth of the pool in the domestic wharves is -11 mLWS and in the international wharves -14 mLWS. To support the quality and speed of loading and unloading services, this has been supported by unloading equipment in the form of 10 STS units with an average loading and unloading productivity of 25 boxes per crane per hour (BCH).





Gambar Progres Pekerjaan Perpanjangan Dermaga Petikemas 150 x 80m dan Pengembangan Instalasi *Shore Connection* di Terminal Teluk Lamong

Work Progress of Extension of 150 x 80m Container Pier and Development of Shore Connection Installation at Teluk Lamong Terminal

PEMBANGUNAN JALAN AKSES TIMUR KALIBARU

Pembangunan Jalan Akses Timur Pelabuhan Kalibaru Triwulan IV Tahun 2022 terealisasi terealisasi sebesar Rp14,85 miliar, terserap 143,62% dari nilai RKAP Tahun 2022 sebesar Rp10,34 miliar. Saat ini Pembangunan Jalan Akses Timur Kalibaru masih dalam tahap perencanaan dan pengurusan izin-izin terkait. Progres pekerjaan saat ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Hasil Kajian Komersial dan Konsep Umum Perencanaan Jalan Akses Timur Kalibaru/*North Priok Eastern Access* (NPEA) selesai disusun dan dilaporkan kepada Direksi;
2. Penyelesaian Jasa Pendampingan dan Konsultasi Penyusunan *Review* Kajian Bisnis dan Studi Kelayakan Proyek *New Priok Eastern Access* di mana hasil studi telah disampaikan kepada Direksi;

CONSTRUCTION OF THE EAST KALIBARU ACCESS ROAD

The construction of the Eastern Access Road to Kalibaru Port in the fourth quarter of 2022 was realized in the amount of Rp14.85 billion, or 143.62% of the 2022 RKAP value of Rp10.34 billion. Currently, the construction of the East Kalibaru Access Road is still in the planning stage and the processing of related permits. Current work progress to be submitted is as follows:

1. The results of the Commercial Study and the General Concept of East Kalibaru/North Priok Eastern Access (NPEA) planning has been completed and reported to the Board of Directors;
2. Completion of Assistance and Consultancy Services for the preparation of Business Review Review and Feasibility Study of the New Priok Eastern Access Project, where the study results have been submitted to the Board of Directors;

3. Pengurusan Perizinan dengan Instansi terkait (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perhubungan) untuk memenuhi persyaratan dokumen Pembangunan Jalan Akses Timur Kalibaru/*New Priok Eastern Access* (NPEA). Adapun progres pengurusan perizinan antara lain:
   a. Pengajuan Trase NPEA pada revisi Dokumen Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok menunggu penetapan Dokumen Revisi RIP Tanjung Priok;
   b. Penerbitan Persetujuan Dokumen *Basic Design* dan *Right of Way Plan* Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/*New Priok Eastern Access* (NPEA) oleh Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 19 Oktober 2022;
   c. Terkait Izin AMDAL, telah dilakukan Sidang KA ANDAL pada tanggal 21 November 2022 dan telah disubmit Perbaikan Dokumen KA ANDAL pada 2 Desember 2022 dan setelah adanya Dokumen Persetujuan Andalalin NPEA, maka akan dilakukan Pendaftaran Sidang Pleno AMDAL dan sedang proses penjadwalan sidang dimaksud;
   d. Dokumen *Basic Design* telah selesai disusun dan telah dilakukan optimasi terkait biaya konstruksi dimaksud;
   e. Penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) oleh Kementerian ATR/BPN pada Tanggal 23 Mei 2022;
   f. Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tanggal 18 Mei 2022;
   g. Penerbitan Dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Bangkitan Lalu Lintas Tinggi, Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Jalan Tol New Priok Eastern Access (NPEA) di Jalan Akses Marunda Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta pada tanggal 29 Desember 2022 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
   h. Telah dilakukan Verifikasi Dokumen DPPT oleh Tim Verifikasi Pemprov DKI Jakarta dan saat ini dalam proses penerbitan SK Tim Persiapan Pengadaan Tanah Oleh Gubernur DKI Jakarta untuk selanjutnya dilakukan Penetapan Lokasi NPEA.
4. Terkait Perjanjian Pemanfaatan Lahan KBN, telah dilakukan Penandatanganan *Head of Agreement* antara Pelindo dengan PT KBN pada tanggal 2 November 2022.
5. Terkait Pemilihan Mitra NPEA, sedang dalam tahap perumusan skema kerja sama dan pembiayaan oleh Konsultan.

3. Licensing arrangements with related agencies (Provincial Government of DKI Jakarta, Ministry of PUPR, Ministry of ATR/BPN, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, Ministry of Environment, and Ministry of Transportation) to fulfill document requirements for the Construction of East Kalibaru Access Road/New Priok Eastern Access (NPEA). The progress of licensing management includes:
   a. Submission of the NPEA Trace on the revision of the Tanjung Priok Port Master Plan Document awaiting the determination of the Tanjung Priok RIP Revision Document;
   b. Issuance of the Approval of the Basic Design and Right of Way Plan Documents for New Priok Eastern Access (NPEA) by the Director of the Freeway Directorate General of Highways, Ministry of Public Works and Public Housing on October 19, 2022;
   c. For the AMDAL Permit, the KA ANDAL Session was held on November 21, 2022 and the KA ANDAL Document Improvement was submitted on December 2, 2022 and after the NPEA Andal Traffic Approval Document has been obtained, the AMDAL Plenary Session Registration will be carried out and the process of scheduling the said meeting is in progress;
   d. The Basic Design document has been prepared and optimization has been carried out regarding the intended construction costs;
   e. Issuance of Recommendations for Suitability of Space Utilization Activities (RKKPR) by the Ministry of ATR/BPN on May 23, 2022;
   f. Issuance of Approval for Conformity of Marine Spatial Utilization Activities (PKKPRL) by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries on May 18, 2022;
   g. Issuance of the Approval Document on the Results of Traffic Impact Analysis with High Traffic Generation, Traffic Impact Analysis for the Construction of New Priok Eastern Access (NPEA) Toll Road on Marunda Cilincing Access Road, North Jakarta City, DKI Jakarta on December 29, 2022 by DKI Provincial Government Jakarta;
   h. Verification of the DPPT Documents has been carried out by the DKI Jakarta Provincial Government Verification Team and is currently in the process of issuing the Land Acquisition Preparation Team Decree by the Governor of DKI Jakarta for further determination of the NPEA Location.
4. Regarding the KBN Land Utilization Agreement, a Head of Agreement was signed between Pelindo and PT KBN on November 2, 2022.
5. Regarding the Selection of NPEA Partners, this is in the stage of formulating a cooperation and financing scheme by the Consultant.

PENGEMBANGAN PELABUHAN BENOA (BALI MARITIME TOURISM HUB)

Pembangunan Pelabuhan Benoa sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 terealisasi Rp405,30 miliar atau terserap 44,11% dari RKAP Tahun 2022 sebesar Rp918,77 miliar. Pekerjaan yang masih dilanjutkan di Tahun 2022 yaitu Pekerjaan *Revetment & Retaining*

BENOA PORT DEVELOPMENT (BALI MARITIME TOURISM HUB)

The construction of the Benoa Port until the fourth quarter of 2022 realized Rp405.30 billion, or 44.11% of the 2022 RKAP of Rp918.77 billion. Work in 2022 included Revetment & Retaining Wall Dumping 1 and Revetment & Retaining Wall Dumping 2

Wall Dumping 1 dan Pekerjaan *Revetment & Retaining Wall Dumping* 2 dan Dermaga Curah Cair Pelabuhan Benoa, Pekerjaan Perpanjangan Dermaga Timur 160m, Pembangunan Taman Segara Kerthi pada Area Pengembangan 1, serta Pelaksanaan Kerjasama Khusus Pembangunan BMTH.

Adapun penjelasan progres Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Progres fisik konstruksi Pekerjaan *Revetment* dan *Retaining Wall Dumping* I di Pelabuhan Benoa yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Pemborongan No. SP2.93/HK.0502/P.III-2021 Tanggal 30 April 2021 dengan Kontraktor Pelaksana PT Brantas Abipraya (Persero), sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp70,31 miliar dengan progres fisik mencapai 100%.

   Dalam mendukung pelaksanaan fisik Pekerjaan *Revetment* dan *Retaining Wall Dumping* 1 (satu) Di Pelabuhan Benoa terdapat Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yaitu PT Virama Karya (Persero) berdasarkan Perjanjian Pemborongan No. SP2.332.1/HK.0502/P.III-2020 Tanggal 01 Desember 2020 tentang Pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan *Revetment* dan *Retaining Wall Dumping* 1 (satu) dan *Dumping* 2 (dua) Serta Dermaga Curah Cair di Pelabuhan Benoa.

2. Progres fisik konstruksi Pekerjaan *Revetment* dan *Retaining Wall Dumping* 2 (dua) dan Dermaga Curah Cair di Pelabuhan Benoa yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Pemborongan No. SP2.92/HK.0502/P.III-2021 Tanggal 30 April 2021 dengan Kontraktor Pelaksana PT Waskita Karya (Persero), sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp190,54 miliar dengan progres fisik mencapai 65,93%.

   Dalam mendukung pelaksanaan fisik dimaksud terdapat Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yaitu PT Virama Karya (Persero) berdasarkan Perjanjian Pemborongan No. SP2.332.1/HK.0502/P.III-2020 Tanggal 01 Desember 2020 tentang Pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan *Revetment* dan *Retaining Wall Dumping* 1 (satu) dan Dumping 2 (dua) serta Dermaga Curah Cair di Pelabuhan Benoa.

3. Progres Fisik Pekerjaan Perpanjangan Dermaga Timur 160 m yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. SP2.367/HK.0502/P.III-2021 tanggal 30 September 2021 dengan Kontraktor Pelaksana PT Istana Putra Agung, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp82,04 miliar dengan progres fisik mencapai 95,68%.

4. Progres Fisik Pekerjaan Pembangunan Taman Segara Kerthi Area Pengembangan I yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian No. PD.01/13/5/1/ADPG /INVS/PLND-22 tanggal 13 Mei 2022 dengan Kontraktor Pelaksana PT Brantas Abipraya (Persero), sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp46,68 miliar dengan progres fisik mencapai 93,51%.

and Benoa Harbor Liquid Bulk Pier, 160m East Pier Extension, Segara Kerthi Park Development in Development Area 1, and Implementation of Special Development Cooperation BMTH.

An explanation of the progress in Quarter IV 2022 is as follows:

1. The physical progress of the construction of the Revetment and Retaining Wall Dumping I Work at Benoa Port was carried out based on the Contracting Agreement No. SP2.93/HK.0502/P.III-2021 dated April 30, 2021, with the Implementing Contractor PT Brantas Abipraya (Persero), up to Quarterly IV Year 2022 realized Rp70.31 billion with physical progress reaching 100%.

   To support the physical implementation of the 1 (one) Revetment and Retaining Wall Dumping Work at Benoa Port, there is a Construction Management Consultant (MK), PT Virama Karya (Persero) based on Contracting Agreement No. SP2.332.1/HK.0502/P.III-2020 dated December 01, 2020 for Construction Management Consulting Services Work Package Revetment and Retaining Wall Dumping 1 (one) and Dumping 2 (two) and Liquid Bulk Pier at Benoa Harbor.

2. The physical progress of the Revetment and Retaining Wall Dumping 2 (two) and Liquid Bulk Pier construction at Benoa Port was carried out based on the Contracting Agreement No. SP2.92/HK.0502/P.III-2021 dated April 30, 2021 with Implementing Contractor PT. Waskita Karya (Persero), and up to the fourth quarter of 2022 has realized Rp190.54 billion with physical progress reaching 65.93%.

   To support the physical implementation, there is a Construction Management Consultant (MK), PT Virama Karya (Persero) based on the Contracting Agreement No. SP2.332.1/HK.0502/P.III-2020 dated December 1, 2020 for Revetment Work Package Construction Management Consulting Services and Retaining Wall Dumping 1 (one) and Dumping 2 (two) as well as Liquid Bulk Pier at Benoa Port.

3. The Physical Progress of the 160m East Pier Extension Work was carried out based on the Contracting Agreement Letter No. SP2.367/HK.0502/P.III-2021 September 30, 2021 with the Implementing Contractor PT Istana Putra Agung, and until the Fourth Quarter of 2022 a total of Rp82.04 billion was realized with physical progress of 95.68%.

4. The Physical Progress of the Segara Kerthi Park Development Work Area I was carried out based on the Letter of Agreement No. PD.01/13/5/1/ADPG /INVS/PLND-22 dated May 13, 2022 with the Implementing Contractor PT Brantas Abipraya (Persero), and up to In the fourth quarter of 2022, Rp46.68 billion was realized with physical progress of 93.51%.

Berikut ini dokumentasi progres pelaksanaan pekerjaan Pengembangan Pelabuhan Benoa.

The following documents the progress of the Benoa Port Development work.



Pemancangan SPSP/Pilling SPSP



Pekerjaan Timbunan Tanah/Land Deposit Work



Pemancangan CSP/Pilling CSP



Pekerjaan Instal Halfslab/Halfslab Install Work



Pemancangan SPSP/Pilling SPSP



Pekerjaan Capping Beam/Capping Beam Work

Gambar Dokumentasi Pekerjaan *Revetment* dan *Retaining Wall Dumping* 2 dan Dermaga Curah Cair
Revetment Work Documentation and Retaining Wall Dumping 2 and Liquid Bulk Jetty

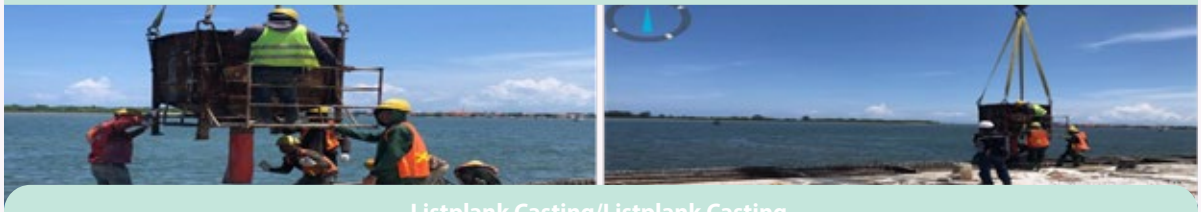
Dokumentasi Progress/Progress Documentation



Aerial View Pekerjaan/Aerial View Work

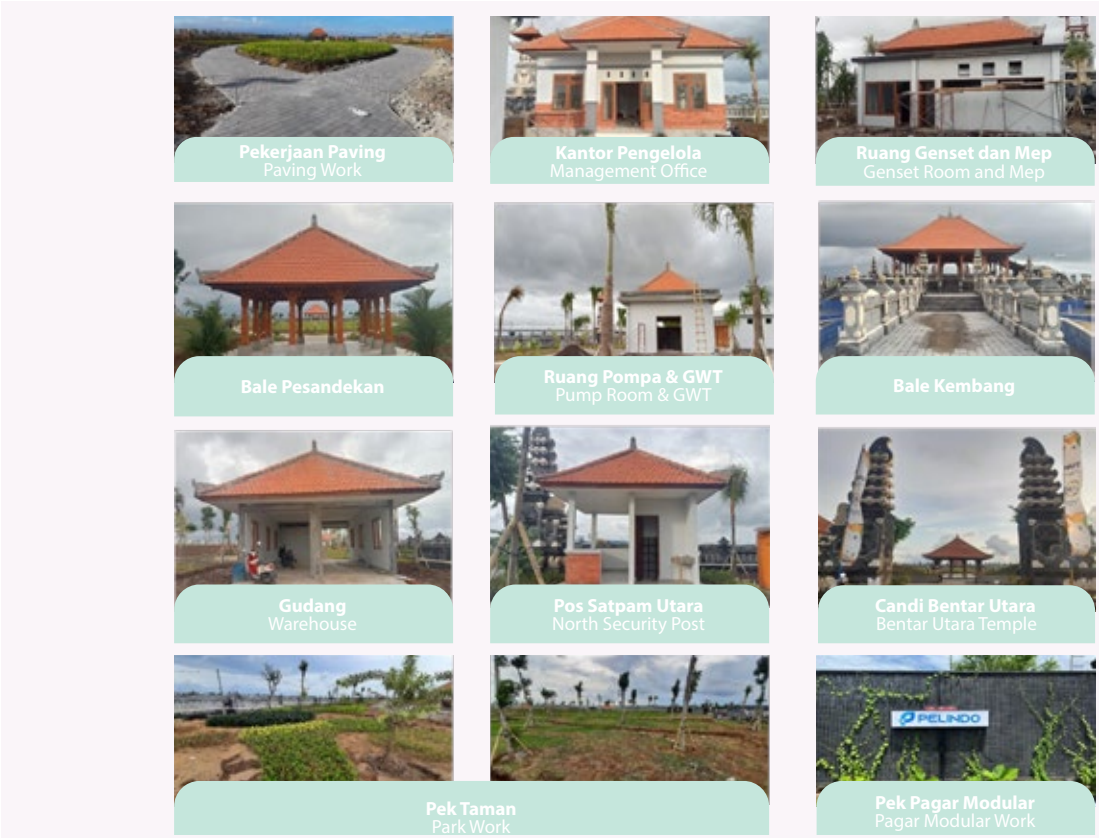


Pengecoran Pelat Lantai, Pembesian Kansteen, Curing Plat Lantai
Floor Plate Casting, Kansteen Wireless, Floor Plate Curing



Listplank Casting/Listplank Casting

Gambar Dokumentasi Pekerjaan Perpanjangan Dermaga *Cruise* Sisi Timur 160 m
160 m East Side Cruise Wharf Extension Works Documentation



Gambar Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Taman Segara Kerthi Area Pengembangan I
Documentation of Segara Kerthi Park Construction Work Development Area I

PEMBANGUNAN MAKASSAR NEW PORT TAHAP 1B DAN 1C

Makassar New Port merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pembangunan Makassar New Port Tahap IB dan Tahap IC Triwulan IV Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp231,23 miliar atau terserap 24,62% dari nilai RKAP Tahun 2022 sebesar Rp939,25 miliar.

Penjelasan progres pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. Progres fisik konstruksi Pembangunan Makassar New Port Tahap IB dan Tahap IC dilaksanakan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 01 Februari 2019 tentang Perjanjian Pemborongan antara PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk tentang Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C dan *Addendum* Perjanjian Pemborongan antara PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk tentang Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap IB dan Tahap IC No. 3/HK.301/6/PI.IV-2021 dan No.140.1/EXT/PP/INFRA2/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021, di mana Triwulan IV Tahun 2022 telah mencapai progres pekerjaan sebesar 93,502%. Saat ini, pekerjaan yang sedang dilaksanakan mencakup:

MAKASSAR NEW PORT DEVELOPMENT PHASE 1B AND 1C

Makassar New Port is one of the National Strategic Projects (PSN) as stated in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia (Perpres RI) No. 109 of 2020 concerning the Third Amendment to Presidential Regulation No. 3 of 2016 concerning Acceleration of Implementation of National Strategic Projects. The construction of Makassar New Port Phase IB and Phase IC in Quarter IV 2022 realized Rp231.23 billion, or 24.62% of the 2022 RKAP of Rp939.25 billion.

Explanation of work progress is as follows:

1. The physical progress of the construction of the Phase IB Makassar New Port Development and IC Stage was carried out based on Deed No. 01 dated February 01, 2019 concerning the Contracting Agreement between PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) and PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk for the Makassar New Port Development Work Phase 1B and Stage 1C, and Addendum to the Contract Agreement between PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) and PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. concerning the Makassar New Port Development Work Phase IB and Phase IC No. 3/HK.301/6/PI.IV-2021 and No. 140.1/EXT/PP/INFRA2/VI/2021 dated June 21, 2021, where by Quarter IV of 2022 has achieved work progress of 93.502%. Currently, work being carried out includes:

a. Pelaksanaan Pekerjaan Perkerasan dan Pemasangan *Paving Block*
b. Pelaksanaan Pekerjaan Jalur RTG
c. Pelaksanaan Pekerjaan *Rehandling* pasir depan dermaga
d. Pengerukan kolam pelabuhan

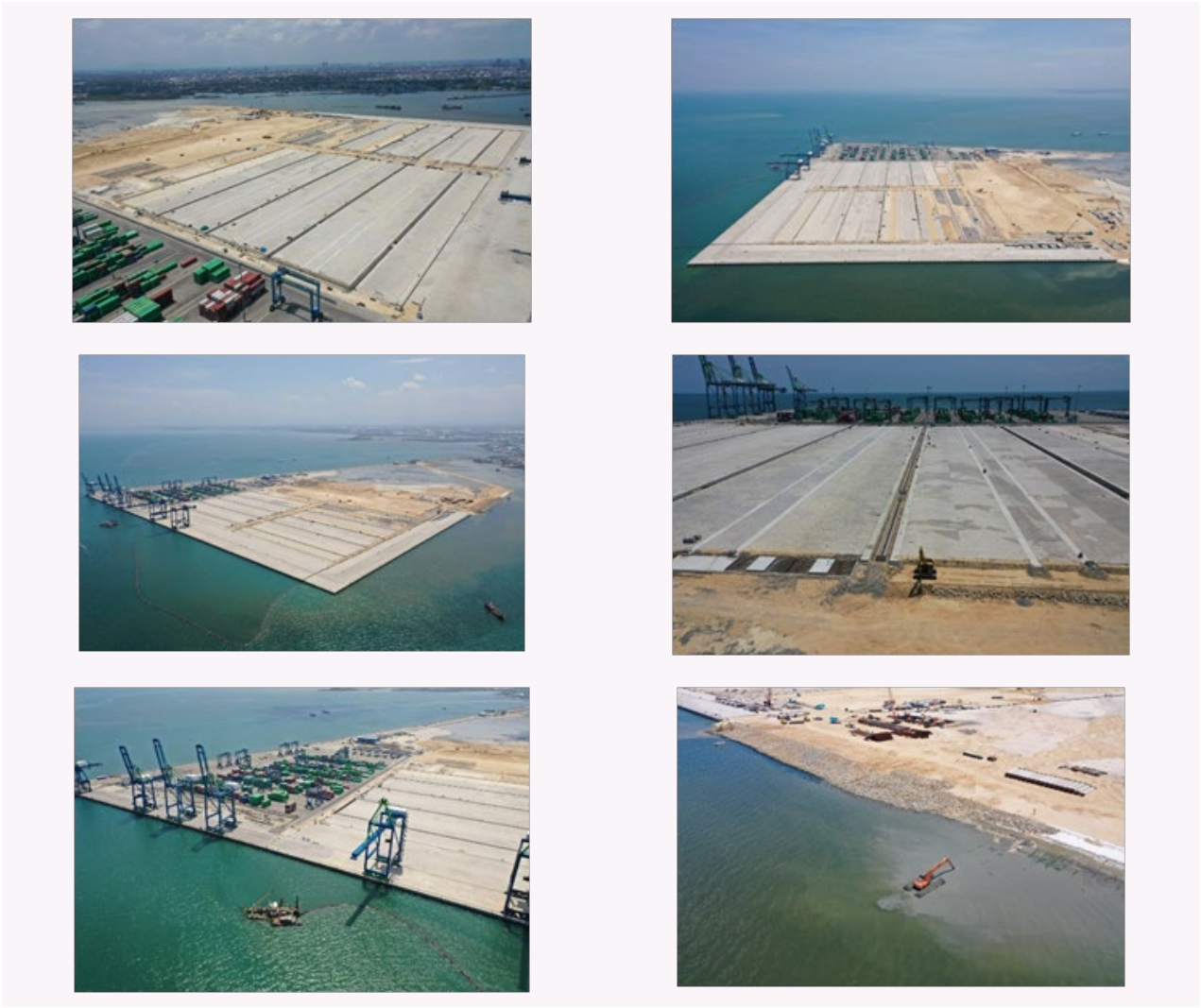
2. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi (PK3R) telah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan pada tanggal 28 Januari 2022 untuk Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi di Makassar New Port (untuk kedalaman -16 mLWS, volume pengerukan ±5,300,550.09 m^3, dan luasan reklamasi ±100,51 Ha).

Berikut ini dokumentasi Pembangunan Makassar New Port Tahap IB dan Tahap IC.

a. Implementation of Pavement Work and Installation of Paving Blocks
b. Implementation of RTG Line Works
c. Implementation of sand rehandling in front of the pier
d. Dredging of harbor ponds

2. The Dredging and Reclamation Work Activity Agreement (PK3R) was issued by the Ministry of Transportation on January 28, 2022 for Dredging and Reclamation Work at Makassar New Port (for a depth of -16 mLWS, dredging volume of ±5,300,550.09 m^3, and reclamation area of ±100.51 Ha).

The following documents the Makassar New Port Development Phase IB and Phase IC.



Gambar Foto Progres Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan 1C
Photo of Makassar New Port Development Progress Phase 1B and 1C

PEMBANGUNAN JALAN TOL CILINCING – CIBITUNG (JTCC)

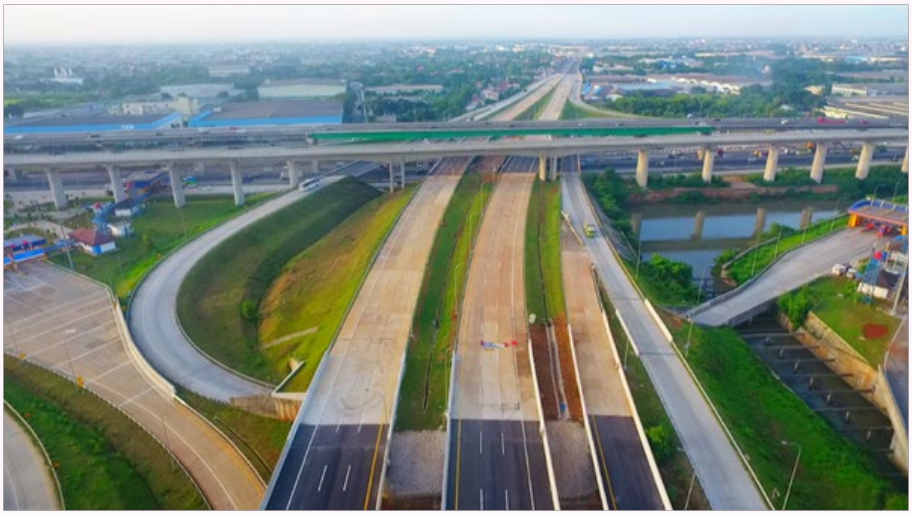
Jalan Tol Cilincing Cibitung dibangun dengan tujuan utama untuk peningkatan konektivitas pelabuhan dan *hinterland* di mana JTCC akan terhubung dengan Jalan Akses Timur Kalibaru (NPEA), serta untuk mengurangi risiko kongesti di jalan eksisting. Pada Triwulan IV Tahun 2022, terealisasi sebesar Rp1.603,68 miliar, terserap 57,38% dari nilai RKAP Tahun 2022 sebesar Rp2.794,89 miliar. Progres fisik konstruksi Triwulan IV Tahun 2022 mencapai 96.37% dan progres pembebasan lahan mencapai 100%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Seksi I - IC Cibitung s.d IC Telaga Asih – Progres Fisik 100%
2. Seksi II - IC Telaga Asih s.d IC Tambelang – Progres Fisik 100%
3. Seksi III - IC Tambelang s.d IC Tarumajaya – Progres Fisik 100%
4. Seksi IV - IC Tarumajaya s.d IC Cilincing – Progres Fisik 95,11%

CONSTRUCTION OF THE CILINCING – CIBITUNG TOLL ROAD (JTCC)

The Cilincing Cibitung Toll Road was constructed with the main objective of increasing port and hinterland connectivity where JTCC will be connected to the East Kalibaru Access Road (NPEA), as well as to reduce the risk of congestion on the existing road. In the fourth quarter of 2022, Rp1,603.68 billion was realized, or 57.38% of the 2022 RKAP of Rp2,794.89 billion. The physical progress of construction in the fourth quarter of 2022 reached 96.37% and the land acquisition progress reached 100%, with details are as follows:

1. Section I - Cibitung IC to Telaga Asih IC – 100% Physical Progress
2. Section II - Telaga Asih IC to Tambelang IC – 100% Physical Progress
3. Section III - IC Tambelang to IC Tarumajaya – 100% Physical Progress
4. Section IV - IC Tarumajaya to IC Cilincing – Physical Progress 95.11%



Gambar Progres Seksi I Jalan Tol Cibitung Cilincing
Progress of Section I of the Cibitung-Cilincing Toll Road



Gambar Progres Seksi II Jalan Tol Cibitung Cilincing
Progress of Section II of the Cibitung-Cilincing Toll Road



Gambar Progres Seksi III Jalan Tol Cibitung Cilincing
Progress of Section III of the Cibitung-Cilincing Toll Road





Gambar Peresmian Seksi 2 dan 3
Inauguration of Sections 2 and 3





Gambar Progres Seksi IV Jalan Tol Cibitung Cilincing
Progress of Section IV of the Cibitung-Cilincing Toll Road

PEMBANGUNAN TERMINAL MULTIPURPOSE LABUAN BAJO – INVESTASI SELESAI

Pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo diinisiasi oleh adanya kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia pada 10 Juli 2019, di mana sesuai arahan Presiden, Pelabuhan Labuan Bajo eksisting akan difokuskan sebagai Pelabuhan Pariwisata (penumpang, phinisi, *yacht* dan *cruise*), sehingga perlu dilakukan pemindahan/ relokasi kegiatan pelayanan barang ke lokasi baru melalui pembangunan Terminal Multipurpose di Wae Kelambu (sesuai dengan penetapan lokasi Terminal Multipurpose Wae Kelambu yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan No: KM 31/2020 tanggal 6 Februari 2020).

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sisi Laut dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dengan kontraktor PT Brantas Abipraya, sementara Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sisi Darat dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan kontraktor PT Wijaya Karya. Fase Pengembangan Awal Terminal Multipurpose telah selesai 100% dan telah diresmikan pada tanggal 14 Oktober 2021.

Sehubungan dengan selesainya pekerjaan fisik, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah menyampaikan Surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. PD.05.01/7/6/1/PGPF/ UTMA/PLND-22 tanggal 7 Juni 2022 perihal Penyampaian Penyelesaian Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menyusulkan proyek tersebut dapat dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional para Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021.

CONSTRUCTION OF LABUAN BAJO MULTIPURPOSE TERMINAL – INVESTMENT COMPLETED

The development of Labuan Bajo Port was initiated by a working visit of the President of the Republic of Indonesia on July 10, 2019, where based on the President's directive, the existing Labuan Bajo Port will be focused as a Tourism Port (passenger, phinisi, yacht and cruise), so it is necessary to transfer/relocate goods service activities to a new location through the construction of a Multipurpose Terminal in Wae Kelambu (in accordance with the location determination of the Wae Kelambu Multipurpose Terminal stipulated in the Ministry of Transportation No: KM 31/2020 dated February 6, 2020).

The Sea Side Facility Development Work was carried out by the Ministry of Transportation with the contractor PT Brantas Abipraya, while the Land Side Facility Development Work was carried out by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) with the contractor PT Wijaya Karya. The Multipurpose Terminal Initial Development Phase has been 100% completed and was inaugurated on October 14, 2021.

In connection with the completion of physical work, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) submitted a Letter to the Coordinating Minister for Economic Affairs No. PD.05.01/7/6/1/PGPF/ UTMA/PLND-22 dated June 7, 2022 concerning Submission of Completion of National Strategic Project Implementation carried out by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) where PT Pelabuhan Indonesia (Persero) submitted the project be excluded from the list of National Strategic Projects according to the Republic of Indonesia Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation No. 7 of 2021.



Gambar Pembangunan Terminal Multipurpose Labuan Bajo
Construction of the Labuan Bajo Multipurpose Terminal

PEMBANGUNAN *FLY OVER* DARI DAN MENUJU TERMINAL TELUK LAMONG – INVESTASI SELESAI

Pekerjaan fisik pembangunan *fly over* dari dan menuju Terminal Teluk Lamong telah selesai 100% pada Tahun 2021. Saat ini belum dioperasikan dikarenakan akses persimpangan dari dan menuju *fly over* Terminal Teluk Lamong belum di bangun oleh Pemerintah Kota Surabaya. Adapun Uji Layak Fungsi (ULF) dan Uji Layak Operasi (ULO) dapat dilakukan setelah persimpangan dimaksud selesai dikonstruksi.

Sehubungan dengan selesainya pekerjaan fisik, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah menyampaikan Surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. PD.05.01/7/6/1/PGPF/UTMA/PLND-22 tanggal 7 Juni 2022 perihal Penyampaian Penyelesaian Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menyusulkan proyek tersebut dapat dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional para Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021.

CONSTRUCTION OF FLY OVER FROM AND TO LAMONG BAY TERMINAL – INVESTMENT COMPLETED

The physical construction of the fly over to and from Teluk Lamong Terminal was 100% completed in 2021. Currently it has not been operating as the intersection access to and from the Teluk Lamong Terminal fly over has not been built by the Surabaya City Government. The Functional Proper Test (ULF) and Operation Worthiness Test (ULO) can be carried out after the construction of the intended intersection has been completed.

In connection with the completion of physical work, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has submitted a Letter to the Coordinating Minister for Economic Affairs No. PD.05.01/7/6/1/PGPF/UTMA/PLND-22 dated June 7, 2022 concerning Submission of Completion of National Strategic Project Implementation carried out by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) where PT Pelabuhan Indonesia (Persero) submitted the project be excluded from the list of National Strategic Projects according to the Republic of Indonesia Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation No. 7 of 2021.



Gambar Pembangunan *Fly Over* dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong
Construction of Fly Over from and to Teluk Lamong Terminal

PENGERUKAN ALUR DAN KOLAM PELABUHAN BENOA

Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 terealisasi Rp375,58 miliar atau terserap 42,90% dari RKAP Tahun 2022. Pekerjaan ini menggunakan dana PMN, di mana total nilai investasi yang telah terkontrak dalam kegiatan Pengerukan Alur & Kolam Pelabuhan Benoa sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp1,13 triliun dengan rincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan *Design and Build* Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket A sebesar Rp493,37 miliar sesuai dengan Surat Perjanjian No. SP2.378/HK.0502/P.III-2021 Tanggal 30 September 2021, dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) dengan durasi 365 Hari Kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Pekerjaan. Progres Fisik sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 (berdasarkan Laporan Progress Mingguan ke-56 oleh Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Manajemen Konstruksi, periode 18 Desember

DREDGING OF BENOA PORT FLOWS AND POOLS

The dredging work of the Benoa Port Channels and Ponds until the fourth quarter of 2022 realized Rp375.58 billion, or 42.90% of the 2022 RKAP. This work uses PMN funds, where the total investment value that has been contracted in Benoa Port Channel & Pond Dredging activities is currently Rp1.13 trillion with the following details:

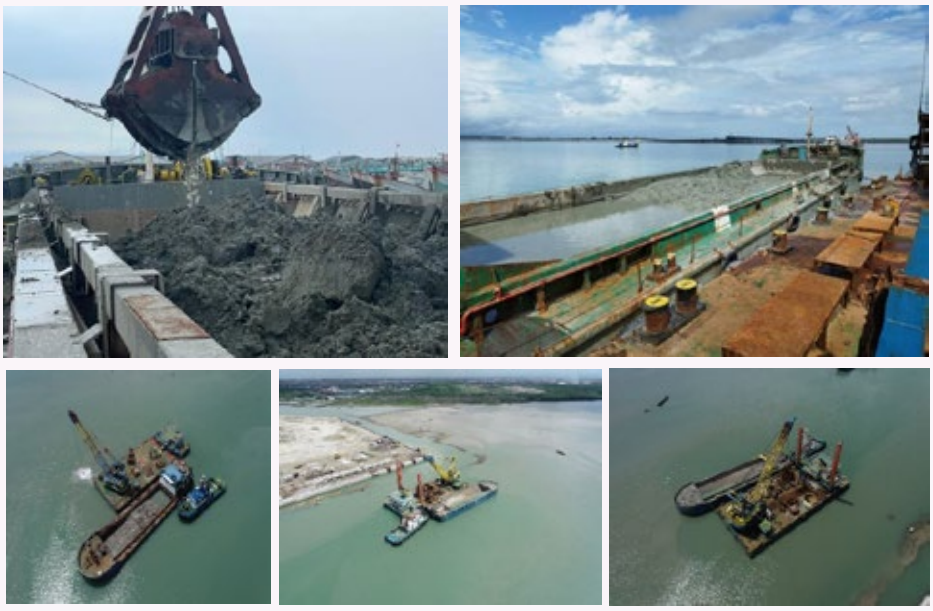
1. Design and Build Work for Dredging Channels and Ponds at Benoa Port Package A in the amount of Rp493.37 billion in accordance with the Letter of Agreement No. SP2.378/HK.0502/P.III-2021 September 30, 2021, to be carried out by PT Wijaya Karya (Persero) over 365 Calendar Days commencing from the date of the Commencement of Work Minutes. Physical Progress up to Quarter IV of 2022 (based on the 56th Weekly Progress Report by Implementing Contractors and Construction Management Consultants, period December

2022 s.d 24 Desember 2022) mencapai 28,029% dari target rencana sebesar 31,505%.

2. Pekerjaan *Design and Build* Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket B sebesar Rp641,03 miliar sesuai dengan Surat Perjanjian No. SP2.373/HK.0502/P.III-2021 Tanggal 30 September 2021, dilaksanakan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) dengan durasi 365 Hari Kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Pekerjaan. Progres Fisik sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 (berdasarkan Laporan Progress Mingguan ke-63 oleh Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Manajemen Konstruksi, periode 18 Desember 2022 s.d 24 Desember 2022) mencapai 46,686% dari target rencana sebesar 45,835%.

18, 2022 to December 24, 2022) has reached 28.029% of the planned target of 31.505%.

2. Design and Build Work for Dredging Channels and Ponds at Benoa Port Package B in the amount of Rp641.03 billion in accordance with the Letter of Agreement No. SP2.373/HK.0502/P.III-2021 September 30, 2021, carried out by PT Pembangunan Perumahan (Persero) over 365 Calendar Days commencing from the date of the Commencement of Work Minutes. Physical Progress up to Quarter IV of 2022 (based on the 63rd Weekly Progress Report by Implementing Contractors and Construction Management Consultants, period December 18, 2022 to December 24, 2022) has reached 46,686% of the planned target of 45,835%.



Gambar Pengerukan Area Kolam Curah Cair dan Gas
Dredging of Liquid and Gas Bulk Pool Areas

PENGEMBANGAN PELABUHAN KUPANG

Pekerjaan pengembangan Pelabuhan Kupang merupakan Proyek Strategis Nasional yang terdiri dari 14 Pekerjaan/investasi. Tahun 2021, 12 pekerjaan telah selesai 100%, dan pada tahun 2022 ini terdapat 2 pekerjaan yang masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan dan progres saat ini telah selesai 100%, yaitu pekerjaan renovasi Terminal Penumpang di Pelabuhan Kupang dan Pelabuhan Waingapu.

Triwulan III Tahun 2022, pekerjaan pengembangan Pelabuhan Kupang terealisasi sebesar Rp22,89 miliar, atau terserap 128,78% dari RKAP Tahun 2022 sebesar Rp17,73 miliar atau terserap 128,78% dari RKAP sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp17,73 miliar. Adapun progres fisik pekerjaan renovasi Terminal Penumpang Pelabuhan Kupang mencapai 100% dan untuk renovasi Terminal Penumpang Pelabuhan Waingapu mencapai 100%.

KUPANG PORT DEVELOPMENT

The Kupang Port development work is a National Strategic Project consisting of 14 Works/investments. In 2021, 12 works have been completed 100%, and in 2022 there were 2 works still in the implementation stage, and progress has now been completed 100% for the renovation of the Passenger Terminal at Kupang Port and Waingapu Port.

In the third quarter of 2022, the Kupang Port development work realized Rp22.89 billion, or 128.78% of the 2022 RKAP of Rp17.73 billion, or 128.78% of the RKAP until the third quarter of 2022 of Rp17.73 billion. The physical progress of the Kupang Port Passenger Terminal renovation work has reached 100%, and for the Waingapu Port Passenger Terminal renovation has reached 100%.



Gambar Progres Fisik Renovasi Terminal Penumpang Tenau Kupang
Physical Progress of Renovation of the Tenau Kupang Passenger Terminal



Gambar Progres Fisik Renovasi Terminal Penumpang Waingapu
Physical Progress of Waingapu Passenger Terminal Renovation

PENGEMBANGAN PELABUHAN SORONG EKSISTING

Pengembangan Pelabuhan Sorong Eksisting terdiri dari 2 pekerjaan/investasi yaitu pekerjaan pembangunan CY PMN dan *refurbishment* 2 (dua) unit CC di Pelabuhan Sorong. Triwulan IV Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2,99 miliar, atau terserap 5,45% dari RKAP Tahun 2022 sebesar Rp54,80 miliar. Pekerjaan *refurbishment* telah selesai 100% sementara untuk pekerjaan perkerasan CY masih dalam tahap perencanaan. Pelaksana kegiatan perkerasan CY mengalami kesulitan finansial akibat COVID-19, di mana dilakukan pemutusan kontrak tanggal 22 Juni 2022 dengan progres terakhir 14,02%. Sesuai dengan arahan Direksi, telah dilakukan koordinasi dengan *Subholding* Pelindo (SPTP) terkait perubahan layout dan spesifikasi teknis. Saat ini dalam proses finalisasi revisi desain dan penyiapan dokumen lelang.

DEVELOPMENT OF THE EXISTING SORONG PORT

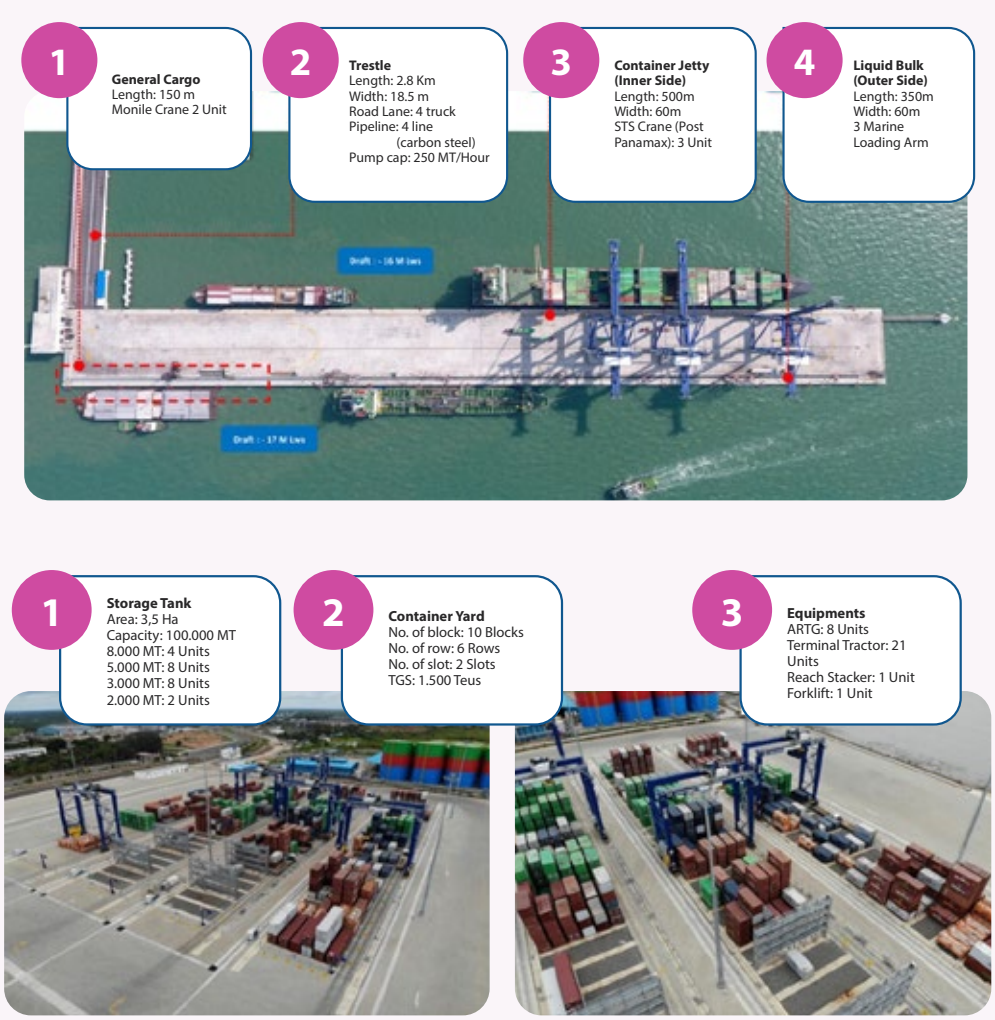
The development of the Existing Sorong Port consists of 2 works/investments, namely the construction of CY PMN and the refurbishment of 2 (two) CC units at Sorong Port. In the fourth quarter of 2022, Rp2.99 billion was realized, or 5.45% of the 2022 RKAP of Rp54.80 billion. The refurbishment work has been completed 100% while the CY pavement work is still in the planning stage. Implementing CY pavement activities faced financial difficulties due to COVID-19, where the contract was terminated on June 22, 2022, with the latest progress at 14.02%. In accordance with the Board of Directors directive, coordination has been carried out with the Pelindo Subholding (SPTP) concerning changes to the layout and technical specifications. Currently this in the process of finalizing design revisions and preparing tender documents.



I.25 Pekerjaan Pelabuhan Sorong dan Arar
Figure I.25 Sorong and Arar Harbor Works

Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung – Investasi Selesai
Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung telah selesai

Kuala Tanjung Port Development – Investment Completed
Kuala Tanjung Port construction has been completed



Gambar I.26 Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung
Figure I.26 Development of Kuala Tanjung Port

PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI KUALA TANJUNG

Triwulan IV Tahun 2022 Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung terealisasi sebesar Rp270,94 miliar, atau terserap 89,21% dari RKAP Tahun 2022 sebesar Rp303,71 miliar. Realisasi Pelaksanaan pekerjaan yaitu proses pembebasan lahan, KJPP Pengadaan Tanah, penyusunan *Feasibility Study* untuk menentukan *highest best use* terhadap optimalisasi lahan serta proses perencanaan Infrastruktur Dasar di Kawasan Industri.

Adapun penjelasan investasi pada Tahun 2022 antara lain:

1. Pengadaan Tanah 55,65 Ha, adapun progresnya adalah sebagai berikut:
   a. Penunjukkan KJPP telah selesai pada tanggal 8 April 2022 dengan Surat Perjanjian No. HK.45/2/15/PPK-22;
   b. Telah diterbitkan SK tentang Penetapan Penilai pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan Hub Internasional dan Fasilitas Penunjang Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara No. 022/SK-12-09-AT-01-02-IV/22 Tanggal 11 April 2022 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;



   c. Telah selesai dilaksanakan Musyawarah Bentuk ganti Rugi Kerugian pada 21 s.d 24 Juni 2022;



Gambar I.26 Musyawarah Ganti Rugi Lahan
Picture I.26 Deliberation on Land Compensation

   d. Rapat upaya percepatan pengadaan tanah dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan pimpinan rapat Sekda Batubara;
   e. Validasi oleh BPN Asahan sebanyak 342 Persil pada tanggal 25, 26,27 Oktober 2022, 16, 23 dan 30 November 2022, 08 dan 28 Desember 2022;
   f. Pembayaran ganti rugi tanah dengan total sebanyak 336 Persil dengan luasan mencapai 39,53 Ha. Yang dilaksanakan pada tanggal 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 15, 16 dan 30 Desember 2022;
2. Pembangunan Infrastruktur Dasar saat ini masih dalam proses perencanaan;
3. Pekerjaan Kajian aspek Komersial seperti Kajian Pendanaan dan *Business Plan* Kawasan saat ini masih dalam proses pelaksanaan.

DEVELOPMENT OF KUALA TANJUNG INDUSTRIAL AREA

In quarter IV of 2022, the Kuala Tanjung Industrial Estate development realized Rp270.94 billion, or 89.21% of the 2022 RKAP of Rp303.71 billion. Realization of the work includes the process of land acquisition, KJPP Land Procurement, preparation of a Feasibility Study to determine the highest best use for land optimization ,and the planning process for Basic Infrastructure in the Industrial Area.

An explanation of investment in 2022 includes:

1. Land Acquisition of 55.65 Ha, with the progress as follows:
   a. The appointment of KJPP was completed on April 8, 2022 with the Letter of Agreement No. HK.45/2/15/PPK-22;
   b. Appraiser Appointment for Land Acquisition Decree for Development of International Hub Port and Supporting Facilities for Kuala Tanjung Port in Batu Bara District, North Sumatra Province, No. 022/SK-12-09-AT-01-02-IV/22 dated April 11, 2022 was issued by the Asahan District Land Office;
   c. The Forms of Compensation of Losses Consultation was completed on June 21 to 24, 2022;
   d. A meeting to accelerate land acquisition was held on October 19, 2022 with the chairman from the Coal Regional Secretariat;
   e. Validation by BPN Asahan of 342 parcels on 25, 26,27 October 2022, 16, 23 and November 30, 2022, December 08 and 28, 2022;
   f. Payment of land compensation for a total of 336 plots with an area of 39.53 Ha., held on December 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 15, 16 and 30, 2022;
2. Basic Infrastructure Development is currently still in the planning process;
3. Commercial aspect study work such as the Funding Study and Area Business Plan are currently still in the process of being implemented.

ASPEK PEMASARAN

Uraian aspek pemasaran meliputi strategi pemasaran serta pangsa pasar atas produk dan jasa Pelindo.

STRATEGI PEMASARAN

Strategi pemasaran yang tepat akan mendorong peningkatan pangsa produk dan jasa Pelindo. Berikut adalah uraian mengenai strategi pemasaran Pelindo yang dilakukan masing-masing regional Pelindo di tahun 2022.

REGIONAL 1

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Regional 1 berfokus pada peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan dan memperluas pangsa pasar yang meliputi beberapa aspek terkait yaitu:

1. **Aspek Produk dan Layanan**

   Dalam memberikan layanan jasa kepelabuhanan, Regional 1 telah memberikan layanan jasa sesuai dengan target kinerja operasional dan diharapkan dapat juga memenuhi harapan pelanggan. Layanan jasa yang diberikan berfokus pada sisi waktu yaitu kecepatan layanan (pelayanan pemanduan, penundaan dan juga bongkar muat barang) dan kualitas layanan (ketepatan dan keselamatan kerja).

   Realisasi *market share* curah Regional 1 Tahun 2022 adalah sebesar 46% dan dijadikan sebagai target *market share* curah Regional 1 Tahun 2023, namun Regional 1 tetap berupaya agar realisasi *market share* curah tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022. Untuk memberikan peningkatan kualitas layanan dari sisi sarana dan prasarana, Regional 1 menyusun rencana pengerukan untuk beberapa Cabang Pelabuhan antara lain yaitu pengerukan alur pelayaran di Pelabuhan Belawan, pengerukan kolam di Pelabuhan Belawan, pengerukan kolam di Pelabuhan Dumai, dan pengerukan kolam di Pelabuhan Malahayati. Realisasi Pemanduan di TUKS Regional 1 tahun 2022 adalah sebesar 45.925,00 Gerakan dan 257.157.705,72 GT Gerakan dengan RKAP tahun 2023 adalah sebesar 51.998 gerakan dan 288.472.428,90 GT Gerakan. Realisasi Penundaan di TUKS Regional 1 tahun 2022 adalah sebesar 37.055,26 Jam dan 364.669.711,76 GT dengan RKAP tahun 2023 adalah sebesar 47.495,50 Jam dan 423.976.474,81 GT.Jam.

2. **Aspek Tarif**

   Regional 1 menerapkan kebijakan yang dapat diberikan kepada pelanggan khususnya pada segmen pelayanan jasa kapal sesuai kondisi di lapangan antara lain:

   a. Penawaran tarif diferensiasi dengan mekanisme kerja sama *Business to Business* (B to B).
   b. Memberikan kelonggaran jangka waktu pembayaran (*term of payment*) untuk perusahaan pengguna jasa, misalnya pemberian Top 20 hari kepada PT Meratus Lines.
   c. Pemberian potongan tarif (diskon) sesuai ketentuan yang berlaku.

MARKETING ASPECT

A description of the marketing aspect includes marketing strategy and market share for Pelindo's products and services.

MARKETING STRATEGY

Following the right marketing strategy will encourage an increase in the share of Pelindo's products and services. The following explains Pelindo's marketing strategy carried out by each Pelindo region in 2022.

REGIONAL 1

The marketing strategy undertaken by Regional 1 focuses on improving the quality of service to customers and expanding market share which includes several related aspects, as follows:

1. **Product and Service Aspect**

   In providing port services, Regional 1 has provided services in accordance with operational performance targets and is expected to also meet customer expectations. The services provided focus on the time side, namely the speed of service (scouting services, delays and also the loading and unloading of goods) and service quality (accuracy and work safety).

   The realization of Regional 1 bulk market share in 2022 was 46% and will be used as the target of Regional 1 bulk market share in 2023, but Regional 1 is still trying to increase the realization of bulk market share in 2023 from 2022. To provide improved quality of service in terms of facilities and infrastructure, Regional 1 has prepared dredging plans for several Port Branches, including dredging shipping lanes at Belawan Port, pond dredging at Belawan Port, pond dredging at Dumai Port, and pond dredging at Malahayati Port. TUKS Scouting in Regional 1 in 2022 was 45,925.00 Movements and 257,157,705.72 GT Movements, against the 2023 RKAP target of 51,998 Movements and 288,472,428.90 GT Movements. Delays in TUKS Regional 1 in 2022 amounted to 37,055.26 Hours and 364,669,711.76 GT, with the 2023 RKAP of 47,495.50 Hours and 423,976,474.81 GT. Hours.

2. **Tariff Aspect**

   Regional 1 has policies that can be given to customers, especially in the ship service segment according to conditions in the field, including:

   a. Differentiation tariff offering using a Business to Business (B to B) collaboration mechanism.
   b. Providing flexible terms of payment for service user companies, for example giving Top 20 days to PT Meratus Lines.
   c. Providing discounted rates in accordance with applicable regulations.

3. Aspek Hubungan Pelanggan dan *Stakeholder*

Salah satu faktor penting dalam strategi pemasaran adalah menjaga hubungan baik dan harmonis dengan para *stakeholder*. Regional 1 telah melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan *engagement* dengan pelanggan dan *stakeholder*. Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan *Customer Visit*

Dalam rangka pemberian apresiasi dan menjalin hubungan yang harmonis dengan para *customer* serta untuk menampung aspirasi dari *customer* untuk pengembangan kualitas layanan, telah dilakukan kegiatan *customer visit* di areal Medan dan Belawan untuk wilayah Regional 1 kepada 5 *customer* terpilih yaitu:

- PT Pelayaran Karana Line
- PT Admiral Line
- PT Samudera Agency
- PT Tanto Intim Line
- PT Tirta Permai Bahari

b. Kegiatan *Customer Gathering*

Dalam rangka menjalin hubungan yang harmonis dengan para *customer* serta menampung aspirasi dari *customer* untuk pengembangan kualitas layanan telah dilakukan kegiatan *customer gathering* di cabang-cabang Pelabuhan wilayah Regional 1 yang telah terealisasi pada 7 cabang Pelabuhan yaitu:

- Cabang Sibolga
- Cabang Tanjung Balai Karimun
- Cabang Tanjung Pinang
- Cabang Lhokseumawe
- Cabang Dumai
- Cabang Kuala Tanjung
- TPK Belawan

REGIONAL 2

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Regional 2 fokus terhadap pengelolaan dan peningkatan layanan kepada pelanggan. Dengan metode tersebut akan terjalin hubungan yang baik antara Regional 2 dengan pelanggan. Beberapa aspek yang mendukung strategi pemasaran antara lain:

1. Aspek Hubungan Pelanggan dan *Stakeholder*

Kegiatan pemasaran tidak lepas dengan hubungan pelanggan. Dengan adanya hubungan yang baik dengan pelanggan maka segala hal kebutuhan pelanggan yang dapat menjadi potensi penambahan pendapatan perusahaan dapat di-*capture* dan difasilitasi sesuai kemampuan perusahaan. Selain itu untuk menjaga retensi pelanggan dan menarik minat pelanggan baru terhadap layanan yang diberikan oleh Regional 2, telah dilakukan beberapa kegiatan pemasaran berupa *customer visit* kepada pelanggan eksisting maupun calon pelanggan potensial serta kegiatan lain untuk meningkatkan *engagement* ke

3. **Customer and Stakeholder Relations Aspect**

One important factor in marketing strategy is maintaining good and harmonious relations with stakeholders. Regional 1 has carried out several activities aimed at increasing engagement with customers and stakeholders. The activities carried out are as follows:

a. Customer Visit Activities

To show appreciation and establish harmonious relationships with customers and to accommodate aspirations from customers for the development of service quality, customer visit activities have been carried out in the Medan and Belawan areas for Regional 1 to 5 selected customers, namely:

- PT Pelayaran Karana Line
- PT Admiral Line
- PT Samudera Agency
- PT Tanto Intim Line
- PT Tirta Permai Bahari

b. Customer Gathering Activities

To establish harmonious relationships with customers and accommodate the aspirations of customers for the development of service quality, customer gathering activities have been carried out at Port branches in Regional 1 in 7 Port branches, namely:

- Sibolga Branch
- Tanjung Balai Karimun Branch
- Tanjung Pinang Branch
- Lhokseumawe branch
- Dumai Branch
- Kuala Tanjung Branch
- TPK Belawan

REGIONAL 2

The marketing strategy in Regional 2 focuses on managing and improving customer service. With this method, good relationships will be established between Regional 2 and its customers. Several aspects that support the marketing strategy include:

1. **Customer and Stakeholder Relations Aspect**

Marketing activities are important for building customer relationships. With a good customer relationship, everything the customer needs can realize addition Company revenue. In addition to maintaining customer retention and attracting new customers' interest in the services provided by Regional 2, several marketing activities have been carried out in the form of customer visits to existing and potential customers, as well as other activities to increase customer engagement such as customer surveys. Following the merger of PT Pelindo and the formation of a subholding that directly handles port operational activities, Regional 2 acts as a

pelanggan seperti *customer gathering, customer awarding* dan *customer survey*. Dengan penggabungan PT Pelindo dan terbentuknya *subholding* yang menangani langsung kegiatan operasional pelabuhan, maka Regional 2 berperan sebagai *stakeholder management* untuk mendukung kelancaran bisnis dan operasional di cabang pelabuhan maupun *subholding* di lingkungan Regional 2.

2. **Aspek Produk dan Layanan**
   Dalam memasarkan produk dan layanan yang diberikan, Regional 2 telah melakukan sosialisasi ataupun publikasi di media sosial ataupun dalam forum pertemuan resmi di tingkat cabang ataupun regional. Selain itu, dalam memudahkan pelanggan untuk mengakses layanan yang dibutuhkan, Regional 2 telah mengimplementasikan beberapa portal pengajuan layanan antara lain sistem *E-Service*, VMS, NPK-TOS, i-Hub dan sistem operasi lain yang didukung juga dengan tersedianya *channel E-Care* untuk penanganan keluhan pelanggan. Sebagai media *marketing tools*, informasi mengenai jenis layanan dan fasilitas di lingkungan Regional 2 juga telah disusun dalam bentuk *product catalogue.*
3. **Aspek Tarif**
   Terkait aspek tarif yang berlaku di lingkungan Regional 2 juga dapat dilihat oleh pelanggan melalui *website* perusahaan dan portal pengajuan layanan untuk menjamin transparansi tarif pelabuhan. Dalam menjaga persaingan dengan kompetitor, Regional 2 juga menerapkan beberapa kebijakan yang dapat diberikan kepada pelanggan sesuai kondisi di lapangan antara lain:
   a. Penawaran tarif diferensiasi dengan mekanisme kerja sama *Business to Business* (B to B).
   b. Pemberian *reward* atas capaian kontribusi pelanggan kepada Perseroan.
   c. Pemberian Insentif berupa kompensasi atau kemudahan yang diberikan dalam rangka menjaga retensi pelanggan.
   d. Pemberian potongan tarif (diskon) sesuai ketentuan yang berlaku.
   e. Pemberian relaksasi jangka waktu pembayaran nota tagihan dalam kondisi tertentu.

REGIONAL 3

Persaingan bisnis global khususnya pada industri kepelabuhanan saat ini semakin ketat sehingga Regional 3 menjalankan berbagai strategi pemasaran pasar dan pengembangan produk/layanan jasa untuk dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan capaian pendapatan Perusahaan. Adapun strategi pemasaran yang dilakukan oleh Regional 3 terbagi menjadi beberapa aspek, antara lain:

1. **Produk/Layanan**
   Regional 3 telah melakukan kerja sama dengan Pihak Swasta, Kementerian/Lembaga dan sinergi bersama BUMN lainnya dalam rangka pengembangan pelayanan jasa dan peningkatan kualitas layanan kepada pengguna jasa. Hal tersebut dilakukan untuk memperluas cakupan wilayah kerja sehingga dapat meraih potensi *market* baru maupun pengembangan *market* eksisting. Adapun bentuk pengembangan dan kerja sama yang telah dilakukan seperti:

coordinator to support smooth business and operations at port branches and subholdings within Regional 2.

2. **Product and Service Aspect**
   For marketing its products and services, Regional 2 has carries out socialization or publications on social media or through official meeting forums at the branch or regional level. To make it easier for customers to access the services they need, Regional 2 has implemented several service submission portals including the E-Service system, VMS, NPK-TOS, i-Hub and other operating systems supported by the E-Care channels for handling customer complaints. As a media marketing tool, information on the types of services and facilities in Regional 2 has also been compiled in a product catalog.

3. **Tariff Aspect**
   Related to the tariff aspect that applies in Regional 2 environment, it has also been determined in accordance with applicable regulations in Indonesia with competitive tariff rates and in accordance with the services provided to customers. Other activities that we implement to maintain the existence and competitiveness of the company include:
   a. Differentiation tariffs offered through a Business to Business (B to B) collaboration mechanism.
   b. Providing rewards for achieving customer contributions to the Company.
   c. Providing incentives in the form of compensation or facilities provided to maintain customer retention.
   d. Providing discount rates in accordance with applicable regulations.
   e. Relaxation of invoice payment periods under certain conditions.

REGIONAL 3

The global business competition, especially in the port industry, is currently getting tighter so that Regional 3 is instigating various market marketing strategies and product/service development to expand its market share and increase the Company's revenue achievements. The marketing strategy instigated by Regional 3 is divided into several aspects, including:

1. **Products/Services**
   Regional 3 collaborates with private parties, ministries/agencies and synergized with other state-owned enterprises in the context of developing services and improving the quality of services to service users. This is carried out to expand the scope of the work area so that it can reach new market potential, as well as develop existing markets. The types of development and cooperation carried out include:

a. Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP – BMN);
b. Kerja Sama pelayanan jasa kepelabuhanan dengan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) milik Perusahaan Swasta dan BUMN;
c. Penyediaan paket layanan *port to door* atau *door to door service*.
d. Peningkatan pelayanan jasa dengan investasi peralatan dan fasilitas pelabuhan sesuai dengan *needs customer*.

2. Saluran Promosi (*Promotion Channel*)

Adapun saluran/media untuk meningkatkan *brand image* Perusahaan dan strategi mempromosikan produk/jasa kepada pelanggan, antara lain:

a. Pengiklanan;
b. *Customer visit;*
c. *Customer forum/sharing session;*
d. *Personal selling* secara B2B (*Business-to-Business*); dan
e. Publikasi melalui media sosial dan media cetak.

3. Sumber Daya Manusia/SDM (*People*)

Strategi yang digunakan adalah dengan membentuk SDM untuk mendukung aktivitas pemasaran yang melaksanakan 2 (dua) fungsi berikut, antara lain:

a. Fungsi *Sales* (Penjualan);
b. Peran ini dilakukan oleh pelaksana *Marketing Sales Officer* (MSO) yang ahli dalam melakukan pemasaran dan memahami proses bisnis perusahaan. Fungsi ini berfokus pada peningkatan pengusahaan dan penjualan produk/jasa serta pangsa pasar;
c. Fungsi Bina Pelanggan;
d. Peran ini dilaksanakan oleh pelaksana pelayanan pelanggan yang berfokus pada pendukung fungsi *sales* (penjualan) dalam rangka memastikan pelanggan mendapat pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku, memastikan kepuasan pelanggan dan menangani atau menyelesaikan suara pelanggan.

4. Harga (*Price*)

Strategi yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan tarif atau harga pada saat mempromosikan produk/jasa kepelabuhanan kepada pengguna jasa, antara lain:

a. Menawarkan tarif yang lebih kompetitif dibandingkan pesaing;
b. Menawarkan tarif dengan paket *bundling* jasa;
c. Pemberian stimulus/diskon;
d. Komisi penjualan (*return commission*);
e. Memberikan kebijakan jangka waktu pembayaran (*term of payment*).

REGIONAL 4

Sesuai dengan arah pengembangan perusahaan antara lain perkuatan kemampuan pengelolaan pada lini bisnis utama dan terintegrasi dengan ekosistem logistik, ekstensifikasi bisnis di luar area wilayah kerja, mengupayakan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan non-komersial, dan pengembangan produk dan layanan pada lini bisnis utama, serta komersialisasi aset-aset yang kurang optimal, PT Pelindo (Persero) Regional 4 berupaya melakukan langkah-langkah strategis dalam beberapa aspek sebagai berikut:

a. Collaboration on Utilization of State Property (KSP – BMN);
b. Cooperation in port services with Terminals for Own Interests (TUKS) owned by private companies and BUMN;
c. Providing port to door, or door to door service packages.
d. Improving service delivery by investing in port equipment and facilities based on customer needs.

2. Promotion Channel

The channels/media used to promote the Company's brand image and strategies to promote products/services to customers include:

a. Advertising;
b. Customer visits;
c. Customer forums/sharing sessions;
d. Personal selling in B2B (Business-to-Business); and
e. Publications through social media and print media.

3. Human Resources/HR (People)

The strategy used is to build HC to support marketing activities for the following 2 (two) functions:

a. Sales Function;
b. This role is performed by a Marketing Sales Officer (MSO), an expert in marketing and understanding of the Company's business processes. This function focuses on building the business and sales of products/services and market share;
c. Customer Development Function;
d. This role is carried out by customer service executives who focus on supporting the sales function to ensure customers receive services according to applicable procedures, to ensure customer satisfaction, and to handle or resolve customer complaints or criticisms and suggestions.

4. Price

The strategy involves using a tariff or price approach when promoting port products/services to service users, including:

a. Offering more competitive rates than competitors;
b. Offering tariffs with service bundling packages;
c. Providing incentives/discounts;
d. Giving a sales commission (return commission);
e. Applying a terms of payment leniency policy.

REGIONAL 4

In line with the Company's development direction, including strengthening management capabilities in the main business lines and integrating with the logistics ecosystem, business expansion outside the work areas, looking for non-commercial ports management opportunities, developing products and services in the main business lines, as well as the less than optimal commercialization of assets, PT Pelindo (Persero) Regional 4 took the following strategic steps in several aspects:

1. **Aspek Layanan**
   a. Regional 4 berupaya meningkatkan *level of service* dengan mengimplementasikan salah satu inisiatif strategis Pelindo terintegrasi yakni digitalisasi dan sistemasi operasi kepelabuhanan khususnya pelayanan terminal penumpang. Regional 4 berfokus pada pelayanan *cash less* dan pemenuhan data yg akurat serta *real time*.
   b. Selain itu inovasi juga dilakukan pada pelabuhan kawasan dalam penyediaan listrik yang lebih murah dan ramah lingkungan bekerja sama dengan PT PLN (Persero) dalam menyediakan Anjungan Listrik Mandiri.
   c. Untuk menstimulasi inovasi layanan jasa setiap cabang, dilakukan *monitoring* pelaksanaan inovasi melalui program *Value Creation*.
2. **Aspek Pelanggan**
   a. Pengelolaan *Key Account Management* (KAM) yakni pengelolaan kepada pelanggan utama melalui pemberian penghargaan *customer gathering* untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan loyalitas kepada Perseroan.
   b. Pelaksanaan survei kepuasan, ketidakpuasan, keterikatan dan loyalitas pelanggan yang rutin dilakukan tahun untuk mendapatkan *feedback* atas pelayanan yang telah diberikan diharapkan dapat menjadi masukan dalam menjaga dan meningkatkan layanan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
   c. Telah dilakukan peningkatan pelayanan keluhan pelanggan yang dapat diakses langsung oleh pengguna jasa melalui *website* www.pelindo.co.id pada *customer portal* Regional 4 atau www.myport.pelindo.co.id dengan tujuan mempercepat penyelesaian keluhan pelanggan dan evaluasi tingkat komplain berdasarkan segmen pelayanan.
3. **Aspek Pasar**
   Peningkatan pangsa pasar dengan melakukan ekspansi bisnis kepelabuhanan seperti kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Pelabuhan Garongkong dan penjajakan kerja sama dengan mitra atas kerja sama *fuel surcharge* dengan Asosiasi DPC INSA atas pelayanan kapal dengan tujuan menekan biaya BBM kapal tunda.

1. **Service Aspect**
   a. Regional 4 looks to increase the level of service by implementing one of Pelindo's integrated strategic initiatives, namely digitalization and systemization of port operations, especially passenger terminal services. Regional 4 focuses on cashless services and fulfilling accurate and real time data.
   b. In addition, innovation are also carried out at regional ports by providing electricity that is cheaper and environmentally friendly in collaboration with PT PLN (Persero) through Independent Electric Pavements.
   c. To stimulate service innovation in each branch, monitoring the implementation of innovations is carried out through a Value Creation program.
2. **Customer Aspect**
   a. Management of Key Account Management (KAM), namely management of key customers by holding customer gatherings to maintain good relations and increase loyalty to the Company.
   b. Conducting customer satisfaction, dissatisfaction, engagement and loyalty surveys routinely to obtain feedback on the services provided, as input for maintaining and improving services in terms of quality and quantity.
   c. Improving the customer complaint service so it can be accessed directly by service users through the website www.pelindo.co.id on the Regional 4 customer portal or www.myport.pelindo.co.id with the aim of accelerating the resolution of customer complaints and evaluating complaint levels based on service segments.
3. **Market Aspect**
   Increases in market share by expanding the port business such as cooperation in the Utilization of State Property at Garongkong Port, and exploring cooperation with partners for fuel surcharge cooperation with the DPC INSA Association for ship services with the aim of reducing tugboat fuel costs.

PANGSA PASAR

Pangsa pasar yang dikelola oleh Perseroan tahun 2022 mencapai 98% dari seluruh volume petikemas domestik, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 85%. Sedangkan pangsa pasar nonpetikemas domestik tahun 2022 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang masih berada dalam kisaran 15%. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya trafik sebagai dampak dari membaiknya kondisi perekonomian serta adanya *booming* CPO dan batu bara.

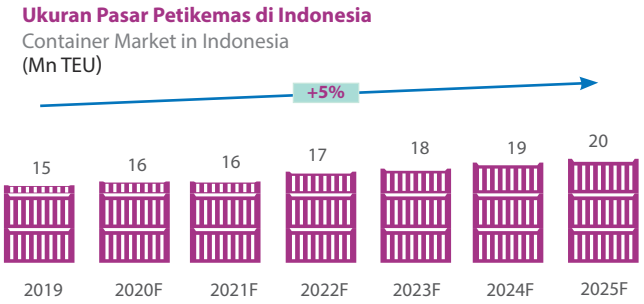
Adapun pertumbuhan pasar petikemas domestik 2019 sampai dengan 2025 diproyeksikan sebesar 5%, dengan proyeksi volume pada tahun 2023 sebesar 18 juta Ton. Untuk proyeksi pertumbuhan nonpetikemas domestik dalam jangka waktu 2019 sampai dengan 2025 adalah sebesar 5,2% atau diperkirakan akan mencapai volume sebesar 2,2 miliar Ton pada tahun 2023. Perseroan dapat meningkatkan target bisnis nonpetikemas pada tahun 2023 dengan strategi pertumbuhan anorganik.

MARKET SHARE

The Company's market share in 2022 was 98% of all domestic container volume, an increase compared to the previous year's 85%. The domestic non-container market share in 2022 did not change compared to the previous year, and was still in the range of 15%. This was due to increased traffic as a result of improving economic conditions as well as the booming CPO and coal.

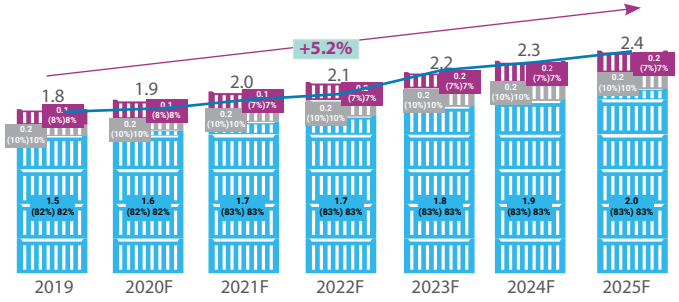
The domestic container market growth from 2019 to 2025 is projected to be 5%, with a projected volume in 2023 of 18 million tons. The projected domestic non-container growth for the period 2019 to 2025 is 5.2%, and is expected to reach a volume of 2.2 billion tons in 2023. The Company can increase its non-container business target in 2023 with an inorganic growth strategy.

Gambar Proyeksi Petikemas
Container Projection Image



Sumber: Analisis BCG untuk *Masterplan* Pelindo 2021-2025
Source: BCG Analysis for the Pelindo Master Plan 2021-2025

Gambar Proyeksi Nonpetikemas
Non-container Projection Image



Sumber: GTA Forecasting, ISH Market, Ekspose RKAP Pelindo 2023
Source: GTA Forecasting, ISH Market, Pelindo 2023 RKAP Expose

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Kelompok Usaha yang terlibat baik dalam menyediakan produk atau jasa tertentu (segmen usaha) yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya. Segmen usaha Pelindo dikelompokan ke dalam segmen usaha Operasi Kepelabuhan dan Jasa Lainnya. Segmen Kepelabuhan meliputi arus kapal, arus petikemas, arus barang nonpetikemas dan arus penumpang. Segmen Jasa Lainnya meliputi Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik (TBAL) dan Fasilitas Rupa-Rupa.

PENJELASAN DAN PRODUKTIVITAS SEGMEN USAHA

OPERASI KEPELABUHAN

Operasi kepelabuhan meliputi arus kapal, arus petikemas, arus barang nonpetikemas dan arus penumpang.

ARUS KAPAL

Arus kapal merupakan jumlah kapal yang mendapatkan pelayanan jasa kapal dari perusahaan dan dibuktikan dengan dikeluarkannya nota jasa pelabuhan. Pencatatan trafik kapal ini dalam satuan unit kapal dan *gross tonnage* kapal serta dibedakan berdasarkan jenis lokasi pelayanan, jenis pelayaran dan jenis kapal.

Realisasi arus kapal dalam satuan unit tahun 2022 mencapai 290.970 unit, meningkat 14,25% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 254.669 unit. Demikian pula dengan realisasi arus kapal dalam satuan GT tahun 2022 mencapai 1.201.814.534 GT, meningkat 1,31% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 1.186.217.247 GT. Hal ini antara lain dipengaruhi:

1. Adanya peningkatan kegiatan pelayanan kapal di luar dermaga umum (TUKS) untuk kapal batubara di SBU Marine Tanah Grogot.
2. Meningkatnya volume kunjungan kapal jenis *general cargo*, petikemas dan Ro-Ro di di beberapa cabang utama.
3. Kenaikan kegiatan kapal di Rede dalam negeri untuk komoditas batubara.

REVIEW OF OPERATIONS PER BUSINESS SEGMENT

A segment relates to a distinguishable part of the Business Group that is engaged either in providing certain products or services (business segment), which are subject to risks and rewards that are different from those of other segments. Pelindo's business segments are grouped into the Port Operations segment and Other Services segment. The Port Segment includes ship traffic, container traffic, non-container goods traffic, and passenger traffic. The Other Services segment includes Land, Buildings, Water and Electricity (TBAL) Concession and Miscellaneous Facilities.

EXPLANATION AND PRODUCTIVITY OF BUSINESS SEGMENTS

PORT OPERATIONS

Port operations include ship traffic, container traffic, non-container goods traffic and passenger traffic.

SHIP TRAFFIC

Ship traffic shows the number of ships that receive ship services from the Company, as evidenced by the issuance of port service notes. This ship traffic is recorded in units of ships and gross tonnage of ships, and is differentiated based on the type of service location, type of shipping and type of ship.

Realization of ship traffic in units in 2022 reached 290,970 units, an increase of 14.25% compared to 254,669 units in 2021. Meanwhile, actual ship traffic in GT units in 2022 reached 1,201,814,534 GT, a decrease of 1.31% compared to 1,186,217,247 GT in 2021. This is influenced by:

1. Increase in ship service activities outside the wharf(TUKS) for coal ships in SBU Marine Land Grogot.
2. Increasing the volume of general cargo ship visits, containers and Ro-Ro in several main branches.
3. Increase in ship activities in domestic Rede for coal commodity.

Tabel Arus Kapal
Ship Traffic

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Dermaga Umum General Wharves					
Internasional International	Unit	16.232	11.805	4.427	37,50
	GT	208.507.972	201.654.893	6.853.079	3,40
Domestik Domestic	Unit	120.335	121.331	(996)	(0,82)
	GT	338.489.677	365.275.148	(26.785.471)	(7,33)

Tabel Arus Kapal
Ship Traffic

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Total Dermaga Umum Total General Wharves	**Unit**	**136.567**	**133.136**	**3.431**	**2,58**
	GT	**546.997.649**	**566.930.041**	**(19.932.392)**	**(3,52)**
Non-Dermaga Umum Non-General Wharves					
Internasional International	Unit	16.700	16.383	317	1,93
	GT	218.902.310	244.159.765	(25.257.455)	(10,34)
Domestik Domestic	Unit	137.703	105.150	32.553	30,96
	GT	435.914.575	335.932.191	99.982.384	29,76
Total Non-Dermaga Umum Total Non-General Wharves	**Unit**	**154.403**	**121.533**	**32.870**	**27,05**
	GT	**654.816.885**	**619.287.206**	**35.529.679**	**5,74**
Total Arus Kapal Total Ship Traffic	**Unit**	**290.970**	**254.669**	**36.301**	**14,25**
	GT	**1.201.814.534**	**1.186.217.247**	**15.597.287**	**1,31**

ARUS PETIKEMAS

Arus petikemas adalah jumlah petikemas yang di bongkar/muat di pelabuhan dalam satuan box dan teus. Petikemas ini dibedakan berdasarkan jenis kegiatan, jenis perdagangan, ukuran dan jenis kemasan petikemas.

Realisasi arus petikemas dalam satuan *box* tahun 2022 mencapai 13.292.102 *box*, meningkat 0,44% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 13.234.256 *box*. Demikian pula dengan arus petikemas dalam satuan TEUs yang meningkat sebesar 0,96%, dari 17.056.636 TEUs di tahun 2021 menjadi 17.220.312 TEUs di tahun 2022. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh:

1. Peningkatan arus petikemas internasional di Tanjung Priok khususnya di Terminal NPCT1 dan IPC TPK TP2 yang disebabkan adanya penambahan *service* regular baru (Meratus Line, RCL, GSL dan MSC) dan beberapa kapal adhoc MSC baik international maupun domestik.
2. Meningkatnya volume muatan, khusunya untuk komoditi palawija, beras dan jagung tujuan Cabang Belawan, Palembang, Pontianak dan Tenau Kupang.
3. Meningkatnya volume muatan semen di Cabang Tarakan serta bahan material guna pembangunan bendungan ameroro, transmall dan jalan akses Toronipa pada Cabang Kendari.

CONTAINER TRAFFIC

Container traffic reflects the number of containers unloaded/loaded at the ports, based on number of boxes and containers. These containers are differentiated based on the type of activity, type of trade, size and type of container packaging.

Realization of container traffic in boxes units in 2022 reached 13,292,102 boxes, an increase of 0.44% compared to 13,234,256 boxes in 2021. Also, the container traffic in TEUs increased by 0.96%, from 17,056,636 TEUs in 2021 to 17,220,312 TEUs in 2022. This was due to:

1. Increased flow of international containers at Tanjung Priok, especially at the NPCT1 and IPC TPK TP2 Terminals due to the addition of new regular services (Meratus Line, RCL, GSL and MSC) and several ad hoc international and domestic MSC ships.
2. Increased cargo volume, especially for secondary crops, rice and corn at the Belawan, Palembang, Pontianak and Tenau Kupang Branches.
3. Increased volume of cement cargo at the Tarakan Branch as well as materials for the construction of the Ameroro Dam, Transmall and the Toronipa access road at the Kendari Branch.

Tabel Arus Petikemas
Container Traffic

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Pelayanan Luar Negeri Overseas Services	Box	5.250.679	5.230.284	20.395	0,39
	Teus	7.965.736	7.872.429	93.307	1,19
Pelayanan Dalam Negeri Domestic Services	Box	8.041.423	8.003.972	37.451	0,47
	Teus	9.254.576	9.184.207	70.369	0,77
Total Arus Petikemas Total Container Traffic	**Box**	**13.292.102**	**13.234.256**	**57.846**	**0,44**
	Teus	**17.220.312**	**17.056.636**	**163.676**	**0,96**

ARUS BARANG NONPETIKEMAS

Arus barang nonpetikemas adalah jumlah barang yang di bongkar/muat di pelabuhan dalam satuan ton, meter kubik, MMBTU, Unit dan ekor. Barang nonpetikemas dibedakan berdasarkan lokasi kegiatan, jenis kegiatan, jenis perdagangan dan jenis kemasan.

Realisasi arus barang nonpetikemas dalam satuan ton tahun 2022 mencapai 159.727.836 ton, meningkat 9,25% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 146.200.809 ton. Hal ini antara lain dipengaruhi:

1. Adanya kenaikan bongkar muat curah kering dengan komoditi *food and grain* di Cabang Belawan dan adanya kerja sama baru untuk *handling* batubara di Cabang Tembilahan.
2. Adanya kenaikan kegiatan bongkar muat batubara di Mekar Putih serta kenaikan bongkar muat BBM milik PT AKR Corporindo di Cabang Kotabaru.
3. Kenaikan juga terjadi pada Cabang Biak yang disebabkan kegiatan bongkar pasir dan bongkar muat curah cair BBM di TUKS Pertamina.

Realisasi arus barang nonpetikemas dalam satuan M^3 tahun 2022 mencapai 5.604.518 M3, meningkat 24,11% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 4.515.637 M^3. Hal ini antara lain dipengaruhi adanya peningkatan bongkar kayu masak milik PT Pelita Bandar Nasional pada Terminal Jamrud, bongkar komoditi kayu log pada Cabang Gresik dan meningkatnya arus barang batua granit dan barang *project on shore* di Pelabuhan Dumai.

Realisasi arus barang nonpetikemas dalam satuan unit tahun 2022 mencapai 2.441.155 unit, meningkatnya 60,67% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 1.519.404 unit. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya kunjungan kapal milik PT Atosim Lampung Pelayaran dan PT Damai Lautan Nusantara, peningkatan kegiatan bongkar muat kendaraan melalui kapal RoRo di Cabang Panjang, Semarang, Tanjung Wangi dan Lembar serta penambahan armada milik PT Berlian Lautan Sejahtera pada Pelabuhan Ende – Ippi.

Realisasi arus barang nonpetikemas dalam satuan MMBTU tahun 2022 mencapai 8.800.934 MMBTU, meningkat 12,53% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 7.820.960

NON-CONTAINER GOODS TRAFFIC

Non-container goods traffic reflects the amount of goods unloaded/loaded at the port in tons, cubic meters, MMBTU, units and heads. Non-container goods are differentiated based on location of activity, type of activity, type of trading and type of packaging.

Realization of non-container goods traffic in tons in 2022 reached 159,727,836 tons, an increase of 9.25% compared to 146,200,809 tons in 2021. This was due to:

1. An increase in loading and unloading of dry bulk food and grain commodities at the Belawan Branch, and a new collaboration for handling coal at the Tembilahan Branch.
2. An increase in coal loading and unloading activities at Mekar Putih, and an increase in PT AKR Corporindo's fuel loading and unloading at the Kotabaru Branch.
3. An increase also occurred in the Biak Branch in sand unloading and liquid fuel loading and unloading activities at Pertamina TUKS.

Realization of non-container goods traffic in M3 in 2022 reached 5,604,518 M3, an increase of 24.11% compared to 4,515,637 M3 in 2021. This was partly due to the increase in the unloading of wood belonging to PT Pelita Bandar Nasional at the Jamrud Terminal, the unloading of timber commodities at the Gresik Branch, and the increase in the granite and on shore project goods traffic at Dumai Port.

Realization of non-container goods traffic in units in 2022 reached 2,441,155 units, an increase of 60.67% compared to 1,519,404 units in 2021. This was partly due to the increase in visits in ships belonging to PT Atosim Lampung Pelayaran and PT Damai Lautan Nusantara, increased vehicles loading and unloading activities via RoRo vessels at the Panjang Branch, Semarang, Tanjung Wangi and Lembar, as well as the addition the PT Berlian Lautan Sejahtera fleet at the Port of Ende - ippi.

Realization of non-container goods traffic in MMBTU units in 2022 reached 8,800,934 MMBTU, an increase of 12.53% compared to 7,820,960 MMBT in 2021. This was partly due to the repair

MMBT. Hal ini antara lain dipengaruhi karena telah diperbaikinya 1 unit alat vaporizer sehingga transfer gas dapat didukung oleh 2 unit alat vaporizer di Sub Regional Bali Nusra Cabang Benoa.

Realisasi arus barang nonpetikemas dalam satuan ekor tahun 2022 mencapai 503.694 ekor mengalami penurunan 20,69% dibandingkan tahun 2021 mencapai 635.120 ekor. Hal ini antara lain dipengaruhi:

1. Penurunan permintaan daging dari luar pulau karena adanya pusat pengembangbiakkan sapi di daerah Kalimantan dan belum terealisasinya KSP.
2. Adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sehingga berakibat pada kegiatan impor hewan dari Negara Australia di Terminal PTP Tanjung Priok.

of 1 vaporizer unit, enabling gas transfer to be supported by 2 vaporizer units in the Benoa Branch of Bali Nusra Sub-region.

Realization of non-container goods traffic in animals in 2022 reached 503,694 heads, a decrease of 20.69% compared to 635,120 in 2021. This was due to:

1. Decreased demand for meat from outside the island due to the existence of a cattle-breeding center in the Kalimantan area, and the KSP not yet realized.
2. There was an outbreak of Foot and Mouth Disease (FMD), which resulted in the import of animals from Australia at PTP Tanjung Priok Terminal.

Tabel Arus Barang Nonpetikemas
Non-Container Traffic

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Barang Luar Negeri Foreign Goods	Ton	77.687.347	68.028.591	9.658.756	14,20
	M^3	1.068.187	911.088	157.099	17,24
	Unit	453.442	337.351	116.091	34,41
	MMBTU	-	-	-	-
	Ekor	344.938	428.752	(83.814)	(19,55)
Barang Dalam Negeri Domestic Goods	Ton	82.040.489	78.172.218	3.868.271	4,95
	M^3	4.536.330	3.604.549	931.781	25,85
	Unit	1.987.713	1.182.053	805.660	68,16
	MMBTU	8.800.934	7.820.960	979.974	12,53
	Ekor	158.756	206.368	(47.612)	(23,07)
Total	**Ton**	**159.727.836**	**146.200.809**	**13.527.027**	**9,25**
	M^3	**5.604.518**	**4.515.637**	**1.088.881**	**24,11**
	Unit	**2.441.155**	**1.519.404**	**921.751**	**60,67**
	MMBTU	**8.800.934**	**7.820.960**	**979.974**	**12,53**
	Ekor	**503.694**	**635.120**	**(131.426)**	**(20,69)**

ARUS PENUMPANG

Arus penumpang adalah jumlah penumpang yang melakukan aktivitas di pelabuhan yang dicatatkan dalam satuan orang. Pencatatan arus penumpang ini dibagi berdasarkan jenis kegiatan dan jenis rute pelayaran. Jenis kegiatan terdiri dari kegiatan penumpang naik ke atas kapal dan penumpang turun dari kapal. Sedangkan rute pelayaran adalah jenis rute kapal yang dibagi dalam rute pelayaran dalam negeri dan rute pelayaran luar negeri.

Realisasi arus penumpang pada tahun 2022 mencapai 15.028.884 orang, meningkat 86,53% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8.056.905 orang. Hal ini dikarenakan terjadinya kenaikan arus penumpang di semua regional akibat adanya penurunan level PPKM dan kelonggaran kebijakan pembatasan mobilisasi

PASSENGER TRAFFIC

Passenger traffic reflects the number of passenger activities carried out at the ports, recorded in units of people. The passenger traffic is divided based on the type of activity and the type of shipping route. The type of activity consists of passengers boarding the ship and passengers getting off the ship. While the shipping routes are divided into domestic shipping routes and overseas shipping routes.

Passenger traffic in 2022 reached 15,028,884 people, an increase of 86.53% compared to 8,056,905 the previous year. This was due to an increase in passenger traffic in all regions due to a decrease in the PPKM level, and the relaxing of the community mobilization policy by the Government in Regional 1,2,3 and 4, that led to

masyarakat oleh Pemerintah di hampir seluruh Regional 1,2,3 dan 4 sehingga terjadi lonjakan arus penumpang pada saat libur bersama sekolah maupun hari raya baik lebaran dan natal 2022 yang terjadi di seluruh terminal penumpang.

a surge in passenger traffic in all passenger terminals during schools holidays, and both Eid and Christmas 2022 holidays.

Tabel Arus Penumpang
Passenger Traffic

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Luar Negeri Overseas					
Embarkasi Embarkation	Orang People	383.533	338	383.195	113.371,30
Debarkasi Debarkation	Orang People	304.151	1.538	302.613	19.675,75
Jumlah Luar Negeri Total Overseas		**687.684**	**1.876**	**685.808**	**36.556,93**
Dalam Negeri Domestic					
Embarkasi Embarkation	Orang People	7.201.720	4.085.873	3.115.847	76,26
Debarkasi Debarkation	Orang People	7.139.480	3.969.156	3.170.324	79,87
Jumlah Dalam Negeri Total Domestic		**14.341.200**	**8.055.029**	**6.286.171**	**78,04**
Jumlah Total	**Orang** People	**15.028.884**	**8.056.905**	**6.971.979**	**86,53**

JASA LAINNYA

Segmen Jasa Lainnya meliputi Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik (TBAL) dan Fasilitas Rupa-Rupa.

PENGUSAHAAN TANAH, BANGUNAN, AIR DAN LISTRIK (TBAL)

TBAL merupakan jasa persewaan lahan, bangunan, air bersih serta energi listrik.

OTHER SERVICES

The Other Services segment includes the Land, Buildings, Water and Electricity (TBAL) and Miscellaneous Concession Facilities.

LAND, BUILDING, WATER AND ELECTRICITY ENTERPRISES (TBAL)

TBAL is a rental service for land, buildings, clean water and electricity.

Tabel Produksi Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik (TBAL)
Land, Building, Water and Electricity Concession (TBAL) Production

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Pengusahaan Properti Property Operations					
Pengusahaan Lahan Land Concession					
Sewa Rental	M^2	15.952.232	33.742.879	(17.790.647)	(52,72)

Tabel Produksi Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik (TBAL)
Land, Building, Water and Electricity Concession (TBAL) Production

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Throughput Fee/Kontribusi Throughput Fee/Contribution	Ton	8.043.234	9.178.471	(1.135.237)	(12,37)
	M^2	581.166	-	581.166	100,00
Pengusahaan Perairan Aquatic Concession	**M^2**	**381.963**	**383.739**	**(1.776)**	**(0,46)**
Pengusahaan Bangunan **Building Business**	**Ton**	**575.136**	**372.576**	**202.560**	**54,37**
	M^3	**4.462**	**-**	**4.462**	**100,00**
	M^2	**217.289**	**877.833**	**(660.544)**	**(75,25)**
Konsolidasi dan Distribusi Barang Consolidation and Goods Distribution	**Paket** Packages	**3.482.063**	**441.737**	**3.040.326**	**688,27**
Pengusahaan Air/Listrik Water/Electricity Business					
Pengusahaan Air Water Business					
Pengusahaan Air Kapal Ship Water Business					
Sumber yang diusahakan Sources Worked on	Ton	2.423.122	2.318.058	105.064	4,53
Sumber yang dikerjasamakan Sources Collaborated on	Ton	349.144	25.767	323.377	1.255,00
Pengusahaan Air Umum Public Water Business					
Sumber yang diusahakan Sources Worked on	Ton	567.840	571.421	(3.581)	(0,63)
Sumber yang dikerjasamakan Sources Collaborated on	Ton	328.117	213.065	115.052	54,00
Pengusahaan Listrik **Electricity Business**	**KWh**	**58.805.557**	**43.806.538**	**14.999.019**	**34,24**

PENGUSAHAAN PROPERTI

Realisasi produksi pengusahaan properti untuk persewaan lahan di tahun 2022 dalam satuan M^2 mencapai 15.952.232 M^2, menurun 52,72% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 33.742.879 M^2. Sedangkan realisasi produksi Pengusahaan TBAL untuk persewaan perairan di tahun 2022 dalam satuan M2 mencapai 381.963 M^2, menurun 0,46% dibandingkan tahun 2021 sebesar 383.739 M^2. Sementara itu, realisasi produksi pengusahaan properti untuk persewaan bangunan dalam satuan M^2 mencapai 217.289 M^2, menurun 75,25% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 877.833 M^2. Pengusahaan bangunan tidak tercapai secara yoy dikarenakan di Tanjung Tembaga (Probolinggo) gudang 102 dan 103 tidak diperpanjang oleh PT Pelayaran Korindo.

PROPERTY BUSINESS

Realization of property business production for land rental in 2022 in M^2 reached 15,952,232 M^2, a decrease of 52.72% compared to 33,742,879 M2 in 2021. Meanwhile, actual production of TBAL business for water rental in 2022 in M^2 units reached 381,963 M^2, a decrease of 0.46% compared to 383,739 M2 in 2021. Meanwhile, actual production of property concessions for building rental in units of M^2 reached 217,289 M^2, a decrease of 75.25% compared to 877,833 M^2 in 2021. Building concessions were not achieved on a yoy basis due to Tanjung Tembaga (Probolinggo) warehouses 102 and 103 not being extended by PT Pelayaran Korindo.

PENGUSAHAAN AIR

Realisasi produksi pengusahaan air kapal untuk sumber yang diusahakan tahun 2022 dalam satuan ton mencapai 2.423.122 ton, meningkat 4,53% dibandingkan realisasi tahun 2021 yang mencapai 2.318.058. Demikian pula dengan pengusahaan air umum dari

WATER BUSINESS

Realization of ship water exploitation for exploited sources in 2022 in tons reached 2,423,122 tons, an increase of 4.53% compared to 2,318,058 in 2021. Likewise with the realization of public water from cooperated sources in 2022 in tons reached

sumber yang dikerjasamakan tahun 2022 dalam satuan ton mencapai 328.117 ton, meningkat 54,00% dibandingkan realisasi tahun 2021 yang sebesar 213.065 ton. Hal tersebut antara lain dipengaruhi peningkatan pengisian air kapal untuk kapal Luar Negeri di Teluk Bayur dan peningkatan kerjasama dengan PT Energi Pelabuhan Indonesia di Sunda Kelapa serta dampak dari mulai pulihnya industri dari pandemi sehingga kebutuhan konsumsi air umum meningkat untuk kegiatan operasional di beberapa pelabuhan.

328,117 tons, an increase of 54.00% compared to 213,065 tons in 2021. This was due to the increase in ship water filling for foreign ships in Teluk Bayur and the increase in cooperation with PT Energi Pelabuhan Indonesia in Sunda Kelapa, as well as the impact of the industry starting to recover from the pandemic so that the need for general water consumption increased for operational activities at several ports.

PENGUSAHAAN LISTRIK

Realisasi produksi pengusahaan listrik di tahun 2022 dalam satuan KWH mencapai 58.805.557 KWH, meningkat 34,24% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 43.806.538 KWH. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pemakaian listrik pada cabang Belawan dan Dumai. Selain itu, adanya penyesuaian tarif listrik pada Cabang Pontianak.

ELECTRICITY BUSINESS

Realization of electricity production in 2022 in KWH units reached 58,805,557 KWH, an increase of 34.24% compared to 43,806,538 KWH in 2021. This was due to an increase in electricity consumption at the Belawan and Dumai branches. In addition, there was an adjustment in electricity rates at the Pontianak Branch.

PELAYANAN JASA RUPA-RUPA

Merupakan jasa pelayanan yang menunjang kegiatan yang ada di pelabuhan. pelayanan jasa rupa-rupa antara lain meliputi pas terminal penumpang, pas pelabuhan, fasilitas *repair/docking* kapal, dan produksi kerja sama.

MISCELLANEOUS SERVICES

Is a service that supports activities in the port. various services include passenger terminal passes, port passes, ship repair/ docking facilities, and joint production.

Realisasi sampai dengan periode tahun 2022 untuk produksi pelayanan jasa rupa-rupa di lingkungan Pelindo dapat dilihat pada tabel berikut:

Realization up to the 2022 period for the production services within Pelindo can be seen in the following table:

Tabel Produksi Pelayanan Jasa Rupa-Rupa
Miscellaneous Services Production

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Pas Terminal Penumpang Passenger Terminal Pass					
Pas Penumpang Passenger Pass	Lembar	7.510.942	3.723.068	3.787.874	101,74
Pas Pelabuhan (Orang) Harbor Pass (People)					
Pas Harian Orang Daily Pass People	Lembar	2.768.044	3.794.742	(1.026.698)	(27,06)
Pas Berlangganan Orang Subscription Pass People	Lembar	116.247	113.381	2.866	2,53
Pas Pelabuhan (Kendaraan) Port Pass (Vehicles)					
Pas Harian Kendaraan Daily Pass Vehicles	Lembar	23.430.491	14.423.543	9.006.948	62,45
	Box	2.829.048	3.371.661	(542.613)	(16,09)
	Ton	11.448.850	14.622.589	(3.173.739)	(21,70)
	M^3	504.978	507.743	(2.765)	(0,54)
	Unit	1.091.155	54.635	1.036.520	1.897,17
	Ekor	26	5.707	(5.681)	(99,54)
Pas Berlangganan Kendaraan Subscription Pass Vehicles	Lembar	855.056	42.894	812.162	1.893,42
	Ton	5.227.126	21.628.608	(16.401.482)	(75,83)
	Unit	815	-	815	100,00

Tabel Produksi Pelayanan Jasa Rupa-Rupa
Miscellaneous Services Production

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (unit)	(%)
Produksi Kerja Sama Production Cooperation					
Kerja Sama Alat Equipment Cooperation	Unit	1.532	415	1.117	269,16
	Jam	74.858	2.539.508	(2.464.650)	(97,05)
	Ton	4.708.058	2.105.245	2.602.813	123,63
Kerja Sama Pelabuhan Port Cooperation	Ton	6.578.382	7.677.655	(1.099.273)	(14,32)
	M^3	680.255	756.521	(76.266)	(10,08)
Kerja Sama Jasa Air Kapal Water Ships Service Cooperation	Ton	6.481	-	6.481	100,00
Kerja Sama Bunker BBM Fuel Bunker Cooperation	Ton	74.694.756	47.454.516	27.240.240	57,40

PAS TERMINAL PENUMPANG

Pas penumpang di tahun 2022 dalam satuan lembar mencapai 7.510.942 lembar, meningkat 101,74% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 3.723.068 lembar. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan kapal penumpang domestik dan kegiatan kapal RORO pada beberapa cabang pelabuhan seperti Cabang Benoa, Lembar, Banyuwangi, Waingapu, Ende-Ippi, Palembang, Panjang, Pontianak dan Banten.

PASSENGER TERMINAL PASS

Passenger passes in 2022 in passes issued reached 7,510,942 sheets, an increase of 101.74% compared to 3,723,068 in 2021. This was partly influenced by the increase in domestic passenger ship activities and RORO ship activities in several port branches including Benoa, Lembar, Banyuwangi, Waingapu, Ende-Ippi, Palembang, Panjang, Pontianak and Banten.

PAS PELABUHAN

Pas harian orang di tahun 2022 dalam satuan lembar mencapai 2.768.044 2 lembar, menurun 27,06% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 3.794.742 lembar. Meskipun demikian, pas harian kendaraan dalam satuan lembar meningkat 62,45% dari 14.423.543 lembar di tahun 2021 menjadi 23.430.491 lembar di tahun 2022. Hal tersebut antara lain dipengaruhi meningkatnya kendaraan pada beberapa cabang pelabuhan seperti Cabang Benoa, Lembar, Banyuwangi, Waingapu, Ende-Ippi, Palembang, Panjang, Pontianak dan Banten.

PORT PASSES

People's daily passes in 2022 in passes issued reached 2,768,044 2 sheets, a decrease of 27.06% compared to 3,794,742 in 2021. Nonetheless, the daily vehicle passes increased by 62.45% from 14,423,543 in 2021 to 23,430,491 sheets in 2022. This was partly influenced by the increase in vehicles at several port branches including Benoa, Lembar, Banyuwangi, Waingapu, Ende-Ippi, Palembang, Panjang, Pontianak and Banten.

PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS SEGMEN USAHA

Pendapatan operasi segmen tahun 2022 mencapai Rp29,70 triliun, meningkat 3,07% atau sebesar Rp885,80 miliar dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp28,81 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan pendapatan operasi antar segmen dari operasi kepelabuhan. Peningkatan pendapatan tersebut sejalan dengan kenaikan laba tahun berjalan yang mencapai 23,06% atau sebesar Rp732,32 miliar dari Rp3,18 triliun di tahun 2021 menjadi Rp3,91 triliun di tahun 2022.

INCOME AND PROFITABILITY BY BUSINESS SEGMENT

Operating income for the segment in 2022 reached Rp29.70 trillion, an increase of 3.07% or Rp885.80 billion compared to Rp28.81 trillion in 2021. This increase was mainly influenced by the growth in inter-segment operating income from port operations. The increase in revenue was in line with the increase in profit for the year which reached 23.06% or Rp732.32 billion from Rp3.18 trillion in 2021 to Rp3.91 trillion in 2022.

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi
Operating Segment Revenue and Profitability

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousands of Rupiah)

Uraian Description	2022				
	Operasi Kepelabuhanan Port Operations	**Jasa Lainnya** Other Services	**Total Sebelum Eliminasi** Total Before Elimination	**Eliminasi** Elimination	**Total**
Pendapatan operasi segmen Segment operating revenues					
Pendapatan operasi eksternal External operating revenues	26.781.758.791	2.918.845.344	29.700.604.135	-	29.700.604.135
Pendapatan operasi antar segmen Inter-segment operating revenues	8.981.833.109	2.018.437.644	11.000.270.753	(11.000.270.753)	-
Total pendapatan operasi segmen Total segment operating revenues					**29.700.604.135**
Beban operasi Operating expenses	(29.756.772.868)	(4.038.359.251)	(33.795.132.119)	10.640.702.928	(23.154.429.191)
Pendapatan operasi lainnya - neto Other operating income - net	372.153.179	193.379.261	565.532.440	3.113.057	568.645.497
Laba usaha Operating income					**7.114.820.441**
Pendapatan keuangan Finance income	759.759.720	42.360.298	802.120.018	(421.629.748)	380.490.270

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi
Operating Segment Revenue and Profitability

(dalam ribuan Rupiah) | (dalam ribuan Rupiah) | (in thousands of Rupiah)

Uraian Description	2022				
	Operasi Kepelabuhanan Port Operations	**Jasa Lainnya** Other Services	**Total Sebelum Eliminasi** Total Before Elimination	**Eliminasi** Elimination	**Total**
Beban pajak final Final tax expense	(375.850.289)	(112.379.013)	(488.229.302)	-	(488.229.302)
Laba sebelum pajak penghasilan badan Income before corporate income tax					**4.738.654.133**
Pajak penghasilan badan Corporate income tax expense					
Kini Current	(898.369.096)	(59.968.402)	(958.337.498)	-	(958.337.498)
Laba tahun berjalan Income for the year					**3.908.469.857**
Posisi keuangan Financial position					
Aset segmen Segment assets	134.500.471.592	25.724.382.172	160.224.853.764	(41.874.275.858)	118.350.577.906
Liabilitas segmen Segment liabilities	71.737.725.596	21.366.079.896	93.103.805.492	(17.557.920.361)	75.545.885.131
Penyusutan dan amortisasi segmen Segment depreciation and amortization	3.701.971.300	335.928.632	4.037.899.932	(470.037.799)	3.567.862.133

Uraian Description	2021				
	Operasi Kepelabuhanan Port Operations	**Jasa Lainnya** Other Services	**Total Sebelum Eliminasi** Total Before Elimination	**Eliminasi** Elimination	**Total**
Pendapatan operasi segmen Segment operating revenues					
Pendapatan operasi eksternal External operating revenues	28.353.022.778	461.783.559	28.814.806.337	-	28.814.806.337
Pendapatan operasi antar segmen Inter-segment operating revenues	5.399.655.411	1.317.551.756	6.717.207.167	(6.717.207.167)	-
Total pendapatan operasi segmen **Total segment operating revenues**					**28.814.806.337**
Beban operasi Operating expenses	(27.346.746.497)	(1.649.297.717)	(28.996.044.214)	6.454.522.959	(22.541.521.255)
Pendapatan operasi lainnya - neto Other operating income - net	2.079.228.416	(39.558.040)	2.039.670.376	(1.772.757.832)	266.912.544
Laba usaha Operating income					**6.540.197.626**

Uraian Description	2021				
	Operasi Kepelabuhanan Port Operations	**Jasa Lainnya** Other Services	**Total Sebelum Eliminasi** Total Before Elimination	**Eliminasi** Elimination	**Total**
Beban keuangan Finance costs	(3.357.351.484)	(78.509.211)	(3.435.860.695)	895.777.829	(2.540.082.866)
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto Equity in income of associates and joint control entity - net	1.626.599.275	-	1.626.599.275	(1.371.491.687)	255.107.588
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Income before final tax and corporate income tax					**4.662.998.232**
Beban pajak final Final tax expense	(473.745.661)	(13.926.208)	(487.671.869)	-	(487.671.869)
Laba sebelum pajak penghasilan badan Income before corporate income tax					4.175.326.363
Pajak penghasilan badan Corporate income tax expense					**3.176.145.276**
Kini Current	(821.369.756)	(26.363.420)	(847.733.176)	-	(847.733.176)
Tangguhan Deferred	(150.992.261)	(455.650)	(151.447.911)	-	(151.447.911)

Laba tahun berjalan Income for the year					**3.176.145.276**
Posisi keuangan Financial position					
Aset segmen Segment liabilities	140.129.226.645	2.199.514.469	142.328.741.114	(26.099.666.614)	116.229.074.500
Liabilitas segmen Segment liabilities	89.713.731.935	2.036.440.753	91.750.172.688	(17.574.207.627)	74.175.965.061
Penyusutan dan amortisasi segmen Segment depreciation and amortization	4.161.043.395	71.865.183	4.232.908.578	(1.033.436.603)	3.199.471.975

Uraian Description	**Pertumbuhan 2022-2021 (dalam nilai Rupiah)** 2022-2021 Growth (in Rupiah)				
	Operasi Kepelabuhanan Port Operations	**Jasa Lainnya** Other Services	**Total Sebelum Eliminasi** Total Before Elimination	**Eliminasi** Elimination	**Total**
Pendapatan operasi segmen Segment operating revenues					
Pendapatan operasi eksternal External operating revenues	(1.571.263.987)	2.457.061.785	885.797.798	-	885.797.798
Pendapatan operasi antar segmen Inter-segment operating revenues	3.582.177.698	700.885.888	4.283.063.586	(4.283.063.586)	-

Uraian Description	**Pertumbuhan 2022-2021 (dalam nilai Rupiah)** 2022-2021 Growth (in Rupiah)				
	Operasi Kepelabuhanan Port Operations	**Jasa Lainnya** Other Services	**Total Sebelum Eliminasi** Total Before Elimination	**Eliminasi** Elimination	**Total**
Beban operasi Operating expenses	(2.410.026.371)	(2.389.061.534)	(4.799.087.905)	4.186.179.969	(612.907.936)
Pendapatan operasi lainnya - neto Other operating income - net	(1.707.075.237)	232.937.301	(1.474.137.936)	1.775.870.889	301.732.953
Laba usaha Operating income					**574.622.815**
Pendapatan keuangan Finance income	172.440.316	37.124.864	209.565.180	(236.850.794)	(27.285.614)
Beban keuangan Finance costs	633.737.123	(606.608.968)	27.128.155	(58.088.257)	(30.960.102)
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto Equity in income of associates and joint control entity - net	1.567.519.800	-	1.310.880.742	(1.263.372.638)	47.508.104
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Income before final tax and corporate income tax					**563.885.203**
Beban pajak final Final tax expense	97.895.372	(98.452.805)	(557.433)	-	(557.433)

Uraian Description	Pertumbuhan 2022-2021 (dalam nilai Rupiah) 2022-2021 Growth (in Rupiah)				
	Operasi Kepelabuhanan Port Operations	**Jasa Lainnya** Other Services	**Total Sebelum Eliminasi** Total Before Elimination	**Eliminasi** Elimination	**Total**
Pajak penghasilan badan Corporate income tax expense					
Kini Current	(76.999.340)	(33.604.982)	(110.604.322)	-	(110.604.322)
Tangguhan Deferred	194.156.623	85.444.510	279.601.133	-	279.601.133
Laba tahun berjalan Income for the year					**732.324.581**
Posisi keuangan Financial position					
Aset segmen Segment assets	(5.628.755.053)	23.524.867.703	17.896.112.650	(15.774.609.244)	2.121.503.406
Liabilitas segmen Segment liabilities	(17.976.006.339)	19.329.639.143	1.353.632.804	16.287.266	1.369.920.070
Penyusutan dan amortisasi segmen Segment depreciation and amortization	(459.072.095)	264.063.449	(195.008.646)	563.398.804	368.390.158

KINERJA ENTITAS ANAK PELINDO

Uraian Kinerja entitas anak Pelindo disajikan sebagai berikut.

PT PELINDO MULTI TERMINAL

PELINDO SUBSIDIARIES' PERFORMANCE

The performance description of Pelindo's subsidiaries is presented as follows.

PT PELINDO MULTI TERMINAL

Tabel Kinerja Keuangan PT Pelindo Multi Terminal
PT Pelindo Multi Terminal Business Performance

(dalam jutaan Rupiah) | (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	4.082.815	1.053.145	3.029.670	287,68%
Beban usaha Operating expenses	(3.457.994)	(679.163)	(2.778.831)	409,16%
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	624.821	373.982	250.839	67,07%
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	461.353	295.741	165.612	56,00%

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha tahun 2022 mencapai sebesar Rp4,08 triliun, meningkat 287,68% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sebesar Rp1,06 triliun. Peningkatan pendapatan usaha ini disebabkan antara lain peningkatan pendapatan petikemas dari kegiatan bongkar muat petikemas di beberapa *branch* yaitu Belawan, Begendang, Trisakti, Bumiharjo, Makassar dan Jamrud Nilam Mirah serta meningkatnya arus petikemas dan permintaan muatan dari turunan kelapa sawit (cangkang, bungkil, CPO, dan lain-lain).

LABA (RUGI) BERSIH

Laba bersih tahun 2022 mencapai sebesar Rp461,35 miliar, meningkat 56,00% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sebesar Rp295,74 miliar. Peningkatan laba bersih tersebut sejalan dengan pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 287,68%. Hal tersebut antara lain disebabkan meningkatnya kegiatan lift *on/lift off* di depot petikemas yang masuk di pelabuhan Makassar pada bulan November 2022 dan meningkatnya arus Curah Cair TL/Curah Kering yang menggunakan timbangan dan penyewaan *forklift* Pelindo untuk kegiatan *stripping/stuffing* pada *Branch* Bumiharjo.

OPERATING REVENUES

Operating income in 2022 reached Rp4.08 trillion, an increase of 287.68% compared to Rp1.06 trillion in 2021. This increase was mainly due to an increase in container revenue from container loading and unloading activities at several branches, namely Belawan, Begendang, Trisakti, Bumiharjo, Makassar and Jamrud Nilam Mirah as well as increased container traffic and demand for cargo from palm oil derivatives (shell, cake, CPO, and others).

NET PROFIT (LOSS)

Net profit in 2022 reached Rp461.35 billion, an increase of 56.00% compared to Rp295.74 billion in 2021. This increase was in line with the growth in operating revenue of 287.68%. This was partly due to an increase in lift on/lift off activities at container depots that entered Makassar port in November 2022, and an increase in TL/Dry Bulk Liquid traffic using Pelindo scales and forklift rentals for stripping/stuffing activities at the Bumiharjo Branch.

PT PELINDO SOLUSI LOGISTIK

PT PELINDO SOLUSI LOGISTIK

Tabel Kinerja Keuangan PT Pelindo Solusi Logistik
PT Pelindo Solusi Logistik Business Performance

(dalam jutaan Rupiah) | (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	2.219.675	1.883.363	336.312	17,86%
Beban usaha Operating expenses	(1.495.247)	(1.271.378)	(223.869)	17,61%
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	724.428	611.985	112.443	18,37%
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	118.632	294.251	(175.619)	(59,68%)

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha tahun 2022 mencapai sebesar Rp2,21 triliun, meningkat 17,86% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sebesar Rp1,88 triliun. Peningkatan pendapatan usaha antara lain disebabkan peningkatan produksi di Depo Kuala Tanjung, peningkatan produksi layanan intermodal, dan peningkatan produksi pengusahaan alat, serta adanya kontrak penyediaan jasa keamanan seluruh Pelindo *Group* oleh PT ISMA.

LABA (RUGI) BERSIH

Laba bersih tahun 2022 mencapai sebesar Rp118,63 miliar, menurun 59,68% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sebesar Rp294,25 miliar. Penurunan ini disebabkan keterlambatan penyelesaian proyek JTCC dari target di bulan Agustus 2022

OPERATING REVENUES

Operating revenues in 2022 reached Rp2.21 trillion, an increase of 17.86% compared to Rp1.88 trillion in 2021. The increase in operating revenues was partly due to increased production at the Kuala Tanjung Depot, increased production of intermodal services, and increased production of the equipment business, as well as a contract to provide security services for the entire Pelindo Group by PT ISMA.

NET PROFIT (LOSS)

Net profit in 2022 reached Rp118.63 billion, a decrease of 59,68%compared to Rp294.25 billion in 2021. This decrease was due to delays in the completion of the JTCC project from the target date of August 2022 so that the 65% divestment of

sehingga divestasi 65% saham PT CTP oleh PT API tidak terealisasi yang menyebabkan terserap rugi PT CTP.

PT CTP shares by PT API was not realized which caused PT CTP's losses to be absorbed.

PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS

PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS

Tabel Kinerja Keuangan PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas Business Performance

(dalam jutaan Rupiah) | (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	11.189.964	7.661.575	3.528.390	46,05%
Beban usaha Operating expenses	(8.991.152)	(5.868.370)	(3.122.783)	53,21%
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	2.198.812	1.793.205	405.607	22,62%
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	1.771.423	1.163.978	607.445	52,19%

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha tahun 2022 mencapai sebesar Rp11,19 triliun, meningkat 46,05% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sebesar Rp7,66 triliun. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan kenaikan pendapatan bunga atas giro dan deposito yang merupakan dampak optimalisasi penempatan dana perusahaan.

OPERATING REVENUES

Operating revenues in 2022 reached Rp11.19 trillion, an increase of 46.05% compared to Rp7.66 trillion in 2021. This increase was partly due to the increase in interest income from current accounts and time deposits, as a result of the Company's optimizing placement of funds.

LABA (RUGI) BERSIH

Laba bersih tahun 2022 mencapai sebesar Rp1,77 triliun, meningkat 52,19% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sebesar Rp1,16 triliun. Peningkatan laba bersih tersebut sejalan dengan pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 51,05%.

NET PROFIT (LOSS)

Net profit in 2022 reached Rp1.77 trillion, an increase of 52.19% compared to Rp1.16 trillion in 2021. This increase was in line with the growth in operating revenue of 51.05%.

PT PELINDO JASA MARITIM

PT PELINDO JASA MARITIM

Tabel Kinerja Keuangan PT Pelindo Jasa Maritim
PT Pelindo Jasa Maritim Business Performance

(dalam jutaan Rupiah) | (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	5.058.101	982.810	4.075.291	414,66%
Beban usaha Operating expenses	(4.442.336)	(884.458)	(3.557.878)	402,27%

Tabel Kinerja Keuangan PT Pelindo Jasa Maritim
PT Pelindo Jasa Maritim Business Performance

(dalam jutaan Rupiah) | (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	615.765	98.352	517.413	526,08%
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	480.369	55.429	424.940	766,64%

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha tahun 2022 mencapai sebesar Rp5,06 triliun, meningkat 414,66% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sebesar Rp929,81 triliun. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan trafik kunjungan kapal di dermaga umum wilayah Regional 2 yang kegiatan penundaannya di kelola oleh PT JAI dan meningkatnya nilai tukar US Dollar, meningkatnya trakfik kapal pada STS Palembang yang dilaksanakan oleh PT JAI, serta terealisasinya pengerukan proyek Kalibaru yang dilaksanakan oleh PT Rukindo yang melebihi target.

LABA (RUGI) BERSIH

Laba bersih tahun 2022 mencapai sebesar Rp480,37 miliar, meningkat 766,64% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sebesar Rp55,43 miliar. Peningkatan laba bersih ini sejalan dengan peningkatan pendapatan atas pelaksanaan kegiatan Serah Operasi SBPP di tahun 2022.

OPERATING REVENUES

Operating revenues in 2022 reached Rp5.06 trillion, an increase of 414.66% compared to Rp929.81 trillion in 2021. This was the result of an increase in ship traffic at the regional 2 public wharves, whose delay activities are managed by PT JAI, an increase in the US Dollar exchange rate, and an increase in ship traffic at STS Palembang carried out by PT JAI, and the realization of the Kalibaru project dredging carried out by PT Rukindo exceeding the target.

NET PROFIT (LOSS)

Net profit in 2022 reached Rp480.37 billion, an increase of 766.64%compared to Rp55.43 billion in 2021. This increase was line with the increase in revenue from the SBPP Operation Handover activities in 2022.

PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA

PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA

Tabel Kinerja Keuangan PT Pelabuhan Indonesia Investama
PT Pelabuhan Indonesia Investama Business Performance

(dalam jutaan Rupiah) | (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	87.778	84.544	3.233	3,82%
Beban usaha Operating expenses	(73.180)	(72.869)	(311)	0,43%
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	14.598	11.676	2.923	25,03%
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	10.765	7.770	2.995	38,55%

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha tahun 2022 mencapai sebesar Rp87,78 miliar, meningkat 3,82% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sebesar Rp84,54 miliar. Peningkatan pendapatan ini antara lain disebabkan meningkatnya pendapatan yang didominasi oleh keuntungan penjualan saham yang sudah di atas nilai investasi dan nilai akuntansi.

LABA (RUGI) BERSIH

Laba bersih tahun 2022 mencapai Rp10,77 miliar, meningkat 38,55% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sebesar Rp7,77 miliar. Peningkatan laba ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya pendapatan yang diperoleh dari penerimaan dividen saham grup dan non-grup seperti keuntungan kupon obligasi dan keuntungan penjualan saham serta kenaikan investasi jangka panjang sejalan dengan *rebalancing* dari penjualan saham ke surat utang.

OPERATING REVENUES

Operating revenues in 2022 reached Rp87.78 billion, an increase of 3.82% compared to Rp84.54 billion in 2021. This increase was due, to an increase in income which was dominated by profits from the sale of shares which were already above the investment value and accounting value.

NET PROFIT (LOSS)

Net profit in 2022 reached Rp10.77 billion, an increase of 38.55% compared to Rp7.77 billion in 2021. This increase was partly due to the increase in income from group and non-group stock dividends, such as bonds coupon gains and gains from selling shares, as well as an increase in long-term investments in line with the rebalancing from selling shares to debentures.

PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI

PT INTEGRASI LOGISTICS CIPTA SOLUSI

Tabel Kinerja Keuangan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi Business Performance

(dalam jutaan Rupiah) | (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	303.830	191.678	112.152	58,51%
Beban usaha Operating expenses	(220.202)	(135.902)	(84.301)	62,03%
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	83.627	55.776	27.852	49,93%
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	19.724	11.692	8.033	68,70%

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha tahun 2022 mencapai sebesar Rp303,83 miliar, meningkat 58,51% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sebesar Rp191,68 miliar. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh adanya portofolio *ICT system Implementor,* portofolio *IT Managed Service* dan portofolio *Digital Seaport*. Adapun kenaikan pendapatan usaha ini berpengaruh pada proyek-proyek yang sudah dikerjakan antara lain: KSMU Opus M IPC TPK, Implementasi *Single ERP* Kantor Pusat dan Regional, Sewa *Network* dan *Colo*, Perpanjangan KFS dan ERP, Perpanjangan *ATS Oracle* serta *Manage Service* BKO.

LABA (RUGI) BERSIH

Laba bersih tahun 2022 mencapai sebesar Rp19,72 miliar, meningkat 68,70% dibandingkan tahun 2021 mencapai Rp11,69 miliar. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan pendapatan atas portofolio *ICT implementor, IT Manage Service* serta *Digital Seaport*.

OPERATING REVENUES

Operating revenues in 2022 reached Rp303.83 billion, an increase of 58.51% compared to Rp191.68 billion in 2021. This increase was partly due to the ICT system implementor portfolio, IT Managed Service portfolio and Digital Seaport portfolio. The increase in operating revenues affected the projects that have been carried out, including: KSMU Opus M IPC TPK, Implementation of Single ERP Headquarters and Regional, Network and Colo Rentals, Extension of KFS and ERP, Extension of ATS Oracle and BKO Manage Service.

NET PROFIT (LOSS)

Net profit in 2022 reached Rp19.72 billion, an increase of 68.70% compared to Rp11.69 billion in 2021. This increase was partly due to an increase in revenue from the ICT implementer portfolio, IT Manage Service and Digital Seaport.

PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

Tabel Kinerja Keuangan PT Pelindo Daya Sejahtera
PT Pelindo Daya Sejahtera Business Performance

(dalam jutaan Rupiah) | (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	941.161	546.127	395.034	72,33%
Beban usaha Operating expenses	(888.707)	(520.910)	(367.796)	70,61%
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	52.454	25.217	27.237	108,01%
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	40.360	21.362	18.998	88,93%

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha tahun 2022 mencapai sebesar Rp941,16 miliar, meningkat 72,33% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp546,13 miliar. Peningkatan pendapatan antara lain disebabkan kenaikan pendapatan yang dikarenakan tambahan *project* pekerjaan pada area Pelindo *Holding*, Regional 1, Regional 2, dan *Subholding* Pelindo.

OPERATING REVENUES

Operating revenues in 2022 reached Rp941.16 billion, an increase of 72.33% compared to Rp546.13 billion in 2021. The increase in revenue was partly due to the increase in revenue due to additional work projects in the Regional 1, Regional 2 and Pelindo Subholding areas.

LABA (RUGI) BERSIH

Laba bersih tahun 2022 mencapai sebesar Rp40,36 miliar, meningkat 88,93% dibandingkan tahun 2021 mencapai sebesar Rp21,36 miliar. Peningkatan laba sejalan dengan peningkatan pendapatan yang sebesar 72,33%.

NET PROFIT (LOSS)

Net profit in 2022 reached Rp40.36 billion, an increase of 88.93% compared to Rp21.36 billion in 2021. The increase in profit was in line with the increase in revenue of 72.33%.

KSO TERMINAL PETIKEMAS KOJA

KSO TERMINAL PETIKEMAS KOJA

Tabel Kinerja Keuangan KSO Terminal Petikemas Koja
KSO Terminal Petikemas Koja Business Performance

(dalam jutaan Rupiah) | (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	1.548.351	1.507.820	40.531	2,69%
Beban usaha Operating expenses	(807.499)	(791.868)	(15.631)	1,97%
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	740.852	715.952	24.900	3,48%
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	151.961	138.254	13.707	9,91%

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha tahun 2022 mencapai sebesar Rp1,55 triliun, meningkat 2,69% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sebesar Rp1,51 triliun. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh kenaikan pendapatan di luar usaha akibat lebih tingginya pendapatan bunga giro sejalan dengan belum dibayarkannya bagi hasil *escrow* kepada pemilik dan kenaikan saldo giro.

LABA (RUGI) BERSIH

Laba bersih tahun 2022 mencapai Rp151,96 miliar, meningkat 9,91% dibandingkan tahun 2021 mencapai Rp138,25 miliar. Peningkatan laba antara lain disebabkan karena efisiensi biaya yang dilakukan serta pendapatan bunga giro dan kenaikan saldo giro.

OPERATING REVENUES

Operating revenues in 2022 reached Rp1.55 trillion, an increase of 2.69% compared to Rp1.51 trillion in 2021. This was partly due to an increase in non-business income due to higher demand deposit interest income in line with the non-payment of escrow profit sharing to owners and an increase in current account balances.

NET PROFIT (LOSS)

Net profit in 2022 reached Rp151.96 billion, an increase of 9.91% compared to Rp138.25 billion in 2021. This increase was partly due to cost efficiencies as well as current account interest income and an increase in current account balances.

PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA

PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA

Tabel Kinerja Keuangan PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia Business Performance

(dalam jutaan Rupiah) | (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	202.174	131.464	70.710	53,79%
Beban usaha Operating expenses	(184.575)	(123.700)	(60.875)	49,21%
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	17.599	7.764	9.835	126,68%
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	12.706	6.005	6.701	111,58%

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha tahun 2022 mencapai sebesar Rp202,17 miliar, meningkat 53,79% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sebesar Rp131,46 miliar. Peningkatan pendapatan ini antara lain disebabkan kenaikan pendapatan dari jasa pembelajaran dan *consulting* seperti pelatihan via learning *E-Wallet*, kegiatan proyek ALPI, *Learning Facility Management*.

LABA (RUGI) BERSIH

Laba bersih tahun 2022 mencapai sebesar Rp12,71 miliar, meningkat 111,58% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sebesar Rp6,01 miliar. Peningkatan laba sejalan dengan kenaikan pendapatan sebesar 53,79%.

OPERATING REVENUES

Operating revenues in 2022 reached Rp202.17 billion, an increase of 53.79% compared to Rp131.46 billion in 2021. This increase in revenue was due to an increase in revenues from learning and consulting services such as training via learning E-Wallet, ALPI activities, and Learning Facility Management.

NET PROFIT (LOSS)

Net profit in 2022 reached Rp12.71 billion, an increase of 111,58% compared to Rp6.01 billion in 2021. The increase was in line with the increase in revenue of 53.79%.

PT ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA

PT ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA

Tabel Kinerja Keuangan PT Electronic Data Interchange Indonesia
PT Electronic Data Interchange Indonesia Business Performance

(dalam jutaan Rupiah) | (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	66.972	79.308	(12.336)	(15,55%)
Beban usaha Operating expenses	(74.473)	(105.276)	(30.803)	(29,26%)
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	(7.502)	(25.968)	(18.466)	(71,11%)
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	(9.092)	(32.295)	(23.203)	(71,85%)

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha tahun 2022 mencapai sebesar Rp66,97 miliar, menurun 15,55% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sebesar Rp79,31 miliar. Penurunan ini antara lain disebabkan tertundanya penyelesaian pekerjaan yang mengikuti lelang karena nilai pagu lebih rendah dari pada biaya yang harus dikeluarkan dan pemilik pekerjaan membatalkan/menunda pekerjaan yang akan dilelang.

OPERATING REVENUES

Operating revenues in 2022 reached Rp66.97 billion, a decrease of 15.55% compared to Rp79.31 billion in 2021. This decrease was partly due to delays in the completion of work following the auction as the ceiling value was lower than the costs to be incurred and the work owner canceled/postponed the work to be auctioned.

LABA (RUGI) BERSIH

Rugi bersih tahun 2022 mencapai sebesar Rp9,09 miliar, menurun 71,85% dibandingkan tahun 2021 yang mengalami kerugian mencapai sebesar Rp32,30 miliar. Hal tersebut sejalan dengan turunnya pendapatan usaha sebesar 15,55%.

NET PROFIT (LOSS)

The net loss in 2022 reached Rp9.09 billion, a decrease of 71.85% compared to the loss of Rp32.30 billion in 2021. This is in line with the decrease in operating revenues by 15.55%.

PT PRIMA HUSADA CIPTA MEDAN

PT PRIMA HUSADA CIPTA MEDAN

Tabel Kinerja Keuangan PT Pelindo Husada Cipta Medan
PT Pelindo Husada Cipta Medan Business Performance

(dalam jutaan Rupiah) | (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	40.773	84.475	(43.702)	(51,73%)
Beban usaha Operating expenses	(35.102)	(57.816)	22.715	(39,29%)
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	5.672	26.659	(20.987)	(78,73%)

Tabel Kinerja Keuangan PT Pelindo Husada Cipta Medan
PT Pelindo Husada Cipta Medan Business Performance

(dalam jutaan Rupiah) | (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	3.870	19.896	(16.025)	(80,55%)

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha tahun 2022 mencapai sebesar Rp40,77 miliar, menurun 51,73% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sebesar Rp84,48 miliar. Penurunan ini antara lain disebabkan menurunnya tarif pelayanan *screening* COVID-19 yang semula dianggarkan mengikuti tarif tahun 2021 akan tetapi diturunkan sesuai tarif dari kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas perawatan pasien COVID-19 serta berkurangnya permintaan layanan PCR dan *rapid antigen*.

OPERATING REVENUES

Operating revenues in 2022 reached Rp40.77 billion, a decrease of 51.73% compared to Rp84.48 billion in 2021. This decrease was partly due to the reduced rates for COVID-19 screening services which were originally budgeted to follow the 2021 rates but were reduced according to the rates set by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia for the treatment of COVID-19 patients and their reduction requests for PCR and rapid antigen services.

LABA (RUGI) BERSIH

Laba bersih tahun 2022 mencapai sebesar Rp3,87 miliar, menurun 80,55% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sebesar Rp19,90 miliar. Penurunan tersebut antara lain disebabkan menurunnya angka kunjungan pasien rawat inap umum (Non-COVID) ke Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan sebagai dampak penurunan kasus pandemi selama periode tahun 2022.

NET PROFIT (LOSS)

Net profit in 2022 reached Rp3.87 billion, a decrease of 80.55% compared to Rp19.90 billion in 2021. This decrease was partly due to the decrease in the number of general inpatient (Non-COVID) patient visits to the Prima Husada Cipta Hospital in Medan as a result of the decrease in pandemic cases during 2022.

PT PRIMA MULTI TERMINAL

PT MULTI TERMINAL INDONESIA

Tabel Kinerja Keuangan PT Prima Multi Terminal
PT Prima Multi Terminal Business Performance

(dalam jutaan Rupiah) | (in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	84.108	81.730	2.378	2,91%
Beban usaha Operating expenses	(150.601)	(152.455)	1.855	(1,22%)
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	(66.493)	(70.726)	4.233	(5,98%)
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	(199.188)	(295.567)	96.379	(32,61%)

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha tahun 2022 mencapai sebesar Rp84,11 miliar, meningkat 2,91% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sebesar Rp81,73 miliar. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan *throughput* petikemas sebanyak 491 TEUs dibandingkan dengan tahun lalu walaupun secara kunjungan kapal menurun 40 *call*, serta terjadinya peningkatan arus barang *general cargo* sebesar 55.800 ton dibanding tahun lalu.

LABA (RUGI) BERSIH

Rugi bersih tahun 2022 mencapai sebesar Rp199,19 miliar, menurun 32,61% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai kerugian Rp295,57 miliar. Penurunan ini antara lain disebabkan adanya upaya efisiensi biaya yang dilakukan Manajemen PT Multi Terminal Indonesia (PMT) dan penurunan tersebut didominasi oleh penurunan nilai perhitungan atas beban *reinvestment* dan bunga provisi atas aset konsesi sesuai dengan PSAK 57, serta diperoleh manfaat pajak tangguhan atas perhitungan rugi fiskal PMT.

OPERATING REVENUES

Operating revenues in 2022 reached Rp84.11 billion, an increase of 2.91% compared to 2021 which reached of Rp81.73 billion. This was due to an increase in container throughput of 491 TEUs compared to last year, even though ship visits decreased by 40 calls, as well as an increase in general cargo goods traffic by 55,800 tons compared to last year.

NET PROFIT (LOSS)

The net loss in 2022 reached Rp199.19 billion, a decrease of 32.61% compared to a loss of Rp295.57 billion in 2021. This decrease was partly due to cost efficiency efforts carried out by the Management of PT Multi Terminal Indonesia (PMT), with this decrease dominated by a decrease in the calculation value of reinvestment expenses and provisional interest on concession assets in accordance with PSAK 57, as well as obtaining deferred tax benefits for calculating PMT fiscal losses.

TINJAUAN KEUANGAN
Financial Review



Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja dan mendapat opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The financial review below refers to the Financial Statements for the year ending December 31, 2022 presented in this Annual Report. The Financial Statements have been audited by Purwantono, Sungkoro & Surja and received an opinion present fairly in all material respects, the consolidated financial position of PT Pelabuhan Indonesia (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") for December 31, 2022, and their consolidated financial performances and cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

KINERJA KEUANGAN

Kinerja keuangan Perseroan terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif serta Laporan Arus Kas Konsolidasian disajikan sebagai berikut.

FINANCIAL PERFORMANCE

The Company's financial performance consists of the performance of the Consolidated Statement of Financial Position, Statement of Profit and Loss and Comprehensive Income and Consolidated Statement of Cash Flows presented as follows.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ASET ASSETS				
ASET LANCAR CURRENT ASSETS				
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	13.597.640.823	12.922.388.587	675.252.236	5,23%
Investasi jangka pendek Short-term investments	3.943.051.999	5.718.525.973	(1.775.473.974)	(31,05%)
Piutang usaha – neto Trade receivables - net				
Pihak ketiga Third parties	1.130.425.885	1.253.132.841	(122.706.956)	(9,79%)
Pihak berelasi Related parties	319.681.316	263.129.705	56.551.611	21,49%
Piutang lain-lain – neto Other receivables, net				
Pihak ketiga Third parties	54.645.010	126.988.519	(72.343.509)	(56,97%)
Pihak berelasi Related parties	392.181.781	1.153.378.016	(761.196.235)	(66,00%)
Uang muka dan beban dibayar di muka Advances and prepaid expenses	225.480.260	258.677.724	(33.197.464)	(12,83%)
Pendapatan masih akan diterima Accrued revenues				
Pihak ketiga Third parties	543.670.248	297.585.161	246.085.087	82,69%
Pihak berelasi Related parties	107.559.957	33.383.321	74.176.636	222,20%
Persediaan Inventories	276.990.511	217.674.563	59.315.948	27,25%
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	972.176.643	1.080.535.298	(108.358.655)	(10,03%)
Aset lancar lainnya Other current assets	56.662.961	55.194.659	1.468.302	2,66%
Total Aset Lancar Total Current Assets	**21.620.167.394**	**23.380.594.367**	**(1.760.426.973)**	**(7,53%)**

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS				
Investasi jangka panjang Long-term investments	4.118.791.190	3.751.638.877	367.152.313	9,79%
Properti investasi – neto Investment properties - net	1.233.319.427	873.433.978	359.885.449	41,20%
Aset tetap – neto Fixed assets - net	45.033.835.147	46.300.182.922	(1.266.347.775)	(2,74%)
Aset kerja sama operasi – neto Joint operation assets - net	379.887.734	408.013.146	(28.125.412)	(6,89%)
Aset hak guna - neto Right-of-use assets - net	453.988.347	452.002.189	1.986.158	0,44%
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	632.879.439	587.268.838	45.610.601	7,77%
Aset tak berwujud – neto Intangible assets - net	42.546.542.738	38.760.454.848	3.786.087.890	9,77%
Taksiran tagihan restitusi pajak Estimated claims for tax refund	1.109.658.955	750.660.351	358.998.604	47,82%
Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets	1.221.507.535	964.824.984	256.682.551	26,60%
Total Aset Tidak Lancar **Total Non-current Assets**	**96.730.410.512**	**92.848.480.133**	**3.881.930.379**	**4,18%**
TOTAL ASET TOTAL ASSETS	**118.350.577.906**	**116.229.074.500**	**2.121.503.406**	**1,83%**
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY				
LIABILITAS LIABILITIES				
LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES				
Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loans	105.361.831	138.493.774	(33.131.943)	(23,92%)
Utang usaha Trade payables				
Pihak ketiga Third parties	976.563.635	1.338.142.064	(361.578.429)	(27,02%)
Pihak berelasi Related parties	1.092.012.208	1.926.350.211	(834.338.003)	(43,31%)
Pendapatan diterima di muka jangka pendek Short-term unearned revenues	1.594.355.077	1.298.045.484	296.309.593	22,83%

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

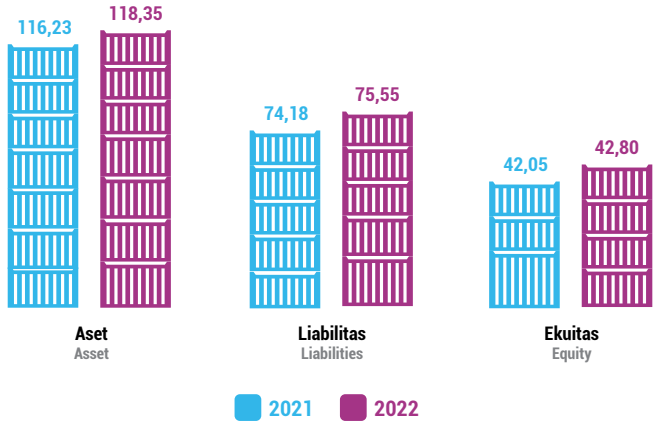
Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Utang pajak Taxes payable	1.025.273.741	578.540.987	446.732.754	77,22%
Beban akrual Accrued expenses	5.273.585.288	3.699.192.020	1.574.393.268	42,56%
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang Current maturities of long-term liabilities				
Utang obligasi Bonds payable	8.637.804.928	-	8.637.804.928	100,00%
Utang bank Bank loans	152.606.159	2.365.898.747	(2.213.292.588)	(93,55%)
Liabilitas sewa Lease liabilities	49.907.726	76.345.578	(26.437.852)	(34,63%)
Liabilitas jangka pendek lainnya Other current liabilities				
Pihak ketiga Third parties	855.825.793	1.182.432.796	(326.607.003)	(27,62%)
Pihak berelasi Related parties	185.307.298	1.066.277.650	(880.970.352)	(82,62%)
Total Liabilitas Jangka Pendek **Total Current Liabilities**	**19.948.603.684**	**13.536.422.392**	**6.412.181.292**	**47,37%**
LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES				
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian lancar Long term liabilities – net of current portion				
Utang obligasi Bonds payable	34.116.829.197	40.176.176.480	(6.059.347.283)	(15,08%)
Utang bank Bank loans	7.678.666.058	6.633.174.189	1.045.491.869	15,76%
Liabilitas sewa Lease liabilities	385.228.086	257.540.134	127.687.952	49,58%
Utang lembaga keuangan non-bank Loans from non-bank financial institution				
Pihak ketiga Third parties	584.328.133	476.290.919	108.037.214	22,68%
Pihak berelasi Related parties	1.160.435.133	949.751.736	210.683.397	22,18%
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities	231.128.682	105.071.621	126.057.061	119,97%
Pendapatan diterima di muka jangka panjang Long-term unearned revenue	4.544.771.276	4.495.055.535	49.715.741	1,11%

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Liabilitas jangka panjang lainnya Other long-term liabilities	1.126.588.038	962.389.202	164.198.836	17,06%
Liabilitas imbalan kerja Employee benefit liabilities	5.769.306.844	6.560.923.531	(791.616.687)	(12,07%)
Total Liabilitas Jangka Panjang **Total Non-current Liabilities**	**55.597.281.447**	**60.616.373.347**	**(5.019.091.900)**	**(8,28%)**
TOTAL LIABILITAS **TOTAL LIABILITIES**	**75.545.885.131**	**74.175.965.061**	**1.369.920.070**	**1,85%**
EKUITAS EQUITY				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity attributable to owners of the parent entity				
Modal saham Share capital	40.575.584.000	8.475.067.000	32.100.517.000	378,76%
Modal donasi Donated capital	26.825.982	26.825.982	-	-
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	(33.358.048.450)	(1.128.322.898)	(32.229.725.552)	2.856,43%
Komponen Ekuitas Lainnya Other equity component	1.466.121	1.466.121	-	-
Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali Difference in value of transactions with non-controlling interest	836.905.071	836.072.934	832.137	0,10%
Saldo Laba Retained earnings				
Ditentukan penggunaannya Appropriated	31.900.794.522	29.925.514.788	1.975.279.734	6,60%
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	4.915.321.447	4.434.909.230	480.412.217	10,83%
Penghasilan Komprehensif Lain Other comprehensive income	(3.774.159.697)	(2.062.503.591)	(1.711.656.106)	82,99%
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk – Neto Equity attributable to owners of the parent entity – net	**41.124.688.996**	**40.509.029.566**	**615.659.430**	**1,52%**
Kepentingan Non-pengendali Non-controlling interests	1.680.003.779	1.544.079.873	135.923.906	8,80%
TOTAL EKUITAS **TOTAL EQUITY**	**42.804.692.775**	**42.053.109.439**	**751.583.336**	**1,79%**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS **TOTAL LIABILITIES AND EQUITY**	**118.350.577.906**	**116.229.074.500**	**2.121.503.406**	**1,83%**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian(dalam triliun Rupiah)
Consolidated Statement of Financial Position (in trillion Rupiah)



ASET

Aset tahun 2022 mencapai Rp118,35 triliun, meningkat 1,83% atau Rp2,12 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp116,23 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh karena terdapat kapitalisasi aset sepanjang tahun 2022.

ASSETS

Assets in 2022 reached Rp118.35 trillion, an increase of 1.83% or Rp2.12 trillion compared to Rp116.23 trillion in 2021. This increase was due to the asset capitalization throughout 2022.

Tabel Aset
Assets

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			(Rp)	**(%)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4) = (2)-(3)**	**(5) = (4)/(3)**
Aset lancar Current assets	21.620.167.394	23.380.594.367	(1.760.426.973)	(7,53%)
Aset tidak lancar Non-current assets	96.730.410.512	92.848.480.133	3.881.930.379	4,18%
Total aset Total assets	**118.350.577.906**	**116.229.074.500**	**2.121.503.406**	**1,83%**

ASET LANCAR

Aset lancar tahun 2022 mencapai Rp21,62 triliun, menurun 7,35% atau Rp1,76 triliun dibandingkan tahun 2021 mencapai Rp23,38 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan investasi jangka pendek, penurunan piutang, dan penurunan uang muka dan pajak dibayar di muka.

CURRENT ASSETS

Current assets in 2022 reached Rp21.62 trillion, a decrease of 7.35% or Rp1.76 trillion compared to Rp23.38 trillion in 2021. This decrease was mainly due to a decrease in short-term investments, a decrease in receivables, and a decrease in advances and prepaid taxes.

Tabel Aset Lancar
Current Assets

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	13.597.640.823	12.922.388.587	675.252.236	5,23%
Investasi jangka pendek Short-term investments	3.943.051.999	5.718.525.973	(1.775.473.974)	(31,05%)
Piutang usaha – neto Trade receivables, net				
Pihak ketiga Third parties	1.130.425.885	1.253.132.841	(122.706.956)	(9,79%)
Pihak berelasi Related parties	319.681.316	263.129.705	56.551.611	21,49%
Piutang lain-lain – neto				
Pihak ketiga Third parties	54.645.010	126.988.519	(72.343.509)	(56,97%)
Pihak berelasi Related parties	392.181.781	1.153.378.016	(761.196.235)	(66,00%)
Uang muka dan beban dibayar di muka Advances and prepaid expenses	225.480.260	258.677.724	(33.197.464)	(12,83%)
Pendapatan masih akan diterima Accrued revenues				
Pihak ketiga Third parties	543.670.248	297.585.161	246.085.087	82,69%
Pihak berelasi Related parties	107.559.957	33.383.321	74.176.636	222,20%
Persediaan Inventories	276.990.511	217.674.563	59.315.948	27,25%
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	972.176.643	1.080.535.298	(108.358.655)	(10,03%)
Aset lancar lainnya Other current assets	56.662.961	55.194.659	1.468.302	2,66%
Total Aset Lancar Total current assets	**21.620.167.394**	**23.380.594.367**	**(1.760.426.973)**	**(7,53%)**

KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas tahun 2022 mencapai Rp13,60 triliun, meningkat 5,23% atau Rp765,25 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp12,92 triliun. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan serta adanya pencairan sebagian investasi jangka pendek.

CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents in 2022 reached Rp13.60 trillion, an increase of 5.23% or Rp765.25 billion compared to Rp12.92 trillion in 2021. This increase was mainly due to the increase in cash receipts from customers and the partial disbursement of short-term investments.

Tabel Kas dan Setara Kas
Cash and Cash Equivalents

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kas Cash	39.387.247	42.703.201	(3.315.954)	(7,77%)
Bank	6.321.179.839	4.727.772.682	1.593.407.157	33,70%
Deposito berjangka Time deposits	7.237.073.737	8.151.912.704	(914.838.967)	(11,22%)
Total Kas dan Setara Kas **Total cash and cash equivalents**	**13.597.640.823**	**12.922.388.587**	**675.252.236**	**5,23%**

INVESTASI JANGKA PENDEK
Investasi jangka pendek tahun 2022 mencapai Rp3,91 triliun, menurun 31,59% atau Rp1,81 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp5,72 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya pencairan sebagian investasi jangka pendek untuk pemenuhan kebutuhan internal dalam rangka optimalisasi *financing cost*.

SHORT-TERM INVESTMENTS
Short-term investment in 2022 reached Rp3.91 trillion, a decrease of 31.59% or Rp1.81 trillion compared to Rp5.72 trillion in 2021. This decrease was mainly due to the partial disbursement of short-term investments to meet internal needs in order to optimize financing costs.

Tabel Investasi Jangka Pendek
Short Term Investments

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Total deposito berjangka Total time deposits	3.943.050.108	5.718.327.340	(1.775.277.232)	(31,05%)
Efek yang diperdagangkan Marketable securities	1.891	198.633	(196.742)	(99,05%)
Total investasi jangka pendek **Total short-term investments**	**3.943.051.999**	**5.718.525.973**	**(1.775.473.974)**	**(31,05%)**

PIUTANG USAHA – NETO
Piutang usaha neto tahun 2022 mencapai Rp1,45 triliun, menurun 4,36% atau Rp66,16 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp1,52 triliun. Penurunan tersebut sejalan dengan upaya penagihan piutang yang lebih intensif yang dilakukan oleh manajemen.

TRADE RECEIVABLES – NET
Trade receivables - net in 2022 reached Rp1.45 trillion, a decrease of 4.36% or Rp66.16 billion compared to Rp1.52 trillion in 2021. This decrease was in line with management's more intensive efforts to collect receivables.

Tabel Piutang Usaha - Neto
Trade Receivables-Net

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga - neto Third parties - net	1.130.425.885	1.253.132.841	(122.706.956)	(9,79%)
Pihak berelasi - neto Related parties -net	319.681.316	263.129.705	56.551.611	21,49%
Piutang usaha - neto Trade receivables - net	**1.450.107.201**	**1.516.262.546**	**(66.155.345)**	**(4,36%)**

PIUTANG LAIN-LAIN – NETO

Piutang lain-lain neto tahun 2022 mencapai Rp446,83 miliar, menurun 65,10% atau Rp833,54 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp1,28 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp761,20 miliar.

OTHER RECEIVABLES-NET

Other Receivables – Net in 2022 reached Rp446.83 billion, a decrease of 65.10% or Rp833.54 billion compared to Rp1.28 billion in 2021. This decrease was mainly due to a decrease in other receivables from related parties of Rp761.20 billion.

Tabel Piutang Lain-Lain - Neto
Other Receivables - Net

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga - neto Third parties - net	54.645.010	126.988.519	(72.343.509)	(56,97%)
Pihak berelasi - neto Related parties -net	392.181.781	1.153.378.016	(761.196.235)	(66,00%)
Piutang usaha - neto Trade receivables - net	**446.826.791**	**1.280.366.535**	**(833.539.744)**	**(65,10%)**

UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Uang muka dan beban dibayar di muka tahun 2022 mencapai Rp225,48 miliar, menurun 12,83% atau Rp33,20 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp258,68 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya penurunan beban dibayar di muka pegawai, asuransi, sewa, umum, dan pemeliharaan.

ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

Advances and prepaid expenses in 2022 reached Rp225.48 billion, a decrease of 12.83% or Rp33.20 billion compared to Rp258.68 billion in 2021. This decrease was mainly due to a decrease in employee prepaid expenses, insurance, rent, general and maintenance expenses.

Tabel Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka
Advances And Prepaid Expenses

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Uang muka Advances				
Pemasok Suppliers	101.992.677	67.420.878	34.571.799	51,28%
Operasional Operational	16.008.986	1.518.015	14.490.971	954,60%
Subtotal	**118.001.663**	**68.938.893**	**49.062.770**	**71,17%**
Beban dibayar di muka Prepaid expenses				
Pegawai Employees	28.623.299	52.374.591	(23.751.292)	(45,35%)
Asuransi Insurance	26.794.822	44.471.527	(17.676.705)	(39,75%)
Sewa Leases	17.120.962	42.059.099	(24.938.137)	(59,29%)
Umum General	9.824.532	14.060.826	(4.236.294)	(30,13%)
Pemeliharaan Maintenance	1.007.221	12.008.540	(11.001.319)	(91,61%)
Pemindahan tempat penimbuhan petikemas Transfer of container hoarding sites				
Lain-lain Others	24.107.761	24.764.248	(656.487)	(2,65%)
Subtotal	**107.478.597**	**189.738.831**	**(82.260.234)**	**(43,35%)**
Total	**225.480.260**	**258.677.724**	**(33.197.464)**	**(12,83%)**

PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA

Pendapatan masih akan diterima tahun 2022 mencapai Rp651,23 miliar, meningkat 96,77% atau Rp320,26 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp330,97 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan yang masih akan diterima dari pihak ketiga sebesar Rp246,09 miliar.

ACCRUED REVENUES

Accrued revenues in 2022 reached Rp651.23 billion, an increase of 96.77% or Rp320.26 billion compared to Rp330.97 billion in 2021. This increase was mainly due to an increase in accrued revenues from third parties of Rp246.09 billion.

Tabel Pendapatan yang Masih Akan Diterima
Accrued Revenues

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga - neto Third parties - net	543.670.248	297.585.161	246.085.087	82,69%
Pihak berelasi - neto Related parties -net	107.559.957	33.383.321	74.176.636	222,20%
Total	**651.230.205**	**330.968.482**	**320.261.723**	**96,77%**

PERSEDIAAN

Persediaan tahun 2021 mencapai Rp276,99 miliar, meningkat 27,25% atau Rp59,32 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp217,67 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan suku cadang dan bahan bakar yang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan.

INVENTORIES

Inventories for 2021 reached Rp276.99 billion, an increase of 27.25% or Rp59.32 billion compared to Rp217.67 billion in 2021. This increase was mainly due to an increase in the supply of spare parts and fuel, which experienced a significant price increase.

Tabel Persediaan
Inventories

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Suku cadang Spareparts	212.364.275	176.273.424	36.090.851	20,47%
Bahan bakar Fuels	67.065.664	42.728.088	24.337.576	56,96%
Alat tulis dan barang cetakan Stationery and printing	188.794	643.761	(454.967)	(70,67%)
Obat, bahan, dan alat medis Medicines, materials, and equipment	288.194	331.907	(43.713)	(13,17%)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar) Others (each below Rp1 billion)	4.467.560	6.182.313	(1.714.753)	(27,74%)
Total	**284.374.487**	**226.159.493**	**58.214.994**	**25,74%**
Dikurangi: Penyisihan persediaan usang Less: Allowance for inventory obsolence	(7.383.976)	(8.484.930)	1.100.954	(12,98%)
Neto Net	**276.990.511**	**217.674.563**	**59.315.948**	**27,25%**

PAJAK DIBAYAR DI MUKA

Pajak dibayar di muka tahun 2022 mencapai Rp972,17 miliar, menurun 10,03% atau Rp108,34miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp1,08 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya pajak pertambahan nilai dari entitas anak sebesar Rp134,90 miliar.

PREPAID TAXES

Prepaid taxes in 2022 reached Rp972.17 billion, a decrease of 10.03% or Rp108.34 billion compared to Rp1.08 trillion in 2021. The decrease was mainly due to a decrease in value added tax from subsidiaries amounting to Rp134.90 billion.

Tabel Pajak Dibayar Di Muka
Prepaid Taxes

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			(Rp)	**(%)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4) = (2)-(3)**	**(5) = (4)/(3)**
Perusahaan Company				
Pajak pertambahan nilai Value Added Tax	154.235.105	199.195.000	(44.959.895)	(22,57%)
Pajak penghasilan Income Tax	159.117.505	176.154.037	(17.036.532)	(9,67%)
Subtotal	**313.352.610**	**375.349.037**	**(61.996.427)**	**(16,52%)**
Entitas anak **Subsidiaries**			-	
Pajak pertambahan nilai Value Added Tax	524.525.927	659.421.104	(134.895.177)	(20,46%)
Pajak penghasilan lainnya Income Tax	134.298.106	45.765.157	88.532.949	193,45%
Subtotal	**658.824.033**	**705.186.261**	**(46.362.228)**	**(6,57%)**
Total	**972.176.643**	**1.080.535.298**	**(108.358.655)**	**(10,03%)**

ASET LANCAR LAINNYA

Aset lancar lainnya tahun 2022 mencapai Rp56,66 miliar, meningkat 2,66% atau Rp1,47 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp55,19 miliar. Peningkatan tersebut terutama karena adanya kenaikan aset tetap tersedia untuk dijual.

OTHER CURRENT ASSETS

Other current assets in 2022 reached Rp56.66 billion, an increase of 2.66% or Rp1.47 billion compared to Rp55.19 billion in 2021. This increase was mainly due to an increase in available-for-sale fixed assets.

Tabel Aset Lancar Lainnya
Other Current Assets

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			(Rp)	**(%)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4) = (2)-(3)**	**(5) = (4)/(3)**
Aset lancar lainnya Other current assets	56.662.961	55.194.659	1.468.302	2,66%

ASET TIDAK LANCAR

Aset tidak lancar tahun 2022 mencapai Rp95,73 triliun, meningkat 4,18% atau Rp3,88 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp92,84 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset tak berwujud - neto sebesar Rp3,79 triliun.

NON-CURRENT ASSETS

Non-current assets in 2022 reached Rp95.73 trillion, an increase of 4.18% or Rp3.88 trillion compared to Rp92.84 trillion in 2021. This increase was mainly due to an increase in intangible assets - net of Rp3.79 trillion.

Tabel Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Investasi jangka panjang Growth	4.118.791.190	3.751.638.877	367.152.313	9,79%
Properti investasi – neto Investment properties - net	1.233.319.427	873.433.978	359.885.449	41,20%
Aset tetap – neto Fixed assets - net	45.033.835.147	46.300.182.922	(1.266.347.775)	(2,74%)
Aset kerja sama operasi – neto Joint operation assets - net	379.887.734	408.013.146	(28.125.412)	(6,89%)
Aset hak guna - neto Right-of-use assets - net	453.988.347	452.002.189	1.986.158	0,44%
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	632.879.439	587.268.838	45.610.601	7,77%
Aset tak berwujud – neto Intangible assets - net	42.546.542.738	38.760.454.848	3.786.087.890	9,77%
Taksiran tagihan restitusi pajak Estimated claims for tax refund	1.109.658.955	750.660.351	358.998.604	47,82%
Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets	1.221.507.535	964.824.984	256.682.551	26,60%
Total Aset Tidak Lancar **Total non-current assets**	**96.730.410.512**	**92.848.480.133**	**3.881.930.379**	**4,18%**

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang tahun 2022 mencapai Rp4,12 triliun, meningkat 9,79% atau Rp367,15 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp3,75 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya investasi jangka panjang pada entitas asosiasi sebesar Rp374,47 miliar.

LONG-TERM INVESTMENTS

Long-term investment in 2022 reached Rp4.12 trillion, an increase of 9.79% or Rp367.15 billion compared to Rp3.75 trillion in 2021. This increase was mainly due to an increase in long-term investment in associates of Rp374.47 billion.

Tabel Investasi Jangka Panjang
Long-Term Investments

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Investasi pada entitas asosiasi Investment in associated entitiies	3.483.541.212	3.109.069.141	374.472.071	12,04%
Investasi pada penyertaan saham Investment in share of stock	35.239.244	82.207.761	(46.968.517)	(57,13%)
Investasi pada surat utang Investment in bonds	600.010.734	560.361.975	39.648.759	7,08%
Total	**4.118.791.190**	**3.751.638.877**	**367.152.313**	**9,79%**

PROPERTI INVESTASI – NETO

Properti investasi tahun 2022 mencapai Rp1,23 triliun, meningkat 41,20% atau Rp359,89 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp873,43 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya properti investasi gedung atas pengoperasian dan komersialisasi gedung Pelindo Tower.

INVESTMENT IN PROPERTY-NET

Investment in property in 2022 reached Rp1.23 trillion, an increase of 41.20% or Rp359.89 billion compared to Rp873.43 billion in 2021. This increase was mainly due to an increase in building property investments for the operation and commercialization of the Pelindo Tower building.

Tabel Properti Investasi
Investment in Property

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Harga perolehan Acquisition cost				
Tanah Land	824.489.045	576.010.187	248.478.858	43,14%
Bangunan fasilitas pelabuhan Port facilities	702.192.357	700.131.110	2.061.247	0,29%
Jalan dan Bangunan Roads and buildings	176.269.950	28.074.591	148.195.359	527,86%
Total	**1.702.951.352**	**1.304.215.888**	**398.735.464**	**30,57%**
Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation				
Bangunan fasilitas pelabuhan Port facilities	(437.731.763)	(416.980.942)	(20.750.821)	4,98%
Emplasemen Emplacement	(30.373.352)	(12.274.158)	(18.099.194)	147,46%
Total	**(468.105.115)**	**(429.255.100)**	**(38.850.015)**	**9,05%**

Tabel Properti Investasi
Investment in Property

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai Less: Allowance for impairment	(1.526.810)	(1.526.810)	-	0,00%
Nilai buku neto Net book value	**1.233.319.427**	**873.433.978**	**359.885.449**	**41,20%**

ASET TETAP – NETO

Aset tetap neto tahun 2022 mencapai Rp45,03 triliun, menurun 2,74% atau Rp1,27 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp46,30 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya aset tetap dalam penyelesaian karena adanya reklasifikasi aset tetap menjadi aset hak konsesi.

FIXED ASSETS-NET

Fixed assets - Net in 2022 reached Rp45.03 trillion, a decrease of 2.74% or Rp1.27 trillion compared to Rp46.30 trillion in 2021. This decrease was due to a decrease in construction in progress due to the reclassification of fixed assets into concession rights assets.

Tabel Aset Tetap
Fixed Assets

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Harga perolehan Acquisition cost				
Tanah Land	3.743.932.670	3.403.711.516	340.221.154	10,00%
Bangunan fasilitas pelabuhan Port facilities	20.767.002.876	19.113.857.430	1.653.145.446	8,65%
Kapal Vessels	5.758.866.093	5.945.716.876	(186.850.783)	(3,14%)
Alat fasilitas pelabuhan Port equipment	16.649.210.544	16.712.741.883	(63.531.339)	(0,38%)
Instalasi fasilitas pelabuhan Port installation	3.676.364.496	3.498.893.462	177.471.034	5,07%
Jalan dan bangunan Roads and buildings	6.266.749.811	5.779.160.164	487.589.647	8,44%

Tabel Aset Tetap
Fixed Assets

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Peralatan Equipment	1.535.155.304	1.669.392.356	(134.237.052)	(8,04%)
Kendaraan Vehicles	177.809.769	178.116.172	(306.403)	(0,17%)
Emplasemen Emplacement	654.521.177	662.029.394	(7.508.217)	(1,13%)
Subtotal	**59.229.612.740**	**56.963.619.253**	**2.265.993.487**	**3,98%**
Aset dalam penyelesaian Construction in progress	6.679.813.380	7.933.244.086	(1.253.430.706)	(15,80%)
Total	**65.909.426.120**	**64.896.863.339**	**1.012.562.781**	**1,56%**
Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation	(20.841.774.273)	(18.532.994.344)	(2.308.779.929)	12,46%
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Less: Allowance for impairment	(33.816.700)	(63.686.073)	1.653.145.446	(2.595,77%)
Nilai buku neto Net book value	**45.033.835.147**	**46.300.182.922**	**(1.266.347.775)**	**(2,74%)**

ASET KERJA SAMA OPERASI – NETO

Aset kerja sama operasi – neto tahun 2022 mencapai Rp379,89 miliar, menurun 6,89% atau sebesar Rp28,13 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp408,07 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya aset kerja sama operasi pada harga perolehan alat fasilitas pelabuhan sebesar Rp1,11 miliar dan akumulasi penyusutan sebesar Rp27,01 miliar.

JOINT OPERATION ASSETS-NET

Joint operation assets - net in 2022 reached Rp379.89 billion, a decrease of 6.89% or Rp28.13 billion compared to Rp408.07 billion in 2021. The decrease was mainly due to a decrease in joint operation assets for the cost of port facility equipment of Rp1.11 billion and accumulated depreciation of Rp27.01 billion.

Tabel Aset Kerja Sama Operasi
Joint Operation Assets

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Harga perolehan Acquisition Costs				
Bangunan fasilitas pelabuhan Port facilities	772.669.489	772.669.489	-	0,00%
Alat fasilitas pelabuhan Port equipment	86.424.759	87.538.706	(1.113.947)	(1,27%)
Instalasi fasilitas pelabuhan Port installation	10.504.447	10.504.447	-	-

Tabel Aset Kerja Sama Operasi
Joint Operation Assets

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Jalan dan bangunan Roads and buildings	1.082.111	1.082.111	-	-
Peralatan Equipment	1.535.821	1.535.821	-	-
Emplasemen mplacement	4.530.520	4.530.520	-	-
Total	**876.747.147**	**877.861.904**	**(1.114.757)**	**(0,13%)**
Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation	(496.798.946)	(469.787.481)	(27.011.465)	5,75%
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Less: Allowance for impairment	(60.467)	(60.467)	-	0,00%
Nilai buku neto Net book value	**379.887.734**	**408.013.956**	**(28.126.222)**	**(6,89%)**

ASET HAK GUNA

Aset hak guna neto tahun 2022 mencapai Rp453,99 miliar, meningkat 0,44% dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp452,00 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan aset hak guna dari hak perolehan bangunan fasilitas pelabuhan sebesar Rp79,76 miliar.

RIGHT-OF-USE ASSETS

Right of Use assets - net in 2022 reached Rp453.99 billion, an increase of 0.44% compared to Rp452.00 billion in 2021. The increase was caused by an increase in Right of Use assets for the right to acquire port facility buildings amounting to Rp79.76 billion.

Tabel Aset Hak Guna
Right-of-Use Assets

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4) = (2)-(3)**	**(5) = (4)/(3)**
Hak Perolehan Acquisition Costs				
Bangunan fasilitas pelabuhan Port facilities	283.428.093	203.669.947	79.758.146	39,16%
Kapal Vessels	148.030.137	119.407.557	28.622.580	23,97%
Alat fasilitas pelabuhan Port equipment	1.754.274	25.697.627	(23.943.353)	-93,17%
Peralatan Equipment	3.038.404	98.735.557	(95.697.153)	-96,92%
Tanah Land	188.946.426	173.665.160	15.281.266	8,80%

Tabel Aset Hak Guna
Right-of-Use Assets

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kendaraan Vehicles	76.915.310	36.365.322	40.549.988	111,51%
Subtotal	**702.112.644**	**657.541.170**	**44.571.474**	**6,78%**
Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation	(248.124.297)	(205.538.981)	(42.585.316)	20,72%
Nilai buku bersih Net book value	**453.988.347**	**452.002.189**	**1.986.158**	**0,44%**

ASET PAJAK TANGGUHAN

Aset pajak tangguhan tahun 2022 mencapai Rp632,88 miliar, meningkat 7,77% atau Rp45,61 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp587,27 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan aset pajak tangguhan pada entitas anak sebesar Rp227,04 miliar.

DEFERRED TAX ASSETS

Deferred tax assets in 2022 reached Rp632.88 billion, an increase of 7.77% or Rp45.61 billion compared to Rp587.27 billion in 2021. The increase was due to an increase in deferred tax assets in subsidiaries of Rp227.04 billion.

Tabel Aset Pajak Tangguhan
Deferred Tax Assets

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Perusahaan Company	253.885.629	435.310.826	(181.425.197)	(41,68%)
Entitas anak Subsidiaries	378.993.810	151.958.012	227.035.798	149,41%
Aset Pajak Tangguhan Deferred tax assets	**632.879.439**	**587.268.838**	**45.610.601**	**7,77%**

ASET TAKBERWUJUD – NETO

Aset takberwujud tahun 2022 mencapai Rp42,55 triliun, meningkat 9,77% atau Rp3,79 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp38,76 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tak berwujud yang berasal dari aset hak konsesi sebesar Rp3,01 triliun.

INTANGIBLE ASSETS-NET

Intangible assets in 2022 reached Rp42.55 trillion, an increase of 9.77% or Rp3.79 trillion compared to Rp38.76 trillion in 2021. This increase was mainly due to an increase in intangible assets originating from concession rights assets of Rp3.01 trillion.

Tabel Aset TakBerwujud
Intangible Assets

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset hak konsesi Concession rights assets	42.332.482.771	39.317.534.983	3.014.947.788	7,67%
Piranti lunak Software application	1.386.093.582	1.332.014.102	54.079.480	4,06%
Sertifikasi Certification	143.041.164	143.041.164	-	0,00%
Lisensi Licenses	93.784.038	93.309.813	474.225	0,51%
Aset dalam penyelesaian Construction in progress	1.649.219.115	72.392.067	1.576.827.048	2.178,18%
Aset tak berwujud lainnya Other intangible assets	104.379.824	300.537.663	(196.157.839)	(65,27%)
Subtotal	**45.709.000.494**	**41.258.829.792**	**4.450.170.702**	**10,79%**
Akumulasi amortisasi dan penyisihan penurunan nilai Accumulated amortization and allowance for impairment	(3.162.457.756)	(2.498.374.944)	(664.082.812)	26,58%
Neto Net	**42.546.542.738**	**38.760.454.848**	**3.786.087.890**	**9,77%**

TAKSIRAN TAGIHAN RESTITUSI PAJAK

Taksiran tagihan restitusi pajak tahun 2021 mencapai Rp1,11 triliun, meningkat 47,82% dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp750,66 miliar Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan taksiran tagihan restitusi pajak di Perusahaan maupun Entitas Anak, yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar Rp207,63 miliar dan Rp151,37 miliar.

ESTIMATED CLAIMS FOR TAX REFUND

The estimated claims for tax refund in 2021 reached Rp1.11 trillion, an increase of 47.82% compared to Rp750.66 billion in 2021. The increase was mainly due to an increase in estimated claims for tax refund at the Company and its Subsidiaries, which increased by Rp207.63 billion and Rp151.37 billion, respectively.

Tabel Taksiran Tagihan Restitusi Pajak
Estimated Claims for Tax Refund

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Perusahaan Company	777.567.550	569.941.684	207.625.866	36,43%
Entitas anak Subsidiaries	332.091.405	180.718.667	151.372.738	83,76%
Total	**1.109.658.955**	**750.660.351**	**358.998.604**	**47,82%**

ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Aset tidak lancar lainnya tahun 2022 mencapai Rp1,22 triliun, meningkat 26,60% atau Rp256,68 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp964,83 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset lain-lain sebesar Rp302,68 miliar.

OTHER NON-CURRENT ASSETS

Other non-current assets in 2022 reached Rp1.22 trillion, an increase of 26.60% or Rp256.68 billion compared to Rp964.83 billion in 2021. This increase was mainly due to an increase in other assets of Rp302.68 billion.

Tabel Aset Tidak Lancar Lainnya
Other Non-Current Assets

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Uang muka pembelian aset tetap Advances for purchase of fixed assets	535.957.148	259.168.931	276.788.217	106,80%
Piutang perluasan kawasan industri Industrial area expansion receivables	124.811.321	127.000.000	(2.188.679)	(1,72%)
Aset tetap tidak produktif Unproductive fixed assets	9.922.943	130.179.339	(120.256.396)	(92,38%)
Pajak final dibayar di muka Prepaid final tax	113.836.681	126.924.148	(13.087.467)	(10,31%)
Jaminan pelaksanaan Performance guarantee	37.000.000	69.777.240	(32.777.240)	(46,97%)
Piutang pemulihan investasi Receivable investment recovery	80.303.277	64.838.387	15.464.890	23,85%
Uang jaminan Guarantees	34.422.211	31.684.181	2.738.030	8,64%
Biaya transaksi pinjaman sindikasi Syndicated loan transaction costs	29.506.875	-	29.506.875	100,00%
Goodwill Goodwill	42.266.304	32.550.784	9.715.520	29,85%
Piutang pajak Tax receivables	28.361.374	29.340.959	(979.585)	(3,34%)
Aset tetap belum dimanfaatkan Fixed assets not utilized		25.493.693	(25.493.693)	(100,00%)
Aset lain-lain Other assets	557.351.735	254.667.895	302.683.840	118,85%
Dikurangi: Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai Less: Accumulated depreciation and impairment	(372.232.334)	(186.800.573)	(185.431.761)	99,27%
Total	**1.221.507.535**	**964.824.984**	**256.682.551**	**26,60%**

LIABILITAS

Liabilitas tahun 2022 mencapai Rp75,55 triliun, meningkat 1,85% atau Rp1,37 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp74,18 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya liabilitas jangka panjang sebesar Rp5,04 triliun.

LIABILITIES

Liabilities in 2022 reached Rp75.55 trillion, an increase of 1.85% or Rp1.37 trillion compared to Rp74.18 trillion in 2021. This decrease was mainly due to a decrease in Non-current liabilities of Rp5.04 trillion.

Tabel Liabilitas
Liabilities

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas jangka pendek Current Liabilities	19.948.603.684	13.536.422.392	6.412.181.292	47,37%
Liabilitas jangka panjang Non-Current liabilities	55.597.281.447	60.639.542.669	(5.042.261.222)	(8,32%)
Total liabilitas **Total Liabilities**	**75.545.885.131**	**74.175.965.061**	**1.369.920.070**	**1,85%**

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Liabilitas jangka pendek tahun 2022 mencapai Rp19,95 triliun, meningkat 47,37% atau Rp6,41 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp13,65 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan bagian lancar atas liabilitas jangka panjang dari utang obligasi yang sebesar Rp8,65 triliun.

CURRENT LIABILITIES

Current liabilities in 2022 reached Rp19.95 trillion, an increase of 47.37% or Rp6.41 trillion compared to Rp13.65 trillion in 2021. This increase was mainly due to an increase in the current portion of Non-current liabilities from bonds payable which amounted to Rp8.65 trillion.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loans	105.361.831	138.493.774	(33.131.943)	(23,92%)
Utang usaha Trade payables				
Pihak ketiga Third parties	976.563.635	1.338.142.064	(361.578.429)	(27,02%)
Pihak berelasi Related parties	1.092.012.208	1.926.350.211	(834.338.003)	(43,31%)
Pendapatan diterima di muka jangka pendek Short-term unearned revenues	1.594.355.077	1.298.045.484	296.309.593	22,83%
Utang pajak Taxes payable	1.025.273.741	578.540.987	446.732.754	77,22%
Beban akrual Accrued expenses	5.273.585.288	3.699.192.020	1.574.393.268	42,56%
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang Current maturities of long-term liabilities				
Utang obligasi Bonds payable	8.637.804.928	-	8.637.804.928	100,00%

Tabel Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Utang bank Bank loans	152.606.159	2.365.898.747	(2.213.292.588)	(93,55%)
Liabilitas sewa Lease liabilities	49.907.726	76.345.578	(26.437.852)	(34,63%)
Liabilitas jangka pendek lainnya Other current liabilities				
Pihak ketiga Third parties	855.825.793	1.182.432.796	(326.607.003)	(27,62%)
Pihak berelasi Related parties	185.307.298	1.066.277.650	(880.970.352)	(82,62%)
Total Liabilitas Jangka Pendek **Total current liabilities**	**19.948.603.684**	**13.536.422.392**	**6.412.181.292**	**47,37%**

PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

Pinjaman bank jangka pendek tahun 2022 mencapai Rp105,36 miliar, menurun 23,92% atau sebesar Rp33,13 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp138,49 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya pinjaman bank jangka pendek pada pihak berelasi sebesar Rp30,19 miliar.

SHORT-TERM BANK LOANS

Short-term bank loans in 2022 reached Rp105.36 billion, a decrease of 23.92% or Rp33.13 billion compared to Rp138.49 billion in 2021. This decrease was due to a decrease in short-term bank loans to related parties of Rp30.19 billion.

Tabel Pinjaman Bank Jangka Pendek
Short-term Bank Loans

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga Third parties	2.255.302	5.196.855	(2.941.553)	(56,60%)
Pihak berelasi Related parties	103.106.529	133.296.919	(30.190.390)	(22,65%)
Total pinjaman bank jangka pendek **Total short-term bank loans**	**105.361.831**	**138.493.774**	**(33.131.943)**	**(23,92%)**

UTANG USAHA

Utang usaha tahun 2022 mencapai Rp2,07 triliun, menurun 36,63% atau Rp1,20 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp3,26 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya utang usaha kepada pihak berelasi sebesar Rp834,34 miliar.

TRADE PAYABLES

Trade payables in 2022 reached Rp2.07 trillion, a decrease of 36.63% or Rp1.20 trillion compared to Rp3.26 trillion in 2021. This increase was mainly due to a decrease in trade payables to related parties of Rp834.34 billion.

Tabel Utang Usaha
Trade Payables

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga Third parties	976.563.635	1.338.142.064	(361.578.429)	(27,02%)
Pihak berelasi Related parties	1.092.012.208	1.926.350.211	(834.338.003)	(43,31%)
Total utang usaha **Total trade payables**	**2.068.575.843**	**3.264.492.275**	**(1.195.916.432)**	**(36,63%)**

PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PENDEK

Pendapatan diterima di muka jangka pendek tahun 2022 mencapai Rp1,59 triliun, meningkat 22,83% atau Rp296,31 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp1,30 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan diterima di muka jangka pendek dari pelayanan jasa pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik sebesar Rp229,54 miliar.

SHORT-TERM UNEARNED REVENUES

Short-term unearned revenues in 2022 reached Rp1.59 trillion, an increase of 22.83% or Rp296.31 billion compared to Rp1.30 trillion in 2021. The increase was mainly due to an increase in short-term unearned revenues from land, building, water and electricity concession services amounting to Rp229.54 billion.

Tabel Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Pendek
Short-term Unearned Revenues

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Sewa kuartalan Quarterly rent	683.682.059	695.543.951	(11.861.892)	(1,71%)
Uang untuk diperhitungkan Advances from customers				
Pihak ketiga Third parties	292.643.156	130.044.647	162.598.509	125,03%
Pihak berelasi Related parties	8.286.359	8.064.950	221.409	2,75%
Pendapatan diterima di muka jangka pendek - lainnya Other short-term unearned revenues	36.400.194	66.976.899	(30.576.705)	(45,65%)

Tabel Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Pendek
Short-term Unearned Revenues

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pelayanan jasa pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik Land, building, water and electricity services	402.204.627	172.666.515	229.538.112	132,94%
Subtotal	**1.423.216.395**	**1.073.296.962**	**349.919.433**	**32,60%**
Bagian lancar pendapatan diterima di muka jangka panjang Current portion of long-term unearned revenue	171.138.682	224.748.522	(53.609.840)	(23,85%)
Total	**1.594.355.077**	**1.298.045.484**	**296.309.593**	**22,83%**

UTANG PAJAK

Utang pajak tahun 2022 mencapai Rp1,03 triliun, meningkat 77,22% atau Rp446,73 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp578,54 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang pajak pada entitas anak sebesar Rp321,67 miliar.

TAXES PAYABLE

Taxes payable in 2022 reached Rp1.03 trillion, an increase of 77.22% or Rp446.73 billion compared to Rp578.54 billion in 2021. This increase was mainly due to an increase in taxes payable for subsidiaries amounting to Rp321.67 billion.

Tabel Utang Pajak
Taxes Payable

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Induk perusahaan Company	372.032.518	246.971.066	125.061.452	50,64%
Entitas anak Subsidiaries	653.241.223	331.569.921	321.671.302	97,01%
Utang pajak Taxes payable	**1.025.273.741**	**578.540.987**	**446.732.754**	**77,22%**

BEBAN AKRUAL

Beban akrual tahun 2022 mencapai Rp5,27 triliun, meningkat 42,56% atau Rp1,57 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp3,70 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban akrual dari lain-lain sebesar Rp662,89 miliar.

ACCRUED EXPENSES

Accrued expenses in 2022 reached Rp5.27 trillion, an increase of 42.56% or Rp1.57 trillion compared to Rp3.70 trillion in 2021. This increase was mainly due to an increase in accrued expenses from others amounting to Rp662.89 billion.

Tabel Beban Akrual
Accrued Expenses

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pegawai Employees	1.543.094.665	1.536.062.485	7.032.180	0,46%
Kerja sama mitra usaha Partnership	1.023.263.751	708.323.183	314.940.568	44,46%
Umum General	662.233.036	417.036.376	245.196.660	58,80%
Bunga Interest	379.603.334	351.739.853	27.863.481	7,92%
Bahan Fuel	239.342.300	206.967.006	32.375.294	15,64%
Pemeliharaan Maintenance	449.258.262	167.675.465	281.582.797	167,93%
Asuransi Insurance	30.272.043	41.050.044	(10.778.001)	-26,26%
Biaya konsesi Concession fees	40.227.983	26.989.964	13.238.019	49,05%
Lain-lain Others	906.239.914	243.347.644	662.892.270	272,41%
Total	**5.273.535.288**	**3.699.192.020**	**1.574.343.268**	**42,56%**

BAGIAN LANCAR ATAS LIABILITAS JANGKA PANJANG

Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang tahun 2022 mencapai Rp8,84 triliun, meningkat 261,98% atau sebesar Rp6,40 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp2,44 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan bagian lancar atas liabilitas jangka panjang pada utang obligasi sebesar Rp8,65 triliun.

CURRENT MATURITIES OF LONG-TERM LIABILITIES

The current maturities of long-term liabilities in 2022 reached Rp8.84 trillion, an increase of 261.98% or Rp6.40 trillion compared to Rp2.44 trillion in 2021. This increase was mainly due to an increase in the current maturities of long-term liabilities in bonds payable of Rp8.65 trillion.

Tabel Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang
Current Maturities of Long-Term Liabilities

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Utang obligasi Bonds payable	8.637.804.928	-	8.637.804.928	100,00%
Utang bank Bank loans	152.606.159	2.255.771.149	(2.103.164.990)	(93,23%)

Tabel Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang
Current Maturities of Long-Term Liabilities

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas sewa Lease liabilities	49.907.726	76.345.578	(26.437.852)	(34,63%)
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang Total Current Maturities of Long-Term Liabilities	**8.840.318.813**	**2.442.244.325**	**6.398.074.488**	**261,98%**

LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

Liabilitas jangka pendek lainnya tahun 2022 mencapai Rp1,04 triliun, menurun 53,70% dibandingkan dengan tahun tahun 2021 mencapai Rp2,25 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya liabilitas jangka pendek lainnya pada pihak berelasi sebesar Rp880,97 miliar.

OTHER CURRENT LIABILITIES

Other current liabilities in 2022 reached Rp1.04 trillion, a decrease of 53.70% compared to Rp2.25 trillion in 2021. The decrease was mainly due to a decrease in other current liabilities for related parties of Rp880.97 billion.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek Lainnya
Other Current Liabilities

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga Third parties	855.825.793	1.182.432.796	(326.607.003)	(27,62%)
Pihak berelasi Related parties	185.307.298	1.066.277.651	(880.970.353)	(82,62%)
Liabilitas jangka pendek lainnya Other current liabilities	**1.041.133.091**	**2.248.710.447**	**(1.207.577.356)**	**(53,70%)**

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang tahun 2022 mencapai Rp55,60 triliun, menurun 8,28% atau Rp5,02 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp60,62 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar pada utang obligasi sebesar Rp6,06 triliun.

NON-CURRENT LIABILITIES

Non-current liabilities in 2022 reached Rp55.60 trillion, a decrease of 8.28% or Rp5.02 trillion compared to Rp60.62 trillion in 2021. This decrease was mainly due to a decrease in Non-current liabilities after deducting the current portion of bonds payable of Rp6.06 trillion.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian lancar Long term liabilities – net of current portion				
Utang obligasi Bonds payable	34.116.829.197	40.176.176.480	(6.059.347.283)	(15,08%)
Utang bank Bank loans	7.678.666.058	6.633.174.189	1.045.491.869	15,76%
Liabilitas sewa Lease liabilities	385.228.086	257.540.134	127.687.952	49,58%
Utang lembaga keuangan non-bank Loans from non-bank financial institution				
Pihak ketiga Third parties	584.328.133	476.290.919	108.037.214	22,68%
Pihak berelasi Related parties	1.160.435.133	949.751.736	210.683.397	22,18%
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities	231.128.682	105.071.621	126.057.061	119,97%
Pendapatan diterima di muka jangka panjang Long-term unearned revenue	4.544.771.276	4.495.055.535	49.715.741	1,11%
Liabilitas jangka panjang lainnya Employee benefit liabilities	1.126.588.038	962.389.202	164.198.836	17,06%
Liabilitas imbalan kerja Employee benefit liabilities	5.769.306.844	6.560.923.531	(791.616.687)	(12,07%)
Total Liabilitas Jangka Panjang **Total Non-current Liabilities**	**55.597.281.447**	**60.616.373.347**	**(5.019.091.900)**	**(8,28%)**

LIABILITAS JANGKA PANJANG – SETELAH DIKURANGI BAGIAN LANCAR

Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar tahun 2022 mencapai Rp42,18 triliun, menurun 10,38% atau Rp4,89 triliun dibandingkan dengan 2021 mencapai Rp47,07 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya liabilitas jangka panjang pada utang obligasi sebesar Rp6,06 triliun.

LONG-TERM LIABILITIES - CURRENT PORTION MATURITIES

Long-term liabilities after deducting the current portion in 2022 reached Rp42.18 trillion, a decrease of 10.38% or Rp4.89 trillion compared to Rp47.07 trillion in 2021. This decrease was mainly due to a decrease in long-term liabilities for bonds payable of Rp6.06 trillion.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang-Setelah Dikurangi Bagian Lancar
Long-Term Liabilities - Current Portion

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Utang obligasi Bonds payable	34.116.829.197	40.176.176.480	(6.059.347.283)	(15,08%)
Utang bank Bank loans	7.678.866.058	6.633.174.190	1.045.691.868	15,76%
Liabilitas sewa Lease liabilities	385.228.086	257.540.134	127.687.952	49,58%
Total liabilitas jangka panjang - setelah di bagian jangka panjang **Loans from non-bank financial institution**	**42.180.923.341**	**47.066.890.804**	**(4.885.967.463)**	**(10,38%)**

UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK

Utang lembaga keuangan non-bank tahun 2022 mencapai Rp1,74 triliun, meningkat 22,35% atau sebesar Rp318,72miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp1,43 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang lembaga keuangan non-bank pada pihak berelasi dan pihak ketiga sebesar Rp210,64 miliar dan Rp108,04 miliar.

LOANS FROM NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS

Loans from Non-bank financial institution in 2022 reached Rp1.74 trillion, an increase of 22.35% or Rp318.72 billion compared to Rp1.43 trillion in 2021. This increase was mainly due to an increase in non-bank financial institution debt to related parties and third parties of Rp210.64 billion and Rp108.04 billion.

Tabel Utang Lembaga Keuangan Non-Bank
Loans from Non-Bank Financial Institutions

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga Third parties	584.328.133	476.290.919	108.037.214	22,68%
Pihak berelasi Related parties	1.160.435.133	949.751.736	210.683.397	22,18%
Total utang lembaga keuangan non-bank **Total loans from non-bank financial institution**	**1.744.763.266**	**1.426.042.655**	**318.720.611**	**22,35%**

LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

Liabilitas pajak tangguhan tahun 2022 mencapai Rp231,13 miliar, meningkat 119,97% atau sebesar Rp126,06 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp105,07 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya liabilitas pajak tangguhan dari entitas anak.

DEFERRED TAX LIABILITIES

Deferred tax liabilities in 2022 reached Rp231.13 billion, an increase of 119.97% or Rp126.06 billion compared to Rp105.07 billion in 2021. The increase was mainly due to an increase in deferred tax liabilities from subsidiaries.

Tabel Liabilitas Pajak Tangguhan
Deferred Tax Liabilities

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Entitas anak **Subsidiaries**	**231.128.682**	**105.071.621**	**126.057.061**	**119,97%**
Total liabilitas pajak tangguhan **Total deferred tax liabilities**	**231.128.682**	**105.071.621**	**126.057.061**	**119,97%**

PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PANJANG

Pendapatan diterima di muka jangka panjang tahun 2022 mencapai Rp4,57 triliun, meningkat 1,11% atau Rp49,72 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp4,50 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan diterima di muka jangka panjang dari sewa diterima di muka - NPCT 1 sebesar Rp18,41 miliar.

LONG-TERM UNEARNED REVENUE

Long-term unearned income in 2022 reached Rp4.57 trillion, an increase of 1.11% or Rp49.72 billion compared to Rp4.50 trillion in 2021. The increase was mainly due to an increase in long-term unearned income from prepaid rent - NPCT 1 amounting to Rp18.41 billion.

Tabel Pendapatan Diterima di muka Jangka Panjang
Long-Term Unearned Revenue

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Premium JICT JICT Premium	1.968.510.521	1.967.827.813	682.708	0,03%
Sewa diterima di muka - NPCT 1 Advance rental fee - NPCT 1	1.170.100.949	1.151.689.282	18.411.667	1,60%
Premium TPK Koja TPK Koja Premium	429.898.958	457.634.375	(27.735.417)	(6,06%)
Sewa tanah dan/atau bangunan Land and/or building rental	1.147.399.530	1.142.652.587	4.746.943	0,42%
Subtotal	**4.715.909.958**	**4.719.804.057**	**(3.894.099)**	**(0,08%)**
Bagian lancar Current portion	(171.138.682)	(224.748.522)	53.609.840	(23,85%)
Total bagian jangka panjang **Total long-term portion**	**4.544.771.276**	**4.495.055.535**	**49.715.741**	**1,11%**

LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA

Liabilitas jangka panjang lainnya tahun 2022 mencapai Rp1,13 triliun, meningkat 17,06% atau sebesar Rp164,20 miliar dibandingkan dengan tahun tahun 2021 mencapai Rp962,39 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka panjang lainnya dari pihak ketiga sebesar Rp161,39 miliar.

OTHER LONG-TERM LIABILITIES

Other long-term liabilities in 2022 reached Rp1.13 trillion, an increase of 17.06% or Rp164.20 billion compared to Rp962.39 billion in 2021. The increase was mainly due to an increase in other long-term liabilities from third parties of Rp161.39 billion.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang Lainnya
Other Long-Term Liabilities

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga Third parties	657.240.525	495.850.804	161.389.721	32,55%
Pihak berelasi Related parties	469.347.513	466.538.398	2.809.115	0,60%
Liabilitas jangka panjang lainnya **Other long-term liabilities**	**1.126.588.038**	**962.389.202**	**164.198.836**	**17,06%**

LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja tahun 2022 mencapai Rp5,77 triliun, menurun 12,07% atau Rp791,62 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp6,56 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya program kesehatan pensiunan sebesar Rp807,95 miliar.

EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

Employee benefit liabilities in 2022 reached Rp5.77 trillion, a decrease of 12.07% or Rp791.62 billion compared to Rp6.56 trillion in 2021. This decrease was mainly due to a decrease in the pensioner's health program of Rp807.95 billion.

Tabel Liabilitas Imbalan Kerja
Employee Benefit Liabilities

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Perusahaan Company				
Program pensiun Pension program	641.600.368	635.994.743	5.605.625	0,88%
Program penghargaan masa bakti Gratuity and compensation benefits	963.637.236	906.174.293	57.462.943	6,34%
Program kesehatan pensiunan Pension healthcare program	3.318.712.560	4.126.658.787	(807.946.227)	(19,58%)
Imbalan kerja jangka panjang lainnya Other long-term employee benefits	383.941.290	434.967.735	(51.026.445)	(11,73%)
Subtotal	**5.307.891.454**	**6.103.795.558**	**(795.904.104)**	**(13,04%)**
Entitas anak Subsidiaries				
Program pensiun, penghargaan masa bakti dan imbalan pasca-kerja lainnya Pension program, gratuity and compensation benefits and other post-benefits program	461.415.390	457.127.973	4.287.417	0,94%
Total	**5.769.306.844**	**6.560.923.531**	**(791.616.687)**	**(12,07%)**

EKUITAS

Ekuitas tahun 2022 mencapai Rp42,80 triliun, meningkat 1,79% atau Rp751,58 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp42,05 triliun. Peningkatan tersebut karena pertumbuhan modal saham sebesar Rp32,10 triliun dan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesarRp1,98 triliun.

EQUITY

Equity in 2022 reached Rp42.80 trillion, an increase of 1.79% or Rp751.58 billion compared to Rp42.05 trillion in 2021. This increase was due to the growth in share capital of Rp32.10 trillion and retained earnings of Rp1.98 trillion.

Tabel Ekuitas
Equity

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity attributable to owners of the parent				
Modal saham Share capital	40.575.584.000	8.475.067.000	32.100.517.000	378,76%
Modal donasi Donation capital	26.825.982	26.825.982	-	-
Tambahan modal disetor Additional paid- in capital	(33.358.048.450)	(1.128.322.898)	(32.229.725.552)	2.856,43%
Komponen Ekuitas Lainnya Other Equity Component	1.466.121	1.466.121	-	-
Selisih nilai transaksi dengan pihak non-bank Difference in value of transactions with non- controlling interest	836.905.071	836.072.934	832.137	0,10%
Saldo Laba Retained Earn				
Ditentukan penggunaannya Appropriated	31.900.794.522	29.925.514.788	1.975.279.734	6,60%
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	4.915.321.447	4.434.909.230	480.412.217	10,83%
Penghasilan komprehensif lain other comprehensive income	(3.774.159.697)	(2.062.503.591)	(1.711.656.106)	82,99%
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk – Neto Equity Attributable to Owners of the Parent Entity - Net	**41.124.688.996**	**40.509.029.566**	**615.659.430**	**1,52%**
Kepentingan Non-pengendali Non-controlling interests	1.680.003.779	1.544.079.873	135.923.906	8,80%
TOTAL EKUITAS TOTAL EQUITY	**42.804.692.775**	**42.053.109.439**	**751.583.336**	**1,79%**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam ribuan Rupiah)
Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan operasi Operating revenues	29.700.604.135	28.814.806.337	885.797.798	3,07%
Pendapatan konstruksi Construction revenues	2.397.701.575	3.195.512.405	(797.810.830)	(24,97%)
Beban operasi Operating expenses	(23.154.429.191)	(22.503.946.817)	(650.482.374)	2,89%
Beban konstruksi Construction expenses	(2.397.701.575)	(3.195.512.405)	797.810.830	(24,97%)
Pendapatan operasi lainnya - neto Other operating revenue (expense) - net	568.645.497	229.338.106	339.307.391	147,95%
LABA USAHA INCOME FROM OPERATIONS	**7.114.820.441**	**6.540.197.626**	**574.622.815**	**8,79%**
Pendapatan keuangan Finance income	380.490.270	407.775.884	(27.285.614)	(6,69%)
Beban keuangan Finance costs	(2.571.042.968)	(2.540.082.866)	(30.960.102)	1,22%
Bagian laba entitas asosiasi Equity in Income of Associates	302.615.692	255.107.588	47.508.104	18,62%
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX	**5.226.883.435**	**4.662.998.232**	**563.885.203**	**12,09%**
Beban pajak final Final tax expense	(488.229.302)	(487.671.869)	(557.433)	0,11%
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX	**4.738.654.133**	**4.175.326.363**	**563.327.770**	**13,49%**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)			-	
Kini Current	(958.337.498)	(847.733.176)	(110.604.322)	13,05%
Tangguhan Deferred	128.153.222	(151.447.911)	279.601.133	(184,62%)

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam ribuan Rupiah)
Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME	**3.908.469.857**	**3.176.145.276**	**732.324.581**	**23,06%**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Item that will not be reclassified to profit or loss				
Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto setelah pajak Remeasurements of defined benefit plans - net off tax	823.295.840	94.351.746	728.944.094	772,58%
Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Change in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income	87.470.875	(47.180.224)	134.651.099	(285,40%)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi **Item that will be reclassified to profit or loss**			-	
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Exchange differences due to financial statements translation	198.045.650	13.379.913	184.665.737	1.380,17%
Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas Effective portion of gains and losses on hedging instrument in relation to cash flow hedge	(2.820.468.471)		(2.820.468.471)	(100,00%)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT	**2.196.813.751**	**3.236.696.711**	**(1.039.882.960)**	**(32,13%)**
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: INCOME (LOSS) FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT ATTRIBUTABLE TO:				
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	3.772.545.951	3.292.133.734	480.412.217	14,59%

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam ribuan Rupiah)
Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income (in thousand Rupiah)

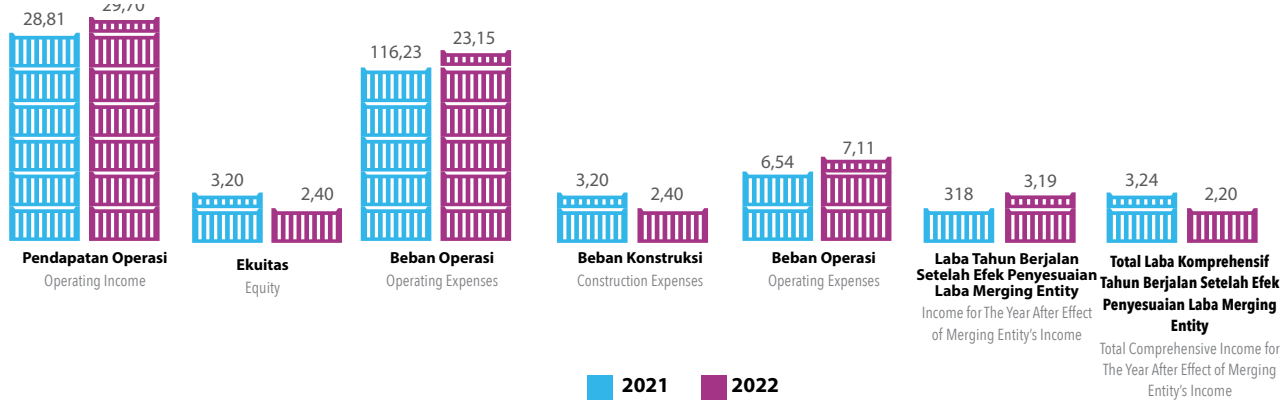
Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	135.923.906	(115.988.458)	251.912.364	(217,19%)
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT	**3.908.469.857**	**3.176.145.276**	**732.324.581**	**23,06%**
Penyesuaian atas Laba *Merging Entity*: **Adjustment of merging entity's profit:**				
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	-	(2.280.313.686)	(2.280.313.686)	(100,00%)
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	-	130.572.397	(130.572.397)	(100,00%)
	-	**(2.149.741.289)**	**(2.149.741.289)**	**(100,00%)**
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: INCOME FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT ATTRIBUTABLE TO:				
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	3.772.545.951	1.011.820.048	2.760.725.903	272,85%
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	135.923.906	14.583.939	121.339.967	832,01%
LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* INCOME FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT	**3.908.469.857**	**1.026.403.987**	**2.882.065.870**	**280,79%**
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT ATTRIBUTABLE TO:				
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	2.060.889.845	3.351.776.051	(1.290.886.206)	(38,51%)
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	135.923.906	(115.079.340)	251.003.246	(218,11%)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT	**2.196.813.751**	**3.236.696.711**	**(1.039.882.960)**	**(32,13%)**
Penyesuaian atas Laba Komprehensif Lainnya *Merging Entity*: **Adjustment of Merging Entity's Other Comprehensive Income:**				
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	-	(2.170.608.365)	(2.170.608.365)	(100,00%)
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	-	129.586.062	(129.586.062)	(100,00%)
	-	**(2.041.022.303)**	**(2.041.022.303)**	**(100,00%)**

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam ribuan Rupiah)
Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT ATTRIBUTABLE TO:				
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	2.060.889.845	1.181.167.686	879.722.159	74,48%
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	135.923.906	14.506.722	121.417.184	836,97%
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT	**2.196.813.751**	**1.195.674.408**	**1.001.139.343**	**83,73%**
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh) **BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)**	**92.976**	**81.136**	**11.840**	**14,59%**
LABA PER SAHAM DILUSIAN (nilai penuh) **DILUTED EARNINGS PER SHARE (full amount)**	**91.783**	**80.095**	**11.688**	**14,59%**

Grafik Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

(dalam triliun Rupiah)
(in trillion Rupiah)



PENDAPATAN OPERASI

Pendapatan operasi tahun 2022 mencapai Rp29,70 triliun, meningkat 3,07% atau Rp885,80 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp28,81 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan pendapatan operasi yang berasal dari pelayanan jasa terminal sebesar Rp568,85 miliar, pelayanan jasa barang sebesar Rp269,77 miliar serta pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik sebesar Rp231,24 miliar.

OPERATING REVENUES

Operating revenues in 2022 reached Rp29.70 trillion, an increase of 3.07% or Rp885.80 billion compared to Rp28.81 trillion in 2021. The increase was mainly due to an increase in operating revenues originating from terminal services of Rp568.85 billion, goods services of Rp269.77 billion and exploitation of land, buildings, water and electricity of Rp231.24 billion.

Tabel Pendapatan Operasi
Operating Revenues

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pelayanan terminal petikemas Container services	12.927.659.143	12.828.726.516	98.932.627	0,77%
Pelayanan jasa kapal Vessel services	5.090.014.199	5.625.502.132	(535.487.933)	(9,52%)
Pelayanan jasa terminal Terminal services	4.499.450.059	3.930.598.686	568.851.373	14,47%
Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik Land, building, water and electricity services	3.787.257.944	3.556.019.099	231.238.845	6,50%
Jasa logistik Logistic services	159.334.977	196.604.847	(37.269.870)	(18,96%)
Kerjasama dan *fee for services* *Partnership and fee for services*	1.233.329.761	1.082.564.914	150.764.847	13,93%
Pendapatan pas pelabuhan dan terminal Port and terminal entry fee	441.126.796	246.352.980	194.773.816	79,06%
Pengusahaan peralatan Equipment services	370.796.897	347.645.520	23.151.377	6,66%
Pelayanan jaringan dan konsultasi sistem informasi Network services and consultant information system	155.363.848	128.555.195	26.808.653	20,85%
Pelayanan jasa barang Cargo services	515.398.786	245.628.403	269.770.383	109,83%
Jasa pengerukan Dredging services	405.778.070	464.343.904	(58.565.834)	(12,61%)
Pelayanan kesehatan Medical services	16.448.305	56.969.167	(40.520.862)	(71,13%)
Lain-lain Others	98.645.350	105.294.974	(6.649.624)	(6,32%)
Total	**29.700.604.135**	**28.814.806.337**	**885.797.798**	**3,07%**

PENDAPATAN KONSTRUKSI

Pendapatan konstruksi tahun 2022 mencapai Rp2,40 triliun, menurun 24,97% atau Rp797,81 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp3,20 triliun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh capaian *progress* fisik pekerjaan pembangunan aset (investasi) di tahun berjalan. Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perseroan dalam pembangunan terminal Kalibaru, Kijing, Teluk Lamong, Manyar Gresik, Kuala Tanjung, Belawan Fase II, Makassar New Port, Alur Pelayaran Barat Surabaya dan Jalan Tol Cibitung - Cilincing. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya yang mana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset.

CONSTRUCTION REVENUES

Construction revenues in 2022 will reach Rp2.40 trillion, decreased by 24.97% or Rp797.81 billion compared to in 2021 which will reach Rp3.20 trillion. This decrease was influenced by the achievement of physical progress of asset development (investment) work in the current year. Construction revenue represents compensation services recognized by the Company in the construction of Kalibaru, Kijing, Teluk Lamong, Manyar Gresik, Kuala Tanjung, Belawan Phase II terminals, Makassar New Port, Surabaya West Shipping Channel and Cibitung - Cilincing Toll Road. Construction revenue is valued using the cost method in which all costs are directly attributable to the cost of asset.

Tabel Pendapatan Konstruksi
Construction Revenues

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan konstruksi Construction revenues	2.397.701.575	3.195.512.405	(797.810.830)	(24,97%)

BEBAN OPERASI

Beban operasi tahun 2022 mencapai Rp23,15 triliun, meningkat 2,72% atau Rp612,91 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp22,54 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban bahan bakar dan bahan habis pakai sebesar Rp509,17 miliar.

OPERATING EXPENSES

Operating expenses in 2022 reached Rp23.15 trillion, an increase of 2.72% or Rp612.91 billion compared to Rp22.54 trillion in 2021. This increase was mainly due to an increase in fuel and consumables expenses of Rp509.17 billion.

Tabel Beban Operasi
Operating Expenses

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kerja sama mitra usaha Partnership	6.550.559.411	6.594.578.809	(44.019.398)	(0,67%)
Pegawai Employees	5.801.903.082	5.776.773.548	25.129.534	0,44%
Umum General	3.567.862.133	3.199.471.975	368.390.158	11,51%
Penyusutan dan amortisasi Depreciation and amortization	3.309.282.651	3.311.181.821	(1.899.170)	(0,06%)
Bahan bakar dan bahan habis pakai Fuels and supplies	2.367.251.451	1.858.083.842	509.167.609	27,40%

Tabel Beban Operasi
Operating Expenses

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pemeliharaan Maintenance	1.030.572.335	1.205.821.148	(175.248.813)	(14,53%)
Asuransi Insurance	433.675.572	381.095.875	52.579.697	13,80%
Administrasi kantor Office administration	93.322.556	214.514.237	(121.191.681)	(56,50%)
Total	**23.154.429.191**	**22.541.521.255**	**612.907.936**	**2,72%**

BEBAN KONSTRUKSI

Beban konstruksi tahun 2022 mencapai Rp2,40 triliun, turun 24,97% atau Rp797,81 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp3,20 triliun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh capaian *progress* fisik pekerjaan pembangunan aset (investasi) di tahun berjalan.

CONSTRUCTION EXPENSES

Construction expenses in 2022 reached Rp2.40 trillion, a decrease of 24.97% or Rp797.81 billion compared to Rp3.20 trillion in 2021. This decrease was influenced by the achievement of physical progress of asset development (investment) work in the current year.

Tabel Beban Konstruksi
Construction Expenses

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Beban konstruksi Construction expenses	(2.397.701.575)	(3.195.512.405)	797.810.830	(24,97%)

PENDAPATAN OPERASI LAINNYA - NETO

Pendapatan operasi lainnya-neto tahun 2022 sebesar Rp568,65 miliar, meningkat 113,05% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp266,91 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan dari lain-lain sebesar Rp181,12 miliar dan keuntungan dari transaksi peningkatan kepemilikan saham pada entitas asosiasi sebesar Rp141,67 miliar.

OTHER OPERATING INCOME-NET

Other operating income-net in 2022 amounted to Rp568.65 billion, an increase of 113.05% compared to Rp266.91 billion in 2021. The increase was mainly due to the growth in other revenues of Rp181.12 billion, and gains from the increase in share ownership transactions in associated entities of Rp141.67 billion.

Tabel Pendapatan (Beban) Operasi Lainnya
Other Operating Income (Expense) - Net

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Amortisasi premium Amortization of premium	161.033.845	146.997.708	14.036.137	9,55%
Keuntungan dari transaksi peningkatan pemilikan saham pada entitas asosiasi Gain from increasing shareholding transaction in associates	141.671.533	-	141.671.533	100,00%
Pendapatan denda Income from penalties	92.212.745	164.990.708	(72.777.963)	(44,11%)
Efek penyesuaian IFRC 19 Effect of IFRC 19 adjustments	82.855.722	-	82.855.722	100,00%
Penerimaan aset *build, operate, transfer* *Receive of build, operate, transfer assets*	26.537.083	219.657.600	(193.120.517)	(87,92%)
Rugi penghapusan aset tetap - neto Loss on disposal of fixed assets - net	(748.245)	(1.969.868)	1.221.623	(62,02%)
Beban denda Expenses from penalties	(34.792.709)	(88.995.349)	54.202.640	(60,91%)
Rugi selisih kurs - neto Loss on foreign exchange - net	(182.036.994)	(274.562.559)	92.525.565	(33,70%)
Lain-lain - neto Others - net	281.912.517	100.794.304	181.118.213	179,69%
Total	**568.645.497**	**266.912.544**	**301.732.953**	**113,05%**

LABA USAHA

Laba usaha tahun 2022 sebesar Rp7,11 triliun, meningkat 8,79% atau sebesar Rp574,62 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp6,54 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan operasi sebesar Rp885,80 miliar.

INCOME FROM OPERATIONS

Income From Operations in 2022 was Rp7.11 trillion, an increase of 8.79% or Rp574.62 billion compared to Rp6.54 trillion in 2021. This increase was mainly due to an increase in operating revenues of Rp885.80 billion.

Tabel Laba Usaha
Income From Operations

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan operasi Operating revenues	29.700.604.135	28.814.806.337	885.797.798	3,07%
Pendapatan konstruksi Construction revenues	2.397.701.575	3.195.512.405	(797.810.830)	(24,97%)

Tabel Laba Usaha
Income From Operations

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Beban operasi Operating expenses	23.154.429.191	22.541.521.255	612.907.936	2,72%
Beban konstruksi Construction expenses	2.397.701.575	3.195.512.405	(797.810.830)	(24,97%)
Pendapatan operasi lainnya – neto Other operating income - net	568.645.497	266.912.544	301.732.953	113,05%
Laba usaha **Income From Operations**	**7.114.820.441**	**6.540.197.626**	**574.622.815**	**8,79%**

PENDAPATAN KEUANGAN

Pendapatan keuangan tahun 2021 sebesar Rp380,49 miliar, menurun 6,69% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp407,78 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan bunga pinjaman sebesar Rp62,65 miliar.

FINANCE INCOME

Financial income in 2021 amounted to Rp380.49 billion, a decrease of 6.69% compared to Rp407.78 billion in 2021. This decrease was mainly due to a decrease in loan interest income of Rp62.65 billion.

Tabel Pendapatan Keuangan
Finance Income

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan bunga deposito Interest income from deposits	247.860.700	249.312.805	(1.452.105)	(0,58%)
Pendapatan bunga pinjaman Interest income from loans	28.128.476	90.775.509	(62.647.033)	(69,01%)
Pendapatan jasa giro Interest income on current accounts	104.501.094	67.687.570	36.813.524	54,39%
Total	**380.490.270**	**407.775.884**	**(27.285.614)**	**(6,69%)**

BEBAN KEUANGAN

Beban keuangan tahun 2022 sebesar Rp2,57 triliun, meningkat 1,22% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp2,54 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban keuangan yang berasal dari beban bunga obligasi sebesar Rp67,35 miliar.

FINANCE COSTS

Financial costs in 2022 amounted to Rp2.57 trillion, an increase of 1.22% compared to Rp2.54 trillion in 2021. This increase was mainly due to an increase in finance costs originating from bond interest expenses of Rp67.35 billion.

Tabel Beban Keuangan
Finance Costs

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Beban bunga obligasi Interest expense from bonds	2.036.128.007	1.968.778.546	67.349.461	3,42%
Beban bunga pinjaman bank Interest expense from bank loans	391.025.313	461.005.512	(69.980.199)	(15,18%)
Beban bunga sewa Lease interest expenses	30.313.025	33.358.003	(3.044.978)	(9,13%)
Beban bunga, dan amortisasi diskonto dan biaya transaksi Interest expenses, and amortization of discount and transaction cost	96.208.028	56.089.251	40.118.777	71,53%
Beban administrasi bank Bank administration charges	17.345.775	4.738.635	12.607.140	266,05%
Beban amortisasi penerbitan obligasi		874.035	(874.035)	(100,00%)
Beban lain-lain Amortization expenses	22.820	1.909.962	(1.887.142)	(98,81%)
Total	**2.571.042.968**	**2.540.082.866**	**30.960.102**	**1,22%**

BAGIAN LABA ENTITAS ASOSIASI

Bagian laba entitas asosiasi tahun 2022 sebesar Rp302,62 miliar, meningkat 18,62% atau Rp47,51 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp255,11 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya bagian laba entitas asosiasi yang berasal dari BKMS sebesar Rp74,33 miliar.

EQUITY IN INCOME OF ASSOCIATES

The Equity in Income of associates in 2022 was Rp302.62 billion, an increase of 18.62% or Rp47.51 billion compared to Rp255.11 billion in 2021. The increase was mainly due to an increase in the profit share of associates from BKMS of Rp74.33 billion.

Tabel Bagian Laba Entitas Asosiasi
Equity in Income of Associates

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
BKMS	164.502.001	90.170.663	74.331.338	82,43%
NPCT1	105.093.768	56.314.207	48.779.561	86,62%
JICT	62.413.034	75.292.403	(12.879.369)	(17,11%)
RSP	10.210.479	28.714.581	(18.504.102)	(64,44%)
Ambapers	3.040.547	10.105.662	(7.065.115)	(69,91%)
PTI	2.951.271	-	2.951.271	100,00%
LNG	380.592	456.096	(75.504)	(16,55%)
PCN	102.185	157.451	(55.266)	(35,10%)
TNU	(7.601.852)	(9.921.272)	2.319.420	(23,38%)

Tabel Bagian Laba Entitas Asosiasi
Equity in Income of Associates

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
JBT	(14.278.018)	(21.612.324)	7.334.306	(33,94%)
PHC	(24.198.315)	25.430.121	(49.628.436)	(195,16%)
Total	**302.615.692**	**255.107.588**	**47.508.104**	**18,62%**

LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan tahun 2022 sebesar Rp5,23 triliun, meningkat 12,09% atau sebesar Rp563,89 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp4,66 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba usaha sebesar Rp574,62 miliar.

INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX

Profit before final tax and corporate income tax in 2022 amounted to Rp5.23 trillion, an increase of 12.09% or Rp563.89 billion compared to Rp4.66 trillion in 2021. This increase was mainly due to an increase in operating profit of Rp574.62 billion.

Tabel Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan
Income Before Final Tax and Corporate Income Tax

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba usaha Income From Operations	7.114.820.441	6.540.197.626	574.622.815	8,79%
Pendapatan keuangan Finance income	380.490.270	407.775.884	(27.285.614)	(6,69%)
Beban keuangan Finance costs	(2.571.042.968)	(2.540.082.866)	(30.960.102)	1,22%
Bagian laba entitas asosiasi Equity in income of associates	302.615.692	255.107.588	47.508.104	18,62%
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Income Before Final Tax and Corporate Income Tax	**5.226.883.435**	**4.662.998.232**	**563.885.203**	**12,09%**

BEBAN PAJAK FINAL

Beban pajak final tahun 2022 sebesar Rp488,23 miliar, meningkat 0,11% atau sebesar Rp557,43 juta dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp487,67 miliar. Peningkatan tersebut kenaikan beban pajak final dari entitas anak.

FINAL TAX EXPENSE

The final tax expense in 2022 was Rp488.23 billion, an increase of 0.11% or Rp557.43 million compared to Rp487.67 billion in 2021. The increase is an increase in the final tax expense of the subsidiary.

Tabel Beban Pajak Final
Final Tax Expense

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Perusahaan Company	333.173.903	367.537.823	(34.363.920)	(9,35%)
Entitas anak Subsidiaries	155.055.399	120.134.046	34.921.353	29,07%
Beban pajak final Final Tax Expense	**488.229.302**	**487.671.869**	**557.433**	**0,11%**

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN

Laba sebelum pajak penghasilan badan tahun 2022 sebesar Rp4,74 triliun, meningkat 13,49% atau sebesar Rp563,33 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp4,18 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Rp563,89 miliar.

INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX

Income before corporate income tax in 2022 amounted to Rp4.74 trillion, an increase of 13.49% or Rp563.33 billion compared to Rp4.18 trillion in 2021. This increase was due to an increase in profit before final tax and corporate income tax of Rp563.89 billion.

Tabel Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan
Income Before Corporate Income Tax

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Income Before Final Tax and Corporate Income Tax	5.226.883.435	4.662.998.232	563.885.203	12,09%
Beban pajak final Final Tax Expense	(488.229.302)	(487.671.869)	(557.433)	0,11%
Laba sebelum pajak penghasilan badan Income Before Corporate Income Tax	**4.738.654.133**	**4.175.326.363**	**563.327.770**	**13,49%**

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN

Beban pajak penghasilan badan tahun 2022 sebesar Rp830,18 miliar, menurun 16,91% atau sebesar Rp167,00 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp999,18 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya beban pajak tangguhan.

CORPORATE INCOME TAX BENEFITS (EXPENSE)

In 2022, the corporate income tax expense was Rp830.18 billion, a decrease of 16.91% or Rp167.00 billion compared to Rp999.18 billion in 2021. This decrease was due to a decrease in deferred tax expense.

Tabel Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan
Corporate Income Tax Benefit (Expense)

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kini Current	(958.337.498)	(847.733.176)	(110.604.322)	13,05%
Tangguhan Deferred	128.153.222	(151.447.911)	279.601.133	(184,62%)
Manfaat (beban) pajak penghasilan badan Corporate Income Tax Benefit (Expense)	**(830.184.276)**	**(999.181.087)**	**168.996.811**	**(16,91%)**

LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY*

Laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* tahun 2022 sebesar Rp3,91 triliun, meningkat 23,06% atau sebesar Rp732,32 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp3,18 triliun Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya laba sebelum pajak penghasilan badan sebesar Rp563,33 miliar.

INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME

Income for the year after the effect of merging entity income in 2022 amounted to Rp3.91 trillion, an increase of 23.06% or Rp732.32 billion compared to Rp3.18 trillion in 2021. This increase was due to an increase in profit before corporate income tax of Rp563 .33 billion.

Tabel Laba Tahun Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Laba *Merging Entity*
Income for the Year after Effect of Merging Entity's Income

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba sebelum pajak penghasilan badan Income before corporate income tax	4.738.654.133	4.175.326.363	563.327.770	13,49%
Manfaat (beban) pajak penghasilan badan Corporate income tax benefit (expense)				
Kini Current	(958.337.498)	(847.733.176)	(110.604.322)	13,05%
Tangguhan Deferred	128.153.222	(151.447.911)	279.601.133	(184,62%)
Laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* **Income for the Year after Effect of Merging Entity's Income**	**3.908.469.857**	**3.176.145.276**	**732.324.581**	**23,06%**

Adapun laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2022 mencapai Rp3,77 triliun, meningkat 14,59% atau Rp480,41 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp3,29 triliun. Sedangkan laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali pada tahun 2022 mencapai Rp135,92 miliar, meningkat 217,19% atau Rp251,91 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencatatkan rugi sebesar Rp115,99 miliar.

The Income for the Year after Effect of Merging Entity's Income attributable to owners of the parent entity in 2022 reached Rp3.77 trillion, an increase of 14.59% or Rp480.41 billion compared to Rp3.29 trillion in 2021. Meanwhile, Income for the Year after Effect of Merging Entity's Income attributable to non-controlling interests in 2022 reached Rp135.92 billion, an increase of 217.19% or Rp251.91 billion compared to a loss of Rp115.99 billion in 2021.

Tabel Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Laba *Merging Entity* yang Dapat Diatribusikan
Income (Cost) for the Year After Effect of Attributable Merging Entity Income

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	3.772.545.951	3.292.133.734	480.412.217	14,59%
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	135.923.906	(115.988.458)	251.912.364	(217,19%)
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* **Income (Cost) for the Year After Effect of Attributable Merging Entity Income**	**3.908.469.857**	**3.176.145.276**	**732.324.581**	**23,06%**

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Penghasilan komprehensif lain tahun 2022 mencapai (Rp1,71) triliun, menurun 2.926,78% atau Rp1,77 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp60,55 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi dari bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas.

OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Other comprehensive income in 2022 reached (Rp1.71) trillion, a decrease of 2,926.78% or Rp1.77 trillion compared to Rp60.55 billion 2021. The decrease was mainly due to items that will be reclassified to profit or loss from the effective portion of the hedging instrument gains and losses for cash flow hedging.

Tabel Penghasilan Komprehensif Lain
Other Comprehensive Income

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Item that will not be reclassified to profit or loss				
Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto setelah pajak Remeasurements of defined benefit plans – net after tax	823.295.840	94.351.746	728.944.094	772,58%
Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Changes in the fair value of financial assets to fair value through other comprehensive income	87.470.875	(47.180.224)	134.651.099	(285,40%)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Item that will be reclassified to profit or loss				
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Exchange differences due to financial statements translation	**198.045.650**	**13.379.913**	**184.665.737**	**1.380,17%**
Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas Effective portion of hedging instrument gains and losses in a cash flow hedge	(2.820.468.471)	-	(2.820.468.471)	(100,00%)
Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income	**(1.711.656.106)**	**60.551.435**	**(1.772.207.541)**	**(2.926,78%)**

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY*

Laba komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* tahun 2022 sebesar Rp2,20 triliun, menurun 32,13% atau sebesar Rp1,04 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp3,24 triliun. Penurunan tersebut sejalan dengan turunnya penghasilan komprehensif lain.

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME

Comprehensive Income for the Year after Effect of Merging Entity's Income in 2022 amounted to Rp2.20 trillion, a decrease of 32.13% or Rp1.04 trillion compared to Rp3.24 trillion in 2021. This decrease was in line with the decrease in other comprehensive income.

Tabel Laba Komprehensif Tahun Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Laba *Merging Entity*
Comprehensive Income for the Year after Effect of Merging Entity's Income

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* Income for the year after the effect of merging entity's Income	**3.908.469.857**	**3.176.145.276**	**732.324.581**	**23,06%**
Penghasilan komprehensif Lain Other comprehensive income	(1.711.656.106)	60.551.435	(1.772.207.541)	(2.926,78%)
Total laba komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* Comprehensive Income for the Year after Effect of Merging Entity's Income	**2.196.813.751**	**3.236.696.711**	**(1.039.882.960)**	**(32,13%)**

Adapun laba komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2022 mencapai Rp2,06 triliun, menurun 38,15% atau Rp1,29 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp3,35 triliun. Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali pada tahun 2022 mencapai Rp135,92 miliar, menurun 218,11% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencatatkan rugi sebesar Rp115,08 miliar.

The Comprehensive Income for the Year After Effect of Merging Entity's Income Attributable to Owners of the Parent Entity in 2022 reached Rp2.06 trillion, a decrease of 38.15% or Rp1.29 trillion compared to Rp3.35 trillion in 2021. Meanwhile, Comprehensive Income for the Year After Effect of Merging Entity's Income Attributable to the comprehensive income for the current year non-controlling interests in 2022 reached Rp135.92 billion, a decrease of 218.11% compared to a loss of Rp115.08 billion in 2021.

Tabel Laba Komprehensif Tahun Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Laba *Merging Entity* yang Dapat Diatribusikan
Attributable Comprehensive Income for the Year After Effect of Merging Entity's Income

(dalam ribuan Rupiah)
Income (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	2.060.889.845	3.351.776.051	(1.290.886.206)	(38,51%)
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	135.923.906	(115.079.340)	251.003.246	(218,11%)
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* Comprehensive income (Loss) for the year after effect of merging entity's income attribution	**2.196.813.751**	**3.236.696.711**	**(1.039.882.960)**	**(32,13%)**

LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dasar tahun 2022 sebesar Rp92.976, meningkat 14,59% atau Rp11.840 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp81.136. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

BASIC EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share in 2022 amounted to Rp92,976, an increase of 14.59% or Rp11,840 compared to Rp81,136 in 2021. Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to owners of the parent entity by the weighted average total of shares outstanding during the year.

Tabel Laba Per Saham Dasar
Basic Earnings Per Share

(dalam Rupiah penuh)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba per saham dasar (nilai penuh) Basic Earnings Per Share (full value)	92.976	81.136	11.840	14,59%

LABA PER SAHAM DILUSIAN

Laba per saham dilusian tahun 2022 sebesar Rp91.783, meningkat 14,59% atau Rp11.688 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp80.095. Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun pelaporan, yang disesuaikan untuk mengasumsikan konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif.

DILUTED EARNINGS PER SHARE

Diluted earnings per share in 2022 amounted to Rp91,783, an increase of 14.59% or Rp11,688 compared to Rp80,095 in 2021. Diluted earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the reporting year, adjusted to assume conversion of dilutive potential ordinary shares.

Tabel Laba Per Saham Dilusian
Diluted Earnings Per Share

(dalam Rupiah penuh)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba per saham dilusian (nilai penuh) Diluted earning per share (full value)	91.783	80.095	11.688	14,59%

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statement of Cash Flows

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES				
Penerimaan kas dari pelanggan Cash receipts from customers	31.671.281.588	30.056.470.288	1.614.811.300	5,37%
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya Payment to contractors, suppliers and others	(14.592.877.976)	(14.481.551.070)	(111.326.906)	0,77%
Pembayaran kepada karyawan Payment to employees	(5.662.070.239)	(5.661.556.853)	(513.386)	0,01%
Pembayaran pajak penghasilan Payment for income taxes	(1.396.604.110)	(1.319.862.044)	(76.742.066)	5,81%
Penghasilan bunga Interest received	132.629.570	156.818.218	(24.188.648)	(15,42%)
Penerimaan pajak Tax receipt	949.549.254	1.078.288.509	(128.739.255)	(11,94%)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	**11.101.908.087**	**9.828.607.048**	**1.273.301.039**	**12,96%)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES				
Penerimaan dividen Receipt of dividend	366.126.855	322.271.932	43.854.923	13,61%
Laba (rugi) penjualan aset tetap Gain (loss) on disposal assets	37.117.004	(1.969.868)	39.086.872	(1.984,24%)
Perolehan aset tetap dan aset tak berwujud Acquisition of fixed assets and intangible assets	(6.511.011.701)	(6.908.699.330)	397.687.629	(5,76%)
Pencairan investasi jangka pendek Withdrawal of short-term investments	2.245.190.808	5.742.520.260	(3.497.329.452)	(60,90%)
Penyertaan saham Investment in shares	(395.591.435)	(2.674.308.254)	2.278.716.819	(85,21%)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	**(4.258.168.469)**	**(3.520.185.260)**	**(737.983.209)**	**20,96%**

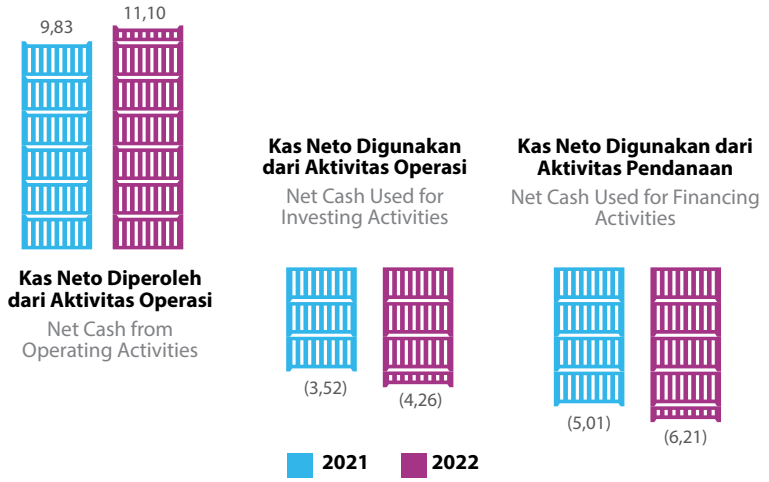
Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statement of Cash Flows

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES				
Setoran modal Capital injection	-	1.201.500.000	(1.201.500.000)	(100,00%)
Pembayaran pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya Payment of bank loans and other financial institutions	(4.221.618.857)	(4.345.416.914)	123.798.057	(2,85%)
Penerimaan pinjaman Receipt of loans	1.983.144.166	1.611.983.309	371.160.857	23,03%
Pembayaran bunga Interest payment	(2.512.723.161)	(2.752.569.073)	239.845.912	(8,71%)
Pembayaran liabilitas sewa Payments of lease liabilities	(138.892.333)	(162.741.729)	23.849.396	(14,65%)
Pembayaran dividen Payment of dividend	(1.316.854.000)	(560.000.000)	(756.854.000)	135,15%
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Used in Financing Activities	**(6.206.944.185)**	**(5.007.244.407)**	**(1.199.699.778)**	**23,96%**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	**636.795.433**	**1.301.177.381**	**(664.381.948)**	**(51,06%)**
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	38.456.803	8.154.416	30.302.387	371,61%
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR	**12.922.388.587**	**11.613.056.790**	**1.309.331.797**	**11,27%**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR	**13.597.640.823**	**12.922.388.587**	**675.252.236**	**5,23%**

Grafik Laporan Arus Kas Konsolidasian
Graph of Consolidated Statement of Cash Flows

(dalam ribuan Rupiah) | (in thousands of Rupiah)



ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2022 mencapai Rp11,10 triliun, meningkat 12,96% atau Rp1,27 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp9,83 triliun. Hal tersebut antara lain dipengaruhi penerimaan pengembalian pajak pada tahun 2021 yang tidak terjadi di tahun 2022 serta sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha.

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Net cash from operating activities in 2022 reached Rp11.10 trillion, an increase of 12.96% or Rp1.27 trillion compared to Rp9.83 trillion in 202.This was mainly due to the receipt of tax returns in 2021 that did not occur in 2022 and was in line with an increase in operating revenue.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2021 mencapai Rp4,26 triliun, meningkat 20,96% atau Rp737,98 miliar atau dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp3,52 triliun. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh lebih tingginya pencairan deposito di dalam investasi jangka pendek dibandingkan tahun 2022 yang dikarenakan untuk pengambilalihan saham PT Waskita Toll Road di CTP.

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Net cash used for investing activities in 2021 reached Rp4.26 trillion, an increase of 20.96% or Rp737.98 billion or compared to Rp3.52 trillion in 2021. This was mainly due to the higher disbursement of deposits in short-term investments compared to 2022 due to the takeover of PT Waskita Toll Road's shares in CTP.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2021 mencapai Rp6,21 triliun, meningkat 23,96% atau Rp1,20 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 mencapai Rp5,01 triliun. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya pembayaran dividen serta adanya pelunasan pinjaman Bank di PT Prima Multi Terminal.

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Net cash used for financing activities in 2021 reached Rp6.21 trillion, an increase of 23.96% or Rp1.20 trillion compared to Rp5.01 trillion in 2021. This was mainly due to the increase in dividend payments and the repayment of bank loans at PT Prima Multi Terminal.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

ABILITY TO PAY DEBT AND RECEIVABLES COLLECTIBILITY

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memenuhi hak-hak kreditor dengan melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunganya secara tepat waktu. Kemampuan Pelindo dalam memenuhi kewajibannya dapat dilihat dari sejumlah indikator, misalnya: kondisi keuangan jangka pendek dan kondisi keuangan jangka panjang.

ABILITY TO PAY DEBT

The Company is committed to fulfilling creditors' rights by making timely payments of principal and interest. Pelindo's ability to fulfill its obligations can be seen from a number of indicators, for example: short-term financial conditions and long-term financial conditions.

Kemampuan membayar hutang jangka pendek tercermin dari rasio likuiditas sedangkan kemampuan membayar hutang jangka panjang tercermin dari rasio solvabilitas. Rasio likuiditas dan rasio solvabilitas disajikan sebagai berikut.

The ability to pay short-term debt is reflected in the liquidity ratio while the ability to pay long-term debt is reflected in the solvency ratio. The liquidity ratio and solvency ratio are presented as follows.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PENDEK (LIKUIDITAS)

Rasio likuiditas 2022 baik diukur dengan menggunakan rasio kas (*cash ratio*) dan rasio lancar (*current ratio*). Rasio kas diperoleh dari penambahan nilai kas, deposito, dan surat berharga jangka pendek, lalu dibagi dengan nilai liabilitas jangka pendek. Sedangkan rasio lancar diperoleh dari pembagian nilai aset lancar dengan liabilitas jangka pendek.

ABILITY TO PAY SHORT-TERM DEBT (LIQUIDITY)

The 2022 liquidity ratio was measured using the cash ratio and current ratio. The cash ratio is obtained by adding cash, time deposits and short-term securities, then dividing the total by short-term liabilities. Meanwhile, the current ratio is obtained from dividing the total current assets by total short-term liabilities.

Tabel Likuiditas
Liquidity

(dalam %)
(in %)

Likuiditas Liquidity	2022	2021	Perubahan Change
Cash Ratio	68,00	137,71	(69,71)
Current Ratio	108,00	172,72	(64,72)

Rasio kas tahun 2022 mencapai 68%, turun 69,71% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 137,71%. Demikian pula dengan rasio lancar tahun 2022 mencapai 108%, turun 64,72% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 172,72%. Penurunan rasio kas dan rasio lancar karena penggunaan kas internal Perseroan untuk pelunasan pinjaman Bank.

The cash ratio in 2022 reached 68%, a decrease of 69.71% compared to 137.71% in 2021. The current ratio in 2022 reached 108%, a decrease of 64.72% compared to 172.72% in 2021. The decrease in the cash ratio and current ratio was due to the use of the Company's internal cash to repay bank loans.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PANJANG (SOLVABILITAS)

Rasio solvabilitas yang menunjukkan kemampuan Perseroan dalam membayar kewajiban-kewajibannya khususnya kewajiban jangka panjang. Uraian mengenai rasio solvabilitas dijabarkan sebagai berikut.

ABILITY TO PAY LONG TERM DEBT (SOLVENCY)

The solvency ratio shows the Company's ability to pay its obligations, especially long-term liabilities. The description of the solvency ratio is as follows.

Tabel Solvabilitas
Solvency

(dalam %)
(in %)

Solvabilitas	2022	2021	Perubahan Change
Return on Assets (ROA)	0,03	0,03	0,00
Return on Equity (ROE)	0,09	0,08	0,01
Return on Investment (ROI)	11,02	11,71	(0,69)
Debt to Equity (DER)	1,76	1,76	0,00

ROA tahun 2022 mencapai, 0,03%, relatif sama dengan tahun 2021 yang juga mencapai 0,03%. ROE tahun 2022 meningkat menjadi 0,09, sedangkan ROI sedikit mengalami penurunan

ROA in 2022 reached 0.03%, the same as in 2021 when it reached 0.03%. ROE in 2022 increased to 0.09, while ROI slightly decreased to 11.02%. DER in 2022 reached 1.76%, the same as in 2021

menjadi 11,02%. DER tahun 2022 mencapai 1,76%, relatif sama dengan tahun 2021 yang juga mencapai 1,76%. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh peningkatan laba usaha Perseroan, sedangkan prosentase peningkatan aset tetap lebih besar dibanding dengan peningkatan laba.

when it reached 1.76%. This was partly due to an increase in the Company's operating profit, while the percentage increase in fixed assets was greater than the increase in profit.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DARI EFEK YANG DITERBITKAN

Kemampuan membayar utang juga dapat tercermin berdasarkan peringkat obligasi, obligasi secara rutin dinilai oleh lembaga pemeringkatan guna mendukung kelayakan obligasi yang diterbitkan. Obligasi ini tercatat di Bursa Efek Singapura dan telah meraih peringkat internasional dari berbagai lembaga pemeringkat yaitu *Standard and Poor's* (S&P), Moody's dan Fitch serta Pefindo.

ABILITY TO PAY DEBT FROM ISSUED SECURITIES

The ability to pay debts can also be reflected based on bond ratings, bonds are routinely assessed by rating agencies to support the eligibility of bonds issued. These bonds are listed on the Singapore Stock Exchange and have received international ratings from rating agencies, namely Standard and Poor's (S&P), Moody's and Fitch and Pefindo.

Tabel Kemampuan Membayar Hutang dari Obligasi Global
Ability to Pay Global Bonds

Uraian Description	Peringkat Rating	
	2022	2021 (*Merger*)
Obligasi Global dan Domestik Global and Domestic Bonds	• Moody's : Baa3 (*Positive*) • Fitch : BBB (*Stable*) • Pefindo : AAA (*Stable*)	• Moody's : Baa3 (*Positive*) • Fitch : BBB (*Stable*) • Pefindo : AAA (*Stable*)

Adapun definisi dari setiap peringkat obligasi yang diberikan adalah sebagai berikut.

The definition of each bond rating given is as follows.

Tabel Definisi Peringkat Obligasi Global
Global Bond Rating Definition

Pemeringkat Rating		
Standard and Poor's (S&P)	BBB	Termasuk kedalam kategori peringkat investasi kualitas menengah - risiko menengah yang saat ini dalam kondisi memuaskan. Included in the investment category of medium quality - medium risk and currently in a satisfactory condition.
Moody's	Baa3	Obligasi dengan risiko moderat dan oleh karenanya memiliki karakteristik spekulatif. Bonds with moderate risk and therefore have speculative characteristics..
Fitch	BBB	Termasuk kedalam kategori peringkat investasi kualitas menengah - risiko menengah yang saat ini dalam kondisi memuaskan. Included in the investment category of medium quality - medium risk and currently in a satisfactory condition.
Pefindo	AAA	Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya. The obligor's ability to meet its long-term financial commitments, relative to other Indonesian obligors.
	AA	Kemampuan Obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan Obligor lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat. The obligor's ability to meet its long-term financial commitments for these debt securities, compared to other obligors in Indonesia, is very strong.

Tabel Definisi Peringkat Obligasi Global
Global Bond Rating Definition

Pemeringkat Rating	
Outlook	
Stable	Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil peringkat akan stabil. A stable prospect so the rating results are stable.
Positive	Prospek yang berpotensi untuk menaikkan peringkat. Prospects with the potential to raise their rating.
Tanda tambah (+)	Pada peringkat tertentu menunjukkan bahwa peringkat tersebut relatif kuat dalam masing-masing kategori peringkat. A rating that indicates the ranking is relatively strong in each rating category.
Tanda minus (-)	Pada peringkat tertentu menunjukkan bahwa peringkat tersebut relatif lemah dalam masing-masing kategori peringkat. A rating that indicates the ranking is relatively weak in each rating category.

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Average Collection Period (ACP) merupakan suatu rasio yang menjadi referensi yang menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan oleh Perseroan untuk menerima pembayaran dari pengguna jasa dalam rangka pelunasan piutang usaha. Semakin kecil nilai ACP menggambarkan Perseroan mampu menerima pembayaran pelunasan piutang lebih cepat.

Rasio perputaran piutang tahun 2022 mencapai 18 hari, lebih baik dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 19 hari. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan saldo rata-rata piutang usaha (net) pada tahun 2022 sebesar Rp53 miliar dibandingkan rata-rata piutang usaha (net) tahun 2021.

RECEIVABLES COLLECTIBILITY

The Average Collection Period (ACP) is a reference ratio used to show how long it takes the Company to receive payments from service users to settle trade receivables. The lower the ACP value, the more quickly the Company receives payments of receivables.

The receivables turnover ratio in 2022 reached 18 days, better than the 19 days in 2021. This was due to a decrease in the average trade receivables balance (net) in 2022 of Rp53 billion compared to the average trade receivables (net) in 2021.

Tabel Kolektibilitas Piutang
Receivable Collectibility

Uraian Description	Satuan	2022	2021	Perubahan Change
Average Collection Period (ACP)	Hari	18	19	(1)

Analisa umur piutang tahun 2022 yang belum jatuh tempo sebesar Rp263,71 miliar, lebih besar dibandingkan jumlah piutang yang lewat jatuh tempo 91 – 180 hari sebesar Rp217,12 miliar. Hal tersebut menunjukkan bahwa kolektibilitas piutang masih dalam kategori baik, sehingga dapat mendukung kegiatan Perseroan.

The aging analysis of receivables in 2022 that are not yet due was Rp263.71 billion, greater than the receivables that are past due for 91 – 180 days of Rp217.12 billion. This shows that the collectability of receivables is still in the good category, so that it can support the Company's activities.

Tabel Analisis Umur Piutang Usaha
Account Receivable Age Analysis

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Analisis Umur Piutang Usaha Trade Receivables	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Belum jatuh tempo Not yet due	263.711.508	540.601.210	(276.889.702)	(51,22%)
Lewat jatuh tempo Past due				
1-90 hari 1-90 days	949.936.337	914.452.235	35.484.102	3,88%
91-180 hari 91-180 days	217.120.498	145.965.228	71.155.270	48,75%
Lebih dari 180 hari More than 180 days	1.155.304.793	1.076.472.800	78.831.993	7,32%
Subtotal	**2.586.073.136**	**2.677.491.473**	**(91.418.337)**	**(3,41%)**
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai Less: Allowance for impairment	(1.135.965.935)	(1.161.228.927)	25.262.992	(2,18%
Neto	**1.450.107.201**	**1.516.262.546**	**(66.155.345)**	**(4,36%)**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang usaha cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha. Manajemen juga berkeyakinan bahwa tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.

As of December 31, 2022 and 2021, Management believes that the allowance for impairment of trade receivables is sufficient to cover possible losses from uncollectible trade receivables. Management also believes that there is no significant concentration of credit risk on receivables from third parties.

STRUKTUR MODAL

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Komposisi struktur modal di 2022 yang dimiliki oleh Pelindo adalah 63,83% berasal dari liabilitas, dan 36,17% berasal dari ekuitas. Komposisi ini sedikit mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2021, komposisi struktur modal yang berasal dari liabilitas sebesar 63,82% dan ekuitas sebesar 36,18%.

CAPITAL STRUCTURE

CAPITAL STRUCTURE DETAILS

The Pelindo capital structure composition in 2022 is 63.83% coming from liabilities, and 36.17% coming from equity. This composition has slightly changed compared to 2021, where the capital structure composition coming from liabilities was 63.82% and equity was 36.18%.

Tabel Rincian Struktur Modal
Capital Structure Details

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022		2021		Pertumbuhan Growth	
	(Rp)	Komposisi Composition (%)	(Rp)	Komposisi Composition (%)	(Rp)	(%)
Liabilitas jangka pendek Current Liabilities	19.948.603.684	16,86%	13.559.591.714	11,67%	6.389.011.970	47,12%
Liabilitas jangka panjang (utang berbasis bunga) Long-Term Liabilities (interest-based debt)	55.597.281.447	46,98%	60.616.373.347	52,15%	(5.019.091.900)	(8,28%)
Total liabilitas Total liabilities	75.545.885.131	63,83%	74.175.965.061	63,82%	1.369.920.070	1,85%
Total ekuitas Total equity	42.804.692.775	36,17%	42.053.109.439	36,18%	751.583.336	1,79%
Total liabilitas dan ekuitas **Total liabilities and equity**	**118.350.577.906**	**100,00%**	**116.229.074.500**	**100,00%**	**2.121.503.406**	**1,83%**

Struktur modal terkait dengan struktur modal kerja jangka pendek (likuiditas) telah disajikan pada bagian kemampuan membayar hutang dalam Laporan Tahunan ini.

The capital structure related to the short-term working capital structure (liquidity) has been presented in the debt service capacity section of this Annual Report.

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Dalam mengelola permodalannya, Pelindo senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko. Untuk itu, Perseroan menetapkan sejumlah rasio modal sesuai proporsi terhadap risiko. Pelindo secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

CAPITAL STRUCTURE MANAGEMENT POLICY

In managing its capital, Pelindo always seeks to maintain business continuity and maximize benefits for shareholders and other stakeholders, and to provide adequate returns to shareholders by determining the price of products and services that are commensurate with the level of risk. For this reason, the Company determines a number of capital ratios according to the proportion to risk. Pelindo actively and regularly reviews and manages its capital to ensure optimal capital structure and returns for shareholders, taking into account the efficient use of capital based on operating cash flows and capital expenditures, and by considering future capital requirements.

DASAR PEMILIHAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Pelindo mengelola struktur modal dan hasil pengembalian kepada pemegang saham yang optimal dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan profitabilitas baik masa sekarang maupun yang akan datang, perkiraan arus kas operasi, estimasi belanja modal, dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

BASIS FOR THE CAPITAL STRUCTURE MANAGEMENT POLICY

Pelindo manages optimal capital structure and returns to shareholders while taking into account future capital requirements and current and future profitability, estimated operating cash flows, estimated capital expenditures, and projected strategic investment opportunities.

IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL

Pelindo melakukan ikatan material untuk investasi barang modal yang disajikan sebagai berikut.

MATERIAL CAPITAL GOODS INVESTMENT BONDS

Pelindo has commitments for material capital goods investments, which are presented as follows.

Tabel Ikatan Material Investasi Barang Modal
Material Capital Goods Investment Bonds

No.	Jenis Ikatan Type of Bond	Nama Pihak (Vendor) Pelaksana Program Name of the Party (Vendor) Executing the Program	Mata Uang yang menjadi Denominasi Denominated Currency
1	Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing Kijing Terminal Port Development	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Istaka Karya (Persero) PT Yodya Karya (Persero)	Rupiah
2	Makassar *New Port*	PT PP (Persero) Tbk PT Yodya Karya (Persero)	Rupiah
3	Pengembangan Pelabuhan Benoa (*Bali Maritime Tourism Hub*) Benoa Harbor (Bali Maritime Tourism Hub) Development	PT PP (Persero) Tbk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Istaka Karya (Persero) PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT Brantas Abipraya (Persero) PT Virama Karya (Persero) PT Bina Karya (Persero)	Rupiah
4	Kawasan Industri Kuala Tanjung Kuala Tanjung Industrial Area	PT PP (Persero), Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Rupiah
5	Jalan Tol Cibitung - Cilincing Cibitung - Cilincing Toll Ways	PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT Waskita Beton Precast PT Virama Karya (Persero) PT Jasa Marga Toll Maintenance PT Jasa Marga Toll Operator	Rupiah

TUJUAN IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL

Pada tahun 2022, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melakukan ikatan material untuk investasi barang modal dengan tujuan peningkatan kapasitas, produktivitas, dan pelayanan untuk membangun dermaga, lapangan penumpukan, serta melengkapi alat bongkar/muat, dan pengerukan.

PURPOSE OF MATERIAL CAPITAL GOODS INVESTMENT BONDS

In 2022, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) carried out material commitments for capital goods investments with the aim of increasing capacity, productivity and services to build docks, stacking yards, and loading/unloading and dredging equipment.

SUMBER DANA

Sumber pendanaan atas ikatan material investasi barang modal berasal dari dana internal Pelindo dan *commercial loan*/obligasi.

SOURCE OF FUNDS

Sources of funds for material commitments for capital goods investment come from Pelindo's internal funds and commercial loans/bonds.

LANGKAH PERLINDUNGAN RISIKO MATA UANG

Dalam ikatan yang terjadi pada tahun 2022, tidak terdapat ikatan dalam mata uang asing sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia terkait dengan kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perseroan. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2022 (nilai penuh).

CURRENCY RISK PROTECTION MEASURES

For bonds in 2022, there are no bonds in foreign currency in accordance with Bank Indonesia Regulations regarding the obligation to use Rupiah in all transactions within the territory of the Republic of Indonesia.

In addition, the consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency and presentation currency of the Company. Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rates prevailing at the time the transactions were made. The following shows the major foreign exchange rates used for translation as of December 31, 2022 (full amount).

Tabel Nilai Kurs
Exchange Rate

(dalam ribuan Rupiah)
(in full Rupiah)

Mata Uang Currency	31 Desember 2022 December 31, 2022
Dolar Amerika Serikat (USD) 1 United States Dollar (USD) 1	15.731
Euro Eropa (EUR) 1 European Euro (EUR) 1	16.712
Dolar Singapura (SGD) 1 Singapore Dollar (SGD) 1	11.659

INFORMASI KEUANGAN YANG TELAH DILAPORKAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Selama tahun 2022, Perseroan tidak memiliki informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.

REPORTED FINANCIAL INFORMATION FOR EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS REPORTED FINANCIAL INFORMATION FOR EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

During 2022, the Company has no financial information to report on extraordinary and rare events.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH SERTA LABA OPERASI

Pada tahun 2021 dan 2022, Perseroan tidak terkena dampak yang signifikan terhadap perubahan harga penjualan atau pendapatan bersih serta laba operasi Perseroan.

IMPACT OF PRICE CHANGES ON SALES OR NET REVENUES AND OPERATING PROFIT

In 2021 and 2022, the Company was significantly affected by changes in sales prices or net revenues and operating profit.

KOMPONEN-KOMPONEN SUBSTANSI DARI PENDAPATAN DAN BEBAN LAINNYA

Selama tahun 2022, tidak terdapat komponen-komponen dari pendapatan dan beban lainnya yang nilainya sama atau lebih 20% dari total nilai pendapatan dan beban lainnya.

SUBSTANTIAL COMPONENTS OF OTHER INCOME AND EXPENSES

During 2022, there were no components of other income and expenses whose value was equal to or more than 20% of the total value of other income and expenses.

PENINGKATAN/PENURUNAN MATERIAL DARI PENJUALAN/PENDAPATAN BERSIH

Selama tahun 2022, tidak terdapat peningkatan maupun penurunan material dari penjualan/pendapatan bersih.

MATERIAL INCREASES/DECREASES IN SALES/ NET INCOME

During 2022, there was no material increase or decrease in sales/ net income.

INVESTASI BARANG MODAL

Investasi berupa Barang Modal *(Capital Expenditure)* merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

CAPITAL GOODS INVESTMENTS

Investment in the form of Capital Goods (Capital Expenditure) is an activity of disbursing funds that are used to purchase a number of fixed assets or add value to fixed assets that are expected to provide value in the future.

JENIS DAN NILAI INVESTASI

Investasi barang modal dan penyertaan modal yang terealisasi pada tahun 2022 sebesar Rp10,28 triliun, menurun 16,03% atau Rp1,96 triliun dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp12,24 triliun.

Adapun rincian per jenis terkait nilai investasi barang modal dan penyertaan modal diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

INVESTMENT TYPE AND VALUE

Realized investment in capital goods and equity participation in 2022 amounting to Rp10.28 trillion, a decrease of 16.03% or Rp1.96 trillion compared to 2021 of RP12.24 trillion.

The details per type related to the investment value of capital goods and equity participation are shown in the following table:

Tabel Jenis dan Nilai Investasi
Investment Type and Value

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Jenis Type	Nilai Investasi Tahun 2022 2022 Investment Value	Nilai Investasi Tahun 2021 2021 Investment Value	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Bangunan Fasilitas, Jalan, Bangunan, Sarana dan Prasarana, Kapitalisasi Bunga Port Building Facilities, Roads, Buildings, Facilities and Infrastructure, Interest Capitalization	3.084.831	3.921.803	(836.972)	(21,34%)
Alat-Alat Fasilitas, Instalasi Fasilitas, Peralatan dan Perlengkapan, Kapal dan Kendaraan Equipment Facilities, Installation Facilities, Equipment and Supplies, Vessels and Vehicles	271.180	500.928	(229.748)	(45,86%)
Tanah dan Hak atas Tanah, dan Emplasemen Land and Land Rights, and Emplacements	82.340	116.164	(33.824)	(29,12%)
Investasi Non Fisik Non Physical Investment	57.999	89.857	(31.858)	(35,45%)
Total Investasi Perusahaan Induk **Total Parent Company Investment**	**3.496.350**	**4.628.752**	**(1.132.402)**	**(24,46%)**
Investasi Entitas Anak Subsidiary Investment	3.031.849	2.820.372	211.477	7,50%
Total Investasi Konsolidasi **Total Consolidated Investment**	**6.528.199**	**7.449.124**	**(920.925)**	**(12,36%)**
Penyertaan Modal Equity Capital	3.751.515	4.793.030	(1.041.515)	(21,73%)
Total Investasi + Penyertaan Modal **Total Investment + Equity Participation**	**10.279.714**	**12.242.154**	**(1.962.440)**	**(16,03)**

BANGUNAN FASILITAS PELABUHAN, JALAN, BANGUNAN, SARANA DAN PRASARANA, KAPITALISASI BUNGA

Bangunan fasilitas, jalan, bangunan, sarana dan prasarana, kapitalisasi bunga tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3,08 triliun atau menurun sebesar 21,34% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang sebesar Rp3,92 triliun. Hal ini disebabkan diantaranya pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I terealisasi sebesar Rp126,43 miliar atau terserap 73,34% terhadap realisasi 2021 sebesar Rp480,04 miliar.

BUILDING FACILITIES, ROADS, BUILDINGS, FACILITIES AND INFRASTRUCTURE, THE INTEREST CAPITALIZATION

Building facilities, roads, buildings, facilities and infrastructure, the interest capitalization in 2022 was Rp3.08 trillion, a decrease of 21.34% compared to Rp3.92 trillion in 2021. This was mainly due to the construction of the North Kalibaru Terminal Phase I, which amounted to Rp126.43 billion, or 73.34% of the 2021 realization of Rp480.04 billion.

ALAT-ALAT FASILITAS, INSTALASI FASILITAS, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN, KAPAL DAN KENDARAAN

Alat-alat fasilitas, instalasi fasilitas, peralatan dan perlengkapan, kapal dan kendaraan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp271,18 miliar atau menurun sebesar 45,86% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang sebesar Rp500,93 miliar. Hal ini disebabkan diantaranya pekerjaan pengadaan 11 (sebelas) unit *docking system* termasuk *automation* pada *waterside* ASC *block* terealisasi Rp6,71 miliar atau terserap 93,62% di bawah realisasi 2021 sebesar Rp105,17 miliar.

EQUIPMENT FACILITIES, INSTALLATION FACILITIES, EQUIPMENT AND SUPPLIES, VESSELS AND VEHICLES

Equipment Facilities, Installation Facilities, Equipment and Supplies, Vessels and Vehicles in 2022 was Rp271.18 billion, a decrease of 45.86% compared to Rp500.93 billion in 2021. This was mainly due to the procurement of 11 (eleven) docking system units including automation on the waterside ASC block, which amounted to Rp6.71 billion, or 93.62% below the 2021 realization of Rp105.17 billion

TANAH DAN HAK ATAS TANAH, DAN EMPLASEMEN

Tanah dan hak atas tanah, dan emplasemen tahun 2022 terealisasi sebesar Rp82,34 miliar atau menurun sebesar 29,12% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp116,16 miliar. Hal ini disebabkan diantaranya Pekerjaan Pembebasan Lahan HPL di Pelabuhan Teluk Bayur (Tahap III) tidak terealisasi.

LAND AND LAND RIGHTS

Land and land rights, and emplacements in 2022 was Rp82.34 billion, a decrease of 29.12% compared to Rp116.16 billion in 2021. This was mainly due to the HPL Land Acquisition Work at Teluk Bayur Port (Phase III) not being realized.

INVESTASI NON-FISIK

Investasi non-fisik tahun 2022 terealisasi sebesar Rp57,99 miliar atau menurun sebesar 35,45% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang sebesar Rp89,86 miliar. Hal ini disebabkan diantaranya dana penunjang investasi strategi Belawan dan Kuala Tanjung terealisasi Rp791,82 juta atau 95,11% dari realisasi 2021 sebesar Rp16,20 miliar.

NON PHYSICAL INVESTMENT

Non-physical investments in 2022 was Rp57.99 billion, a decrease of 35.45% compared to Rp89.86 billion in 2021. This was mainly due to the investment supporting funds for the Belawan and Kuala Tanjung strategies, which realized Rp791.82 million, or 95.11% of the 2021 realization of Rp16.20 billion.

PENYERTAAN MODAL

Penyertaan modal tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3,75 triliun atau menurun sebesar 21,73% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang sebesar Rp4,79 triliun. Hal ini dikarenakan terdapat setoran modal kepada kepada CTP sebesar Rp805 miliar.

CAPITAL PARTICIPATION

Capital investment in 2022 was Rp3.75 trillion, a decrease of 21.73% compared to Rp4.79 trillion in 2021. This was due to a capital deposit to CTP of Rp805 billion.

TUJUAN INVESTASI BARANG MODAL

Dari arahan strategis dan juga inisiatif strategis yang telah disusun untuk tahun 2022, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) harus melakukan kegiatan investasi guna menutup kesenjangan kapasitas dan kapabilitas PT Pelabuhan Indonesia (Persero) antara kondisi eksisting dengan aspirasi yang ingin dicapai PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Besaran investasi yang dibutuhkan terdiri dari tiga macam investasi yaitu investasi terkait inisiatif strategis, investasi rutin *(business as usual)*, dan investasi proyek strategis Perseroan. Investasi rutin bertujuan memenuhi minimal *requirement*, meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja, serta mendukung tujuan administratif. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan terus melanjutkan program investasi yang sudah berjalan, seperti pembangunan terminal. Investasi yang ada juga akan diprioritaskan pada pembangunan Proyek Strategis Perseroan.

CAPITAL GOODS INVESTMENTS PURPOSE

From the strategic directives and initiatives prepared for 2021, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) must carry out investment activities to close the gap in the capacity and capability of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) between its existing conditions and the aspirations PT Pelabuhan Indonesia (Persero) wants to achieve. The amount of investment required consists of three investment types, namely investments related to strategic initiatives, routine investments (business as usual), and investments for the Company's strategic projects. Routine investments are required to meet minimum requirements, improve work safety and security, and support administrative objectives. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) will continue to conduct investment programs, including terminal construction. Existing investments will also be prioritized for the development of the Company's Strategic Projects.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Pada tanggal 19 Mei 2023 Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memutuskan untuk mengangkat Agus Suhartono sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-101/MBU/05/2023 efektif 19 Mei 2023, yang sebelumnya dijabat oleh Marsetio sebagai Komisaris (Plt. Komisaris Utama)

Dampak perubahan komposisi Dewan Komisaris yaitu dengan dinyatakannya efektif dapat bertindak dalam jabatannya dan memberikan keputusan yang mengikat sebagai anggota Dewan Komisaris yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja Pelindo dan risiko usaha di masa yang akan datang.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS AFTER THE DATE OF ACCOUNTANT'S REPORT

On May 19, 2023 the Ministry of SOEs as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) appointed Agus Suhartono as President Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Minister of SOEs Decree No. SK-101/MBU/05/2023 effective May 19, 2023, to replace Marsetio as Commissioner (Acting President Commissioner)

The impact of changing the Board of Commissioners composition has been declared effective, as they can act in their positions and make binding decisions as members of the Board of Commissioners, and have a positive impact on Pelindo's future performance and business risks.

PROSPEK USAHA

Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi global 2023 dapat mencapai 2,6%, sejalan dengan dampak positif pembukaan ekonomi Tiongkok dan penurunan disrupsi suplai global. Perkembangan positif ekonomi global serta ekspektasi kenaikan upah karena keketatan pasar tenaga kerja di Amerika Serikat dan Eropa mengakibatkan proses penurunan inflasi global berjalan lebih lambat, sehingga mendorong kebijakan moneter ketat negara maju berlangsung lebih lama sepanjang 2023.

Drewry Maritime dalam *Port and Terminal Insight* memperkirakan volume arus kontainer dunia tumbuh sebesar 2,8%. Pertumbuhan ekonomi global diprediksikan akan melanjutkan tren positif yang akan diikuti oleh pertumbuhan arus barang secara internasional. Kondisi pandemi telah menciptakan tren kebiasaan baru dimana salah satunya adalah terkait belanja daring (*online shopping*). Pertumbuhan bisnis *e-commerce* pun meningkat pesat sebagai jawaban akan kebutuhan belanja daring ini. Hampir sebagian besar barang-barang *e-commerce* diangkut dalam kemasan petikemas yang turut memberikan efek positif pada pertumbuhan arus petikemas global. Potensi pertumbuhan arus petikemas global ini dapat dioptimalkan dengan pengembangan *international transshipment* memanfaatkan lokasi wilayah pelabuhan Pelindo yang berada di jalur pelayaran dunia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan ekspor. Konsumsi rumah tangga diprakirakan makin kuat sejalan dengan peningkatan mobilitas di seluruh wilayah, penjualan eceran, dan membaiknya keyakinan konsumen. Investasi juga solid ditopang penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan peningkatan aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA). Prospek permintaan domestik yang meningkat juga dipengaruhi dampak lanjutan perbaikan ekspor. Ekspor barang dan jasa diprakirakan lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya seiring perbaikan prospek ekonomi global. Perkembangan hingga Februari 2023 menunjukkan ekspor non migas Indonesia tumbuh tinggi, termasuk dari peningkatan ekspor batu bara, bijih logam, dan CPO ke Tiongkok. Selain itu, kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara diprakirakan juga meningkat. Secara spasial, prospek ekspor yang lebih baik mendukung prospek ekonomi di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) yang lebih tinggi. Berdasarkan Lapangan usaha, prospek sektor Industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan diprakirakan tumbuh kuat. Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi pada 2023 diprakirakan dalam kisaran 4,5%-5,3%.

Untuk kargo non petikemas, pasar arus barang domestik masih memiliki potensi yang sangat besar dikarenakan pada saat ini Pelindo hanya memiliki pangsa pasar sebagian kecil dari pasar nasional. Pelindo dapat melakukan kerjasama dalam beberapa skema dengan pelabuhan non petikemas yang terdiri dari pelabuhan Terminal Khusus (Tersus)/Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan pelabuhan milik Kementerian/Lembaga (K/L) Pemerintah.

Sumber:
Port and Terminal Insight, Drewry, Agustus 2022
Tinjauan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia, Maret 2023

BUSINESS PROSPECTS

Bank Indonesia projects global economic growth in 2023 to reach 2.6%, in line with the positive impact of China's economy opening, and reduced global supply disruptions. The positive developments in the global economy, and the expectations of wage increases due to the tight labor markets in the United States and Europe have resulted in a slower pace in global inflation reduction, pushing the tight monetary policies of developed countries to continue into 2023.

Drewry Maritime in its Port and Terminal Insight estimates that the volume of world container traffic will grow by 2.8%. Global economic growth is predicted to continue the positive trend, which will be followed by growth in the international goods traffic. The pandemic conditions created new habit trends, one of which was related to online shopping. The growth in e-commerce business increased rapidly in response to this online shopping need. Most of the e-commerce goods are transported in containers, which also had a positive effect on the growth of global container traffic. The growth potential for global container traffic can be optimized by developing international transshipment utilizing the location of the Pelindo port area on the world shipping routes.

Indonesia's economic growth remains strong driven by increased domestic and export demand. Household consumption is predicted to strengthen in line with increased mobility across regions, retail sales and improving consumer confidence. Investment is also solid supported by the completion of the National Strategic Project (PSN) and the increased inflows of Foreign Investment (PMA). The prospect of increasing domestic demand is also influenced by the continued impact from improving exports. Exports of goods and services are predicted to be higher than previously projected in line with the improvement in the global economic outlook. Developments up to February 2023 show that Indonesia's non-oil and gas exports are growing rapidly from increased exports of coal, metal ore and CPO to China. In addition, visits by domestic and foreign tourists are also expected to increase. Spatially, the better export prospects support the higher economic prospects in the Kalimantan, Sumatra and Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) regions. Based on business field, prospects for the manufacturing, wholesale and retail trade, as well as transportation and warehousing sectors are predicted to grow strongly. Thanks to these developments, economic growth in 2023 is predicted to be in the range of 4.5% -5.3%.

For non-container cargo, the domestic goods market still has enormous potential as currently Pelindo only has a small share of the national market. Pelindo will cooperate in several schemes with non-container ports including Special Terminal (Tersus)/ Terminal for Own Interest (TUKS) ports and ports owned by Government Ministries/Institutions (K/L).

Source:
Port and Terminal Insight, Drewry, August 2022
Monetary Policy Review, Bank Indonesia, March 2023

Dalam menghadapi tahun 2023, Perseroan melakukan analisis secara internal untuk mengidentifikasi peluang-peluang usaha yang dapat dicapai dengan berbekal keunggulan yang dimiliki. Pelindo memiliki beberapa kekuatan internal yang dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan bisnis pelabuhan di Indonesia, seperti portofolio yang terdiversifikasi, menguasai pasar petikemas di Indonesia, dan memiliki lokasi yang strategis untuk dijadikan *transshipment hub*. Namun, untuk dapat melakukan perencanaan strategi dan mencapai sasaran PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tahun 2021-2025, Perseroan tidak cukup mengandalkan kekuatan internalnya saja tetapi juga mengkalkulasi faktor eksternal yang menjadi ancaman sekaligus peluang yang dapat dioptimalkan guna keberlangsungan Perseroan, sehingga perlu dilakukan Analisis Lingkungan Bisnis Perseroan dengan menggunakan *framework Strengths Weaknesses Opportunities Threats* (SWOT). Analisis SWOT adalah bagian integral setiap proses perencanaan strategis dalam menangkap potensi dan memetakan hambatan yang ada. Analisis mencakup lingkungan internal Perseroan yang akan menghasilkan *strengths* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan), sedangkan analisis eksternal akan menghasilkan *opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman).

To face 2023, the Company conducted an internal analysis to identify business opportunities that can be achieved with the advantages it has. Pelindo has several internal strengths that can be used as a basis for developing the port business in Indonesia, such as a diversified portfolio, controlling the container market in Indonesia, and having a strategic location to become a transshipment hub. However, to carry out strategic planning and achieve the targets of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for 2021-2025, it is not sufficient for the Company to rely only on its internal strengths but also to external factors that are threats as well as opportunities that can be optimized for the sustainability of the Company, so it is necessary to carry out an Environmental Analysis. The Company's business uses the Strengths Weaknesses Opportunities Threats (SWOT) framework. SWOT analysis is an integral part of every strategic planning process in capturing potential and mapping existing obstacles. An internal analysis will produce the Company's strengths and weaknesses, while an external analysis will produce the opportunities and threats.

Tabel Analisis SWOT PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2021-2025

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) SWOT Analysis for 2021-2025

Strengths	*Weaknesses*
1. Luas dan Kendali Jaringan, Serta Pangsa Pasar Petikemas a. Jangkauan jaringan pelabuhan yang luas dan tersebar di seluruh Indonesia. b. Kendali strategis lebih baik secara nasional melalui adanya perencanaan keseluruhan untuk jaringan dan investasi aset. c. Menguasai pasar petikemas Indonesia secara dominan. **2. Kelengkapan Jasa Kepelabuhan dan Portofolio Terdiversifikasi** a. Rantai jasa usaha yang lengkap di bisnis kepelabuhan, memiliki 4 (empat) klaster yaitu: • Petikemas • Non Petikemas • *Logistik and Hinterland Development* • *Marine, Equipment* and *Port Services* b. Memiliki portofolio yang terdiversifikasi di luar bisnis kepelabuhan. ***3. Strategic Port*** Memiliki lokasi yang strategis untuk dijadikan *transshipment hub*. ***4. Stakeholder Relation*** Dukungan aspek legalitas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan kegiatan usaha yang dilaksanakan. ***5. Business Experience*** Pengalaman dan rekam jejak dalam pelaksanaan aktivitas pelabuhan (*port know-how*).	***1. Gap* pengembangan SDM dan Organisasi** a. Kecepatan unit kerja untuk beradaptasi dengan perubahan model bisnis baru yang masih lambat. b. Kompetensi SDM belum merata untuk semua pelabuhan ketika integrasi dilakukan. **2. *Gap* Teknologi** Penerapan teknologi yang terintegrasi untuk mendukung proses operasional masih terbatas. **3. Pangsa Pasar Non-Petikemas (NPK)** Penguasaan pangsa pasar muatan non petikemas yang masih rendah. **4. *Gap* Operasi** a. Terdapat beberapa terminal yang belum termanfaatkan secara optimal. b. Terdapat kesenjangan dalam standardisasi proses bisnis antar pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). ***5. Gap* Kapabilitas Bisnis** Kapabilitas dan kemampuan layanan di segmen logistik, *hinterland development*, *marine*, serta *port services* belum memiliki perkembangan yang baik.

1. **Network Area and Control, and Container Market Share**
   a. The wide reach of the port network throughout Indonesia;
   b. Better strategic control nationally through overall planning for network and asset investments; and
   c. Dominates the Indonesian container market.
2. **Completeness of Port Services and a Diversified Portfolio**
   a. A complete business service chain in the port business with 4 (four) clusters:
      - Containers
      - Non Containers
      - Logistics and Hinterland Development
      - Marine, Equipment and Port Services
   b. A portfolio outside the port business.
3. **Strategic Port**
   Strategical locations for transshipment hubs.
4. **Stakeholder Relation**
   Support for high legality aspects in every business activity carried out.
5. **Business Experience**
   Experience and track record in carrying out port activities (port know-how).

1. **HC and Organizational Development Gap**
   a. The speed of work units must adapt to changes in new business models is still slow; and
   b. HC competencies were not evenly distributed across all ports when integration was carried out.
2. **Technology Gap**
   The application of integrated technology to support operational processes is still limited.
3. **Non-Containerized Market Share (NPK)**
   The market share for non-container cargo is still low.
4. **Operation Gap**
   a. There are several terminals not being used optimally; and
   b. There is a gap in the standardization of business processes between the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ports.
5. **Business Capability Gap**
   Service capabilities and abilities in the logistics, hinterland development, marine, and port services segments have not been developed well.

Opportunities	*Threats*
1. Visi/Program Pemerintah Untuk pengembangan infrastruktur maritim dan intensifikasi program pemerintah di bidang maritim berpotensi mendukung rencana integrasi Pelindo. **2. Potensi Pengembangan Layanan dan Rantai Nilai Kepelabuhan** a. Mengembangkan penawaran jasa pelabuhan yang lebih terintegrasi dengan hadirnya layanan di segmen logistik, *hinterland development*, *marine*, serta *port services* pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero). b. Peningkatan sinergi dengan BUMN lain di segmen transportasi pelayaran dan logistik. **3. Pemanfaatan Teknologi** Potensi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi jasa layanan kepelabuhan. **4. *Strategic Partnership*** Peningkatan kerjasama usaha dengan mitra strategis dan strategi aliansi.	**1. Pemulihan Ekonomi** a. Ketidakpastian ekonomi global dan nasional akibat pandemi COVID-19. b. Makro ekonomi Indonesia terdampak oleh pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat. c. Volatilitas nilai Rupiah. **2. *Entry Barriers* yang Semakin Rendah** Pemilik barang, pelaku industri dan Pemerintah Daerah yang membuka dan melakukan operasi pelabuhan sendiri, serta dapat ber-*partner* dengan operator pelabuhan dari luar negeri. **3. Konektivitas Maritim** Tingkat konektivitas maritim nasional yang masih rendah, sehingga belum terwujudnya *network* maritim yang terintegrasi. **4. Integrasi Multimoda dan Integrasi Hinterland Yang Masih Rendah** Integrasi multimoda dan integrasi *hinterland* yang masih rendah dan lebih banyak bergantung pada transportasi jalur darat.
1. Government Vision/Program For the development of maritime infrastructure and the intensification of Government programs in the maritime sector have the potential to support Pelindo's integration plan. **2. Potential for Port Service and Value Chain Development** a. Developing a more integrated port service offering with services in the logistics, hinterland development, marine, and port services segments at PT Pelabuhan Indonesia (Persero); and b. Increased synergies with other SOEs in the shipping and logistics transportation segment. **3. Use of Technology** Potential use of technology and digitalization to increase the port services effectiveness and efficiency. **4. Strategic Partnership** Increase in business cooperation with strategic partners and strategic alliances.	**1. Economic Recovery** a. Global and national economic uncertainty due to the COVID-19 pandemic; b. Indonesia's macroeconomy is affected by slowing world economic growth; and c. Rupiah volatility. **2. Lower Entry Barriers** Goods owners, industry businesses and local governments who open and carry out port operations themselves, and partner with overseas port operators. **3. Maritime Connectivity** The level of national maritime connectivity is still low, and an integrated maritime network has not yet been realized. **4. Multimodal Integration and Low Hinterland Integration** Multimodal integration and hinterland integration is still low, with a reliance on land transportation.

Sumber: Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020-2024 masing-masing Perusahaan Pelindo I-IV, Analisis BCG

Source: Company Long-Term Plan (RJPP) 2020-2024 for each Pelindo I-IV Company, BCG Analysis

Berdasarkan hal tersebut di atas, Perseroan menilai bahwa kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) yang dimiliki oleh Perseroan melebihi kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) yang ada. Dengan dilakukannya penggabungan Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke dalam Pelindo II, Perseroan optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dengan kata lain, Perseroan memiliki prospek usaha yang baik yang juga didukung oleh kekuatan-kekuatan yang dimiliki Perseroan.

Dengan penuh kewaspadaan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada tahun 2023, aksi korporasi dan langkah strategis Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Aksi Korporasi

a. Kajian Implementasi Aksi Korporasi Pemurnian Fokus Bisnis Pelindo *Group*.
b. Pemberian pinjaman pemegang saham kepada *subholding*/ entitas anak untuk mendukung kelancaran operasional dan/atau kebutuhan investasi *subholding*/ entitas anak dengan total nilai maksimal sebesar Rp1 triliun.
c. Optimalisasi kas dan pendanaan Pelindo *Group* untuk *prepayment*/ *refinancing*/ *buyback* atas seluruh hutang/ sebagian hutang di level Pelindo dan/atau di level *subholding*/anak/cucu Pelindo (dengan skema pemberian pinjaman pemegang saham) dan juga untuk kebutuhan investasi modal kerja Pelindo *Holding* yang bersumber dari *internal cash* dan/atau pinjaman komersial/obligasi/ sukuk dengan total nilai maksimal sebesar eq. USD1 miliar.
d. Penyesuaian perjanjian konsesi dan izin lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pasca *merger*, serta novasi izin operasi terminal PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
e. Pengurusan balik nama Hak Atas Tanah dan Bangunan pasca *merger*, serta pengurusan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

2. Langkah Strategis

a. Fokus pada penyelarasan bisnis pasca integrasi melalui standardisasi dan integrasi operasional dan komersial untuk peningkatan kualitas pelayanan.
b. Melakukan investasi terintegrasi untuk pengembangan bisnis.
c. Reorganisasi Perseroan dan pengembangan budaya terintegrasi.
d. Pengembangan bisnis melalui *Strategic Partnership* (i.e. INA).
e. Kolaborasi dengan pelayaran domestik dan global untuk peningkatan konektivitas laut.
f. Pengembangan konektivitas dan ekosistem logistik melalui kerjasama dengan pelaku industri logistik darat.
g. Persiapan rencana ekspansi regional dan internasional PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

After conducting this analysis, the Company assessed that the Company's strengths and opportunities possessed outweighed the existing weaknesses and threats. With the merger of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV into Pelindo II, the Company is optimistic that it can continuously improve its performance in the short-term and in the-long term. In other words, the Company has good business prospects that are supported by the strengths of the Company.

With full awareness of the possibilities that could occur in 2023, the Company's corporate actions and strategic steps in 2023 are as follows:

1. Corporate Actions

a. Studying the Corporate Actions to Refine Pelindo Group's Business Focus.
b. Providing shareholder loans to subholdings/subsidiaries to support the smooth operation and/or investment needs of subholdings/subsidiaries with a maximum total value of Rp1 trillion.
c. Optimizing the Pelindo Group cash and funding for prepayments/refinancing/buyback of all debts/part of debts at the Pelindo level and/or at the Pelindo subholding/ subsidiary/ sub-subsidiary level (with a shareholder lending scheme) and also for the working capital investment needs of Pelindo Holding to be sourced from internal cash and/or commercial loans/bonds/sukuk with a maximum total value of eq. USD 1 billion.
d. Adjusting PT Pelabuhan Indonesia (Persero) concession agreements and environmental permits after the merger, as well as replacing PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terminal operating permits.
e. Arranging post-merger land and building title transfers, as well as arranging Free Certificate (SKB) facilities resulting from the transfer of land and/or building rights.

2. Strategic Steps

a. Focusing on post-integration business alignment through operational and commercial standardization and integration to improve service quality.
b. Developing integrated investments for business development.
c. Reorganizing the Company and developing an integrated culture.
d. Developing the business through Strategic Partnership (i.e. INA).
e. Collaborating with domestic and global shipping to increase sea connectivity.
f. Developing logistics connectivity and ecosystem through collaboration with ground logistics industry companies.
g. Preparing PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional and international expansion plans.

Pada tahun 2023, Perseroan memasuki fase *Business Expansion and Partnership* dengan mulai berfokus pada inisiatif pengembangan bisnis melalui *Strategic Partnership*, maupun kerjasama dan kolaborasi dengan pelaku logistik BUMN dan swasta. Salah satu prospek bisnis yang akan menjadi target Perseroan adalah potensi layanan petikemas *international transshipment* hub di selat Malaka. Total volume petikemas yang melalui Selat Malaka mencapai 64 juta Teus dengan 78% nya merupakan kargo *transshipment* (berdasarkan data 2021, Roland Berger). Selaras dengan fase *Business Expansion and Partnership*, inisiatif strategis yang akan mulai dilakukan baik pada tahap perencanaan maupun tahap eksekusi pada tahun 2023 antara lain:

1. **Inisiatif Strategis Tahap Perencanaan yang dimulai pada tahun 2023**
   a. Perencanaan ekspansi regional di bisnis pelabuhan.
   b. Eksplorasi kerjasama untuk pengembangan international *transshipment hub*.
   c. Kerjasama dengan pelaku logistik BUMN dan swasta (eg. *cold storage*/multimoda kereta api).
   d. Eksplorasi pemanfaatan *data analytics* untuk pengembangan bisnis (*enabler*).
2. **Inisiatif Strategis Tahap Pelaksanaan yang dimulai pada tahun 2023**
   a. *Additional marine service offering* untuk *key account* Pelindo.
   b. Kerjasama dengan kawasan industri/logistik.
   c. Pengembangan layanan operasi TUKS dengan bekerja sama dengan BUMN dan swasta.
   d. Restrukturisasi organisasi dan tata kelola (*enabler*).
   e. Pengembangan fungsi *shared service* (*enabler*).
3. **Inisiatif Strategis Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan pada tahun 2023**
   a. Digitalisasi dan Sistemisasi Operasi Kepelabuhan.
   b. Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan.
   c. Kerjasama antar pelabuhan untuk optimalisasi konsep *hub and spoke* dengan integrasi data
   d. Sentralisasi *Knowledge Management* (*enabler*).
   e. Internalisasi budaya Pelindo Terintegrasi (*enabler*).

PENCAPAIAN TARGET DAN TARGET KE DEPAN

PENCAPAIAN TARGET

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PRODUKSI

Uraian atas perbandingan target dan realisasi produksi tahun 2022 adalah sebagai berikut.

In 2023, the Company will enter the Business Expansion and Partnership phase by starting to focus on business development initiatives through Strategic Partnerships, as well as cooperation and collaboration with state-owned and private logistics companies. One of the business prospects that will become the target of the Company is the potential for international transshipment hub container services in the Malacca Strait. The total volume of containers passing through the Malacca Strait reaches 64 million Teus, of which 78% were transshipment cargo (based on 2021 data, Roland Berger). In line with the Business Expansion and Partnership phase, strategic initiatives that will begin to be carried out both at the planning and execution stages in 2023 2ill include:

1. **Strategic Initiative Planning Phase starting in 2023**
   a. Regional expansion planning in the port business.
   b. Collaborative exploration for the development of international transshipment hubs.
   c. Collaboration with BUMN and private logistics companies (e.g. cold storage/multimodal trains).
   d. Exploring the utilization of data analytics for business development (enabler).
2. **Strategic Initiative Implementation Phase starting in 2023**
   a. Additional marine service offering for Pelindo key accounts.
   b. Collaboration with industrial/logistics areas.
   c. Development of TUKS operational services in collaboration with BUMN and the private sector.
   d. Organizational and governance restructuring (enabler).
   e. Development of shared service functions (enabler).
3. **Strategic Initiative Planning and Implementation Phase in 2023**
   a. Digitization and Systemization of Port Operations.
   b. Development of Port Infrastructure and Equipment.
   c. Cooperation between ports to optimize the hub and spoke concept with data integration
   d. Centralized Knowledge Management (enabler).
   e. Integrated Pelindo culture internalization (enabler).

TARGET ACHIEVEMENT AND FUTURE TARGETS

TARGET ACHIEVEMENT

COMPARISON OF PRODUCTION TARGET AND REALIZATION

A description of the comparison of targets and actual production in 2022 is as follows.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Produksi
Comparison of Production Target and Realization

Jenis Kegiatan Type of Activity	Satuan Unit	RKAP Tahun 2022 2022 RKAP	Realisasi Tahun 2022 2022 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100
Arus Kapal Ship Traffic	Unit	258.951	290.970	112,36%
	GT	1.271.376.372	1.201.814.534	94,53%
Arus Petikemas Container Traffic	Box	13.532.839	13.292.102	98,22%
	Teus	17.250.158	17.220.312	99,83%
Arus Barang Non-Petikemas Non-Container Traffic	Ton	144.329.660	159.727.836	110,67%
	M^3	4.452.555	5.604.518	125,87%
	Unit	1.438.384	2.441.155	169,72%
	MMBTU	7.533.600	8.800.934	116,82%
	Ekor	572.829	503.694	87,93%
Arus Penumpang Passenger Traffic	Orang People	7.017.010	15.028.884	214,18%

Capaian Arus kapal dalam satuan unit/*call* tahun 2022 mencapai 112,36%, di atas target RKAP. Sedangkan untuk satuan GT belum melampaui target RKAP yakni sebesar 94,53%. Hal ini antara lain disebabkan:

1. Penurunan kunjungan kapal internasional di luar dermaga umum yang disebabkan tidak diperpanjangnya beberapa kerjasama pelayanan kapal.
2. Adanya kegiatan pelayanan kapal milik PT Pertamina (Persero) yang sudah tidak dilayani oleh Perusahaan dan dilakukan sendiri oleh anak usaha PT Pertamina (Persero), khususnya di Cabang Tanjung Intan, Dumai dan Pekanbaru.
3. Adanya kebijakan Pemerintah terkait pembatasan ekspor batubara pada awal tahun 2022 yang berdampak penurunan trafik di beberapa Cabang, khususnya cabang yang melayani kegiatan TUKS.
4. Kecenderungan peralihan penggunaan kapal domestik yang memiliki GT lebih kecil di beberapa TUKS.

Achievements in Ship traffic in unit/call units in 2022 reached 112.36%, above the RKAP target. Meanwhile, the GT unit has not exceeded the RKAP target of 94.53%%. This was due, among other things:

1. Decrease in international ship traffic, especially outside the public wharf due to the cessation of ship service cooperation at the Sangatta Branch.
2. In early 2022 there were restrictions on coal exports at the Balikpapan, Banjarmasin and Samarinda Branches as well as restrictions on CPO exports at the Belawan and Dumai Branches.
3. Pertamina's TUKS piloting services, especially in Dumai, Cilacap and Kendari, were carried out internally by Pertamina.
4. The tendency to switch to domestic ships that have a smaller GT in several TUKS.

Arus petikemas dalam satuan box tahun 2022 berada sedikit di bawah target RKAP sebesar 98,22% demikian pula dalam satuan teus tercapai 99,83%. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh:

1. Adanya kongesti (penimbunan) di China serta cuaca buruk di bulan Desember 2022 sehingga menyebabkan keterlambatan kedatangan kapal.
2. Kedatangan kapal yang masih belum sesuai dengan jadwal (*delay*) dari pelabuhan sebelumnya dan adanya beberapa *service omit* untuk *reschedule* jadwal.
3. Berhentinya kapal Pendulum Nusantara yang sebelumnya membawa petikemas *transshipment* serta adanya pembatasan ekspor CPO dan turunannya.
4. Penurunan kegiatan *transshipment* di beberapa cabang pelabuhan.

The container traffic in box units in 2022 was 98.22%below the RKAP target, as well as in teus units which was 99.83% below the RKAP target. This was influenced by:

1. World macroeconomic conditions (the Ukraine-Russia conflict and the Covid-19 pandemic) which affected global trade so that international containers experienced a decline at the Tanjung Priok, Belawan, Semarang, Surabaya and Makassar Branches.
2. There was a ban on the export of Palm RBD (cooking oil) and its derivatives from the Government resulting in a decrease in container traffic, especially in the Belawan and Dumai Branches.
3. There was a decrease in transshipment containers at the Balikpapan, Ternate and Bitung Branches.
4. Decreased transshipment activities at several port branches.

Arus barang non-petikemas dalam satuan ton tahun 2022 mencapai 110,67% di atas target RKAP. Hal ini antara lain dipengaruhi:

The non-container goods traffic in tons in 2022 was 110.67% above the RKAP target. This was due to:

1. Adanya kenaikan bongkar muat curah kering dengan komoditi *food & grain* di Cabang Belawan dan adanya kerjasama baru untuk *handling* batubara di Cabang Tembilahan.
2. Adanya kenaikan kegiatan bongkar muat batubara di Mekar Putih serta kenaikan bongkar muat BBM milik PT AKR Corporindo di Cabang Kotabaru.
3. Kenaikan juga terjadi pada Cabang Biak yang disebabkan kegiatan bongkar pasir dan bongkar muat curah cair BBM di TUKS Pertamina.

Arus barang non-petikemas satuan M^3 mencapai 125,87%, yang berada di atas target RKAP. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh adanya peningkatan bongkar kayu masak milik PT Pelita Bandar Nasional pada Terminal Jamrud, bongkar komoditi kayu *log* pada Cabang Gresik dan meningkatnya arus barang batuan granit dan barang *project on shore* di Pelabuhan Dumai.

Arus barang non-petikemas dalam satuan unit berhasil melampaui target RKAP yang mencapai 169,72%. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya kunjungan kapal milik PT Atosim Lampung Pelayaran dan PT Damai Lautan Nusantara, peningkatan kegiatan bongkar muat kendaraan melalui kapal RoRo di Cabang Panjang, Semarang, Tanjung Wangi dan Lembar serta penambahan armada milik PT Berlian Lautan Sejahtera pada Pelabuhan Ende – Ippi.

Arus barang non-petikemas dalam satuan MMBTU berhasil melampaui target RKAP, dengan capaian 116,82%. Hal ini antara lain dipengaruhi karena telah diperbaikinya 1 unit alat *vaporizer* sehingga transfer gas dapat didukung oleh 2 unit alat *vaporizer* di Sub Regional Bali Nusra Cabang Benoa.

Pencapaian arus hewan mencapai 87,93% yang berada di bawah target RKAP. Hal ini antara lain dipengaruhi:
1. Penurunan permintaan daging dari luar pulau karena adanya pusat pengembangbiakkan sapi di daerah Kalimantan dan belum terealisasinya KSP.
2. Adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sehingga berakibat pada kegiatan impor hewan dari Negara Australia di Terminal PTP Tanjung Priok.

Capaian arus penumpang tahun 2022 mencapai 214,18% berhasil melampaui target RKAP. Hal ini dikarenakan terjadinya kenaikan arus penumpang di semua regional akibat adanya penurunan level PPKM dan kelonggaran kebijakan pembatasan mobilisasi masyarakat oleh Pemerintah di hampir seluruh Regional 1,2,3 dan 4 sehingga terjadi lonjakan arus penumpang pada saat libur bersama sekolah maupun hari raya baik lebaran dan natal 2022 yang terjadi di seluruh terminal penumpang.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KEUANGAN

Uraian atas realisasi perbandingan target dan realisasi laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. An increase in loading and unloading of dry bulk with food & grain commodities at the Belawan Branch, and a new collaboration for handling coal at the Tembilahan Branch.
2. An increase in coal loading and unloading activities at Mekar Putih, and an increase in PT AKR Corporindo's fuel loading and unloading at the Kotabaru Branch.
3. An increase also occurred in the Biak Branch due to sand unloading and liquid fuel loading and unloading activities at TUKS Pertamina.

The non-container goods traffic in M^3 reached 125.87%, above the RKAP target. This was partly influenced by an increase in the unloading of wood from PT Pelita Bandar Nasional at the Jamrud Terminal, the unloading of timber commodities at the Gresik Branch, and the increase in the granite and on shore project goods traffic at Dumai Port.

The non-container goods traffic in units exceeding the RKAP target by 169.72%. This was influenced by the increase in PT Atosim Lampung Pelayaran and PT Damai Lautan Nusantara ship visits, increased loading and unloading of vehicles via RoRo vessels at the Panjang, Semarang, Tanjung Wangi and Lembar Branches, as well as the addition of a fleet belonging to PT Berlian Lautan Sejahtera at the Ende - ippi Port.

The non-container goods traffic in MMBTU units exceeded the RKAP target, with an achievement of 116.82%. This was due to the repair of 1 vaporizer unit, so that gas transfer could be supported by 2 vaporizer units in the Benoa Branch of Bali Nusra Sub-region.

The animal traffic reached 87.93% , below the RKAP target. This is influenced by:
1. Decreased demand for meat from outside the island due to the existence of a cattle-breeding center in the Kalimantan area and the KSP has not yet been realized.
2. An outbreak of Foot and Mouth Disease (FMD) that impacted the import of animals from Australia at PTP Tanjung Priok Terminal.

The passenger traffic in 2022 reached 214.18% exceeding the RKAP target. This was due to an increase in passenger traffic in all regions due to the relaxation of the government's policy of limiting community mobilization in Regional 1,2,3 and 4 so there was a surge in passenger traffic during the school holidays, and both Eid and Christmas holidays in 2022 at all passenger terminals.

COMPARISON OF FINANCIAL TARGETS AND REALIZATION

A comparison of targets and the realization of the 2022 consolidated statement of financial position is shown as follows.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Comparison of the Consolidated Statement of Financial Position Targets and Realization

(dalam jutaan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	**RKAP 2022** 2022 RKAP	**Realisasi 2022** 2022 Realization	**Pencapaian** Achievement
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)=(3)/(2)*100**
ASET ASSETS			
Aset lancar Current Assets	21.275.007	21.620.168	101,62%
Aset tidak lancar Non-Current Assets	91.250.848	96.730.410	106,00%
Total aset Total Assets	112.525.855	118.350.578	105,18%
LIABILITAS LIABILITIES			
Liabilitas jangka pendek Short-Term Liabilities	10.635.024	19.948.604	187,57%
Liabilitas jangka panjang Non-Current Liabilities	56.256.957	55.597.281	98,83%
Total liabilitas Total Liabilities	66.891.981	75.545.885	112,94%
EKUITAS Equity			
Ekuitas Equity	45.633.874	42.804.693	93,80%

Total aset lancar terealisasi sebesar Rp21,62 triliun atau tercapai 101,62% dari RKAP tahun 2022. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh:

1. Kas dan setara kas terealisasi sebesar Rp13,60 triliun atau 34,78% di atas RKAP Tahun 2022 yang sebesar Rp10,09 triliun. Hal ini terutama disebabkan meningkatnya arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp2,10 triliun dan pencairan investasi jangka pendek;
2. Pendapatan masih akan diterima terealisasi sebesar Rp651,23 miliar atau 23,73% di atas RKAP tahun 2022 yang sebesar Rp526,34 miliar. Hal ini terutama disebabkan meningkatnya pendapatan rental *fee* Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK Koja) dan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) akibat penguatan mata uang USD terhadap Rupiah;Persediaan terealisasi sebesar Rp276,99 miliar atau 10,90% di atas RKAP Tahun 2022 yang sebesar Rp249,78 miliar. Hal ini terutama disebabkan kenaikan harga BBM.

Total aset tidak lancar terealisasi sebesar Rp96,73 triliun atau tercapai 106,00% dari RKAP tahun 2022. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh:

1. Properti investasi terealisasi sebesar Rp1,23 triliun atau 205,84% di atas RKAP Tahun 2022 yang sebesar Rp403,26 miliar. Hal ini terutama disebabkan meningkatnya realisasi investasi properti atas aset tanah serta jalan dan bangunan emplasemen;

Total current assets realized amounted to Rp21.62 trillion, or 101.62% of the 2022 RKAP target. This was due to:

1. Realized cash and cash equivalents of Rp13.60 trillion, or 34.78% above the 2022 RKAP of Rp10.09 trillion. This was mainly due to an increase in cash flow from operating activities of Rp2.10 trillion, and disbursement of short-term investments;
2. Accrued Revenue of Rp651.23 billion, or 23.73% above the 2022 RKAP of Rp526.34 billion. This was mainly due to an increase in rental fee income for the Koja Container Terminal Operations Cooperation (KSO TPK Koja), and PT Jakarta International Container Terminal (JICT) due to the strengthening of the USD currency against the Rupiah; inventories amounted to Rp276.99 billion or 10.90% above the 2022 RKAP of Rp249.78 billion. This was mainly due to the increase in fuel prices.

Total non-current assets amounted to Rp96.73 trillion, or 106.00% of the 2022 RKAP. This was due to:

1. Realized investment property of Rp1.23 trillion, or 205.84% above the 2022 RKAP of Rp403.26 billion. This was mainly due to the increase in the realization of property investment in land assets as well as roads and emplacement buildings;

2. Aset tak berwujud - neto terealisasi sebesar Rp42,55 triliun atau 22,27% di atas RKAP Tahun 2022 yang sebesar Rp34,80 triliun. Hal ini terutama disebabkan aset tak berwujud jalan tol milik PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP) yang dianggarkan telah dijual namun dalam realisasinya masih tercatat sebagai aset perusahaan;
3. Taksiran tagihan restitusi pajak terealisasi sebesar Rp1,11 triliun yang tidak dianggarkan di RKAP Tahun 2022. Hal ini terutama disebabkan anggaran tagihan restitusi pajak dicatat pada pajak dibayar di muka aset lancar;
4. Aset hak-guna - neto terealisasi sebesar Rp453,99 miliar atau 25,58% di atas RKAP Tahun 2022 yang sebesar Rp361,51 miliar. Hal ini terutama disebabkan adanya kerjasama pengelolaan pelabuhan UPP/UPT KSP Garongkong dan KSP Bima milik Kementerian Perhubungan;
5. Aset kerjasama operasi - neto terealisasi sebesar Rp379,89 miliar atau 12,14% di atas RKAP Tahun 2022 yang sebesar Rp338,75 miliar. Hal ini terutama disebabkan penyusutan aset KSO TPK Koja lebih kecil dari yang dianggarkan;
6. Aset tidak lancar lainnya terealisasi sebesar Rp1,22 triliun atau 37,59% di atas RKAP Tahun 2022 yang sebesar Rp887,78 miliar. Hal ini terutama disebabkan meningkatnya uang muka pembelian aset tetap di Regional 3 untuk pekerjaan *dumping* area di Bali dan pekerjaan BMTH *(Bali Marine Tourism Hub)*.

Total liabilitas jangka pendek terealisasi sebesar Rp19,95 triliun atau tercapai 187,57% dari RKAP tahun 2022. Realisasi nilai liabilitas jangka pendek di atas RKAP diantaranya dipengaruhi oleh:

1. Utang bank terealisasi sebesar Rp152,61 miliar atau 857,44% di atas RKAP Tahun 2022 yang sebesar Rp15,94 miliar. Hal ini dikarenakan atas pinjaman PT Prima Terminal Petikemas masih dianggarkan pada utang bank jangka panjang;
2. Utang obligasi tercatat sebesar Rp8,64 triliun yang jatuh tempo dalam satu tahun tidak dianggarkan di RKAP Tahun 2022. Hal ini terutama disebabkan terdapat utang obligasi domestik dan global yang jatuh tempo tahun 2023;
3. Beban akrual terealisasi sebesar Rp5,27 triliun atau 40,27% di atas RKAP 2022 yang sebesar Rp3,76 triliun. Hal ini terutama disebabkan kenaikan beban akrual kerjasama mitra usaha kegiatan pelayanan bongkar muat sejalan dengan kenaikan aktivitas operasional serta kenaikan beban akrual atas pelaksanaan proyek;
4. Utang pajak terealisasi sebesar Rp1,03 triliun atau 28,19% di atas RKAP 2022 yang sebesar Rp799,84 miliar. Hal ini terutama disebabkan adanya kenaikan pada PPh 29 di PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) sebesar Rp338,00 miliar dan peningkatan hutang PPN Keluaran pada Regional 2 sebesar Rp68,00 miliar yang diikuti dengan kenaikan pendapatan jasa kepelabuhanan serta semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi global pasca pandemi COVID-19;
5. Pinjaman bank jangka pendek terealisasi sebesar Rp105,36 miliar yang tidak dianggarkan di RKAP Tahun 2022. Hal ini terutama disebabkan adanya pinjaman di entitas anak yaitu PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII) kepada bank OCB NISP berupa Kredit Rekening Koran (KRK) Rp2,20 miliar dari plafon Rp4,00 miliar.

Total liabilitas jangka panjang terealisasi sebesar Rp55,60 triliun atau tercapai 98,83%. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh:

1. Utang obligasi terealisasi sebesar Rp34,12 triliun atau 15,32%

2. Realized intangible assets - net of Rp42.55 trillion, or 22.27% above the 2022 RKAP of Rp34.80 trillion. This was mainly due to the toll road intangible assets owned by PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP) that had budgeted to have been sold but in reality were still listed as Company assets;
3. The estimated claim for tax refund that reached Rp1.11 trillion and was not budgeted for in the 2022 RKAP. This was mainly due to a budget for claims for tax refunds being recorded in prepaid taxes on current assets;
4. Right-of-use assets - net reached Rp453.99 billion, or 25.58% above the 2022 RKAP of Rp361.51 billion. This was mainly due to the collaboration in managing the UPP/UPT KSP Garongkong and KSP Bima ports owned by the Ministry of Transportation;
5. Realized joint operation assets - net reached Rp379.89 billion, or 12.14% above the 2022 RKAP of Rp338.75 billion. This was mainly due to the depreciation of TPK Koja's KSO assets that were smaller than budgeted;
6. Realized other non-current assets reached Rp1.22 trillion, or 37.59% above the 2022 RKAP of Rp887.78 billion. This was mainly due to an increase in advances for the purchase of fixed assets in Regional 3 for dumping area work in Bali, and for BMTH (Bali Marine Tourism Hub) work.

Total realized short-term liabilities amounted to Rp19.95 trillion, or 187.57% of the 2022 RKAP, due to:

1. Realized bank loans of Rp152.61 billion, or 857.44% above the 2022 RKAP of Rp15.94 billion. This is due to the PT Prima Terminal Petikemas loan still being budgeted as a long-term bank loans;
2. Bonds payable that mature in one year of Rp8.64 trillion that were not budgeted for in the 2022 RKAP. This is due to domestic and global bonds payable maturing in 2023;
3. Realized accrued expenses of Rp5.27 trillion, or 40.27% above the 2022 RKAP of Rp3.76 trillion. This was mainly due to an increase in accrual expenses for cooperation with business partners for loading and unloading services in line with an increase in operational activities and an increase in accruals for implementing the projects;
4. Realized tax payable of Rp1.03 trillion, or 28.19% above the 2022 RKAP of Rp799.84 billion. This was mainly due to an increase of Rp338.00 billion in PPh 29 at PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP), and an increase of Rp68.00 billion in VAT output payable in Regional 2, followed by an increase in port service revenues and improved COVID-19 post-pandemic global economic growth;
5. Realized short-term bank loans of Rp105.36 billion, which were not budgeted for in the 2022 RKAP. This was mainly due to loans from a subsidiary, PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII) to OCB NISP bank in the form of a Current Account (KRK) of Rp2.20 billion with a limit of Rp4.00 billion.

Total realized long-term liabilities amounted to Rp55.60 trillion, or 98.83%. This was due to:

1. Realized bonds payable of Rp34.12 trillion, or 15.32% below

di bawah RKAP Tahun 2022 yang sebesar Rp40,29 triliun. Hal ini terutama disebabkan pada RKAP utang obligasi yang jatuh tempo pada tahun 2023 masih dicatat dalam utang obligasi jangka panjang;
2. Pendapatan diterima di muka jangka panjang terealisasi sebesar Rp4,54 triliun atau 2,75% dibawah RKAP Tahun 2022 yang sebesar Rp4,67 triliun. Hal ini terutama disebabkan belum terealisasinya kerjasama BNCT;
3. Liabilitas imbalan kerja terealisasi sebesar Rp5,77 triliun atau 20,20% dibawah RKAP Tahun 2022 yang sebesar Rp7,23 triliun. Hal ini terutama disebabkan penurunan program kesehatan pensiun.

Total ekuitas terealisasi sebesar Rp42,80 triliun atau tercapai 93,80% dari RKAP tahun 2022 antara lain dipengaruhi karena adanya pembayaran dividen tahun buku 2021 sebesar Rp1,3 triliun serta peningkatan OCI akibat diterapkannya *hedge accounting* sesuai PSAK 71.

the 2022 RKAP of Rp40.29 trillion. This is mainly due to the bonds payable that mature in 2023 still being recorded in long-term bonds payable;

2. Realized long-term unearned income of Rp4.54 trillion, or 2.75% below the 2022 RKAP of Rp4.67 trillion. This was mainly due to the non-realization of the BNCT collaboration;
3. Realized employee benefit liabilities of Rp5.77 trillion, or 20.20% below the 2022 RKAP of Rp7.23 trillion. This was mainly due to a decline in the pension health program.

Total equity amounted to Rp42.80 trillion, or 93.80% of the 2022 RKAP, due to the payment of dividends for the 2021 fiscal year of Rp1.3 trillion and an increase in OCI due to the implementation of hedge accounting in accordance with PSAK 71.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Comparison of Targets and Realization of Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2022 2022 RKAP	Realisasi 2022 2022 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100
Pendapatan Usaha Operating revenues	30.382.587	29.700.604	97,76%
Pendapatan Konstruksi Construction revenues	4.150.136	2.397.701	57,77%
Beban Usaha Operating expenses	(23.448.279)	(23.154.429)	98,75%
Beban Konstruksi Construction expenses	(4.150.136)	(2.397.702)	57,77%
Laba Usaha **Income From Operations**	**7.368.660**	**7.114.820**	**96,56%**
Pendapatan Keuangan Finance Income	271.780	380.490	140,00%
Beban Keuangan Finance Costs	(2.608.503)	(2.571.042)	98,96%
Bagian Laba Entitas Asosiasi Equity in Income of Associates	92.450	302.616	327,33%
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan **Income Before Final Tax and Corporate Income Tax**	**5.124.387**	**5.226.883**	**102,00%**
Beban Pajak Final Final tax expense	(405.436)	(488.229)	120,42%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan **Income Before Corporate Income Tax**	**4.718.951**	**4.738.654**	**100,42%**
Beban Pajak Penghasilan Badan Corporate income tax expense	(818.360)	(830.284)	101,46%
Laba Tahun Berjalan **Income for the Current Period**	**3.900.591**	**3.908.470**	**100,20%**
Laba Komprehensif Periode Berjalan **Comprehensive Income for the Current Period**	**3.731.221**	**2.196.814**	**58,88%**

Berdasarkan rincian data pada tabel di atas, pendapatan usaha dan pendapatan konstruksi berada di bawah target yang masing-masing mencapai 97,76% dan 57,77%. Hal tersebut antara lain dipengaruhi tidak tercapainya target pendapatan pelayanan kapal internasional dan petikemas. Pelayanan kapal internasional tidak tercapai karena pembatasan ekspor CPO dan batubara pada awal tahun 2022. Pendapatan petikemas tidak tercapai karena dampak dari *lockdown* China dan Perang Rusia-Ukraina

Based on the detailed data in the table above, operating revenues and construction revenues were below the target of 97.76% and 57.77% respectively. This was due to the failure to achieve the revenue target for international ships and container services. International ship services were not achieved due to restrictions on exports of CPO and coal in early 2022. Container revenue was not achieved due to the impact of the Chinese lockdown and the Russo-Ukrainian Conflict

Meskipun demikian, pencapaian laba tahun berjalan berhasil melampaui target mencapai 100,20% dengan realisasi sebesar Rp3,91 triliun. Laba tahun berjalan tercapai di atas RKAP dan naik dibandingkan tahun lalu karena terdapat efisiensi beban bunga pinjaman dan obligasi sebesar Rp38 miliar di bawah RKAP dan serap laba asosiasi Rp210 miliar di atas RKAP.

Nonetheless, the profit for the year exceeded the target by 100.20% with a realization of Rp3.91 trillion. This increase was due to efficiencies in interest expenses on loans and bonds of Rp38 billion that were below the RKAP, and the associated absorption of Rp210 billion above the RKAP.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI STRUKTUR MODAL

Komposisi struktur modal di 2022 yang dimiliki oleh Pelindo adalah 63,83% berasal dari liabilitas, dan 36,17% berasal dari ekuitas. Adapun uraian perbandingan target dan realisasi struktur modal tahun 2022 disajikan sebagai berikut.

COMPARISON OF TARGET AND REALIZATION OF CAPITAL STRUCTURE

Pelindo's capital structure composition in 2022 was 63.83% coming from liabilities, and 36.17% coming from equity. A description of the comparison of capital structure targets and realization for 2022 is presented as follows.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal
Comparison of Targets and Realization of Capital Structure

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2022 2022 RKAP	Realisasi 2022 2022 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100
Liabilitas jangka pendek Current liabilities	10.635.024	19.948.604	187,57%
Liabilitas jangka panjang Non-Current liabilities	56.256.957	55.597.281	98,83%
Total liabilitas Total liabilities	66.891.981	75.545.885	112,94%
Total ekuitas Total equity	45.633.874	42.804.693	93,80%
Total liabilitas dan ekuitas Total liabilities and equity	112.525.855	118.350.578	105,18%

Realisasi total liabilitas tahun 2022 mencapai Rp75,55 triliun dengan capaian 112,94% berada di atas target RKAP. Demikian pula dengan total liabilitas jangka pendek terealisasi sebesar Rp19,95 triliun atau tercapai 187,57% dari RKAP tahun 2022 dan total liabilitas jangka panjang terealisasi sebesar Rp55,60 triliun atau mencapai 98,83% dari RKAP tahun 2022. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh belum terealisasinya penjualan PT CTP sehingga utang usaha dan pinjaman terkait JTCC masih tercatat sebagai liabilitas Perseroan.

Realization of total liabilities in 2022 reached Rp75.55 trillion, 112.94% above the RKAP target. Likewise, the total realized short-term liabilities amounted to Rp19.95 trillion, or 187.57% of the 2022 RKAP, and the realized total long-term liabilities amounted to Rp55.60 trillion, or 98.83% of the 2022 RKAP. This was influenced due to non-consolidation of debt to PT CTP in line with the divestment of PT CTP's majority shares and the reclassification of maturing bonds.

Di sisi lain, total ekuitas tahun 2022 terealisasi sebesar Rp42,80 triliun, dengan capaian sebesar 93,80% antara lain dipengaruhi karena adanya pembayaran dividen tahun buku 2021 sebesar Rp1,3 triliun serta peningkatan OCI akibat diterapkannya *hedge accounting* sesuai PSAK 71.

On the other hand, total equity in 2022 reached Rp42.80 trillion, or 93.80%, which was influenced by the payment of dividends for the 2021 fiscal year of Rp1.3 trillion, and an increase in OCI due to the implementation of hedge accounting in accordance with PSAK 71.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PEMASARAN

Uraian perbandingan target dan realisasi pemasaran disajikan sebagai berikut.

COMPARISON OF MARKETING TARGET AND REALIZATION

The comparison of marketing targets and realizations is presented as follows.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran
Comparison of Marketing Targets and Realization

Uraian Description	**Satuan** Unit	**RKAP 2022** 2022 RKAP	
(1)	**(2)**	**(3)**	
REGIONAL 1			
Kerjasama Baru/*Addendum* New Cooperation/Addendum	Kerjasama Baru/ *Addendum* New Cooperation/Addendum	Adanya Kerja sama Baru/ *Addendum* New Cooperation/Addendum	
Customer Visit	Kegiatan Activities	2 Kegiatan 2 Activities	
Customer Gathering/ Sharing Session	Kegiatan Activities	3 Kegiatan 3 Activities	
REGIONAL 2			
Pelaksanaan *customer visit* pelanggan eksisting dan potensial di lingkungan Regional 2 Existing and potential customer visits in Regional 2	*Customer*/mitra Customer/mitra	144	
REGIONAL 3			
Customer Visit	Freq	524	
Sharing Session/Customer Forum	Freq	1	
Kerjasama Pengangkutan FAME dari Gresik ke Tanjung Perak Fame Transportation Collaboration from Gresik to Tanjung Perak	Rp miliar Rp billion	68	
Kerjasama Pengelolaan TUKS di Tanjung Emas Semarang. TUKS Management Cooperation in Tanjung Emas Semarang.	Rp juta Rp million	909	
Kerjasama Pelayanan Bongkar Muat Curah Kering di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Collaboration on Dry Bulk Loading and Unloading Services at Tanjung Emas, Semarang Port.	Rp miliar Rp billion	2,4	
Kerjasama Pelayanan Bongkar *General Cargo* di Tanjung Emas Semarang. Collaboration on General Cargo Unloading Services at Tanjung Emas Semarang.	Rp juta Rp million	900	
Kerjasama Bongkar Muat Curah Cair dengan di Pelabuhan Benoa. Liquid Bulk Loading and Unloading Collaboration at Benoa Port.	Rp juta Rp million	750	
Kerjasama Pelayanan Jasa dengan Curah Kering di Pelabuhan Waingapu. Dry Bulk Service Cooperation at Waingapu Port.	Rp miliar Rp billion	3,2	
REGIONAL 4			
Electronic Pass (*e-Pass*)	Cabang Branch	12	
Centralized Ticketing Terminal	Cabang Branch	10	
Pengelolaan *Key Account Management* Key Account Management	Kegiatan Activity	2	
Penjajakan Kerjasama Baru dengan Mitra Exploration of New Cooperation with Partners	Kerjasama Cooperation	1	
Optimalisasi Gudang Warehouse Optimization	Kerjasama Cooperation	2	

	Realisasi 2022 2022 Realization	Pencapaian Achievement
	(4)	(5)=(4)/(3)*100%
	1. Kerjasama pelayanan pemanduan, penundaan dan jasa lainnya di Terminal Khusus PT RAPP. 2. Perpanjangan kerjasama *Floating Fender* di Perairan Wajib Pandu Sei Pakning dengan PT Segara Mitra Abadi dan CV Wimalindo Metro Karya. 3. Kerjasama pelayanan penundaan dengan PT Zenit Maritim Indonesia di Tersus Lubuk Gaung. 1. Collaboration on pilotage services, delays and other services at the PT RAPP Special Terminal. 2. Extension of the Floating Fender cooperation in Mandatory Sei Pakning Waters with PT Segara Mitra Abadi and CV Wimalindo Metro Karya. 3. Collaboration on delay services with PT Zenit Maritim Indonesia in the Lubuk Gaung Passage.	100%
	5 Kegiatan 5 Activities	250%
	7 Kegiatan 7 Activities	233%
	210	146%
	528	100%
	1	100%
	67	99%
	878	96%
	2,45	100%
	1.600	177%
	775	101%
	3,7	115%
	12	100%
	10	96%
	2	100%
	1	100%
	2	100%

REGIONAL 1

Pada tahun 2022 Regional 1 telah berhasil mencapai kesepakatan dengan PT RAPP terkait kerjasama penambahan kapal tunda di Pelabuhan Sei Pakning, untuk meningkatkan pelayanan pemanduan, penundaan dan jasa lainnya di Terminal Khusus PT RAPP. Dimana PT RAPP memberikan *market share* ± 60% dari total pendapatan di Pelabuhan Sei Pakning. Penambahan 1 (satu) unit kapal tunda yang baru sangat dibutuhkan untuk membantu keselamatan pelayaran dan pemanduan, mengingat jumlah (*call*), ukuran kapal (GRT) dan panjang kapal (LoA) yang masuk meningkat sangat signifikan di Tersus PT RAPP dan Pelabuhan Umum Tanjung Buton. Selain itu diberikan juga pemberian potongan tarif (diskon) kepada mitra kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai bagian dari kegiatan pemasaran juga telah dilaksanakan *customer visit* untuk menangkap kebutuhan pelanggan serta meningkatkan kualitas layanan untuk menjaga kepuasan pelanggan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) *visit* ke pelanggan eksisting di areal Medan dan Belawan Regional 1 secara *offline* dengan capaian 250 % dari yang ditargetkan, dengan data *customer* sebagai berikut:

1. PT Pelayaran Karana Line
2. PT Admiral Line
3. PT Samudera Agency
4. PT Tanto Intim Line
5. PT Tirta Permai Bahari

Telah dilakukan kegiatan *customer gathering* di cabang-cabang Pelabuhan wilayah Regional 1 yang telah terealisasi pada 7 (tujuh) cabang Pelabuhan secara *offline* dengan capaian 233% dari yang ditargetkan, dengan data cabang sebagai berikut:

1. Cabang Sibolga
2. Cabang Tanjung Balai Karimun
3. Cabang Tanjung Pinang
4. Cabang Lhokseumawe
5. Cabang Dumai
6. Cabang Kuala Tanjung
7. TPK Belawan

REGIONAL 2

Sebagai bagian dari kegiatan pemasaran juga telah dilaksanakan *customer visit* untuk menangkap informasi peluang bisnis dan kebutuhan pasar serta meningkatkan kualitas layanan untuk menjaga kepuasan pelanggan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 210 *visit* ke pelanggan eksisting maupun potensial di 12 cabang pelabuhan Regional 2 baik secara *online* maupun *offline* dengan capaian 146% dari yang ditargetkan.

REGIONAL 1

In 2022 Regional 1 reached an agreement with PT RAPP regarding cooperation in adding tugboats at the Sei Pakning Port, to improve pilotage, tugboat and other services at the PT RAPP Special Terminal. Where PT RAPP provides a market share of ± 60% of total revenue at Sei Pakning Port. The addition of 1 (one) new tugboat was urgently needed to assist shipping safety and pilotage, considering the number (call), vessel size (GRT) and vessel length (LoA) that entered had increased very significantly at PT RAPP Special Port and Tanjung Buton Public Port. Apart from that, tariff discounts (discounts) were also given to cooperation partners according to applicable regulations.

As part of marketing activities, customer visits have also been carried out to capture customer needs and improve service quality to maintain customer satisfaction. During 2022, 5 (five) visits were carried out to existing customers in the Medan and Belawan Regional 1 areas offline with an achievement of 250% of the target, with customer data as follows:

1. PT Pelayaran Karana Line
2. PT Admiral Line
3. PT Samudera Agency
4. PT Tanto Intim Line
5. PT Tirta Permai Bahari

Customer gathering activities were carried out at Port branches in Regional 1 in 7 (seven) Port branches offline with an achievement of 233% of the target, with branch data as follows:

1. Sibolga Branch
2. Tanjung Balai Karimun Branch
3. Tanjung Pinang Branch
4. Lhokseumawe Branch
5. Dumai Branch
6. Kuala Tanjung Branch
7. TPK Belawan

REGIONAL 2

As part of marketing activities, customer visits have also been carried out to capture information on business opportunities and market needs as well as improve service quality to maintain customer satisfaction. During 2022, 210 visits were carried out to existing and potential customers at 12 port branches of Regional 2 both online and offline with an achievement of 146% of the target.

REGIONAL 3

Pada tahun 2022 Regional 3 telah menjalankan berbagai aktivitas pemasaran sebagai upaya untuk meningkatkan pangsa pasar dan pendapatan Perusahaan, serta meningkatkan kualitas pelayanan jasa & kepuasan pelanggan. Adapun aktivitas pemasaran yang telah dilakukan antara lain aktif melakukan pendekatan melalui *customer visit* secara langsung dan menawarkan kerjasama pelayanan jasa kepelabuhanan & jasa terkait kepelabuhanan dengan tarif yang kompetitif *kepada potential customer* maupun *existing customer* yang berpotensi untuk dilakukan pengembangan bisnis. *Customer* yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya Perusahaan Swasta, termasuk juga instansi/lembaga Pemerintah dan Perusahaan BUMN lainnya yang turut berperan dalam melakukan aktivitas bisnis di bidang kepelabuhanan. Adapun contoh bentuk kerjasama yang telah dilakukan antara lain:

1. Regional 3 menyediakan paket layanan terintegrasi pengiriman FAME dari BUBBN Wilmar di Gresik melalui moda angkutan kapal laut, pelayanan jasa kepelabuhanan di Terminal Mirah, hingga penyaluran melalui pipa dari dermaga di Terminal Mirah sampai dengan IT (*Integrated Tank*) Pertamina di Tanjung Perak.
2. Melakukan kerjasama dengan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) untuk penyediaan pelayanan jasa kepelabuhanan diberbagai wilayah Regional 3 seperti TUKS PT Sriboga di Semarang, TUKS PT Pantai Damai Sejahtera di Lembar dan TUKS PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Gresik. Adapun manfaat atas kerjasama dimaksud adalah perluasan cakupan *market* yang dapat diraih, optimalisasi aset atau peningkatan utilisasi penggunaan dermaga eksisting dan peningkatan produktivitas bongkar muat bagi pemilik TUKS, serta sebagai *value creation* baru yang dapat meningkatkan pendapatan bagi Regional 3 dan mitra kerjasama.
3. Regional 3 dengan Kementerian Perhubungan melakukan Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP – BMN) di Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan Bima dan Pelabuhan Badas. Integrasi pengelolaan layanan fasilitas kepelabuhanan ini diharapkan dapat mengoptimalkan aset negara dalam menunjang kegiatan operasional dan berdampak pada peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan. Selain itu, integrasi fasilitas pelabuhan juga diharapkan dapat memperluas jaringan konektivitas distribusi pelayanan khususnya di wilayah Indonesia Timur.
4. Kerjasama pelayanan jasa kepelabuhanan seperti kerjasama pelayanan bongkar muat barang dengan PT Kebon Agung & PT Setia Indo Putra di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, PT Muria Sumba Manis di Pelabuhan Waingapu dan PT AKR di Pelabuhan Benoa.

Selanjutnya, telah dilakukan standardisasi pengelolaan suara pelanggan melalui media langsung (rapat, *sharing session, customer visit*, survei kepuasan pelanggan) dan media tidak langsung (surat, telephone, *email*, aplikasi, survei kepuasan pelanggan *online*) untuk mengetahui saran/masukan & keluhan sehingga dapat diketahui harapan dan *needs* dari customer. Selain itu, Regional 3 juga telah mengadakan acara *customer forum/sharing session* di Yogyakarta dengan mengundang 23 Perusahaan *potential customer* dalam rangka meningkatkan *customer relationship* dan menggali informasi atau potensi pengembangan kedepannya dengan *customer*.

REGIONAL 3

In 2022, Regional 3 carried out marketing activities to increase the Company's market share and revenue, as well as to improve the quality of service & customer satisfaction. The marketing activities carried out included approaching through customer visits directly and offering port service cooperation & port-related services at competitive rates to potential customers and existing customers who have the potential for business development. The customers referred to in this case are not only private companies, but are government agencies/institutions and other BUMN companies that play a role in carrying out business activities in the port sector. Examples of forms of cooperation that have been carried out include:

1. Regional 3 provided an integrated service package for FAME delivery from BUBBN Wilmar in Gresik via sea transportation, port services at Mirah Terminal, for distribution through pipes from the pier at Mirah Terminal to Pertamina's IT (Integrated Tank) at Tanjung Perak.
2. Collaborated with Terminal for TUKS to provide port services in Regional 3 areas such as TUKS PT Sriboga in Semarang, TUKS PT Pantai Damai Sejahtera in Lembar and TUKS PT Semen Indonesia (Persero) Tbk in Gresik. The benefits of this collaboration includes expanding market coverage, optimizing assets or increasing utilization of existing wharves and increasing loading and unloading productivity for TUKS owners, as well as creating new value that can increase revenue for Regional 3 and cooperation partners.
3. Regional 3 with the Ministry of Transportation carried out Cooperation on the Utilization of State Property (KSP - BMN) at Labuan Bajo Port, Waingapu Port, Bima Port and Badas Port. The integration of port facility service management is expected to optimize state assets to support operational activities and have an impact on improving port services. In addition, the integration of port facilities is also expected to expand the service distribution connectivity network, especially in the Eastern Indonesia region.
4. Cooperation in port services such as cooperation in loading and unloading services with PT Kebon Agung & PT Setia Indo Putra at the Tanjung Emas Port in Semarang, PT Muria Sumba Manis at the Port of Waingapu and PT AKR at the Port of Benoa.

Furthermore, standardization of customer voice management has been carried out through direct media (meetings, sharing sessions, customer visits, customer satisfaction surveys) and indirect media (letters, telephone, email, applications, online customer satisfaction surveys) to receive any suggestions/ input & complaints so as to understand the expectations and needs of customers. In addition, Regional 3 also held a customer forum/sharing session in Yogyakarta by inviting 23 potential customer companies in order to improve customer relationships and explore information or potential future development with customers.

REGIONAL 4

Peningkatan layanan pada terminal penumpang dilakukan dengan penerapan *Centralized Ticketing Terminal* (CTT) *System,* dimana pada tahun 2022 telah diterapkan pada 10 (sepuluh) cabang diantaranya Bitung, Makassar, Manado, Samarinda, Nunukan, Ternate, Tarakan, Jayapura, Parepare dan Ambon. Selain melakukan digitalisasi layanan pada terminal penumpang, Regional 4 juga berhasil menerapkan layanan *Electronic Pass* (*E-Pass*) pada 12 (dua belas) cabang diantaranya Makassar, Balikpapan, Samarinda, Tarakan, Nunukan, Ambon, Sorong, Manado, Bitung, Ternate, Parepare dan Kendari.

Untuk memberikan pelayanan optimal kepada pelanggan utama, telah dilakukan *customer gathering* pada tanggal 01-03 Desember 2022 di Yogyakarta dengan mengundang pelanggan kunci pada Regional 4 baik pada segmen petikemas, non-petikemas dan pelanggan kapal serta turut dihadirkan beberapa asosiasi yang merupakan *stakeholder* pada bisnis jasa kepelabuhanan. Pada kesempatan tersebut juga diberikan apresiasi untuk pelanggan dengan pendapatan tertinggi, piutang terendah, dan produksi tertinggi. Selain dari itu, manajemen cabang melakukan *coffee morning* baik kepada pemerintah daerah setempat, asosiasi maupun pengguna jasa dengan tujuan mendapatkan potensi dan peluang kerjasama, mendengar suara pelanggan serta meningkatkan keterikatan para *stakeholder* setempat.

Untuk peningkatan pangsa pasar, pada tahun 2022 Regional 4 telah melakukan kerjasama dengan KUPP Kelas II Garongkong untuk pemanfaatan Pelabuhan Garongkong selama 50 (lima puluh) tahun dengan skema Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP BMN) dengan kegiatan bongkar muat komoditi clinker, batu bara, semen. Dimana Pelabuhan Garongkong didukung dengan adanya pembangunan kereta api yang menghubungkan Makassar – Parepare jangka menengah dan Makassar – Bitung Jangka Panjang sehingga diharapkan Pelabuhan Garongkong menjadi *hub port* atas komoditi tersebut dan memangkas biaya dan waktu distribusi pada jangka Panjang.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Realisasi Sumber Daya Manusia (SDM) Pelindo untuk induk perusahaan, *subholding* dan entitas anak pada tahun 2022 mencapai 25.199 orang atau 94,79% dari RKAP 2022. Hal ini antara lain dipengaruhi adanya pekerja yang pensiun, mutasi internal ke *subholding*, anak/cucu perusahaan dan serah terima operasi.

REGIONAL 4

Improving services at the passenger terminal was carried out by implementing the Centralized Ticketing Terminal (CTT) System, which in 2022 was implemented in 10 (ten) branches including Bitung, Makassar, Manado, Samarinda, Nunukan, Ternate, Tarakan, Jayapura, Parepare and Ambon. In addition to digitizing services at the passenger terminal, Regional 4 also implemented Electronic Pass (E-Pass) services at 12 (twelve) branches including Makassar, Balikpapan, Samarinda, Tarakan, Nunukan, Ambon, Sorong, Manado, Bitung, Ternate, Parepare and Kendar.

To provide optimal service to key customers, a customer gathering was held on December 01-03, 2022 in Yogyakarta by inviting key customers in Regional 4 both in the container, non-container and ship customer segments as well as several associations that are stakeholders in the port services business. On this occasion, appreciation was also given to customers with the highest revenue, the lowest accounts receivable, and the highest production. In addition, branch management conducted coffee mornings for local government, associations and service users with the aim of obtaining cooperation potential and opportunities, hearing the voices of customers and increasing the engagement of local stakeholders.

To increase market share, in 2022 Regional 4 collaborated with KUPP Class II Garongkong for the utilization of Garongkong Port for 50 (fifty) years under a Cooperation scheme for Utilization of State Property (KSP BMN) with loading and unloading activities for clinker, coal, cement. Where the Garongkong Port would be supported by the construction of a railroad connecting Makassar - Parepare in the medium term and Makassar - Bitung in the long term, so that the Garongkong Port will become a hub port for these commodities and cut costs and distribution time in the long term.

COMPARISON OF TARGETS AND REALIZATION OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

The realization of Pelindo Human Resources (HR) for the holding company, subholdings and subsidiaries in 2022 reached 25,199 people or 94.79% of the 2022 RKAP. This is influenced by the retirement of employees, internal transfers to subholdings, subsidiaries/sub-subsidiaries of the Company, and handover of operations.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Sumber Daya Manusia
Comparison of Human Resources and Realization

(dalam satuan Orang)
(in People)

Uraian Description	RKAP 2022 2022 RKAP	Realisasi Tahun 2022 2022 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(5)=(3)/(2)*100%
Posisi Organik Organic Position			
Induk Perusahaan (a) Induk Perusahaan (a)	4.272	3.504	82,02%
Penugasan ke *Subholding* (b) On assignment to Subholding (b)	63	3.588	5.695,24%
Penugasan ke Entitas Anak Lainnya (c) On assignment to Other Subsidiaries (c)	2.933	112	3,82%
Sub Total Organik Induk Perusahaan (a+b+c) **Parent Company Organic Sub Total (a+b+c)**	**7.268**	**7.204**	**99,12%**
Organik Entitas Anak pada *Subholding* (d) Organic Subsidiaries in Subholding (d)	2.303	1.956	84,93%
Organik Entitas Anak Lainnya (e) Other Organic Subsidiaries (e)	641	631	98,44%
Total Pegawai Organik (a+b+c+d+e) **Total Organic Employees (a+b+c+d+e)**	**10.212**	**9.791**	**95,88%**
Posisi Non-Organik, Organik Pemegang Saham Lainnya dan BOD Non-Pelindo Non-Organic, Other Organic Shareholders and Non-Pelindo BOD Position			
Induk Perusahaan (f) **Parent Company (f)**	**5.467**	**3.128**	**57,22%**
***Subholding* (g)**	**9.295**	**11.676**	**125,62%**
- PKWT (g1)	9.264	11.641	125,66%
- TAD (g2)			
- Organik Pemegang Saham Lainnya (g3) Other Organic Shareholders (g3)	1	5	500,00%
- BOD Non-Pelindo (g4)	30	30	100,00%
Entitas Anak Lainnya (h) Other Subsidiaries (h)	**1.610**	**1.365**	**84,78%**
- PKWT (h1)	1.601	1.360	85,76%
- TAD (g2)			
- Organik Pemegang Saham Lainnya (h3) Other Organic Shareholders (h3)	3	2	66,67%
- BOD Non-Pelindo (h4)	6	3	50,00%
Total Pegawai Non-Organik (f+g+h) **Total Non-Organic Employees (f+g+h)**	**16.372**	**16.169**	**98,76%**
Jumlah Induk Perusahaan (a + f) Total Parent Company (a + f)	**9.739**	**6.632**	**68,10%**
Jumlah *Subholding* (b) + (d) + (g) Total Subholding (b) + (d) + (g)	**11.661**	**17.220**	**147,67%**
Jumlah Entitas Anak (c + e + h) Total Subsidiaries (c + e + h)	**5.184**	**2.108**	**40,66%**
Total	**26.584**	**25.960**	**97,65%**

PROYEKSI/TARGET KE DEPAN

FUTURE PROJECTIONS/TARGETS

ASUMSI DALAM MENYUSUN PROYEKSI 2023

Dalam penyusunan proyeksi tahun 2023, Pelindo menggunakan beberapa asumsi dasar makro antara lain sebagai berikut:

ASSUMPTIONS FOR THE 2023 PROJECTIONS

In preparing the 2023 projections, Pelindo uses several basic macro assumptions, including the following:

Tabel Asumsi Dasar Makro
Basic Macro Assumptions

Indikator Indicator	Asumsi Makro Ekonomi 2023 Macroeconomic Assumptions for 2023
Pertumbuhan ekonomi Economic growth	5,3%
Tingkat inflasi Inflation rate	3,6%
Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun 10 Year Government Securities (SBN)	7,9%
Kurs Rupiah (per USD) Indonesian Rupiah to USD exchange rate	Rp14.800
Harga minyak mentah (per Barel) Crude oil price (per barrel)	USD90

Sumber: Surat Kementerian BUMN No.S-683/MBU/10/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 perihal Aspirasi Pemegang Saham/ Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023.
Source: The Ministry of SOEs Letter No.S-683/MBU/10/2022 dated October 24, 2022 concerning Aspirations of Shareholders/Capital Owners for the Preparation of the Company's 2023 Work Plan and Budget.

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, Pelindo menyusun proyeksi untuk tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

Based on the above assumptions, Pelindo projections for 2023 are as follows.

PROYEKSI PRODUKSI TAHUN 2023

Uraian proyeksi produksi tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

PRODUCTION PROJECTIONS FOR 2023

The production projections for 2023 are presented as follows.

Tabel Proyeksi Produksi
Production Projection

Uraian Description	Satuan Unit	Proyeksi 2023 2023 Projection
(1)	(2)	(3)
Arus Kapal Ship Traffic	Unit	301.941
	GT	1.248.499.373
Arus Barang Non Petikemas Non-Container Goods Traffic	Ton	161.463.719
	M^3	5.188.567
	Unit	2.282.287
	MMBTU	8.672.400
	Ekor Animals	527.873
Arus Petikemas Container Traffic	Box	13.730.728
	Teus	17.664.908
Arus Penumpang Passenger Traffic	Orang People	13.466.830

PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 2023

Uraian proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

FINANCIAL PROJECTIONS FOR 2023

The projections for the 2023 Consolidated Statement of Financial Position are as follows.

Tabel Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position Projectiona

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	Proyeksi 2023 2023 Projection
POSISI KEUANGAN **FINANCIAL POSITION**	
Aset lancar Current assets	17.824.922
Aset tidak lancar Non-current assets	94.251.639
Total aset Total assets	112.076.560
Liabilitas jangka pendek Short-term liabilities	17.355.068
Liabilitas jangka panjang Long-term liabilities	47.431.004
Total liabilitas Total liabilities	64.786.072
Ekuitas Equity	47.290.488
LABA RUGI **PROFIT and LOSS**	
Pendapatan Usaha Operating revenues	31.819.126
Pendapatan Konstruksi Construction revenues	3.198.009
Laba Usaha Income from operations	6.383.555
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan Income Before Final Tax and Corporate Income Tax	4.966.260
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Income Before Corporate Income Tax	4.583.597
Laba Periode Berjalan Income for the Period	3.819.509
Total Laba Komprehensif Periode Berjalan Total Comprehensive Income for the Period	3.831.022
RASIO KEUANGAN **FINANCIAL RATIOS**	
EBITDA Margin	32,37
Return on Asset (ROA)	3,43
Return on Equity (ROE)	8,35
Return on Invested Capital (ROIC)	6,91
Rasio Kas Financial Ratios	0,63
Rasio Lancar Current Ratio	1,03

PROYEKSI STRUKTUR MODAL TAHUN 2023

Uraian proyeksi struktur modal tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

CAPITAL STRUCTURE PROJECTION FOR 2023

The projections for capital structure in 2023 are as follows.

Tabel Proyeksi Struktur Modal
Capital Structure Projections

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	Proyeksi 2023 2023 Projection
(1)	(2)
Liabilitas Jangka Pendek Current liabilities	17.355.068
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current liabilities	47.431.004
Total Liabilitas Total Liabilities	64.786.072
Total Ekuitas Total Equity	47.290.488
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**112.076.560**

PROYEKSI KEBIJAKAN DIVIDEN TAHUN 2023

Kebijakan dividen didasarkan pada pemenuhan kepentingan Pemegang Saham serta rencana pengembangan usaha. Keputusan penentuan besaran dividen dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Pada tahun 2023, Pelindo berencana membagikan dividen atas laba tahun buku 2022 sebesar Rp1,00 triliun. Besarnya pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2023, penentuan nilai dividen dilakukan saat pembahasan Pra RUPS.

DIVIDEND POLICY PROJECTION FOR 2023

The dividend policy is based on fulfilling the interests of Shareholders and business development plans. The decision to determine the amount of dividends is made at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS). In 2023, Pelindo plans to distribute dividends on profits for the 2022 fiscal year of Rp1.00 trillion. The amount of cash dividend payments will be made through approval at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), the determination of the dividend will be made during a Pre-GMS discussion.

PROYEKSI PEMASARAN TAHUN 2023

Uraian proyeksi pemasaran tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

MARKETING PROJECTIONS IN 2023

A description of the 2023 marketing projection is presented as follows.

Tabel Proyeksi Pemasaran
Marketing Projections

Uraian Description	Satuan Unit	Proyeksi 2023 2023 Projection
(1)	(2)	(3)
REGIONAL 1		
Adanya Kerjasama Baru/ *Addendum* di Regional 1 New Collaboration/Addendum in Regional 1	Kerjasama Baru/ *Addendum* New Cooperation/ Addendum	100%
Pengurusan Pelabuhan Sibolga menjadi Pelabuhan Wajib Pandu Management of Sibolga Port to become Mandatory Pandu Port	Proses Pengurusan Pelabuhan Sibolga menjadi Pelabuhan Wajib Pandu Management Process of Sibolga Port to become Mandatory Pandu Port	100%

Tabel Proyeksi Pemasaran
Marketing Projections

Uraian Description	Satuan Unit	Proyeksi 2023 2023 Projection
(1)	(2)	(3)
Penyesuaian Tarif Pas Pelabuhan Port Pass Tariff Adjustment	Penyesuaian Tarif Pas Pelabuhan Port Pass Tariff Adjustment	2 Cabang 2 branches
Implementasi *Autogate* Pas Pelabuhan Implementation of Autogate Port Pass	Implementasi *Autogate* Pas Pelabuhan Implementation of Autogate Port Pass	100%
REGIONAL 2		
Kerjasama Pelayanan Pemanduan dan Penundaan dengan TUKS PT Pacrim Nusantara Lestari Foods (Cargil Group), PT Sinar Jaya Inti Mulya dan Pertamina di area STS Teluk Semangka pada Pelabuhan Panjang Guidance and Delay Service Collaboration with TUKS PT Pacrim Nusantara Lestari Foods (Cargil Group), PT Sinar Jaya Inti Mulya and Pertamina in STS area of Semangka Bay at Panjang Port	GT	9.266.859
REGIONAL 3		
Kerjasama Pelayanan Bongkar Muat Curah Kering di Probolinggo Cooperation of Dry Bulk Loading and Unloading Services in Probolinggo	Rp miliar Rp billion	5
Kerjasama Pelayanan Bongkar Muat Curah Cair di Tanjung Perak Liquid Bulk Loading and Unloading Service Cooperation at Tanjung Perak	Rp juta Rp million	900
Kerjasama Pelayanan Bongkar Muat Curah Cair di TUKS Gresik Liquid Bulk Loading and Unloading Service Collaboration at TUKS Gresik	Rp juta Rp million	160
Kerjasama Pelayanan Jasa Curah Kering & Lahan di Pulang Pisau Cooperation of Dry Bulk Services & Land in Pulang Pisau	Rp juta Rp million	4
Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Gudang di Pelabuhan Labuan Bajo Collaboration on Utilization of Warehouse Facilities at Labuan Bajo Port	Rp juta Rp million	400
Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Gudang di Pelabuhan Bima Collaboration on Utilization of Warehouse Facilities at Bima Port	Rp juta Rp million	300
Kerjasama Pemanfaatan fasilitas Bangunan di Pelabuhan Benoa Collaboration on Utilization of Building Facilities at Benoa Harbor	Rp juta Rp million	360
REGIONAL 4		
Implementasi KAM KAM implementation	Kegiatan Activity	2
Pengelolaan CRM CRM Management	Kegiatan Activity	1
Optimalisasi lahan *idle* Idle land optimization	Rp	7.776.414.000
Implementasi *Centrillized Ticketing Terminal* (CTT) *System* pada terminal penumpang Implementation of Centrillized Ticketing Terminal (CTT) System at the passenger terminal	Cabang Branch	3
Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Cooperation in Utilization of State Property	Cabang Branch	3
Kerjasama multimoda Multimodal cooperation	Cabang Branch	1

REGIONAL 1

Proyeksi pemasaran Regional 1 di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. *Addendum* Kerjasama Pelayanan Pemanduan dengan PT Djakarta Llyod di Cabang Sibolga.
2. Kerjasama kegiatan *handling* semen merah putih dengan PT Cemindo Gemilang Tbk di Cabang Gunung Sitoli.
3. Pengurusan Pelabuhan Sibolga menjadi Pelabuhan Wajib Pandu dan mengusahakan pelimpahan pemanduan kepada Cabang Sibolga.
4. Penyesuaian Tarif Pas Penumpang di Cabang Tanjung Balai Karimun dan Penyesuaian Tarif Pas Masuk Orang, Penumpang dan Kendaraan di Cabang Sibolga.
5. Implementasi *Autogate* Pas Pelabuhan di Regional 1.

Proyeksi pengelolaan properti Regional 1 di tahun 2022 adalah melakukan MOU/perjanjian kerjasama baru dan perpanjangan kerjasama yang diuraikan sebagai berikut:

1. MOU/Perjanjian Kerjasama Baru
   a. Perjanjian kerjasama baru pemanfaatan Gedung A GPS dengan *subholding* SPMT.
   b. Perjanjian kerjasama baru sewa lahan untuk kegiatan bongkar muat batubara di Cabang Tembilahan.
2. Perpanjangan Kerjasama
   a. Perpanjangan perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan dengan PT Bank Negara Indonesia di Gedung B Grha Pelindo Satu.
   b. Perpanjangan perjanjian kerjasama pemanfaatan ruangan dengan PT Prima Pengembangan Kawasan di Gedung B Grha Pelindo Satu.

REGIONAL 2

Untuk proyeksi pemasaran Regional 2 di tahun 2023 terdapat potensi peningkatan pangsa pasar yaitu peningkatan pendapatan melalui Kerjasama Pelayanan Pemanduan dan Penundaan dengan TUKS PT Pacrim Nusantara Lestari Foods (Cargil Group), PT Sinar Jaya Inti Mulya dan Pertamina di area STS Teluk Semangka pada Pelabuhan Panjang.

REGIONAL 3

Proyeksi Pemasaran Regional 3 di tahun 2023 adalah melakukan kerjasama yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan kerjasama eksisting dengan PT Cheiljedang Indonesia dalam pelayanan bongkar muat curah kering di Tanjung Perak, yang selanjutnya akan dilakukan di Probolinggo.
2. Pengembangan kerjasama eksisting yang telah terjalin dengan PT Industri Nabati Lestari dalam pemanfaatan Gudang di Tanjung Perak di tahun 2022, dimana tahap selanjutnya adalah kerjasama dalam pelayanan bongkar muat curah cair.
3. Pengembangan kerjasama eksisting dengan TUKS di Gresik dengan penambahan cargo curah cair milik PHE WMO.
4. Terjalinnya kerjasama baru dengan PT Sinar Agung Energi di Pulang Pisau dalam pemanfaatan lahan dan bongkar muat curah kering di Pulang Pisau.
5. Terjalinnya kerjasama baru dalam pemanfaatan fasilitas gudang untuk *bag cargo* dengan CV Artha Niaga Gemilang dan PT Anugrah Nuansa Kasih di Pelabuhan Labuan Bajo.
6. Terjalinnya kerjasama baru dalam pemanfaatan fasilitas gudang untuk PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) di Pelabuhan Bima.

REGIONAL 1

Regional 1 marketing projections in 2023 are as follows:

1. Addendum to Cooperation in Guidance Services with PT Djakarta Lloyd at the Sibolga Branch.
2. Cooperation in the handling semen merah putih with PT Cemindo Gemilang Tbk at the Gunungsitoli Branch.
3. Arrangement of Sibolga Port to become a Compulsory Port Pilot and seek the delegation of pilotage to the Sibolga Branch.
4. Adjustment of Passenger Pass Rates at the Tanjung Balai Karimun Branch and Adjustment of Passenger Pass Rates for Persons, Passengers and Vehicles at the Sibolga Branch.
5. Implementation of Autogate Port Pass in Region 1.

The projection for Regional 1 property management in 2022 is to enter into a new MOU/cooperation agreement and extension of cooperation, as follows:

1. MOU/New Cooperation Agreement
   a. New cooperation agreement for utilization of Building A GPS with SPMT subholding.
   b. New cooperation agreement on land lease for coal loading and unloading activities at the Tembilahan Branch.
2. Extension of Cooperation
   a. Extension of the land use cooperation agreement with PT Bank Negara Indonesia in Building B Grha Pelindo One.
   b. Extension of the space utilization cooperation agreement with PT Prima Pembangunan Kawasan in Building B Grha Pelindo One.

REGIONAL 2

For Regional 2 marketing projections in 2023, there is potential for an increase in market share, namely an increase in revenue through the Collaboration of Guidance and Delay Services with TUKS PT Pacrim Nusantara Lestari Foods (Cargil Group), PT Sinar Jaya Inti Mulya and Pertamina in STS area of Teluk Semangka at Panjang Port.

REGIONAL 3

Regional 3 Marketing Projection in 2023 is to carry out the cooperation as follows:

1. Development of the existing cooperation with PT Cheiljedang Indonesia in dry bulk loading and unloading services at Tanjung Perak, which will then be carried out in Probolinggo.
2. Development of the existing cooperation that has been established with PT Industri Nabati Lestari in the utilization of the Warehouse at Tanjung Perak in 2022, where the next stage is cooperation in liquid bulk loading and unloading services.
3. Development of the existing cooperation with TUKS in Gresik with the addition of PHE WMO's liquid bulk cargo.
4. Establishment of a new collaboration with PT Sinar Agung Energi in Pulang Pisau in land use and loading and unloading of dry bulk in Pulang Pisau.
5. Established a new collaboration in utilizing warehouse facilities for bag cargo with CV Artha Niaga Gemilang and PT Anugrah Nuansa Kasih at the Labuan Bajo Port.
6. Establishment of a new collaboration in the utilization of warehouse facilities for PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) at Bima Port.

7. Terjalinnya kerjasama baru dalam pemanfaatan fasilitas bangunan dengan PT Multi Rasa Bogatama di Pelabuhan Benoa.

REGIONAL 4

Proyeksi pemasaran Regional 4 di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. *Key Account Management* dengan melaksanakan survei kepuasan pelanggan pada setiap segmen pelayanan jasa kepelabuhanan serta pelaksanaan pemberian apresiasi kepada pelanggan utama setiap segmen pelayanan.
2. Pengembangan layanan terintegrasi atas pengelolaan pelanggan melalui *Customer Relationship Management* kepada seluruh pelanggan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
3. Untuk meningkatkan pendapatan Perseroan pada tahun 2023, Regional 4 melakukan strategi dengan optimalisasi lahan *idle* yang ada pada wilayah kerja Regional 4. Untuk tahun 2023 ditargetkan pada cabang pada cabang Kendari, Manokwari dan Bitung, dengan asumsi pendapatan masing-masing:
   a. Cabang Kendari (12.000 m^2 x Rp30.000 = Rp360.000.000)
   b. Cabang Manokwari (3.942 m^2 x Rp25.000 = Rp98.550.000)
   c. Cabang Bitung (33.879 m^2 x Rp216.000 = Rp7.317.864.000)
4. Program *Centralized Ticketing Terminal* adalah program standardisasi dan digitalisasi pelayanan terminal penumpang yang mulai dilaksanakan pada tahun 2022 pada 10 cabang Regional 4 dan dianggap berhasil meningkatkan *level of service* dengan menyajikan laporan embarkasi penumpang secara *online* sehingga dapat diakses secara *real time* yang lebih akurat, untuk itu program ini diharapkan untuk dilanjutkan pada cabang lainnya di wilayah kerja Regional 4 dengan dukungan dan kerjasama PT ILCS serta operator kapal setempat.
5. Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara atas aset milik negara yang berbatasan langsung dengan aset milik Pelindo dengan tujuan memaksimalkan pelayanan khususnya pelayanan jasa kapal atas dermaga milik negara.
6. Peningkatan pelayanan penumpang dapat dilaksanakan dengan kerjasama antarmoda laut dan darat dimana kerjasama melibatkan perusahaan angkutan umum darat yang memberikan kemudahan kepada para penumpang debarkasi melalui Pelabuhan Makassar sebagai *pilot project* sampai ke tujuan dengan menurunkan tingkat kepadatan kendaraan dan pengantar penjemput pada Pelabuhan Makassar namun dapat meningkatkan pendapatan dari bagi hasil kerjasama multimoda.

7. Establishment of a new collaboration in the utilization of building facilities with PT Multi Rasa Bogatama at Benoa Port.

REGIONAL 4

Regional 4 marketing projections in 2023 are as follows:

1. Key Account Management by conducting customer satisfaction surveys in each segment of port services as well as providing appreciation to the main customers in each service segment.
2. Development of integrated services for customer management through Customer Relationship Management for all customers of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
3. Increase the Company's revenue in 2023, Regional 4 by carrying out a strategy for optimizing the existing idle land in the Regional 4 work area. For 2023 the target is for branches in the Kendari, Manokwari and Bitung branches, assuming their respective revenues are:
   a. Kendari Branch (12,000 m^2 x Rp30,000 = Rp360,000,000)
   b. Manokwari Branch (3,942 m^2 x Rp25,000 = Rp98,550,000)
   c. Bitung Branch (33,879 m^2 x Rp216,000 = Rp7,317,864,000)
4. The Centralized Ticketing Terminal Program is a program for standardizing and digitizing passenger terminal services, which will begin to be implemented in 2022 at 10 Regional 4 branches and is considered successful in increasing the level of service by presenting passenger embarkation reports online so they can be accessed in real time in a more accurate manner, as It is hoped that this program will be continued in other branches in the Regional 4 working area with the support and cooperation of PT ILCS and local ship operators.
5. Collaboration on Utilization of State Property on state-owned assets that are directly adjacent to Pelindo's assets with the aim of maximizing services, especially ship services on state-owned wharves.
6. Improving passenger services to be carried out through sea and land intermodal cooperation where the cooperation involves public land transportation companies that provide convenience to passengers for disembarkation through Makassar Port as a pilot project to their destination by reducing the level of vehicle congestion and pick-up delivery at Makassar Port can increase revenue from sharing the multimodal cooperation.

PROYEKSI PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2023

Uraian proyeksi pengembangan SDM tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

HR DEVELOPMENT PROJECTION IN 2023

A description of the HR development projections for 2023 is presented as follows.

Tabel Proyeksi Sumber Daya Manusia
Human Resources Projection

(dalam satuan Orang)
(in People)

Uraian Description	**RKAP Tahun 2023** 2023 RKAP
(1)	**(2)**
Posisi Organik **Organic Positions**	
Induk Perusahaan (a) Parent Company (a)	3.297
Penugasan ke *Subholding* (b) On assignment to Subholding (b)	3.623
Penugasan ke Anak Perusahaan Lainnya (c) On assignment to Other Subsidiaries (c)	120
Sub Total Organik Induk Perusahaan (a+b+c) Parent Company Organic Sub Total (a+b+c)	**7.049**
Organik Anak Perusahaan pada *Subholding* (d) Organic Subsidiaries in Subholding (d)	1.947
Organik Anak Perusahaan Lainnya (e) Other Organic Subsidiaries (e)	660
Total Pegawai Organik (a+b+c+d+e) Total Organic Employees (a+b+c+d+e)	**9.656**
Posisi Non Organik, Organik Pemegang Saham Lainnya dan BOD Non-Pelindo **Non-Organic, Other Organic Shareholders and Non-Pelindo BOD Position**	
Induk Perusahaan (f) Parent Company (f)	**3.313**
PKWT (f.1)	26
Tenaga Alih Daya (f.2) Transfer Energy (f.2)	3.287
***Subholding* (g)**	12.063
PKWT (g.1)	1.444
TAD (g.2)	10.590
Pekerja Pemegang Saham Lainnya (g.3) Other Organic Shareholders (g3)	1
BOD Non-Pelindo (g.4)	28
Anak Perusahaan Lainnya (h) **Other Subsidiaries (h)**	**1.542**
PKWT (h.1)	433
TAD (h.2)	1.098
Pekerja Pemegang Saham Lainnya (h.3) Other Shareholder Employees (p.3)	7
BOD Non-Pelindo (h.4)	4
Total Pegawai Non Organik (f) + (g) + (h) Total Non-Organic Employees (f) + (g) + (h)	**16.918**
Jumlah Induk Perusahaan (a) + (f) Total Parent Company (a) + (f)	**6.610**
Jumlah *Subholding* (b) + (d) + (g) Total Subholding (b) + (d) + (g)	**17.642**
Jumlah Anak Perusahaan (c) + (e) + (h) Total Subsidiaries (c) + (e) + (h)	**2.322**
Total	**26.574**

KEBIJAKAN, PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sehubungan dengan penggabungan PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo I), PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Pelindo IV) melakukan penggabungan ke dalam PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo II) sebagai perusahaan hasil penggabungan pada tanggal 1 Oktober 2021, maka penjelasan kebijakan dividen untuk masing-masing Perusahaan (sebelum penggabungan) disajikan sebagai berikut:

1. **Perusahaan (dahulu Pelindo I)**
   Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perusahaan, laba bersih dapat dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen setelah penyisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan undang - undang. Pembagian dividen harus disetujui oleh Pemegang Saham melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan berdasarkan rekomendasi Perusahaan.
2. **Perusahaan (dahulu Pelindo II)**
   Melaksanakan pembayaran dividen setiap tahun berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Sesuai dengan PMK No, 05/ PMK,02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari dividen, pembayaran dividen dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dividen ditetapkan oleh Pemegang Saham. Jumlah dividen yang ditetapkan adalah sebesar persentase tertentu dari laba bersih (setelah pajak) Pelindo II yang diatribusikan kepada Pemegang Saham. Kebijakan dividen yang didasarkan pada pemenuhan kepentingan Pemegang Saham serta rencana pengembangan usaha Pelindo II.
3. **Perusahaan (dahulu Pelindo III)**
   Perusahaan membagikan dividen kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kompetensi inti di bidang jasa pelayanan kepelabuhanan, Pelindo III senantiasa berkomitmen untuk memberikan dividen kepada Pemegang Saham (Kementerian BUMN) serta berupaya memperlancar integrasi logistik dalam upaya mendukung pembangunan dalam lingkup makro ekonomi. Penetapan dividen dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Pengusulan penetapan dividen oleh Perusahaan didasarkan pada kepentingan Perusahaan dengan melihat berbagai hal seperti kelangsungan usaha, strategi yang akan dan sedang dijalankan, serta rencana investasi.
4. **Perusahaan (dahulu Pelindo IV)**
   Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah RI. Penyetoran dividen sepenuhnya menjadi hak Pemerintah. Penentuan besarnya dividen yang disetorkan kepada Pemegang Saham berdasarkan keputusan Kementerian BUMN Selaku RUPS dan kuasa Pemegang Saham.

POLICIES, ANNOUNCEMENTS AND PAYMENT OF DIVIDENDS

DIVIDEND POLICY

In connection with the merger of PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III"), and PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") into PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo II), as the result of the merger on October 1, 2021, the dividend policy for each Company (before the merger) is presented as follows:

1. **Company (formerly Pelindo I)**
   In accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia, and the Company's Articles of Association, net profit can be distributed to Shareholders as dividends after a provision for mandatory reserve funds, as required by law. The dividend distribution must be approved by the Shareholders through an Annual General Meeting of Shareholders (GMS resolution) based on the recommendation of the Company.
2. **Company (formerly Pelindo II)**
   The annual payment of dividends was based on a General Meeting of Shareholders (GMS) resolution, in accordance with PMK No. 05/ PMK.02/2013 concerning Procedures for Depositing Non-Tax State Revenue from dividends, dividend payments are made no later than 1 (one) month after the dividend is determined by the Shareholders. The amount of dividends determined will be a certain percentage of Pelindo II's net profit (after tax) attributable to Shareholders. The dividend policy is based on fulfilling the interests of Shareholders and Pelindo II's business development plans.
3. **Company (formerly Pelindo III)**
   The Company distributed dividends to the Government of the Republic of Indonesia as Shareholders based on a General Meeting of Shareholders (GMS) resolution. As a State-Owned Enterprise (SOE) with core competencies in the field of port services, Pelindo III was committed to providing dividends to Shareholders (Ministry of SOEs), and to facilitating logistics integration in an effort to support development in the macroeconomic sphere. The determination of dividends was carried out by the Shareholders in the GMS. The proposal for determining dividends by the Company was based on the interests of the Company after considering business continuity, strategies that will be and are being implemented, as well as investment plans.
4. **Company (formerly Pelindo IV)**
   The Company is a State-Owned Enterprise (BUMN) whose shares are 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. The payment of dividends is fully the right of the Government. The determination of dividends to be paid to Shareholders was based on a Ministry of SOEs resolution, as the GMS and proxy of the Shareholders.

Pelindo membagikan dividen kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham berdasarkan Keputusan RUPS. Hal ini sebagai bentuk komitmen Pelindo untuk memperlancar rantai pasok maritim dan ekosistem logistik dalam upaya mendukung ekonomi nasional. Pengusulan penetapan dividen didasarkan pada kepentingan Pelindo berdasarkan hal-hal seperti kelangsungan usaha, strategi yang akan dan sedang dijalankan, serta rencana investasi.

Pelindo distributes dividends to the Government of the Republic of Indonesia as Shareholders based on the GMS Decision. This is a form of Pelindo's commitment to expedite the maritime supply chain and logistics ecosystem in an effort to support the national economy. The proposed dividend determination is based on Pelindo's interests based on matters such as business continuity, strategies that will be and are being implemented, and investment plans.

RINCIAN INFORMASI DIVIDEN

Rincian informasi dividen disajikan sebagai berikut.

ANNOUNCEMENT AND PAYMENT OF DIVIDENDS

A description of dividends is presented as follows.

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun 2021-2022

Announcement and Payment of Dividends for 2021-2022

Uraian Description	Tahun 2022	Tahun 2021			
	Perusahaan (dahulu Pelindo I, II, III, IV) Company (formerly Pelindo Pelindo I, II, III, IV)	**Perusahaan (dahulu Pelindo I)** Company (formerly Pelindo I)	**Perusahaan (dahulu Pelindo II)** Company (formerly Pelindo II)	**Perusahaan (dahulu Pelindo III)** Company (formerly Pelindo III)	**Perusahaan (dahulu Pelindo IV)** Company (formerly Pelindo IV)
Dividen Kas (Rp Ribu) Cash Dividend (Rp Thousand)	1.316.854.000	-	560.000.000	-	-
Dividen Non-Kas*) Non-Cash Dividend	-	-	-	-	-
Dividen Kas Per Saham (Rp penuh) Cash Dividend Per Share (Rp full amount)	1.000.000	-	66.076	-	-
Dividen Non-Kas Per Saham*) Non-Cash Dividend Per Share	-	-	-	-	-
Dividend *Pay Out Ratio* (%) Dividend Pay Out Ratio (%)	40,00%	-	47,26%	-	-
Tanggal Pengumuman Announcement Date	18 Mei 2022 May 18, 2022	16 September 2021 September 16, 2021	10 Mei 2021 May 10, 2021	5 Agustus 2021 August 5, 2021	10 Mei 2021 May 10, 2021
Tanggal Pembayaran Payment Date	16 Juni 2022 June 16, 2022	-	3 Juni 2021 June 3, 2021	-	-
Tanggal Pembayaran Dividen Non-Kas*) Payment Date Non-Cash Dividend	-	-	-	-	-

*) Pelindo tidak memiliki dividen non-kas
*) Pelindo does not have non-cash dividends

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Pada tahun 2022, tidak terdapat realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Sehingga Pelindo tidak menyajikan informasi yang meliputi total perolehan dana; rencana penggunaan dana; rincian penggunaan dana; saldo dana; dan tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana.

REALIZATION OF THE USE OF PUBLIC OFFERING PROCEEDS

In 2022, there was no realization of the use of funds public offering results. Pelindo does not serve information covering the total acquisition of funds; plan use of funds; details of the use of funds; fund balance; and the date of approval of the GMS/RUPO for changes use of funds.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, PENGGABUNGAN/ PELEBURAN USAHA, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI HUTANG DAN MODAL

MATERIAL INFORMATION CONCERNING INVESTMENTS, EXPANSIONS, BUSINESS MERGERS/CONSOLIDATIONS, DIVESTMENTS, ACQUISITIONS, AND DEBT AND CAPITAL RESTRUCTURING

INVESTASI

Uraian investasi jangka pendek dan jangka panjang Pelindo tahun 2021-2022 disajikan sebagai berikut.

INVESTMENTS

A description of Pelindo's short-term and long-term investments for 2021-2022 are as follows.

Tabel Investasi
Investments

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
INVESTASI JANGKA PENDEK SHORT-TERM INVESTMENTS				
Total deposito berjangka Total time deposits	3.943.050.108	5.718.327.340	(1.775.277.232)	(31,05%)
Efek yang diperdagangkan Marketable securities	1.891	198.633	(196.742)	(99,05%)
Total	3.943.051.999	5.718.525.973	(1.775.473.974)	(31,05%)
INVESTASI JANGKA PANJANG LONG TERM INVESTMENTS				
Investasi pada entitas asosiasi Investment in associates	3.483.541.212	3.109.069.141	374.472.071	12,04%
Investasi pada penyertaan saham Investment in share of stocks	35.239.244	82.207.761	(46.968.517)	(57,13%)
Investasi pada surat utang Investment in bonds	600.010.734	560.361.975	39.648.759	7,08%
Total	4.118.791.190	3.751.638.877	367.152.313	9,79%

EKSPANSI

Pada tahun 2022, PT Pelabuhan Indonesia telah menjalin kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di beberapa Pelabuhan/Terminal Milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, antara lain sebagai berikut:

1. Pelabuhan Badas, TMT 7 April 2022.
2. Pelabuhan Waingapu, TMT 7 April 2022.
3. Pelabuhan Garongkong, TMT 14 Juni 2022.
4. Pelabuhan Bima, TMT 7 September 2022.

EXPANSIONS

In 2022, PT Pelabuhan Indonesia collaborated on the use of State Property (BMN) in several Ports/Terminals Owned by the Directorate General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation, including the following:

1. Port of Badas, TMT April 7, 2022.
2. Port of Waingapu, TMT April 7, 2022.
3. Garongkong Harbor, TMT June 14, 2022.
4. Port of Bima, TMT September 7, 2022.

PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA

Selama tahun 2022, Pelindo tidak melakukan kegiatan penggabungan/peleburan usaha.

BUSINESS MERGERS/CONSOLIDATIONS

During 2022, Pelindo did not carry out business mergers/ consolidation activities.

DIVESTASI

Selama tahun 2022, Pelindo tidak melakukan kegiatan divestasi.

DIVESTMENTS

During 2022, Pelindo did not carry out divestment activities.

AKUISISI

Selama tahun 2022, Pelindo tidak melakukan kegiatan akuisisi.

ACQUISITIONS

During 2022, Pelindo did not carry out acquisition activities.

RESTRUKTURISASI HUTANG DAN MODAL

Selama tahun 2022, Pelindo tidak melakukan kegiatan restrukturisasi hutang dan modal.

DEBT AND CAPITAL RESTRUCTURING

During 2022, Pelindo did not carry out debt and capital restructuring activities.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha).

Lingkup Transaksi:

Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Material dalam:

1. 1 (satu) kali transaksi; atau
2. Suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.17/POJK.04/2020.

Batasan Nilai:

1. Suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.
2. Transaksi berupa perolehan dan pelepasan atas perusahaan atau segmen operasi dikategorikan sebagai Transaksi Material dalam hal:
   a. Nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka;
   b. Total aset yang menjadi objek transaksi dibagi total aset Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen);
   c. Laba bersih objek transaksi dibagi dengan laba bersih Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen); atau
   d. Pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan pendapatan usaha Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen).
3. Dalam hal transaksi sebagaimana dimaksud pada (1) dan (2) dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang mempunyai ekuitas negatif, transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset Perusahaan Terbuka.

MATERIAL INFORMATION FOR TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

Material Transactions are any transactions carried out by a public company or a controlled company that meets a transaction value limit equal to 20% (twenty percent) or more of the Public Company's equity (Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions and Changes in Business Activities).

Scope of Transactions:

Where the Public Company conducts Material Transactions in:

1. 1 (one) transaction; or
2. A series of transactions for a specific purpose or activity, must comply with the provisions as stipulated in POJK No.17/POJK.04/2020.

Value Limit:

1. A transaction is categorized as a Material Transaction if the transaction value is equal to 20% (twenty percent) or more of the Public Company's equity.
2. Transactions in the form of acquisitions and disposal of companies or operating segments are categorized as Material Transactions when:
   a. The transaction value is equal to 20% (twenty percent) or more of the Public Company's equity;
   b. The total assets that are the object of the transaction divided by the total assets of the Public Company are equal to or more than 20% (twenty percent);
   c. The net profit of the object of the transaction divided by the net profit of the Public Company is equal to or more than 20% (twenty percent); or
   d. The operating income of the object of the transaction divided by the operating income of the Public Company is equal to or more than 20% (twenty percent).
3. In the event that the transactions as referred to in (1) and (2) are carried out by a Public Company that has negative equity, the transaction is categorized as a Material Transaction if the transaction value is equal to 10% (ten percent) or more of the total assets of the Public Company.

TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan

CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS

In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, a Conflict of Interest is the difference between the economic interests of a public company and the personal economic interests of members of

komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.

the board of directors, members of the board of commissioners, majority shareholders, or the controlling shareholders that may harm the public company in question.

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori transaksi benturan kepentingan.

In 2022, there were no transactions that met any of the categories of conflict of interest transactions.

TRANSAKSI AFILIASI

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Afiliasi adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Selanjutnya transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali.

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori transaksi pihak afiliasi.

AFFILIATED TRANSACTIONS

Based on the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, Affiliated means:

1. Familial relationships due to marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically;
2. Relationships between the party and the employee, director, or commissioner of the same party;
3. Relationships between 2 (two) companies where there are 1 (one) or more members on both board of directors or board of commissioners;
4. Relationships between the company and parties that directly or indirectly control or are controlled by the company;
5. Relationships between 2 (two) companies controlled, directly or indirectly, by the same party; or
6. Relationships between the company and the majority shareholders.

Affiliated transactions related to any activity and/or transaction carried out by a public company or controlled company with an Affiliate of a public company or Affiliate of a Member of the Board of Directors, Member of the Board of Commissioners, Majority or Controlling Shareholder, including all activities and/or transactions carried out by the Public Company or Controlling Company for the benefit of Affiliates of the Public Company or Affiliates of members of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners, Majority or Controlling Shareholders.

In 2022 there were no transactions that met any of the categories of affiliated party transactions.

TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 44 dalam Laporan Keuangan. Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

The Company and its subsidiaries have related party transactions in accordance with the definition described in PSAK 7. These transactions are carried out on terms agreed by both parties, which may not be the same as other transactions made with unrelated parties. Material transactions and balances with related parties are disclosed in Note 44 of the Financial Statements. Unless specifically disclosed as related parties, the other parties mentioned in the notes to the consolidated financial statements are unrelated parties.

Sifat Relasi Nature of Relationship	Nama Pihak Berelasi Related Party Name	Jenis Transaksi Type of Transaction
Pemegang Saham Shareholder	Negara Republik Indonesia	Jasa konsesi Concession services

Sifat Relasi Nature of Relationship	Nama Pihak Berelasi Related Party Name	Jenis Transaksi Type of Transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah Entities related to the Government	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan dan pinjaman Banking and loan services
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jasa perbankan dan pinjaman Banking and loan services
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Jasa Perbankan Banking services
	PT Bank Mandiri Taspen	Jasa Perbankan Banking services
	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT Wika Haka Joint Operation	Jasa Pembangunan Development Services
	PT Pertamina (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and operational activities services
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)Tbk	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and operational activities services
	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Jasa Klasifikasi dan Registrasi Kapal Ship Classification and Registration Services
	PT Sucofindo (Persero)	Jasa pemeriksaan Inspection services
	PT Brantas Abipraya (Persero)	Jasa Pembangunan Development Services
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Jasa Pembangunan Development Services
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penjualan jasa Sales services
	PT Semen Padang (Persero)	Penjualan jasa Sales services
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and operational activities services
	PT Nusantara Regas	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and operational activities services
	PT Pertamina Patra Niaga	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and operational activities services
	Koperasi Karyawan TPK KOJA	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and operational activities services
	Koperasi Pegawai Maritim	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and operational activities services
	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	Jasa Pensiun Pension Services
	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Jasa Pembangunan Development Services
	PT Hutama Karya (Persero)	Jasa Pembangunan Development Services

Sifat Relasi Nature of Relationship	Nama Pihak Berelasi Related Party Name	Jenis Transaksi Type of Transaction
	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Penjualan jasa Sales Services
	Direktorat Jenderal Pajak	Perpajakan Taxation
	Badan Layanan Umum Sekretariat, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Pinjaman Loans
	PT Nindya Karya (Persero)	Jasa Pembangunan Development Services
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Jasa Pembangunan Development Services
	Koperasi Pegawai PT Pelindo III	Alih Daya Transfer of Power
	PT Surveyor Indonesia	Jasa pemeriksaan Inspection Services
	PT Danareksa (Persero)	Jasa Keuangan Inspection Services
	PT Sarana Bandar Nasional	Jasa Bongkar Muat Loading and Unloading Services
	BPKD Provinsi DKI Jakarta	Penjualan jasa Sales services
	PT Yodya Karya (Persero)	Konsultan Consultant
	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Jasa Pembangunan Development Services
	PT Krakatau Engineering Amarta	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and operational activities services
	PT Indonesia Power	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and operational activities services
	PT Jasa Marga Tollroad Maintenance	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and operational activities services
	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pinjaman Loans
	PT Virama Karya (Persero)	Jasa pembangunan Development Services
	PT Bukit Asam Tbk	Penjualan jasa Sales Services
	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Penjualan jasa Sales Services
	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Penjualan jasa Sales Services
	PT Dharma Lautan Nusantara	Penjualan jasa Sales Services
	Tentara Nasional Indonesia	Penjualan jasa Sales Services
	Instansi Pemerintah	Penjualan jasa Sales Services
	BPJS Kesehatan	Penjualan jasa Sales Services

Sifat Relasi Nature of Relationship	Nama Pihak Berelasi Related Party Name	Jenis Transaksi Type of Transaction
	PT BNI Life Insurance	Penjualan jasa Sales Services
	PT Pertamina Trans Kontinental	Penjualan jasa Sales Services
	PT Semen Tonasa	Penjualan jasa Sales Services
	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Penjualan jasa Sales Services
	Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3")	Jasa Pensiun/ Pension Services
	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Penjualan Jasa Sales Services
	PT Petrokimia Gresik	Penjualan jasa Sales Services
	PT Prima Citra Nutrindo	Jasa Boga Catering Services
	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Penjualan jasa Sales Services
	PT PP Presisi Tbk	Jasa pembangunan Development Services
	PT Bukit Prima Bahari	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and Operational Activities Services
	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Pinjaman Loans
	PT Taspen (Persero)	Penjualan jasa Sales Services
	BPJS Ketenagakerjaan	Penjualan jasa Sales Services
	Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut	Penjualan jasa Sales Services
	PT Daya Radar Utama	Penjualan jasa Sales Services
	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Penjualan jasa Sales Services
	PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and Operational Activities Services
	Lembaga Manajemen Aset Negara	Piutang pembebasan Lahan Land Acquisition Receivables
	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	Penjualan jasa Sales Services
	PT Asuransi Kredit Indonesia	Jasa asuransi Insurance Services
	PT Asuransi Jiwasraya	Jasa asuransi Insurance Services
	PT Pertamina Hulu Energi	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and Operational Activities Services
	PT Waskita Beton Precast Tbk	Jasa pembangunan Development Services

Sifat Relasi Nature of Relationship	Nama Pihak Berelasi Related Party Name	Jenis Transaksi Type of Transaction
	PT Asuransi Jasa Indonesia	Jasa asuransi Insurance Services
	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Jasa pembangunan Development Services
	PT Berdikari (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and Operational Activities Services
	PT Terminal Nilam Utara	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and Operational Activities Services
	PT Jawa Satu Power	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and Operational Activities Services
Entitas asosiasi Associated entity	JICT	Sewa dan royalti Rent and Royalties
	NPCT1	Investasi Investment
	RSP	Jasa Kesehatan Health Services
	PHC	Jasa Kesehatan Health Services
	KSO TPK KOJA	Penjualan Sales
	BKMS	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional Sales and Operational Activities Services
	Ambapers	Penjualan jasa Sales Services

KEWAJARAN TRANSAKSI

Transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan secara wajar sesuai dengan kepentingan Perseroan (*Arm's Length Principle*). Transaksi telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bebas dari konflik kepentingan.

TRANSACTION FAIRNESS

All transactions with related parties have been carried out fairly in accordance with the interests of the Company (Arm's Length Transaction). The transactions carried out comply with the laws and regulations and are free from conflicts of interest.

ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi dilaksanakan atas dasar alasan kebutuhan usaha Pelindo serta ditujukan untuk meningkatkan kinerja Pelindo.

REASONS FOR THE TRANSACTION

All transactions with related parties are carried out on the basis of Pelindo's business needs and are aimed at improving Pelindo's performance.

REALISASI (NILAI) TRANSAKSI

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut.

TRANSACTION REALIZATION (VALUE)

The significant accounts with related parties (government, government entities or others) are as follows.

Tabel Realisasi (Nilai) Transaksi Pihak Berelasi
Realization (Value) of Related Party Transactions

(dalam jutaan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	31 Desember 2022 December 31, 2022		31 Desember 2021 December 31, 2021	
	Total	Persentase Percentage (%)	Total	Persentase Percentage (%)
Kas dan setara kas Percentage				
Bank				
Rupiah	4.394.220.513	3,72	3.725.987.853	3,20
Dolar AS	1.495.195.477	1,27	518.814.309	0,45
Deposito berjangka				
Rupiah	6.377.884.801	5,38	7.190.688.390	6,18
Dolar AS	168.988.936	0,15	161.894.623	0,13
Investasi jangka pendek Time deposits				
Deposito berjangka Time deposits	3.923.050.108	3,32	5.718.327.340	4,92
Piutang usaha Trade receivables	319.681.316	0,27	277.437.076	0,24
Piutang Lain-lain Other receivables	392.181.781	0,33	1.153.378.016	0,97
Pendapatan masih akan diterima Accrued revenues	107.559.957	0,09	33.383.321	0,03
Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loans	103.106.529	0,14	133.296.919	0,18
Utang usaha Trade payables	1.092.012.208	1,43	1.926.350.211	2,60
Uang untuk diperhitungkan Advances from customers	8.286.359	0,01	8.064.950	0,00
Uang titipan pelanggan Deposits from customers	75.209.277	0,10	65.132.073	0,09
Liabilitas jangka pendek lainnya Other Current Liabilities	110.098.021	0,14	1.001.145.577	1,24
Liabilitas jangka panjang lainnya Other Non-current Liabilities	469.347.513	0,62	466.538.398	0,63

Rincian nama pihak terkait realisasi (nilai) transaksi pihak berelasi disajikan pada catatan atas Laporan Keuangan No. 44 yang terlampir pada Laporan Tahunan ini. Transaksi berelasi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Details of the names of the parties related to the realization (value) of related party transactions are presented in note No. 44 in the Financial Statements attached to this Annual Report. These related transactions are business activities carried out to generate business income and are carried out routinely, repeatedly, and/or continuously.

KEBIJAKAN MEKANISME *REVIEW* TRANSAKSI

Setiap transaksi dengan pihak berelasi harus melalui mekanisme *review* sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi, dilakukan dengan syarat normal dan wajar (*Arm's Length Principle*). Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Persyaratan dan kondisi transaksi dengan pihak berelasi secara umum dilakukan sebagaimana dengan pihak ketiga yang di *review* oleh Komite Audit serta wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

TRANSACTION REVIEW MECHANISM POLICY

All transactions with related parties must go through a review mechanism in accordance with what has been determined by the Company. All transactions and significant balances with related parties are carried out on normal and fair terms. Transactions with related parties are carried out based on terms agreed by both parties, where these terms may not be the same as transactions made with unrelated parties. The terms and conditions of transactions with related parties are carried out as with those with third parties, and are reviewed by the Audit Committee and must obtain approval from the Board of Commissioners.

PEMENUHAN PERATURAN TERKAIT

Selama tahun 2022, tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi.

COMPLIANCE WITH RELATED REGULATIONS

During 2022, there were no violations of laws and regulations related to transactions with related parties.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAKNYA

Selama tahun 2022, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan aktivitas operasional Pelindo dan dampaknya terhadap Laporan Keuangan.

CHANGES IN LEGISLATION AND THE IMPACT

During 2022, there are no changes to laws and regulations that had a significant effect on the implementation of Pelindo's operational activities and an impact on the Financial Statements.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penerapan standar akuntansi keuangan dilakukan untuk mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang berlaku dalam tahun berjalan. Grup menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, termasuk standar yang direvisi. Berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup:

Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual

Amendemen PSAK 22 Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. Secara umum Amendemen PSAK 22 ini:

1. Menambahkan deskripsi terkait "liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK 30" yang dinyatakan dalam paragraf 21A-21C.
2. Mengubah paragraf 23 dengan mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang diakui pada tanggal akuisisi.
3. Menambahkan paragraf 23A terkait definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

Amendemen ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan dan amendemen ini tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Grup pada saat diadopsi untuk pertama kali.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

The application of financial accounting standards is carried out to comply with Statements of Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) that apply in the current year. The Group first adopts all new standards and/or revised policies that are effective for the period started on or after January 1, 2022, including revised standards. The following affects the consolidated financial statements Group:

Amendments to PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to the Conceptual Framework

Combinations regarding Reference to the Conceptual Framework clarifies the interactions between PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 and the Conceptual Framework for Financial Reporting.

1. Added a description regarding "liabilities and contingent liabilities within the scope of PSAK 57 or ISAK 30", as stated in paragraphs 21A-21C.
2. Amended paragraph 23 by clarifying the contingent liabilities recognized at the acquisition date.
3. Added paragraph 23A regarding the definition of contingent assets and their accounting treatment.

This amendment became effective on January 1, 2022 with early adoption permitted and the amendments are not expected to have an impact on the Group's financial reporting when they are first adopted.

Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Mengganggu - Biaya Pemenuhan Kontrak

Amendemen PSAK 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari:

1. Biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan;
2. Alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

Amendemen ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan dan amendemen ini tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Grup pada saat diadopsi untuk pertama kali.

Penyesuaian Tahunan 2020 – PSAK 71: Instrumen Keuangan

Amendemen ini mengklarifikasi biaya yang diperhitungkan entitas dalam mengevaluasi apakah persyaratan yang dimodifikasi dari suatu liabilitas keuangan menyebabkan penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Biaya tersebut hanya mencakup yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk *fee* yang dibayarkan atau diterima baik oleh peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

Amendemen ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan namun tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Grup pada saat diadopsi untuk pertama kali.

Penyesuaian Tahunan 2020 – PSAK 73: Sewa

Amendemen terhadap Contoh Ilustrasi 13 yang merupakan bagian dari PSAK 73 menghilangkan dari contoh ilustrasi penggantian perbaikan properti sewaan oleh pesewa untuk mengatasi potensi kebingungan mengenai perlakuan insentif sewa yang mungkin timbul karena cara insentif sewa diilustrasikan dalam contoh tersebut.

Amendemen ini diterapkan secara prospektif terhadap pengukuran nilai wajar pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan pertama yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan namun amendemen ini tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Grup pada saat diadopsi untuk pertama kali.

TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara terdapat tiga aspek penilaian yaitu aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi. Untuk indikator aspek keuangan dan aspek administrasi indikatornya sudah ditentukan di dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, sedangkan untuk aspek operasional disesuaikan dengan bisnis Perseroan.

Amendments to PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets regarding Interfering Contracts - Contract Fulfillment Costs

Amendments to PSAK 57 stipulated that the cost of fulfilling the contract consists of costs that are directly related to the contract. Costs directly related to the contract consist of:

1. The incremental costs of fulfilling these contracts, and;
2. Allocation of other costs directly related to fulfilling the contracts.

This amendment became effective on January 1, 2022 with early adoption permitted and the amendments are not expected to have an impact on the Group's financial reporting when they are first adopted.

2020 Annual Adjustment – PSAK 71: Financial Instruments

This amendment clarifies the costs an entity can take into account in evaluating whether the modified terms of a financial liability result in the derecognition of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. These costs only include those paid or received between the borrower and the lender, including fees paid or received by either the borrower or the lender on behalf of the other party.

This amendment became effective on January 1, 2022 with early adoption permitted and the amendments are not expected to have an impact on the Group's financial reporting when they are first adopted.

2020 Annual Adjustment – PSAK 73: Leases

The amendment to Example Illustration 13 as part of PSAK 73 removes from the illustrative example the replacement of a leased property repair by a lessee to address potential confusion regarding the treatment of lease incentives that may arise because of the way rental incentives are illustrated in the example.

This amendment is applied prospectively to fair value measurement at or after the start of the first annual reporting period commencing on or after January 1, 2022, with early adoption permitted and the amendments are not expected to have an impact on the Group's financial reporting when they are first adopted.

COMPANY HEALTH LEVEL

Based on the Decree of the Minister of BUMN No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning level assessment There are three aspects to the health of State Owned Enterprises assessment namely financial aspects, operational aspects and aspects administration. For indicators of financial aspects and aspects administrative indicators have been determined in the letter Decree of the Minister of BUMN No. KEP-100/MBU/2002, meanwhile for operational aspects adjusted to the Company's business.

Tabel Realisasi Tingkat Kesehatan Perseroan
Realization of Company Health Level

No.	Indikator Indicator	Bobot Weight	2022	
			RKAP	Realisasi Realization
I.	**ASPEK KEUANGAN** FINANCIAL ASPECT			
	Return on Equity (ROE)	15,00	7,50	10,50
	Return on Investment (ROI)	10,00	9,00	6,00
	Rasio Kas *(Cash Rasio)* Cash Ratio	3,00	3,00	3,00
	Rasio Lancar (*Current Rasio*)	4,00	4,00	2,50
	Collection Period	4,00	4,00	4,00
	Perputaran Persediaan *(Inventory Turnover)* Inventory Turnover	4,00	4,00	4,00
	Perputaran Total Aset *(Total Asset Turnover)* Total Asset Turnover	4,00	1,50	1,50
	Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset Equity to Total Assets Ratio	6,00	5,50	6,00
	SKOR UNTUK ASPEK KEUANGAN FINANCIAL ASPECT SCORE	**50,00**	**38,50**	**37,50**
II.	**ASPEK OPERASIONAL** OPERATIONAL ASPECT			
	Waiting Time For Pilot	9,00	9,00	9,00
	Tingkat Efektivitas Tambatan Petikemas Container Mooring Effectiveness Level	9,00	9,00	9,00
	Yard Occupancy Ratio Petikemas Container B/M Productivity	9,00	9,00	9,00
	Produktivitas B/M Petikemas Container Yard Occupancy Ratio	8,00	8,00	8,00
	SKOR UNTUK ASPEK OPERASIONAL OPERATIONAL ASPECT SCORE	**35,00**	**35,00**	**35,00**
III.	**ASPEK ADMINISTRATIF** ADMINISTRATIVE ASPECT			
	Laporan Perhitungan Tahunan Annual Report Calculation	3,00	3,00	3,00
	Rancangan RKAP RKAP draft	3,00	3,00	3,00
	Laporan Periodik Periodic Report	3,00	3,00	3,00
	Efektivitas Penyaluran Dana Funds Disbursement Effectiveness	3,00	3,00	3,00
	Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Loan Repayment Collectability	3,00	2,00	3,00
	SKOR UNTUK ASPEK ADMINISTRATIF ADMINISTRATIVE ASPECT SCORE	**15,00**	**14,00**	**15,00**
	TOTAL SKOR TOTAL SCORE	**100,00**	**87,50**	**87,50**
	KATEGORI CATEGORY		**SEHAT** **AA**	**SEHAT** **AA**

Skor PT Pelabuhan Indonesia untuk realisasi tahun 2022 sebesar 87,50 yang berada dalam kategori SEHAT dengan nilai AA.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Kinerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) *Group* dapat bertahan di tengah dinamika tantangan eksternal dan domestik. Sejumlah tantangan eksternal dan domestik yang mempengaruhi kinerja operasional dan finansial PT Pelabuhan Indonesia (Persero) antara lain:

1. **Kondisi Pasar dan Peningkatan Persaingan Usaha pada Lini Bisnis Non-Petikemas dan Jasa Maritim**
   Kondisi pasar pada lini bisnis pengelolaan dan pelayanan Terminal Non-Petikemas merupakan pasar yang terfragmentasi (*fragmented market*), tidak ada satu pun Perusahaan atau Organisasi yang memiliki pengaruh yang memadai untuk menggerakkan industri pengelolaan dan pelayanan Non-Petikemas ke arah tertentu. Hal ini memunculkan tantangan bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) khususnya Klaster Bisnis Non-Petikemas dalam meningkatkan pangsa pasar (*market share*) domestik. Klaster Bisnis Non-Petikemas PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menginisiasi sejumlah kolaborasi dengan pelaku bisnis Swasta dan/atau BUMN lain dalam mengkonsolidasikan bisnis untuk memperoleh skala ekonomi dan pengembangan bisnis. Pada lini bisnis Jasa Maritim, khususnya Layanan Pemanduan, terdapat peningkatan persaingan usaha dengan bertambahnya pelaku bisnis yang memiliki izin Badan Usaha Pelabuhan Pemanduan dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).
2. **Permasalahan Lahan dan Penyelesaian Balik Nama dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pasca Penggabungan**
   Terdapat sejumlah aktivitas peningkatan status kepemilikan aset dan penyelesaian sengketa aset lahan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) antara lain: proses sertifikasi aset hasil reklamasi di Cabang Pelabuhan Belawan dan Cabang Pelabuhan Dumai untuk dapat dikomersialisasi, komunikasi dan penyelesaian sengketa lahan di Belawan bersama dengan Badan Pertanahan Nasional, melanjutkan proses sertifikasi lahan di Terminal Pelabuhan Gilimas tahap 2, penyelesaian penggunaan aset lahan Perusahaan oleh warga di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) Gresik serta pembebasan lahan. Dalam hal Penyelesaian Balik Nama dan BPHTB Pasca Penggabungan, Hingga akhir tahun 2022, sebanyak 61 Cabang dari target 76 Cabang telah menerima SKB (Surat Keterangan Bebas) BPHTB dari BAPENDA setempat.
3. **Penyelesaian Perizinan dan Konsesi**
   Terdapat sejumlah aktivitas terkait penyelesaian perizinan dan konsesi Perusahaan antara lain pengurusan pelimpahan pemanduan di Perairan Wajib Pandu Kelas I Belawan, pengurusan peningkatan status perairan wajib pandu dan pengurusan pelimpahan pemanduan Pelabuhan Sibolga, penyelesaian konsesi pelimpahan pemanduan di Nipah Transit Anchorage Area (NTAA) pada *Subholding* Jasa Maritim serta penyusunan Kajian Hukum Internasional oleh *Subholding* Jasa Maritim sebagai langkah dalam

PT Pelabuhan Indonesia's score for the realization in 2022 was 87.50, in the HEALTHY category with an AA value.

BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

MATTERS THAT COULD POTENTIALLY INFLUENCE BUSINESS CONTINUITY

The performance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) group can survive amidst the dynamics of external and domestic challenges. A number of external and domestic challenges that can affect PT Pelabuhan Indonesia (Persero) operational and financial performance include:

1. **Market Conditions and Increases in Business Competition in the Non-Container and Maritime Services Business Lines**
   Market conditions in the non-container terminal management and service business line are fragmented markets, with no single company or organization possessing sufficient influence to move the non-container management and service industry in a certain direction. This poses a challenge for PT Pelabuhan Indonesia (Persero), especially as the Non-Container Business Cluster is increasing domestic market share. The PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Non-Container Business Cluster has initiated a number of collaborations with private businesses and/or other SOEs in consolidating businesses to gain economies of scale and business development. In the Maritime Services business line, particularly Pilotage Services, there is an increase in business competition with an increasing number of businesses with Permits for Port Pilotage and Terminal Business for Self Interest (TUKS).
2. **Land Issues and Post Merger Land and Building Rights Acquisition Fees and Completion of Transfer of Names and Fees (BPHTB)**
   There are a number of activities to increase the status of asset ownership and settle land asset disputes by PT Pelabuhan Indonesia (Persero), including: the process of certifying reclamation proceeds at the Belawan Port Branch and Dumai Port Branch for commercialization, communication and settlement of land disputes in Belawan with the National Land Agency, continuing the Phase 2 land certification process at the Gilimas Port Terminal, completing the use of the Company's land assets by residents in the Gresik Port Working Area (DLKr), and land acquisition. For the Completion of Transfer of Names and BPHTB Post Merger, by the end of 2022, 61 of the target 76 Branches received BPHTB Free Certificates (SKB) from the local BAPENDA.
3. **Licensing and Concession Completion**
   There are a number of activities related to the completion of the Company's licensing and concessions, including the management of the transfer of pilotage in Belawan Class I Compulsory Waters, the management for upgrading the status of mandatory pilotage waters, and the arrangement for handover of pilotage in Sibolga Port, the completion of pilotage delegation concessions in the Nipah Transit Anchorage Area (NTAA) in the Service Subholding Maritime Affairs, and the preparation of the International Law Study

peningkatan status perairan Iyu Kecil-Nongsa sehingga dapat dasar untuk penetapan area Wajib Pandu.

4. **Harga Bahan Bakar Minyak**
   Rata-rata harga solar industri sepanjang tahun 2022 sebesar Rp20.492/liter atau meningkat dibandingkan dengan rata-rata harga solar industri pada tahun 2021 yang sebesar Rp12.042/liter.
5. **Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Global**
   Konflik geopolitik dan kondisi makro ekonomi global yang melemah secara umum berdampak pada rantai pasokan global. Pertumbuhan perdagangan global melambat sebagai respon terhadap inflasi yang tinggi, pola konsumen endemik, dan pertumbuhan ekonomi global yang lebih lemah. *Drewry Maritime Research* dalam *Drewry's Port and* Terminal Insight Kuartal IV tahun 2022 merevisi proyeksi *throughput* pelabuhan dengan menurunkan proyeksi pertumbuhan. UNCTAD *Global Trade Update* Desember 2022, mencatat bahwa pertumbuhan perdagangan global telah berubah negatif pada paruh kedua tahun 2022. Penilaian UNCTAD tentang perdagangan saat ini menunjukkan bahwa nilai perdagangan global akan menurun pada Kuartal IV tahun 2022 baik untuk barang maupun jasa. Perkembangan aktivitas industri manufaktur global di Desember 2022 melanjutkan kontraksi dan mencapai level terendah dalam dua tahun terakhir. Potensi kenaikan tingkat bunga di negara maju masih cukup besar dan akan menekan likuiditas global. Dengan penurunan prospek ekonomi global dan perbaikan sisi suplai mendorong tren penurunan harga komoditas ungulan, terutama komoditas energi. Dampak perang antara Rusia dan Ukraina, melemahnya ekonomi global dan dilakukan *lockdown* di China pada tahun 2022 juga mempengaruhi ketercapaian arus petikemas di bawah RKAP.

by the Maritime Services Subholding as a step to improving the status of the Iyu Kecil-Nongsa waters so they can form the basis for determining the Compulsory Tugboat areas.

4. **Fuel Prices**
   The average industrial diesel price throughout 2022 was Rp20,492/liter, an increase compared to the average industrial diesel price in 2021 of Rp12,042/liter.
5. **Slowdown in Global Economic Growth**
   Geopolitical conflicts and weakening global macroeconomic conditions generally impacted global supply chains. Global trade growth slowed down due to high inflation, endemic consumer patterns, and weaker global economic growth. Drewry Maritime Research in the Drewry's Port and Terminal Insight in the fourth quarter of 2022 revised the port throughput projection by lowering the growth projection. UNCTAD Global Trade Update December 2022, noted that global trade growth had turned negative in the second half of 2022. UNCTAD's current assessment of trade indicates that total global trade will decline in the fourth quarter of 2022 for both goods and services. Developments in global manufacturing industry activity in December 2022 continued to contract and reached their lowest level in the last two years. The potential for an increase in interest rates in developed countries is still high, and will put pressure on global liquidity. The declining global economic prospects and increases in the supply side has resulted in a downward trend in the prices of prime commodities, especially energy commodities. The impact of the conflict between Russia and Ukraine, the weakening global economy and the implementation of a lockdown in China in 2022 also affected the container traffic achievement of in the RKAP.

Adapun kinerja finansial PT Pelabuhan Indonesia (Persero) antara lain diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan usaha terealisasi Rp29,70 triliun atau tercapai 98% dari RKAP tahun 2022 dan naik sebesar 3% dari realisasi tahun 2021. Pelayanan kapal internasional tidak tercapai karena pembatasan ekspor CPO dan batubara pada awal tahun. Pendapatan petikemas tidak tercapai karena dampak dari *lockdown* China dan Perang Rusia-Ukraina.
2. Beban usaha terealisasi Rp23,15 triliun atau tercapai 99% dari RKAP tahun 2022 dan mengalami peningkatan sebesar 3% dari realisasi tahun 2021. Beban bahan terealisasi 33% di atas RKAP dan naik 27% dari tahun lalu karena kenaikan harga BBM sepanjang tahun 2022. Beban KSMU terealisasi 3% di atas RKAP.
3. EBITDA terealisasi Rp10,23 triliun atau tercapai 97% dari RKAP tahun 2022 dan meningkat sebesar 8% dari realisasi tahun 2021. EBITDA terealisasi di bawah target RKAP karena laba usaha hanya tercapai 94% dari RKAP yang disebabkan oleh pendapatan kapal dan petikemas tidak tercapai dan realisasi beban bahan BBM dan KSMU di atas RKAP.
4. Total aset terealisasi Rp118,35 triliun tercapai 105% dari RKAP dan meningkat sebesar 2% dari realisasi tahun sebelumnya. Total aset terealisasi di atas RKAP karena saldo kas yang masih tinggi akibat dari penyerapan investasi tahun 2022 yang di bawah RKAP serta belum terealisasinya penjualan PT CTP sehingga JTCC masih tercatat sebagai aset.

The financial performance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is as follows:

1. Realized operating revenue of Rp29.70 trillion, or 98% of the 2022 RKAP, and an increase of 3% from the 2021 realization. International ship services were not achieved due to restrictions on CPO and coal exports at the beginning of the year. Container revenue was not achieved due to the impact of China's lockdown and the Russo-Ukrainian Conflict.
2. Realized operating expenses of Rp23.15 trillion, or 99% of the 2022 RKAP, and an increase of 3% from the 2021 realization. Material expenses realized were 33% above the RKAP, an increase of 27% from last year due to the increase in fuel prices throughout 2022. KSMU expenses realized 3% above the RKAP.
3. Realized EBITDA of Rp10.23 trillion, or 97% of the 2022 RKAP, and an increase of 8% from the 2021 realization. EBITDA was below the RKAP target due to operating profit only achieving 94% of the RKAP due to ship and container revenue not being achieved and the realization of fuel and KSMU material costs being above the RKAP.
4. Total realized assets of Rp118.35 trillion, or 105% of the RKAP, an increase of 2% from the previous year's realization. The total assets were above the RKAP due to the cash balance still being high as a result of absorbing investments in 2022 being below the RKAP, and the sale of PT CTP had not been realized so that JTCC was still recorded as an asset.

5. Total liabilitas terealisasi Rp75,55 triliun atau tercapai 113% dari RKAP tahun 2022 dan naik 2% dari realisasi tahun 2021. Total liabilitas terealiasi di atas RKAP dan meningkat dari tahun lalu karena karena belum terealisasinya penjualan PT CTP sehingga utang usaha dan pinjaman terkait JTCC masih tercatat sebagai liabilitas Perseroan.
6. Total ekuitas terealisasi Rp42,80 triliun atau tercapai 94% dari RKAP tahun 2022 dan naik 2% dari tahun 2021. Realisasi nilai ekuitas di bawah RKAP karena terdapat pembayaran dividen tahun buku 2021 sebesar Rp1,3 triliun serta peningkatan OCI akibat diterapkannya *hedge accounting* sesuai PSAK 71.
7. Saldo kas terealisasi Rp13,60 triliun atau tercapai 135% dari RKAP tahun 2022 dan naik 5% dari realisasi tahun 2021. Saldo kas terealisasi di atas RKAP karena rendahnya realisasi pembayaran investasi sejalan dengan *progress* investasi yang masih di bawah target.

Beberapa hal penting dari Laporan Tahun 2022 antara lain:
1. Dampak perang antara Rusia dan Ukraina, serta melemahnya ekonomi global dan dilakukan *lockdown* di China pada tahun 2022 mempengaruhi ketercapaian arus petikemas di bawah RKAP.
2. Rata-rata harga solar industri sepanjang tahun 2022 sebesar Rp20.492/liter atau meningkat dibandingkan dengan rata-rata harga solar industri pada tahun 2021 yang sebesar Rp12.042/liter.
3. Realisasi investasi di bawah RKAP dikarenakan mayoritas *progress* fisik investasi strategis seperti Makassar *New Port* hanya terealisasi 24,62% dari RKAP, Terminal Kalibaru Utara Tahap I hanya terealisasi 49,36% dari RKAP, Pengembangan Pelabuhan Benoa hanya terealisasi 42,60% dari RKAP, Pekerjaan Lanjutan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa hanya terealisasi 42,90% dari RKAP serta Pembangunan Jalan Akses Timur Pelabuhan Kalibaru terealisasi 143,62% dari RKAP.
4. Pelindo berhasil mencapai skor KPI sebesar 103,71% pada tahun 2022, sehingga secara keseluruhan dapat memenuhi target ditetapkan pada tahun 2022.

Berdasarkan hal-hal yang dijabarkan di atas tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Pelindo. Manajemen menganalisa bahwa meskipun terdapat kendala-kendala yang tengah dihadapi oleh Pelindo, hal tersebut masih dapat diakomodir dengan menggunakan inisiatif strategis yang tepat dan dengan utilisasi sumber daya yang optimal, sehingga kelangsungan usaha Pelindo dapat terjaga dengan baik.

5. Total realized liabilities of Rp75.55 trillion, or 113% of the 2022 RKAP, an increase of 2% from the 2021 realization. Total realized liabilities were above the RKAP and increased from last year due to the fact that the sale of PT CTP had not been realized so that JTCC trade payables and related loans were still recorded as a liability of the Company.
6. Total realized equity of Rp42.80 trillion, or 94% of the 2022 RKAP, an increase of 2% from 2021. Realization of total equity was below the RKAP due to dividend payments for the 2021 fiscal year of Rp1.3 trillion, and an increase in OCI due to the implementation of hedge accounting in accordance with PSAK 71.
7. Realized cash balance of Rp13.60 trillion, or 135% of the 2022 RKAP, an increase of 5% from the 2021 realization. The realized cash balance was above the RKAP due to the low realization of investment payments in line with investment progress still being below target.

Other important matters from the 2022 Report include:
1. The impact of the conflict between Russia and Ukraine, as well as the weakening global economy and the lockdown in China in 2022 affected the container traffic achievement in the RKAP.
2. The average price of industrial diesel throughout 2022 was Rp20,492/liter or an increase compared to the average price of industrial diesel in 2021 of Rp12,042/liter.
3. Realization of investments in the RKAP as the majority of the physical progress of strategic investments such as the Makassar New Port only realizing 24.62%, North Kalibaru Terminal Phase I only realizing 49.36%, Benoa Port Development only realizing 42.60%, Follow-up Work on Dredging Channels and Benoa Port Ponds only realizing 42.90%, and Construction of East Access Road to Kalibaru Port realizing 143.62% of the RKAP.
4. Pelindo managed achieves a KPI score of 103.71% in 2022, so that overall it can meet the targets set in 2022.

Based on the above matters, there are no matters that have the potential to significantly affect Pelindo's business continuity. Management analysis shows that even though there are obstacles currently being faced by Pelindo, these can still be accommodated by using the right strategic initiatives and with optimal resource utilization, so that Pelindo's business continuity can be well maintained

ASESMEN MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Manajemen Perseroan melakukan asesmen atas kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya, asesmen dilakukan dengan berdasarkan berbagai faktor seperti analisis kekuatan kondisi keuangan maupun non-keuangan. Berdasarkan hasil asesmen, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, Manajemen Pelindo tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk melanjutkan usahanya.

MANAGEMENT ASSESSMENT OF MATTERS THAT POTENTIALLY INFLUENCE BUSINESS CONTINUITY

The Company's management conducts assessments on the Company's business continuity, with the assessment carried out based on various factors including an analysis of the strengths of its financial and non-financial condition. Based on the assessment results, the Company's believes that it has the resources to continue its business in the future, and does not see any material uncertainties that could give rise to any significant doubt about Pelindo's business continuity.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN UNTUK MELAKUKAN ASESMEN

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan manajemen dalam melakukan asesmen terhadap kelangsungan usaha adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan sumber daya Pelindo yang unggul untuk berkompetisi dalam industri pelabuhan.
2. Posisi Pelindo dalam industri yang baik dalam kancah regional, yang dapat memberikan kontribusi besar dalam perekonomian negara.
3. Kondisi keuangan yang baik dengan profitabilitas pencapaian laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba *merging entity* tahun 2022 sebesar Rp3,91 triliun.
4. Tingkat kesehatan Perseroan dengan kualifikasi AA yang berada dalam kategori Sehat.

ASSUMPTIONS USED BY MANAGEMENT DURING THE ASSESSMENT

Several factors are considered by management when conducting assessments of business continuity, including:

1. Pelindo's superior resource capabilities to compete in the port industry.
2. Pelindo's position in the industry is good in the regional arena, and can make a major contribution to the country's economy.
3. Good financial conditions by achieving Income for the year after effect of merging entity's income in 2022 of Rp3.91 trillion.
4. The Company's health level with AA qualification is in the Healthy category.

ASPEK PERPAJAKAN

Pelindo dalam kegiatan operasionalnya telah menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* yang dilakukan secara transparan dan akuntabel khususnya dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakannya, hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembayaran Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diuraikan sebagai berikut:

TAX ASPECT

Pelindo in its operational activities has implemented Good Corporate Governance in a transparent and accountable manner, especially for managing its tax rights and obligations, the tax rights and obligations, which are carried out in accordance with applicable regulations. Tax Payments and Non-Tax State Revenue (PNBP) are as follows:

Tabel Pembayaran Pajak dan PNBP
Tax Payments and PNBP

(dalam Rupiah penuh)
(in billion Rupiah)

No.	Jenis Kontribusi Pada Pemerintah Type of Contribution to the Government	2022	2021
1	Dividen Dividends	1.316.854.000.000	560.000.000.000
2	PNBP	209.028.833.117	209.253.691.223
3	Konsesi Concessions	535.645.575.067	480.615.293.703
4	PPh Pasal 21 PPh Article 21	861.776.847.782	594.590.750.963
5	PPh Pasal 22 PPh Article 22	6.403.576.820	10.464.929.351

Tabel Pembayaran Pajak dan PNBP
Tax Payments and PNBP

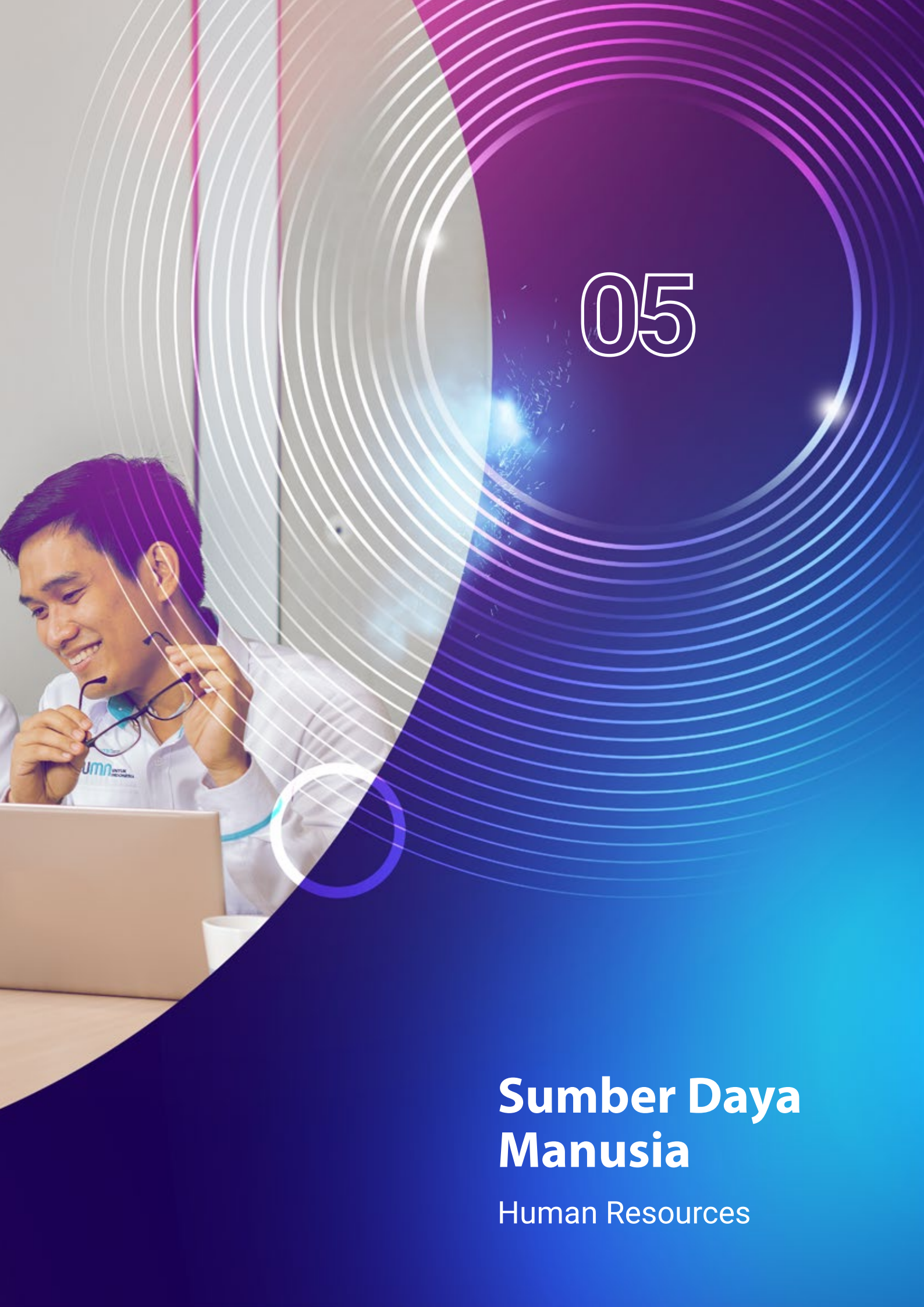
(dalam Rupiah penuh)
(in billion Rupiah)

No.	Jenis Kontribusi Pada Pemerintah Type of Contribution to the Government	2022	2021
6	PPh Pasal 23 PPh Article 23	300.971.422.692	143.054.429.218
7	PPh Pasal 4 Ayat 2 PPh Article, Paragraph 2	157.234.989.622	140.136.518.923
8	PPh Pasal 15 PPh Article 15	6.158.496.310	12.311.995.012
9	PPh Pasal 26 PPh Article 26	206.335.733.450	281.159.395.447
10	PPh Pasal 25 PPh Article 25	877.133.091.245	398.048.575.143
11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Land & Building Tax (PBB)	190.836.869.903	142.602.238.572
12	Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut Compulsory Value Added Tax	674.250.099.398	918.587.670.349
13	Pajak Pertambahan Nilai Value Added Tax	1.870.461.440.964	801.988.355.895
TOTAL		**7.213.090.976.371**	**4.692.813.843.799**


MERATUS
SPIL
WAN HAI
SITC



PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY



05

Sumber Daya Manusia

Human Resources

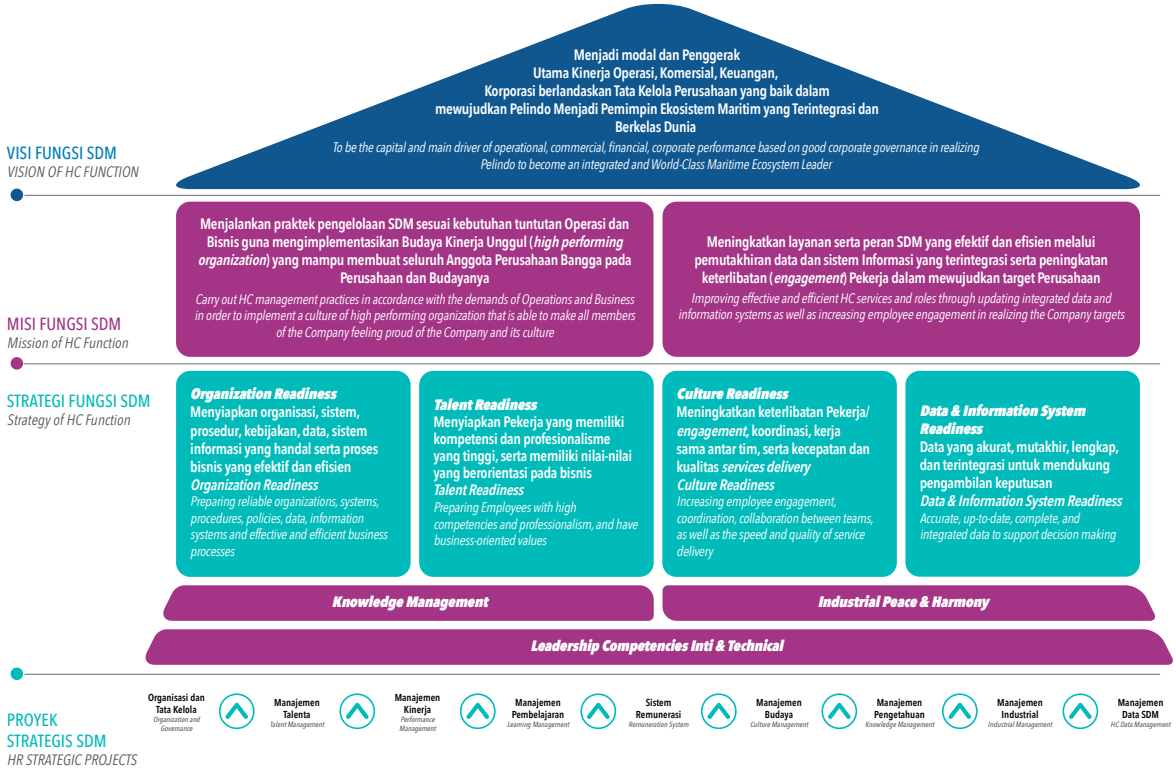
STRATEGI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources Management Strategy



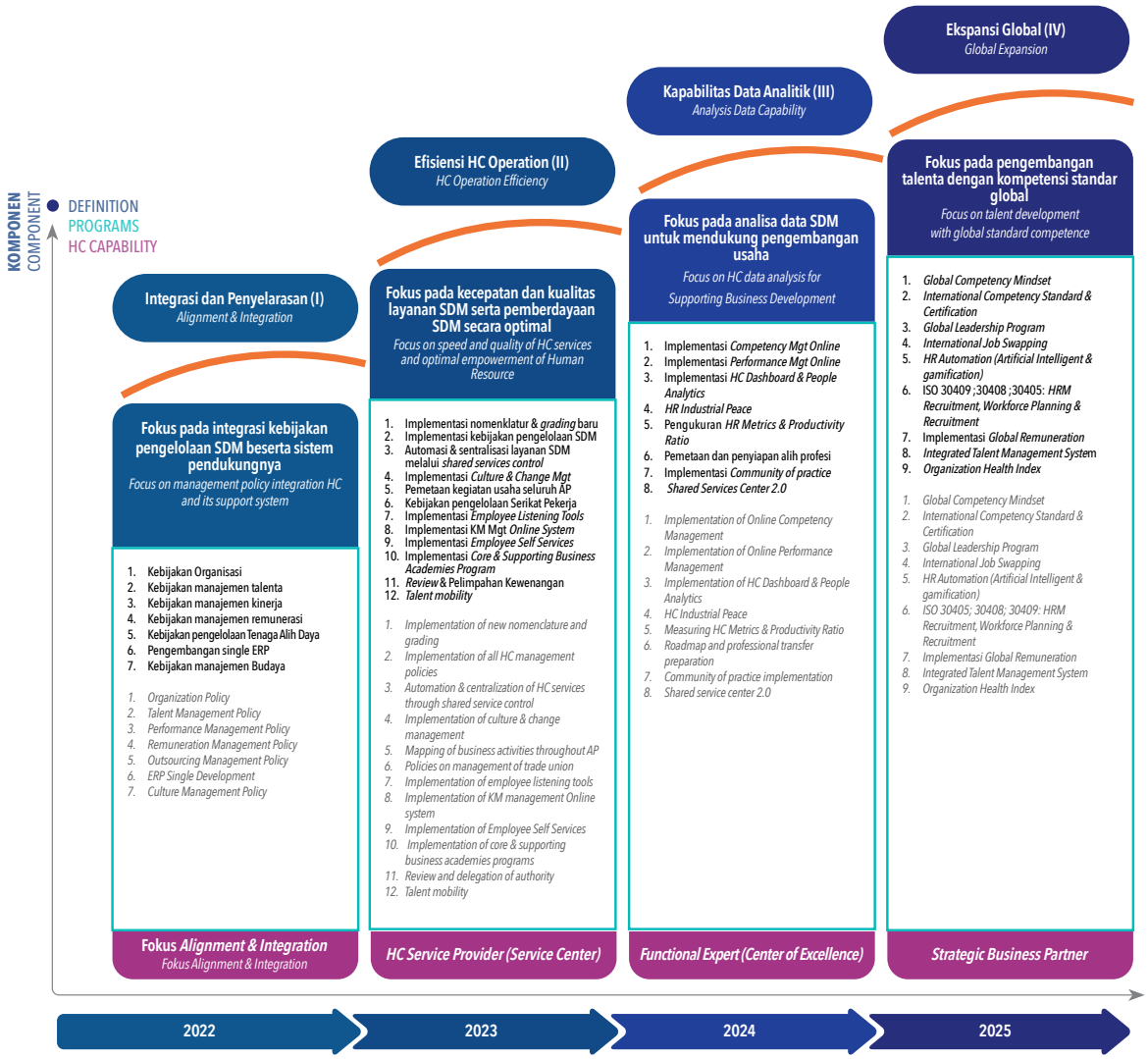
Visi, Misi, dan Strategi Fungsi SDM Pelindo untuk Menjawab Kebutuhan Transformasi Bisnis Perseroan

Vision, Mission and Strategy of Pelindo's Human Resource Function to respond to the needs of the Company's business



Roadmap Implementasi Program Strategis Fungsi SDM dalam Mendukung Visi Misi Periode 2022-2025

Roadmap of HC Function Strategic Program Implementation in Supporting 2022-2025 Vision and Mission



PROJECT INITIATIVES

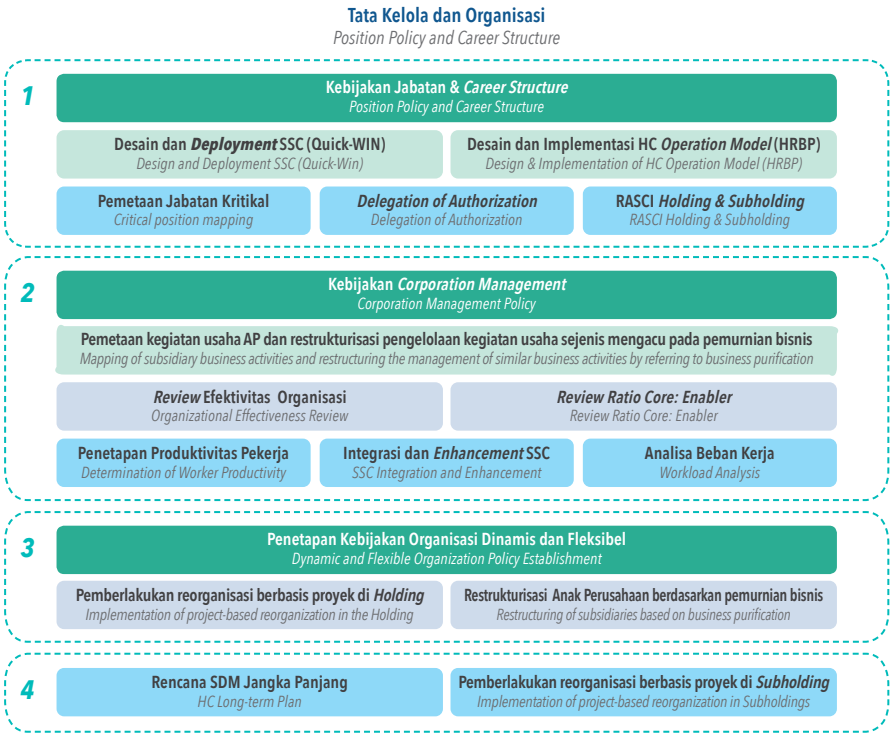
PROJECT INITIATIVES

Komponen Component	**Tahun 2022 (Integrasi dan Penyelarasan)** 2022 (Alignment & Integration)	**Tahun 2023 (Efisiensi HC *Operation*)** 2023 (HC Operation Efficiency)	**Tahun 2024 (Kapabilitas Data Analitik)** 2024 (Analytics Data Capability)	**Tahun 2025 (Ekspansi Global)** 2025 (Global Expansion)
Definition	Fokus pada integrasi kebijakan pengelolaan SDM beserta sistem pendukungnya Focus on integration of HC management policies and their supporting systems.	Fokus pada kecepatan dan kualitas layanan SDM serta pemberdayaan SDM secara optimal Focus on speed and quality of HC services as well as optimal HC empowerment	Fokus pada analisa data SDM untuk mendukung pengembangan usaha Focus on HC data analysis to support business development	Fokus pada pengembangan talenta dengan kompetensi standar global Focus on developing talent with global standard competencies

Komponen Component	**Tahun 2022 (Integrasi dan Penyelarasan)** 2022 (Alignment & Integration)	**Tahun 2023 (Efisiensi HC *Operation*)** 2023 (HC Operation Efficiency)	**Tahun 2024 (Kapabilitas Data Analitik)** 2024 (Analytics Data Capability)	**Tahun 2025 (Ekspansi Global)** 2025 (Global Expansion)
Programs	• Standardisasi nomenklatur, *grading system* dan prosedur • Kebijakan manajemen talenta • Kebijakan manajemen kinerja • Kebijakan manajemen remunerasi • Kebijakan pengelolaan hubungan industrial • Pembangunan *single* ERP • Standardization of nomenclature, grading systems and procedures • Talent Management Policy • Performance Management Policy • Remuneration Management Policy • Industrial relation Management Policy • ERP Single Development	• Implementasi nomenklatur dan *grading* baru • Implementasi seluruh kebijakan pengelolaan SDM • Automasi & sentralisasi layanan SDM melalui *share services* • *Culture & Change Management* • *Data cleansing & completing* • Pemetaan dan penyiapan alih profesi untuk penguatan SDM operasi • Pemetaan kegiatan usaha seluruh Anak Perusahaan AP dan restrukturisasi pengelolaan kegiatan usaha sejenis • Implementation of new nomenclature and grading • Implementation of all HC management policies • Automation & centralization of HC services through share services • implementation of culture & change management data cleansing and completing • Mapping the business activities of all Subsidiaries and restructuring the management of similar business activities	• *Online competency management* • *Organization health index* • *Logistic business academies program* • *Flexible benefit program* • *Employee self services apps* • *Integrated talent management system* • *HC dashboard & analytics* • *Employee satisfaction index* • *HR score card* • *Best employer/ employee choice/HR excellence awards*	• *Global competency mindset* • *International competency standard* • *Global leadership program* • *International job swapping* • *Shared services center 2.0* • *HR automation (artificial intelligence & gamification)* • ISO 30405, 30408, 30409: HRM *recruitment, workforce planning & recruitment*
HC *Capability*	*Alignment & integration*	*HC service provider (service center)*	*Functional expert (center of excellence)*	*Strategic business partner*

TATA KELOLA DAN ORGANISASI

GOVERNANCE AND ORGANIZATION



Proyek strategis SDM yang pertama adalah tata kelola dan organisasi yang meliputi *initiatives* kebijakan jabatan dan *career structure* yang dilaksanakan di tahun 2022 dan dilanjutkan dengan *initiatives* SSC terkait dengan desain dan *deployment* sebagai *Quick Win* dari initiatives tersebut. Desain dan implementasi *New HC Operation Model* (HRBP) dan pemetaan jabatan kritikal merupakan salah satu dari *initiatives* yang segera dilaksanakan di semester dua tahun 2022. *Delegation of Authorization* Otorisasi serta RASCI *Holding* dan *Subholding* merupakan salah satu dari *highlight* untuk dilaksanakan tahun 2022.

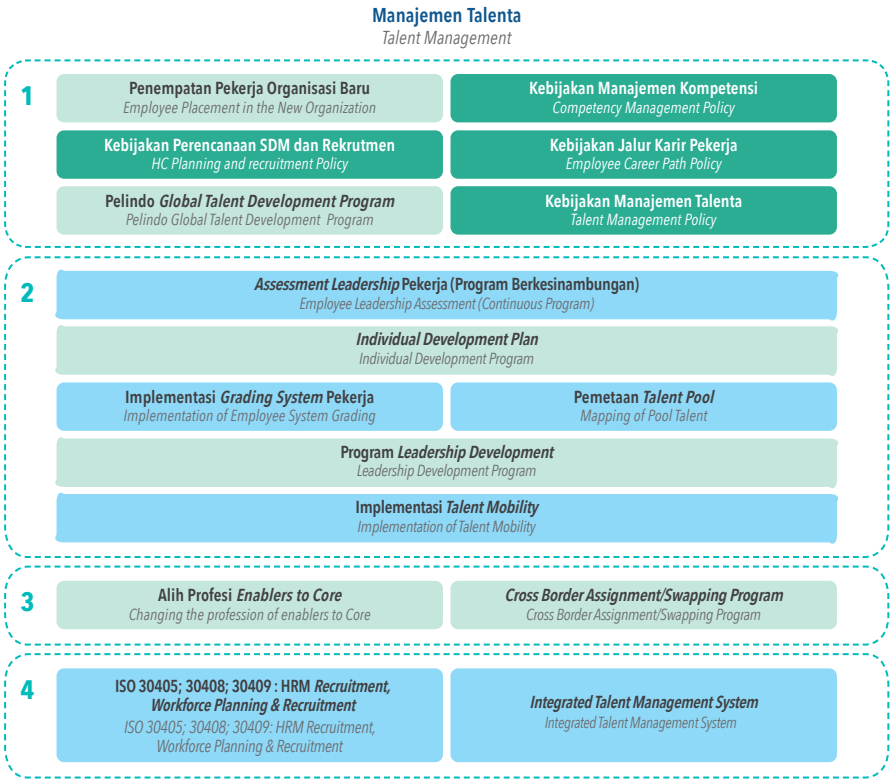
Pada tahun 2023 ada 7 (tujuh) program *initiatives* yakni pemetaan kegiatan usaha Anak Perusahaan dan restrukturisasi pengelolaan kegiatan usaha sejenis mengacu pada pemurnian bisnis, *review* efektivitas organisasi, *review ratio core*: *enabler*, penetapan produktivitas pekerja, integrasi dan *enhancement* SSC, *work load analysis* atau analisa beban kerja, kebijakan *corporation management*. Pada tahun 2024 akan melaksanakan 3 (tiga) program *initiatives* yaitu pemberlakuan reorganisasi berbasis proyek di *Holding*, restrukturisasi Anak Perusahaan berdasarkan pemurnian bisnis, dan penetapan kebijakan organisasi dinamis dan fleksibel. Kemudian pada tahun 2025 terdapat 2 (dua) program yang akan dilaksanakan yaitu rencana SDM jangka panjang dan pemberlakuan reorganisasi berbasis proyek di *Subholding*.

The first HC strategic project is governance and organization that includes position policy and career structure initiatives which was implemented in 2022 and continued by SSC initiatives related to design and deployment as Quick Win of these initiatives. Design and implementation of New HC Operation Model (HRBP) and mapping of critical positions is one of the initiatives to be implemented in the second half of 2022. Delegation of Authorization as well as RASCI Holding and Sub Holding is one of the highlights to be implemented in 2022.

In 2023, there are 7 (seven) program initiatives, namely mapping business activities of Subsidiaries and restructuring management of similar business activities with reference to business purification, reviewing organizational effectiveness, reviewing ratio core: enabler, determining employee productivity, SSC integration and enhancement, work load analysis, workload analysis, corporate management policy. In 2024, 3 (three) program initiatives will be conducted, namely implementation of project-based reorganization in Holding, restructuring of Subsidiaries based on business purification, and setting dynamic and flexible organizational policies. Then in 2025, there are 2 (two) programs that will be conducted, namely the long-term HC plan and implementation of project-based reorganization in Sub holdings.

MANAJEMEN TALENTA

TALENT MANAGEMENT



Proyek Strategis SDM bidang manajemen talenta memiliki 6 (enam) program *initiatives* yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Program tersebut seperti penempatan pekerja organisasi baru, penyusunan kebijakan manajemen kompetensi, penyusunan kebijakan perencanaan SDM dan rekrutmen, penyusunan kebijakan jalur karir pekerja, Pelindo *Global Talent Development* program, dan yang terakhir penyusunan kebijakan manajemen talenta.

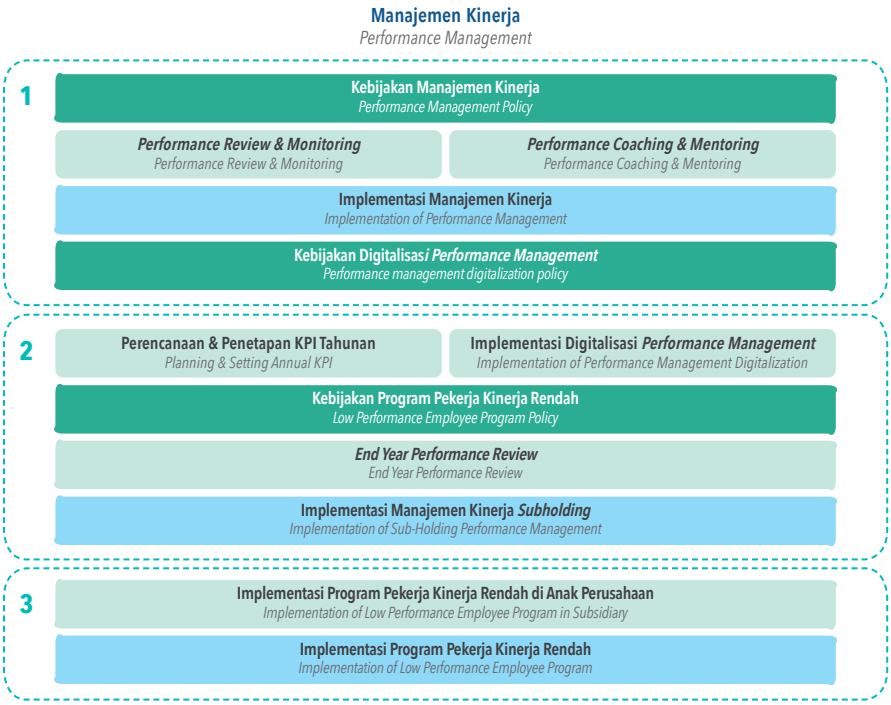
Pada tahun 2023 terdapat 6 (enam) program *initiatives* yakni *assessment leadership* pekerja yang merupakan program berkesinambungan untuk dilaksanakan, *individual development plan*, implementasi *grading system* pekerja, pemetaan *talent pool*, *program leadership development*, dan implementasi *talent mobility*. Pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) program yang akan dijalankan yaitu alih profesi *enablers to core* dan *cross border assignment* atau *swapping program*. Di tahun 2025 juga terdapat 2 (dua) program yang akan dijalankan yaitu ISO 30405, 30408, 30409: HRM *Recruitment, Workforce Planning & Recruitment,* dan *Integrated Talent Management System*.

HC Strategic Project in talent management has 6 (six) initiatives programs that has been carried out in 2022. The programs were placement of employees in the new organization, preparation of competency management policy, preparation of HC planning and recruitment policy, Pelindo Global Talent Development program, and preparation of talent management policy.

In 2023, there are 6 (six) initiatives programs namely employee leadership assessment which is a continuous program to be implemented, individual development plan, implementation of employee grading systems, talent pool mapping, leadership development programs, and implementation of talent mobility. In 2024, there are 2 (two) programs that will be carried out, namely changing the profession of enablers to core and cross border assignments or swapping programs. In 2025, there are also 2 (two) programs that will be carried out, namely ISO 30405, 30408, 30409: HRM Recruitment, Workforce Planning & Recruitment, and Integrated Talent Management System.

MANAJEMEN KINERJA

PERFORMANCE MANAGEMENT



Bidang manajemen kinerja memiliki 12 (dua belas) program *initiatives* yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian Visi, Misi dan fungsi SDM. Kegiatan ini dilakukan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Penyusunan kebijakan manajemen kerja, implementasi program *performance review mentoring*, implementasi program *performance coaching* dan *mentoring*, implementasi program manajemen kinerja dan penyusunan kebijakan digitalisasi *performance management* dilakukan pada tahun 2022.

Kemudian tahun berikutnya yaitu pada tahun 2023 akan melakukan kegiatan perencanaan & penetapan KPI Tahunan, implementasi digitalisasi *performance management*, penyusunan kebijakan pekerja kinerja rendah, implementasi program *end year performance review*, dan yang terakhir implementasi manajemen kinerja *Subholding*. Kegiatan di tahun 2024 hanya ada 2 (dua) program *initiatives* yaitu implementasi program pekerja kinerja rendah di Anak Perusahaan dan implementasi program Pekerja kinerja rendah.

Performance management has 12 (twelve) initiatives program that will be implemented to realize the achievement of HC Vision, Mission and functions, starting from 2022 to 2024. The preparation of work management policies, implementation of performance review mentoring programs, implementation of performance coaching and mentoring programs, implementation of performance management programs and preparation of performance management digitalization policies were carried out in 2022.

Next year, in 2023, planning & establishment of annual KPI, implementing digitalization of performance management, compiling low-performance worker policies, implementation of end-year performance review programs, and implementation of Sub Holding performance management will be carried out. There are only 2 (two) initiatives program in 2024, namely implementation of low performance employee program in Subsidiaries and implementation of low performance employee program.

MANAJEMEN PEMBELAJARAN

LEARNING MANAGEMENT



Proyek strategis SDM bidang manajemen pembelajaran diawali dengan penyusunan penetapan kebijakan pembelajaran di tahun 2022. Kegiatan selanjutnya penyusunan kebijakan pemetaan kompetensi dan program pengembangan yang dilaksanakan pada tahun 2023. Kegiatan selanjutnya penyusunan kebijakan program pengembangan kepemimpinan yang akan dilakukan 2023.

Selanjutnya implementasi program *technical skill, soft skill* dan *strategic business development skill* yang awal pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Selanjutnya kegiatan implementasi *Leadership Development Program* yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sampai dengan akhir tahun 2025. Selanjutnya penyusunan kebijakan terkait dengan *Core Business Academies Development Program* yang dilakukan pada tahun 2023. Kegiatan ini meliputi pengembangan program pembelajaran berbasis *blended learning*.

HC strategic project in learning management began with the preparation of learning policy in 2022. The next activity is preparation of competency mapping policies and development programs to be carried out in 2023. Afterward, the next activity is to formulate leadership development program policies to be carried out in 2023.

Furthermore, implementation of technical skills, soft skills and strategic business development skills programs will be carried out from 2023 to 2024. Next, implementation of Leadership Development Program will be carried out in 2023 until the end of 2025. Then, preparation of policies related to Core Business Academies Development Program will be carried out in 2023. This activity includes the development of blended learning-based learning programs.

Penyusunan kebijakan *Supporting Academies Development Program* dilaksanakan pada tahun 2023. Implementasi program *Core Business Academic Development Program* dilaksanakan pada tahun 2023 secara berkelanjutan dilaksanakan sepanjang tahun berikutnya. Implementasi *Supporting Academic Development Program* dilaksanakan pada tahun 2023 secara berkelanjutan dijalankan setiap tahunnya yang dilanjutkan dengan implementasi program *International Competency Certification* yang akan dilaksanakan di tahun 2025.

The formulation of Supporting Academies Development Program policy will be conducted in 2023. Implementation of Core Business Academic Development Program and implementation of Supporting Academic Development Program will be conducted in 2023 on an ongoing basis throughout the following year followed by implementation of International Competency Certification program which will be carried out in 2025.

MANAJEMEN REMUNERASI

REMUNERATION MANAGEMENT



Proyek Strategis SDM bidang manajemen remunerasi diawali dengan kajian, penetapan dan penerapan harmonisasi remunerasi (Tahap I) yang dilaksanakan pada semester dua tahun 2022. Pada tahun 2023 ada dua kegiatan yang akan dijalani seperti Harmonisasi tahap II – Penerapan *Performance Base Remuneration* atau penetapan target KPI dan target insentif, lalu kegiatan selanjutnya kajian, penetapan dan penerapan *benefit* pasca PKB Baru. Dilanjut dengan kegiatan harmonisasi tahap II di tahun 2024 yang meliputi evaluasi remunerasi tahap I dan realisasi *performance base remuneration* (*performance review* dan penetapan insentif) dan pada waktu yang bersamaan juga melaksanakan kajian kebijakan remunerasi di *Subholding*.

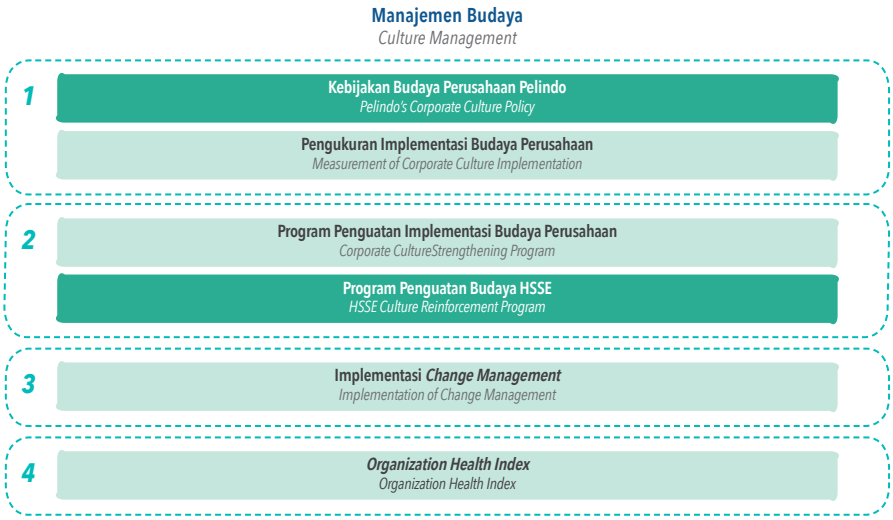
HC Strategic Project in remuneration management began with review, determination and implementation of remuneration harmonization (Phase I), which was carried out in second half of 2022. In 2023, there are two activities that will be carried out, namely Phase II Harmonization - Implementation of Performance Base Remuneration or setting KPI targets and incentive targets, then the next activity is reviewing, determining and implementing benefits after the New CLA. Followed by phase II harmonization activities in 2024 which includes evaluation of phase I remuneration and realization of performance base remuneration (performance review and determination of incentives) and at the same time also reviewing remuneration policies in Sub Holdings.

Dalam mempersiapkan implementasi program *Global Remuneration* di 2025 (*Expansi* Global) maka Kajian *Global Remuneration* dilaksanakan di tahun 2024 sebagai satu rangkaian kegiatan yang berkesinambungan.

In preparing for the implementation of Global Remuneration program in 2025 (Global Expansion), Global Remuneration Study will be carried out in 2024 as a series of continuous activities.

MANAJEMEN BUDAYA

CULTURE MANAGEMENT

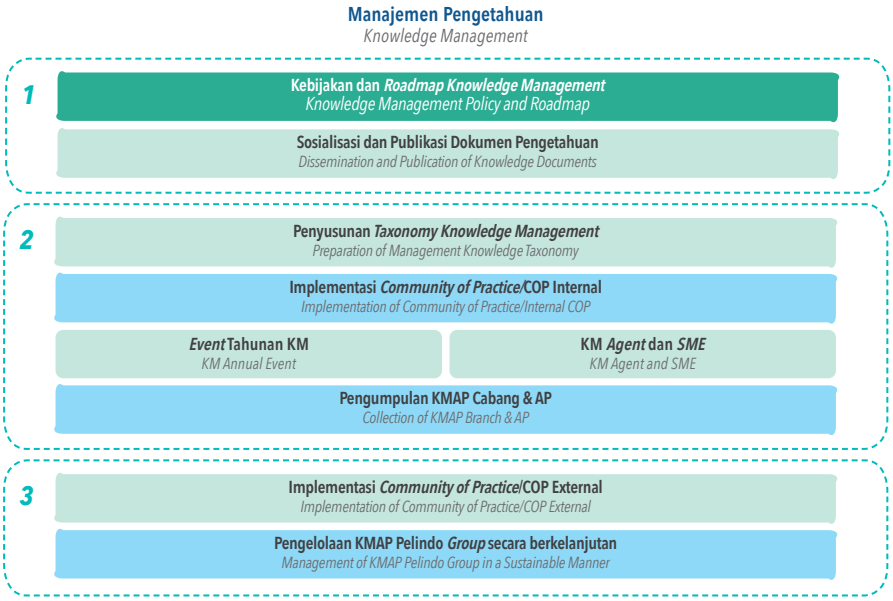


Initiatives proyek strategis SDM bidang Manajemen Budaya pada tahun 2022 semester dua yaitu melakukan penyusunan Kebijakan Budaya Perusahaan Pelindo dan Pengukuran Implementasi Budaya perusahaan setelah *merger*. Kegiatan berikutnya program penguatan implementasi Budaya Perusahaan, program penguatan budaya HSSE sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam setiap aktivitas PT Pelabuhan Indonesia (Persero), serta implementasi *change Management* yang dilakukan di tahun 2023. Kegiatan berikutnya dilakukan di tahun 2025 yakni *Organization Health Index* yaitu sebagai program pengukuran transformasi budaya kerja untuk mengetahui tingkat kesehatan budaya organisasi.

HC Strategic project initiatives in Culture Management in second semester of 2022 are preparing Pelindo's Corporate Culture Policy and measuring implementation of corporate culture after merger. The next activity is a program to strengthen Corporate Culture implementation, a program to strengthen HSSE culture as an integral part of every PT Pelabuhan Indonesia (Persero) activity, as well as implementation of change management to be carried out in 2023. The next activity that will be carried out in 2025 is the Organization Health Index, as work culture transformation measurement program to determine the soundness of organizational culture.

MANAJEMEN PENGETAHUAN

KNOWLEDGE MANAGEMENT



Initiatives proyek strategis SDM bidang Manajemen Pengetahuan pada tahun 2022 semester dua adalah Penyusunan Kebijakan dan *Roadmap Knowledge Management* serta Sosialisasi dan publikasi dokumen pengetahuan. Penyusunan *taxonomy knowledge management*, implementasi *community of practice*/COP Internal, *Event* Tahunan KM, KM Agent dan SME, Pengumpulan KMAP Cabang & AP akan dilakukan di tahun 2023. Kegiatan pada tahun 2024 adalah Implementasi *community of practice* (COP) *External* dan Pengelolaan KMAP Pelindo Group secara berkelanjutan.

HC Strategic project initiatives in Knowledge Management in the second semester of 2022 were Policy Development and Knowledge Management Roadmap as well as Dissemination and publication of knowledge documents. Preparation of taxonomy knowledge management, implementation of community of practice/Internal COP, KM Annual Event, KM Agent and SME, Collection of KMAP Branches & AP will be carried out in 2023. Activities in 2024 are Implementation of External community of practice (COP) and Management of Pelindo KMAP Group on an ongoing basis.

MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL

INDUSTRIAL RELATION MANAGEMENT



Proyek strategis SDM bidang manajemen hubungan industrial diawali dengan kegiatan yang padat tahun 2022 dimana ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan seperti Kebijakan Pengelolaan Tenaga Alih Daya, penyusunan dan finalisasi PKB, *employee satisfaction and engagement survey*, Kebijakan Sistem Keluh Kesah Pekerja, Pelaksanaan Pengelolaan Tenaga Alih Daya, Implementasi Sistem Keluh Kesah Pekerja. Dilanjut di tahun berikutnya yaitu tahun 2023 dengan kegiatan Pelaksanaan *Procurement* terintegrasi bidang LASD, *Employee Listening Tools*, Penetapan Kebijakan Pengelolaan Serikat Pekerja. Lalu ditutup dengan satu kegiatan di tahun 2024 yaitu HC Audit – Industrial Peace.

HC strategic project in industrial relations management began with a series of activities in 2022, namely Outsourcing Management Policy, preparation and finalization of CLA, employee satisfaction and engagement survey, Employee Grievance System Policy, Implementation of Outsourcing Management, and Implementation of Employee's Complaint System. In the following year of 2023, will be continued with integrated Procurement Implementation activities in LASD sector, Employee Listening Tools, Determination of Trade Union Management Policies. Then closed with one activity in 2024, namely HC Audit – Industrial Peace.

MANAJEMEN DATA, SISTEM DAN TEKNOLOGI

DATA, SYSTEMS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT



Proyek strategis SDM terakhir untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Pelindo adalah Manajemen Data, Sistem dan Teknologi. Kegiatan di tahun 2022 diawali dengan Pengembangan *Single* ERP, Identifikasi Aktivitas Penyaluran SSC, Kebijakan Manajemen Data SDM, Konversi – *cleansing Data Payroll Related* dan Konversi – *cleansing Data Non Payroll Related*. Di tahun 2023 melakukan kegiatan Implementasi SSC/LMS/KMS/ TMS/PMS Fase I, Implementasi *Employee Self Service*, Implementasi Layanan *Shared Services* Tahap I (*Payroll* dan *Basic Benefit*), serta Implementasi Layanan *Shared Services* Tahap II (Perjalanan dan Pengelolaan SDM lainnya). Kemudian di tahun 2024 ada satu kegiatan yang terbagi menjadi dua yaitu: implementasi HC *Dashboard* dan HR *Analytical Tools*. Program HR *Automation* (*Artificial Intelligence & gamification*) akan di implementasi di 2025 semester I.

The last HC strategic project to realize the achievement of Pelindo's Vision and Mission is Data, Systems and Technology Management. Activities in 2022 began with Single ERP Development, Identification of SSC Distribution Activities, HC Data Management Policy, Conversion – cleansing Data Payroll Related and Conversion – cleansing Data Non-Payroll Related. In 2023, SSC/LMS/KMS/ TMS/PMS Phase I Implementation, Employee Self Service Implementation, Shared Services Phase I Implementation (Payroll and Basic Benefits), and Shared Services Phase II Implementation (Travel and other HC Management) will be carried out. Then in 2024, there will be one activity that is be divided into two, namely: implementation of HC Dashboard and HC Analytical Tools. HC Automation (Artificial Intelligence & gamification) program will be carried out in the first semester of 2025.

INTERKONEKTIVITAS *PROJECT* STRATEGIS

Interkonektivitas *project* strategis akan membantu menentukan prioritas dan kedekatan korelasi *project* saat implementasi. Dalam proses *merger* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan banyak sekali dibutuhkan pedoman dan kebijakan, maka sangat disarankan untuk dibuatkan satu pedoman kebijakan pengelolaan SDM yang terintegrasi satu dengan yang lainnya yang mencakup keseluruhan pedoman dan kebijakan yang dapat menjadi *handbook* dan menjadi *Standard Operating Procedure* dari HC dalam mengintegrasikan sistem di *Holding*, *Subholding*, Regional dan seluruh entitas di bawahnya.

STRATEGIC PROJECT INTER CONNECTIVITY

Strategic project interconnectivity will help determine the priority and proximity of project correlations during implementation. In Merger process of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), numerous guidelines and policies will be needed, hence it is highly recommended to make one HC Management Policy guideline that is integrated with one another and covers all guidelines and policies, which become HC's handbook and Standard Operating Procedure in integrating the systems in Holding, Sub Holding, Regional and all entities.

Berikut adalah pedoman-pedoman yang telah teridentifikasi dibutuhkan dalam pengelolaan SDM di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) saat ini:

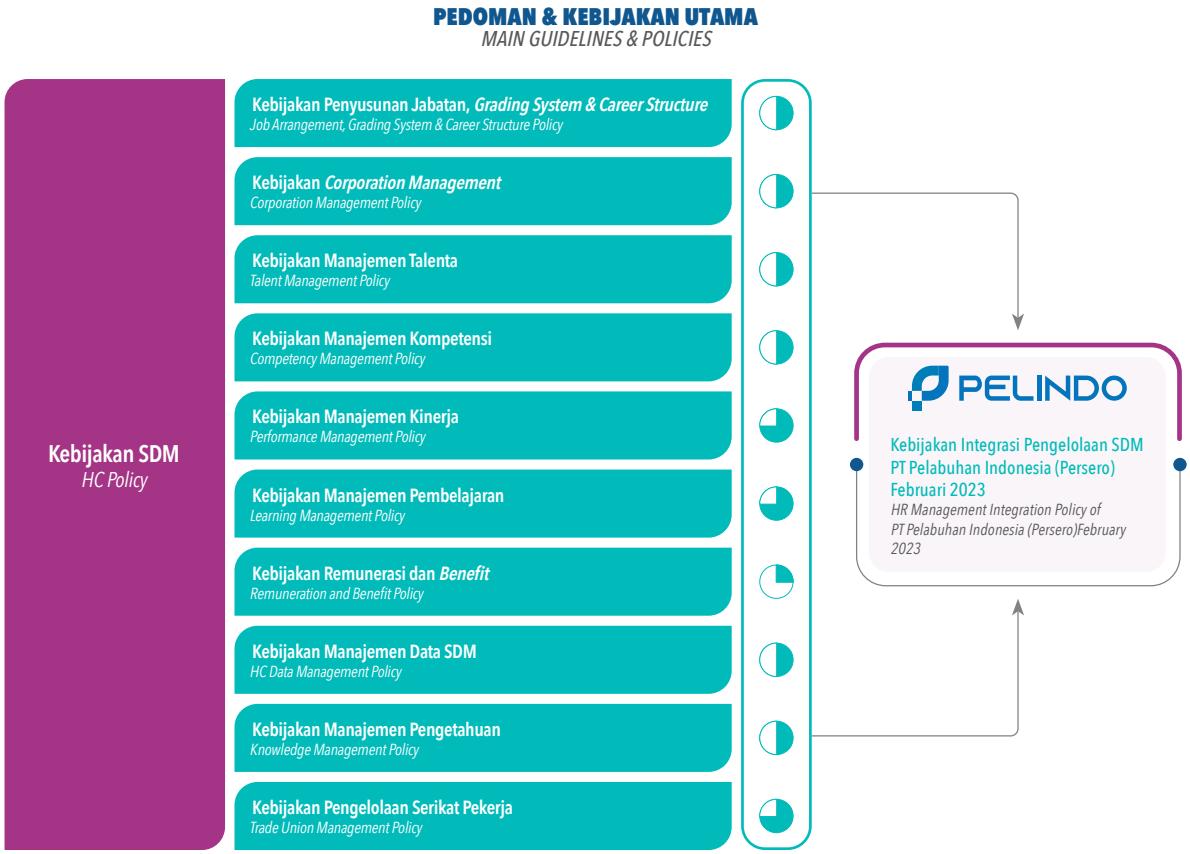
1. Kebijakan Penyusunan Jabatan, *Grading System & Career Structure*;
2. Kebijakan *Corporation Management;*
3. Kebijakan Manajemen Talenta;
4. Kebijakan Manajemen Kompetensi;
5. Kebijakan Manajemen Kinerja;
6. Kebijakan Manajemen Pembelajaran;
7. Kebijakan Remunerasi dan *Benefit* ;
8. Kebijakan Manajemen Data SDM;
9. Kebijakan Manajemen Pengetahuan; dan
10. Kebijakan Pengelolaan Serikat Pekerja.

Dari hasil observasi dan evaluasi, keseluruhan kebijakan di atas saat ini telah dimiliki oleh masing-masing *ex.* PT Pelabuhan Indonesia I-IV hanya saja kebijakan tersebut belum tersentral dan perlu sedikit penyesuaian dalam pengimplementasiannya untuk kemudian digabungkan menjadi satu *handbook*/SOP terkait Kebijakan Integrasi Pengelolaan SDM PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang mencakup keseluruhan proses.

The following are required guidelines that have been identified in Human Resource management at PT Pelabuhan Indonesia (Persero):

1. Job Arrangement, Grading System & Career Structure Policy;
2. Corporation Management Policy;
3. Talent Management Policy;
4. Competency Management Policy;
5. Performance Management Policy;
6. Learning Management Policy;
7. Remuneration and Benefit Policy;
8. HC Data Management Policy;
9. Knowledge Management Policy; and
10. Trade Union Management Policy.

Through observation and evaluation carried out, all of the above policies are currently owned by each ex-PT Pelabuhan Indonesia I-IV, but these policies are not yet centralized and need adjustment in its implementation and then combined into one handbook/SOP related to HC Management Integration Policy of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) that covers the entire processes.

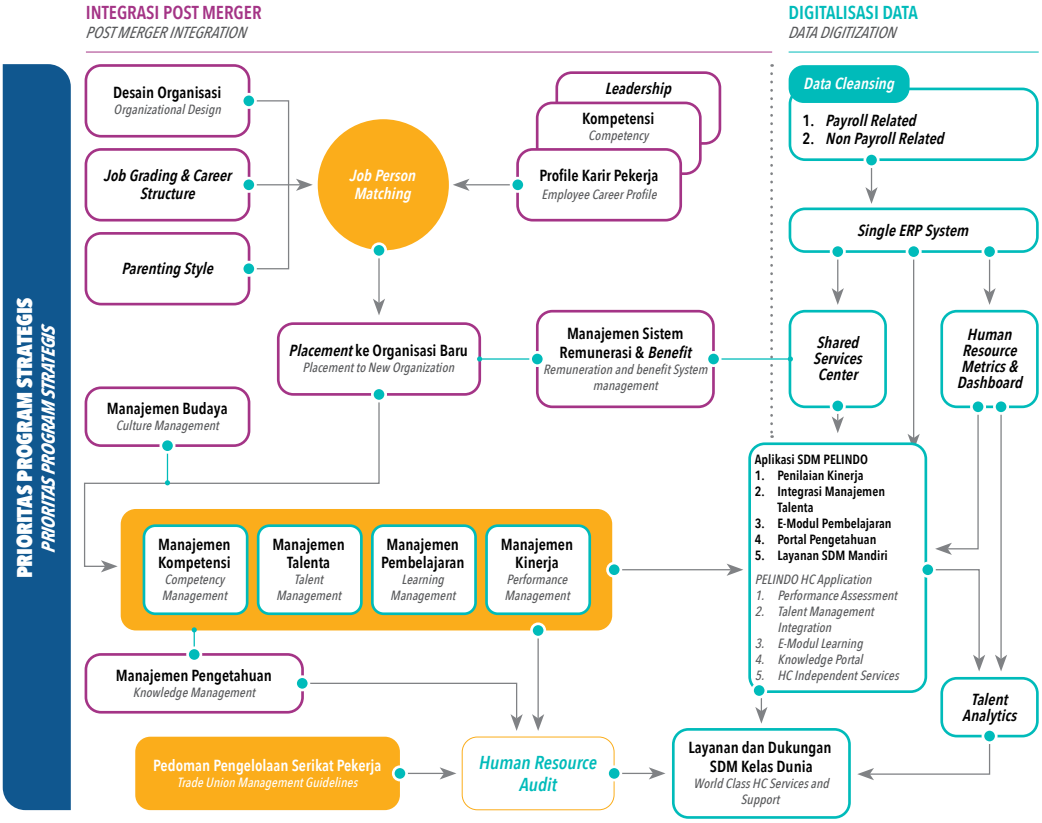


Setelah Integrasi *Post Merger* akan dilakukan suatu kegiatan berupa Desain Organisasi atau bentuk organisasi yang meliputi struktur organisasi, *job description, job specification* dan hasil evaluasi jabatan. *Job Grading* dan *Career Structure* juga akan dilakukan setelah integrasi *post merger*, seperti yang kita tahu *job grading* adalah membuat ukuran parameter untuk dapat dihitung bobot dan besaran bisnis yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menggambarkan besaran *magnitude* untuk kemudian menjadi dasar dalam menghitung *accountability* dalam *Hay Points*.

Kegiatan terakhir setelah integrasi *post merger* adalah *parenting style*, yang digunakan sebagai acuan dalam mengelola bisnis Anak Perusahaan. Ketiga kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dunia usaha dan industri. Pemahaman juga dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu *Leadership*, Kompetensi, dan Profil Karir Pekerja.

After Post Merger Integration, an activity will be carried out, namely Organizational Design that includes organizational structure, job descriptions, job specifications and job evaluation results. Job Grading and Career Structure will also be carried out after post-merger integration. Job grading is defined as creating parameter sizes to calculate the weight and size of business which can be taken into consideration in describing the magnitude then become the basis for calculating accountability in Hay Points.

The last activity after post-merger integration is parenting style, which is used as a reference in managing the Subsidiary's business. These three activities are carried out to enhance the comprehension regarding business world and industry. Such comprehension is also influenced by three factors, namely Leadership, Competence, and Employee Career Profile.



Tahap lanjutan dari *Job Person Matching* adalah *Placement* ke Organisasi Baru dan memiliki korelasi dengan Manajemen Sistem Remunerasi & *Benefit*. Dalam tahap *Placement* ke Organisasi Baru ini juga tidak lepas dari pengaruh Manajemen Budaya dan Manajemen Pengetahuan yang mana kedua Manajemen tersebut terdiri dari Manajemen Kompetensi, Manajemen Talenta, Manajemen Pembelajaran, dan Manajemen Kinerja. *Human Resource Audit* merupakan proses sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti evaluasi secara objektif dalam menentukan sejauh mana kriteria pengelolaan SDM terpenuhi. Beberapa macam Manajemen di atas masuk dalam kriteria proses sistematis yang dilakukan *Human Resource* dan juga tetap mengacu pada Pedoman Pengelolaan Serikat Pekerja.

The next stage of Job Person Matching is Placement to New Organization and has a correlation with Remuneration & Benefit System Management. The Placement in New Organization stage cannot be separated from the influence of Culture Management and Knowledge Management, both of which consist of Competency Management, Talent Management, Learning Management and Performance Management. Human Resource Audit is a systematic, independent and documented process to obtain objective evaluation evidence in determining the extent to which HC management criteria are met. Several types of Management above are included in the criteria of systematic process conducted by Human Resource and remained to be guided by the Guidelines for Management of Trade Union.

Digitalisasi data dilakukan *Data Cleansing* yang terdiri dari *Payroll Related* dan *Non Payroll Related*. Dari *data cleansing* tersebut akan menghasilkan *Single* ERP *System* yang berperan untuk menjalankan keseluruhan kegiatan transaksional seperti memenuhi semua kebutuhan pekerja secara personal dan menyediakan layanan transaksional (data dan informasi) bersamaan dengan *Human Resource Matrics* & *Dashboard*, juga manajemen budaya dan pengetahuan merumuskan Aplikasi SDM Pelindo termasuk di dalamnya Penilaian Kinerja, Integrasi Manajemen Talenta, E-Modul Pembelajaran, Portal Pengetahuan dan yang terakhir Layanan SDM Mandiri. Dari aplikasi SDM yang dirumuskan akan membentuk *Talent Analytics* yang akan berpengaruh pada Layanan dan Dukungan SDM Kelas Dunia.

Data digitization is carried out by Data Cleansing which consists of Payroll Related and Non-Payroll Related. The data cleansing will produce Single ERP System whose role is to carry out all transactional activities such as fulfilling all employee needs personally and providing transactional services (data and information) together with Human Resource Matrix & Dashboard, as well as cultural and knowledge management formulating Pelindo HC Application including Performance Assessment, Talent Management Integration, E-Learning Modules, Knowledge Portals and the last is Independent HC Services. The formulated HC application will form Talent Analytics which will affect World Class HC Services and Support.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN MANAJEMEN HUMAN SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resource Management Implementation and Policy

REKRUTMEN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM Perseroan guna mendukung pencapaian kinerja yang optimal, maka diselenggarakan proses Rekrutmen secara transparan dan terbuka. Rekrutmen dilaksanakan berdasarkan analisa kebutuhan pekerja sesuai formasi kebutuhan oleh Divisi Strategi SDM Perseroan. Setiap orang, baik pria maupun wanita dengan tidak memandang latar belakang yang dimiliki calon pekerja, seperti suku, agama, ras, hingga kondisi fisik diberikan kesempatan yang sama untuk dapat mengikuti rekrutmen pekerja sepanjang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Perseroan kemudian mengangkat calon pekerja dengan mengacu pada hasil seleksi, hasil evaluasi masa percobaan, serta pencapaian orientasi pekerja.
Tahapan pelaksanaan rekrutmen adalah:

1. Pengumuman Pembukaan secara Terbuka;
2. Registrasi melalui *Website*;
3. Seleksi Administrasi;
4. Tes Berenang (untuk Jabatan Pandu);
5. Tes Seleksi Tahapan Pertama (Tes Potensi Akademik);
6. Tes Seleksi Tahapan Kedua (Psikotes dan Bahasa Inggris);
7. *Interview User*;
8. Tes Kesehatan; dan
9. *Interview* Direksi.

Pada Tahun 2022, Perseroan mengikuti program Rekrutmen Bersama yang diselenggarakan oleh Forum Human Resource Indonesia (FHCI) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) untuk posisi Tenaga Pandu. Informasi terkait rekrutmen disampaikan secara luas baik melalui *website* bersama FHCI KBUMN maupun *website* dan media sosial Perseroan, mulai dari pembukaan lowongan, seleksi, hingga hasil dari setiap tahapan seleksi. Namun demikian, belum didapatkan kandidat yang memenuhi persyaratan untuk lolos dari rekrutmen dan seleksi yang diselenggarakan. Di akhir tahun 2022, dilaksanakan rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan Pekerja melalui mekanisme Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Perseroan dan terjaring sebanyak 12 (dua belas) orang untuk posisi Pandu dan 2 (dua) orang untuk posisi setingkat *Officer* di unit *Shared Service Center* (SSC) Kantor Pusat. Namun, untuk Perjanjian Kerja tersebut dilaksanakan mulai Januari 2023 dan Februari 2023. Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi ini dibantu oleh salah satu Anak Perusahaan Perseroan, yaitu PT Pelindo Daya Sejahtera.

RECRUITMENT

In order to meet the needs of the Company's HC to support the achievement of optimal performance, the Company conducts transparent and open recruitment process. Recruitment is carried after an analysis of employees needs in accordance with the formation needs of HC Strategy Division. Everyone, both male and female regardless of the background of prospective employees, including ethnicity, religion, race, and physical condition are given an equal opportunity to participate in recruitment as long as they meet the required criteria. The Company recruits prospective employees after referring to selection results, evaluation results during probationary period, and employees' orientation achievements.
The recruitment stages are:

1. Open Public Announcement;
2. Registration via Website;
3. Selection Administration;
4. Swimming Test (for Pilot Position);
5. First Stage Selection Test (Potential Academic Test);
6. Second Stage Selection Test (Psychology and English);
7. User Interviews;
8. Health Examination; and
9. Interview with Board of Directors.

In 2022, the Company took a part in the Joint Recruitment program organized by the Indonesian Human Resource Forum (FHCI) of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) for Pilot Position. Information related to recruitment was conveyed widely both through the joint website of SOE FHCI and the Company's website and social media, started from the opening of vacancies, selection, to results of each stage of selection. However, no candidate has been found who meets the requirements to pass recruitment and selection. At the end of 2022, recruitment was carried out to meet the needs of Employees through Specific Time Work Agreement (PKWT) mechanism with the Company and managed to recruit 12 (twelve) people for Pilot position and 2 (two) people for Officer-level position in Shared Service Center unit (SSC) Head Office. However, Employment Agreement will be implemented from January 2023 to February 2023. The recruitment and Selection Implementation is assisted by one of the Company's Subsidiaries, namely PT Pelindo Daya Sejahtera.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

KEBIJAKAN

Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pekerja tertuang didalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tanggal 18 Februari 2022 No. HK.01/18/2/1/PSBL/UTMA/PLND-22 Tentang Pembelajaran Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Program Pembelajaran Pekerja pada Perseroan terdiri dari:

COMPETENCY DEVELOPMENT

Policy

Employee Competency Development Policy is contained in the Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dated February 18, 2022 No. HK.01/18/2/1/PSBL/UTMA/PLND-22 Concerning Employee Learning in the Environment of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The Company's Employee Learning Program consists of:

1. Program Pendidikan adalah program peningkatan kompetensi akademis melalui institusi pendidikan formal pada tingkat Diploma, Sarjana, Pasca Sarjana, dan Doktoral.
2. Program Pelatihan adalah program peningkatan kompetensi non akademis melalui sertifikasi, pelatihan atau kursus, yang dapat disampaikan melalui metode antara lain namun tidak terbatas pada metode konvensional maupun eksperimental, kelas tatap muka, seminar/webinar, *E-learning*, *Coaching, Mentoring, On-Job-Training (Job Assignment* dan/atau *Job Rotation*) *Self-Learning*, dan *Blended Learning*, yang disampaikan secara tatap muka (luring), elektronik (*on line*/ daring) ataupun keduanya.
3. Program Magang adalah adalah program peningkatan keterampilan dan keahlian secara langsung di industri terkait dalam waktu tertentu.

1. Education Program, academic competency development program through formal educational institutions at Diploma, Undergraduate, Postgraduate, and Doctoral levels.
2. Training Program, non-academic competency development programs through certification, training or courses, which can be delivered through methods including but not limited to conventional or experimental methods, face-to-face classes, seminars/webinar, E-learning, Coaching, Mentoring, On-Job-Training (Job Assignment and/or Job Rotation) Self-Learning, and Blended Learning, delivered face-to-face (offline), electronically (online/online) or both.
3. Internship Program, program to increase skills and expertise directly in a related industry for a certain time.

Pelindo senantiasa mengedepankan pembelajaran berkesinambungan kepada semua pekerja karena Perseroan percaya bahwa pengembangan kompetensi akan berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis Perseroan. Pelindo memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pekerja untuk dapat mengikuti program pengembangan kompetensi yang diadakan Perseroan. Sejalan dengan prinsip tersebut, Perseroan mengimplementasikan program pengembangan kompetensi pekerja secara intensif dan berkesinambungan.

Pelindo prioritizes continuous learning for all employees because the Company believes that competency development will have a positive impact on its business growth. Pelindo gives equal opportunities for all employees to be able to take part in the competency development program held by the Company. In line with these principles, the Company organizes intensive and sustainable employee competency development program.

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Competency Development Implementation

Tabel Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2022
Competency Development Based on Job Level in 2022

No.	Level Jabatan Job Level	Jenis Pelatihan Types of Training	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Pegawai Number of Employees	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan Number of employees who have attended training	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan Percentage of those who have attended training for each job level	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap jenis pelatihan Percentage of those who have attended training for each type of training
1.	BOD-1	*Training* dan Seminar Training and Seminar	Mengembangkan kompetensi kepemimpinan dan mengembangkan kemampuan strategis untuk mengembangkan suatu usaha Develop leadership competency and develop strategic capabilities to develop a business	228	200	88%	88%
		Sertifikasi Certification			22	10%	10%

Tabel Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2022
Competency Development Based on Job Level in 2022

No.	Level Jabatan Job Level	Jenis Pelatihan Types of Training	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Pegawai Number of Employees	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan Number of employees who have attended training	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan Percentage of those who have attended training for each job level	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap jenis pelatihan Percentage of those who have attended training for each type of training
2.	BOD -2	*Training* dan Seminar Training and Seminar	Mengembangkan kompetensi kepemimpinan dan mengembangkan kemampuan strategis untuk mengembangkan suatu usaha Develop leadership competency and develop strategic capabilities to develop a business	629	573	91%	91%
		Sertifikasi Certification			77	12%	12%
3.	BOD-3	*Training* dan Seminar Training and Seminar		1.251	1.108	89%	89%
		Sertifikasi Certification			148	12%	12%
4.	BOD-4	*Training* dan Seminar Training and Seminar		2.354	2.045	87%	87%
		Sertifikasi Certification			279	12%	12%
5.	BOD-5	*Training* dan Seminar Training and Seminar		2.744	2.034	74%	74%
		Sertifikasi Certification			138	5%	5%
JUMLAH TOTAL				**7.206**	**6.642**		**92,17%**

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Dalam rangka mengukur dan mendukung pengembangan efektivitas Program Pembelajaran, maka dilaksanakan proses evaluasi sebagai berikut:

1. Evaluasi Program Pendidikan:
   a. Evaluasi Penyelenggara meliputi pengajar dan fasilitas;
   b. Evaluasi Peserta dilakukan dengan:
      - Penyerahan laporan *progress* secara berkala, hasil tugas akhir akademis, transkrip, dan Ijazah Asli kepada Pengelola SDM masing-masing unit kerja dan dilaporkan kepada *Group Head* Pengelolaan SDM Kantor Pusat;
      - Melakukan *sharing knowledge* atas tugas akhir akademik dan pengetahuan lain yang diperoleh pada saat pendidikan.

Competency Development Implementation Evaluation

In order to measure and support the Learning Program effectiveness, the evaluation process is carried out as follows:

1. Education Program Evaluation:
   a. Evaluation of Organizer, includes instructors and facilities;
   b. Evaluation of Participants is carried out by:
      - Periodic submission of progress reports, academic final assignment results, transcripts, and original diplomas to HC Manager of each work unit and reported to Head Office HC Management Group Head;
      - Sharing knowledge on academic final assignments and other knowledge obtained during education.

2. Evaluasi Program Pelatihan:
   a. Evaluasi Penyelenggaraan Pembelajaran (Level 1), yaitu evaluasi terhadap penyelenggaraan suatu pelatihan yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan program pembelajaran yang diukur melalui metode survei;
   b. Evaluasi Pengetahuan Peserta Pembelajaran (Level 2), yaitu evaluasi terhadap pekerja pada akhir suatu pelatihan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat penyerapan pembelajaran dan menyatakan kelulusan pekerja dalam pelatihan tersebut yang diukur melalui metode-metode yang ditetapkan oleh pengajar;
   c. Evaluasi Perilaku Peserta Pembelajaran (Level 3), yaitu evaluasi terhadap pekerja yang telah kembali ke unit kerjanya yang bertujuan untuk mengetahui perubahan perilaku dan pemanfaatan hasil pelatihan di unit kerja yang diukur melalui hasil observasi atasan selama 3 (tiga) – 6 (enam) bulan;
   d. Evaluasi Dampak Pembelajaran (Level 4), yaitu evaluasi dampak atau manfaat pelatihan terhadap kinerja individu pekerja, atau kinerja unit dimana pekerja bekerja, atau kinerja perusahaan secara keseluruhan.
3. Evaluasi Program Magang:
   a. Evaluasi Penyelenggara meliputi materi magang, proses magang, fasilitas yang diberikan oleh instansi yang menyediakan program magang.
   b. Evaluasi Peserta dilakukan dengan:
      - Menyusun laporan pelaksanaan magang;
      - Melalui *sharing knowledge* hasil magang pada waktu yang ditentukan oleh Pengelola SDM di masing-masing unit kerja dan dilaporkan kepada *Group Head* Pengelolaan SDM Kantor Pusat.

Biaya Pengembangan Kompetensi

Biaya pengembangan kompetensi pada periode 2022 adalah sebesar Rp39.805.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Juta Rupiah).

Rencana Pelatihan Tahun 2023

Pada tahun 2023, Perseroan telah memiliki rencana pelatihan meliputi, program pembelajaran terkait regulasi dan kompetensi akademi, ahli kepelabuhanan untuk pekerja dengan masa kerja di atas 10 Tahun, pelatihan *financial* untuk pekerja bagian keuangan maupun *non financial*, pelatihan hukum untuk divisi hukum dan diluar hukum, dasar-dasar operasional (terminal petikemas dan non petikemas), P3K (Program Pengembangan Pekerja Fungsional), pelatihan K3 & Lingkungan, pelatihan dan sertifikasi analisa pengolahan limbah B3, Sertifikasi Ahli Manajemen Proyek, Sertifikasi Ahli K3 Listrik (Kemenaker), Teknik bernegosiasi dan *complain handling*, kearsipan dan administrasi, serta Sertifikasi *Lead Auditor* ISO 9001

PENGEMBANGAN KARIR

Pada Tahun 2022 telah diterbitkan Peraturan Direksi tentang Pendelegasian Kewenangan Mutasi. Peraturan Direksi ini mengatur tentang Kewenangan Mutasi yang didelegasikan oleh Kantor Pusat ke *Subholding* dan Regional. *Subholding* dan Regional dapat menerbitkan Surat Keputusan Alih Tugas untuk melakukan rotasi terhadap Pekerja Perseroan yang ditugaskan di sana pada level tertentu. Selain itu, telah disusun

2. Training Evaluation Program:
   a. Evaluation of Learning Implementation (Level 1), namely evaluation of training implementation that aimed at improving learning program services as measured by the survey method;
   b. Evaluation of Learning Participants' Knowledge (Level 2), namely an evaluation of employees at the end of a training which aims to determine the level of learning absorption and certify employee's graduation in training which is measured through the methods set by the instructor;
   c. Evaluation of Learning Participants' Behavior (Level 3), namely an evaluation of employee who have returned to their work unit which aims to determine changes in behavior and the utilization of training results in work units as measured through the results of supervisor's observations for 3 (three) - 6 (six) months;
   d. Learning Impact Evaluation (Level 4), namely evaluating the impact or benefits of training on performance of individual employee, or performance of employee's unit work, or performance of the Company as a whole.

3. Apprentice Program Evaluation:
   a. Evaluation of the Organizer, includes apprenticeship material and process, as well as facilities provided by agencies providing apprenticeship programs.
   b. Participant Evaluation is carried out by:
      - Prepare a report on apprenticeship implementation;
      - Through sharing knowledge of apprenticeship results at the time determined by HC Manager in each work unit and reported to Head Office HC Management Group Head.

Competency Development Cost

Competency development costs for 2022 period amounted to Rp39,805,000,000,- (Thirty Nine Billion Eight Hundred and Five Million Rupiah).

2023 Training Plan

In 2023, the Company's training plan will include learning programs related to academic regulations and competencies, port experts for employees who have worked for more than 10 years, financial training for employees in the financial and non-financial divisions, legal training in the legal and non-legal divisions, operational basics (container and non-container terminals), P3K (Functional Employee Development Program), OHS & Environment training, B3 waste processing analysis training and certification, Project Management Expert Certification, OHS Electricity Expert Certification (Ministry of Manpower), Negotiation techniques and complaints handling, filing and administration, as well as ISO 9001 Lead Auditor Certification.

CAREER DEVELOPMENT

In 2022, the Board of Directors Regulation concerning Transfer of Authority Delegation has been issued. This Board of Directors Regulation regulates Transfer of Authorities delegated by Head Office to Sub Holdings and Regional Offices. Sub Holdings and Regionals can issue a Decision Letter of Transfer to rotate the Company's Employees assigned there at a certain level. Apart from that, Talent Management within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

juga mengenai Manajemen Talenta di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang mengatur tentang pengelolaan pekerja yang memiliki kompetensi dan kinerja yang tinggi mulai dari pengklasifikasian, perputaran, hingga pengembangannya.

has also been prepared, which regulates the management of employees who have high competencies and performance starting from classification, turnover, until development.

Dalam rangka pengembangan karier, tentunya Perseroan melaksanakan Alih Tugas ke berbagai posisi sesuai kebutuhan Perseroan kepada Pekerja yang memenuhi persyaratan untuk menduduki posisi tersebut, baik melalui pelaksanaan mutasi ataupun penugasan melalui *Job Assignment* dan *Job Sharing*. Alih tugas ini dilakukan baik untuk pemenuhan posisi jabatan lowong, penataan SDM dalam serah terima operasi, *replacement* dari perubahan struktur organisasi *Subholding*, Regional, ataupun unit lainnya di bawah *Holding*, maupun hasil dari pelaksanaan *Job Bidding* (Lelang Jabatan).

In the context of career development, the Company carries out Transfer to various positions according to the needs of the Company to Employees who meet requirements to occupy the positions, either through implementation of transfers or assignments through Job Assignment and Job Sharing. This transfer is carried out to fulfill vacant positions, structuring Human Resource in operations handover, replacement from changes in organizational structure of Sub Holding, Regional, or other units under the Holding, as well as the results of Job Bidding.

Pada Tahun 2022, Perseroan melaksanakan *Job Bidding* (Lelang Jabatan) untuk seluruh posisi di Kantor Pusat, *Subholding*, dan Regional. Hal ini dilaksanakan untuk mendapatkan kandidat yang paling sesuai untuk menduduki posisi-posisi yang ada terutama setelah pelaksanaan merger Perseroan. Mekanisme *Job Bidding* dilakukan mulai dari pembukaan lowongan, permintaan rekomendasi kepada para atasan dari masing-masing *incumbent* (pemangku jabatan) seleksi tertulis, wawancara dengan pihak *user* dan SDM bidang Pengelolaan SDM, hingga pembuatan Surat Keputusan Direksi Alih Tugas kepada Pekerja yang terpilih dari *Job Bidding*.

In 2022, the Company has been performed Job Bidding for all positions at Head Office, Sub Holding and Regional, with the goal of obtaining the most suitable candidates to occupy existing positions, especially after the Company's merger. Job Bidding mechanism is started from opening vacancies, requesting recommendations to supervisor from each incumbent (job holder), written selection, interviews with users and HC in in charge of HC Management, up to making Board of Directors Decree on Transfer to Employees selected from Job Bidding.

Perseroan juga melakukan penyusunan Struktur Karir, Jalur Karir, Pohon Karir, serta Aspirasi Karir baik dari sisi pekerja itu sendiri, atasan pekerja, dan para pemangku jabatan, sebagai upaya agar pengelolaan dan pengembangan karier Pekerja lebih sistematis dan terarah serta tetap sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan Aspirasi Pekerja.

The Company also prepares Career Structure, Career Path, Career Tree, and Career Aspirations both from employee's own point of view, employee's supervisor, and the job holder, as an effort to make the management and development of Employee's career more systematic and focused and still in accordance with the needs of the Company and Employee Aspirations.

PENILAIAN KINERJA

Kebijakan terkait pengelolaan kinerja berdasarkan pada Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/15/8/1/KPIU/UTMA/PLND-22 tanggal 15 Agustus 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Individu di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Pelindo secara berkala melakukan *review* dan penilaian terhadap pencapaian kinerja individu Pekerja berdasarkan target dan realisasi pada ukuran kinerja individu yang ditetapkan melalui *cascading* dari *key performance individu* (KPI) Korporat. Penilaian kinerja individu dilakukan kepada seluruh (100%) pekerja Perseroan sesuai dengan ukuran kinerja masing-masing yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penilaian kinerja tersebut menjadi salah satu dasar dalam pemberian apresiasi kepada Pekerja atas kinerja yang dihasilkan selama tahun berjalan.

PERFORMANCE ASSESSMENT

Policies related to performance management are based on PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulations Number HK.01/15/8/1/KPIU/UTMA/PLND-22 dated August 15, 2022 concerning Guidelines for Individual Performance Management within PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Pelindo periodically reviews and assesses individual employee performance achievements based on targets and realization on individual performance measures as determined through cascading from corporate individual key performance (KPI). Individual performance assessments are conducted to all (100%) of the Company's employees according to predetermined performance measures. The results of performance assessment are one of the bases for giving appreciation to employees for their performance during the year.

Selain itu, hasil penilaian kinerja individu akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan perjalanan karir pekerja seperti mutasi/rotasi, promosi, dan juga demosi. Penilaian kinerja individu terus diupayakan untuk dilakukan secara objektif tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, pandangan politik, dan sebagainya. Melalui proses penilaian kinerja individu yang adil, objektif, dan transparan, Perseroan optimis akan tercipta lingkungan kerja yang sehat, menumbuhkan kepuasan Pekerja, serta mendorong

In addition, the results of individual performance assessments will become one of the bases in determining employee career path such as transfers/rotations, promotions, and demotions. Individual performance assessment is continued to be pursued objectively without discriminating against ethnicity, religion, gender, political views and others. Through a fair, objective, and transparent individual performance assessment process, the Company is optimistic to be able to create a healthy work

motivasi Pekerja untuk terus meningkatkan kinerja individu dan kinerja perusahaan.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan implementasi standardisasi pengelolaan kinerja individu di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada seluruh pekerja yang berada pada unit kerja Kantor Pusat, Regional dan *Subholding*. Implementasi dimaksud dilakukan dengan harapan agar pekerja dapat memahami dengan baik terkait pedoman pengelolaan kinerja individu yang berlaku di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

REMUNERASI

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan Visi menjadi "Pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia", berkomitmen untuk secara konsisten memberikan kesejahteraan bagi para Pekerja. Pemberian remunerasi, fasilitas dan kesejahteraan pekerja pasca kerja oleh Perusahaan pasca penggabungan masih mengikuti kebijakan di masing-masing Perusahaan sebelum penggabungan sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/1/10/1/ HUKU/UTMA/PLND-21 tanggal 01 Oktober 2021 Tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/15/10/1/KIRF /UTMA/PLND-21 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penggunaan Kebijakan Remunerasi, Fasilitas, *Benefit*, dan Kesejahteraan Paska Kerja PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

PROGRAM PENSIUN

Dalam alur sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia, terdapat tahapan dimana pegawai akan memasuki masa pensiun atau pengakhiran hubungan kerja. Pemberian remunerasi, fasilitas dan kesejahteraan pegawai pasca kerja oleh Perusahaan pasca penggabungan masih mengikuti kebijakan di masing-masing Perusahaan sebelum penggabungan sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/1/10/1/HUKU/UTMA/PLND-21 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/15/10/1/KIRF/ UTMA/ PLND-21 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penggunaan Kebijakan Remunerasi, Fasilitas, *Benefit*, dan Kesejahteraan Paska Kerja PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dalam kebijakan masing-masing Perusahaan sebelum penggabungan, mengatur ketentuan terkait:

environment, foster employee satisfaction, and encourage employee motivation to continue to improve individual performance and company performance.

In 2022, the standardization of individual performance management within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has been carried out for all employees in Head Office, Regional and Sub Holding work units. The intended implementation was conducted with the hope that employees can have better understanding about the individual performance management guidelines that apply within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

REMUNERATION

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) with the Vision of becoming "Leader of an integrated and world-class maritime ecosystem", is committed to consistently providing welfare for its employees. Provision of remuneration, facilities and post-employment welfare for employees after the merger, still follows the policies of each company prior to the merger as stipulated in the Regulation the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/1/10/1/ HUKU/UTMA/PLND-21 dated October 01, 2021 Concerning Temporary Enactment of the Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) At PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

The Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/15/10/1/KIRF/UTMA/PLND-21 dated October 15, 2021 concerning Use of Remuneration Policies, Facilities, Benefits and Post-Employment Welfare of PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero) by PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

PENSION PROGRAM

In the Human Resource management system, there are stages where employee will enter retirement or termination of employment relationship. Provision of post-employment remuneration, facilities and welfare after the merger still follows the policies of each company prior to the merger as stipulated in the Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/1/10/1/HUKU/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021 concerning Temporary Enactment of the Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/15/10/1/KIRF/UTMA/PLND-21 dated October 15, 2021 concerning the Use of Remuneration Policies, Facilities, Benefits, and Post-Employment Welfare of PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero) by PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The policies of each Company before the merger regulate the followings:

1. Pegawai yang diberhentikan atau pensiun jika mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, akibat pelanggaran disiplin, permintaan sendiri, mengikuti program *Golden Handshake* dan lain sebagainya;
2. Kesejahteraan pegawai saat memasuki masa pensiun dengan program pensiun baik manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.

Komponen program Pensiun pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero), antara lain:
1. Program Pensiun Manfaat Pasti pada Dana Pensiun Pemberi Kerja;
2. Program Pensiun Iuran Pasti pada Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
3. Program Asuransi Tunjangan Hari Tua;
4. Program Pemberian Pesangon dan lainnya;
5. Program Jaminan sosial Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
6. Program Asuransi Jiwa.

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI (PPMP)

Program Pensiun Manfaat Pasti ("PPMP") adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) yang pendiriannya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-049/MK.13/1989 tanggal 13 Januari 1989. Dana Pensiun ini merupakan kelanjutan program pensiun yang dikelola oleh Yayasan Bersama Dana Pensiun Perusahaan Umum Pelabuhan I, II, III, IV dan Perusahaan Umum Pengerukan (YP4) yang telah didirikan sebelumnya. PPMP berlaku bagi pegawai tetap Perusahaan yang diangkat sebelum tahun 2002.

Sehubungan dengan status merger per 1 Oktober 2021, maka Pendiri Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Mitra Pendiri yaitu PT Pengerukan Indonesia (Rukindo). Adapun besaran Iuran dan Manfaat Pensiun pada Program ini berdasarkan Peraturan Dana Pensiun yang disusun oleh Pendiri dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI (PPIP)

Program Pensiun Iuran Pasti ("PPIP") adalah program pensiun yang Iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh Iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai manfaat pensiun. Pegawai yang tidak didaftarkan pada PPMP, didaftarkan pada PPIP Dana Pensiun Pelindo Purnakarya (DP3) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), disamping terdapat Pegawai yang menjadi peserta PPMP dan PPIP.

1. Employees who are terminated or retire if they reach the retirement age limit, passed away, as a result of disciplinary violations, at their own request, following the Golden Handshake program and so on;
2. Employee welfare when entering retirement age with a pension program, both short term and long term benefits.

The components of Pension program at PT Pelabuhan Indonesia (Persero), include:
1. Defined Benefit Pension Program at Employer Pension Fund;
2. Defined Contribution Pension Program in Employer Pension Funds and Financial Institution Pension Funds;
3. Old Age Allowance Insurance Program;
4. Severance Provision Program and others;
5. Workforce social security program by the Employment Social Security Administration Agency (BPJS);
6. Life Insurance Program.

DEFINED BENEFIT PENSION PLAN (PPMP)

Defined Benefit Pension Plan ("PPMP") is a pension program whose benefits are stipulated in the Pension Fund regulations. This program is managed by the Port and Dredging Company Pension Fund (DP4), whose establishment has been approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-049/MK.13/1989 dated January 13, 1989. This pension fund is a continuation of the pension program managed by Joint Foundation for Pension Funds of Perusahaan Umum Pelabuhan I, II, III, IV and Public Dredging Company (YP4) which had been previously established. PPMP applies to permanent employees of the Company who were appointed before 2002.

In connection with the merger status as of October 1, 2021, the Founder of Port and Dredging Company Pension Fund (DP4) became PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Founding Partner, namely PT Pengerukan Indonesia (Rukindo). The amount of Pension Contributions and Benefits in this Program is based on the Pension Fund Regulations drawn up by the Founder and stipulated by the Financial Services Authority.

DEFINED CONTRIBUTION PENSION PLAN (PPIP)

Defined Contribution Pension Plan ("PPIP") is a pension program whose contributions are stipulated in the Pension Fund Regulations and all contributions and the results of their development are recorded in each Participant's account as pension benefits. Employees who are not registered with the PPMP are registered with Pelindo Purnakarya Pension Fund PPIP (DP3) or Financial Institution Pension Fund (DPLK), besides there are employees who are PPMP and PPIP participants.

SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resource Information System

Pada tahun 2022 Perseroan telah secara bertahap mengelola sumber daya manusia pada s*ingle system Cloud* ERP SAP RISE modul *Human Resource Management* (SAP HCM) dan mengintegrasikan proses secara *end-to-end*. Solusi SAP HCM digunakan Perseroan untuk mengelola proses-proses inti SDM seperti:

1. Pengelolaan organisasi;
2. Pengelolaan data pekerja;
3. Pengelolaan data penempatan pekerja;
4. Pengelolaan jadwal kerja dan kehadiran;
5. Pengelolaan *payroll* dan *benefit;*
6. Pengelolaan kedisiplinan pekerja;
7. Pengelolaan perjalanan dinas; dan
8. Pengelolaan perencanaan biaya pekerja.

SAP HCM diimplementasikan untuk memastikan data secara efektif dan efisien dikelola di satu sumber yang sama dan terstandar dengan tetap memperhatikan kebijakan yang berlaku baik yang sudah diharmonisasi maupun kebijakan masing-masing eks Regional. Perseroan juga mengintegrasikan SAP HCM dengan sistem lain yang berperan untuk mempermudah antar muka proses-proses tersebut bagi seluruh pekerja yang dapat diakses oleh pekerja dimanapun dan kapanpun, meliputi:

1. MyPelindo - Pelindo *Travel* (P-Travel)
   Portal pengelolaan perjalanan dinas yang meliputi proses administrasi pengajuan, verifikasi biaya serta pertanggungjawaban perjalanan dinas pekerja. P-*Travel* juga menjadi portal bagi pihak ketiga penyedia jasa pemesanan tiket transportasi dan akomodasi dalam melayani kebutuhan perjalanan dinas perusahaan. P-*Travel* terintegrasi dengan sistem keuangan yang memungkinkan kontrol terhadap anggaran dan biaya perjalanan dinas.
2. MyPelindo - Pelindo *Clock In/Clock Out* (P-CICO)
   Mobile apps yang memiliki kapabilitas *face recognition* serta *geofencing* untuk memastikan perekaman kehadiran secara lebih fleksibel di area kerja namun tetap memperhatikan kontrol atas kebenaran data dan lokasi penempatan pekerja.
3. MyPelindo - Pelindo *E-Office* (PEO)
   Merupakan sistem pengelolaan korespondensi serta naskah dinas perusahaan baik secara internal maupun eksternal. PEO mendukung *Good Corporate Governance* (GCG) dengan memungkinkan koordinasi kedinasan yang *traceable*, efisien serta pengarsipan naskah dinas secara lebih terstruktur.
4. Pelindo *Employee Self Service* (P-ESS)
   Portal *employee self-service* bagi pekerja untuk secara mandiri melakukan pengelolaan data personal pekerja, jadwal kerja, kehadiran, cuti, lembur, *benefit, payslip*. P-ESS memungkinkan seluruh administrasi pekerja dilakukan dengan lebih mudah dengan tetap menerapkan kontrol melalui *workflow approval* untuk setiap proses sesuai dengan ketentuan perusahaan. Dengan adanya P-ESS, pekerja lebih memiliki tanggung jawab/*ownership* terhadap data masing-masing, sehingga fungsi SDM tidak hanya administratif, melainkan melakukan kontrol dan analisis.

In 2022, the Company has gradually carried out Human Resource management in a single system Cloud ERP SAP RISE Human Resource Management (SAP HCM) module and integrated processes in an end-to-end manner. The SAP HCM solution is used by the Company to manage core HC processes such as:

1. Organizational management
2. Employee data management
3. Management of employee placement data
4. Management of work schedules and attendance
5. Management of payroll and benefits
6. Management of employee discipline
7. Management of business travel
8. Management of labor cost planning

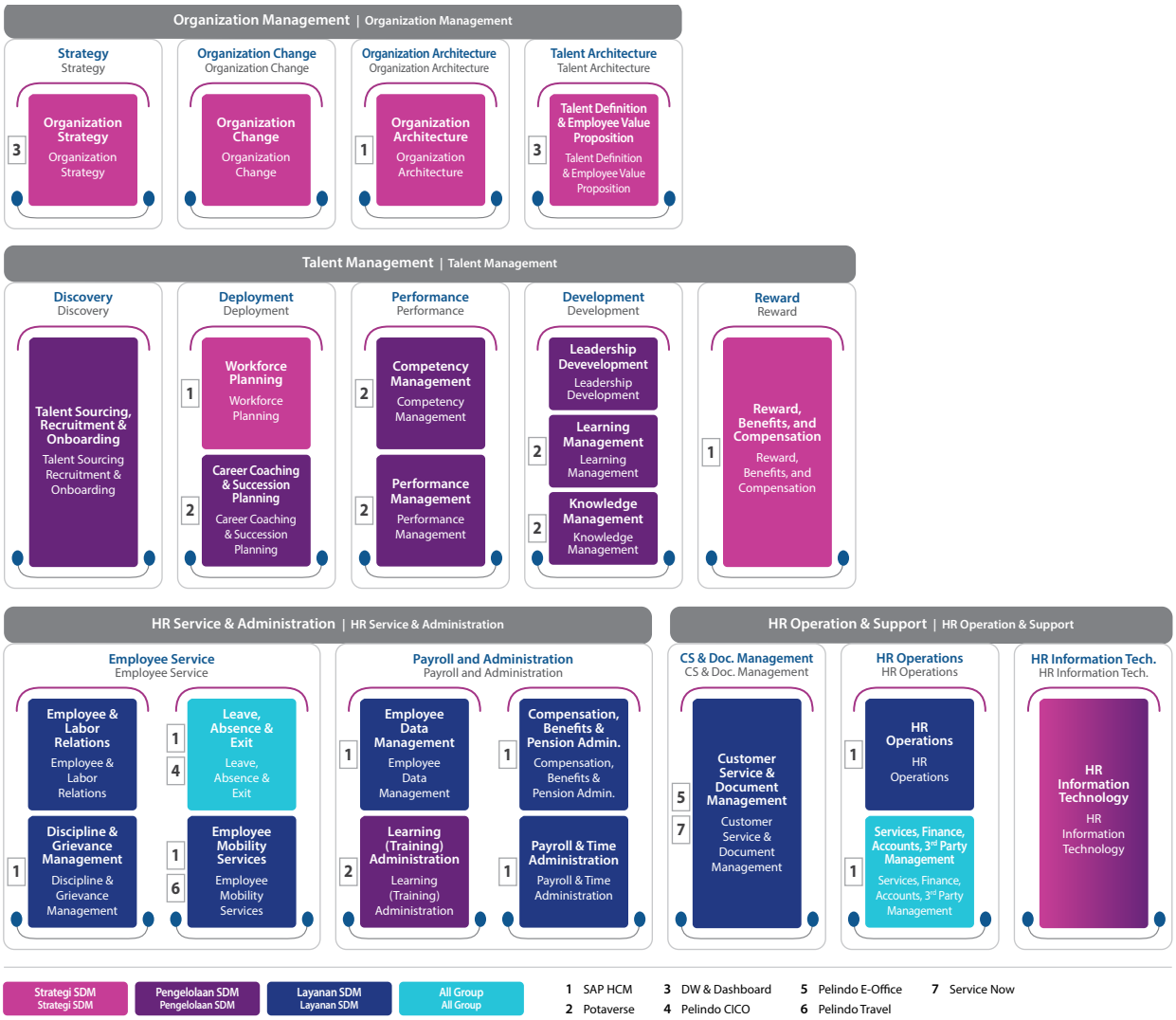
SAP HCM is implemented to ensure that data is effectively and efficiently managed in the same and standardized source while taking into account the applicable policies that have been harmonized and the policies of each ex-region. The Company also integrates SAP HCM with other systems whose role is to facilitate the interface of these processes for all workers which can be accessed by workers anywhere and anytime, including:

1. MyPelindo - Pelindo Travel (P-Travel)
   Business travel management portal, which includes the administrative process of filing, cost verification and accountability of employee business travel. P-Travel is also a portal for third-party ticket booking service providers for transportation and accommodation in serving the Company's business travel needs. P-Travel is integrated with the financial system, which allows control over business travel budgets and expenses.
2. MyPelindo - Pelindo Clock In/Clock Out (P-CICO)
   Mobile apps that have face recognition and geo-fencing capabilities to ensure more flexible attendance recording in the work area but still pay attention to control over the correctness of data and the location of worker placement.
3. MyPelindo - Pelindo E-Office (PEO)
   Is a correspondence management system as well as the Company's official document, both internally and externally. PEO supports Good Corporate Governance (GCG) by enabling traceable, efficient official coordination and more structured archiving of official documents.
4. Pelindo Employee Self Service (P-ESS)
   Employee self-service portal for employees to independently manage employee personal data, work schedules, attendance, leave, overtime, benefits, payslip. P-ESS allows all employee administration to be carried out more easily while still implementing control through workflow approval for each process in accordance with company regulations. With the P-ESS, employees have more responsibility/ownership of their respective data, so that the HC function is not only administrative, but also performs control and analysis.

5. *Portaverse*
   Portaverse merupakan aplikasi Pengelolaan SDM yang terintegrasi dengan konsep sosial media yang menggabungkan 3 (tiga) modul sistem, di antaranya *Knowledge Management System* (KMS), *Learning Management System* (LMS), dan *Talent & Performance System* (T/PMS). *Portaverse Knowledge* mendukung pencapaian tujuan perusahaan melalui sistem pengelolaan dan pemanfaatan pengetahuan yang lengkap dan terintegrasi. *Portaverse Learning* mengoptimalkan sistem pembelajaran untuk meningkatkan kapabilitas pekerja sesuai perkembangan bisnis perusahaan. *Portaverse Talent & Performance* meningkatkan proses *talent life-cycle* perusahaan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan *talent* secara *online* dan terintegrasi.
6. HC *Dashboard*
   Sistem yang memungkinkan manajemen mendapatkan *overview* data secara interaktif dan visual terkait kondisi sumber daya manusia terkini di perusahaan. HC *Dashboard* diharapkan dapat menjadi *decision support system* bagi manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat terkait dengan sumber daya manusia di Perseroan.
7. Implementasi ERP beserta *surrounding system* terkait pengelolaan SDM disertai dengan pelaksanaan *change management*, baik pada proses yang berjalan secara *end-to-end* maupun kepada setiap *stakeholder* terkait, mulai dari manajemen, pekerja hingga pihak-pihak eksternal. Perseroan selanjutnya akan melaksanakan standardisasi dan tata kelola serta mengembangkan kapabilitas integrasi sistem antar entitas grup terkait data-data SDM untuk mengoptimalkan pengelolaan administrasi serta talenta yang dimiliki.

5. Portaverse
   Portaverse is an HC Management application integrated with the social media concept that combines 3 (three)-system modules, including Knowledge Management System (KMS), Learning Management System (LMS), and Talent & Performance System (T/PMS). Portaverse Knowledge supports the achievement of corporate goals through a complete and integrated knowledge management and utilization system. Portaverse Learning optimizes the learning system to improve employee capabilities according to the company's business development. Portaverse Talent & Performance improves the company's talent life-cycle process which includes online and integrated talent planning, implementation, measurement and reporting activities.

6. HC Dashboard
   A system that allows management to get an interactive and visual overview of data related to the current condition of Human Resource in the company. The HC Dashboard is expected to become a decision support system for management in making more informed decisions related to the company's Human Resource.
7. ERP implementation along with surrounding system related to HC management, accompanied by the implementation of change management, both in end-to-end processes and for each relevant stakeholder, from management, employees to external parties. The company will then carry out standardization and governance as well as develop system integration capabilities between group entities related to Human Resource data to optimize administration and talent management.


Organization Management | Organization Management
Strategy
Strategy
3
Organization Strategy
Organization Strategy
Organization Change
Organization Change
Organization Change
Organization Architecture
Organization Architecture
1
Organization Architecture
Organization Architecture
Talent Architecture
Talent Architecture
3
Talent Definition & Employee Value Proposition
Talent Definition & Employee Value Proposition
Talent Management | Talent Management
Discovery
Discovery
Talent Sourcing, Recruitment & Onboarding
Talent Sourcing Recruitment & Onboarding
Deployment
Deployment
1
Workforce Planning
Workforce Planning
2
Career Coaching & Succession Planning
Career Coaching & Succession Planning
Performance
Performance
2
Competency Management
Competency Management
2
Performance Management
Performance Management
Development
Development
Leadership Devevelopment
Leadership Development
2
Learning Management
Learning Management
2
Knowledge Management
Knowledge Management
Reward
Reward
1
Reward, Benefits, and Compensation
Reward, Benefits, and Compensation
HR Service & Administration | HR Service & Administration
Employee Service
Employee Service
Employee & Labor Relations
Employee & Labor Relations
1
4
Leave, Absence & Exit
Leave, Absence & Exit
1
Discipline & Grievance Management
Discipline & Grievance Management
1
6
Employee Mobility Services
Employee Mobility Services
Payroll and Administration
Payroll and Administration
1
Employee Data Management
Employee Data Management
1
Compensation, Benefits & Pension Admin.
Compensation, Benefits & Pension Admin.
2
Learning (Training) Administration
Learning (Training) Administration
1
Payroll & Time Administration
Payroll & Time Administration
HR Operation & Support | HR Operation & Support
CS & Doc. Management
CS & Doc. Management
5
7
Customer Service & Document Management
Customer Service & Document Management
HR Operations
HR Operations
1
HR Operations
HR Operations
1
Services, Finance, Accounts, 3rd Party Management
Services, Finance, Accounts, 3rd Party Management
HR Information Tech.
HR Information Tech.
HR Information Technology
HR Information Technology
Strategi SDM
Strategi SDM
Pengelolaan SDM
Pengelolaan SDM
Layanan SDM
Layanan SDM
All Group
All Group
1 SAP HCM
2 Potaverse
3 DW & Dashboard
4 Pelindo CICO
5 Pelindo E-Office
6 Pelindo Travel
7 Service Now

INTERNALISASI BUDAYA
Culture Internalization

Sebagai bentuk keberlanjutan dan implementasi dari dikeluarkannya Surat Edaran nomor 0T.02.03/31/12/1/KBDK/UTMA/PLND-21 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Perseroan melaksanakan program internalisasi budaya perusahaan dengan berpegang pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-115/MBU/05/2022 tanggal 10 Mei 2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Pedoman Implementasi Nilai-Nilai Utama Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (AKHLAK) *Culture Journey*.

Adapun tahapan-tahapan dalam AKHLAK *Culture Journey* yang diadaptasi dalam pengelolaan Budaya di Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Awal
   Pada Tahap ini, fokus utama kegiatan pengelolaan budaya adalah membangun kesadaran dan pemahaman SDM akan budaya AKHLAK. Tahap ini dimulai dengan komunikasi yang bertujuan untuk memperkenalkan Nilai-Nilai Utama SDM BUMN kepada seluruh pekerja. Adapun pada tahap ini, kegiatan utama yang dilakukan oleh Pelindo adalah sebagai berikut:
   a. Komunikasi oleh Para Pemimpin dilakukan melalui pelaksanaan Rakernas pada tanggal 24-25 Januari 2022. Adapun selain bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Perusahaan dan Ketercapaian Progres Program Kerja Pasca Penggabungan, Rakernas juga menjadi sebuah media komunikasi pimpinan perusahaan terkait strategi dan target perusahaan guna mendapat dukungan seluruh entitas perusahaan.
   b. Pembentukan *Change Agent* telah dilaksanakan pada tahun 2021 namun pada tahun 2022 telah dilaksanakan *Reinforcement Change Management for Change Agent* pada tanggal 27-28 Juni 2022 terhadap 609 *Change Agent*. Selain sosialisasi *update progress merger* Pelindo, pada sesi ini juga dilaksanakan diskusi bersama *Change Agents* dengan Pengelola Budaya dan Manajemen Integrasi Kantor Pusat.
   c. Penyelenggaraan Kegiatan Pengenalan Budaya dilakukan pada tahun 2022 dimulai dari penyusunan program kerja dalam pengelolaan budaya yang dilaksanakan melalui *Workshop Action Plan*. *Workshop* tersebut dilaksanakan dalam 2 sesi yaitu Sesi Pertama pada tangga 1-2 Maret 2022 dan sesi Kedua pada tanggal 24-25 Maret 2022. Adapun tujuan dari kegiatan ini salah satunya adalah meningkatkan *engagement* pengelola budaya dalam menerapkan perilaku AKHLAK melalui pelaksanaan program budaya. Pada *Action Workshop Plan* inilah diputuskan pengelolaan budaya perusahaan pada tahun 2022 akan mengkampanyekan *Break the sylo* (#BTS) sebagai bagian dari komunikasi budaya perusahaan yang diharapkan terwujud setelah merger yang dilakukan pada tahun 2021.

As a form of sustainability and implementation of the issuance of Circular No. 0T.02.03/31/12/1/KBDK/UTMA/PLND-21 concerning Core Values of Human Resource for State-Owned Enterprises within PT Pelabuhan Indonesia (Persero), the Company executes a corporate culture internalization program by adhering to the Decree of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SK-115/MBU/05/2022 dated May 10, 2022 concerning Guidelines for Implementing the Main Values of Human Resource for State-Owned Enterprises (AKHLAK) Culture Journey.

The stages in AKHLAK Culture Journey that are adapted in managing Culture in the Company are as follows:

1. Initial Stage
   At this stage, the main focus of cultural management activities is to build Human Resource awareness and understanding of AKHLAK culture. This stage begins with communication aimed at introducing the Main Values of SOE HC to all employees. At this stage, the main activities carried out by Pelindo are as follows:
   a. Communication by Leaders is carried out through the National Working Meeting on January 24-25, 2022. Apart from aiming to evaluate the Company's performance and Achievement of the Progress of Post-Merger Work Programs, the National Working Meeting also becomes a communication medium for company leaders regarding company strategies and targets to get the support of all corporate entity.
   b. The establishment of Change Agents has been carried out in 2021, and in 2022 Reinforcement Change Management for Change Agents has been carried out on June 27-28, 2022 for 609 Change Agents. In addition to the socialization of Pelindo's merger progress update, this session also held discussions between Change Agents with Culture Manager and Head Office Integration Management.
   c. Cultural Introduction Activities, which was carried out in 2022 starting with the preparation of a work program in cultural management through an Action Plan Workshop. The workshop was held in 2 sessions, the first session was on March 1-2, 2022 and the second session was on March 24-25, 2022. One of the objectives of this activity was to increase the engagement of cultural managers in implementing AKHLAK behavior through the implementation of cultural programs. At the Action Workshop Plan, it was decided that the management of corporate culture in 2022 would campaign Break the sylo (#BTS) as part of corporate culture communication, which is expected to materialize after the merger in 2021.

2. Tahap Intervensi (*Intervention*)
Tahap ini merupakan tahap mengupayakan perubahan secara terencana agar SDM BUMN berperilaku selaras dengan Nilai-Nilai Utama SDM BUMN. Dalam tahap ini, kegiatan yang dilaksakan adalah:
   a. Komitmen pemimpin (*Leadership*)
      - Komitmen pemimpin dicerminkan melalui beberapa kegiatan yang melibatkan Direksi dan juga Pimpinan di berbagai tingkat manajemen, kegiatan tersebut yaitu:
      - BERLABUH (Bincang Bersama Pelabuhan Indonesia) merupakan acara *Sharing Session* mengenai budaya yang pada tahun 2022 telah terlaksana sebanyak 27 Episode yang melibatkan Direksi *Holding*, Direksi *Subholding* dan juga *Group Head* Kantor Pusat sebagai narasumber dan pekerja terpilih sebagai presenter. Konsep yang disajikan melalui BERLABUH adalah sebuah konsep *on-line Podcast* yang bertujuan untuk meningkatkan *engagement* Pekerja pada acara tersebut.
      - GH *Power Lunch* adalah sebuah acara makan siang bersamma dengan *Group Head* Kantor Pusat pada tanggal 11 Agustus 2023 yang bertujuan memastikan komitmen *Group Head* untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Budaya.
      - Pelindo *e-Talks* atau disebut Pelindo *Empower Talk* merupakan sarana komunikasi Pimpinan dan kepada pegawai untuk menyampaikan nilai-nilai, budaya serta strategi dan tujuan perusahaan. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak dua kali pertama pada tanggal 28 Oktober 2022 di Makassar dan kedua pada tanggal 5 Desember 2022 di Medan.
   b. Sistem (*System*) dicerminkan dengan upaya manajemen dalam menyelaraskan Nilai-Nilai utama SDM BUMN dengan sistem manajemen atau prosedur. Pada Pelindo, tahap ini telah dilaksanakan dalam pengukuran kinerja berbasis perilaku yang masuk dalam *Performance Management System*. Penilaian ini dilakukan untuk periode penilaian Januari-Desember 2022 dengan menggunakan metode *survey multi rater assessor*.
   c. Simbol (*Symbol*) dicerminkan melalui terciptanya atribut dan lingkungan yang mendukung program implementasi budaya perusahaan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung hal ini tercermin pada dua kegiatan yang terdapat pada dua level yaitu:
      - #BTS Level Departemen *Head* merupakan kegiatan yang melibatkan Departemen *Head* dan Manager Kantor Pusat yang terdiri dari 3 *Batch* pelaksanaan pada periode 5 September-24 Oktober 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan empati dan menghilangkan silo dan juga Departemen Head serta Manager juga menjadi *Agent* Perubahan untuk membangun semangat kolaboratif.
      - Pengelolaan Mutiara Pelindo. Mutiara Pelindo lahir secara resmi melalui Surat Keputusan Direksi No. KP.20.01/21/4/1/KBDK/UTNA/PLND-22 tanggal 21 April 2022 tentang Organisasi Mutiara Pelindo. Organisasi ini lahir dengan semangat pemberdayaan pekerja perempuan dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung wanita untuk dapat berkarya.

2. Intervention Stage
This stage is the stage of seeking planned changes, so that SOE HC can behave in harmony with the Core Values of SOE HC. In this stage, the activities carried out are:

   a. Leaders' commitment (Leadership)
      - Leaders' commitment is reflected through several activities involving the Board of Directors as well as Leaders at various levels of management, with the following activities:
      - BERLABUH (Bincang Bersama Pelabuhan Indonesia) is a Sharing Session on culture, which in 2022 has been held as many as 27 Episodes involving Holding Directors, Sub Holding Directors and also Head Office Group Heads as resource persons and selected employees as presenters. The concept presented through BERLABUH is an on-line Podcast concept that aims to increase Employee engagement at the event.
      - GH Power Lunch is a luncheon with the Head Office Group Head on August 11, 2023, which aims to ensure the Group Head's commitment to support the implementation of cultural management.

      - Pelindo e-Talks, also known as Pelindo Empower Talk, is a means of communication for leaders and employees to convey the values, culture, strategy and goals of the company. This activity was held twice, the first on October 28, 2022 in Makassar and the second on December 5, 2022 in Medan.

   b. System is reflected by management efforts in aligning the main values of SOE HC with management systems or procedures. At Pelindo, this stage has been carried out in behavior-based performance measurement, which is included in the Performance Management System. This assessment was carried out for the January-December 2022 assessment period using the multi rater assessor survey method.
   c. Symbol is reflected through the creation of attributes and environments that support corporate culture implementation programs. The activities carried out to support this are the two activities at two levels:

      - #BTS Department Head Level, an activity that involves Head Office Department Heads and Managers consisting of 3 batches in the period September 5 - October 24, 2022. This activity aims to foster empathy and eliminate silo and also for Department Heads and Managers to become Agent of Change to build a collaborative spirit.

      - Mutiara Pelindo Management. Mutiara Pelindo was officially born through the Decree of Board of Directors No. KP.20.01/21/4/1/KBDK/UTNA/PLND-22 dated April 21, 2022 concerning Pelindo Mutiara Organization. This organization was born with the spirit of empowering women employees by creating a work environment that supports women to work and being empowered.

- Pengelolaan BUMN Muda Pelindo. Merujuk pada pembentukan BUMN Muda, BUMN Muda Pelindo terbetuk melalui Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/28/10/1/KBDK/UTMA/PLND-22 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Organisasi BUMN Muda Pelindo. Wadah organisasi ini ditujukan bagi pekerja millenials untuk bekerja, bersosialisasi, berkarya dan menuangkan ide dan kreatifitas dengan tetap mendukung kinerja bagi para anggotanya.

3. Tahap Penerimaan.
4. Tahap Perubahan Perilaku.

- Management of Pelindo Young SOE. Referring to the formation of Young SOE, Pelindo Young SOE was formed through the Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/28/10/1/KBDK/UTMA/PLND-22 dated October 28, 2022 concerning Pelindo Young SOE Organization. This organizational platform is intended for millennial employees to work, socialize, create and express ideas and creativity while still supporting the performance of its members.

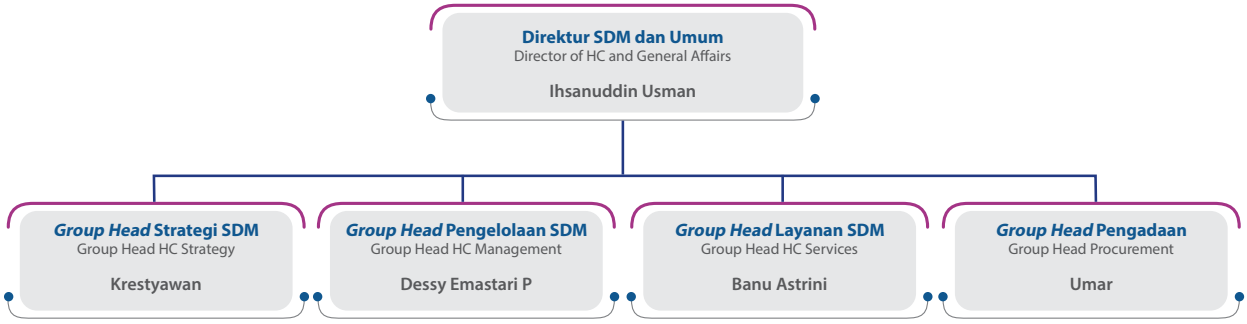
3. Acceptance Stage.
4. Behavior Change Stage.

STRUKTUR PENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resource Management Structure

Berikut adalah Struktur pengelola Sumber Daya Manusia di Pelindo:

The following is the Human Resource management structure at Pelindo:



Tugas Direktorat Sumber Daya Manusia sebagai pengelolaan strategi bidang SDM meliputi:

1. Strategi perencanaan SDM, organisasi dan budaya Perusahaan;
2. Kebijakan dan pengelolaan remunerasi dan *benefit*;
3. Kebijakan dan pengelolaan manajemen talenta dan kinerja SDM;
4. Strategi rekrutmen dan pengembangan SDM;
5. Kebijakan pengelolaan sistem dan infrastuktur bidang SDM;
6. Strategi pengelolaan hubungan industrial, kebijakan masa persiapan pensiun, dan *exit plan*;
7. Kebijakan dan pengelolaan arsip;
8. Kebijakan dan pedoman pengadaan.

The duties of the Directorate of Human Resource as strategic management in the field of HC include:

1. HC planning strategy, organization and corporate culture;
2. Policy and management of remuneration and benefits;
3. Policy and management of talent management and HC performance;
4. HC recruitment and development strategy;
5. System and infrastructure management policies in the HC sector;
6. Industrial relations management strategy, retirement preparation period policies, and exit plans
7. Policy and archive management;
8. Procurement policies and guidelines.

RENCANA KERJA SUMBER DAYA MANUSIA 2023

Human Resource Work Plan for 2023

Dalam rangka penataan bidang Sumber Daya Manusia, untuk tahun 2023 Perseroan telah menyusun program-program strategis sumber daya manusia yang meliputi:

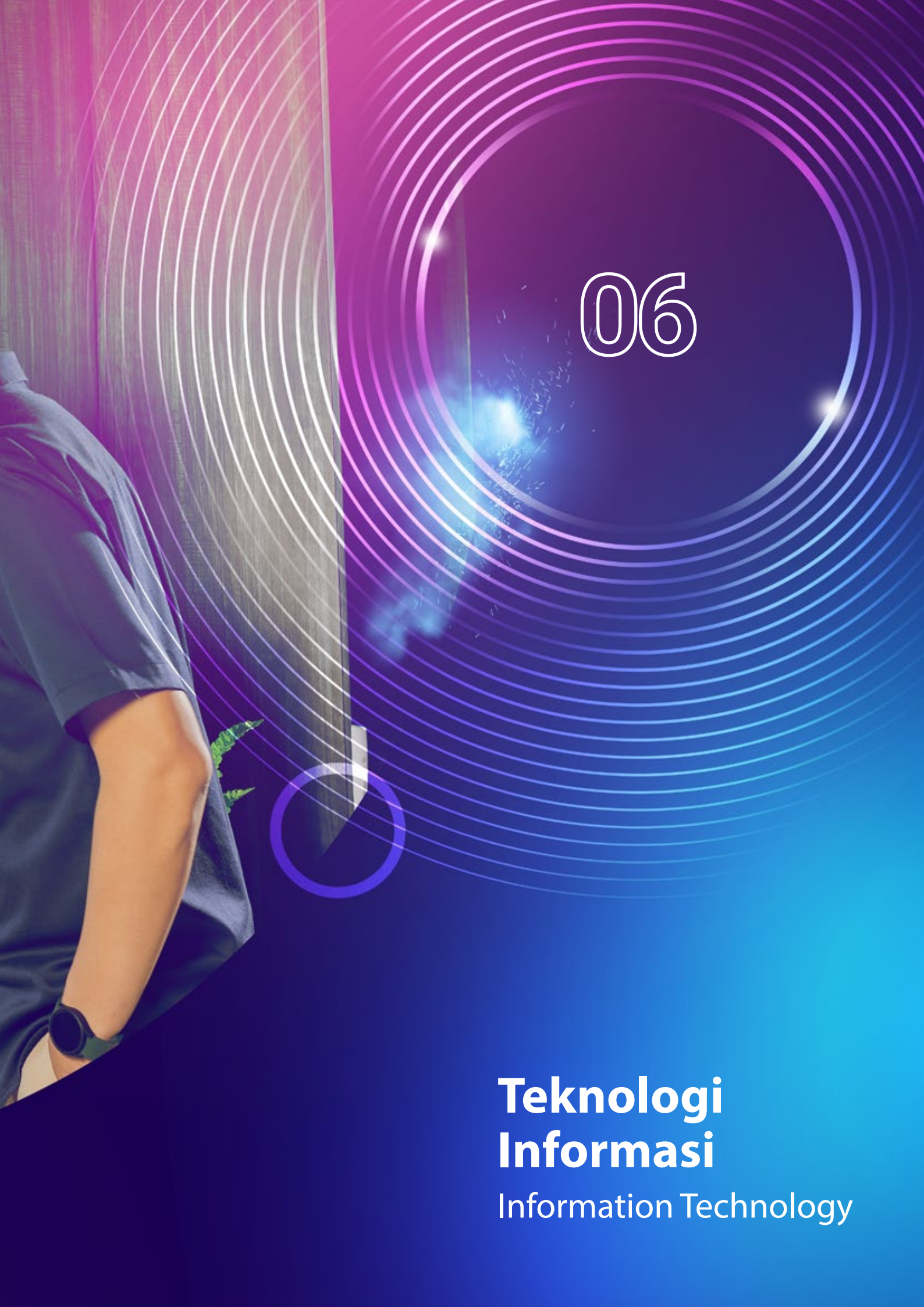
1. Restrukturisasi organisasi dan tata kelola Pelindo;
2. Evaluasi dan implementasi remunerasi;
3. Penyusunan kebijakan kesejahteraan Pekerja;
4. Penyusunan *roadmap* penyehatan Dana Pensiun;
5. Perhitungan beban imbalan kerja PSAK 24;
6. Implementasi kebijakan SDM sebagai dampak dari aksi korporasi dalam pemurnian Bisnis;
7. Penyelarasan jabatan Pekerja Penugasan pada *Group* bisnis Pelindo;
8. Penyusunan pedoman optimalisasi dan *streamliner* struktur jabatan level BOD dan layering organisasi di bawah BOD pada Anak Perusahaan *Non-Cluster*, Perusahaan terafiliasi, KSO, dan Dana Pensiun;
9. Evaluasi kebijakan *Corporate Parenting*;
10. Optimalisasi Pekerja yang pernah menjabat sebagai Pekerja Struktural.
11. Pengembangan *Integrated Human Resource System.*
12. Monitoring implementasi *Roadmap* SDM.
13. Peningkatan kompetensi Pekerja dengan memberikan pelatihan di berbagai bidang terkait.

In the context of Human Resource restructuring, the Company has developed the following strategic Human Resource programs for 2023:

1. Organizational restructuring and governance of Pelindo.
2. Evaluation and implementation of remuneration.
3. Formulation of employee welfare policies.
4. Compilation of a roadmap for restructuring Pension Funds.
5. Calculation of employee benefits expense PSAK 24.
6. Implementation of Hc policies as a result of corporate actions in business refining.
7. Alignment of Assignee employee positions in Pelindo business group.
8. Preparation of guidelines for optimizing and streamlining the BOD level position structure and organizational layering under the BOD in Non-Cluster Subsidiaries, Affiliated Companies, JOs, and Pension Funds.
9. Evaluation of Corporate Parenting policies.
10. Optimization of employees who have served as Structural Employees.
11. Development of Integrated Human Resource System.
12. Monitoring the implementation of Human Resource Roadmap.
13. Increasing employee competencies by organizing training in various related fields.



PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY

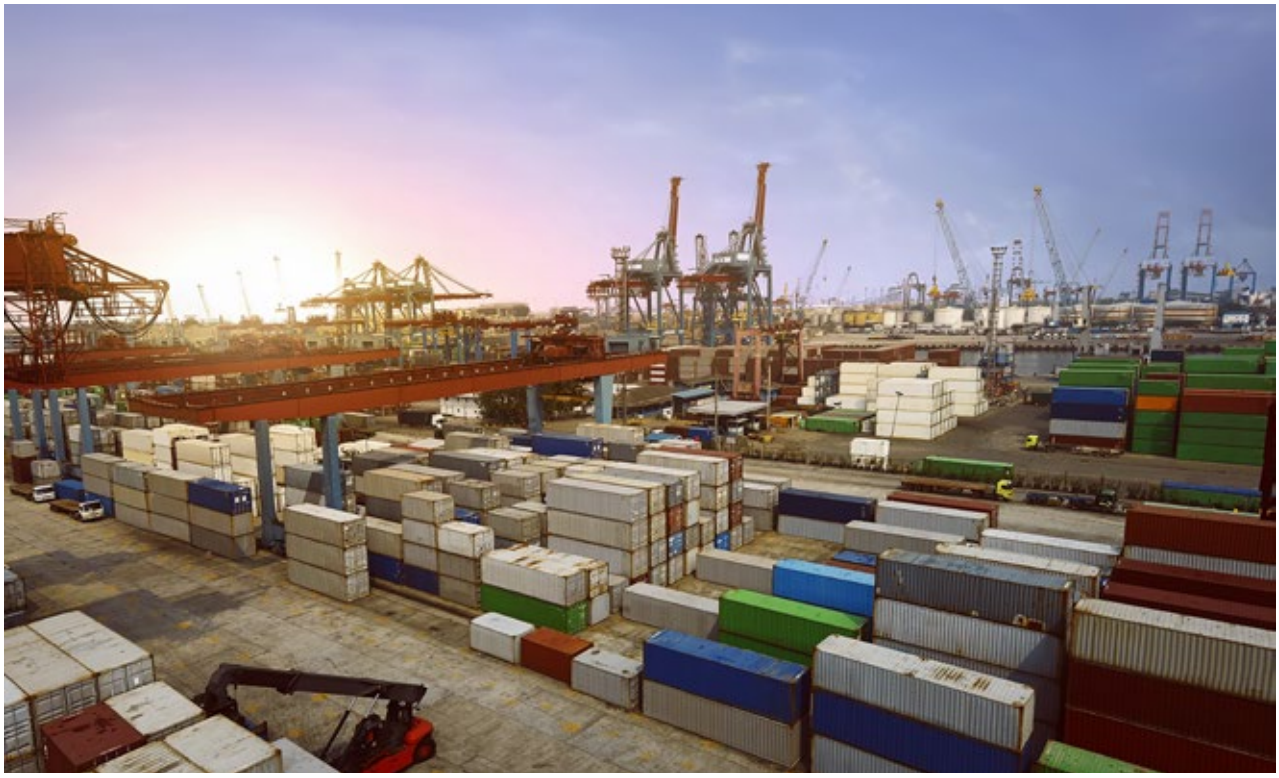


06

Teknologi Informasi

Information Technology

TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology



Teknologi informasi (TI) telah menjadi hal penting bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam mewujudkan visi misi menjadi pelabuhan kelas dunia serta memberikan pengalaman baru bagi pelanggan dalam mendapatkan pelayanan perusahaan. Melalui teknologi informasi perusahaan menemukan cara baru dalam melaksanakan kegiatan agar lebih efektif dan efisien. Hal ini dibuktikan dengan implementasi solusi *information technology* (IT) diseluruh proses bisnis perusahaan. Mulai dari implementasi aplikasi portal pelayanan pelanggan, pelayanan kapal, pelayanan terminal, implementasi sistem untuk proses keuangan dan proses *back office* lainnya.

Secara umum, implementasi teknologi informasi berfokus kepada tiga tujuan yaitu:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi proses bisnis yang ada di perusahaan melalui integrasi aplikasi dan implementasi *single* aplikasi untuk menghilangkan proses serupa dan berulang
2. Peningkatan pendapatan dan pengurangan biaya melalui *real-time transaction* menggunakan aplikasi yang bersifat *online*;
3. Pengendalian yang lebih baik terhadap kinerja perusahaan dan kemudahan dalam pengambilan keputusan dengan memanfaatkan *executive summary dashboard system*.

Information technology (IT) has become important for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in realizing its vision and mission of becoming a world-class port and providing new experiences for customers in obtaining company services. Through information technology companies find new ways of carrying out more effective and efficient activities. This is evidenced by the implementation of information technology (IT) solutions throughout the company's business processes. Starting from the implementation of customer service portal applications, ship services, terminal services, system implementation for financial processes and other back office processes.

In general, the information technology focuses on 3 (three) objectives:

1. Increasing the effectiveness and efficiency of existing business processes in the company through application integration to eliminate similar and repetitive processes;
2. Increasing revenue and reducing costs through real-time transactions using online application; and
3. Better control over company performance and ease of decision making by utilizing the executive summary dashboard system.

MASTER PLAN DAN STRATEGI TEKNOLOGI INFORMASI

Sesuai arahan dari Kementerian BUMN, maka pada tahun 2022 telah disusun IT *Master Plan* PT Pelabuhan Indonesia periode 2022 – 2026 yang selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2021 – 2025. Dalam *Master Plan* IT (ITMP) visi IT Pelindo yaitu sebagai enabler bagi bisnis untuk integrasi ekosistem dan menuju *world class port*. Untuk mencapai visi tersebut maka dijabarkan inisiatif yang tercantum dalam IT *Roadmap* yang terdapat 12 inisiatif utama antara lain, *Journey to Cloud, enhancement Single ERP, Enterprise Datawarehouse,* konsolidasi dan *enhancement* TOS, dan lainnya.

Selain itu di dalam ITMP juga dijabarkan IT Operation Model (ITOM) yang berfungsi untuk menunjukan model operasi bagian IT dalam berhubungan dengan *stakeholder* terkait untuk mencapai visi IT Pelindo. Beberapa hal yang dijabarkan dalam ITOM antara lain IT Forum dan IT *Steering Committe*e. IT Forum adalah wadah bagi tim IT di Pelindo Grup untuk berdiskusi dan melakukan *monitoring progress* yang diselenggarakan secara rutin. Sedangkan IT *Steering Committee* adalah wadah yang terdiri dari Direksi dan manajemen di *holding* yang berfungsi untuk memberi arahan dan mengambil keputusan terhadap hal-hal yang bersifat strategis. Selain hal-hal tersebut, IT *Master Plan* juga berisikan mengenai IT *enterprise architecture,* tren teknologi informasi, dan lainnya. Dengan demikian, Perseroan dapat berjalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* dengan dukungan teknologi dan meminimalkan distrupsi teknologi di era 4.0.

Pada tahun 2022 Teknologi Informasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengusung tema "*Reinforce Foundation*" atau memperkuat fondasi teknologi IT yang berfokus pada Standardisasi aplikasi dan infrastruktur. Beberapa program yang dijalankan pada tahun 2022 adalah:

1. Pengembangan PEO untuk Standardisasi proses tata naskah;
2. Implementasi ERP (SAP) untuk standarisasi proses keuangan dan SDM;
3. Sentralisasi IT *Service Desk*;
4. Penyusunan Peraturan Direksi dan SOP IT;
5. Dan lain-lain.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pada tahun 2022, Pelindo telah melakukan berbagai pengembangan dan implementasi IT guna mendukung dan meningkatkan nilai tambah yang mengedepankan pengalaman baru bagi pelanggan. Adapun pengembangan dan implementasi yang telah dilakukan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi
   Back End:
   a. Pengimplementasian Aplikasi SECURE untuk proses pengadaan di Kantor Pusat, Regional, Cabang dan *Subholding* PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
   b. Pengimplementasian aplikasi PEO untuk proses tata naskah di Kantor Pusat, Regional, Cabang dan *Subholding* PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
   c. Pengimplementasian aplikasi CENTRA untuk proses HR dan Keuangan di *Subholding*;

INFORMATION TECHNOLOGY MASTER PLAN AND STRATEGY

In accordance with the directives from the Ministry of SEs, in 2022, PT Pelabuhan Indonesia's IT Master Plan for the period 2022 – 2026 was prepared aligned with the Company's Long Term Plan for 2021 – 2025. In the IT Master Plan (ITMP) Pelindo's IT vision is to become an enabler for businesses for ecosystem integration and towards a world class port. To achieve this vision, the initiatives listed in the IT Roadmap consist of 12 main initiatives including Journey to Cloud, Single ERP enhancement, Enterprise Datawarehouse, TOS consolidation and enhancement, and others.

In addition, the ITMP describes the IT Operation Model (ITOM) that functions to show the operating model of the IT section in dealing with relevant stakeholders to achieve Pelindo's IT vision. Some of the matters described in the ITOM include the IT Forum and the IT Steering Committee. The IT Forum is a forum for the IT team at Pelindo Group to regularly discuss and monitor progress. While the IT Steering Committee is a forum consisting of the Board of Directors and management at the holding whose function is to provide direction and make decisions on strategic matters. In addition to these matters, the IT Master Plan also contains IT enterprise architecture, information technology trends, and others. Thus, the Company can run by applying the principles of Good Corporate Governance with the support of technology and minimize technological disruption in the 4.0 era.

In 2022, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Information Technology theme was "Reinforce Foundation" or strengthen the IT technology foundation to focus on standardizing applications and infrastructure. Some of the programs implemented in 2022 included:

1. Development of PEO to standardize the drafting process;
2. Implementation of ERP (SAP) to standardize financial and HR processes;
3. Centralization of IT Service Desk;
4. Preparation of Board of Directors' Regulations and IT SOPs;
5. And others.

INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS DEVELOPMENT

In 2022, Pelindo carried out IT developments and implementations to support and increase added value by promoting new experiences for customers. The development and implementation carried out in 2022 was as follows:

1. Application Development and Implementation
   Back End:
   a. Implementation of the SECURE Application for the procurement process at the Head Office, Regional, Branches and Subholdings of PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
   b. Implementation of the PEO application for the drafting process at the Head Office, Regional, Branches and Subholdings of PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
   c. Implemented the CENTRA application for HR and Finance processes in Subholdings;

d. Pengimplementasian P-*Travel* untuk proses perjalanan dinas di Kantor Pusat, *Subholding*, Regional dan Cabang;
e. Pengimplementasian SAP untuk modul ESS, PS, MM, FI, CO, FM, dan HR di Kantor Pusat, Regional dan Cabang;
f. Pengimplementasian PCICO sebagai media absensi pada Kantor Pusat, Regional, Cabang dan *Subholding*;
g. Melakukan proses penambahan lisensi untuk aplikasi E-audit di Kantor Pusat;
h. Sedang dilakukan proses persiapan migrasi ke *Cloud* untuk SAP;
i. Melakukan *roll out E-Catalog* dan PADI di Regional I, II, III dan IV;
j. Melakukan *Go Live* aplikasi HSSE *(Health, Safety, Security and Environment)* untuk HO, Regional dan *subholding*.
k. Pengimplementasian *Dashboard Executive Summary* untuk bidang Operasional, Keuangan, Peralatan dan SDM;
l. Pengimplementasian aplikasi PGOOD di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
m. Pengimplementasian aplikasi PBOS di Kantor Pusat;
n. Pengimplementasian aplikasi PPID di Kantor Pusat;
o. Pengimplementasian aplikasi BIOS di Kantor Pusat, Regional dan Cabang;
p. .Sedang dilakukan pengembangan untuk aplikasi *Portaverse*.

Front End:
a. Pengimplementasian Phinnisi di wilayah Bengkulu, Makassar, Semarang, Samarinda, Kendari, Tanjung Perak, dan Dumai;
b. Pengimplementasian MOS dan TOS di Regional I;
c. Pengimplementasian STID dan SIMON TKBM di area Tanjung Mas, Kendari, Belawan, Tanjung Perak, Balikpapan, Samarinda, Banten, Makassar, Dumai, Panjang, Palembang, dan Pontianak;
d. Melakukan integrasi aplikasi operasional ke SAP;
e. Melakukan implementasi PTOSM di pelabuhan Badas dan Bitung.

2. Peningkatan Infrastruktur TI
a. Saat ini telah berjalan proses konsultasi perencanaan infrastruktur TI Pelindo Tower;
b. Untuk proses pengawasan infrastruktur TI untuk Pelindo Tower sedang dijalankan;
c. Sedang dilakukan pekerjaan infrastruktur IT Pelindo Tower
d. Melakukan penyediaan perangkat pendukung aplikasi phinnisi di area Makassar, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Kendari, Samarinda, Dumai, Pontianak dan Palembang PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
e. Melakukan penyediaan perangkat pendukung aplikasi STID dan SIMOP TKBM di Area Balikpapan, Samarinda, Banten, Makassar, Tanjung Mas, Kendari, Belawan, Tanjung Perak, Panjang, Palembang, Dumai, dan Pontianak;
f. Melakukan novasi *software* lisensi (vmware,microsoft,oracle,trendmicro) di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
g. Melakukan sentralisasi *procurement software* lisensi;
h. Sedang dilakukan pekerjaan *enhancement cyber security*.

d. Implemented P-Travel for official travel processes at the Head Office, Subholdings, Regional and Branches;
e. Implemented SAP for ESS, PS, MM, FI, CO, FM, and HR modules at Headquarters, Regional and Branch Offices;
f. Implemented PCICO as attendance media at the Head Office, Regional, Branches and Subholdings;
g. Carried out the process of adding a license for the E-audit application at the Head Office;
h. Currently carrying out in the process of preparing to migrate to Cloud for SAP;
i. Rolled out the E-Catalog and PADI in Regions I, II, III and IV;

j. Conducted Go Live HSSE (Health, Safety, Security and Environment) applications for HO, Regional and subholdings.
k. Implemented Dashboard Executive Summary for the Operations, Finance, Equipment and HR fields;
l. Implemented PGOOD application within PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
m. Implemented PBOS application at Head Office;
n. Implemented PPID application at the Head Office;
o. Implemented BIOS application at Head Office, Regional and Branch;
p. Development is underway for the Portaverse application.

Front End:
a. Implemented Phinnisi in the Bengkulu, Makassar, Semarang, Samarinda, Kendari, Tanjung Perak and Dumai regions;

b. Implemented MOS and TOS in Regional I;
c. Implemented STID and SIMON TKBM in the Tanjung Mas, Kendari, Belawan, Tanjung Perak, Balikpapan, Samarinda, Banten, Makassar, Dumai, Panjang, Palembang and Pontianak areas;
d. Performed operational application integration into SAP;
e. Implemented PTOSM at the Badas and Bitung ports.

2. IT Infrastructure Improvement
a. The Pelindo Tower IT infrastructure planning consultancy process is Currently underway;
b. The IT infrastructure monitoring process for Pelindo Tower is currently underway;
c. The Pelindo Tower's IT infrastructure work is being carried out
d. Provided phinnisi application support devices in the Makassar, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Kendari, Samarinda, Dumai, Pontianak and Palembang PT Pelabuhan Indonesia (Persero) areas;
e. Provided supporting devices for STID and SIMOP TKBM applications in the Balikpapan, Samarinda, Banten, Makassar, Tanjung Mas, Kendari, Belawan, Tanjung Perak, Panjang, Palembang, Dumai, and Pontianak areas;
f. Performed license software innovations (vmware, microsoft, oracle, trendmicro) in PT Pelabuhan Indonesia (Persero);

g. Centralized the procurement of licensing software;
h. Cyber security enhancement work is being carried out

3. Penyusunan IT *Strategic Management and Governance*
   a. IT *Master Plan* 2022 – 2026 telah disahkan oleh Direksi;
   b. Saat ini sedang dilakukan penyusunan kebijakan standardisasi master data (struktur dan proses pengelolaan) serta perencanaan pengembangan sistem manajemen master data terpusat untuk master data pelabuhan, pelanggan, dan peralatan.
   c. Saat ini sedang berjalan proses *assessment* INDI 4.0 sebagaimana arahan dari kementerian perindustrian;
   d. Melakukan sentralisasi *Service Desk* IT;
   e. Novasi telah selesai dilakukan pada perangkat berikut:
      - Lisensi perangkat lunak Pentana Audit (E-Audit)
      - Lisensi perangkat lunak VMWare
      - Lisensi Trendmicro
      - Lisensi Microsoft
      - Lisensi Oracle

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Sebelum dilakukan *merger*, masing-masing entitas telah memiliki teknologi infrastruktur masing-masing. Hal tersebut mengakibatkan pada pasca *merger* teknologi infrastruktur yang harus dilakukan pemeliharaan menjadi cukup banyak. Oleh karena itu, pada tahun 2022 dilakukan standardisasi teknologi infrastruktur, dimulai dari pemilihan produk/tipe yang akan terus dipakai dan melakukan novasi untuk beberapa kontrak yang ada.

3. Preparation of IT Strategic Management and Governance
   a. IT Master Plan 2022 – 2026 was approved by the Board of Directors;
   b. Currently, the formulation of a policy on standardization of master data (management structure and process) is underway as well as planning for the development of a centralized master data management system for port, customer and equipment master data.
   c. Currently the INDI 4.0 assessment process is underway as directed by the Ministry of Industry;
   d. Centralized the IT Service Desk;
   e. Novations were completed on the following devices:
      - Pentana Audit software license (E-Audit)
      - VMWare software license
      - Trendmicro License
      - Microsoft license
      - Oracle License

INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE

Prior to the merger, each entity had its own infrastructure technology. This resulted in post-merger infrastructure technology that require a lot of maintenance. Therefore, in 2022 infrastructure technology standardization was carried out, starting with selecting products/types that will continue to be used, and making novations to several existing contracts.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology Governance

Agar pemanfaatan teknologi informasi lebih terarah, sesuai kebutuhan dan selaras dengan visi, misi, nilai dan budaya perusahaan maka PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menerapkan tata kelola IT (IT *Governance*). Tata Kelola TI menjabarkan prinsip-prinsip terkait manajemen dan organisasi, prinsip data dan informasi, prinsip aplikasi dan prinsip teknologi. Selain itu juga menjabarkan peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), organisasi TIK serta proses-proses yang memastikan sistem TI dapat mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.

Pengelolaan *Cyber Security*/Keamanan TIK merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), baik pihak internal maupun pihak eksternal yang mengakses perangkat, aplikasi, data dan informasi milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Untuk memastikan semua risiko terkait keamanan TIK, manajemen Pelindo telah mengidentifikasi dan mengelola TIK serta melaporkan kepada Direksi. Kebijakan pengelolaan keamanan TIK antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dilakukan pengendalian dan keamanan terhadap perangkat keras, aplikasi, hak akses, penggunaan *password*, keamanan fisik data center, lingkungan kerja, infrastruktur jaringan, keamanan *mobile computing* dan *teleworking* serta email Perseroan;
2. Perseroan melakukan inisiasi untuk membentuk tim tanggap darurat keamanan TIK atau *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) dan melaporkan insiden keamanan kepada manajemen TIK;
3. Melakukan *assessment* keamanan TIK secara periodik;
4. Penerapan *antivirus* di perangkat komputer, laptop, server dan jaringan untuk pengendalian virus dan *malware* yang mengganggu/merusak layanan TIK.

Dalam upaya menanggulangi risiko yang akan berdampak pada operasional, Perseroan telah memiliki kebijakan *Business Continuity Management* yang disahkan melalui Peraturan Direksi. Hal ini merupakan bentuk pengelolaan *disaster recovery* (pemulihan bencana) untuk memastikan semua risiko utama Perseroan telah teridentifikasi, terkelola, dan dilaporkan pada Direksi dan Dewan Komisaris.

To make the use of information technology more directed, based on the needs and aligned with the vision, mission, values and corporate culture, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) applies IT governance. IT Governance outlines the principles related to management and organization, data and information principles, application principles and technology principles. It also describes the role of Information and Communication Technology (ICT), the ICT organization and processes that are needed to ensure the IT systems support the achievement of the Company goals.

Management of Cyber Security/ICT Security is the joint responsibility of all parties within PT Pelabuhan Indonesia (Persero), including internal and external parties who access devices, applications, data and information belonging to PT Pelabuhan Indonesia (Persero). To ensure all risks related to ICT security, Pelindo management has identified and managed ICT, and reported such to the Board of Directors. The ICT security management policy covers the following matters:

1. Control and security of hardware, applications, access rights, use of passwords, data center physical security, work environment, network infrastructure, mobile computing and teleworking security as well as Company email;
2. The Company initiated an Computer Security Incident Response Team (CSIRT) and reports security incidents to ICT management.
3. Periodic ICT security assessments;
4. Application of antivirus on computers, laptops, servers and networks to control viruses and malware that can disrupt/damage ICT services.

In an effort to overcome risks that will impact operations, the Company has a Business Continuity Management policy that is ratified through a Board of Directors Regulation. This is a form of disaster recovery management to ensure that all of the Company's main risks have been identified, managed and reported to the Board of Directors and Board of Commissioners.

STRUKTUR PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology Management Structure

Organisasi TIK terdiri dari 2 (dua) bagian sebagai berikut:

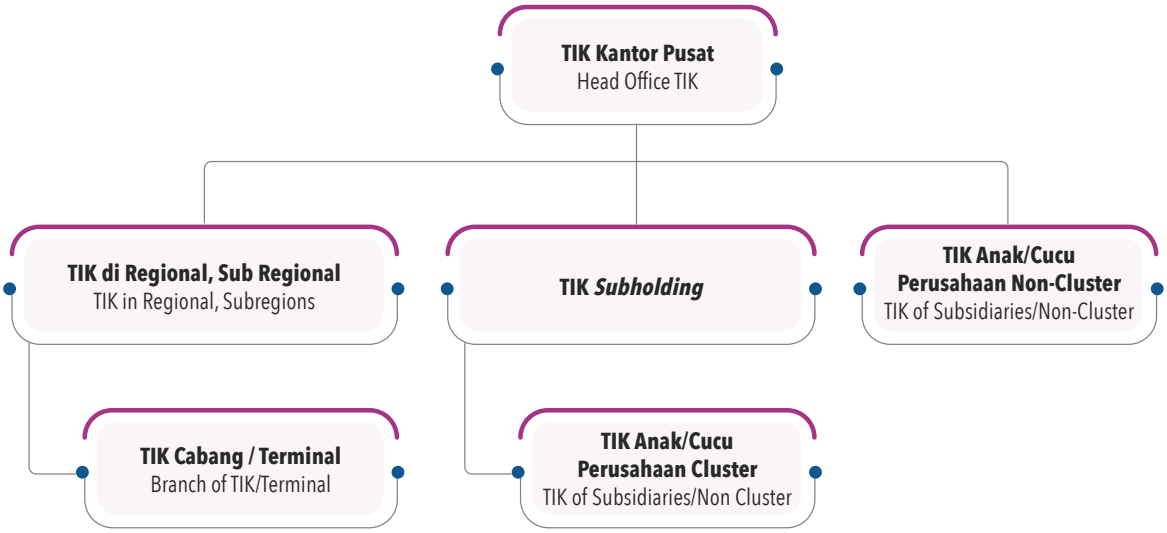
a. IT *Steering Committee*
   IT *Steering Committee* merupakan komite yang yang diketuai oleh Direktur yang membawahi bidang TIK. Anggota tetap IT *Steering Committee* adalah Direktur yang membawahi bidang keuangan dan Kepala Unit Bisnis yang membawahi bidang TIK. Anggota tidak tetap IT *Steering Committee* terdiri dari Direktur Bidang dan Kepala Unit Bisnis terkait. Pertemuan IT *Steering Committee* diadakan secara *ad-hoc* untuk membahas antara lain Program Strategis, Pembiayaan, kendala TIK dan hal-hal terkait TIK lainnya.

b. Manajemen Pengelola TIK
   Struktur Manajemen Pengelola Teknologi Informasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dapat digambarkan sebagai berikut:

The ICT organization consists of 2 (two) sections as follows:

a. IT Steering Committee
   The IT Steering Committee is a committee chaired by the Director in charge of the ICT sector. Permanent members of the IT Steering Committee are the Director in charge of finance and the Head of the Business Unit in charge of ICT. Non-permanent members of the IT Steering Committee consist of Field Directors and Heads of related Business Units. IT Steering Committee meetings are held on an ad-hoc basis to discuss, Strategic Programs, Financing, ICT constraints and other ICT-related matters.

b. ICT Manager Management
   The Information Technology Manager Management Structure of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is shown below:



RENCANA KERJA TEKNOLOGI INFORMASI 2023
Information Technology 2023 Work Plan

Rencana pengembangan IT pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Standardisasi aplikasi layanan operasional:
   a. Implementasi sistem operasi pelayanan petikemas di pelabuhan Gorontalo;
   b. Implementasi dan/atau *monitoring* sistem operasi pelayanan non petikemas di Pelabuhan Tanjung Emas dan area SPMT;
   c. Implementasi sistem operasi terminal penumpang dan roro di Cabang Belawan, Balikpapan, Sorong, Makassar, Kumai, Kupang dan Tanjung Emas;

The IT development plan for 2023 is as follows:

1. Standardization of operational service applications:
   a. Implementation of a container service operating system at the Gorontalo port;
   b. Implementation and/or monitoring of non-container service operating systems at the Tanjung Emas Port and the SPMT area;
   c. Implementation of passenger and roro terminal operating systems at the Belawan, Balikpapan, Sorong, Makassar, Kumai, Kupang and Tanjung Emas Branches;

d. *Enhancement* SIMPANDA
e. Implementasi sistem pelayanan kapal di Cabang Palembang, Pontianak, Sorong, Ambon, Tarakan, Tanjung Redeb, Tanjung Intan, Tanjung Wangi, Lembar, Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Sei Pakning, Cirebon dan Jambi;
f. Implementasi *autogate* di Pelabuhan Dumai, Jambi, Pangkal Balam, Benoa, Lembar, Belawan, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Priok, Teluk Bayur, Panjang, Pontianak, Tanjung Emas, Kupang, Celukan Bawang
g. *Enhancement* Aplikasi *Raport*.

2. Standardisasi aplikasi *back office*
   a. Pengembangan aplikasi inventarisasi aset tetap berbasis QR *Code*;
   b. Integrasi dan *Monitoring* Transaksi *Intercompany* Pelindo dengan *Subholding*;
   c. Implementasi Sistem Penyusunan (BPC) Capex PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Konsolidasi secara terintegrasi (Seluruh Regional);
   d. Optimalisasi Proses Verifikasi Dokumen Tagihan Eksternal Melalui Pengembangan *Robotic Process Automation* (RPA);
   e. Pengembangan portal *submit* dokumen tagihan eksternal yang terintegrasi dengan portal *procurement* (*Procure To Pay*);
   f. Pengembangan Fungsi *Shared Service*;
   g. *Enhancement Travel Management* dan *Benefit*;
   h. Pengembangan *Smart Learning*;
   i. Pengembangan Aplikasi *Performance Management* di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahap II;
   j. Pengembangan modul aplikasi SECURE dan *roll-out* ke 4 (empat) subholding serta 2 (dua) anak perusahaan pada masing-masing *subholding*;
   k. Digitalisasi *Business Process* Peralatan;
   l. Standardisasi Master Data HRIS untuk Pelindo dan *Subholding*;
   m. Alih Media Arsip Pekerja Aktif Pelindo dan/atau Arsip Vital;
   n. *Customer Relationship Management* (CRM).
3. Penerapan IT *Service Management*
   a. Sentralisasi *Call center* Regional;
   b. Standardisasi *tools* IT *Service Management*.
4. Penyusunan arsitektur infrastruktur HO, Regional dan Subholding
   a. Penyusunan Arsitektur Infrastruktur HO;
   b. Penyusunan Arsitektur Infrastruktur Regional;
   c. *Guidance* Penyusunan arsitektur Infrastruktur *Subholding*.
5. Penerapan *Single Master Data Management* di Pelindo *Group*;
6. Penyiapan *Single Data Warehouse* di Pelindo *Group*;
7. Pengembangan *Dashboard Executive* Tahap II;
8. Peningkatan *Single* ERP Pelindo;
9. Implementasi *Single* ERP di Pelindo Grup.

Rencana pengembangan IT pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Standardisasi aplikasi layanan operasional:
   a. Implementasi sistem operasi pelayanan petikemas di pelabuhan Gorontalo;

d. Enhancement of SIMPANDA
e. Implementation of ship service systems in Palembang, Pontianak, Sorong, Ambon, Tarakan, Tanjung Redeb, Tanjung Intan, Tanjung Wangi, Lembar, Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Sei Pakning, Cirebon and Jambi Branches;
f. Implementation of autogates at the Dumai, Jambi, Pangkal Balam, Benoa, Lembar, Belawan, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Priok, Teluk Bayur, Panjang, Pontianak, Tanjung Emas, Kupang, Celukan Bawang Ports;
g. Enhancement of the Raport Application.

2. Standardization of back office applications
   a. Development of a QR Code-based fixed asset inventory application;
   b. Integration and Monitoring of Pelindo Intercompany Transactions with Subholdings;
   c. Implementation of an integrated PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Capex Consolidation Compilation System (BPC) (All Regions);
   d. Optimization of the Verification Process for External Billing Documents through the Development of Robotic Process Automation (RPA);
   e. Development of an external billing document submission portal integrated with the procurement portal (Procure To Pay);
   f. Development of a Shared Service Function;
   g. Enhancement of Travel Management and Benefits;
   h. Development of Smart Learning;
   i. Development of Performance Management Application in PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Phase II;
   j. Development of the SECURE application module and roll-out to 4 (four) subholdings and 2 (two) subsidiaries in each subholding;
   k. Digitalization of Business Process Equipment;
   l. Standardization of HRIS Master Data for Pelindo and Subholdings;
   m. Transfer Media for Pelindo Active Employee Archives and/or Vital Archives;
   n. Customer Relationship Management (CRM).
3. Implementation of IT Service Management
   a. Centralization of Regional Call center;
   b. Standardization of IT Service Management tools.
4. Preparation of HO, Regional and Subholding infrastructure architectures
   a. Preparation of HO Infrastructure Architecture;
   b. Preparation of Regional Infrastructure Architecture;
   c. Guidance for Subholding Infrastructure Architecture.
5. Implementation of Single Master Data Management in the Pelindo Group;
6. Preparation of Single Data Warehouse in the Pelindo Group;
7. Development of Stage II Executive Dashboard;
8. Improvement to Pelindo's Single ERP;
9. Implementation of Single ERP in the Pelindo Group.

The IT development plan for 2023 is as follows:

1. Standardization of operational service applications:
   a. Implementation of a container service operating system at the Gorontalo port;

b. Implementasi dan/atau *monitoring* sistem operasi pelayanan non-petikemas di Pelabuhan Tanjung Emas dan area SPMT;

c. Implementasi sistem operasi terminal penumpang dan roro di Cabang Belawan, Balikpapan, Sorong, Makassar, Kumai, Kupang dan Tanjung Emas;
d. *Enhancement* SIMPANDA;
e. Implementasi sistem pelayanan kapal di Cabang Palembang, Pontianak, Sorong, Ambon, Tarakan, Tanjung Redeb, Tanjung Intan, Tanjung Wangi, Lembar, Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Sei Pakning, Cirebon dan Jambi;
f. Implementasi *autogate* di Pelabuhan Dumai, Jambi, Pangkal Balam, Benoa, Lembar, Belawan, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Priok, Teluk Bayur, Panjang, Pontianak, Tanjung Emas, Kupang, Celukan Bawang;
g. *Enhancement* Aplikasi Raport.

2. Standardisasi aplikasi *back office*
   a. Pengembangan aplikasi inventarisasi aset tetap berbasis QR *Code*;
   b. Integrasi dan *Monitoring* Transaksi Intercompany Pelindo dengan *Subholding*;
   c. Implementasi Sistem Penyusunan (BPC) Capex PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Konsolidasi secara terintegrasi (Seluruh Regional);
   d. Optimalisasi Proses Verifikasi Dokumen Tagihan Eksternal Melalui Pengembangan *Robotic Process Automation* (RPA);

   e. Pengembangan portal submit dokumen tagihan eksternal yang terintegrasi dengan *portal procurement (Procure To Pay)*;
   f. Pengembangan Fungsi *Shared Service*;
   g. Enhancement *Travel Management* dan *Benefit*;
   h. Pengembangan *Smart Learning*;
   i. Pengembangan Aplikasi *Performance Management* di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahap II;
   j. Pengembangan modul aplikasi SECURE dan *roll-out* ke 4 (empat) *subholding* serta 2 (dua) anak perusahaan pada masing-masing *subholding*;
   k. Digitalisasi *Business Process* Peralatan;
   l. Standardisasi Master Data HRIS untuk Pelindo dan *Subholding*;

   m. Alih Media Arsip Pekerja Aktif Pelindo dan/atau Arsip Vital;

   n. *Customer Relationship Management* (CRM).
3. Penerapan IT *Service Management*
   a. Sentralisasi *Call center* Regional;
   b. Standardisasi *tools* IT *Service Management*.
4. Penyusunan arsitektur infrastruktur HO, Regional dan *Subholding*

   a. Penyusunan Arsitektur Infrastruktur HO;
   b. Penyusunan Arsitektur Infrastruktur Regional;
   c. *Guidance* Penyusunan arsitektur Infrastruktur *Subholding*.
5. Penerapan *Single Master Data Management* di Pelindo *Group*;

6. Penyiapan *Single Data Warehouse* di Pelindo *Group*;
7. Pengembangan *Dashboard Executive* Tahap II;
8. Peningkatan *Single* ERP Pelindo;
9. Implementasi *Single* ERP di Pelindo *Group*.

b. Implementation and/or monitoring of non-container service operating systems at the Tanjung Emas Port and the SPMT area;
c. Implementation of passenger and roro terminal operating systems at the Belawan, Balikpapan, Sorong, Makassar, Kumai, Kupang and Tanjung Emas Branches;
d. Enhancement of SIMPANDA;
e. Implementation of ship service systems in Palembang, Pontianak, Sorong, Ambon, Tarakan, Tanjung Redeb, Tanjung Intan, Tanjung Wangi, Lembar, Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Sei Pakning, Cirebon and Jambi Branches;
f. Implementation of autogates at the Dumai, Jambi, Pangkal Balam, Benoa, Lembar, Belawan, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Priok, Teluk Bayur, Panjang, Pontianak, Tanjung Emas, Kupang, Celukan Bawang Ports;
g. Enhancement of the Raport Application.

2. Standardization of back office applications
   a. Development of a QR Code-based fixed asset inventory application;
   b. Integration and Monitoring of Pelindo Intercompany Transactions with Subholdings;
   c. Implementation of an integrated PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Capex Consolidation Compilation System (BPC) (All Regions);
   d. Optimization of the Verification Process for External Billing Documents through the Development of Robotic Process Automation (RPA);
   e. Development of an external billing document submission portal integrated with the procurement portal (Procure To Pay);
   f. Development of a Shared Service Function;
   g. Enhancement of Travel Management and Benefits;
   h. Development of Smart Learning;
   i. Development of Performance Management Application in PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Phase II;
   j. Development of the SECURE application module and roll-out to 4 (four) subholdings and 2 (two) subsidiaries in each subholding;
   k. Digitalization of Business Process Equipment;
   l. Standardization of HRIS Master Data for Pelindo and Subholdings;
   m. Transfer Media for Pelindo Active Employee Archives and/or Vital Archives;
   n. Customer Relationship Management (CRM).
3. Implementation of IT Service Management
   a. Centralization of Regional Call center;
   b. Standardization of IT Service Management tools.
4. Preparation of HO, Regional and Subholding infrastructure architectures
   a. Preparation of HO Infrastructure Architecture;
   b. Preparation of Regional Infrastructure Architecture;
   c. Guidance for Subholding Infrastructure Architecture.
5. Implementation of Single Master Data Management in the Pelindo Group;
6. Preparation of Single Data Warehouse in the Pelindo Group;
7. Development of Stage II Executive Dashboard;
8. Improvement to Pelindo's Single ERP;
9. Implementation of Single ERP in the Pelindo Group.



PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY



07

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

PENCAPAIAN DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Achievements in Corporate Governance



1. Ikut menjuarai evaluasi keterbukaan Informasi Publik 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat dan meraih kategori Informatif dengan skor 94.43 dan masuk 10 besar BUMN kategori informatif.
2. 100% seluruh pegawai Pelindo sudah melakukan pengisian survey GCG dan penandatangan Pakta Integritas melalui sistem P-GOOD.
3. *Assessment* GCG Tahun 2021 yang dilakukan pada tahun 2022 dengan menggunakan *Diagnostic Assessment.*
4. *Assessment* GCG tahun 2022 yang dilakukan pada tahun 2023, menjadi *assessment* pertama Pelindo pasca merger dengan skor 90,473 kategori SANGAT BAIK.
5. Penghargaan dari KPK Kepada Pelindo atas kontribusi pelaksanaan aksi reformasi pelabuhan melalui digitalisasi sistem pelayanan kapal di 14 pelabuhan *piloting* dan juga penyediaan infrastruktur untuk implementasi SSNK Pabeanan Karantina tanggal 20 Desember 2022.

1. As one of the winner in the 2022 evaluation of Public Information disclosure held by the National Information Commission and won the Informative category with a score of 94.43 and entered the top 10 SOEs in the informative category.
2. All Pelindo People (100%) had filled out the GCG survey and signed the Integrity Pact through P-GOOD system.
3. The 2021 GCG Assessment was conducted in 2022 using a Diagnostic Assessment.
4. The 2022 GCG Assessment conducted in 2023 is Pelindo's first post-merger assessment with a score of 90.473 in VERY GOOD category.
5. Won the Award from KPK for the contribution to the port reform actions through digitizing the ship service system at 14 piloting ports and the provision of infrastructure for SSNK Quarantine Customs implementation on December 20, 2022.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Basis of Corporate Governance Implementation

Dalam menerapkan praktik GCG, Pelindo mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 10/MBU/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 Tanggal 26 JUNI 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/ MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 Tanggal 13 April 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

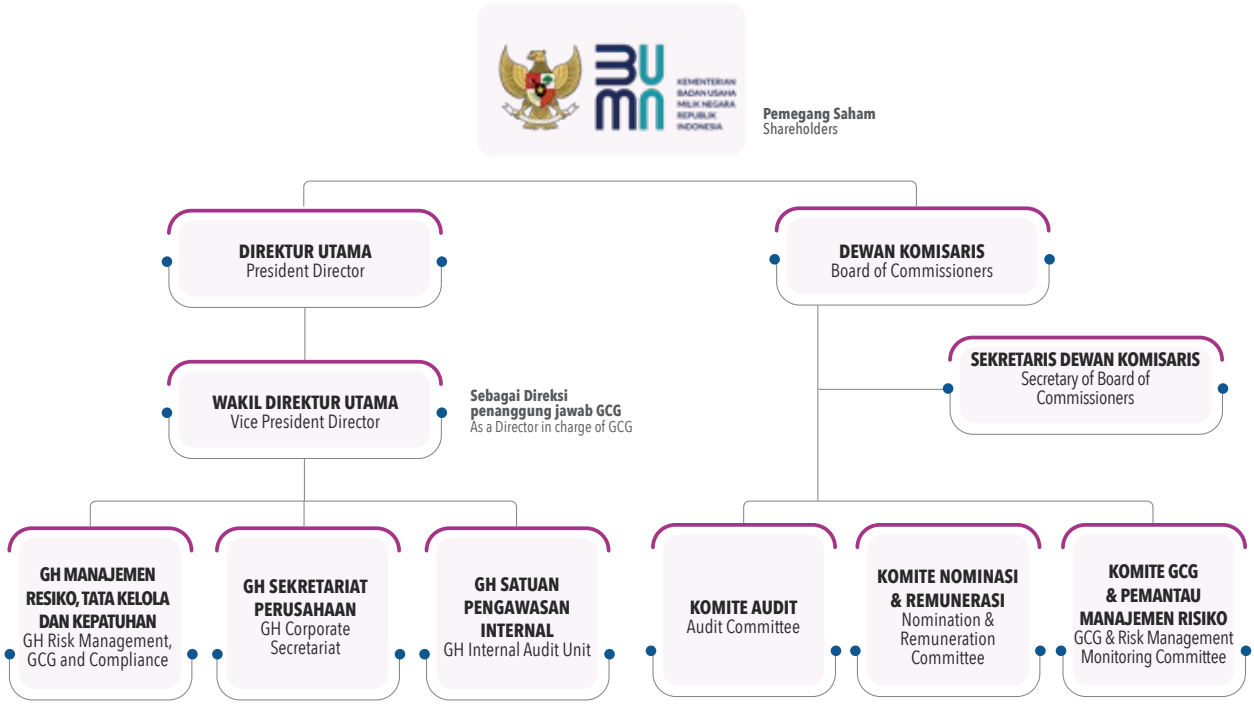
In implementing GCG practices, Pelindo refers to a number of laws and regulations, with the following descriptions:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (PT).
2. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOEs).
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 on Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (SOE).
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/02/2015 dated February 17, 2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER 10/MBU/2020 on Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER 02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04/MBU/06/2020 dated June 26, 2020 on Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03/MBU/2012 concerning Guidelines for Appointing Members of Board of Directors and Members of Board of Commissioners of Subsidiaries of State Owned Enterprises.
6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-06/MBU/04/2021 dated April 13, 2021 on Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.
7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-11/MBU/07/2021 dated July 30, 2021 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of Board of Directors of State-Owned Enterprises.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
STRUCTURE AND MECHANISM OF CORPORATE GOVERNANCE

STRUKTUR ORGAN PERUSAHAAN

STRUCTURE OF CORPORATE ORGANS



GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

Dalam melaksanakan kegiatan Perseroan, Pelindo memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang disebut dengan *governance soft structure*. *Governance soft structure* yang dimiliki Pelindo antara lain sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar
2. *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi
3. *Charter* Komite Audit
4. *Charter* Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko
5. *Charter* Komite Nominasi dan Remunerasi
6. Pedoman Kode Etik Bisnis
7. Pedoman Pelaksanaan GCG Perusahaan
8. Pedoman *Whistleblowing System*
9. Pedoman Pengendalian Gratifikasi

GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

In carrying out the Company's activities, Pelindo has various policies/guidelines for executing its functions and duties, which are called the governance soft structure. Pelindo's governance soft structure includes:

1. Articles of Association
2. Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors
3. Audit Committee Charter
4. GCG and Risk Management Monitoring Committee Charter
5. Nomination and Remuneration Committee Charter
6. Code of Conduct
7. GCG Code
8. Whistleblowing System Guidelines
9. Gratification Control Guidelines

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM

PEMEGANG SAHAM

Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia dan Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

SHAREHOLDERS

The Company's shares are shares on behalf of and issued on behalf of their owners which are registered in the Shareholders Register consisting of Series A Dwiwarna Shares which can only be owned by the Republic of Indonesia and Series B Shares which can be owned by the Republic of Indonesia and/or the public.

Hak Pemegang Saham

Jenis saham pada Pelindo terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. Hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang tidak dimiliki oleh saham Seri B yaitu hak untuk melakukan:

1. Perubahan Anggaran Dasar.
2. Perubahan struktur permodalan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran.
5. Permintaan dan pengaksesan data dan dokumen Perusahaan.
6. Persetujuan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
8. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
9. Persetujuan rencana penggunaan laba.
10. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka Panjang yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
11. Pengusulan agenda RUPS.
12. Pengusulan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

Shareholders' Rights

Pelindo's shares consist of Series A Dwiwarna Shares and Series B shares. The holders of Series A Dwiwarna and Series B shares have the same rights and each 1 (one) share gives 1 (one) voting right. The rights of Series A Dwiwarna Shareholders that are not owned by Series B shares are the right to conduct:

1. Amendments to the Articles of Association.
2. Changes in the capital structure.
3. Appointment and dismissal of Board of Directors and Board of Commissioners.
4. Approval regarding merger, consolidation, acquisition, separation and dissolution.
5. Request and access to Company data and documents.
6. Approval of the remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners.
7. Approval of the transfer of assets based on the Articles of Association requires the GMS approval.
8. Approval regarding the participation and reduction of the percentage of equity participation in other companies which, based on the Articles of Association, requires the GMS approval.
9. Approval of the plan to use profit.
10. Approval regarding investment and long-term financing based on the Articles of Association requires the GMS approval.
11. Proposing the GMS agenda.
12. Proposing candidates for members of Board of Directors and Board of Commissioners.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di Pelindo dan suatu wadah atau forum bagi para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan RUPS melalui proses pengumuman dan pemanggilan RUPS yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sejak diterbitkannya pengumuman dan surat pemanggilan pelaksanaan rapat tersebut, seluruh bahan yang akan dibahas dalam RUPS telah tersedia di kantor Pelindo. Dengan demikian, para Pemangku Kepentingan yang menjadi peserta rapat dapat mengambil bahan tersebut.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan. Pemanggilan RUPS mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Pada saat pemanggilan RUPS telah disampaikan penjelasan untuk tiap-tiap agenda yang akan mendapat persetujuan Pemegang Saham. Sebelum pelaksanaan RUPS Perseroan menjelaskan tata cara pemungutan suara.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest authority in Pelindo and is a forum where shareholders gather to make important decisions where the authority is not given to Boards of Directors and Board of Commissioners as stipulated in Pelindo's Articles of Association and all applicable laws.

GMS is held through a process of GMS announcement and summons in accordance with applicable regulations. After the announcement and invitation letter for the meeting, all materials to be discussed at the GMS are available at IPC office, so that the Stakeholders who will be participants in the meeting can take the material.

Summons for GMS are made no later than 14 (fourteen) days before the date of GMS holding, excluding the date of the summons and the date of the GMS. The GMS summon includes the date, time, place and agenda accompanied by notification that the material to be discussed at the GMS is available at the Company's office from the date of GMS summons is made until the date of GMS. At the GMS summons, an explanation has been conveyed for each agenda that will be approved by the Shareholders. Prior to the GMS holding, the Company explained the voting procedures.

Keputusan RUPS sah jika semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan bulat. Setelah RUPS selesai maka risalah RUPS mencatat pertanyaan atau tanggapan Pemegang Saham.

Penyelenggaraan RUPS di Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan dilakukan Pelindo setiap tahun, yang meliputi RUPS Tahunan tentang Laporan Tahunan dan RUPS Tahunan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS RKAP). Sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2022 DAN REALISASINYA

Pelaksanaan RUPS dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Januari 2022
Waktu : 15.49 WIB – 16.45 WIB
Tempat : Rapat *online zoom meeting*

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan tentang Pengesahan RKAP Tahun 2022

GMS in the Company consists of Annual GMS and Extraordinary GMS. Annual GMS is held by Pelindo every year, which includes Annual GMS on Annual Report of and Annual GMS on the Company's Work Plan and Budget. While Extraordinary GMS can be held at any time based on the needs and for the benefits of the Company.

A GMS resolution is valid if all shareholders with valid voting rights are present or represented at the GMS and the resolution is unanimously approved. After the GMS is completed, the minutes of GMS record the Shareholders' questions or responses.

ANNUAL GMS ON THE APPROVAL OF 2022 CORPORATE WORK PLAN AND BUDGET AND THE REALIZATION

The GMS was held on:
Day/Date : Thursday, January 27, 2022
Time : 15.49 WIB - 16.45 WIB
Venue : Online zoom meeting

Recapitulation of Attendance at The GMS on 2022 RKAP Approval

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
1	Marsetio	Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner/ Acting President Commissioner	Hadir Present
2	Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
3	Antonius Rainer Haryanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
4	Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
5	Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	Hadir Present
6	Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Hadir Present
7	Raden Agus Haryoto Purnomo	Komisaris Commissioner	Hadir Present
8	Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Hadir Present
9	Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Hadir Present
10	Ihsanuddin Usman	Direktur SDM dan Umum Human Resources and General Affairs Director	Hadir Present
11	Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Hadir Present

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
12	Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Hadir Present
13	Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	Hadir Present
14	Putut Sri Mulyanto	Direktur Pengelola Investment Director	Hadir Present

PIHAK INDEPENDEN

Pelindo telah menunjuk pihak *independent* yaitu Notaris Nanda Fauz Iwan dalam menyusun Akta hasil RUPS.

INDEPENDENT PARTY

Pelindo has appointed an independent party, Notary Nanda Fauz Iwan, to prepare the deed of GMS results.

KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN RKAP TAHUN 2022

RESOLUTION AND REALIZATION OF THE GMS ON 2022 RKAP

Agenda Pertama First Agenda	
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2022.	Approval of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s 2022 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) including Board of Commissioners 2022 Work Plan and Budget
Keputusan Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2022 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), dengan pokok-pokok sebagai berikut: 1. Asumsi Penyusunan RKAP 2022 Assumptions for Compiling RKAP 2022	**Resolution** Approved PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s 2022 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) including Board of Commissioners 2022 Work Plan and Budget, with the following points:

Uraian Description	RKAP 2022
Nilai Tukar Rupiah/USD Rupiah/USD Exchange Rate	14.350
Tingkat Inflasi (%) Inflation Rate (%)	3.00
Pertumbuhan Ekonomi (%) Economic Growth (%)	5,0 – 5,5
ICP (USD/Barrel) ICP (USD/Barrel)	63.00
SBM 10 Tahun (10%) SBM 10 Years (10%)	6.82

2. Pokok-pokok Laporan Keuangan (Rp Miliar)
Principal Financial Statements (Rp Billion)

Uraian Description	**RKAP 2022**
Pendapatan Revenues	30.382, 6
Laba Usaha Operating Profit	6.934,3
EBITDA	10.588.1
Laba Bersih Net Profit	3.900.6
Laba Bersih (Atribusi Induk) Net Profit (Attributable to Parent)	3.944,9
Total Aset Total Assets	112.525,9
Ekuitas Equity	45.633,9
Interest Bearing Debt	43.386,3
Net Operating Cash Flow	9.278.6

3. Investasi/CAPEX (Rp Miliar)
Investment/CAPEX (Rp Billion)

Uraian Description	**RKAP 2022**
Bangunan Fasilitas, Jalan, Bangunan, Sarana dan Prasarana, Kapitalisasi Bunga Building Facilities, Roads, Buildings, Facilities and Infrastructure, Capitalization of Interest	6.964,6
Alat-alat Fasilitas, Instalasi Fasilitas, Peralatan dan Perlengkapan, Kapan dan Kendaraan Facility Tools, Facility Installation, Equipment and Supplies, Ships and Vehicles	923,8
Tanah dan Hak atas Tanah dan Emplasemen Land and Land Rights and Emplacements	320,4
Investasi Non-Fisik Non-Physical Investment	204,1
Total Investasi Perusahaan Induk Total Parent Entity's Investment	8.412,8
Investasi Entitas Anak Subsidiary Investment	4.743,8
Total Investasi Konsolidasi Total Consolidated Investment	13.156,6
Penyertaan Modal Equity Capital	1.622,6
Total Investasi + Penyertaan Modal Total Investment + Equity Capital	14.779,2

Agenda Kedua Second Agenda	
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2022	Approval of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s 2022 Work Plan and Budget for the Partnership and Community Development Program (RKA-PKBL)

Keputusan Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2022 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	**Resolution** Approved PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s 2022 Work Plan and Budget for the Partnership and Community Development Program (RKA-PKBL).

Agenda Ketiga
Third Agenda

Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target *Key Performance Indicators* Direksi secara Kolegial Tahun 2022	Determination of 2022 Annual Management Contract, which contains collegial Key Performance Indicators of Board of Directors
Keputusan Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) secara Kolegial tahun 2022, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.	**Resolution** Determined the 2022 Annual Management Contract, which contains collegial Key Performance Indicators of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), as attached and is an integral part of this resolution.

No.	KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	
					Sub	Total
A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia **Economic and Social Value for Indonesia**						**44.00**
Finansial Financial						16.00
1	EBITDA	Rp Miliar Rp Billion	10,588.06	*Maximize*	5.00	
2.	ROIG ≥ WAGG	%	0,96	*Maximize*	5.00	
3a.	*Interest Bearing Debt to* EBITDA	Kali Times	4.10	*Minimize*	3.00	
3b.	*Interest Bearing Debt to Invested Capital*	%	48.74	*Minimize*	3.00	
Operasional **Operational**						**21.00**
4	*Container Throughput*	Juta TEUS Million TEUS	17.25	*Maximize*	7.00	
5	Non-*Container Throughput*	Juta Ton Million Tons	144.33	*Maximize*	7.00	
6.	B/S/H Gross	B/S/H	38.00	*Maximize*	7.00	
Sosial **Social**						**7.00**
7.	Manfaat kesejahteraan masyarakat di sekitar Pelabuhan Benefits for the welfare of community around the port	%	100,00	*Maximize*	7.00	
B. Inovasi Model Bisnis **Business Model Innovation**						**16.00**
8.	Efisiensi biaya melalui Pengadaan Terpusat Cost efficiency through Centralized Procurement	Rp Miliar Rp Billion	115.40	*Maximize*	7.00	
9.	Pembentukan dan Pengembangan *Subholding* Formation and Development of Sub Holding	%	100,00	*Maximize*	7.00	

No.	KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	
					Sub	Total
C. Kepemimpinan Teknologi **Technology Leadership**						**14.00**
10.	Standardisasi dan Digitalisasi layanan Pelabuhan Standardization and Digitization of Port services	%	100,00	*Maximize*	7.00	
11.	Implementasi *Green Technology* di Pelabuhan Implementation of Green Technology at the Port	%	100,00	*Maximize*	7.00	
D. Peningkatan Investasi **Investment Increase**						**14.00**
12.	Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan Development of Port Infrastructure and Equipment	%	100,00	*Maximize*	7.00	
13.	Pengembangan Potensi Pelabuhan melalui Kerja Sama dengan *Strategic Partner* (e.g INA) Port Potential Development through Collaboration with Strategic Partners (e.g INA)	%	100,00	*Maximize*	7.00	
E. Pengembangan Talenta **Talent Development**						**14.00**
14.	Perempuan dalam *nominated talent* % Female in Nominated Talent	%	11.00	*Maximize*	6.00	
	Milenial (≤ 42 tahun) dalam *nominated talent* Millennials (≤ 42 years old) in nominated talent	%	11.00	*Maximize*	6.00	
15.	Penyusunan kajian program *talent development* dan *Career Path System* di lingkup klaster Compilation of studies on talent development programs and Career Path System within the cluster	%	50.00	*Maximize*	2.00	
Total						**100.00**
1	Akumulasi Progres Proyek Pengerukan Accumulation of Dredging Project Progress	%	100		Maximize	
2	Akumulasi Penyerapan Dana PMN Accumulation of PMN Fund Absorption	%	100		Maximize	
3	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Absorption of Local Labor	%	100		Maximize	
4	Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Terdampak Providing Assistance to Affected Communities	%	100		Maximize	

Agenda Keempat Fourth Agenda	
Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan (*Key Performance Indicator*) Dewan Komisaris dengan Pemegang Tahun 2022	Determination of 2022 Management Contract (Key Performance Indicators) between Board of Commissioners and Shareholders
Realisasi Menetapkan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*) antara Dewan Komisaris Tahun 2022, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.	**Realization** Determined the 2022 Management Contract (Key Performance Indicators) between Board of Commissioners and Shareholders, as attached and is an integral part of this resolution.

Key Performance Indicator

No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target
1.	Kontribusi terhadap capaian kinerja perusahaan Contribution to the Company's performance achievements		10	
	Kontribusi terhadap realisasi capaian KPI Direksi Contribution to the realization of Board of Directors' KPI achievements	Poin Point	10	100
2.	Ketepatan waktu penyampaian Pendapat dan Saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris Timeliness of submission of Opinions and Suggestions that are the obligations of Board of Commissioners		20	
	a. Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas RKAP 2022, Laporan Triwulanan 2022, dan Laporan Tahunan 2021 Board of Commissioners' Opinions and Suggestions on RKAP 2022, Quarterly Report 2021, and Annual Report 2021	Hari Kerja Working days	5	30
	b. Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan RUPS/Menteri Responses to Board of Directors' actions that must be approved by the GMS/Minister	Hari Kerja Working days	5	14
	c. Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris Responses to Board of Directors' actions that must be approved by Board of Commissioners	Hari Kerja Working days	5	14
	d. Laporan Dewan Komisaris triwulanan dan Tahunan Quarterly and Annual Board of Commissioners Report	Hari Kerja Working days	5	30
3.	Kontribusi terhadap penerapan GCG Contribution to the implementation of GCG		10	
	a. Kontribusi kualitas penerapan GCG Contribution to the quality of GCG implementation	Poin Point	5	31,50
	b. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil *Assessment* GCG Aspek Dewan Komisaris Follow-up to the Recommendations on the Results of GCG Assessment of Board of Commissioners aspect	%	5	100
4.	Rapat dan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Meetings and Working Visits of Board of Commissioners		18	
	a. Jumlah Rapat Internal Dewan Komisaris Number of Internal Meetings of Board of Commissioners	Jumlah Amount	6	12
	b. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Number of Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors	Jumlah Amount	6	12
	c. Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Cabang Working Visit of Board of Commissioners to the Branch	Jumlah Amount	6	7

No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target
5.	Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan perusahaan Supervision and direction to Board of Directors on Company plans and policies	Jumlah Amount	14	**7**
6.	Efektivitas Kegiatan Penunjang Dewan Komisaris Effectiveness of Supporting Activities of Board of Commissioners		28	
	a. Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Board of Commissioners Competency Improvement			
	Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris Board of Commissioners Competency development	Pelaksanaan Implementation	3	14
	b. Efektivitas Organ Pendukung Effectiveness of Supporting Organs			
	Komite Audit Audit Committee			
	• Pelaksanaan Rapat Internal Komite Audit Implementation of Internal Audit Committee Meetings	Jumlah Amount	3	12
	• Laporan Penugasan Komite Audit Audit Committee Assignment Report	Laporan Report	3	4
	Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee			
	• Pelaksanaan Rapat Internal Komite PMR Implementation of PMR Committee Internal Meeting s	Jumlah Amount	3	12
	• Laporan Penugasan Komite PMR PMR Committee Assignment Report	Laporan Report	3	4
	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee			
	• Pelaksanaan Rapat Internal Komite NR Implementation of NR Committee Internal Meetings	Jumlah Amount	3	12
	• Laporan Penugasan Komite NR NR Committee Assignment Report	Laporan Report	3	4
	Jumlah Total		**100**	

Agenda Kelima Fifth Agenda	
Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2022	Stipulation of Operational Aspect indicators for the Measurement of the Company's 2022 Soundness Level

Keputusan
Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2022, sebagai berikut:

Resolution
Stipulated the Operational Aspect Indicators for the Measurement of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s 2022 Soundness Level, as follows:

No.	Indikator Indicators	Bobot Weight
Aspek Operasional Operational Aspect		35.00
1.	*Waiting Time for Pilot*	9.0
2.	Tingkat Efektivitas Tambahan Petikemas Additional Container Effectiveness Level	9.0
3.	*Yard Occupancy Ratio* Petikemas Container Yard Occupancy Ratio	9.0
4.	Produktivitas B/M Petikemas -*Gross* Productivity of Container B/M -Gross	8.0

Agenda Keenam
Sixth Agenda

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program/item investasi sepanjang tidak merubah program/item investasi dan tidak melebihi total nilai investasi.

Approval of delegation of authority to the Board of Commissioners to approve if there are actions that result in changes to investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program/item as long as does not change the investment program/item and does not exceed the investment total value.

Keputusan
Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program/item investasi sepanjang tidak merubah program/item investasi dan tidak melebihi total nilai investasi.

Resolution
Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to give approval if there are actions that result in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program/item as long as does not change the investment program/item and does not exceed the investment total value.

REALISASI ARAHAN RUPS

REALIZATION OF GMS DIRECTIONS

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-Up
1	RKAP yang disahkan merupakan pedoman bagi Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha dan pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan perusahaan tahun 2022. RKAP tersebut termasuk di dalamnya program Manajemen Risiko agar dirinci menjadi program dan target bulanan dan triwulanan untuk memudahkan *monitoring* dan evaluasi pencapaiannya, serta dilakukan *cascading* ke seluruh jajaran perusahaan. The approved RKAP is a guideline for Board of Directors in carrying out business activities and a guideline for Board of Commissioners in carrying out supervisory duties in 2022. The RKAP includes the Risk Management program to be broken down into monthly and quarterly programs and targets to facilitate monitoring and evaluation of achievements, as well as cascading to all levels of the company.	Penyusunan RKAP yang disahkan oleh Direksi telah menggunakan *Risk Based Budgeting* dan Dokumen RKAP telah dilengkapi dengan rencana target program Manajemen Risiko untuk memudahkan evaluasi serta pencapaiannya. The preparation of RKAP approved by Board of Directors has used Risk Based Budgeting and RKAP Document has been equipped with Risk Management program target plan to facilitate evaluation and achievement.
2	Berkomitmen untuk mencapai target-target RKAP 2022 dan *Key Performance Indicators* (KPI) tahun 2022 dengan tetap melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Committed to achieving the 2022 RKAP and 2022 Key Performance Indicators (KPI) targets while continuing to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG).	Penyusunan *Key Performance Indicators* (KPI) tahun 2022 dalam Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat KPI Direksi secara Kolegial antara RUPS Pelindo dan Direksi Pelindo untuk selanjutnya dilakukan *monitoring* dan pengukuran setiap triwulan atas capaian target KPI 2022 yang disampaikan dalam Laporan Manajemen. The preparation of Key Performance Indicators (KPI) for 2022 in the Annual Management Contract includes KPIs for Directors collegially between Pelindo GMS and Pelindo Directors, and achievement of 2022 KPI targets are further monitored and measured every quarter, and presented in the Management Report.
3	Perbuatan-perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS sesuai Anggaran Dasar dan Peraturan Lainnya agar diajukan secara tersendiri dengan dilengkapi sekurang-kurangnya tanggapan Dewan Komisaris, Pakta Integritas Direksi, kajian teknis, kajian hukum, kajian ekonomi dan kajian risiko. The Board of Directors' actions that require approval from the GMS in accordance with the Articles of Association and Other Regulations must be submitted separately accompanied by at least the Board of Commissioners' responses, the Board of Directors' Integrity Pact, technical studies, legal studies, economic studies and risk studies.	Dalam permintaan persetujuan RUPS atas keputusan strategis Direksi telah dilengkapi dengan tanggapan Dewan Komisaris, Pakta Integritas Direksi, kajian teknis, kajian hukum, kajian ekonomi, dan kajian risiko The request for approval from the GMS on the Board of Directors' strategic decisions has been completed with the Board of Commissioners' responses, the Board of Directors' Integrity Pact, technical studies, legal studies, economic studies, and risk studies.
4	Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas temuan, serta saran dan rekomendasi auditor, baik auditor eksternal (BPK RI dan/atau KAP) maupun auditor internal (SPI) di tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Tindak lanjut penyelesaian temuan/ saran auditor agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan dilaporkan secara tertulis kepada Pemegang Saham. Board of Directors should follow up and complete the findings, as well as suggestions and recommendations from the auditors, both external auditors (BPK RI and/or KAP) and internal auditors (SPI) in 2021 and in previous years. Follow-up on the completion of auditor's findings/suggestions to be comprehensively discussed with Board of Commissioners and reported in writing to Shareholders.	Telah dilaksanakan *monitoring* tindak lanjut LHP BPK dan disampaikan pemenuhan dokumen sesuai dengan rekomendasi temuan BPK dengan progress 71,92% pada Semester I Tahun 2022 dan 38,16% untuk *monitoring* Tindak Lanjut Rekomendasi LHA SPI. The monitoring of follow-up f BPK's LHP has been carried out and submitted the fulfillment of documents in accordance with recommendations from BPK's findings with progress of 71.92% in Semester I of 2022 and 38.16% for monitoring of Follow-Up of LHA SPI Recommendations.
5	Melakukan langkah-langkah efisiensi di segala bidang dengan tetap menjaga produktivitas dan kualitas pelayanan. Perform efficiency measures in all areas while maintaining productivity and service quality.	Telah dilakukan proses pengendalian anggaran sesuai dengan Perdiri No HK.01/11/3/1/PKPN/UTMA/PLND-22 dan setiap bulan dilakukan evaluasi pencapaian kinerja keuangan Regional dan Subholding. Untuk realisasi beban usaha tahun 2022 (*unaudited*) tercapai 100% dari RKAP Tahun 2022. Budget control process has been carried out in accordance with Perdiri No. HK.01/11/3/1/PKPN/UTMA/PLND-22 and an evaluation of the achievement of Regional and Subholding financial performance is carried out every month. For the realization of operating expenses in 2022 (unaudited), reached 100% of the 2022 RKAP.

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-Up
6	Melakukan penilaian tingkat kematangan manajemen risiko/RMI secara berkala dengan mengacu pada ketentuan dan pedoman yang berlaku, serta melaporkan hasilnya kepada Kementerian BUMN. Untuk penilaian tingkat kematangan risiko/RMI tahun 2021, hasil penilaiannya agar disampaikan paling lambat pertengahan Triwulan II tahun 2022. Conduct periodic risk management/RMI maturity level assessments with reference to applicable provisions and guidelines, and report the results to the Ministry of SOEs. For the assessment of risk maturity level/RMI in 2021, the assessment results should be submitted no later than the middle of the second quarter of 2022.	Penilaian RMI tahun 2021 telah dilakukan secara *self assessment* dengan menggunakan *framework* dari PwC dan hasil penilaian telah disampaikan kepada Tim Manajemen Risiko dan Kepatuhan KBUMN pada 7 September 2022. The 2021 RMI assessment has been carried out as a self-assessment using the framework from PwC and the assessment results have been submitted to the KBUMN Risk Management and Compliance Team on September 7, 2022.
7	Pelaksanaan Investasi agar memperhatikan skala prioritas, kemampuan keuangan perusahaan dan berpedoman pada rencananya (*cost & schedule*) serta dijaga supaya tidak terjadi *cost overrun*, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan targetnya. Investment should pay attention to the priority scale, the company's financial capability and be guided by the plan (cost & schedule) and be maintained in order to avoid cost overrun and can be completed according to the target.	Dalam penyusunan usulan investasi kita telah memisahkan berdasarkan kategori urgensi yakni *must have* dan *nice to have* yang diselaraskan dengan kemampuan perusahaan serta adanya struktur organisasi baru yang melakukan *monitoring* secara rutin In preparing investment proposals, we have separated them based on the urgency category, namely must have and nice to have, which are aligned with the company's capabilities as well as the existence of a new organizational structure that carries out regular monitoring.
8	Direksi agar melaporkan realisasi program *blueprint* amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk Tahun 2021, serta menyusun dan melaksanakan strategi implementasinya pada tahun 2022. Apabila *blueprint* dimaksud belum disusun, Direksi diminta untuk memenuhinya pada tahun 2022 dimana dapat dilakukan melalui kolaborasi/ *benchmarking* dengan BUMN lain, sekaligus mengakselerasi implementasinya pada Tahun 2022. Board of Directors is required to report the realization of blueprint program mandated by Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities for 2021, as well as prepared and carry out the implementation strategy in 2022. If the said blueprint has not been prepared, Board of Directors is asked to fulfill it in 2022, which can be done through collaboration/benchmarking with other SOEs, as well as accelerating its implementation in 2022.	Pemenuhan amanat Undang Undang Nomor 8 Tahun 2-16 tentang Penyandang Disabilitas telah dilakukan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero), yang merupakan kelanjutan dari program pada tahun sebelumnya, meliputi penempatan, pengembangan karir, kesejahteraan, aksesibilitas, serta program kesehatan dan keselamatan kerja di masing-masing fungsi terkait baik di *holding* maupun *subholding* Fulfillment of the mandate of Law Number 8 Year 2-16 concerning Persons with Disabilities has been carried out at PT Pelabuhan Indonesia (Persero), which is a continuation of the previous year's program, covering placement, career development, welfare, accessibility, as well as occupational health and safety programs in each related function, both in holding and subholding
9	Direksi agar melengkapi Data Pengurus BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi BUMN serta Talent pada portal *Human Capital* BUMN. Board of Directors is required to complete data on SOE Management, SOE Subsidiaries, and SOE Consolidated Affiliated Companies and Talents on the SOE Human Capital portal.	Telah dilakukan *updating* data pengurus BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi secara berkala di portal *Human Capital* BUMN. The data on SOE management, SOE Subsidiaries, and Affiliated Companies data has been periodically updated on the SOE Human Capital portal.
10	Direksi agar meningkatkan pembinaan anak perusahaan sehingga kinerjanya diharapkan senantiasa tumbuh dengan baik dan dapat memberikan kontribusi positif bagi Perusahaan Induk. Board of Directors should improve the development of subsidiary companies so that their performance can continue to grow well and make a positive contribution to the parent company.	Telah dilaksanakan pembinaan anak perusahaan salah satunya melalui program *Business Performance Review* secara berkala oleh Group Manajemen Portofolio Anak Perusahaan untuk memastikan kinerja anak perusahaan senantiasa tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi Perusahaan Induk. Subsidiary management has been carried out, one of which is through the Business Performance Review program periodically by the Subsidiary Portfolio Management Group to ensure that the subsidiary's performance continues to grow and make a positive contribution to the Parent Company.
11	Menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya akhir Februari 2022. Submitting the Company's Annual Report including the 2021 Financial Statements, which have been audited by the Public Accounting Firm no later than the end of February 2022.	Penyusunan Laporan Audit Tahun buku 2021 telah selesai dibuat. Compilation of the Audit Report for 2021 fiscal year has been completed.

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-Up
12	Menindaklanjuti dan melaksanakan hasil rekomendasi pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran TJSL dengan Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Nomor: RIS-09/DSI.MBU.B/12/2021. Follow up and implement the recommendations from the discussion on CSR Work Plan and Budget with Assistant Deputy for Social and Environmental Responsibility as stated in the Minutes of Meeting Number: RIS-09/DSI.MBU.B/12/2021.	1. Anggaran Program TJSL Tahun 2022 CID Non PUMK telah ditetapkan sebesar Rp120.500 Miliar dalam RKA TJSL Tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp112.521 M; 2. Pelaksanaan Program PUMK Tahun 2022 telah dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank BRI (Persero) sebesar Rp79.782.062.832,- pada tanggal 30 Desember 2022. 1. 2022 CID Non-PUMK CSR Program Budget has been stipulated at Rp120,500 billion in 2022 CSR RKA with a realization of Rp112,521 billion; 2. 2022 PUMK Program has been carried out in collaboration with PT Bank BRI (Persero) in the amount of Rp79,782,062,832 ,- on December 30, 2022.
13	Melakukan evaluasi kinerja Perusahaan dan ketercapaian *progress* program kerja pasca penggabungan dan *Value Realization*. Evaluating the Company's performance and the achievement of post-merger work program progress and Value Realization.	Telah dilaksanakan evaluasi kinerja Perusahaan dan ketercapaian progress program kerja pasca penggabungan dan *Value Realization* secara berkala melalui Forum Integrasi. Periodic evaluation of the Company's performance and achievement of work program progress post-merger and Value Realization has been carried out through the Integration Forum.
14	Berperan aktif dalam implementasi *National Logistic Ecosystem* (NLE) dan melaksanakan Pembenahan tata kelola pelabuhan sebagai bagian dari Aksi Pemangkasan Birokrasi dan Peningkatan Layanan di Kawasan Pelabuhan dan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dalam memberikan dampak terhadap efektivitas waktu dan efisiensi biaya di Kawasan Pelabuhan. Playing an active role in the implementation of National Logistic Ecosystem (NLE) and carrying out reforms to port governance as part of the Action to Reduce Bureaucracy and Service Improvement in Port Area and the Action on National Strategy for Corruption Prevention (Stranas PK) in impacting time effectiveness and cost efficiency in Port Area.	Pelindo berperan aktif dalam implementasi *National Logistic Ecosystem* (NLE) dan melaksanakan pembenahan tatakelola pelabuhan sebagai bagian dari Aksi Pemangkasan Birokrasi melalui Standardisasi dan Digitalisasi Pelayanan, seperti : 1. *Go Live* Aplikasi Phinisi 2. Single Truck Identification (STID) 3. Simon TKBM 4. Gate System 5. SSm QC 6. SSm Pengangkut 7. DO *Online* 8. SP2 *Online* Pelindo plays an active role in the implementation of National Logistic Ecosystem (NLE) and carries out port governance improvements as part of the Bureaucratic Reduction Action through Standardization and Digitalization of Services, such as: 1. Go Live Phinisi App 2. Single Truck Identification (STID) 3. Simon TKBM 4. Gate System 5. SSm QC 6. SSm Carrier 7. DO Online 8. SP2 Online
15	Melakukan pemenuhan target KPI PMN TA 2021 sesuai dengan perencanaan yang telah diajukan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Fulfilling PMN FY 2021 KPI targets in accordance with the plan that has been submitted by PT Pelabuhan Indonesia (Persero).	Terkait KPI *Output* pada Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa yang menggunakan anggaran PMN, pada tahun 2022 tidak memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan kendala perizinan dll. Telah dilakukan penyusunan KPI terkait Pekerjaan PMN ini untuk Tahun 2023. Regarding the Output KPI for Benoa Port Channel and Pond Dredging Work that used the PMN budget did not meet the targets set due to licensing constraints etc. in 2022. KPIs related to PMN Work have been prepared for 2023.
16	Menyusun langkah-langkah untuk peningkatan kinerja operasional terutama pada cabang-cabang yang masih merugi dari sisi finansial. Formulate steps to improve operational performance, especially for branches that are still losing financially.	Mengimplementasikan program Optimalisasi Lahan *Idle* untuk peningkatan kinerja operasional dan pendapatan bagi perusahaan. Implementing the Idle Land Optimization program to increase operational performance and revenue for the company.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 DAN REALISASINYA

Pelaksanaan RUPS dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Mei 2022
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Kantor Pelindo Tower, Lantai 6
Jl. Yos Sudarsi No. 9 Kec. Koja, Jakarta Utara, 14230

ANNUAL GMS ON APPROVAL OF FISCAL YEAR 2021 ANNUAL REPORT AND THE REALIZATION

The GMS was held on:
Day/Date : Wednesday, May 18, 2022
Time : 09.00 WIB - finish
Venue : Pelindo Tower Office, 6th Floor
Jl. Yos Sudarsi No. 9 District. Koja, North Jakarta, 14230

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021

Recapitulation of Attendance at The GMS on Approval of Fiscal Year 2021 Annual Report

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
1	Marsetio	Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner and Acting President Commissioner	Hadir Present	-
2	Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present	-
3	Antonius Rainer Haryanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present	-
4	Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present	-
5	Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	Hadir Present	-
6	Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Hadir Present	-
7	Raden Agus Haryoto Purnomo	Komisaris Commissioner	Tidak Hadir Absent	Cuti Ibadah Worship Leave
8	Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Hadir Present	-
9	Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Hadir Present	-
10	Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director	Hadir Present	-
11	Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Hadir Present	-
12	Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Hadir Present	-
13	Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	Hadir Present	-
14	Putut Sri Mulyanto	Direktur Pengelola Managing Director	Hadir Present	-

PIHAK INDEPENDEN

Pelindo telah menunjuk pihak *independent* yaitu Notaris Nanda Fauz Iwan dalam menyusun Akta hasil RUPS.

INDEPENDENT PARTY

Pelindo has appointed an independent party, Notary Nanda Fauz Iwan, to prepare the deed of GMS results.

Keputusan dan Realisasi RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021

Resolution and Realization of The GMS on Approval of Fiscal Year 2022 Annual Report

Agenda Pertama
First Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021.

Approval of the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2021, including the Restatement of the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2020 and the Board of Commissioners Supervisory Report for Fiscal Year 2021.

Keputusan

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) termasuk mengesahkan penyajian kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00352/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/III/2022 tanggal 29-03-2022 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh dua) dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan Tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Resolution

Approve the Annual Report for Fiscal Year 2021 (two thousands and twenty one) including the Supervisory Report of Board of Commissioners and ratify the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2021 (two thousands and twenty one) which have been audited by Public Accounting Firm (KAP) Purwanto, Sungkoro and Surja (EY) according to their report No. 00352/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/III/2022 dated 29-03-2022 (twenty-ninth of March two thousand and twenty-two) with the opinion "unqualified", and providing full release and discharge (volledig acquit et de charge) to Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervisory actions that have been carried out in the Fiscal Year ending 31-12-2021 (thirty first December two thousand and twenty one), as long as these actions do not constitute criminal acts and are reflected in the Company's report books.

Agenda Kedua
Second Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun 2021.

Approval of the 2021 Social and Environmental Responsibility Program (CSR) Annual Report and Ratification of the 2021 Micro and Small Business Funding Program (PUMK) Financial Report.

Keputusan

Menyetujui Laporan Tahunan TJSL Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan mengesahkan Laporan Keuangan Program PUMK Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00375/2.1032/AU.2/06/0697- 2/1/III/2022 tanggal 30-03-2022 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh dua) dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan TJSL Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

Resolution

Approve CSR Annual Report for Fiscal Year 2021 (two thousand and twenty one) and ratified the PUMK Program Financial Report for 2021 (two thousand and twenty one) which has been audited by KAP Purwantono, Sungkoro & Surja as contained in its report Number: 00375/2.1032 /AU.2/06/0697- 2/1/III/2022 dated 30-03-2022 (thirtieth of March two thousand and twenty-two) with the opinion "unqualified", and providing release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision of CSR for Fiscal Year 2021 (two thousand twenty one), as long as these actions do not constitute criminal acts and are reflected in the report.

Agenda Ketiga
Third Agenda

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Determination of the use of the Company's net profit for fiscal year 2021.

Keputusan
Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp3.292.133.733.732,00,- (tiga triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) sebagai berikut:
1. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari laba bersih atau sebesar Rp1.316.854.000.000,00,- (satu triliun tiga ratus enam belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai.
2. Sebesar 60% (enam puluh persen) dari laba bersih atau sebesar Rp1.975.279. 733. 732,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) ditetapkan sebagai cadangan.

Resolution
Determine the use of Net Profit Attributable to the Owners of Parent Entity for Fiscal Year 2021 (two thousand and twenty one) in the amount of Rp3,292,133,733,732.00 (three trillion two hundred ninety two billion one hundred thirty three million seven hundred thirty three thousand seven hundred three twenty two rupiah) as follows:
1. 40% (forty percent) of the net profit or Rp1,316,854,000,000.00 (one trillion three hundred sixteen billion eight hundred and fifty four million rupiah) is designated as cash dividends.
2. 60% (sixty percent) of net profit or Rp1,975,279. 733. 732.00 (one trillion nine hundred seventy five billion two hundred seventy nine million seven hundred thirty three thousand seven hundred thirty two rupiah) is designated as reserves.

Agenda Keempat
Fourth Agenda

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021, Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2022.

Determination of Tantiem for Fiscal Year 2021, Salary for Board of Directors and Honorarium for Board of Commissioners along with Other Facilities and Allowances for 2021.

Keputusan
Besaran Tantiem Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), Gaji untuk Direksi dan Honorarium Untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) akan ditetapkan secara tersendiri.

Resolution
Determination of Tantiem for Fiscal Year 2021 (two thousand and twenty one), Salary for Board of Directors and Honorarium for Board of Commissioners along with Facilities and Other Allowances for 2022 (two thousand and twenty two) will be determined separately.

Agenda Kelima
Fifth Agenda

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 Serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022.

Appointment of Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2022 as well as the Financial Statements and Implementation of Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for Fiscal Year 2022.

Keputusan
1. Menetapkan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

Resolution
1. Appoint KAP Purwantono, Sungkoro & Surja to conduct a general audit of the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2022 (two thousand and twenty two) and the Financial Statements for the Company's Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for Fiscal Year 2022 (two thousand and two twenty two).
2. Delegating authority to the Board of Commissioners to determine the amount of compensation for audit services, adding the required scope of work and other reasonable requirements for the KAP.

Agenda Keenam
Sixth Agenda

Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara.

Ratification of Report on the Realization of Additional Use of State Equity Participation Funds.

Keputusan
Mengesahkan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2021 (dua ribu dua puluh satu) untuk periode Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Resolution
Ratify Report on the Realization of Additional Use of State Equity Participation Funds (PMN) originating from the 2021 (two thousand twenty one) State Budget for the period of Fiscal Year 2021 (two thousand twenty one).

Realisasi Arahan RUPS

Realization of GMS Directions

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-up
1	Direksi perlu meningkatkan efisiensi di segala bidang (terutama beban Kerja Sama mitra usaha), termasuk efisiensi dengan telah terintegrasinya PT Pelabuhan Indonesia I, III, dan IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan indonesia (Persero) dengan tetap menjaga produktivitas dan kualitas pelayanan. Board of Directors needs to improve efficiency in all fields (especially the expenses for cooperation with business partners), including efficiency due to the integration of PT Pelabuhan Indonesia I, III, and IV (Persero) into PT Pelabuhan Indonesia (Persero) while maintaining productivity and service quality.	Telah dilakukan proses pengendalian anggaran sesuai dengan Perdiri No HK.01/11/3/1/PKPN/UTMA/PLND-22 dan setiap bulan dilakukan evaluasi pencapaian kinerja keuangan Regional dan Subholding. Untuk realisasi beban usaha tahun 2022 (unaudited) tercapai 100% dari RKAP Tahun 2022. Budget control process has been carried out in accordance with Perdiri No. HK.01/11/3/1/PKPN/UTMA/PLND-22 and the achievement of Regional and Subholding financial performance is evaluated every month. For the realization of operating expenses in 2022 (unaudited), reached 100% of the 2022 RKAP.
2	Direksi perlu segera melakukan upaya Standardisasi dan perbaikan fasilitas serta layanan di cabang-cabang PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sehingga pengguna jasa dapat menerima pelayanan yang lebih baik dan memuaskan. Board of Directors needs to immediately standardize and improve facilities and services at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) branches, hence service users can receive better and more satisfying services.	Telah disusun Kajian Buku Putih yang didalamnya terdapat mapping untuk rencana penataan transformasi terminal petikemas pada Cabang-Cabang PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan profiling terminal yang akan diserah-operasikan ke *Subholding* PT Pelabuhan Indonesia (Persero). White Paper Study has been prepared, which includes mapping for the plan for transforming container terminals at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Branches and terminal profiling which will be handed over to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Subholding.
3	Direksi agar menyelesaikan realisasi dana PMN Tahun Anggaran 2021 (Tahun Anggaran dua ribu dua puluh satu) untuk pengembangan Proyek BMTH sesuai target KPI yang menjadi bagian dalam kajian PMN serta melaporkan realisasinya secara berkala sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/03/2021. Board of Directors should complete the realization of PMN funds for Fiscal Year 2021 (two thousand and twenty one) for the development of BMTH Project according to the KPI targets that are part of the PMN study and report their realization periodically in accordance with the Minister of SOE Regulation Number: PER-01/MBU/03 /2021.	Terkait target KPI pada Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa yang menggunakan anggaran PMN pada tahun 2021 tidak memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan kendala perizinan dan lainnya, sedangkan penyusunan dan penyampaian laporan realisasi PMN telah dilakukan secara berkala (per Triwulan) sesuai ketentuan yang berlaku. Regarding the KPI targets for the Dredging Work of Benoa Port Channels and Ponds which use the PMN budget in 2021, did not meet the targets due to licensing and other constraints, while PMN realization reports have been prepared and submitted periodically (quarterly) in accordance with applicable regulations.
4	Direksi agar secara intensif mengawal *progress Asset Recycling* dan kerja sama strategis dengan INA sehingga dapat terealisasi tepat waktu serta memastikan prosesnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Board of Directors should intensively oversee the progress of Asset Recycling and strategic cooperation with INA, so that it can be realized on time and ensure that the process is carried out in accordance with applicable rules and regulations.	Telah dilakukan finalisasi atas kajian aset *recycling* dan penunjukan konsultan pendamping transaksi. The finalization of recycling assets review and the appointment of transaction assistant consultant has been carried out.
5	Direksi perlu melakukan percepatan penyelesaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) bagi masing-masing *subholding* yang sekaligus terintegrasi dan sejalan dengan RJPP Induk. Board of Directors needs to accelerate the completion of the Company's Long Term Plan (RJPP) for each subholding, which is simultaneously integrated and in line with the main RJPP.	RJPP *Subholding* yang telah diselaraskan dengan RJPP Induk/ Terintegrasi telah diselesaikan dan disahkan.melalui RUPS tgl 30 September 2022 sbb: 1. RUPS Pengesahan RJPP SPSL No. SK.03/30/9/1/PBAP/UTMA/PLNS-22 2. RUPS Pengesahan RJPP SPTP No. SK.03/30/9/2/PBAP/UTMA/PLNS-22 3. RUPS Pengesahan RJPP SPMT No. SK.03/30/9/3/PBAP/UTMA/PLNS-22 4. RUPS Pengesahan RJPP SPJM No. SK.03/30/9/4/PBAP/UTMA/PLNS-22 The Subholding RJPP which has been aligned with the Main/ Integrated RJPP has been finalized and ratified through the GMS on September 30, 2022 as follows: 1. GMS Ratification of RJPP SPSL No. SK.03/30/9/1/PBAP/UTMA/PLNS-22 2. GMS Ratification of RJPP SPTP No. SK.03/30/9/2/PBAP/UTMA/PLNS-22 3. GMS Ratification of RJPP GMS No. SK.03/30/9/3/PBAP/UTMA/PLNS-22 4. GMS Ratification of RJPP SPJM No. SK.03/30/9/4/PBAP/UTMA/PLNS-22

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-up
6	Direksi agar melakukan upaya peningkatan nilai *Key Performance Indicators* (KPI) khususnya terhadap indikator yang belum mencapai target pada tahun 2021 yaitu Inovasi Model Bisnis pada Standardisasi Performansi Pelabuhan dan Peningkatan Investasi pada Optimalisasi Aset. Board of Directors should make efforts to increase the score of Key Performance Indicators (KPI), especially for indicators that have not reached the target in 2021, namely Business Model Innovation in Port Performance Standardization and Increased Investment in Asset Optimization.	Penyusunan *Key Performance Indicators* (KPI) Standarisasi Performansi Pelabuhan dan Optimalisasi Aset (Lahan dan Alat B/M) dalam Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat KPI Direksi secara Kolegial antara RUPS Pelindo dan Direksi Pelindo Tahun 2021 untuk selanjutnya dilakukan monitoring dan pengukuran setiap triwulan atas capaian target KPI 2021 yang disampaikan dalam Laporan Manajemen. Adapun Standardisasi Performansi Pelabuhan meliputi Terminal Petikemas Belawan, Terminal Petikemas Domestik Tanjung Priok TP1 & TP2, Terminal Petikemas Nilam, dan Makassar New Port & Terminal Petikemas Makassar. Sedangkan Optimalisasi Aset (Lahan dan Alat B/M) meliputi Program Pemanfaatan Gd Eks Kantor Pusat Pelindo 1, Kerjasama dengan PT FKS di Jawa Tengah, dan Kerjasama Pemanfaatan CY antara cabang Makassar dengan TPM dan Persewaan lahan cabang Kendari CY Pelabuhan Nusantara. Preparation of Key Performance Indicators (KPI) Standardization of Port Performance and Asset Optimization (Land and B/M Equipment) in the Annual Management Contract which contains collegial KPIs for Board of Directors between Pelindo GMS and Pelindo Directors in 2021, in which the target achievements of 2021 KPIs are further monitored and measured every quarter, and presented in the Management Report. The Port Performance Standardization includes Belawan Container Terminal, Tanjung Priok Domestic Container Terminal TP1 & TP2, Nilam Container Terminal, and Makassar New Port & Makassar Container Terminal. Meanwhile, Asset Optimization (Land and B/M Equipment) includes the Utilization Program of Ex-Pelindo 1 Head Office Building, Collaboration with PT FKS in Central Java, and CY Utilization Collaboration between Makassar branch and TPM, and land lease of Kendari branch CY Nusantara Port.
7	Direksi dan Dewan Komisaris perlu memastikan agar setiap pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Board of Directors and Board of Commissioners need to ensure that every business activities of the Company is carried out with due regard to the principles of Good Corporate Governance (GCG) in a consistent and sustainable manner, guided by the applicable rules and regulations.	Direksi dan Dewan Komisaris telah memastikan setiap pelaksanaan kegiatan perusahaan telah dilakukan berdasarkan prinsip GCG. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan penilaian GCG yang telah dilakukan oleh Pelindo dengan capaian skor sebesar 90,473 dengan predikat Sangat Baik. Pelaksanaan penilaian GCG pelindo dilakukan oleh *assessor* BPKP. Board of Directors and Board of Commissioners have ensured that every company activities have been carried out based on GCG principles. This is in line with Pelindo's GCG assessment with a score of 90.473 and Very Good predicate. Pelindo's GCG assessment was carried out by BPKP assessor.
8	Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas terhadap setiap temuan, catatan serta saran/rekomendasi baik dari auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik/KAP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan RI/BPK-RI termasuk instansi pengawasan berwenang lainnya) maupun auditor internal Perseroan yang belum dinyatakan selesai ditindaklanjuti. Progres tindak lanjut penyelesaian temuan-temuan dimaksud agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan disampaikan tertulis secara berkala kepada Pemegang Saham. Board of Directors should follow up and complete thoroughly on every finding, note and suggestion/recommendation from both external auditors (Public Accountant Office/KAP, Financial and Development Supervisory Agency/BPKP and Indonesian Supreme Audit Agency/BPK-RI including other authorized supervisory agencies) as well as the Company's internal auditors, which the follow-up has not been completed. The follow-up progress of the said findings should be comprehensively discussed with Board of Commissioners and submitted in writing periodically to Shareholders.	Telah dilaksanakan *monitoring* tindak lanjut LHP BPK dan disampaikan pemenuhan dokumen sesuai dengan rekomendasi temuan BPK dengan progress 83,25% pada Semester II Tahun 2022 dan 68% untuk *monitoring* Tindak Lanjut Rekomendasi LHA SPI. *Next Step*: Koordinasi dengan Unit kerja terkait dalam rangka pemenuhan dokumen rekomendasi BPK yang masih Belum Sesuai dan Koordinasi dengan BPK untuk kegiatan monitoring Tahun 2023 serta *monitoring* tindak lanjut LHA SPI secara berkala. BPK LHP follow-up has been monitored and the fulfillment of documents has been submitted in accordance with recommendations from BPK's findings with progress of 83.25% in Semester II of 2022 and 68% for monitoring of Follow-Up of SPI LHA Recommendations. Next Step: Coordination with related work units to fulfill BPK recommendation documents that is still not in compliance and coordination with BPK for monitoring activities in 2023 and regular monitoring of SPI LHA follow-up.

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-up
9	Direksi agar senantiasa menjaga konsistensi dalam melakukan *monitoring* dan *updating* data pada Portal BUMN, yakni Portal Silaba, Portal Human Capital (HC), Portal TJSL, dan Portal Publik. Progres pemutakhiran data dalam portal tersebut agar dilaporkan dalam laporan manajemen triwulanan dan laporan tahunan. Board of Directors should always maintain consistency in monitoring and updating data on SOE Portals, namely Silaba Portal, Human Capital (HC) Portal, CSR Portal, and Public Portal. Progress of updating data in the portal to be reported in quarterly management reports and annual reports.	• Telah dilakukan *monitoring* dan konsistensi penyampaian laporan di portal Silaba. • Progres pemutakhiran data dalam masing-masing portal telah dilaporkan dalam laporan manajemen triwulanan dan laporan Tahunan serta menjadi bagian dari indikator penilaian KPI dan tingkat kesehatan perusahaan. • Monitoring and consistency in reporting has been carried out on the Silaba portal. • The progress of updating data in each portal has been reported in quarterly management reports and annual reports as well as being part of KPI assessment indicators and company soundness level.
10	Direksi agar menindaklanjuti hal-hal yang menjadi rekomendasi dari Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sesuai surat yang disampaikan Nomor: 28/DKIPI/IV-2022 tanggal 18-04-2022 (delapan belas April dua ribu dua puluh dua) perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Tahun 2021 Audited PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Board of Directors should follow up on matters that become recommendations of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) according to the letter Number: 28/DKIPI/IV-2022 dated 18-04-2022 (eighteenth April two thousand and twenty two) regarding the Board of Commissioners' Response for 2021 Audited Management Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).	Rekomendasi Dewan Komisaris pada tanggapan Laporan Manajemen Tahun 2021 telah dituangkan menjadi Rencana Kerja Manajemen serta KPI Direktorat terkait yang di*monitoring* secara rutin setiap triwulanan pada Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi. The Board of Commissioners' recommendations in response to the 2021 Management Report have been outlined in the Management Work Plan and KPI of the relevant Directorates which are monitored regularly every quarter at the Joint Meetings of Commissioners and Directors

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2021 DAN REALISASINYA

Pelaksanaan RUPS dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 29 Januari 2021
Waktu : 18.30 WIB – 19.45 WIB
Tempat : *Virtual Meeting* melalui *Link Video Conference via Zoom Meeting*

ANNUAL GMS ON APPROVAL OF 2021 CORPORATE WORK PLAN AND BUDGET AND THE REALIZATION

The GMS was held on:
Day/Date : Friday, January 29, 2021
Time : 18.30 WIB – 19.45 WIB
Venue : Virtual Meeting via Video Conference Link via Zoom Meeting

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2021

Recapitulation Of Attendance at The GMS on 2021 RKAP Approval

No.	Name Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
1	Moermahadi Soerja Djanegara	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Hadir Present
2	Suaidi Marasabessy	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
3	Nurrachman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
4	Raden Agus Haryoto Purnomo	Komisaris Commissioner	Hadir Present
5	Djaman Andhi Nirwanto	Komisaris Commissioner	Hadir Present
6	Montty Girianna	Komisaris Commissioner	Hadir Present
7	Kushari Suprianto	Komisaris Commissioner	Hadir Present

No.	Name Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
8	Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Hadir Present
9	Ihsanuddin Usman	Direktur Director	Hadir Present
10	Zuhri Iryansyah	Direktur Director	Hadir Present
11	Muarip	Direktur Director	Hadir Present
12	Ogi Rulino	Direktur Director	Hadir Present
13	Rima Novianti	Direktur Director	Hadir Present
14	Yon Irawan	Direktur Director	Hadir Present

PIHAK INDEPENDEN

Pelindo telah menunjuk pihak independent yaitu Notaris Nanda Fauz Iwan dalam menyusun Akta hasil RUPS.

INDEPENDENT PARTY

Pelindo has appointed an independent party, Notary Nanda Fauz Iwan, to prepare the deed of GMS results.

Keputusan dan Realisasi RUPS RKAP Tahun 2021

Decision and Realization of The GMS on 2021 RKAP

Agenda Pertama First Agenda	
Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020-2024 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	Approval of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s Corporate Long-Term Plan (RJPP) for 2020-2024.
Keputusan Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020-2024 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan pokok-pokok sebagai berikut: a. Visi Menjadi Ekosistem Maritim Berkelas Dunia b. Misi Membangun jaringan Pelabuhan dan Logistik Maritim yang terintegrasi guna menurunkan biaya logistik dan meningkatkan perdagangan Nasional c. Inisiatif Strategis • Rencana sinergi dan integrasi BUMN layanan pelabuhan melalui pelaksanaan *quick wins* standardisasi performansi Pelabuhan dan Pengelolaan Pelanggan Terintegrasi/secara Bersama (*Unified Key Account Management*). • Rata-rata pertumbuhan proyeksi operasional pada non-petikemas diperkirakan naik sebesar 2,9 - 4, 7% per tahun, petikemas naik sebesar 2,5 - 4,5% pertahun, dan kapal naik sebesar 1,7 - 2,9% pertahun. • Besaran investasi yang dibutuhkan selama 5 tahun ke depan (2020-2024) sebesar Rp25,99 Triliun, untuk program *Business As Usual*, inisiatif strategis, dan Proyek Strategis Perusahaan yang diantaranya adalah untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (antara lain Pengembangan Terminal New Priok dan Pelabuhan Kijing) serta Proyek Strategis lainnya yang masuk dalam *pipeline* pengembangan bisnis Perusahaan. • Pendanaan investasi direncanakan untuk menggunakan dana dari *Global Bond* Perusahaan, kas di luar *Global Bond* dan penambahan pinjaman baru (jika diperlukan), dengan detail sebagai berikut:	**Resolution** Approved PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s Corporate Long-Term Plan (RJPP) for 2020-2024 with the following points: a. Vision Becoming a World Class Maritime Ecosystem b. Mission Building an integrated network of ports and maritime logistics to reduce logistics costs and improve national trade c. Strategic Initiatives • Plan for the synergy and integration of state-owned port services through the implementation of quick wins standardization of port performance and Unified Key Account Management. • Average operational growth projection for non-container is estimated to increase by 2.9 - 4.7% per year, container to increase by 2.5 - 4.5% per year, and ships to increase by 1.7 - 2.9% per year. • Total investment needed for the next 5 years (2020-2024) is Rp25.99 trillion, for Business As Usual programs, strategic initiatives, and Corporate Strategic Projects which include the construction of National Strategic Projects (among others the Development of New Priok Terminal and Kijing Port) as well as other Strategic Projects that are included in the Company's business development pipeline. • Investment funding is planned to use funds from the Company's Global Bonds, cash other than Global Bonds and addition of new loans (if needed), with details as follows:

No.	Pendanaan Investasi Investment Funding	Unit Unit	2020	2021	2022	2023	2024
1.	*Global Bond*	%	100,00	100,00	100,00	-	-
2.	Kas di Luar *Global Bond* Cash other than Global Bond	%	-	-	-	90,00	85,00
3.	Pendanaan Lainnya Other Funding	%	-	-	-	10,00	15,00

• Implementasi program *Green Port/Green Technology* pada tahun 2020-2024.
• Implementation of Green Port/Green Technology program in 2020-2024.

d. Pokok Laporan Keuangan Pokok

d. Principal Financial Statements

Uraian Description	Satuan Unit	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR (%)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	Rp Miliar Rp Billion	10.156,70	11.594,15	11.158,28	11.438,36	11.766,85	3,75
Laba Usaha Operating Profit	Rp Miliar Rp Billion	2.204,00	2.756,23	2.383,41	2.477,55	2.595,77	4,17
EBITDA	Rp Miliar Rp Billion	3.075,80	3.664,73	3.392,57	3.512,82	3.657,77	4,43
Laba Bersih Net Profit	Rp Miliar Rp Billion	614,80	1.431,36	1.491,32	1.614,39	1.702,21	28,99
Investasi Investment	Rp Miliar Rp Billion	3.067,72	5.684,43	6.778,28	7.489,43	2.976,43	-0,75
Arus Kas Operasi Operating Cash Flow	Rp Miliar Rp Billion	1.356,29	1.918,97	2.760,81	2.528,14	2.892,50	20,85
Total Aset Total Assets	Rp Miliar Rp Billion	53.476,27	55.291,91	57.516,94	59.488,24	61.811,48	3,69
Total Liabilitas Total Liabilities	Rp Miliar Rp Billion	35.365,48	36.950,93	38.114,05	38.918,35	40.023,70	3,14
Total Ekuitas Total Equity	Rp Miliar Rp Billion	18.110,79	18.340,98	19.402,89	20.569,89	21.787,78	4,73

Agenda Kedua
Second Agenda

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 Termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2021 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Approval of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s 2021 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) including Board of Commissioners 2021 Work Plan and Budget.

Keputusan
Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 Termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2021 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Resolution
Approved PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s 2021 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) including Board of Commissioners 2021 Work Plan and Budget, with the following points:

a. Asumsi Penyusunan RKAP 2021 / a. Assumptions for Compiling RKAP 2021

Uraian Description	RKAP 2021
Nilai Tukar Rupiah/USD Rupiah/USD Exchange Rate	14.600
Tingkat Inflasi (%) Inflation Rate (%)	3,00
Pertumbuhan Ekonomi (%) Economic Growth (%)	4,50
ICP (USD/Barrel) ICP (USD/Barrel)	45,00
Covid *Recovery* Covid Recovery	Q4 2021

b. Pokok-pokok Laporan Keuangan (Rp Miliar) / b. Principal Financial Statements (Rp Billion)

Uraian Description	RKAP 2021
Pendapatan Revenue	11.594,2
Laba Usaha Operating Profit	2.756,2
EBITDA EBITDA	3.664,7
Laba Bersih Net Profit	1.431,4
Total Aset Total Assets	55.291,9
Ekuitas Equity	18.340,9
Interest Bearing Debt Interest Bearing Debt	24.146,6
Net Operating Cash Flow Net Operating Cash Flow	1.918,9

c. Investasi/CAPEX (Rp Miliar)

c. Investment/CAPEX (Rp Billion)

Uraian Description	RKAP 2021
Bangunan Fasilitas Pelabuhan Port Facility Building	2.896,7
Kapal Ship	45,4
Alat Fasilitas Pelabuhan Port Facility Tools	189,3
Instalasi Fasilitas Pelabuhan Port Facility Installation	66,5
Tanah Land	15,3
Jalan dan Bangunan Roads and Buildings	248,7
Peralatan Equipment	59,8
Kendaraan Vehicle	0,4
Emplasemen Emplacement	4,5
Investasi Non Fisik Non-Physical Investment	380,8
Investasi Anak Perusahaan Subsidiary Investment	829,6
Penyertaan Modal Equity Capital	947,4
Total Investasi Total Investment	5.684,4

Agenda Ketiga
Third Agenda

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2021 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	Approval of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s 2021 Work Plan and Budget for the Partnership and Community Development Program (RKA-PKBL).
Keputusan Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2021 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan pokok-pokok sebagai berikut:	**Resolution** Approved PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s 2021 Work Plan and Budget for the Partnership and Community Development Program (RKA-PKBL) with the following points:

Uraian Description	RKAP 2021 (Rp Juta) RKAP 2021 (Rp Million)
Program Kemitraan Partnership Program	
Dana Tersedia Funds Available	49.071,04
Penggunaan Dana Funds Used	49.071,04
Sisa Dana Remaining Funds	0,00
Bina Lingkungan Community Development	

Uraian Description	RKAP 2021 (Rp Juta) RKAP 2021 (Rp Million)
Dana Tersedia Funds Available	27.340,00
Penggunaan Dana Funds Used	27.340,00
Sisa Dana Remaining Funds	0,00

Agenda Keempat
Fourth Agenda

Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan (*Key Performance Indicator*) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2021.	Determination of the 2021 Annual Management Contract (Key Performance Indicator) between Board of Directors and Board of Commissioners with Shareholders.
Keputusan Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan (*Key Performance Indicator*) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2021, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.	**Resolution** Determine the 2021 Annual Management Contract (Key Performance Indicator) between Board of Directors and Board of Commissioners with Shareholders, as attached and is an integral part of this resolution.

No.	KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	
					Sub	Total
Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia **Economic and Social Value for Indonesia**						46.00
Finansial Financial						
1	ROIG - WAGG (*Cost of Equity* 3,28%)	%	0,58	Maximize	4.00	
2.	*Cash From Operation* (di luar pembayaran bunga) Cash From Operation (excluding interest payments)	Rp Miliar Rp Billion	2.993,89	Maximize	4.00	
3.	*Maximum Loss from Exchange Rate to Operating Income*	%	4,50	Minimize	4.00	
4.	*Interest Bearing Debt to Invested Capital*	%	56,83	Minimize	4.00	
5.	*Interest Bearing Debt to* EBITDA	Kali Kali	6,59	Minimize	4.00	
Operasional Operational						22.00
6.	*Throughput*				11.00	
	a. Container Throughput	TEUS	7.204.599	Maximize	6.00	
	b. Non-Container Throughput	Ton	53.483.482	Maximize	5.00	

No.	KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	
					Sub	Total
7.	B/S/H *Gross*	B/S/H	40,00	Maximize	6.00	
8.	*Waiting Time for Pilot*	Jam Hour	0,50	Minimize	5.00	
Sosial Social						4.00
9.	Manfaat kesejahteraan masyarakat sekitar Pelabuhan Benefits for the welfare of community around the port	%	100,00	Maximize	4.00	
Inovasi Model Bisnis **Business Model Innovation**						16.00
10.	Integrasi BUMN Layanan Kepelabuhanan SOEs Port Services Integration	%	90,00	Maximize	6.00	
11.	Standarisasi Performansi Pelabuhan Port Performance Standardization	%	100,00	Maximize	5.00	
12.	*Unified Key Account Management*	%	73,33	Maximize	5.00	
Kepemimpinan Teknologi **Technology Leadership**						11.00
13.	Digitalisasi Pelayanan Pelabuhan Port Service Digitization	%	100,00	Maximize	6.00	
14.	Implementasi *Green Technology* di Pelabuhan Implementation of Green Technology at the Port	%	100,00	Maximize	5.00	
Peningkatan Investasi **Investment Increase**						11.00
15.	*Milestone* Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Port Infrastructure Development Milestone	%	100,00	Maximize	5.00	
16.	Optimalisasi Aset (Lahan dan Alat 8/M) Asset Optimization (Land and Equipment 8/M)	%	100,00	Maximize	6.00	
Pengembangan Talenta **Talent Development**						16.00
17.	Pemenuhan Standar Keahlian Teknis Fulfillment of Technical Expertise Standards	%	100,00	Maximize	5.00	
18.	% Perempuan dalam *Nominated Talent* % Female in Nominated Talent	%	7,90	Maximize	6.00	
19.	Penyiapan Suksesor Milenial Millennial Successor	%	35,33	Maximize	5.00	
Total						**100.00**

Agenda Kelima Fifth Agenda	
Penetapan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2021.	Determination of 2021 Management Contract (Key Performance Indicator) between Board of Commissioners and Shareholders.
Realisasi Menetapkan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2021, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.	**Realization** Determine the 2021 Management Contract (Key Performance Indicator) between Board of Commissioners and Shareholders, as attached and is an integral part of this resolution.

Key Performance Indicator

No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target
1.	Kontribusi terhadap capaian kinerja perusahaan Contribution to the Company's performance achievements		10	
	Kontribusi terhadap realisasi capaian KPI Direksi Contribution to the realization of Board of Directors' KPI achievements	Poin Point	10	
2.	Ketepatan waktu penyampaian Pendapat dan Saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris Timeliness of submission of Opinions and Suggestions that are the obligations of Board of Commissioners		20	
	a. Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas RKAP 2021, Laporan Triwulanan 2021, dan Laporan Tahunan 2020 Board of Commissioners' Opinions and Suggestions on RKAP 2021, Quarterly Report 2021, and Annual Report 2020	Hari Kerja Working days	5	30
	b. Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan RUPS/Menteri Responses to Board of Directors' actions that must be approved by the GMS/Minister	Hari Kerja Working days	5	14
	c. Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris Responses to Board of Directors' actions that must be approved by Board of Commissioners	Hari Kerja Working days	5	14
	d. Laporan Dewan Komisaris triwulanan dan Tahunan Quarterly and Annual Board of Commissioners Report	Hari Kerja Working days	5	30
3.	Kontribusi terhadap penerapan GCG Contribution to the implementation of GCG		10	
	a. Kontribusi kualitas penerapan GCG Contribution to the quality of GCG implementation	Poin Point	5	31,50
	b. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil *Assessment* GCG Aspek Dewan Komisaris Follow-up to the Recommendations on the Results of GCG Assessment of Board of Commissioners aspect	%	5	100
4.	Rapat dan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Meetings and Working Visits of Board of Commissioners		18	
	a. Jumlah Rapat Internal Dewan Komisaris Number of Internal Meetings of Board of Commissioners	Jumlah Total	6	12

Key Performance Indicator

No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target
	b. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Number of Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors	Jumlah Total	6	12
	c. Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Cabang Working Visit of Board of Commissioners to the Branch	Jumlah Total	6	7
5.	Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan perusahaan Supervision and direction to Board of Directors on Company plans and policies	Jumlah Total	14	7
6.	Efektivitas Kegiatan Penunjang Dewan Komisaris Effectiveness of Supporting Activities of Board of Commissioners		28	
	a. Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Board of Commissioners Competency Improvement			
	Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris Board of Commissioners Competency development	Pelaksanaan Implementation	10	4
	b. Efektivitas Organ Pendukung Effectiveness of Supporting Organs			
	Komite Audit Audit Committee			
	• Pelaksanaan Rapat Internal Komite Audit Implementation of Internal Audit Committee Meeting	Jumlah Total	3	12
	• Laporan Penugasan Komite Audit Audit Committee Assignment Report	Laporan Report	3	4
	Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee			
	• Pelaksanaan Rapat Internal Komite PMR Implementation of PMR Committee Internal Meeting	Jumlah Total	3	12
	• Laporan Penugasan Komite PMR PMR Committee Assignment Report	Laporan Report	3	4
	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee			
	• Pelaksanaan Rapat Internal Komite NR Implementation of NR Committee Internal Meetings	Jumlah Total	3	12
	• Laporan Penugasan Komite NR NR Committee Assignment Report	Laporan Report	3	4
	Jumlah Total		**100**	

Agenda Keenam Sixth Agenda	
Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2021.	Operational Aspect indicators for the Measurement of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2021 Soundness Level.
Keputusan Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2021, sebagai berikut:	**Resolution** Stipulated the Operational Aspect Indicators for the Measurement of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2021 Soundness Level, as follows:

No.	Indikator Indicators	Satuan Unit	Target Target	Skor Score	Bobot Weight
Aspek Operasional Operational Aspect				35	35,00
1.	*Waiting Time for Pilot*	Jam Hour	BS (0,5)	9	9.0
2.	Tingkat Efektivitas Tambahan Petikemas Additional Container Effectiveness Level	%	BS (65,00)	9	9.0
3.	*Yard Occupancy Ratio* Petikemas Container Yard Occupancy Ratio	%	BS (40,00)	9	9.0
4.	Produktivitas B/M Petikemas -Gross Productivity of Container B/M -Gross	B/S/H	BS (40,00)	8	8.0

Agenda Ketujuh Seventh Agenda	
Pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk Memberikan Persetujuan Apabila Terdapat Tindakan-tindakan yang Mengakibatkan Perubahan Alokasi Anggaran Investasi.	Delegation of Authority to the Board of Commissioners to Approve If There Are Actions That Result in Changes to Investment Budget Allocation.
Keputusan Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program/item investasi sepanjang tidak merubah program/item investasi dan tidak melebihi total nilai investasi.	**Resolution** Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to give approval if there are actions that result in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program/item as long as does not change the investment program/item and does not exceed the total value investment.

Realisasi RUPS

GMS Realization

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-up
1	Menyusun *cascading* langkah dan target pencapaian RJPP Tahun 2020-2024 yang terukur dengan penanggung jawab yang jelas serta melakukan evaluasi secara periodik. Prepare cascading of steps and targets for achieving the 2020-2024 RJPP that are measurable with clear responsibilities and conduct periodic evaluations.	Telah disusun Inisiatif Strategis (sebagai turunan dari sasaran strategis perusahaan) yang merupakan penjabaran langkah-langkah pencapaian RJPP Tahun 2020-2024. Inisiatif Strategis disusun secara jelas target setiap tahunnya untuk masing-masing Direktorat sebagai penanggung jawab dari inisiatif tersebut. Telah disusun KPI jangka panjang perusahaan ke dalam target tahunan secara spesifik dan terukur. Pada buku RJPP telah dijabarkan pula target-target tahunan untuk kinerja keuangan dan operasional perusahaan. RJPP dituangkan kedalam RKAP tahunan yang didalamnya mencakup Rencana Kerja Manajemen dan KPI. Pencapaian atas RJPP akan dievaluasi secara periodik dalam Laporan Manajemen RKAP.

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-up
		Strategic Initiatives have been prepared (as a derivative of the Company's strategic goals) which is an elaboration of the steps to achieve the 2020-2024 RJPP. Strategic Initiatives clearly set targets every year for each Directorate as the person in charge of the initiative. The Company's long-term KPIs have been compiled into specific and measurable annual targets. The RJPP book also describes annual targets for the Company's financial and operational performance. The RJPP is explained into the annual RKAP which includes the Management Work Plan and KPI. Achievement of RJPP will be evaluated periodically in the RKAP Management Report.
2	Memastikan seluruh insan perusahaan memahami dokumen RJPP Tahun 2020-2024 Perubahan melalui sosialisasi, dan penerapan *key performance indicators* agar diturunkan kepada unit-unit kerja sampai dengan target kinerja individual. Ensuring that all Company's personnel understand the Revised 2020-2024 RJPP document, through socialization, and application of key performance indicators to be passed down to work units up to individual performance targets.	Telah dilakukan sosialisasi RJPP Tahun 2020-2024 kepada seluruh pegawai Pelindo *Group* dan menjadi acuan dalam setiap paparan pada forum manajemen. *Key Performance Indicators* (KPI) Perusahaan tiap tahunnya telah disusun dan diturunkan sampai level kinerja pegawai. Penerapan KPI Perusahaan dilakukan dengan *Cascading* KPI Direksi secara Kolegial menjadi KPI Direksi Individu, lalu diturunkan kepada para BOD-1 dan BOD-2 hingga target kinerja individu pegawai. The 2020-2024 RJPP socialization has been carried out to all Pelindo Group employees and has become a reference in every presentation at management forums. Each year the Company's key performance indicators (KPI) have been compiled and detailed to the level of employee's performance. The Company's KPIs implementation is carried out by cascading the Directors' KPIs collegially into Individual Directors' KPIs, then passing them on to BOD-1 and BOD-2 down to individual employee performance targets.
3	RKAP Tahun 2021 agar di-*breakdown* menjadi rencana bulanan untuk memudahkan *monitoring* dan evaluasi pencapaiannya. RKAP 2021 to be broken down into a monthly plan, hence the achievements can be easily monitored and evaluated.	RKAP telah di-*breakdown* per bulan baik di tingkat konsolidasi, regional, cabang, *subholding*, dan anak perusahaan. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan secara rutin setiap bulannya dan dilaporkan pencapaiannya kepada Dewan Komisaris. The RKAP has been broken down monthly at the consolidated, regional, branch, subholding and subsidiary levels. Monitoring and evaluation is carried out routinely every month and the achievements are reported to the Board of Commissioners.
4	Operasi perusahaan agar diupayakan untuk terus meningkatkan pendapatan, namun tetap berpegang pada efisiensi beban-beban usaha, baik beban pokok pendapatan maupun beban administrasi dan umum. The Company's operations should be strived to increase revenue, but still adhere to the efficiency of operating expenses, both the cost of revenue as well as administrative and general expenses.	Pendapatan usaha tercapai 100,4% dari RKAP Tahun 2021 dan mengalami peningkatan sebesar 8% dari realisasi tahun sebelumnya. Perusahaan juga terus melakukan efisiensi, khususnya beban administrasi dan umum sehingga beban ini lebih rendah 17% dibandingkan tahun 2020 dan 11% di bawah RKAP tahun 2021. Business revenue reached 100.4% of the 2021 RKAP and increased by 8% from the previous year's realization. The Company also continues to make efficiencies, especially on the administrative and general expenses so that these expenses are 17% lower compared to 2020 and 11% below the 2021 RKAP.

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-up
5	Direksi agar memastikan bahwa penarikan pinjaman/ pendanaan harus mempertimbangkan aspek *timing, sizing* dan *pricing* serta skema dan proses terbaik sehingga dapat dilakukan efisiensi terhadap beban bunga (*cost of fund*) serta tidak memberatkan kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Board of Directors should ensure that loan/funding withdrawals must consideingr the timing, sizing and pricing aspects as well as the best schemes and processes so that the cost of funds can be made efficient and does not burden the Company's financial performance in the future.	Sepanjang tahun 2021 Perusahaan melakukan *refinancing* pinjaman dalam rangka efisiensi *financing cost* dan berhasil membukukan beban bunga pinjaman yang lebih rendah sebesar Rp278 Miliar dari RKAP. Throughout 2021, the Company refinanced loans in the context of cost efficiency and managed to record a lower loan interest expense of Rp278 billion from the RKAP.
6	Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas temuan, saran dan rekomendasi auditor baik auditor eksternal (BPK RI dan/atau KAP) maupun auditor internal (SPI) di tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. Tindak lanjut penyelesaian temuan/saran auditor agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan dilaporkan secara tertulis kepada Pemegang Saham. Board of Directors should follow up and complete the findings, suggestions and recommendations of the auditors, both external auditors (BPK RI and/or KAP) and internal auditors (SPI) in 2020 and previous years. The completion follow-up of auditor's findings/ suggestions to be discussed comprehensively with Board of Commissioners and submit the written report to Shareholders.	Tahun 2021 Perusahaan telah menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas temuan, saran dan rekomendasi auditor baik auditor eksternal (BPK RI dan/atau KAP) maupun auditor internal (SPI) dengan capaian Audit Internal (SPI) sebesar 96,25% telah ditindaklanjuti dan Audit Eksternal sebesar 333 rekomendasi dari total 463 rekomendasi yang telah sesuai ditindaklanjuti. Terhadap capaian tindaklanjut tersebut telah disampaikan secara triwulanan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. In 2021 the Company has followed up and completely settled the findings, suggestions and recommendations of the auditors, both external auditors (BPK RI and/or KAP) and internal auditors (SPI) with an Internal Audit (SPI) achievement of 96.25% which has been followed up and an External Audit of 333 recommendations out of a total of 463 recommendations were followed up accordingly. The follow-up achievements have been submitted quarterly to the President Director and the Board of Commissioners.
7	Perbuatan-perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis dari RUPS diajukan secara tersendiri dengan dilengkapi sekurang-kurangnya tanggapan Dewan Komisaris, Pakta Integritas Direksi, kajian teknis, kajian hukum, kajian ekonomi dan kajian risiko. Board of Directors' actions that require written approval from the GMS are submitted separately, accompanied by at least Board of Commissioners' response, Board of Directors' Integrity Pact, technical studies, legal studies, economic studies and risk studies.	Dewan Komisaris dan Direksi setiap tahun melakukan penandatanganan pakta integritas. Direksi dan Dewan Komisaris juga menerapkan *board manual* Perusahaan yang meminta persetujuan tertulis Dari RUPS dengan melengkapi kajian tertulis dan kajian GRC. Board of Commissioners and Board of Directors signed the integrity pact each year. Board of Directors and Board of Commissioners also apply the Company's board manual which requests written approval from the GMS by completing a written review and GRC review.
8	Dewan Komisaris agar lebih meningkatkan pengawasan atas kebijakan dan tindakan Direksi terutama dalam bidang tata kelola perusahaan, operasional dan keuangan perusahaan yang sehat. Board of Commissioners should improve the supervision over the policies and actions of Board of Directors, especially in corporate governance, operations and sound corporate finance.	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas kebijakan dan tindakan Direksi salah satunya dengan pemberian masukan terhadap RKAP dan RJPP perusahaan. Board of Commissioners has supervised the policies and actions of Board of Directors, one of which is by providing input on the Company's RKAP and RJPP.
9	Direksi agar terus meningkatkan kemampuan dan kapabilitas SOM melalui program yang terukur untuk menciptakan lebih banyak calon suksesor dari kalangan milenial (termasuk di dalamnya memperhatikan keterwakilan perempuan). Board of Directors should continue to improve the skills and capabilities of SOM through measurable programs to create more potential successors from millennials (including paying attention to female's representation)	Pemenuhan Standar Keahlian Teknis telah dipenuhi melalui program-program pelatihan tersertifikasi, di samping itu pengembangan SDM juga dilaksanakan melalui beberapa program antara lain pelatihan baik secara *public training* maupun *in house training, learning wallet* serta program kepemimpinan yang secara komprehensif menyiapkan calon suksesor melalui modul-modul kegiatan. Technical Expertise Standards has been fulfilled by certified training programs, in addition to that HC development is also carried out through several programs including training both in public and in-house training, learning wallet and leadership programs that comprehensively prepare potential successors through activity modules.

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-up
10	Memperkuat fungsi legal, pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan dalam rangka *early warning system*. Selanjutnya, Dewan Komisaris agar melakukan evaluasi atas efektivitas peran SPI dan manajemen risiko serta melaporkan hasilnya kepada Pemegang Saham. Strengthening the Company's legal, internal control and risk management function are early warning system. Furthermore, Board of Commissioners should evaluate the effectiveness of SPI's role and risk management and report the results to the Shareholders.	Melakukan perkuatan fungsi legal, pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan dengan melakukan Rapat Koordinasi dengan Divisi SPI, Manajemen Risiko dan Divisi Hukum secara rutin yang dilakukan per Triwulan, serta Membuat dan mengirimkan Laporan TW 1, 2 dan 3 kepada Pemegang Saham terkait realisasi kinerja Dewan Komisaris, termasuk didalamnya laporan hasil evaluasi atas efektivitas peran SPI dan manajemen risiko (*point* IV.2. Evaluasi/Arahan/Tanggapan/Persetujuan). Strengthening the Company's legal function, internal control and risk management by conducting Coordination Meetings with the SPI Division, Risk Management and Legal Division on a quarterly basis, as well as preparing and sending Q1, 2 and 3 Reports to Shareholders regarding the Board of Commissioners' performance, including an evaluation report on the effectiveness of the role of SPI and risk management (point IV.2. Evaluation/Directions/Response/Approval).
11	Memperhatikan saran dan pendapat Dewan Komisaris sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat Nomor: 80/DK/PI.II/XI-2020 tanggal 25 November 2020 dan Nomor: 72/DK/PI.II/X-2020 tanggal 27 Oktober 2020. Taking into account the suggestions and opinions of Board of Commissioners as stated in letters Number: 80/DK/PI.II/XI-2020 dated November 25, 2020 and Number: 72/DK/PI.II/X-2020 dated October 27, 2020.	Berdasarkan Surat No. 80/DK/PI.II/XI-2020 tanggal 25 November 2020: 1. Dewan Komisaris telah: a. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. b. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP. 2. Atas Rancangan RJPP Tahun 2020-2024 Perubahan PT Pelindo II (Persero) yang disampaikan Direksi dengan surat Nomor PR.05/25/9/1/STR/UT/PI.II-2020 tanggal 25 September 2020, Dewan Komisaris telah menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor 67/ DK/PI.II/IX-2020 tanggal 30 September 2020. Berdasarkan Surat No. 72/DK/PI.II/X-2020 tanggal 27 Oktober 2020: Atas rancangan RKAP Tahun 2021 yang disampaikan oleh Direksi, Dewan Komisaris telah meneliti dan menelaah rancangan tersebut dalam rapat Komite Dewan Komisaris dengan jajaran Manajemen dan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi. Dari pembahasan-pembahasan tersebut, Dewan Komisaris memberi masukan atas rancangan RKAP Tahun 2021 dalam hal: a. Dampak penerapan PSAK 73 Akuntansi Sewa terhadap kinerja Anak Perusahaan. b. Pengaruh pendapatan (biaya) komprehensif lain terhadap laba (rugi) konsolidasi. c. Upaya Hukum Peninjauan Kembali atas Putusan Banding Pajak di Mahkamah Agung. d. Perubahan struktur organisasi di Kantor Pusat dan Cabang PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Dewan Komisaris telah menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2021 dan *Key Performance Indicators* (KPI) melalui surat Nomor: 63/DK/PI.II/IX-2020 tanggal 18 September 2020 yang merupakan bagian dari RKAP Tahun 2021, serta berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi peran pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar seluruh target perusahaan pada tahun 2021 dapat tercapai.

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-up
		Based on Letter No. 80/DK/PI.II/XL-2020 dated November 25, 2020: 1. The Board of Commissioners has done: a. Examining, reviewing and signing the RJPP and RKAP determined by the Board of Directors in accordance with the provisions of Articles of Association. b. Provide opinions and suggestions in the GMS about the RJPP and RKAP regarding the reasons for the Board of Commissioners to sign the RJPP and RKAP. 2. Regarding the 2020-2024 RJPP Draft Changes to PT Pelindo II (Persero) submitted by the Board of Directors with letter Number PR.05/25/9/1/STR/UT/PI.II-2020 September 25 , 2020, the Board of Commissioners has submitted response by letter Number 67/DK/PI.II/IX-2020 dated September 30, 2020. Based on Letter No. 72/DK/PI.II/X-2020 dated October 27, 2020 regarding the 2021 RKAP draft submitted by the Board of Directors, the Board of Commissioners has examined and reviewed the draft in the Board of Commissioners' Committee meetings with Management and the Board of Commissioners' meetings with the Directors. From these discussions, the Board of Commissioners provided input on the 2021 RKAP draft in terms of: a. The impact of implementing PSAK 73 Accounting for Leases on the performance of Subsidiaries. b. Effect of other comprehensive income (expense) on consolidated profit (loss). c. Legal Reconsideration of Decision on Tax Appeal at the Supreme Court. d. Changes in the organizational structure at the Head Office and Branches of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Board of Commissioners has submitted the Board of Commissioners' 2021 Work Plan and Budget and Key Performance Indicators (KPI) through letter Number: 63/DK/PI.II/IX-2020 dated September 18, 2020 which is part of the 2021 RKAP, and is committed to improve the effectiveness and efficiency of the supervisory role and providing advice to Board of Directors so that all of the Company's targets in 2021 can be achieved.
12	Menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya akhir Februari 2021. Submit the Company's Annual Report including Financial Statements for the Fiscal Year 2020, which has been audited by the Public Accounting Firm no later than the end of February 2021.	Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik telah disampaikan kepada Pemegang Saham tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. The Company's Annual Report including the Financial Statements for Fiscal Year 2020 which has been audited by the Public Accounting Firm has been submitted to Shareholders in a timely manner in accordance with applicable regulations.
13	Menyampaikan laporan secara tepat waktu melalui portal Kementerian BUMN dan senantiasa memperbaharui data/ informasi portal tersebut yang terdiri dari portal Sistem Laporan Berkala (http://silaba.bumn.go.id), Portal Aset (http://asset.bumn.go.id), Portal SOM (http://sdm.bumn.go.id), Portal PKBL (http://pkbl.bumn.go.id) dan Portal Publik (www.bumn.go.id) serta melaporkannya kepada unit pengelola portal. Submit reports in a timely manner through the Ministry of SOE's portal and constantly update the data/information on the portal which consists of Periodic Report System portal (http://silaba.bumn.go.id), Asset Portal (http://asset.bumn.go .id), SOM Portal (http://sdm.bumn.go.id), PKBL Portal (http://pkbl.bumn.go.id) and Public Portal (www.bumn.go.id) and report it to the portal management unit.	Laporan periodik telah dilakukan secara tepat waktu melalui portal-portal BUMN dan Perusahaan memperoleh skor tertinggi dalam aspek administrasi pada Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2021. Periodic reports have been submitted in a timely manner through SOE portals and the Company has received the highest score in the administrative aspect at the 2021 Corporate Soundness Level.

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-up
14	Berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan TJSL agar: Diutamakan yang mendukung kegiatan bisnis perusahan dan mampu melindungi serta meningkatkan kelangsungan usaha perusahaan, salah satunya dengan cara *community development* pada masyarakat sekitar wilayah usaha perusahaan yang terkena dampak langsung perusahaan - Menindaklanjuti dan melaksanakan hasil rekomendasi pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran TJSL dengan Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Nomor: RIS-74/DSI.MBU.B/01/2021. With regard to CSR activities, it is necessary to prioritize those that support the Company's business activities and are able to protect and improve the Company's business continuity, one of which community development around the Company's business areas that are directly affected by the Company - Following up and implement the recommendations of the discussed CSR Work Plan and Budget with the Assistant Deputy for Social and Environmental Responsibility as stated in the Minutes of Meeting No. RIS-74/DSI.MBU. B/01/2021.	Telah dilaksanakan kegiatan TJSL sesuai bidang prioritas dari Kementerian BUMN termasuk salah satunya adalah kegiatan *Community Development,* sebagaimana tercantum dalam Laporan Kinerja TJSL Triwulanan dan Risalah Rapat Laporan Keuangan dan Pelaksanaan TJSL Tahun 2021. CSR activities have been carried out in accordance with the priority areas of the Ministry of SOEs including one of them is Community Development activities, as stated in the Quarterly CSR Performance Report and Minutes of 2021 CSR Financial Statements and Implementation Meetings.
15	Menindaklanjuti arahan Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam Surat Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan RKAP Tahun 2021 Nomor: S-949/MBU/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020. Follow up the Shareholders' directions as stated in the Shareholders' Aspiration Letter for the Preparation of 2021 RKAP No. S-949/MBU/10/2020 dated October 23, 2020.	Penyusunan Buku RKAP tahun 2021 sudah mengakomodir dan menggunakan asumsi-asumsi yang Aspirasi Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Surat Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan RKAP Tahun 2021 Nomor: S-949/MBU/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020. The preparation of 2021 RKAP Book has accommodated and used the assumptions of Shareholders' Aspirations as stated in the Shareholders' Aspiration Letter for the 2021 RKAP Preparation No. S-949/MBU/10/2020 dated October 23, 2020.
16	Buku RJPP Tahun 2020-2024, Buku RKAP Tahun 2021, Buku dan Risalah Pembahasan RKA-PKBL Tahun 2021, Kontrak Manajemen dan Tanggapan Dewan Komisaris, serta Arahan Pemegang Saham merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah RUPS ini. The 2020-2024 RJPP Book, 2021 RKAP Book, 2021 RKA-PKBL Discussion Book and Minutes, Management Contracts and Responses from the Board of Commissioners, and Shareholders' Directions are an integral part of the Minutes of this GMS.	Buku RJPP Pelindo terintegrasi telah ditetapkan pada November 2021. The integrated Pelindo RJPP book has been set for November 2021.
17	Direksi agar mendukung, melaksanakan, dan mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan implementasi penggabungan (Merger) BUMN Pelabuhan (Pelindo I-IV) sesuai dengan arahan, inisiatif dan kebijakan kementerian BUMN; dalam rangka meningkatkan *value creation* bersama melalui kolaborasi penggunaan SOM, peralatan maupun pendanaan serta perencanaan pengembangan jaringan Pelabuhan yang terintegrasi secara Nasional. Board of Directors should support, implement, and take the necessary steps in the framework of the establishment and implementation of SOE's Port Merger (Pelindo I-IV) that in accordance with the directions, initiatives and policies of the Ministry of SOEs; in order to increase joint value creation through collaborative use of SOM, equipment and funding as well as planning for the development of nationally integrated port network.	Proses penggabungan Pelindo I-IV berhasil dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2021. Dalam mendukung proses pra-penggabungan BUMN Pelabuhan, Direksi mendukung, melaksanakan dan mengambil langkah dalam tiap tahapannya, beberapa diantaranya berperan aktif Rakortas yang dilaksanakan sepanjang bulan juni hingga september 2022, berperan aktif dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI serta dalam penyusunan kajian bersama Penggabungan BUMN Pelabuhan (Manajemen Integrasi). The process of merging Pelindo I-IV was successfully carried out on October 1, 2021. In supporting the pre-merger process of Port SOEs, Board of Directors supports, implements and takes steps at each phase, some of which play an active role in the Commission VI Work Meeting of the DPR RI as well as in the preparation of a joint study on the Merger of SOEs' Port (Integration Management).

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-up
18	Direksi agar meningkatkan kinerja keuangan sehingga lebih berkesinambungan dengan secara bertahap mempertahankan rasio-rasio hutang pendanaan pada level rasio *investment grade.* Board of Directors should improve financial performance in order to be more sustainable by gradually maintain debt-funding ratios at the level of investment grade ratio.	Perusahaan berhasil mempertahankan *rating* yang dikeluarkan *rating agency* dan dapat mempertahankan rasio-rasio/*covenant* yang dipersyaratkan oleh *rating agency.* The Company managed to maintain the rating issued by the rating agency and was able to maintain the ratios/covenants required by the rating agency.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 DAN REALISASINYA

Pelaksanaan RUPS dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 10 Mei 2021
Waktu : 13.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : *Video Conference Zoom Meeting*

ANNUAL GMS ON APPROVAL OF FISCAL YEAR 2020 ANNUAL REPORT AND THE REALIZATION

The GMS was held on:
Day/Date : Monday, May 10, 2021
Time : 13.00 WIB until finished
Venue : Video Conference Zoom Meeting

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020

Recapitulation of Attendance at GMS on Approval of Fiscal Year 2020 Annual Report

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
1	Moermahadi Soerja Djanegara	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Hadir Present
2	Nurrachman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
3	Raden Agus Haryoto Purnomo	Komisaris Commissioner	Hadir Present
4	Djaman Andhi Nirwanto	Komisaris Commissioner	Hadir Present
5	Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Hadir Present
6	Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Hadir Present
7	Zuhri Iryansyah	Direktur Teknik Director of Technical	Hadir Present
8	Muarip	Direktur Operasi Director of Operations	Hadir Present
9	Ogi Rulino	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Director of Transformation and Business Development	Hadir Present
10	Rima Novianti	Direktur Komersial Director of Commercial	Hadir Present
11	Ihsanuddin Usman	Direktur SDM dan Umum Director of HC and General Affairs	Hadir Present

Pihak Independen

Pelindo telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Nanda Fauz Iwan dalam menyusun Akta hasil RUPS.

Independent Party

Pelindo has appointed an independent party, Notary Nanda Fauz Iwan, to prepare the deed of GMS results.

Keputusan dan Realisasi RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020

Resolution and Realization of GMS on Approval of Fiscal Year 2020 Annual Report

Agenda Pertama
First Agenda

Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020.

Approval of the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2020 and the Board of Commissioners Supervisory Report for Fiscal Year 2020.

Keputusan

Mengesahkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro dan Surja (EY) sesuai laporannya Nomor: 00282/2.1032/AU.1/O6/0697-1/1/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Resolution

Ratify the Annual Report for 2020 Fiscal Year including the Supervisory Report of Board of Commissioners and ratify the Company's Consolidated Financial Statements for 2020 Fiscal Year which have been audited by Public Accounting Firm (KAP) Purwanto, Sungkoro and Surja (EY) according to their report No.00282/2.1032/AU. 1/O6/0697-1/1/III/2021 dated March 25, 2021 with the opinion "unqualified", and providing full release and discharge (volledig acquit et de charge) to Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervisory actions that have been carried out in the Fiscal Year ending December 31, 2020 as long as these actions do not constitute criminal acts and are reflected in the Company's report books.

Agenda Kedua
Second Agenda

Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020.

Approval of Company's Partnership and Community Development Program Annual Report for Fiscal Year 2020.

Keputusan

Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan PKBL Tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro dan Surja (EY) sesuai laporannya Nomor: 000328/2.1032/AU.2/06/0697-1/1/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

Resolution

Ratify PKBL Annual Report for Fiscal Year 2020 and ratify PKBL Financial Statements for 2020 which have been audited by Purwanto, Sungkoro and Surja (EY) Public Accounting Firm according to their report No.000328/2.1032/AU.2/06/0697-1/1 /III/2021 March 25, 2021 with the opinion "unqualified", and gave full release and discharge (volledig acquit et de charge) to Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of PKBL for Fiscal Year 2020, as long as these actions are not a crime and are reflected in the report.

Agenda Ketiga
Third Agenda

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020.

Determination of the use of the Company's net profit for fiscal year 2020.

Keputusan

Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp1.184.857.249.366,- sebagai berikut:

- Sebesar 47,26% dari laba bersih atau sebesar Rp560.000.000.000,- ditetapkan sebagai dividen tunai;
- Sebesar 52,74% dari laba bersih atau sebesar Rp624.857.249.366,- ditetapkan sebagai cadangan.

Resolution

Determine the use of Net Profit Attributable to Owners of Parent Entity for 2020 Fiscal Year of Rp1,184,857,249,366,- as follows:

- 47.26% of the net profit or Rp560,000,000,000,- is designated as cash dividends;
- 52.74% of the net profit or Rp624,857,249,366,- is designated as a reserves.

Agenda Keempat
Fourth Agenda

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2020, Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2021.

Determination of Tantiem for Fiscal Year 2020, Salary for Board of Directors and Honorarium for Board of Commissioners along with Other Facilities and Allowances for 2021.

Keputusan

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2020, Gaji untuk Direksi dan Honorarium Untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2021, akan ditetapkan secara tersendiri.

Resolution

Determination of Tantiem for Fiscal Year 2020, Salary for Board of Directors and Honorarium for Board of Commissioners along with Facilities and Other Allowances for 2021, will be determined separately.

Agenda Kelima Fifth Agenda	
Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2021.	Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements of Partnership Program and Community Development Program for Fiscal Year 2021.
Keputusan Penunjukan KAP untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dilakukan secara tersendiri oleh Menteri BUMN selaku RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	Resolution The appointment of KAP to conduct a general audit of the Company's Consolidated Financial Statements for 2021 Fiscal Year and the Financial Statements of the Company's Partnership and Community Development Program for 2021 Fiscal Year is carried out separately by the Minister of SOE as the GMS based on the recommendation of Board of Commissioners.

ARAHAN RUPS

GMS DIRECTIONS

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-up
1	Direksi dan Dewan Komisaris diminta menjadi *role model* (*lead in example*) dalam setiap perilaku kerja setiap insan perusahaan dalam penerapan nilai-nilai AKHLAK sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri BUMN. Board of Directors and Board of Commissioners are asked to lead in example for every work behavior of every Company's people in implementing AKHLAK values as determined by the Minister of SOE.	Dewan Komisaris dan Direksi terlibat dalam seluruh program transformasi budaya perusahaan khususnya: 1. Peringatan Hari Ulang Tahun Akhlak 2. *Sharing Session Program*: BERLABUH (Bincang Bersama Pelabuhan Indonesia) 3. NGOBRAS (Ngobrol Bareng Santuy) 4. Video AKHLAK Board of Commissioners and Board of Directors are involved in all corporate culture transformation programs, as in particular: 1. AKHLAK Commemoration Day 2. Sharing Session Program: BERLABUH (Talks with Indonesian Ports) 3. NGOBRAS (Ngobrol Bareng Santuy) 4. AKHLAK video
2	Direksi dan Dewan Komisaris perlu memastikan agar setiap pelaksanaan kerja sama pemanfaatan/optimalisasi aset dengan pihak ketiga dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan diupayakan untuk dapat memberikan keuntungan yang setinggi-tingginya. Board of Directors and Board of Commissioners need to ensure that every implementation of cooperation in the utilization/optimization of assets with the third parties is carried out with consistent observance of the principles of Good Corporate Governance (GCG) and efforts are made to provide the highest possible profit.	Setiap rencana pengembangan dan kerja sama, terlebih dilakukan kajian yang komprehensif mencakup analisa pasar, analisa kelayakan ekonomi dan finansial, analisa risiko dan analisa teknik dan operasi, yang kemudian akan diproses dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direksi terkait kerja sama dengan mitra. For each development and cooperation plan, a comprehensive study is carried out covering market analysis, economic and financial feasibility analysis, risk analysis and technical and operational analysis, which will then be processed and implemented in accordance with the Board of Directors' Regulations regarding cooperation with partners.
3	Terhadap anak perusahaan yang belum memberikan kontribusi kepada perusahaan, Direksi diminta memberikan arahan kepada manajemen anak perusahaan untuk lebih fokus melakukan pengembangan usaha dan menggali strategi inisiatif baru pada sektor-sektor yang berpotensial menghasilkan pendapatan. For subsidiaries that have not contributed to the Company, Board of Directors is asked to provide direction to the management of subsidiaries to focus more on business development and explore new initiative strategies in sectors that have the potential to generate income.	Upaya peningkatan kinerja telah dilakukan dan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Anak Perusahaan tahun 2021 menunjukkan hasil positif dan/atau peningkatan kinerja utamanya atas anak-anak perusahaan yang pada periode tahun buku 2020 belum memberikan kontribusi optimal pada Perusahaan. Efforts to improve performance have been made and the Independent Auditor's Report on the Financial Statements of Subsidiaries for 2021 shows positive results and/or an increase in the subsidiaries main performance which in 2020 Fiscal Year have not made an optimal contribution to the Company.

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-up
4	Direksi agar terus meningkatkan kemampuan dan kapabilitas SDM melalui program yang terukur untuk menciptakan lebih banyak calon suksesor dari kalangan milenial (termasuk di dalamnya memperhatikan keterwakilan perempuan). Board of Directors should continue to improve HC abilities and capabilities through measurable programs to create more potential successors from millennials (including paying attention to women's representation).	Pemenuhan Standar Keahlian Teknis telah dipenuhi melalui program-program pelatihan tersertifikasi, disamping itu pengembangan SDM juga dilaksanakan melalui beberapa program antara lain pelatihan baik secara public training maupun *in house training* serta program kepemimpinan yang secara komprehensif menyiapkan calon suksesor melalui model-model kegiatan. Fulfillment of Technical Expertise Standards has been met through certified training programs, in addition to that HC development was also carried out through several programs including training both public training and in-house training as well as leadership program that comprehensively prepares potential successors through activity models.
5	Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas terhadap setiap temuan, catatan serta saran/rekomendasi baik dari auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik/KAP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI/BPK-RI termasuk instansi pengawasan berwenang lainnya) maupun auditor internal Perseroan yang belum dinyatakan selesai ditindaklanjuti. Progres tindak lanjut penyelesaian temuan-temuan dimaksud agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan disampaikan tertulis secara berkala kepada Pemegang Saham. Board of Directors should follow up and complete thoroughly on every finding, note and suggestion/recommendation from both external auditors (Public Accountant Office/KAP, Financial and Development Supervisory Agency/BPKP and Indonesian Supreme Audit Agency/BPK-RI including other authorized supervisory agencies) as well as the Company's internal auditors, which the follow-up has not been completed. The follow-up progress of the said findings should be comprehensively discussed with Board of Commissioners and submitted in writing periodically to Shareholders.	Tahun 2020 Perseroan telah menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas temuan, saran dan rekomendasi auditor baik auditor eksternal (BPK RI dan/atau KAP) maupun auditor internal (SPI) dengan capaian tindak lanjut Audit Internal (SPI) sebesar 99% telah ditindaklanjuti untuk rekomendasi tahun 2011 -2018 dan sebesar 83% dari 626 rekomendasi telah ditindaklanjuti untuk rekomendasi tahun 2019 serta Audit Eksternal sebesar 115 rekomendasi dari total 190 rekomendasi yang telah sesuai ditindaklanjuti. Terhadap capaian tindaklanjut tersebut telah disampaikan secara triwulanan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. In 2020, the Company has followed up and completely completed the auditor's findings, suggestions and recommendations, both external auditors (BPK RI and/or KAP) and internal auditors (SPI) with Internal Audit (SPI) follow-up of 99% which has been followed up for recommendations in 2011 -2018 and 83% of 626 recommendations have been followed up for recommendations in 2019 and External Audit of 115 recommendations out of a total of 190 recommendations that have been suitably followed up. The follow-up achievements have been submitted quarterly to President Director and Board of Commissioners.
6	Direksi agar senantiasa menjaga konsistensi dalam melakukan *monitoring* dan *updating* data pada 5 (lima) portal BUMN, yakni portal *Financial Information System*, Portal Aset, Portal SDM, Portal PKBL, dan Portal Publik. Progres pemutakhiran data dalam portal tersebut agar dilaporkan dalam laporan manajemen triwulanan dan laporan tahunan. Board of Directors should always maintain consistency in monitoring and updating data on 5 (five) SOE's portals, namely the Financial Information System portal, Asset Portal, HC Portal, PKBL Portal and Public Portal. Progress of updating data in the portal to be reported in the quarterly management report and annual report.	Monitoring, updating data, dan pelaporan dalam portal BUMN telah dilakukan secara rutin dan tidak melewati batas waktu yang ditetapkan sehingga Perusahaan mendapatkan skor tertinggi dalam hal administrasi dalam tingkat kesehatan. Monitoring, updating data, and reporting in the SOE portal have been carried out regularly and not exceeding the set time limit so that the Company gets the highest score in terms of administration at the soundness level.
7	Direksi agar menindaklanjuti hal-hal yang menjadi rekomendasi dari Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sesuai surat yang disampaikan Nomor: 24/DK/P1.11/V-2021 tanggal 7 Mei 2021. Board of Directors should follow up on matters that become recommendations from Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) according to the letter submitted No.24/DK/P1.11/V-2021 dated May 7, 2021.	Manajemen telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris yang dibuktikan dengan adanya pencapaian laba yang diperoleh sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Management has followed up on the recommendations of Board of Commissioners as proofed by the achievement of profits earned in accordance with predetermined targets.


ontainer Terminal

DIREKSI

Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Tugas Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Direksi juga bertugas untuk:

1. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi;
2. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan;
3. Memelihara seluruh Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan serta Dokumen Perusahaan lainnya.

Wewenang Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berwenang untuk:

1. Menetapkan kebijakan pengurusan Perusahaan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan dan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang Pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk dalam penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;

BOARD OF DIRECTORS

Board of Directors is a corporate organ that is authorized and responsible for managing the Company for the benefit of the Company, both inside and outside the court in accordance with the Articles of Association.

BOARD OF DIRECTORS DUTIES AND AUTHORITIES

Board of Directors Duties

Board of Directors is in charge of carrying out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the Company's purposes and objectives, and representing the Company both inside and outside the Court on all matters and all events with limitations as stipulated in laws and regulations, the Articles of Association and/or GMS Resolutions.

Each member of Board of Directors must carry out their duties in good faith and with full responsibility for the interests and business of the Company. Board of Directors is fully responsible for carrying out their duties for the benefit of the Company in achieving its purposes and objectives.

In performing their duties, Board of Directors must comply with the Company's Articles of Association and laws and regulations and must apply the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness. Board of Directors is also responsible to:

1. Make a Register of Shareholders, a Special Register, minutes of GMS and minutes of Board of Directors meetings;
2. Make annual reports and financial documents of the Company;
3. Maintain the entire Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners and Board of Directors Meetings, Annual Report and Corporate Financial Documents as well as other Corporate Documents.

Board of Directors Authorities

In carrying out its duties, Board of Directors is authorized to:

1. Determine the Company's management policies;
2. Regulate the Board of Directors' power of attorney to one or several members of Board of Directors to make decisions and on behalf of Board of Directors or represent the Company inside and outside the court;
3. Regulate the Board of Directors' power of attorney to one or several Company employees, either individually or jointly or to other people, to represent the Company inside and outside the Court;
4. Regulate the provisions regarding the Company's employment including in the determination of salary, pension or old age benefits and other income for employees based on applicable laws and regulations, with provisions for determining salary, pension or old age benefits and other income for Employees that exceed obligations stipulated by laws and regulations, must obtain prior approval from the GMS;

5. Mengangkat dan memberhentikan Pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan; serta
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan /atau Keputusan RUPS.

5. Appoint and dismiss Company Employees based on the Company's employment regulations and applicable laws and regulations;
6. Appoint and dismiss the Corporate Secretary; and
7. Perform all actions and other actions regarding the management and ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties and/or other parties with the Company, and represent the Company in and out of court on all matters and all events, with restrictions as stipulated in laws and regulations, Articles of Association and/or GMS Resolutions.

Tanggung Jawab Direksi

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS;
2. Dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, Direksi harus segera melaporkan kepada Pemegang Saham dengan tembusan Dewan Komisaris, dengan disertai usu lan mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham melalui RUPS setiap permasalahan yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan.

Board of Directors Responsibilities

1. In carrying out their duties, Board of Directors is responsible to the GMS;
2. In the event that the Company shows signs of significant decline, Board of Directors must immediately report to the Shareholders with a copy to the Board of Commissioners, accompanied by suggestions regarding corrective measures to be taken;
3. Provide opinions and suggestions to Shareholders through the GMS on any issues deemed important for the management of the Company.

MASA JABATAN DIREKSI

Para anggota Direksi diangkat untuk waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

BOARD OF DIRECTORS TENURE

A member of Board of Directors is appointed for a period of 5 (five) years without prejudice to the GMS right to dismiss him/her at any time.

PERSYARATAN DIREKSI

Persyaratan Umum

Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

1. Dinyatakan pailit.
2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit.
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Pemenuhan persyaratan tersebut, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perusahaan.

Persyaratan lainnya

Selain memenuhi persyaratan umum, pengangkatan anggota Direksi juga dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BOARD OF DIRECTORS CRITERIA

General Requirement

Those who can be appointed as members of Board of Directors are individuals who are capable of carrying out legal actions, unless within 5 (five) years prior to their appointment they have:

1. Been declared bankrupt.
2. Became a member of Board of Directors or Board of Commissioners or Supervisory Board, who is found guilty of causing a Company or general Company to be declared bankrupt.
3. Sentenced for committing a crime that is detrimental to the State's finances and/or related to the financial sector.

Fulfillment of these requirements is evidenced by a statement signed by the prospective member of Board of Directors and the letter is kept by the Company.

Other requirements

In addition to meeting the general requirements, Board of Directors member is also appointed by taking into account the requirements stipulated in applicable laws and regulations.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Secara lebih rinci, pedoman dan tata tertib kerja Direksi diatur dalam tentang Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) antara lain berisi tentang petunjuk Tata Laksana kerja Direksi menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, serta dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dengan adanya Board Manual, diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip- prinsip GCG.

Pedoman tata tertib kerja Direksi dalam *Board Manual* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dijelaskan secara khusus dalam Bab II, yang mencakup:

1. Fungsi Direksi
2. Keanggotaan Direksi
3. Independensi (Kemandirian) Direksi
4. Etika Jabatan Anggota Direksi
5. Tugas dan Wewenang Direksi
6. Kewajiban Direksi
7. Tanggung Jawab Direksi
8. Hak Direksi
9. Prinsip-prinsip Pengambilan Keputusan Direksi
10. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
11. Organ Pendukung Direksi
12. Penilaian Kinerja Direksi
13. Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi
14. Hubungan Perusahaan dengan *Subholding* dan/ atau Anak Perusahaan

BOARD MANUAL OF BOARD OF DIRECTORS

In more detail, the guidelines and work procedures for Board of Directors are regulated in the Board Manual of Board of Directors and Board of Commissioners, which include, among others, the Board of Directors' work procedures that explains the stages of activities in a structured, systematic, easy-to-understand and consistent manner, as well as can be a reference for Board of Directors in carrying out their respective duties to achieve the vision and mission of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). With the Board Manual, it is hoped that high work standards will be achieved in line with GCG principles.

The guidelines and work procedures of Board of Directors in the Board Manual of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) are specifically described in Chapter II, which includes:

1. Functions of Board of Directors
2. Membership of Board of Directors
3. Independence of Board of Directors
4. Job Ethics of Members of Board of Directors
5. Duties and Authorities of Board of Directors
6. Obligations of Board of Directors
7. Responsibilities of Board of Directors
8. Rights of Board of Directors
9. Principles of Board of Directors Decision Making
10. Induction and Capabilities Improvement Program
11. Supporting Organs of Board of Directors
12. Board of Directors Performance Appraisal
13. Board of Directors Performance Evaluation Criteria
14. Company Relationship with Subholding and/or Subsidiaries

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

SCOPE OF WORK AND RESPONSIBILITIES OF EACH MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS

Adapun pembidangan tugas Direksi adalah sebagai berikut

The division of duties of Board of Directors are as follows.

Tabel Pembidangan Tugas Direksi
Board of Directors' Division of Duties

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Duties
Arif Suhartono	Direktur Utama	1. Sebagai Pimpinan Perusahaan, Direktur Utama bertindak sebagai pimpinan dari para anggota Direksi untuk menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dan melaksanakan kegiatan usaha perusahaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja Manajemen (RKM) dalam rangka tercapainya tujuan perusahaan; 2. Sebagai Pimpinan Direktorat Utama, Direktur Utama memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP dan RKM dalam kegiatan sekretariat perusahaan, satuan pengendalian internal, dan manajemen integrasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku berdasarkan pada prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, efektivitas penyelenggaraan pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan, dan tercapainya tujuan Integrasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). 1. As the Head of the Company, President Director acts as the leader of Board of Directors to prepare the Company's Long-Term Plan (RJPP), and carry out the Company's business activities as stipulated in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and Management Work Plan (RKM) in order to achieve Company goals; 2. As the Head of the Main Directorate, President Director leads and stipulates a strategy as an elaboration of the RJPP, RKAP and RKM in the activities of corporate secretariat, internal audit unit, and integration management to ensure compliance with applicable regulations based on the principles of good corporate governance, effective internal control, risk management and good corporate governance in order to achieve the Company's objectives and the objectives of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) integration.
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Sebagai koordinator dalam memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP dan RKM dalam kegiatan sekretariat perusahaan, satuan pengendalian internal, dan manajemen integrasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku berdasarkan pada prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, efektivitas penyelenggaraan pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan, dan tercapainya tujuan Integrasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). As a coordinator in leading and setting strategies as an elaboration of RJPP, RKAP and RKM in corporate secretariat activities, internal audit unit, and integration management to ensure compliance with applicable regulations based on the principles of good corporate governance, effective internal control, risk management and good corporate governance in order to achieve the Company's objectives and the objectives of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Integration.

Tabel Pembidangan Tugas Direksi
Board of Directors' Division of Duties

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Duties
Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan strategis fungsional yang meliputi penetapan dan pengelolaan kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan bidang keuangan serta manajemen risiko untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan dan aspirasi pemegang saham. Responsible for functional strategic policies which include the establishment and management of strategic policies related to finance and risk management to support the achievement of the Company's vision and mission and shareholder aspirations.
Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director	Melaksanakan tugas khusus pada Direktur SDM dan Umum serta memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Carry out special duties to the Human Resources and General Affairs Director and provide advice and considerations in accordance with Company policy.
Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	Bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan strategis yang meliputi Perencanaan Strategi, Pengembangan dan Kerja sama Usaha, Pembinaan Anak Perusahaan dan Pengelolaan Hukum untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan dan aspirasi pemegang saham. Responsible for strategic policies which include Strategic Planning, Business Development and Cooperation, Subsidiary Development and Legal Management to support the achievement of the Company's vision and mission and shareholder aspirations.
Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Melaksanakan tugas khusus pada Direktorat Investasi serta memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Carry out special duties at the Directorate of Investment and provide advice and considerations in accordance with Company policy.
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	Mengarahkan, menetapkan dan menyetujui atas kebijakan-kebijakan strategis terkait pengelolaan pelayanan bisnis bidang komersial, bidang operasional, pengelolaan Regional dan Cabang, sinergi hubungan Perusahaan serta menetapkan program kerja bidang pengelolaan perusahaan untuk memastikan pencapaian visi dan misi perusahaan dan aspirasi pemegang saham. Directing, determining and approving strategic policies related to the management of business services in the commercial sector, operational sector, Regional and Branch management, synergy of Company relations and establishing work programs in the field of corporate management to ensure the achievement of the Company's vision and mission and shareholder aspirations.

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai berikut:

1. Direktur Utama atau Direktur pada BUMN Lainnya, atau perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan.
2. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Jabatan-jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan yang dipimpinnya dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

POLICY OF BOARD OF DIRECTORS CONCURRENT POSITIONS

A member of Board of Directors may not hold other positions as follows:

1. President Director or Director in Other SOEs, or private Company or other positions related to the management of the Company.
2. Other structural and functional positions in Central and Regional Government agencies/institutions.
3. Other positions that may cause a conflict of interest directly or indirectly with the Company they lead and/or which are contrary to the applicable laws and regulations.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi
Board of Directors Concurrent Position

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain Position at Other Companies/Institutions	Nama Perusahaan/ Instansi Lain Name of Other Companies/Institutions
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	PT Jakarta International Container Terminal
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	-	-
Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director	-	-
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	-	-
Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	-	-
Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	-	-
Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	-	-

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Setiap anggota Direksi harus mematuhi etika terkait benturan kepentingan, sebagai berikut:

1. Wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan informasi kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain, termasuk bila tidak memiliki kepemilikan saham, serta secara berkala setiap akhir tahun melakukan pembaharuan (*updating*) dan wajib memberitahukan Perseroan bila ada perubahan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
   a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
   b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
   c. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud Poin a di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
      - Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
      - Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
      - Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

MANAGEMENT OF BOARD OF DIRECTORS CONFLICT OF INTEREST

Each member of Board of Directors must comply with ethics related to conflicts of interest, as follows:

1. Must fill out a Special Register containing information on ownership of their shares and/or their families in other companies, including if they do not have share ownership, and periodically update at the end of each year and must notify the Company if there are changes to the data in accordance with the prevailing laws and regulations;
2. Members of Board of Directors are not authorized to represent the Company if:
   a. There is a case before the Court between the Company and the concerned member of Board of Directors;
   b. b. The concerned member of Board of Directors has a conflict of interest with the Company;
   c. In the event of a situation as referred to in Point a above, those who are entitled to represent the Company are:
      - Other members of Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company;
      - Board of Commissioners in the event that all members of Board of Directors have a conflict of interest with the Company;
      - Other parties appointed by the GMS in the event that all members of Board of Directors or Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.

d. Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan tidak ada satu pun anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.

d. In the event that all members of Board of Directors have a conflict of interest with the Company and there is no a single member of Board of Commissioners, the Company is represented by another party appointed by the GMS.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Seluruh Direksi telah melaporkan kepada Perseroan terkait kepemilikan saham yang dimiliki baik di Pelindo maupun di perusahaan lainnya. Kepemilikan saham masing-masing Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

BOARD OF DIRECTORS SHARE OWNERSHIP

The entire Board of Directors has submitted a report to the Company regarding the ownership of shares both in Pelindo and in other companies. The share ownership of each Board of Directors can be seen in the table below:

Tabel Kepemilikan Saham Direksi
Board of Directors Share Ownership

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Share Ownership	
		Pelindo	Perusahaan Lain Other Companies
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	Nihil Nil	PT Rejeki Sehat Sejahtera (550 lembar/shares)
Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	Nihil Nil	PT Aneka Kimia Raya (125.000 lembar/125,000 shares) PT Aneka Tambang (12.500 lembar/12,500 shares) PT Adaro Mineral (7.5000 lembar/7,500 shares) PT Surya Eka Perkasa (23.500 lembar/23,500 shares) PT Waskita (30.000 lembar/30,000 shares)

RAPAT DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

KEBIJAKAN RAPAT

MEETING POLICY

Kebijakan rapat Direksi telah diatur dalam *Board Manual*. Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa diadakan rapat Direksi, sepanjang keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.

Board of Directors meeting is a meeting held by the Board of Directors. Binding decisions can also be made without holding a meeting , as long as the decision is approved in writing and signed by all members of Board of Directors.

Rapat Direksi diadakan setiap kali dianggap perlu, namun sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu oleh:
1. Seorang atau lebih anggota Direksi;
2. Permintaan tertulis dari Dewan Komisaris;
3. Permintaan tertulis seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan;
4. Rapat Direksi ini merupakan rapat yang bersifat segera dan strategis, dengan agenda hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan level Direksi.

Board of Directors meeting is held whenever deemed necessary, but at least once in 1 (one) month. Board of Directors meeting can be held outside the regular schedule, if deemed necessary by:
1. One or more members of Board of Directors;
2. A written request from Board of Commissioners;
3. A written request from one or more Shareholders who have the largest number of shares stating the matters to be discussed;
4. This Board of Directors meeting is an immediate and strategic meeting, with an agenda of matters that require decision-making at Board of Directors level.

Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat kegiatan usaha Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan Direksi. Panggilan rapat diatur sebagai berikut:

1. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak;
2. Panggilan rapat dan penyelenggaraan rapat Direksi dapat didelegasikan kepada Sekretaris Perusahaan, kecuali diatur lain oleh Rapat Direksi;
3. Panggilan rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat serta menyertakan agenda dan materi rapat tersebut;
4. Panggilan rapat Direksi dapat dilakukan melalui sarana elektronik (SMS, *email*, dan sarana elektronik lainnya) agar pemberitahuan mengenai agenda rapat dapat lebih cepat disampaikan, tanpa mengesampingkan ketentuan Anggaran Dasar mengenai tata cara panggilan rapat secara tertulis.

Board of Directors meetings can be held at the Company's domicile or at the Company's place of business or at other places within the territory of the Republic of Indonesia determined by Board of Directors. Summons for meetings are arranged as follows:
1. Summons for Board of Directors meetings are made in writing by a member of Board of Directors who has the right to represent the Company and delivered at least 3 (three) working days before the meeting is held, or in a shorter time if there is an urgent situation;
2. Summons for meetings and holding of meetings of Board of Directors can be delegated to the Corporate Secretary, unless otherwise stipulated by the meeting of Board of Directors;
3. Summons for Board of Directors meetings must include the event, date, time and place of meeting and include the agenda and materials for meeting;
4. Summons for Board of Directors meetings can be made via electronic means (SMS, e-mail and other electronic means) so that notifications regarding the meeting agenda can be delivered more quickly, without prejudice to the provisions of the Articles of Association regarding procedures for written invitations to meetings.

Agenda rapat Direksi ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Setiap dan hanya anggota Direksi yang berhak mengajukan usulan agenda rapat. Usulan agenda rapat dapat diajukan selain oleh Direksi, namun tetap harus mendapatkan persetujuan dari Direktur terkait;
2. Usulan agenda rapat dikumpulkan oleh Sekretaris Perusahaan untuk diverifikasi kecukupan syarat-syarat untuk diajukan sebagai agenda rapat;
3. Anggota Direksi, yang usulan agendanya ditetapkan sebagai agenda rapat harus mempersiapkan materi yang memadai sesuai agenda yang diusulkannya.

Board of Directors meeting agenda is determined based on the following provisions:
1. Each and only member of Board of Directors has the right to propose a meeting agenda. Proposal for meeting agenda can be submitted other than by Board of Directors, but must still obtain approval from the relevant Director;
2. The proposed meeting agenda is collected by Corporate Secretary to verify the adequacy of requirements to be submitted as a meeting agenda;
3. Member of Board of Directors, whose proposed agenda is determined as a meeting agenda, must prepare adequate material in accordance with the proposed agenda.

Pimpinan rapat Direksi diatur sebagai berikut:
1. Seluruh rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama;
2. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka rapat Direksi dipimpin oleh Pelaksana Harian Direktur Utama/Direksi yang ditunjuk atau diberikan kuasa oleh Direktur Utama;
3. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan sebagaimana dijelaskan dalam huruf b di atas, maka:

The Board of Directors meeting chairman is regulated as follows:
1. All Board of Directors meetings are chaired by the President Director;
2. In the event that the President Director is absent or unable to attend, Board of Directors meeting shall be chaired by Daily Acting President Director/Director appointed or authorized by the President Director;
3. In the event that the President Director does not make the appointment as described in letter b above, then:

a. Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat;
b. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan ditunjuk sebagai pimpinan rapat Direksi;
c. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang terlama menjabat dan tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya. Dalam hal anggota Direksi tidak hadir dalam rapat rutin, maka anggota Direksi tersebut dapat mewakilkan kepada anggota Direksi lainnya dengan memberikan Surat Kuasa kehadiran dengan mencantumkan pernyataan persetujuan atau penolakan atas agenda rapat, dengan alasan-alasannya.

Direksi wajib terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam rapat. Untuk itu, Anggota Direksi yang tidak hadir pada saat pengambilan keputusan akan dilaksanakan harus dihubungi untuk segera kembali mengikuti proses rapat. Jika tidak berhasil dihubungi, maka peserta rapat tersebut dianggap menyetujui keputusan rapat yang diambil.

Keputusan rapat Direksi ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak biasa, dengan ketentuan:

1. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.
2. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat pimpinan rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi.
3. Apabila terdapat usulan lebih dari 2 dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) alternatif yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu alternatif memperoleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Setiap rapat Direksi harus dibuatkan risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir.

a. Vice President Director chairing the Meeting;
b. In the event that the Vice President Director is not present, then one of the Directors who has served the longest time is appointed as chairman of Board of Directors meeting;
c. In the event that the longest serving Director is more than 1 (one) person, then the longest serving Director and the oldest in age act as chairman of Board of Directors meeting.

Board of Directors meeting is legal and has the right to make binding decisions, if attended by more than 1/2 (one half) of Board of Directors members or their representatives. A Board of Directors member can be represented at a meeting only by another member of Board of Directors based on a written power of attorney specifically granted for that purpose. A Board of Directors member can only represent another member of Board of Directors. In the event that a Board of Directors member is absent at regular meetings, the member of Board of Directors may represent another Board of Directors member by providing a Power of Attorney for attendance including a statement of approval or rejection of the meeting agenda, along with the reasons.

Board of Directors must be involved in every decision-making process at meetings. For this reason, Board of Directors members who are not present at the time the decision is made must be contacted to immediately return to the meeting process. If contact is not successful, then the meeting participants are deemed to agree with the meeting decisions taken.

The decision of Board of Directors meeting is determined by deliberation to reach a consensus, if no agreement is reached then the decision is determined by an ordinary majority vote, with the following provisions:

1. Each Board of Directors member has the right to cast 1 (one) vote plus 1 (one) vote for the member of Board of Directors he/she represents;
2. If there are an equal number of agreeing and disagreeing votes, then the meeting decision is in accordance with the opinion of the meeting chairman while taking into account the provisions regarding responsibilities as a member of Board of Directors;
3. If there is more than 2 (two) alternatives being proposed and the voting results do not have one alternative with votes of more than 1/2 (one-half) of total votes cast, then a re-election will be carried out for 2 (two) alternatives that received the most votes so that one of the alternatives obtains more than 1/2 (one-half) of total votes cast;

Minutes of meeting must be made for every Board of Directors meeting. The minutes of meeting are signed by the meeting chairman and all members of Board of Directors present.

Rencana Rapat Direksi

Board of Directors Meeting Plan

Adapun rencana rapat Direksi selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The Board of Directors meeting plans for 2022 are as follows:

1	**Rencana Rapat Direksi Bulan Januari 2022** Board of Directors Meeting Plan for January 2022	
1.1	Minggu ke-2	2nd Week
	CEO *Direction*	CEO Direction
	Arah Pengembangan *Subholding* dan Anak Perusahaan Tahun 2022	Development Direction of Subholding and Subsidiaries in 2022
	Tindak Lanjut Optimalisasi Pelabuhan Cabang	Follow-up of Branch Port Optimization
	Progress Penyelesaian Kontrak Kerja Sama yang Jatuh Tempo Tahun 2022	Progress of Cooperation Contract Settlement that Matures in 2022
	Progress Penyusunan SK Bisnis Model Baru	Progress of New Business Model Decree Preparation
	Lain-Lain	Others
1.2	Minggu ke-4	4th Week
	CEO *Direction*	CEO Direction
	Bidang IT - Tata Kelola IT Kantor Pusat, Regional, *Subholding*, ILCS dan EDII	IT Division - IT Governance of Head Office, Regional, Subholding, ILCS and EDII
	Rencana Pengoperasian LNG di BMTH	LNG Operation Plan at BMTH
	Pembahasan RJPP	RJPP Discussion
	Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab antara Direktorat Direktorat Utama, Pengelola, Strategi dan Investasi	Division of Duties and Responsibilities between Directorate, Vice President Director, Management, Strategy and Investment
	Serah Operasi Bisnis kepada *Subholding*	Handover of Business Operations to Subholding
	Realisasi Kinerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) s.d Desember 2021	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Performance Realization until December 2021
	Lain-Lain	Others
2	**Rencana Rapat Direksi Bulan Februari 2022** Board of Directors Meeting Plan for February 2022	
2.1	Minggu ke-2	2nd week
	CEO *Direction*	CEO Direction
	Revisi Perdir Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelindo (Persero)	Revision of Board of Directors Regulation on Guidelines for Procurement of Goods and Services within PT Pelindo (Persero)
	Pembagian Tanggung Jawab antara Direktorat Investasi dan Direktorat Strategi atas Rencana Pengembangan Pelabuhan Baru oleh Bappenas	Division of Responsibility between the Directorate of Investment and the Directorate of Strategy on the New Port Development Plan by Bappenas
	Rencana Investasi Baru dari Regional	New Investment Plan from Regional
	Update NPEA	NPEA Update
	Lain-Lain	Others

2.2	Minggu ke-4	4th week
	CEO *Direction*	CEO Direction
	Update Perpindahan Menara Maritim	Maritime Tower Transfer Update
	Progress Proyek Strategis dan Isu Strategis Bidang Teknik di Regional	Progress of Strategic Projects and Strategic Issues in the Field of Engineering in the Region
	Progress Assessment Struktural Pelindo	Pelindo Structural Assessment Progress
	Update Kerja Sama Usaha dengan Mitra Strategis di Pelindo	Update on Business Cooperation with Strategic Partners at Pelindo
	Lain-Lain	Others
3	**Rencana Rapat Direksi Bulan Maret 2022** Board of Directors Meeting Plan for March 2022	
3.1	Minggu ke-2	2nd Week
	CEO *Direction*	CEO Direction
	Pembahasan Materi Rakomdir Maret 2022	Discussion of Materials for BOC and BOD Meetings in March 2022
	Percepatan Kerja Sama Usaha	Acceleration of Business Cooperation
	Penyusunan Peraturan Direksi tentang Kerja Sama Usaha di Lingkungan Pelindo	Drafting of Board of Directors Regulation on Business Cooperation in Pelindo Environment
	Progress Single ERP	Progress of Single ERP
	Lain-Lain	Others
3.2	Minggu ke-4	4th Week
	CEO *Direction*	CEO Direction
	Penyusunan Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengembangan Bisnis di Lingkungan Perusahaan	Drafting of Board of Directors Regulation on Business Development Guidelines in Company Environment
	Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan	Development of Port Infrastructure and Equipment
	Harmonisasi IT *Masterplan*	Harmonization of IT Masterplan
	Lain-Lain	Others
4	**Rencana Rapat Direksi Bulan April 2022**	**Board of Directors Meeting Plan for April 2022**
4.1	Minggu ke-2	2nd week
	CEO *Direction*	CEO Direction
	Pembahasan Materi Rakomdir April 2022	Discussion of Materials for BOC and BOD Meetings in April 2022
	Pengembangan Kawasan Industri dan/atau Logistik	Development of Industrial and/or Logistics Areas
	Pengembangan Layanan Operasi Pelabuhan di luar Area Kerja Perusahaan	Development of Port Operation Services outside the Company's Working Area
	Penyusunan dan Standarisasi *Master Data* Operasional	Compilation and Standardization of Operational Master Data
	Lain-Lain	Others
4.2	Minggu ke-4	Week 4
	CEO *Direction*	CEO Direction
	Progress Proyek Strategis dan Isu Strategis Bidang Teknik di Regional	Strategic Project Progress and Strategic Issues in Engineering in the Region
	Realisasi Kinerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Triwulan I 2022	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Performance Realization for 1st Quarter 2022
	Progress Penyusunan Pedoman Manajemen Proyek	Progress on the Preparation of Project Management Guidelines
	Lain-Lain	Others

5	**Rencana Rapat Direksi Bulan Mei 2022** Board of Directors Meeting Plan for May 2022	
5.1	Minggu ke-2	2nd Week
	CEO *Direction*	CEO Direction
	Pembahasan Materi Rakomdir bulan Mei 2022	Discussion of Materials for BOC and BOD Meetings in May 2022
	Update Kerja Sama Usaha dengan Mitra Strategis di Pelindo	Update on Business Cooperation with Strategic Partners in Pelindo
	Konsolidasi Data Aset dan Program Kerja TIK seluruh Regional	Consolidation of Asset Data and ICT Work Programmes across Regions
	Lain-Lain	Others
5.2	Minggu ke-4	4th Week
	CEO *Direction*	CEO Direction
	Progress Desain dan Implementasi *Dashboard Executive Summary*	Progress of Dashboard Design and Implementation Executive Summary
	Rencana Pelimpahan Terminal Petikemas yang dikelola oleh Cabang Pelabuhan kepada *Subholding*	Plan for the delegation of Container Terminals managed by Port Branches to Subholding
	Lain-Lain	Others
6	**Rencana Rapat Direksi Bulan Juni 2022** Board of Directors Meeting Plan for June 2022	
6.1	Minggu ke-2	2nd week
	CEO *Direction*	CEO Direction
	Pembahasan Materi Rakomdir Juni 2022	Discussion of Materials for BOC and BOD Meetings in June 2022
	Progress Sentralisasi *Procurement* Lisensi Group TIK	ICT Group License Procurement Centralization Progress
	Rencana Pelimpahan Terminal Nonpetikemas yang dikelola oleh Cabang Pelabuhan kepada *Subholding*	Plan for the delegation of Non-Packaging Terminals managed by Branches Port to Sub Holding
	Lain-Lain	Others
6.2	Minggu ke-4	4th Week
	CEO *Direction*	CEO Direction
	Progress Penyusunan Kebijakan dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	Progress of Information Technology and Governance Policies and Procedures Communication
	Progress Proyek Strategis dan Isu Strategis Bidang Teknik di Regional	Progress of Strategic Projects and Strategic Issues in Engineering in the Region
	Lain-Lain	Others
7	**Rencana Rapat Direksi Bulan Juli 2022** Board of Directors Meeting Plan for July 2022	
7.1	Minggu ke-2	2nd Week
	CEO *Direction*	CEO Direction
	Pembahasan Materi Rakomdir Juli 2022	Discussion of Materials for BOC and BOD Meetings in July 2022
	Update Progress Dashboarding Pelaporan Peralatan Pelabuhan	Update Progress Dashboarding Port Equipment Reporting
	Realisasi Kinerja Semester I 2022	First Semester of 2022 Performance Realization
	Lain-Lain	Other

7.2	Minggu ke-4	4th Week
	CEO *Direction*	CEO Direction
	Progress Optimalisasi Peralatan	Equipment Optimization Progress
	Realisasi Investasi Semester I 2022	Investment Realization Semester I 2022
	Usulan RKAP Tahun 2023	Proposed RKAP for 2023
	Lain-Lain	Other
8	**Rencana Rapat Direksi Bulan Agustus 2022** Board of Directors Meeting Plan for August 2022	
8.1	Minggu ke-2	2nd week
	CEO *Direction*	CEO Direction
	Pembahasan Materi Rakomdir Agustus 2022	Discussion of Materials for BOC and BOD Meetings in August 2022
	Progress Standardisasi Teknis Peralatan	Progress of Equipment Technical Standardization
	Progress Pengembangan Kawasan Industri dan/atau Logistik	Progress of Industrial and/or Logistics Area Development
	Standardisasi Sistem Manajemen Mutu	Quality Management System Standardization
	Lain-Lain	Other
8.2	Minggu ke-4	4th Week
	CEO *Direction*	CEO Direction
	Progress Dashboard Monitoring Availability dan Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan	Progress of Dashboard Monitoring Availability and Facility Maintenance
	Progress Penyusunan Database Sertifikasi *Health, Safety, Security Environment (HSSE) Management System*	Progress of Compilation of Health, Safety, Security Environment Certification Database (HSSE) Management System
	Lain-Lain	Others
9	**Rencana Rapat Direksi Bulan September 2022** Board of Directors Meeting Plan for September 2022	
9.1	Minggu ke-2	2nd week
	CEO *Direction*	CEO Direction
	Pembahasan Materi Rakomdir September 2022	Discussion of Materials for BOC and BOD Meetings in September 2022
	Progress Pengembangan Aplikasi TCS	TCS Application Development Progress
	Update Progress Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan	Update on Progress of Port Infrastructure and Equipment Development
	Lain-Lain	Others
9.2	Minggu ke-4	4th Week
	CEO *Direction*	CEO Direction
	Progress Peningkatan Pelayanan melalui *Key Account Management* Terintegrasi	Progress of Service Improvement through Integrated Key Account Management
	Update Progress Studi Pelabuhan Ambon	Ambon Port Study Progress Update
	Lain-Lain	Others
10	**Rencana Rapat Direksi Bulan Oktober 2022** Board of Directors Meeting Plan for October 2022	
10.1	Minggu ke-2	2nd week
	CEO *Direction*	CEO Direction
	Laporan Kinerja Triwulan III 2022	Third Quarter of 2022 Performance Report

	Pembahasan Materi Rakomdir bulan Oktober 2022	Discussion of Materials for BOC and BOD Meetings in October 2022
	Lain-Lain	Others
10.2	Minggu ke-4	4th week
	CEO *Direction*	CEO Direction
	Progress Mapping Aset Lahan berdasarkan Alas Hak	Progress of Mapping Land Assets based on Alas Hak
	Laporan Realisasi Investasi Triwulan III 2022	Investment Realization Report for the third quarter of 2022
	Lain-Lain	Others
11	**Rencana Rapat Direksi Bulan November 2022** Board of Directors Meeting Plan for November 2022	
11.1	Minggu ke-2	2nd week
	CEO *Direction*	CEO Direction
	Review Pelaksanaan Ketentuan Tambahan Tarif atas Pelayanan Jasa Kapal	Review of the Implementation of Additional Tariff on Ship Services
	Pembahasan Materi Rakomdir bulan November 2022	Discussion of Materials for BOC and BOD Meetings in November 2022
	Lain-Lain	Others
11.2	Minggu ke-4	4th week
	CEO *Direction*	CEO Direction
	Rencana Pengenaan *Channel Fee* pada Alur Pelayaran Pelabuhan	Plan for the Imposition of Channel Fee on Port Shipping Lanes
	Progress Database Kerja Sama Lahan	Progress of Land Cooperation Database
	Lain-Lain	Others
12	**Rencana Rapat Direksi Bulan Desember 2022** Board of Directors Meeting Plan for December 2022	
12.1	Minggu ke-2	2nd Week
	CEO *Direction*	CEO Direction
	Pembahasan Materi Rakomdir Desember 2022	Discussion of Materials for BOC and BOD Meetings in December 2022
	Update Progress Single ERP	Update on Single ERP Progress
	Lain-Lain	Others
12.2	Minggu ke-4	4th week
	CEO *Direction*	CEO Direction
	Update Progress Standardisasi Teknis Peralatan	Update on Equipment Technical Standardization Progress
	Laporan Rencana Kerja Manajemen Tahun 2022	2022 Management Work Plan Report
	Laporan RKM Strategis Kantor Pusat	Head Office Strategic RKM Report
	Lain-Lain	Others

AGENDA, TANGGAL DAN PESERTA RAPAT DIREKSI

Sepanjang tahun 2022, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

AGENDA, DATE AND PARTICIPANTS OF BOARD OF DIRECTORS› MEETINGS

Throughout 2022, the agenda, dates and participants of Board of Directors Meetings are as follows.

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
1	12 Januari 2022 January 12, 2022	1. CEO *Direction* 2. Lain-lain 3. Bonus Tahun 2023 4. Serah Operasi Bisnis kepada *Subholding* 5. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab antara Direktorat Wakil Direktur Utama, Pengelola, Strategi dan Investasi 6. *Study* Pelabuhan Ambon 7. Kerja Sama Pemanfaatan Garongkong 8. Rencana Pengoperasian LNG di BMTH 9. Bidang IT - Tata Kelola IT Kantor Pusat, Regional, *Subholding*, ILCS dan EDII 10. Pembahasan RJPP 11. *Update Progress* New Priok Eastern Access (NPEA) 12. Rencana Investasi Baru dari Regional 1,2,3 dan 4 13. Pembagian Tanggung Jawab antara Direktorat Investasi dan Direktorat Strategi atas Rencana Pengembangan Pelabuhan Baru oleh Bappenas 14. Revisi Perdir Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelindo (Persero) 15. Hasil Konsultasi SDM bersama SPI 1. CEO Direction 2. Other 3. 2023 Bonuses 4. Handover of Business Operations to Subholding 5. Division of Duties and Responsibilities between Directorates of Vice President Director, Management, Strategy and Investment 6. Study of Ambon Port 7. Garongkong Utilization Cooperation 8. LNG Operation Plan at BMTH 9. IT - IT Governance of Head Office, Regional, Sub Holding, ILCS and EDII 10. Discussion of RJPP 11. Update on New Priok Eastern Access (NPEA) Progress 12. New Investment Plan from Regional 1,2,3 and 4 13. Division of Responsibility between Directorate of Investment and Directorate of Strategy on New Port Development Plan by Bappenas 14. Revision of Board of Directors Regulation on Goods and Services Procurement Guidelines within PT Pelindo (Persero) 15. Results of HC Consultation with SPI	Arif Suhartono Hambra Ihsanuddin Usman Putut Sri Muljanto Mega Satria Boy Robyanto Prasetyo	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
2	2 Februari 2022 February 2, 2022	1. CEO *Direction* 2. Lain-lain 3. Skema Kerja Sama Pelayanan Jasa 4. Penyesuaian Perpanjangan Jangka Waktu Kerja Sama Penggunaan Bagian Tanah HPL Pelabuhan dan Kerja Sama Penyediaan Air Bersih di Pelabuhan Tanjung Emas oleh PT Tirto Podomoro 5. *Update* JTCC 6. Kelanjutan Investasi Dermaga Tarakan 7. *Update* Pengerukan di Seluruh Wilayah Kerja Pelindo 8. Rencana Relokasi Alat dan Pengadaan Peralatan Pelabuhan 9. Pembahasan Laporan Teknis Penilaian GCG Tahun 2021 10. Pemaparan Kajian dan Keputusan Inbreng Saham SPSL 11. Pemaparan terkait Putusan Pengadilan yang akan di Eksekusi 12. *Update* Kerja Sama dengan INA 13. Penataan *Layout* Lantai Direksi dan Direktorat di Menara Pelindo 14. Tindak Lanjut *Assessment* Struktural (*Confidential*) 15. *Nominated Talent Cluster Logistic* dan *Selected Talent* Pelindo (*Confidential*) 16. Formulasi Bonus (*Confidential*) 17. Skema Kerja Sama Penggunaan Ruangan oleh *Subholding* 1. CEO Direction 2. Others 3. Service Cooperation Scheme 4. Adjustment of the Cooperation Period Extension for the Use of HPL Port Land and Clean Water Supply Cooperation at Tanjung Emas Port by PT Tirto Podomoro 5. JTCC Update 6. Continuation of Tarakan Pier Investment 7. Update on Dredging in All Pelindo Working Areas 8. Equipment Relocation Plan and Port Equipment Procurement 9. Discussion of GCG Assessment Technical Report for 2021 10. Presentation of Study and Decision on SPSL Share Inbreng 11. Presentation of Court Decisions that will be Executed 12. Update on Cooperation with INA 13. Layout of Board of Directors and Directorate Floor in Pelindo Tower 14. Structural Assessment Follow-up (Confidential) 15. Nominated Talent Cluster Logistic and Selected Talent Pelindo (Confidential) 16. Bonus Formulation (Confidential) 17. Cooperation Scheme for Room Usage by Subholding	Arif Suhartono Hambra Ihsanuddin Usman Putut Sri Muljanto Mega Satria Boy Robyanto Prasetyo	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
3	15 Februari 2022 February 15, 2022	1. CEO *Direction* 2. *Port & Institute Logistic* 3. Kalender Korporat Tahun 2022 4. Usulan STO SPSL dan PPI 5. LNG BMTH 6. *Update* Kerja Sama dengan INA 7. Lain-lain 8. *Update* Usulan Implementasi *Green Port* 9. *Update Project Showcase* G20 10. *Update* Permasalahan Pelabuhan Bojonegara 11. Usulan SK Organisasi PMO & Organisasi Pengadaan Tanah 12. Kerja sama Lahan dengan Instansi Pemerintah 13. Perubahan Skema Sewa lahan Menjadi *Revenue Sharing* untuk PT IKT tbk 14. Valuasi Bersama *Port of Rotterdam* dan *Port* Zhejiang	Arif Suhartono Hambra Ihsanuddin Usman Putut Sri Muljanto Mega Satria Boy Robyanto Prasetyo	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	
		1. CEO Direction 2. Port & Institute Logistics 3. 2022 Corporate Calendar 4. Proposal of STO SPSL and PPI 5. BMTH LNG 6. Update on Cooperation with INA 7. Others 8. Update on Green Port Implementation Proposal 9. Update on G20 Showcase Project 10. Update on Bojonegara Port Issues 11. Proposal for Decree on PMO & Land Acquisition Organization 12. Land Cooperation with Government Agencies 13. Change of Land Lease Scheme to Revenue Sharing for PT IKT tbk 14. Joint Valuation of Rotterdam Port and Zhejiang Port			

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
4	1 Maret 2022 March 1, 2022	1. CEO *Direction* 2. *Update* Kerja Sama dengan INA 3. Perkembangan DP4 4. *Update* Usulan Struktur Organisasi Kantor Pusat 5. Permasalahan Lahan *Ex-President* Regional 2 Tanjung Priok 6. Bisnis Pemanduan Pada Lingkungan Pelindo 7. *Review* Struktur Dermaga Berlian 8. Pekerjaan Pengadaan 2 Unit Kapal Tunda untuk Cabang Dumai 9. Laporan *Progress* Balik Nama Lahan di Pelindo 10. Laporan *Progress* Pemurnian Bisnis Anak Perusahaan dan Restrukturisasi PMT 11. Kerja Sama Pelayanan Kapal Ro-Ro PT Atosim Lampung Pelayaran di Lingkungan Pelindo 1. CEO Direction 2. Update on Cooperation with INA 3. DP4 development 4. Update on Head Office Organization Structure Proposal 5. Land Issues of Ex-President Regional 2 Tanjung Priok 6. Guiding Business in Pelindo Environment 7. Review of Diamond Pier Structure 8. Procurement of 2 units of tugboat for Dumai Branch 9. Progress Report on Land Title Transfer at Pelindo 10. Progress Report on Subsidiary Business Refining and PMT Restructuring 11. Cooperation of Ro-Ro Ship Services of PT Atosim Lampung Shipping in Pelindo Environment	Arif Suhartono Hambra Ihsanuddin Usman Putut Sri Muljanto Mega Satria Boy Robyanto Prasetyo	Hadir Present	
5	22 Maret 2022 March 22, 2022	1. CEO *Direction* 2. Laporan Keuangan Februari 2022 3. Masalah Lahan PT Terminal Logistik Makmur Indonesia di Regional 3 Cabang Banjarmasin 4. Kerjasama Aset oleh Mitra dan Anak Perusahaan (PT ISAB) 5. Pembahasan Alternatif Desain *Ramp off* Tol Bali Mandara ke Benoa Marina 6. *Wreck Removal* Benoa 7. *Timeline* Penggabungan PPI ke SPSL 8. *Update Layout* Pelindo Tower 9. *Job Grading* (*Confidential*) 10. *Update* Hasil Konsultasi SPI (*Confidential*) 11. Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Struktur Dermaga Berlian	Arif Suhartono Hambra Ihsanuddin Usman Putut Sri Muljanto Mega Satria Boy Robyanto Prasetyo	Hadir Present	

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
		1. CEO Direction 2. February 2022 Financial Report 3. Land Issues of PT Terminal Logistik Makmur Indonesia in Regional 3 Banjarmasin Branch 4. Asset Cooperation by Partners and Subsidiaries (PT ISAB) 5. Discussion of Alternative Design of Ramp off Bali Mandara Toll Road to Benoa Marina 6. Wreck Removal Benoa 7. PPI to SPSL Merger Timeline 8. Pelindo Tower Layout Update 9. Job Grading (Confidential) 10. Update on SPI Consultation Results (Confidential) 11. Implementation of Belian Pier Structure Strengthening Work			
6	5 April 2022 April 5, 2022	1. CEO *Direction* 2. Pembahasan Valuasi DP4 Tahun 2019 dan 2020 3. Final *Draft* Kajian Restrukturisasi PMT 4. Lain-lain 5. Rencana Pekerjaan *Design and Build* Infrastruktur Dasar pada Area Pengembangan 1 BMTH dan Usulan *Addendum* Pekerjaan Fasilitas Tambatan Kapal Pandu dan Tunda, Struktur Proteksi *Offshore* dan Pelindung Abrasi pada Pembangunan Terminal Kijing 6. Rencana Pembangunan NPEA 7. Pelaksanaan Kerja Sama Pembuatan *Crane* di Dalam Negeri oleh SPJM 1. CEO Direction 2. Discussion on DP4 Valuation for 2019 and 2020 3. Final Draft of PMT Restructuring Study 4. Design and Build Work Plan for Basic Infrastructure in BMTH Development Area 1 and Proposal for Addendum to the Mooring Facility Work for Guiding and Towing Vessels, Offshore Protection Structures and Abrasion Protectors in the Kijing Terminal Development 5. NPEA Development Plan 6. Implementation of Domestic Crane Manufacturing Cooperation by SPJM	Arif Suhartono Hambra Ihsanuddin Usman Putut Sri Muljanto Mega Satria Boy Robyanto Prasetyo	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	
7	26 April 2022 April 26, 2022	1. CEO *Direction* 2. *Progress* dan Mekanisme Pengadaan Pelindo Tower 3. Laporan Kinerja TW I 2023 4. Laporan *Progress* Pengadaan Tanah Kijing 5. Rencana Hibah kepada Pemerintah Kota Denpasar 6. Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Struktur Dermaga Berlian 1. CEO Direction 2. Progress and Mechanism of Pelindo Tower Procurement 3. First Quarter of 2023 Performance Report 4. Kijing Land Procurement Progress Report 5. Grant Plan to Denpasar City Government 6. Implementation of Diamond Pier Structure Strengthening Work	Arif Suhartono Hambra Ihsanuddin Usman Putut Sri Muljanto Mega Satria Boy Robyanto Prasetyo	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
8	17 Mei 2022 May 17, 2022	1. Finalisasi Buku Menuju 1 BUMN Pelabuhan 2. Pembahasan Rencana *Buyback & Fundraising* 3. Lain-lain 4. Relokasi Perikanan di Benoa (eks Perinus) 5. Penyelesaian Permasalahan Pengadaan 2 Unit Kapal Tunda 2 x 1800HP untuk Cabang Dumai dan 3 Unit Kapal Tunda 2x1600HP untuk Cabang Belawan 6. CEO *Direction* 7. Bonus Pegawai 2022 (*Confidential*) 8. Tindak Lanjut Kerja Sama PT Bandar Nelayan 9. Kerja Sama Tanah Lahan HPL Tanjung Priok dengan PT Kawasan Berikat Nusantara 10. Optimalisasi Alat Bongkar Muat di Regional IV Cabang Pantoloan dan Ambon 11. Pembelian Saham TCS untuk Pengoperasian Pelabuhan Mekar Putih 1. Finalization of the book Towards One SOE Port 2. Buyback & Fundraising Plan Discussion 3. Others 4. Relocation of Fisheries in Benoa (ex Perinus) 5. Settlement of Problems in Procurement of 2 Units of 2 x 1800HP Tugboats for Dumai Branch and 3 Units of 2x1600HP Tugboats for Belawan Branch 6. CEO Direction 7. Employee Bonus 2022 (Confidential) 8. Follow-up Cooperation with PT Bandar Nelayan 9. Cooperation of Tanjung Priok HPL Land with PT Kawasan Berikat Nusantara 10. Optimization of Loading and Unloading Equipment in Regional IV Pantoloan and Ambon Branches 11. Purchase of TCS Shares for the Operation of Mekar Putih Port	Arif Suhartono Hambra Ihsanuddin Usman Putut Sri Muljanto Mega Satria Boy Robyanto Prasetyo	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	
9	23 Mei 2022 May 23, 2022	1. CEO *Direction* 2. Restrukturisasi PMT 3. Lain-Lain 1. CEO Direction 2. PMT Restructuring 3. Others	Arif Suhartono Hambra Ihsanuddin Usman Putut Sri Muljanto Mega Satria Boy Robyanto Prasetyo	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	
10	7 Juni 2022 June 7, 2022	1. CEO *Direction* 2. *Update Progress* BNCT 3. Lain-Lain 4. Prosedur Pelaksanaan Rapat Direksi 5. Pembahasan Kajian Pemurnian Bisnis Pelindo *Group* 6. *Update Progress* Integrasi IT 1. CEO Direction 2. BNCT Progress Update 3. Others 4. Board of Directors Meeting Procedures 5. Discussion of Pelindo Group Business Refining Study 6. IT Integration Progress Update	Arif Suhartono Hambra Ihsanuddin Usman Putut Sri Muljanto Mega Satria Boy Robyanto Prasetyo	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
11	28 Juni 2022 June 28, 2022	1. *Monitoring Action Items* 2. *Update* Kerja sama dengan INA 3. Pembahasan *Draft* MOU dengan APBMI dan kewajiban Pembayaran Konsesi atas Pelayanan Bongkar dan Muat *Multipurpose* 4. Paparan Kinerja Mei 2022 5. Solusi Penyelesaian Kerja Sama dengan PBM Olah Jasa Andal (OJA) 1. Monitoring Action Items 2. Update on Cooperation with INA 3. Discussion of the MOU Draft with APBMI and Concession Payment obligation for Multipurpose Loading and Unloading Services 4. Performance Exposure May 2022 5. Solution to Settlement of Cooperation with PBM Olah Jasa Andal (OJA)	Arif Suhartono Hambra Ihsanuddin Usman Putut Sri Muljanto Mega Satria Boy Robyanto Prasetyo	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	
12	29 Juni 2022 June 29, 2022	1. *Update* Kerja Sama dengan INA 2. Permasalahan Lahan *Ex-President* Regional 2 Tanjung Priok 3. Permohonan Pengalihan Aset Lahan Pelindo oleh Pemerintah Kota Denpasar 4. *Minimum Throughput* pada Perhitungan *Revenue Sharing* Kerja Sama Internal Pelindo *Group* 1. Update on Cooperation with INA 2. Land Issues Ex-President Regional 2 Tanjung Priok 3. Request for Transfer of Pelindo Land Assets by Denpasar City Government 4. Minimum Throughput in Revenue Sharing Calculation of Pelindo Group Internal Cooperation	Arif Suhartono Hambra Ihsanuddin Usman Putut Sri Muljanto Mega Satria Boy Robyanto Prasetyo	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	
13	20 Juli 2022 July 20, 2022	1. CEO *Direction* 2. Pemurnian Bisnis *Chapter* II 3. Lain-Lain 4. *Update* Kerja Sama dengan INA 5. Laporan Kinerja TW II 2023 6. *Update* Restrukturisasi PMT dan PTP 1. CEO Direction 2. Chapter II of Business Refining 3. Other 4. Update on Cooperation with INA 5. Second Quarter of 2023 Performance Report 6. PMT and PTP Restructuring Update	Arif Suhartono Hambra Ihsanuddin Usman Putut Sri Muljanto Mega Satria Boy Robyanto Prasetyo	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
14	16 Agustus 2022 August 16, 2022	1. CEO *Direction* 2. Usulan PKB Pelindo (*Confidential*) 3. Perdir Mutasi (*Confidential*) 4. Skema Sentralisasi Pemeliharaan Alat 5. Aset Tanah di Terminal Kijing 6. Penghapusan Aset Kelurahan Lumpur Gresik 7. *Update Progress* Siak Bandaraya Melayu 8. Pengembangan Kawasan Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe 9. Laporan Kinerja s.d Juli 2023 10. Paparan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan 11. Penetapan Kreditur untuk Pembiayaan Perusahaan 12. Pemurnian Bisnis *Chapter* II 13. Kesiapan Hari Pelindo 1 Oktober 1. CEO Direction 2. Proposal of PKB Pelindo (Confidential) 3. Board of Directors Mutation Regulation (Confidential) 4. Equipment Maintenance Centralization Scheme 5. Land Assets at Kijing Terminal 6. Deletion of Gresik Mud Village Assets 7. Update on the Progress of Siak Melayu Airport 8. Arun Lhokseumawe Special Area (SEZ) Development 9. Performance Report up to July 2023 10. Presentation of Supervision of with Specific Objectives of Inspectorate General of the Ministry of Finance 11. Determination of Creditor for Company Financing 12. Chapter II of Business Refining 13. Readiness for Pelindo Day on October 1st	Arif Suhartono Hambra Ihsanuddin Usman Putut Sri Muljanto Mega Satria Boy Robyanto Prasetyo	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	
15	30 Agustus 2022 August 30, 2022	1. CEO *Direction* 2. Kerja Sama Pelindo dengan SUPS 3. *Monitoring Action Items* 4. Budaya Arsip 5. Tantiem BoD BoC Anper dan *Subholding* Tahun 2021 (*Confidential*) 1. CEO Direction 2. Pelindo's cooperation with SUPS 3. Monitoring Action Items 4. Archive Culture 5. Tantiem for BoD BoC of Subsidiaries and Subholding in 2021 (Confidential)	Arif Suhartono Hambra Ihsanuddin Usman Putut Sri Muljanto Mega Satria Boy Robyanto Prasetyo	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
16	13 September 2022 September 13, 2022	1. CEO *Direction* 2. *Update Progress* Kajian *Logistic Cost*, Kajian *ReMasterplan* Kuala Tanjung dan RJPP *Holding* 3. *Update Progress* Pemilihan Mitra NPEA 4. Usulan Penghapusan Aset Tetap Tahun 2023 5. Tantiem BoD BoC Anper dan *Subholding* Tahun 2022 6. Lain-lain 1. CEO Direction 2. Update Progress of Logistic Cost Study, Kuala Tanjung ReMasterplan Study and Holding RJPP 3. Update Progress of NPEA Partner Selection 4. Proposal of Fixed Assets Write-off in 2023 5. Tantiem for BoD BoC of Subsidiaries and Subholding in 2022 6. Others	Arif Suhartono Hambra Ihsanuddin Usman Putut Sri Muljanto Mega Satria Boy Robyanto Prasetyo	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Tidak Hadir Not Present Hadir Present Hadir Present	 Cuti Ibadah Worship Leave
17	27 September 2022 September 27, 2022	1. CEO *Direction* 2. *Update Progress* Pemurnian Bisnis Pelindo *Group* 3. *Update Progress* FS Ambon baru dan FS Palembang Baru 4. Penyampaian Kinerja s.d. Agustus 2022 dan Paparan *Draft* Awal RKAP 2024 5. Skema Insentif CMA/CGM untuk Layanan Jasa Pandu dan Tunda 1. CEO Direction 2. Update on Pelindo Group Business Refining Progress 3. Update on Progress of New Ambon FS and New Palembang FS 4. Submission of Performance up to August 2022 and Exposure of Initial Draft of 2024 RKAP 5. CMA/CGM Incentive Scheme for Guidance and Tug Services	Arif Suhartono Hambra Ihsanuddin Usman Putut Sri Muljanto Mega Satria Boy Robyanto Prasetyo	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	
18	11 Oktober 2022 October 11, 2022	1. CEO *Direction* 2. Penyelesaian Permasalahan Aset & Hutang PT Djakarta Lloyd di PT Pelabuhan Indonesia 3. Usulan Percepatan Penyerapan Investasi 2023 4. Penyampaian Laporan Usulan Investasi 2023 oleh Komite GRC 5. Rencana Pendanaan Perusahaan 6. Usulan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 2024 7. Rencana Skema Kerja Sama terkait Mitra PBM Petikemas di Tanjung Priok 8. *Update* re*Masterplan* Kuala Tanjung 9. *Update* rencana kerja sama LNG Benoa setelah 2024 10. *Update progress* rencana studi IKN 11. Lain-Lain	Arif Suhartono Hambra Ihsanuddin Usman Putut Sri Muljanto Mega Satria Boy Robyanto Prasetyo	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
		1. CEO Direction 2. Settlement of PT Djakarta Lloyd's Assets & Debts at PT Pelabuhan Indonesia 3. Proposal to Accelerate Investment Absorption 2023 4. Submission of the 2023 Investment Proposal Report by the GRC Committee 5. Company Funding Plan 6. Proposal of 2024 Company Budget Work Plan 7. Cooperation Scheme Plan related to Container PBM Partners in Tanjung Priok 8. Update on Kuala Tanjung reMasterplan 9. Update on Benoa LNG cooperation plan after 2024 10. Update on progress of IKN study plan 11. Others			
19	21 Oktober 2022 October 21, 2022	1. CEO *Direction* 2. Implementasi *Job Grading* (*confidential*) 3. Laporan Kinerja Perusahaan s.d. September 2022 dan *Update* Pengajuan RKAP 2024 4. Penyampaian Laporan Usulan Investasi 2023 oleh Komite GRC 5. Tindak lanjut PERMEN BUMN terkait Manajemen Risiko 6. *Update Progress* Pemurnian Bisnis Pelindo *Group* 7. Rencana Relokasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas Instansi Kementerian Perhubungan di Pelabuhan Belawan 8. Usulan Struktur Organisasi SSC 9. Lain-Lain 1. CEO Direction 2. Job Grading Implementation (confidential) 3. Company Performance Report up to September 2022 and Update on 2024 RKAP Submission 4. Submission of 2023 Investment Proposal Report by GRC Committee 5. Follow-up of SOE Regulation related to Risk Management 6. Update on Pelindo Group Business Refining Progress 7. Relocation Plan of Office Building and Agency House of the Ministry of Transportation at Belawan Port 8. Proposal of SSC Organization Structure 9. Others	Arif Suhartono Hambra Ihsanuddin Usman Putut Sri Muljanto Mega Satria Boy Robyanto Prasetyo	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Tidak Hadir Not Present	 Perjalanan Dinas Luar Negeri Overseas Business Trip
20	15 November 2022 November 15, 2022	1. *Update* Usulan RKAP 2023 dan Usulan Investasi (Capex) 2024 2. Perubahan Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 3. *Update Progress* Pemurnian Bisnis: a. Rekap Pemetaan Portofolio Bisnis; *Parenting Model* dan Peta Peran; Struktur Aksi Korporasi. b. Aksi Korporasi Spesifik: Rumah Sakit; Transformasi Rukindo; *Roadmap* Implementasi Pemurnian Bisnis." 4. Pembahasan *Progress* Pengurusan BPHTB, PNBP dan Ganti Nama Sertifikat 5. Penyelesaian Kepemilikan Tanah Di Kalibaru Barat Pelabuhan Tanjung Emas Antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Dengan PT Pertamina (Persero) 6. Lain-lain	Arif Suhartono Hambra Ihsanuddin Usman Putut Sri Muljanto Mega Satria Boy Robyanto Prasetyo	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Tidak Hadir Not Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	 Cuti Tahunan Annual Leave

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
		1. Update on the 2023 RKAP Proposal and 2024 Investment (Capex) Proposal 2. Amendment to the Board of Directors Regulation on Guidelines for Procurement of Goods and Services within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 3. Update on Business Refining Progress: a. Business Portfolio Mapping Recap; Parenting Model and Role Map; Corporate Action Structure. b. Specific Corporate Action: Hospital; Rukindo Transformation; Business Refining Implementation Roadmap." 4. Discussion on Progress of BPHTB, PNBP and Certificate Name Change. 5. Settlement of Land Ownership in Kalibaru West of Tanjung Emas Port Between PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Pertamina (Persero) 6. Others			
21	6 Desember 2022 December 6, 2022	1. CEO *Direction* 2. *Update Progress* Pemilihan Mitra NPEA 3. *Update* IT *Masterplan* 4. Rencana Pengoperasian LNG di BMTH 5. *Update Progress* BNCT 6. Penyesuaian *Revenue Sharing* Kerja Sama Operasi *Subholding* 7. Pembahasan Proposal Kerja Sama Pemanfaatan tanah HPL Pelabuhan Regional 2 Tanjung Priok dengan DKB 8. Lain-lain 1. CEO Direction 2. NPEA Partner Selection Progress Update 3. IT Masterplan Update 4. LNG Operation Plan at BMTH 5. BNCT Progress Update 6. Revenue Sharing Adjustment for Subholding Operation Cooperation 7. Discussion of Cooperation Proposal for Utilization of HPL land of Regional Port 2 Tanjung Priok with DKB 8. Others	Arif Suhartono Hambra Ihsanuddin Usman Putut Sri Muljanto Mega Satria Boy Robyanto Prasetyo	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	

Agenda dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi telah tersaji pada bagian Rapat Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan tahunan ini.

The agenda and participants for joint meeting of Board of Commissioners and Board of Directors have been presented in the Board of Commissioners Meeting section of Corporate Governance Chapter of this annual report.



FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF DIRECTORS

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Direksi Board of Directors Meetings		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	21	21	100%
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	21	21	100%
Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	21	20	95%
Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Capital and General Affairs	21	21	100%
Prasetyo	Direktur Strategi Director of Strategy	21	20	95%
Boy Robyanto	Direktur Investasi Director of Investment	21	21	100%
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	21	20	95%

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DIREKSI

Kebijakan Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Direksi dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perseroan, mengantisipasi masalah yang timbul di kemudian hari bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan. Ketentuan tentang program peningkatan kapabilitas bagi Direksi yang diatur dalam pedoman tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi.
2. Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan dalam RKAP.
3. Setiap anggota Direksi yang mengikuti program peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diminta untuk mempresentasikan kepada anggota Direksi lainnya dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan (*sharing knowledge*).

BOARD OF DIRECTORS TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT

Training and/or Competence Development of Members of the Board of Directors

Capability improvement is deemed important to enable Board of Directors to update their knowledge on the latest developments of the Company's core business, to anticipate problems that arise in the future for the Company's sustainability and progress. The provisions regarding Board of Directors capability improvement program are as follows:

1. The capability improvement program is carried out to improve the work effectiveness of Board of Directors.
2. The capability improvement program plan must be included in the RKAP.
3. Each member of Board of Directors who participates in capability improvement programs such as seminar and/or training is required to present to other members of Board of Directors for sharing knowledge.

	Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris Board of Directors and Board of Commissioners Joint Meetings			RUPS GMS		
	Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance			Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
	12	12	100%	2	2	100%
	12	12	100%	2	2	100%
	12	12	100%	2	2	100%
	12	12	100%	2	2	100%
	12	12	100%	2	2	100%
	12	12	100%	2	2	100%
	12	12	100%	2	2	100%

4. Anggota Direksi yang bersangkutan harus bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Direksi, selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyelenggaraan pelaksanaan program tersebut.

4. The member of Board of Directors concerned is obliged to make report on the capability improvement program. The report is submitted to Board of Directors, no later than 30 (thirty) days after the date of the program.

Adapun pelatihan yang telah diikuti oleh Direksi selama tahun 2022, yaitu:

The trainings that have been attended by Board of Directors during 2022 are:

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Materials	Tanggal/Tempat Date/Venue	Penyelenggara Organizer
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	*Executive Sharing session* TJSL	20 - 22 Januari 2022- Double Tree Hilton Jakarta January 20-22, 2022 – Double Tree Hilton Jakarta	PT Global Certification Indonesia
		Executive Developmental Workshop (EDW) Series 3	22 – 29 Juni 2022 – Los Angeles USA June 22–29, 2022 – Los Angeles USA	UCLA Extension
		Executive Sharing session TJSL	20 Oktober 2022- Pullman Hotel Jakarta October 20, 2022 – Pullman Hotel Jakarta	Interlink Technology Service

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Materials	Tanggal/Tempat Date/Venue	Penyelenggara Organizer
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	*Executive Sharing session* TJSL	20 - 22 Januari 2022- Double Tree Hilton Jakarta January 20-22, 2022 – Double Tree Hilton Jakarta	PT Global Certification Indonesia
		Executive Sharing session TJSL	20 Oktober 2022- Pullman Hotel Jakarta October 20, 2022 – Pullman Hotel Jakarta	Interlink Technology Service
Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	*Executive Sharing session* TJSL	20 - 22 Januari 2022- Double Tree Hilton Jakarta January 20-22, 2022 – Double Tree Hilton Jakarta	PT Global Certification Indonesia
		Executive Developmental Workshop (EDW) Series 3	22 – 29 Juni 2022 – Los Angeles USA June 22–29, 2022 – Los Angeles USA	UCLA Extension
		Executive Sharing session TJSL	20 Oktober 2022- Pullman Hotel Jakarta October 20, 2022 – Pullman Hotel Jakarta	Interlink Technology Service
Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director	*Executive Sharing session* TJSL	20 - 22 Januari 2022- Double Tree Hilton Jakarta January 20-22, 2022 – Double Tree Hilton Jakarta	PT Global Certification Indonesia
		Executive Developmental Workshop (EDW) Series 3	22 – 29 Juni 2022 – Los Angeles USA June 22–29, 2022 – Los Angeles USA	UCLA Extension
		Executive Sharing session TJSL	20 Oktober 2022- Pullman Hotel Jakarta October 20, 2022 – Pullman Hotel Jakarta	Interlink Technology Service
Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	*Executive Sharing session* TJSL	20 - 22 Januari 2022- Double Tree Hilton Jakarta January 20-22, 2022 – Double Tree Hilton Jakarta	PT Global Certification Indonesia
		Executive Sharing session TJSL	20 Oktober 2022- Pullman Hotel Jakarta October 20, 2022 – Pullman Hotel Jakarta	Interlink Technology Service

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Materials	Tanggal/Tempat Date/Venue	Penyelenggara Organizer
Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	*Executive Sharing session* TJSL	20 - 22 Januari 2022- Double Tree Hilton Jakarta January 20-22, 2022 – Double Tree Hilton Jakarta	PT Global Certification Indonesia
		Executive Training For Director & Commissioner	03 – 07 Oktober 2022 London, UK October 3–7, 2022 – London, UK	GLOMACS
		Executive Sharing session TJSL	20 Oktober 2022- Pullman Hotel Jakarta October 20, 2022 – Pullman Hotel Jakarta	Tiga Enterprise
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	*Executive Sharing session* TJSL	20 - 22 Januari 2022- Double Tree Hilton Jakarta January 20-22, 2022 – Double Tree Hilton Jakarta	PT Global Certification Indonesia
		Executive Sharing session TJSL	20 Oktober 2022- Pullman Hotel Jakarta October 20, 2022 – Pullman Hotel Jakarta	Interlink Technology Service

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Ketentuan tentang program pengenalan bagi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Kepada anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya, wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan.
2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapa pun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
3. Program pengenalan meliputi:
   a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
   b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
   c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; dan
   d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal lain yang tidak diperbolehkan.
4. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan.
5. Program pengenalan Perusahaan dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah RUPS memutuskan pengangkatan anggota Direksi yang baru.

Selama tahun 2022 tidak terdapat Direksi baru sehingga tidak terdapat pelaksanaan program orientasi bagi Direksi baru.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW BOARD OF DIRECTORS

The provisions regarding the orientation program for members of Board of Directors are as follows:

1. Members of Board of Directors who are appointed for the first time must be given an orientation program regarding the Company.
2. The responsibility for conducting the orientation program rests with the Corporate Secretary or anyone who performs the function as the Corporate Secretary.
3. The orientation program includes:
   a. Implementation of GCG principles by the Company;
   b. An overview of the Company in relation to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
   c. Information related to delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee; and
   d. Information regarding the duties and responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors as well as other prohibited matters.
4. The Company's orientation program can be in the form of presentations, meetings, visits to Company facilities and review of documents or other programs deemed appropriate to the Company.
5. The Company's orientation program is carried out no later than 90 (ninety) calendar days after the GMS decides on the appointment of new members of Board of Directors.

During 2022, there were no new Directors, hance no orientation program for new Directors was held.

KEPUTUSAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Direksi selama tahun 2022 antara lain sebagai berikut.

BOARD OF DIRECTORS› DECISIONS AND IMPLEMENTATION OF DUTIES

The decisions issued by Board of Directors in 2022 are as follows. In accordance with their duties and responsibilities, during 2022

No.	Nomor Keputusan Decision Number	Perihal Subject
1	HK.01/5/1/1/PSOG/SDMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Guidelines for Implementing Workload Analysis in PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
2	HK.01/17/1/1/PTUD/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Kebijakan Administrasi Keuangan untuk Pembayaran Beban Dewan Komisaris, Direksi, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Guidelines for Financial Administration Policy for Payment of Expenses for the Board of Commissioners, Board of Directors and Supporting Organs of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
3	HK.01/21/1/1/PGBS/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Pengembangan Bisnis di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Business Development Guidelines within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
4	HK.01/24/1/1/ADPG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Guidelines for the Procurement of Goods and Services within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
5	HK.01/26/1/1/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Sub Regional pada Regional 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Organizational Structure and Sub-Regional Governance in PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3
6	HK.01/26/1/2/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola pada Regional 1 Cabang Belawan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Organizational Structure and Governance in PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Belawan Branch
7	HK.01/26/1/3/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola pada Regional 1 Cabang Tanjung Balai Karimun PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Organizational Structure and Governance in PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Tanjung Balai Karimun Branch
8	HK.01/26/1/4/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola pada Regional 1 Cabang Tanjung Pinang PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Organizational Structure and Governance in PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Tanjung Pinang Branch
9	HK.01/26/1/5/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/31/12/1/PSOG/UTMA/PLND-21 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Cabang/Terminal/Unit Pelayanan Kepelabuhanan pada Regional 4 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Amendments to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation Number: HK.01/31/12/1/PSOG/UTMA/PLND-21 dated December 31 2021 Concerning Organizational Structure and Governance of Regional 4Branches/Terminals/Port Service Units

No.	Nomor Keputusan Decision Number	Perihal Subject
10	HK.01/1/2/1/SPAP/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Kebijakan Pengelolaan Bidang SDM pada *Subholding*, Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi, dan Kerjasama Operasi (KSO) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning HR Management Policy in PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Subholdings, Subsidiaries, Affiliated Companies, and Joint Operations (KSO)
11	HK.01/2/2/1/PRKU/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Kantor Pusat dan Regional Tahun 2022 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Determination of the Company's 2022 Work Plan and Budget (RKAP) for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Head Office and Regional Offices
12	KU.02.08/9/2/1/ASTP/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Penyimpanan Bukti Kepemilikan Aset Milik Perusahaan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Guidelines for Keeping Evidence of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Company-Owned Assets
13	HK.01/11/2/1/PBEN/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Kebijakan Administrasi Keuangan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Guidelines for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Financial Administration Policies
14	HK.01/15/2/1/PSBL/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman *Knowledge Management* di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Guidelines for Knowledge Management
15	HK.01/18/2/1/PSBL/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pembelajaran Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Employee Learning
16	HK.01/24/2/1/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Sub Regional pada Regional 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Organizational Structure and Sub-Regional Governance
17	HK.01/24/2/6/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Perubahan Kedua Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/31/12/1/PSOG/UTMA/PLND-22 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Cabang/Terminal/Unit Pelayanan Kepelabuhanan pada Regional 4 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning the Second Amendment to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation Number: HK.01/31/12/1/PSOG/UTMA/PLND-22 December 31, 2021 concerning Regional 4 Branches/Terminals/Port Service Units Organizational Structure and Governance
18	HK.01/24/2/5/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola pada Regional 1 Cabang Pekanbaru PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Pekanbaru Branch Organizational Structure and Governance
19	HK.01/24/2/3/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola pada Regional 1 Cabang Lhokseumawe PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Lhokseumawe Branch Organizational Structure and Governance

No.	Nomor Keputusan Decision Number	Perihal Subject
20	HK.01/24/2/2/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola pada Regional 1 Cabang Malahayati PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Malahayati Branch Organizational Structure and Governance
21	HK.01/24/2/4/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola pada Regional 1 Cabang Kuala Tanjung PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Kuala Tanjung Branch Organizational Structure and Governance
22	HK.01/24/2/1/ADPG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Petunjuk Teknis Peraturan Direksi Nomor: HK.01/24/1/1/ADPG/UTMA/PLND-22 Tanggal 24 Januari 2022 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Technical Instructions for Board of Directors Regulation Number: HK.01/24/1/1/ADPG/UTMA/PLND-22 dated January 24,2022 concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
23	HK.01/24/2/2/ADPG/UTMA/PLND-22	Buku I Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Book I concerning Technical Guidelines for Procurement of Goods and Services within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
24	HK.01/24/2/3/ADPG/UTMA/PLND-22	Buku II Tentang Petunjuk Teknis Standar Dokumen Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Book II concerning Standard Technical Guidelines for Selection of Goods and Services Procurement Providers within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
25	HK.01/24/2/4/ADPG/UTMA/PLND-22	Buku III Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Book III concerning Technical Guidelines for Electronic Procurement of Goods and Services within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
26	HK.01/24/2/5/ADPG/UTMA/PLND-22	Buku IV Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Book IV concerning Technical Guidelines for Procurement of Goods and Services Through Electronic Catalogs (e-Catalogue) within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
27	HK.01/24/2/6/ADPG/UTMA/PLND-22	Buku V Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Melalui *Contract Management System* (CMS) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Book V concerning Technical Guidelines for Contract Management for Procurement of Goods and Services Electronically Through the Contract Management System (CMS) within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
28	HK.01/25/2/1/PSBL/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Program Magang dan Penelitian di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning the Internship and Research Programs in PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
29	HK.01/11/3/1/PKPN/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Pengendalian Anggaran dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Guidelines for Compilation of Company Work Plans and Budgets, Budget Control and Performance Reporting within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

No.	Nomor Keputusan Decision Number	Perihal Subject
30	HK.01/14/3/1/HBUP/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Tugas dan Wewenang Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning the Duties and Authorities of the Examination Team for Employee Discipline Violations within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
31	HK.01/17/3/1/PSBL/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pengelolaan Tenaga Pengajar di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning the Management of Teaching Personnel in PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
32	HK.01/25/3/1/HLTI/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Working Procedures Guidelines for the Board of Commissioners and Board of Directors (Board Manual) of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
33	HK.01/25/3/2/HLTI/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman *Good Corporate Governance* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Good Corporate Governance Guidelines
34	HK.01/25/3/3/HLTI/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Gratification Control Guidelines in PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
35	HK.01/25/3/4/HLTI/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Kode Etik Bisnis PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Code of Business Ethics Guidelines in PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
36	HK.01/25/3/5/HLTI/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Whistleblowing System Guidelines in PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
37	HK.01/30/3/1/ASTP/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Tata Cara Pengelolaan Administrasi Aset Tetap di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Procedures for Administrative Management of Fixed Assets in PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
38	HK.01/31/3/1/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Sub Regional Pada Regional 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Organizational Structure and Sub-Regional Governance
39	HK.01/31/3/2/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Perubahan Ketiga Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/31/12/1/PSOG/UTMA/PLND-22 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Cabang/Terminal/Unit Pelayanan Kepelabuhanan pada Regional 4 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning the Third Amendment to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation Number: HK.01/31/12/1/PSOG/UTMA/PLND-22 dated December 31, 2021 concerning Regional 4Branches/Terminals/Port Service Units Organizational Structure and Governance

No.	Nomor Keputusan Decision Number	Perihal Subject
40	HK.01/1/4/1/SPAP/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris *Subholding*, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerja Sama Operasi (KSO) di Lingkungan Group Bisnis Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Guidelines for Determining the Board of Directors and Board of Commissioners Remuneration in Subholdings, Subsidiaries and Affiliated Companies as well as the Joint Operations (KSO) Management Board and Supervisory Board within the Company's Business Group
41	HK.01/1/4/1/KBLG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Kebijakan dan Strategi *Key Account Management* di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Policy Guidelines and Key Account Management Strategies in PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
42	HK.01/1/4/1/KPTN/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Pemeriksaan Kepatuhan Hukum Atas Dokumen Perusahaan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Guidelines for Legal Compliance Examination of Company Documents within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
43	HK.01/4/4/1/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Organisasi Satuan Kerja Manajemen Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning the Organization of the Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) Project Management Unit
44	HK.01/13/4/1/PRKP/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Kerja Manajemen (RKM) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Guidelines for the Preparation and Management of Management Work Plans (RKM) within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
45	HK.01/26/4/1/NTPK/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Kebijakan dan Pedoman Relokasi Peralatan Pelabuhan (Alat Fasilitas Terminal) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Policy and Guidelines for Port Equipment Relocation (Terminal Facility Equipment) within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
46	HK.01/28/4/1/KAPN/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/31/12/1/KAPN/UTMA/PLND-21 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Amendments to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation Number: HK.01/31/12/1/KAPN/UTMA/PLND-21 dated December 31, 2021 concerning Guidelines for Official Document Arrangements within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
47	HK.01/9/5/1/KPTN/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Implementation of the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Anti-Bribery Management System
48	HK.01/10/5/1/INSD/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang SDM pada Regional di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Delegation of Authority in the Regional HR Sector within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

No.	Nomor Keputusan Decision Number	Perihal Subject
49	HK.01/10/5/1/MRNO/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/30/12/1/MRNO/UTMA/PLND-2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengasuransian Aset, Inventaris, Tanggung Gugat dan Gangguan Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Amendments to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation Number: HK.01/30/12/1/MRNO/UTMA/PLND-2021 concerning Guidelines and Procedures for Asset Insurance, Inventory, Liabilities and Business Interruption within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
50	HK.01/10/5/1/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Organisasi Satuan Kerja Implementasi *Single Enterprise Resource Planning* (ERP) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Single Enterprise Resource Planning (ERP) Work Unit Organization Implementation
51	HK.01/11/5/1/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Honorarium Narasumber dan Rapat di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Guidelines for Honorarium for Meeting Resource Persons in PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
52	HK.01/11/5/1/KAPN/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pola dan Kode Klasifikasi Arsip PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Pattern and Classification Codes of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Archives
53	HK.01/12/5/1/KAPN/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Organizational Structure and Governance
54	HK.01/17/5/1/KIRF/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pemberian Fasilitas untuk Pekerja Tertentu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Provision of Facilities for Specific workers in PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
55	HK.01/19/5/1/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pembagian Peran dan Tanggung Jawab di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Division of Roles and Responsibilities within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
56	HK.01/19/5/2/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pendelegasian Wewenang (*Delegation of Authority*) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Delegation of Authority within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
57	HK.01/20/5/1/KAPN/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning the Security Classification System and Dynamic Archive Access Rights within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
58	HK.01/23/5/1/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Organisasi Satuan Kerja Manajemen Proyek JICT Koja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning the JICT Koja Project Management Work Unit Organization
59	HK.01/23/5/2/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Organisasi Satuan Kerja Manajemen Proyek Makassar *New Port* (MNP) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning the Makassar New Port Project Management Work Unit (MNP) Organization

No.	Nomor Keputusan Decision Number	Perihal Subject
60	HK.01/30/5/1/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kelola Cabang/Terminal/Unit Pelayanan Kepelabuhanan Pada Regional 4 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning the Regional 4 Branches/Terminals/Port Service Units Organizational Structure and Governance
61	HK.01/30/5/1/KPTN/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Penyusunan dan Tata Urutan Peraturan Perusahaan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning the Compilation and Sequence of Company Regulations within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
62	HK.01/6/6/1/ILKU/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Pedoman Administrasi Layanan Keuangan (*Shared Service Center*) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Guidelines for Administration of Financial Services (Shared Service Center) within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
63	HK.01/9/6/1/PRIN/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Anggaran Investasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Investment Budget Guidelines in PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
64	HK.01/17/6/1/KIRF/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pelindo Purnakarya PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Pension Fund Regulations for the Pelindo Purnakarya Pension Fund
65	HK.01/30/6/1/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Organisasi dan Tata Kelola Regional 1 Pekanbaru PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Pekanbaru Organization and Governance
66	HK.01/12/7/1/KPRR/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pelayanan Terminal Penumpang untuk Penumpang Kapal Domestik dan Internasional di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Passenger Terminal Services for Domestic and International Passengers within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
67	HK.01/18/7/1/PMDN/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Buku Panduan (*Guidebook*) Standardisasi Operasional Pelayanan Kapal dan Pelayanan Terminal di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning the Operational Standardization of Ship Services and Terminal Services Guidebook within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
68	HK.01/18/7/1/PPLP/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Implementation of Social and Environmental Responsibility (SER) Guidelines within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
69	HK.01/21/7/1/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/12/5/1/PSOG/UTMA/PLND-22 Tanggal 12 Mei 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Amendments to the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation Number: HK.01/12/5/1/PSOG/UTMA/PLND-22 dated May 12, 2022 concerning the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Organizational Structure and Governance

No.	Nomor Keputusan Decision Number	Perihal Subject
70	HK.01/28/7/1/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pencabutan Atas Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor PD 4 Tahun 2021 Tanggal 15 Januari 2021 Tentang *Strategic Business Unit* (SBU) Pelayanan Peti Kemas PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning the Revocation of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Board of Directors Regulation Number PD 4 of 2021 dated January 15, 2021 concerning Strategic Business Unit (SBU) Container Services
71	HK.01/1/8/1/MRIO/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Penetapan Pernyataan Selera Risiko (*Risk Appetite Statement)* dan Pernyataan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance Statement*) Direksi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning the Board of Directors Determination of the Risk Appetite Statement and Risk Tolerance Statement within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
72	HK.01/15/8/1/KPIU/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Individu di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Guidelines for Managing Individual Performance within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
73	HK.01/15/8/1/SEBL/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi tentang program beasiswa magister (S-2) dan Doktoral (S-3) bagi pekerja di lingkungan Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Masters (S-2) and Doctoral (S-3) scholarship programs for Pelabuhan Indonesia (Persero) employees
74	HK.01/31/8/1/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/30/5/1/PSOG/UTMA/PLND-22 Tanggal 30 Mei 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Cabang dan Unit Pelayanan Kepelabuhanan Pada Regional 4 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Amendments to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation Number: HK.01/30/5/1/PSOG/UTMA/PLND-22 dated May , 2022 concerning Regional 4 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Organizational Structure and Management of Branches and Port Service Units
75	HK.01/3/10/1/BNPL/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi Tentang Pelayanan Jasa Kapal di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Ship Services in PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
76	HK.01/3/10/1/KMKP/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Guidelines for Implementation of Public Information Disclosure in PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
77	HK.01/6/10/1/RKTK/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pendelegasian Kewenangan Mutasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning the Delegation of Authority Transfers within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
78	HK.01/13/10/1/MRNO/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Anggaran Investasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Investment Budget
79	HK.01/20/10/1/LAUH/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Jasa Terkait Kepelabuhanan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Guidelines for Port Services and Port-Related Services within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

No.	Nomor Keputusan Decision Number	Perihal Subject
80	HK.01/21/10/1/KOMS/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Aset Properti di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Guidelines for Management and Operation of Property Assets within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
81	HK.01/25/10/1/MNMT/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Sistem Manajemen Terpadu di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Integrated Management System Guidelines within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Environment
82	HK.01/1/11/1/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pencabutan Atas Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor PD 5 Tahun 2021 Tanggal 15 Januari 2021 Tentang Pembentukan *Project Management Office* (PMO) Transformasi Pelayanan Kapal PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Revocation of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Board of Directors Regulation Number PD 5 of 2021 dated January 15, 2021 concerning the Formation of a Project Management Office (PMO) for the Transformation of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Ship Services
83	HK.01/1/11/2/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pencabutan Atas Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor PD 6 Tahun 2021 Tanggal 15 Januari 2021 Tentang Pembentukan *Project Management Office* (PMO) Transformasi Peti Kemas PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Revocation of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Board of Directors Regulation Number PD 6 of 2021 dated January 15, 2021 concerning the Formation of a Project Management Office (PMO) for Container Transformation of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
84	HK.01/9/11/1/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Struktur Organisasi *Shared Services Center* (SSC) Bidang SDM dan Pengadaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning the Shared Services Center (SSC) for Human Resources and Procurement Organizational Structure
85	HK.01/24/11/1/PGPF/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Manajemen Proyek di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Project Management Guidelines within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
86	HK.01/25/11/1/PSOG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pencabutan Atas Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PR.01/2/10/PI-20.TU Tanggal 3 Desember 2020 Tentang *Project Management* Pengadaan Tanah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning the Revocation of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Board of Directors Regulation Number PR.01/2/10/PI-20.TU dated December 3, 2020 Concerning Land Acquisition Project Management
87	HK.01/28/11/1/PMO5/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pengelolaan Proyek dengan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Project Management with Additional State Equity Participation (PMN) within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
88	HK.01/1/12/1/ADPG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Procurement of Goods and Services Guidelines within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

No.	Nomor Keputusan Decision Number	Perihal Subject
89	HK.01/5/12/1/KSMG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi Tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Wewenang Bidang SDM dan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Shared Service Centre (SSC) Board of Directors Regulation Concerning Main Duties and Functions and Authorities in the Field of Human Resources and Procurement of Goods and Services at the Shared Service Center (SSC)
90	HK.01/9/12/1/PRKP/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Pengelolaan Inovasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation concerning Innovation Management
91	HK.01/9/12/1/KIRF/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi Tunjangan *Regional Head* Board of Directors Regulation Concerning Regional Head Allowance
92	HK.01/26/12/1/SKKS/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi Tentang Pendanaan Eksternal Board of Directors Regulation Concerning External Funding
93	HK.01/28/12/1/BNPL/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi Tentang Pedoman Bina Pelanggan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation Concerning Guidelines for Customer Development within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
94	HK.01/29/12/1/SPGI/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi Tentang Pedoman Audit Berbasis Risiko Board of Directors Regulation Concerning Risk-Based Audit Guidelines
95	HK.01/29/12/2/SPGI/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi Tentang Pelaksanaan *Remote* Audit Board of Directors Regulation Concerning Implementation of Remote Audits
96	HK.01/29/12/3/SPGI/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi Pedoman Sinergi Bidang Audit Pelindo Board of Directors Regulation Concerning Guidelines for Pelindo Audit Synergy
97	HK.01/29/12/4/SPGI/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi Pedoman Umum Satuan Pengawasan Intern Board of Directors Regulation Concerning General Guidelines for the Internal Audit Unit
98	HK.01/29/12/5/SPGI/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi Pengelolaan Satuan Pengawasan Intern Board of Directors Regulation Concerning Internal Control Unit Management
99	HK.01/30/12/1/STIG/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi Tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Strategi, Implementasi dan Pemantauan Program Kerja Strategis Integrasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation Concerning Guidelines for Preparing and Managing Strategy, Implementation and Monitoring of Integration Strategic Work Programs within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
100	HK.01/9/12/1/PRKP/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Pengelolaan Inovasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation Concerning Innovation Management
101	HK.01/9/12/1/KIRF/UTMA/PLND-22	Peraturan Direksi Tunjangan *Regional Head* Board of Directors Regulation Concerning Regional Head Allowances

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2022 Direksi telah menjalankan tugasnya untuk pengurusan Perseroan. Adapun tugas yang telah dilakukan oleh Direksi antara lain:

1. Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2022.
2. Menggelar rapat Direksi yang pada tahun 2022.
3. Menyusun RKAP dan RKM Perseroan Tahun 2022.
4. Membuat Pakta Integritas dalam rangka penerapan GCG, Kepatuhan Kode Etik Bisnis, Surat Pernyataan Benturan Kepentingan, Daftar Khusus Kepemilikan Saham.
5. Menghadiri rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.

the Board of Directors has carried out their duties in managing the Company, as follows:

1. Prepared an Annual Report and Sustainability Report for 2022 Fiscal Year.
2. Held Board of Directors meetings in 2022.
3. Prepared the Company's RKAP and RKM for 2022.
4. Made an Integrity Pact in the context of GCG implementation, Compliance with the Code of Conduct, Statement of Conflict of Interest, Special Register of Share Ownership.
5. Attending Board of Commissioners meetings inviting the Directors.

6. Melakukan kunjungan kerja ke Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan.
7. Melakukan rapat kerja nasional yang dihadiri oleh seluruh Direksi, seluruh Manajerial Kantor Pusat, *General Manager* Cabang Pelabuhan dan Direksi Anak Perusahaan.
8. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya.
9. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham terkait Pengesahan RKAP 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Tahunan.
10. Melakukan hapus buku piutang pokok macet, bunga, denda, dan/atau ongkos yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Pemegang Saham.
11. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam berbagai bidang mencakup bisnis, operasional dan *support*.
12. Melaksanakan kegiatan edukasi dalam rangka peningkatan pemahaman mengenai dunia kepelabuhanan.
13. Memastikan Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha.
14. Mewakili Perseroan di dalam dan luar Pengadilan yang mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan.
15. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk gaji, pensiun, promosi, pelatihan, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan lainnya.
16. Melaksanakan kegiatan CSR, selama tahun 2022 telah tersalur dana CSR untuk kegiatan sosial kemasyarakatan maupun lingkungan.
17. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan.
18. Menetapkan kebijakan lainnya untuk Perusahaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh 2 (dua) Komite di bawah Direksi, yang terdiri dari Komite Pelindo Bersih dan Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi secara periodik dengan kriteria penilaian kinerja Komite di bawah Direksi berdasarkan rapat dan pelaksanaan tugas yang telah dijalankan selama tahun buku.

Komite Pelindo Bersih merupakan komite yang membantu Direksi dalam Melakukan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan WBS Perseroan serta menyelesaikan laporan WBS yang telah masuk. Selama tahun 2022, Komite Pelindo Bersih telah melaksanakan rapat sebanyak 9 (Sembilan) kali. 4 (empat) laporan WBS yang masuk telah ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Direktur Utama.

Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan merupakan komite yang membantu Direksi dalam mendukung peningkatan kinerja dan transformasi bisnis yang memperhatikan aspek tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan terkait

6. Conducted working visit to Port Branches and Subsidiaries;
7. Conducting national work meetings attended by all Directors, all Managerial Head Offices, General Managers of Port Branches and Directors of Subsidiaries;
8. Prepared the organizational structure of the Company, with complete details of duties;
9. Held General Meeting of Shareholders on 2022 RKAP Ratification and General Meeting of Shareholders on Annual Report.
10. Wrote off bad debt principal, interest, fines, and/or fees which were then reported to the Board of Commissioners and obtain the Shareholders' approval.
11. Cooperating with third parties in various fields including business, operations and support.
12. Carried out educational activities in order to increase understanding of the port world.
13. Ensuring the Implementation of Good Corporate Governance in every business activity.
14. Representing the Company inside and outside the Court which binds the Company to other parties and/or other parties to the Company.
15. Regulated provisions regarding the Company's employment including salaries, pensions, promotions, training, old age security, health insurance, and others.
16. Carried out CSR activities, and in 2022 CSR funds have been channeled for social and environmental activities;
17. Implementation of other tasks related to the management of the Company.
18. Established other policies for the Company in accordance with statutory provisions.

PERFORMANCE APPRAISAL OF COMMITTEES UNDER BOARD OF DIRECTORS AND THE BASIS OF APPRAISAL

In carrying out its management duties, Board of Directors is assisted by 2 (two) Committees under Board of Directors, consisting of Pelindo Bersih Committee and Governance, Risk Management and Compliance Committee. The performance evaluation of Committees under Board of Directors is carried out by Board of Directors periodically with the criteria based on meetings and implementation of duties during the fiscal year.

Pelindo Bersih Committee is a committee that assists the Board of Directors in supervising the effectiveness of the Company's WBS and completing WBS reports that have been submitted. During 2022, Pelindo Bersih Committee has held 9 (nine) meetings. 4 (four) incoming WBS reports have been followed up and reported to the President Director.

Governance, Risk Management and Compliance Committee is a committee that assists the Board of Directors in supporting performance improvement and business transformation that takes into account the aspects of good corporate governance, risk management and compliance in the Company's decision-

dengan pengelolaan investasi, kebijakan strategis operasional Perseroan dan pengendalian kegiatan strategis usaha grup Pelindo. Selama tahun 2022, Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan membahas rencana aksi korporasi restrukturisasi Entitas anak serta finalisasi usulan investasi.

Sepanjang tahun 2022, Direksi menilai bahwa Komite di bawah Direksi tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Para anggota Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena alasan salah satu di bawah ini:

1. Meninggal dunia.
2. Permohonan sendiri.
3. Pengalihan tugas.
4. Cacat fisik dan/atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik.
5. Terlibat dalam tindak pidana kejahatan.
6. Tidak mampu melaksanakan tugas.
7. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
8. Tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar.
9. Alasan-alasan lain yang dapat diterima RUPS.

making process related to investment management, the Company's strategic operational policies and activity control Pelindo group business strategy.During 2022, the Governance, Risk Management and Compliance Committee held 2 (two) meetings to discuss corporate action plans for restructuring subsidiaries and finalizing investment proposals.

Throughout 2022, Board of Directors considered that the Committees under Board of Directors had carried out their duties and responsibilities well.

BOARD OF DIRECTORS RESIGNATION AND DISMISSAL MECHANISM

Members of Board of Directors are dismissed before their term of office ends for any of the following reasons:

1. Passed away.
2. Own request.
3. Transfer of assignment.
4. Physical and/or mental disabilities that result in not being able to carry out their duties properly.
5. Engage in criminal acts of crime.
6. Unable to carry out the task.
7. Does not carry out their duties properly.
8. Not applying the provisions in the Articles of Association.
9. Other reasons that can be accepted by the GMS.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komsiaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisars berwenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen Perusahaan, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, memeriksa surat berharga serta kekayaan Perusahaan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
8. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
13. Dewan Komisaris harus segera merespon informasi yang diterima dari Direksi setiap terjadinya perubahan lingkungan yang berpengaruh signifikan pada kinerja Perusahaan.

BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is a corporate organ whose task is to supervise and provide advice to the Board of Directors in carrying out the Company's management activities.

BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES AND AUTHORITIES

Board of Commissioners Duties

Board of Commissioners is tasked with supervising the Company's management policies, the general management of both the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors, including supervising the implementation of RJPP, RKAP and Articles of Association and GMS resolutions, as well as prevailing laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

Board of Commissioners Authorities

In carrying out its supervisory duties, Board of Commissioners has the authority to:

1. Look at the Company's books, letters and documents, examine cash for verification purposes and others, examine the Company's securities and assets;
2. Entering the grounds, buildings and offices used by the Company;
3. Request an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues related to the management of the Company;
4. Acknowledge all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;
5. Requesting the Board of Directors and/or other officials under the Directors, under their consent, to attend the Board of Commissioners meetings;
6. Appoint and dismiss the Secretary of Board of Commissioners, if deemed necessary;
7. Temporarily dismiss members of Board of Directors in accordance with the Articles of Association;
8. Temporarily dismiss members of Board of Directors in accordance with the Articles of Association;
9. Using experts for certain matters and within a certain period of time at the expense of the Company, if deemed necessary;
10. Carry out management actions of the Company under certain conditions for a certain period of time in accordance with the Articles of Association;
11. Attend Board of Directors meetings and provide views on matters discussed;
12. Carry out other supervisory authorities as long as they do not conflict with laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS decisions.
13. Board of Commissioners must immediately respond to information received from the Board of Directors whenever there is a change in the environment that has significant effect on the Company's performance.

TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS;
2. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
3. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
4. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas;
5. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Angka 4 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS UTAMA

1. Bertanggung jawab sebagai Koordinator umum Dewan Komisaris;
2. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris;
3. Mengkoordinasikan serta memastikan pelaksanaan tugas dan Rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.

KEPUTUSAN YANG PERLU MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Perbuatan-perbuatan Direksi yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris yaitu:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
2. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BOwT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan RUPS;
3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada Anak Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
7. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern;
8. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.

BOARD OF COMMISSIONERS RESPONSIBILITIES

1. In carrying out its duties, Board of Commissioners is accountable to the GMS;
2. Board of Commissioners supervises management policies, general management of both the Company and the Company's business, and provides advice to the Board of Directors;
3. Each member of Board of Commissioners must be in good faith, prudent and responsible in carrying out supervisory and advisory duties to the Board of Directors;
4. Each member of Board of Commissioners is personally responsible for the loss of the Company if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his/her duties as referred to in Number 3 above;
5. In the event that Board of Commissioners consists of 2 (two) members of Board of Commissioners or more, the responsibilities referred to in Number 4 apply jointly and severally to each member of Board of Commissioners.

PRESIDENT COMMISSIONER'S DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Responsible as general coordinator of the Board of Commissioners;
2. Calls Board of Commissioners' meetings in writing to all members of the Board of Commissioners;
3. Coordinates and ensures the Board of Commissioners' duties and meetings are implemented in accordance with applicable regulations.

DECISIONS REQUIRING BOARD OF COMMISSIONERS' APPROVAL

The Board of Directors' actions that must first obtain approval from Board of Commissioners are:

1. Collateralize fixed assets for short-term credit withdrawals;
2. Establish cooperation with business entities or other parties in the form of licensing cooperation, management contracts, leasing assets, Joint Operations (JO), Build Operate Transfers (BOT), Build Own Transfers (BOwT), Build Transfer Operate (BTO) and other collaborations with a certain value or period of time determined by the GMS;
3. Receive or provide medium/long term loans, except for loans (payables or receivables) arising from business transactions, and loans granted to Subsidiaries with the condition that loans to Subsidiaries are reported to the Board of Commissioners;
4. Eliminating bad debts and dead goods inventory from the books;
5. Releasing movable fixed assets with an economic age that is generally valid in the industry in general up to 5 (five) years;
6. Establish an organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors;
7. Appoint and dismiss the Head of Internal Audit Unit;
8. Appoint and dismiss the Corporate Secretary.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

BOARD OF COMMISSIONERS TENURE

Members of Board of Commissioners are appointed for a period of 5 (five) years and may be reappointed for 1 (one) term of office. Members of Board of Commissioners may be dismissed at any time based on the decision of the GMS by stating the reasons.

PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Persyaratan Umum

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

1. Dinyatakan pailit.
2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit.
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Pemenuhan persyaratan tersebut, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perusahaan.

Persyaratan Lainnya

Selain memenuhi persyaratan umum, pengangkatan anggota Dewan Komisaris juga dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CRITERIA FOR BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERS

General requirement

Those who can be appointed as members of Board of Commissioners are individuals who are capable of carrying out legal actions, unless within 5 (five) years prior to their appointment they have:

1. Been declared bankrupt.
2. Become a member of Board of Directors or Board of Commissioners or Supervisory Board who is found guilty of causing a Company or general Company to be declared bankrupt.
3. Been sentenced for committing a crime that is detrimental to the State's finances and/or related to the financial sector.

The fulfillment of these requirements is evidenced by a statement signed by the candidate for Board of Commissioners member and the letter is kept by the Company.

Other Requirements

In addition to meeting the general requirements, Board of Commissioners member is also appointed by taking into account the requirements stipulated in prevailing laws and regulations.

PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (*BOARD MANUAL*)

Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) telah disahkan berdasarkan Peraturan Direksi No. HK.01/25/3/I/HLTI/UTMA/PLND.22. Ruang lingkup Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Pelindo mengatur dan menjelaskan pola hubungan kerja yang baku antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, agar tercipta tata Kelola perusahaan yang baik, professional, transparan, efektif dan efisien.

Adapun isi dari Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dijelaskan secara khusus dalam Bab III, yang mencakup:

1. Fungsi Dewan Komisaris;
2. Keanggotaan Dewan Komisaris;
3. Etika Jabatan Dewan Komisaris;
4. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris;
5. Kewajiban Dewan Komisaris;
6. Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
7. Hak Dewan Komisaris;
8. Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris;
9. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas;
10. Organ Pendukung Dewan Komisaris;
11. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris;
12. Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris.

BOARD MANUAL OF BOARD OF COMMISSIONERS

Direksi (Board Manual) telah disahkan berdasarkan Peraturan Direksi No. HK.01/25/3/I/HLTI/UTMA/PLND.22. Ruang lingkup Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) Pelindo mengatur dan menjelaskan pola hubungan kerja yang baku antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, agar tercipta tata Kelola perusahaan yang baik, professional, transparan, efektif dan efisien.

The contents of Board Manual of Board of Commissioners are described specifically in Chapter III, which includes:

1. Functions of Board of Commissioners;
2. Membership of Board of Commissioners;
3. Ethics of Board of Commissioners;
4. Duties and Authorities of Board of Commissioners;
5. Obligations of Board of Commissioners;
6. Responsibilities of Board of Commissioners;
7. Rights of Board of Commissioners;
8. Principles of Board of Commissioners Decision Making of;
9. Induction and Capability Improvement Program;
10. Supporting Organs of Board of Commissioners;
11. Performance Appraisal of Board of Commissioners;
12. Criteria of Performance Evaluation of Board of Commissioners.

PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Pembidangan tugas Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 09/KEP-DK/PI/X-2022 tanggal 13 Oktober 2022. Adapun pembagian tugas anggota Dewan Komisaris Pelindo adalah sebagai berikut.

BOARD OF COMMISSIONERS DIVISION OF DUTIES

The division of duties of Board of Commissioners is based on the Decree of Board of Commissioners No. 09/KEP-DK/PI/X-2022 dated October 13, 2022. The division of duties for members of Board of Commissioners of Pelindo is as follows.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris
Board of Commissioners Division of Duties

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Duties
Marsetio	Plt. Komisaris Utama/Komisaris Independen Acting President Commissioner/ Independent Commissioner	Koordinator umum, bidang remunerasi, dan sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi General coordinator, remuneration sector, and as Chairman of Nomination and Remuneration Committee
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Bidang operasional dan sistem informasi dan sebagai Wakil Ketua Komite Audit Operations and information systems and as Deputy Chairman of Audit Committee
Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	Bidang sumber daya manusia, hukum, pengadaan barang dan jasa, dan sebagai Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Human capital, legal, procurement of goods and services, and as Deputy Chairman of Nomination and Remuneration Committee
Arif Toha Tjahjagama	Komisaris Commissioner	Bidang transformasi dan pengembangan bisnis dan sebagai Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Business transformation and development and as Deputy Chairman of Nomination and Remuneration Committee
Antonius Rainier Haryanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Bidang Teknik, komersial, manajemen risiko dan sebagai Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Engineering, commercial, risk management and as Chairman of GCG and Risk Management Monitoring Committee
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Bidang audit, keuangan dan sebagai Ketua Komite Audit Audit, finance and as Chairman of Audit Committee
Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner	Bidang Sosial, tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan kemasyarakatan dan sebagai Wakil Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Social, social and environmental responsibility, and community affairs and as Deputy Chairman of GCG and Risk Management Monitoring Committee

*Berhenti menjabat sejak tanggal 20 September 2022
**Mulai menjabat sejak tanggal 20 September 2022
*No longer served since September 20, 2022
**Started serving since September 20, 2022

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada BUMN, BUMN, Badan Usaha Milik Swasta.
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

POLICY OF BOARD OF COMMISSIONERS CONCURRENT POSITION

Members of Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as:

1. Members of Board of Directors in SOE, ROE, Private Owned Enterprises.
2. Other positions according to laws and regulations, political party administrators and/or legislative candidates/members and/or Regional Head/Deputy Regional Head candidates.
3. Other positions that may cause a conflict of interest.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
Concurrent Positions of Board of Commissioners

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain** Position in Other Companies/ Institutions	**Nama Perusahaan/** Instansi Lain Name of Other Companies/ Institutions
Marsetio	Komisaris Independen (Plt. Komisaris Utama) Independent Commissioner (Acting President Commissioner)	Guru Besar Bidang Ilmu Budaya Teknologi Kemaritiman Professor of Maritime Technology Culture	Universitas Pertahanan Indonesia Indonesian Defense University
		Penasihat Khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim Special Advisor to the Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment in Maritime Defense and Security Sector	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment
R. Agus H. Purnomo*	Komisaris Commissioner	Staf Utama Menteri Perhubungan Bidang Transportasi Laut dan Logistik Maritim Senior Staff of Minister of Transportation for Sea Transportation and Maritime Logistics	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Director General of National Export Development	Kementerian Perdagangan Ministry of Trade
Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	-	-
Arif Toha Tjahjagama**	Komisaris Commissioner	Direktur Jendral Perhubungan Laut Director General of Sea Transportation	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation
Antonius Rainier Haryanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	*Head of Strategic Delivery Unit* Head of Strategic Delivery Unit	Kementerian BUMN Ministry of SOE
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-

*Berhenti menjabat sejak tanggal 20 September 2022
**Mulai menjabat sejak tanggal 20 September 2022
*No longer served since September 20, 2022
**Started serving since September 20, 2022

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris hendaknya senantiasa menghindari adanya benturan kepentingan, antara lain dengan:
1. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas;
2. Mengisi Daftar Khusus yang berisikan informasi kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain, termasuk bila tidak memiliki kepemilikan saham, serta secara berkala setiap akhir tahun melakukan pembaharuan dan wajib memberitahukan Perseroan bila ada perubahan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MANAGEMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS CONFLICTS OF INTEREST

Board of Commissioners should always avoid conflicts of interest, among others by:
1. Avoid any activity that can affect his/her independence in carrying out his duties;
2. Fill out a Special Register containing information on ownership of shares and/or their families in other companies, including if they do not have share ownership, and periodically update each year at the end of the year and are obliged to notify the Company if there are changes to the data in accordance with the applicable laws and regulations;

3. Tidak menanggapi permintaan dari pihak manapun dan dengan alasan apa pun, baik permintaan secara langsung dari pihak-pihak tertentu termasuk dan tidak terbatas pada pejabat/pegawai di lingkungan instansi pemerintah dan partai politik yang berkaitan dengan permintaan sumbangan, termasuk yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Perseroan sepanjang hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan suatu keputusan;
4. Berpedoman untuk tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan;
5. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut.

3. Not responding to requests from any party and for any reason, whether direct requests from certain parties including but not limited to officials/employees within government agencies and political parties relating to requests for donations, including those relating to the procurement of goods and services in the Company and can affect the decision making;
4. Firm in not taking advantage of his/her position for personal interests or for the interests of other people or related parties that are contrary to the interests of the Company;
5. Disclose if a conflict of interest occur and the concerned member of Board of Commissioners shall not be involved in the Company's decision-making process related to this matter.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS SHARE OWNERSHIP

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
Board of Commissioners Share Ownership

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Share Ownership	
		Pelindo	Perusahaan Lain Other Companies
Marsetio	Komisaris Independen (Plt. Komisaris Utama) Independent Commissioner (Acting President Commissioner)	Nihil Nil	Nihil Nil
R. Agus H. Purnomo*	Komisaris Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Arif Toha Tjahjagama**	Komisaris Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Antonius Rainier Haryanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil

*Berhenti menjabat sejak tanggal 20 September 2022
**Mulai menjabat sejak tanggal 20 September 2022
*No longer served since September 20, 2022
**Started serving since September 20, 2022

KOMISARIS INDEPENDEN

Per 31 Desember 2022, anggota Dewan Komisaris Independen berjumlah 4 (empat) orang atau 57,14 persen dari total anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 7 (tujuh) orang, sehingga telah memenuhi kriteria yang disyaratkan, yaitu minimal 20 persen dari total anggota Dewan Komisaris Perseroan.

INDEPENDENT COMMISSIONER

As of December 31, 2022, there are 4 (four) Independent Commissioners or 57.14 percent of the total 7 (seven) members of Board of Commissioners, hence has fulfilled the required criteria, which is at least 20 percent of the total members of the Company's Board of Commissioners.

KRITERIA DAN PERNYATAAN KOMISARIS INDEPENDEN

INDEPENDENT COMMISSIONER CRITERIA AND STATEMENT

Kriteria Komisaris Independen Independent Commissioner Criteria	Komisaris Independen Independent Commissioner			
	Marsetio	Muchtar Luthfi Mutty	Heru Sukanto	Antonius Rainier Haryanto
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner of the Issuer or Public Company in the following period	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Does not own shares either directly or indirectly in the Issuer or Public Company.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Has no affiliation with the Issuer or Public Company, members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or major shareholder of the Issuer or Public Company.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut Does not have business relationship, either directly or indirectly, related to the business activities of the Issuer or Public Company	√	√	√	√

RAPAT DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

KEBIJAKAN RAPAT

MEETING POLICY

Kebijakan rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam *Board Manual*. Keputusan-keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan, dan dapat mengundang Direksi. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sewaktu-waktu, jika dianggap perlu oleh:

The Board of Commissioners decisions are taken at the Board of Commissioners' Meeting. Decisions can also be taken outside the Board of Commissioners meeting as long as all members of Board of Commissioners agree on the method and material to be decided. Board of Commissioners meeting is held at least once in 1 (one) month, and may invite the Board of Directors. Board of Commissioners meeting can be held at any time, if deemed necessary by:

1. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
2. Permintaan tertulis dari Direksi.

Panggilan rapat diatur sebagai berikut:
1. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama (atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama) dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak;
2. Panggilan rapat dan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dapat didelegasikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris, kecuali diatur lain menurut rapat Dewan Komisaris;
3. Panggilan rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat serta menyertakan agenda dan materi Rapat tersebut;
4. Panggilan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui sarana elektronik (SMS, *email*, dan sarana elektronik lainnya) agar pemberitahuan mengenai agenda rapat dapat lebih cepat disampaikan, tanpa mengesampingkan ketentuan Anggaran Dasar mengenai tata cara panggilan rapat secara tertulis.

Panggilan rapat tidak diperlukan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.

Agenda rapat Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengajukan usulan agenda Rapat.
2. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan agenda rapat Dewan Komisaris, maka usulan agenda rapat dikumpulkan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.
3. Usulan agenda rapat yang telah dikumpulkan tersebut dilakukan seleksi ulang oleh Dewan Komisaris dengan ketentuan, usulan agenda rapat yang akan diajukan pada rapat Dewan Komisaris merupakan agenda yang disetujui oleh ½ (satu per dua) bagian jumlah suara.
4. Anggota Dewan Komisaris, yang usulan agendanya ditetapkan sebagai agenda rapat Dewan Komisaris harus mempersiapkan materi yang memadai sesuai agenda yang diusulkannya.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris, atau apabila terdapat lebih dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam jabatan, maka yang tertua usia bertindak sebagai pimpinan rapat.

1. One or more members of Board of Commissioners;
2. Written request from the Board of Directors.

Summons for meetings are arranged as follows:
1. Summons for Board of Commissioners meeting are made in writing by the President Commissioner (or a member of Board of Commissioners appointed by the President Commissioner) and delivered at least 3 (three) working days before the meeting is held, or in a shorter time if it's urgent;
2. Summons for meeting and holding of meeting of Board of Commissioners can be delegated to the Secretary to Board of Commissioners, unless otherwise stipulated according to the meeting of Board of Commissioners;
3. Summons for Board of Commissioners meeting must include the event, date, time and place of meeting and include the agenda and materials for meeting;
4. Summons for Board of Commissioners meeting can be made via electronic means (SMS, e-mail and other electronic means) so that notifications regarding the meeting agenda can be delivered more quickly, without prejudice to the Articles of Association regarding the procedure for summons for meetings in writing.

Summons for meetings are not required if all members of Board of Commissioners are present at the meeting.

Board of Commissioners meeting agenda is determined based on the following provisions:
1. Each member of Board of Commissioners has the right to propose a meeting agenda.
2. n the event that there is more than 1 (one) proposal for Board of Commissioners meeting agenda, then the proposed meeting agenda will be collected by the Secretary to Board of Commissioners.
3. The proposed meeting agenda that has been submitted is re-selected by Board of Commissioners with the provision that the proposed meeting agenda to be submitted at Board of Commissioners meeting is an agenda approved by ½ (one-half) of the number of votes.
4. 4. Member of Board of Commissioners, whose proposed agenda is determined as the agenda for Board of Commissioners meeting must prepare adequate material according to the agenda proposed.

Board of Commissioners meeting is chaired by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent or unable to attend, the meeting is chaired by another member of Board of Commissioners appointed by the President Commissioner.

In the event that the President Commissioner does not make an appointment, then the member of Board of Commissioners who has served the longest as a Board of Commissioners member acts as chairman of Board of Commissioners meeting, or if there are more than 2 (two) members of Board of Commissioners who are the longest in position, then the oldest acting as meeting leader.

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. Keterwakilan anggota Dewan Komisaris dalam rapat hanya dapat dilakukan dengan mewakilkan kepada anggota Dewan Komisaris lainnya secara tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut dan dengan ketentuan bahwa satu orang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili satu orang anggota Dewan Komisaris lainnya.

Board of Commissioners meetings are valid and have the right to make binding decisions if attended or represented by more than 1/2 (one half) of Board of Commissioners members. Representation of members of Board of Commissioners in meetings can only be carried out by representing other members of Board of Commissioners in writing which is specifically given for this purpose and provided that one member of Board of Commissioners can only represent one other member of Board of Commissioners.

Setiap peserta rapat Dewan Komisaris wajib terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam rapat. Untuk itu, peserta rapat yang tidak hadir pada saat pengambilan keputusan akan dilaksanakan harus dihubungi untuk segera kembali mengikuti proses rapat. Jika tidak berhasil dihubungi, maka peserta rapat tersebut dianggap menyetujui keputusan rapat yang diambil Keputusan Rapat Dewan Komisaris ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak biasa. Dewan Komisaris melakukan Pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi.

Every participants in Board of Commissioners meeting must be involved in every decision-making process at the meeting. For this reason, meeting participants who are not present at the time the decision will be made must be contacted to immediately return to the meeting process. If contact is not successful, then the meeting participants are deemed to have agreed to the meeting resolutions adopted. The resolutions of Board of Commissioners Meetings are determined by deliberation to reach a consensus, if no agreement is reached, the decisions are determined by an ordinary majority vote. Board of Commissioners conducts discussions/reviews on the Board of Directors proposals and GMS directions/decisions regarding the Board of Directors proposals.

Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah sama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Pengambilan keputusan pada Rapat Dewan Komisaris, kecuali mengenai diri orang, dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.

Each Board of Commissioners member has the right to cast 1 (one) vote plus 1 (one) vote for the member of Board of Commissioners he/she represents. If the number of agreeing and disagreeing votes is the same, then the meeting decision is the same as the opinion of the meeting chairman, taking into account the provisions regarding accountability as stipulated in the Company's Articles of Association. Decision making at Board of Commissioners meeting, except regarding a person, is carried out by closed election.

Hasil-hasil keputusan rapat disusun dalam lembar keputusan rapat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari risalah rapat. Risalah rapat tersebut harus ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.

The meeting decisions are compiled in the meeting resolution sheet as an integral part of the minutes of meeting. The minutes of meeting must be signed by the meeting chairman and all members of Board of Commissioners present at the meeting.

RENCANA RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING PLAN

Rencana Rapat Internal Dewan Komisaris
Board of Commissioners Internal Meeting Plan

No.	Bulan Month	Agenda Agenda	
1	Januari 2022 January 2022	1. Pembahasan hasil rapat terdahulu 2. Pembahasan kinerja *unaudited* tahun 2021 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat 4. Pembahasan Rencana Implementasi RKAP 2022 5. Pembahasan hal-hal strategis lainnya	1. Discussion of the results of previous meeting 2. Discussion on 2021 unaudited performance 3. Performance progress reports for each Directorate 4. Discussion on 2022 RKAP Implementation Plan 5. Discussion of other strategic matters

Rencana Rapat Internal Dewan Komisaris
Board of Commissioners Internal Meeting Plan

No.	Bulan Month	Agenda Agenda	
2	Februari 2022 February 2022	1. Pembahasan hasil rapat terdahulu 2. Pembahasan kinerja bulan Januari 2022 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat 4. Pembahasan Hasil Audit Tahun Buku 2021 5. Pembahasan Hasil Asesmen GCG Tahun Buku 2021 6. Pembahasan hal-hal strategis lainnya	1. Discussion of the results of previous meeting 2. Discussion on January 2022 performance 3. Performance progress reports for each Directorate 4. Discussion on Audit Results for Fiscal Year 2021 5. Discussion on GCG Assessment Results for Fiscal Year 2021 6. Discussion of other strategic matters
3	Maret 2022 March 2022	1. Pembahasan hasil rapat terdahulu 2. Pembahasan kinerja bulan Februari 2022 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat 4. Pembahasan hasil temuan audit dan tindak lanjutnya 5. Pembahasan Rencana Penunjukan Auditor Eksternal (KAP) Tahun Buku 2022 6. Pembahasan Persiapan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan 2021 7. Pembahasan hal-hal strategis lainnya	1. Discussion of the results of previous meeting 2. Discussion on February 2022 performance 3. Performance progress reports for each Directorate 4. Discussion of audit findings and follow-up 5. Discussion on the Plan to Appoint External Auditor (KAP) for Fiscal Year 2022 6. Discussion on Preparation for the GMS Ratification of 2021 Annual Report 7. Discussion of other strategic matters
4	April 2022 April 2022	1. Pembahasan hasil rapat terdahulu 2. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat 3. Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan I/2022 4. Pembahasan hasil RUPS Pengesahan Laporan Tahunan 2021 5. Pembahasan hal-hal strategis lainnya	1. Discussion of the results of previous meeting 2. Performance progress reports for each Directorate 3. Discussion on the Quarter I/2022 Management Report 4. Discussion on the results of GMS Ratification of 2021 Annual Report 5. Discussion of other strategic matters
5	Mei 2022 May 2022	1. Pembahasan hasil rapat terdahulu 2. Pembahasan kinerja bulan April 2022 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat 4. Pembahasan hal-hal strategis lainnya	1. Discussion of the results of previous meeting 2. Discussion on April 2022 performance 3. Performance progress reports for each Directorate 4. Discussion of other strategic matters
6	Juni 2022 June 2022	1. Pembahasan hasil rapat terdahulu 2. Pembahasan kinerja bulan Mei 2022 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat 4. Pembahasan hal-hal strategis lainnya	1. Discussion of the results of previous meeting 2. Discussion on May 2022 performance 3. Performance progress reports for each Directorate 4. Discussion of other strategic matters
7	Juli 2022 July 2022	1. Pembahasan hasil rapat terdahulu 2. Pembahasan Laporan Manajemen Semester I/2022 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat 4. Telaah atas pelaksanaan RKAP 2022 5. Pembahasan hal-hal strategis lainnya	1. Discussion of the results of previous meeting 2. Discussion on the Semester I/2022 Management Report 3. Performance progress reports for each Directorate 4. Review the implementation of 2022 RKAP 5. Discussion of other strategic matters
8	Agustus 2022 August 2022	1. Pembahasan hasil rapat terdahulu 2. Pembahasan kinerja bulan Juli 2022 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat 4. Pembahasan hal-hal strategis lainnya	1. Discussion of the results of previous meeting 2. Discussion on July 2022 performance 3. Performance progress reports for each Directorate 4. Discussion of other strategic matters
9	September 2022 September 2022	1. Pembahasan hasil rapat terdahulu 2. Pembahasan kinerja bulan Agustus 2022 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat 4. Pembahasan Usulan RKAP 2023 5. Pembahasan hal-hal strategis lainnya	1. Discussion of the results of previous meeting 2. Discussion on August 2022 performance 3. Performance progress reports for each Directorate 4. Discussion on the 2023 RKAP Proposal 5. Discussion of other strategic matters

Rencana Rapat Internal Dewan Komisaris
Board of Commissioners Internal Meeting Plan

No.	Bulan Month	Agenda Agenda	
10	Oktober 2022 October 2022	1. Pembahasan hasil rapat terdahulu 2. Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan III/2022 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat 4. Pembahasan Usulan RKAP 2023 5. Pembahasan hal-hal strategis lainnya	1. Discussion of the results of previous meeting 2. Discussion of the Quarter III/2022 Management Report 3. Performance progress reports for each Directorate 4. Discussion of the 2023RKAP Proposal 5. Discussion of other strategic matters
11	November 2022 November 2022	1. Pembahasan hasil rapat terdahulu 2. Pembahasan kinerja bulan Oktober 2022 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat 4. Persiapan RUPS Pengesahan RKAP 2023 5. Pembahasan hal-hal strategis lainnya	1. Discussion of the results of previous meeting 2. Discussion on October 2022 performance 3. Performance progress reports for each Directorate 4. Preparation of the GMS for Ratification of 2023 RKAP 5. Discussion of other strategic matters
12	Desember 2022 December 2022	1. Pembahasan hasil rapat terdahulu 2. Pembahasan kinerja bulan November 2022 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat 4. Pembahasan hal-hal strategis lainnya	1. Discussion of the results of previous meeting 2. Discussion on November 2022 performance 3. Performance progress reports for each Directorate 4. Discussion of other strategic matters

Realisasi Rapat Internal Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2022, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Realization of Board of Commissioners Internal Meeting

Throughout 2022, the agenda, date and participants of Board of Commissioners Meetings are as follows.

Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

No.	Tanggal Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Hadir Meeting Attendees Present	Peserta Rapat Tidak Hadir Meeting participants Not present	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
1	11 Januari 2022 January 11, 2022	1. Penyampaian *Update* Materi oleh Komite Audit. a. *Progress* Audit Laporan Keuangan Tahun 2021 b. PKPT SPI Tahun 2022 dan Audit Charter; 2. Penyampaian *Update* Materi oleh Komite GCG dan PMR: a. Progres pelaksanaan *Assessment* GCG 2021 b. *Point of Concern* atas usulan investasi RKAP 2022; 3. Penyampaian *Update* Perkembangan Kasus-Kasus Hukum Pasca Penggabungan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi; 4. Hal-hal strategis lainnya. 1. Submission of Material Updates by Audit Committee. a. Progress of 2021 Financial Statement Audit b. PKPT SPI for 2022 and Audit Charter; 2. Submission of Material Update by GCG and PMR Committee: a. Progress on the implementation of 2021 GCG Assessment b. Point of Concern on the investment proposal for the 2022 RKAP; 3. Submission of Update on the Development of Post-Merger Legal Cases by Nomination and Remuneration Committee; 4. Other strategic matters.	Marsetio	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	
			Didi Sumedi	Hadir Present	
			Sudung Situmorang	Hadir Present	
			Antonius Rainier Haryanto	Hadir Present	
			Heru Sukanto	Hadir Present	
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	
2	22 Februari 2022 February 22, 2022	1. Usulan Tantiem Pra Merger Tahun Buku 2021; 2. Persiapan Rapat Koordinasi tanggal 23 Februari 2022; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Proposed Pre-Merger Tantiem for 2021 Fiscal Year; 2. Preparation for Coordination Meeting on February 23, 2022; 3. Other strategic matters.	Marsetio	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	
			Didi Sumedi	Tidak Hadir Not Present	Menjalankan penugasan di instansi asal Carry out assignment at origin agency
			Sudung Situmorang	Hadir Present	
			Antonius Rainier Haryanto	Hadir Present	
			Heru Sukanto	Hadir Present	
			Muchtar Luthfi Mutty	Tidak Hadir Not Present	Menjalankan penugasan di instansi asal

Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

No.	Tanggal Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Hadir Meeting Attendees Present	Peserta Rapat Tidak Hadir Meeting participants Not present	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
3	22 Maret 2022 March 22, 2022	1. Laporan Manajemen bulan Februari 2022 oleh Komite Audit; 2. *Progress Assessment* GCG oleh BPKP oleh Komite GCG & PMR; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. February 2022 Management Report by Audit Committee; 2. Progress of GCG Assessment by BPKP by GCG & PMR Committee; 3. Other strategic matters.	Marsetio	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	
			Didi Sumedi	Hadir Present	
			Sudung Situmorang	Hadir Present	
			Antonius Rainier Haryanto	Hadir Present	
			Heru Sukanto	Hadir Present	
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	
4	18 April 2022 April 18, 2022	1. Usulan Kerja Sama Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dengan PT Inti Sentosa Alam Bahtera; 2. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Tahun Buku 2021; 3. Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelindo (Persero); 4. Rencana Usulan Wakil Perseroan Dewan Komisaris Anak Perusahaan; 5. Hal-hal strategis lainnya. 1. Proposed Cooperation for Port Services with PT Inti Sentosa Alam Bahtera; 2. Board of Commissioners' response to the Management Report for 2021 Fiscal Year; 3. Proposed Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelindo (Persero); 4. Proposed Plan for the Company's Representative of Board of Commissioners of Subsidiaries; 5. Other strategic matters..	Marsetio	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	
			Didi Sumedi	Hadir Present	
			Sudung Situmorang	Hadir Present	
			Antonius Rainier Haryanto	Hadir Present	
			Heru Sukanto	Hadir Present	
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	
5	25 Mei 2022 May 25, 2022	1. *Update* Progres Pekerjaan Pengembangan BMTH dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan G20 di Bali pada pekerjaan pengembangan BMTH. 2. Hal-hal strategis lainnya. 1. Update on BMTH Development Work Progress and Preparation for the Implementation of G20 Activities in Bali on BMTH development work. 2. Other strategic matters.	Marsetio	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	
			Didi Sumedi	Hadir Present	
			Sudung Situmorang	Hadir Present	
			Antonius Rainier Haryanto	Hadir Present	
			Heru Sukanto	Hadir Present	
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	

Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

No.	Tanggal Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Hadir Meeting Attendees Present	Peserta Rapat Tidak Hadir Meeting participants Not present	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
6	21 Juni 2022 June 21, 2022	1. Pembahasan Laporan Hasil Kunjungan ke Pelabuhan Kendari dan Balikpapan; 2. Evaluasi Laporan Manajemen Bulan Mei Tahun 2022; 3. Persetujuan atas Dokumen Pengajuan Nilai Buku Inbreng Saham PT Pelindo (Persero) kepada *Subholding* sesuai Klaster Bisnis; 4. Tanggapan Dekom atas Permohonan Persetujuan Tindak Lanjut LHP BPK RI Tahun 2021 kepada RUPS; 5. Tanggapan atas Usulan Wakil Perseroan sebagai Direksi di Anak Perusahaan; 6. Pembahasan KPI Individual Direksi Triwulan I Tahun 2022. 1. Discussion on Report of Visit to Kendari and Balikpapan Ports; 2. Evaluation of May 2022 Management Report; 3. Approval of the Submission Document for Book Value of PT Pelindo (Persero) Shares to Subholding according to the Business Cluster; 4. BOD's response to the request for approval of the follow-up of BPK RI's LHP in 2021 to the GMS; 5. Response to the Company's Proposed Representative as Board of Directors in Subsidiary Companies; 6. Discussion of Board of Directors' Individual KPIs for the first quarter of 2022.	Marsetio	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	
			Didi Sumedi	Hadir Present	
			Sudung Situmorang	Hadir Present	
			Antonius Rainier Haryanto	Hadir Present	
			Heru Sukanto	Hadir Present	
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	
7	9 Juli 2022 July 9, 2022	1. Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL); 2. Rencana Restrukturisasi PT Prima Multi Terminal (PT PMT); 3. Evaluasi Laporan Manajemen Bulan Juni Tahun 2022; 4. Hal–hal strategis lainnya. 1. Guidelines for Social and Environmental Responsibility (CSR) Program Implementation; 2. Restructuring Plan of PT Prima Multi Terminal (PT PMT); 3. Evaluation of June 2022 Management Report; 4. Other strategic matters.	Marsetio	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	
			Didi Sumedi	Hadir Present	
			Sudung Situmorang	Hadir Present	
			Antonius Rainier Haryanto	Hadir Present	
			Heru Sukanto	Hadir Present	
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	

Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

No.	Tanggal Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Hadir Meeting Attendees Present	Peserta Rapat Tidak Hadir Meeting participants Not present	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
8	18 Agustus 2022 August 18, 2022	1. Pembahasan Lanjutan Rencana Restrukturisasi PT PMT dan *Business Plan* Pasca Restrukturisasi; 2. Pembahasan Rencana Pengembangan Pelabuhan Arar Sorong; 3. Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Juli Tahun 2022; 4. Hal–hal strategis lainnya. 1. Further Discussion on PT PMT Restructuring Plan and Post Restructuring Business Plan; 2. Discussion of Arar Sorong Port Development Plan; 3. Discussion of July 2022 Management Report; 4. Other strategic matters.	Marsetio	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	
			Didi Sumedi	Hadir Present	
			Sudung Situmorang	Hadir Present	
			Antonius Rainier Haryanto	Hadir Present	
			Heru Sukanto	Hadir Present	
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	
9	1 September 2022 September 1, 2022	1. Pembahasan Terkait Laporan Proses Pemilihan INA sebagai Mitra Kerja Sama Investasi dan Pengoperasian BNCT; 2. Pembahasan Penetapan KAP Tahun Buku 2022; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Discussion Related to the INA Selection Process Report as Investment Cooperation Partner and BNCT Operation; 2. Discussion on the Determination of KAP for 2022 Fiscal Year; 3. Other strategic matters.	Marsetio	Hadir Present	
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	
			Didi Sumedi	Hadir Present	
			Sudung Situmorang	Hadir Present	
			Antonius Rainier Haryanto	Hadir Present	
			Heru Sukanto	Hadir Present	
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	

Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

No.	Tanggal Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Hadir Meeting Attendees Present	Peserta Rapat Tidak Hadir Meeting participants Not present	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
10	27 September 2022 September 27, 2022	1. Pembahasan Surat Direksi Tentang Permohonan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Penjaminan *Letter of Undertaking* dalam Perjanjian Kredit Sindikasi dan Perjanjian Kredit Subordinasi Pada PT Prima Multi Terminal (PMT); 2. Pembahasan Tindak Lanjut Prosedur Pendanaan Usaha Kecil & Menengah (PUMK) kaitannya dengan TJSL; 3. Pembahasan Progres Pembangunan Seksi 4 dan Rencana Divestasi Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC); 4. *Update* Rencana Perbaikan Kinerja Anak/Cucu Perusahaan yang Mengalami Kerugian: 1. Discussion of Board of Directors' Letter Regarding the Request for Written Response from Board of Commissioners on the Letter of Undertaking Guarantee in Syndicated Credit Agreement and Subordinated Credit Agreement at PT Prima Multi Terminal (PMT); 2. Discussion on Follow-up Procedures for Funding Small & Medium Enterprises (PUMK) in relation to CSR. 3. Discussion on Section 4 Development Progress and Divestment Plan of Cibitung-Cilincing Toll Road (JTCC); 4. Update on the Performance Improvement Plan of Subsidiaries that Experienced Losses:	Marsetio	Hadir Present	
			Arif Toha Tjahjagama	Tidak Hadir Not Present	Ada agenda lain There was other agenda
			Didi Sumedi	Hadir Present	
			Sudung Situmorang	Hadir Present	
			Antonius Rainier Haryanto	Hadir Present	
			Heru Sukanto	Hadir Present	
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	

No	Nama Perusahaan Company Name	Industri Industry
a.	PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII)	Jasa Investasi Investment Services
b.	PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII)	Jasa IT IT Services
c.	PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS)	Jasa IT IT Services
d.	PT Pengerukan Indonesia (Rukindo)	Jasa Pengerukan Dredging Services
e.	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI)	Jasa Alat Pelabuhan Port Equipment Services

5. Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Agustus 2022;
6. Pembahasan Permasalahan Sengketa Lahan dan Lahan yang Belum Dioptimalisasi di Bojonegara, Cabang Banten;
7. Hal–hal strategis lainnya.
5. Discussion of August 2022 Management Report;
6. Discussion of Land Dispute Issues and Land that has not been Optimized in Bojonegara, Banten Branch;
7. Other strategic matters.

Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

No.	Tanggal Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Hadir Meeting Attendees Present	Peserta Rapat Tidak Hadir Meeting participants Not present	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
11	13 Oktober 2022 October 13, 2022	1. Paparan Konsep Pembangunan Pelabuhan Balikpapan sesuai dengan Rencana Pengembangan IKN; 2. Pembahasan Presentasi Desain Ruang Kerja Dewan Komisaris beserta Organ Pendukung dan Komponen TKDN yang digunakan; 3. Hal–hal strategis lainnya. 1. Presentation of Balikpapan Port Development Concept in accordance with IKN Development Plan; 2. Discussion of the Board of Commissioners Workspace Design Presentation along with Supporting Organs and TKDN Component used; 3. Other strategic matters.	Marsetio	Hadir Present	
			Arif Toha Tjahjagama	Hadir Present	
			Didi Sumedi	Hadir Present	
			Sudung Situmorang	Hadir Present	
			Antonius Rainier Haryanto	Hadir Present	
			Heru Sukanto	Hadir Present	
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	
12	21 November 2022 November 21, 2022	1. Pembahasan RJPP Tahun 2021-2025 PT Pelindo (Persero); 2. Pembahasan RKAP Tahun 2023 PT Pelabuhan Indonesia (Persero); 3. Pembahasan Usulan Penghapusbukuan Aset; 4. Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Oktober 2022; 5. Pembahasan Peraturan Direksi tentang Pedoman Kerja Sama PT Pelabuhan Indonesia (Persero); 6. Pembahasan Lanjutan Permasalahan Lahan di Regional 2 – Bojonegara (Dihadiri oleh GH Hukum, GH *Manajemen Asset, Regional Head* 2); 7. Hal–hal strategis lainnya. 1. Discussion of 2021-2025 PT Pelindo (Persero) RJPP; 2. Discussion of the 2023 RKAP of PT Pelabuhan Indonesia (Persero); 3. Discussion of Proposed Asset Write-off; 4. Discussion of October 2022 Management Report; 5. Discussion of the Board of Directors Regulation on the Guidelines for Cooperation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero); 6. Continued Discussion of Land Issues in Regional 2 - Bojonegara (Attended by GH Law, GH Asset Management, Regional Head 2); 7. Other strategic matters	Marsetio	Hadir Present	
			Arif Toha Tjahjagama	Tidak Hadir Not Present	Ada agenda lain There was other agenda
			Didi Sumedi	Hadir Present	
			Sudung Situmorang	Hadir Present	
			Antonius Rainier Haryanto	Hadir Present	
			Heru Sukanto	Hadir Present	
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	

Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

No.	Tanggal Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Hadir Meeting Attendees Present	Peserta Rapat Tidak Hadir Meeting participants Not present	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
13	21 Desember 2022 December 21, 2022	1. Pembahasan Laporan Manajemen Bulan November 2022; 2. Pembahsan *update* penerapan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara; 3. Pembahasan usulan amandemen Perjanjian Bangun Guna Serah Terminal Belawan Fase 2 dan Rencana Kerja sama serta Investasi dan Pengoperasian Terminal Belawan New Container Terminal (BNCT); 4. Hal–hal strategis lainnya. 1. Discussion of November 2022 Management Report; 2. Discussion of updates on the implementation of Minister of SOE Regulation Number PER-5/MBU/09/2022 concerning the Implementation of Risk Management at State-Owned Enterprises; 3. Discussion of the proposed amendments of Belawan Terminal Phase 2 Build-to-Sell Agreement and the Cooperation Plan as well as the Investment and Operation of Belawan New Container Terminal (BNCT); 4. Other strategic matters.	Marsetio	Hadir Present	
			Arif Toha Tjahjagama	Hadir Present	
			Didi Sumedi	Hadir Present	
			Sudung Situmorang	Hadir Present	
			Antonius Rainier Haryanto	Hadir Present	
			Heru Sukanto	Hadir Present	
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2022, agenda, tanggal dan peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS JOINT MEETINGS

Throughout 2022, the agenda, date and participants of Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting are as follows.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda	Peserta Rapat Dewan Komisaris Meeting Participants - Board of Commissioners	Kehadiran Attendance	Peserta Rapat – Direksi Meeting Participants - Board of Directors	Kehadiran Attendance
1	26 Januari 2022 January 26, 2022	1. Tindak Lanjut Rapat Korespondensi Surat menyurat sebelumnya; 2. RKAP PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2022; 3. Laporan *Manajemen Unaudited* Tahun 2021; 4. Hal-hal strategis lainnya. 1. Follow-up of previous correspondence meeting; 2. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 2022 RKAP; 3. Unaudited Management Report for 2021; 4. Other strategic matters.	Marsetio	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Antonius Rainier Haryanto	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present
2	23 Februari 2022 February 23, 2022	1. Tindak Lanjut Rapat Korespondensi surat menyurat sebelumnya; a. RJPP Tahun 2021 – 2025; b. Rencana PT PPI Menggantikan PT PSL sebagai *Subholding* Klaster Logistik & *Hinterland*; c. Penjelasan atas Kontrak Seksi 4 Proyek JTCC; d. *Update* Perkembangan dan Penyelesaian Proyek-Proyek e. Investasi, terutama Proyek Kijing dan BMTH (Laporan Penggunaan Dana PMN); f. *Update* atas Penyelesaian Pinjaman PT Prima Multi Terminal. 2. Laporan Manajemen Bulan Januari 2022; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Follow-up of previous correspondence meeting; a. RJPP 2021 - 2025; b. PT PPI's Plan to Replace PT PSL as Subholding of Logistics & Hinterland Cluster; c. Explanation of Section 4 Contract of JTCC Project; d. Update on Progress and Completion of Project; e. Investment Projects, especially Kijing and BMTH Projects (PMN Fund Utilization Report); f. Update on the Settlement of PT Prima Multi Terminal Loan. 2. January 2022 Management Report 3. Other strategic matters.	Marsetio	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Antonius Rainier Haryanto	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda	Peserta Rapat Dewan Komisaris Meeting Participants - Board of Commissioners	Kehadiran Attendance	Peserta Rapat – Direksi Meeting Participants - Board of Directors	Kehadiran Attendance
3	25 Maret 2022 March 25, 2022	1. Tindak Lanjut Rapat Korespondensi surat menyurat sebelumnya; a. *Progress* Laporan Manajemen *Audited* Tahun Buku 2021; b. Tindak Lanjut atas penyelesaian Pinjaman PT Prima Multi Terminal. c. Penjelasan atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat. 2. Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Februari 2022; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Follow-up of previous Correspondence Meeting; a. Progress of Audited Management Report for 2021 Fiscal Year; b. Follow-up on Loan Settlement of PT Prima Multi Terminal; c. Explanation of the Proposal to Change the Head Office Organization Structure. 2. Discussion on February 2022 Management Report; 3. Other strategic matters.	Marsetio	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Antonius Rainier Haryanto	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present
4	27 April 2022 April 27, 2022	1. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Korespondensi surat menyurat sebelumnya; a. Pembahasan PSN di Lingkup Pelabuhan Indonesia (Persero); b. Pembahasan Piutang Macet; c. Pembahasan Temuan Auditor yang dinyatakan belum selesai/ ditindaklanjuti; d. Pembahasan Rencana Kerja sama dengan PT ISAB. 2. Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Maret 2022; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Discussion on Follow-Up of Previous Correspondence Meeting; a. Discussion of PSN in the scope of Pelabuhan Indonesia (Persero); b. Discussion of Bad Debt; c. Discussion of Auditor Findings which are declared unfinished/ followed up; d. Discussion of Cooperation Plan with PT ISAB; 2. Discussion of March 2022 Management Report; 3. Other strategic matters.	Marsetio	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Antonius Rainier Haryanto	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda	Peserta Rapat Dewan Komisaris Meeting Participants - Board of Commissioners	Kehadiran Attendance	Peserta Rapat – Direksi Meeting Participants - Board of Directors	Kehadiran Attendance
5	30 Mei 2022 May 30, 2022	1. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Korespondensi surat menyurat sebelumnya; a. Progres penanganan kasus-kasus Hukum Pasca Merger; b. Pembahasan *Update* Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) dan kebijakan pengelolaan SDM; c. Pembahasan Rencana Operasional Pelabuhan Kijing; d. Status dan Rencana Tindak Lanjut Temuan BPK. 2. Pembahasan Laporan Manajemen Bulan April 2022; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Discussion on Follow-Up of Previous Correspondence Meeting; a. Progress of Post-Merger Legal cases handling; b. Discussion of the Organization and Governance Structure (SOTK) Update and HC management policy; c. Discussion of Kijing Port Operational Plan; d. Status and Follow-up Plan for BPK Findings. 2. Discussion of April 2022 Management Report; 3. Other strategic matters.	Marsetio	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Antonius Rainier Haryanto	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda	Peserta Rapat Dewan Komisaris Meeting Participants - Board of Commissioners	Kehadiran Attendance	Peserta Rapat – Direksi Meeting Participants - Board of Directors	Kehadiran Attendance
6	29 Juni 2022 June 29, 2022	1. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Korespondensi surat menyurat sebelumnya; a. Rencana Penyusunan *Masterplan* Pelabuhan Indonesia dan Persiapan Pelindo untuk mendukung Pembangunan IKN; b. *Update* Penyelesaian Proyek JTCC; c. Pembahasan Rancangan Perubahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2021-2025; d. Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Mei 2022. 2. Hal-hal strategis lainnya. (Hasil Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Kendari *New Port*). 1. Discussion on Follow-Up of Previous Correspondence Meeting; a. Indonesian Port Masterplan Preparation Plan and Pelindo's Preparation to support the IKN Development; b. Update on JTCC Project Completion; c. Discussion of Draft Amendment to the Company's Long Term Plan (RJPP) of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for 2021-2025; d. Discussion of May 2022 Management Report; 2. Other strategic matters. (The result of Board of Commissioners Working Visit to Kendari New Port).	Marsetio	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Antonius Rainier Haryanto	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda	Peserta Rapat Dewan Komisaris Meeting Participants - Board of Commissioners	Kehadiran Attendance	Peserta Rapat – Direksi Meeting Participants - Board of Directors	Kehadiran Attendance
7	25 Juli 2022 July 25, 2022	3. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Korespondensi surat menyurat sebelumnya; a. Pembahasan *Business Plan* Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Belawan berkaitan dengan Rencana Restrukturisasi PT PMT; b. Pembahasan *Stress Test* dan Analisis Risiko menindaklanjuti surat Menteri BUMN Nomor: S-413/MBU/06/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Permintaan Analisis *Stress Test* dan Analisis Risiko sebagai *Early Warning System* Kinerja BUMN; c. Pembahasan Rencana Kerja Sama BMTH dengan Pemerintah Kota Denpasar. 4. Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Juni 2022; 5. Hal-hal strategis lainnya. 1. Discussion on Follow-Up of Previous Correspondence Meeting; a. Discussion of Kuala Tanjung and Belawan Port Development Business Plan related to PT PMT Restructuring Plan; b. Discussion of Stress Test and Risk Analysis following up on the letter of Minister of SOEs Number: S-413/MBU/06/2022 dated June 27, 2022 concerning Request for Stress Test Analysis and Risk Analysis as an Early Warning System for SOE Performance; c. Discussion of BMTH Cooperation Plan with Denpasar City Government; 2. Discussion of June 2022 Management Report; 3. Other strategic matters.	Marsetio	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Antonius Rainier Haryanto	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda	Peserta Rapat Dewan Komisaris Meeting Participants - Board of Commissioners	Kehadiran Attendance	Peserta Rapat – Direksi Meeting Participants - Board of Directors	Kehadiran Attendance
8	20 Agustus 2022 August 20, 2022	1. Tindak Lanjut Rapat Korespondensi surat menyurat sebelumnya; Pembahasan Lanjutan Rencana Restrukturisasi PT PMT dan *Business Plan* Pasca Restrukturisasi; 2. Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Juli 2022; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Follow-up of previous correspondence meeting; Further Discussion of PT PMT Restructuring Plan and Post Restructuring Business Plan; 2. Discussion of July 2022 Management Report; 3. Other strategic matters.	Marsetio	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			R. Agus H. Purnomo	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Didi Sumedi	Tidak Hadir Not Present	Mega Satria	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Tidak Hadir Not Present	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Antonius Rainier Haryanto	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present
9	29 September 2022 September 29, 2022	1. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Korespondensi surat menyurat sebelumnya; a. *Update* Rencana Pemilihan INA sebagai Mitra Kerja sama Belawan New Container Terminal (BNCT). b. Pembahasan Tindak Lanjut Prosedur Pendanaan Usaha Kecil & Menengah (PUMK) kaitannya dengan TJSL. c. Pembahasan Progres Pembangunan Seksi 4 dan Rencana Divestasi Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) d. *Update* Rencana Perbaikan Kinerja Anak/ Cucu Perusahaan yang Mengalami Kerugian:	Marsetio	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			Arif Toha Tjahjagama	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Antonius Rainier Haryanto	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda	Peserta Rapat Dewan Komisaris Meeting Participants - Board of Commissioners	Kehadiran Attendance	Peserta Rapat – Direksi Meeting Participants - Board of Directors	Kehadiran Attendance
		1. Discussion of Follow Up to previous Correspondence Meeting; a. Update on INA Selection Plan as Cooperation Partner of Belawan New Container Terminal (BNCT). b. Discussion of Follow-up Procedures for Funding Small & Medium Enterprises (PUMK) in relation to CSR. c. Discussion of Section 4 Development Progress and Divestment Plan for Cibitung-Cilincing Toll Road (JTCC). d. Update on the Performance Improvement Plan for Subsidiaries that Experienced Losses:				

No	Nama Perusahaan Company name	Industri Industry
a.	PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII)	*Investment Services*
b.	PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII)	*IT Services*
c.	PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS)	*IT Services*
d.	PT Pengerukan Indonesia (Rukindo)	*Dredging Services*
e.	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI)	*Harbor Equipment Services*

2. Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Agustus 2022;
3. Hal-hal strategis lainnya
2. Discussion of August 2022 Management Report;
3. Other strategic matters.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda	Peserta Rapat Dewan Komisaris Meeting Participants - Board of Commissioners	Kehadiran Attendance	Peserta Rapat – Direksi Meeting Participants - Board of Directors	Kehadiran Attendance
10	24 Oktober 2022 October 24, 2022	1. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Korespondensi surat menyurat sebelumnya; a. Pembahasan Rancangan RKAP Tahun 2023 PT Pelabuhan Indonesia (Persero); b. *Progress* Implementasi Pengembangan Teknologi Informasi Pelindo; c. Hasil Pemetaan Pemenuhan Pedoman Manajemen Risiko sebagaimana Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022; 2. Pembahasan Laporan Manajemen Bulan September 2022; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Discussion on Follow-Up of Previous Correspondence Meeting; a. Discussion of 2023 RKAP Draft of PT Pelabuhan Indonesia (Persero); b. Progress of Pelindo Information Technology Development Implementation; c. Mapping Results of Compliance with Risk Management Guidelines as stipulated in the Regulation of Minister of SOEs Number PER-5/MBU/09/2022; 2. Discussion of September 2022 Management Report; 3. Other strategic matters.	Marsetio	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			Arif Toha Tjahjagama	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Antonius Rainier Haryanto	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda	Peserta Rapat Dewan Komisaris Meeting Participants - Board of Commissioners	Kehadiran Attendance	Peserta Rapat – Direksi Meeting Participants - Board of Directors	Kehadiran Attendance
11	22 November 2022 November 22, 2022	1. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Korespondensi surat menyurat sebelumnya; a. Pembahasan RJPP Tahun 2021 - 2025 PT Pelabuhan Indonesia (Persero); b. Pembahasan RKAP Tahun 2023 PT Pelabuhan Indonesia (Persero); 2. Pembahasan Laporan Manajemen bulan Oktober 2022; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Discussion on Follow-Up of Previous Correspondence Meeting; a. Discussion of 2021-2025 RJPP of PT Pelabuhan Indonesia (Persero); b. Discussion of 2023 RKAP of PT Pelabuhan Indonesia (Persero); 2. Discussion of October 2022 Management Report; 3. Other strategic matters.	Marsetio	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			Arif Toha Tjahjagama	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Antonius Rainier Haryanto	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda	Peserta Rapat Dewan Komisaris Meeting Participants - Board of Commissioners	Kehadiran Attendance	Peserta Rapat – Direksi Meeting Participants - Board of Directors	Kehadiran Attendance
12	22 Desember 2022 December 22, 2022	1. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Korespondensi surat menyurat sebelumnya; a. Pembahasan Tindak Lanjut atas Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana surat Nomor: 91/DK/PI/XI-2022 tanggal 24 November 2022; b. Pembahasan Usulan Amandemen Perjanjian Bangun Guna Serah Terminal Belawan Fase 2 dan Rencana Kerja sama serta Investasi dan Pengoperasian Terminal Belawan New Container Terminal (BNCT). 2. Pembahasan Laporan Manajemen bulan November 2022; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Discussion of Follow-Up of Previous Correspondence Meeting; a. Discussion of Follow-up to Coordination Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors as letter Number: 91/DK/PI/XI-2022 dated November 24, 2022; b. Discussion of the Amendment Proposal to Build-to-Sell Agreement for Belawan Terminal Phase 2 and the Cooperation Plan as well as the Investment and Operation of Belawan New Container Terminal (BNCT). 2. Discussion of November 2022 Management Report; 3. Other strategic matters.	Marsetio	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			Arif Toha Tjahjagama	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Antonius Rainier Haryanto	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF COMMISSIONERS' MEETINGS

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
Meeting Frequency and Attendance of Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meetings			
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran Number and Percentage of Attendance			
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage	
Marsetio	Komisaris Independen (Plt. Komisaris Utama) Independent Commissioner (Acting President Commissioner)	13	13	100%	
R. Agus H. Purnomo*	Komisaris Commissioner	9	9	100%	
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	13	12	92%	
Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	13	13	100%	
Arif Toha Tjahjagama**	Komisaris Commissioner	4	2	50%	
Antonius Rainier Haryanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	13	13	100%	
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	13	13	100%	
Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner	13	12	92%	

*Berhenti menjabat sejak tanggal 20 September 2022
**Mulai menjabat sejak tanggal 20 September 2022
*No longer served since September 20, 2022
**Started serving since September 20, 2022

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbarui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan terkait program peningkatan kapabilitas bagi Dewan Komisaris yang diatur dalam *Board Manual* adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris.
2. Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan dalam RKA Dewan Komisaris.

BOARD OF COMMISSIONERS TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT

Policy on training and/or competency development of members of Board of Commissioners,

Capability improvement is deemed important to enable the Board of Commissioners to update their knowledge on the latest developments of the Company's core business, to anticipate problems that arise in the future for the sustainability and progress of the Company. The provisions regarding Board of Commissioners capability improvement program are as follows:

1. The capability improvement program is carried out to improve the work effectiveness of Board of Commissioners.
2. The capability improvement program plan must be included in the Board of Commissioners RKA.

	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings			RUPS		
	Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance			Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
	Jumlah Rapat Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**Persentase** Percentage	**Jumlah Rapat** Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**Persentase** Percentage
	12	12	100%	2	2	100%
	8	8	100%	2	2	100%
	12	11	92%	2	2	100%
	12	11	92%	2	2	100%
	4	4	100%	-	-	-
	12	12	100%	2	2	100%
	12	12	100%	2	1	50%
	12	12	100%	2	2	100%

3. Setiap anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diminta untuk menyampaikan bahan/hasil yang diperoleh dalam program peningkatan kapabilitas kepada anggota Dewan Komisaris lainnya dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan.
4. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris, selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyelenggaraan pelaksanaan program tersebut.

3. Each member of Board of Commissioners who participates in capability improvement programs such as seminar and/or training is required to present to other members of Board of Commissioners for sharing knowledge.
4. The member of Board of Commissioners concerned is obliged to make report on the capability improvement program. The report is submitted to Board of Commissioners, no later than 30 (thirty) days after the date of the program.

Realisasi program peningkatan kapabilitas yang diikuti oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022 dijabarkan dalam tabel berikut ini:

The trainings that have been attended by Board of Commissioners during 2022 are:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Materi Pelatihan** Training Materials	**Tanggal/Tempat** Date/Venue	**Penyelenggara** Organizer
Marsetio	Komisaris Independen (Plt. Komisaris Utama) Independent Commissioner (Acting President Commissioner)	*Executive Sharing session* TJSL	20 - 22 Januari 2022- Double Tree Hilton Jakarta January 20-22, 2022 – Double Tree Hilton Jakarta	PT Global Certification Indonesia
		Executive Sharing session TJSL	20 Oktober 2022- Pullman Hotel Jakarta October 20, 2022 – Pullman Hotel Jakarta	Interlink Technologi Service
R. Agus H. Purnomo*	Komisaris Commissioner	Executive Sharing session TJSL	20 - 22 Januari 2022- Double Tree Hilton Jakarta January 20-22, 2022 – Double Tree Hilton Jakarta	PT Global Certification Indonesia
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	*Executive Sharing session* TJSL	20 - 22 Januari 2022- Double Tree Hilton Jakarta January 20-22, 2022 – Double Tree Hilton Jakarta	PT Global Certification Indonesia
		Executive Sharing session TJSL	20 Oktober 2022- Pullman Hotel Jakarta October 20, 2022 – Pullman Hotel Jakarta	Interlink Technologi Service
Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	*Executive Sharing session* TJSL	20 - 22 Januari 2022- Double Tree Hilton Jakarta January 20-22, 2022 – Double Tree Hilton Jakarta	PT Global Certification Indonesia
		Executive Sharing session TJSL	20 Oktober 2022- Pullman Hotel Jakarta October 20, 2022 – Pullman Hotel Jakarta	Interlink Technologi Service
Arif Toha Tjahjagama**	Komisaris Commissioner	*Executive Sharing session* TJSL	20 - 22 Januari 2022- Double Tree Hilton Jakarta January 20-22, 2022 – Double Tree Hilton Jakarta	PT Global Certification Indonesia

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Materials	Tanggal/Tempat Date/Venue	Penyelenggara Organizer
		Onboarding Commissioner Program Angkatan 6 Tahun 2022 Onboarding Commissioner Batch 6 Program of 2022	*Online*, tanggal 2 November 2022 – 21 Desember 2022 n line, November 2, 2022 – December 21, 2022	BUMN Leadership & Management Institute bermitra dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) SOE Leadership &Management Institute in cooperation with with Indonesian Human Capital Forum (FHCI)
Antonius Haryanto Rainier	Komisaris Independen Independent Commissioner	*Executive Sharing session* TJSL	20 - 22 Januari 2022- Double Tree Hilton Jakarta January 20-22, 2022 – Double Tree Hilton Jakarta	PT Global Certification Indonesia
		Executive Sharing session TJSL	20 Oktober 2022- Pullman Hotel Jakarta October 20, 2022 – Pullman Hotel Jakarta	Interlink Technologi Service
		Onboarding Commissioner Program Angkatan 4, Tahun 2022 Onboarding Commissioner Batch 4 Program of 2022	*Online*, tanggal 17 Maret 2022 Online, March 17, 2022	Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Indonesian Human Capital Forum (FHCI)
		Onboarding Commissioner Program Angkatan 4, Tahun 2022 Onboarding Commissioner Batch 4 Program of 2022	*Online*, tanggal 21 Maret 2022 Online, March 21, 2022	Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Indonesian Human Capital Forum (FHCI)
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	*Executive Sharing session* TJSL	20 - 22 Januari 2022- Double Tree Hilton Jakarta January 20-22, 2022 – Double Tree Hilton Jakarta	PT Global Certification Indonesia
		Executive Sharing session TJSL	20 Oktober 2022- Pullman Hotel Jakarta October 20, 2022 – Pullman Hotel Jakarta	Interlink Technologi Service

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Materials	Tanggal/Tempat Date/Venue	Penyelenggara Organizer
Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner	*Executive Sharing session* TJSL	20 - 22 Januari 2022- Double Tree Hilton Jakarta January 20-22, 2022 – Double Tree Hilton Jakarta	PT Global Certification Indonesia
		Executive Sharing session TJSL	20 Oktober 2022- Pullman Hotel Jakarta October 20, 2022 – Pullman Hotel Jakarta	Interlink Technologi Service

*Berhenti menjabat sejak tanggal 20 September 2022
**Mulai menjabat sejak tanggal 20 September 2022
*No longer served since September 20, 2022
**Started serving since September 20, 2022

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Ketentuan tentang program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Kepada anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya, wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan.
2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapa pun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
3. Program pengenalan meliputi:
   a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
   b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
   c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; dan
   d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal lain yang tidak diperbolehkan.
4. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan.
5. Program pengenalan Perusahaan dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah RUPS memutuskan pengangkatan anggota Direksi yang baru.

Pelaksanaan program orientasi bagi Dewan Komisaris baru telah dilaksanakan pada Rabu, 21 September 2022 bertempat di ruang rapat Dewan Komisaris Lantai 1 Kantor Pusat Gedung Pelindo.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW BOARD OF COMMISSIONERS

The provisions regarding the orientation program for members of Board of Commissioners are as follows:

1. Members of Board of Commissioners who are appointed for the first time must be given an induction program regarding the Company.
2. The responsibility for conducting the orientation program rests with the Corporate Secretary or anyone who performs the function as the Corporate Secretary.
3. The orientation program includes:
   a. Implementation of GCG principles by the Company;
   b. An overview of the Company in relation to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
   c. Information related to delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee; and
   d. Information regarding the duties and responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors as well as other prohibited matters.
4. The Company's orientation program can be in the form of presentations, meetings, visits to Company facilities and review of documents or other programs deemed appropriate to the Company.
5. The Company's orientation program is carried out no later than 90 (ninety) calendar days after the GMS decides on the appointment of new members of Board of Commissioners.

The orientation program for new Board of Commissioners, Arif Toha Tjahjagama, was held on Wednesday, September 21, 2022 at the Board of Commissioners meeting room on the 1st floor of Pelindo Head Office Building.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2022 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya berdasarkan rencana kerja, antara lain:

1. Melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris dan organ pendukung, rapat internal Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi serta rapat koordinasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi.
2. Pengawasan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
3. Pengawasan pelaksanaan audit eksternal dan mengajukan usulan auditor eksternal.
4. Memberikan tanggapan terhadap hal-hal terkait dengan tupoksi Dewan Komisaris dalam pengelolaan perusahaan.
5. Menyampaikan Laporan Dewan Komisaris
6. Penugasan khusus.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dievaluasi secara periodik. Dewan Komisaris menetapkan indikator pencapaian kinerja (KPI) yang disahkan melalui RUPS setiap tahun. RUPS menetapkan indikator pencapaian kinerja (KPI) Dewan Komisaris yang merupakan ukuran penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasinya kepada Pemegang Saham/Menteri BUMN.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris tahun 2022 disusun dengan indikator utama dan bobot sebagai berikut:

1. Kontribusi terhadap capaian kinerja perusahaan
   Berupa kontribusi Dewan Komisaris atas pencapaian kinerja perusahaan, yang ditunjukkan melalui pencapaian KPI perusahaan.
2. Ketepatan waktu penyampaian pendapat dan saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris
   Merupakan ukuran ketepatan waktu penyampaian pendapat dan saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris, diukur menggunakan rata-rata penetapan persetujuan/rekomendasi dibandingkan dengan jumlah hari maksimal yang ditetapkan untuk proses persetujuan/pendapat/saran.
3. Kontribusi terhadap penerapan GCG
   Mengukur pencapaian GCG untuk aspek Dewan Komisaris pada Tahun 2021 serta tindak lanjut atas rekomendasi *area of improvement* pada pengukuran GCG tahun 2021.
4. Rapat dan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris
   Merupakan ukuran tingkat keaktifan Dewan Komisaris dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris, baik rapat internal dan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, serta jumlah kunjungan kerja Dewan Komisaris ke Cabang.

BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES IMPLEMENTATION

During 2022, the Board of Commissioners has performed its duties based on the work plan, among others:

1. Conducting internal meetings of Board of Commissioners and supporting organs, internal meetings of Board of Commissioners by inviting Board of Directors and coordination meetings between Board of Commissioners and Board of Directors.
2. Supervising the implementation of good corporate governance principles.
3. Supervising the implementation of external audit and proposing external auditor.
4. Providing responses to matters related to the duties and functions of Board of Commissioners in the management of the Company.
5. Submitting the Board of Commissioners Report
6. Special assignment.

BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE APPRAISAL

Procedure of Board of Commissioners Performance Appraisal

The performance of Board of Commissioners is evaluated periodically. Board of Commissioners determines the performance achievement indicators (KPI) which are ratified through the GMS every year. The GMS determines the performance achievement indicators (KPI) of Board of Commissioners as a success measure of Board of Commissioners' duties and responsibilities implementation based on the proposal of Board of Commissioners and submits a quarterly report on the realization progress to the Shareholders/Minister of SOEs.

Criteria of Board of Commissioners Performance Evaluation

The Key Performance Indicators (KPI) of Board of Commissioners in 2022 were prepared with the following main indicators and weights:

1. Contribution to the Company's performance achievements
   The contribution made by Board of Commissioners to the Company's performance achievements, which is shown through the achievement of corporate KPIs.
2. Timely submission of opinions and suggestions which are the obligations of Board of Commissioners
   Measuring the timeliness of submitting opinions and suggestions which are the obligations of Board of Commissioners, using the average approval/recommendation determination compared to the maximum number of days set for the approval/opinion/suggestion process.
3. Contribution to GCG implementation
   Measuring the achievement of GCG for Board of Commissioners aspect in 2021 as well as following up on recommendations for areas of improvement in 2021 GCG assessment.
4. Meetings and Working Visits of Board of Commissioners
   Measuring the level of activeness of Board of Commissioners in meetings held by Board of Commissioners, both internal meetings and meetings of Board of Commissioners with Board of Directors, as well as the number of working visits of Board of Commissioners to Branches.

5. Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan perusahaan
   Merupakan ukuran kegiatan pengawasan dan arahan yang diukur dari jumlah nasihat dan arahan yang diberikan kepada perusahaan atas 7 bidang utama sebagaimana yang dipersyaratkan dalam GCG.
6. Efektivitas kegiatan penunjang Dewan Komisaris
   Merupakan penilaian efektivitas kegiatan penunjang Dewan Komisaris yang diukur melalui jumlah penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta efektivitas organ pendukung Dewan Komisaris, yang terdiri atas tingkat kehadiran, jumlah rapat, dan laporan penugasan komite.

5. Supervision and direction to Board of Directors on Company plans and policies
   Measuring the supervision and direction activities, measured by the amount of advice and direction given to the Company on 7 main areas as required in GCG.

6. Effectiveness of Board of Commissioners' supporting activities
   Assessing the effectiveness of Board of Commissioners' supporting activities, measured by the number of competency development held, as well as the effectiveness of supporting organs of Board of Commissioners, which consists of the level of attendance, number of meetings, and committee assignment reports.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan sistem *self assessment.*

Assessor

The performance appraisal of Board of Commissioners is carried out using a self-assessment system.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Board of Commissioners Performance Assessment Results

No. No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Capaian Achievement Score
1.	Kontribusi terhadap capaian kinerja perusahaan Contribution to achieving the Company performance		10,00				10,42
	Kontribusi terhadap realisasi capaian KPI Direksi Contribution to realizing the Board of Directors KPI achievements	Poin Points	10,00	100	104,22	104%	10,42
2.	Ketepatan waktu penyampaian Pendapat dan Saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris Timeliness of Opinion submission and Advice that is the obligation of the Board of Commissioners		20,00				22,29
	Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas RKAP 2022, Laporan Triwulanan 2021, dan Laporan Tahunan 2020 Board of Commissioners Opinion and Advice on the 2022 RKAP, 2021 Quarterly Report, and 2020 Annual Report	Hari Days	5.00	30	19	120%	6,00

No. No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Capaian Achievement Score
	Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan RUPS/Menteri Responses to the Board of Directors actions that must be approved by the GMS/ Minister	Hari Days	5,00	14	13	120%	6,00
	Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris Responses to the Board of Directors actions that must be approved by the Board of Commissioners	Hari Days	5,00	14	16	86%	4,29
	Laporan Dewan Komisaris triwulanan dan Tahunan Board of Commissioners Quarterly and Annual Report	Hari Days	5,00	30	23	120%	6,00
3.	Kontribusi terhadap penerapan GCG Contribution to GCG implementation		10,00				10,00
	Kontribusi kualitas penerapan GCG Contribution to the quality of GCG implementation	Poin Points	5,00	31,5	31,5	100%	5,00
	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil *Assessment* GCG Aspek Dewan Komisaris Follow-up on the Board of Commissioners GCG Assessment Results Aspect Recommendations	%	5,00	100	100	100%	5,00
4.	Rapat dan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Board of Commissioners Meetings and Working Visits		18,00				19,70
	Jumlah Rapat Internal Dewan Komisaris Number of Board of Commissioners Internal Meetings	Jumlah Number	6,00	12	13	108%	6,50
	Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Number of Board of Commissioners and Board of Directors meetings	Jumlah Number	6,00	12	12	100%	6,00
	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Cabang Board of Commissioners Working Visits to Branches	Jumlah Number	6,00	7	28	120%	7,20

No. No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Capaian Achievement Score
5.	Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan perusahaan Board of Directors Supervision and directives on Company plans and policies	Jumlah Number	14,00	7	7	100%	16,80
6.	Efektivitas Kegiatan Penunjang Dewan Komisaris		28,00				33,50
	a. Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Board of Commissioners Competency Improvement						
	Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris Board of Commissioners' Competency Development	Pelaksanaan Implemented	10,00	4	5	120%	12,00
	b. Efektivitas Organ Pendukung Supporting Organs Effectiveness						
	Komite Audit Audit Committee						
	Pelaksanaan Rapat Internal Komite Audit Implementation of Internal Audit Committee Meetings	Jumlah Total	3,00	12	20	120%	3,60
	Laporan Penugasan Komite Audit Audit Committee Assignment Reports	Laporan Reports	3	4	24	120%	3,60
	Komite GCG & Pemantau Manajemen Risiko GCG & Risk Management Monitoring Committee						
	Pelaksanaan Rapat Internal Komite PMR Implementation of PMR Committee Internal Meetings	Jumlah Total	3,00	12	19	120%	3,60
	Laporan Penugasan Komite PMR PMR Committee Assignment Reports	Laporan Reports	3	4	22	120%	3,60
	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee						

No. No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Capaian Achievement Score
	Pelaksanaan Rapat Internal Komite NR Implementation of NR Committee Internal Meetings	Jumlah Total	3,00	12	14	117%	3,50
	Laporan Penugasan Komite NR NR Committee Assignment Reports	Laporan Reports	3,00	4	12	120%	3,60
	Jumlah Total		**100**				**112,71**

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian Kinerja Direksi Secara Kolegial

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Pengelolaan KPI Direksi secara Kolegial diawali dengan penetapan KPI Direksi secara kolegial yang mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku, aspirasi pemegang saham, RJPP dan capaian KPI Perusahaan tahun sebelumnya. Hasil penetapan Direksi secara kolegial selanjutnya dituangkan dalam Kontrak Manajemen Tahunan Direksi secara Kolegial yang ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris beserta perwakilan dari Pemegang Saham/RUPS.

Penilaian KPI Direksi secara Kolegial diawali dengan pemetaan sumber data dan unit pemilik data (*data producer*), untuk kemudian mengisi data realisasi KPI pada kertas kerja pengukuran KPI. Jika tidak tercapai, maka pemilik data harus menyampaikan justifikasi ketidaktercapaian KPI beserta dokumen pendukung lainnya kepada *Group* Perencanaan Strategis.

Pencapaian KPI Direksi secara Kolegial dilaporkan secara berkala yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Manajemen. Laporan Capaian KPI Direksi secara Kolegial yang menjadi kesatuan dalam Laporan Manajemen akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya hasil evaluasi capaian KPI Direksi secara Kolegial dalam tanggapan Laporan Manajemen kepada Direksi. Penilaian KPI Direksi secara Kolegial dilakukan mengacu kepada hasil pengukuran yang dilakukan oleh Auditor Eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan tahun yang bersangkutan dengan ketentuan realisasi akhir masing-masing variabel KPI maksimal 110% (seratus sepuluh persen).

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Adapun KPI Direksi secara kolegial Tahun 2022 terdiri atas berikut ini:

BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE APPRAISAL

Collegial Board of Directors Performance Appraisal

Procedure of Board Of Directors Performance Appraisal

Collegial management of the Board of Directors' KPIs begins with a collegial determination of the Board of Directors' KPIs that refers to applicable government regulations, shareholder aspirations, RJPP and the Company's KPI achievements in the previous year. The results of collegial determination of Board of Directors are then set forth in the Annual Management Contract of Board of Directors, which is collegially signed by Board of Directors and Board of Commissioners along with representatives of the Shareholders.

The Board of Directors' KPI assessment begins with the mapping of data sources and data producer units, to then fill in the KPI Realization data on KPI measurement working paper. If not achieved, the data owner must submit justification for KPI non-achievement along with other supporting documents to the Strategic Planning Group.

The Board of Directors' collegial KPI achievement on is reported periodically and becomes an integral part of the Management Report. The Board of Directors Collegial KPI Achievement Report, which is an integral part of the Management Report, will be evaluated by Audit Committee and a response from Board of Commissioners to Board of Directors on the KPI achievement will be submitted. The assessment of the Board of Directors' KPIs Collegially is carried out with reference to the measurement results carried out by the External Auditor who audited the Company's Financial Statements for the year in question with the provision that the final Realization of each KPI variable is a maximum of 110% (one hundred and ten percent).

BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE

The Board of Directors' collegial KPIs for 2021 consist of the following:

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pencapaian KPI Direksi secara kolegial adalah sebagai berikut:

RESULTS OF BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE APPRAISAL

The collegial KPI achievements of Board of Directors are as follows:

No.	KPI
Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia **Economic and Social Value for Indonesia**	
Finansial Financial	
1	EBITDA
2.	ROIG ≥ WAGG
3a.	*Interest Bearing Debt to* EBITDA
3b.	*Interest Bearing Debt to Invested Capital*
Operasional Operational	
4	*Container Throughput*
5	*Non-Container Throughput*
6.	B/S/H *Gross*
Sosial Social	
7.	Manfaat kesejahteraan masyarakat di sekitar Pelabuhan Benefits for the welfare of community around the port
Inovasi Model Bisnis **Business Model Innovation**	
8.	Efisiensi biaya melalui Pengadaan Terpusat Cost efficiency through Centralized Procurement
9.	Pembentukan dan Pengembangan *Subholding* Formation and Development of Subholding
Kepemimpinan Teknologi **Technology Leadership**	
10.	Standardisasi dan Digitalisasi layanan Pelabuhan Standardization and Digitization of Port services
11.	Implementasi *Green Technology* di Pelabuhan Implementation of Green Technology at the Port
Peningkatan Investasi **Investment Increase**	
12.	Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan Development of Port Infrastructure and Equipment
13.	Pengembangan Potensi Pelabuhan melalui Kerja Sama dengan *Strategic Partner* (e.g INA) Port Potential Development through Collaboration with Strategic Partners (e.g INA)
Pengembangan Talenta **Talent Development**	
14.	Perempuan dalam *nominated talent* % Female in Nominated Talent
	Milenial (≤ 42 tahun) dalam *nominated talent* Millennials (≤ 42 years old) in nominated talent
15.	Penyusunan kajian program *talent development* dan *Career Path System* di lingkup klaster Compilation of studies on talent development programs and Career Path System within the cluster

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Direksi yaitu Dewan Komisaris dan disampaikan ke Pemegang Saham/RUPS.

ASSESSOR

The performance of Board of Directors is evaluated by Board of Commissioners and the results are submitted to the Shareholders/GMS.

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pencapaian KPI Direksi secara kolegial adalah sebagai berikut:

RESULTS OF BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE APPRAISAL

The collegial KPI achievements of Board of Directors are as follows:

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2022 *Audited* Audited December 31, 2022		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia				**44,00**			**45,36**
Finansial Financial				**16,00**			**15,44**
EBITDA	Rupiah (juta) Rupiah (million)	10.588.056	*Maximize*	5	10.231.616	96,66%	4,83
ROIC-WACC	%	0,96	*Maximize*	5	1,71	110,00%	5,50
a. *Interest Bearing Debt to* EBITDA	Kali Times	4,10	*Minimize*	3	5,04	81,35%	2,44
b. *Interest Bearing Invested Capital*	%	48,74	*Minimize*	3	54,84	88,88%	2,67
Operasional Operational				**21,00**			**22,22**
Container Throughput	TEUS	17.250.158	*Maximize*	7	17.220.312	99,83	6,99
Non-Container Throughput	Ton	144.329.660	*Maximize*	7	159.727.836	110,00%	7,70
B/S/H (gross)	B/S/H	38,00	*Maximize*	7	40,90	107,63%	7,53
Sosial Social				**7,00**			**7,70**
Manfaat kesejahteraan masyarakat di sekitar pelabuhan Benefits for the welfare of community around the port	%	100,00	*Maximize*	7	118,00	110,00%	7,70
Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation				**14,00**			**14,41**
Efisiensi biaya melalui pengadaan terpusat Cost efficiency through Centralized Procurement	Rupiah (Miliar) Rupiah (billion)	115,40	*Maximize*	7,00	122,10	105,81	7,41
Pembentukan dan Pengembangan *Subholding* Formation and Development of Sub Holding	%	100,00	*Maximize*	7,00	100,00	100,00%	7,00
Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership				**14,00**			**14,70**
Standardisasi dan Digitalisasi Pelayanan Pelabuhan Standardization and Digitization of Port services	%	100,00	*Maximize*	7	100,00	100,00%	7,00

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2022 *Audited* Audited December 31, 2022		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
Implementasi *Green Technology* di Pelabuhan Implementation of Green Technology at the Port	%	100,00	*Maximize*	7	112,50	110,00%	7,70
Peningkatan Investasi Investment Increase				**14,00**			**13,84**
Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan Development of Port Infrastructure and Equipment	%	100,00	*Maximize*	7	108,78	108,78%	7,61
Pengembangan Potensi Pelabuhan melalui Kerja Sama dengan *Strategic Partner* (e.g.INA) Port Potential Development through Collaboration with Strategic Partners (e.g INA)	%	100,00	*Maximize*	7	89,00	89,00%	6,23
Pengembangan Talenta Talent Development				**14,00**			**15,40**
a. Perempuan dalam *Nominated Talent* Female in Nominated Talent	%	11,00	*Maximize*	6	14,29	110,00%	6,60
b. Milenial (<=42 tahun) dalam *Nominated Talent* Millennials (≤ 42 years old) in nominated talent	%	11,00	*Maximize*	6,00	14,29	110,00%	6,60
Penyusunan Kajian Program *Talent Development* dan *Career Path System* di Lingkup Klaster Compilation of studies on talent development programs and Career Path System within the cluster	%	50,00	*Maximize*	2,00	100,00	110,00%	2,20
Total				**100,00**			**103,71**

PENILAIAN KINERJA DIREKSI SECARA INDIVIDUAL

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Pengelolaan KPI Direksi secara Individual mengacu kepada peraturan pemerintah yang berlaku, RJPP, RKAP, KPI Direksi Kolegial dan inisiatif strategis/RKM pada direktorat tersebut. KPI Direksi Individual merupakan KPI Direktur Utama yang diturunkan kepada masing-masing anggota Direksi sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab anggota Direksi tersebut dalam lingkup direktorat yang dipimpinnya. KPI Direksi secara individual terdiri dari:

INDIVIDUAL PERFORMANCE APPRAISAL OF BOARD OF DIRECTORS

Procedure for Board of Directors Performance Appraisal

The management of Individual Directors' KPIs refers to the prevailing government regulations, RJPP, RKAP, Collegial BOARD OF Directors' KPIs and strategic initiatives/RKM in the directorate. Individual KPIs of Board of Directors are KPIs of President Director that are cascaded to each member of Board in accordance Individual KPIs of Board of Directors, consist of:

1. KPI Bersama: merupakan variabel KPI dalam KPI Direksi Kolegial yang disepakati menjadi tanggung jawab secara kolegial/bersama. Pembobotan atas KPI Bersama yaitu sebesar 40%.
2. KPI Direktorat: merupakan variabel KPI yang mencerminkan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direktorat yang memberikan kontribusi/dukungan secara langsung kepada KPI Direksi Kolegial. Pembobotan atas KPI Direktorat yaitu sebesar 60%.

Hasil penetapan Direksi secara Individual selanjutnya dituangkan dalam Kontrak Manajemen KPI Direksi secara Individual yang ditandatangani oleh Direksi terkait, Komisaris Utama dan Direktur Utama. Penilaian KPI Direksi secara Individual diawali dengan pemetaan sumber data dan unit pemilik data (*data producer*), untuk kemudian mengisi data realisasi KPI pada kertas kerja pengukuran KPI. Jika tidak tercapai, maka pemilik data harus menyampaikan justifikasi ketidaktercapaian KPI beserta dokumen pendukung lainnya kepada *Group* Perencanaan Strategis.

Pencapaian KPI Direksi secara Individual beserta penjelasan capaiannya disampaikan kepada Komisaris melalui Surat Dinas. Penilaian KPI Direksi secara Individual dilakukan mengacu kepada hasil pengukuran yang dilakukan oleh Auditor Eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan tahun yang bersangkutan, dengan ketentuan realisasi akhir masing-masing variable KPI maksimal 110% (seratus sepuluh persen).

Pihak yang Melakukan Penilaian

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Direksi yaitu Dewan Komisaris dan disampaikan ke Pemegang Saham/RUPS.

Kriteria dan Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Pencapaian KPI Wakil Direktur Utama adalah sebagai berikut:

1. Joint KPI: is a KPI variable in the Collegial KPI of Board of Directors that is agreed to be a collegial/shared responsibility. The weighting of Joint KPI is 40%.
2. Directorate KPI: is a KPI variable that reflects the duties, functions and responsibilities of the Directorate that directly contributes/supports the Collegial KPI of Board of Directors. The weighting of Directorate KPI is 60%.

Individual Directors' KPI determination results are then outlined in the Individual Directors' KPI Management Contract signed by the relevant Directors, President Commissioner and President Director. The assessment of Individual Directors' KPIs begins with the mapping of data sources and data producer units, to then fill in the KPI Realization data on KPI measurement working paper. If not achieved, the data owner must submit justification for KPI non-achievement along with other supporting documents to the Strategic Planning Group.

Individual KPI achievement of Board of Directors along with an explanation of the achievement is submitted to the Commissioner through an Official Letter. The assessment of the individual KPIs of Board of Directors is carried out with reference to the measurement results of External Auditor who audited the Company's Financial Statements for the year concerned, provided that the final Realization of each KPI variable is a maximum of 110% (one hundred and ten percent).

Assessor

The performance of Board of Directors is evaluated by Board of Commissioners and the results are submitted to the Shareholders/GMS.

Criteria and Results of Board of Directors Performance Appraisal

The KPI achievements of Vice President Director are as follows:

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2022 *Audited* Audited December 31, 2022		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
KPI Bersama Joint KPIs							
EBITDA	Rupiah (juta) Rupiah (million)	10.588.056	*Maximize*	6	10.234.616	96,66%	5,80
ROIC-WACC	%	0,96	*Maximize*	5	1,71	110,00%	5,50
Interest Bearing Debt to EBITDA	Kali Times	4,10	*Minimize*	5	5,04	81,35%	4,07
Interest Bearing Invested Capital	%	48,74	*Minimize*	9	54,84	88,88%	8,00
Pembentukan dan Pengembangan *Subholding* Formation and Development of Subholding	%	100,00	*Maximize*	15	100,00	100,00%	15,00
KPI Wakil Direktur Utama KPI of Vice President Director							
Container Throughput	TEUS	17.250.158	*Maximize*	5	17.220.312	99,83%	4,99

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2022 *Audited* Audited December 31, 2022		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
Non-Container Throughput	Ton	144.329.660	*Maximize*	5	159.727.836	110,00%	5,50
B/S/H *(gross)*	B/S/H	38,00	*Maximize*	5	40,90	107,63%	5,38
Manfaat kesejahteraan masyarakat di sekitar pelabuhan Benefits for the welfare of community around the port	%	100,00	*Maximize*	3	118 ,00	110,00%	3,30
Efisiensi biaya melalui pengadaan terpusat Cost efficiency through Centralized Procurement	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	115,40	*Maximize*	3	122,10	105,81%	3,17
Standardisasi dan Digitalisasi Pelayanan Pelabuhan Standardization and Digitization of Port services	%	100,00	*Maximize*	3	100,00	100,00%	3,00
Implementasi *Green Technology* di Pelabuhan Implementation of Green Technology at the Port	%	100,00	*Maximize*	2	112,50	110,00%	2,20
Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan Development of Port Infrastructure and Equipment	%	100,00	*Maximize*	3	108,78	108,78%	3,26
Pengembangan Potensi Pelabuhan melalui Kerja Sama dengan *Strategic Partner* (e.g.INA) Port Potential Development through Collaboration with Strategic Partners (e.g INA)	%	100,00	*Maximize*	6	89,00	89,00%	5,34
Perempuan dalam *Nominated Talent* Female in Nominated Talent	%	11,00	*Maximize*	3	14,29	110,00%	3,30
Milenial (<=42 tahun) dalam *Nominated Talent* Millennials (≤ 42 years old) in nominated talent	%	11,00	*Maximize*	3	14,29	110,00%	3,30

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2022 *Audited* Audited December 31, 2022		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
Penyusunan Kajian Program *Talent Development dan Career Path System* di Lingkup Klaster Compilation of studies on talent development programs and Career Path System within the cluster	%	50,00	*Maximize*	1	100,00	110,00%	1,10
Peralihan Status tanah HPL, HGB, dan HP Transition of Land Status for HPL, HGB and HP	%	50,00	*Maximize*	6	100,00	110,00%	6,60
Review penyusunan peraturan Direksi Pelindo Review of the preparation of Pelindo Board of Directors regulations	%	100,00	*Maximize*	6	400,00	110,00%	6,60
Realisasi Program Kerja Kajian Transformasi Bisnis Anak Perusahaan Realization of Subsidiary Business Transformation Review Program	%	100,00	*Maximize*	6	100,00	100,00%	6,00
Total				**100**			**101,41**

Pencapaian KPI Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

The KPI achievements of Finance and Risk Management Director are as follows:

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2022 *Audited* Audited December 31, 2022		
					Realisasi Realization	Capaian	Skor
EBITDA	Rupiah (juta) Rupiah (million)	10.588.056	*Maximize*	9	10.234.616	96,66%	8,70
ROIC-WACC	%	0,96	*Maximize*	7	1,71	110,00%	7,70
Interest Bearing Debt to EBITDA	Kali Times	4,10	*Minimize*	7	5,04	81,35%	5,69
Interest Bearing Invested Capital	%	48,74	*Minimize*	10	54,84	88,88%	8,89

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2022 *Audited* Audited December 31, 2022		
					Realisasi Realization	Capaian	Skor
Pembentukan dan Pengembangan *Subholding* Formation and Development of Subholding	%	100,00	*Maximize*	7	100,00	100,00%	7,00
KPI Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KPI of Finance and Risk Management Director							
Standardisasi dan Digitalisasi Pelayanan Pelabuhan Standardization and Digitization of Port services	%	100,00	*Maximize*	10	100,00	100,00%	10,00
Pengembangan Potensi Pelabuhan melalui Kerja Sama dengan *Strategic Partner* (e.g.INA) Port Potential Development through Collaboration with Strategic Partners (e.g INA)	%	100,00	*Maximize*	8	89,00	89,000%	7,12
Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan Development of Port Infrastructure and Equipment	%	100,00	*Maximize*	6	108,78	108,78%	6,53
Capaian KPI Penanaman Modal Negara (PMN) Achievement of State Investment KPI (PMN)	%	100,00	*Maximize*	8	93,66	93,66%	7,49
Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko Maturity Level of Risk Management	%	3,00	*Maximize*	7	3,36	110,00%	7,70
Penurunan/ *Optimalisasi Financing Cost* Reducing/Optimizing Financing Costs	Rupiah (miliar) Rupiah (billion)	413,40	*Maximize*	7	501,00	110,00%	7,70
Implementasi Standardisasi Proses Pilar Keuangan Implementation of Standardization of Financial Pillar Process	%	100,00	*Maximize*	7	110.00	110,00	7,70
Pengembangan *Supply Chain Financing* Development of Supply Chain Financing	%	100,00	*Maximize*	7	100,00	100,00	7,00

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2022 *Audited* Audited December 31, 2022		
					Realisasi Realization	Capaian	Skor
Total				**100**			**99,22**

Pencapaian KPI Direktur SDM dan Umum adalah sebagai berikut: The KPI achievements of HR and General Affairs Director are as follows:

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2022 *Audited* Audited December 31, 2022		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor
KPI Bersama Joint KPIs							
EBITDA	Rupiah (juta) Rupiah (million)	10.588.056	*Maximize*	9	10.234.616	96,66%	8,70
ROIC-WACC	%	0,96	*Maximize*	6	1,71	110,00%	6,60
Interest Bearing Debt to EBITDA	Kali Times	4,10	*Minimize*	6	5,04	81,35%	4,88
Interest Bearing to Invested Capital	%	48,74	*Minimize*	8	54,84	88,88%	7,11
Pembentukan dan Pengembangan *Subholding* Formation and Development of Subholding	%	100,00	*Maximize*	11	100,00	100,00%	11,00
KPI Direktur SDM dan Umum HR and General Affairs Director							
Manfaat kesejahteraan masyarakat di sekitar pelabuhan Benefits for the welfare of community around the	%	100,00	*Maximize*	7	118 ,00	110,00%	7,70
Container Throughput	TEUS	17.250.158	*Maximize*	5	17.220.312	99,83%	4,99
Non-Container Throughput	Ton	144.329.660	*Maximize*	5	159.727.836	110,00%	5,50
B/S/H *(gross)*	B/S/H	38,00	*Maximize*	5	40,90	107,63%	5,38
Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Pelabuhan Standardization and Digitization of Port services	%	100,00	*Maximize*	5	105,99	105,99%	5,30

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2022 *Audited* Audited December 31, 2022		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor
Efisiensi biaya melalui pengadaan terpusat Cost efficiency through Centralized Procurement	Rupiah (miliar) Rupiah (billion)	115,40	*Maximize*	7	122,10	105,81%	7,41
Perempuan dalam *Nominated Talent* Female in Nominated Talent	%	11,00	*Maximize*	7	14,29	110,00%	7,70
Milenial (<=42 tahun) dalam *Nominated Talent* Millennials (≤ 42 years old) in nominated talent	%	11,00	*Maximize*	7	14,29	110,00%	7,70
Penyusunan Kajian Program *Talent Development* dan *Career Path System* di Lingkup Klaster Compilation of studies on talent development programs and Career Path System within the cluster	%	50,00	*Maximize*	7	100,00	110,00%	7,70
Capaian KPI Penanaman Modal Negara (PMN) Achievement of State Investment KPI (PMN)	%	100,00	*Maximize*	5	93,66	93,66%	4,68
Total				**100**			**102,35**

Pencapaian KPI Direktur Strategi adalah sebagai berikut: The KPI achievements of Strategy Director are as follows:

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2022 *Audited* Audited December 31, 2022		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
KPI Bersama Joint KPIs							
EBITDA	Rupiah (juta) Rupiah (million)	10.588.056	*Maximize*	6	10.234.616	96,66%	5,80
ROIC-WACC	%	0,96	*Maximize*	6	1,71	110,00%	6,60
Interest Bearing Debt to EBITDA	Kali Times	4,10	*Minimize*	6	5,04	81,35%	4,88
Interest Bearing to Invested Capital	%	48,74	*Minimize*	10	54,84	88,88%	8,89

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2022 *Audited* Audited December 31, 2022		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
Pembentukan dan Pengembangan *Subholding* Formation and Development of Subholding	%	100,00	*Maximize*	12	100,00	100%	12,00
KPI Direktur Strategi KPI of Strategy Director							
Container Throughput	TEUS	17.250.158	*Maximize*	7	17.220.312	99,83%	6,99
Non-Container Throughput	Ton	144.329.660	*Maximize*	7	159.727.836	110%	7,70
B/S/H *(gross)*	B/S/H	38,00	*Maximize*	6	40,90	107,63%	6,46
Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Pelabuhan Standardization and Digitization of Port services	%	100,00	*Maximize*	9	100,00	100,00%	9,00
Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan Development of Port Infrastructure and Equipment	%	100,00	*Maximize*	7	108,78	108,78%	7,61
Pengembangan Potensi Pelabuhan melalui Kerja Sama dengan *Strategic Partner* (e.g.INA) Port Potential Development through Collaboration with Strategic Partners (e.g INA)	%	100,00	*Maximize*	9	89,00	89,00%	8,01
Penyusunan Kajian Program *Talent Development* dan Career Path System di Lingkup Klaster Compilation of studies on talent development programs and Career Path System within the cluster	%	50,00	*Maximize*	6	100,00	110,00%	6,60
IT *Masterplan*	%	100,00	*Maximize*	9	100,00	100,00%	9,00
Total				**100**			**99,54**

Pencapaian KPI Direktur Investasi adalah sebagai berikut: The KPI achievements of Investment Director are as follows:

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2022 *Audited* Audited December 31, 2022		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor
KPI Bersama Joint KPIs							
EBITDA	Rupiah (juta) Rupiah (million)	10.588.056	*Maximize*	8	10.234.616	96,66%	7,73
ROIC-WACC	%	0,96	*Maximize*	6	1,71	110,00%	6,60
Interest Bearing Debt to EBITDA	Kali Times	4,10	*Minimize*	7	5,04	81,35%	5,69
Interest Bearing Invested to Capital	%	48,74	*Minimize*	9	54,84	88,88%	8,00
Pembentukan dan Pengembangan *Subholding* Formation and Development of Subholding	%	100,00	*Maximize*	10	100,00	100,00%	10,00
KPI Direktur Investasi KPI of Investment Director							
Container Throughput	TEUS	17.250.158	*Maximize*	6	17.220.312	99,83%	5,99
Non-Container Throughput	Ton	144.329.660	*Maximize*	6	159.727.836	110,00%	6,60
B/S/H *(gross)*	B/S/H	38,00	*Maximize*	6	40,90	107,63%	6,46
Manfaat kesejahteraan masyarakat di sekitar pelabuhan Benefits for the welfare of community around the port	%	100,00	*Maximize*	6	118,00	110,00%	6,60
Efisiensi biaya melalui pengadaan terpusat Cost efficiency through Centralized Procurement	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	115,40	*Maximize*	6	122,10	105,81%	6,35
Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Pelabuhan Standardization and Digitization of Port services	%	100,00	*Maximize*	6	100,00	100,00%	6,00
Implementasi *Green Technology* di Pelabuhan Implementation of Green Technology at the Port	%	100,00	*Maximize*	8	112,50	110,00%	8,80

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2022 *Audited* Audited December 31, 2022		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor
Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan Development of Port Infrastructure and Equipment	%	100,00	*Maximize*	8	108,78	108,78%	8,70
Capaian KPI Penanaman Modal Negara (PMN) Achievement of State Investment KPI (PMN)	%	100,00	*Maximize*	8	93,66	93,66	7,49
Total				**100**			**101,01**

Pencapaian KPI Direktur Pengelola adalah sebagai berikut: The KPI achievements of Managing Director are as follows:

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2022 *Audited* Audited December 31, 2022		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor
KPI Bersama Joint KPIs							
EBITDA	Rupiah (juta) Rupiah (million)	10.588.056	*Maximize*	9	10.234.616	96,66%	8,70
ROIC-WACC	%	0,96	*Maximize*	7	1,71	110,00%	7,70
Interest Bearing Debt to EBITDA	Kali	4,10	*Minimize*	7	5,04	81,35%	5,69
Interest Bearing to Invested Capital	%	48,74	*Minimize*	8	54,84	88,88%	7,11
Pembentukan dan Pengembangan *Subholding* Formation and Development of Subholding	%	100,00	*Maximize*	9	100,00	100,00%	9,00
KPI Direktur Pengelola KPI of Managing Director							
Container Throughput	TEUS	17.250.158	*Maximize*	10	17.220.312	99,83%	9,98
Non-Container Throughput	Ton	144.329.660	*Maximize*	10	159.727.836	110,00%	11,00
B/S/H *(gross)*	B/S/H	38,00	*Maximize*	10	40,90	107,63%	10,76
Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Pelabuhan Standardization and Digitization of Port services	%	100,00	*Maximize*	10	100,00	100,00%	10,00
Waiting Time for Pilot	Jam	0,50	*Minimize*	5	0,12	110,00%	5,50

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2022 *Audited* Audited December 31, 2022		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor
Peningkatan Pelayanan melalui *Key Account Management* terintegrasi Service Improvement through integrated Key Account Management	%	100,00	*Maximize*	5	821,05	110,00%	5,50
Optimalisasi *Asset* Lahan Optimization of Land Assets	Rupiah (miliar) Rupiah (billion)	27,00	*Maximize*	5	64,39	110,00%	5,50
Standardisasi proses bisnis Pelindo Standardization of Pelindo's business processes	%	25,00	*Maximize*	5	56,52	110,00%	5,50
Total				**100**			**101,94**

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris meliputi Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko. Prosedur penilaian terhadap kinerja Komite dilakukan secara periodik. Kriteria penilaian atas kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris merupakan bagian dari KPI Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh Pemegang Saham. Adapun kriteria penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Pelaksanaan Rapat Internal Komite dan Laporan Penugasan Komite.

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris menilai komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi aspek-aspek operasional dan strategis Perseroan dengan baik.

MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, dengan memberitahukan rencana pemberhentian tersebut kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik secara lisan maupun tertulis oleh Pemegang Saham. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, antara lain:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;

PERFORMANCE APPRAISAL OF COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BASIS OF APPRAISAL

In carrying out its duties and responsibilities, Board of Commissioners is assisted by committees under Board of Commissioners including Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and GCG and Risk Management Monitoring Committee. The Committee performance assessment procedure is conducted periodically. The criteria for assessing the performance of Committees under Board of Commissioners is part of the KPI of Board of Commissioners that has been approved by Shareholders. The criteria for assessing the performance of Committees under Board of Commissioners are the Implementation of Internal Committee Meetings and Committee Assignment Report.

Throughout 2022, Board of Commissioners assessed that the Committees have properly performed their duties and responsibilities in overseeing the operational and strategic aspects of the Company.

BOARD OF COMMISSIONERS RESIGNATION AND DISMISSAL MECHANISM

Members of Board of Commissioners can be dismissed at any time based on a GMS resolution by stating the reasons, by notifying the planned dismissal to the member of Board of Commissioners concerned, both orally and in writing by the Shareholders. The dismissal of Board of Commissioners member is carried out if based on the facts, the member concerned, among others:

1. Unable to carry out his/her duties properly;
2. Fail to comply with statutory provisions and/or provisions of the Articles of Association;

3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagaimana anggota Dewan Komisaris BUMN;
5. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Mengundurkan diri;
7. Memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris;
8. Berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri;
2. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS;
3. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dapat kurang dari 30 (tiga puluh) hari, apabila secara peraturan perundangan tidak memperbolehkan yang bersangkutan merangkap jabatan;
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak mengundurkan diri dan secara peraturan perundangan tidak memperbolehkan yang bersangkutan merangkap jabatan, maka anggota Dewan Komisaris tersebut dianggap telah mengundurkan diri dan RUPS hanya menetapkan atau meratifikasi pengunduran diri tersebut telah menjadi efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pelindo senantiasa menjaga keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif, komprehensif, optimal, serta berdampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Perusahaan. Dengan adanya keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, diharapkan Perusahaan dapat memperkaya sudut pandang dalam pengambilan keputusan, baik dalam jajaran Dewan Komisaris maupun Direksi, sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam kegiatan operasional dan manajemen Perusahaan, termasuk dalam hal penerapan tata kelola perusahaan.

3. Involved in actions that are detrimental to the Company and/or the State;
4. Performing actions that violate ethics and/or propriety that should be respected as members of Board of Commissioners of SOEs;
5. Declared guilty by a court decision that has permanent legal force;
6. Resigned;
7. Having family relations up to the third degree, both in a straight line and sideways, including relationships arising from marriages between members of Board of Directors and members of Board of Commissioners;
8. Based on other reasons deemed appropriate by the GMS for the interests and objectives of the Company.

Members of Board of Commissioners have the right to resign under the following conditions:

1. Notify in writing regarding his/her intention to the Shareholders, other members of Board of Commissioners and Board of Directors no later than 30 (thirty) days prior to the date of his/her resignation. If the resignation letter states that the effective date is less than 30 (thirty) days from the receipt date of the letter, then it is deemed not to mention the effective date of resignation;
2. If until the date requested by the member of Board of Commissioners concerned or within 30 (thirty) days from the date the letter of resignation is received in the event that the effective date of resignation is not stated, then the member of Board of Commissioners resigns automatically on the date requested mentioned above or with the passing of 30 (thirty) days from the date the letter of resignation is received without requiring the GMS approval;
3. The resignation of a member of Board of Commissioners can be less than 30 (thirty) days, if the laws and regulations do not allow the person concerned to have concurrent positions;
4. 4. In the event that a member of Board of Commissioners does not resign and the laws and regulations do not allow the person concerned to hold concurrent positions, then the member of Board of Commissioners is considered to have resigned and the GMS only determines or ratifies the resignation as effective based on laws and regulations.

POLICY OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS DIVERSITY

Pelindo always maintains diversity in the composition of Board of Commissioners and Board of Directors to encourage more objective, comprehensive, optimal decision making, and have a positive impact on the supervision and management of the Company. With the diversity in the composition of Board of Commissioners and Board of Directors, the Company is expected to enrich the point of view in decision making, both within Board of Commissioners and Board of Directors, so as to provide added value in the Company's operational and management activities, including in terms of implementing corporate governance.

Board Manual telah mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan pengetahuan dan keahlian. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki keberagaman pengetahuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan operasional Perusahaan. Perusahaan belum mengembangkan kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi secara khusus, Keberagaman usia dan gender belum diatur karena Perusahaan masih menekankan pada keberagaman keahlian tanpa memandang usia dan gender.

The Board Manual stipulates that members of Board of Commissioners and Board of Directors must fulfil the knowledge and expertise requirements. This indicates that Board of Commissioners and Board of Directors must have a diversity of knowledge and expertise in accordance with the Company's operational needs. The Company has not developed a specific policy on the diversity in composition of Board of Commissioners and Board of Directors. Age and gender diversity have not been regulated because the Company still emphasises on diversity of expertise regardless of age and gender.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Diversity in Board of Commissioners Composition

Nama Name	**Jabatan** Position	**Usia** Age	**Jenis Kelamin** Gender	**Pendidikan** Education	**Pengalaman Kerja** **Work Experience**	**Keahlian** **Expertise**
Marsetio	Plt. Komisaris Utama/Komisaris Independen Acting President Commissioner/ Independent Commissioner	65 tahun 65 years old	Pria Male	• S1 bidang Fisip/ ADNE • S2 bidang *Management* • Bachelor of Social and Political Science/ ADNE • Master in Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan dan pemerintahan Has work experience in education and government sector	Fisip dan Manajemen Faculty of Social and Political Sciences and Management
Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner	65 tahun 65 years old	Pria Male	• Program Sarjana Muda APDN • S1 Ilmu Pemerintahan • S2 bidang Kajian Ketahanan Nasional • S2 bidang Administrasi Negara • APDN Baccalaureate Program • Bachelor of Government Science • Master of National Resilience Studies • Master of State Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in government sector	Ilmu Pemerintahan Administrasi Negara Government Science Public Administration
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	64 tahun 64 years old	Pria Male	• S1 bidang Hukum • S2 bidang Manajemen • Bachelor of Law • Master of Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan Has work experience in banking sector	Hukum Manajemen Law and Management

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Diversity in Board of Commissioners Composition

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Antonius Rainier Haryanto	Komisaris Commissioner	63 tahun 63 years old	Pria Male	• S1 bidang Teknik Sipil • S2 bidang Teknik Manajemen Lingkungan • S3 bidang *Build Environment* • Bachelor of Civil Engineering • Master of Environmental Management Engineering • Doctorate in Build Environment	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in government sector	Teknik Sipil Manajemen Lingkungan Civil Engineering and Management Environmental
R. Agus H. Purnomo	Komisaris Commissioner	60 tahun 60 years old	Pria Male	• S1 bidang Teknik Mesin • S2 bidang Manajemen • Bachelor of Mechanical Engineering • Master in Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in government sector	Teknik Mesin Manajemen Mechanical Engineering and Management
Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	60 tahun 60 years old	Pria Male	S2 bidang Hukum Master of Law	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum Has work experience in legal sector	Hukum Law
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	57 tahun 57 years old	Pria Male	S1 bidang Sosial Politik Administrasi Negara Bachelor of Social Politics and State Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang perdagangan Has work experience in trade sector	Sosial Politik Administrasi Negara Social Politics Public Administration
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	52 tahun 52 years old	Pria Male	• S1 bidang Teknik Sipil • S2 bidang *Infrastructure Management* • S2 bidang *Business Administration* • Bachelor in Civil Engineering • Master in Infrastructure Management • Master in Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang jasa kepelabuhan dan *logistic* Has work experience in port and logistics services sector	Teknik Sipil Bisnis Administrasi Civil Engineering Business Administration

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Diversity in Board of Commissioners Composition

Nama Name	**Jabatan** Position	**Usia** Age	**Jenis Kelamin** Gender	**Pendidikan** Education	**Pengalaman Kerja** **Work Experience**	**Keahlian** **Expertise**
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	54 tahun 54 years old	Pria Male	• S1 bidang Ilmu Hukum • S2 bidang Hukum Bisnis • Bachelor in Law • Master in Business Law	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan jasa kepelabuhan dan *logistic* Has work experience in legal, port and logistics services sector	Hukum Bisnis Law Business
Ihsanuddin Usman	Direktur SDM dan Umum Director of HC and General Affairs	53 tahun 53 years old	Pria Male	• S1 bidang Teknik Pertambangan • S2 bidang *Innovation & Technology Management* • Bachelor in Mining Engineering • Master in Innovation & Technology Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang pertambangan dan jasa kepelabuhan dan *logistic* Has work experience in mining, port and logistics services sector	Teknik Pertambangan Teknologi Mining Engineering Technology
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	49 tahun 49 years old	Pria Male	• S1 bidang Ekonomi Manajemen • S2 bidang Manajemen • Bachelor in Management Economics • Master in Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang jasa kepelabuhan dan *logistic* Has work experience in port and logistics services sector	Manajemen Management

NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN PER-10/MBU/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan pada Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Bakal calon Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan melalui Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah seorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan formal, persyaratan materiil dan persyaratan lain serta lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). Penetapan Direksi dan Dewan dilakukan melalui Keputusan RUPS.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

Dasar Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kewenangan Pemegang Saham dan ditetapkan dalam RUPS yang formulasinya mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-13/MBU/09/2021 Tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi berawal dari tahap pengusulan yang diajukan oleh pihak Direksi. Direksi meminta pihak ketiga (konsultan) untuk melakukan review remunerasi Direktur Utama. Hasil review dari konsultan tersebut diajukan kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan rekomendasi. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan telaah dan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi. Rekomendasi Dewan Komisaris tersebut disampaikan kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS NOMINATION AND REMUNERATION

PROCEDURE OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS NOMINATION

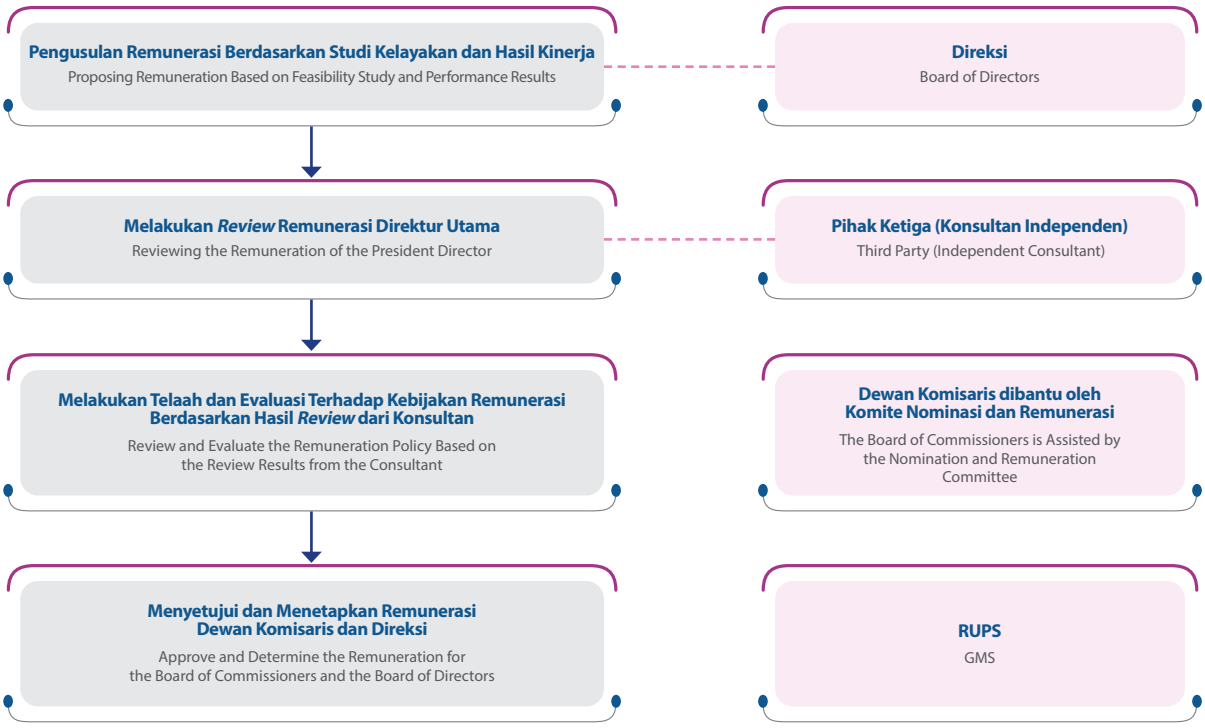
In the nomination process of Board of Commissioners and Board of Directors, the Company refers to the Minister of SOEs Regulation PER-10/MBU/10/2020 dated October 9, 2020 concerning Amendments to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-02/MBU/02/2015 on Requirements and Procedures for Appointing and Dismissing Members of Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises and to the Regulation of Minister of SOEs PER-03/MBU/02/2015 dated February 17, 2015 concerning Requirements and Procedures for Appointing and Dismissing Members of Board of Directors of State-Owned Enterprises.

Candidates for Board of Commissioners and Board of Directors are proposed through Board of Commissioners assisted by Remuneration and Nomination Committee. The candidate who will be determined as a candidate for Board of Commissioners and Board of Directors is a person who has been declared to have fulfilled the formal requirements, material requirements and other requirements and passed the Fit and Proper Test (UKK). Board of Directors and Board of Commissioners are appointed through a GMS Resolution.

REMUNERATION DETERMINATION PROCEDURE

The basis for determining remuneration for members of Board of Commissioners and Board of Directors is the authority of Shareholders and is determined at the GMS, the formulation of which refers to the Regulation of Minister of SOEs Number: PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of SOEs as amended several times, most recently by the Regulation of Minister of SOEs Number: PER-13/MBU/09/2021 dated September 24, 2021 on the Sixth Amendment to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

The remuneration determination procedure for Board of Commissioners and Board of Directors starts from the proposal stage submitted by Board of Directors. Board of Directors requests a third party (consultant) to review the remuneration of President Director. The review result from the consultant is submitted to Board of Commissioners for recommendation. Board of Commissioners, assisted by Nomination and Remuneration Committee, reviews and evaluates the remuneration policy. Board of Commissioners' recommendations are then submitted to the Shareholders for approval at the GMS.



INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI

Penetapan Penghasilan yang berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

INDICATORS OF REMUNERATION DETERMINATION

Income in the form of fixed Salary or Honorarium, Allowances and Facilities is determined by considering business scale factor, business complexity factor, inflation rate, conditions and financial capabilities of the Company, and other relevant factors, and must not conflict with statutory regulations.

STRUKTUR DAN JUMLAH NOMINAL/KOMPONEN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut.

STRUCTURE AND AMOUNT OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION

The remuneration structure of Board of Commissioners and Board of Directors is as follows.

Jenis Penghasilan Income Type	**Keputusan** Decision		**Keterangan** Remarks
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	
Honorarium/Gaji **Honorarium/Salary**	Honorarium Komisaris Utama : 45% dari Direktur Utama Anggota Dewan Komisaris: 90% dari Komisaris Utama Honorarium of President Commissioner: 45% of President Director Members of Board of Commissioners: 90% of President Commissioner	Gaji Direktur Utama : 100% Anggota Direksi lainnya 85% dari gaji Direktur Utama. President Director Salary: 100% Other members of Board of Directors 85% of President Director's salary.	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently by PER-13/MBU/09/2021

Jenis Penghasilan Income Type	Keputusan Decision		Keterangan Remarks
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	
Tunjangan **Allowances**			
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	1 (satu) kali honorarium 1 (one) time honorarium	1 (satu) kali gaji 1 (one) time salary	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently by PER-13/MBU/09/2021
Asuransi Purna Jabatan Post-Service Insurance	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun Premium borne by the Company is 25% of salary in 1 year	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun Premium borne by the Company is 25% of salary in 1 year	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently by PER-13/MBU/09/2021
Tunjangan perumahan Housing Allowance	-	Rp25.000.000 per bulan Rp25,000,000 per month	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021. Apabila menyediakan rumah jabatan wajib digunakan sampai berakhir dan yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan. In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently by PER-13/MBU/09/2021 If provided, the office house must be used until the term of office of Board of Directors ends and the person concerned is not given a housing allowance.
Tunjangan Transportasi Transport Allowance	20% dari honorarium per bulan 20% of honorarium per month	-	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently by PER-13/MBU/09/2021
Fasilitas **Facility**			
Fasilitas Kendaraan Vehicle Facility	-	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan. 1 (one) unit along with maintenance and operational costs, taking into account the Company's financial condition.	Spesifikasi dan jenis kendaraan diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 3.500 cc. Specifications and types of vehicles are regulated by Board of Commissioners with a maximum limit of 3,500 cc.

Jenis Penghasilan Income Type	Keputusan Decision		Keterangan Remarks
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	
Fasilitas Kesehatan Medical Facility	Dalam bentuk asuransi Kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*) Health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost)	Dalam bentuk asuransi Kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*) Health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost)	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently by PER-13/MBU/09/2021
Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance Facility	Sebesar pemakaian (*at cost*) At cost	Sebesar pemakaian (*at cost*) At cost	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently by PER-13/MBU/09/2021
Tantiem/Insentif Kinerja Tantiem/Work Incentives	Pemberian Tantiem/IK diberikan secara proporsional berdasarkan capaian kinerja pada tahun yang bersangkutan serta mempertimbangkan capaian kontribusi dividen kepada Negara atau indikator lainnya yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun yang bersangkutan. The granting of Tantiem/IK is given proportionally based on performance achievements in the year concerned and considering the achievement of dividend contributions to the State or other indicators determined by the GMS/Minister in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the year concerned.	Pemberian Tantiem/IK diberikan secara proporsional berdasarkan capaian kinerja pada tahun yang bersangkutan serta mempertimbangkan capaian kontribusi dividen kepada Negara atau indikator lainnya yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun yang bersangkutan. The granting of Tantiem/IK is given proportionally based on performance achievements in the year concerned and considering the achievement of dividend contributions to the State or other indicators determined by the GMS/Minister in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the year concerned.	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently by PER-13/MBU/09/2021

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris diberi kewenangan untuk membentuk organ-organ pendukung dalam rangka mendorong efektivitas fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretariat Dewan Komisaris diangkat untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, khususnya di bidang kesekretariatan dan penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain, termasuk Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris.

Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris juga melaksanakan tugas lain berupa:

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
4. Bertindak sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

ORGANS AND COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is authorised to establish supporting organs in order to encourage the effectiveness of its supervisory and advisory functions to the Board of Directors. The policy refers to the Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/2012 concerning Amendment to the Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises and the Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 on Supporting Organs of Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises. In carrying out its duties, Board of Commissioners is assisted by Secretary of Board of Commissioners, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and GCG and Risk Management Monitoring Committee.

SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS

Secretary of Board of Commissioners is appointed to assist the smooth running of Board of Commissioners' duties, particularly in the field of secretarial and liaison between Board of Commissioners and other parties, including the Board of Directors.

Secretary of Board of Commissioners Duties and Responsibilities

Secretary of Board of Commissioners carries out the following duties:

1. Prepare the meetings, including the Board of Commissioners' briefing sheet;
2. Prepare the minutes of Board of Commissioners meeting in accordance with the provisions;
3. Administering the Board of Commissioners' documents, both incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
4. Prepare the Board of Commissioners Work Plan and Budget;
5. Drafting the Board of Commissioners Reports.

Carry out other duties from the Board of Commissioners. Secretary to Board of Commissioners also carries out other duties in the form of:

1. Ensuring that Board of Commissioners complies with laws and regulations and applies GCG principles;
2. Provide information needed by Board of Commissioners periodically and/or at any time when requested;
3. Coordinating Committee members, if necessary in order to expedite the duties of Board of Commissioners;
4. Act as a liaison officer for Board of Commissioners with other parties.

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



Rizqi Kurnianto
Sekretaris Dewan Komisaris / *Secretary of Board of Commissioners*

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/ Usia Place and Date of Birth/Age	Jakarta, 22 Maret 1985/37 tahun	Jakarta, March 22, 1985/37 years old
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Program Diploma III Akuntansi (2006) • S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2009) • S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2014)	• State College of Accountancy, Diploma in Accounting Program (2006) • Bachelor in Accounting, Faculty of Economics, University of Indonesia (2009) • Master in Management, Faculty of Economics, University of Indonesia (2014)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Staf Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2008-2009) • Staf Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) (2009-2013) • Sekretaris Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara IX (2011-2016) • Sekretaris Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (2016-2019) • Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2021)	• Staff of Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2008-2009) • Staff of Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) (2009-2013) • Secretary of Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara IX (2011-2016) • Secretary of Board of Commissioners of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (2016-2019) • Secretary of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2021)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 7/KEP-DK/PI/X-2021	Board of Commissioners Decision Number 7/KEP-DK/PI/X-2021
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga & Masyarakat (2017 – sekarang)	Head of Sub Division of Inter-Institutional and Community Relations (2017 – present)

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2022, Sekretaris Dewan Komisaris telah menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Menyusun risalah rapat Dewan Komisaris.
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
4. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
5. Menyusun rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris.

SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES IMPLEMENTATION

Ensuring that the Board of Commissioners complies with the laws and regulations and applies the principles of GCG;

1. Prepare the meetings, including the Board of Commissioners' briefing sheet;
2. Prepare the minutes of Board of Commissioners meeting;
3. Administering the Board of Commissioners' documents, both incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
4. Prepare the Board of Commissioners Work Plan and Budget;
5. Drafting the Board of Commissioners Reports.

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan organ pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan IPC sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pembentukan Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
6. Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas-tugas Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
2. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Satuan Pengawasan Intern (SPI).
4. Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor KAP.
5. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan pengendalian intern serta pelaksanaannya.
6. Komite Audit memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan.
7. Komite Audit melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.
8. Komite Audit mengusulkan kepada Dewan Komisaris calon auditor KAP Laporan Keuangan Tahunan disertai alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor KAP tersebut.
9. Tugas Khusus dari Dewan Komisaris:
   a. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan perintah tertulis yang memuat:
      - Nama yang diberi tugas;
      - Sifat penugasan;

AUDIT COMMITTEE

Audit Committee is a supporting organ under Board of Commissioners, which is formed to assist Board of Commissioners in supervising the Company's management in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). Audit Committee is formed by Board of Commissioners with reference to:

1. Law no. 19 of 2003 dated October 4, 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 concerning Supporting Organs for Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
4. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
5. Decree of the Secretary of Ministry of SOEs No. SK-16/S. MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs;
6. The Company's Articles of Association.

Audit Committee Duties And Responsibilities

The duties of Audit Committee are as follows:

1. Audit Committee works collectively in carrying out its duties to assist Board of Commissioners.
2. Audit Committee is independent both in carrying out its duties and in reports and being responsible to Board of Commissioners.
3. Audit Committee assists the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of internal control system and the effectiveness of duties of auditors of Public Accounting Firm (KAP) and Internal Audit Unit (SPI).
4. Audit Committee assesses the implementation of activities and the results of audits carried out by SPI and KAP auditors.
5. Audit Committee provides recommendations regarding the improvement of internal control and its implementation.
6. Audit Committee ensures that there is a satisfactory review procedure for all information issued by the Company.
7. Audit Committee identifies matters that require Board of Commissioners' attention as well as other tasks assigned by Board of Commissioners.
8. Audit Committee proposes to Board of Commissioners a candidate for KAP to audit the Annual Financial Statements along with the reasons for nomination and proposed fee/ fee for KAP auditor.
9. Special Assignment from Board of Commissioners:
   a. Special tasks assigned to Audit Committee by Board of Commissioners is carried out with a written order containing:
      - Name of assignee;
      - Nature of assignment;

- Lingkup pekerjaan;
- Tujuan dan sasaran pekerjaan;
- Jangka waktu penugasan.

b. Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite Audit sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Dalam melaksanakan tugas khusus Komite Audit dapat:
   - Melakukan *review* terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Dewan Direksi dan rapat Dewan Komisaris jika dianggap perlu.
   - Melakukan audit investigasi dapat bekerja sama dengan SPI atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite Audit.

d. Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.

Tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:
1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
   a. Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Audit;
   b. Laporan Triwulanan pelaksanaan tugas Komite Audit;
   c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Audit.
3. Komite Audit bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit berwenang:
1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Perseroan.

Piagam Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit Pelindo mengacu pada Piagam Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) terakhir ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 09/KEPDK/PI.II/ VII-2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemutakhiran/Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Dalam Piagam tersebut memuat ketentuan yang harus dipatuhi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit agar dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Piagam tersebut ditata dalam susunan bagian sebagai berikut:
1. Landasan Hukum;

- Scope of work;
- Goals and objectives of the work;
- Duration of assignment.

b. The scope of work for special tasks of Audit Committee is fully determined by Board of Commissioners as long as does not against applicable laws and regulations.

c. In carrying out special tasks, Audit Committee may:
   - Reviewing all necessary records, documents and other information including the minutes of Board of Directors meeting and Board of Commissioners meeting if deemed necessary.
   - Conducting an investigative audit by cooperating with SPI or ask for assistance from experts or consultants to assist Audit Committee.

d. Audit Committee submits a report on the implementation of special tasks to Board of Commissioners.

Audit Committee responsibilities are as follows:
1. Audit Committee is responsible to Board of Commissioners.
2. The accountability of Audit Committee to Board of Commissioners is presented in the following report:
   a. Annual report on the implementation of Audit Committee duties;
   b. Quarterly Report on the implementation of Audit Committee duties;
   c. Reports for each implementation of special tasks of Audit Committee.
3. Audit Committee is responsible for maintaining the confidentiality of the Company's documents, data and information.

Audit Committee Authorities

In carrying out its duties, Audit Committee is authorized to:
1. Examine books, letters, and other documents, check cash for verification purposes and other securities and examine the Company's assets;
2. Entering yards, buildings and offices used by the Company;
3. Requesting an explanation from Board of Directors and/or other officials regarding all issues related to the management of the Company;
4. Acknowledge all policies and actions that have been and will be implemented by the Company.

Audit Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, Pelindo's Audit Committee refers to the Audit Committee Charter of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which was last stipulated by Board of Commissioners through Board of Commissioners Decree No. 09/KEPDK/PI.II/VII-2017 dated July 14, 2017 concerning Update/ Stipulation of Audit Committee Charter, Risk Management Monitoring Committee, Nomination & Remuneration Committee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The Charter contains provisions that must be complied with in the establishment and implementation of Audit Committee activities so that they can work independently, objectively, independently, transparently, and can be accounted for. The Charter is organized in the following sections:
1. Legal Basis;

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota;
3. Tugas;
4. Kewenangan;
5. Persyaratan Keanggotaan;
6. Tanggung Jawab;
7. Rapat;
8. Laporan;
9. Akses Kerahasiaan Informasi;
10. Rencana Kerja dan Anggaran;
11. Penghasilan Anggota;
12. Pendidikan dan Tenaga Penunjang;
13. Penilaian Kinerja;
14. Lain-Lain;
15. Penutup.

2. Appointment and Dismissal of Members;
3. Duties;
4. Authority;
5. Membership Requirements;
6. Responsibilities;
7. Meetings;
8. Report;
9. Access to Confidential Information;
10. Work Plan and Budget;
11. Member's Income;
12. Education and Support Personnel;
13. Performance Assessment;
14. Other;
15. Closing.

Masa Jabatan Komite Audit

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Audit Committee Tenure

The tenure for members of Audit Committee who are not members of the Company's Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for another 2 (two) years, without prejudice to the right of Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Structure, Membership And Expertise of Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise
Heru Sukanto	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hukum, Manajemem Law, Management
Didi Sumedi	Wakil Ketua Vice Chairman	Komisaris Commissioner	Sosial Politik Administrasi Negara Social politics State Administration
Ahmad Zakie Mubarrok	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Audit Accounting, Auditing
Sofia Chairunnisa	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Audit Accounting, Auditing

PROFIL KOMITE AUDIT

Profil Komite Audit per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

AUDIT COMMITTEE PROFILE

The profile of Audit Committee as of December 31, 2022 is as follow.

Heru Sukanto
Ketua Komite Audit
Chairman of Audit Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Profile can be seen in the Profile of Board of Commissioners section in this Annual Report.

Didi Sumedi
Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Profile can be seen in the Profile of Board of Commissioners section in this Annual Report.



Ahmad Zakie Mubarrok

Anggota Komite Audit / *Member of Audit Committee*

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Bandung	Bandung
Tempat dan Tanggal Lahir/ Usia Place and Date of Birth/Age	Wonosobo, 16 Februari 1985/37 tahun	Wonosobo, February 16, 1985/37 years old
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran (2007) • Magister Akuntansi, Akuntansi Sektor Publik Universitas Gadjah Mada (2012)	Bachelor of Economics in Accounting, Padjadjaran University (2007) Master of Accounting, Public Sector Accounting, Gadjah Mada University (2012)
Sertifikasi Certification	• *Certified in Audit Committee Practices* (CACP) • *Certified Public Accountant* (CPA)	• Certified in Audit Committee Practices (CACP) • Certified Public Accountant (CPA)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Dosen Tetap Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (2012 – sekarang) • Associate Partner KAP Jojo Sunarjo dan Rekan Cabang Bandung (2014 – sekarang) • Komite Audit PT Perkebunan Nusantara VIII (2014 – 2017) • Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Perkebunan Nusantara VIII (2017-2019) • Komite Audit PT Pupuk Kujang (2019 – 2021) • Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021 – sekarang)	• Permanent Lecturer in the Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Padjadjaran University (2012 – present) • Associate Partner of KAP Jojo Sunarjo and Partners, Bandung Branch (2014 – present) • PT Perkebunan Nusantara VIII Audit Committee (2014 – 2017) • PT Perkebunan Nusantara VIII Risk Management Monitoring Committee (2017-2019) • PT Pupuk Kujang Audit Committee (2019 – 2021) • PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Audit Committee (2021 – present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KEP-DK/PI.II/III-2021 tanggal 1 Maret 2021	Board of Commissioners Decree No. 05/KEP-DK/PI.II/III-2021 dated March 1, 2021
Periode Menjabat Service Period	2021 - 2024	2021 - 2024
Jabatan Rangkap Concurrent Position	• Dosen Tetap Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (2012 – sekarang) • Associate Partner KAP Jojo Sunarjo dan Rekan Cabang Bandung (2014 – sekarang)	• Dosen Tetap Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (2012 – sekarang) • Associate Partner KAP Jojo Sunarjo dan Rekan Cabang Bandung (2014 – sekarang)



Sofia Chairunnisa
Anggota Komite Audit / *Member of Audit Committee*

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/ Usia Place and Date of Birth/Age	Jakarta, 5 Agustus 1986/36 tahun	Jakarta, August 5, 1986/36 years old
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia (2009)	Bachelor of Economics in Accounting, University of Indonesia (2009)
Sertifikasi Certification	• *Certified Auditor under The Audit Board of the Republic of Indonesia* (BPK RI) • *Certified Professional Auditor of Indonesia*	• Certified Auditor under The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) • Certified Professional Auditor of Indonesia
Pengalaman Kerja Work Experience	• Audit Manager KAP Bing Santrio & Eny (Deloitte Indonesia) (2009 – 2018) • Financial, Accounting and Tax Manager PT Steadfast Marine Tbk. (2018) • Business Analyst Manager PT Maxima Integra Investama (2019) • Accounting & Tax Manager PT Sumber Hidup Sehat (2019 – 2020) • Audit Manager KAP Gani Sigiro Handayani (Grant Thornton Indonesia) (2020 – sekarang)	• Audit Manager of KAP Bing Santrio & Eny (Deloitte Indonesia) (2009 – 2018) • Financial, Accounting and Tax Manager of PT Steadfast Marine Tbk. (2018) • Business Analyst Manager of PT Maxima Integra Investama (2019) • Accounting & Tax Manager of PT Sumber Hidup Sehat (2019 – 2020) • Audit Manager of KAP Gani Sigiro Handayani (Grant Thornton Indonesia) (2020 – present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 4/KEP-DK/PI/X-2-21 tanggal 15 Oktober 2021	Board of Commissioners Decree No. 4/KEP-DK/PI/X-2-21 dated October 15, 2021
Periode Menjabat Service Period	2021 - 2024	2021 - 2024
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Audit Manager KAP Gani Sigiro Handayani (Grant Thornton Indonesia) (2020 – sekarang)	Audit Manager of KAP Gani Sigiro Handayani (Grant Thornton Indonesia) (2020 – present)

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND WORK EXPERIENCE

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit
Educational Qualifications and Work Experience of Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Heru Sukanto	Ketua Chairman	• Sarjana Hukum • Magister Manajemen • Bachelor of Law • Master of Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan Has work experience in banking

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit
Educational Qualifications and Work Experience of Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Didi Sumedi	Wakil Ketua Vice Chairman	Sarjana Sosial Politik Administrasi Negara Bachelor of Law Master of Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang perdagangan Has work experience in trading
Ahmad Zakie Mubarrok	Anggota Member	• Sarjana Ekonomi • Magister Akuntansi • Bachelor of Economics • Master of Accounting	Memiliki pengalaman kerja di bidang akuntansi dan *auditing* Has work experience in accounting and auditing
Sofia Chairunnisa	Anggota Member	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Bachelor of Economics in Accounting	Memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan, akuntansi dan *auditing* Has work experience in finance, accounting and auditing

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Komite Audit melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Piagam Komite Audit, kualifikasi independensi dari anggota Komite Audit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

AUDIT COMMITTEE INDEPENDENCE

Audit Committee carries out its functions and duties professionally and independently, without interference from any party that is not in accordance with the laws and regulations. In accordance with the Audit Committee Charter, the independence qualifications of members of Audit Committee must meet the following criteria:

Tabel Independensi Komite Audit
Audit Committee Independence

Aspek Independensi Independence Aspect	Heru Sukanto	Didi Sumedi	Ahmad Zakie Mubarrok	Sofia Chairunnisa
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no managerial relationship in the Company, subsidiary, or affiliated Company	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Does not have share ownership relationship in the Company	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Does not have family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Audit Committee	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrators of political parties, officials and government	√	√	√	√

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT PADA TAHUN 2022

AUDIT COMMITTEE TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT IN 2022

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Type of Training and Subject of Training/Competency Development	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Penyelenggara Organizer
Heru Sukanto	Ketua Chairman	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini Training and/or competency development can be seen in the Board of Directors Training and/or Competency Development section of Corporate Governance Chapter in this Annual Report		
Didi Sumedi	Wakil Ketua Vice Chairman	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini Training and/or competency development can be seen in the Board of Directors Training and/or Competency Development section of Corporate Governance Chapter in this Annual Report		
Ahmad Zakie Mubarrok	Anggota Member	-	-	-
Sofia Chairunnisa	Anggota Member	Konsep dan Implementasi Icofr di Entitas Induk dan Anak Concept and Implementation of Icofr in Parent Entity and Subsidiaries	*Online* 1 Agustus 2022 Online August 1, 2022	Kementerian BUMN Ministry of SOE

RAPAT KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE MEETING

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. Komite Audit mengadakan rapat koordinasi dengan SPI sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

AUDIT COMMITTEE MEETING POLICY

Audit Committee holds meetings at least equal to the minimum Board of Commissioners meetings as stipulated in the Company's Articles of Association. Audit Committee meeting is chaired by the Chairman of Audit Committee or the most senior member of Audit Committee, if the Chairman of Audit Committee is unable to attend. If deemed necessary, Audit Committee may invite Management parties related to the meeting material to attend Audit Committee meeting. Each Audit Committee meeting is set forth in the minutes of meeting signed by all members of Audit Committee present. Audit Committee holds a coordination meeting with SPI at least once every 3 (three) months.

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2022, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

AUDIT COMMITTEE MEETING AGENDA

Throughout 2022, the date, meeting agenda and participants of Audit Committee meetings are as follows.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	13 Januari 2022 January 13, 2022	Permintaan Dokumen Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perseroan Request for the Company's Long Term Plan Document (RJPP).	Heru Sukanto Didi Sumedi Ahmad Zakie Mubarrok Sofia Chairunnisa

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

Audit Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
2	25 Januari 2022 January 25, 2022	Tanggapan atas Usulan RKAP Tahun 2022 Response to the 2022 RKAP Proposal	Heru Sukanto Didi Sumedi Ahmad Zakie Mubarrok Sofia Chairunnisa
3	11 Februari 2022 February 11, 2022	Percepatan Pembangunan Jalan Tol Ruas Cibitung – Cilincing Accelerating the Construction of Cibitung – Cilincing Toll Road Section	Heru Sukanto Didi Sumedi Ahmad Zakie Mubarrok Sofia Chairunnisa
4	22 Februari 2022 February 22, 2022	Tanggapan atas Usulan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2021-2025 Response to the Proposed Company Long Term Plan (RJPP) of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for 2021-2025	Heru Sukanto Didi Sumedi Ahmad Zakie Mubarrok Sofia Chairunnisa
5	5 April 2022 April 5, 2022	Penyampaian Kuesioner Evaluasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2021 Submission of Public Accounting Firm (KAP) Evaluation Questionnaire for Fiscal Year 2021	Heru Sukanto Didi Sumedi Ahmad Zakie Mubarrok Sofia Chairunnisa
6	12 April 2022 April 12, 2022	1. Usulan Penetapan dan Persetujuan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2022 2. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen Tahun 2021 Audited PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 1. Proposal for the Appointment and Approval of Public Accounting Firm for Fiscal Year 2022 2. Response of Board of Commissioners to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Audited Financial Statements and Management Reports for 2021	Heru Sukanto Didi Sumedi Ahmad Zakie Mubarrok Sofia Chairunnisa
7	19 Mei 2022 May 19, 2022	Tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2022 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Response to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Quarter I 2022 Management Report	Heru Sukanto Didi Sumedi Ahmad Zakie Mubarrok Sofia Chairunnisa
8	23 Juni 2022 June 23, 2022	Rencana Strategis Pengembangan Cabang Pelabuhan Balikpapan Balikpapan Port Branch Development Strategic Plan	Heru Sukanto Didi Sumedi Ahmad Zakie Mubarrok Sofia Chairunnisa
9	28 Juni 2022 June 28, 2022	Laporan Evaluasi Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2021 Evaluation Report for Public Accounting Firm for Fiscal Year 2021	Heru Sukanto Didi Sumedi Ahmad Zakie Mubarrok Sofia Chairunnisa
10	8 Juli 2022 July 8, 2022	Tanggapan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2021 Response of Board of Commissioners to the Follow-Up of 2021 BPK RI Audit Results Report (LHP)	Heru Sukanto Didi Sumedi Ahmad Zakie Mubarrok Sofia Chairunnisa
11	26 Juli 2022 July 26, 2022	Rekomendasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2022 Recommendations from Public Accounting Firm (KAP) for Fiscal Year 2022	Heru Sukanto Didi Sumedi Ahmad Zakie Mubarrok Sofia Chairunnisa
12	28 Juli 2022 July 28, 2022	Laporan Realisasi Penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Triwulan II Tahun 2022 Report on the Realization of Use of State Equity Participation (PMN) for the second quarter of 2022	Heru Sukanto Didi Sumedi Ahmad Zakie Mubarrok Sofia Chairunnisa

Tabel Agenda Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
13	18 Agustus 2022 August 18, 2022	Tanggapan atas Laporan Manajemen Semester I Tahun 2022 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Response to the 2022 Semester I Management Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Heru Sukanto Didi Sumedi Ahmad Zakie Mubarrok Sofia Chairunnisa
14	5 September 2022 September 5, 2022	Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Pekerjaan *General Audit* Laporan Keuangan Konsolidasian dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022 Approval of the Appointment of Public Accountant Firm (KAP) for General Audit of Consolidated Financial Statements and Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for Fiscal Year 2022	Heru Sukanto Didi Sumedi Ahmad Zakie Mubarrok Sofia Chairunnisa
15	27 Oktober 2022 October 27, 2022	Tanggapan atas Usulan RKAP Tahun 2023 Response to the 2023 RKAP Proposal	Heru Sukanto Didi Sumedi Ahmad Zakie Mubarrok Sofia Chairunnisa
16	23 November 2022 November 23, 2022	1. Tanggapan atas Usulan Penghapusbukuan Aset Tetap Milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 2. Tindak Lanjut atas Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi 1. Response to the Proposal to Write Off Fixed Assets Owned by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 2. Follow up on the Coordination Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors	Heru Sukanto Didi Sumedi Ahmad Zakie Mubarrok Sofia Chairunnisa
17	25 November 2022 November 25, 2022	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen TW III tahun 2022 Board of Commissioners' response to the Q3 2022 Management Report	Heru Sukanto Didi Sumedi Ahmad Zakie Mubarrok Sofia Chairunnisa
18	29 November 2022 November 29, 2022	Tanggapan atas Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2021-2025 Response to the Draft of Company Long Term Plan (RJPP) of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for 2021-2025	Heru Sukanto Didi Sumedi Ahmad Zakie Mubarrok Sofia Chairunnisa
19	16 Desember 2022 December 16, 2022	1. Rekomendasi atas Usulan Penghapusbukuan Aset Tetap Milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 2. Persetujuan atas Usulan Penghapusbukuan Aset Tetap Milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 1. Recommendations for the Proposal to Write Off Fixed Assets Owned by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 2. Approval of the Proposed Write-off of Fixed Assets Owned by PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Heru Sukanto Didi Sumedi Ahmad Zakie Mubarrok Sofia Chairunnisa
20	23 Desember 2022 December 23, 2022	Tindak Lanjut atas Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi Follow up on the Coordination Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors	Heru Sukanto Didi Sumedi Ahmad Zakie Mubarrok Sofia Chairunnisa

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE MEETINGS FREQUENCY AND ATTENDANCE

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit
Attendance Level of Audit Committee Meetings

Nama Name	**Jabatan** Position	**Rapat Komite Audit** Audit Committee Meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**Persentase** Percentage
Heru Sukanto	Ketua Chairman	20	20	100%
Didi Sumedi	Wakil Ketua Vice Chairman	20	20	100%
Ahmad Zakie Mubarrok	Anggota Member	20	20	100%
Sofia Chairunnisa	Anggota Member	20	20	100%

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT TAHUN 2022

Program kerja yang telah dilaksanakan oleh Komite Audit selama tahun 2022 yaitu:

1. Melakukan evaluasi atas RJPP.
2. Evaluasi Usulan RKAP Tahun 2022.
3. Evaluasi Usulan RKAP Tahun 2023.
4. Analisis kesenjangan yang terjadi antara *master plan* IT dengan aktual dengan identifikasi risiko yang dapat ditimbulkan.
5. *Monitoring* Audit Keuangan oleh KAP.
6. Evaluasi Kinerja KAP.
7. Tanggapan Laporan Keuangan Audited Tahun 2021.
8. Pemilihan KAP Audit Keuangan Tahun 2022.
9. Kunjungan Kerja untuk Evaluasi Kinerja Cabang dan cek fisik aset yang diusulkan penghapusan.
10. Evaluasi Kinerja SPI.
11. Evaluasi dan saran atas PKPT SPI (organ pendukung Dewan Komisaris).
12. Rapat koordinasi Triwulanan dengan SPI (Evaluasi LHA, Pemutakhiran Data dan Tindak lanjut).
13. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal.
14. Tanggapan Laporan Manajemen Tahun 2021.
15. Evaluasi Laporan Manajemen Triwulanan.
16. Menyusun kajian atas usulan Direksi yang memerlukan tanggapan/persetujuan Dewan Komisaris.
17. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit.
18. Penyusunan Laporan Triwulanan Komite Audit.
19. Mengikuti Seminar/pelatihan/*workshop*/studi banding.
20. Rapat internal Komite Audit (minimal satu bulan sekali).
21. Rapat dengan Dewan Komisaris.
22. *Self Assessment* Kinerja Komite Audit.

AUDIT COMMITTEE WORK PROGRAMS AND DUTIES IMPLEMENTATION IN 2022

The work programs that have been carried out by Audit Committee in 2022 are:

1. Evaluate the RJPP.
2. Evaluate the 2022 RKAP Proposal.
3. Evaluate the 2023 RKAP Proposal.
4. Analysis of the gaps that occur between actual IT master plan and the identification of risks that can arise.
5. Monitoring of Financial Audit by KAP.
6. Evaluate KAP Performance.
7. Response to the 2021 Audited Financial Statements.
8. Selection of KAP Financial Audit in 2022.
9. Work Visit for Branch Performance Evaluation and physical check of assets proposed for deletion.
10. Evaluate SPI Performance.
11. Evaluation and advice on PKPT SPI (supporting organ of Board of Commissioners)
12. Quarterly coordination meeting with SPI (LHA Evaluation, Data Update and Follow-up)
13. Monitoring the follow-up of the external auditor's audit results.
14. Response to the 2021 Management Report.
15. Evaluation of Quarterly Management Reports.
16. Prepare a study on the Board of Directors' proposal which requires the response/approval of Board of Commissioners.
17. Prepare the Audit Committee Work Plan and Budget.
18. Prepare the Audit Committee Quarterly Report.
19. Participating in seminars/training/workshops/comparative studies.
20. Audit Committee internal meeting (at least once a month).
21. Meeting with Board of Commissioners.
22. Audit Committee Performance Self Assessment

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang ·dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Pelindo II (Persero) dengan maksud untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan penilaian atas kebijakan dan pelaksanaan nominasi dan remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris bahwa Perusahaan telah melaksanakan proses nominasi dan remunerasi secara baik memadai.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas-tugas Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi Perusahaan dan Direksi Anak Perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
4. Berperan sebagai *Talent Committee* untuk Eksekutif BUMN (Direksi dan BOD-1);
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
   b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Pertanggungjawaban Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
   a. Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;
   b. Laporan Triwulanan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;
   c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab menjaga kerahasian dokumen, data dan informasi perseroan.

WEWENANG KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang:

1. Melakukan reviu, memeriksa, melakukan Analisa dan memberikan pendapat serta rekomendasi dalam batas ruang lingkup tugasnya;

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Nomination and Remuneration Committee is a Committee formed by Board of Commissioners of PT Pelindo II (Persero) with the aim of assisting Board of Commissioners in carrying out its obligations to monitor, supervise and evaluate the nomination and remuneration policies and implementation. Nomination and Remuneration Committee is formed to provide input to Board of Commissioners, that the Company has carried out the nomination and remuneration process properly and adequately.

Nomination and Remuneration Committee Duties and Responsibilities

The duties of Nomination and Remuneration Committee are as follows:

1. Provide recommendations regarding candidates for members of Board of Directors of the Company and Board of Directors of Subsidiaries to Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
2. Prepare and provide recommendations regarding the system and procedure for selecting and/or replacing members of Board of Commissioners and Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
3. Evaluating the remuneration policy;
4. Acting as Talent Committee for SOE Executives (Director and BOD-1);
5. Provide recommendations to Board of Commissioners regarding:
   a. Remuneration policy for Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
   b. Remuneration policy for employees as a whole to be submitted to Board of Directors.

The responsibilities of Nomination and Remuneration Committee are as follows:

1. Nomination and Remuneration Committee is responsible to Board of Commissioners;
2. Nomination and Remuneration Committee's accountability to Board of Commissioners is presented in the following report:
   a. Annual report on the implementation of Nomination and Remuneration Committee's duties;
   b. Quarterly Report on the implementation of Nomination and Remuneration Committee's duties;
   c. Reports on the implementation of each special duties of Nomination and Remuneration Committee.
3. Nomination and Remuneration Committee is responsible for maintaining the confidentiality of Company documents, data and information.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE AUTHORITIES

In carrying out its duties, Nomination and Remuneration Committee is authorised to:

1. Review, examine, analyse and provide opinions and recommendations within the scope of its duties;

2. Mencari dan mendapatkan informasi (akses yang tidak terbatas) yang relevan dari Sistem Informasi Manajemen (SIM), laporan-laporan, maupun dari setiap anggota Direksi, karyawan atau individu atau narasumber terkait;
3. Mengundang manajemen untuk hadir dalam rapat komite.

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi Pelindo mengacu pada Piagam Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) terakhir ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 09/KEPDK/PI.II/VII-2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemutakhiran/Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Dalam Piagam tersebut memuat ketentuan yang harus dipatuhi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit agar dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Piagam tersebut ditata dalam susunan bagian sebagai berikut:

1. Landasan Hukum;
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota;
3. Tugas;
4. Kewenangan;
5. Persyaratan Keanggotaan;
6. Tanggung Jawab;
7. Rapat;
8. Laporan;
9. Akses Kerahasiaan Informasi;
10. Rencana Kerja dan Anggaran;
11. Penghasilan Anggota;
12. Pendidikan dan Tenaga Penunjang;
13. Penilaian Kinerja;
14. Lain-Lain;
15. Penutup.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Periode 1 Januari 2022 – Oktober 2022

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Marsetio	Ketua Chairman	Komisaris Independen (Plt. Komisaris Utama) Independent Commissioner (Acting President Commissioner)	Fisip, Manajemen Social Sciences, Management	SK Pengangkatan No. 05/KEP-DK/PI/X-2021 tanggal 15 Oktober 2021 Decree of Appointment No. 05/KEP-DK/PI/X-2021 dated October 15, 2021
R. Agus H. Purnomo	Wakil Ketua Vice Chairman	Komisaris Commissioner	Teknik Mesin, Manajemen Mechanical Engineering, Management	SK Pengangkatan No. 05/KEP-DK/PI/X-2021 tanggal 15 Oktober 2021 Decree of Appointment No. 05/KEP-DK/PI/X-2021 dated October 15, 2021

2. Seek and obtain relevant information (unlimited access) from the Management Information System (SIM), reports, as well as from each member of Board of Directors, employees or related individuals or sources;
3. Invite management to attend committee meetings.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER

In carrying out its duties and responsibilities, Nomination and Remuneration Committee of Pelindo refers to the Nomination and Remuneration Committee Charter of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), which was last stipulated by Board of Commissioners through the Board of Commissioners Decree No. 09/KEPDK/PI.II/VII-2017 dated July 14, 2017 concerning the Updating/Stipulation of the Charter of Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, Nomination & Remuneration Committee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The Charter contains provisions that must be adhered to in the formation and implementation of Nomination and Remuneration Committee activities in order to work independently, objectively, independently, transparently and accountably. The Charter is organised in the following sections:

1. Legal Basis;
2. Appointment and Dismissal of Members
3. Duties;
4. Authorities;
5. Membership Requirements;
6. Responsibilities;
7. Meetings;
8. Report;
9. Access to Confidential Information;
10. Work Plan and Budget;
11. Member's Income;
12. Education and Support Personnel;
13. Performance Assessment;
14. Other;
15. Closing.

STRUCTURE, MEMBERSHIP AND EXPERTISE OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Period of January 1, 2022 – October 2022

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Sudung Situmorang	Wakil Ketua Vice Chairman	Komisaris Commissioner	Hukum Law	SK Pengangkatan No. 05/KEP-DK/PI/X-2021 tanggal 15 Oktober 2021 Decree of Appointment No. 05/KEP-DK/PI/X-2021 dated October 15, 2021
Agus Pambagio	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Teknologi Kimia Tekstil Teknik Textile Chemical Technology Engineering	SK Pengangkatan No. 06/KEP-DK/PI/X-2021 tanggal 15 Oktober 2021 Decree of Appointment No. 06/KEP-DK/PI/X-2021 dated October 15, 2021
Mahbub Junaedi	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Hukum Accounting, Law	SK Pengangkatan No. 06/KEP-DK/PI/X-2021 tanggal 5 Mei 2021. SK Pengalihan No.04/KEP-DK/PI/X-2021 tanggal 15 Oktober 2021 Decree of Appointment No. 06/KEP-DK/PI/X-2021 dated May 5, 2021. Decree of Transfer No.04/KEP-DK/PI/X-2021 dated October 15, 2021

Periode 20 September 2022 – 31 Desember 2022 **Period of October 2022 – December 31, 2022**

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise
Marsetio	Ketua Chairman	Komisaris Independen (Plt. Komisaris Utama) Independent Commissioner (Acting President Commissioner)	Fisip, Manajemen Social and Political Sciences, Management
Arif Toha Tjahjagama	Wakil Ketua Vice Chairman	Komisaris Commissioner	Teknik Mesin, Manajemen Mechanical Engineering, Management
Sudung Situmorang	Wakil Ketua Vice Chairman	Komisaris Commissioner	Hukum Law
Agus Pambagio	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Teknologi Kimia Tekstil Teknik Textile Chemical Technology Engineering
Mahbub Junaedi	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Hukum Accounting, Law

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE PROFIL

Marsetio
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen (Plt. Komisaris Utama)
Chairman of Nomination and Remuneration Committee/ Independent Commissioner (Acting President Commissioner)

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Profile can be seen in the Profile of Board of Commissioners section in this Annual Report.

Arif Toha Tjahjagama
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris
Member of Nomination and Remuneration Committee/Independent Party

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Member of Nomination and Remuneration Committee

Sudung Situmorang
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris
Member of Nomination and Remuneration Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Profile can be seen in the Profile of Board of Commissioners section in this Annual Report.



Agus Pambagio
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of Nomination and Remuneration Committee

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/ Usia Place and Date of Birth/Age	Semarang,19 Agustus 1959/63 tahun	Semarang, August 19, 1959/63 years old
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S1 Teknologi Kimia Tekstil dari Institut Teknologi Tekstil Bandung (1984) • S2 *Engineering Management* dari School of Engineering & Applied Science The George Washington University, Washington, DC, USA (1990)	• Bachelor of Textile Chemical Technology from Bandung Textile Technology Institute (1984) • Master of Engineering Management from School of Engineering & Applied Science The George Washington University, Washington, DC, USA (1990)
Sertifikasi Certification	• *Certified Professional Negotiator* dari Paska Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, 2008 • *Certified Professional US Lobbyist*, from American Lobby League, Washington, DC 2008 • *Certified Mastering Lobbyist*, from European Training Institute, Brussels, Belgium 2010 • *Certified Public Service Policy Development*, SNCF France 2013	• Certified Professional Negotiator dari Paska Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, 2008 • Certified Professional US Lobbyist, from American Lobby League, Washington, DC 2008 • Certified Mastering Lobbyist, from European Training Institute, Brussels, Belgium 2010 • Certified Public Service Policy Development, SNCF France 2013
Pengalaman Kerja Work Experience	• Anggota Tim Pakar Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri (2021 – sekarang) • Anggota Dewan Pengawas Penanganan Tailing PT Freeport Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019 – sekarang) • Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Pelindo 3 (Persero) (2019 – 2021) • Anggota Dewan Pertimbangan Proper Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019 – sekarang) • Anggota Team Ahli Siber Pungli, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan RI (2017 -2018)	• Member of Population Administration Expert Team, Ministry of Home Affairs (2021 – present) • Member of PT Freeport Indonesia's Tailings Handling Supervisory Board, Ministry of Environment and Forestry (2019 – present) • Nomination and Remuneration Committee for Board of Commissioners of PT Pelindo 3 (Persero) (2019 – 2021) • Member of National Proper Advisory Council, Ministry of Environment and Forestry (2019 – present) • Member of Cyber Extortion Expert Team, Coordinating Ministry for Political and Security Affairs of the Republic of Indonesia (2017 -2018)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 6/KEP-DK/PI/X-2021 tanggal 15 Oktober 2021	Board of Commissioners Decree No. 6/KEP-DK/PI/X-2021 dated October 15, 2021

Periode Menjabat Service Period	2021 - 2024	2021 - 2024
Jabatan Rangkap Concurrent Position	• Anggota Tim Pakar Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri (2021 – sekarang) • Anggota Dewan Pengawas Penanganan Tailing PT Freeport Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019 – sekarang) • Anggota Dewan Pertimbangan Proper Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019 – sekarang)	• Member of Population Administration Expert Team, Ministry of Home Affairs (2021 – present) • Member of PT Freeport Indonesia's Tailings Handling Supervisory Board, Ministry of Environment and Forestry (2019 – present) • Member of National Proper Advisory Council, Ministry of Environment and Forestry (2019 – present)



Mahbub Junaedi
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Pihak Independen
Member of Nomination and Remuneration Committee

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/ Usia Place and Date of Birth/Age	Jakarta, 30 Desember 1972/50 tahun	Jakarta, December 30, 1972/50 years old
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1998) • DIV Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (2000) • S1 Jurusan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2011) • S2 Jurusan Hukum Perdagangan Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2012)	• Bachelor of Accounting, Faculty of Economics, University of Indonesia (1998) • Diploma in Accounting, State College of Accountancy (STAN) (2000) • Bachelor of Business Law, Faculty of Law, University of Indonesia (2011) • Master of International Trade Law, Faculty of Law, University of Indonesia (2012)
Sertifikasi Certification	• WMI (Wakil Manager Investasi) • Manajemen Risiko Level 1 Sektor Perbankan. • CGP (*Certified Governance Professional*) • CRP (*Certified Risk Professional*)	• WMI (Vice Manager of Investment) • Level 1 Risk Management Banking Sector. • CGP (Certified Governance Professional) • CRP (Certified Risk Professional)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Partner – International Trade Division JMTHouse – Konsultan Pajak dan Keuangan, (2008-2011) • Partner JMT Law House – Konsultan Hukum, (2011-2014) • Pengurus Management Building Adhi Graha (PPKPAG Surveyor Indonesia), (2012-2014) • Anggota Tim Legal Drafting Produk Hukum Dewan Pengawas BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan (2014-2018) • Komite Audit dan Sekretaris Dewan Pengawas BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), (2018-2021)	• Partner – International Trade Division JMTHouse – Tax and Financial Consultant, (2008-2011) • Partner JMTLawHouse – Legal Consultant, (2011-2014) • Building Management Adhi Graha (PPKPAG Surveyor Indonesia) (2012-2014) • Member of the Legal Drafting Team for Legal Products of BPJS Health Supervisory Board, BPJS Health (2014-2018) • Audit Committee and Secretary to Supervisory Board of BPKH Hajj Financial Management Agency (BPKH), (2018-2021)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 4/KEP-DK/PI/X-2021	Board of Commissioners Decree No. 4/KEP-DK/PI/X-2021
Periode Menjabat Service Period	2021 - 2024	2021 - 2024

Jabatan Rangkap Concurrent Position	• Anggota Tim Pakar Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri (2021 – sekarang) • Anggota Dewan Pengawas Penanganan Tailing PT Freeport Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019 – sekarang) • Anggota Dewan Pertimbangan Proper Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019 – sekarang)	• Member of Population Administration Expert Team, Ministry of Home Affairs (2021 – present) • Member of PT Freeport Indonesia's Tailings Handling Supervisory Board, Ministry of Environment and Forestry (2019 – present) • Member of National Proper Advisory Council, Ministry of Environment and Forestry (2019 – present)

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND WORK EXPERIENCE

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Educational Qualifications and Work Experience

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Marsetio	Ketua Chairman	• S1 bidang Fisip/ADNE • S2 bidang *Management* • Bachelor degree in Faculty of Social and Political Science/ADNE • Master degree in Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan dan pemerintahan Has work experience in education and government
R. Agus H. Purnomo*	Wakil Ketua Vice Chairman	• S1 bidang Teknik Mesin • S2 bidang Manajemen • Bachelor degree in Mechanical Engineering • Master of Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in government
Arif Toha Tjahjagama**	Wakil Ketua Vice Chairman	• S1 bidang Teknik Sipil • S2 bidang Transportasi Ekonomi • Bachelor in Civil Engineering • Master in Economic Transportation	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in government
Sudung Situmorang	Wakil Ketua Vice Chairman	S2 bidang Hukum Master of Law	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum Has work experience in law
Agus Pambagio	Anggota Member	• S1 Teknologi Kimia Tekstil • S2 *Engineering Management* • Bachelor of Textile Chemical Technology • Master of Engineering Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang lingkungan Has work experience in environment
Mahbub Junaedi	Anggota Member	• S1 Jurusan Akuntansi • DIV Jurusan Akuntansi • S1 Jurusan Hukum Bisnis • S2 Jurusan Hukum Perdagangan Internasional • Bachelor of Accounting • Diploma of Accounting • Bachelor of Business Law • Master of International Trade Law	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum Has work experience in law

*Berhenti menjabat sejak tanggal 20 September 2022
**Mulai menjabat sejak tanggal 20 September 2022
*No longer served since September 20, 2022
**Started serving since September 20, 2022

INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Tabel Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Independence

Aspek Independensi Independence Aspect	Marsetio	R. Agus H. Purnomo	Arif Toha Tjahjagama	Sudung Situmorang	Agus Pambagio	Mahbub Junaedi
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no managerial relationship in the Company, subsidiary, or affiliated Company	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Does not have share ownership relationship in the Company	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Does not have family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Nomination and Remuneration Committee	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrator of political parties, official and government	√	√	√	√	√	√

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Types of Training and Subject of Training/Competency	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Penyelenggara Organizer
Marsetio	Ketua Chairman	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini Training and/or competency development can be seen in the Board of Directors' Training and/or Competency Development section of Corporate Governance Chapter in this Annual Report		
R. Agus H. Purnomo	Wakil Ketua Vice Chairman	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini Training and/or competency development can be seen in the Board of Directors' Training and/or Competency Development section of Corporate Governance Chapter in this Annual Report		

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan** Types of Training and Subject of Training/Competency	**Waktu dan Tempat Pelaksanaan** Time and Venue	**Penyelenggara** Organizer
Arif Toha Tjahjagama**	Wakil Ketua Vice Chairman	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini Training and/or competency development can be seen in the Board of Directors' Training and/or Competency Development section of Corporate Governance Chapter in this Annual Report		
Sudung Situmorang	Wakil Ketua Vice Chairman	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini Training and/or competency development can be seen in the Board of Directors' Training and/or Competency Development section of Corporate Governance Chapter in this Annual Report		
Agus Pambagio	Anggota Member	-	-	-
Mahbub Junaedi	Anggota Member	Konsep dan Implementasi Icofr di Entitas Induk dan Anak Concept and Implementation of Icofr in Parent and Subsidiaries	*Online*, 1 Agustus 2022 Online, August 1, 2022	Kementerian BUMN Ministry of SOE
		Sertifikasi Nasional *"Certified Risk Governance Professional* (Level IV)" National Certification "Certified Risk Governance Professional (Level IV)"	*Online*, 29 - 30 November 2022 dan tanggal 8 Desember 2022 Online, November 29 - 30 2022 and December 8, 2022	RAP Learning Center - LSPMR

*Berhenti menjabat sejak tanggal 20 September 2022
**Mulai menjabat sejak tanggal 20 September 2022
*No longer served since September 20, 2022
**Started serving since September 20, 2022

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang paling senior, apabila Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhalangan hadir. Jika dipandang perlu, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi. Setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir. Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat koordinasi dengan Struktural SDM sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETING

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETING POLICY

Nomination and Remuneration Committee holds meetings at least equal to the minimum Board of Commissioners meetings as stipulated in the Company's Articles of Association. Nomination and Remuneration Committee meetings are chaired by the Chairman of Nomination and Remuneration Committee or the most senior member, if the Chairman of Nomination and Remuneration Committee is unable to attend. If deemed necessary, Nomination and Remuneration Committee may invite Management parties related to the meeting material to attend the Nomination and Remuneration Committee meeting. Each meeting of Nomination and Remuneration Committee is set out in the minutes of meeting signed by all members of Nomination and Remuneration Committee present. Nomination and Remuneration Committee holds a coordination meeting with Structural HC at least once every 3 (three) months.

AGENDA RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

MEETING AGENDA OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	16 Februari 2022 February 16, 2022	Hasil Evaluasi Dewan Komisaris terhadap Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Results of Board of Commissioners' Evaluation on Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Marsetio R. Agus H. Purnomo Sudung Situmorang Agus Pambagio Mahbub Junaedi
2	21 Februari 2022 February 21, 2022	1. Usulan Tantiem Pra Merger Tahun Kerja 2021 2. Tanggapan atas Rencana Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 1. Proposal on Pre-Merger Tantiem for 2021 Working Year 2. Responses to the Plan to Propose Company Representatives as Director and Commissioner of Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Marsetio R. Agus H. Purnomo Sudung Situmorang Agus Pambagio Mahbub Junaedi
3	8 Februari 2022 February 8, 2022	Rencana Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Plan on Work Visit of Board of Commissioners to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1	Marsetio R. Agus H. Purnomo Sudung Situmorang Agus Pambagio Mahbub Junaedi
4	22 Maret 2022 March 22, 2022	Tanggapan atas Usulan Perubahan Organisasi Kantor Pusat Response to Proposed Changes in Head Office Organization	Marsetio R. Agus H. Purnomo Sudung Situmorang Agus Pambagio Mahbub Junaedi
5	12 April 2022 April 12, 2022	Tanggapan atas Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Direksi PT Prima Multi Terminal (Anak Perusahaan) Response to Proposal of Company Representatives as Director of PT Prima Multi Terminal (Subsidiary)	Marsetio R. Agus H. Purnomo Sudung Situmorang Agus Pambagio Mahbub Junaedi
6	14 April 2022 April 14, 2022	Usulan Tantiem *Post Merger* (Oktober-Desember) Tahun Kerja 2021 dan Gaji Tahun 2022 Direksi dan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Proposed Tantiem Post Merger (October-December) for 2021 Working Year and 2022 Salary for Directors and Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Marsetio R. Agus H. Purnomo Sudung Situmorang Agus Pambagio Mahbub Junaedi
7	20 Juni 2022 June 20, 2022	1. Tanggapan atas Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Komisaris pada Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 2. Tanggapan atas Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Direksi Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 1. Response to the Proposal of the Company's Representative as Commissioner in Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 2. Response to the Proposal of the Company's Representative as Director of Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Marsetio R. Agus H. Purnomo Sudung Situmorang Agus Pambagio Mahbub Junaedi

Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
8	5 Juli 2022 July 5, 2022	Pembahasan Tentang Rencana Restrukturisasi PT Prima Multi Terminal (PT PMT) Discussion on Restructuring Plan for PT Prima Multi Terminal (PT PMT)	Marsetio R. Agus H. Purnomo Sudung Situmorang Agus Pambagio Mahbub Junaedi
9	25 Agustus 2022 August 25, 2022	Laporan Proses Pemilihan Indonesia Investment Authority (INA) Sebagai Calon Mitra Kerja sama Investasi dan Pengoperasian BNCT Report on Selection Process of Indonesia Investment Authority (INA) as a Prospective BNCT Investment and Operation Cooperation Partner	Marsetio R. Agus H. Purnomo Sudung Situmorang Agus Pambagio Mahbub Junaedi
10	2 September 2022 September 2, 2022	Saran Dewan Komisaris atas Laporan Proses Pemilihan Indonesia Investment Authority (INA) Sebagai Calon Mitra Kerja sama Investasi dan Pengoperasian BNCT Advice from Board of Commissioners on the Report on Selection Process of Indonesia Investment Authority (INA) as a Prospective BNCT Investment and Operation Cooperation Partner	Marsetio R. Agus H. Purnomo Sudung Situmorang Agus Pambagio Mahbub Junaedi
11	18 Oktober 2022 October 18, 2022	Saran/Masukan Dewan Komisaris atas Permasalahan Tanah di Pelabuhan Bojonegara Regional 2 Banten Advice/Input of Board of Commissioners on Land Issues at Bojonegara Port Regional 2 Banten	Marsetio Arif Toha Tjahjagama Sudung Situmorang Agus Pambagio Mahbub Junaedi
12	2 November 2022 November 2, 2022	Tanggapan Tertulis atas Rencana Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Komisaris PT Prima Multi Terminal (Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Written Response to the Plan to Propose Company Representative as Commissioner of PT Prima Multi Terminal (Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Marsetio Arif Toha Tjahjagama Sudung Situmorang Agus Pambagio Mahbub Junaedi
13	14 Desember 2022 December 14, 2022	Tanggapan Tertulis atas Rencana Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Direktur Utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Written Response to the Plan to Propose Company Representative as President Director of PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Marsetio Arif Toha Tjahjagama Sudung Situmorang Agus Pambagio Mahbub Junaedi

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETINGS FREQUENCY AND ATTENDANCE

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Attendance Level of Nomination and Remuneration Committee Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentasi Percentage
Marsetio	Ketua Chairman	13	13	100%
R. Agus H. Purnomo*	Wakil Ketua Vice Chairman	10	10	100%

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Attendance Level of Nomination and Remuneration Committee Meetings

Nama Name	**Jabatan** Position	**Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi** Nomination and Remuneration Meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Total Attendance	**Persentasi** Percentage
Arif Toha Tjahjagama**	Wakil Ketua Vice Chairman	3	3	100%
Sudung Situmorang	Wakil Ketua Vice Chairman	13	13	100%
Agus Pambagio	Anggota Member	13	13	100%
Mahbub Junaedi	Anggota Member	13	13	100%

*Berhenti menjabat sejak tanggal 20 September 2022
**Mulai menjabat sejak tanggal 20 September 2022
*No longer served since September 20, 2022
**Started serving since September 20, 2022

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2022

Selama tahun 2022 Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja. Adapun pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.
2. Evaluasi Kinerja Direksi.
3. Evaluasi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Evaluasi usulan/rekomendasi kepada RUPS tentang calon Anggota Direksi (apabila diperlukan), serta Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan.
5. Rapat koordinasi Triwulanan dengan Bagian SDM.
6. Evaluasi Usulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2022.
7. Evaluasi atas desain dan pola struktur organisasi Perusahaan.
8. Evaluasi atas Penerapan Pola Karir.
9. Evaluasi atas Penerapan HR *Contact center* untuk komunikasi antara HR HO dengan Anak Perusahaan & Cabang.
10. Evaluasi atas sistem manajemen karir.
11. Evaluasi penerapan GCG perusahaan.
12. Evaluasi peraturan-peraturan mengenai GCG.
13. *Updating* data *talent pool*.
14. Kunjungan Kerja ke Cabang Pelabuhan.
15. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi.
16. Penyusunan Laporan Triwulanan Komite Nominasi dan Remunerasi.
17. Mengikuti Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi setiap bulan sekali.
18. Mengikuti kegiatan rapat-rapat yang dilaksanakan, baik rapat internal Komite Nominasi dan Remunerasi maupun rapat-rapat dengan Unit Kerja dan Komite Dewan Komisaris diluar rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat koordinasi Dewan Komisaris-Direksi.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Penjelasan terkait dengan Kebijakan Suksesi Direksi dapat dilihat pada Sub Judul Kebijakan dan Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO (PMR)

Komite GCG & PMR adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan maksud untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan penilaian atas kebijakan dan pelaksanaan Pemantau Manajemen Risiko. Komite GCG & PMR dibentuk dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris bahwa Perusahaan telah melaksanakan proses Risiko secara baik memadai

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE WORK PROGRAM AND IMPLEMENTATION OF DUTIES IN 2022

During 2022, Nomination and Remuneration Committee has carried out its duties according to the work program. The implementation of duties of Nomination and Remuneration Committee is as follows:

1. Supervision of Good Corporate Governance Principles Implementation.
2. Evaluation of Board of Directors' performance.
3. Evaluation of remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors
4. Evaluation of proposals/recommendations to the GMS regarding candidates for members of Board of Directors (if necessary), as well as Directors and Commissioners of Subsidiaries.
5. Quarterly coordination meeting with HC Department.
6. Evaluation of Proposed Remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors for 2022.
7. Evaluation of the design and pattern of the Company's organizational structure.
8. Evaluation of the Application of Career Patterns.
9. Evaluation of the Implementation of HR Contact Center for communication between HR HO and Subsidiaries & Branches.
10. Evaluation of the career management system.
11. Evaluation of the company's GCG implementation.
12. Evaluation of regulations regarding GCG.
13. Updating talent pool data.
14. Working Visit to Port Branches.
15. Prepare the Nomination and Remuneration Committee Work Plan and Budget.
16. Preparation of the Nomination and Remuneration Committee Quarterly Reports.
17. Participate in internal meetings of the Board of Commissioners and meetings between Board of Commissioners and Board of Directors once a month.
18. Participating in meetings held, both internal meetings of Nomination and Remuneration Committee as well as meetings with Work Units and Committees of Board of Commissioners other than the internal meetings of Board of Commissioners and coordination meetings between Board of Commissioners and Board of Directors.

BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION POLICY

Explanations related to the Board of Directors Succession Policy can be seen in Sub Headings of Board Nominating Policies and Procedures Commissioners and Directors in this Annual Report.

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING (RMM) COMMITTEE

GCG & RMM Committee is a Committee formed by Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) with the aim of assisting Board of Commissioners in carrying out their obligations to monitor, supervise and assess the policies and implementation of Risk Management. GCG & RMM Committee is formed to provide input to Board of Commissioners that the Company has carried out the Risk process properly and adequately.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Tugas-tugas Komite GCG & PMR adalah sebagai berikut:

1. Komite GCG & PMR bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
2. Komite GCG & PMR bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Komite GCG & PMR memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem Manajemen Risiko serta pelaksanaannya.
4. Komite GCG & PMR memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan.
5. Komite GCG & PMR melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.
6. Tugas Khusus dari Dewan Komisaris:
   a. Pemberian tugas khusus kepada Komite GCG & PMR oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan perintah tertulis yang memuat:
      - Nama yang diberi tugas;
      - Sifat penugasan;
      - Lingkup pekerjaan;
      - Tujuan dan sasaran pekerjaan;
      - Jangka waktu penugasan.
   b. Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite GCG & PMR sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
   c. Dalam melaksanakan tugas khusus Komite GCG & PMR dapat:
      - Melakukan *review* terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Dewan Direksi dan rapat Dewan Komisaris; jika dianggap perlu.
      - Melakukan analisis dan evaluasi, bekerja sama dengan Struktural Manajemen Risiko, dan atau Struktural unit kerja terkait atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite GCG & PMR dengan beban Perseroan.
   d. Komite GCG & PMR menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.

Tanggung jawab Komite GCG & PMR adalah sebagai berikut:

1. Komite GCG & PMR bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Pertanggungjawaban Komite GCG & PMR kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
   a. Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite GCG & PMR.
   b. Laporan Triwulanan pelaksanaan tugas Komite GCG & PMR.
   c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite GCG & PMR.
3. Komite GCG & PMR bertanggung jawab menjaga kerahasian dokumen, data dan informasi Perseroan.

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties of GCG & RMM Committee are as follows:

1. GCG & RMM Committee works collectively in carrying out their duties to assist Board of Commissioners.
2. GCG & RMM Committee is independent both in carrying out its duties and in reports and is responsible to reqBoard of Commissioners.
3. GCG & RMM Committee provides recommendations regarding the improvement of Risk Management system and its implementation.
4. GCG & RMM Committee ensures that there is a satisfactory review procedure for all information issued by the Company.
5. GCG & RMM Committee identifies matters that require Board of Commissioners' attention as well as other tasks assigned by Board of Commissioners.
6. Special Duties from Board of Commissioners:
   a. Board of Commissioners assigns special tasks to GCG & RMM Committee with a written order containing:
      - The name of assignee;
      - The nature of assignment;
      - Scope of work;
      - The goals and objectives of the work;
      - The duration of assignment.
   b. The scope of work for special duties for GCG & RMM Committee is fully determined by Board of Commissioners as long as it does not conflict with applicable laws and regulations.
   c. In carrying out the special duties, GCG & RMM Committee may:
      - Reviewing all necessary records, documents and other information including the minutes of Board of Directors meeting and Board of Commissioners meeting; if deemed necessary.
      - Conduct analysis and evaluation, cooperate with Structural Risk Management, and/or Structural related work units or request assistance from experts or consultants to assist GCG & RMM Committee at the expense of the Company.
   d. GCG & RMM Committee submits a report on the implementation of special tasks to Board of Commissioners.

The responsibilities of GCG & RMM Committee are as follows:

1. GCG & RMM Committee is responsible the Board of Commissioners.
2. The accountability of GCG & RMM Committee to Board of Commissioners is presented in the following report:
   a. Annual report on the implementation of GCG & RMM Committee duties.
   b. Quarterly Report on the implementation of GCG & RMM Committee duties.
   c. Reports for each implementation of special duties of GCG & RMM Committee.
3. GCG & RMM Committee is responsible for maintaining the confidentiality of Company documents, data and information.

WEWENANG KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Dalam melaksanakan tugasnya Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko berwenang:

1. Mengakses catatan atau informasi tentang aset dan sumber daya lainnya dan memasuki pekarangan, Gedung, serta kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
2. Berhak mendapat dan meminta setiap hasil kajian risiko yang dilakukan baik oleh para *risk owner*, para pejabat struktural terkait, *risk champion*, Satuan Pengawasan Intern maupun Direksi Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Dalam melaksanakan kewenangannya, Komite bekerja sama dengan unit kerja terkait, dalam hal ini para *risk owner*, pejabat struktural terkait kendali mutu dan manajemen risiko serta Satuan Pengawasan Internal Perseroan.

PIAGAM KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Pelindo mengacu pada Piagam Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) terakhir ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 09/KEPDK/PI.II/ VII-2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Pemutakhiran/Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Dalam Piagam tersebut memuat ketentuan yang harus dipatuhi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit agar dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Piagam tersebut ditata dalam susunan bagian sebagai berikut:

1. Landasan Hukum;
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota;
3. Tugas;
4. Kewenangan;
5. Persyaratan Keanggotaan;
6. Tanggung Jawab;
7. Rapat;
8. Laporan;
9. Akses Kerahasiaan Informasi;
10. Rencana Kerja dan Anggaran;
11. Penghasilan Anggota;
12. Pendidikan dan Tenaga Penunjang;
13. Penilaian Kinerja;
14. Lain-Lain;
15. Penutup.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Periode 1 Januari 2022 – 7 Maret 2022

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE AUTHORITIES

In carrying out its duties, GCG and Risk Management Monitoring Committee is authorised to:

1. Access records or information about assets and other resources and enter the grounds, buildings, and offices used by the Company;
2. Have the right to obtain and request any results of risk assessments conducted either by risk owners, relevant structural officials, risk champions, Internal Audit Unit or Board of Directors of the Company;
3. Request explanations from Board of Directors and/or other officials regarding all issues relating to the management of the Company;
4. In exercising its authority, the Committee cooperates with relevant work units, in this case the risk owners, structural officials related to quality control and risk management as well as the Company's Internal Audit Unit.

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE CHARTER

In carrying out its duties and responsibilities, Pelindo's GCG and Risk Management Monitoring Committee refers to the latest PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)' GCG and Risk Management Monitoring Committee Charter established by Board of Commissioners through Board of Commissioners Decree No. 09/KEPDK/PI.II/VII-2017 dated July 14, 2017 concerning Updating/ Stipulation of the Charter of Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, Nomination & Remuneration Committee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The Charter contains provisions that must be adhered to in the formation and implementation of GCG and Risk Management Monitoring Committee activities in order to work independently, objectively, independently, transparently and accountably. The charter is organised in the following sections:

1. Legal Basis;
2. Appointment and Dismissal of Members
3. Duties;
4. Authority;
5. Membership Requirements;
6. Responsibilities;
7. Meetings;
8. Report;
9. Access to Confidential Information;
10. Work Plan and Budget;
11. Member's Income;
12. Education and Support Personnel;
13. Performance Assessment;
14. Other;
15. Closing.

STRUCTURE, MEMBERSHIP AND EXPERTISE OF GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Period of March 7, 2022 – December 31, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Antonius Rainier Haryanto	Ketua Chairman	Komisaris Commissioner	Teknik Sipil, Manajemen Lingkungan Civil Engineering, Environmental Management	SK pembagian Tugas No. 13/KEP-DK/PI.II/VI-2021 tanggal 16 Juni 2021 Decree of Task Division No. 13/KEP-DK/PI.II/VI-2021 dated June 16, 2021
Muchtar Luthfi Mutty	Wakil Ketua Vice Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ilmu Pemerintahan, Administrasi Negara Government and State Administration	SK Pengangkatan No.02/KEP-DK/PI/I-2022 tanggal 11 Januari 2022 Appointment Decree No.02/KEP-DK/PI/I-2022 dated January 11, 2022
Rakhmat Adi Santosa	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi Accountancy	SK Pengangkatan No. 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020 Decree of Appointment No. 09/KEP-DK/PI.II/IV-2020
Aries Fikirman	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Keuangan Finance	SK Pengangkatan No. 04/KEP-DK/PI/III-2020 tanggal 7 Maret 2022 Decree of Appointment No. 04/KEP-DK/PI/III-2020 dated March 7, 2022

Periode 7 Maret 2022 – 31 Desember 2022 Period of March 7, 2022 – December 31, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Antonius Rainier Haryanto	Ketua Chairman	Komisaris Commissioner	Teknik Sipil, Manajemen Lingkungan Civil Engineering, Environmental Management	SK pembagian Tugas No. 13/KEP-DK/PI.II/VI-2021 tanggal 16 Juni 2021 Decree of Task Division No. 13/KEP-DK/PI.II/VI-2021 dated June 16, 2021
Muchtar Luthfi Mutty	Wakil Ketua Vice Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ilmu Pemerintahan, Administrasi Negara Government and State Administration	SK Pengangkatan No.02/KEP-DK/PI/I-2022 tanggal 11 Januari 2022 Appointment Decree No.02/KEP-DK/PI/I-2022 dated January 11, 2022
Aries Fikirman	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Keuangan Finance	SK Pengangkatan No. 04/KEP-DK/PI/III-2020 tanggal 7 Maret 2022 Decree of Appointment No. 04/KEP-DK/PI/III-2020 dated March 7, 2022
Sugiyono	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Manajemen Accountancy, Management	SK Pengangkatan No. 01/KEP-DK/PI.II/II-2018 tanggal 1 Februari 2018 SK Pengalihan No. 07/KEP-DK/PI.II/IV-2020 tanggal 8 April 2020 SK Perpanjangan No. 03/KEP-DK/PI.II/II-2020 tanggal 8 April 2021 Decree of Appointment No. 01/KEP-DK/PI.II/II-2018 dated February 1, 2018 Transfer Decree No. 07/KEP-DK/PI.II/IV-2020 dated April 8, 2020 Extension Decree No. 03/KEP-DK/PI.II/II-2020 dated April 8, 2021

PROFIL KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Profil Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE PROFILE

The profile of GCG and Risk Management Monitoring Committee as of December 31, 2022 is as follows

Antonius Rainier Haryanto
Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko/Komisaris
Chairman of GCG and Risk Management Monitoring Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Profile can be seen in the Profile of Board of Commissioners section in this Annual Report.

Muchtar Luthfi Mutty
Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko/Komisaris Independen
Member of GCG and Risk Management Monitoring Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Profile can be seen in the Profile of Board of Commissioners section in this Annual Report.



Aries Fikirman
Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko
Member of GCG and Risk Management Monitoring Committee

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Bandung	Bandung
Tempat dan Tanggal Lahir/ Usia Place and Date of Birth/Age	Sukabumi, 21 Maret 1964/58 tahun	Sukabumi, March 21, 1964/58 years old
Riwayat Pendidikan Educational Background	• DIII Postal dan Ilmu Akademis Umum Pendidikan Tinggi Pos (1986) • S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan Pendidikan Tinggi Pos Lanjutan (1993) • S2 Manajemen Keuangan Universitas Padjadjaran Bandung (2005)	• Diploma in Postal and General Academic Science, Postal Higher Education (1986) • Bachelor in Economics and Development Studies, Post Advanced Higher Education (1993) • Master in Financial Management, Padjadjaran University, Bandung (2005)
Sertifikasi Certification		
Pengalaman Kerja Work Experience	• Sekretaris Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) (2009 – 2014) • Staf Ahli Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) (2011) • Manajer Kinerja Unit Bisnis PT Pos Properti Indonesia (2014) • Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Bisnis Syariah dan Pasar PT Pos Indonesia (Persero) (2017)	• Secretary of Board of Commissioners of PT Pos Indonesia (Persero) (2009 – 2014) • Expert Staff to President Director of PT Pos Indonesia (Persero) (2011) • Business Unit Performance Manager of PT Pos Properti Indonesia (2014) • Head of Planning, Sharia Business Development and Market of PT Pos Indonesia (Persero) (2017)

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/KEP-DK/PI.II/II2018 tanggal 1 Februari 2018 • Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/KEP-DK/PI.II/II-2021 tanggal 1 Februari 2021	• Board of Commissioners Decree No. 01/KEP-DK/PI.II/II2018 dated February 1, 2018 • Board of Commissioners Decree No. 03/KEP-DK/PI.II/II-2021 dated February 1, 2021
Periode Menjabat Service Period	• Periode I : 1 Februari 2018 – 1 Februari 2021 • Periode II : 1 Februari 2021 – 31 Januari 2023	• 1st Period: February 1, 2018 – February 1, 2021 • 2nd Period: February 1, 2021 – January 31, 2023
Jabatan Rangkap Concurrent Position	-	



Sugiyono

Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko/ Pihak Independen

Member of GCG and Risk Management Monitoring Committee / Independent Party

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/ Usia Place and Date of Birth/Age	29 Mei 1985/37 tahun	May 29, 1985/37 years old
Riwayat Pendidikan Educational Background	• DIII Akuntansi Universitas Indonesia (2007) • Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia (2009) • Magister Manajemen PPM School of Management (2022)	• DIII Accounting of University of Indonesia • Bachelor of Accounting, University of Indonesia • Master of Management, PPM School of Management
Sertifikasi Certification	Certified Risk Governance Professional	Certified Risk Governance Professional
Pengalaman Kerja Work Experience	• Sales Operation Audit Manager PT Astra International,Tbk (2010 –2019) • Risk Management Manager PT Astra International,Tbk (Januari – Juli 2020) • Risk Management Committee PT Askrindo (2020 - sekarang)	• Sales Operation Audit Manager of PT Astra International,Tbk (2010 –2019) • Risk Management Manager of PT Astra International,Tbk (January – July 2020) • Risk Management Committee of PT Askrindo (2020 - present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris No. 04/KEP-DK/PI/III-2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite *Good Corporate Governance* dan Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia	Decision of Board of Commissioners No. 04/KEP-DK/PI/III-2022 concerning Dismissal and Appointment of Members of Good Corporate Governance and Risk Management Monitoring Committee of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia
Periode Menjabat Service Period	2022 - 2025	2022 - 2025
Jabatan Rangkap Concurrent Position	• Risk Management Committee PT Askrindo	• Risk Management Committee of PT Askrindo

MASA JABATAN KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE TENURE

The tenure for members of GCG and Risk Management Monitoring Committee who are not members of Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for another 2 (two) years, without prejudice to the right of Board of Commissioners to dismiss them at any time.

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND WORK EXPERIENCE

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko
GCG and Risk Management Monitoring Committee Educational Qualifications and Work Experience

Nama Name	**Jabatan** Position	**Pendidikan** Education	**Pengalaman Kerja** Work Experience
Antonius Rainier Haryanto	Ketua Chairman	• S1 bidang Teknik Sipil • S2 bidang Teknik Manajemen Lingkungan • S3 bidang *Build Environment* • Bachelor degree in Civil Engineering • Master degree in Environmental Management Engineering • Doctorate in Build Environment	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in government sector
Muchtar Luthfi Mutty	Wakil Ketua Vice Chairman	• Program Sarjana Muda APDN • S1 Ilmu Pemerintahan • S2 bidang Kajian Ketahanan Nasional • S2 bidang Administrasi Negara • APDN Bachelor Program • Bachelor of Government Science • Master of National Resilience Studies • Master of Public Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in government sector
Rakhmat Adi Santosa*	Anggota Member	• DIII Akuntansi • S1 Jurusan Akuntansi Fakultas • S2 Jurusan Akuntansi • Diploma in Accounting • Bachelor of Accounting Faculty • Master of Accounting	Memiliki pengalaman kerja di bidang Akuntansi dan Audit Has work experience in Accounting and Auditing
Aries Fikirman	Anggota Member	• DIII Postal dan Ilmu Akademis Umum • S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan) • S2 Manajemen Keuangan • Diploma in Postal and General Academic Sciences • Bachelor of Economics and Development Studies • Master of Financial Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan. Has work experience in courier services, logistics, and financial transactions
Sugiyono**	Anggota Member	• DIII Akuntansi • S1 Akuntansi • S2 Manajemen • Diploma of Accounting • Bachelor of Accounting • Master of Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen risiko. Have work experience in the field of risk management

*Berhenti menjabat sejak 7 Maret 2022
**Mulai menjabat sejak 7 Maret 2022
*No longer served since March 7, 2022
**Started to serve since March 7, 2022

INDEPENDENSI KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE INDEPENDENCE

Tabel Independensi Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko
GCG and Risk Management Monitoring Committee Independence

Aspek Independensi Independence Aspect	Antonius Rainier Haryanto	Muchtar Luthfi Mutty	Rakhmat Adi Santosa	Aries Fikirman	Sugiyono
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no managerial relationship in the Company, subsidiary, or affiliated Company	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Does not have share ownership relationship in the Company	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Does not have family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Nomination and Remuneration Committee	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not have family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Nomination and Remuneration Committee	√	√	√	√	√

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO PADA TAHUN 2022

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT IN 2022

Nama Name	Jabatan Name	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Types of Training and Subject of Training/Competency	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Penyelenggara Organizer
Antonius Rainier Haryanto	Ketua Chairman	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini Training and/or competency development can be seen in the Board of Directors' Training and/or Competency Development section of Corporate Governance Chapter in this Annual Report		

Nama Name	Jabatan Name	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Types of Training and Subject of Training/Competency	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Penyelenggara Organizer
Muchtar Luthfi Mutty	Wakil Ketua Vice Chairman	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini Training and/or competency development can be seen in the Board of Directors' Training and/or Competency Development section of Corporate Governance Chapter in this Annual Report		
Rakhmat Adi Santosa*	Anggota Member	-	-	-
Aries Fikirman	Anggota Member	Konsep dan Implementasi Icofr di Entitas Induk dan Anak Concept and Implementation of Icofr in Parent and Subsidiaries	*Online*, 1 Agustus 2022 Online, August 1, 2022	Kementerian BUMN Ministry of SOE
		Sertifikasi Nasional *"Certified Risk Governance Professional* (Level IV)" National Certification "Certified Risk Governance Professional (Level IV)"	*Online*, 29 - 30 November 2022 dan tanggal 8 Desember 2022 Online, November 29 - 30 2022 and December 8, 2022	RAP Learning Center - LSPMR
Sugiyono**	Anggota Member	Sertifikasi Nasional *"Certified Risk Governance Professional* (Level IV)" National Certification "Certified Risk Governance Professional (Level IV)"	*Online*, 29 - 30 November 2022 dan tanggal 8 Desember 2022 Online, November 29 - 30 2022 and December 8, 2022	RAP Learning Center - LSPMR

*Berhenti menjabat sejak 7 Maret 2022
**Mulai menjabat sejak 7 Maret 2022
*No longer served since March 7, 2022
**Started to serve since March 7, 2022

RAPAT KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dipimpin oleh Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko atau anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko yang paling senior, apabila Ketua GCG dan Komite Pemantau Manajemen Risiko berhalangan hadir. Jika dipandang perlu, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko. Setiap rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko yang hadir. Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko mengadakan rapat koordinasi dengan Struktural Manajemen Risiko sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE MEETINGS

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE MEETING POLICY

GCG and Risk Management Monitoring Committee conducts meetings at least equal to the minimum Board of Commissioners meetings as stipulated in the Company's Articles of Association. GCG and Risk Management Monitoring Committee meetings are chaired by the Chairman of GCG and Risk Management Monitoring Committee or the most senior member, if the Chairman of GCG and Risk Management Monitoring Committee is unable to attend. If deemed necessary, GCG and Risk Management Monitoring Committee may invite the Management related to the meeting material to attend GCG and Risk Management Monitoring Committee meeting. Each meeting of GCG and Risk Management Monitoring Committee is set forth in the minutes of meeting signed by all members of GCG and Risk Management Monitoring Committee present. GCG and Risk Management Monitoring Committee holds coordination meetings with Structural Risk Management at least once every 3 (three) months.

AGENDA RAPAT KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Sepanjang tahun 2022, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko, sebagai berikut.

MEETING AGENDA GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING

Throughout 2022, the date, meeting agenda and participants of GCG and Risk Management Monitoring Committee meetings are as follows.

Tabel Agenda Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko
GCG and Risk Management Monitoring Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	3 Januari 2022 January 3, 2022	1. Permintaan Penjelasan atas Rencana Investasi Tahun 2022 dan Perkembangan Pelaksanaan Proyek Strategis di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 2. Tindak Lanjut Keputusan RUPS atas Penetapan Nilai dan Jangka Waktu Perjanjian Kerja sama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 1. Request for Explanation of the 2022 Investment Plan and Development of Strategic Project at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 2. Follow up on the GMS Resolution on the Determination of Value and Term of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cooperation Agreement	Antonius Rainier Haryanto Muchtar Luthfi Mutty Rakhmat Adi Santosa Aries Fikirman
2	9 Februari 2022 February 9, 2022	Tanggapan atas Rencana Pengalihan Saham (Inbreng) pada PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PT PPI) Response to Share Transfer Plan (Inbreng) at PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PT PPI)	Antonius Rainier Haryanto Muchtar Luthfi Mutty Rakhmat Adi Santosa Aries Fikirman
3	7 Maret 2022 March 7, 2022	1. Mekanisme Penilaian *Assessment Good Corporate Governance* (GCG) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tahun 2021 2. Tanggapan atas Usulan Penyesuaian Batasan Kewenangan Kerja Sama dengan Anak/Cucu Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan Kepemilikan Saham di bawah 95% dan terhadap Eksternal 1. Good Corporate Governance (GCG) Assessment Mechanism of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in 2021 2. Response to Proposal for Adjusting the Limits of Authority in Cooperation with Subsidiaries/Sub-Subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) with Share Ownership below 95% and to External	Antonius Rainier Haryanto Muchtar Luthfi Mutty Rakhmat Adi Santosa Aries Fikirman
4	21 Maret 2022 March 21, 2022	Pengesahan Pedoman Perangkat *Good Corporate Governance* (GCG) Ratification of Good Corporate Governance (GCG) Tools Guidelines	Antonius Rainier Haryanto Muchtar Luthfi Mutty Rakhmat Adi Santosa Aries Fikirman
5	14 April 2022 April 14, 2022	Permintaan Tambahan Informasi Terkait Hasil Kajian Rencana Kerja sama Pelayanan Kepelabuhanan dengan PT Inti Sentosa Alam Bahtera (PT ISAB) Request for Additional Information Related to the Study Results on the Port Service Cooperation Plan with PT Inti Sentosa Alam Bahtera (PT ISAB)	Antonius Rainier Haryanto Muchtar Luthfi Mutty Rakhmat Adi Santosa Aries Fikirman
6	11 Mei 2022 May 11, 2022	Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja Sama Pelayanan Kepelabuhanan dengan PT Inti Sentosa Alam Bahtera (PT ISAB) Board of Commissioners' Response to the Port Services Cooperation Plan with PT Inti Sentosa Alam Bahtera (PT ISAB)	Antonius Rainier Haryanto Muchtar Luthfi Mutty Rakhmat Adi Santosa Aries Fikirman

Tabel Agenda Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko

GCG and Risk Management Monitoring Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
7	19 Mei 2022 May 19, 2022	Permintaan Klarifikasi Hasil Kunjungan ke Pelabuhan Kijing & Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Request for Clarification of Visit Results to Kijing Port & Follow-Up of BPK Audit Results	Antonius Rainier Haryanto Muchtar Luthfi Mutty Aries Fikirman Sugiyono
8	20 Juni 2022 June 20, 2022	Tindak Lanjut Pembangunan Jalan Akses Dari/Menuju Terminal Kendari New Port (KNP) di Bungkotoko Follow-up to the construction of access road from/to Kendari New Port (KNP) Terminal in Bungkotoko	Antonius Rainier Haryanto Muchtar Luthfi Mutty Aries Fikirman Sugiyono
9	28 Juni 2022 June 28, 2022	Evaluasi Penyesuaian Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2021-2025 Evaluation of Adjustments of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Corporate Long Term Plan (RJPP) for 2021-2025	Antonius Rainier Haryanto Muchtar Luthfi Mutty Aries Fikirman Sugiyono
10	1 Juli 2022 July 1, 2022	Persetujuan *Draft* Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Approval of the Draft Guidelines for the Social and Environmental Responsibility Program (CSR)	Antonius Rainier Haryanto Muchtar Luthfi Mutty Aries Fikirman Sugiyono
11	20 Juli 2022 July 20, 2022	Permintaan Data dan Informasi serta Penjelasan Tambahan terkait Rencana Restrukturisasi PT Prima Multi Terminal Request for Data and Information as well as Additional Explanation regarding the Restructuring Plan of PT Prima Multi Terminal	Antonius Rainier Haryanto Muchtar Luthfi Mutty Aries Fikirman Sugiyono
12	30 Agustus 2022 August 30, 2022	Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Restrukturisasi PT Prima Multi Terminal (PT PMT) Board of Commissioners' response to the Restructuring Plan of PT Prima Multi Terminal (PT PMT)	Antonius Rainier Haryanto Muchtar Luthfi Mutty Aries Fikirman Sugiyono
13	26 September 2022 September 26, 2022	1. Arahan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2022 2. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Penjaminan *Letter of Undertaking* (LOU) dalam Perjanjian Kredit Sindikasi dan Perjanjian Subordinasi pada PT PMT 1. Directions for the Implementation of Micro and Small Business Funding Program (PUMK) of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in 2022 2. Written Response of Board of Commissioners on Guarantee Letter of Undertaking (LOU) in the Syndicated Credit Agreement and Subordination Agreement at PT PMT	Antonius Rainier Haryanto Muchtar Luthfi Mutty Aries Fikirman Sugiyono
14	9 November 2022 November 9, 2022	Persetujuan atas Rencana Pendanaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Approval of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Funding Plan	Antonius Rainier Haryanto Muchtar Luthfi Mutty Aries Fikirman Sugiyono
15	29 November 2022 November 29, 2022	Persetujuan *Draft* Peraturan Direksi tentang Pedoman Kerja sama di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Approval of the Draft of Board of Directors Regulations concerning Cooperation Guidelines within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Antonius Rainier Haryanto Muchtar Luthfi Mutty Aries Fikirman Sugiyono
16	1 Desember 2022 December 1, 2022	Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama Program PUMK PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2022 Approval for the Implementation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PUMK Program Cooperation in 2022	Antonius Rainier Haryanto Muchtar Luthfi Mutty Aries Fikirman Sugiyono

Tabel Agenda Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko
GCG and Risk Management Monitoring Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
17	12 Desember 2022 December 12, 2022	Pelaksanaan Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2022 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Good Corporate Governance (GCG) Assessment in 2022 of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Antonius Rainier Haryanto Muchtar Luthfi Mutty Aries Fikirman Sugiyono
18	16 Desember 2022 December 16, 2022	Tanggapan atas Pengalihan Saham (Inbreng) Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada PT Prima Multi Terminal Response to Transfer of Shares (Inbreng) Subsidiary PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to PT Prima Multi Terminal	Antonius Rainier Haryanto Muchtar Luthfi Mutty Aries Fikirman Sugiyono
19	26 Desember 2022 December 26, 2022	Persetujuan Amandemen Perjanjian Bangun Guna Serah Terminal Petikemas Belawan Fase 2 dan Tanggapan Tertulis Rencana Kerja sama Investasi dan Pengoperasian Terminal Belawan New Container Terminal (BNCT) Approval of the Amendment to Build-use and Transfer Agreement for Belawan Container Terminal Phase 2 and Written Responses to Belawan New Container Terminal (BNCT) Investment and Operation Cooperation Plan	Antonius Rainier Haryanto Muchtar Luthfi Mutty Aries Fikirman Sugiyono

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE OF GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko
Attendance at GCG and Risk Management Monitoring Committee Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko GCG and Risk Management Monitoring Committee Meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Antonius Rainier Haryanto	Ketua Chair	19	19	100%
Muchtar Luthfi Mutty	Wakil Ketua Deputy Chair	19	19	100%
Rakhmat Adi Santosa*	Anggota Member	3	3	100%
Aries Fikirman	Anggota Member	19	19	100%
Sugiyono**	Anggota Member	16	16	100%

*Berhenti menjabat sejak 7 Maret 2022
**Mulai menjabat sejak 7 Maret 2022
*Ceased serving on March 7, 2022
**Served since March 7, 2022

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2022

Selama tahun 2022 Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja. Adapun pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat internal Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko.
2. Melaksanakan rapat Internal dengan Dewan Komisaris dan atau menghadiri Rakomdir.
3. *Review* Bulanan dengan *Group Head* Manajemen Risiko.
4. Telaah Atas Kajian Usulan Kerja sama PT ISAB.
5. *Points of Concern* Pembahasan *progress* asimilasi budaya perusahaan.
6. *Points of Concern* Pembahasan rencana revisi RJPP.
7. *Points of Concern* Pembahasan Pedoman TJSL.
8. Telaah terhadap LOU Rencana Restrukturisasi PMT.
9. Telaah terhadap Rencana Kerja Sama dengan INA
10. Telaah terhadap Permohonan Persetujuan atas Rencana Pendanaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
11. Telaah terhadap Rencana Pengalihan Saham (*Inbreng*) PT Pelindo (Persero) Pada PT Prima Multi Terminal.
12. Telaah Terhadap Surat Permohonan Persetujuan atas Pelaksanaan Kerja sama Program PUMK PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
13. Telaah Terhadap Surat Permohonan Persetujuan Amandemen BOT dan Permohonan Tanggapan Tertulis Atas Rencana Kerja sama Investasi BNCT.
14. Kunjungan Regional dan Cabang.

WORK PROGRAM AND IMPLEMENTATION OF DUTIES GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE DUTIES IN 2022

During 2022, GCG Committee and Risk Management Monitoring have carried out their duties according to the work program. The implementation of duties of GCG and Risk Management Monitoring Committee is as follows:

1. Held internal meetings of GCG and Risk Management Monitoring Committee.
2. Held internal meetings with Board of Commissioners and or attend BOD-BOC meetings.
3. Monthly Review with Group Head of Risk Management.
4. Review of PT ISAB's Proposed Cooperation Study.
5. Points of Concern of Discussion on the progress of corporate culture assimilation.
6. Points of Concern of Discussion on RJPP revision plan.
7. Points of Concern of Discussion of TJSL Guidelines.
8. Review of PMT Restructuring Plan LOU.
9. Study of Cooperation Plan with INA
10. Review of the Application for Approval of Funding Plan of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
11. Review of PT Pelindo (Persero)'s Share Transfer Plan (Inbreng) to PT Prima Multi Terminal.
12. Review of the Request for Approval for PUMK Program Cooperation with PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
13. Review of BOT Amendment Approval Letter and Request for Written Responses to BNCT Investment Cooperation Plan.
14. Regional and Branch Visits.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

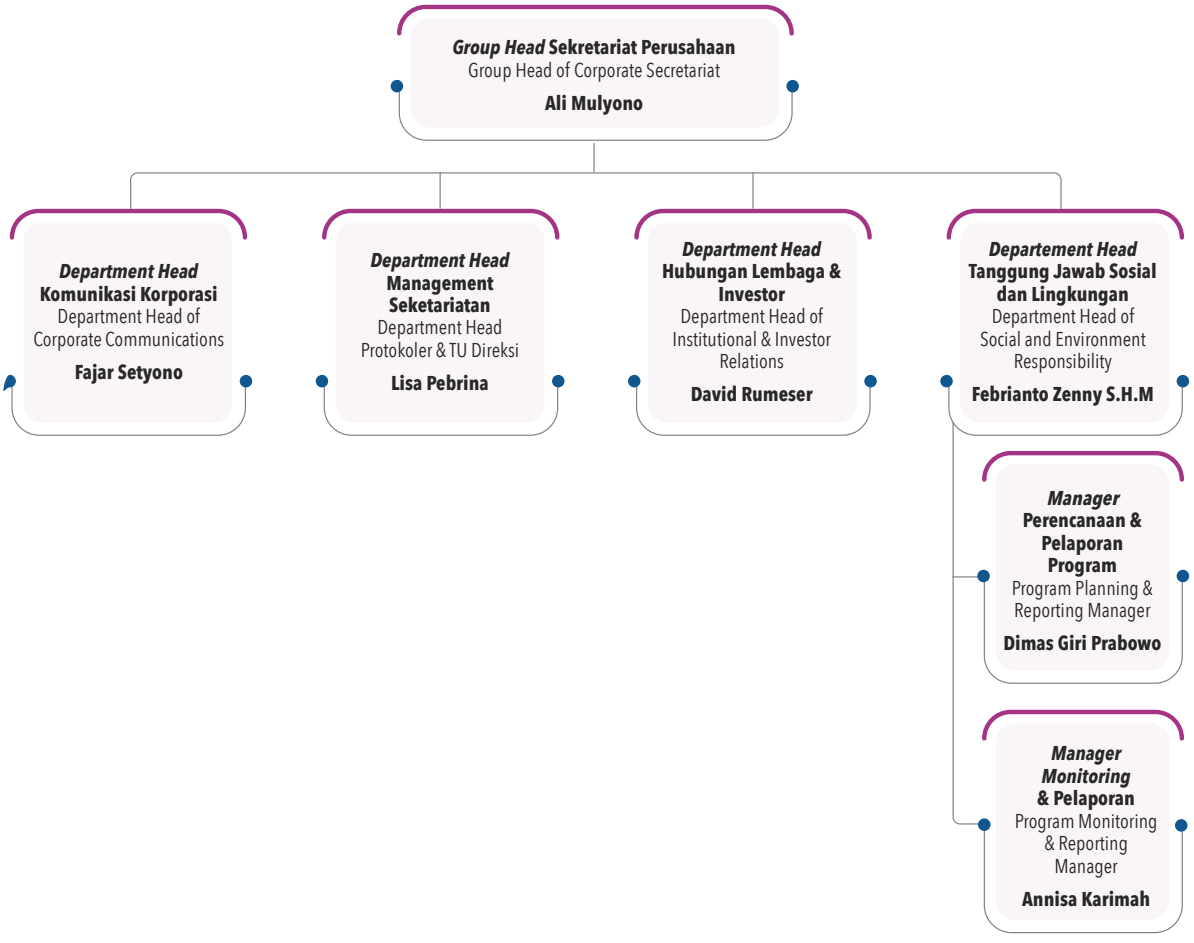
SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Sekretariat Perusahaan merupakan organ tata kelola perusahaan yang memegang peran signifikan sebagai *Compliance Officer* yang membantu Direksi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG serta memenuhi ketentuan terhadap praktik GCG. *General Head President* Sekretariat Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bertugas mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui program komunikasi yang efektif kepada segenap *stakeholders*.

DASAR PENGANGKATAN SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Sekretariat Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Manajemen telah membuat Berita Acara Kesepakatan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No KP.03/1/10/1/RTK/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Persetujuan Pengangkatan Pekerjaan Pada Jabatan Sekretariat Perusahaan dan Satuan Pengendalian Internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

STRUKTUR SEKRETARIAT PERUSAHAAN



ORGANS AND COMMITTEES UNDER BOARD OF DIRECTORS

CORPORATE SECRETARIAT

Corporate Secretariat is a corporate governance organ that plays a significant role as a Compliance Officer who assists Board of Directors in implementing GCG principles and complying with the provisions of GCG practices. General Head President of Corporate Secretariat of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) reports directly to President Director and is tasked with carrying out the mission to support the creation of a consistent and sustainable good corporate image through effective communication programs to all stakeholders.

CORPORATE SECRETARIAT APPOINTMENT BASIS

Corporate Secretariat is appointed and dismissed by President Director based on the Company's internal mechanism under the approval of Board of Commissioners/Supervisory Board. This is in accordance with the Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. The management has made Minutes of Agreement of Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.03/1/10/1/RTK/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021 regarding Approval of Appointment at Corporate Secretariat and Internal Audit Unit PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

CORPORATE SECRETARIAT STRUCTURE

FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Fungsi

Bertanggung jawab untuk memastikan dan mengkoordinasikan rencana dan program kerja bidang pengelolaan kegiatan komunikasi korporasi, tanggung jawab sosial, protokoler dan Tata Usaha Direksi, hubungan lembaga, penerapan tata kelola korporasi, serta kegiatan hubungan investor, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk memastikan tersedianya informasi yang dibutuhkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta, tersedianya laporan manajemen triwulan dan tahunan, Sebagai penghubung (*liaison officer*) untuk membina Hubungan dengan Lembaga/Instansi Pemerintah dan/atau non-Pemerintah pada skala Nasional, serta penyelenggaraan rapat Direksi, pengadaan bahan rapat Direksi dan penyusunan risalah rapat Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengelola, memutuskan dan me*review* rencana dan implementasi program kerja dan anggaran terkait bidang pengelolaan kegiatan komunikasi korporasi, tanggung jawab sosial, protokoler dan tata usaha Direksi, hubungan lembaga, penerapan tata kelola korporasi, serta kegiatan hubungan investor di lingkungan Perusahaan;
2. Melakukan *review* dan evaluasi terhadap:
   a. Usulan rencana kegiatan terkait dengan penyebaran informasi kepada pihak internal ataupun eksternal serta peningkatan *corporate identity*;
   b. Laporan Manajemen Triwulanan, Tahunan untuk dapat disampaikan ke Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
   c. Usulan kebijakan peraturan perusahaan terkait dengan GCG beserta kebijakan turunan yang lainnya seperti *Board Manual* (Tata Kelola Direksi dan Dewan Komisaris), Kode Etik Perusahaan, Pedoman Gratifikasi dan *Whistleblowing System* (WBS);
   d. Usulan *framework*/metode pengendalian GCG, *Board Manual* (Tata Kelola Direksi dan Dewan Komisaris), Kode Etik Perusahaan, Pedoman Gratifikasi dan *Whistleblowing System* (WBS);
   e. Tindak lanjut hasil penilaian/pemeriksaan penerapan GCG, *Board Manual* (Tata Kelola Direksi dan Dewan Komisaris, Kode Etik Perusahaan, Pedoman Gratifikasi dan *Whistleblowing System* (WBS);
   f. Usulan rencana kegiatan program pelayanan masyarakat meliputi Kemitraan, Bina Lingkungan dan CSR;
   g. Hasil evaluasi terhadap proposal atau usulan kegiatan pelayanan masyarakat, Bina Lingkungan dan CSR yang berasal dari pihak eksternal;
   h. Hasil evaluasi penerapan program kemitraan, bina lingkungan dan CSR;
   i. Usulan rencana pelaksanaan Rapat Direksi yang dilaksanakan secara rutin ataupun insidental;
   j. Pengelolaan kegiatan protokoler Direksi Perusahaan;
   k. Usulan pengelolaan dan penggunaan anggaran biaya Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan;

CORPORATE SECRETARY FUNCTIONS, DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Functions

Responsible for ensuring and coordinating work plans and programs in the field of corporate communication activities management, social responsibility, protocol and administration of Board of Directors, institutional relations, implementation of corporate governance, as well as investor relations activities, are carried out in accordance with applicable regulations, to ensure the availability of information needed by Board of Directors and Board of Commissioners on a regular basis and/or at any time if requested, the availability of quarterly and annual management report, as a liaison officer to foster Relations with Government Institutions/Agencies and/or non-Government on a National scale, as well as holding meetings of Board of Directors, preparation of briefing sheets for Board of Directors meetings and making minutes of Board of Directors meetings.

Duties and Responsibilities

1. Manage, decide and review the plans and implementation of work programs and budgets related to the corporate communication activities management, social responsibility, protocol and administration of Board of Directors, institutional relations, implementation of corporate governance, and investor relations activities within the Company;
2. Conduct review and evaluation of:
   a. Proposed activity plans related to the dissemination of information to internal or external parties as well as improving corporate identity;
   b. Quarterly, Annual Management Report to be submitted to Board of Commissioners/Supervisory Board;
   c. Proposed corporate regulatory policies related to GCG along with other derivative policies such as the Board Manual, the Company's Code of Conduct, Gratification Guidelines and Whistleblowing System (WBS);
   d. Proposed GCG framework/control method, Board Manual, the Company's Code of Conduct, Gratification Guidelines and Whistleblowing System (WBS);
   e. Follow-up on the results of GCG assessment/inspection, Board Manual, the Company's Code of Conduct, Guidelines for Gratification and Whistleblowing System (WBS);
   f. Proposed plans for community service programs include Partnership, Community Development and CSR;
   g. Evaluate the proposals for community service activities, Community Development and CSR from external parties;
   h. Evaluate the implementation results of partnership program, community development and CSR;
   i. Propose plan for Board of Directors Meeting which is held routinely or incidentally;
   j. Management of the Company's Board of Directors protocol activities;
   k. Proposed management and use of the budget for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company;

l. Mengelola tata usaha serta menyimpan dokumen perusahaan termasuk daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi/ rapat Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan RUPS;
m. Memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam *website* perusahaan maupun media cetak atau media resmi perusahaan untuk dikelola ketika ada pembaharuan;
n. Pengelolaan kegiatan hubungan kelembagaan baik dengan Instansi terkait baik Pemerintah dan/atau non-Pemerintah, Nasional, termasuk memfasilitasi komunikasi dengan calon mitra/investor;

Merekomendasikan usulan terkait:
1. Media yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada pegawai perusahaan dan/atau pihak eksternal;
2. Kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan *corporate identity;*
3. Kebijakan *corporate identity* perusahaan;
4. Jenis kegiatan Program Pelayanan masyarakat, Bina Lingkungan dan CSR yang akan dilaksanakan;
5. Kebijakan perusahaan terkait dengan GCG dan peraturan turunannya seperti *Board Manual* (Tata Kelola Direksi dan Dewan Komisaris), dan Kode Etik Perusahaan, Pedoman Gratifikasi dan *Whistleblowing System* (WBS);
6. Tindak lanjut terhadap ketidakpatuhan atas Pedoman Gratifikasi dan *Whistleblowing System* (WBS) oleh Pegawai di lingkungan Perusahaan;
7. Agenda dan jadwal pelaksanaan rapat Direksi;
8. Rencana anggaran biaya Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan;
9. Jenis informasi yang dapat/tidak dapat disebarkan kepada pegawai internal perusahaan
10. Kebijakan keterbukaan informasi publik perusahaan;

Melakukan pengendalian terhadap:
1. Realisasi program kerja dan kesesuaian pengelolaan anggaran terkait komunikasi perusahaan, penerapan GCG dan peraturan turunannya, Protokoler dan Tata Usaha Direksi, serta pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya;
2. Implementasi strategi dan/atau peraturan perusahaan terkait komunikasi perusahaan, penerapan GCG dan peraturan turunannya, Protokoler dan Tata Usaha Direksi, serta pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan;
3. Informasi untuk pegawai internal perusahaan dan pihak eksternal perusahaan;
4. Keberhasilan program Pelayanan Masyarakat, Bina Lingkungan, dan CSR yang dilakukan oleh Perusahaan;
5. Hasil evaluasi penerapan GCG dan peraturan turunannya seperti *Board Manual* (Tata Kelola Direksi dan Dewan Komisaris), dan Kode Etik Perusahaan, Pedoman Gratifikasi dan *Whistleblowing System* (WBS);
6. Keberjalanan Rapat Direksi secara rutin ataupun insidental.

l. Manage administration and store Company documents including shareholder register, special register and minutes of Board of Directors/Board of Commissioners/Supervisory Board meetings and GMS meetings;
m. Updating the information material presented on the Company website as well as print media or official Company media to be managed when there is an update;
n. Manage the institutional relations activities with related agencies, both Government and/or non-Government, National, including facilitating communication with potential partners/investors;

Recommend proposals related to:
1. Media used to disseminate information to Company employees and/or external parties;
2. Activities to be carried out to improve corporate identity;
3. Company's corporate identity policy;
4. Types of Community Service Program, Community Development and CSR activities to be carried out;
5. Company policies related to GCG and its derivative regulations such as the Board Manual, the Company's Code of Conduct, Guidelines for Gratification and Whistleblowing System (WBS);
6. Follow up on non-compliance with Gratification Guidelines and Whistleblowing System (WBS) by Employees of the Company;
7. Agenda and schedule for Board of Directors meeting;
8. Budget plan for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company;
9. Types of information that can/cannot be disseminated to internal Company employees
10. Company's public information disclosure policy;

Exercise control on:
1. Realization of work programs and suitability of budget management related to corporate communications, implementation of GCG and its derivative regulations, Protocol and Administration of Board of Directors, as well as implementation of partnership and community development programs with a predetermined budget;
2. Implementation of corporate strategy and/or regulations related to corporate communication, implementation of GCG and its derivative regulations, Protocol and Administration of the Board of Directors, as well as implementation of partnership and community development programs;
3. Information for the Company's internal employees and external parties;
4. The success of the Community Service, Community Development, and CSR programs carried out by the Company;
5. The evaluation results of the implementation of GCG and its derivative regulations such as the Board Manual, the Company's Code of Conduct, Gratification Guidelines and Whistleblowing System (WBS);
6. Routine or incidental Board of Directors Meetings.

PROFIL SEKRETARIAT PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARIAT PROFILE



Ali Mulyono
Group Head Sekretariat Perusahaan
Group Head Corporate Secretariat

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia	Indonesia Citizen
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/ Usia Place and Date of Birth/Age	Jepara, 15 Agustus 1969/53 tahun per 31 Desember 2022	Jepara, August 15, 1969/53 years as of December 31 2022
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Hukum dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1998	Bachelor of Law from Gadjah Mada University in 1998
Sertifikasi Certification	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	1. AGM Kepatuhan Internal dan Tanggap Bencana/PFSO Cabang Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2012 -2014; 2. Deputi Safety, Security and Environment PT Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2014 – 2016; 3. DGM hukum dan Pengendalian Internal Cabang Pelabuhan Tanjung Priok PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada tahun 2016 – 2018; 4. Direktur SDM PT New Priok Container Terminal One pada tahun 2018 – 2020; 5. SVP Hukum PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada tahun 2020 – 2021; 6. EVP Sekretariat Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada tahun 2021; 7. *Group Head* Sekretariat Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Perseo) pada tahun 2021 sampai saat ini.	1. AGM Internal Compliance and Disaster Response/PFSO Tanjung Priok Port Branch in 2012 -2014; 2. Deputy for Safety, Security and Environment of PT Pelabuhan Tanjung Priok in 2014 – 2016; 3. Legal DGM and Internal Control of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tanjung Priok Port Branch in 2016 – 2018; 4. HC Director of PT New Priok Container Terminal One in 2018 – 2020; 5. SVP of Law of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 2020 – 2021; 6. EVP Corporate Secretariat of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 2021; 7. Group Head Corporate Secretariat of PT Pelabuhan Indonesia (Perseo) in 2021 until present.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Berita Acara Kesepakatan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No KP.03/1/10/1/RTK/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Persetujuan Pengangkatan Pekerjaan Pada Jabatan Sekretariat Perusahaan dan Satuan Pengendalian Internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Minutes of Agreement of Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.03/1/10/1/RTK/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021 concerning Approval for Appointment of Officials at Corporate Secretariat and Internal Audit Unit of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SEKRETARIAT PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Type of Training and Subject of Training/Competency Development	**Waktu dan Tempat Pelaksanaan** Time and Venue	**Penyelenggara** Organizer
Financial Strategy For Non-Finance Batch 1	24 – 25 November 2022 November 24-25, 2022	Pelindo
International Webinar: Ecosystems Approach to Port Development	12 Desember 2022 December 12, 2022	Pelindo
Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS): *Achieving Asean Asset Class*	18 Oktober 2022 October 18, 2022	Pelindo

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIAT PERUSAHAAN TAHUN 2022

Pelaksanaan tugas Sekretariat Perusahaan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Departemen Komunikasi Korporasi

1. Pengelolaan Informasi internal dan eksternal;
2. Pengelolaan kegiatan internal dan eksternal;
3. Partisipasi *Sponsorship* dan Bentuk Partisipasi Lainnya;
4. Partisipasi dalam kegiatan *award*;
5. Konsultansi Kehumasan;
6. Pembuatan *Annual Report & Sustainability Report* Tahun 2021;
7. Mengikuti kegiatan *monitoring* dan evaluasi keterbukaan informasi publik;
8. Penerbitan Iklan;
9. Pendokumentasian Kegiatan Perusahaan;
10. Produksi Cinderamata Perusahaan;
11. Pembuatan kalender dan agenda perusahaan; dan
12. pembelian langsung/langganan surat kabar.

Departemen Hubungan Lembaga dan Investor

1. Tata Kelola Perusahaan
   a. Pelaksanaan Asesmen GCG;
   b. Penandatanganan Kode Etik Perusahaan dan Pakta Integritas bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai;
   c. Pemenuhan *Area of Improvement* (AoI) GCG;
   d. Pengendalian Gratifikasi;
   e. Pengelolaan WBS Pelindo *Group*;
   f. Optimalisasi implementasi GCG dan Sosialisasi penerapan *corporate governance;*
   g. Pengesahan perangkat pedoman GCG oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
   h. *Benchmark* GCG Perusahaan;
   i. Penguatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
   j. Penyusunan SOP pada Departemen HLTI; dan
   k. *Support* dalam penyusunan *Annual Report* (AR) dan *Sustainability Report* (SR) 202.
2. Hubungan Antar Lembaga
   a. Pengelolaan hubungan lembaga dan *issue* strategis lembaga;
   b. Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Kerja Kementerian, Lembaga Eksternal, *Sharing Knowledge* dan *Port Visit* Lembaga;
   c. Pelaksanaan Pendampingan RDP dan Kunker DPR-RI ke Cabang Pelabuhan;
   d. Sinergi antara Pelindo dengan Pemerintah /Lembaga lainnya;
   e. Pelaksanaan kegiatan *event* perusahaan dan Acara Peresmian; dan
   f. Keanggotaan aktif pada Organisasi Internasional.
3. Investor
   a. Koordinasi dengan OJK terkait Investor dan kepatuhan POJK No 14 tahun 2022;
   b. Pengiriman surat terkait laporan kepatuhan terhadap OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Departemen Protokoler dan TU Direksi

1. Pelaksanaan Rapat Direksi;
2. Pelaksanaan Rapat Komisaris dan Direksi;

CORPORATE SECRETARY DUTIES IMPLEMENTATION IN 2022

The Corporate Secretariat duties implementation during 2022 are as follows:

Corporate Communication Department

1. Internal and external information management;
2. Management of internal and external activities;
3. Sponsorship and other forms of participation;
4. Participation in award activities;
5. Public Relations Consultancy;
6. Preparation of 2021 Annual Report & Sustainability Report;
7. Participating in monitoring and evaluation of public information disclosure activities;
8. Issuance of advertisements;
9. Documentation of Company Activities;
10. Production of Company Souvenirs;
11. Production of Company calendars and agendas; and
12. Direct purchase/newspaper subscription.

Department of Institutional and Investor Relations

1. Corporate Governance
   a. GCG Assessment;
   b. Signing of the Company's Code of Conduct and Integrity Pact for Board of Commissioners, Board of Directors and Employees;
   c. Fulfilment of GCG Area of Improvement (AoI);
   d. Gratification Control;
   e. Pelindo Group WBS Management;
   f. Optimization of GCG implementation and socialization of corporate governance implementation;
   g. Ratification of GCG guidelines by Board of Commissioners and Board of Directors;
   h. Company GCG Benchmark;
   i. Strengthening of Anti-Bribery Management System;
   j. Preparation of SOP at HLTI Department; and
   k. Support in the preparation of Annual Report (AR) and Sustainability Report (SR) 202.
2. Inter-Institutional Relations
   a. Management of institutional relations and institutional strategic issues;
   b. Implementation of Ministry Work Visit Activities, External Institutions, Knowledge Sharing and Port Visit Institutions;
   c. Implementation of DPR-RI's RDP and Working Visit Assistance to Port Branches;
   d. Synergy between Pelido and other Government/Institutions;
   e. Implementation of Company event activities and Inauguration Events; and
   f. Active membership in International Organizations.
3. Investors
   a. Coordination with OJK regarding Investors and compliance with POJK No. 14 of 2022;
   b. Delivery of letters related to compliance reports to OJK and Indonesia Stock Exchange.

Protocol and TU Directors' Department

1. Implementation of Board of Directors Meeting;
2. Implementation of Board of Commissioners and Board of Directors Meetings;

3. Pelaksanaan Pelatihan Direksi dan Komisaris;
4. Pelaksanaan Administrasi dan Keuangan Kegiatan Operasional Komisaris dan Direksi;
5. Manajemen Kegiatan Direksi;
6. Pemenuhan Kelengkapan Komisaris dan Direksi;
7. Penyusunan SOP Administrasi Direksi Pasca Merger;
8. Penyusunan Peraturan Direksi Tahun 2022;
9. Pelaksanaan Pelindo Forum; dan
10. Program Perkenalan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022.

Departemen Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan

1. Perencanaan dan Pelaksanaan Program
   a. Pelaksanaan Program TJSL Sesuai Prioritas Bidang Pendidikan;
   b. Pelaksanaan Program TJSL Sesuai Prioritas Bidang Lingkungan;
   c. Pelaksanaan Program TJSL dengan Pendekatan CSV;
   d. Pelaksanaan Program TJSL Non-Bidang Prioritas;
   e. Penyusunan SOP TJSL Pasca Merger.
2. *Monitoring* dan Pelaporan Program
   a. Pelaksanaan Program TJSL Sesuai Prioritas Bidang Pengembangan UMK;
   b. Pelaksanaan *Monitoring* dan Penagihan Piutang Mitra Binaan;
   c. Pemutakhiran Aplikasi Sistem Informasi TJSL Pelindo;
   d. Penyusunan SOP TJSL Pasca Merger;
   e. Pembentukan Komite TJSL.

3. Implementation of Board of Directors and Commissioners Training;
4. Implementation of Administrative and Financial Operational Activities of Board of Commissioners and Board of Directors;
5. Activity Management of Board of Directors;
6. Fulfilment of Completeness of Board of Commissioners and Board of Directors;
7. Preparation of SOP for Post-Merger Board of Directors Administration;
8. Preparation of Board of Directors Regulation 2022;
9. Implementation of Pelindo Forum;
10. Introduction Program of Board of Commissioners and Board of Directors in 2022

Social Responsibility and Environment Department

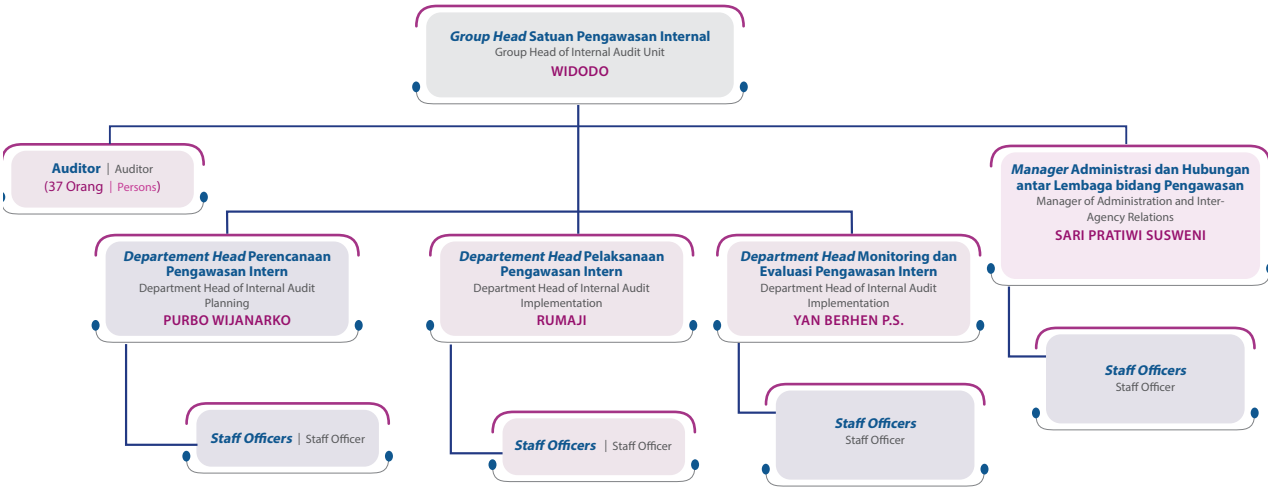
1. Program Planning and Implementation
   a. Implementation of CSR Programs in accordance with Education Priorities;
   b. Implementation of CSR Program in accordance with the priorities of Environmental Sector;
   c. Implementation of CSR Programs with a CSV Approach;
   d. Implementation of CSR Programs with Non-Priority Sectors;
   e. Preparation of Post-Merger SOP of CSR.
2. Program Monitoring and Reporting
   a. Implementation of CSR Programs in accordance with MSE Development Priorities;
   b. Implementation of Monitoring and Collection of Assisted Partner Receivables;
   c. Updating Pelindo CSR Information System Application;
   d. Preparation of Post-Merger SOP of CSR;
   e. Establishment of CSR Committee.

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Struktur Organisasi Pengawasan Intern

INTERNAL AUDIT UNIT

Internal Audit Organizational Structure



Kedudukan Satuan Pengawasan Intern Dalam Struktur Organisasi

Satuan Pengawasan Intern merupakan bagian dari manajemen yang independen dan dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern dan secara stuktur bertanggung jawab langsung pada Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Auditor Internal yang ditugaskan di Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern.

Internal Audit Unit Position In Organization

Internal Audit Unit is part of independent management and is led by the Head of Internal Audit l Unit and is structurally responsible directly to the President Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Internal Auditor assigned to Internal Audit Unit is directly responsible to the Head of Internal Audit Unit.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern

Head of Internal Audit Unit Profile



Widodo
Group Head Satuan Pengawasan Intern
Group Head of Internal Audit Unit

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Semarang, 28 September 1969/53 tahun per Desember 2022 Semarang, September 28, 1969/53 years old as December 2022
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1993); • Magister Manajemen dari Universitas Budi Luhur (2001); • Magister *Infrastructure Management* dari Institut Teknologi Bandung (2005); • *Master Shipping and Transportation* dari Netherlands Maritime University (2013). • Bachelor of Civil Engineering from Bandung Institute of Technology (1993); • Master of Management from Budi Luhur University (2001); • Master of Infrastructure Management from Bandung Institute of Technology (2005); • Master of Shipping and Transportation from Netherlands Maritime University (2013).
Sertifikasi Certification	*Qualified Internal Auditor*
Pelatihan di Tahun 2022	• Optimasi Terminal Petikemas, PMLI • *International Webinar - Port & Rotterdam, Port & City in Indonesia Relationship,* PMLI • Container Terminal Optimization • International Webinar - Port & Rotterdam, Port & City in Indonesia Relationship, PMLI
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur Sumber Daya Manusia PT Jakarta International Container Terminal (Juli 2020 – Oktober 2021); • EVP Satuan Pengawasan Internal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (September 2016 – Juli 2020); • Kepala Biro Pengadaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (April 2014 – Agustus 2016); • Senior Manager Perencanaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Oktober 2013 - Maret 2014); • Staf Madya Direktur SDM PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Agustus 2011 - September 2013); • Manager Teknik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Oktober 2019 – Agustus 2011). • Human Capital Director of PT Jakarta International Container Terminal (July 2020 – October 2021); • EVP of Internal Audit Unit of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (September 2016 – July 2020); • Head of Procurement Bureau of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (April 2014 – August 2016); • Senior Manager of Planning of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (October 2013 - March 2014); • Associate Staff Director of Human Capital of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (August 2011 - September 2013); • Technical Manager of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (October 2019 – August 2011).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Decree No. KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021.

Pengawasan Intern

Peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Pegawai Satuan Pengawasan Intern selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Internal Audit Unit Competency Development Program

Competency development that have been followed by Internal Audit Unit Employees during 2022 are as follows.

No.	Nama Name	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer
1	Abd. Rachman	*International Webinar – Port & Rotterdam City, Port & City in Indonesia Relationship*	Pelindo
		Personal Branding for Professional Purposes	Skill Academy
		Project Management	PPM Manajemen
		Selling in Difficult Times	Markplus
		Tips Berpikir Lebih Kreatif dan Penuh dengan Inovasi Tips for Thinking More Creatively and Full of Innovation	Qubisa
		International Webinar: Ecosystems Approach to Port Development	Pelindo
		High Performance Leadership	PPM Manajemen
		English First Unlimited Private Lessons and Group Classes	English First
2	Aldimas Kharunia Zaman	Data Analisis dengan Google Data Studio Data Analytics with Google Data Studio	Skill Academy
		Mengenal Operasi Crane (QCC/STS) Langsung dari Cabin Operator	Pelindo
		Udemi Business	Udemy
		Financial Statement Analysis	PPM Manajemen
		Belajar Analisa Saham untuk Investasi yang Menguntungkan Learn Stock Analysis for a Profitable Investment	Skill Academy
		Bahasa Mandarin Bisnis untuk Pemula Business Mandarin for Beginners	Skill Academy
3	Arendra Haryo Prabowo	*International Webinar – Port & Rotterdam City, Port & City in Indonesia Relationship*	Pelindo
		Container Terminal Optimization	Pelindo
4	Baihaqi	*Container Terminal Optimization*	Pelindo
		Dasar Microsoft Powerpoint untuk Pemula Basic Microsoft Powerpoint for Beginners	Skill Academy
		Happiness in Difficult Times	ILM
		Jago Editing Video di Android dengan Aplikasi Gratis Tanpa Watermark Good at Editing Videos on Android with Free Applications without Watermarks	Qubisa
		Membuat Brosur Digital dengan Canva Create a Digital Brochure with Canva	Skill Academy
		Microsoft Excel – Beginner to Intermediate Level	Multimatic
		My Port Mantap! Mari yuk Paham Operasional Terminal dan Makin Tau Pelabuhan My Port Mantap! Come on, let's Understand Terminal Operations and Know More About Ports	Pelindo
		Corporate's Resilience	PT Intipesan Pariwara
		Mahir Berbicara Arab Proficient in Speaking Arabic	Skill Academy
		Costumer Satisfaction Management	PPM Manajemen
		Container Terminal Operation for Non-Operation	Pelindo
		7 Laws of Happiness	ILM

No.	Nama Name	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer
5	Bara Wijianto	Belajar Reksadana – Untung Besar dengan Modal Kecil Learn Mutual Funds – Big Profits with Small Capital	Skill Academy
		Lebih Cepat (mempersiapkan) Pensiun Lebih Baik The Faster (preparing for) Retirement The Better	Prospero
		Webinar: Strategi *Workplace Fraud Investigation* Webinar: Workplace Fraud Investigation Strategy	Pelindo
		Certified Governance Risk and Compliance Professional (CGRCPA)	Dilatih.Co
		Belajar Analisa Saham untuk Investasi yang Menguntungkan Learn Stock Analysis for a Profitable Investment	Skill Academy
		Basic Finance Fot Non-Finance	Pelindo
6	Budi Herlambang	*ISO 45001 Health & Safety Practical Implementation*	PT ECI Bisnis Manajemen
		Mengenal Operasi Crane (QCC/STS) Langsung dari Cabin Operator Get to know Crane Operations (QCC/STS) Directly from the Cabin Operator	PMLI
		Webinar-Digital Forensic Bukti Elektronik untuk Mendukung Audit Investigatif Webinar-Digital Forensic Electronic Evidence to Support Investigative Audits	Arcaplus
		Webinar-Data Science for Audit	dilatih.com
		TKDN	SUCOFINDO - PMLI
		CGRCPA	dilatih.com
		Finance for Non-Finance	Arcaplus
		HR for Non HR Managers	LPPM - PMLI
		Dampak Korosi Corrosion Impact	HPJI DPD JABAR
7	Darul Ikhran Angkasa Batubara	*Digital Transformation in Maritime Public Sector*	Pelindo
		International Webinar: How to Develop a Modern Port	Pelindo
		Kelola Proyek dengan Microsoft Project Manage Projects with Microsoft Project	Skill Academy
		Membuat Visualisasi Data Menarik dengan Tableau Create Interesting Data Visualizations with Tableau	Skill Academy
		Tingkatkan Kemampuan Komunikasi untuk Menunjang Karir Improve Communication Skills to Support Career	Skill Academy
		Tingkatkan Produktivitas dengan Microsoft Excel Increase Productivity with Microsoft Excel	Skill Academy
		Udemy Business	Udemy
		Webinar: Strategi Workplace Fraud Investigation	Pelindo
		Making Digital Talent	Pelindo
		Wealth Management	Pelindo
		My Port Mantap! Mari yuk Paham Operasional Terminal dan Makin Tau Pelabuhan My Port Mantap! Come on, Let's Understand Terminal Operations and Know More about Ports	Pelindo
		English First Unlimited Private Lessons and Group Classes	English First
		Data Analisis dengan Google Data Studio Data Analytics with Google Data Studio	Skill Academy
		Analytical and Creative Thinking	Markplus

No.	Nama Name	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer
8	Deski Rizaldi	Data Management di Era Disrupsi Teknologi Data Management in the Era of Technology Disruption	Skill Academy
		Introduction to Database with MS, SQL Server	Multimatic
		Kelas *Digital Imaging: Photoshop Basic* Digital Imaging Class: Photoshop Basic	Qubisa
		Mahir Bebicara Arab Proficient in Speaking Arabic	Skill Academy
		Microsoft Excel – Beginner to Intermediate Level	Multimatic
		My Port Mantap! Mari yuk Paham Operasional Terminal dan Makin Tau Pelabuhan My Port Mantap! Let's Understand Terminal Operations and Getting to Know the Port	Pelindo
		Presentation Skill	Qubisa
		Softskill 4.0 Key 21st Century Skills: Problem Solving Full Package	Multimatic
		Strategi Meminimalkan dan Mencegah Terjadinya *Fraud* di Perusahaan Strategies for Minimizing and Preventing Fraud in Company	Qubisa
		Supply Chain Management	PPM Manajemen
		Warehouse Management	Ruang Logistik
		Membuat Visualisasi Data Menarik dengan Tableau Create Interesting Data Visualizations with Tableau	Skill Academy
		High Performance Leadership	PPM Manajemen
		Analytical and Creative Thinking	Markplus
		Administering Cyber Risk in a Digital Ages (Level 1)	Multimatic
9	Donny Simon Mayman Hutasoit	*International Webinar: Ecosystems Approach to Port Development*	Pelindo
		Webinar: Strategi *Workplace Fraud Investigation* Webinar: Workplace Fraud Investigation Strategy	Pelindo
		Thinking Skills For Innovation: Seni Melahirkan Ide Inovasi dari Rutinitas Sehari-hari Thinking Skills For Innovation: The Art of Generating Innovation Ideas from Daily Routine	Regional 3
		International Webinar – Port & Rotterdam City, Port & City in Indonesia Relationship	Pelindo
		Container Terminal Optimization	Pelindo
10	Ervina Lady Martha Simatupang	Praktis Kuasai Bahasa Belanda Dasar Practically Master Basic Dutch	Skill Academy
		Tingkatkan Produktivitas dengan Microsoft Excel Increase Productivity with Microsoft Excel	Skill Academy
		Webinar: Strategi *Workplace Fraud Investigation* Webinar: Workplace Fraud Investigation Strategy	Pelindo
		Stress Management: Kelola *Stress* Agar Tetap Produktif Stress Management: Manage Stress to Stay Productive	Skill Academy
		International Webinar – Port & Rotterdam City, Port & City in Indonesia Relationship	Pelindo
		Certified Governance Risk and Compliance Professional (CGRCPA)	Dilatih.Co

No.	Nama Name	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer
11	Fitri Herayati Nasution	*English First Unlimited Private Lessons and Group Classes*	English First
		Mahir Bebicara Arab Proficient in Speaking Arabic	Skill Academy
		Membuat Brosur Digital dengan Canva Create a Digital Brochure with Canva	Skill Academy
		My Port Mantap! Mari yuk Paham Operasional Terminal dan Makin Tau Pelabuhan My Port Mantap! Let's Understand Terminal Operations and Getting to Know the Port	Pelindo
		Rahasia Menguasai Ilmu *Public Speaking* dengan Teknik NLP The Secret to Mastering Public Speaking with NLP Techniques	Skill Academy
		Tingkatkan Produktivitas dengan Microsoft Excel Increase Productivity with Microsoft Excel	Skill Academy
		Policy Management in GRC Ecosystem	Pelindo
		Jurnalistik: Teknik Menulis Naskah berita Sperti Jurnalis Andal Journalism: Techniques for Writing News Manuscripts Like a Reliable Journalist	Skill Academy
		Certified Governance Risk and Compliance Professional (CGRCPA)	Dilatih.Co
		Belajar Dasar-dasar Bahasa Inggris (*Basic English*) Part 1 Learn the Basics of English (Basic English) Part 1	Qubisa
12	Henny Nur Aini	Learn 25 Foreign *Languages* Online With Rosetta Stone dor 3 Months	RGE
		Tips Hemat Kelola Pemasukan dengan Konsep Syariah Saving Tips for Managing Income with the Sharia Concept	Skill Academy
		Rahasia Menguasai Ilmu *Public Speaking* dengan Teknik NLP The Secret to Mastering Public Speaking with NLP Techniques	Skill Academy
		International Webinar – Port & Rotterdam City, Port & City in Indonesia Relationship	Pelindo
		Cara Belajar Bahasa Korea: Pola Kalimat How to Learn Korean: Sentence Patterns	Qubisa
13	Holly Tantyaka Yutha Keswara	Tingkatkan Kemampuan Komunikasi untuk Menunjang Karir Improve Communication Skills to Support Career	Skill Academy
		Belajar Bahasa Jepang untuk Pemula Learn Japanese for Beginners	Qubisa
		Memahami Aturan Ketenagakerjaan di Indonesia sesuai UU Cipta Kerja Understand Labor Regulations in Indonesia according to the Copyright Law Work	Ruang Seminar
		Pelatihan *Creative Accounting* Creative Accounting Training	Ruang Seminar
		International Webinar Forensic Accounting VS Investigative Auditing Fraud Detection	Ruang Seminar
		International Webinar – Port & Rotterdam City, Port & City in Indonesia Relationship	Pelindo
		Digital Forensic Dalam Investigative Auditing Digital Forensic in Investigative Auditing	Ruang Seminar
		Job Analysis, Job Description, Job Specification and Job Evaluation	Ruang Seminar
		Report Writing	PPM Manajemen

No.	Nama Name	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer
		The Amazing You	ACT Consulting / ESQ Group
		ERM-Audit Integration	CRMS
		TKDN	SUCOFINDO
		ISO 45001 HEALTH & SAFETY Practical Implementation	ECI Bisnis Manajemen
		Digital Forensik-Bukti Elektronik untuk Mendukung Audit Investigatif Digital Forensics-Electronic evidence to support audits investigative	Arcaplus
		Webinar Financial For Non-Finance	Arcaplus
		Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas karyawan Pelindo dalam menghadapi transformasi digital Improving the competency and capability of Pelindo employees in dealing with digital transformation	Pelindo
		International Webinar Ecosystem Approach to Port Development	Pelindo
		Incoterm in Door to Door Logistics	Pelindo
14	Ibnu Sukarma	*Report Writing*	PPM Manajemen
		HR For HR Managers	PPM Manajemen
		Container Terminal Optimization	Pelindo
15	Jufrianto Siahaan	*International Webinar – Port & Rotterdam City, Port & City in Indonesia Relationship*	Pelindo
		Thinking Skills For Innovation: Seni Melahirkan Ide Inovasi dari Rutinitas Sehari-hari Thinking Skills For Innovation: The Art of Generating Innovation Ideas from Daily Routine	Regional 3
		Webinar: Strategi *Workplace Fraud Investigation* Webinar: Workplace Fraud Investigation Strategy	Pelindo
		International Webinar: Ecosystems Approach to Port Development	Pelindo
		Container Terminal Optimization	Pelindo
		Certified Governance Risk and Compliance Professional (CGRCPA)	Dilatih.Co
16	Jusak Hadi Winarto	*International Webinar – Port & Rotterdam City, Port & City in Indonesia Relationship*	Pelindo
		Kelola Proyek dengan Microsoft Project Manage Projects with Microsoft Project	Skill Academy
		Kuasai TOEFL PBT Raih Score 600+ Master the PBT TOEFL Score 600+	Skill Academy
		Memilih Badan Usaha yang tepat untuk Mendirikan *Startup* Choosing the right Business Entity to Establish a Startup	Skill Academy
		Professional Project Management Certification	IEEL Institute
		Softskills 4.0 Full Package	Multimatic
		Mudah Pahami *Grammar* TOEFL Easy to Understand Grammar TOEFL	Skill Academy
		International Webinar: Ecosystems Approach to Port Development	Pelindo
		IELTS Lesson for Getting Higher Score	Skill Academy
		Bahasa Inggris untuk Menengah English for Intermediate	Qubisa

No.	Nama Name	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer
17	Khrismayanti Dewi	*Audit- Financial Statement*	Udemy
		TKDN	SUCOFINDO
		Certified Internal Auditor (CIA) Part1-Full Study Course	Udemy
		Become an External Auditor – External Audit Process Level1	Udemy
		PPL 2020-06- Penerapan Audit Berbasis Risiko PPL 2020-06- Application of Risk Based Audit	Udemy
18	Kresnajaya Prasetia Pancakarsa	*Growth Mindset*	Qubisa
		Jago Presentasi dalam 90 Menit Great Presentation in 90 Minutes	Skill Academy
		Lean Industry/Enterprise to be a Business Winner	ACT/ESQ Consulting
		Membuat Visualisasi Data Menarik dengan Tableau Create Interesting Data Visualizations with Tableau	Skill Academy
		Mobile Programming Android & Kotlin	Skill Academy
		MYDIGILEARN	Telkom
		Pelajari Dasar Keahlian Berpikir Kritis Learn Basic Critical Thinking Skills	Skill Academy
		Reksa Dana *Advance*: Kuasai Strategi Reksa Dana Agar Untung Maksimal Advance Mutual Funds: Master Mutual Fund Strategies to Profit Maximum	Skill Academy
		Statistic Foundation fot Data Science	Skill Academy
		Strategic Decision Making	PPM Manajemen
		Sukses Beriklan di Google Ads Successful Advertising on Google Ads	Skill Academy
		Udemy Business (6000 Course) Akses 1 Tahun Udemy Business (6000 Course) 1 Year Access	Udemy
		Tingkatkan Kemampuan Komunikasi untuk Menunjang Karir Improve Communication Skills to Support Career	Skill Academy
		Memilih Badan Usaha yang Tepat untuk Mendirikan *Startp* Choosing the right Business Entity to Establish a Startup	Skill Academy
		International Webinar – Port & Rotterdam City, Port & City in Indonesia Relationship	Pelindo
		Data Management di Era Disrupsi Teknologi Data Management in the Era of Technology Disruption	Skill Academy
		2 Jam Pahami Digital Marketing Untuk Memulai Bisnis Anda 2 Hours Understand Digital Marketing To Start Your Business	Skill Academy
19	Kurniawan Haryo Yudanto	Kuasai TOEFL PBT Raih Score 600+ Master the PBT TOEFL Score 600+	Skill Academy
		Mengenal Operasi Crane (QCC/STS) Langsung dari Cabin Operator Get to know Crane Operations (QCC/STS) Directly from the Cabin Operator	Pelindo
		Microsoft Excel – Beginner To Intermediate Level	Multimatic
		Project Procurement and Risk Management	PPM Manajemen
		Tingkatkan Produktivitas dengan Microsoft Excel Increase Productivity with Microsoft Excel	Skill Academy
		SAP 2000 for Structural Design & Analysis Workshop	Pelindo
		Laris Manis berjualan di *E-Commerce* Selling Sweet sells on E-Commerce	Skill Academy

No.	Nama Name	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer
		Kelola Proyek dengan Microsoft Project dalam 2 Jam Manage Projects with Microsoft Project in 2 Hours	Skill Academy
		Desain Interior 3D MAX Desain Interior 3D MAX	Flashcom Indonesia
20	Mohamad Rizki Kurniawan	*International Webinar – Port & Rotterdam City, Port & City in Indonesia Relationship*	Pelindo
		Webinar-Strategi Workplace Fraud Investigation	Pelindo
		ISO 45001 Health & Safety Practical Implementation	PT ECI Bisnis Manajemen
		Container Terminal Optimization	Pelindo
		Mengenal Operasi Crane (QCC/STS) Langsung dari Cabin Operator Get to know Crane Operations (QCC/STS) Directly from the Cabin Operator	Pelindo
		Webinar-Digital Forensic Bukti Elektronik untuk Mendukung Audit Investigatif Webinar-Digital Forensic Electronic Evidence to Support Investigative Audits	Arcaplus
		Webinar-Webinar Data Science for Audit	Dilatih.co
		Pelatihan Penghitungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) TKDN Calculation Training (Domestic Component Level)	Pelindo
		Certified Governance Risk and Compliance Professional	Dilatih.co
		Basic Green Port	Pelindo
		Certified IT Audit Professional (CITAP)	Dilatih.co
21	Muhammad Badrum	*Feasibility Study*	PPM Manajemen
		Negotiation Skill: Seni Mendapatkan yang Kamu Inginkan Negotiation Skill: The Art of Getting What You Want	Skill Academy
		Supply Chain Management	PPM Manajemen
		Tingkatkan Kemampuan Komunikasi untuk Menunjang Karir Improve Communication Skills to Support Career	Skill Academy
		Financial Statement Analysis	PPM Manajemen
		Cara Memecahkan Masalah *Ala Consultant* How to Solve Problems Ala Consultant	Skill Academy
		Belajar Analisa Saham Untuk Investasi yang Menguntungkan Learn Stock Analysis for a Profitable Investment	Skill Academy
22	Nurwan Bayu Setyawan	*International Webinar – Port & Rotterdam City, Port & City in Indonesia Relationship*	Pelindo
		Webinar-Strategi Workplace Fraud Investigation	Pelindo
23	Pandita Wisna Patria	*Negotiation Skill*: Seni Mendapatkan yang Kamu Inginkan Negotiation Skill: The Art of Getting What You Want	Skill Academy
		Tingkatkan Produktivitas dengan Microsoft Excel Increase Productivity with Microsoft Excel	Skill Academy
		Making Digital Talent	Pelindo
		Pelajari Dasar Keahlian Berpikir Kritis Increase Productivity with Microsoft Excel	Skill Academy
		International Webinar – Port & Rotterdam City, Port & City in Indonesia Relationship	Pelindo
		CFA Level 1 Preparation: Paket Lengkap *Financial Reporting and Analysis*	Skill Academy

No.	Nama Name	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer
24	Pramudito	Webinar: Strategi *Workplace Fraud Investigation* Webinar: Workplace Fraud Investigation Strategy	Pelindo
		Thinking Skills For Innovation: Seni Melahirkan Ide Inovasi dari Rutinitas Sehari-hari Thinking Skills For Innovation: The Art of Generating Innovation Ideas from Daily Routine	Regional 3
		Container Terminal Optimization	Pelindo
25	Ramdhana Feri Martin	*Incoterms in Door to Door Logistics*	Pelindo
		Introduction to Database With MS, SQL Server	Multimatic
		Mahir Berbicara Bahasa Arab Proficient in Speaking Arabic	Skill Academy
		Microsoft Excel – Beginner to Intermediate Level	Multimatic
		Softskills 4.0 Full Package	Multimatic
		Supply Chain Management	PPM Manajemen
		Teknik Dasar Fotografi untuk Hasilkan Foto *Like Pro* Basic Photography Techniques to Produce Pro-Like Photos	Qubisa
		Webinar Digitalisasi Arsip Batch II: Rencana Strategis Digitalisasi Arsip Batch II Archive Digitization Webinar: Archive Digitization Strategic Plan	Pelindo
		Wealth Management	Pelindo
		My Port Mantap! Mari yuk Paham Operasional Terminal dan Makin Tau Pelabuhan My Port Mantap! Let's Understand Terminal Operations and Getting to Know the Port	Pelindo
		International Webinar: How to Develop a Modern Port	Pelindo
		Belajar Analisis Data dengan Google Sheets Learn Data Analysis with Google Sheets	Qubisa
		Administering Cyber Risk In A Digital Ages (Level 1)	Multimatic
26	Rery Indra Kusuma	*Design Thinking for Business Innovation*	Prasetya Mulya
		Marketing Analytics for Experience Marketer	Markplus
		MYDIGILEARN	Telkom
		Udemy Business (6000 Course) Akses 1 Tahun Udemy Business (6000 Course) 1 Year Access	Udemy
		Learn Startup: Mulai Bisnis Tanpa Takut Gagal Learn Startup: Start a Business Without Fear of Failure	Skill Academy
		Certified Social Media Management Professional (CSMMP)	Dilatih.co
		Build & Test Minimum Viable Product	PPM Manajemen
27	Rosseno Ratman	Udemy Business (6000 Course) Akses 1 Tahun Udemy Business (6000 Course) 1 Year Access	Udemy
		Financial Statement Analysis	PPM Manajemen
28	Rustini	Meningkatkan Kompetensi dan Kapabilitas Karyawan Pelindo Improving the competency and capability of Pelindo employees in dealing with digital transformation	Qubisa
		International Webinar: Ecosystems Approach to Port Development	Pelindo

No.	Nama Name	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer
29	Samsul	Rahasia Menguasai Ilmu *Public Speaking* dengan Teknik MLP The Secret to Mastering Public Speaking with the MLP Technique	Skill Academy
		Thinking Skills for Innovation: Seni Melahirkan Ide Inovasi dari Rutinitas Sehari-hari Thinking Skills For Innovation: The Art of Generating Innovation Ideas from Daily Routine	Regional 3
		Persiapan Keuangan Hari Tua Old Age Financial Preparation	MSDM Academy
		International Webinar – Port & Rotterdam City, Port & City in Indonesia Relationship	Pelindo
30	Septa Andreas Sitepu	Udemy Business (6000 Course) Akses 1 Tahun Udemy Business (6000 Course) 1 Year Access	Udemy
31	Sigit Poernomo	*Incoterms in Door to Door Logistics*	Pelindo
		Risk Based Internal Audit	CRMS
		Thinking Skills for Innovation: Seni Melahirkan Ide Inovasi dari Rutinitas Sehari-hari Thinking Skills For Innovation: The Art of Generating Innovation Ideas from Daily Routine	Regional 3
		Udemy Business (6000 Course) Akses 1 Tahun Udemy Business (6000 Course) 1 Year Access	Udemy
		Webinar: Strategi *Workplace Fraud Investigation* Webinar: Workplace Fraud Investigation Strategy	Pelindo
		Mengenal Operasi Crane (QCC/STS) Langsung dari Cabin Operator Get to know Crane Operations (QCC/STS) Directly from the Cabin Operator	Pelindo
		ERM & Audit Integration	CRMS
		Certified Governance Risk and Compliance Professional (CGRCPA)	Dilatih.Co
32	Sugiarto	*International Webinar: Ecosystems Approach to Port Development*	Pelindo
		Mengenal Operasi Crane (QCC/STS) Langsung dari Cabin Operator Get to know Crane Operations (QCC/STS) Directly from the Cabin Operator	Pelindo
		Webinar: Strategi Workplace Fraud Investigation	Pelindo
		Learn 25 Foreign Languages Online With Rosetta Stone dor 3 Months	RGE
		Incoterms in Door to Door Logistics	Pelindo
		ERM & Audit Integration	CRMS
33	Suwondo Widjatmoko	*Global Supply Chain ManagementL Strategic and Practices in Product Distribution*	PPM Manajemen
		International Webinar: Ecosystems Approach to Port Development	Pelindo
		Incoterms in Door to Door Logistics	Pelindo
		Effective Leadership	PPM Manajemen
		Certified Governance Risk and Compliance Professional (CGRCPA)	Dilatih.Co

No.	Nama Name	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer
34	Tanjung Halomoan Ambarita	*Certified IT Audit Professional* (CITAP)	Dilatih.Co
		Diskusi Nasional Pelabuhan Tanjung Priok & Marunda National Discussion of Ports of Tanjung Priok & Marunda	Pelindo
		Engineering (Fixed) Asset Management	PPM Manajemen
		Kuasai TOEFL PBT Raih *Score* 600+ Master the PBT TOEFL Score 600+	Skill Academy
		MYDIGILEARN	Telkom
		Pengenalan Industri Pelabuhan Port Industry Introduction	Pelindo
		Port Management	Pelindo
		Project Procurement and Risk Management	PPM Manajemen
		Microsoft Excel – Beginner to Intermediate Level	Multimatic
		Dasar *Microsoft Powerpoint* untuk Pemula Basic Microsoft Powerpoint for Beginners	Skill Academy
		Certified Governance Risk and Compliance Professional (CGRCPA)	Dilatih.Co
		Cara Mendapatkan Penghasilan melalui Blog How to Earn Income through Blogs	Skill Academy
35	Wimbi Perdana Putra	*Become an External Auditor – External Auditor Process Level 1*	Udemy
		Management System Auditor Training	Udemy
36	Yan Berhen Pangondian Sitompul	*Certified Data Science Using Excel Associate*	Dilatih.Co
		Certified Governance Risk and Compliance Professional	Dilatih.Co
		Valuation on Merger and Acquisition	PPM Manajemen
		Financial Globalization , Capital Flows and The Global Financial Cycle	ADB Institute
		Financial Inclusion, Financial Literacy and Financial Education in Asia	ADB Institute
		OJK *Webinar* : "Strategi & Inovasi Dalam Memperkuat Branding Produk Keuangan Syariah" OJK Webinar: "Strategy & Innovation in Strengthening Branding Sharia Financial Products"	OJK Institute
		OJK Webinar : "Carbon Market - Guide to Global Offsetting Mechanism"	OJK Institute
		OJK *Webinar*: "*Digital Leadership* untuk Memperkuat Transformasi Digital" OJK Webinar: "Digital Leadership to Strengthen Transformation Digital	OJK Institute
		Indonesia International Conference for Sustainable Finance and Economy 2022	Dep. Keuangan & ICAEW
		Mastering Strategic Management	Acacia University, Arizona
		Workshop Tingkat Komponen DalamNegeri (TKDN) Domestic Component Level Workshop (TKDN	Sucofindo
		Indonesia Accountants Go Global: Creating Value Through Professionalism & Competencies	Ikatan Akuntan Indonesia
		IIA Code of Ethics	IIA Indonesia
		MyPort MANTAP! Mari Yuk Paham OpeRasional Terminal & MAkiN TAu Pelabuhan! MyPort MANTAP! Let's Understand Terminal Operations & Get to Know the Port	Pelindo
		Webinar : Strategi Workplace Fraud Investigation	Pelindo

No.	Nama Name	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer
		Kuasai Teknik Audio Mixing Master Audio Mixing Techniques	Pelindo
37	Yulias Caesar Sihombing	*Port Management*	Pelindo

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Kepala Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian auditor internal dilaksanakan dengan mempertimbangkan pendapat dari Kepala Satuan Pengawasan Intern dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perseroan.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT

Head of Internal Audit Unit is appointed and dismissed by President Director after obtaining approval from Board of Commissioners. President Director may dismiss the Head of Internal Audit Unit with Board of Commissioners' approval. The appointment and dismissal of internal auditor is carried out by taking into account the opinion of Head of Internal Audit Unit and fulfilling the requirements set by the Company.

INTERNAL AUDIT CHARTER

Dalam mewujudkan tugasnya secara professional, kompeten, independen dan objektif, unit Satuan Pengawasan Intern mengacu pada Audit *Charter* Satuan Pengawasan Intern berdasarkan Nomor PW.01/17/1/1/PMPL/UTMA/PLND-22 tanggal 17 Januari 2022. Adapun isi Audit *Charter* Satuan Pengawasan Intern yaitu:

1. Pendahuluan;
2. Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai dan Strategi;
3. Ruang Lingkup;
4. Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Kewenangan, dan Akuntabilitas;
5. Kode Etik;
6. Pengorganisasian;
7. Program Asurans dan Peningkatan Kualitas SPI;
8. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
9. Pelaporan dan *Monitoring;*
10. Komunikasi SPI dengan Pihak Lain;
11. Hubungan Kerja dengan Pihak Lain;
12. Evaluasi Piagam Satuan Pengawasan Intern; dan
13. Penutup.

INTERNAL AUDIT CHARTER

In carrying out its duties in a professional, competent, independent and objective manner, Internal Audit Unit refers to the Internal Audit Charter Number PW.01/17/1/1/PMPL/UTMA/PLND-22 dated January 17, 2022. The content of Internal Audit Charter is:

1. Introduction;
2. Vision, Mission, Objectives, Values and Strategy;
3. Scope;
4. Functions, Duties, Responsibilities, Authority, and Accountability;
5. Code of Conduct;
6. Organization;
7. SPI Assurance and Quality Improvement Program;
8. Annual Supervisory Work Program (PKPT);
9. Reporting and Monitoring;
10. SPI Communication with Other Parties;
11. Working Relationship with Other Parties;
12. Internal Audit Charter Evaluation; and
13. Closing.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INTERNAL AUDIT

1. Mengelola kegiatan pengawasan sesuai kode etik melalui jasa *assurance, probity* dan *consulting,* serta audit khusus dan audit objek tertentu lainnya atas perintah Direktur Utama di seluruh unit kerja di Perseroan, anak perusahaan dan afiliasinya.
2. Menguji, mengevaluasi, menilai dan melaporkan pelaksanaan pengawasan dan sistem manajemen risiko dan tata kelola perusahaan sesuai dengan standar audit.
3. Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan pengawasan intern berbasis risiko *(Risiko Based Audit*) dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris *cq* Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran.
4. Memberikan rekomendasi dan saran yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua unit kerja di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), serta melaporkan hasil pengawasan intern kepada *stakeholder* Satuan Pengawasan Intern.

INTERNAL AUDIT DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Manage supervisory activities according to the code of conduct through assurance, probity and consulting services, as well as special audit and audit of certain other objects on orders from President Director in all work units in the Company, its subsidiaries and affiliates.
2. Test, evaluate, assess and report the implementation of supervision and risk management system and corporate governance in accordance with auditing standards.
3. Develop and implement an annual risk-based internal control work program (Risk Based Audit) and submit it to President Director and Board of Commissioners cq Audit Committee for consideration and advice.
4. Provide objective recommendations and suggestions on audited activities in all work units within PT Pelabuhan Indonesia (Persero), as well as report the results of internal audit to stakeholders of Internal Audit Unit.

5. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit oleh auditor internal maupun eksternal dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris *cq* Komite Audit.
6. Melakukan pendampingan kepada auditor eksternal dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan dan menjadi fasilitator bagi auditor eksternal dalam berinteraksi dengan unit-unit kerja di Perseroan.
7. Melakukan komunikasi, koordinasi dan pelaporan secara periodik atas kegiatan SPI kepada *stakeholder* Satuan Pengawasan Intern.
8. Mengembangkan teknologi yang terintegrasi untuk perencanaan, pelaksanaan, *monitoring,* dan pelaporan terhadap seluruh kegiatan di Satuan Pengawasan Intern.
9. Menjaga profesionalitas auditor dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang cukup serta sertifikasi yang diperlukan.
10. Melakukan *assessment* untuk mengevaluasi mutu dari Satuan Pengawasan Intern secara periodik.
11. Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) agar terciptanya sinergis atas kegiatan Satuan Pengawasan Inten.

KEWENANGAN INTERNAL AUDIT

1. Unit SPI memiliki akses tak terbatas ke seluruh auditee di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terhadap semua fungsi, catatan, dokumen, properti, personil, laporan hasil audit yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya dan bertanggung jawab atas kerahasiaan catatan dan informasi tersebut.
2. Kepala SPI akan memastikan bahwa aktivitas audit internal bebas dari kondisi yang mengancam kemampuan audit internal untuk melakukan pekerjaannya dalam keadaan yang tidak memihak. Jika independensi atau objektivitas audit internal terganggu secara *Fact or Appearance,* Kepala SPI akan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3. Jika sebelumnya Kepala SPI memiliki peran dan/atau tanggung jawab di luar audit internal, maka harus dibuat ketentuan untuk membatasi terjadinya penurunan independensi dan objektivitas.
4. Menyusun dan merubah kebijakan pengawasan internal, antara lain pedoman, prosedur dan ketentuan lainnya terkait pekerjaan pengawasan internal di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) agar tercipta pengawasan yang terintegrasi.
5. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi penugasan, menetapkan objek penugasan, menentukan ruang lingkup penugasan, serta menetapkan teknik penugasan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan.
6. Melakukan optimalisasi atas sumber daya yang digunakan dalam kegiatan pekerjaan/pemeriksaan antara lain berasal dari auditor di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan.
7. Mengusulkan penugasan tambahan terkait *Assurance, probity, consulting,* audit khusus atau audit lainnya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris *cq.* Komite Audit jika terdapat hal yang terindikasi akan mengganggu pencapaian tujuan Perseroan.

5. Monitor, evaluate and report the results of monitoring on the follow-up to recommendations of audit results by internal and external auditors, and the results are reported to President Director and a copy is submitted to Board of Commissioners cq Audit Committee.
6. Provide assistance to external auditors by providing the required information and become a facilitator for external auditors in interacting with work units in the Company.
7. Communicating, coordinating and reporting periodically about SPI's activities to stakeholders of Internal Audit Unit.
8. Develop integrated technology for planning, implementation, monitoring, and reporting of all activities in Internal Audit Unit.
9. Maintain the professionalism of the auditors by providing sufficient knowledge, skills and experience as well as the necessary certifications.
10. Conduct an assessment to evaluate the quality of Internal Audit Unit periodically.
11. Provide guidance and coordination with Internal Audit Unit within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in order to create synergies on the activities of Internal Audit Unit.

INTERNAL AUDIT AUTHORITIES

1. Internal Audit Unit has unlimited access to all auditees within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to all functions, records, documents, property, personnel, audit reports related to the implementation of their works and is responsible for the confidentiality of such records and information.
2. Head of Internal Audit will ensure that the internal audit activity is free from conditions that threaten the ability of internal audit to carry out its work in an impartial manner. If the independence or objectivity of the internal audit is impaired by Fact or Appearance, the Head of SPI will report to President Director and Board of Commissioners.
3. If previously the Head of Internal Audit had roles and/or responsibilities other than internal audit, provisions must be made to limit the decrease in independence and objectivity.
4. Develop and change internal control policies, including guidelines, procedures and other provisions related to internal control work within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in order to create integrated supervision.
5. Allocating resources, determining the frequency of assignments, determining the object of assignment, determining the scope of assignment, and determining the assignment techniques needed to achieve the assignment objectives.
6. Optimizing the resources used in work/audit activities, including from internal or external auditors.
7. Propose additional assignments related to assurance, probity, consulting, special audit or other audits to President Director and Board of Commissioners cq. Audit Committee if there are issues that are indicated will interfere with the achievement of Company goals.

8. Melakukan peningkatan kualitas melalui penggunaan dan penerapan teknologi terintegrasi terkait pekerjaan pengawasan internal yang akan digunakan oleh Satuan Pengawasan Intern di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
9. Menentukan pola pembinaan, *monitoring* dan koordinasi kepada Satuan Pengawasan Intern di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) agar terciptanya pengawasan internal yang akan terintegrasi.
10. Memiliki akses untuk berkomunikasi secara langsung dengan Direktur Utama dan Dewan Komisaris *cq* Komite Audit.
11. Melarang perangkapan tugas dan jabatan auditor dan pelaksana yang duduk dalam Unit Audit Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
12. Menolak terhadap penugasan di luar fungsi, tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern, yaitu:
    a. Pengambilan keputusan dan menjalankan fungsi operasional secara langsung atau tidak langsung.
    b. Memulai dan menyetujui transaksi yang tidak berkaitan dengan Satuan Pengawasan Intern.
    c. Memberikan perintah secara langsung kepada pekerja di luar personil Satuan Pengawasan Intern.
    d. Bertanggung jawab terhadap personil, departemen atau aktivitas yang menjadi objek pemeriksaan.
    e. Memberhentikan karyawan atau membubarkan departemen terkait dengan temuan audit.
    f. Menyusun dan menjalankan prosedur, sistem atau aktivitas operasional yang menjadi miliki objek perusahaan.
    g. Melakukan pelaksanaan audit yang sedang ditangani oleh aparat hukum negara Republik Indonesian (RI).

8. Improve quality through the use and application of integrated technology related to internal control work that will be used by Internal Audit Unit within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
9. Determine the pattern of guidance, monitoring and coordination to Internal Audit Unit within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in order to create an integrated internal control.
10. Have access to communicate directly with President Director and Board of Commissioners cq Audit Committee.
11. Prohibit the dual duties and positions of auditors and implementers who serve in Internal Audit Unit from carrying out Company operational activities within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
12. Refused to assignments other than the functions, duties and responsibilities of Internal Audit Unit, namely:
    a. Decision making and carrying out operational functions directly or indirectly.
    b. Initiate and approve transactions that are not related to Internal Audit Unit.
    c. Give orders directly to employees other than Internal Audit Unit personnel.
    d. Responsible for personnel, departments or activities that are the object of audit.
    e. Terminate employees or dissolve departments related to audit findings.
    f. Develop and carry out procedures, systems or operational activities that belong to the object of the Company.
    g. Carry out audit that is being handled by the state legal apparatus of the Republic of Indonesia (RI).

KOMPOSISI DAN SERTIFIKASI PROFESI PERSONEL SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Unit SPI saat ini terdiri dari 1 (satu) orang *Group Head*, 2 (dua) orang Departemen *Head*, 1 (satu) orang *Manager* dan 37 (tiga puluh tujuh) auditor serta 5 (lima) orang *officer*, dengan rincian sebagai berikut.

COMPOSITION AND PROFESSIONAL CERTIFICATION OF INTERNAL AUDIT UNIT PERSONNEL

The SPI Unit currently consists of 1 (one) Group Head, 2 (two) Department Heads, 1 (one) Manager and 37 (thirty seven) auditors and 5 (five) officers, with details as follows.

No.	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
1.	Widodo	*Group Head* Satuan Pengawasan Intern *Group Head of Internal Audit*	QIA
2.	Rumaji	Departemen *Head* Pelaksanaan Pengawasan Intern *Department Head of Internal Audit Implementation*	Auditor ISO QIA
3.	Purbo Wijanarko	Departemen *Head* Perencanaan Pengawasan Intern *Department Head of Internal Audit Planning*	QIA
4.	Sari Pratiwi Susweni	*Manager* Administrasi dan Hubungan Antar Lembaga *Manager of Administration and Inter-Agency Relations*	Dasar Audit *Audit Basics*

No.	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
5.	Sigit Poernomo	Auditor Utama *Main Auditor*	• *Certified Accountant* • Audit Operasional • Audit Kecurangan • *Certified Accountant* • *Operational Audits* • *Fraud Audits*
6.	Sugiarto	Auditor Utama *Main Auditor*	• Dasar Audit (PPAK) • Diklat Audit • Lanjutan Operasional • *Basic Audit (PPAK)* • *Audit Training* • *Advanced Operational*
7.	Kresnajaya Prasetia Pancakarsa	Auditor Utama *Main Auditor*	
8.	Yan Berhen Pangondian Sitompul	Auditor Madya *Associate Auditor*	QIA
9.	Suwondo Widjatmoko	Auditor Madya *Associate Auditor*	QIA
10.	Donny Simon Mayman Hutasoit	Auditor Utama *Main Auditor*	• PIA (AAI) • Auditor Internal 3 • Akuntansi dan Keuangan (PIA) • *PIA (AAI)* • *Internal Auditor 3* • *Accounting and Finance (PIA)*
11.	Yulias Caesar Sihombing	Auditor Madya *Associate Auditor*	• QIA • CIA • *CA* • CPA
12.	Pramudito	Auditor Utama *Main Auditor*	• PIA (PPAK) • Sertifikat AK3 Dasar (Depnaker) • *PIA (PPAK)* • *Basic AK3 Certificate (Ministry of Manpower)*
13.	Rery Indra Kusuma	Auditor Muda *Junior Auditor*	QIA
14.	Ibnu Sukarma	Auditor Muda *Junior Auditor*	QIA
15.	Tanjung Halomoan Ambarita	Auditor Pratama *Senior Auditor*	QIA
16.	Fitri Herayati Nasution	Auditor Pratama *Senior Auditor*	QIA
17.	Muhammad Badrum	Auditor Madya *Associate Auditor*	Dasar Audit (PPAK) *Audit Basics (PPAK)*
18.	Rustini	Auditor Madya *Associate Auditor*	DDA (PPAK)
19.	Budi Herlambang	Auditor Muda *Junior Auditor*	QIA CGRCPA
20.	Khrismayanti Dewi	Auditor Muda *Junior Auditor*	QIA
21.	Septa Andreas Sitepu	Auditor Muda *Junior Auditor*	QIA
22.	Holly Tantyaka Yutha Keswara	Auditor Muda *Junior Auditor*	• QIA • Ahli Pengadaan Nasional • *QIA* • *Procurement Expert National*

No.	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
23.	Mohamad Rizki Kurniawan	Auditor Muda *Junior Auditor*	QIA
24.	Baihaqi	Auditor Pratama *Senior Auditor*	QIA
25.	Darul Ikhran Angkasa Batubara	Auditor Pratama *Senior Auditor*	Tingkat Dasar *Basic Level*
26.	Ervina Lady Martha Simatupang	Auditor Pratama *Senior Auditor*	QIA
27.	Arendra Haryo Prabowo	Auditor Madya *Associate Auditor*	• Auditor Internal 3 • Akuntansi dan Keuangan (PIA) • *Internal Auditor 3* • *Accounting and Finance (PIA)*
28.	Rosseno Ratman	Auditor Pratama *Senior Auditor*	QIA
29.	Aldimas Kharunia Zaman	Auditor Pratama	QIA
30.	Deski Rizaldi	Auditor Pratama *Senior Auditor*	Lanjutan 1 *Advanced 1*
31.	Ramdhana Feri Martin	Auditor Pratama *Senior Auditor*	QIA
32.	Abd. Rachman	Auditor Madya *Associate Auditor*	• DDA • Audit operasional • *DDA* • *Operational audit*
33.	Pandita Wisna Patria	Auditor Muda *Junior Auditor*	Auditor Muda (LSPAI)
34.	Jufrianto Siahaan	Auditor Muda *Junior Auditor*	Auditor Internal (LSPAI) *Junior Auditor (LSPAI)*
35.	Kurniawan Haryo Yudanto	Auditor Muda *Junior Auditor*	QIA
36.	Nurwan Bayu Setyawan	Auditor Pratama *Senior Auditor*	Tingkat Dasar *Basic Level*
37.	Bara Wijianto	Auditor Pratama *Senior Auditor*	Tingkat Dasar *Basic Level*
38.	Samsul	Auditor Pratama *Senior Auditor*	QIA
39.	Henny Nur Aini	Auditor Pratama *Senior Auditor*	• Auditor Madya (LSPAI) • Sertifikat Supervisor (Dale Carnegie & Associates) • *Associate Auditor (LSPAI)* • *Supervisor Certificate (Dale Carnegie & Associates)*
40.	Jusak Hadi Winarto	Auditor Pratama *Senior Auditor*	CRMO
41.	Wimbi Perdana Putra	Auditor Pratama *Senior Auditor*	-
42.	Indri Andriani	*Senior Officer* Perencanaan *Senior Planning Officer*	Lanjutan II *Advanced II*
43.	Mohamad Jamil	*Senior Officer* Administrasi dan Hubungan Lembaga *Senior Administration and Institutional Relations Officer*	Lanjutan II *Advanced II*

No.	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
44.	Ranisa Trinanda Septira	*Senior Officer Monitoring* dan Evaluasi *Senior Monitoring and Evaluation Officer*	CMA
45.	Fransisca Dina K.	*Senior Officer Monitoring* dan Evaluasi *Senior Monitoring and Evaluation Officer*	Lanjutan II *Advanced II*
46.	Arief Budiman	*Senior Officer* Administrasi dan Hubungan Lembaga *Senior Administration and Institutional Relations Officer*	Dasar Audit (PPAK) *Audit Basics (PPAK)*

KODE ETIK AUDITOR

AUDITORS CODE OF ETHICS

Prinsip Dasar Basic Principles	Aturan Perilaku Behavioral Guidance
Integritas Integritas Auditor Internal membentuk keyakinan dengan membangun kepercayaan untuk membuat pendapat (*judgment)* yang handal. **Integrity** Integrity of Internal auditors build confidence by building trust to generate reliable opinion (judgment).	• Bekerja dengan jujur, tekun dan bertanggung jawab. • Mematuhi hukum dan mengungkapkan informasi sebagaimana yang diatur oleh hukum dan profesi. • Tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau kegiatan apapun yang mencemarkan profesi Auditor Internal atau Perusahaan. Menaruh hormat dan ikut berperan dalam pencapaian tujuan perusahaan yang etis dan tela sesuai dengan hukum (*legitimate*). • Work honestly, diligently and responsibly. • Comply with the law and disclose information as required by law and the profession. • Not involved in activities that violate the law or any activities that defame the profession of Internal Auditor or the Company. Respect and play a role in achieving the Company's goals that are ethical and in accordance with the law (legitimate).
Objektivitas Auditor Internal menunjukkan objektivitas yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diuji. Auditor Internal melakukan penilaian secara seimbang (*balance)* atas segala hal yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain, dalam membuat pendapat (*judgement*). **Objectivity** Internal auditors demonstrate high objectivity in obtaining, evaluating and communicating information about the audited activity or process. Internal Auditors perform a balanced assessment and are not influenced by personal interests or others, in making an opinion (judgment).	• Tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat mengurang atau dianggap mengurangi objektivitas Auditor Internal dalam melakukan penilaian, termasuk dalam aktivitas atau hubungan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. • Tidak menerima apapun yang dapat melemahkan atau dianggap melemahkan pertimbangan profesional. • Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yang apabila tidak diungkapkan dapat menyebabkan distorsi pelaporan atas aktivitas yang diperiksa. • Not involved in activities that may reduce or be deemed to reduce the objectivity of Internal Auditor in conducting an assessment, including in activities or relationships that may cause a conflict of interest. • Do not accept anything that could undermine or be deemed to impair professional judgment. • Disclosing all known material facts, which if not disclosed can cause distortion of reporting on the activities being examined.
Kerahasiaan Auditor Internal menghormati nilai dan kepentingan atas informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang berwenang kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut. **Confidentiality** Internal auditors respect the value and the importance of information received and do not disclose such information without proper authorization unless there is a legal or professional obligation to disclose the information.	• Bertindak hati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan tugas. • Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau mengganggu pencapaian sasaran perusahaan yang etis dan berlegitimasi. • Act with caution in using and safeguarding the information obtained during the execution of tasks. • Do not use information for personal gain or in any way that is against the law or interferes with the achievement of legitimate and ethical Company goals.

Prinsip Dasar Basic Principles	Aturan Perilaku Behavioral Guidance
Kompetensi Auditor internal menerapkan pengetahuan kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal. **Competence** Internal auditors apply the knowledge, skills and experience required in providing internal audit services.	• Hanya terlibat dalam pemeriksaan apabila memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam pemeriksaan tersebut. • Melaksanakan fungsi pengawasan intern sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan pengelolaan SPI. • Secara berkesinambungan meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pekerjaan; bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan dan standar profesional yang berlaku. • Only engage in audit if they have the knowledge, skills and experience required for the audit. • Carry out the internal control function at least in accordance with the requirements for IAU management. • Continuously improve skills as well as effectiveness and quality of work; act sincerely and in accordance with the method of carrying out the work and applicable professional standards.
Perilaku Profesional Auditor Internal mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang dapat mengurangi kepercayaan kepada profesi. **Professional Behavior** Internal Auditors comply with applicable regulations and avoid any behavior that can reduce confidence in the profession.	• Melaksanakan fungsi pengawasan intern sesuai dengan prosedur, ketentuan dan peraturan yang berlaku. • Menghindari perilaku apapun yang dapat mengurangi kepercayaan kepada profesi auditor. • Dilarang menerima setiap pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain yang terkait dengan pekerjaannya baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. • Harus mematuhi hukum dan menjunjung tinggi norma professional Auditor Internal. • Dilarang merangkap tugas dan jabatan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan, anak perusahaan maupun perusahaan terafiliasi bagi auditor dan pelaksana yang duduk dalam unit internal audit. • Carry out the internal control function in accordance with applicable procedures, provisions and regulations. • Avoid any behavior that can reduce confidence in the auditor profession. • Forbidden to accept any gifts in any form from other parties related to their work, both inside and outside the Company. • Must comply with the law and uphold the professional norms of Internal Auditor. • Prohibited to hold concurrent duties and positions in the implementation of the Company's operational activities, subsidiaries and affiliated companies for auditors and executives who serve in the internal audit unit.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN INTERNAL AUDIT TAHUN 2022

Pada penentuan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2022, *Group* Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah menentukan audit berdasarkan tematik. Tema-tema yang sudah ditentukan, antara lain: Pengadaan & *Inventory*, Investasi, Migrasi IT, Lahan, Mitra PBM, Pemanfaatan Aset, SOM & *Outsourcing*, Manajemen Proyek Strategis Nasional, Inisiative Pokja, GCG/GRC, *Inter Transaction Company* & Perpajakan, dan *Billing* & Nota Pranota pada unit Kantor Pusat, Regional, Cabang, *Subholding*, Anak Perusahaan, Cucu Perusahaan, Cicit Perusahaan, dan unit lainnya.

REALISASI PELAKSANAAN AUDIT

Pada Triwulan I tahun 2022 terjadi perubahan strategi yang awalnya audit berdasarkan tematik menjadi audit berdasarkan unit. Sehingga sampai dengan Triwulan I tahun 2022 Group SPI telah melakukan penugasan audit meliputi 8 (delapan) penugasan audit rutin pada Kantor Regional 1 dan 7 (tujuh) Cabang Pelabuhan serta 1 (satu) audit performansi dan kepatuhan Anak Perusahaan.

Rincian realisasi pelaksanaan audit pada triwulan I tahun 2022 sebagai berikut:

BRIEF REPORT OF INTERNAL AUDIT ACTIVITIES IN 2022

In determining the Annual Audit Work Program (PKPT) for 2022, Internal Audit Group (SPI) of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has determined thematic audits. The themes that have been determined include: Procurement & Inventory, Investment, IT Migration, Land, PBM Partners, Asset Utilization, SOM & Outsourcing, National Strategic Project Management, Working Group Initiative, GCG/GRC, Company & Taxation inter transactions, and Billing & Memorandum at Head Office, Regional, Branch, Sub Holding, Subsidiaries, Grand Subsidiaries, Great Grand Subsidiaries, and other units.

AUDIT REALIZATION

In the first quarter of 2022, there were changes in strategy from thematic-based audits to unit-based audits. Accordingly, up to the first quarter of 2022, SPI Group has conducted audit assignments including 8 (eight) routine audit assignments at Regional Office 1 and 7 (seven) Port Branches and 1 (one) performance and compliance audit of Subsidiaries.

Details of audit Realization in the first quarter of 2022 are as follows:

Deskripsi Description	**Rencana Audit** Audit Plan	**Realisasi Audit** Audit Realization
Audit Rutin Cabang Pelabuhan & Kantor Pusat *Port Branch & Head Office Routine Audit*	• Kantor Pusat Regional 1*/Regional 1 Head Office* Pekanbaru • Belawan • Batam • Malahayati • Dumai • Kuala Tanjung • TPK Belawan	• Kantor Pusat Regional 1*/Regional 1 Head Office* Pekanbaru • Belawan • Batam • Malahayati • Dumai • Kuala Tanjung • TPK Belawan
Audit Performansi Anak Perusahaan *Subsidiary Performance Audit*	PT Prima Indonesia Logistik	PT Prima Indonesia Logistik PT Prima Multi Peralatan
Audit Khusus *Special Audit*		PT Pengerukan Indonesia

Pada Triwulan II tahun 2022 Unit Satuan Pengawasan Internal (SPI) telah melaksanakan penugasan audit rutin dengan menerapkan *joint* audit antara SPI *Holding* dan *Subholding*, serta memaksimalkan implementasi *Audit Management System* (AMS). Dalam kegiatan audit dimaksud meliputi penugasan audit rutin pada Kantor Regional 4, 15 (lima belas) Cabang Pelabuhan pada area Regional 4 serta 3 (tiga) audit performansi dan kepatuhan pada Anak Perusahaan.

In the second quarter of 2022, Internal Audit Unit (SPI) has carried out routine audit assignments by implementing joint audits between SPI Holding and Sub-holding, and maximising the implementation of Audit Management System (AMS). The audit activities include routine audit assignments at Regional Office 4.15 (fifteen) Port Branches in Regional 4 area and 3 (three) performance and compliance audits at Subsidiaries.

Rincian realisasi pelaksanaan audit pada triwulan II tahun 2022 sebagai berikut:

Details of audit realization in the second quarter of 2022 are as follows:

Deskripsi Description	**Rencana Audit** Audit Plan	**Realisasi Audit** Audit Realization
Audit Rutin Cabang Pelabuhan & Kantor Pusat Port Branch & Head Office Routine Audit	• Kantor Pusat Regional 4 • Cabang Pelabuhan Makassar • Cabang Pelabuhan Makassar New Port Cabang Pelabuhan Terminal Petikemas Makassar • Cabang Pelabuhan Bitung • Cabang Pelabuhan TPK Bitung • Cabang Pelabuhan Ambon • Cabang Pelabuhan TPK Ambon • Cabang Pelabuhan Pantoloan • Cabang Pelabuhan Balikpapan • Cabang Pelabuhan Tarakan • Cabang Pelabuhan Samarinda • Cabang Pelabuhan Jayapura • Cabang Pelabuhan Sorong • Cabang Pelabuhan Kendari • Cabang Pelabuhan TPK Kendari • Regional 4 Head Office • Makassar Port Branch • Makassar New Port Branch Makassar Container Terminal Port Branch • Bitung Port Branch • Bitung TPK Port Branch • Ambon Port Branch • Ambon TPK Port Branch • Pantoloan Port Branch • Balikpapan Port Branch • Tarakan Port Branch • Samarinda Port Branch • Jayapura Port Branch • Sorong Port Branch • Kendari Port Branch • TPK Kendari Port Branch	• Kantor Pusat Regional 4 • Cabang Pelabuhan Makassar • Cabang Pelabuhan Makassar New Port Cabang Pelabuhan Terminal Petikemas Makassar • Cabang Pelabuhan Bitung • Cabang Pelabuhan TPK Bitung • Cabang Pelabuhan Ambon • Cabang Pelabuhan TPK Ambon • Cabang Pelabuhan Pantoloan • Cabang Pelabuhan Balikpapan • Cabang Pelabuhan Tarakan • Cabang Pelabuhan Samarinda • Cabang Pelabuhan Jayapura • Cabang Pelabuhan Sorong • Cabang Pelabuhan Kendari • Cabang Pelabuhan TPK Kendari • Regional 4 Head Office • Makassar Port Branch • Makassar New Port Branch Makassar Container Terminal Port Branch • Bitung Port Branch • Bitung TPK Port Branch • Ambon Port Branch • Ambon TPK Port Branch • Pantoloan Port Branch • Balikpapan Port Branch • Tarakan Port Branch • Samarinda Port Branch • Jayapura Port Branch • Sorong Port Branch • Kendari Port Branch • TPK Kendari Port Branch
Audit Performansi Anak Perusahaan Subsidiary Performance Audit	• PT Equiport Inti Indonesia • PT Pelindo Jasa Maritim • PT Nusantara Terminal Services • PT Pelindo Marine Service (PT PMS) SBU Pelayanan Kapal	• PT Equiport Inti Indonesia • PT Pelindo Jasa Maritim • PT Nusantara Terminal Services • PT Pelindo Marine Service (PT PMS) SBU Pelayanan Kapal

Pada Triwulan III tahun 2022 Unit Satuan Pengawasan Intern (SPI) telah melaksanakan penugasan audit rutin (Performansi dan Kepatuhan) dengan menerapkan *joint* audit antara SPI *Holding* dan *Subholding*, yang dimulai pada tanggal 12 September sampai dengan 07 Oktober 2022. Dalam kegiatan audit dimaksud meliputi penugasan audit rutin pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3, *Subholding*, dan Anak Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

In the third quarter of 2022, Internal Audit Unit (SPI) has carried out routine audit assignments (Performance and Compliance) by implementing joint audits between SPI Holding and Sub-holding, which began on September 12 to October 7, 2022. The audit activities include routine audit assignments at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3, Subholding, and Subsidiaries with the following details:

Deskripsi Description	**Rencana Audit** Audit Plan	**Realisasi Audit** Audit Realization
Audit Rutin Cabang Pelabuhan & Kantor Pusat Port Branch & Head Office Routine Audit	• Kantor Pusat Regional 3 • Subregional Jawa • Subregional Kalimantan • Subregional Bali – Nusra • Regional 3 Head Office • Java Subregion • Kalimantan Subregion • Bali - Nusra Subregion	• Kantor Pusat Regional 3 • Subregional Jawa • Subregional Kalimantan • Subregional Bali – Nusra • Regional 3 Head Office • Java Subregion • Kalimantan Subregion • Bali - Nusra Subregion
Audit Performansi Anak Perusahaan Subsidiary Performance Audit	• PT Pelindo Terminal Petikemas • PT Pelindo Marine Service (PT PMS)	• PT Pelindo Terminal Petikemas • PT Pelindo Marine Service (PT PMS)

Pada Triwulan IV tahun 2022 Unit Satuan Pengawasan Intern (SPI) telah melaksanakan penugasan audit rutin (Performansi dan Kepatuhan) dengan menerapkan *joint* audit antara SPI *Holding* dan *Subholding*. Dalam kegiatan audit dimaksud meliputi penugasan audit rutin pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2, *Subholding*, dan Anak Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

In the fourth quarter of 2022, Internal Audit Unit (SPI) has carried out routine audit assignments (Performance and Compliance) by implementing joint audits between SPI Holding and Sub holding. The audit activities include routine audit assignments at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2, Subholding, and Subsidiaries with the following details:

Deskripsi Description	**Rencana Audit** Audit Plan	**Realisasi Audit** Audit Realization
Audit Rutin Cabang Pelabuhan & Kantor Pusat Port Branch & Head Office Routine Audit	• Kantor Pusat Regional 2 • Cabang Tanjung Priok • Cabang Banten • Cabang Palembang • Cabang Panjang • Cabang Pontianak • Cabang Teluk Bayur • Regional 2 Head Office • Tanjung Priok Branch • Banten Branch • Palembang Branch • Panjang Branch • Pontianak Branch • Teluk Bayur Branch	• Kantor Pusat Regional 2 • Cabang Tanjung Priok • Cabang Banten • Cabang Palembang • Cabang Panjang • Cabang Pontianak • Cabang Teluk Bayur • Regional 2 Head Office • Tanjung Priok Branch • Banten Branch • Palembang Branch • Panjang Branch • Pontianak Branch • Teluk Bayur Branch
Audit Performansi Anak Perusahaan Subsidiary Performance Audit	• PT Pelindo Solusi Logistik • PT Pelindo Multi Terminal • PT IPC Terminal Petikemas • PT Pelabuhan Tanjung Priok	• PT Pelindo Solusi Logistik • PT Pelindo Multi Terminal • PT IPC Terminal Petikemas • PT Pelabuhan Tanjung Priok

REALISASI PELAKSANAAN AUDIT TEMATIK

Selain melaksanakan kegiatan Audit Rutin (Performansi dan Kepatuhan) pada Kantor Pusat dan Cabang Pelabuhan, entitas Subholding, Anak perusahaan dan Audit Khusus, SPI juga melaksanakan Audit Tematik sebagai upaya meningkatkan peran SPI sebagai *strategic partner* bagi manajemen. Pada tahun 2022 SPI telah melaksanakan kegiatan Audit Tematik sebagai berikut:

1. Audit tematik atas Pedoman serta Petunjuk Teknis Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
2. Audit tematik terkait Pengelolaan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Pekerjaan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH).

THEMATIC AUDIT REALIZATION

In addition to carrying out Routine Audit activities (Performance and Compliance) at Head Office and Port Branches, Subholding entities, Subsidiaries and Special Audits, SPI also carries out Thematic Audits as an effort to increase the role of SPI as a strategic partner for management. In 2022, SPI has carried out Thematic Audit activities as follows:

1. Thematic audit of the Guidelines and Technical Guidelines for the Procurement of Goods and Services of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
2. Thematic audit related to the Management of State Capital Participation (PMN) in Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) Work.

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN KONSULTASI

Pada tahun 2022, selain melaksanakan fungsi *Assurance* melalui pelaksanaan Audit Rutin pada Kantor Pusat dan Cabang pelabuhan, Audit Performansi pada entitas *Subholding*, Anak perusahaan dan Audit Khusus, SPI juga melaksanakan fungsi konsultansi sebagai upaya meningkatkan peran SPI sebagai *strategic partner* bagi manajemen. SPI telah melaksanakan kegiatan konsultansi yaitu Kegiatan Konsultasi Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

CONSULTANCY ACTIVITIES REALIZATION

In 2022, apart from carrying out the Assurance function through Routine Audits at Head Office and Port Branches, Performance Audits at Sub-holding entities, Subsidiaries and Special Audits, SPI also carries out consultancy functions as an effort to increase the role of SPI as a strategic partner for management. SPI has carried out consultancy activities, namely Consultancy Activities for the Implementation of Domestic Component Level (TKDN) at PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

REALISASI PELAKSANAAN AUDIT KHUSUS

Selama tahun 2022, SPI juga melaksanakan Audit Khusus yaitu audit khusus terhadap penyelesaian proyek pengerukan pada PT Rukindo.

SPECIAL AUDIT REALIZATION

During 2022, SPI also carried out a Special Audit, namely a special audit on the dredging project completion at PT Rukindo.

REALISASI PELAKSANAAN AUDIT TUJUAN TERTENTU

Selama tahun 2022, SPI telah melaksanakan Audit Tujuan Tertentu perihal Permasalahan Implementasi MOS di Tanjung Priok.

RAPAT BERSAMA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU KOMITE AUDIT

1. Fungsi Audit Internal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
2. Komunikasi antara Kepala Satuan Pengawasan Internal dengan Direktur Utama dan Dewan Komisaris dapat dilakukan secara formal dan informal.
3. Satuan Pengawasan Intern menyampaikan Laporan Hasil Audit secara periodik kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
4. Secara berkala Satuan Pengawasan Intern dengan Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melakukan rapat koordinasi melalui rapat *Board of Director* (BOD) dan/atau Rapat Komisaris, serta menyampaikan hasil *survey* kepuasan *Auditee*.

Selama tahun 2022, SPI telah melaksanakan rapat koordinasi bersama Komite Audit dengan rincian sebagai berikut.

REALIZATION OF SPECIFIC PURPOSE AUDIT IMPLEMENTATION

During 2022, SPI has carried out a Specific Purpose Audit regarding MOS Implementation Issues in Tanjung Priok.

JOINT MEETINGS OF BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS AND/OR AUDIT COMMITTEE

1. Internal Audit function in carrying out its duties and responsibilities and authority can communicate and coordinate with President Director and Board of Commissioners.
2. Communication between Head of Internal Audit with President Director and Board of Commissioners can be done formally and informally.
3. Internal Audit Unit submits periodic Audit Reports to President Director and Board of Commissioners.
4. Periodically, Internal Audit Unit with President Director and/or Board of Commissioners conducts coordination meetings through Board of Director (BOD) meetings and/or Board of Commissioners Meetings, and submits the results of Auditee satisfaction surveys.

During 2022, SPI has conducted coordination meetings with Audit Committee, with the following details.

NO	TANGGAL SURAT LETTER DATE	SURAT LETTER NUMBER	AGENDA	TANGGAL KEGIATAN EVENT DATE	TEMPAT VENUE
1	2 Juni 2022 June 2, 2022	17/KA.DK/PI/VI-2022	Rapat Koordinasi Triwulan I Tahun 2022 Komite Dewan Komisaris dengan Divisi Satuan Pengawasan Intern, Divisi Manajemen Risiko, dan Divisi SDM PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Coordination Meeting for the First Quarter of 2022 Board of Commissioners Committee with Internal Audit Unit, Risk Management Division, and HC Division of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	09 s.d. 10 Juni 2022 June 9 to 10, 2022	Gumaya Tower Hotel Semarang
2	22 Agustus 2022 August 22, 2022	28/KA.DK/PI/VIII-2022	Rapat Koordinasi Triwulan II Tahun 2022 Komite Audit dengan Divisi Satuan Pengawasan Intern PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Coordination Meeting for the Second Quarter of 2022 Audit Committee with Internal Audit Unit of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	25 s.d. 26 Agustus 2022 August 25 to 26, 2022	Hotel Santika Bogor Santika Hotel Bogor
3	5 Desember 2022 December 5, 2022	40/KA.DK/PI/XII-2022	Rapat Koordinasi Triwulan III Tahun 2022 Komite Audit dengan Divisi Satuan Pengawasan Intern PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Coordination Meeting for the Third Quarter of 2022 Audit Committee with Internal Audit Unit of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	8 s.d. 9 Desember 2022 December 8 to 9, 2022	Yogyakarta Marriot Hotel
4	7 Februari 2022 February 7, 2022	06/KA.DK/PI/III-2023	Rapat Koordinasi Triwulan IV Tahun 2022 Komite Audit dan Satuan Pengawasan Intern PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Coordination Meeting for the Fourth Quarter of 2022 Audit Committee and Internal Audit Unit of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	9 s.d. 10 Februari 2023 February 9 to 10, 2023	Bandung

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Jumlah temuan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut.

AUDIT FINDINGS AND FOLLOW-UP

The number of findings and follow-up on audit recommendations until 2022 are as follows.

Jumlah Total	Tahun Year		
	2020	2021	2022
Regional 1			
Rekomendasi Recommendation	194	96	153
Tindak Lanjut Follow-up	158	33	33
Persentase Penyelesaian Completion Percentage	81%	34%	22%
Regional 2			
Rekomendasi Recommendation	241	400	-
Tindak Lanjut Follow-up	224	212	-
Persentase Penyelesaian Completion Percentage	93%	53%	-
Regional 3			
Rekomendasi Recommendation	149	94	-
Tindak Lanjut Follow-up	138	58	-
Persentase Penyelesaian Completion Percentage	92%	62%	-
Regional 4			
Rekomendasi Recommendation	63	35	-
Tindak Lanjut Follow-up	58	22	-
Persentase Penyelesaian Completion Percentage	92%	62%	-

***Monitoring* Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Ri**

Jumlah temuan dan tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan BPK sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Follow-Up Monitoring Of BPK Ri's Audit Report

The number of findings and follow-up on the recommendations of BPK Compliance Audit Report until 2022 are as follows.

Regional	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow-up	Persentase Penyelesaian Completion Percentage
Regional 1	177	160	90%
Regional 2	236	194	82%
Regional 3	169	132	78%
Regional 2	51	41	80%

GROUP MANAJEMEN RISIKO, TATA KELOLA DAN KEPATUHAN

Group Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Kepatuhan berfungsi untuk mengevaluasi, mengelola dan merekomendasikan penyusunan dan pengelolaan program kerja bidang manajemen risiko dan pengelolaan asuransi di lingkungan Perseroan untuk mendukung operasionalisasi dan pencapaian tujuan Perseroan untuk memastikan pencapaian visi dan misi Perseroan dan aspirasi pemegang saham.

RISK MANAGEMENT, GOVERNANCE AND COMPLIANCE GROUP

Risk Management Governance and Compliance Group functions to evaluate, manage and recommend the preparation and management of work programs in risk management and insurance management within the Company to support the operationalization and achievement of the Company's objectives to ensure the achievement of the Company's vision and mission and shareholders' aspirations.

STRUKTUR ORGANISASI *GROUP* MANAJEMEN RISIKO, TATA KELOLA DAN KEPATUHAN

RISK MANAGEMENT, GOVERNANCE AND COMPLIANCE GROUP ORGANIZATIONAL STRUCTURE



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB *GROUP* MANAJEMEN RISIKO, TATA KELOLA DAN KEPATUHAN

1. Menyusun/merumuskan dan mengusulkan rencana program kerja dan anggaran terkait bidang pengelolaan risiko operasional dan non-operasional di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
2. Mengambil keputusan terkait dengan implementasi rencana program kerja dan anggaran bidang pengelolaan risiko operasional dan non-operasional berdasarkan hasil putusan Direksi.
3. Melakukan pemeriksaan dan kajian terhadap:
   a. *Risk objective, risk appetite, risk tolerance* perusahaan, dan taksonomi risiko;
   b. Mekanisme penetapan *Key Risk Indicators* (KRI) di tingkat korporat serta penerapan *Early Warning System* (EWS);
   c. Profil risiko operasional (profil risiko korporat);

RISK MANAGEMENT, GOVERNANCE AND COMPLIANCE GROUP DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Prepare/formulate and propose a work program plan and budget related to operational and non-operational risk management within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
2. Make decisions related to the implementation of work program plans and budgets in operational and non-operational risk management based on the results of Board of Directors' decisions.
3. Conduct inspections and studies on:
   a. Risk objective, risk appetite, risk tolerance, and risk taxonomy;
   b. The mechanism for determining Key Risk Indicators (KRI) at corporate level and applying Early Warning System (EWS);
   c. Operational risk profile (corporate risk profile);

d. Profil risiko non-operasional (profil risiko investasi);
e. Pengembangan peralatan (*tools*) Manajemen Risiko yang terdiri dari metode dan aplikasi Manajemen Risiko;
f. Laporan Monitor Risiko;
g. Usulan pengelolaan pengetahuan Manajemen Risiko dalam rangka membangun lingkungan sadar risiko di Perusahaan antara lain melalui kampanye kepedulian Manajemen Risiko, portal pengetahuan Manajemen Risiko, program pemeliharaan dan kompetensi Manajemen Risiko, dan sosialisasi Kebijakan dan Proses Manajemen Risiko.

4. Merekomendasikan usulan terkait:
   a. Usulan strategi terkait dengan pengelolaan risiko operasional dan non-operasional;
   b. *Risk objective, risk appetite, risk tolerance* perusahaan, dan taksonomi risiko;
   c. Mekanisme penetapan *Key Risk Indicators* (KRI) di tingkat korporat serta penerapan *Early Warning System* (EWS);
   d. Pengembangan peralatan (*tools*) Manajemen Risiko yang terdiri dari metode dan aplikasi Manajemen Risiko;
   e. Tanggapan atas pertanyaan dari pihak eksternal mengenai risiko-risiko strategis Perusahaan sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku;
   f. Penyusunan RKAP berbasis Risiko;
   g. Pengelolaan Audit berbasis Risiko.
5. Mengoordinasikan pihak internal Perusahaan dalam rangka pelaksanaan proses manajemen risiko.
6. Melakukan monitor terhadap:
   a. Realisasi program kerja dan kesesuaian pengelolaan anggaran bidang pengelolaan risiko dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya;
   b. Implementasi strategi dan/atau peraturan perusahaan terkait bidang pengelolaan risiko;
   c. Tindak lanjut pengendalian risiko terhadap risiko yang signifikan secara periodik;
   d. Realisasi capaian KRI dan penerapan EWS.
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan bidang risiko, tata kelola dan kepatuhan di korporat.

d. Non-operational risk profile (investment risk profile);
e. Development of Risk Management tools consisting of Risk Management methods and applications;
f. Risk Monitoring Report;
g. Proposal for risk management knowledge management in order to build a risk-aware environment in the Company include, among others, Risk Management awareness campaign, Risk Management knowledge portal, Risk Management competency and maintenance programs, and dissemination of Risk Management Policies and Processes.

4. Recommend suggestions related to:
   a. Proposed strategies for operational and non-operational risk management;
   b. Risk objective, risk appetite, risk tolerance, and risk taxonomy;
   c. The mechanism for determining Key Risk Indicators (KRI) at the corporate level and applying Early Warning System (EWS);
   d. Development of Risk Management tools consisting of Risk Management methods and applications;
   e. Responses to questions from external parties regarding the Company's strategic risks in accordance with applicable Company regulations;
   f. Risk-based RKAP preparation;
   g. Risk-based Audit Management.
5. Coordinate the Company's internal parties in implementing the risk management process.
6. Monitor:
   a. Realization of work programs and compliance with budget management in risk management with previously determined budget;
   b. Implementation of Company strategies and/or regulations related to risk management;
   c. Periodic follow-up of risk control on significant risks;
   d. Realization of KRI achievements and implementation of EWS.
7. Coordinate the implementation of risk management, governance and compliance in the corporate sector.

PROFIL KEPALA *GROUP* MANAJEMEN RISIKO, TATA KELOLA DAN KEPATUHAN

HEAD OF RISK MANAGEMENT, GOVERNANCE AND COMPLIANCE GROUP PROFILE



Usman Saroni
Group Head Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Kepatuhan
Group Head of Risk Management , Governance and Compliance

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia

Domisili Domicile	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Bandung, 13 Februari 1978/44 tahun per Desember 2022 Bandung, February 13, 1978/44 years as of December 2022
Riwayat Pendidikan Educational Background	• *Port Management*, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Jakarta (1996) • *Shipping and Logistic*, World Maritime University, Swedia (2015) • Port Management, College of Shipping, Jakarta (1996) • Shipping and Logistics, World Maritime University, Sweden (2015)
Sertifikasi Certification	*Qualified Risk Management Professional*
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Manager Ship Planning* JICT (Jakarta International Container Terminal) (2009-2019) • *Manager Yard Planning* (Jakarta International Container Terminal) (2010-2011) • *Manager Control Tower* (Jakarta International Container Terminal) (2011-2012) • *Senior Manager* Petikemas IPC (2012-2014) • *Vice President Quality Management* IPC (2016-2019) • *Vice President* Pengelolaan Anak Perusahaan dan Cabang IPC (2019-2021) • Direktur Keuangan dan SDM PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2021-2022) • *Group Head Management* Risiko PT Pelabuhan Indonesia (2022 – saat ini) • Ship Planning Manager JICT (Jakarta International Container Terminal) (2009-2019) • Yard Planning Manager (Jakarta International Container Terminal) (2010-2011) • Control Tower Manager (Jakarta International Container Terminal) (2011-2012) • IPC Container Senior Manager (2012-2014) • IPC Vice President Quality Management (2016-2019) • IPC Vice President Subsidiary and Branch Management (2019-2021) • Director of Finance and HR of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2021-2022) • Group Head of Risk Management PT Pelabuhan Indonesia (2022-present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.03/1/3/1/RKTK/UTMA/PLND-23 tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.03/1/3/1/RKTK/UTMA/PLND-23 Concerning Transfer of Duties/Job in PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG MANAJEMEN RISIKO

1. *Distance Learning* Sertifikasi Nasional;
2. *Certified Risk Governance Professional* (Level IV);
3. Sertifikasi QRGP;
4. *Enhancing Risk Management to Miximize Your Performance;*
5. *Qualified Chief Risk Officer* (QCRO);
6. *Certified Risk Management Profesional* (CRMP/QRMP/ERMCP);
7. *Business Continuity Management*;
8. *Dual Certificate QRGP dan CERG*;
9. *Certified Qualified Risk Management Analyst (QRMA);*
10. *Certified GRC Professional (CGRCP);*
11. *Certified Governance Professional (CGP).*

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sertifikasi manajemen risiko yang telah dimiliki oleh pekerja Pelindo antara lain:

1. Sertifikasi Skema Ahli Tata Kelola Risiko Terintegrasi (ATKRT-BNSP)/(CRGP-GIRMA)
2. *Qualified Risk Management Professional* (QRMP)
3. *Certified Governance, Risk Management, Compliance Professional* (CGRCP)
4. *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)
5. *Qualified Risk Management Officer* (QRMO)
6. *Certified Governance Professional* (CGP)
7. Ahli Manajemen Risiko Terintegrasi (CRMP)
8. *Qualified Risk Management Analyst* (QRMA)

COMPETENCY DEVELOPMENT IN RISK MANAGEMENT

1. National Certification of Distance Learning;
2. Certified Risk Governance Professional (Level IV);
3. QRGP Certification;
4. Enhancing Risk Management To Miximize Your Performance;
5. Qualified Chief Risk Officer (QCRO);
6. Certified Professional Risk Management (CRMP/QRMP/ERMCP);
7. Business Continuity Management;
8. Dual Certificate QRGP and CERG;
9. Certified Qualified Risk Management Analyst (QRMA);
10. Certified GRC Professional (CGRCP);
11. Certified Governance Professional (CGP).

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

The risk management certifications owned by Pelindo employees include:

1. Integrated Risk Governance Expert Scheme Certification (ATKRT-BNSP)/(CRGP-GIRMA);
2. Qualified Risk Management Professional (QRMP);
3. Certified Governance, Risk Management, Compliance Professional (CGRCP);
4. Qualified Risk Governance Professional (QRGP);
5. Qualified Risk Management Officer (QRMO);
6. Certified Governance Professional (CGP);
7. Integrated Risk Management Expert (CRMP);
8. Qualified Risk Management Analyst (QRMA).

PELAKSANAAN TUGAS *GROUP* MANAJEMEN RISIKO, TATA KELOLA DAN KEPATUHAN TAHUN 2022

Selama tahun 2022, telah melaksanakan rencana kerja manajemen yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut.

RISK MANAGEMENT, GOVERNANCE AND COMPLIANCE GROUP DUTIES IMPLEMENTATION IN 2022

During 2022, has implemented the established management work plan, with details as follows.

Rencana Kerja Manajemen Management Work Plan	**Realisasi** Realization
Pengembangan Budaya Risiko Development of Risk Culture	1. Seminar Manajemen Risiko; 2. Pelaksanaan *Awards* Manajemen Risiko Internal Perusahaan; 3. Pelaksanaan Diskusi Manajemen Risiko (Disko) di Lingkungan Internal Perusahaan; 4. *Benchmark*. 1. Risk Management Seminar; 2. The Company's Internal Risk Management Awards; 3. Risk Management Discussion (Disko) in the Company's Internal Environment; 4. Benchmark.
Sosialisasi Peraturan Direksi tentang Pengelolaan Asuransi Dissemination of the Board of Directors Regulation on Insurance Management	Sosialisasi Peraturan Direksi tentang Pedoman dan Tata Cara Pengasuransian Aset, Tanggung Gugat, dan Gangguan Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Dissemination of Board of Directors Regulations on Guidelines and Procedures for Assets, Liability, and Business Interruption Insurance within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Risk Assessment sebagai Data Penunjang Re-asuransi di Pelabuhan Besar/*High Risk* dan Sosialisasi Hasil *Risk Assessment* Risk Assessment as Re-insurance Supporting Data in Major/ High Risk Ports and Dissemination of Risk Assessment Results	1. *Risk Assessment* dan Sosialisasi Report Regional 1; 2. *Risk Assessment* dan Sosialisasi Report Regional 2. 1. Regional 1 Risk Assessment and Socialization Report; 2. Regional 2 Risk Assessment and Socialization Report.
Penilaian Aset Pertanggungan atas Seluruh Aset Alat & Fasilitas yang Diasuransikan Valuation of Insured Assets of All Insured Equipment & Facilities Assets	Hasil *Appraisal* Appraisal Results
Pengadaan Asuransi Aset secara Terpusat Centralized Procurement of Asset Insurance	Polis Asuransi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Insurance Policy of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Pengembangan Aplikasi Manajemen Risiko Risk Management Application Development	*Go Live Readiness* Regional 1, 2, 3, 4
Peningkatan Fungsi Divisi Manajemen Risiko sebagai Risk Advisor Improving the Risk Management Division's Function as Risk Advisor	1. Profil Risiko Korporat Triwulan (TW4 2021, TW1 2022, TW2 2022, TW3 2022); 2. Revisi Profil Risiko Usulan RKAP 2022 dan Profil Risiko Usulan RKAP 2023. 1. Quarterly Corporate Risk Profile (Q4 of 2021, Q1 of 2022, Q2 of 2022, Q3 of 2022); 2. Revised Risk Profile Proposed 2022 RKAP and Risk Profile Proposed 2023 RKAP.
Peningkatan Kualitas Sistem Manajemen Risiko Quality Improvement of Risk Management System	Hasil *Review* Sistem Manajemen Risiko yang Meliputi Pedoman Strategis dan Pedoman Teknis Results of Review of Risk Management System Covering Strategic Guidelines and Technical Guidelines
Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko. Maturity Level Assessment of Risk Management Implementation.	Realisasi Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko Realization of Risk Management Implementation Maturity Level

*Adanya perubahan struktur organisasi terbaru perubahan Group Manajemen Risiko menjadi Group Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Kepatuhan. Sebelumnya Fungsi Tata Kelola di bawah Group Sekretariat Perusahaan dan Fungsi Manajemen Risiko di bawah Group Hukum.
*There was a recent change in the organizational structure of Risk Management Group to become Risk Management, Governance and Compliance Group. Previously the Governance Function was under Corporate Secretariat Group and the Risk Management Function under Legal Group.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

KOMITE PELINDO BERSIH

Dalam rangka pelaksanaan GCG di lingkungan Perseroan dan sejalan dengan program BUMN Bersih yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN, maka Perseroan menerapkan *whistleblowing system.* Dalam rangka efektivitas penerapan *whistleblowing system* Direksi membentuk Komite Pelindo Bersih dibentuk berdasarkan SK 01.01/31/12/1/HLTI/UTMA/PLND-21 tanggal 31 Desember 2021.

PEDOMAN KERJA KOMITE PELINDO BERSIH

Pedoman kerja Komite Pelindo Bersih mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 01.01/31/12/1/HLTI/UTMA/PLND-21 tanggal 31 Desember 2021 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pelindo Bersih Dalam Pelaksanaan *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PELINDO BERSIH

1. Membahas dan memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut atas laporan dugaan pelanggaran yang masuk dalam saluran *whistleblowing system* dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penerimaan pengaduan.
2. Rekomendasi yang diberikan berupa kesimpulan hasil pembahasan laporan *whistleblowing system* oleh komite (laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak dan membutuhkan investigasi lebih lanjut atau tidak) dan rekomendasi urgensi laporannya.
3. Menindaklanjuti dan melakukan investigasi semua laporan yang masuk (termasuk *out of scope*) untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan tipe pelanggarannya selama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima dibantu oleh PIC WBS dari regional, *subholding* dan anak perusahaan Pelindo.
4. Melakukan investigasi dan membuat kesimpulan, saran serta rekomendasi atas hasil pemeriksaan/permintaan yang dikoordinasikan oleh *Group Head* Satuan Pengawasan Intern dan meminta keterangan ahli apabila diperlukan.
5. Me-*monitoring* tindak lanjut/putusan atas laporan yang masuk jika terbukti terjadi pelanggaran, untuk tindak lanjut/ putusan kepada internal dikoordinasikan oleh *Group Head* Layanan SDM.
6. Melakukan rapat internal minimal 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan dan/atau setiap terdapat laporan dugaan pelanggaran melalui WBS.
7. Melakukan pengawasan terhadap independensi dan efektivitas pelaksanaan WBS Perseroan.
8. Melakukan *benchmarking* pada perusahaan lain untuk melihat perkembangan skema WBS.
9. Setiap anggota Komite wajib menandatangani pakta integritas agar selalu menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugasnya.
10. Membuat dan me*review* kebijakan dan sistem prosedur operasi (SOP) terkait WBS dibantu oleh pihak independen yang ditunjuk perusahaan.
11. Melakukan sosialisasi kepada insan Pelindo dan *stakeholder* terkait penggunaan saluran WBS.

COMMITTEES UNDER BOARD OF DIRECTORS

PELINDO BERSIH (CLEAN PELINDO) COMMITTEE

In order to implement GCG within the Company and in line with the BUMN Bersih (Clean SOEs) program launched by the Ministry of SOEs, the Company implemented a whistleblowing system. In order to effectively implement the whistleblowing system, Board of Directors established Pelindo Bersih Committee based on Decree 01.01/31/12/1/HLTI/UTMA/PLND-21 dated December 31, 2021.

PELINDO BERSIH COMMITTEE WORK GUIDELINES

The Pelindo Bersih Committee work guidelines refer to the Board of Directors Decree No. 01.01/31/12/1/HLTI/UTMA/PLND-21 dated December 31, 2021 concerning the Pelindo Bersih Committee Duties and Responsibilities for the Implementation of the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Whistleblowing System.

PELINDO BERSIH COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Discuss and provide recommendations for follow-up on reports of alleged violations that enter the whistleblowing system channel no later than 14 (fourteen) working days from the receipt of the complaint.
2. Recommendations given in the form of conclusions on the results of the discussion of the whistleblowing system report by the committee (the report can be followed up or not and requires further investigation or not) and recommendations on the urgency of the report.
3. Follow up and investigate all incoming reports (including out of scope) to be followed up according to the type of offense for 30 (thirty) working days after the report is received assisted by WBS PICs from regional, sub holding and Pelindo subsidiaries.
4. Conduct investigations and make conclusions, suggestions and recommendations on the results of examinations/requests coordinated by the Group Head of Internal Audit Unit and request expert testimony if necessary.
5. Monitoring the follow-up/decision on the incoming report if a violation is proven, for internal follow-up/decision coordinated by the Group Head of HC Services.
6. Conduct internal meetings at least 1 (one) time in every 3 (three) months and/or every time there is a report of alleged violation through WBS.
7. Supervise the independence and effectiveness of the Company's WBS implementation.
8. Conduct benchmarking with other companies to see the development of the WBS scheme.
9. Each Committee member is required to sign an integrity pact to always maintain confidentiality in carrying out their duties.
10. Create and review policies and system operating procedures (SOP) related to WBS assisted by an independent party appointed by the Company.
11. Conduct socialization to Pelindo People and stakeholders regarding the use of WBS channel.

12. Membuat laporan secara berkala setiap semester kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama atas pelaksanaan WBS.
13. Perusahaan dapat menunjuk pihak eksternal/KAP, atau pihak eksternal lainnya untuk menangani pengelolaan WBS di Perseroan.

12. Make periodic reports every semester to President Director and President Commissioner on the implementation of WBS.
13. The Company may appoint external parties/KAP, or other external parties to handle WBS management in the Company.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE PELINDO BERSIH

PELINDO BERSIH COMMITTEE MEMBERSHIP STRUCTURE

NO	Unit Kerja Work Unit	Jabatan Dalam Tim Position In The Team
1	*Group Head* Sekretariat Perusahaan Group Head of Corporate Secretariat	Ketua (Merangkap Anggota) Chairman (Concurrently Member)
2	*Group Head* Satuan Pengawasan Intern Group Head of Internal Audit Unit	Wakil Ketua (Merangkap Anggota) Vice Chairman (Concurrently Member)
3	Departemen *Head* Hubungan Lembaga, Tata Kelola dan Investor Department Head of Institutional, Governance and Investor Relations	Sekretaris (Merangkap Anggota) Secretary (Concurrently Member)
4	*Group Head* Hukum Group Head of Legal	Anggota Member
5	*Group Head* Manajemen Risiko Group Head of Risk Management	Anggota Member
6	*Group Head* Layanan SDM Group Head of HC Services	Anggota Member
7	*Group Head* Pelayanan Terminal Group Head of Terminal Services	Anggota Member

*Struktur keanggotaan Komite Pelindo Bersih berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 01.01/31/12/1/HLTI/UTMA/PLND-21 tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.
*The membership structure of Pelindo Bersih Committee is based on Board of Directors Decree Number 01.01/31/12/1/HLTI/UTMA/PLND-21 dated December 31, 2021 is as follows.

Ali Mulyono
Ketua merangkap Anggota/*Group Head* Sekretariat Perusahaan
Chairman, concurrently Member/Group Head of Corporate Secretariat

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Sekretariat Perusahaan dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile can be seen in the Corporate Secretariat Profile section in the Corporate Governance Chapter in this Annual Report.

Widodo
Wakil Ketua merangkap Anggota /*Group Head* Satuan Pengawasan Intern
Deputy Chairman, concurrently Member/Group Head of the Internal Audit Unit

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile can in the Profile section of the Head of the Internal Audit Unit in the Corporate Governance Chapter in this Annual Report.

David Rumeser
Sekretaris/Departemen Head Hubungan Lembaga, Tata Kelola dan Investor
Secretary/Department Head of Institutional, Governance and Investor Relations

Warga Negara Indonesia. Lahir di Palembang, 1 September 1986. Beliau lulusan Sarjana Teknik Industri ITB (2009), Magister Engineering Project Management The University of Manchester (2012) dan Doktor Management of Projects The University of Manchester (2018). Beliau Pernah menjabat sebagai Project Specialist Kantor Pusat IPC (2018-2019), Learning Manager - Blue Prism (perusahaan IT di Inggris) (2015-2018).
Indonesian citizens. Born in Palembang, September 1, 1986. Graduated with a Bachelor of Industrial Engineering from ITB (2009), a Masters in Engineering Project Management from the University of Manchester (2012) and a Doctorate in Management of Projects from the University of Manchester (2018). Previously served as Project Specialist at IPC Head Office (2018-2019), Learning Manager - Blue Prism (IT company in England) (2015-2018).

Usman Saroni
Anggota/*Group Head* Manajemen Risiko
Member/Group Head of Risk Management

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Kepala Group Manajemen Risiko dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile can be seen in the Risk Management Group Head Profile section in the Corporate Governance Chapter in this Annual Report.

Banu Astrini
Anggota/*Group Head* Layanan SDM
Member/Group Head of HC Services

Warga Negara Indonesia. Lahir di Yogyakarta, 17 Desember 1975. Beliau lulusan Sarjana Ilmu Komunikasi UGM (1988) dan Magister Business Administrasi University of Melbourne (2002). Diangkat menjadi Group Head Layanan SDM berdasarkan surat keputusan KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Rumah Sakit Pelabuhan (2020-2021), Direktur SDM PT Jakarta International Container Terminal (2019-2020), Direktur Pemasaran PT Rumah Sakit Pelabuhan (2018-2019).
Indonesian citizen. Born in Yogyakarta, December 17, 1975. Graduated with a Bachelor of Communication Science degree from UGM (1988), and a Masters in Business Administration from the University of Melbourne (2002). Appointed as HR Services Group Head based on decree KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21. Previously served as President Director of PT Rumah Sakit Pelabuhan (2020-2021), HR Director of PT Jakarta International Container Terminal (2019-2020), Marketing Director of PT Rumah Sakit Pelabuhan (2018-2019).

Arif Rusman Yulianto
Anggota/*Group Head* Pelayanan Terminal
Terminal Services Member/Group Head

Warga Negara Indonesia. Lahir di Sumenep, 04 Juli 1975. Beliau lulusan Sarjana Teknik Listrik Universitas Krisnadwipayana (2002) dan Magister Business Administrasi Kuhne Logistics University (2014). Diangkat menjadi Group Head Pelayanan Terminal berdasarkan surat keputusan KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21. Beliau Pernah menjabat sebagai SVP Pemasaran Kantor Pusat (2019-2021), Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis IPC Terminal Petikemas (2017-2019).

Indonesian citizen. Born in Sumenep, July 4, 1975. Graduated with a Bachelor of Electrical Engineering from Universitas Krisnadwipayana (2002), and a Masters in Business Administration at Kuhne Logistics University (2014). Appointed as Terminal Services Group Head based on decree KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21. Previously served as SVP Marketing Head Office (2019-2021), Director of Commercial & Business Development at IPC Terminal Petikemas (2017-2019)

Agus Hermawan
Anggota/*Group Head* Hukum
Member/Group Head of Legal

Warga Negara Indonesia. Lahir di Surabaya, 04 Oktober 1973. Beliau lulusan Sarjana dari Universitas Airlangga (1993). Menjabat sebagai Group Head Hukum sejak tahun 2021. Beliau Pernah menjabat sebagai SM Pengembangan Bisnis (2018-2021), Project Coordinator Pelayanan Kapal, Operasi Terminal (2017-2018) dan General Manager Operasi Terminal (2017).

Indonesian citizens. Born in Surabaya, October 4, 1973. Graduated with a Bachelor's Degree from Airlangga University (1993). Served as Group Head of Legal since 2021. Previously served as SM Business Development (2018-2021), Project Coordinator of Ship Services, Terminal Operations (2017-2018) and General Manager of Terminal Operations (2017).

INDEPENDENSI KOMITE PELINDO BERSIH

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

PELINDO BERSIH COMMITTEE INDEPENDENCE

All members of the Committee have no affiliation with other Directors, Commissioners or Controlling Shareholders, are not shareholders of a Company that can affect their ability to act independently, or are a Commissioner, Director or employee of a Company that has affiliations or conducts business with the Company.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PELINDO BERSIH

Komite melakukan rapat internal minimal 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan dan/atau setiap terdapat laporan dugaan pelanggaran melalui WBS. Adapun pelaksanaan rapat dan pelaksanaan tugas Komite Pelindo Bersih selama tahun 2022 yaitu:

PELINDO BERSIH COMMITTEE MEETINGS AND DUTIES

The Committee conducts internal meetings at least 1 (once) every 3 (three) months and/or whenever there is a report of alleged violations through the WBS. The implementation of the Clean Bersih Committee meetings and duties during 2022, included:

No.	TANGGAL RAPAT MEETING DATE	MATA AGENDA AGENDA ITEM
1	11 Januari 2022 January 11, 2022	Rapat pembahasan Pengelolaan *Whistleblowing* System TW 1 dan Laporan tahun 2021 Q1 Whistleblowing System Management Discussion Meeting and 2021 Report
2	5 April 2022 April 5, 2022	Rapat Pembahasan Pengelolaan *Whistleblowing System* TW II Q2 Whistleblowing System Management Discussion Meeting
3	6 April 2022 April 6, 2022	Pembahasan Integrasi *Whistleblowing System* Pelindo Bersih dan AROMA KPK RI Discussion of Integration of Pelindo Bersih Whistleblowing and AROMA KPK RI
4	6 Juni 2022 June 6, 2022	Rapat Pembahasan Pengelolaan *Whistleblowing System* dan Pembahasan Pengelolaan WBS Pelindo *Independent* Whistleblowing System Management Discussion Meeting and Pelindo Independent WBS Management Discussion Meeting
5	28 Juni 2022 June 28, 2022	Pembahasan Pengelolaan *Whistleblowing* Pelindo Bersih Discussion of Pelindo Bersih Whistleblowing Management
6	21 Juli 2022 July 21, 2022	Rapat Pembahasan Pengelolaan *Whistleblowing System* TW III Q3 Whistleblowing System Management Discussion Meeting
7	28 Juli 2022 July 28, 2022	Rapat Pembahasan Pelaporan WBS Pelindo Discussion Meeting on Pelindo WBS Reporting
8	28 Juli 2022 July 28, 2022	Pembahasan Integrasi *Whistleblowing System* Pelindo Bersih dan AROMA KPK RI Discussion of Integration of Whistleblowing System of Pelindo Bersih and AROMA KPK RI

KOMITE TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan transformasi bisnis yang memperhatikan aspek tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan terkait dengan pengelolaan investasi, kebijakan strategis operasional Perseroan dan pengendalian kegiatan strategis usaha grup Pelindo, maka Direksi membentuk Komite Tata Kelola, Manajemen risiko dan Kepatuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dibentuk berdasarkan Keputusan No PW.05.02/4/10/1/MRNO.UTMA/ PLND-21 tanggal 4 Oktober 2021.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

1. Melaksanakan tugasnya secara kolektif dalam membantu Direksi.
2. Memastikan kesesuaian dan kelengkapan dokumen tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan atas usulan program investasi Perseroan, kebijakan strategis operasional dan pengendalian kegiatan strategis usaha *Group* Perseroan.
3. Memberikan opini atas kelengkapan dan kesesuaian usulan program investasi perusahaan, kebijakan strategis operasional dan pengendalian kegiatan strategis usaha *Group* Perseroan terkait dengan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan.
4. Harus bersikap independen dan objektif serta professional dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
5. Melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian dari Direksi sebelum keputusan/kebijakan strategis akan ditetapkan oleh Perseroan.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE

In order to support the performance improvement and business transformation that takes into account the aspects of good corporate governance, risk management and compliance in the Company's decision-making process related to investment management, the Company's operational strategic policies and control of Pelindo group's strategic business activities, Board of Directors formed PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Governance, Risk Management and Compliance Committee based on Decree No. PW.05.02/4/10/1/MRNO.UTMA/PLND-21 dated October 4, 2021.

GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Perform its duties collectively in assisting Board of Directors.
2. Ensure the suitability and completeness of governance, risk management and compliance documents on the Company's proposed investment program, strategic operational policies and control of the Company's Group business strategic activities.
3. Provide an opinion on the completeness and suitability of the Company's proposed investment program, operational strategic policies and control of the Group's strategic business activities related to governance, risk management and compliance with laws and regulations.
4. Must be independent and objective as well as professional in carrying out its duties as well as in reports and is directly responsible to the Board of Directors.
5. Identify matters that require attention from Board of Directors before strategic decisions/policies will be established by the Company.

GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE MEMBERSHIP STRUCTURE

Jabatan Department	**POSISI** POSITION
Group Head Manajemen Risiko Group Head of Risk Management	Ketua Chairman
Group Head Hukum Group Head of Legal	Sekretaris Secretary
Group Head Perencanaan Strategis Department Head of Strategic Planning	Anggota Member
Group Head Pembinaan Anak Perusahaan Group Head of Subsidiary Development	Anggota Member
Group Head Anggaran dan Pelaporan Group Head of Budget & Reporting	Anggota Member
Group Head Pengelolaan Keuangan Group Head of Financial Management	Anggota Member
Group Head Sekretariat Perusahaan Group Head of Corporate Secretariat	Anggota Member

*Struktur keanggotaan Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan berdasarkan Keputusan No PW.05.02/4/10/1/MRNO.UTMA/ PLND-21 tanggal 4 Oktober 2021 adalah sebagai berikut.
*The membership structure of Governance, Risk Management and Compliance Committee based on Decree No PW.05.02/4/10/1/MRNO.UTMA/ PLND-21 dated October 4, 2021 is as follows.

PROFIL KOMITE TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE PROFILES

Usman Saroni
Ketua/*Group* Manajemen Risiko
Risk Management Head/Group

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Kepala Group Manajemen Risiko dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile can be seen in the Risk Management Group Head Profile section in the Corporate Governance Chapter in this Annual Report.

Agus Hermawan
Anggota/*Group Head* Hukum
Member/Legal Group Head

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Komite Pelindo Bersih dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile can be seen in the Pelindo Bersih Committee Profile section in the Corporate Governance Chapter in this Annual Report.

Bobby Hardian
Anggota/*Group Head* Perencanaan Strategis
Member/Strategic Planning Group Head

Warga Negara Indonesia. Lahir di Bukittinggi, 04 Oktober 1980. Beliau lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Andalas (2003) dan Magister Maritime Economics and Logistics/Maritime Economics & Logistics Erasmus Universiteit Rotterdam (2011). Diangkat menjadi Group Head Perencanaan Strategis berdasarkan surat keputusan KP.10.02/1/3/1/RKTK/UTMA/ PLND-22. Beliau Pernah menjabat sebagai SVP Perencanaan Strategis & Pengembangan Bisnis PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2022), SVP Perencanaan Strategis & Pengembangan Bisnis PT Pelindo Solusi Logistik (2021-2022).
Indonesian citizen. Born in Bukittinggi, October 4, 1980. Graduated with a Bachelor of Economics degree in Accounting from Universitas Andalas (2003), and a Masters degree in Maritime Economics and Logistics/Maritime Economics & Logistics from Erasmus Universiteit Rotterdam (2011). Appointed as Group Head of Strategic Planning based on decree KP.10.02/1/3/1/RKTK/UTMA/PLND-22. Previously served as SVP of Strategic Planning & Business Development at PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2022), SVP of Strategic Planning & Business Development at PT Pelindo Solusi Logistik (2021-2022).

Aris Subagyo
Anggota/*Group Head* Anggaran dan Pelaporan
Budget and Reporting Member/Group Head

Warga Negara Indonesia. Lahir di Kulon Progo, 15 Oktober 1973. Beliau lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Gadjah Mada (2002). Diangkat menjadi Group Head Anggaran dan Pelaporan berdasarkan surat keputusan KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21. Beliau Pernah menjabat sebagai SVP Perencanaan & Pengendalian Keuangan Kantor Pusat (2021), Junior Chief Specialist Direktur Keuangan Kantor Pusat (2021), Direktur Administrasi & Keuangan PT Rumah Sakit Pelabuhan (2020-2021).
Indonesian citizen. Born in Kulon Progo, October 15, 1973. Graduated with a Bachelor of Economics degree in Accounting from Universitas Gadjah Mada (2002). Appointed as Group Head of Budget and Reporting based on decree KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21. Previously served as SVP of Planning & Financial Control at the Head Office (2021), Junior Chief Specialist Director of Finance at the Head Office (2021), Director of Administration & Finance at PT Rumah Sakit Pelabuhan (2020-2021).

Yoni Setiawan
Anggota/*Group Head* Pengelolaan Keuangan
Member/Financial ManagementGroup Head

Warga Negara Indonesia. Lahir di Semarang, 18 Juni 1877. Beliau Pernah menjabat sebagai Group Head Layanan Keuangan & Perpajakan (2021), Senior Manager Keuangan Korporat, Tresuri & Perpajakan (2017-2021), ASM Manajemen Perpajakan & Aset (2015-2017).
Indonesian citizen. Born in Semarang, June 18, 1977. Previously served as Group Head of Financial & Taxation Services (2021), Senior Manager of Corporate Finance, Treasury & Taxation (2017-2021), ASM Tax & Asset Management (2015-2017).

Ali Mulyono
Anggota/*Group Head* Sekretariat Perusahaan
Member/Corporate Secretariat Group Head

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Sekretariat Perusahaan dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The profile can be seen in the Corporate Secretariat Profile section in the Corporate Governance Chapter in this Annual Report.

Fahrus Salam
Anggota/*Group Head* Pembinaan Anak Perusahaan
Member/Group Head of Subsidiary Development

Warga Negara Indonesia. Lahir di Pamekasan, 2 Februari 1983. Menjabat sebagai Group Head Pembinaan Anak Perusahaan sejak tahun 2021. Beliau Pernah menjabat sebagai Senior Manajer Pembinaan Anak Perusahaan (2018-2021), Senior VP Human Capital Service (2016-2018).
Indonesian citizens. Born in Pamekasan, 2 February 1983. Served as Group Head of Subsidiary Development since 2021. Previously served as Senior Manager of Subsidiary Development (2018-2021), Senior VP Human Capital Service (2016-2018).

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE IMPLEMENTATION OF DUTIES

No.	TANGGAL RAPAT MEETING DATE	MATA AGENDA AGENDA ITEM
1	22 Juni 2022 June 22, 2022	• Rapat Pembahasan Rencana Aksi Korporasi • Restrukturisasi PT Prima Multi Terminal (PT PMT) oleh Komite GRC • Corporate Action Plan Discussion Meeting • PT Prima Multi Terminal (PT PMT) Restructuring by the GRC Committee
2	25 Oktober 2022 October 25, 2022	Rapat Pembahasan Finalisasi usulan Investasi pada RKAP tahun 2023 Discussion Meeting on the Finalization of the 2023 RKAP Investment proposals

AKUNTAN PUBLIK

PUBLIC ACCOUNTANT

PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Pemilihan penyedia jasa KAP dilakukan dengan *E-Procurement*. Dimulai dengan mengundang Pelaku Usaha dengan status *activated* pada tanggal 15 Juli 2021. Sedangkan untuk penyampaian dokumen penawaran dibuka sejak tanggal 19 Juli 2021 hingga 21 Juli 2021. Hasil Laporan dan Usulan Penyedia selesai pada 21 Juli 2022 dan disampaikan melalui surat dari Direktur Penyelenggara kepada dewan komisaris dan direksi masing-masing BUMN Pelabuhan. Usulan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri BUMN tanggal 24 Juli 2020 untuk mendapat persetujuan. Persetujuan penunjukan KAP oleh Menteri BUMN dan penetapan penyedia dilakukan pada 30 Juli 2021. Proses penyediaan jasa oleh KAP tertunjuk selesai pada 31 Maret 2022.

APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTANT

The KAP service provider is selected using E-Procurement. Starting by inviting Business Players with activated status on July 15, 2021. As for the submission of bid documents was open from July 19, 2021 to July 21, 2021. The results of Provider Report and Proposal was completed on July 21, 2022 and submitted by letter from the Managing Director to Board of Commissioners and Board of Directors of each state-owned port. The proposal was then submitted to the Minister of SOEs on July 24, 2020 for approval. Approval for the appointment of KAP by the Minister of SOEs and the determination of provider was carried out on July 30, 2021. The process of providing services by the appointed KAP will be completed on March 31, 2022.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK, NAMA AKUNTAN DAN *FEE*

PUBLIC ACCOUNTING OFFICE, NAME OF ACCOUNTANT AND FEE

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan *Fee*
Public Accounting Firm, Accountant Name and Fee

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Periode KAP KAP Period	Nama Akuntan (*Partner* Penanggung Jawab) Accountant Name (Responsible Partner)	Periode AP AP Period	*Fee* Jasa Audit Audit Service Fee	Izin AP AP License
2022	Ernst Young	Periode Kesembilan Periode Kesembilan	Mochamad Dadang Syachruna	Periode Ketiga Third Period	Rp10.000.010.917	603/KM.1/2015
2021	Ernst Young	Periode Kedelapan Eighth Period	Purwantoro , Sungkoro & Surja (Moch Dadang Syachruna)	Periode Kedua Second Period	Rp4.438.792.110	603/KM.1/2015
2020	Ernst Young	Periode Ketujuh Seventh Period	Purwantoro , Sungkoro & Surja (Moch Dadang Syachruna)	Periode Pertama First Period	Rp3.802.636.200	603/KM.1/2015
2019	Ernst Young	Periode Keenam Sixth Period	Purwantoro , Sungkoro & Surja (Muhammad Kurniawan)	Periode Ketiga Third Period	Rp3.874.519.000	603/KM.1/2015

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Periode KAP KAP Period	Nama Akuntan (*Partner* Penanggung Jawab) Accountant Name (Responsible Partner)	Periode AP AP Period	*Fee* Jasa Audit Audit Service Fee	Izin AP AP License
2018	Ernst Young	Periode Kelima Fifth Period	Purwantoro , Sungkoro & Surja (Muhammad Kurniawan)	Periode Kedua Second Period	Rp3.583.700.000	603/KM.1/2015
2017	Ernst Young	Periode Keempat Fourth Period	Purwantoro , Sungkoro & Surja (Muhammad Kurniawan)	Periode Pertama First Period	Rp3.945.700.000	603/KM.1/2015

JASA LAIN YANG DIBERIKAN AKUNTAN

Selama tahun 2022, tidak terdapat jasa lain yang diberikan akuntan.

OTHER SERVICES PROVIDED BY ACCOUNTANT

During 2022, there was no other service provided by accountants.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal merupakan aspek yang sangat penting dalam penerapan GCG, karena dapat mendorong Perseroan menjadi lebih transparan, akuntabel, responsibel, mandiri, adil, dan terpercaya. Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan andal mampu memberikan keyakinan bagi para *stakeholder* bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dikelola dengan baik dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menjadi tanggung jawab dari Manajemen Perseroan.

Sistem Pengendalian Intern Perseroan merupakan suatu proses pengendalian yang dilaksanakan secara terus menerus oleh Direksi, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana, dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian visi, misi, sasaran, dan tujuan Perseroan.

TUJUAN PENGENDALIAN

1. Efisiensi dan Efektivitas Operasional
   Dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya Perseroan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan.
2. Keandalan Pelaporan
   Dimaksudkan untuk menjamin laporan yang akurat, wajar, tepat waktu, dan relevan, sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dan operasional lebih terjamin dengan adanya pengendalian intern yang efektif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa seluruh data yang diolah adalah transaksi yang sah dan telah mendapat otorisasi, serta seluruh transaksi telah dicatat pada tanggal terjadinya dengan nilai yang akurat.
3. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
   Dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua kegiatan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Internal Control System is a very important aspect in implementing of GCG, because it can encourage the Company to be more transparent, accountable, responsible, independent, fair, and reliable. An effective and reliable Internal Control System is able to provide confidence to stakeholders that all available resources can be managed properly in order to achieve the Company's goals. The implementation of a reliable and effective Internal Control System at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is the responsibility of the Company's Management.

The Company's Internal Control System is a control process implemented continuously by Board of Directors, Structural Officers, Functional Officers, and Executives, designed to provide adequate assurance of the achievement of the Company's vision, mission, goals, and objectives.

OBJECTIVES OF CONTROL

1. Operational Efficiency and Effectiveness
   Intended to increase effectiveness and efficiency in managing the Company's resources in order to achieve the Company's objectives.
2. Reporting Reliability
   Intended to guarantee accurate, fair, timely and relevant reports, as a basis for making appropriate and accountable decisions. The presentation and disclosure of information in financial and operational reports is more secure with effective internal control. This is intended to provide assurance that all processed data are valid and authorized transactions, and all transactions have been recorded on the date of occurrence with accurate values.
3. Compliance with Laws and Regulations
   Intended to ensure that all of the Company's activities are carried out in accordance with the applicable laws and regulations, both provisions issued by the government

ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak berwenang lainnya, maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur yang ditetapkan oleh Perseroan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERSEROAN

Kerangka konseptual pengendalian internal COSO sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur efektivitas pengendalian internal terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*);
4. Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*);
5. Pemantauan dan Evaluasi (*Monitoring*).

LINGKUNGAN PENGENDALIAN (*CONTROL ENVIRONMENT*)

Komponen Lingkungan Pengendalian di Perusahaan terdiri dari 5 (lima) prinsip, yaitu:

1. Menunjukkan Komitmen terhadap Integritas dan Nilai Etika.
   Perusahaan menunjukkan komitmen terhadap penegakan integritas dan nilai etika dengan:
   a. Menegakkan keteladanan melalui arahan, tindakan, dan perilaku, komitmen terhadap integritas dan nilai etika untuk mendukung efektivitas Sistem Pengendalian Intern oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
   b. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku (*code of conduct*) yang mendefinisikan integritas dan nilai etika.
   c. Mengevaluasi kepatuhan terhadap aturan perilaku.
   d. Mengidentifikasi pelanggaran terhadap aturan perilaku dan memperbaiki secara tepat waktu dan konsisten.
   e. Penetapan target dan sasaran yang realistis dapat dicapai dan tidak menuntut pegawai untuk mencapai sasaran yang tidak realistis.
   f. Memberikan penghargaan yang sepadan kepada pegawai atas prestasi kerjanya dalam rangka penegakkan integritas dan kepatuhan terhadap nilai etika.
   g. Menegakkan sanksi sesuai aturan yang berlaku atas pelanggaran terhadap integritas dan nilai etika.
2. Implementasi Tanggung Jawab Pengawasan
   Dewan Komisaris bersikap independen terhadap Direksi dan mengimplementasikan pengawasan terhadap pengembangan dan pelaksanaan dari pengendalian internal.
   a. Tanggung jawab pengawasan oleh Dewan Komisaris
      Dewan Komisaris mengidentifikasi dan menerima tanggung jawab pengawasan terhadap kecukupan dan efektivitas pengendalian internal.
   b. Memegang atau mendelegasikan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris memegang tanggung jawab pengawasan atau mendelegasikan tanggung jawab tersebut Direksi untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan.
   c. Mengimplementasikan keahlian yang relevan
      Dewan Komisaris mendefinisikan dan secara periodik menilai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh anggota-anggota Dewan Komisaris untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk bersikap kritis terhadap Direksi dan mengambil tindakan yang diperlukan.

or other authorities, as well as policies, provisions, and procedures established by the Company.

INTERNAL CONTROL SYSTEM OF THE COMPANY

The conceptual framework of COSO internal control as a comprehensive framework for measuring the effectiveness of internal control consists of 5 (five) components:

1. Control Environment;
2. Risk Assessment;
3. Control Activities;
4. Information and Communication;
5. Monitoring and Evaluation.

CONTROL ENVIRONMENT

The Control Environment Component in the Company consists of 5 (five) principles, namely:

1. Demonstrating Commitment to Integrity and Ethical Values.
   The Company demonstrates commitment to upholding integrity and ethical values by:
   a. Upholding role models through direction, actions, and behavior, commitment to integrity and ethical values to support the effectiveness of Internal Control Systems by Board of Commissioners and Board of Directors.
   b. Developing and implementing code of conduct that defines integrity and ethical values.
   c. Evaluating compliance with the code of conduct.
   d. Identify code of conduct violations and correct them in a timely and consistent manner.
   e. Setting realistic targets and goals that are achievable and not requiring employees to achieve unrealistic goals.
   f. Providing commensurate awards to employees for their work achievements in the context of upholding integrity and compliance with ethical values.
   g. Enforcing sanctions in accordance with applicable regulations for violations of integrity and ethical values.
2. Implementation of Supervisory Responsibilities
   Board of Commissioners acts independently toward Board of Directors and implements oversight of the development and implementation of internal control.
   a. Supervisory responsibilities by Board of Commissioners
      Board of Commissioners identifies and accepts supervisory responsibility for the adequacy and effectiveness of internal control.
   b. Holding or delegating supervisory responsibilities
      Board of Commissioners holds supervisory responsibilities or delegates these responsibilities to Board of Directors to support the achievement of the Company's objectives.
   c. Implement relevant skills
      Board of Commissioners defines and periodically assesses the knowledge and skills required by members of Board of Commissioners to improve their ability to be critical of Board of Directors and take necessary action.

d. Beraktivitas secara independen
Dewan Komisaris memiliki jumlah anggota yang cukup, bersikap independen, dan objektif.

3. Mencapai Tujuan Perusahaan
Direksi membentuk struktur organisasi, jalur pelaporan dan kewenangan, serta pertanggungjawaban yang memadai untuk mencapai tujuan Perusahaan, yaitu:
a. Direksi dan Dewan Komisaris berada di Lini Pertama yang mempertimbangkan berbagai struktur yang digunakan (seluruh struktur entitas) termasuk unit operasional, entitas legal, penyedia jasa (*outsourcing*) untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.
b. Manajemen mendesain dan mengevaluasi pola pelaporan untuk setiap struktur atau entitas agar mampu mengeksekusi kewenangan, tanggung jawab serta arus informasi dalam mengelola aktivitasnya.
c. Direksi dan Dewan Komisaris mendelegasikan kewenangan, mendefinisikan, dan mengalokasikan, serta memisahkan fungsi secara memadai pada berbagai tingkatan dalam organisasi.
d. Manajemen melaksanakan evaluasi, penyesuaian, dan perbaikan terhadap struktur organisasi dalam hal terjadi perubahan lingkungan yang strategis.
e. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai untuk formasi yang dibutuhkan Perseroan.

4. Komitmen terhadap Kompetensi
Perseroan menunjukkan komitmen terhadap kompetensi pegawai melalui tahapan proses untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang berkompeten, dengan cara:
a. Menyusun Kebijakan dan Praktik Standar Kompetensi yang menggambarkan harapan organisasi atas kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.
b. Mengalokasikan pemenuhan kebutuhan untuk pembinaan dan pelatihan yang diperlukan untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan kecukupan dan kompetensi pekerja dan penyedia jasa *outsourcing*.
c. Mengevaluasi kompetensi seluruh tingkat dan individu organisasi, termasuk penyedia jasa *outsourcing*, terkait dengan kebijakan dan praktik yang ditetapkan, dan bertindak memadai untuk mengatasi kekurangan.
d. Merencanakan dan menyiapkan suksesi pelimpahan tanggung jawab secara signifikan.

5. Pengendalian Intern
Perusahaan meminta pertanggungjawaban individual atas area Pengendalian Intern yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan yang meliputi:
a. Penegakan Akuntabilitas melalui Struktur, Kewenangan, dan Tanggung Jawab dengan cara membangun mekanisme untuk mengomunikasikan dan menuntut para pekerja agar akuntabel atas pelaksanaan tanggung jawab Pengendalian Intern organisasi dan mengimplementasikan tindakan koreksi jika diperlukan.
b. Pembangunan Pengukuran Kinerja, Insentif, dan Penghargaan dengan cara membangun ukuran kinerja, insentif, dan penghargaan yang layak bagi pertanggungjawaban pada setiap level entitas, yang menggambarkan dimensi dan kinerja dan standar perilaku, dan mempertimbangkan pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang;

d. Work independently
Board of Commissioners has a sufficient number of members, is independent and objective.

3. Achieving Company Objectives
Board of Directors establishes an adequate organizational structure, reporting lines and authority, and accountability to achieve the Company's objectives, namely:
a. Board of Directors and Board of Commissioners are in the First Line which considers the various structures used (all entity structures) including operational units, legal entities, service providers (outsourcing) to support the achievement of the Company's objectives.
b. Management designs and evaluates the reporting pattern for each structure or entity to be able to execute the authority, responsibility and information flow in managing its activities.
c. Board of Directors and Board of Commissioners delegate authority, define and allocate, and adequately separate functions at various levels in the organization.
d. Management conducts evaluations, adjustments, and improvements to the organizational structure in the event of strategic environmental changes.
e. Determining the appropriate number of employees for the formation required by the Company.

4. Commitment on Competencies
The Company demonstrates commitment to employee competencies through the stages of process to recruit, develop and retain competent individuals, by:

a. Developing Competency Standard Policies and Practices that describe the organization's expectations of the competencies needed to support the achievement of the Company's objectives.
b. Allocating the fulfillment of needs for coaching and training required to recruit, develop, and maintain adequate and competent workers and outsourcing service providers.
c. Evaluate the competence of all levels and individuals of the organization, including outsourced service providers, in relation to established policies and practices, and act accordingly to address deficiencies.
d. Plan and prepare for the succession of significant delegations of responsibility.

5. Internal Control
The Company holds individuals accountable for the areas of Internal Control for which they are responsible in order to achieve the objectives which include:
a. Enforcement of Accountability through Structure, Authority, and Responsibility by establishing mechanisms to communicate and hold workers accountable for carrying out the organization's Internal Control responsibilities and implementing corrective actions where necessary.
b. Building Performance Measures, Incentives, and Rewards by building appropriate performance measures, incentives, and rewards for accountability at each level of the entity, which describes the dimensions and performance and behavior standards, and considers the achievement of short-term and long-term goals;

c. Mengevaluasi Ukuran Kinerja, Insentif, dan Penghargaan dengan cara menyelaraskan insentif dan penghargaan dengan pemenuhan tanggung jawab Pengendalian Intern dalam pencapaian tujuan Perseroan.
d. Mempertimbangkan Tekanan Berlebihan dengan cara mengevaluasi dan menyesuaikan tekanan-tekanan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan ketika memberikan tanggung jawab mengembangkan ukuran kinerja, dan mengevaluasi kinerja.
e. Mengevaluasi Kinerja, dan Penghargaan atau Sanksi Disiplin Individu dengan cara mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab Pengendalian Intern, termasuk kepatuhan terhadap aturan dan tingkat kompetensi yang diharapkan dapat memberikan penghargaan atau sanksi disiplin.

PENILAIAN RISIKO (*RISK ASSESSMENT*)

Penilaian Risiko (*Risk Assessment*) merupakan basis untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola. Sebelum melakukan penilaian risiko, terlebih dahulu harus ditetapkan tujuan Perusahaan sampai pada tingkat kegiatan, yang dibagi menjadi tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Penetapan tujuan Perusahaan memuat pernyataan dan arahan spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu serta dikomunikasikan ke seluruh pegawai.

Komponen Penilaian Risiko terdiri dari 4 (empat) prinsip, yaitu:

1. Perusahaan menetapkan tujuan secara jelas untuk implementasi proses identifikasi dan penilaian risiko-risiko terkait dengan tujuan dengan atribut-atribut Pengendalian Intern sebagai berikut:
   a. Atribut Terkait Tujuan Operasional
      - Manajemen mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat diterima dalam pencapaian tujuan operasional.
      - Tujuan operasional menggambarkan pilihan manajemen terkait struktur, pertimbangan industri, dan kinerja Perseroan.
      - Perseroan menggambarkan tingkat kinerja operasional dan keuangan yang diharapkan dalam tujuan operasional.
      - Manajemen menggunakan tujuan operasional sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja operasional dan keuangan yang diharapkan.
   b. Untuk tujuan pelaporan, atribut dibedakan menjadi:
      - Tujuan Pelaporan Internal (Keuangan dan/atau Non-Keuangan)
        » Manajemen mempertimbangkan tingkat akurasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam tujuan pelaporan non-keuangan dan materialitas, serta dalam tujuan pelaporan keuangan.
        » Pelaporan internal menyediakan informasi yang akurat dan lengkap terkait pilihan manajemen dan informasi yang dibutuhkan dalam mengelola Perseroan.
        » Pelaporan eksternal menggambarkan transaksi dan kejadian yang mendasarinya dalam rentang batas yang dapat diterima.

c. Evaluating Performance Measures, Incentives, and Rewards by aligning incentives and rewards with the fulfillment of Internal Control responsibilities in achieving Company objectives.
d. Considering Excessive Pressure by evaluating and adjusting pressures related to achieving goals when assigning responsibility for developing performance measures, and evaluating performance.
e. Evaluating Performance, and Rewards or Disciplinary Sanctions for Individuals by evaluating the implementation of Internal Control responsibilities, including compliance with rules and the level of competence expected to provide rewards or disciplinary sanctions.

RISK ASSESSMENT

Risk assessment is the basis for determining how risks will be managed. Before conducting a risk assessment, the Company's objectives must first be set down to the activity level, which is divided into operational, reporting and compliance objectives. The Company's goal setting contains statements and directions that are specific, measurable, achievable, realistic and time-bound, and communicated to all employees.

The Risk Assessment component consists of 4 (four) principles, namely:

1. The Company sets clear goals for the implementation of the process of identifying and assessing risks related to objectives with the following Internal Control attributes:
   a. Attributes Related to Operational Goals
      - Management considers the level of risk that is acceptable in achieving operational goals.
      - Operational goals describe management's choices regarding the structure, industry considerations, and performance of the Company.
      - The Company describes the expected level of operational and financial performance in the operational objectives.
      - Management uses the operational objectives as a basis for allocating the resources needed to achieve operational and financial performance needed to achieve the expected operational and financial performance.
   b. For reporting purposes, attributes are divided into:
      - Internal Reporting Objectives (Financial and/or Non-Financial)
        » Management considers the level of accuracy appropriate to user needs in non-financial reporting objectives and materiality, as well as in financial reporting objectives.
        » Internal reporting provides accurate and complete information related to management choices and information needed to manage the Company.
        » External reporting describes the underlying transactions and events within acceptable limits.

- Tujuan Pelaporan Keuangan Eksternal
  - » Manajemen mempertimbangkan materialitas dalam penyajian laporan keuangan.
  - » Tujuan pelaporan keuangan konsisten dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan tersedia di Perseroan.
  - » Prinsip akuntansi dipilih sesuai dengan keadaan dan mematuhi Standar Akuntansi Keuangan.
  - » Pelaporan eksternal menggambarkan transaksi dan kejadian yang mendasarinya dalam rentang batas yang dapat diterima.
- Tujuan Pelaporan Non-Keuangan Eksternal
  - » Manajemen menggambarkan tingkat akurasi yang dipersyaratkan yang cocok dengan kebutuhan pengguna laporan dan didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh pihak ketiga atas pelaporan non-keuangan.
  - » Manajemen menetapkan tujuan secara konsisten dengan standar dan kerangka yang dibangun oleh organisasi eksternal yang diakui.
  - » Pelaporan eksternal menggambarkan transaksi dan kejadian yang mendasarinya dalam rentang batas yang dapat diterima.

c. Atribut terkait Tujuan Kepatuhan
- Manajemen mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat diterima terkait pencapaian tujuan kepatuhan.
- Hukum dan aturan merupakan standar minimal yang diintegrasikan ke dalam tujuan kepatuhan.

2. Perseroan mengidentifikasi risiko untuk mencapai tujuannya dan menganalisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko dapat dikelola. Proses identifikasi dan analisis risiko diatur lebih lanjut dalam Kerangka Manajemen Risiko Perusahaan. Beberapa aktivitas dalam menganalisis risiko adalah sebagai berikut:
   a. Perseroan melaksanakan mekanisme penilaian risiko yang efektif dan melibatkan berbagai tingkatan manajemen.
   b. Perseroan mengidentifikasi dan menilai risiko pada tingkat entitas, anak usaha, divisi, unit operasional, dan fungsional yang relevan dengan pencapaian tujuan Perseroan.
   c. Identifikasi risiko mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian tujuan Perseroan.
   d. Risiko yang teridentifikasi dianalisis melalui suatu proses, termasuk estimasi tingkat kemungkinan dan potensi signifikansi.
   e. Penilaian risiko termasuk mempertimbangkan bagaimana risiko-risiko signifikan seharusnya dikelola, dan apakah diterima, dihindari, dikurangi, atau dialihkan.
3. Organisasi mempertimbangkan potensi terjadi kecurangan (*fraud*) dan penyuapan dalam menilai risiko untuk pencapaian tujuan Perseroan.
   a. Penilaian risiko kecurangan (*fraud*) mempertimbangkan kemungkinan kehilangan aset, laporan manipulatif, dan korupsi yang diakibatkan oleh berbagai cara untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) dan tidak patut.
   b. Penilaian risiko mempertimbangkan faktor signifikan yang mempengaruhi kehilangan atas aset dan dampak signifikan terkait aktivitas operasional, pelaporan, dan kepatuhan.

- Objectives of External Financial Reporting
  - » Management considers materiality in the presentation of financial statements.
  - » The financial reporting objectives are consistent with the accounting principles applicable and available to the Company.
  - » Accounting principles are selected according to the circumstances and comply with Financial Accounting Standards.
  - » External reporting describes the underlying transactions and events within acceptable ranges.
- Objectives of External Non-Financial Reporting
  - » Management describes the required level of accuracy that matches the needs of report users and is based on criteria established by third parties for non-financial reporting.
  - » Management sets objectives consistent with standards and frameworks developed by recognized external organizations.
  - » External reporting describes the underlying transactions and events within acceptable ranges.

c. Attributes related to Compliance Objectives
- Management considers the acceptable level of risk associated with achieving compliance objectives.
- Laws and regulations are the minimum standards integrated into the compliance objectives.

2. The Company identifies risks to achieve its objectives and analyzes risks as a basis for determining how risks can be managed. The process of risk identification and analysis is further regulated in the Company's Risk Management Framework. Some activities in analyzing risks are as follows:
   a. The Company implements an effective risk assessment mechanism involving various levels of management.
   b. The Company identifies and assesses risks at the entity, subsidiary, division, operational unit, and functional levels that are relevant to the achievement of the Company's objectives.
   c. Risk identification considers internal and external factors and how they impact the achievement of the Company's objectives.
   d. Identified risks are analyzed through a process, including estimation of likelihood and potential significance.
   e. Risk assessment includes considering how significant risks should be managed, and whether they should be accepted, avoided, reduced or transferred.
3. The organization considers the potential for fraud and bribery in assessing risks to the achievement of the Company's objectives.
   a. Fraud risk assessment considers the possibility of loss of assets, manipulative reports, and corruption resulting from various ways to commit fraud and improper actions.
   b. The risk assessment considers significant factors affecting loss of assets and significant impacts on operational, reporting, and compliance activities.

c. Penilaian risiko kecurangan (*fraud*) mempertimbangkan insentif dan tekanan.
d. Penilaian risiko kecurangan (*fraud*) mempertimbangkan kesempatan untuk mengakuisisi, menggunakan, atau melepas aset secara tidak sah, mengubah catatan pelaporan entitas, atau melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) lainnya.
e. Penilaian risiko kecurangan (*fraud*) mempertimbangkan bagaimana manajemen dan pekerja lainnya dapat menjustifikasi tindakan tidak patut.
f. Penilaian risiko mempertimbangkan tindakan memberi/menerima suap kepada pihak eksternal/internal yang dapat mempengaruhi proses kerja dan pilihan keputusan pejabat pihak eksternal/internal sehingga mengeluarkan keputusan yang diinginkan dan memberi dampak kerugian bagi Perseroan.

4. Mengidentifikasi dan Menganalisis Perubahan Signifikan
   a. Proses identifikasi risiko mempertimbangkan perubahan faktor eksternal yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mencapai tujuannya.
   b. Perseroan mempertimbangkan dampak potensial dari bisnis baru, perubahan besar pada komposisi bisnis yang ada, mengakuisisi atau melepas operasi bisnis terhadap Sistem Pengendalian Internal, perubahan geografi luar negeri, teknologi baru, dan perubahan lingkungan fisik di mana bisnis beroperasi.
   c. Perseroan mempertimbangkan perubahan dalam manajemen, yaitu perilaku dan filosofi manajemen terhadap Sistem Pengendalian Internal.

KEGIATAN PENGENDALIAN (*CONTROL ACTIVITIES*) - PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*) dilaksanakan di semua tingkatan Perseroan, di berbagai tahapan proses bisnis, dan termasuk di lingkup pengembangan teknologi yang meliputi kebijakan prosedur yang membantu untuk menjamin arahan manajemen dapat dilaksanakan dengan benar.

Komponen kegiatan pengendalian terdiri dari 3 (tiga) prinsip, yaitu:

1. Menetapkan dan Mengembangkan Aktivitas Pengendalian
   Perusahaan menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian untuk memitigasi risiko signifikan terhadap pencapaian tujuan Perseroan ke level yang dapat diterima melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:
   a. Aktivitas pengendalian membantu dan menjamin respons risiko telah dilaksanakan dalam mengatasi dan memitigasi risiko signifikan. Setelah proses penilaian risiko, manajemen mengidentifikasi dan mengimplementasikan aktivitas yang diperlukan untuk merespons risiko tertentu.
   b. Manajemen menentukan proses bisnis yang relevan yang membutuhkan aktivitas pengendalian.
   c. Manajemen mempertimbangkan kompleksitas, sifat, dan operasional lingkungan, serta karakteristik spesifik dari Perseroan yang mempengaruhi pemilihan dan pengembangan aktivitas pengendalian.
   d. Aktivitas pengendalian termasuk rentang, variasi, dan bauran pengendalian untuk memitigasi risiko, dengan

c. The fraud risk assessment considers incentives and pressures.
d. The fraud risk assessment considers opportunities to unlawfully acquire, use, or dispose of assets, alter the entity's reporting records, or commit other acts of fraud.
e. The fraud risk assessment considers how management and other employees may justify improper actions.
f. Risk assessment considers the act of giving/receiving bribes to external/internal parties that can influence the work process and decision choices of external/internal party officials so as to issue the desired decision and have a loss impact on the Company.

4. Identifying and Analyzing Significant Changes
   a. The risk identification process considers changes in external factors that significantly affect the Company's ability to achieve its objectives.
   b. The Company considers the potential impact of new businesses, major changes to the composition of existing businesses, acquiring or disposing of business operations on the Internal Control System, changes in overseas geography, new technology, and changes in the physical environment in which the business operates.
   c. The Company considers changes in management, namely management behavior and philosophy on the Internal Control System.

CONTROL ACTIVITIES - FINANCIAL AND OPERATIONAL CONTROL

Control Activities are implemented at all levels of the Company, at various stages of the business process, and including in the scope of technology development which includes policy procedures that help to ensure management directives can be implemented correctly.

The components of control activities consist of 3 (three) principles, namely:

1. Establish and Develop Control Activities
   The Company establishes and develops control activities to mitigate significant risks to the achievement of the Company's objectives to an acceptable level through the following activities:
   a. Control activities assist and ensure that risk responses have been implemented to address and mitigate significant risks. Following the risk assessment process, management identifies and implements the activities required to respond to specific risks.
   b. Management determines the relevant business processes that require control activities.
   c. Management considers the complexity, nature, and operational environment, as well as the specific characteristics of the Company that affect the selection and development of control activities.
   d. Control activities include the range, variety, and mix of controls to mitigate risk, taking into account manual and

mempertimbangkan pengendalian manual dan otomatis, serta pengendalian preventif dan detektif.

e. Manajemen memisahkan fungsi/tugas yang tidak kompatibel (tidak dapat bersamaan), dan ketika pemisahan tersebut menjadi tidak praktis dan efisien, manajemen menentukan dan mengembangkan aktivitas pengendalian alternatif (pengendalian kompensatif).

f. Pemisahan fungsi umumnya membagi tanggung jawab pencatatan, otorisasi, dan persetujuan transaksi, serta penanganan aset terkait. Ketidakadaan pemisahan fungsi dan pengendalian kompensatif akan:
   - Membuat pengendalian internal menjadi tidak efektif, sehingga dapat menimbulkan tindakan kecurangan (*fraud*).
   - Memitigasi risiko terjadinya management *override* (pengabaian manajemen), yang sering terjadi saat melakukan kecurangan (*fraud*).
   - Pemisahan fungsi juga mengurangi risiko kecurangan (*fraud*) oleh satu orang dan risiko kesalahan karena para pihak terpisah tidak saling mereviu pekerjaan pihak lainnya.
   - Namun, kadang kala pemisahan fungsi tidak praktis atau tidak efisien. Dalam situasi ini, manajemen menetapkan dan mengembangkan pengendalian internal alternatif sebagai kompensasi dari tidak diterapkannya prinsip pengendalian internal.

g. Pemisahan fungsi diarahkan untuk mengurangi kesalahan, kecurangan, dan pemborosan. Pemisahan fungsi di lingkungan Perseroan, dilakukan dengan memastikan bahwa:
   - Tidak seorang pun diperbolehkan mengendalikan seluruh aspek utama kejadian dan transaksi dari awal sampai akhir proses.
   - Pemisahan tanggung jawab dan tugas atas kejadian dan transaksi kepada pegawai yang berbeda berkaitan dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau penerimaan dana, reviu dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan aset.
   - Pembagian tugas kepada lebih dari satu orang pegawai dilakukan secara sistematik untuk memberikan keyakinan adanya *check and balances*.
   - Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kolusi.

2. Menetapkan dan Mengembangkan Pengendalian Umum (*General Controls*) terhadap Teknologi

   Manajemen memahami dan menentukan ketergantungan dan hubungan antara proses bisnis, aktivitas pengendalian otomatis, dan pengendalian umum teknologi.

   a. Manajemen menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian atas infrastruktur teknologi, yang dirancang dan diimplementasikan untuk membantu menjamin kelengkapan, akurasi, dan keberlangsungan proses teknologi.
   b. Manajemen menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang didesain dan diimplementasikan untuk membatasi hak akses teknologi hanya bagi pengguna terotorisasi sesuai dengan tanggung jawab tugasnya dan untuk melindungi aset Perseroan dari ancaman eksternal dan internal.
   c. Manajemen menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian terkait akuisisi, pengembangan, dan

automated controls, as well as preventive and detective controls.

e. Management separates incompatible functions/tasks (cannot concurrently), and when such separation becomes impractical and efficient, management determines and develops alternative control activities (compensative control).

f. Segregation of functions generally divides the responsibilities of recording, authorizing, and approving transactions, and handling the associated assets. The absence of segregation of functions and compensatory controls will:
   - Making internal control ineffective, hence can lead to fraud.
   - Mitigating the risk of management override, which often occurs when committing fraud.
   - The separation of functions also reduces the risk of fraud by one person and the risk of error because the separate parties do not review each other's work.
   - However, sometimes separation of functions is impractical or inefficient. In this situation, management establishes and develops alternative internal controls as compenzation for not applying the principles of internal control.

g. Segregation of functions is geared towards reducing errors, fraud, and waste. The separation of functions within the Company is carried out by ensuring that:
   - No one is allowed to control all major aspects of events and transactions from start to finish.
   - Segregation of responsibilities and duties for events and transactions to different employees relating to authorization, approval, processing and recording, payment or receipt of funds, reviews and audits, and asset storage and handling functions.
   - The division of tasks to more than one employee is carried out systematically to ensure that there are checks and balances.
   - The Board of Directors establishes policies to reduce opportunities for collusion.

2. Establish and Develop General Controls on Technology

   Management understands and determines the dependencies and relationships between business processes, automated control activities, and general technology controls.

   a. Management establishes and develops control activities over the technology infrastructure, designed and implemented to help ensure the completeness, accuracy, and continuity of technology processes.
   b. Management establishes and develops control activities designed and implemented to limit technology access rights only to authorized users in accordance with their responsibilities and to protect the Company's assets from external and internal threats.
   c. Management establishes and develops control activities related to the acquisition, development, and maintenance

pemeliharaan teknologi dan infrastrukturnya, untuk mencapai tujuan Perseroan.

d. Secara detail, pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*) atas sistem informasi diatur dalam Kerangka Sistem Informasi Perseroan.

3. Implementasi melalui Kebijakan dan Prosedur yang dilakukan dengan cara:
   a. Manajemen membentuk aktivitas pengendalian yang dibangun ke dalam proses bisnis dan aktivitas sehari-hari para pekerja, melalui kebijakan dan prosedur untuk mendukung pelaksanaan arahan manajemen.
   b. Manajemen membangun tanggung jawab dan akuntabilitas atas aktivitas pengendalian melalui personel yang ditunjuk dari unit bisnis atau fungsi, dengan risiko relevan berada.
   c. Manajemen menjamin bahwa pekerja yang kompeten dapat melaksanakan aktivitas pengendalian dengan tekun dan berkelanjutan.
   d. Manajemen memastikan kepada pekerja untuk melaksanakan aktivitas pengendalian secara tepat waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur;
   e. Pekerja yang bertanggung jawab dapat melakukan investigasi dan merespon permasalahan yang teridentifikasi dari pelaksanaan aktivitas pengendalian;
   f. Manajemen secara periodik mereviu aktivitas pengendalian untuk menilai relevansi dan keperluan pembaruan saat diperlukan.

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Dalam meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan, Perseroan memiliki Komite di bawah Direksi yaitu Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang memiliki tugas memberikan opini atas kelengkapan dan kesesuaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mempertimbangkan toleransi risiko yaitu manajemen mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat diterima terkait pencapaian tujuan kepatuhan serta mempertimbangkan aturan dan hukum eksternal yaitu Hukum dan aturan merupakan standar minimal yang diintegrasikan ke dalam tujuan kepatuhan.

INFORMASI DAN KOMUNIKASI (*INFORMATION & COMMUNCATION*)

Direksi wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan informasi (keuangan dan non-keuangan) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam waktu dan bentuk (format) yang tepat untuk memudahkan pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawabannya.

Komponen Informasi dan Komunikasi terdiri dari 3 (tiga) prinsip, yaitu:

1. Menggunakan Informasi Relevan
   Perseroan memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi berkualitas, relevan untuk mendukung efektivitas komponen-komponen pengendalian internal yang dilakukan dengan:

of technology and infrastructure, to achieve the Company's objectives.

d. In detail, general control and application control over the information system are regulated in the Company's Information System Framework.

3. Implementation through Policies and Procedures carried out by:
   a. Management establishes control activities that are built into business processes and daily activities of workers, through policies and procedures.
   b. Management establishes responsibility and accountability for control activities through designated personnel from the business unit or function, where the relevant risk is located.
   c. Management ensures that competent employees can carry out control activities diligently and continuously.
   d. Management ensures that workers carry out control activities in a timely manner as specified in policies and procedures;
   e. Responsible workers can investigate and respond to problems identified from the implementation of control activities.
   f. Management periodically reviews control activities to assess whether they are still relevant and can be updated if necessary.

COMPLIANCE WITH OTHER LAW REGULATIONS

In improving the Company's compliance with laws and regulations, the Company has a Committee under Board of Directors, namely Governance, Risk Management and Compliance Committee which has the task of providing opinions on the completeness and suitability of compliance with laws and regulations. Compliance with laws and regulations is carried out by considering risk tolerance, i.e. management considers the level of risk that can be management considers the acceptable level of risk related to achieving compliance objectives and considers external rules and laws i.e. Laws and rules are minimum standards that are integrated into compliance objectives.

INFORMATION & COMMUNCATION

Boards of Directors is required to identify, record, and communicate financial and non-financial information related to the implementation of their main duties and functions in a timely and appropriate form to facilitate implementation, control, and accountability.

The Information and Communication component consists of 3 (three) principles, namely:

1. Using Relevant Information
   The Company obtains or generates and uses quality, relevant information to support the effectiveness of internal control components carried out with:

a. Mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan
   Suatu proses dilaksanakan untuk mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan dan diharapkan untuk mendukung efektivitas pengendalian internal dan pencapaian tujuan Perseroan.
b. Mendapatkan data eksternal dan internal
   Sistem informasi dapat memperoleh data eksternal dan internal.
c. Memproses data relevan menjadi informasi
   Sistem informasi memproses dan mengubah data relevan menjadi informasi.
d. Memelihara kualitas selama proses berlangsung
   Sistem informasi menghasilkan informasi secara tepat waktu, terkini, akurat, lengkap, dapat diakses, terlindungi, dan dapat diverifikasi, serta dapat disimpan. Informasi direviu untuk menilai relevansinya dalam mendukung efektivitas pengendalian internal.
e. Mempertimbangkan biaya dan manfaat
   Sifat, kuantitas, dan akurasi informasi disinkronkan dalam mendukung pencapaian tujuan Perseroan.

2. Komunikasi secara Internal
   Perseroan mengomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab atas pengendalian internal, yang dibutuhkan untuk mendukung efektivitas pengendalian internal yang dilakukan dengan perincian sebagai berikut:
   a. Mengomunikasikan pengendalian internal atas informasi ke para pekerja
      Untuk mengomunikasikan informasi yang dibutuhkan agar para pekerja dapat memahami dan melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal mereka.
   b. Mengomunikasikan dengan Dewan Komisaris
      Terdapat komunikasi antara manajemen/Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga mereka memiliki informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi peran mereka dalam mencapai tujuan Perseroan.
   c. Menyediakan garis komunikasi yang terpisah sebagai *fail safe mechanisms* untuk dijalankan sebagai komunikasi anonim atau rahasia ketika jalur normal tidak beroperasi atau tidak efektif. Seperti saluran khusus *whistleblower*.
   d. Menetapkan metode komunikasi relevan dengan mempertimbangkan waktu, audiens/pendengar, dan dan sifat informasi.
3. Komunikasi secara Eksternal
   Perseroan mengomunikasikan dengan pihak eksternal terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal yang dilakukan dengan cara:
   a. Komunikasi dengan pihak eksternal
      Suatu proses diterapkan untuk mengomunikasikan informasi relevan dan secara tepat waktu ke pihak eksternal termasuk pemegang saham, *partner*, pemilik, pemerintah, konsumen, analis keuangan, serta pihak eksternal lainnya.
   b. Memudahkan komunikasi masuk
      Jalur komunikasi terbuka memudahkan input dari konsumen, pemasok, auditor eksternal, pemerintah, analis keuangan, dan lainnya, untuk menyediakan informasi relevan bagi manajemen/Direksi dan Dewan Komisaris.

a. Identify the information needed
   A process is implemented to identify the information needed and expected to support the effectiveness of internal control and the achievement of the Company's objectives.
b. Obtain external and internal data
   Information systems can obtain external and internal data.
c. Processing relevant data into information
   Information systems process and convert relevant data into information.
d. Maintain quality throughout the process
   Information systems produce information that is timely, current, accurate, complete, accessible, protected, and verifiable, and can be stored. Information is reviewed to assess its relevance in supporting the effectiveness of internal control.
e. Considering costs and benefits
   The nature, quantity, and accuracy of information are synchronized to support the achievement of the Company's objectives.

2. Internal Communication
   The Company communicates information internally, including the objectives and responsibilities for internal control, which is needed to support the effectiveness of internal control carried out with the following details:

   a. Communicating internal control over information to employees
      To communicate the information needed for employees to understand and carry out their internal control responsibilities.
   b. Communicating with the Board of Commissioners
      There is communication between the management/ Board of Directors and the Board of Commissioners, so that they have the information needed to fulfill their role in achieving the Company's goals.
   c. Provide separate lines of communication as fail safe mechanisms to run as anonymous or confidential communication when normal lines are not operational or ineffective. Such as a dedicated whistleblower channel.
   d. Establish relevant communication methods by considering the time, audience/listener, and nature of the information.

3. External Communication
   The Company communicates with external parties regarding matters that affect the effectiveness of internal control by means of:
   a. Communication with external parties
      A process is implemented to communicate relevant and timely information to external parties including shareholders, partners, owners, governments, consumers, financial analysts and other external parties.
   b. Facilitate incoming communication
      Open lines of communication facilitate input from consumers, suppliers, external auditors, government, financial analysts, and others, to provide relevant information to management/Board of Directors and the Board of Commissioners.

c. Menyediakan garis komunikasi yang terpisah
Jalur komunikasi terpisah diterapkan sebagai *fail safe mechanisms* untuk dijalankan sebagai komunikasi anonim atau rahasia ketika jalur normal tidak beroperasi atau tidak efektif. Seperti saluran khusus *whistleblower*.
d. Komunikasi dengan Dewan Komisaris
Informasi relevan dihasilkan dari penilaian yang dilakukan oleh pihak eksternal dikomunikasikan kepada manajemen/Direksi dan Dewan Komisaris.

e. Menetapkan metode komunikasi
Metode komunikasi mempertimbangkan waktu, *audiens*/pendengar, sifat komunikasi, serta ketentuan perjanjian dan aturan pemerintah.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan Evaluasi adalah proses menilai kualitas Sistem Pengendalian Intern Perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan melalui:

1. Melakukan Evaluasi Berkelanjutan dan/atau Terpisah
Perseroan menetapkan, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi berjalan dan/atau terpisah untuk meyakinkan bahwa pengendalian internal telah didesain secara memadai dan efektif.
   a. Mempertimbangkan bauran evaluasi berkelanjutan dan terpisah.
   b. Mengembangkan pemahaman titik awal
   Desain dan kondisi saat ini dari Sistem Pengendalian Internal digunakan untuk membangun titik awal untuk evaluasi berkelanjutan dan terpisah.
   c. Mempertimbangkan tingkat perubahan
   Manajemen mempertimbangkan tingkat perubahan dalam proses bisnis ketika menetapkan dan mengembangkan evaluasi berkelanjutan dan terpisah.
   d. Menggunakan pekerja yang kompeten
   Evaluator yang melaksanakan evaluasi berkelanjutan dan terpisah memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami apa yang sedang dievaluasi.
   e. Terintegrasi dengan proses bisnis
   Evaluasi berjalan dibangun dalam proses bisnis dan disesuaikan dengan perubahan kondisi.
   f. Evaluasi objektif dilakukan secara terpisah dan periodik untuk memberikan masukan yang objektif.

   g. Menyesuaikan lingkup dan frekuensi
   Manajemen menyesuaikan lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah, tergantung pada risiko.
2. Evaluasi dan Komunikasi Kelemahan Pengendalian Intern kepada para pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris melalui:
   a. Penilaian hasil evaluasi berkelanjutan dan terpisah oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
   b. Mengomunikasikan kelemahan kepada manajemen kepada pihak yang bertanggung jawab untuk dilakukan perbaikan dan dapat disampaikan kepada manajemen senior.
   c. Melaporkan kelemahan signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
   d. Memonitor tindakan perbaikan oleh manajemen.

c. Provide a separate line of communication
Separate communication lines are implemented as fail safe mechanisms to operate as anonymous or confidential communications when normal lines are inoperative or ineffective. Like a special whistleblower channel.
d. Communication with the Board of Commissioners
Relevant information generated from the assessment carried out by external parties is communicated to the management/Board of Directors and the Board of Commissioners.
e. Establish communication methods
The communication method takes into account the timing, audience, nature of communication, as well as the terms of agreement and government regulations.

MONITORING AND EVALUATION

Monitoring and Evaluation is the process of assessing the quality of the Company's Internal Control System within a certain period of time. Monitoring and evaluation is carried out through:

1. Conduct Continuous and/or Separate Evaluations
The Company establishes, develops, and carries out ongoing and/or separate evaluations to ensure that internal controls have been designed adequately and effectively.

   a. Consider a mix of ongoing and separate evaluations

   b. Develop an understanding of starting points
   The design and running state of the Internal Control System is used to establish a starting point for ongoing and separate evaluations.
   c. Consider the rate of change
   Management considers the degree of change in business processes when establishing and developing ongoing and separate evaluations.
   d. Using competent workers
   Evaluators who carry out ongoing and separate evaluations have sufficient knowledge to understand what is being evaluated.
   e. Integrated with business processes
   Ongoing evaluation is built into business processes and adapted to changing conditions.
   f. Evaluation objectively
   Separate evaluations are carried out periodically to provide objective input.
   g. Adjust the scope and frequency
   Management adjusts the scope and frequency of separate evaluations, depending on the risk.
2. Evaluation and Communication of Internal Control Weaknesses to the parties responsible for taking corrective action, including Board of Directors and Board of Commissioners through:
   a. Assessment of the results of continuous and separate evaluations by Board of Directors and Board of Commissioners.
   b. Communicating weaknesses to management to the responsible party for improvement and can be conveyed to senior management.
   c. Reporting significant weaknesses to Board of Directors and Board of Commissioners.
   d. Monitor corrective actions by management.

KESESUAIAN DENGAN *COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF TRADEWAY COMMISSION* (COSO)

Sistem Pengendalian Internal Perseroan telah mengacu ke COSO Internal *Control Integrated Framework* Kerangka konseptual pengendalian internal COSO sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur efektivitas pengendalian internal terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian *(Control Environment);*
2. Penilaian Risiko *(Risk Assessment);*
3. Kegiatan Pengendalian *(Control Activities);*
4. Informasi dan Komunikasi *(Information & Communication);*
5. Pemantauan dan Evaluasi *(Monitoring).*

COMPLIANCE WITH THE COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF TRADEWAY COMMISSION (COSO)

The Company's Internal Control System has referred to the COSO Internal Control Integrated Framework. The COSO internal control conceptual framework as a comprehensive framework for measuring the effectiveness of internal control consists of 5 (five) components:

1. Control Environment;
2. Risk Assessment;
3. Control Activities;
4. Information and Communication;
5. Monitoring and Evaluation.

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) secara rutin mengevaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai reliabilitas Sistem Pengendalian Internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) serta konsistensi implementasinya. Evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pada tahun 2022 telah dilakukan secara *self assessment* dengan hasil bahwa seluruh Sistem Pengendalian Internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terbukti dapat berjalan cukup efektif. Hal tersebut menunjukan bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah mematuhi elemen-elemen pengendalian internal yang telah disusun.

INTERNAL CONTROL SYSTEM EVALUATION

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regularly evaluates the effectiveness of Internal Control System. This evaluation aims to assess the reliability of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Internal Control System and the consistency of its implementation. Evaluation of the implementation of internal control system in 2021 has been carried out on a self-assessment basis with the result that the entire Internal Control System of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has proven to be effective. This shows that PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has complied with the elements of internal control that have been prepared.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan sistem pengendalian intern sudah berjalan dengan baik. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas kinerja yang telah dicapai oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada tahun 2022. Kecukupan pengendalian internal tercermin dalam laporan hasil audit yang telah disampaikan oleh SPI kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

STATEMENT OF BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Commissioners is of the view that the application of the system internal control has been running well. Board The Commissioner expresses his appreciation for the performance that has been achieved by the Internal Audit Unit (SPI) in 2022. The adequacy of internal control is reflected in the results report audit that has been submitted by SPI to the Board of Directors and the Board Commissioner.

MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat eksposur risiko yang dihadapi perusahaan. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi dan menciptakan nilai perusahaan. Perusahaan mengelola risiko dengan menyeimbangkan antara strategi bisnis dengan pengelolaan risikonya sehingga perusahaan akan mendapatkan hasil optimal dari operasionalnya.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menerapkan manajemen risiko yang mengacu pada ISO 31000:2018. Setiap perusahaan pasti menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Target Perusahaan mencakup berbagai aspek, nilai dari aspek strategis, operasional, finansial, pembentukan citra perusahaan keselarasan hukum dan kepatuhan, lingkungan serta keselamatan kerja.

RISK MANAGEMENT

Risk management is an important element in run the company's business because it is growing corporate world and the increasing complexity of activities company resulting in increased level of risk exposure faced by the company. The main target of the implementation risk management is protecting and creating the value of the company. The company manages risk by balance between business strategy and management risks so that the company will get optimal results from its operations.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) applies risk management that refers to ISO 31000:2018. Every Company certainly has to deal with risks that can affect the achievement of targets that have been set. The Company's targets cover various aspects, values from strategic, operational, financial aspects, corporate image formation, legal and compliance, environmental and work safety aspects.

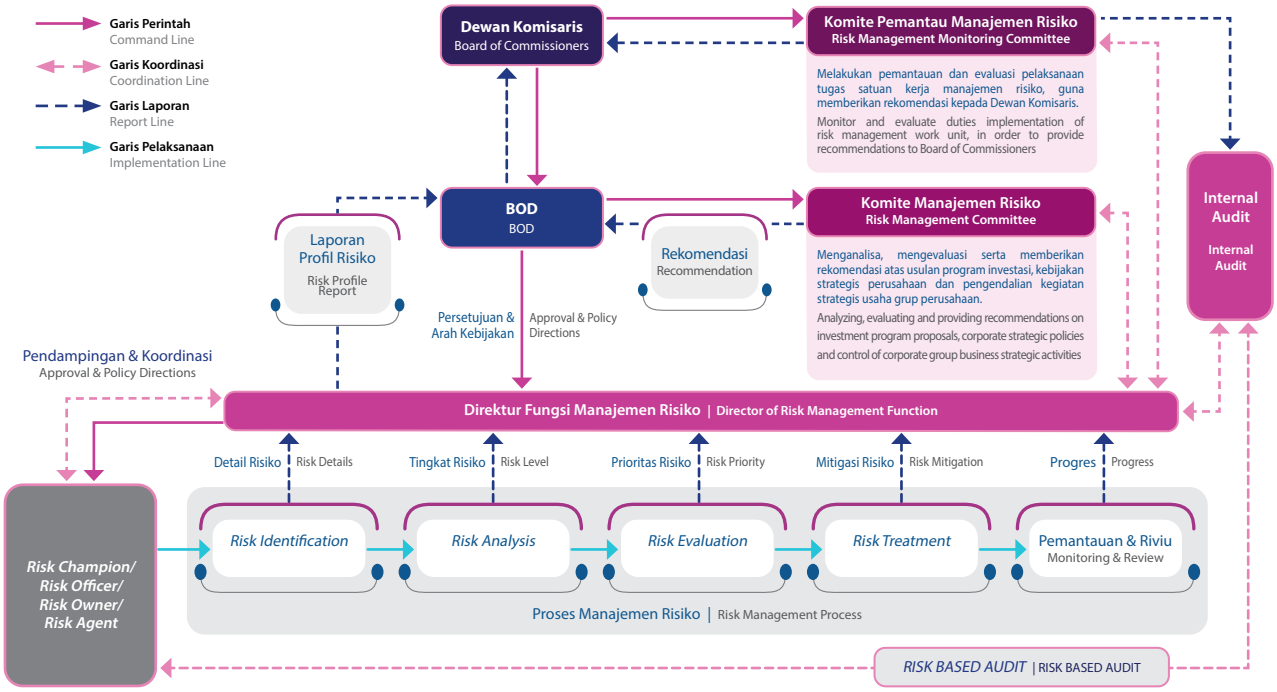
STRUKTUR KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

Dalam implementasi manajemen risiko diperlukan struktur koordinasi dan komunikasi yang efektif, sehingga fungsi perintah koordinasi, pelaksanaan dan pelaporan terpetakan dengan jelas. Struktur koordinasi dan komunikasi serta pengelolaan manajemen risiko digambarkan sebagai berikut.

COORDINATION AND COMMUNICATION STRUCTURE

The risk management requires an effective coordination and communication structure, so that the functions of coordination, implementation and reporting are clearly mapped. The structure of coordination and communication and risk management is described as follows.

STRUKTUR KOORDINASI & KOMUNIKASI MANAJEMEN RISIKO
Structure of Coordination and Communication Risk Management

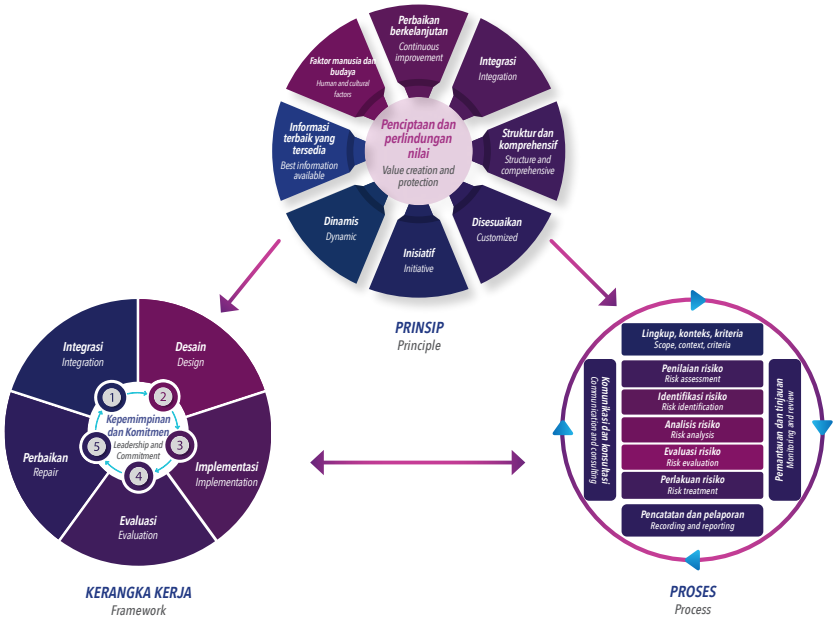


SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Pelindo telah mengadopsi standar arsitektur manajemen risiko berbasis ISO 31000:2018 *Risk Management Guidelines*, yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Prinsip, Kerangka Kerja dan Proses Manajemen Risiko.

RISK MANAGEMENT SYSTEM

Pelindo has adopted the risk management architecture standard based on ISO 31000:2018 Risk Management Guidelines, which consists of 3 (three) parts, namely Principles, Framework and Risk Management Process.

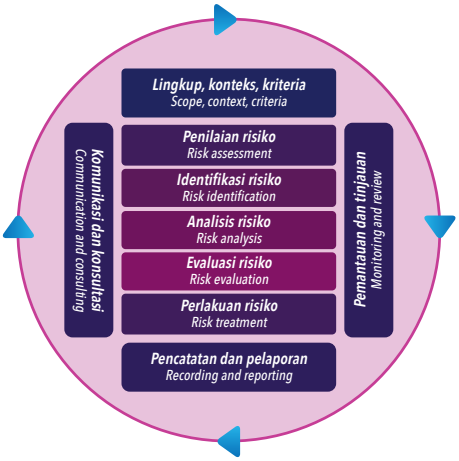


SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko melibatkan penerapan sistematis dari kebijakan, prosedur dan praktik pada aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, serta penilaian, perlakuan, pemantauan, peninjauan, pencatatan dan pelaporan risiko.

RISK MANAGEMENT SYSTEM

The risk management process involves systematic application of policies, procedures and practices to communication and consulting activities, context setting, and risk assessment, treatment, monitoring, review, recording and reporting.



KOMUNIKASI DAN KONSULTASI

Komunikasi dan konsultasi membatu *risk owner* dalam memahami risiko, sebagai dasar dalam membuat keputusan dan alasan dilakukannya suatu aksi yang dipelukan. Komunikasi akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman risiko, sementara konsultasi mencakup umpan balik (*feedback*) dan informasi yang diperoleh untuk mendukung dalam pengambilan keputusan. Koordinasi harus memfasilitasi secara faktual, tepat waktu, relevan, akurat dan dapat dimengerti. Pertukaran informasi harus memperhatikan kerahasiaan dan integritas informasi, termasuk hak cipta individu.

COMMUNICATION AND CONSULTATION

Communication and consultation helps the risk owner in understanding the risk, as the basis for making decisions and the reasons for taking required actions. Communication will increase awareness and understanding of risk, while consultation includes feedback and information obtained to support decision making. Coordination must be factual, timely, relevant, accurate and understandable. Information exchange must pay attention to the confidentiality and integrity of information, including individual copyrights.

RUANG LINGKUP, KONTEKS DAN KRITERIA

Tujuan penetapan ruang lingkup, konteks dan kriteria adalah untuk menyesuaikan proses manajemen risiko, mengaktifkan penilaian risiko yang efektif dan perlukuan risiko yang memadai. Ruang lingkup, konteks dan kriteria mencakup penentuan ruang lingkup proses dan pemahaman konteks eksternal dan internal.

1. Penilaian Risiko
   Penilaian Risiko adalah proses menyeluruh dari identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko. Penilaian risiko sebaiknya dilakukan secara sistematis, berulang dan kolaboratif berdasarkan pengetahuan dan pandangan pemangku kepentingan.
2. Identifikasi risiko
   Tujuan identifikasi risiko adalah untuk menemukan, mengenali dan menguraikan risiko yang dapat membantu atau menghalangi organisasi dalam mencapai sasarannya. Informasi yang relevan, memadai dan mutakhir penting dalam mengidentifikasi risiko. Perseroan mengidentifikasi risiko tanpa memandang apakah sumber risiko dapat dikendalikan atau tidak.
3. Analisis Risiko
   Tujuan analisis risiko adalah untuk memahami sifat risiko dan karakteristiknya, termasuk, jika memungkinkan tingkat risikonya. Analisis risiko melibatkan pertimbangan mendetail terhadap ketidakpastian, sumber risiko, dampak, kemungkinan, peristiwa, scenario, kendali dan efektivitas kendali tersebut.

SCOPE, CONTEXT AND CRITERIA

The purpose of establishing the scope, context and criteria is to adapt the risk management process, enable effective risk assessment and adequate risk assessment. Scope, context and criteria include determining the scope of the process and understanding the external and internal context.

1. Risk Assessment
   Risk Assessment is a comprehensive process of risk identification, risk analysis and risk evaluation. Risk assessment should be carried out in a systematic, iterative and collaborative manner based on the knowledge and views of stakeholders.
2. Risk identification
   The purpose of risk identification is to find, identify and describe risks that can help or hinder the organization in achieving its goals. Relevant, adequate and up-to-date information is important in identifying risks. The Company identifies risks regardless of whether the source of the risk can be controlled or not.
3. Risk Analysis
   The purpose of risk analysis is to understand the nature of the risk and its characteristics, including, if possible, the level of risk. Risk analysis involves a detailed consideration of the uncertainties, sources of risk, impacts, possibilities, events, scenarios, controls and the effectiveness of those controls.

Analisis risiko dapat dilakukan dengan beragam tingkat detail dan kompleksitas, bergantung pada tujuan analisis, ketersediaan dan keandalan informasi serta ketersediaan sumber daya. Analisis risiko memberikan masukan untuk evaluasi risiko, untuk keputusan apakah risiko memerlukan perlakuan dan bagaimana perlakuannya, serta terhadap strategi dan metode perlakuan risiko yang paling sesuai.

4. Evaluasi Risiko
   Tujuan evaluasi risiko adalah untuk mendukung pengambilan keputusan. Evaluasi risiko melibatkan pembandingan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan tambahan.
5. Perlakuan Risiko
   Tujuan perlakuan risiko adalah untuk memilih dan menerapkan opsi penanganan risiko. Perlakuan risiko mencakup proses berulang dari:
   a. Formulasi dan seleksi opsi perlakuan risiko.
   b. Perencanaan dan implementasi perlakuan risiko.
   c. Penilaian efektivitas perlakuan itu.
   d. Pengambilan keputusan apakah risiko tersisa dapat diterima.
   e. Pelaksanaan perlakuan lanjutan, jika opsi tidak diterima.

MONITORING DAN REVIU

Bentuk *monitoring* dan reviu terdiri atas:

1. *Monitoring* berkelanjutan (*on going monitoring*)
   Unit pemilik risiko secara terus menerus melakukan *monitoring* atas seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dan kondisi lingkungan perusahaan. Apabila terdapat perubahan organisasi yang direncanakan atau lingkungan eksternal yang berubah, maka dimungkinkan terjadi perubahan dalam:
   a. Ruang lingkup dan konteks
   b. Risiko yang terjadi atau tingkat prioritas risiko
   c. Sistem pengendalian/media kontrol yang sudah ada
   d. Penanganan risiko
   Dalam hal terjadi perubahan signifikan, dimungkinkan dilakukan penilaian ulang atas profil risiko. *Monitoring* dilakukan secara berkala dan menjadi bagian dalam proses bisnis perusahaan.
2. *Monitoring* berkala
   Monitoring risiko dilakukan untuk memantau pelaksanaan realisasi penanganan risiko, analisis status indikator risiko utama serta tren perubahan tingkat eksposure risiko. Setelah dilakukan *monitoring* oleh *risk owner*, dilakukan pembahasan profil risiko bersama fungsi manajemen risiko dan *risk owner* yang dihadiri minimal terdiri dari *risk agent* dan *risk officer*.
3. Reviu
   Membantu interaksi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Pemantau Manajemen Risiko termasuk pihak yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk aktivitas manajemen risiko.

Risk analysis can be carried out with varying levels of detail and complexity, depending on the purpose of the analysis, the availability and reliability of the information and the availability of resources. Risk analysis provides input for risk evaluation, for decisions on whether risks need treatment and how to treat them, as well as on the most appropriate risk treatment strategies and methods.

4. Risk Evaluation
   The purpose of risk evaluation is to support decision making. Risk evaluation involves comparing the results of risk analysis with the established risk criteria to determine whether additional action is required.

5. Risk Treatment
   The purpose of risk treatment is to select and implement risk treatment options. Risk treatment includes an iterative process of:
   a. Formulation and selection of risk treatment options.
   b. Planning and implementation of risk treatment.
   c. Assessment of the effectiveness of treatment.
   d. Decision making whether the remaining risk is acceptable.
   e. Implementation of further treatment, if the option is not accepted.

MONITORING AND REVIEW

The form of monitoring and review consists of:

1. On going monitoring
   The risk owner unit continuously monitors all factors that affect the risk and environmental conditions of the Company. If there is a planned organizational change or a changing external environment, changes are most likely to occur in:
   a. The scope and context
   b. The risk that occurs or the priority level of risk
   c. Existing control system/control media
   d. Risk handling
   In the event of a significant change, it is possible to reassess the risk profile. Monitoring is carried out regularly and becomes part of the Company's business processes.
2. Periodic monitoring
   Risk monitoring is carried out to monitor the implementation of the realization of risk management, analysis of the status of main risk indicators as well as trends in changes in the level of risk exposure. After monitoring by the risk owner, a discussion of the risk profile is carried out with the risk management function and risk owner, which consists of at least risk agents and risk officers.
3. Review
   The risk management review aims to see the suitability of the implementation and the output of the entire risk management process with applicable regulations. The risk management review is carried out by the risk management function and/or risk manager/risk owner according to their respective authorities.

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Proses dan hasil keluaran manajemen risiko sebaiknya didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang sesuai. Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk:

1. Mengomunikasikan aktivitas manajemen risiko dan hasil keluaran dari proses manajemen risiko.
2. Memberikan informasi untuk pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan efektivitas manajemen risiko.
4. Membantu interaksi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Pemantau Manajemen Risiko termasuk pihak yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk aktivitas manajemen risiko.

RECORDING AND REPORTING

Risk management processes and outputs should be documented and reported through appropriate mechanisms. Recording and reporting aims to:

1. Communicating risk management activities and the outputs of risk management process.
2. Provide information for decision making.
3. Increase the effectiveness of risk management.
4. Assist in interaction with Board of Directors, Board of Commissioners and Risk Management Monitoring Committee, including those who have responsibility and accountability for risk management activities.

PROFIL RISIKO DAN PENGELOLAANNYA

RISK PROFILE AND THE MANAGEMENT

No	Tipe Risiko Risk Type	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
1	Eksekusi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Penugasan (A5) a. Pekerjaan *revetment* dan *retaining wall* dumping 1 b. Pekerjaan *revetment* dan *retaining wall dumping* 2 dan Dermaga Curah Cair Pelabuhan Benoa c. Pekerjaan *Design* dan *Build* pengerukan alur dan kolam pelabuhan Benoa Paket A. d. Pekerjaan *Design* dan *Build* pengerukan alur dan kolam pelabuhan Benoa Paket B. Execution of National Strategic Projects (PSN) and Assignments (A5) a. Revetment and retaining wall dumping work 1 b. Revetment and retaining wall dumping 2 and Benoa Port Liquid Bulk Jetty works c. Design and Build work on dredging the Benoa harbor channel and pond Package A. d. Design and Build work on dredging the Benoa harbor channel and pond Package B.	1. Penyusunan Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pelindo 2. Pengurusan perizinan (RIP, AMDAL, Persetujuan Kegiatan kerja keruk) 3. Penentuan lokasi *dumping* 4. Penyesuaian *Detail Engineering Design* (DED) 5. Evaluasi metode/peralatan sesuai dengan KAK 1. Preparation of Cooperation between Bali Provincial Government and Pelindo 2. Licensing (RIP, AMDAL, Approval of dredging activities) 3. Determination of dumping location 4. Adjustment of Detail Engineering Design (DED) 5. *Evaluation of method/equipment in accordance with KAK*
2	Penyerapan PMN tidak sesuai dengan perencanaan PMN absorption is not in line with the plan	1. Membuat *action plan* dan *checklist* kegiatan pelaksanaan proyek yang menggunakan dana PMN agar sesuai rencana. 2. Penyesuaian dan persetujuan atas alokasi dana kelebihan/kekurangan untuk pekerjaan lainnya ke Kementerian Keuangan dan KBUMN. 3. Koordinasi dengan BPKP, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya dan lebih ketat. 1. Create action plans and checklists for project implementation activities that use PMN funds so that they are in accordance with the plan. 2. Adjustment and approval of the allocation of excess/deficient funds for other works to the Ministry of Finance and KBUMN. 3. Stricter coordination with BPKP, Ministry of SOEs, Ministry of Finance and other relevant agencies.
3	Terjadinya *complain*/tuntutan dari masyarakat sekitar The occurrence of complaints/demands from the surrounding community	1. Sosialisasi kepada masyarakat terdampak. 2. Koordinasi dengan dinas terkait tentang status kepemilikan lahan dan observasi potensi area terdampak. 3. Rekrutmen tenaga lokal dalam pekerjaan proyek. 4. Pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak melalui program CSR. 1. Socialization to affected communities. 2. Coordination with relevant agencies on land ownership status and observation of potential affected areas. 3. Recruitment of local labor in project work. 4. Provision of assistance to affected communities through CSR programs.

No	Tipe Risiko Risk Type	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
4	Pengembangan bisnis baru (B4) New business development (B4)	1. Melakukan dana talangan *project* (pengadaan tanah). 2. Melakukan konsinyasi lahan. 3. Pengurusan perizinan. 4. Penunjukkan konsultan. 5. Kajian proses divestasi. 6. Seleksi investor. 7. Proses lelang (*binding offer*). 1. Conduct project bailout (land acquisition). 2. Conduct land consignment. 3. Licensing. 4. Appointment of consultant. 5. Review of divestment process. 6. Investor selection. 7. Auction process (binding offer).
5	Pergerakan rupiah (C3) Rupiah movement (C3)	*Buyback* global *bonds* dalam rangka mengurangi hutang USD.
6	*Environmental social governance* (D1) Environmental social governance (D1)	1. Program TJSL Non-PUMK (Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil) Prioritas bidang lingkungan, bidang pendidikan, dan bidang pengembangan UMK. 2. Program TJSL Non-PUMK (Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil) Non-Prioritas. 3. Program TJSL PUMK bekerja sama/sinergi dengan BUMN/Anak Perusahaan BUMN/Afiliasi. 1. Non-PUMK CSR Program (Micro and Small Business Funding) Priorities are environment, education, and MSE development. 2. Non-priority Non-PUMK (Micro and Small Business Funding) CSR programs. 3. TJSL PUMK programs in collaboration/synergy with SOEs/SOE subsidiaries/affiliates
7	Keamanan Jaringan (E2) Network Security (E2)	1. Instalasi, pengelolaan dan perpanjangan lisensi antivirus. 2. Membuat *password* pada server aplikasi *public* dan *server database* dengan indikator kuat. 3. Melakukan penggantian *password* aplikasi *public* dan server secara berkala. 4. *Update database malware endpoint security* dan *network security*. 5. *Monitoring, update patch*, dan memperpanjang *Annual Technical Support* perangkat *security*. 6. Melakukan *monitoring* secara berkala baik melalui *file asset management* maupun *email reminder*. 7. Memasang dan rutin memperpanjang/memperbarui sertifikat SSL untuk aplikasi publik. 1. Installation, management and renewal of antivirus licenses. 2. Creating passwords on public application servers and database servers with strong indicators. 3. Periodically changing passwords for public applications and serves. 4. Update the endpoint security and network security malware database. 5. Monitoring, updating patches, and extending Annual Technical Support for security devices. 6. Conduct regular monitoring either through asset management files or email reminders. 7. Installing and regularly extending/renewing SSL certificates for public applications.

No	Tipe Risiko Risk Type	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
8	Struktur Pendanaan Jangka Pendek (F2) Short Term Funding	1. Implementasi *Autocollection* pada Cabang Pelabuhan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan. 2. Pengembangan *supply chain financing*. 3. Standardisasi dan pelaksanaan kebijakan kredit limit bagi pengguna jasa sesuai tahapan yang ditetapkan. 4. Standardisasi administrasi nota. 5. Aksi penagihan piutang terhadap pengguna jasa. 6. Penyampaian surat konfirmasi, surat teguran dan melakukan pendekatan kepada pengguna jasa. 7. Kerja sama dengan JPN untuk penagihan piutang kepada pelanggan yang mampu namun tidak mau membayar sesuai tahapan yang ditentukan. 1. Implementation of Autocollection at the Port Branch in accordance with the stages set. 2. Development of supply chain financing. 3. Standardization and implementation of credit limit policy for service users in accordance with the stipulated stages. 4. Standardization of note administration. 5. Action on collection of receivables against service users. 6. Submitting confirmation letters, warning letters and approaching service users. 7. Cooperation with JPN for collection of receivables to customers who are capable but do not want to pay according to the specified stages.
9	Pajak (F3) Tax (F3)	1. Kurang Bayar dan Denda Pajak a. Perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara terpusat. b. Sosialisasi dan pelatihan perpajakan. c. Melakukan sosialisasi terkait peraturan terbaru dan arahan kepada seluruh Pelindo *Group*. 2. Peningkatan beban pajak akibat aksi merger a. Pengajuan permohonan penggunaan nilai buku. b. Pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan perpajakan. 3. Peningkatan beban pajak akibat inbreng anak perusahaan kepada *subholding*. a. Pengajuan permohonan penggunaan nilai buku. b. Pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan perpajakan. 1. Tax Underpayment and Penalty a. Centralized tax calculation, remittance, and reporting. b. Tax socialization and training. c. Conducting socialization related to the latest regulations and directives to the entire Pelindo Group. 2. Increased tax burden due to merger action a. Submission of application for the use of book value. b. Fulfillment of requirements in accordance with tax provisions. 3. Increase in tax burden due to inbreng of subsidiaries to subholding. a. Submission of application for the use of book value. b. Fulfillment of requirements in accordance with tax provisions.
10	Pelaksanaan proyek (G3) Project implementation (G3)	1. Pelaksanaan rapat rutin mingguan dan bulanan dengan kontraktor, konsultan dan *project management*. 2. Koordinasi intensif dengan instansi terkait perizinan. 3. Evaluasi periodik terhadap kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan *action plan* yang disepakati. 1. Conduct regular weekly and monthly meetings with contractors, consultants and project management. 2. Intensive coordination with licensing agencies. 3. Periodic evaluation of the suitability of work implementation with the agreed action plan.

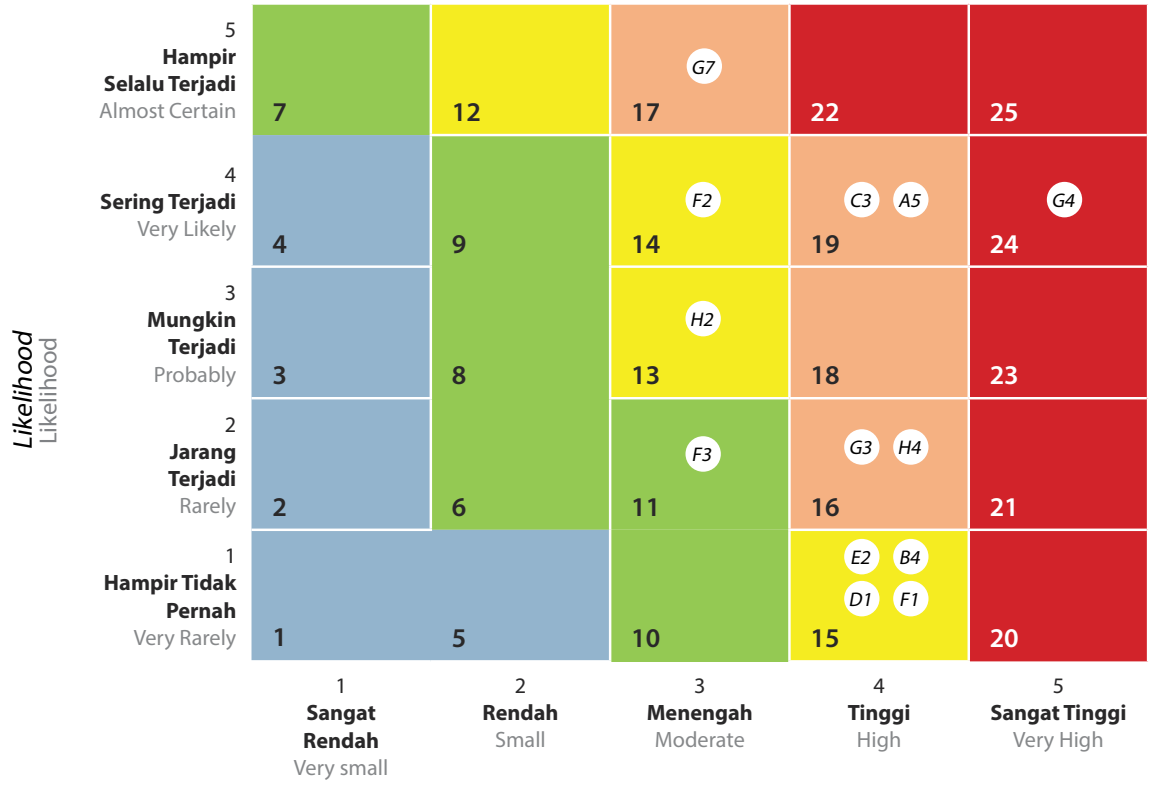
No	Tipe Risiko Risk Type	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
11	*Health Safety Security Environment* (G4) Health Safety Security Environment (G4)	1. Kecelakaan Kerja a. Melakukan HSSE *Silent Inspection* pada area operasional Pelabuhan. b. Penyusunan HSSE *corporate guideline*. 2. Pencemaran Lingkungan a. Penyusunan *framework roadmap greenport*. b. Pengelolaan izin lingkungan. 1. Work Accidents a. Conduct HSSE Silent Inspection in the Port operational area. b. Drafting HSSE corporate guideline. 2. Environmental Pollution a. Preparation of greenport roadmap framework. b. Environmental permit management.
12	*Sales* dan *Marketing* (G7) Sales and Marketing (G7)	1. Ketidaktercapaian target trafik/*throughput* a. (Kapal) Menjalin kerja sama pelauamam pandu dan tunda dengan TUKS/Tersus yang berada di wilayah Pelindo. b. (Kapal) Koordinasi dengan pihak regulator untuk pelaksanaan evaluasi pelimpahan pemanduan dan penundaan. c. (Terminal) Standardisasi Operasi TPK d. (Terminal) Standardisasi Operasi NPK e. (Kapal) Standardisasi Operasi Pelayanan Terminal Penumpang dan RoRo. f. (Komersial) Penjajakan Kerja sama dengan mitra/*customer* baru. g. (Komersial) Penyusun program pemberian insentif bagi *customer*. h. (SPTP) Pemetaan potensi Kerja sama dengan skema integrasi/ bundling dengan layanan di regional/klaster Pelindo. i. (SPMT) Kerja sama dengan regional dan AP untuk pengelolaan TUKS dan UPP. j. (Terminal) Optimalisasi pengelolaan UPP Garongkong, Sulawesi Selatan. k. (SPJM) Pengkajian ulang tentang skema *pricing* dan peningkatan pemasaran. l. Diskusi peraturan Direksi terkait pelayanan terminal penumpang domestik dan internasional serta melakukan *self assessment* untuk mengukur *maturity level* terminal penumpang dan RoRo. 2. Kurang optimalnya pemanfaatan aset *idle*. a. *Site analysis* lahan *idle* masing-masing regional. b. Koordinasi dan *Monitoring* progres optimalisasi lahan *idle* yang dapat dimanfaatkan tahun 2022. 1. Non-achievement of traffic/throughput targets a. (Ship) Establish cooperation of pilot and tug services with TUKS/ Tersus located in the Pelindo area. b. (Ship) Coordination with regulators for the implementation of evaluation of the delegation of guiding and delaying. c. (Terminal) Standardization of TPK Operations d. (Terminal) Standardization of NPK Operations e. (Ship) Standardization of Passenger Terminal and RoRo Service Operations. f. (Commercial) Cooperation Exploration with new partners/ customers. g. (Commercial) Development of incentive program for customers. h. (SPTP) Mapping the potential for cooperation with integration/ bundling schemes with services in the Pelindo region/cluster. i. (SPMT) Cooperation with regions and AP for the management of TUKS and UPP. j. (Terminal) Optimization of UPP Garongkong management, South Sulawesi. k. (SPJM) Reassessment of pricing scheme and marketing improvement. l. Discussion of Board of Directors regulations related to domestic and international passenger terminal services and conducting self-assessment to measure the maturity level of passenger terminals and RoRo. 2. Less than optimal utilization of idle assets. a. Site analysis of idle land in each region. b. Coordination and monitoring of the progress of optimizing idle land that can be utilized in 2022.

No	Tipe Risiko Risk Type	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
13	Kehilangan Hak atas Aset (H4) Loss of Asset Rights (H4)	1. Penanganan penyelesaian permasalahan lahan. 2. Pelaksanaan Tindakan hukum (*legal action*) terhadap lahan Perusahaan yang dikuasai pihak lain. 3. Pengamanan aset secara fisik pada area Pelabuhan dengan melakukan pemagaran dan penempatan tim pengamanan. 1. Handling the settlement of land issues. 2. Implementation of legal action against the Company's land controlled by other parties. 3. Physical security of assets in the Port area by fencing and placing a security team.
14	Kepatuhan (H2) Compliance (H2)	1. Penyusunan *business process architecture and organization structure* untuk mendukung *integrated* Pelindo. 2. Penyusunan *grand design* Pelindo *Group* dan tata Kelola hubungan induk dan anak perusahaan. 1. Development of business process architecture and organization structure to support integrated Pelindo. 2. Preparation of Pelindo Group grand design and governance of parent and subsidiary relationships.
15	Struktur Pendanaan Jangka Panjang. Long Term Funding Structure.	1. Sosialisasi secara *parallel* kepada Dewan Komisaris dan Kementerian BUMN. 2. Menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung. 3. *Monitoring* ketat terhadap proses persetujuan dokumen aksi korporasi. 1. Parallel socialization to the Board of Commissioners and the Ministry of SOEs. 2. Prepare supporting documents. 3. Close monitoring of the corporate action document approval process.

PENILAIAN RISIKO

RISK ASSESSMENT

Residual Triwulan 3
3 Quarter Residualp



Rendah | Small
Menengah | Moderate
Tinggi | High
Ekstrim | Extreme
Batas Selera Risiko | Risk Appetite Limits
Batas Toleransi Risiko | Risk Tolerance Limit

EVALUASI PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Mekanisme pelaksanaan evaluasi Manajemen Risiko dilakukan secara berjenjang, mulai dari Cabang Pelabuhan ke Fungsi Manajemen Risiko Regional kemudian diteruskan ke *Group* Manajemen Risiko Kantor Pusat, sedangkan untuk anak perusahaan ke Divisi Manajemen Risiko *Subholding* kemudian dilaporkan ke *Group* Manajemen Risiko Kantor Pusat dan untuk anak perusahan di luar cluster bisnis, dilakukan evaluasi secara langsung oleh *Group* Manajemen Risiko Kantor Pusat. Evaluasi telah dilakukan dengan melihat data pada pengisian profil risiko pada kertas kerja *Risk Control Self Assessment* (RCSA) dengan pendekatan efektivitas tindakan mitigasi yang telah dilaksanakan oleh pemilik risiko (*risk owner*), kemudian divalidasi dan diverifikasi kembali dengan menunjukkan data-data kinerja operasional, keuangan, investasi dan data pendukung lainnya serta menggunakan data kejadian yang merugikan (*loss event*). Hasil evaluasi disampaikan melalui Nota Dinas kepada Unit Kerja terkait ataupun dilakukan pembahasan secara langsung bersama dengan *risk owner* dengan mekanisme memberikan masukan, saran, dan *feed back* terkait pengisian RCSA.

Rencana mitigasi yang sudah ada akan dilakukan *monitoring* dengan periode bulanan dan pelaporan dilakukan pertriwulanan. Selanjutnya, laporan *monitoring* profil risiko triwulanan akan disusun dan disampaikan kepada *Group* Anggaran dan Pelaporan untuk dimuat dalam laporan manajemen triwulanan korporat.

Hasil *Assessment* Maturitas Manajemen Risiko yang dilakukan pada 11 Aspek, 43 Indikator dan 101 Parameter atas penerapan Manajemen Risiko di Pelindo, diperoleh nilai 3,36 atau level 3. Tingkat maturitas Level 3 menunjukkan kondisi di mana perusahaan telah secara konsisten dan terbukti dengan setiap dokumen/bukti menerapkan manajemen risiko secara terus menerus. Namun masih menggunakan metode yang sederhana dan sistem aplikasi yang digunakan belum terintegrasi secara menyeluruh. Proses manajemen risiko telah tergambarkan dalam prosedur, *tools* dan metodologi yang mendorong konsistensi pelaksanaan MR pada setiap unit.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris Perusahaan memiliki organ pendukung yakni Komite *Good Corporate Governance* dan Pemantau Manajemen Risiko yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

RISK MANAGEMENT EVALUATION

The Risk Management evaluation mechanism is carried out in stages, starting from the Port Branch to the Regional Risk Management Function then forwarded to the Head Office Risk Management Group, while for subsidiaries to the Sub-holding Risk Management Division then reported to the Head Office Risk Management Group and for subsidiaries outside the business cluster, the evaluation is carried out directly by the Head Office Risk Management Group. The evaluation has been carried out by looking at the data on risk profile filling in the Risk Control Self Assessment (RCSA) working paper with the approach of effectiveness of mitigation actions that have been implemented by the risk owner, then validated and verified again by showing operational, financial, investment and other supporting data and using loss event data.

The evaluation results are submitted through a Service Memorandum to the relevant Work Unit or discussed directly with the risk owner with the mechanism of providing input, suggestions, and feed back related to RCSA filling.

The existing mitigation plan will be monitored with a monthly period and reporting is carried out quarterly. Furthermore, a quarterly risk profile monitoring report will be prepared and submitted to the Budget and Reporting Group to be included in the quarterly corporate management report.

The results of Risk Management Maturity Assessment conducted on 11 Aspects, 43 Indicators and 101 Parameters on the implementation of Risk Management in Pelindo, obtained a score of 3.36 or level 3. Level 3 maturity level indicates a condition where the Company has consistently and proven by every document/evidence to implement risk management continuously. However, it still uses simple methods and the application system used has not been thoroughly integrated. The risk management process has been described in procedures, tools and methodologies that encourage consistency in the implementation of MR in each unit.

STATEMENT OF BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS OR AUDIT COMMITTEE ON THE ADEQUACY OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Company's Board of Commissioners has supporting organs, including the Good Corporate Governance and Risk Management Monitoring (GCG and RMM) Committee that is tasked with monitoring and evaluating the Risk Management work unit duties in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.

Group Manajemen Risiko Kantor Pusat secara periodik selalu melakukan pertemuan dengan Komite GCG dan PMR dalam rangka melakukan koordinasi terkait rencana dan *monitoring* proses implementasi Manajemen Risiko Perusahaan. Hasil koordinasi dituangkan dalam bentuk notulen rapat untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh Group Manajemen Risiko. Koordinasi yang secara rutin telah dilakukan dengan Komite GCG dan PMR di tahun 2022 adalah Koordinasi Bulanan dan Koordinasi Triwulanan. Adapun topik yang dibahas dalam koordinasi tersebut diantaranya meliputi Usulan Profil Risiko RKAP, Hasil *Monitoring* Profil Risiko Triwulanan dan hal-hal lainnya yang menjadi perhatian Direksi dan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi berpandangan bahwa kecukupan sistem manajemen risiko telah berjalan memadai.

The Head Office Risk Management Group regularly conducts meetings with the GCG and RMM Committee in order to coordinate the plans and monitoring process of the Company's Risk Management. The coordination results are set forth in the meeting minutes to be followed up by the Risk Management Group. Coordination was routinely carried out with the GCG and RMM Committee in 2022 through Monthly Coordination and Quarterly Coordination. The topics discussed during this coordination included the Proposed RKAP Risk Profile, Quarterly Risk Profile Monitoring Results, and other matters of concern to the Board of Commissioners and Board of Directors. The Board of Commissioners and Board of Directors are of the opinion that the risk management system is adequate.

PERKARA HUKUM

LEGAL CASES

Tabel Perkara Hukum
Legal Cases

No.	Perkara Penting Litigation	Jumlah Amount		
		Perdata Civil	Pidana Criminal	Hubungan Industrial Industrial Relations
1.	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Completed (had permanent legal force)	20	-	2
2.	Dalam proses penyelesaian In the process of completion	35	-	2
Total		**55**	**-**	**4**

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERUSAHAAN LEGAL CASES FACED BY THE COMPANY

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

No	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit	Kasus Posisi/Status Penyelesaian Position Case/ Settlement Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Amount of Lawsuit	Sanksi yang dikenakan Sanctions Imposed	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan Impact on the Company's condition
1	Perkara Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh PT Metito Indonesia di Pengadilan Negeri Medan dengan nomor register perkara 281/Pdt.G/2019/PN Mdn kepada PT Pelindo terkait dengan Kerja sama Operasi Pengusahaan Air Minum di Pelabuhan Belawan, Dumai, dan Tanjung Balai Karimun. The default lawsuit filed by PT Metito Indonesia at the Medan District Court with case register number 281/Pdt.G/2019/PN Mdn to PT Pelindo related to the Drinking Water Operation Cooperation at the Ports of Belawan, Dumai, and Tanjung Balai Karimun.	**Tingkat Pertama:** PT Pelindo kalah **Tingkat Banding:** PT pelindo Kalah PT Pelindo telah mengajukan Kasasi sebagaimana Akta Pernyataan Kasasi Nomor Kasasi Nomor: 85/Pdt/Kasasi/2021/PN.Mdn pada tanggal 7 Oktober 2021. **Tingkat Kasasi** Telah diterima Putusan Mahkamah Nomor 1850K/Pdt/2022 Tanggal 18 Juli 2022 yang pada inti Amar Putusannya Menolak Permohonan Kasasi dari PT Pelindo dan PT Metito Indonesia. **First Level:** PT Pelindo lost **Appeal Level:** PT Pelindo lost PT Pelindo has filed a Caszation as stated in the Caszation Deed Number: 85/Pdt/Kasasi/2021/PN.Mdn on October 7, 2021. **Caszation Level** Court Decision Number 1850K/Pdt/2022 dated July 18, 2022 has been received, in which the core of the verdict rejects the caszation request from PT Pelindo and PT Metito Indonesia.	PT Pelindo berpotensi membayar Rp24.560.623.050,62 kepada PT Metito Indonesia atas pembelian dan pembayaran fasilitas milik pembanding yang telah di tanam di pelabuhan Dumai apabila dinyatakan kalah dalam Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. PT Pelindo has the potential to pay Rp24,560,623,050.62 to PT Metito Indonesia for the purchase and payment of the appellant's facilities that have been planted at the port of Dumai if it is declared defeated in a Court Decision with permanent legal force.	-	-

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

No	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit	Kasus Posisi/Status Penyelesaian Position Case/ Settlement Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Amount of Lawsuit	Sanksi yang dikenakan Sanctions Imposed	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan Impact on the Company's condition
2	Gugatan PT Artha Sempana kepada PT Pelindo (Dahulu PT Pelindo II) selaku Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang pada intinya mengklaim sebagai pemilik atas tanah yang terletak di Jalan Lodan No. 43, Kelurahan Ancol, kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, seluas ± 5.148 M^2 yang semula telah disewa dari Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa berdasarkan Perjanjian yang telah berakhir pada 6 Agustus 2012 yang merupakan bagian tanah HPL yang dikelola Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa. PT Artha Sempana's lawsuit against PT Pelindo (Formerly PT Pelindo II) as Defendant I at the North Jakarta District Court which essentially claims to be the owner of land located at Jalan Lodan No. 43, Ancol Village, Penjaringan sub-district, North Jakarta City, covering an area of ± 5,148 M^2 which was originally leased from Sunda Kelapa Port Branch based on an Agreement that expired on August 6, 2012 which is part of HPL land managed by Sunda Kelapa Port Branch.	**Tingkat Pertama:** PT Pelindo menang **Tingkat Banding:** PT Pelindo menang PT Artha Sempana mengajukan Kasasi atas Putusan Banding pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan PT Pelindo Telah menyampaikan Kontra memori Kasasi pada tanggal 25 Januari 2022. **Tingkat Kasasi** Telah diterima Putusan Mahkamah Agung Nomor 3200K/Pdt/2022 dengan Amar Putusan yang pada intinya Menolak Permohonan Pemohon Kasasi (PT Artha Sempana) (PT Pelindo Menang) dan Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap *(In Kracht Van Gewijsde).* **First Level:** PT Pelindo won **Appeal Level:** PT Pelindo won PT Artha Sempana filed an Caszation against the Appeal Decision of the DKI Jakarta High Court and PT Pelindo has submitted a Counter-memory of Caszation on January 25, 2022. **Caszation Level** Supreme Court Decision Number 3200K/Pdt/2022 has been received with a verdict that essentially rejects the application of the Caszation Petitioner (PT Artha Sempana) (PT Pelindo won) and the verdict has been legally binding (In Kracht Van Gewijsde).	PT Pelindo berpotensi membayar kehilangan aset seluas 5.143 M^2 di Regional 2 Sunda Kelapa apabila dinyatakan kalah dalam Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap PT Pelindo has the potential to pay for the loss of assets covering an area of 5,143 M^2 in Regional 2 Sunda Kelapa if it is declared defeated in a Court Decision with permanent legal force.	-	-

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Legal Cases Faced by the Company

No	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit	Kasus Posisi/Status Penyelesaian Position Case/ Settlement Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Amount of Lawsuit	Sanksi yang dikenakan Sanctions Imposed	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan Impact on the Company's condition
3	Perkara Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Manado dengan nomor register perkara 384/pdt.G/2017/PN.Mnd antara Penggugat (Makis Sasambe/ PT Dian Osiania) Tergugat (PT Pelindo IV) terkait ganti rugi yang dialami Penggugat. Civil Lawsuit at Manado District Court with case register number 384/pdt.G/2017/PN.Mnd between the Plaintiff (Makis Sasambe/ PT Dian Osiania) Defendant (PT Pelindo IV) related to compenzation experienced by the Plaintiff.	**Tingkat Pertama:** PT Pelindo menang **Tingkat Banding:** PT Pelindo menang Makis Sasambe/PT Dian osiania mengajukan Kasasi atas Putusan Banding pengadilan Tinggi Manado. **First Level:** PT Pelindo won **Appeal Level:** PT Pelindo won Makis Sasambe/PT Dian Osiania filed an appeal against the Manado High Court Appeal Decision.	PT Pelindo berpotensi membayar Rp82.649.572.000 kepada Makis Sasambe/ PT Dian Osiania atas Tenggelamnya Kapal KM. Bawangung Nusa 1 dan rusaknya *Part* kapal seperti area kamar mesin, mesin bantu dan sistem jaringan elektrik, panel-panel kelistrikan, modul komputer terendam air laut sehingga semua peralatan kapal rusak. miliknya apabila PT Pelindo dinyatakan kalah dalam Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. PT Pelindo has the potential to pay Rp82,649,572,000 to Makis Sasambe/PT Dian Osiania for the sinking of KM. Bawangung Nusa 1 and damaged ship parts such as engine room area, auxiliary engine and electrical network system, electrical panels, computer modules submerged in seawater to all the damaged ship's equipment if PT Pelindo is declared defeated in a Court Decision that has permanent legal force.	-	-

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

No	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit	Kasus Posisi/Status Penyelesaian Position Case/ Settlement Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Amount of Lawsuit	Sanksi yang dikenakan Sanctions Imposed	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan Impact on the Company's condition
4	Gugatan perdata PMH yang diajukan Komura kepada Penggugat dan Turut Tergugat di pengadilan negeri Samarinda dengan Nomor register perkara 75/Pdt.G/2019/PN. Smr terkait dengan permasalahan yang diklaim oleh Penggugat bahwa Surat Tergugat Nomor 0148.03.17/ Dir/PSP tanggal 18 Maret 2017 Perihal Penangguhan Biaya TKBM adalah Tidak Sah, karena tidak melibatkan komura. Surat dari PT PSP perihal penangguhan biaya TKBM atas komponen upah dari struktur tarif resmi terhadap jasa TKBM Komura. The PMH civil lawsuit filed by Komura against the Plaintiff and the Co-Defendants in the Samarinda District Court with case register number 75/Pdt.G/2019/PN. Smr related to the issue claimed by the Plaintiff that the Defendant's Letter Number 0148.03.17/Dir/PSP dated March 18, 2017 Regarding the Suspension of TKBM Fees is Unlawful, because it does not involve Komura. Letter from PT PSP regarding the suspension of TKBM fees for the wage component of the official tariff structure for Komura's TKBM services.	**Tingkat Pertama:** PT PSP Kalah (Pelindo harus tunduk pada Putusan) **Tingkat Banding:** PT PSP Kalah (Pelindo harus tunduk pada Putusan) PT PSP Mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung telah memutus Perkara Nomor 910K/PDT/2022 Tanggal 14 Maret 2022 yang pada inti Amar Putusannya Menolak Permohonan Kasasi dari PT PSP. PT PSP Mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Oktober 2022. **First Level:** PT PSP Loses (Pelindo must comply with the Decision) **Appeal Level:** PT PSP Lose (Pelindo must comply with the Decision) PT PSP filed a caszation appeal to the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Supreme Court has decided Case Number 910K/PDT/2022 dated March 14, 2022 which in the core of its verdict rejected the caszation appeal from PT PSP. PT PSP filed an Extraordinary Legal Action for Reconsideration on October 6, 2022.	Atas perkara ini, PT Pelindo berpotensi kehilangan *sharing fee* dengan Tergugat PT PSP senilai Rp20.908.733.088 (Dua puluh milyar sembilan ratus delapan delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah). In this case, PT Pelindo has the potential to lose the sharing fee with Defendant PT PSP worth Rp20,908,733,088 (Twenty billion nine hundred eight million seven hundred thirty three thousand eighty eight rupiah).	-	-

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

No	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit	Kasus Posisi/Status Penyelesaian Position Case/ Settlement Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Amount of Lawsuit	Sanksi yang dikenakan Sanctions Imposed	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan Impact on the Company's condition
5	Gugatan Perdata PMH yang dilakukan oleh PT Pelindo (Dahulu PT Pelindo IV) kepada para Tergugat terkait dengan penguasaan sebagian Tanah HPL No.1/ Cambayya Tahun 1994 seluas 4.18 Ha. PMH Civil Lawsuit brought by PT Pelindo (Formerly PT Pelindo IV) against the Defendants related to the control of part of HPL Land No.1/Cambayya in 1994 covering an area of 4.18 Ha.	**Tingkat Pertama:** PT Pelindo kalah **Tingkat Banding:** PT Pelindo Kalah **Tingkat Kasasi:** PT Pelindo Kalah Perkara saat ini dalam tahap persiapan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. **First Level:** PT Pelindo lost **Appeal Level:** PT Pelindo lost **Caszation Level:** PT Pelindo lost The case is currently in the preparation stage for Judicial Review at the Supreme Court.	PT Pelindo berpotensi tidak bisa memanfaatkan sebagian HPL 1/ Cambayya seluas 4.18 Ha karena putusan pengadilan menyatakan sah HGB atas nama pihak lain di atas HPL PT Pelindo seluas 4.023 M^2 PT Pelindo has the potential to unable to utilize part of HPL 1/Cambayya covering 4.18 Ha because the court decision declares valid HGB on behalf of other parties on HPL PT Pelindo covering 4,023 M^2.	-	-

PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Selama tahun 2022, tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

LEGAL CASES FACED BY BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN OFFICE

During 2022, there were no legal cases being faced by Board of Commissioners and Board of Directors in office.

PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI ANAK PERUSAHAAN

LEGAL ISSUES FACING SUBSIDIARIES

No	Pokok Perkara / Gugatan Principal Case / Lawsuit	Status Penyelesaian Completion Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Claim Amount	Sanksi yang dikenakan Sanctions Imposed	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan Impact on the Company's Condition
1	Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kisaran terkait tuntutan pengembalian uang muka atas rencana pembelian tanah yang sudah dibayarkan oleh Penggugat (Pembeli) karena tidak terlaksananya pembelian sebagaimana Perjanjian pada bulan Februari 2016. PT PPK sebagai Turut Tergugat II namun terdampak dengan dimohonkannya sita jaminan atas tanah yang dibeli dari Tergugat (Perkara Nomor 70, 71 dan 72) Kronologis Singkat: Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli dan Penjual melakukan transaksi jual beli tanah yang dituangkan ke dalam sebuah perjanjian, dimana di dalamnya diwajibkan Pembeli untuk menyerahkan sejumlah DP kepada Penjual. Atas dasar tersebut, Pembeli menyerahkan DP kepada Penjual, namun ternyata Pembeli tidak dapat melanjutkan pembayaran selanjutnya, sehingga Penjual menganggap bahwa DP tersebut telah hangus. Tahun 2018, PT Prima Pengembangan Kawasan (PT PPK) membeli bidang tanah yang dimintakan sita jaminan dalam perkara nomor 70, 71 dan 72 dari Tergugat (Penjual) selaku pemilik tanah.	Dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung.	Kehilangan tanah yang dimintakan untuk sita jaminan dalam rangka pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai pihak yang kalah pada perkara nomor 70, 71 dan 72. Adapun minimal potensi kerugian adalah berdasarkan nilai gugatan materiil sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 70: Rp406.778.125,- 2. Perkara Nomor 71: Rp966.150.000,- 3. Perkara Nomor 72: Rp2.876.718.750,- Adapun terhadap perkara nomor 73, tidak berdampak/ berisiko bagi PT PPK karena tanah yang dimintakan sita jaminan bukan merupakan tanah milik PT PPK.	-	Berpotensi kehilangan tanah yang dimintakan untuk sita jaminan dalam rangka pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai pihak yang kalah pada perkara nomor 70, 71 dan 72. Adapun minimal potensi kerugian adalah berdasarkan nilai gugatan materiil sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 70: Rp406.778.125,- 2. Perkara Nomor 71: Rp966.150.000,- 3. Perkara Nomor 72: Rp2.876.718.750,- Adapun terhadap perkara nomor 73, tidak berdampak/ berisiko bagi PT PPK karena tanah yang dimintakan sita jaminan bukan merupakan tanah milik PT PPK

No	Pokok Perkara / Gugatan Principal Case / Lawsuit	Status Penyelesaian Completion Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Claim Amount	Sanksi yang dikenakan Sanctions Imposed	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan Impact on the Company's Condition
	Civil lawsuit at the Kisaran District Court related to demands for refund of down payment for land purchase plan paid by the Plaintiff (Buyer) due to non-implementation of the purchase as agreed in February 2016. PT PPK as Co-Defendant II but affected by the request for collateral confiscation of land purchased from the Defendant (Case Numbers 70, 71 and 72) Brief Chronology: In 2016, the Plaintiff and the Defendant as the Buyer and Seller made a land sale and purchase transaction as outlined in an agreement, in which the Buyer was required to submit an amount as DP to the Seller. On this basis, the Buyer submits the DP to the Seller, but it turns out that the Buyer cannot continue with further payments, so the Seller considers that the DP has been forfeited. In 2018, PT Prima Pembangunan Kawasan (PT PPK) purchased the plots of land that were requested for collateral confiscation in case numbers 70, 71 and 72 from the Defendant (Seller) as the land owner.	In the examination at the cassation level at the Supreme Court.	Loss of land requested for collateral confiscation in order to fulfill the Defendant's obligations as the losing party in cases number 70, 71 and 72. The minimum potential loss is based on the value of the material lawsuit as follows: 1. Case Number 70: Rp406,778,125 2. Case Number 71: Rp966,150,000 3. Case Number 72: Rp2,876,718,750 For case number 73, it has no impact/risk for PT PPK as the land for which the collateral is requested is not land belonging to PT PPK.		Potential loss of land requested as collateral in order to fulfill the Defendant's obligations as the losing party in case numbers 70, 71 and 72. The minimum potential loss is based on the value of the material lawsuit as follows: 1. Case Number 70: Rp406,778,125 2. Case Number 71: Rp966,150,000 3. 3Case Number 72: Rp2,876,718,750 As for case number 73, it has no impact/risk for PT PPK as the land for which the collateral is requested is not land belonging to PT PPK.

SANKSI ADMINISTRATIF YANG DIKENAKAN KEPADA PERUSAHAAN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI OLEH OTORITAS PASAR MODAL DAN OTORITAS LAINNYA

Selama tahun 2022, tidak terdapat Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Perseroan akan mengungkapkan informasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. Pengungkapan informasi kepada Publik dan *Stakeholders* lainnya dilakukan secara wajar, dengan memperhatikan klasifikasi informasi, kepentingan Perseroan dan kebutuhan pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap jajaran Perseroan tidak diperkenankan melakukan pengungkapan informasi yang bertentangan dengan peraturan dan etika bisnis, antara lain:

1. Mengungkapkan informasi yang salah;
2. Mengungkapkan informasi yang tidak seluruhnya benar;
3. Mengungkapkan informasi yang tidak lengkap;
4. Perseroan melarang penggunaan informasi oleh Orang Dalam, termasuk data/informasi yang berasal dari Anak Perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek dan belum diungkap ke publik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau orang lain secara tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Perseroan melarang memperbincangkan tentang informasi rahasia dengan keluarga atau pihak di luar Perseroan, atau membicarakannya di tempat-tempat umum di luar lingkungan Perseroan;
6. Pengungkapan Informasi Biasa dapat dilakukan oleh setiap jajaran Perseroan;
7. Pengungkapan Informasi Terbatas kepada pihak lain dapat dilakukan oleh Pejabat di bawah Direktur terkait atau Pejabat lainnya yang secara khusus ditunjuk oleh Direksi;
8. Pengungkapan Informasi Rahasia kepada pihak lain dapat dilakukan, di mana Direktur atau Pejabat Perseroan dapat ditugasi oleh Direksi untuk meminta persetujuan tertulis dari Direktur Utama atau Direktur terkait;
9. Informasi yang belum terklasifikasi tidak dapat diungkapkan pihak lain sebelum informasi tersebut ditetapkan klasifikasinya oleh Direksi.

Pengungkapan informasi Perseroan harus memperhatikan tingkat *urgency* dan manfaat bagi Perseroan. Informasi Biasa Perseroan yang dipublikasikan dapat diperoleh atau diakses dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Sebagai bentuk pelaksanaan keterbukaan informasi Perseroan kepada para pemangku kepentingan maupun masyarakat umum, Perseroan telah menyediakan informasi secara tepat waktu, relevan, memadai, jelas, akurat, dan mudah diakses melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS IMPOSED ON THE COMPANY, MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS BY CAPITAL MARKET AUTHORITIES AND OTHER AUTHORITIES

During 2022, there were no Administrative Sanctions Imposed on the Company, Members of Board of Commissioners and Board of Directors by the Capital Market Authority and Other Authorities

ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

The Company discloses complete, accurate and timely information to Shareholders and Board of Commissioners. Disclosure of information to the Public and other Stakeholders is carried out reasonably, taking into account the classification of information, the interests of the Company and the needs of interested parties in accordance with applicable regulations. Each line of the Company is not allowed to disclose information that is contrary to regulations and business ethics, including:

1. Disclosing false information;
2. Disclosing information that is not entirely correct;
3. Disclosing incomplete information;
4. The Company prohibits the use of information by Insiders, including data/information originating from Subsidiaries that have been listed on the Stock Exchange and have not been disclosed to the public, with the intention of benefiting themselves, groups, or others illegally and contrary to applicable laws and regulations;
5. The Company prohibits discussing confidential information with family or parties outside the Company, or discussing it in public places outside the Company;
6. Disclosure of Ordinary Information can be done by every line of the Company;
7. Disclosure of Restricted Information to other parties may be made by Officers under the relevant Director or other Officers specifically appointed by Board of Directors;
8. Disclosure of Confidential Information to other parties may be made, where a Director or Officer of the Company may be assigned by the Board of Directors to seek written approval from President Director or relevant Director;
9. Unclassified information cannot be disclosed to other parties before the information is classified by Board of Directors.

The disclosure of the Company's information must pay attention to the level of urgency and benefits for the Company. The Company›s published Ordinary Information can be obtained or accessed quickly and on time, at low cost, and in a simple manner.

As a form of implementation of the Company's information disclosure to stakeholders and the general public, the Company has provided information in a timely, relevant, adequate, clear, accurate, and easily accessible manner through various media, both print and electronic media.

Kantor Pusat | Head Office
Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok
Jakarta Utara | North Jakarta, 14310, Indonesia
Telp : 021 4301080
Email : info@pelindo.co.id
Web : www.pelindo.co.id

Group Head Sekretariat Perusahaan
Group Head Corporate Secretariat
Ali Mulyono
Email: corp_sec@pelindo.co.id
Facebook : BUMN Pelabuhan Indonesia
Twitter : @indonesiaport
Instagram : @pelindo
Youtube : Pelindo

SIARAN PERS

PRESS CONFERENCE

No.	Tanggal Date	Siaran Pers Press Release
1	4 Januari 2022 January 4, 2022	Perkuat Bisnis, Pelindo Lakukan Serah Operasi dan *Inbreng* Saham ke *Subholding* Strengthening Business, Pelindo Handed Over Operation and Share Inbreng to Subholding
2	5 Januari 2022 January 5, 2022	Pelindo Multi Terminal Resmi Operasikan Terminal Pelabuhan Dumai Pelindo Multi Terminal Officially Re-Operates Dumai Port Terminal
3	9 Januari 2022 January 9, 2022	Pelindo Sinergikan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung dengan PTPN III dan KAI Pelindo Synergizes Kuala Tanjung Multipurpose Terminal with PTPN III and KAI
4	13 Januari 2022 January 13, 2022	Pelindo Tiadakan Denda Pelayanan Pemanduan Pelindo Eliminates Fines for Guiding Services
5	27 Januari 2022 January 27, 2022	Selaraskan Visi Pasca Merger, Pelindo Gelar Rakernas Harmonize Vision After Merger, Pelindo Held National Meeting
6	28 Januari 2022 January 28, 2022	Pelindo Teken Empat Perjanjian Kerja Sama Pandu-Tunda Pelindo Signed Four Pilot-Delay Cooperation Agreements
7	31 Januari 2022 January 31, 2022	Rakor TJSL Kementerian BUMN, Pelindo Prioritaskan Program Pendidikan, Lingkungan dan UMK Ministry of SOEs TJSL Coordination Meeting, Pelindo Prioritizes Education, Environment, and MSE Programs
8	3 Februari 2022 February 3, 2022	Pelindo Multi Terminal Resmi Operasikan Belawan dan Tanjung Intan Pelindo Multi Terminal Officially Operates Belawan and Tanjung Intan
9	8 Februari 2022 February 8, 2022	Dukung Kelancaran Logistik, Akses Tol Makassar New Port Siap Dibangun Supporting Smooth Logistics, Makassar New Port Toll Access is Ready to be Built
10	9 Februari 2022 February 9, 2022	Pelindo Berkomitmen Dukung KPK dalam Pelaporan Harta Kekayaan Pelindo is Committed to Support KPK in Asset Reporting
11	21 Februari 2022 February 21, 2022	Pelindo, KAI dan Pos Indonesia Sinergi Perkuat Layanan Logistik Pelindo, KAI and Pos Indonesia Synergize to Strengthen Logistics Services
12	2 Maret 2022 March 2, 2022	Pelindo *Inbreng* Saham *Subholding* Logistik dan Pengembangan Hinterland Pelindo Inbreng Shares of Logistics Subholding and Hinterland Development
13	3 Maret 2022 March 3, 2022	Pelindo Multi Terminal Perluas Wilayah Operasi di Kalimantan Tengah dan Jawa Timur Pelindo Multi Terminal Expands Operation Area in Central Kalimantan and East Java
14	17 Maret 2022 March 17, 2022	Usai *Inbreng* Saham Pelindo, SPSL Komitmen Ciptakan Layanan Logistik yang Terintegrasi After Inbreng Pelindo Shares, SPSL is Committed to Creating Integrated Logistics Services
15	21 Maret 2022 March 21, 2022	Dukung GP Mandalika, Pelindo Sukses Layani Hotel Terapung Perdana Supporting Mandalika GP, Pelindo Successfully Served the First Floating Hotel
16	23 Maret 2022 March 23, 2022	Patuh Pajak, Pelindo Raih Penghargaan Wajib Pajak Besar Empat Tax Compliance, Pelindo Received Big Four Taxpayer Award
17	23 Maret 2022 March 23, 2022	Perluas Pasar, SPSL dan BDL Tandatangani MoU *Joint Marketing* Market Expansion, SPSL and BDL Signed Joint Marketing MoU
18	29 Maret 2022 March 29, 2022	Dukung Pemenuhan Energi Bersih Indonesia, Pelindo Lakukan Penataan Terminal LNG Bali Maritime *Tourism Hub* Supporting Indonesia's Clean Energy Fulfillment, Pelindo Re-arranged Bali Maritime Tourism Hub LNG Terminal

No.	Tanggal Date	Siaran Pers Press Release
19	31 Maret 2022 March 31, 2022	*Subholding* Pelindo Jasa Maritim Inisiasi Pembuatan *Crane* di Indonesia Pelindo Maritime Services Subholding Initiates Crane Manufacturing in Indonesia
20	1 April 2022 April 1, 2022	Berekspansi, Pelindo Daya Sejahtera Kelola 10.000 Pekerja TAD Pelindo *Group* Expanding, Pelindo Daya Sejahtera Manages 10,000 Pelindo Group TAD Workers
21	5 April 2022 April 5, 2022	*Subholding* Pelindo Multi Terminal Perkokoh Layanan Kepelabuhanan di Indonesia Timur Pelindo Multi Terminal Subholding Strengthens Port Services in Eastern Indonesia
22	20 April 2022 April 20, 2022	59 Terminal Penumpang Pelindo Siap Hadapi Arus Mudik Lebaran 2022 59 Pelindo Passenger Terminals are Ready to Face the 2022 Eid Homecoming Flow
23	22 April 2022 April 22, 2022	Dukung Perempuan Berkarya, Pelindo Luncurkan Komunitas Mutiara Pelindo Supporting Women's Work, Pelindo Launched Mutiara Pelindo Community
24	27 April 2022 April 27, 2022	Pelindo Lepas 2500 Peserta Mudik Bersama BUMN Pelindo Released 2500 Participants of Homecoming with SOE
25	27 April 2022 April 27, 2022	Tinjau Arus Mudik, Dua Menteri Kunjungi Terminal Penumpang Nusantara Pura Two Ministers Visited Nusantara Pura Passenger Terminal to Review Homecoming Flow
26	30 April 2022 April 30, 2022	Dukung Kelancaran Arus Mudik Pelindo Tambah Layanan Kapal Penyebrangan Supporting Smooth Homecoming Flow, Pelindo Added Ferry Service
27	1 Mei 2022 May 1, 2022	Dukung Program Mudik Pemerintah, Pelindo Layani 637 Ribu Pemudik Melalui 59 Terminal Penumpang Supporting the Government's Mudik Program, Pelindo Served 637 Thousand Travelers Through 59 Passenger Terminals
28	4 Mei 2022 May 4, 2022	Antisipasi Arus Balik Lebaran 2022, Tiga Menteri Kunjungi Pelabuhan Panjang Anticipating the 2022 Eid Homecoming Backflow, Three Ministers Visited Panjang Port
29	10 Mei 2022 May 10, 2022	Lebaran 2022 Pelindo Layani Satu Juta Pemudik Eid 2022 Pelindo Served One Million Travelers
30	12 Mei 2022 May 12, 2022	Pelindo Catatkan Kinerja Positif Pada Triwulan I 2022 Pelindo Recorded Positive Performance in the First Quarter of 2022
31	13 Mei 2022 May 13, 2022	Tingkatkan Sinergi Logistik dan Kawasan Industri, SPSL Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Himpunan Kawasan Industri Indonesia Improve Logistics and Industrial Estate Synergies, SPSL Signed Memorandum of Understanding with the Indonesian Industrial Estate Association
32	17 Mei 2022 May 17, 2022	Optimalisasi Aset, Pelindo Pindahkan Sejumlah Peralatan Bongkar Muat Peti Kemas Asset Optimization, Pelindo Moved a Number of Container Loading and Unloading Equipment
33	28 Mei 2022 May 28, 2022	Pelindo Berikan Relaksasi Bagi Pelanggan Terdampak Rob Semarang Pelindo provided relaxation for customers affected by Semarang Rob
34	24 Juni 2022 June 24, 2022	Kinerja Moncer Pelindo Pasca Merger Pelindo's Excellent Performance After Merger
35	29 Juni 2022 June 29, 2022	Standar Layanan Terminal Peti Kemas Jadi Prioritas Container Terminal Service Standards are a Priority
36	1 Juli 2022 July 1, 2022	Perkuat Standardisasi Layanan, SPMT Belawan terima Penetapan Terminal dari Kementerian Perhubungan Strengthen Service Standardization, SPMT Belawan received Terminal Designation from the Ministry of Transportation
37	5 Juli 2022 July 5, 2022	Majukan Pendidikan Indonesia, Pelindo Sinergi dengan Kementerian BUMN Gelar Program Kuliah Umum Advancing Indonesian Education, Pelindo Synergizes with Ministry of SOEs to Hold Public Lecture Program
38	6 Juli 2022 July 6, 2022	SPSL Kolaborasi YCH Indonesia *Smart Growth Center* di Indonesia SPSL Collaborates with YCH Indonesia Smart Growth Center in Indonesia
39	8 Juli 2022 July 8, 2022	Pelindo dan ASDP Kolaborasi Tingkatkan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pelindo and ASDP Collaborate to Improve Port Services
40	9 Juli 2022 July 9, 2022	Idul Adha 1443 H, Pelindo Salurkan Lebih dari 500 Hewan Kurban Eid al-Adha 1443 H, Pelindo Distributed More than 500 Sacrificial Animals
41	10 Juli 2022 July 10, 2022	Dukung Kelancaran Logistik Idul Adha,SPMT Belawan Bongkar Muatan Sapi Impor Australia Supporting the Logistics of Eid al-Adha, SPMT Belawan Unloaded Australian Imported Cattle

No.	Tanggal Date	Siaran Pers Press Release
42	12 Juli 2022 July 12, 2022	Pelindo Optimalkan PMN di BMTH Guna Dongkrak Ekonomi Sektor Pariwisata Pelindo Optimizes PMN in BMTH to Boost Tourism Sector Economy
43	18 Juli 2022 July 18, 2022	Arus Peti Kemas *Subholding* Pelindo Tembus 5,3 Juta TEUs Pelindo Subholding Container Flow Reached 5.3 Million TEUs
44	26 Juli 2022 July 26, 2022	Geliat SPSL Membangun Pondasi Transformasi Bisnis dan Layanan SPSL Builds the Foundation for Business and Service Transformation
45	26 Juli 2022 July 26, 2022	*Subholding* Pelindo Ambil Alih Kepemilikan Saham WIKA dan HK Pelindo Subholding Takes Ownership of WIKA and HK Shares
46	29 Juli 2022 July 29, 2022	Kinerja SPMT Tumbuh Positif Selama Semester I 2022 SPMT Performance Grew Positively During the First Semester of 2022
47	3 Agustus 2022 August 3, 2022	TJSL SPSL *Group*: "Satu Kaki Palsu untuk Sejuta Langkah" TJSL SPSL Group: "One False Leg for a Million Steps"
48	9 Agustus 2022 August 9, 2022	Presiden Joko Widodo Resmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak President Joko Widodo Inaugurated Pontianak Port Kijing Terminal
49	11 Agustus 2022 August 11, 2022	Dukung Ketahanan Nasional, Pelindo Tandatangani MoU Dengan Lemhanas Supporting National Resilience, Pelindo Signed MoU with National Defense Institute
50	16 Agustus 2022 August 16, 2022	Relawan Bakti BUMN: Bakti Pelindo Bagi Bunaken SOE Volunteers: Pelindo's Devotion to Bunaken
51	11 Agustus 2022 August 11, 2022	SPSL Group Gelar Kolaborasi untuk Dukung Percepatan Vaksinasi SPSL Group Collaborate to Support the Acceleration of Vaccination
52	16 Agustus 2022 August 16, 2022	Relawan Bakti BUMN: Bakti Pelindo Bagi Bunaken SOE Volunteers: Pelindo's Devotion to Bunaken
53	19 Agustus 2022 August 19, 2022	Pelindo Rehabilitasi 31 Hektar Kawasan Mangrove di Makassar Pelindo Rehabilitates 31 Hectares of Mangrove Area in Makassar
54	23 Agustus 2022 August 23, 2022	Dukung Pencegahan Korupsi, 13 Pelabuhan Pelindo Tandatangani Pakta Integritas SSm QC Supporting Corruption Prevention, 13 Pelindo Ports Signed SSm QC Integrity Pact
55	25 Agustus 2022 August 25, 2022	PJM Standardisasi Layanan Kapal PJM Standardizes Ship Services
56	25 Agustus 2022 August 25, 2022	Pelindo dan INA Jadikan Belawan Sebagai Pintu Gerbang Indonesia di Selat Malaka Pelindo and INA Make Belawan as Indonesia's Gateway in the Malacca Strait
57	29 Agustus 2022 August 29, 2022	Pelindo Jalin Kerja sama *Sister Port* dengan Johor Port Authority Pelindo Establishes Sister Port Cooperation with Johor Port Authority
58	2 September 2022 September 2, 2022	Manajemen Pelindo dan Port of LA Hidupkan Kembali Kerja sama Pelindo and Port of LA Management Revive Cooperation
59	5 September 2022 September 5, 2022	Jalin Silaturahmi, Manajemen Pelindo Terima Kunjungan Jampidmil Keeping in Touch, Pelindo Management Received Visit from Jampidmil
60	7 September 2022 September 7, 2022	SIG dan Pelindo Perkuat Sinergi Bidang Operasional dan Pengembangan Usaha SIG and Pelindo Strengthen Synergy in Operations and Business Development
61	19 September 2022 September 19, 2022	Perdana Sejak Pandemi, Pelabuhan Benoa Sukses Layani Laperouse Benoa Port Successfully Served Laperouse for the First time since Pandemic
62	20 September 2022 September 20, 2022	Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Cibitung-Cilincing President Jokowi Inaugurated Cibitung-Cilincing Toll Road
63	6 Oktober 2022 October 6, 2022	Setahun Merger, Pelindo Hemat Hingga Ratusan Miliar One year after merger, Pelindo saved up to hundreds of billions
64	6 Oktober 2022 October 6, 2022	Raih Kepercayaan Pasar, SPJM Standardisasi Operasi MEPS Gaining Market Trust, SPJM Standardizes MEPS Operations
65	6 Oktober 2022 October 6, 2022	Komitmen SPSL Tingkatkan *Value* Perusahaan Pasca Merger Pelindo SPSL's Commitment to Increase Company Value after Pelindo Merger

No.	Tanggal Date	Siaran Pers Press Release
66	18 Oktober 2022 October 18, 2022	Kurangi Emisi Karbon, Pelindo Manfaatkan Listrik Darat di Pelabuhan Reducing Carbon Emissions, Pelindo Utilizes Land-based Electricity at Ports
67	19 Oktober 2022 October 19, 2022	Jalin Kolaborasi, Pelindo Jasa Maritim Tandatangani MoU untuk Dekarbonisasi Pelabuhan Collaboration, Pelindo Maritime Services Signed MoU for Port Decarbonization
68	20 Oktober 2022 October 20, 2022	*Subholding* Pelindo Catat Arus Peti Kemas 8,2 Juta Teus Pelindo Subholding Recorded 8.2 Million Teus of Container Flow
69	27 Oktober 2022 October 27, 2022	Transparansi Internasional Indonesia dan Pelindo Jajaki Kolaborasi Perkuatan GCG Transparansi Internasional Indonesia and Pelindo Explore Collaboration to Strengthen GCG
70	31 Oktober 2022 October 31, 2022	Terbesar di Indonesia, CMA CGM Alexander Von Humboldt Sandar di JICT Largest in Indonesia, CMA CGM Alexander Von Humboldt Docked at JICT
71	1 November 2022 November 1, 2022	Kolaborasi BSI dan Pelindo Percepat Pertumbuhan Ekosistem Keuangan Syariah BSI and Pelindo Collaboration Accelerated the Growth of Sharia Finance Ecosystem
72	2 November 2022 November 2, 2022	PLN Sulap Pelabuhan Pelindo Jadi Pelabuhan Hijau PLN Transforms Pelindo Port into a Green Port
73	4 November 2022 November 4, 2022	Pelindo dan KBN Sinergi dalam Optimalisasi NPEA Pelindo and KBN Synergize in Optimizing NPEA
74	5 November 2022 November 5, 2022	Pelindo Resmikan Terminal Penumpang Baru di Pelabuhan Waingapu Pelindo Inaugurated New Passenger Terminal at Waingapu Port
75	9 November 2022 November 9, 2022	Komitmen Dukung G20, Pelindo Layani Pengiriman 900 Mobil Listrik di Bali Committed to Supporting G20, Pelindo Serves the Shipment of 900 Electric Cars in Bali
76	15 November 2022 November 15, 2022	Perkuat Konektivitas Indonesia, Pelindo Layani Kapal Besar Kapasitas 14 Ribu TEU Strengthening Indonesia's Connectivity, Pelindo Serves Large Vessels with a Capacity of 14 Thousand TEU
77	17 November 2022 November 17, 2022	Fokus Transformasi Pasca Merger, Kinerja Pelindo Kian Meningkat Focus on Post-Merger Transformation, Pelindo's Performance Improves
78	19 November 2022 November 19, 2022	Pelindo Gotong Royong Rehabilitasi Mangrove Nasional Pelindo Works Together to Rehabilitate National Mangroves
79	23 November 2022 November 23, 2022	Aksi Cepat Pelindo *Group* Tanggap Bencana Gempa Cianjur Pelindo Group's Quick Response to Cianjur Earthquake Disaster
80	25 November 2022 November 25, 2022	Kolaborasi BUMN, Pelindo Bantu Masyarakat Terdampak Gempa Cianjur SOE Collaboration, Pelindo Helped Communities Affected by Cianjur Earthquake
81	30 November 2022 November 30, 2022	TPK Sorong Resmi Beroperasi Non-*Stop* TPK Sorong Officially Operates Non-Stop
82	10 Desember 2022 December 10, 2022	Pelindo Resmikan Desa Adat Penglipuran sebagai Desa Binaan Pelindo Inaugurated Penglipuran Traditional Village as Assisted Village
83	14 Desember 2022 December 14, 2022	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022, Pelindo Raih Predikat Informatif Public Information Disclosure Award 2022, Pelindo Achieved the Informative Predicate
84	19 Desember 2022 December 19, 2022	Siapkan MTCC, Pelindo Multi Terminal Perkuat Program Transformasi Prepare MTCC, Pelindo Multi Terminal Strengthens Transformation Program
85	19 Desember 2022 December 19, 2022	Eksplorasi Potensi Bisnis, Pelindo Solusi Logistik Gandeng Para Pelaku Industri Logistik Exploring Business Potential, Pelindo Logistics Solutions Collaborates with Logistics Industry Players
86	20 Desember 2022 December 20, 2022	KPK Apresiasi Pelindo Dalam Aksi Pencegahan Korupsi KPK Appreciated Pelindo in Corruption Prevention Action
87	21 Desember 2022 December 21, 2022	Pelindo Pastikan Kelancaran Arus Mudik Nataru 2022/2023 Pelindo Ensurds Smooth Flow of Homecoming Flow in Nataru 2022/2023
88	30 Desember 2022 December 30, 2022	Pelindo Siapkan Antisipasi Potensi Cuaca Buruk di Pelabuhan Tanjung Emas Pelindo Prepared to Anticipate Potential Bad Weather at Tanjung Emas Port
89	31 Desember 2022 December 31, 2022	Meningkat 71,2%, Pelindo Layani 1,1 juta Penumpang Nataru 2022/2023 71.2% Increase, Pelindo Served 1.1 million Passengers for Nataru 2022/2023

TRANSPARANSI PENYAMPAIAN LAPORAN

Perseroan berkomitmen untuk mematuhi kewajiban penyampaian laporan yang bersifat insidental maupun sektoral yang dimintakan oleh Regulator, Pemegang Saham, maupun pihak lain yang memiliki hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun laporan yang telah disampaikan selama tahun 2021 antara lain:

1. Laporan Tahunan;
2. Laporan Manajemen Triwulan I, II, III, IV, dan *Audited;*
3. Laporan Kinerja TJSL Triwulan I, II, III, Laporan Tahunan, dan *Audited;*
4. Laporan Pelaksanaan *Assessment* GCG;
5. Pelaporan Pemberitaan Agenda *Setting;*
6. Laporan *Progress* Pelindo Pasca Penggabungan.

TRANSPARENCY OF REPORT SUBMISSION

The Company is committed to complying with the obligation to submit incidental and sectoral reports requested by Regulators, Shareholders, and other parties who have rights in accordance with applicable laws and regulations. The reports that have been submitted during 2021 include:

1. Annual Report;
2. Quarterly I, II, III, IV of Management Reports and Audited;
3. Quarterly I, II, III of TJSL Performance Report, Annual Report, and Audited;
4. GCG Assessment Report;
5. Agenda Setting Reporting;
6. Pelindo Post Merger Progress Report.

KODE ETIK

Pelindo menyadari akan pentingnya arti implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang dan secara berkesinambungan, tidak hanya bagi Pemegang saham (*shareholder*) namun juga untuk segenap Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) lainnya. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penerapan Pedoman Kode Etik Bisnis (*Code of Conduct*).

Pedoman Kode Etik Bisnis adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari Etika Profesional dan Etika Kerja Insan Pelindo yang memuat Panduan Perilaku Insan Pelindo, yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk dan mengarahkan kesesuaian tingkah laku dengan nilai-nilai dan budaya Perseroan dalam mencapai visi dan misi.

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penerapan Pedoman Kode Etik Bisnis bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut:
   a. Setiap Insan Pelindo memahami bahwa segala aktivitas Perusahaan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang meliputi Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Ketidakberpihakan, Kewajaran dan Terpercaya;
   b. Mendorong seluruh Insan Pelindo untuk berperilaku baik dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan;
   c. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perseroan;
   d. Membangun reputasi Perseroan lebih baik;
   e. Meminimalisir peluang terjadinya penyimpangan.
2. Tujuan penerapan Pedoman Kode Etik Bisnis bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut:
   a. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) secara profesional dan beretika dalam melakukan usaha;
   b. Sebagai panduan perilaku bagi seluruh Insan Pelindo yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas bisnis;
   c. Sebagai landasan etis untuk bertindak dan berpikir serta mengambil keputusan yang terkait dengan Perusahaan;
   d. Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan antara Insan Pelindo dan *stakeholders* lainnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan beretika, agar menjadi perusahaan yang berdaya saing tinggi.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Kode Etik Bisnis mencerminkan tindakan dan nilai-nilai yang menjadi panduan Insan Pelindo dalam berinteraksi dengan semua Pemangku Kepentingan (Karyawan, Pelanggan, Pemerintah, Vendor, dan Komunitas) untuk membangun hubungan jangka panjang yang bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman serta cara untuk melaporkan setiap pelanggaran atau ketidakjelasan terkait dengan etika profesional dan etika kerja. Kode etik Bisnis Perseroan mengatur terkait Etika Profesional dan Etika Kerja.

CODE OF CONDUCT

Pelindo realizes the importance of GCG implementation as a tool to increase value and long-term business growth on a sustainable basis, not only for shareholders but also for all other stakeholders. Therefore, the Company is committed to implementing GCG consistently, one of which is done through the implementation of Code of Conduct.

The Code of Conduct is a set of commitments consisting of the Professional Ethics and Work Ethics of Pelindo employees that contain Pelindo People' Behavioral Guidance, which is prepared to influence, shape and direct behavioral conformity with the values and culture of the Company in achieving the vision and mission.

PURPOSE AND OBJECTIVES

1. The purposes of implementing the Code of Conduct for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) are as follows:
   a. Every Pelindo People understands that all Company's activities are based on the principles of good corporate governance which include Transparency, Accountability, Responsibility, Impartiality, Fairness and Trustworthiness;
   b. Encouraging all Pelindo people to behave well in carrying out all Company's activities;
   c. Creating a healthy and comfortable working atmosphere in the Company's environment;
   d. Build a better reputation of the Company;
   e. Minimize the chance of deviation.
2. The objectives of implementing the Code of Conduct for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) are as follows:
   a. As a shared commitment to realize the vision and carry out the mission of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in a professional and ethical manner of doing a business;
   b. As a behavioral guide for all Pelindo People that must be obeyed in carrying out all business activities;
   c. As an ethical basis for acting, thinking and making decisions related to the Company;
   d. Develop harmonious, synergistic and mutually beneficial relationships between Pelindo People and other stakeholders based on sound and ethical corporate principles, in order to become a highly competitive Company.

PRINCIPLES OF CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct reflects the actions and values that guide Pelindo People in interacting with all Stakeholders (Employees, Customers, Government, Vendors, and Communities) to build long-term relationships that aim to provide information, understanding and ways to report any violations or ambiguity regarding professional ethics and work ethics. The Company's Code of Conduct regulates Professional Ethics and Work Ethics.

1. Etika Profesional
   Etika Profesional yaitu etika yang berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk memastikan kualitas dan proses yang dijalani sesuai dengan kaidah-kaidah dalam profesi serta sebagai acuan untuk berhubungan dengan *Stakeholders*. Dalam etika profesional mengatur mengenai:
   a. Hubungan dengan Pekerja
   b. Hubungan dengan Pemegang Saham
   c. Hubungan dengan Serikat Pekerja
   d. Hubungan dengan Pelanggan
   e. Hubungan dengan Vendor
   f. Hubungan dengan Kreditur
   g. Hubungan dengan Debitur
   h. Hubungan dengan Investor dan Lembaga Keuangan
   i. Hubungan dengan Pesaing
   j. Hubungan dengan Masyarakat, Komunitas dan Lingkungan
   k. Hubungan dengan Regulator dan Aparatur Pemerintah
   l. Hubungan dengan *Subholding* dan/atau Anak Perusahaan
   m. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Lain

2. Etika Kerja
   Etika Kerja yaitu sistem nilai atau norma yang digunakan dalam bekerja didasarkan pada kerja keras dan ketekunan yang diharapkan dapat meningkatkan karakter moral Insan Pelindo seperti kejujuran, keterbukaan, ketulusan dan loyalitas.
   a. Kepatuhan Terhadap Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Lainnya
   b. Benturan Kepentingan
   c. Korupsi dan Suap
   d. Pencurian dan Penyelewengan Sejenisnya
   e. Pencucian Uang
   f. Gratifikasi (Pemberian dan Penerimaan Hadiah atau Imbalan, Jamuan, Hiburan dan Donasi
   g. Kesempatan yang Sama untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi
   h. Pendokumentasian dan Pencatatan Perusahaan
   i. Integritas Laporan Keuangan
   j. Kerahasiaan Data dan/atau Informasi
   k. Media, Komunikasi, dan Penyebaran Informasi
   l. Pengelolaan Arsip
   m. Perlindungan Harta Perusahaan
   n. Pengendalian Intern
   o. Perjalanan Dinas
   p. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
   q. Aktivitas Politik dan Sosial
   r. Perilaku Etis Terhadap Sesama Pekerja

KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

Kode Etik Bisnis ini berlaku bagi seluruh Insan Pelindo yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Karyawan Pelindo.

1. Professional Ethics
   Professional Ethics, namely ethics related to the field of work in order to ensure the quality and processes carried out in accordance with the rules in the profession as well as as a reference for dealing with stakeholders. Professional ethics regulates:
   a. Relationship with Employees
   b. Relationship with Shareholders
   c. Relationship with Trade Union
   d. Relationship with Customers
   e. Relationship with Vendors
   f. Relationship with Creditors
   g. Relationship with Debtors
   h. Relationship with Investors and Financial Institutions
   i. Relationship with Competitors
   j. Relationship with Society, Community and Environment
   k. Relationship with Regulators and Government Apparatus
   l. Relationship with Sub Holding and/or Subsidiaries
   m. Relationship with Other Stakeholders

2. Work Ethics
   Work Ethics is a system of values or norms used in work based on hard work and perseverance, which is expected to improve the moral character of Pelindo People such as honesty, openness, sincerity and loyalty.

   a. Compliance with Laws, Legislations and Other Provisions

   b. Conflict of Interest
   c. Corruption and Bribery
   d. Theft and Other Misappropriation
   e. Money Laundering
   f. Gratification (Giving and Receiving of Gifts or Rewards, Meals, Entertainment and Donations)
   g. Equal Opportunity to Get Job and Promotion

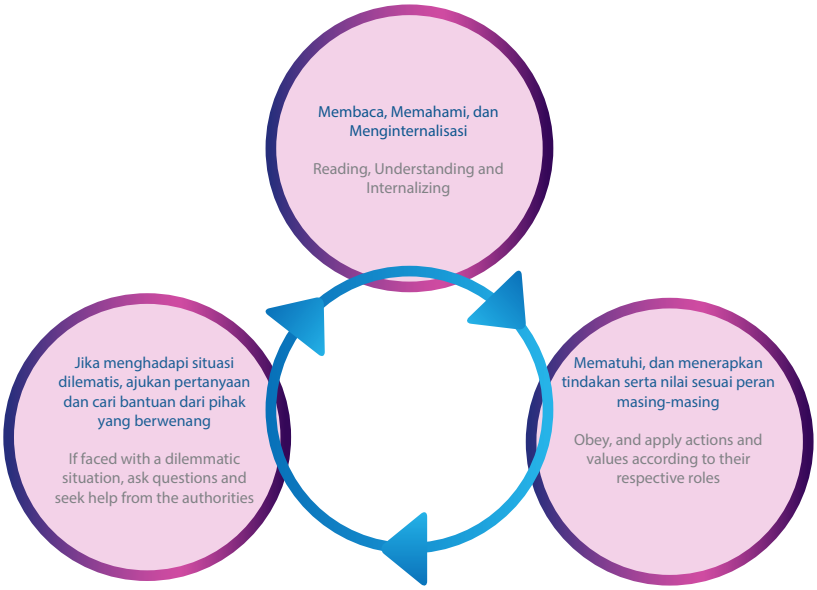
   h. Company's Documentation and Records
   i. Financial Report Integrity
   j. Confidentiality of Data and/or Information
   k. Media, Communication and Information Dissemination
   l. Archive Management
   m. Company's Assets Protection
   n. Internal Control
   o. Business trip
   p. Intellectual Property Rights (IPR)
   q. Political and Social Activities
   r. Ethical Behavior towards Fellow Workers

COMPLIANCE WITH CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct applies to all Pelindo People, i.e., Board of Commissioners, Board of Directors and all employees of Pelindo.

Setiap tahun seluruh Insan Pelindo menandatangani Pakta Integritas dan Kepatuhan Kode Etik Bisnis sebagai bentuk komitmen bersama atas kepatuhan kepada asas-asas GCG. Penandatanganan pakta integritas dan Kepatuhan Kode Etik Bisnis di Pelindo pada tahun 2022 tercapai penuh. Seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan 100% Pegawai Pelindo telah menandatangani pakta integritas melalui sistem Pelindo *Good Corporate Governance* (PGood).

Every year, all Pelindo People sign the Integrity Pact and Compliance with the Code of Conduct as a form of joint commitment to comply with GCG principles. The signing of integrity pacts and compliance with the Code of Conduct in Pelindo in 2022 was fully achieved. The entire Board of Commissioners, Board of Directors and 100% of Pelindo people have signed an integrity pact through the Pelindo Good Corporate Governance (PGood) system.



SOSIALISASI KODE ETIK

Dalam rangka membangun kultur perusahaan berbasis nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik dan *corporate culture*, maka Perseroan melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pedoman Kode Etik Bisnis kepada seluruh insan Pelindo secara berkala. Adapun kegiatan sosialisasi kode etik selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Sosialisasi penerapan GCG pada Regional 1 pada tanggal 14 Juli 2022 dan Regional 2 tanggal 31 Agustus 2022 dengan materi yang dibawakan oleh Deputi BPKP dan Direktur Gratifikasi KPK RI.
2. Sosialisasi Peraturan Direksi terkait *Board Manual*, GCG, Kode Etik, *Whistleblowing* kepada seluruh pegawai dengan disampaikan melalui sistem Pelindo *E-Office* (PEO) dan pada sistem *P-Good*.
3. Keikutsertaan PT Pelindo dalam sosialisasi SMAP 37001:2016 pada *Subholding* PT PJM pada tanggal 9 Desember 2022.

Keberadaan pedoman Kode Etik ini juga dapat dilihat pada *website* Perseroan (www.pelindo.co.id), sistem Pelindo *E-Office* (PEO) dan sistem Pelindo *Good Corporate Governance* (PGood). Sehingga seluruh *stakeholders* internal dan eksternal perusahaan dapat mengakses pedoman kode etik bisnis Pelindo setiap saat.

CODE OF CONDUCT SOCIALIZATION

In order to build a corporate culture based on the values of good corporate governance and corporate culture, the Company regularly socializes and internalizes the values contained in the Code of Conduct to all Pelindo people. The code of conduct dissemination activities during 2022 are as follows.

1. Socialization of GCG implementation in Regional 1 on July 14, 2022 and Regional 2 on August 31, 2022 with material presented by the Deputy of BPKP and Director of Gratification of KPK RI.
2. Socialization of Board of Directors Regulations related to Board Manual, GCG, Code of Conduct, Whistleblowing to all employees delivered through the Pelindo E-Office (PEO) system and on the P-Good system.
3. PT Pelindo's participation in the socialization of SMAP 37001:2016 at PT PJM Subholding on December 9, 2022.

This Code of Conduct can also be seen on the Company's website (www.pelindo.co.id), Pelindo E-Office (PEO) system and Pelindo Good Corporate Governance (PGood) system. Therefore, all internal and external stakeholders of the Company can access Pelindo's code of conduct at any time.

UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*), maka seluruh Insan Pelindo memiliki komitmen untuk:

1. Senantiasa berpikir dan berperilaku secara korporasi dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi dan/atau kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi Perseroan;
2. Senantiasa peduli dan menjaga citra baik serta reputasi Perseroan;
3. Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan;
4. Peduli dan tanggap terhadap keluhan pelanggan/mitra bisnis dan dengan segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri dan memperluas pengetahuan serta bersedia berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*) dan keterampilan serta membantu rekan kerja lainnya tanpa merasa takut tersaingi;
6. Selalu bersikap terpuji sebagai individu dan anggota masyarakat dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan citra Perseroan;
7. Menghindarkan diri dari seluruh tindakan yang dapat melanggar ketentuan dan atau menyalahgunakan wewenang;
8. Melaksanakan ibadah agama yang dianut oleh masing-masing Insan Pelindo dengan baik serta memahami dan mematuhi etika dan perilaku;
9. Bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Oleh sebab itu sebagai perwujudan Komitmen diatas maka:

1. Seluruh Insan Pelindo wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan komitmen Insan Pelindo untuk melaksanakan Pedoman Kode Etik Bisnis yang diperbaharui setiap tahun;
2. Pedoman Kode Etik Bisnis harus disosialisasikan dan dipahami oleh Insan Pelindo;
3. Pakta Integritas, Janji Pedoman Kode Etik Bisnis dan Pernyataan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris dan Direksi dibuat dan ditandatangani dalam satu rangkap dan disimpan di Sekretaris Perusahaan;
4. Pakta Integritas Pekerja Perusahaan dibuat dan ditandatangani dalam sistem *P-Good*;
5. Adapun unit kerja di Kantor Pusat (Departemen *Head* Hubungan Lembaga, Tata Kelola, Investor), Regional (Departemen Head Pelayanan SDM dan Umum), *Subholding* dan Anak Perusahaan (SVP Sekretariat Perusahaan) melakukan *monitoring*, membuat laporan dan rekapitulasi Pekerja Perusahaan yang melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas di wilayah kerjanya masing-masing setiap tahunnya, untuk kemudian disampaikan kepada *Group Head* Sekretariat Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
6. Seluruh Pimpinan Unit Kerja sampai dengan pimpinan 2 (dua) level di bawah nya bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan Pedoman Kode Etik Bisnis ini.

CODE OF CONDUCT IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT EFFORTS

In order to realize the Company's commitment to stakeholders, all Pelindo People are committed to:

1. Always think and behave in a corporate manner by prioritizing the interests of the Company above personal and/or group interests and to provide the best for the Company;
2. Always care and maintain the good image and reputation of the Company;
3. Carry out duties professionally with full responsibility and uphold integrity, honesty, and the spirit of togetherness;
4. Care and respond to customer/business partner complaints and immediately follow up in accordance with applicable regulations;
5. Have a strong motivation to develop themselves and expand their knowledge and are willing to share knowledge and skills as well as help other co-workers without fearing competition;
6. Always be commendable as an individual and a member of the community and not commit any disgraceful act that could degrade the Company's image;
7. Avoid all actions that may violate the provisions and or abuse authority;
8. Carry out religious worship adhered to by each Pelindo People properly, and understand and comply with ethics and behavior;
9. Work in accordance with the principles of Good Corporate Governance.

As an embodiment of the above commitments:

1. All Pelindo People are required to sign the Integrity Pact which are the commitments of Pelindo People to implement the Code of Conduct that is updated every year;
2. The Code of Conduct must be socialized and understood by Pelindo People;
3. Integrity Pact, Promises of Code of Business Ethics Guidelines and Statements of Conflicts of Interest of the Board of Commissioners and Directors are made and signed in one copy and kept in the Corporate Secretary;
4. The Integrity Pact are drawn up and signed in the P-Good system;
5. Work units at the Head Office (Department Head of Institutional Relations, Governance, Investors), Regional (Department Head of Human Capital and General Affairs), Subholdings and Subsidiaries (SVP of Corporate Secretariat) monitor, make reports and recapitulate employees who sign the Integrity Pact in their respective working area every year, to then be submitted to Group Head Corporate Secretariat of PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
6. All Heads of Work Units up to 2 (two) levels below are responsible for and set an example for their subordinates for the implementation of this Code of Conduct.

JENIS SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

TYPES OF SANCTIONS FOR VIOLATION OF THE CODE OF CONDUCT

Jenis Pelanggaran Type of Violation	Sanksi Sanction
Ringan Mild	Teguran Tertulis Teguran Lisan Pernyataan Tidak Puas Pemotongan Tunjangan posisi 5% selama 2 bulan Written Reprimand Oral Reprimand Statement of Dissatisfaction Position allowance deduction of 5% for 2 months
Sedang Moderate	Pemotongan Penghasilan sebesar 20% selama 3 bulan Income deduction of 20% for 3 months
Berat Severe	Penurunan Kelas Jabatan 3 Tingkat Lebih Rendah Pemutusan Hubungan Kerja Demotion to 3 Levels Lower Termination of Employment

JUMLAH PELANGGARAN DAN SANKSI YANG DIBERIKAN

NUMBER OF VIOLATIONS AND SANCTIONS IMPOSED

No.	Kewenangan Proses Disiplin Disciplinary Process Authority	Indikasi Pelanggaran tahun 2022 Indication of Violations in 2022						
		Ringan Mild	Sedang Moderate	Berat Severe	Proses Process	Tidak Terbukti Not Proven	Jumlah Amount	Sanksi Sanction
1	Kantor Pusat Head Office	0	0	3	1	0	4	Berat : PHK Severe: Termination of Employment
2	Regional 1	0	1	4	0	0	5	Ringan: Pemotongan Tunjangan posisi 5% selama 2 bulan MIld: Position allowance deduction of 5% for 2 months
3	Regional 2	0	0	0	1	0	1	Sedang: Pemotongan Penghasilan sebesar 20% selama 3 bulan Moderate: Income deduction of 20% for 3 months
4	Regional 3	48	10	5	0	0	63	Ringan: Teguran Lisan Berat: Penurunan Kelas Jabatan 3 Tingkat Lebih Rendah Mild: Verbal Reprimand Severe: Demotion 3 Levels Lower
5	Regional 4	2	1	10	0	0	0	-
6	SPMT	0	0	0	0	0	0	-
7	SPTP	5	0	0	0	0	5	Ringan: Teguran Tertulis, Teguran Lisan, Pernyataan Tidak Puas Mild: Written Reprimand, Oral Reprimand, Statement of Dissatisfaction
8	SPJM	23	3	0	0	0	26	Ringan: Teguran Tertulis, Teguran Lisan, Pernyataan Tidak Puas Mild: Written Reprimand, Oral Reprimand, Statement of Dissatisfaction
9	SPSL	0	0	0	0	0	0	-

BUDAYA PERUSAHAAN

Uraian terkait Budaya Perusahaan disampaikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG BERBASIS KINERJA

Perseroan tidak memiliki kebijakan kompensasi jangka panjang berbasis kinerja. Pelindo bukan merupakan Perusahaan Terbuka sehingga tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP).

KEBIJAKAN *INSIDER TRADING*

Pelindo bukan merupakan Perusahaan terbuka sehingga tidak terdapat kepemilikan saham yang di perdagangkan pada bursa efek sehingga perseroan belum memiliki kebijakan *insider trading*.

KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SERTA PELAKSANAANNYA

Pelindo bukan merupakan Perusahaan Terbuka sehingga tidak terdapat informasi Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System (WBS) atau yang disebut Pelindo Bersih diperkenalkan untuk memperkuat penerapan dalam rangka memberikan kesempatan kepada seluruh insan Pelindo dan *stakeholders* lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai–nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan serta dengan niat baik.

Pelindo Bersih adalah sebuah program nyata dari manajemen Pelindo beserta seluruh cabang pelabuhan dan grup perusahaan untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi dan pemerasan.

PENYAMPAIAN DAN MEDIA LAPORAN PELANGGARAN

Pelindo menyediakan aplikasi/sistem untuk melaporkan tindakan curang, korupsi, dan pemerasan bagi seluruh *stakeholder* yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang dilakukan oleh insan Pelindo, cabang pelabuhan, dan grup perusahaan melalui sistem yang independen. Melalui sistem ini, Pelindo dapat menjadi perseroan yang lebih baik dan mempunyai daya saing baik di tingkat nasional dan internasional. Bagi insan Pelindo atau *stakeholder* yang melaporkan akan diberikan perlindungan, baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun dari kemungkinan tindakan balasan oleh si terlapor.

CORPORATE CULTURE

The description of Corporate Culture is presented in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

PERFORMANCE-BASED LONG-TERM COMPENZATION POLICY

The Company does not have a long-term performance-based compenzation policy. Pelindo is not a Public Company, hence does not have a Share Ownership Program by Employees and/or Management (ESOP/MSOP).

INSIDER TRADING POLICY

Pelindo is not a public Company, there is ownership of shares traded on the stock exchange securities, so that the company does not yet have an insider policy
trading.

POLICY ON INFORMATION DISCLOSURE OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS SHARE OWNERSHIP AND THE IMPLEMENTATION

Pelindo is not a Public Company, hence there is no information on share ownership of members of Board of Directors and members of Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the ownership or any changes in the ownership of shares of Public Company.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System (WBS) or what is known as Pelindo Bersih (Clean Pelindo) was introduced to strengthen its implementation in providing opportunities for all Pelindo people and other stakeholders to submit report regarding indications of violations of applicable ethical values, based on accountable evidence and with good intentions.

Pelindo Bersih is a real program from Pelindo management and all port branches and corporate groups to create a workplace that is clean from fraud, corruption and extortion.

VIOLATION REPORT SUBMISSION AND MEDIA

Pelindo provides an application/system to report fraudulent acts, corruption, and extortion for all stakeholders who have information and wish to report an act indicating a violation committed by Pelindo people, port branches, and corporate groups through an independent system. Through this system, Pelindo can become a better Company and have competitiveness both at the national and international level. Pelindo people or stakeholders who report will be given a protection, both in terms of identity confidentiality and from possible retaliation by the reported party.

Sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) adalah sistem yang digunakan untuk menerima, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan.

The whistleblowing system is a system used to receive, process and follow up as well as make report on information submitted by the whistleblower regarding violation that occurred within the Company.



Telah dilakukan penyampaian surat terkait tindak lanjut pelaksanaan penerapan *single* WBS untuk Pelindo *Group* dimana di dalam nya juga terdapat perintah untuk melakukan publikasi terkait larangan pungli, praktik suap seta gratifikasi No. SK.01.01/21/12/1/HLTI/WDUT/PLND-21 tanggal 21 Desember 2021. Sehingga saluran WBS Pelindo *Group* terkelola menjadi satu pintu di Kantor Pusat.

A letter has been submitted regarding the follow-up to the implementation of single WBS for Pelindo Group, in which there is also an instruction to publish the prohibition of extortion, bribery practices and gratification No. SK.01.01/21/12/1/HLTI/WDUT/PLND-21 dated December 21, 2021. Thus, Pelindo Group WBS channel is managed as one door at the Head Office.

PERLINDUNGAN BAGI *WHISTLEBLOWER*

1. Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor, kecuali apabila pengungkapan tersebut diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib;
2. Pelaporan yang dilakukan tanpa identitas akan tetap di proses, namun demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu kesungguhan isi laporan, kredibilitas, dan bukti-bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk melakukan konfirmasi pelaporan;
3. Perseroan menetapkan sanksi atas penyalahgunaan saluran WBS dan ditegaskan bahwa para pihak yang menyampaikan laporan berupa fitnah atau laporan palsu akan diberikan sanksi termasuk proses hukum dan tidak memperoleh baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan Pelapor;

WHISTLEBLOWER PROTECTION

1. The Company guarantees the confidentiality of the whistleblower's identity, except if the disclosure is required related to the report or investigation conducted by the authorities;
2. Report made without an identity will still be processed, however, the seriousness of the report content, credibility, and evidence submitted, as well as the possibility to confirm the report will be considered;
3. The Company stipulates sanctions for the misuse of WBS channel and emphasizes that parties who submit report in the form of slander or false report will be subject to sanctions including legal processes and does not receive either guarantees of confidentiality or Whistleblower protection;

4. Perseroan menjamin terhadap pelapor dari segala tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, intimidasi, hukuman maupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun atas kesaksian dan/atau pelaporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian dan/atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;
5. Perseroan memberikan perlindungan kepada pelapor atas kemungkinan dilakukannya hal-hal sebagai berikut:
   a. Pemecatan yang tidak adil;
   b. Penurunan jabatan atas pangkat dengan alasan yang tidak jelas;
   c. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*);
6. Perseroan menjamin kepentingan dan memberikan pendampingan hukum bagi pelapor pada saat sebelum dan setelah selesainya proses kasus terkait hal yang dilaporkan;
7. Perseroan memberikan hak kepada pelapor untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan kepentingan dan pendampingan hukum sejauh tidak bertentangan dengan peraturan Perseroan.

PENANGANAN PENGADUAN

Laporan dapat ditindaklanjuti bila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Termasuk pada kriteria jenis-jenis pelanggaran yang telah ditentukan;
2. Laporan merupakan tindakan pelanggaran yang melibatkan Insan Pelindo;
3. Laporan mempunyai dampak terhadap kinerja dan reputasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
4. Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan memprioritaskan tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh Pelapor yang menyebutkan identitas serta dilengkapi dengan 2 (dua) alat bukti pendukung.

Persyaratan laporan yang disampaikan sedikitnya memuat hal-hal di bawah ini:
1. Identitas Pelapor;
   Pelapor harus menyebutkan identitasnya agar Pelapor memperoleh perlindungan dari manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan akan mempermudah tindak lanjut laporan dalam hal dibutuhkan data tambahan. Pelapor dapat tidak menyertakan identitas (*anonimus*) tetapi untuk kebutuhan verifikasi laporan dibutuhkan identitas pelapor.
2. Uraian pelanggaran yang dilakukan dengan dalam pelaporan sedikitnya memuat:
   a. Permasalahan: Pelanggaran yang diadukan merupakan pelanggaran yang terkait dengan aktivitas perusahaan dan atau anak perusahaan
   b. Lokasi kejadian;
   c. Waktu kejadian.
3. Data terlapor dan pihak lain yang terlibat serta unitnya (bila ada);
4. Dokumen pendukung dan/atau bukti lainnya;
5. Pengaduan yang akan diproses lebih lanjut adalah kejadian/peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun

4. The Company guarantees the whistleblower against all lawsuits, both criminal and civil, intimidation, punishment or unpleasant actions from any party for the testimony and/or reporting that will be, is being or has been given, unless the testimony and/or report is not submitted with good intention;
5. The Company provides protection to the whistleblower against the possibility of the following things:
   a. Unfair dismissal;
   b. Demotion of rank for unclear reasons;
   c. Adverse records in his/her personal file record;
6. The Company guarantees the interests and provides legal assistance to the whistleblower before and after the completion of the case process related to the reported matter;
7. The Company grants the right to the whistleblower to participate in the process of selecting and determining the form of interest protection and legal assistance as long as does not conflict with Company regulations.

COMPLAINT HANDLING

A report can be followed up if the following criteria is fulfilled:
1. Included in the criteria for the types of violations as have been determined;
2. The report is an act of violation involving Pelindo People;
3. The report has an impact on the performance and reputation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
4. The management of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) will prioritize the follow-up to the report submitted by the Whistleblower that is stating his/her identity and equipped with 2 (two) supporting evidences.

The requirements for the report submitted should at least contain the following:
1. Whistleblower Identity;
   The Whistleblower must state his/her identity so that the Whistleblower can get protection from the management of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and will facilitate the follow-up of the report if additional data is required. The whistleblower may not include an identity (anonymous) but for the purposes of report verification, the whistleblower's identity is required.
2. The description of violation committed in the report shall at least contain:
   a. Problem: The reported violation is a violation related to the activities of the Company and or its subsidiaries
   b. Incident location;
   c. Incident time.
3. Data of the reported and other parties involved and their units (if any);
4. Supporting documents and/or other evidence;
5. Complaints that will be further processed are incidents/events that occurred within the last 3 (three) years from

terakhir terhitung sejak tanggal diterimanya laporan oleh Komite Pelindo Bersih.

Bukti-bukti sebagaimana point 3 dan 4 meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
1. Bukti tertulis berupa Dokumen, surat, kwitansi atau Nota tagihan yang dituangkan di atas kertas ataupun dalam bentuk data atau Surat elektronik yang dapat dibaca dan dibuktikan secara hukum;
2. Bukti Tidak Tertulis berupa saksi, Rekaman Suara (Audio), Rekaman Visual atau gambar (video);
3. Bukti lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DILAPORKAN

Pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah semua perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perusahaan, kode etik, melawan hukum dan segala perbuatan di luar ketentuan yang dapat mengakibatkan kerugian secara materiel maupun penurunan citra perusahaan.

Kategori pelanggaran meliputi:
1. **Tindakan Curang (Tidak Adil)**
   Adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok Insan Pelindo dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ataupun menggerakkan orang lain untuk memberikan keuntungan kepadanya dengan cara–cara yang tidak benar dan melawan hukum.

   Contoh dari tindakan curang :
   a. Menyetujui pemberian order kepada *supplier* yang memiliki "hubungan istimewa";
   b. Membayar atau tidak membayar vendor yang memiliki "hubungan istimewa", yang secara langsung-tidak langsung memberi keuntungan komersial atau bentuk manfaat kompetitif lainnya bagi pada vendor lain;
   c. Merekrut staf yang memiliki "hubungan istimewa" dengannya, sementara ada kandidat yang memiliki kualifikasi yang lebih baik.
2. **Korupsi**
   Tindakan Insan Pelindo, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya orang orang yang memiliki "hubungan istimewa" dengannya, dengan menyalah gunakan jabatan dan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya.

   Contoh dari tindakan korupsi :
   a. Menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
   b. Menerima keuntungan (contohnya uang, hadiah, keramah-tamahan) yang bertentangan dengan tanggung jawab jabatan;
   c. Menggunakan anggaran, harta, jasa pelayanan dan informasi perusahaan dan anak perusahaan untuk aktivitas diluar kedinasan;

the receipt date of the report by Pelindo Bersih Committee.

The evidence as referred to in point 3 and 4 includes, but is not limited to the following:
1. Written evidence in the form of Documents, letters, receipts or billing notes that are written on paper or in the form of data or electronic letter that can be read and legally proven;
2. Unwritten Evidence in the form of witnesses, Sound Recordings (Audio), Visual Recordings or pictures (video);
3. Other evidence in accordance with applicable regulations.

TYPES OF VIOLATIONS THAT CAN BE REPORTED

Violations that can be reported are all acts that deviate or conflict with company regulations, code of conduct, against the law and all actions outside the provisions that can result in material losses or a decrease in the company's image.

The categories of violation are:
1. **Fraudulent Action**
   It is an act committed by individual/a group of Pelindo People for personal benefit or others by using false identity or false dignity by trickery or lies or moving others to benefit him or her in prohibited and unlawful ways.

   Example of fraudulent action:
   a. Approve an order to supplier with special relationship.
   b. Paying or not paying vendors who have a "special relationship", which directly or indirectly provides a commercial advantage or other form of competitive advantage to other vendors;
   c. Recruit staff that has a "special relationship" with them while there are candidates with better qualifications.
2. **Corruption**
   It is an act of Pelindo People that improperly and illegally enriches or enriches those who have a "special relationship", by abusing positions and powers.

   Example of corruption act:
   a. Abusing power for personal or group interests;
   b. Receiving benefits (eg money, gifts, hospitality) contrary to the responsibilities of his/her position;
   c. Using budgets, assets, services and information of the Company and subsidiaries for activities outside the service.

d. Menerima keuntungan (dalam bentuk apapun) dari siapapun selain dari gaji dan tunjangan yang berhak mereka terima.

3. **Pencurian**
Kegiatan/tindakan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (KUHP Pasal 362).
Contoh dari tindakan pencurian:
a. Mengambil hak milik orang lain tanpa persetujuan dari pemilik tersebut;
b. Menggunakan identitas diri orang lain untuk mendapatkan barang dan pelayanan;
c. Menjual benda-benda dan menyimpan hasil dari penjualan secara rahasia;
d. Menyalahgunakan/mengambil tanpa alasan hak uang/ barang/data/ dokumen milik perusahaan dan/atau nasabah di lingkungan kerja.

4. **Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perusahaan**
Kegiatan/tindakan yang dilakukan oleh Insan Pelindo baik disengaja maupun terencana yang bertentangan dengan kebijakan dan peraturan internal Perusahaan dan Anak Perusahaan. Pelaku pelanggaran ini dapat diancam sanksi menurut ketentuan yang berlaku, baik internal maupun eksternal.

Contoh dari tindakan pelanggaran kebijakan dan peraturan perusahaan:
a. Menjalankan tugas diluar prosedur dan instruksi yang telah ditetapkan;
b. Membocorkan informasi perusahaan, seperti: mengenai anggaran, penawaran dari pemasok, strategi bisnis dan lain sebagainya kepada orang-orang yang tidak berhak di luar kewenangannya;
c. Membuat dan/atau menggunakan dan/atau memberikan dan/atau mengubah dan/atau menyalin dan/atau menggandakan data dan/atau keterangan yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga merugikan perusahaan dan/atau nasabah dan/atau investor/calon investor;
d. Pemberian fasilitas kredit atau perpanjangan waktu pembayaran kewajiban kepada pelanggan atau vendor/ *supplier* yang terindikasi melanggar ketentuan dan berpotensi merugikan Perusahaan dan Anak Perusahaan secara ekonomis;
e. Pelanggaran Norma & Etika (Kode Etik) dengan tindakan diantaranya Perbuatan asusila dilingkungan perseroan, pelecehan, penggunaan narkoba dan terlibat dalam kegiatan masyarakat yang di larang.

5. **Benturan Kepentingan**
Sebuah situasi dan kondisi dimana Insan Pelindo atau Pemegang Saham karena kedudukan atau jabatan di Perusahaan dan Anak Perusahaan memiliki wewenang yang berpotensi disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan pribadinya sehingga menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perusahaan dan Anak Perusahaan.

d. Receive benefits (in any form) from anyone other than salary and benefits that they are entitled to receive.

3. **Theft**
It is the activity/action to take goods, wholly or partly belongs to another person, with the intent to possess unlawfully (KUHP Article 362).

Example of theft:
a. Taking the property of other person without the owner's consent;
b. Using the identity of others to get goods and services;
c. Selling goods and keeping the proceeds from the sale in secret;
d. Abusing/taking without any reason in the form of money/ goods/data/documents owned by the Company in the workplace.

4. **Violations of Company Policies and Regulations**
Activities/actions carried out by Pelindo Pelindo, whether intentional or planned, are contrary to the internal policies and regulations of the Company and its Subsidiaries. Perpetrators of this violation can be threatened with sanctions according to applicable regulations, both internal and external.

Example of violation of Company policies and policies:
a. Carry out the tasks other than the established procedures and instructions;
b. Leaking corporate information, such as: about the budget, supply from suppliers, business strategies and so on to unauthorized people.
c. Creating and/or using and/or providing and/or changing and/or copying and/or duplicating data and/or information that are not in accordance with the truth, detrimental to the Company and/or customers and/or investors/ potential investors;
d. Provision of credit facilities and extension of obligation payments to customers or vendors/suppliers indicated to violate the provisions and potentially harm the Company and Subsidiaries in an economic manner.
e. Violation of Code of Conduct with actions including immoral acts within the Company, harassment, drug use and involvement in prohibited community activities.

5. **Conflict of Interest**
A situation in which Pelindo People or the Shareholder due to the position in the Company has the authority that is potentially misused either intentionally or unintentionally for his or her personal interest, resulting in a conflict between personal interests and/or groups and/or families with the economic interests of the Company.

Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas keputusan atas tugas yang diamanatkan kepadanya, sehingga kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan Perusahaan dan Anak Perusahaan.

Contoh dari tindakan Benturan Kepentingan :
a. Menerima hadiah dalam bentuk uang atau hiburan dari vendor atau *supplier*;
b. Menerima bantuan finansial atau non-finansial dari vendor atau *supplier*;
c. Di mana seseorang atau pasangannya melakukan tindakan yang memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kegiatan bisnis di Perseroan;
d. Pemberian keputusan penunjukan pihak tertentu sebagai penyedia barang/jasa, di mana insan Pelindo tersebut mempunyai kepentingan ekonomis pada pihak yang ditunjuk tersebut.

Such condition can affect the quality of decision on the tasks assigned, so that the performance of the decision results can be detrimental to the Company and its Subsidiaries.

Example of Conflict of Interest:
a. Receive prizes in the form of money or entertainment from vendors or suppliers;
b. Receive financial or non-financial assistance from vendors or suppliers;
c. A person or his/her spouse performs actions that have conflict of interests with business activities in the Company;
d. Decide the appointment of a certain party as a provider of goods/services, in which Pelindo people have an economic interest in the appointed party.

6. **Penyuapan/Gratifikasi**
Suatu tindakan/kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan sadar menerima sesuatu atau janji, sedangkan dia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya dia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum (Pasal 3 UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap).

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. (Pasal 128 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Untuk informasi lebih lanjut terkait Penyuapan/ Gratifikasi terdapat di dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Contoh dari tindakan penyuapan/gratifikasi :
a. Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan suatu transaksi bisnis Perseroan;
b. Menerima keuntungan-keuntungan dalam bentuk apapun yang mempengaruhi penilaian atau keputusan bisnis perusahaan yang akan diambil.

6. **Bribery/Gratification**
A deliberate and conscious act of accepting something or a promise, while he or she knows or can reasonably expect that the giving of something or a promise is meant for he or she to do something or to do anything in his or her duties, which is contrary to his or her authority or obligation in the public interest (Article 3 of Law No. 11 of 1980 concerning the Crime of Bribery).

In a broad sense, giving includes the provision of money, goods, rebates, commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment, and other facilities. (Article 128 of Law No. 20 of 2001 on Amendment to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption. For further information regarding Bribery/Gratification, please refer to the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Gratification Control Guidelines.

Example of bribery/gratification:
a. Receive direct or indirect benefits from any parties related to a business transaction of his or her Company.

b. Receive benefits in any form that affect the assessment or business decisions to be taken.

7. **Penipuan**
Kegiatan/tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sadar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang (KUHP Pasal 378).

7. **Embezzlement**
A deliberate and conscious act with the intent to unlawfully benefit oneself or others, by using a false name or false prestige, by deception, or a series of lies, to incite other people to hand over something to them, or to give debt or write off receivables (KUHP Article 378).

Contoh dari tindakan Penipuan :

a. Suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain menandatangani kontrak tersebut, padahal tanpa tipu muslihat tersebut pihak lain itu tidak akan menandatangani kontrak yang bersangkutan;
b. Dengan sengaja memberikan produk yang dalam kondisi rusak yang mengakibatkan kerugian dalam bentuk finansial;
c. Bekerja sendiri ataupun bekerja sama dengan pihak lain untuk menipu atasan atau Perusahaan dengan menggunakan tanda tangan palsu atau faktur palsu.

Example of Embezzlement:

a. A ruse used by a party to cause the other party to sign the contract, even though without this ruse the other party would not have signed the contract concerned;
b. Deliberately providing products that are in a damaged condition resulting in financial losses;
c. Working alone or in collaboration with other parties to deceive superiors or the Company by using fake signatures or fake invoices.

8. **Pemerasan**

Kegiatan/tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang (KUHP Pasal 368).

Contoh dari tindakan Pemerasan :

a. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi/golongan/pihak lain;
b. Meminta sejumlah uang atau hadiah kepada calon *supplier* sebagai pengganti untuk sebuah pekerjaan;
c. Meminta sejumlah uang atau hadiah kepada pelanggan sebagai pengganti untuk sebuah pelayanan istimewa/ khusus.

8. **Fraud**

A deliberate and conscious act that is intended to benefit themselves or others unlawfully, using false identity or false dignity, with tricks, or lies, moving others to surrender something to them, or to give debt or write off accounts receivable (KUHP Article 368).

Example of Fraud:

a. Performing illegal levies in any form in carrying out their duties for the interests of personal/group/other party;
b. Requesting a sum of money or a gift from potential supplier as a substitute for a job;
c. Requesting a certain amount of money or a gift from a customer in exchange for a special service.

9. **Penggelapan**

Tindakan/kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang saat ini ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. (KUHP Pasal 372).

Contoh dari tindakan Penggelapan:

a. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik perusahaan, yang dalam kekuasaannya baik karena jabatannya maupun bukan karena jabatannya.
b. Melakukan tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/ harta perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

9. **Extortion**

A deliberate and conscious unlawful act to possess goods that are wholly or partly owned by another person, which is currently under their control, not because of a crime. (KUHP Article 372).

Example of Exortion:

a. Deliberately and unlawfully owns an object which is wholly or partly owned by the Company, which is under his/her control either because of his/her position or not because of his/her position.
b. Performing dishonest actions by hiding Company goods/ assets without the Company's knowledge with the aim of possessing, controlling, or using them for other purposes.

PENGELOLA LAPORAN PELANGGARAN

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bersama pihak ketiga selaku mitra dalam penerapan sistem WBS telah menerima dan memonitor pengaduan baik internal dan eksternal serta membuat laporan bulanan kepada Tim Pelindo Bersih sebagai *counterpart* yang diatur dalam SK Direksi No. SK.01.01/31/12/1/ HLTI/UTMA/PLND-21 tanggal 31 Desember 2021 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pelindo Bersih dalam Pelaksanaan *Whistleblowing* System PT Pelabuhan Indonesia (Persero), yang beranggotakan:

WHISTLEBLOWING MANAGEMENT

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) together with a third party as partner in implementing the WBS system have received and monitored complaints, both internally and externally, and made monthly reports to Pelindo Bersih Team as counterpart as regulated in the Board of Directors Decree No. SK.01.01/31/12/1/ HLTI/UTMA/PLND-21 dated December 31, 2021 regarding the Duties and Responsibilities of Pelindo Bersih Committee in the Implementation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s Whistleblowing System, which consists of:

Unit Kerja Work Unit	Jabatan dalam TIm Position in the Team
Group Head Sekretariat Perusahaan Group Head of Corporate Secretariat	Ketua (Merangkap Anggota) Chairman (Concurrently Member)
Group Head Satuan Pengawasan Intern Group Head of Internal Audit Unit	Wakil Ketua (Merangkap Anggota) Vice Chairman (Concurrently Member)
Departemen *Head* Hubungan Lembaga, Tata Kelola dan Investor Department Head of Institutional, Governance and Investor Relations	Sekretaris (Merangkap Anggota) Secretary (Concurrently Member)
Group Head Hukum Group Head of Legal	Anggota Member
Group Head Manajemen Risiko Group Head of Risk Management	Anggota Member
Group Head Layanan SDM Group Head of HC Services	Anggota Member
Group Head Pelayanan Terminal Group Head of Terminal Services	Anggota Member

SOSIALISASI *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

1. Pelaksanaan sosialisasi penerapan GCG pada Regional 1 tanggal 14 Juli 2022 dan regional 2 tanggal 31 Agustus 2022 dengan materi yang dibawakan oleh Deputi BPKP dan Direktur Gratifikasi KPK RI;
2. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Direksi terkait *Board Manual,* GCG, Kode Etik, Gratifikasi dan *Whistleblowing* kepada seluruh pegawai dengan disampaikan melalui aplikasi internal Perseroan yaitu Pelindo *E-Office* PEO;
3. Pelaksanaan keikutsertaan PT Pelindo dalam sosialisasi SMAP 37001 pada *Subholding* PT PJM tanggal 9 Desember 2022.

WHISTLEBLOWING SYSTEM SOCIALIZATION

1. Socialization of GCG implementation in Regional 1 on July 14, 2022 and Regional 2 on August 31, 2022 with material presented by the Deputy of BPKP and Director of Gratification of KPK RI;
2. Implementation of socialization of Board of Directors Regulations related to Board Manual, GCG, Code of Conduct, Gratification and Whistleblowing to all employees delivered through PEO;
3. Implementation of PT Pelindo's participation in the socialization of SMAP 37001 at PT PJM Subholding on December 9, 2022.

JUMLAH PENGADUAN DAN PROSES PENGADUAN

Selama tahun 2022 melalui sistem *Whistleblowing* Pelindo telah menerima laporan yang masuk sebanyak 375 laporan dengan 4 (empat) laporan yang termasuk kedalam kategori pelanggaran dan 371 Laporan yang termasuk *out of scope*. Pelaporan terkait indikasi pelanggaran dari 4 (empat) laporan yang masuk kepada Komite Pelindo Bersih telah ditindaklanjuti sebanyak 4 (empat) laporan dengan capaian 100%. Laporan yang termasuk dalam kategori *out of scope* telah disarankan oleh pengelola WBS Independen untuk melakukan pelaporan kepada saluran terkait dan/atau *customer service* Pelindo *Group*.

NUMBER OF COMPLAINTS AND COMPLAINTS HANDLING

During 2022, through the Whistleblowing system Pelindo has received 375 incoming reports with 4 (four) reports included in the category of violations and 371 reports included out of scope. Reporting related to indications of violations from 4 (four) incoming reports to Pelindo Bersih Committee has been followed up as many as 4 (four) reports with 100% achievement. Reports that fall into the out of scope category have been advised by the Independent WBS manager to related report and/or to Pelindo Group customer service channel.

SANKSI/TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN DI TAHUN 2022

Kepada pihak terlapor yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku diperusahaan dan/atau perundang-undangan. Penjatuhan hukuman dapat dilakukan oleh Tim Indisipliner masing-masing wilayah kerja sesuai dengan Peraturan Direksi Terkait Indisipliner. Sepanjang tahun 2022, terdapat 4 (empat) laporan WBS yang telah ditindaklanjut, sebagai berikut:

SANCTIONS/FOLLOW-UP ON COMPLAINTS IN 2022

Reported parties who are proven guilty can be sentenced according to the regulations in force in the Company and/or laws. Punishment can be executed by the disciplinary team in each work area in accordance with the Board of Directors Regulations regarding disciplinary matters. Throughout 2022, there were 4 (four) WBS reports that have been followed up:

NO	PELANGGARAN VIOLATION	JUMLAH PELAPORAN TOTAL REPORTS	TINDAK LANJUT FOLLOW-UP
1	Penipuan Fraud	2	Tidak terbukti bersalah sehingga tidak terdapat pemberian sanksi. Not proven guilty so there is no sanction.
2	Pelanggaran Kebijakan Perusahaan Violation of Company Policy	1	Damai (terkait SARA) Peace (related to SARA)
3	Pemerasan Extortion	1	Tidak terbukti bersalah sehingga tidak terdapat pemberian sanksi. Not proven guilty so there is no sanction.
TOTAL		4	

PROGRAM ANTI KORUPSI

Pelaksanaan program anti korupsi di Perseroan diatur dalam kode etik, pedoman *Whistleblowing* System serta pedoman gratifikasi Perseroan. Pelindo berkomitmen menciptakan praktik bisnis yang bersih dan menjauhi segala bentuk kecurangan *(Fraud).* Komitmen Perseroan diperkuat dengan dibentuknya sistem *Whistleblowing* System yaitu sistem yang disediakan oleh Pelindo bagi seluruh *stakeholders*.

Pelindo melarang segala bentuk *fraud*, korupsi, gratifikasi dan suap. Korupsi (*Corruption*), merupakan tindakan yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau badan lain yang merugikan atau perekonomian Negara. Penyuapan dapat diartikan sebagai pemberian atau penerimaan segala bentuk penawaran, komitmen, uang, hadiah, hiburan, atau barang berharga yang tidak sesuai dengan etika, yang diberikan atau diterima dengan tujuan favoritisme, mempengaruhi, mengubah keputusan, melanggar perjanjian kerja, memberikan keuntungan yang tidak pantas dan tidak sesuai etika ketika Insan Pelindo berada dalam kapasitas pekerjaan.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengharapkan semua Insan Pelindo untuk:

1. Tidak memberi atau menerima semua hal yang telah disebutkan di atas dari pihak eksternal seperti pelanggan, pesaing dan vendor;
2. Apabila terdapat pihak eksternal yang memberikan penawaran atau mencoba untuk melakukan hal serupa, Insan Pelindo perlu melaporkannya kepada atasan untuk menentukan tindakan yang pantas dilakukan dan/atau Tim UPG.

Pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 yaitu:

1. Pelaksanaan acara Bimbingan Teknis oleh KPK dengan judul Pemberdayaan Dunia Usaha Antikorupsi Mewujudkan Dunia Usaha Antikorupsi Melalui Penanaman Nilai – Nilai Integritas pada tanggal 3 Agustus 2022;
2. Penandatanganan Evaluasi SSM *Quarantine* dan *Customs* (QC) dengan stratnas PK, Bea Cukai, Karantina, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Kementerian Pertanian pada tanggal tanggal 22 Agustus 2022;
3. Pelaksanaan keikutsertaan Ikut serta dalam Forum Hari Korupsi Dunia yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2022 yang dihadiri oleh Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero);

ANTI-CORRUPTION PROGRAM

The implementation of the anti-corruption program in the Company's is regulated in the code of conduct, Whistleblowing System guidelines and the Company's gratification guidelines. Pelindo is committed to creating clean business practices and avoiding all forms of fraud. The Company's commitment is strengthened by the establishment of Whistleblowing System, which is a system provided by Pelindo for all stakeholders.

Pelindo prohibits all forms of fraud, corruption, gratification and bribery. Corruption, is an act against the law, enriching oneself, other people or other entities that harm or the economy of the State. Bribery can be defined as the giving or receiving of any form of offer, commitment, money, gift, entertainment, or valuable goods that are not in accordance with ethics, which are given or received with the aim of favoritism, influencing, changing decisions, violating employment agreements, providing inappropriate and unethical benefits when Pelindo People are in a work capacity.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) expects all Pelindo people to:

1. Not give or receive any of the above from external parties such as customers, competitors and vendors;
2. If there are external parties who make offers or try to do the same, Pelindo People need to report it to their superiors to determine the appropriate action and/or the UPG Team.

The implementation of activities during 2022 are:

1. Implementation of Technical Guidance event by KPK with the title Empowering the Anti-Corruption Business World, Realizing the Anti-Corruption Business World through the Cultivation of Integrity Values on August 3, 2022;
2. The signing of SSM Quarantine and Customs (QC) Evaluation with the national agencies of PK, Customs, Quarantine, Ministry of Transportation, Ministry of Marine Affairs and Ministry of Agriculture on August 22, 2022;
3. Participation in the World Corruption Day Forum, which was held on December 9, 2022 and attended by the President Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero);

4. Pelaksanaan koordinasi Penguatan GCG PT Pelindo dengan Tranparency International Indonesia yang dilakukan pada tanggal 27 Oktober dan 14 November 2022;
5. Pelaksanaan keikutsertaan PT Pelindo dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 pada tanggal 20 Desember 2022;
6. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) juga ikut serta pada Forum Anti Gratifikasi yang diselenggarakan oleh KPK RI yang dilaksanakan pada tanggal 23 – 25 Desember 2022 di Kota Bandung;
7. PT Pelindo aktif dalam pelaksanaan Rencana Aksi (RENAKSI) yang dilakukan oleh KPK bagian Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat sejak tahun 2022;
8. Koordinasi laporan pelanggaran yang masuk melalui saluran WBS Pelindo maupun KPK.

PROGRAM DAN PROSEDUR YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI PRAKTIK KORUPSI

KEBIJAKAN GRATIFIKASI

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menyadari bahwa dalam menjalin hubungan kerja dengan pihak ketiga, seringkali bersinggungan dengan praktik gratifikasi, sehingga dibutuhkan sebuah pedoman untuk mengendalikan praktik tersebut. Hal ini dilakukan agar seluruh Insan IPC memiliki pemahaman yang sama tentang perlakuan terhadap gratifikasi serta membantu Insan Pelindo untuk tidak terjerat dalam praktik gratifikasi yang termasuk tindak pidana suap.

Pengertian Gratifikasi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pasal 12B adalah Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian dan/atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang diberikan atau diterima oleh Insan Pelindo yang terjadi karena berkaitan dengan jabatan/wewenangnya di Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau mempengaruhi independensinya dalam bekerja serta berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

PENGELOLAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dalam kondisi tertentu, saat insan Pelindo tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Pihak Ketiga dengan pemberian tersebut di luar ketentuan atau pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada/melalui orang lain tanpa sepengetahuan Insan Pelindo, maka yang bersangkutan wajib melaporkan baik secara langsung kepada KPK atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sesuai mekanisme yang telah diatur.

PENGELOLA PELAPORAN GRATIFIKASI

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah unit yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi IPC No. KP 20.01/1/31/12/1/HLTI/UTMA/PLND-21 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada pelaksanaan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang berfungsi

4. Coordination of Strengthening PT Pelindo's GCG with Transparency International Indonesia, which was carried out on October 27 and November 14, 2022;
5. Implementation of PT Pelindo's participation in launch of the 2023-2024 Corruption Prevention Action on December 20, 2022;
6. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) also participated in the Anti-Gratification Forum organized by the KPK RI, which was held on December 23-25, 2022 in Bandung City;
7. PT Pelindo has been active in the Action Plan (RENAKSI) carried out by the Corruption Eradication Commission in the Reporting and Public Complaint Service section since 2022;
8. Coordinate reports of violations that come through Pelindo's and KPK's WBS channels.

PROGRAMS AND PROCEDURES UNDERTAKEN TO OVERCOME CORRUPTION PRACTICES

GRATIFICATION POLICY

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) realizes that in establishing a working relationship with third parties, the practice of gratification is often involved, hence a guideline is needed to control this practice. This aims for all Pelindo People to have the same understanding about the treatment of gratification and assist Pelindo People not to be entangled in gratification practices which is included the crime of bribery.

The definition of gratification according to Law No. 20 of 2001 article 12B is a gift in a broad sense, which includes the giving and/or receipt of gifts/souvenirs and entertainment, both received domestically and abroad and carried out using electronic devices or without electronic devices, given or received by Pelindo People that occur due to their position/authority in the Company, which may cause a conflict of interest and/or affect their independence at work as well as contrary to their obligations or duties.

GRATIFICATION CONTROL MANAGEMENT

Under certain conditions, when Pelindo people cannot avoid receiving a gift from a Third Party, provided that the gift is other than the provisions or the gift is already in a place that is entrusted to/through another person without the knowledge of Pelindo people, then the person concerned must report it either directly to KPK or through Gratification Control Unit (GCU) according to the regulated mechanism.

GRATIFICATION REPORTING MANAGEMENT

Gratification Control Unit (GCU) is a unit established based on the Decree of Board of Directors of IPC No. KP 20.01/1/31/12/1/HLTI/UTMA/PLND-21 dated December 31, 2021 regarding the Formation of Gratification Control Unit (GCU) Team for the implementation of Gratification Prevention and Handling System within PT Pelabuhan Indonesia (Persero), which function as a

sebagai pengendali gratifikasi di lingkungan Pelindo. UPG bersifat *ad-hock*, dan terdiri dari:

controller of gratification within Pelindo environment. The GCU is ad-hock, and consists of:

NO	JABATAN DALAM TIM POSITION IN THE TEAM	JABATAN POSITION
1.	Ketua Chairman	*Group Head* Sekretariat Perusahaan Group Head of Corporate Secretariat
2.	Wakil Ketua Vice Chairman	*Group Head* Satuan Pengawasan Intern Group Head of Internal Audit Unit
3.	Sekretaris Secretary	Departemen *Head* Hubungan Lembaga, Tata Kelola dan Investor Department Head of Institutional, Governance and Investor Relations
4.	Anggota Member	*Group Head* Hukum Group Head of Legal
5.	Anggota Member	*Group Head* Layanan SDM Group Head of HC Service
6.	Penanggung Jawab UPG - Regional GCU Person in Charge - Regional	*Regional Head* 1, 2, 3 , 4 Regional Head 1, 2, 3 , 4
7	Anggota UPG - Regional GCU Member - Regional	Divisian *Head* Pelayanan SDM dan Umum Regional 1,2, 3, 4 Division Head of Regional HC and General Affairs 1,2, 3, 4
8.	Penanggung Jawab UPG - Cabang GCU Person in Charge - Branch	*General Manager* General Manager
9.	Anggota UPG - Cabang GCU Member - Branch	Unit Pengelolaan Layanan SDM dan Umum HC and General Affairs Management Unit

*Berdasarkan Struktur Organisasi baru terdapat perubahan struktur keanggotaan Tim UPG yang saat ini masih dalam proses pengesahan.
*Based on the new Organizational Structure, there is a change in the UPG team membership structure, which is currently in the process of being ratified.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengendalian Gratifikasi

1. Tim UPG Kantor Pusat:
   a. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
   b. Melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi;
   c. Me*review* dan memperbarui kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
   d. Menerima laporan, merekap dan melaporkan gratifikasi dari pihak internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
   e. Menyimpan barang gratifikasi sampai dengan ditetapkannya status barang gratifikasi oleh KPK;
   f. Menindaklanjuti hasil rekomendasi KPK atas penetapan status barang gratikasi;
   g. Berkoordinasi dengan tim KPK terkait dengan pelaksanaan gratifikasi di lingkungan kerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero); dan
   h. Berkoordinasi dengan Tim UPG Regional, Cabang, *Holding*, Anak Perusahaan, Perusahaan Afiliasi dan *Other Business Portfolio* terkait Pengendalian Gratifikasi di lingkungan kerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Gratification Control Unit Duties and Responsibilities

1. Head Office GCU Team:
   a. Conducting socialization of gratification control within PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
   b. Coordinate with units or sections related to the implementation and effectiveness of gratification control;
   c. Reviewing and updating management policies, establishing an anti-gratification environment and preventing corruption within PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
   d. Receive reports, recapitulate and report gratuities from internal parties of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to the Corruption Eradication Commission;
   e. Storing the goods of gratification until the status of the goods is determined by KPK;
   f. Following up on the results of KPK's recommendation on the determination of the status of goods of gratification;
   g. Coordinate with KPK team related to the implementation of gratification in working environment of PT Pelabuhan Indonesia (Persero); and
   h. Coordinate with the Regional GCU Team, Branches, Holding, Subsidiaries, Affiliated Companies and Other Business Portfolios related to Gratification Control in working environment of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

2. Tim UPG Regional:
   a. Para Regional *Head* menjadi penanggung jawab di wilayah kerjanya dan melakukan koordinasi dengan *Group Head* Sekretariat Perusahaan dalam hal pengelolaan gratifikasi di wilayah regional masing-masing;
   b. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berkoordinasi dengan Tim UPG Kantor Pusat;
   c. Menerima laporan, merekap dan melaporkan gratifikasi dari pihak internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada Tim UPG Kantor Pusat;
   d. Menyimpan barang gratifikasi sampai dengan ditetapkannya status barang gratifikasi oleh KPK dan melaporkannya ke Tim UPG Kantor Pusat.

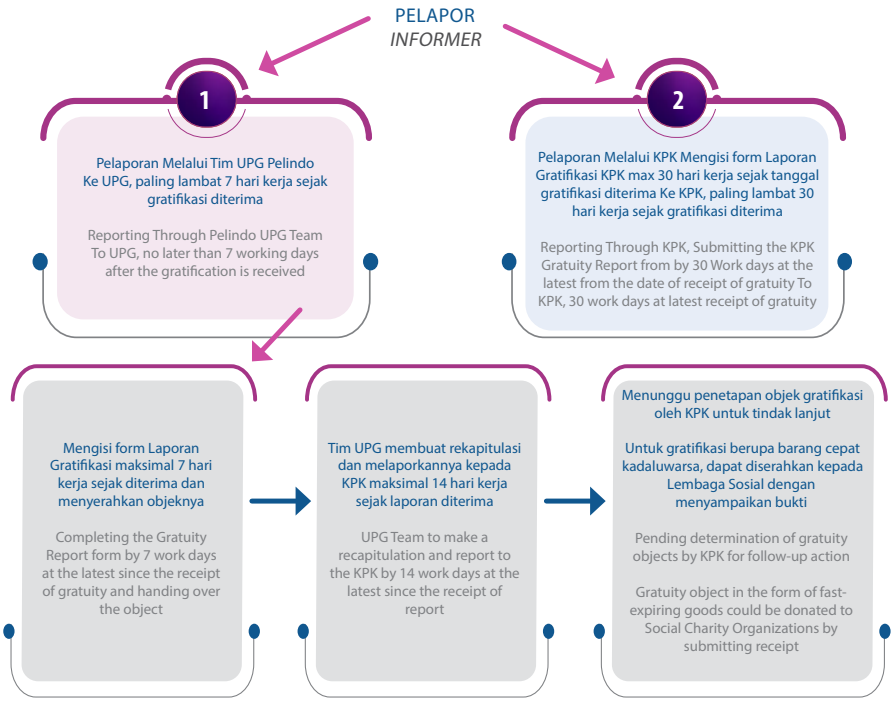
3. Tim UPG Cabang:
   a. Para *General Manager* cabang menjadi penanggung jawab di wilayah kerjanya dan melakukan koordinasi dengan Regional Head dan Kantor Pusat dalam hal pengelolaan gratifikasi di wilayah regional masing-masing;
   b. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berkoordinasi dengan Tim UPG Regional;
   c. Menerima laporan, merekap dan melaporkan gratifikasi dari pihak internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada Tim UPG Kantor Pusat dan tembusan kepada Regional *Head*;
   d. Menyimpan barang gratifikasi sampai dengan ditetapkannya status barang gratifikasi oleh KPK dan melaporkannya ke Tim UPG Kantor Pusat tembusan kepada Regional *Head*.

2. Regional GCU Team:
   a. Regional Heads are responsible for their working areas and coordinate with the Group Head Corporate Secretariat in terms of gratification management in their respective regional areas;
   b. Conducting socialization of gratification control within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in coordination with the Head Office GCU Team;
   c. Receive reports, recapitulate and report gratuities from internal parties of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to the Head Office GCU Team;
   d. Storing the goods of gratification until the status of the goods is determined by the KPK and reporting it to the Head Office GCU Team.

3. Branch GCU Team:
   a. Branch General Managers are responsible for their working areas and coordinate with Regional Heads and Head Office in terms of gratification management in their respective regional areas;
   b. Conducting socialization of gratification control within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in coordination with the Regional GCU Team;
   c. Receive reports, recapitulate and report gratuities from internal parties of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to the Head Office GCU Team and a copy to the Regional Head;
   d. Storing the goods of gratification until the status of the goods is determined by KPK and reporting it to the Head Office GCU Team with a copy to the Regional Head.

MEKANISME PELAPORAN

REPORTING MECHANISM



Apabila terdapat Gratifikasi sebagaimana yang sudah diatur Perusahaan, maka Insan Pelindo yang bersangkutan wajib melaporkan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Saluran Pelaporan Gratifikasi, jika Insan Pelindo menerima barang Gratifikasi :
   a. Pelaporan Melalui KPK
      Laporan Gratifikasi disampaikan secara *online* melalui aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL). Laporan Gratifikasi akan diproses oleh KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di https://gol.kpk.go.id/login;
   b. Pelaporan Melalui Tim UPG Perusahaan
      Jika Insan Pelindo menerima baik secara langsung maupun tidak langsung gratifikasi dapat mengisi form Laporan Gratifikasi melalui Tim UPG Perseroan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima dengan menyerahkan objek gratifikasi yang diterima.

2. Tim UPG membuat rekapitulasi Laporan Gratifikasi serta melaporkannya kepada KPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima oleh Tim UPG Perusahaan untuk selanjutnya mendapat penetapan status objek Gratifikasi oleh KPK;

3. Untuk penerimaan Gratifikasi yang merupakan barang yang cepat kadaluarsa (misal: makanan dan minuman), maka dapat diserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampaikan bukti tanda serah terima kepada Tim UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud, dengan contoh Format sebagaimana diatur dalam Pedoman ini;

4. Untuk penerimaan Gratifikasi yang merupakan barang seperti Cinderamata/Uang/Makanan yang tidak cepat kadaluarsa, dan sebagainya menunggu penetapan objek Gratifikasi oleh KPK untuk tindak lanjut.

5. Saluran Pelaporan Gratifikasi, jika Insan Pelindo melihat adanya dugaan pelanggaran terkait Gratifikasi:
   Penyampaian laporan gratifikasi juga dapat dilakukan melalui saluran *Whistleblowing System* (Pelindo Bersih) bagi Insan Pelindo yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran gratifikasi, sebagaimana yang telah diatur pada Pedoman *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

SOSIALISASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI

1. Penyampaian surat edaran larangan pungutan liar, pemberian dan penerimaan gratifikasi pada perayaan hari raya besar keagamaan dan tahun baru untuk seluruh pegawai pada tahun 2022;
2. Penyampaian sosialisasi kanal komunikasi perusahaan seperti *website*, Instagram, facebook, twitter yang dapat diakses oleh internal dan eksternal perusahaan;
3. Sosialisasi Peraturan Direksi terkait *Board Manual*, GCG, Kode Etik, Gratifikasi dan *Whistleblowing* kepada seluruh pegawai dengan disampaikan melalui aplikasi internal yaitu Pelindo *E-Office* (PEO);

In the event of a gratification occurs, as stipulated by the Company, the relevant Pelindo People must report it in the following manner:

1. Gratification Reporting Channel, if Pelindo People receive Gratification goods:
   a. Reporting Through KPK
      The Gratification Report is submitted online through the Online Gratification (GOL) application. The Gratification Report will be processed by KPK within 30 (thirty) working days after the report is declared complete and received by KPK. For more complete information, see https://gol.kpk.go.id/login;
   b. Reporting Through the Company's UPG Team
      If Pelindo People receive gratuities directly or indirectly, they can fill out the Company's UPG Gratification Report form as attached, no later than 7 (seven) working days from the receipt date of the Gratification by submitting the object of gratification received.

2. The UPG Team makes a recapitulation of the Gratification Report and submit a report to KPK no later than 14 (fourteen) working days after the Gratification report is received by the Company's UPG Team for further approval of the status of Gratification object by KPK;

3. For Gratification which is an item that expires quickly (eg food and drink), can be submitted to Social Institutions by submitting proof of handover to the UPG Team no later than 7 (seven) days after the receipt date of the Gratification, using the Format as regulated in these Guidelines;

4. For Gratification in the form of goods such as Souvenirs/Money/Food that does not expire quickly, and others, is waiting for the determination of the object of Gratification by KPK for follow-up.

5. Gratification Reporting Channel, if Pelindo Personel witnesses an alleged violation related to Gratification:
   Gratification report can also be submitted through the Whistleblowing System (Pelindo Bersih) channel for Pelindo People who are aware of any indications of gratification violation, as stipulated in PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Whistleblowing System Guidelines.

GRATIFICATION POLICY SOCIALIZATION

1. Submission of circulars prohibiting illegal levies, giving and receiving gratuities on major religious holidays and New Year celebrations for all employees in 2022;
2. Submission of dissemination of corporate communication channels such as website, Instagram, Facebook, Twitter which can be accessed by internal and external companies;
3. Socialization of Board of Directors Regulations related to the Board Manual, GCG, Code of Conduct, Gratification and Whistleblowing to all employees by submitting them through internal application, Pelindo E-Office (PEO);

4. Sosialisasi LHKPN : Bimtek tata cara pengisian LHKPN bagi wajib lapor oleh KPK pada tanggal 7 Februari 2022 via *online*;
5. Pelaksanaan acara Bimbingan Teknis oleh KPK dengan judul Pemberdayaan Dunia Usaha Antikorupsi Mewujudkan Dunia Usaha Antikorupsi Melalui Penanaman Nilai-Nilai Integritas pada tanggal 3 Agustus 2022;
6. Pelaksanaan sosialisasi penerapan GCG pada Regional 1 tanggal 14 Juli 2022 dan regional 2 tanggal 31 Agustus 2022 dengan materi yang dibawakan oleh Deputi BPKP dan Direktur Gratifikasi KPK RI;
7. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) juga ikut serta pada Forum Anti Gratifikasi yang diselenggarakan oleh KPK RI yang dilaksanakan pada tanggal 23 – 25 Desember 2022 di Kota Bandung;
8. Pelaksanaan keikutsertaan PT Pelindo dalam sosialisasi SMAP 37001 pada *Subholding* PT PJM tanggal 9 Desember 2022;
9. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) juga ikut serta pada Forum Anti Gratifikasi yang diselenggarakan oleh KPK RI yang dilaksanakan pada tanggal 23 – 25 Desember 2022 di Kota Bandung.

LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2022

Pelaksanaan pengelolaan gratifikasi selama periode tahun 2022 sebanyak 2 (dua) laporan yang berada di wilayah kerja PT PMLI dan Regional 2 dan telah disampaikan pada aplikasi GOL KPK. Laporan gratifikasi dari PT PMLI telah mendapatkan ketetapan oleh KPK pada tahun 2022 dengan status gratifikasi "MILIK NEGARA" dan telah disampaikan kepada KPK. Sementara Laporan dari Regional 2 ditetapkan oleh KPK dengan status "MILIK NEGARA" dan diserahkan objek gratifikasinya pada tahun 2023.

PELATIHAN/SOSIALISASI ANTI KORUPSI KEPADA KARYAWAN

1. Penyampaian surat edaran larangan pungutan liar, pemberian dan penerimaan gratifikasi pada perayaan hari raya besar keagamaan dan tahun baru untuk seluruh pegawai pada tahun 2022;
2. Penyampaian sosialisasi kanal komunikasi perusahaan seperti *website*, Instagram, facebook, twitter yang dapat diakses oleh internal dan eksternal perusahaan;
3. Sosialisasi Peraturan Direksi terkait *Board Manual*, GCG, Kode Etik, Gratifikasi dan *Whistleblowing* kepada seluruh pegawai dengan disampaikan melalui aplikasi internal yaitu Pelindo *E-Office* (PEO) dan sistem PGood;
4. Pembelajaran Interaktif untuk Pengelolaan *Whistleblowing System* Pengaduan Korupsi (Peluit Integritas) *Batch* 2 yang diselenggarakan oleh Pusat Edukasi Antikorupsi KPK pada tanggal 27 Juni 2022 – 1 Juli 2022;
5. Beberapa pegawai ikut serta dalam pembelajaran *E-learning* Antikorupsi WBS pada 28 Juni 2022;
6. Pelaksanaan acara Bimbingan Teknis oleh KPK dengan judul Pemberdayaan Dunia Usaha Antikorupsi Mewujudkan Dunia Usaha Antikorupsi Melalui Penanaman Nilai-Nilai Integritas pada tanggal 3 Agustus 2022;

4. LHKPN Socialization: Technical Guidance on the procedures for filling in LHKPN for mandatory reports by KPK on February 7, 2022 via online;
5. Holding a Technical Guidance event by KPK with the title Empowering the Anti-Corruption Business World Creating an Anti-Corruption Business World through Instilling Integrity Values on August 3, 2022;
6. Socialization of GCG implementation in Regional 1 on July 14, 2022 and regional 2 on August 31, 2022 with material presented by Deputy BPKP and Director of Gratification KPK RI;
7. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) also participated in Anti Gratification Forum organized by the Indonesian Corruption Eradication Committee which was held on December 23-25, 2022 in Bandung;
8. PT Pelindo's participation in the socialization of SMAP 37001 at PT PJM Subholding on December 9, 2022;
9. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) also participated in Anti-Gratification Forum organized by the Indonesian Corruption Eradication Committee which was held on December 23-25, 2022 in Bandung;

GRATIFICATION REPORT IN 2022

During the gratification management in 2022 period, there were 2 (two) reports in the working area of PT PMLI and Regional 2 and had been submitted to KPK GOL application. The gratification report from PT PMLI has received a stipulation by KPK in 2022 with the status of "STATE OWNED" gratification and has been submitted to KPK. While the Report from Regional 2 is determined by KPK with "STATE OWNED" status and the object of gratification will be handed over in 2023.

ANTI-CORRUPTION TRAINING/SOCIALIZATION TO EMPLOYEES

1. Submission of circulars prohibiting illegal levies, giving and receiving gratuities on major religious holidays and New Year celebrations for all employees in 2022;
2. Submission of dissemination of corporate communication channels such as website, Instagram, Facebook, Twitter which can be accessed by internal and external companies;
3. Socialization of Board of Directors Regulations related to the Board Manual, GCG, Code of Conduct, Gratification and Whistleblowing to all employees by submitting them through internal application, Pelindo E-Office (PEO) and the PGood system;
4. Interactive Learning for Management of Corruption Complaint Whistleblowing System (Integrity Whistle) Batch 2 which was held by KPK Anti-Corruption Education Center on June 27, 2022 – July 1, 2022;
5. Several employees participated in the WBS anti-corruption E-learning on June 28, 2022;
6. Technical Guidance event by KPK entitled Empowering the Anti-Corruption Business World Creating an Anti-Corruption Business World through Instilling Integrity Values on August 3, 2022;

7. Seluruh karyawan Pelindo melakukan pengisian *survey* pemahaman GCG dan penandatangan pakta integritas melalui sistem PGood, sebelum melakukan pengisian survei seluruh pegawai Pelindo diminta untuk membaca dan memahami peraturan Direksi terkait GCG salah satunya gratifikasi;
8. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) juga ikut serta pada Forum Anti Gratifikasi yang diselenggarakan oleh KPK RI yang dilaksanakan pada tanggal 23 – 25 Desember 2022 di Kota Bandung.

7. All Pelindo employees filled out a GCG understanding survey and signed an integrity pact through PGood system, before filling out the survey all Pelindo employees were asked to read and understand the Board of Directors› regulations regarding GCG, including about gratification;
8. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) also participated in Anti Gratification Forum organized by RI KPK which was held on December 23-25, 2022 in Bandung.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah disahkan berdasarkan Peraturan Direksi No. HK.01/20/12/1/ADKS/UTMA/PLND-21 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Struktural di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Adapun pengelola LHKPN yaitu:

STATE OFFICIAL WEALTH REPORT (LHKPN)

The Company has a policy regarding the management of State Official Wealth Report (LHKPN), which has been ratified based on the Board of Directors Regulation No. HK.01/20/12/1/ADKS/UTMA/PLND-21 dated December 20, 2021 concerning Guidelines for Wealth Report of Board of Directors, Board of Commissioners, and Structural Officers within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

The management team of LHKPN are:

1.	Penanggung jawab Person in Charge	:	*Group Head* Kesekretariatan Perusahaan Kantor Pusat Corporate Secretariat Group Head of Head Office
2.	Koordinator Bidang Kepegawaian Personnel Coordinator	:	*Group Head* Layanan SDM Kantor Pusat HC Services Group Head of Head Office
3.	Koordinator Bidang Pengawasan Supervision Coordinator	:	*Group Head* Hukum Kantor Pusat Legal Group Head of Head Office

Jumlah wajib lapor di lingkungan Pelindo sebanyak 408 orang. Pada tahun 2022 wajib lapor yang telah melaporkan LHKPN sebanyak 356 orang dan sebanyak 10 orang belum melaporkan LHKPN. Atas Insan Pelindo yang belum melakukan pelaporan LHKPN, Manajemen telah melakukan tindakan.

The number of mandatory reporters within Pelindo is 408 people. In 2022, there were 356 people who have reported their LHKPN and as many as 10 people who have not reported their LHKPN. For Pelindo personnel who have not submitted an LHKPN report, the Management has already taken an action.



PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Implementation of Public Company Governance Guidelines

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	*Comply or Explain*
A.	**Aspek 1 : Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.** Aspect 1: Relationship between Public Company and Shareholders in guaranteeing Shareholders' rights	
A.1.	Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Principle 1: Increase value of General Meetings of Shareholders (GMS) Implementation	
A.1.1.	Rekomendasi 1: Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Penjelasan: Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara *(one share one vote)*. Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara *(voting)*. Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara *(voting)* baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (*voting*) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan *electronic voting*. Recommendation 1: Public Company has open and closed voting based-decision making mechanism and procedure that promote independency and interest of Shareholders. Explanation: Any shares with right to vote that issued have one vote (one share one vote). Shareholders may use their voting rights at the time of decision making, especially if voting needs to be done. However, the decision making mechanism by voting either openly or closedly has not been regulated in details. Public Company is recommended to have a voting procedure in making its decisions as one of GMS' agenda. The voting procedure must maintain shareholders's independency. For example, voting is done openly by raising hands to choose the options offered by the GMS' chairman. Meanwhile, closed voting is done in a decision making process that need secrecy or as requested by shareholders. This procedure may use card or electronic voting.	Perseroan tidak memiliki kebijakan terkait tata cara prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) secara terbuka maupun tertutup disebabkan karena Perseroan bukan merupakan Perusahaan Terbuka Telah dilaksanakan dan *Comply* The Company does not have a policy regarding the technical procedures for open or closed voting because the Company is not a Public Company. Implemented and Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	*Comply or Explain*
A.1.2.	Rekomendasi 2 : Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. Penjelasan : Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS. Recommendation 2 : Every Board of Directors and Board of Commissioners Member of the Public Company attend the Annual GMS Explanation : The presence of all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is intended to ensure that each member is able to observe, explain and answer directly the problems or questions raised by shareholders regarding the GMS' agenda.	Setiap tahunan Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris menghadiri RUPS tahunan yang dipimpin oleh Pemegang Saham (kuasa Pemegang Saham) dari Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian BUMN. Ketidakhadiran Direksi dan Dewan Komisaris disertai dengan Surat Kuasa Telah dilaksanakan dan *Comply* All Board of Directors and Board of Commissioners attend the annual GMS annually, which is chaired by the Shareholders (proxy of Shareholders) from the Government, represented by the Ministry of SOEs. The absence of the BoD and BoC is accompanied by a Power of Attorney. Implemented and Comply
A.1.3.	Rekomendasi 3 : Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Penjelasan : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut. Recommendation 3: Summary of GMS Minutes shall be available at the Public Company Website minimum for 1 (one) year. Explanation: Public Company must prepare summary of GMS minutes in Indonesian and other languages (minimum in English), and announced to the public in 2 (two) working days after the GMS was held, one of it is through the Company's Website. The availability of summary of GMS minutes at the Company's website provides an opportunity for the absent shareholders in GMS to obtain important easily and quickly. Therefore, the regulation concerning the minimum period of the availability of summary of GMS minutes on the Website is intended to provide sufficient time for shareholders to obtain such information.	Perseroan bukan perusahaan terbuka sehingga tidak menerbitkan risalah RUPS pada web Perseroan. Telah dilaksanakan dan *Comply* The Company is not a public Company and therefore does not publish the GMS minutes on the Company's website. Implemented and Comply
A.2.	Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Principle 2: Improve quality of Communication between Public Company and Shareholders or Investors	

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	*Comply or Explain*
A.2.1.	Rekomendasi 4 : Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Penjelasan : Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Di samping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut. Recommendation 4: Public Company has a policy on communication with shareholders or investors. Explanation: Any communication between the Company and shareholders or investors is intended for them to gain a clearer understanding of publicly available information, such as periodic reports, information disclosure, business or performance conditions and prospects, and Corporate Governance implementation. In addition, shareholders or investors may also submit feedback and opinions to the Company's management The Company's commitment in conducting communication with shareholders or investors is demonstrated by the communication policy. Such policy may includes strategies, programs, and communication timelines, as well as guidance that support shareholders or investors to participate in such communications.	Perusahaan memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Setiap tahunnya perusahan rutin melakukan pertemuan dengan Pemegang Saham, Investor dan Stakeholders lainnya untuk menyampaikan informasi dan aktivitas perusahan terkini termasuk isu-isu yang berkembang. Telah dilaksanakan dan *Comply* The Company has a communication policy with shareholders or investors. Every year the Company routinely conducts meetings with shareholders, investors and other stakeholders to convey the latest information and activities of the Company including developing issues. Implemented and Comply
A.2.2.	Rekomendasi 5 : Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. Penjelasan : Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka. Recommendation 5: Public Company shall disclose communication policy of Public Company with Shareholders or investors at the website. Explanation: The Company's commitment on transparency in providing equity to all shareholders or investors is shown in the communication policy disclosure. Such disclosure also aims to increase shareholders or investors' participation and role in the Company's communication program implementation	Dalam rangka keterbukaan informasi publik, Perseroan mempublikasikan laporan tahunan, laporan keuangan, dan informasi terkait lainnya di dalam situs Web secara berkala. Bagi *stakeholders* yang menginginkan informasi selain yang terdapat di *website* Perseroan bisa melalui *website* PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang dapat di akses pada https://ppid.pelindo.co.id/. Telah dilaksanakan dan *Comply* In the context of public information disclosure, the Company publishes annual reports, financial reports, and other related information on the website on a regular basis. For stakeholders who want information other than that contained on the Company's website, they can go through the PPID (Information and Documentation Management Officer) website which can be accessed at https://ppid.pelindo.co.id/. Implemented and Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	*Comply or Explain*
B.	**Aspek 2 : Fungsi dan Peran Dewan Komisaris** Aspect 2: Board of Commissioners' Function and Role	
B.1.	Prinsip 3 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. Principle 3: Strengthening Board of Commissioners membership and composition	
B.1.1.	Rekomendasi 6 : Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Penjelasan : Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris. Recommendation 6: Determination of the number of Board of Commissioners member takes into account the condition of Public Company. Explanation: The number of Board of Commissioners members may affect their effectiveness in work. The number of members determination shall refer to the applicable laws, that at least 2 (two) persons according to Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. In addition, it is also necessary to consider the Company's conditions which include, among other things, the characteristics, capacities and sizes, as well as the achievement of objectives and the fulfillment of different business needs among the Company. However, too many members of Board of Commissioners is potentially disrupt the effectiveness of Board of Commissioners' functions implementation.	Per 31 Desember 2021, anggota Dewan Komisaris Independen berjumlah 3 (tiga) orang atau 42,85 persen dari total anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 7 (tujuh) orang, sehingga telah memenuhi kriteria yang disyaratkan, yaitu minimal 20 persen dari total anggota Dewan Komisaris Perseroan. Telah dilaksanakan dan *Comply* As of December 31, 2021, there were 3 (three) Independent Board of Commissioners members or 42.85 percent of the total 7 (seven) members of Board of Commissioners, thus meeting the required criteria of at least 20 percent of the total members of the Company's Board of Commissioners. Implemented and Comply
B.1.2.	Rekomendasi 7 : Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Penjelasan : Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas. Recommendation 7: Determination of the composition of Board of Commissioners members concerns diversity of required skill, knowledge and experience. Explanation: Board of Commissioners composition is a characteristics combination both in terms of Board of Commissioners as a body and Board of Commissioners members as an individual, in accordance with the Company's needs. Such characteristics may be reflected in the determination of skills, knowledge and experience required for supervisory and advisory tasks implementation by Board of Commissioners of the Company. Composition that has taken into account the needs of the Company is a positive thing, especially regarding decision-making in supervisory function implementation that consider various broader aspects.	Komposisi Dewan Komisaris perusahaan termasuk beragam dengan tingkat pengalaman dan kompetensi sesuai tugas dan fungsi yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan fungsi pengawasan Telah dilaksanakan dan *Comply* The Board of Commissioners composition of the Company is diverse with a level of experience and competence in accordance with the duties and functions required by the Company in carrying out the supervisory function. Implemented and Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	*Comply or Explain*
B.2.	Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4: Improve the quality of Board of Commissioners duty and responsibility implementation.	
B.2.1.	Rekomendasi 8 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri *(self assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Penjelasan : Kebijakan penilaian sendiri *(self assessment)* Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. *Self assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya *self assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Recommendation 8: Board of Commissioners has self assessment policy to evaluate its performance. Explanation: Board of Commissioners' self assessment policy is a guideline used as a form of accountability for Board of Commissioners' performance in a collegial manner. The Self Assessment is undertaken by each member to assess Board of Commissioners' performance in a collegial manner, rather than assessing the individual performance of each member. By doing self assessment, each member of Board of Commissioners is expected to contribute in continuous performance improvement. This policy contains assessment activities undertaken, purposes and objectives, periodic execution time, and assessment indicators or criteria used in accordance with the recommendations given by the nomination and remuneration function of the Company, where such function is required in Financial Services Authority Regulations No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies	Penilaian atas Kinerja Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Board Manual. Dewan Komisaris juga memiliki *Key Performance Indicator* (KPI) secara kolegial maupun secara individu yang telah disetujui oleh Pemegang Saham, sebagai sasaran kerja dari Dewan Komisaris Telah dilaksanakan dan *Comply* The assessment of the Board of Commissioners' performance is regulated in the Corporate Governance Guidelines and Board Manual. The Board of Commissioners also has a Key Performance Indicator (KPI) collegially and individually approved by the Shareholders, as a work target of the Board of Commissioners. Implemented and Comply
B.2.2.	Rekomendasi 9 : Kebijakan penilaian sendiri *(self assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Penjelasan : Pengungkapan kebijakan *self assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Dewan Komisaris. Recommendation 9: Self Assessment policy to evaluate Board of Commissioners' performance shall be disclosed in the Annual Report of Public Company. Explanation: The disclosure on policy of Board of Commissioners' performance Self Assessment is conducted not only to fulfill the transparency aspect as part of performance accountability, but also to give confidence to shareholders or investors upon the efforts to improve Board of Commissioners' performance. This disclosure enables shareholders or investors to acknowledge the check and balance mechanism on Board of Commissioners' performance.	Setiap tahunnya Perusahaan menerbitkan Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Pemegang Saham dan dipublikasikan melalui *website* perusahaan Didalam Laporan tahunan juga disajikan tugas dan kegiatan Dewan Komisaris dalam satu tahun terakhir termasuk memberikan penilaian atas kinerja Direksi dan peran Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan. Telah dilaksanakan dan *Comply* Each year the Company publishes an Annual Report which is submitted to the Shareholders and published on the Company's website. The annual report also presents the duties and activities of the Board of Commissioners in the past year including providing an assessment of the performance of the Board of Directors and the role of the Board of Commissioners in conducting supervision. Implemented and Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	*Comply or Explain*
B.2.3.	Rekomendasi 10 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Recommendation 10: Board of Commissioners has policy on resignation of Board of Commissioners members if involved in financial crime. Explanation: The resignation policy of Board of Commissioners members that involved in financial crime is a policy that can increase stakeholders' trust in Public Company, so that the Company's integrity will be maintained. This policy is required to expedite the legal process and to ensure that the legal process does not interfere business activities. In addition, from morality side, this policy builds an ethical culture within the Company's environment. This policy may be covered in the Board Manual or Code of Conduct that are applicable to Board of Commissioners. Furthermore, what is meant by involved in financial crime is the convicted status of Board of Commissioners' member from the authorized party. Such financial crimes include manipulation and fraud in the financial service activities and Money Laundering Crime Act as referred to Law No.8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crime.	Perusahaan memiliki *Board Manual* sebagai dasar tata kelola antar organ perusahaan yang mengatur tentang kebijakan pengunduran diri serta termasuk mengatur Etika jabatan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Selain itu Dewan Komisaris juga menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen penegakan Etika jabatan yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Telah dilaksanakan dan *Comply* The Company has a Board Manual as the basis for governance among the Company's organs that regulates the resignation policy and includes regulating the Ethics of position and matters prohibited by the Board of Commissioners. In addition, Board of Commissioners also signed an Integrity Pact as a commitment to upholding the ethics of position in accordance with the Company's values. Implemented and Comply
B.2.4.	Rekomendasi 11 : Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan. Recommendation 11: Board of Commissioners or Committee who is in charge in Nomination and Remuneration function formulates succession policy in Board of Directors members nomination process. Explanation: Based on Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, the nomination committee has duty to formulate policies and criteria required in Board of Directors' candidates nomination process. One of the policies is the succession policy of Board of Directors members. The succession policy aims to maintain the leadership regeneration process in the Company in order to maintain the Company's business sustainability and long-term goals.	Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas melakukan proses nominasi untuk suksesi kepemimpinan perusahaan termasuk Direksi Telah dilaksanakan dan *Comply* The Board of Commissioners has established a Nomination and Remuneration Committee that is tasked with carrying out the nomination process for the succession of the Company's leadership including the Board of Directors. Implemented and Comply
C.	**Aspek 3 : Fungsi dan Peran Direksi** Aspect 3: Board of Directors' Role and Function	
C.1.	Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Principle 5: Strengthening Board of Directors membership and composition	

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	*Comply or Explain*
C.1.1.	Rekomendasi 12 : Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Penjelasan : Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Di samping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi. Recommendation 12: Determination of the number of Board of Directors members takes into account the condition of the Public Company and effectiveness in the decision making process. Explanation: As corporate body in charge of managing the Company, the determination of the number of Board of Directors greatly affects the Company's performance. Thus, the number of Board of Directors' members determination shall be conducted through careful consideration and shall refer to the prevailing laws and regulations, which in accordance with Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies that shall comprises of at least 2 (two) persons. In addition, in determining the number of Board of Directors shall be based on the need to achieve the Company's goals and objectives and adjusted to the Company's conditions, including characteristics, capacity and size, and how effective Board of Directors in decision making.	Saat ini jumlah Direksi sebanyak 7 orang yang salah satunya berperan sebagai Direktur Utama. Pembagian tugas Direksi terdiri atas 7 Direktorat yang saling terkait dan sesuai dengan kebutuhan perusahan ke depan. Setiap Direktorat membawahi Divisi yang telah disesuaikan dan dikelompokkan berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing Direktorat, sehingga setiap Divisi memiliki tugas dan fungsi yang saling melengkapi untuk pencapaian tujuan perusahaan. Saat ini perusahan memiliki 23 Divisi yang di pimpin oleh Group Head dan dibantu oleh Departement Head Telah dilaksanakan dan *Comply* Currently, there are 7 Directors, one of whom serves as the President Director. The Board of Directors' division of duties consists of 7 Directorates that are interrelated and in accordance with the needs of the Company going forward. Each Directorate oversees Divisions that have been adjusted and grouped based on the duties and functions of each Directorate, so that each Division has complementary duties and functions to achieve Company goals. Currently, the Company has 23 Divisions led by Group Heads and assisted by Department Heads. Implemented and Comply
C.1.2.	Rekomendasi 13 : Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Penjelasan : Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial. Recommendation 13: Determination of Board of Directors members composition takes into account the diversity of required skill, knowledge and experience. Explanation: As with Board of Commissioners, the diversity of Board of Directors' members composition is the desirable characteristics of Board of Directors as an organization and Board of Directors members as an invidual, in accordance to the Company's needs. The combination is determined by taking into account the appropriate skills, knowledge and experiences on Board of Directors' division and functions in achieving the Company's objectives. Therefore, the characteristics consideration will have an impact in the accuracy of nomination process and individual appointment of Board of Directors's members in a collegial manner.	Perusahaan saat ini memiliki komposisi anggota Direksi yang beragam namun sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pengalaman dan kompetensi yang mumpuni. Telah dilaksanakan dan *Comply* The Company currently has a diverse composition of Board of Directors members who are in accordance with their duties and functions based on qualified experience and competence. Implemented and Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	*Comply or Explain*
C.1.3.	Rekomendasi 14 : Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Penjelasan : Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait. Recommendation 14: Board of Directors member who supervises Accounting or Finance has expertise and/or knowldege in Accounting. Explanation: The Financial Statements is the management accountability report on managing the resources owned by the Public Company, which must be prepared and presented in accordance with the generally accepted Financial Accounting Standards in Indonesia as well as related OJK regulations, including regulation on the Capital Market sector regarding the presentation and disclosure of Public Company's Financial Statements. Under the Capital Market sector laws and regulations that governing Board of Directors' responsibilities on the Financial Statements, Board of Directors is jointly and severally liable for the Financial Statements, signed by the President Director and Director that is in charge of accounting or finance. Thus, the disclosure and compilation of financial information presented in the financial statements will largely depend on the expertise, and/or knowledge of Board of Directors, especially members of Board of Directors in charge of accounting or finance. The expertise and/or knowledge qualification in the accounting field at least give Board of Directors members confidence in the preparation of Financial Statements, so that the Financial Statements can be relied upon by the stakeholders as the basis for economic decision making. Such expertise and/or knowledge may be evidenced by educational background, training certification and/or related work experience.	Direksi bertanggung jawab dalam penyajian laporan keuangan dan setiap tutup tahun dilakukan audit kewajaran atas penyajian laporan keuangan oleh Auditor eksternal. Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan melakukan fungsi pengendalian disetiap proses transaksi keuangan sampai transaksi tersebut dibukukan dalam pencatatan keuangan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi dan Keuangan yang senantiasa dievaluasi dan disesuaikan dengan ketentuan PSAK terkini. Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan memiliki kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Telah dilaksanakan dan *Comply* Board of Directors is responsible for the presentation of financial statements and at the end of each year, an audit of the fairness of the presentation of financial statements is carried out by an external auditor. Board of Directors in charge of accounting and finance performs a control function in every financial transaction process until the transaction is recorded in the financial records in accordance with the Accounting and Financial Policies which are constantly evaluated and adjusted to the latest PSAK provisions. Board of Directors in charge of accounting and finance have adequate qualifications, competence and experience in carrying out their duties. Implemented and Comply
C.2.	Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6: Improve the quality of Board of Directors duty and responsibility implementation.	

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	*Comply or Explain*
C.2.1.	Rekomendasi 15 : Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi. Penjelasan : Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. *Self assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya *self assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Recommendation 15: Board of Directors has self assessment policy to evaluate Board of Directors' performance. Explanation: As with Board of Commissioners, Board of Directors' self assessment policy is a guideline used as a performance accountability for Board of Directors in a collegial manner. The Self Assessment is conducted by each member of Board of Directors to assess Board of Directors' performance in a collegial manner rather than assessing the individual performance of each member of Board of Directors. With the existence of Self Assessment is expected that each member of Board of Directors can contribute to improve Board of Directors' performance on an ongoing basis. The policy contains assessment activities undertaken, purposes and objectives, periodic execution time, and assessment indicators and criteria used in accordance with the recommendations given by the nomination and remuneration function of the Company, where such function is required in Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.	Setiap triwulan Direksi menerbitkan laporan kinerja perusahaan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Kebijakan penilaian kinerja Direksi sesuai dengan Pedoman tata kelola perusahaan dan *Board Manual*. Pelaporan atas Kinerja Direksi sesuai dengan *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah disetujui oleh Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. Penilaian Direksi dilakukan secara Kolegial dan Individual. Telah dilaksanakan dan *Comply* Every quarter the Board of Directors publishes a Company performance report and is reported to the Board of Commissioners and Shareholders. The Board of Directors performance assessment policy is in accordance with the Corporate Governance Guidelines and Board Manual. Reporting on the Board of Directors' performance is in accordance with the Key Performance Indicator (KPI) approved by the Shareholders and Board of Commissioners. The Board of Directors assessment is conducted collegially and individually. Implemented and Comply
C.2.2.	Rekomendasi 16 : Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. Penjelasan : Pengungkapan kebijakan *self assessment* atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Direksi. Recommendation 16: Self-assessment policy to evaluate Board of Director's performance shall be disclosed in the Annual Report of Public Company. Explanation: The disclosure of Self Assessment policy on Board of Directors' performance is conducted not only to fulfill the transparency aspect as a performance accountability, but also to provide important information regarding improvement efforts in the management of the Public Company. Such information is very useful to provide confidence to shareholders or investors that there is certainty of corporate management to be continuously carried out in a better direction. With the disclosure, shareholders or investors acknowledge the check and balance mechanism on Board of Directors' performance	Direksi telah mengungkapkan penilaian kinerja Direksi melalui laporan tahunan Perusahaan. Telah dilaksanakan dan *Comply* The Boards of Directors have disclosed the Board of Directors' performance appraisal through the Company's annual report. Implemented and Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	*Comply or Explain*
C.2.3.	Rekomendasi 17 : Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Recommendation 17: Board of Directors has policy related to resignation of Board of Directors member if involved in financial crime. Explanation: The resignation policy of Board of Directors members that involved in financial crime is a policy that can increase stakeholders' trust in Public Company, so that the Company's integrity will be maintained. This policy is required to expedite the legal process and to ensure that the legal process does not interfere business activities. In addition, from morality side, this policy builds an ethical culture within the Company's environment. This policy may be covered in the Guidelines or Code of Conducts that are applicable to Board of Directors Furthermore, what is meant by involved in financial crime is the convicted status of Board of Directors member from the authorized party. Such financial crimes include manipulation and fraud in the financial service activities and Money Laundering Crime Act as referred to Law No.8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crime	Perusahaan memiliki *Board Manual* sebagai dasar tata kelola antar organ perusahaan yang mengatur pengunduran diri anggota Direksi termasuk mengatur Etika jabatan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Direksi. Selain itu Direksi juga menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen penegakan Etika jabatan yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan Telah dilaksanakan dan *Comply* The Company has a Board Manual as the basis for governance among the Company's organs that regulates the resignation of members of Boards of Directors including regulating the Ethics of office and things that are prohibited by the Boards of Directors. In addition, the Board of Directors also signed an Integrity Pact as a commitment to uphold the ethics of position in accordance with the Company's values. Implemented and Comply
D.	**Aspek 4 : Partisipasi Pemangku Kepentingan** Aspect 4: Stakeholders Participation	
D.1.	Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7: Improve Corporate Governance Aspect through Stakeholders Participation.	
D.1.1.	Rekomendasi 18 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Penjelasan : Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya insider trading tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien. Recommendation 18: Public Company has policy to prevent insider trading. Explanation: A person who has inside information is prohibited to engaging in a Securities transaction by using inside information as referred to the Capital Market Law. Public Companies can minimize the occurrence of insider trading through prevention policies, for example by strictly separating confidential data and/or public information, as well as dividing the management duties and responsibilities for such information in a proportionate and efficient manner	Perusahaan tidak menerbitkan Saham pada Pasar Modal, karena perusahaan merupakan BUMN yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Telah dilaksanakan dan *Comply* The Company has a Code of Conduct policy in which it regulates anti-corruption and anti-fraud. In addition, all employees also sign an Integrity Pact as a commitment to upholding the ethics of the position in accordance with the Company's values. Implemented and Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	*Comply or Explain*
D.1.2.	Rekomendasi 19 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan Antikorupsi dan anti *fraud*. Penjelasan : Kebijakan Antikorupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, *prudent*, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain. Recommendation 19: Public Company has anti-corruption and anti-fraud policy. Explanation: Anti-corruption policy is useful to ensure that the Company's business activities are conducted legally, prudently, and in accordance with the principles of good governance. The policy may be part of the code of conduct, or in its own form. The policy may include, among others, the programs and procedures undertaken in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in the Public Company. The policy scope should illustrate the Public Company's prevention against any corrupt practices of either giving or receiving from other parties.	Perusahaan memiliki kebijakan Kode Etik Bisnis dimana di dalamnya mengatur mengenai Antikorupsi dan anti *fraud* Selain itu Seluruh Pegawaii juga menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen penegakan Etika jabatan yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan Telah dilaksanakan dan *Comply* The Company has a Code of Conduct policy in which it regulates anti-corruption and anti-fraud. In addition, all employees also sign an Integrity Pact as a commitment to upholding the ethics of the position in accordance with the Company's values. Implemented and Comply
D.1.3.	Rekomendasi 20 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Penjelasan : Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (*supply chain*) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor. Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman *Procurement*. Recommendation 20: Public Company has policy on suppliers and vendors selection and capacity building. Explanation: The policy on suppliers or vendors selection is useful to ensure that Public Company obtains the goods or services needed at competitive prices and good quality. While the policy on capacity building of suppliers or vendors is useful to ensure that the supply chain runs efficiently and effectively. The ability of suppliers or vendors to supply/fulfill the goods or services needed by the Company will affect the quality of the Company's output. The implementation of these policies can guarantee supply continuity, both in terms of quantity and quality required by Public Company. The scope of these policies includes criteria in selecting suppliers or vendors, transparent procurement mechanism, efforts to increase the ability of suppliers or vendors, and fulfillment of rights relating to suppliers or vendors. The Company has a policy related to the procurement of goods and services which contains the selection and improvement of supplier or vendor capabilities as stated in the standard Procurement Guidelines.	Perusahaan memiliki Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Peraturan Direksi yang telah mengatur mengenai mekanisme seleksi pemasok/ vendor dan jenis-jenis pengadaannya. Telah dilaksanakan dan *Comply* The Company has a Goods and Services Procurement Policy through a Board of Directors Regulation that regulates the supplier/vendor selection mechanism and the types of procurement. Implemented and Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	*Comply or Explain*
D.1.4.	Rekomendasi 21 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Penjelasan : Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur. Recommendation 21: Public Company has policy on creditors' rights fulfillment. Explanation: The creditors' rights fulfillment policy is used as a guide in providing loan to creditors. The policy's objective is to maintain the rights fulfillment and the creditors' trust to the Company. The policy includes consideration in making agreements, as well as follow-up in obligations fulfilment by the Company to the creditors.	Belum dilaksanakan dan *Explain* Saat ini Perseroan masih menyusun kebijakan terkait pemenuhan hak-hak kreditur. Not Implemented and Explain Currently, the Company preparing related policies fulfillment of creditor rights.
D.1.5.	Rekomendasi 22 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*. Penjelasan : Kebijakan sistem *whistleblowing* yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem *whistleblowing* mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *whistleblowing*, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan. Recommendation 22: Public Company has whistleblowing system policy. Explanation: Well-structured whistleblowing policy will provide protection assurance to witnesses or whistleblowers for a violation indication committed by employee or management. Policy system implementation will have an impact on the establishment of good corporate governance culture. Whistleblowing system policies include, among others, types of offenses, complaints, whistleblower's protection and confidentiality, complaint handling, complaint handling party, and the results of handling and follow-up.	Perusahaan telah memiliki kebijakan *Whistleblowing System* (WBS) melalui Surat Keputusan Direksi NoHK.01/25/3/5/HLTI/UTMA/PLND-22 tanggal 25 Maret 2022 Sistem WBS diterapkan melalui 6 saluran utama yaitu: *Web Online* : https://pelindobersih.whistleblowing.link/ Telepon : +62 21 2782 2345 Faksimile : +62 21 2782 3456 SMS/WhatsApp: +62 811 933 2345 / +62 811 9511 665 Email : pelindobersih@whistleblowing.link Pos : Pelindo Bersih. PO Box 1074. JKS 12010 Perusahaan juga mempunyai Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Tugas dan Tanggung Jawab komite Pelindo Bersih dalam Pelaksanaan *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) nomor SK.01.01/31/12/1/HLTI/UTMA/PLND-31 tanggal 31 Desember 2021 Telah dilaksanakan dan *Comply* The Company has a Whistleblowing System (WBS) policy through the Board of Directors Decree NoHK.01/25/3/5/HLTI/UTMA/PLND-22 dated March 25, 2022. The WBS system is implemented through 6 main channels, namely: Online Web: https://pelindobersih.whistleblowing.link/ Telephone : +62 21 2782 2345 Fax : +62 21 2782 3456 SMS / WhatsApp: +62 811 933 2345 / +62 811 9511 665 Email : pelindobersih@whistleblowing.link Post : Pelindo Bersih. PO Box 1074. JKS 12010 The Company also has a Board of Directors Decree of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regarding the Duties and Responsibilities of the Pelindo Bersih committee in Implementing the Whistleblowing System of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) number SK.01.01/31/12/1/HLTI/UTMA/PLND-31 dated December 31, 2021. Implemented and Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	*Comply or Explain*
D.1.6.	Rekomendasi 23 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Penjelasan : Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk menigkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada. Recommendation 23: Public Company has long-term incentives for Board of Directors and employees. Explanation: Long-term incentives are incentive based on long-term performance achievement. Long-term incentive plan has a rationale that the Company's long-term performance is reflected by the stock value growth or other long-term targets of the Company. Long-term incentives are useful in order to maintain loyalty and motivate Board of Directors and employees to improve performance or productivity that will impact on improving the Company's performance over the long term. The long-term incentives policy is the Company's actual commitment to encourage the long-term incentives to Board of Directors and Employees on terms, procedures and forms that are comply to long-term objectives of the Company. Such policies may include, goals and purposes of providing long-term incentives, terms and procedures for granting incentives, as well as the conditions and risks to be considered by the Company in providing incentives. The policy may also be included in the Company's existing remuneration policy.	Perusahaan telah memiliki Jaminan Hari Tua untuk Direksi dan Karyawan Selain itu Direksi juga diberikan asuransi purna jabatan Telah dilaksanakan dan *Comply* The Company has a retirement insurance for the Board of Directors and Employees. In addition, Board of Directors are also provided with post-employment insurance Implemented and Comply
E.	**Aspek 5 : Keterbukaan Informasi** Aspect 5: Information Disclosure	
E.1.	Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Principle 8: Improve the implementation of information disclosure.	

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	*Comply or Explain*
E.1.1.	Rekomendasi 24 : Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. Penjelasan : Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan. Recommendation 24: Public Company utilizes broader information technology application besides website as means of information disclosure. Explanation: Information technology can be useful as a way of information disclosure. The information disclosure is not only those that have been regulated in legislation, but also other information related to the Company that is felt useful to be known by shareholders or investors. With the utilization of more widely technology than the Website, the Company is expected to improve the corporate information dissemination effectiveness. Nevertheless, the information technology utilization should still pay attention to the Company's benefits and costs.	Perusahaan telah memiliki *website* resmi melalui www.pelindo.co.id, pemutahiran *website* ini dilakukan secara periodik dan merupakan tanggung jawab Sekretariat perusahaan. Selain itu perusahaan juga memiliki media sosial melalui Youtube, Twitter, Facebook dan instagram Telah dilaksanakan dan *Comply* The Company has an official website through www.pelindo.co.id, the updating of this website is carried out periodically and is the responsibility of Corporate Secretariat. In addition, the Company also has social media through Youtube, Twitter, Facebook and Instagram. Implemented and Comply
E.1.2.	Rekomendasi 25 : Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. Penjelasan : Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali. Recommendation 25: Annual Report of Public Company shall disclose the shareholding of Public Company minimum 5% (five percent), in addition to disclosure of end-benefit owners in the shareholding of Public Company via major and controlling shareholders. Explanation: The Capital Market sector legislation in governing the Company's annual report submission has set out the obligation to disclose information regarding the shareholders of 5% (five percent) or more as well as the major and controlling shareholders of the Company either directly or indirectly up to the end-benefit owners in the ownership of such shares. In the Governance Manual, it is recommended to disclose the end-benefit owners of Public Company's shares of at least 5% (five percent), other than to disclose the end-benefit owners of shares by major and controlling shareholders.	Saham Perusahaan saat masih dimiliki oleh mayoritas Pemerintah, karena status perusahaan sebagai BUMN. Saham Perusahaan belum dimiliki oleh masyarakat karena perusahaan belum melakukan IPO. Telah dilaksanakan dan *Comply* The Company's shares are still majority-owned by the Government, due to the Company's status as a state-owned enterprise. The Company's shares are not yet owned by the public because the Company has not conducted an IPO. Implemented and Comply

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

Good Corporate Governance Assessment

Untuk mengetahui efektivitas dan mengukur tingkat implementasi praktik GCG di lingkup usaha, Perseroan setiap tahunnya melakukan asesmen GCG. Pelaksanaan asesmen GCG ini menghasilkan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai acuan Perseroan dalam melakukan perbaikan praktik GCG di Perseroan secara berkelanjutan. Prosedur pelaksanaan penilaian GCG Pelindo mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER- 09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/MMBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara.
4. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Surat Edaran Kementerian Negara BUMN No. SE14/ MBU/2010 tanggal 11 November 2010 tentang Program *Assessment* dan *Review* Pelaksanaan GCG.

To identify the effectiveness and measure the level of GCG practices implementation in the business scope, the Company annually conducts a GCG assessment. The GCG assessment produces recommendations that can be used as a reference for the Company in continuously improving GCG practices in the Company. The procedure of Pelindo's GCG assessment refers to several provisions, including:

1. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.
2. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 on Amendment to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.
3. Decree of the Minister of SOEs No. KEP-117/MMBU/2002 dated August 1, 2002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises.
4. Decree of the Secretary of Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
5. Circular Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SE14/ MBU/2010 dated November 11, 2010 concerning Assessment and Review Program of GCG Implementation.

KRITERIA PENILAIAN

Assessment GCG untuk tahun buku 2021 dilakukan secara Diagnostik Asesmen. Diagnostik Asesmen dimaksudkan untuk mengukur kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) pada Pelindo untuk Tahun Buku 2021 dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan tanpa mengeluarkan *score*. Ruang lingkup dan metodologi diagnostik asesmen tetap merujuk pada kriteria indikator dan parameter yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Sekretaris Menteri BUMN No. S-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Indikator yang digunakan dalam *assessment* GCG tersebut meliputi:

1. Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
4. Direksi;
5. Pengungkapan informasi dan transparansi; dan
6. Aspek lainnya.

ASSESSMENT CRITERIA

GCG Assessment for 2021 fiscal year was carried out by Diagnostic Assessment. The Diagnostic Assessment is intended to measure the quality of the implementation of good corporate governance (GCG) at Pelindo for 2021 fiscal year and provide suggestions for necessary improvement required without issuing a score. The scope and methodology of diagnostic assessment still refer to the criteria for indicators and parameters that have been determined based on the Letter of Secretary of the Minister of SOEs No. S-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. The indicators used in the GCG assessment are:

1. Commitment on sustainable implementation of good corporate governance;
2. Shareholders and GMS/Capital Owners;
3. Board of Commissioners/Supervisory Board;
4. Board of Directors;
5. Disclosure of information and transparency; and
6. Other aspects.

PIHAK YANG MELAKUKAN *ASSESSMENT*

Metode diagnostic *assessment* dilakukan dengan pendampingan oleh BPKP. Diagnostic *assessment* adalah penilaian GCG tanpa mengeluarkan skor, namun menghasilkan *Area of Improvement* (AoI) untuk perbaikan penerapan GCG di tahun depan.

ASSESSOR

The diagnostic assessment method was carried out with assistance from BPKP. The diagnostic assessment is a GCG assessment without scores, but produces Areas of Improvement (AoI) to improve GCG implementation the following year.

HASIL PENILAIAN DAN REKOMENDASI

ASSESSMENT RESULTS AND RECOMMENDATIONS

HASIL PENILAIAN DAN REKOMENDASI TAHUN 2021

Hasil diagnostik asesmen penerapan GCG pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2021, menunjukkan sebanyak 22 dari 43 indikator perlu mendapat perbaikan.

ASSESSMENT RESULTS AND RECOMMENDATIONS IN 2021

The diagnostic assessment of GCG at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in 2021, shows that 22 out of 43 indicators need improvement.

No.	Aspek *Governance* Governance Aspects	Indikator yang memerlukan perbaikan Indicators that need improvement
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment on Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	1 dan 2 1 and 2
2	Pemegang Saham Shareholders	9
3	Dewan Komisaris Board of Commissioners	13, 14, 15,16, 17, 18, 21, 22, 23 dan/and 24
4	Direksi Board of Directors	26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, dan/and 37
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	40
6	Aspek Lainnya Other Aspect	-

Adapun rekomendasi hasil diagnostik asesmen tahun 2021 yang telah ditindaklanjuti adalah sebagai berikut.

Adapun rekomendasi hasil diagnostik asesmen tahun 2021 yang telah ditindaklanjuti adalah sebagai berikut.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow Up
Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan. **Commitment on Sustainable Implementation of Good Corporate Governance Aspect**		
1	Direksi bersama Dewan Komisaris agar menyusun dan menandatangani pernyataan komitmen untuk mematuhi etika bisnis perusahaan. Board of Directors together with Board of Commissioners should develop and sign a statement of commitment to comply with the Company's business ethics.	Deklarasi Direksi dan Dewan Komisaris telah selesai ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Board of Directors and Board of Commissioners Declaration has been signed by Board of Commissioners and Board of Directors.
2	Direksi menyusun Laporan pelaksanaan tata Kelola perusahaan yang baik (GCG) minimal setahun sekali dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan RUPS/ Pemegang Saham. Board of Directors prepares a report on GCG implementation at least once a year and submits it to Board of Commissioners and GMS/Shareholders.	Telah dilakukan penyampaian laporan GCG kepada Pemegang Saham, Dekom dan Direksi. GCG reports have been submitted to the Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow Up
Aspek Pemegang Saham **Shareholders Aspect**		
3	Pemegang saham agar melakukan upaya percepatan pembahasan rancangan RJPP Tahun 2021-2025 bersama Direksi dan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero), untuk selanjutnya mengesahkannya sehingga dapat dipedomani. Shareholders should make efforts to accelerate the discussion of RJPP draft for 2021-2025 with Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), to subsequently ratify it so that it can be guidelines.	Rancangan RJPP 2021-2025 telah disampaikan kepada Pemegang Saham. Kemudian Penyampaian penyesuaian RJPP kepada Kementerian BUMN telah disampaikan. AOI selesai 100% dengan catatan bahwa ranah pengesahan RJPP berada di Kementerian BUMN. The 2021-2025 RJPP draft has been submitted to Shareholders. Then the RJPP adjustments has been submitted to he Ministry of SOE. AOI is 100% complete with a note that the realm of RJPP ratification lies with the Ministry of SOEs.
Aspek Dewan Komisaris **Board of Commissioners Aspect**		
4	Menetapkan anggaran pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris dengan penganggaran yang terpisah dari rencana pelatihan untuk karyawan di RKAP. Establish a training budget for Board of Commissioners members that is separate from the training plan for employees in the RKAP.	Anggaran pelatihan Dewan Komisaris di dalam RKAP telah dipisahkan dengan anggaran pelatihan Karyawan. The Board of Commissioners training budget in the RKAP has been separated from the Employee training budget.
5	Menetapkan aturan internal Dewan Komisaris, mengenai standar angka) waktu tingkat kesegeraan pengkomunikasian keputusan Dewan Komisaris kepada Direksi, maksimal 7 (tujuh) hari sejak disahkan/ditandatangani. Establish Board of Commissioners' internal rules, regarding the standard timeframe for communicating the Board of Commissioners' decisions to Board of Directors, with a maximum of 7 (seven) days since it was passed/signed.	Terdapat didalam SOP yang telah disahkan Dewan Komisaris. It is contained in the SOP that was approved by Board of Commissioners.
6	Rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris agar disampaikan kepada Pemegang saham untuk mendapatkan pengesahan. The Board of Commissioners' annual work plan and budget shall be submitted to the shareholders for ratification.	RKA 2023 telah disampaikan ke Kementerian BUMN melalui surat nomor 75/DK/PI/IX-2022 tanggal 27 September 2022. The 2023 RKA has been submitted to the Ministry of SOEs through letter number 75/DK/PI/IX-2022 dated September 27, 2022.
7	Mempercepat dan memastikan bahwa RJPP disetujui dan disahkan oleh Pemegang Saham/RUPS. Accelerate and ensure that the RJPP is approved and ratified by the Shareholders/RUPS.	Surat No.14/DK/PI/II-2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Tanggapan atas Usulan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tahun 2021-2025. Letter No.14/DK/PI/II-2022 dated February 23, 2022 concerning Responses to the Proposed Company Long-Term Plan (RJPP) of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for 2021-2025.
8	Memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RKAP yang disampaikan kepada Direksi, dan ditembuskan ke Pemegang Saham/RUPS untuk bahan pertimbangan keputusan Pemegang Saham/ RUPS. Provide opinions and suggestions on the draft RKAP submitted to the Board of Directors, and forwarded to the Shareholders/RUPS for consideration of the Shareholders/RUPS resolution.	Pada bulan Oktober Dewan Komisaris telah mengirimkan surat kepada Kementerian terkait tanggapan RKAP 2023. In October, Board of Commissioners sent a letter to the Ministry regarding the 2023 RKAP response.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow Up
9	Menginstruksikan Direksi agar membuat fasilitas teknologi dan ppara informasi perusahaan, yang dapat digunakan Dewan Komisaris untuk mengakses setiap perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan (contoh: *Dashboard* Dewan Komisaris). Instruct Board of Directors to create technology facilities and Company information, which can be used by the Board of Commissioners to access any changes in the business environment and problems faced by the Company (example: Board of Commissioners Dashboard).	Telah diimplementasikan *Dashboard Executive Summary* untuk bidang Operasional, Peralatan, SDM, dan Keuangan. Executive Summary Dashboards have been implemented for Operations, Equipment, HC and Finance.
10	Melakukan pembaruan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-13/DK/PIIINII 1/2017 tentang SOP Proses Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dewan Komisaris. Updating the Board of Commissioners' Decree Number: KEP-13/DK/PIIINII 1/2017 on the SOP for the Implementation Process of Board of Commissioners' Duties and Functions.	Telah disahkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 27 September 2022. Has been approved by the Board of Commissioners on September 27, 2022.
11	Menyampaikan arahan Dewan Komisaris tentang peningkatan efektivitas ppara pengendalian intern, baik tingkat entitas maupun operasional/aktivitas, serta pelaporan penerapannya kepada Direksi. Deliver the Board of Commissioners' direction on improving the effectiveness of internal control, both at the entity and operational/activity levels, and reporting its implementation to the Board of Directors.	Tercantum di tanggapan Triwulan 1. Listed in the Quarter 1 response.
12	Menginstruksikan Direksi agar mempercepat proses penyusunan *Master Plan* teknologi informasi, selanjutnya Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap kebijakan dan pelaksanaan teknologi informasi perusahaan berdasarkan *Master Plan* teknologi informasi tersebut. Instruct Board of Directors to accelerate the process of preparing the information technology Master Plan, and then the Board of Commissioners provided direction on the policies and implementation of the Company's information technology based on the information technology Master Plan.	1. Tanggal 6 Oktober *meeting* bersama GH IT untuk meminta penjelasan terkait progress pengembangan *Master Plan* IT 2. Tanggal 24 Oktober Rapat Komisaris Direksi (Rakomdir) dengan salah satu agenda adalah pembahasan pengembangan *master plan* IT. 1. On October 6, meeting with GH IT to request an explanation regarding the progress of the IT master plan development. 2. On October 24, Board of Commissioners Meeting (Rakomdir) with one of the agendas is the discussion on the development of IT master plan.
13	Menyampaikan arahan Dewan Komisaris tentang kebijakan dan penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan kepada Direksi. Provide direction to the Board of Commissioners on the policy and application of accounting and preparation of financial statements to Board of Directors.	Tercantum di tanggapan TW.3 Saat ini draft tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja TW 3 dalam *review* akhir Dewan Komisaris. Listed in the 3rd quarter response Currently the Board of Commissioners' draft response to the 3rd quarter performance is under final review by the Board of Commissioners.
14	Menetapkan RKA Dewan Komisaris, mengenai pengawasan dan pemberian nasihat atas kebijakan dan pelaksanaan pengadaan. Establish the Board of Commissioners' RKA, regarding supervision and advising on procurement policies and implementation.	RKA 2023 telah disampaikan melalui surat No. 75/DK/PI/IX-2022 tanggal 27 September 202. 2023 RKA has been submitted through letter No. 75/DK/PI/IX-2022 dated September 27, 2022.
15	Melakukan pembahasan/telaah, dan penyampaian arahan Dewan Komisaris atas kebijakan dan pelaksanaan pengadaan kepada Direksi. Discussing/reviewing, and submitting the Board of Commissioners' direction on procurement policy and implementation to Board of Directors.	Tanggal 4 November telah diadakan pembahasan dengan GH Pengadaan bersama dengan Komite untuk me*review* kebijakan pengadaan saat ini. On November 4, a discussion was held with GH Procurement together with the Committee to review the current procurement policy.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow Up
16	Menetapkan RKA Dewan Komisaris, mengenai pengawasan dan pemberian nasihat atas kebijakan dan pelaksanaan mutu dan pelayanan perusahaan. Determine the Board of Commissioners' RKA, regarding supervision and advising on the policies and implementation of the Company's quality and services.	RKA 2023 telah disampaikan melalui surat No. 75/DK/PI/IX-2022 tanggal 27 September 2022. 2023 RKA has been submitted through letter Number 75/DK/PI/IX-2022 dated September 27, 2022
17	Menetapkan RKA Dewan Komisaris, mengenai pengawasan dan pemberian nasihat atas kepatuhan Direksi terhadap perjanjian dengan pihak ketiga. Establish the Board of Commissioners' RKA, regarding supervision and advising on the Board of Directors' compliance with agreements with third parties.	RKA 2023 telah disampaikan melalui surat No. 75/DK/PI/IX-2022 tanggal 27 September 2022. 2023 RKA has been submitted by letter No. 75/DK/PI/IX-2022 dated September 27, 2022.
18	Melaksanakan pengawasan dan pemantauan Dewan Komisaris atas kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP. Carry out the Board of Commissioners' supervision and monitoring of the Board of Directors' compliance in running the Company in accordance with the RKAP and/or RJPP.	Surat No. 26/DK/PI/IV-2022 tanggal 18 April 2022 tentang Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan IV Tahun buku 2021 PT Pelindo telah dikirimkan ke Kementerian BUMN. Letter No. 26/DK/PI/IV-2022 dated April 18, 2022 concerning the Board of Commissioners Supervisory Duties Report for the fourth quarter of 2021 fiscal year of PT Pelindo has been sent to the Ministry of SOEs.
19	Menetapkan anggaran biaya audit eksternal dalam RKA Dewan Komisaris. Determine the external audit fee budget in the Board of Commissioners' RKA.	Berdasarkan hasil diskusi dengan Dewan Komisaris dan Komite, disepakati bahwa untuk anggaran biaya audit eksternal tetap sebagai anggaran Dewan Direksi karena pelaksanaan kerja sama dengan KAP dilakukan oleh Dewan Direksi. Based on the results of discussions with the Board of Commissioners and Committee, it was agreed that the budget for external audit fees remains as the Board of Directors' budget because the implementation of cooperation with KAP is carried out by the Board of Directors.
20	Menyampaikan surat usulan auditor eksternal oleh Dewan Komisaris kepada RUPS. Submitting a proposal letter for external auditors by the Board of Commissioners to the GMS.	Surat No.24/DK/PI/IV-2022 tanggal 13 April 2022 tentang Usulan Penetapan dan Persetujuan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2022. Letter No.24/DK/PI/IV-2022 dated April 13, 2022 regarding the Proposal for Determination and Approval of the Public Accounting Firm for 2022 fiscal year.
21	Menambahkan pelaksanaan telaah atas pengaduan perusahaan/BUMN yang diterima Dewan Komisaris pada Rencana Dewan Komisaris (RKA Dewan Komisaris). Adding the implementation of the review of Company/SOE complaints received by the Board of Commissioners to the Board of Commissioners' Plan ("BOC RKA").	RKA 2023 telah disampaikan melalui surat No. 75/DK/PI/IX-2022 tanggal 27 September 2022. 2023 RKA has been submitted through letter No.75/DK/PI/IX-2022 dated September 27, 2022.
22	Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas audit eksternal. Provide direction to the Board of Directors on improving the effectiveness of external audit.	Laporan No.01/KA/PI/IV-2022 tanggal 8 April 2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Audit atas Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tahun 2021 oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja. Report No.01/KA/PI/IV-2022 dated April 8, 2022 regarding Evaluation Report on the Audit of the Financial Statements of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for 2021 by KAP Purwantono, Sungkoro and Surja.
23	Menetapkan RKA Dewan Komisaris dengan rencana pengawasan atas kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan. Establish the Board of Commissioners' RKA with a plan to supervise the policies and implementation of subsidiary management.	RKA 2023 telah disampaikan melalui surat Nomor 75/DK/PI/IX-2022 tanggal 27 September 2022. 2023 RKA has been submitted by letter Number 75/DK/PI/IX-2022 dated September 27, 2022.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow Up
24	Memperbarui Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris beserta targetnya yang ter*update* sesuai paska merger, dan disetujui RUPS. Update the Performance Achievement Indicators of Board of Commissioners along with its updated targets in accordance with the post-merger, and approved by the GMS.	Tercantum di dalam RKA 2023, telah disampaikan ke Kementerian BUMN melalui surat No. 75/DK/PI/IX-2022 tanggal 27 September 2022, serta Risalah RUPS Tahunan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pengesahan RKAP tahun 2022. Included in the 2023 RKA, it has been submitted to the Ministry of BUMN through letter No. 75/DK/PI/IX-2022 dated September 27, 2022, as well as the Minutes of Annual GMS of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regarding the Ratification of 2022 RKAP.
25	Menambahkan pedoman/tata tertib rapat Dewan Komisaris yang mengatur mengenai pembahasan/ telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS, pencantuman ketidakhadiran dalam risalah rapat, serta pencantuman pendapat yang berbeda (*dissenting comments*) dengan keputusan rapat (bila ada). Adding Board of Commissioners meeting guidelines/ rules of procedure governing the discussion/review of the Board of Directors' proposals and GMS directives/ decisions, inclusion of absences in the meeting minutes, and inclusion of dissenting comments with the meeting decision (if any).	Muatan telah dimasukan kedalam pedoaman *board manual*. Terlampir dalam Risalah Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi. The content has been included in the board manual. Attached to the Minutes of Coordination Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors.
26	Memperbarui Piagam Komite Dewan Komisaris, SOP Komite Komisaris, Program Kerja Tahunan Komite dan rencana *self-assessment* kinerja, sesuai kondisi terkini pasca merger. Update the Board of Commissioners Committee Charter, SOP of Board of Commissioners Committee, Committee Annual Work Program and performance self-assessment plan, in accordance with the latest post-merger conditions.	Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: 06/KEP-DK/PI/VII-2022 tentang Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia. Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: 06/KEP-DK/PI/VII-2022 concerning the Determination of Audit Committee Charter, GCG and Risk Management Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.
27	Pertemuan berkala Komite Nominasi dan Remunerasi agar disesuaikan dengan target program kerja tahunan. Periodic meetings of Nomination and Remuneration Committee should be adjusted to the annual work program targets.	Dalam Laporan KNR TW II 2022 untuk laporan kegiatan KNR telah disesuaikan dengan target program kerja yang telah direncanakan. In the KNR Report for 2nd Quarter of 2022, the KNR activity report has been adjusted to the planned work program target.
28	Penyerahan Risalah rapat Komite Dewan Komisaris kepada Sekretaris Dewan Komisaris secara rutin dan tepat waktu, dengan dibuatkan tanda terimanya. Submission of Minutes of Board of Commissioners Committee meetings to Secretary of Board of Commissioners on a regular and timely basis, with receipts made.	Dokumen serah terima Risalah Rapat Komite Kepada Sekretariat Dewan Komisaris sudah disusun. The handover document of the Minutes of Committee Meeting to Secretary of Board of Commissioners has been prepared.
29	Melengkapi pengungkapan substansi hasil kegiatan dan rekomendasi yang diberikan pada Laporan Komite Dewan Komisaris. Complete disclosure of the substance of activity results and recommendations given in the Board of Commissioners Committee Report.	Dalam laporan Komite kepada Dewan Komisaris untuk periode TW II 2022 telah mencakup poin-poin penting pembahasan dan telah dilengkapi dengan rekomendasinya. In the Committee report to the Board of Commissioners for the second quarter of 2022 has included important points of discussion and has been equipped with recommendations.

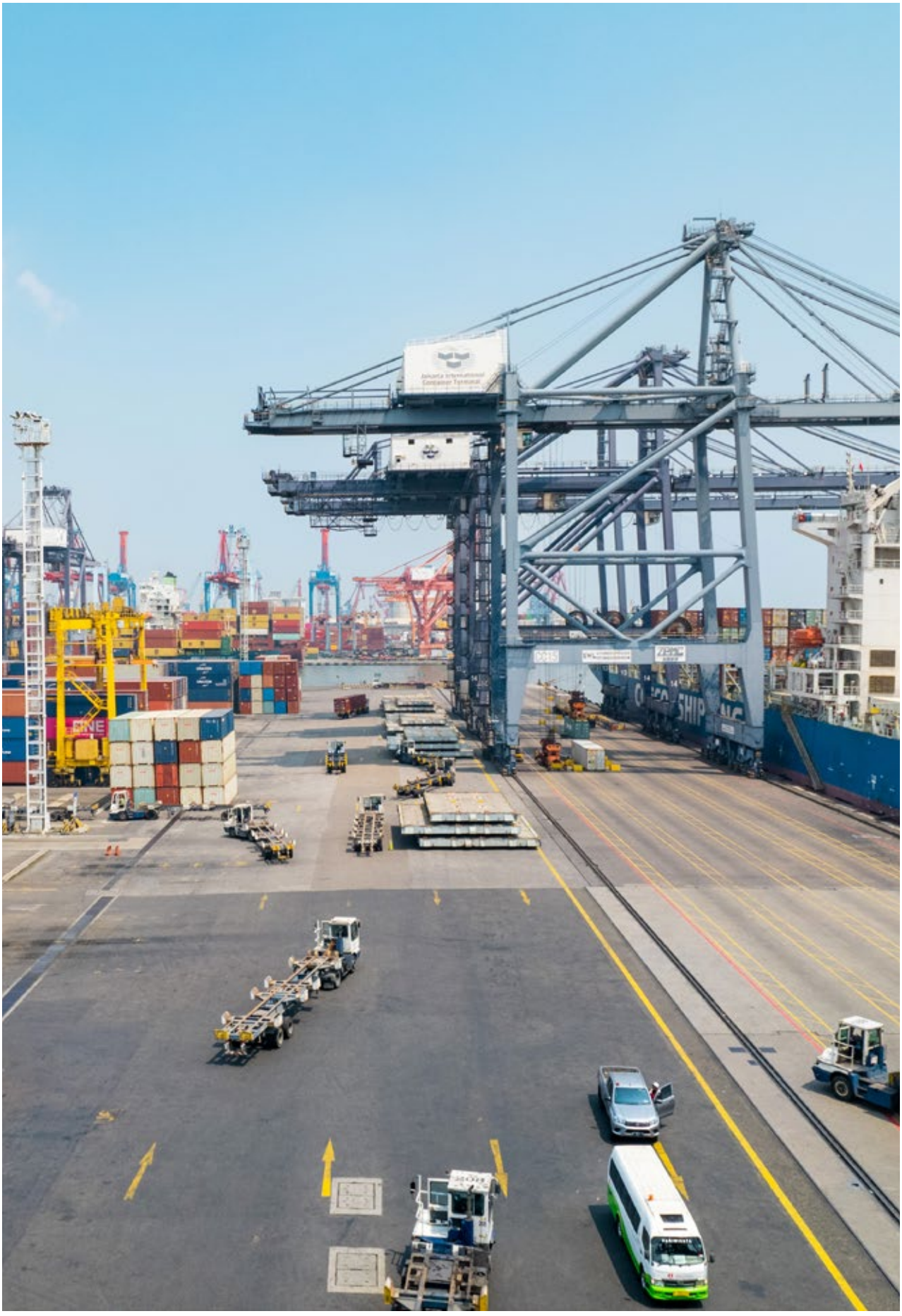
No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow Up
Aspek Direksi **Board of Directors Aspect**		
30	Menetapkan dan pengesahan seluruh SOP pada proses bisnis inti dan pendukung (non-operasional) perusahaan pasca merger. Determine and approve all SOPs on the core and supporting (non-operational) business processes of the post-merger Company.	Telah dilakukan register dan publikasi SOP di Group/Departemen Kantor Pusat. Draft final SOP dapat diakses melalui: https://bit.ly/DraftFinalSOP The SOP has been registered and published in the Head Office Group/ Department. The SOP final draft can be accessed through: https://bit.ly/DraftFinalSOP
31	Mempercepat penyelesaian rancangan RJPP 2021-2025, dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham sesuai ketentuan, serta mensosialisasikannya kepada seluruh pegawai. Accelerate the completion of the 2021-2025 RJPP draft, and submit it to the Shareholders in accordance with the provisions, and socialize it to all employees.	Perusahaan telah mengirimkan rancangan RJPP kepada Pemegang Saham. The Company has sent the RJPP draft to the Shareholders
32	Menetapkan pedoman penyusunan RKAP terbaru paska merger. Establish guidelines for the latest post-merger RKAP preparation.	Dikeluarkannya Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/11/3/1/PKPN/UTMA/PLND tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Pengendalian Anggaran dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Issuance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/11/3/1/PKPN/UTMA/PLND regarding Guidelines for Preparing Corporate Work Plans and Budgets, Budget Control and Performance Reporting within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
33	Menetapkan pedoman tentang pola karir pegawai, database kompetensi pegawai yang terintegrasi dan ter-*update* pasca merger, serta melakukan sosialisasi atas pedoman tersebut kepada seluruh pegawai. Establish guidelines on employee career patterns, an integrated and updated employee competency database after the merger, and socialize the guidelines to all employees.	SK Manajemen Talenta dan aplikasi SMART. Telah disusun *database* hasil asesmen dan kinerja pekerja. Talent Management Decree and SMART application. A database of assessment results and worker performance has been compiled.
34	Menyusun dan melaksanakan studi kelayakan terhadap usulan peluang bisnis, yaitu kajian kelayakan pengembangan suatu (terkait dengan Palembang baru dan Ambon baru). Prepare and carry out feasibility studies on proposed business opportunities, namely a feasibility study of the development of a FS (related to the new Palembang FS and the new Ambon FS).	Penyampaian hasil laporan Final kepada Kementerian Perhubungan. Final report submission to the Ministry of Transportation.
35	Menyusun kontrak kinerja untuk setiap jabatan di bawah direksi dengan tanda tangan pemegang jabatan satu level dan atau dua level atas pegawai yang bersangkutan, sesuai struktur organisasi. Prepare a performance contract for each position under the Board of Directors with the signature of the position holder one level and or two levels above the employee concerned, according to the organizational structure.	Telah ditetapkan KPI untuk BOD-1 sampai dengan level staff tahun 2022. KPIs have been set for BOD-1 up to staff level in 2022.
36	Melaporkan pencapaian kinerja Direksi yang telah diaudit kepada Pemegang Saham. Report the Board of Directors' audited performance achievements to the Shareholders.	Capaian kinerja Direksi Triwulan IV Tahun 2021 yang telah diaudit telah dilaporkan kepada pemegang saham dengan No. Surat PW.06.02/26/4/1/PRKJ/STRI-PLND-22 tanggal 26 April 2022 perihal Capaian KPI Direksi secara Kolegial dan Individual s.d Triwulan IV Tahun 2021 (*Audited*). The Board of Directors' performance achievements for 4th quarter of 2021, which have been audited, have been reported to the shareholders with letter No. PW.06.02/26/4/1/PRKJ/STRI-PLND-22 dated April 26, 2022 regarding Collegial and Individual KPI Achievements of the Board of Directors up to fourth quarter of 2021 (Audited).

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow Up
37	Menyusun dan menetapkan pedoman IT *Master plan*, sebagai pedoman pengembangan teknologi informasi, dan pengelolaan data, serta pelaporan dan penyampaiannya ke Dewan Komisaris sesuai ketentuan. Develop and establish IT Master plan guidelines, as a guideline for information technology development, and data management, as well as reporting and submission to the Board of Commissioners as required.	Pedoman IT *Master Plan* telah ditetapkan Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. IT Master Plan guidelines have been determined by the Board of Directors and submitted to the Board of Commissioners.
38	Menyusun dan menetapkan SOP layanan pelanggan, dan mengintegrasikan SPM antar kantor regional. Develop and establish customer service SOPs, and integrate SOPs between regional offices.	Telah diterbitkan Peraturan Direksi Tentang Pedoman Bina Pelanggan dan telah disusun *Draft* SOP Pengelolaan Data Pelanggan, Survei Kepuasan Pelanggan dan Suara Pelanggan. Board of Directors Regulation on Customer Stewardship Guidelines has been issued and SOP Drafts on Customer Data Management, Customer Satisfaction Survey and Customer Voice have been prepared.
39	Menyusun dan menetapkan kebijakan kompensasi bila mutu tidak terpenuhi serta melakukan sosialisasi atas kebijakan tersebut pada pegawai dan pelanggan. Develop and establish a compenzation policy if quality is not met and socialize the policy to employees and customers.	Telah disusun Draft SLA Bina Pelanggan. SLA Draft for Customer Development has been prepared.
40	Mempublikasikan kebijakan pengadaan agar dapat diakses pemasok/calon pemasok. (contoh: *website*, media, dan sebagainya). Publicize the procurement policy to make it accessible to suppliers/potential suppliers. (e.g. website, news media, etc.).	Telah dilakukan publikasi terkait kebijakan pengadaan, baik melalui *email blast* ke penyedia yang terdaftar, maupun meng*upload* peraturan Direksi pada *website* (SECURE), sehingga pemasok dapat mengakses secara mandiri informasi di dalamnya. Publication of procurement policies has been carried out, both through email blasts to registered suppliers, as well as uploading the Board of Directors' regulations on the website (SECURE), so that suppliers can independently access the information in it.
41	Menetapkan SOP pengadaan barang dan jasa dan menerapkannya secara konsisten, serta kebijakan pengadaan yang belum dipublikasikan/belum dapat diakses pemasok/calon pemasok. Establish SOPs for procurement of goods and services and implement them consistently, as well as procurement policies that have not been published/ not yet accessible to suppliers/potential suppliers.	Telah dibuat SOP Pengadaan Barang dan Jasa. Saat ini telah dibuat 7 (tujuh) SOP yang juga sudah disampaikan ke Bagian Kendali Mutu untuk dilakukan registrasi berdasarkan Nota Dinas No. PW.06.03/23/11/1/ PGAD-PGAD-22 tanggal 23 November 2022. SOPs for Procurement of Goods and Services have been made. Currently, 7 (seven) SOPs have been made which have also been submitted to the Quality Control Section for registration based on Service Memorandum No. PW.06.03/23/11/1/PGAD-PGAD-22 dated November 23, 2022.
42	Menetapkan kebijakan perlindungan keselamatan pekerja paska merger. Establish post-merger worker safety protection policies.	Telah dibuat peraturan direksi terkait perlindungan keselamatan pekerja dan sedang dalam *review* Direktur SDM dan Umum. A Board of Directors regulation has been made regarding the protection of worker safety and is currently under review by the Director of Human Capital and General Affairs.
43	Menetapkan kebijakan/SOP mengenai *job placement* atau penempatan suatu jabatan, skema remunerasi karyawan, serta kebijakan/program *reward punishment* (khususnya *reward* pegawai berprestasi) baik untuk unit dan individu, sekaligus mensosialisasikannya. Establish policies/SOPs regarding job placement, employee remuneration schemes, and rewardpunishment policies/programs (especially rewarding outstanding employees) for both units and individuals, as well as socializing them.	SK Direksi terkait kewenangan mutasi sudah selesai dan telah dikomunikasikan dengan Serikat Pekerja. Pedir No. HK.01/1/11/1/PSOG/UTMA/PLND-21 tanggal 1 November 2021 tentang Pedoman Komite Talenta yang mengatur perihal pembentukan komite talenta dan pelaksanaan lelang jabatan untuk pengisian suatu jabatan. The Board of Directors Decree regarding mutation authority has been completed and has been communicated with the Labor Union. Pedir No. HK.01/1/11/1/PSOG/UTMA/PLND-21 dated November 1, 2021 concerning Talent Committee Guidelines which regulates the formation of talent committees and the implementation of position auctions for filling a position.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow Up
44	Menginstruksikan anak perusahaan agar menetapkan kebijakan pengaturan anak perusahaan (*subsidiary governance*) dan perusahaan patungan pada RUPS anak perusahaan. Instruct subsidiaries to establish subsidiary governance and joint venture policies at the subsidiaries' GMS.	Pembahasan Peraturan Direksi PT Pelindo terkait dengan Tata Kelola Hubungan Induk dan Anak. Discussion of PT Pelindo's Board of Directors Regulation related to the Governance of Parent and Subsidiary Relationships.
45	Menyusun dan menetapkan kebijakan/pedoman pelaksanaan dan pelaporan pengendalian intern perusahaan. Develop and establish policies/guidelines for the implementation and reporting of the Company's internal control.	Telah disusun Peraturan Direksi mengenai Pedoman Pengelolaan SPI dan Pedoman Pengendalian Internal. Board of Directors Regulation on SPI Management Guidelines and Internal Control Guidelines has been prepared.
46	Memastikan unit operasi perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ensure that the Company's operating units comply with applicable laws and regulations, particularly those of the Ministry of Environment and Forestry.	Perusahaan telah memastikan unit operasional menjalankan peraturan perundang-undangan khususnya terkait peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. The Company has ensured that its operational units comply with statutory regulations, especially those related to the regulations of the Ministry of Environment and Forestry.
47	Memastikan penyelesaian atas sengketa yang terkait dengan transaksi bisnis baik yang masih berproses di pengadilan maupun yang masih dalam proses penyelidikan hukum. Ensure the settlement of disputes related to business transactions, both those that are still in process in court and those that are still in the process of legal investigation.	Telah dilakukan penanganan terhadap perkara/sengketa yang terkait dengan transaksi bisnis di Pengadilan maupun pada tahap penyelidikan oleh Aparat Penegak Hukum. Adapun perkara/sengketa hukum yang selesai antara lain: 1. Permintaan keterangan di Regional 1 Batam terkait kegiatan Pemanduan. 2. Perkara KPPU terkait Kegiatan Jasa Bongkar Muat Barang di Dermaga Yos Sudarso Pelabuhan Ambon. 3. Pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Gunungsitoli terkait dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang diakibatkan terdapatnya mafia dalam pengurusan retribusi/pembiayaan di Pelabuhan pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Gunungsitoli yang mengakibatkan tingginya biaya logistik di Pelabuhan. 4. Penanganan perkara perdata gugatan Ibrahim L Dg. Sitaba yang telah dimenangkan pada tingkat kasasi. Cases/disputes related to business transactions have been handled in court and at the investigation stage by law enforcement officials. The cases/legal disputes that have been resolved include: 1. Request for information in Regional 1 Batam related to Guiding activities. 2. KPPU case related to Goods Loading and Unloading Services at Yos Sudarso Pier at Ambon Port. 3. Examination by the Gunungsitoli District Attorney's Office related to the Alleged Corruption Crime caused by the existence of a mafia in the management of retribution/financing at the Port in the jurisdiction of the Gunungsitoli District Attorney's Office which resulted in high logistics costs at the Port. 4. Handling a civil case filed by Ibrahim L Dg. Sitaba which has been won at the caszation level.
48	Menyusun dan menetapkan kebijakan mengenai hak-hak konsumen/pelanggan sesuai peraturan yang berlaku. Develop and establish policies regarding consumer/customer rights in accordance with applicable regulations.	Telah diterbitkan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/28/12/1/BNPL/UTMA/PLND-22 Tanggal 28 Desember 2022 Tentang Pedoman Bina Pelanggan. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/28/12/1/BNPL/UTMA/PLND-22 Date December 28, 2022 Regarding Customer Development Guidelines.
49	Melakukan survei kepuasan kepada pelanggan secara berkala. Conduct periodic customer satisfaction surveys.	Telah dilaksanakan survei kepuasan pelanggan oleh Regional 1,2,3 dan 4. Customer satisfaction surveys have been carried out by Regional 1,2,3 and 4.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow Up
50	Menyusun dan menetapkan kebijakan mengenai perlindungan hak dan kepentingan kreditur. Develop and establish policies regarding the protection of the rights and interests of creditors.	Peraturan Direksi tentang Pendanaan Eksternal di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Board of Directors Regulation on External Funding within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
51	Menetapkan mekanisme penanganan keluhan *stakeholders* (pelanggan, pemasok, karyawan, dan lainnya), serta penyusunan Laporan pelaksanaan tindak lanjut atas keluhan *stakeholders* tersebut. Establish a mechanism for handling stakeholder complaints (customers, suppliers, employees, and others), as well as the preparation of follow-up reports on stakeholder complaints.	Telah diterbitkan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/28/12/1/BNPL/UTMA/PLND-22 Tanggal 28 Desember 2022 Tentang Pedoman Bina Pelanggan. Saat ini penanganan keluhan *stakeholders* terkait proses maupun mekanisme PBJ telah dilakukan dengan menyediakan *Contact Center whatsapp* di nomor: 081212911129 dan email Pengadaan: pengadaan@pelindo.co.id yang dapat di Akses oleh Internal maupun Eksternal. Mekanisme penanganan keluhan *stakeholders* terkait proses maupun mekanisme PBJ ini telah di tuangkan dalam Prosedur Layanan Bantuan/ *Helpdesk* Pengadaan. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/28/12/1/BNPL/UTMA/PLND-22 Date December 28, 2022 Regarding Customer Development Guidelines. Currently, the handling of stakeholder complaints related to the PBJ process and mechanism has been carried out by providing a WhatsApp Contact Center at number: 081212911129 and Procurement email: pengadaan@pelindo.co.id which can be accessed by both Internal and External. The mechanism for handling stakeholder complaints related to the process and mechanism of this PBJ has been set out in the Procurement Help Service/Helpdesk Procedure.
52	Menetapkan kebijakan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Establish policies on corporate social and environmental responsibility.	Peraturan Direksi tentang Petunjuk Teknis dan SK telah selesai disahkan. Board of Directors Regulation on Technical Guidelines and Decree have been finalized.
53	Menyusun dan menetapkan SOP yang memuat kewajiban perusahaan memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha, serta fasilitas perusahaan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. Develop and stipulate SOPs that contain the Company's obligation to ensure that assets and business locations, as well as other Company facilities, comply with applicable laws and regulations regarding environmental preservation, occupational health and safety.	Telah disahkan dokumen SOP Pemenuhan dan Kepatuhan Perundangan HSSE. The SOP document on HSSE Legislation Fulfillment and Compliance has been approved.
54	Kepala Satuan Pengawas Intern agar melaksanakan audit yang sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan yang telah ditetapkan, dan menyusun pedoman pemantauan tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengawasan ekstern (BPK, KAP, dan lainnya). Head of Internal Audit Unit should carry out audits in accordance with the annual supervisory work program that has been determined, and prepare guidelines for monitoring follow-up of recommendations from external supervision results (BPK, KAP, and others).	Telah dilaksanakan audit rutin pada Pelindo regional 1, Regional 4, Regional 3, dan Regional 2 yang mencakup pelaksanaan audit pada Kantor regional, cabang dan anak perusahaan secara sampling sesuai dengan PKPT Revisi. Telah disusun draft Peraturan Direksi mengenai Pedoman Pengelolaan SPI serta SOP *Monitoring* Tindak Lanjut Temuan Eksternal. Routine audits have been carried out at Pelindo Regional 1, Regional 4, Regional 3, and Regional 2 which include audits at regional offices, branches and subsidiaries on a sampling basis in accordance with the Revised PKPT. A draft Board of Directors Regulation on SPI Management Guidelines and SOP for Monitoring Follow-up of External Findings has been prepared.
55	Menyusun risalah rapat Direksi yang mencantumkan jalannya rapat (dinamika rapat). Prepare minutes of meetings of Board of Directors which include the meeting dynamics.	Risalah rapat Direksi telah dilengkapi dengan Dinamika Rapat. The minutes of Board of Directors meeting have been completed with the Meeting Dynamics.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow Up
Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi **Disclosure of Information and Transparency Aspect**		
56	Direksi agar Menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan. Board of Directors is required to prepare an Annual Report in accordance with the provisions.	Telah disusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PT Pelindo tahun 2021. Telah dilakukan Penyampaian surat kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta telah di*upload* pada *website* perusahaan. PT Pelindo's Annual Report and Sustainability Report for 2021 have been prepared. Letters have been submitted to Shareholders, Board of Commissioners and Directors and have been uploaded on the Company's website.



HASIL PENILAIAN DAN REKOMENDASI TAHUN 2022

Penilaian GCG tahun 2022 dilakukan oleh assesor BPKP RI.

ASSESSMENT RESULTS AND RECOMMENDATIONS IN 2022

The RI BPKP assessors carried out the 2022 GCG assessment.

Hasil Penilaian GCG Tahun 2022 PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

GCG Assessment Results for 2022 PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

No.	Aspek Pengujian Assessment Aspects	Bobot Weight	Capaian Achievement		
			Skor Score	% Capaian % Achievement	Predikat Predicate
1.	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Governance Implementation	7	6,848	97,824	Sangat Baik Very Good
2.	Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9	8,369	92,986	Sangat Baik Very Good
3.	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35	32,337	92,390	Sangat Baik Very Good
4.	Direksi Board of Directors	35	32,194	91,984	Sangat Baik Very Good
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparasi Information Disclosure and Transparency	9	8,850	98,341	Sangat Baik Very Good
6.	Aspek Lainnya Other Aspects	±5	1,875		Sangat Baik Very Good
	Jumlah Total	**100**	**90,473**	**90,473**	**Sangat Baik** Very Good

Adapun *area of improvement* dan rekomendasi atas GCG *assessment* tahun 2022 yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Perseroan adalah sebagai berikut.

The areas of improvement and recommendations for 2022 GCG assessment which will be followed up by the Company are as follows.

Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan

Commitment To Sustainable Governance Implementation

No	Parameter Parameter	*Area of Improvement*	Rekomendasi Recommendation
1	**Parameter 9:** Perusahaan melaksanakan kebijakan / SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara. The Company applies policies/SOPs regarding compliance with the state officials' assets reporting.	Belum ada penerapan sanksi atas pegawai yang belum menyampaikan LHKPN. There has been no imposition of sanctions on employees who have not submitted their LHKPN.	Agar diberlakukan sanksi kepada pegawai yang belum menyampaikan LHKPN sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT Pelindo Nomor: HK/01/20/12/1/ADKS/UTMA/2021 tanggal 20 Desember 2021. Sanctions should be imposes to employees who have not submitted their LHKPN according to the time specified as stipulated in PT Pelindo Board of Directors Regulation Number: HK/01/20/12/1/ADKS/UTMA/2021 dated December 20, 2021.

ASPEK PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDERS ASPECT

No	Parameter Parameter	*Area of Improvement*	Rekomendasi Recommendation
1	**Parameter 23:** Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris. Shareholders/GMS/Capital Owners carry out an assessment of prospective members of Board of Commissioners.	Pemegang Saham tidak meminta masukan secara formal dari Departemen teknis BUMN untuk calon anggota Komisaris. Shareholders did not request formal input from the SOE technical department for prospective members of Board of Commissioners	Pemegang Saham agar meminta masukan secara formal dari Departemen teknis BUMN untuk calon anggota Komisaris. Shareholders are asked to request formal input from the SOE technical department for prospective members of Board of Commissioners.
2	**Parameter 24** Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan komposisinya. Shareholders/GMS/Capital Owners determine the appointment of members of Board of Commissioners and their composition.	Penetapan pengangkatan Dewan Komisaris melalui RUPS/Pelantikan Dewan Komisaris belum didukung dengan Berita Acara RUPS/Pelantikan Dewan Komisaris. Determination of the appointment of Board of Commissioners through the GMS/Inauguration of Board of Commissioners has not been supported by the minutes of GMS/Inauguration of Board of Commissioners.	Pemegang saham agar melengkapi Penetapan pengangkatan Dewan Komisaris dengan Berita Acara RUPS/ Pelantikan Dewan Komisaris. Shareholders are required to complete the determination of appointment of Board of Commissioners with the minutes of GMS/Inauguration of Board of Commissioners
3	**Parameter 27:** Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP. Shareholders/GMS/Capital Owners ratify the Company's Long Term Plan (RJPP) or Revised RJPP.	Pemegang saham belum melakukan pengesahan RJPP Tahun 2021-2025. Shareholders have not ratified the 2021-2025 RJPP.	Pemegang saham agar melakukan upaya percepatan pembahasan rancangan RJPP Tahun 2021-2025 bersama Direksi dan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sehingga dapat segera melakukan pengesahan RJPP Tahun 2021-2025. Shareholders should make efforts to accelerate the discussion of 2021-2025 RJPP draft with Directors and Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) so the 2021-2025 RJPP can be immediately ratified.
4	**Parameter 28:** Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Shareholders/GMS/Capital Owners ratify the Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP).	Pengesahan RKAP belum dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan (dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan). Approval of the RKAP has not been carried out on time according to the provisions (carried out no later than the end of the year prior to the current budget year).	Pemegang saham agar melakukan pengesahan RKAP tepat waktu sesuai ketentuan. Shareholders are required to ratify the RKAP in a timely manner according to the provisions.
5	**Parameter 32:** Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan auditor eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan perusahaan. Shareholders/GMS/Capital Owners determine external auditors to audit the Company's Financial Statements	Pemegang Saham telah melakukan pembahasan/pengkajian/penelaahan terhadap pengusulan auditor eksternal namun belum terdapat penetapan besarnya honorarium/imbal jasa untuk auditor eksternal. Shareholders have discussed/reviewed/ analyzed the external auditor's proposal but there has been no determination of the amount of honorarium/reward for external auditor.	Pemegang Saham agar melakukan penetapan besarnya honorarium. Shareholders should determine the amount of honorarium.

ASPEK DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONER ASPECT

No	Parameter Parameter	*Area of Improvement*	Rekomendasi Recommendation
1	**Parameter 44:** Dewan Komisaris menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners determines the mechanism for Board of Commissioners' decision-making.	Board manual dan SOP Dekom telah memuat kebijakan standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan persetujuan terhadap usulan Direksi maksimal 14 hari. namun pada pelaksanaannya masih terdapat pengambilan keputusan yang melebihi standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan. Board manual and SOP for Board of Commissioners have included a standard policy for the level of urgency for making decisions on approval of Board of Directors' proposals, a maximum of 14 days. But in practice there are still decision making that exceeds the time standard for the level of immediacy of decision-making.	Dewan Komisaris agar melaksanakan dan me*monitoring* tingkat kesegeraan pengambilan keputusan persetujuan terhadap usulan Direksi sesuai dengan standar waktu yang ditentukan. Board of Commissioners is required to carry out and monitor the level of urgency in making approval decisions on the Board of Directors' proposals in accordance with the specified time standard.
2	**Parameter 47:** Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. The Board of Commissioners gives approval for the RKAP draft submitted by the Board of Directors.	Dekom telah memberikan tanggapan atas Usulan RKAP Tahun 2022 melalui Surat Dekom Nomor 05/DK/PI/I-2022 tanggal 26 Januari 2022, namun tanggapan belum memuat simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP. Board of Commisisoners has provided a response to the 2022 RKAP proposal through the BoC Letter Number 05/DK/PI/I-2022 dated January 26, 2022, but the response has not contained a conclusion that the RKAP draft is aligned and/or not aligned with the RJPP.	Dewan Komisaris agar dalam memberikan tanggapan atas usulan RKAP memuat simpulan atas keselarasan rancangan RKAP dengan RJPP. Board of Commissioners in responding to the RKAP proposal should include a conclusion on the alignment of RKAP draft with RJPP.
3	**Parameter 51:** Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan. The Board of Commissioners provides direction on strengthening the company's internal control system.	Dewan Komisaris belum melakukan telaah atas *internal control report.* Board of Commissioners has not reviewed the internal control report.	Dewan Komisaris agar melakukan telaah atas *internal control report* yang dibuat oleh Manajemen. Board of Commissioners is required to review the internal control report prepared by Management.

ASPEK DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONER ASPECT

No	Parameter Parameter	*Area of Improvement*	Rekomendasi Recommendation
4	**Parameter 58:** Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga. The Board of Commissioners supervises and monitors the compliance of the Board of Directors in carrying out applicable laws and regulations and agreements with third parties.	a. *Board manual*/SOP Dekom belum memuat kebijakan/pedoman yang mengatur Komisaris untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan terhadap dan Anggaran Dasar. b. Dewan Komisaris belum melaporkan hasil evaluasi/pembahasan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan komisaris secara semesteran dan tahunan. a. The Board manual/SOP of Board of Commissioners does not yet contain policies/guidelines governing the Commissioners to supervise the company's compliance with the Articles of Association. b. Board of Commissioners has not reported the results of evaluation/discussion of applicable laws and regulations and the articles of association as well as the company's compliance with all agreements and commitments made by the company with third parties to the GMS in the semiannual and annual Board of Commissioners supervisory report.	Dewan Komisaris agar: a. Menambahkan pada *Board manual*/ SOP Dekom kebijakan/pedoman yang mengatur Komisaris untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan terhadap dan Anggaran Dasar. b. Melaporkan hasil evaluasi/ pembahasan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan komisaris secara semesteran dan tahunan. Board of Commissioners should: a. Add to the Board manual/SOP of Board of Commissioners, policies/ guidelines that regulate the Commissioners to supervise the company's compliance with the Articles of Association. b. Report the results of evaluation/ discussion of applicable laws and regulations and the articles of association as well as the company's compliance with all agreements and commitments made by the company with third parties to the GMS in the semiannual and annual Board of Commissioners supervisory report.
5	**Parameter 60:** Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS/Pemilik Modal. The Board of Commissioners gives approval for transactions or actions within the scope of authority of the Board of Commissioners or GMS/Capital Owners.	Terdapat Pemberian otorisasi atau rekomendasi yang melebihi ketentuan (paling lambat 14 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris). There is an Authorization or recommendation that exceeds the provisions (no later than 14 days after the complete proposal or document is received by Board of Commissioners).	Dewan Komisaris agar memastikan/ me*monitoring* pemberian otorisasi atau rekomendasi tidak melebihi ketentuan (paling lambat 14 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris). Board of Commissioners must ensure/ monitor the granting of authorization or recommendations that do not exceed the provisions (no later than 14 days after the complete proposal or document is received by Board of Commissioners).
6	**Parameter 61:** Dewan Komisaris (berdasarkan usul dari Komite Audit) mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS/Pemilik Modal. The Board of Commissioners (based on the recommendation from Audit Committee) proposes a candidate for External Auditor to the GMS/Capital Owners.	Dewan Komisaris telah menyampaikan usulan Auditor eksternal kepada RUPS disertai alasan pencalonan namun belum memuat besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut. Board of Commissioners has submitted the external auditor's proposal to the GMS along with the reasons for nomination but has not yet included the amount of honorarium/reward proposed for the external auditor.	Dewan Komisaris agar memuat besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor dalam Usulan Auditor Eksternal kepada RUPS. Board of Commissioners should include the amount of honorarium/remuneration proposed for external auditors in the External Auditor's Proposal to the GMS.

ASPEK DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONER ASPECT

No	Parameter Parameter	*Area of Improvement*	Rekomendasi Recommendation
7	**Parameter 62:** Dewan Komisaris memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris. The Board of Commissioners ensures that external audit and internal audit are carried out effectively and review complaints related to SOEs received by the Board of Commissioners.	Dewan Komisaris belum penyampaian arahan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas audit internal. Board of Commissioners has not submitted directives to Board of Directors regarding increasing internal audit effectiveness.	Dewan Komisaris agar Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas audit internal. Board of Commissioners should give directions to the Board of Directors regarding increasing the effectiveness of internal audit.
8	**Parameter 65:** Peran Dewan Komisaris dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan perusahaan/ perusahaan patungan. The role of Board of Commissioners in selecting candidates for members of Board of Directors and Board of Commissioners of a Subsidiary company/joint venture.	Terdapat penetapan tertulis terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan yang melebihi ketentuan (15 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan Patungan). There is a written stipulation regarding the process of appointing Board of Directors and Board of Commissioners of a subsidiary/joint venture that exceeds the provisions (15 calendar days from the date of receipt of candidates for Board of Directors and Board of Commissioners of the subsidiary/Joint company).	Dewan Komisaris agar melakukan Penetapan tertulis terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan paling lambat 15 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan. Board of Commissioners is required to make a written determination regarding the process of appointing Board of Directors and Board of Commissioners of a subsidiary/joint venture no later than 15 calendar days from the date of receipt of the candidates for Board of Directors and Board of Commissioners of the subsidiary/ joint venture.
9	**Parameter 67:** Dewan Komisaris menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal. The Board of Commissioners evaluates Board of Directors and reports the assessment results to Shareholders/Capital Owners.	a. RKA Dekom telah memuat evaluasi kinerja direksi, namun belum memuat rencana pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang saham. b. Dewan Komisaris belum menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individu kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran dan tahunan. a. Board of Commissioners RKA has included an evaluation of the performance of directors, but has not yet included a plan for monitoring the performance of Directors and reporting to shareholders. b. Board of Commissioners has not submitted the results of performance assessment of Board of Directors collegially and individually to the GMS in semi-annual and annual reports of Board of Commissioners' supervisory duties.	a. Dewan Komisaris agar menambahkan pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham dalam Rencana Kerja (RKA) Dewan Komisaris. b. Dewan Komisaris agar menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individu kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran dan tahunan. a. Board of Commissioners should add monitoring of the performance of Board of Directors and reporting to Shareholders in the Work Plan (RKA) of Board of Commissioners. b. Board of Commissioners should submit the results of performance assessment of Board of Directors collegially and individually to the GMS in the semi-annual and annual report of Board of Commissioners' supervisory duties.

ASPEK DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONER ASPECT

No	Parameter Parameter	*Area of Improvement*	Rekomendasi Recommendation
10	**Parameter 71:** Dewan Komisaris melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners measures and evaluates the performance of Board of Commissioners.	Dewan Komisaris telah mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris namun belum dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris. Board of Commissioners has evaluated the performance achievements of each member of Board of Commissioners but has not yet included it in the minutes of Board of Commissioners' meeting.	Dewan Komisaris agar dalam mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris. Board of Commissioners should evaluate the performance achievements of each member of Board of Commissioners as outlined in the minutes of Board of Commissioners' meeting.
11	**Parameter 83 :** Komite Dewan Komisaris melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris. Committees of Board of Commissioners report on the activities and results of their assignments to the Board of Commissioners.	Muatan laporan triwulan dan laporan tahunan Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi belum memuat Perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan, Substansi hasil kegiatan dan Rekomendasi yang diberikan. The contents of quarterly reports and annual reports of Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee do not contain comparisons of activity realization with annual work programs, substance of activity results and recommendations given.	Dewan Komisaris agar menginstruksikan kepada Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menyusun laporan triwulanan dan laporan tahunan komite agar memuat Perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan, Substansi hasil kegiatan dan Rekomendasi yang diberikan. Board of Commissioners instructs Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee in compiling the committee's quarterly reports and annual reports to include a comparison of the realization of activities with annual work program, the substance of the results of activities and the recommendations given.

ASPEK DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS ASPECT

No	Parameter Parameter	*Area of Improvement*	Rekomendasi Recommendation
1	**Parameter 86:** Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. The Board of Directors determines the organizational structure/ organization according to the needs of the company.	Direksi belum menetapkan pedoman yang berisi spesifikasi jabatan yang di dalamnya memuat kompetensi yang dibutuhkan untuk semua tingkat jabatan. Board of Directors has not yet established guidelines on job specifications, which contain the competencies needed for all job levels.	Direksi agar mengesahkan kebijakan yang berisi spesifikasi jabatan yang di dalamnya memuat kompetensi yang dibutuhkan untuk semua tingkat jabatan. Board of Directors must adopt a policy on job specifications, which contains the competencies needed for all job levels.

ASPEK DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS ASPECT

No	Parameter Parameter	*Area of Improvement*	Rekomendasi Recommendation
2	**Parameter 89:** Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik Modal. The Board of Directors has a Long Term Plan (RJPP), which is approved by the GMS/ Capital Owners.	RJPP Pelindo periode 2021-2025 disusun setelah perusahaan merger, sehingga jadwal waktu penyampaian berbeda dengan BUMN lain dalam kondisi normal. Rancangan RJPP terlambat disampaikan ke Pemegang Saham karena penyampaian ke Dewan Komisaris juga terlambat. Penyampaian rancangan RJPP Direksi ke Dewan Komisaris baru dilakukan sesuai Surat Direktur Utama PT Pelindo Nomor PR.03/3/2/1/PRKP/ UTMA/PLND-22 tanggal 3 Februari 2022 perihal Buku RJPP PT Pelindo (persero) dan RJPP *subholding* tahun 2021-2025. Pelindo's RJPP for 2021-2025 period was prepared after the company was merged, hence the timetable for submission is different from other SOEs under normal conditions. The RJPP draft was submitted to the Shareholders behind schedule because the submission to the Board of Commissioners was also late. The submission of the RJPP draft of Board of Directors to the Board of Commissioners was carried out in accordance with the Letter of President Director of PT Pelindo Number PR.03/3/2/1/PRKP/UTMA/PLND-22 dated February 3, 2022 concerning the PT Pelindo (persero) RJPP Book and Subholding RJPP for 2021 -2025.	Direksi agar memperhatikan ketepatan waktu penyusunan RJPP periode selanjutnya dan penyampaiannya ke Dewan Komisaris dan Pemegang Saham sesuai ketentuan. Board of Directors should pay attention to the timeliness of preparing the RJPP for the next period and submitting it to the Board of Commissioners and Shareholders in accordance with the provisions.
3	**Parameter 91:** Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan. The Board of Directors places employees at all job levels in accordance with the job specifications and has a succession plan for all positions within the company.	Penempatan karyawan pada setiap level jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan yang ditetapkan. Persepsi kuesioner sesuai hasil kuesioner disimpulkan kurang memadai dilihat dari tingkat objektivitas dan transparansi. Placement of employees at each job level in accordance with the specified job specifications. Perceptions of the questionnaire according to the questionnaire results were concluded to be inadequate in terms of the level of objectivity and transparency.	Direksi agar memperhatikan kompetensi dan aspirasi pegawai dalam penempatan karyawan di semua tingkatan. Board of Directors should pay attention to the competency and aspirations of employees in the placement of employees at all levels.
4	**Parameter 92:** Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/ efisiensi perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya. The Board of Directors responds to proposed business opportunities that have the potential to increase company revenue, savings/efficiency, asset utilization, and other benefits.	Terdapat beberapa *complaint* dari *stakeholders* terkait dengan rencana yang dijalankan antara lain: a. Timbulnya korban jiwa dari kecelakaan kerja di Merauke. b. Nelayan di Makassar yang menuntut ganti rugi. There are several complaints from stakeholders related to the plan being implemented, including: a. The incidence of fatalities from work accidents in Merauke. b. Fishermen in Makassar demanding compensation.	Direksi agar mengupayakan penurunan complaint dari *stakeholders* terutama yang berdampak bagi masyarakat sekitar. Board of Directors should strive to reduce complaints from stakeholders, especially those that have an impact on the surrounding community.

ASPEK DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS ASPECT

No	Parameter Parameter	*Area of Improvement*	Rekomendasi Recommendation
5	**Parameter 93:** Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan. The Board of Directors responds to current issues from external regarding changes in the business environment and their problems, in a timely and relevant manner.	Kebijakan atau mekanisme yang mengatur Direksi dalam membahas isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya masih menggunakan peraturan yang lama sebelum merger, untuk aturan yang baru sedang dalam proses penyusunan. The policies or mechanisms that regulate Board of Directors in discussing current issues regarding changes in the business environment and their problems still use the old regulations before the merger, while new regulations are in the process of being drafted.	Direksi agar menyusun dan menetapkan kebijakan atau mekanisme dalam membahas isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya. Board of Directors is required to formulate and establish policies or mechanisms to discuss current issues regarding changes in the business environment and their problems.
6	**Parameter 101:** Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan. The Board of Directors applies product and service quality improvement system.	Direksi belum menyusun dan menetapkan kebijakan/pedoman terkait kebijakan kompensasi bila mutu tidak terpenuhi. Board of Directors has not developed and established policies/guidelines related to compensation policies if quality is not met.	Direksi agar menyusun dan menetapkan kebijakan/pedoman terkait kompensasi bila mutu tidak terpenuhi. Board of Directors should formulate and establish policies/guidelines related to compensation if quality is not met.
7	**Parameter 103:** Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian perusahaan. The Board of Directors develops Human Capital, evaluates performance and provides appropriate remuneration, and builds an HC environment that effectively supports the company's achievements.	Kebijakan Remunerasi secara umum masih dalam penyusunan. Remuneration policies in general are still being drafted.	Direksi agar menyusun dan menetapkan kebijakan/pedoman terkait remunerasi pegawai dan mensosialisasikannya. Board of Directors should formulate and establish policies/guidelines related to employee remuneration and socialize them.

ASPEK DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS ASPECT

No	Parameter Parameter	*Area of Improvement*	Rekomendasi Recommendation
8	**Parameter 110:** Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga. The Company complies with applicable laws and regulations and agreements with third parties.	a. Berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1299/MENLHK/SETJEN/ KUM. 1/12/2022 Tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021 - 2022, Dari 26 yang diajukan dalam proper ada 23 yang mendapatkan peringkat merah dan 3 yang biru. b. Perusahaan belum memiliki pedoman yang mengharuskan Seluruh Nota Kesepahaman dan perjanjian yang melibatkan perusahaan dan pihak ketiga wajib menggunakan bahasa Indonesia. a. Based on Minister of Environment and Forestry Decree Number SK.1299/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2022 concerning the Results of the Assessment of Company Performance Rating in Environmental Management for 2021 - 2022, Of the 26 submitted in proper, 23 received red rating and 3 were blue. b. The Company does not yet have guidelines that require that all Memorandums of Understanding and agreements involving companies and third parties must use the Indonesian language.	Direksi agar: a. Memaksimalkan rencana tindak lanjut yang telah disusun oleh manajemen sehingga hasil penilaian dari KLHK pada tahun berikutnya dapat berkurang yang mendapatkan peringkat merah. b. Melakukan *updating* peraturan yang mengatur Seluruh Nota Kesepahaman dan perjanjian yang melibatkan perusahaan dan pihak ketiga wajib menggunakan bahasa Indonesia. Board of Directors should: a. Maximizing follow-up plans that have been prepared by management so that the results of evaluation from the Ministry of Environment and Forestry in the following year can reduce those that received red rating. b. Updating the regulation governing that all Memorandums of Understanding and agreements involving companies and third parties must use the Indonesian language.
9	**Parameter 112:** Pelaksanaan hubungan dengan pemasok Relations with suppliers	a Rekomendasi hasil *assessment* pemasok berdasarkan pencapaian QCDS (*quality, cost, delivery, service*) belum di kuantifikasi dalam belum bentuk persentase. b. Data Pembayaran kepada vendor belum dilengkapi dengan status pembayaran sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang disepakati, sehingga belum dapat diketahui status pembayaran yang terlambat. c. Analisis *Survey* Kepuasan Penyedia Terhadap Proses Pengadaan telah dilakukan namun tidak ada yang spesifik terkait dengan *fairness* dan transparansi. a. Recommendations from supplier assessment results based on achievement of QCDS (quality, cost, delivery, service) have not been quantified in the form of percentages. b. Payment data to vendors have not been completed with the payment status in accordance with the agreed agreement or agreement, so that late payment status cannot be known. c. Analysis of Provider Satisfaction Survey on the Procurement Process has been carried out but there is nothing specific related to fairness and transparency.	Direksi agar: a. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas rekomendasi hasil *assessment* pemasok berdasarkan pencapaian QCDS (*quality, cost, delivery, service*) dan menyusun dalam bentuk persentase terkait yang sudah ditindaklanjuti dan yang belum. b. Mencantumkan data status pembayaran apakah terlambat atau belum yang dilakukan kepada pemasok atau penyedia, bila terlambat perlu dilengkapi juga dengan tindak lanjutnya. c. Menyusun analisis survei kepuasan penyedia terhadap proses pengadaan dengan mempertimbangkan aspek *fairness* dan transparansi. Board of Directors should: a. Monitor and evaluate the recommendations from supplier assessment results based on QCDS (quality, cost, delivery, service) achievements and compile them in the form of percentages of those that have been followed up and those that have not. b. Include data on the status of payment whether late or not made to suppliers or providers, if it is late, needs to be accompanied by follow-up actions. c. Prepare a provider satisfaction survey analysis of the procurement process by considering the aspects of fairness and transparency.

ASPEK DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS ASPECT

No	Parameter Parameter	*Area of Improvement*	Rekomendasi Recommendation
11	**Parameter 115:** Pelaksanaan hubungan dengan karyawan perusahaan. Relations with company employees.	Belum ada kebijakan terkait dengan penetapan jenis kebijakan yang harus dikomunikasikan kepada karyawan dan kebijakan yang harus melibatkan karyawan dalam perumusannya. There is no policy related to determining the types of policies that must be communicated to employees and policies that must involve employees in their formulation.	Menyusun dan menetapkan kebijakan terkait dengan penetapan jenis kebijakan yang harus dikomunikasikan kepada karyawan dan kebijakan yang harus melibatkan karyawan dalam perumusannya. Develop and establish policies related to determining the types of policies that must be communicated to employees and policies that must involve employees in their formulation.
12	**Parameter 116:** Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan *stakeholders*. There is a written procedure for accommodating and following up on stakeholder complaints	Data atau dokumen yang menunjukan realisasi tindak lanjut atas keluhan-keluhan *stakeholders* belum ada. Data or documents showing the realization of follow-up on stakeholder complaints do not yet exist.	Menyusun dokumen terkait dengan realisasi tindak lanjut atas keluhan-keluhan *stakeholders.* Prepare documents related to the realization of follow-up on stakeholder complaints.
13	**Parameter 118:** Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan. The company carries out corporate social responsibility to support the sustainability of its operations.	a. SOP yang memuat kewajiban perusahaan untuk memastikan bahwa *asset-asset* dan lokasi usaha serta fasilitas perusahaan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan masih dalam proses penyusunan. b. Ada tambahan pinjaman UMKM yang macet dari 86 miliar menjadi 92 miliar. a. The SOP which contains the company's obligation to ensure that the company's assets and business locations as well as other facilities comply with applicable laws and regulations regarding environmental preservation is still in the process of being drafted. b. There are additional non-performing MSME loans from 86 billion to 92 billion.	Direksi agar a. Menyelesaikan penyusunan SOP yang memuat kewajiban perusahaan untuk memastikan bahwa *asset-asset* dan lokasi usaha serta fasilitas perusahaan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan. b. Menyusun rencana dan strategi agar tidak terjadi lagi kenaikan tunggakan pinjaman UMKM. Board of Directors should a. Complete the preparation of SOPs which contain the company's obligations to ensure that the company's assets and business locations and other facilities comply with applicable laws and regulations regarding environmental preservation. b. Develop plans and strategies to prevent an increase in MSME loan arrears.
14	**Parameter 119:** Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan. The Board of Directors establishes a policy regarding mechanisms for Board of Directors and structural officials to prevent personal and other parties from taking advantage due to conflicts of interest.	Penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan dari tiap Direksi tidak dilakukan di awal tahun. The signing of the Statement of Conflict of Interest from each Director is not carried out at the beginning of the year.	Direksi agar melaksanakan penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan di setiap awal tahun. Board of Directors is required to carry out the signing of the Statement of Conflict of Interest at the beginning of each year.

ASPEK DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS ASPECT

No	Parameter Parameter	*Area of Improvement*	Rekomendasi Recommendation
15	**Parameter 132:** Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya. The corporate secretary performs its functions.	Laporan Manajemen Triwulanan disampaikan ke Dewan Komisaris terlambat namun Laporan Tahunan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu. Ketentuan: Jika laporan manajemen triwulanan paling lambat harus disampaikan kepada Pemegang Saham/RUPS 1 (satu) bulan setelah triwulanan yang bersangkutan, maka proses penyampaian kepada Dewan Komisaris paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan. The Quarterly Management Report is submitted to the Board of Commissioners behind time but the Annual Report has been submitted to the Board of Commissioners in a timely manner. Provisions: If the quarterly management report must be submitted to the Shareholders/GMS no later than 1 (one) month after the quarter in question, then the submission process to the Board of Commissioners is no later than 7 (seven) days after the end of the quarter in question.	Direksi agar menyampaikan laporan triwulanan ke Dewan Komisaris secara tepat waktu sesuai ketentuan. Board of Directors is required to submit quarterly reports to the Board of Commissioners in a timely manner according to regulations.
16	**Parameter 132**	Belum terdapat risalah rapat RUPS RJPP dikarenakan belum terdapat pengesahan RJPP. There are no minutes of RJPP GMS meeting because there was no RJPP ratification conducted.	Direksi agar mendorong Pemegang Saham untuk mengesahkan RJPP dan menyusun risalah RUPSnya. Board of Directors to encourage Shareholders to ratify the RJPP and prepare the minutes of GMS.
17	**Parameter 134:** Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. The Board of Directors holds GMS in accordance with the procedures stipulated in the Articles of Association and laws and regulations.	a. Belum ada pengesahan RUPS RJPP. b. RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RKAP dilaksanakan pada awal tahun anggaran, seharusnya dilakukan maksimal pada akhir tahun anggaran. a. There has been no ratification of the RJPP GMS. b. The GMS/Capital Owners resolution for ratification/approval of the RKAP are carried out at the beginning of fiscal year, yet it should be carried out at the maximum at the end of fiscal year.	a. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholders* agar RUPS terkait dengan pengesahan RJPP dapat segera dilakukan. b. Melakukan RUPS terkait dengan pengesahan/persetujuan RKAP pada akhir tahun anggaran, untuk RKAP tahun berikutnya. a. Communicating and coordinating with stakeholders so that the GMS related to the approval of RJPP can be carried out immediately. b. Conduct GMS related to the ratification/ approval of RKAP at the end of fiscal year, for the following year's RKAP.

ASPEK PENGUNGKAPAN INFORMASI
INFORMATION DISCLOSURE ASPECT

No	Parameter Parameter	Area Of Improvement	Rekomendasi Recommendation
1	**Parameter 144:** Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting. The Annual Report contains Summary of Important Financial Data.	Perusahaan telah menyajikan informasi keuangan (laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, rasio-rasio keuangan secara umum dan yang relevan dengan industri perusahaan) dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku namun belum terdapat perbandingan selama 5 (lima) tahun buku karena baru merger di tahun 2021. The company has presented financial information (statement of financial position, comprehensive income, financial ratios in general and relevant to the company's industry) in the form of comparisons for 3 (three) fiscal years but there has been no comparison for 5 (five) fiscal years due to the merger in 2021.	Belum terpenuhi karena masih entitas baru. Not yet fulfilled because it is still a new entity.
2	**Parameter 148:** Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik. The Annual Report contains disclosure of Good Corporate Governance practices.	Laporan Tahunan PT Pelindo (Persero) telah memuat penjelasan tentang uraian mengenai aktivitas berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen mencakup antara lain informasi tentang: (1) Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen; (2) Program peningkatan layanan kepada konsumen; namun biaya terkait komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen belum diuraikan. PT Pelindo (Persero)'s Annual Report contains an explanation of activities related to corporate social responsibility, especially regarding the company's commitment to consumer protection including information on: (1) Establishment of a Consumer Complaint Center; (2) Service improvement program for consumers; but the costs related to the company's commitment to consumer protection have not been described.	Agar perusahaan menyajikan informasi pada laporan tahunan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai ketentuan. The Company should present information in the annual report relating to corporate social responsibility in accordance with the provisions.



PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY



08

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility Program



Pada era globalisasi sekarang ini, penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ("TJSL") terus mengalami perkembangan. TJSL tersebut bukan hanya untuk kepentingan reputasi Perusahaan semata, namun juga harus mampu menjaga keberlanjutan usaha perusahaan melalui program-program di bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan serta berbasis pelibatan masyarakat dan *stakeholder* Perseroan. Regulasi terkait TJSL diatur dalam beberapa dasar hukum, seperti pada Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait komitmen melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Peraturan Pemerintah RI No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, peraturan terkait TJSL dalam lingkup Permen BUMN Negara No. PER-06/MBU/09/2022 Tanggal 15 September 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Sebagai BUMN PT Pelabuhan Indonesia (Persero) secara konsisten melaksanakan program TJSL, bukan semata dalam tataran program, namun juga mencakup aspek perbaikan tata kelola yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan program TJSL, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman ISO 26000: *Guidance on Social Responsibility* (yang berisi 7 subjek utama) dan mengintegrasikan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs)/tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) khususnya 7 (tujuh) prioritas SDGs yang menjadi arahan

In the current globalization era, the implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility ("CSER") continues to develop. CSER is not only carried out for the benefit of the Company's reputation, but must also to maintain the sustainability of the Company's business through economic, social and environmental programs, and the Company's community and stakeholders engagement. CSER is carried out based on several regulations, including Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies' commitment to carry out Social and Environmental Responsibility (CSER), Republic of Indonesia Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) for Limited Liability Companies, and Law No. 19 of 2003 concerning State Owned Enterprises. CSER regulations related to State-Owned Enterprises (SOEs) are regulated in the Minister of SOEs Regulation No. PER-6/MBU/09/2022 concerning Amendments to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/04/2021 on Social and Environmental Responsibility Program for State-Owned Enterprises (SOE CSR).

As a SOE, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) consistently implements its CSER program, not only at a program level, but also includes aspects of sustainable governance improvement. When implementing the CSER program, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) refers to the ISO 26000 guidelines: Guidance on Social Responsibility (which contains 7 main subjects) and integrates the principles of Sustainable Development Goals (SDGs), especially the 7 (seven) priorities SDGs as directed by the Shareholders. In accordance with Minister of SOEs

Pemegang Saham. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/09/2022 Tanggal 15 September 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Pasal 10 Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dengan bentuk Pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan/atau bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan.

Regulation No. PER-06/MBU/09/2022 dated September 15, 2022 concerning Amendments to the Minister of SOEs Regulation No. PER-05/MBU/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility Programs for SOEs, where Article 10 states that the SOE SER Program can be carried out in the form of Micro and Small Business Financing and/or assistance and/or other activities, including coaching.



Wilayah kerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) meliputi 4 (empat) Regional. Regional 1 yang bertanggung jawab dalam menjalankan program TJSL di 4 (empat) Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Regional 2 yang bertanggung jawab dalam menjalankan program TJSL di 9 (sembilan) Provinsi yaitu Sumatera Barat, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Regional 3 yang bertanggung jawab dalam menjalankan program TJSL di 7 (tujuh) Provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Regional 4 yang bertanggung jawab dalam 11 (sebelas) Provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

The working area of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) covers 4 (four) Regions. Regional 1 is responsible for running the CSER programs in 4 (four) Provinces, namely Aceh, North Sumatra, Riau and the Riau Islands. Regional 2 is responsible for running the CSER program in 9 (nine) provinces, namely West Sumatra, Bangka Belitung, Bengkulu, South Sumatra, Lampung, Banten, DKI Jakarta, West Java and West Kalimantan. Regional 3 is responsible for running the CSER program in 7 (seven) Provinces, namely East Java, Central Java, South Kalimantan, Central Kalimantan, Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara. Regional 4 is responsible for 11 (eleven) Provinces namely South Sulawesi, Central Sulawesi, Southeast Sulawesi, North Sulawesi, Gorontalo, East Kalimantan, North Kalimantan, Maluku, North Maluku, Papua and West Papua.

Susunan pengelola adalah unit kerja perusahaan yang secara struktural berada dibawah *Group Head* Sekretariat Perusahaan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-69/MBU/03/2020 tanggal 02 Maret 2020, Berita Acara Kesepakatan Direksi No. UM.339/18/8/3/PI.II-16 tanggal 18 Agustus 2016 dan Surat Keputusan Direksi No. HK.01/12/5/1/PSOG/UTMA/PLND-22, susunan pengelola adalah sebagai berikut:

The management structure comprises a Company work unit structurally under the Group Head of the Corporate Secretariat. Based on the Minister of SOEs Decree No. SK-69/MBU/03/2020 dated March 02, 2020, Minutes of Board of Directors Agreement No. UM.339/18/8/3/PI.II-16 dated August 18, 2016, and Board of Directors Decree No. HK.01/12/5/1/PSOG/UTMA/PLND-22, the management composition is as follows:

Direktur Utama President Director	:	**Arif Suhartono**
Direktur SDM & Umum Human Resources and General Affairs Director	:	**Ihsanuddin Usman**
Group Head Sekretariat Perusahaan Group Head of Corporate Secretariat	:	**Ali Mulyono**
Departemen *Head* Tanggung Jawab Sosial Social Responsibility Head Department	:	**Febrianto Zenny Sulistyo Hari Murti**
Manager Perencanaan dan Pengelolaan Program Planning and Management Program Manager	:	**Dimas Giri Prabowo**
Manager Monitoring dan Pelaporan Program Monitoring and Reporting Program Manager	:	**Annisa Karimah**

Penyusunan Laporan TJSL di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berpedoman pada:

- Undang-Undang No. 19/2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 2 (turut aktif membimbing dan membantu ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat) dan Pasal 88 (sumber dana dapat dari penyisihan laba);
- Undang-Undang No. 40/2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab V tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan;
- PP No. 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas;

- Perpres No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
- Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. 100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara;
- Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
- Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;

- Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SE-5/MBU/DSI/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penanggulangan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Melalui Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- Surat Menteri BUMN No. S-949/MBU/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020 hal Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan RKAP tahun 2021;
- Surat Plt. Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN No. S-165/DSI.MBU/08/2021 tanggal 2 Agustus 2021 perihal Permintaan Penyajian Laporan Manajemen Triwulanan Program TJSL BUMN;
- Permen BUMN Negara No. PER-05/MBU/04/2021 Tanggal 20 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- Permen BUMN Negara No. PER-06/MBU/09/2022 Tanggal 15 September 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; dan
- Surat Menteri BUMN No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program PUMK").

Preparation of the CSER Report at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is guided by:

- Law No. 19 of 2003 dated June 19,2003 concerning SOEs, Article 2 (actively guiding and assisting the weak economies, cooperatives and the communities) and Article 88 (source of funds can be from profit allowance);
- Law No 40 of 2007 dated August 16, 2007 concerning Limited Liability Companies Chapter V concerning Social Environmental Responsibility;
- Government Regulation No 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility (CSER) of Limited Liability Companies;
- Presidential Decree No 59 of 2017 concerning the Achievement of Sustainable Development Goals;
- Minister of SOEs Regulation No. PER- 05/MBU/2007 dated April 27, 2007 concerning Partnership Program between SOEs and Small Businesses, and the Community Development Program;
- Minister of SOEs Decree No. 100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning Assessment of Health Level of SOEs;

- Minister of SOEs Decree No. Kep-236/ MBU/2003 dated June 17, 2003 concerning Small Business Entity Partnership Program and Community Development Program;
- Minister of SOEs Circular No. SE-02/MBU/Wk/2012 dated February 23, 2012 concerning Stipulation of Accounting Guidelines for Partnership and Community Development Programs;
- Minister of SOEs Circular No. SE-5/MBU/DSI/03/2020 dated March 17, 2020 concerning Combating the Spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) through Social and Environmental Responsibility Activities;
- Minister of SOEs Letter No. S-949/ MBU/10/2020 dated October 23, 2020 concerning Aspirations of Shareholders/ Capital Owners for Preparation of 2021 WP&B; and
- Acting Deputy for Human Capital, Technology and Information of the Ministry of SOEs Letter No. S-165/DSI.MBU/08/2021 dated August 2, 2021 concerning Request for Presentation of Quarterly Management Report for SOE CSER Program.
- Minister of SOEs Regulation No. PER-05/MBU/04/2021 dated April 20, 2021 concerning the SOE CSER Program;

- Minister of SOEs Regulation No. PER-06/MBU/09/2022 dated September 15, 2022 concerning Amendment to Minister of SOEs Regulation No. PER-05/MBU/04/2021 concerning SOE CSER Program; and

- Minister of SOEs Letter No. S-721/MBU/11/2022 dated November 10, 2022 concerning Cooperation in the Micro and Small Enterprises Funding Program ("PUMK Program Cooperation").



KINERJA PROGRAM TJSL
CSER Program Performance

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)

REALISASI PROGRAM PENDANAAN UMK (PUMK)

Program PUMK pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp79,83 miliar dari total anggaran Tahun 2022 sebesar Rp79,78 miliar. PUMK tersebut terdiri dari program kerja sama PUMK tahun 2021 dengan UNHAS yang belum terselesaikan sebesar Rp55 juta dan program PUMK kolaborasi yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN pada triwulan IV Tahun 2022 sebesar Rp79,78 miliar dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Gambaran besaran penyaluran PUMK sebagaimana berikut:

MICRO AND SMALL BUSINESS FUNDING PROGRAM (PUMK)

UMK FUNDING PROGRAM REALIZATION (PUMK)

The PUMK program in 2022 realized Rp79.83 billion from the total 2022 budget of Rp79.78 billion. This PUMK consisted of the 2021 PUMK collaboration program with UNHAS, which in 2021 had not been achieved Rp55 million, and the collaborative PUMK program initiated by the Ministry of BUMN in the fourth quarter of 2022 in the amount of Rp79.78 billion with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. An overview of the PUMK distribution is as follows:

Tabel Penyaluran PUMK
Distribution of PUMK

(dalam Rupiah) | (in Rupiah)

Uraian Description	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Period ending December 31, 2021	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Period ending December 31, 2022
Distribusi dana **Funds distribution**		
Jumlah dana yang disalurkan Amount of funds disbursed	29.229.700.000	79.837.062.832
Jumlah distribusi dana **Total funds distribution**	**29.229.700.000**	**79.837.062.832**

RINCIAN DANA PROGRAM PUMK

Dana Program PUMK berasal dari dana bergulir Program PUMK sampai 31 Desember 2022, dana Program PUMK yang tersedia sebesar Rp113.482.426.709 dengan rincian sebagai berikut:

PUMK PROGRAM FUNDING DETAILS

The PUMK Program funding comes from the PUMK Program revolving fund up to December 31, 2022, where the available PUMK Program funds were Rp113,482,426,709 with the following details:

Tabel Rincian Dana Program PUMK
PUMK Program Funding

(dalam Rupiah) | (in Rupiah)

Uraian Description	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Period ending December 31, 2021	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Period ending December 31, 2022
Dana yang tersedia **Available funds**		
Saldo awal bank program PUMK Opening balance of the PUMK bank program	68.248.816.534	78.717.088.566
Pengembalian pinjaman PUMK PUMK loan repayments	29.469.216.501	28.535.724.384

Tabel Rincian Dana Program PUMK
PUMK Program Funding

(dalam Rupiah) | (in Rupiah)

Uraian Description	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Period ending December 31, 2021	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Period ending December 31, 2022
Pendapatan jasa giro Current Account Service Revenue	1.231.970.171	1.530.988.639
Pendapatan jasa administrasi piutang pinjaman Revenue from loan receivables administration services	1.913.247.776	1.634.354.094
Penerimaan Lain Other Receivables	245.977.302	3.064.240.026
Jumlah dana yang tersedia **Total available funds**	**101.109.228.284**	**113.482.426.709**

PROGRAM BANTUAN DAN/ATAU KEGIATAN LAINNYA (NON-PUMK)

REALISASI PROGRAM KERJA

Sumber dana Program TJSL Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya berasal dari anggaran yang dibiayakan pada Perusahaan. Realisasi pelaksanaan Program TJSL tahun 2022 sebesar Rp118.931.369.006 atau 85,41% dari anggaran tahun 2022 atau 116,29% dari anggaran pada periode yang sama, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

ASSISTANCE PROGRAMS AND/OR OTHER ACTIVITIES (NON-PUMK)

REALIZATION OF WORK PROGRAMS

The source of funds for the CSER Assistance and/or Other Activities Program comes from a budget paid by the Company. The 2022 CSER Program realization amounted to Rp118,931,369,006, or 85.41% of the 2022 budget, or 116.29% of the budget in the same period, as shown in the following table:

Tabel Realisasi Program Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya (Non-PUMK)
Realization of Assistance Programs and/or Other Activities (Non-PUMK)

(dalam Rupiah) | (in Rupiah)

Program	Realisasi Tahun 2021 2021 Realization	RKA 2022 2022 RKA	Realisasi Tahun 2022 2022 Realization	Prosentase Capaian Percentage Achievement	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya Assistance and/or Other Activities	102.270.956.681	139.341.720.347	118.931.369.006	116,29	85,35

PROGRAM *COMMUNITY INVOLVEMENT DEVELOPMENT* (CID) DAN NON-*COMMUNITY INVOLVEMENT DEVELOPMENT* (NON-CID)

Program Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya terdiri dari Program yang dijalankan Departemen Tanggung Jawab Sosial pada Group Sekretariat Perusahaan yang disebut dengan Program *Community Involvement Development* (CID) dan Program *Non-Community Involvement Development* (Non-CID) yang dijalankan oleh Perusahaan di luar *Group* Sekretariat Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

COMMUNITY INVOLVEMENT DEVELOPMENT (CID) AND NON-COMMUNITY INVOLVEMENT DEVELOPMENT (NON-CID) PROGRAMS

The Assistance Programs and/or Other Activities consist of Programs run by the Social Responsibility Department in the Company's Secretariat Group, and these include Community Involvement Development (CID) Programs and Non-Community Involvement Development (Non-CID) Programs, run by Companies outside the Company's Secretariat Group, with details as follows:

Tabel Realisasi Program CID dan Program Non-CID
Realization of CID Programs and Non-CID Programs

(dalam Rupiah) | (in Rupiah)

No	Program	Realisasi Tahun 2021 2021 Realization	RKA 2022 2022 RKA	Realisasi Tahun 2022 2022 Realization	TREND	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 5/4	(7) = 5/3
1	Program CID	102.270.956.681	120.500.000.000	112.521.461.548	93,38	110,02
2	Program Non-CID	-	18.841.720.347	6.409.907.458	34,02	-
Total		**102.270.956.681**	**139.341.720.347**	**118.931.369.006**	**85,35**	**116,29**

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Berdasarkan TPB dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar yaitu, Pilar Sosial sebesar Rp54.271.398.273 atau 100,91% dari RKA tahun 2022, Pilar Ekonomi sebesar Rp31.307.610.432 atau 55,75% dari RKA tahun 2022, Pilar Lingkungan sebesar Rp31.756.676.567 atau 111,43% dari RKA tahun 2022, dan Pilar Hukum dan Tata Kelola sebesar Rp1.595.683.634 atau 199,46% dari RKA 2022. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

The SDGs can be grouped into 4 (four) pillars, namely, Social Pillar with Rp54,271,398,273, or 100.91% of the 2022 RKA, Economic Pillar with Rp31,307,610,432, or 55.75% of the 2022 RKA, Environmental Pillar with Rp31,756,676,567, or 111.43% of the 2022 RKA, and the Legal and Governance Pillar with Rp1,595,683,634, or 199.46% of the 2022 RKA. This is shown in the following table:

Tabel TPB
SDG

(dalam Rupiah) | (in Rupiah)

No	Pilar Pillar	Real 2021 (Audited) 2021 Real (Audited)	RKA 2022 2022 RKA	Realisasi 2022 2022 Realization	Presentase Capaian Percentage Achievement	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(6)=(5)/(4)
1	Sosial | Social	72.598.032.121	53.783.378.947	54.271.398.273	79,80	100,91
2	Ekonomi | Economy	18.201.343.500	56.158.341.400	31.307.610.432	127,01	55,75
3	Lingkungan| Environment	10.093.277.060	28.500.000.000	31.756.676.567	314,63	111,43
4	Hukum & Tata Kelola Law & Governance	2.378.313.000	900.000.000	1.595.683.734	67,09	177,30
Total		**102.270.956.681**	**139.341.720.347**	**118.931.369.006**	**116,29**	**85,35**

PROGRAM *CREATING SHARED VALUE* (CSV) DAN PROGRAM PRIORITAS/UNGGULAN

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang menciptakan nilai tambah bagi Perseroan yang terkait dengan bisnis inti atau *Creating Shared Value* (CSV) adalah bentuk strategi Perusahaan untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial secara bersamaan untuk kepentingan masyarakat maupun bisnis Perusahaan. Adapun rincian pelaksanaan Program CSV sebagai berikut:

CREATING SHARED VALUE (CSV) AND FEATURED/PRIORITY PROGRAMS

The Social and Environmental Responsibility Program (CSER) creates added value for the Company's core business. Creating Shared Value (CSV) is a form of the Company's strategy to create economic and social values simultaneously for the benefit of the communities and the Company's business. Details of the CSV Program are as follows:

Tabel Rincian Pelaksanaan Program CSV
CSV Program Details

(dalam Rupiah) | (in Rupiah)

No	Program CSV CSV Program	RKA Tahun 2022 2022 RKA	Realisasi Tahun 2022 2022 Realization	Nilai Manfat CSV bagi Perseroan Value of CSV Benefits for the Company
1	Program Tanam Mangrove Mangrove Planting Program	3.800.000.000	4.298.727.438	Memberi nilai tambah Perseroan dalam penilaian/asesmen *Green Port* Creating added value through the Company in the assessment of the Green Port
2	Program Pelatihan K3 Komunitas Pelabuhan Port Community OHS Training Program	3.200.000.000	2.149.707.512	Memberi nilai tambah Perseroan pada *Awareness* Komunitas Pelabuhan pada K3 Creating added value through the Company's Port Community Awareness on OHS
Total		**7.000.000.000**	**6.448.434.950**	

Penyaluran Program TJSL yang sejalan dengan program prioritas/unggulan yang mendukung pencapaian TPB. Pada Tahun 2022 beberapa program bidang prioritas yang telah dilaksanakan antara lain:

CSER Program Disbursement is in line with priority/leading programs that support the achievement of the SDGs. In 2022 the priority sector programs implemented included:

PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN

PRIORITY PROGRAMS IN THE EDUCATION SECTOR

Tabel Program Unggulan/Prioritas
Table of Featured/Priority Programs

(dalam Rupiah) | (in Rupiah)

No	Program Unggulan/Prioritas Bidang Pendidikan Featured/Priority Programs in the Education Sector	TPB SDG	RKA Tahun 2022 2022 RKA	Realisasi Tahun 2022 2022 Realization
1	Program Pelatihan dan Sertifikasi Pendidikan/Keahlian Education/Skills Training and Certification Program	4	1.800.000.000	2.589.834.744
2	Program Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas Capacity Building Program for People with Disabilities	10	1.800.000.000	1.519.409.535
3	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Education Quality Improvement Program	4	3.950.000.000	9.621.773.902
4	Program Bina Olahraga BUMN SOE Sports Development Program	3	1.000.000.000	495.000.000
5	Program Beasiswa Pelindo Pelindo Scholarship Program	4	8.300.000.000	2.869.231.636
6	Dukungan Pembangunan Nasional untuk Pendidikan National Development Support for Education	4	9.500.000.000	10.578.185.489
7	Program Pelatihan K3 Komunitas Pelabuhan (CSV) Port Community OHS Training Program (CSV)	4	3.200.000.000	2.149.707.512
8	Program Mahasiswa Magang Student Internship Program	4	2.000.000.000	1.510.447.912
9	Program Pelatihan Purnabakti Retirement Training Program	4	290.000.000	-
Total			**31.840.000.000**	**31.333.590.730**

PRIORITAS BIDANG LINGKUNGAN

PRIORITY PROGRAMS IN THE ENVIRONMENT SECTOR

Tabel Program Unggulan/Prioritas
Table of Featured/Priority Programs

(dalam Rupiah) | (in Rupiah)

No	Program Unggulan/Prioritas Bidang Lingkungan Featured/Priority Programs in the Environment Sector	TPB SDG	RKA Tahun 2022 2022 RKA	Realisasi Tahun 202 2022 Realization
1	Program Pengelolaan Sampah Waste Management Program	12	2.050.000.000	3.771.260.827
2	Program Pemerataan Akses Energi Energy Access Program	7	2.050.000.000	1.944.054.982
3	Program Rehabilitasi Pesisir dan Laut Coastal and Marine Rehabilitation Program	14	3.400.000.000	3.317.851.909
4	Program TJSL Pada Proyek Strategis CSER Program for Strategic Projects	9	3.500.000.000	3.343.722.460
5	Program Penyediaan Air Bersih Clean Water Provision Program	6	3.800.000.000	2.626.385.187
6	Program Penghijauan Green Program	15	3.800.000.000	3.473.855.706
7	Program Tanam Mangrove (CSV) Mangrove Planting Program (CSV)	14	3.800.000.000	4.298.727.438
8	Program Penanganan Sosial Kemasyarakatan Proyek Pembangunan Terminal Kijing Tahun II Community Social Handling Program for Kijing Terminal Development Project Year II	9	8.283.341.400	2.228.915.599
9	Pemantauan lingkungan Kantor Pusat Head Office environmental monitoring	12	400.000.000	200.000.000
10	Pemantauan lingkungan PMLI Ciawi PMLI Ciawi environmental monitoring	12	400.000.000	200.000.000
Total			**31.483.341.400**	**25.404.774.108**

PRIORITAS BIDANG PENGEMBANGAN UMK

PRIORITY PROGRAMS IN THE MSME DEVELOPMENT SECTOR

Tabel Program Unggulan/Prioritas
Table of Featured/Priority Programs

(dalam Rupiah) | (in Rupiah)

No	Program Unggulan/Prioritas Bidang Pengembangan UMK Featured/Priority Programs in the MSME Development Sector	TPB SDG	RKA Tahun 2022 2022 RKA	Realisasi Tahun 2022 2022 Realization
1	Program Pelatihan dan Sertifikasi UMK MSME Training and Certification Program	8	2.800.000.000	2.597.152.541
2	Program Keikutsertaan Pameran UMK MSME Exhibition Participation Program	8	1.700.000.000	3.939.693.676
3	Program Bantuan Peningkatan Kapasitas UMK MSME Capacity Building Assistance Program	8	17.000.000.000	5.116.951.632
Total			**21.500.000.000**	**11.653.797.849**

GAMBARAN TPB KESELURUHAN YANG DILAKSANAKAN PERUSAHAAN

OVERALL PICTURE OF THE SDG IMPLEMENTED BY THE COMPANY

No	TPB	*Real* 2021 *(Audited)*	RKA 2022	Realisasi 2022 Realization 2022	Persentase Capaian Performance Percentage	
					Real/RKA Tahunan (%) Annual 2021 (%)	*Real*/RKA Tahun 2021 (%) Annual 2021 (%)
A	PILAR SOSIAL SOCIAL PILLAR	71.598.023.121	53.271.398.273	54.271.398.273	75.80	100.91
1	TPB 1	8.705.121.480	-	-	0.00	0.00
2	TPB 2	16.916.320.040	16.500.000.000	19.095.310.342	112.88	115.73
3	TPB 3	27.089.824.163	8.243.378.947	5.856.906.736	21.62	71.05
4	TPB 4	18.886.757.438	29.040.000.000	29.319.181.195	155.24	100.96
5	TPB 5	-	-	-	0.00	0.00
B	PILAR EKONOMI ECONOMIC PILLAR	18.201.343.500	56.158.341.400	31.307.610.432	172.01	55.75
1	TPB 7	1.716.525.500	2.050.000.000	1.944.054.982	113.26	94.83
2	TPB 8	1.288.247.000	21.525.000.000	11.653.797.849	904.62	54.14
3	TPB 9	15.188.071.000	11.783.341.400	5.572.638.059	36.69	47.29
4	TPB 10	8.500.000	16.300.000.000	12.137.119.542	142789.64	74.46
5	TPB 17	-	4.500.000.000	-	0.00	0.00
C	PILAR LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL PILLARS	10.093.277.060	28.500.000.000	31.756.676.567	314.63	111.43
1	TPB 6	24.950.000	3.800.000.000	2.626.385.187	10526.59	69.12
2	TPB 11	5.917.269.800	9.500.000.000	13.054.718.250	220.62	137.42
3	TPB 12	-	2.850.000.000	4.171.260.827	0.00	146.36
4	TPB 13	503.138.900	1.350.000.000	813.877.250	161.76	60.29
5	TPB 14	3.388.418.360	7.200.000.000	7.616.579.347	224.78	105.79
6	TPB 15	259.500.000	3.800.000.000	3.473.855.706	1338.67	91.42
D	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA LEGAL AND GOVERNANCE PILLAR	2.378.313.000	900.000.000	1.595.683.734	67.09	177.30
1	TPB 16	2.378.313.000	900.000.000	1.595.683.734	67.09	177.30
TOTAL		**102.270.956.681**	**139.341.720.347**	**118.931.369.006**	**116.29**	**85.35**

PEMBINAAN PROGRAM PUMK

PUMK Program Development

a. **Inacraft 2022**



Pelaksanaan : 23 – 27 Maret 2022 Lokasi : Balai Sidang Jakarta Convention Center Mitra Binaan : 1. Ramza Taylor 2. Kube Usaha Maju 3. Batik Jambi Halim 4. CV. Indria Karya 5. Souvenir Sederhana	Implementation: March 23-27, 2022 Location : Balai Sidang Jakarta Convention Center Foster Partners : 1. Ramza Taylor 2. Kube Usaha Maju 3. Batik Jambi Halim 4. CV. Indria Karya 5. Souvenir Sederhana

a. **Inacraft 2022**

b. **Kolaborasi TJSL BUMN Pengembangan UMK dengan Desa Penyangga di Mandalika**



Pelaksanaan : 3,9 dan 12 Maret 2022 Lokasi : Mataram, Kuta Loteng Mitra Binaan : 1. UD Ibarahim ART 2. Mutiara Lombok 3. Distro Gandrung	Implementation: March 3, 9 and 12, 20222 Location : Mataram, Kuta Loteng Foster Partners : 1. UD Ibarahim ART 2. Mutiara Lombok 3. Distro Gandrung

b. **CSER SOE Collaboration with MSEs Development with Supporting Villages in Mandalika**

c. **Pameran UMK di Bizam**



Pelaksanaan : 15 - 31 Maret 2022 Lokasi : Mataram - Bizam Mitra Binaan : 1. UD. Ibarahim ART 2. Distro Gandrung	Implementation: March 15 - 31, 2022 Location : Mataram - Bizam Foster Partners : 1. UD. Ibarahim ART 2. Distro Gandrung

c. **MSE Exhibition in Bizam**

d. **Pameran UMK di Pelindo Forum**



Pelaksanaan : 21-23 Juli 2022 Lokasi : PT PMLI Mitra Binaan : 1. Home Industri Fasya 2. Dimsum Kokom 3. Luwak Lanang Coffee & chocolate 4. Usaha 310 5. Ramza Taylor 6. Renata Label 7. Batik Dewi Arum 8. Morehandcraft Bank Sampah Rumput Hias	Implementation: July 21-23, 2022 Location : PT PMLI Foster Partners : 1. Home Industri Fasya 2. Dimsum Kokom 3. Luwak Lanang Coffee & chocolate 4. Usaha 310 5. Ramza Taylor 6. Renata Label 7. Batik Dewi Arum 8. Morehandcraft Bank Sampah Rumput Hias

d. **MSE Exhibition in Pelindo Forum**

e. **Pameran Indonesia Modest Fashion Week**



Pelaksanaan : 27-30 Oktober 2022 Lokasi : Jakarta Convention Center (JCC) Mitra Binaan : 1. Ramza Taylor 2. Renata Label 3. Al Rafi Ecoprint & Natural Dying 4. Sadina 5. Batik Trusmi 6. Batik Dewi Arum 7. Mutiara Lombok 8. Raffisco Leather	Implementation: October 27-30, 2022 Location : Jakarta Convention Center (JCC) Foster Partners : 1. Ramza Taylor 2. Renata Label 3. Al Rafi Ecoprint & Natural Dying 4. Sadina 5. Batik Trusmi 6. Batik Dewi Arum 7. Mutiara Lombok 8. Raffisco Leather

e. **Indonesia Modest Fashion Week Exhibition**

f. **Pameran Katumbiri**



f. Katumbiri Exhibition

Pelaksanaan : 16 – 20 November 2022 Lokasi : Jakarta Convention Center (JCC) Mitra Binaan : 1. Bordir Tas Aceh dan Rencong 2. Pesona Siger 3. Batik Nderbolo 4. Batik Lavega Madura 5. Kacang Telur FN 6. Bumbu Pecel Intan	Implementation: November 16 – 20, 2022 Location : Jakarta Convention Center (JCC) Foster Partners : 1. Bordir Tas Aceh dan Rencong 2. Pesona Siger 3. Batik Nderbolo 4. Batik Lavega Madura 5. Kacang Telur FN 6. Bumbu Pecel Intan

g. **Future SMEs Village**



g. Future SMEs Village

Pelaksanaan : 10-19 November 2022 Lokasi : Bali Collection ITDC Nusa Dua Mitra Binaan : 1. CV Industri Classica Variasi 2. Suteja Silver 3. Aiswaria Endek Bali 4. Balinese Chocolate	Implementation: November 10 – 19, 2022 Location : Bali Collection ITDC Nusa Dua Foster Partners : 1. CV Industri Classica Variasi 2. Suteja Silver 3. Aiswaria Endek Bali 4. Balinese Chocolate

h. **Sail Tidore Expo**



h. Sail Tidore Expo

Pelaksanaan : 24-29 November 2022 Lokasi : Tidore Mitra Binaan : 1. Amaopi 2. Batik Trusmi 3. Raffisco Leather 4. Fahma Hair 5. Batik Jumput 6. UD Utami 7. CV Kafein Wisanggeni Jaya 8. CV Morisama Sejahtera Indonesia 9. CV Karya Kearifan Lokal 10. Witrove	Implementation: November 24-29, 2022 Location : Tidore Foster Partners : 1. Amaopi 2. Batik Trusmi 3. Raffisco Leather 4. Fahma Hair 5. Batik Jumput 6. UD Utami 7. CV Kafein Wisanggeni Jaya 8. CV Morisama Sejahtera Indonesia 9. CV Karya Kearifan Lokal 10. Witrove

i. **Pameran UMK pada Puncak Inovasi Pelindo di Sarinah**



i. MSE Exhibition at the peak of Pelindo innovation in Sarinah

Pelaksanaan : 22 Desember 2022 Lokasi : Sarinah Mitra Binaan : 1. Gusbeisaekung 2. Jejaring Craft 3. Yao Eco Craft 4. Tridolbag 5. Dapur Tienoer/tienoerfood 6. Sausan Chocolate 7. Ztwo Production 8. Herba Mas 9. Minea Kreasi Nusantara 10. Mejikuhibiniu Butik	Implementation: December 22, 2022 Location : Sarinah Foster Partners : 1. Gusbeisaekung 2. Jejaring Craft 3. Yao Eco Craft 4. Tridolbag 5. Dapur Tienoer/tienoerfood 6. Sausan Chocolate 7. Ztwo Production 8. Herba Mas 9. Minea Kreasi Nusantara 10. Mejikuhibiniu Butik

REALISASI PROGRAM TJSL TAHUN 2022
Realization of the CSER Program in 2022

Realisasi program TJSL tahun 2022 disajikan sebagai berikut: The 2022 CSER program realization is shown as follows:

Tabel Realisasi Program TJSL
CSER Program Realization

No	Nama Program Program Name	No. TPB SDG No.	Pilar Pillars	Target Capaian Achievement Target
A	**PROGRAM PRIORITAS** **PRIORITY PROGRAMS**			
	BIDANG LINGKUNGAN ENVIRONMENT			
1	Program Pengelolaan Sampah Waste Management Program	12	3	Terlaksananya Program Pengelolaan Sampah Implementation of Waste Management Program
2	Program Pemerataan Akses Energi Energy Access Program	7	2	Terlaksananya Program Pemerataan Akses Energi Implementation of Energy Access Program
2	Program Rehabilitasi Pesisir dan Laut Coastal and Marine Rehabilitation Program	14	3	Terlaksananya Program Rehabilitasi Pesisir dan Laut Implementation of Coastal and Marine Rehabilitation Program
3	Program TJSL Pada Proyek Strategis CSER Program for Strategic Projects	9	2	Terlaksananya Program TJSL Pada Proyek Strategis Implementation of CSER Program for Strategic Projects
4	Program Penyediaan Air Bersih Clean Water Provision Program	6	3	Terlaksananya Program Penyediaan Air Bersih Implementation of Clean Water Provision Program
5	Program Penghijauan Green Program	15	3	Terlaksananya Program Penghijauan Implementation of Green Progra
6	Program Tanam Mangrove (CSV) Mangrove Planting Program (CSV)	14	3	Terlaksananya Program Penanaman Mangrove Implementation of Mangrove Planting Program
7	Program Penanganan Sosial Kemasyarakatan Proyek Pembangunan Terminal Kijing Tahun II Community Social Handling Program for Kijing Terminal Development Project Year II	9	2	Untuk mencapai level terbaik *Social License to Operate* (SLO) atau izin sosial Proyek Pembangunan Terminal Kijing To achieve the best level of Social License to Operate (SLO) or social permit for the Kijing Terminal Development Project
8	Pemantauan lingkungan Kantor Pusat Head Office environmental monitoring	12	3	Hasil pemantauan lingkungan Kantor Pusat dan rencana tindak lanjut terhadap hasil tersebut Results of environmental monitoring at the Head Office and plans for follow up on these results
9	Pemantauan lingkungan PMLI Ciawi PMLI Ciawi environmental monitoring	12	3	Hasil pemantauan lingkungan Kantor Pusat dan rencana tindak lanjut terhadap hasil tersebut Results of environmental monitoring at the Head Office and plans for follow up on these results
	BIDANG PENDIDIKAN EDUCATION			
10	Program Pelatihan dan Sertifikasi Pendidikan/ Keahlian Education/Skills Training and Certification Program	4	1	Terlaksananya Program Program Pelatihan dan Sertifikasi Implementation of Education/Skills Training and Certification Program

(dalam Rupiah) | (in Rupiah)

	Realisasi Capaian Achievement Realization	**Lokasi** Location	**Anggaran** Budget	**Realisasi** Realization
	Realisasi bantuan mesin pencacah dan pengayak sampah Realization of assistance for trash shredders and sifters	Bali	2.050.000.000	3.771.260.827
	Realisasi bantuan *Generator Set* Realization of assistance for Generator Set	Manado	2.050.000.000	1.944.054.982
	Kegiatan Transplantasi Terumbu Karang *Triangle Diving Club* di Pulau Langkai, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Terumbu Karang Club Coral Reef Transplant Activity on Langkai Island, Makassar City, South Sulawesi Province	Makassar	3.400.000.000	3.317.851.909
	Pembayaran Iuran Pertama (BPU) BPJS Ketenagakerjaan untuk Para Nelayan disekitar proyek strategis Makassar New Port Payment of First Contribution (BPU) for BPJS Employment for Fishermen around the Makassar New Port strategic project	Makassar	3.500.000.000	3.343.722.460
	Terlaksananya program perbaikan serta peningkatan kualitas sanitasi masyarakat di wilayah Padang Implementation of improvement programs and improving the quality of community sanitation in the Padang area	Padang	3.800.000.000	2.626.385.187
	Terlaksananya Penanaman Pohon dalam rangka Program Hari Menanam Pohon Indonesia Tahun 2021 Implementation of Tree Planting in the context of the 2021 Indonesian Tree Planting Day Program	Lampung	3.800.000.000	3.473.855.706
	Bekasi		3.800.000.000	4.298.727.438
		Pontianak	8.283.341.400	2.228.915.599
	Telah dilakukan kegiatan pemantauan lingkungan sampai dengan TW 1 2022 di Kantor Pusat Environmental monitoring activities carried out up to Q1 2022 at the Head Office	Jakarta	400.000.000	200.000.000
	Hasil pemantauan lingkungan PMLI Ciawi dan rencana tindak lanjut terhadap hasil tersebut PMLI Ciawi environmental monitoring results and follow-up plans for these results	Jakarta	400.000.000	200.000.000
	Terlaksananya Program untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang salah satunya adalah dengan pemberian pelatihan kepada masyarakat umum Implementation of programs to improve capabilities and competencies, one of which was by providing training to the general public	Jakarta, Medan	1.800.000.000	2.589.834.744

No	Nama Program Program Name	No. TPB SDG No.	Pilar Pillars	Target Capaian Achievement Target
11	Program Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas Capacity Building Program for People with Disabilities	10	2	Terlaksananya Program Program Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas Implementation of Capacity Building Program for People with Disabilities
12	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Education Quality Improvement Program	4	1	Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Implementation of Education Quality Improvement Program
13	Program Bina Olahraga BUMN SOE Sports Development Program	3	1	Terlaksananya Program Bina BUMN Implementation of SOE Sports Development Program
14	Program Beasiswa Pelindo Pelindo Scholarship Program	4	1	Terlaksananya Program Beasiswa Pelindo Implementation of Pelindo Scholarship Program
15	Dukungan Pembangunan Nasional untuk Pendidikan National Development Support for Education	4	1	Terlaksananya Program Dukungan Pembangunan Nasional pada Bidang Pendidikan Implementation of National Development Support Program in the Education Sector
16	Program Pelatihan K3 Komunitas Pelabuhan (CSV) Port Community OHS Training Program (CSV)	4	1	Terlaksananya program Program Peningkatan K3 Komunitas Pelabuhan Implementation of Port Community OHS Training Program
17	Program Mahasiswa Magang Student Internship Program	4	1	Program Magang Mahasiswa yang ditempatkan di berbagai unit kerja pada perusahaan, guna meningkatkan pemahaman dan pengenalan bagi para mahasiswa tentang lingkungan kerja yang sesungguhnya, sesuai bidang studi masing-masing Student Internship Program in various work units in the Company, in order to increase understanding and introduction for students about the real work environment, according to their respective fields of study
	BIDANG PENGEMBANGAN UMK MSME DEVELOPMENT			

(dalam Rupiah) | (in Rupiah)

	Realisasi Capaian Achievement Realization	Lokasi Location	Anggaran Budget	Realisasi Realization
			1.800.000.000	1.519.409.535
	Terlaksananya Program TJSL Kolaborasi BUMN Berupa Penyediaan Sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Untuk Provinsi Banten Implementation of SOE CSER Collaboration in the Form of Providing Communication Information Technology (ICT) Facilities for Banten Province	Tangerang, Surabaya, dan Makassar Tangerang, Surabaya, and Makassar	3.950.000.000	9.621.773.902
	Terlaksananya Program Bina Olahraga BUMN (memberangkatkan Volunter ke Piala dunia 2022) Implementation of SOE Sports Development Program (departing Volunteers to the 2022 World Cup)	Jakarta	1.000.000.000	495.000.000
	Terlaksananya Program Beasiswa Pelindo Implementation of Pelindo Scholarship Program	DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Papua. Jakarta, Banten, Java West, West Kalimantan, Lampung, Bangalore, Jambi, West Sumatra, Bangka Belitung, Papua	8.300.000.000	2.869.231.636
	Dukungan Pembangunan Nasional Pada Bidang Pendidikan National Development Support in the Education Sector	Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Bekasi, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Batam, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Tangerang. Aceh, West Sumatra , Riau, West Java, Bekasi, Central Java, Jakarta, Batam, East Java, South Sulawesi, Tangerang.	9.500.000.000	10.578.185.489
	Terlaksananya Program Peningkatan K3 Komunitas Pelabuhan Implementation of Port Community OHS Training Program	Jakarta, Palembang	3.200.000.000	2.149.707.512
	Telah dilaksanakan Program Mahasiswa Magang Bersertifikat, Bekerja sama dengan *Forum Human Capital Indonesia* (FHCI) untuk *Batch* I Tahun 2022 A Certified Internship Student Program was implemented, in collaboration with the Indonesian Human Capital Forum (FHCI) for Batch I in 2022	Jakarta	2.000.000.000	1.510.447.912

No	Nama Program Program Name	No. TPB SDG No.	Pilar Pillars	Target Capaian Achievement Target
18	Program Pelatihan dan Sertifikasi UMK MSME Training and Certification Program	8	2	Terlaksananya Program Program Pelatihan. Pembinaan. dan Sertifikasi UMK Implementation of MSME Training and Certification Program
19	Program Keikutsertaan Pameran UMK MSME Exhibition Participation Program	8	2	Terlaksananya Program Keikutsertaan Pameran UMK Implementation of MSME Exhibition Participation Program
20	Program Bantuan Peningkatan Kapasitas UMK MSME Capacity Building Assistance Program	8	2	Terlaksananya Program Bantuan Peningkatan Kapasitas UMK Implementation of MSME Capacity Building Assistance Program
B	**PROGRAM NON-PRIORITAS** **NON-PRIORITY PROGRAMS**			
19	Program Pelindo Berbagi Pelindo Sharing Program	2	1	Terlaksananya Program Program Pelindo Berbagi Implementation of Pelindo Sharing Program
20	Pelindo Peduli COVID-19 Pelindo Cares About COVID-19	3	1	Terlaksananya Program Pelindo Peduli COVID-19 Implementation of Pelindo Cares About COVID-19
21	Program Peningkatan Kesehatan dan Imunitas Health and Immunity Improvement Program	3	1	Terlaksananya Program Peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Implementation of Health and Immunity Improvement Program
22	Program Tanggap Bencana dan Mitigasi Perubahan Iklim Disaster Response and Climate Change Mitigation Program	13	3	Terlaksananya Program Tanggap Bencana dan Mitigasi Perubahan Iklim Implementation of Disaster Response and Climate Change Mitigation Program
23	Bantuan Sarana dan Prasarana Ibadah Places of Worship Facilities and Infrastructure Assistance	11	3	Terlaksananya Bantuan Sarana dan Prasarana Ibadah Implementation of Places of Worship Facilities and Infrastructure Assistance
24	Bantuan Sarana dan Prasarana Umum Public Facilities and Infrastructure Assistance	11	3	Terlaksananya Bantuan Sarana dan Prasarana Umum Implementation of Public Facilities and Infrastructure Assistance

(dalam Rupiah) | (in Rupiah)

	Realisasi Capaian Achievement Realization	Lokasi Location	Anggaran Budget	Realisasi Realization
	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas UMK dalam rangka optimalisasi alat penunjang produksi untuk mengembangkan pemasaran serta hasil produk UMK Implementation of the MSME Capacity Building Program to optimize production support tools to develop marketing and product output of MSMEs	Bogor	2.800.000.000	2.597.152.541
	Telah berpartisipasi pada program pengembangan UMK dalam pelaksanaan Keikutsertaan pameran UMK dalam rangka mendukung pemasaran produk UMK kepada masyarakat. Pelatihan Revitalisasi digital sangat penting dalam meningkatkan kemampuan pelau UMK dalam meramu strategi bisnis ke depannya Participated in the MSME development program through MSME exhibition participation to support the marketing of MSME products to the public. Digital revitalization training is very	Yogyakarta, Jakarta, Bogor, Makassar dan Ambon Yogyakarta, Jakarta, Bogor, Makassar and Ambon	1.700.000.000	3.939.693.676
	Terealisasinya program bantuan peningkatan kapasitas UMK dengan melalui pemberian fasilitas produksi UMK Realization of the MSME capacity building assistance program through the provision of MSME production facilities	Jakarta	17.000.000.000	5.116.951.632
	Terlaksananya program Pelindo Berbagi dalam rangka penyaluran sembako dan kebutuhan pangan lainnya untuk masyarakat kurang mampu Implementation of the Pelindo Sharing program in the context of distributing groceries and other food needs for underprivileged communities	Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, NTB Central Java, East Java, Banten, NTB	16.500.000.000	19.095.310.342
	Terlaksananya program Pelindo Peduli COVID-19 dengan banyaknya sarana "Mudik Sehat. Mudik Aman Bersama BUMN" Implementation of the Pelindo Cares About Covid program with many facilities "Healthy Homecoming. Safe Homecoming with SOEs"	Jakarta	2.200.000.000	603.572.601
	Pembayaran iuran pertama pekerja bukan penerima upah Payment of the first contribution to workers who are not wage earners	Makassar, Riau, Jawa Timur Makassar, Riau, East Java	2.100.000.000	2.487.790.188
	Terlaksananya Program Tanggap Bencana dan Mitigasi Perubahan Iklim berupa penyaluran bantuan pangan kepada korban bencana Implementation of the Disaster Response and Climate Change Mitigation Program in the form of distributing food aid to victims of disasters	Jakarta, Banten dan Ambon Jakarta, Banten and Ambon	1.350.000.000	813.877.250
	Telaksananya program bantuan Sarana dan Prasarana Ibadah berupa bantuan perbaikan dan/atau pembangunan rumah ibadah serta pemberian peralatan penunjang ibadah Implementation of Places of Worship Facilities and Infrastructure assistance program in the form of assistance for the repair and/or construction of places of worship as well as the provision of supporting equipment	Sumatra Barat, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Maluku, Ambon West Sumatra, Riau, Lampung, West Java, Central Java, DKI Jakarta, Riau Islands, Maluku, Ambon	3.850.000.000	5.622.072.069
	Terlaksananya Program pembangunan dan/atau renovasi sarana dan prasarana umum Implementation of development and/or renovation programs for public facilities and infrastructure	Jawa Tengah, Tanggerang, Bali, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Kepulauan Riau Central Java, Tangerang, Bali, West Sumatra, North Sulawesi, Maluku, Riau Islands	3.850.000.000	6.156.957.181

No	Nama Program Program Name	No. TPB SDG No.	Pilar Pillars	Target Capaian Achievement Target
25	Program Dukungan Pembangunan Nasional National Development Support Program	10	2	Terlaksananya Program Dukungan Pembangunan Nasional Implementation of National Development Support Program
26	Program Bantuan Ruang Tinggal Layak Huni Livable Housing Assistance Program	11	3	Terlaksananya Program Bantuan Ruang Tinggal Layak Huni Implementation of Livable Housing Assistance Program
27	Penyuluhan dan Bantuan Hukum Counseling and Legal Aid	16	4	Terlaksananya Penyuluhan dan Bantuan Hukum Implementation of Counseling and Legal Aid
28	Program *Wellness Competition* 2021 *For* Pelindo *Integration* The 2021 Wellness Competition Program for Pelindo Integration	3	1	Kompetisi pola hidup sehat antar pekerja di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan tujuan Menjaga dan Meningkatkan kesehatan Jasmani para Pekerja serta dengan harapan dapat Mengurangi biaya perawatan Pekerja sebagai akibat dari meningkatnya kesehatan para Pekerja. Competition for a healthy lifestyle among PT Pelindo employees with the aim of maintaining and improving the physical health of employees and with the hope of reducing the cost of treating employees as a result of improving the health of employees.
TOTAL REALISASI PENYALURAN TOTAL DISTRIBUTION REALIZATION				

(dalam Rupiah) | (in Rupiah)

	Realisasi Capaian Achievement Realization	Lokasi Location	Anggaran Budget	Realisasi Realization
	Terealisasinya bantuan insidentil di wilayah Kerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Realization of incidental assistance in the working area of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Banten West Sumatra, West Java, Central Java, DKI Jakarta, Riau Islands, East Java, South Sulawesi, Papua, Banten	14.500.000.000	10.617.710.007
	Terlaksananya program bantuan rumah tinggal layak huni melalui Bantuan bedah rumah Implementation of the housing assistance program for livable housing through home renovation assistance	Banyuwangi	1.800.000.000	1.275.689.000
	Terlaksananya Program Pelindo Anti Suap Untuk Indonesia Bersih. Amanah dan Berakhlak kepada masyarakat dan pengguna jasa di lingkungan Pelabuhan Implementation of the Pelindo Anti-Bribery Program for a Clean Indonesia. Trustworthy and Moral to the community and service users in the Port environment	Jakarta	900.000.000	1.595.683.734
	Program diikuti oleh 413 pekerja di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dan pemenang sebanyak 27 pekerja dari 11 kategori. The program was attended by 413 PT Pelabuhan Indonesia (Persero). employees. And the winners were 27 employees from 11 categories.	Jakarta	2.943.378.947	2.270.543.947
				118.931.369.006

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM

Program Implementation Documentation

No	Program	Dokumentasi Documentation
1	Program Pengelolaan Sampah Waste Management Program	
2	Program Rehabilitasi Pesisir dan Laut Coastal And Marine Rehabilitation Program	
3	Program TJSL Pada Proyek Strategis CSER Program for Strategic Projects	
4	Program Penyediaan Air Bersih Clean Water Provision Program	
5	Program Penghijauan Green Program	
6	Program Tanam Mangrove (CSV) Mangrove Planting Program (CSV)	

No	Program	Dokumentasi Documentation
7	Program Penanganan Sosial Kemasyarakatan Proyek Pembangunan Terminal Kijing Tahun II Community Social Handling Program for Kijing Terminal Development Project Year II	
8	Pemantauan lingkungan Kantor Pusat Head Office environmental monitoring	
9	Pemantauan lingkungan PMLI Ciawi PMLI Ciawi environmental monitoring	
10	Program Pelatihan dan Sertifikasi Pendidikan/ Keahlian Education/ Skills Training and Certification Program	
11	Program Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas Capacity Building Program for People with Disabilities	

No	Program	Dokumentasi Documentation
12	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Education Quality Improvement Program	
13	Program Beasiswa Pelindo Pelindo Scholarship Program	
14	Dukungan Pembangunan Nasional untuk Pendidikan National Development Support for Education	
15	Program Pelatihan K3 Komunitas Pelabuhan (CSV) Port Community OHS Training Program (CSV)	
16	Program Mahasiswa Magang Student Internship Program	
17	Program Pelatihan dan Sertifikasi UMK MSE Training and Certification Program	

No	Program	Dokumentasi Documentation
18	Program Keikutsertaan Pameran UMK MSE Exhibition Participation Program	
19	Program Bantuan Peningkatan Kapasitas UMK MSE Capacity Building Assistance Program	
20	Program Pelindo Berbagi Pelindo Sharing Program	
21	Pelindo Peduli COVID-19 Pelindo Cares About COVID-19	
22	Program Peningkatan Kesehatan dan Imunitas Health and Immunity Improvement Program	
23	Program Tanggap Bencana dan Mitigasi Perubahan Iklim Disaster Response and Climate Change Mitigation Program	

No	Program	Dokumentasi Documentation
24	Bantuan Sarana dan Prasarana Ibadah Places of Worship Facilities and Infrastructure Assistance	
25	Bantuan Sarana dan Prasarana Umum Public Facilities and Infrastructure Assistance	
26	Program Dukungan Pembangunan Nasional National Development Support Program	

No	Program	Dokumentasi Documentation
27	Program Bantuan Ruang Tinggal Layak Huni Livable Housing Assistance Program	
28	Penyuluhan dan Bantuan Hukum Counseling and Legal Aid	
29	Program *Wellness Competition 2021 for Pelindo Integration* Program Wellness Competition 2021 For Pelindo Integration	



PROGRAM KOLABORASI BUMN
SOE Collaboration Program

Program Kolaborasi dengan BUMN yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The Collaboration Programs with SOEs implemented in 2022 were as follows:

Tabel Program Kolaborasi BUMN
SOE Collaboration Program

No	Nama Program Program Name	TPB SDG	Anggaran (Rp) Budget (Rp)	Realisasi (Rp) Realization (Rp)	Lokasi Location
1	Kolaborasi BUMN untuk Program Labuan Bajo SOE Collaboration in the Labuan Bajo Program	4	534.111.000	15.839.000	Labuan Bajo
2	Penyelenggaraan Rakor TJSL BUMN Tahun 2022 di Lampung Holding of the 2022 SOE CSER Coordination Meeting in Lampung	16	1.449.550.900	149.955.090	Lampung
3	Program TJSL Kolaborasi BUMN untuk Prov Banten (bantuan TIK dan seragam sekolah) SOE Collaborative CSER Program for Banten Province (ICT assistance and school uniforms)	4	3.954.825.000	352.445.000	Banten
4	Mudik aman, mudik sehat Bersama BUMN Tahun 2022 Safe homecoming, healthy homecoming with SOEs in 2022	2	663.317.330	614.537.369	Yogyakarta, Semarang, Surabaya
5	Pelaksanaan kegiatan pasar rakyat BUMN dan Pameran UMK di Balige Provinsi Sumut Implementation of SOE people's market activities and MSME exhibitions in Balige, North Sumatra Province	8	1.140.000.000	78.000.000	Balige
6	Program kolaborasi TJSL BUMN untuk Vokasi Ponpes di Jawa Timur SOE CSER collaboration program for Vocational Islamic Boarding Schools in East Java	4	3.335.810.000	79.145.378	Gresik, Surabaya, Kediri
7	Pelaksanaan kegiatan Pasar Murah Rakyat BUMN dan Bazar UMK di Yogyakarta Implementation of SOE People's Cheap Market activities and MSME Bazaar in Yogyakarta	8	792.000.000	80.027.092	Yogyakarta

(dalam Rupiah) | (in Rupiah)

	Jenis Bantuan Type of Assistance	Jumlah Penerima Manfaat Number of Beneficiaries	Keterangan Dampak yang diberikan bagi penerima manfaat Impact Given to Beneficiaries
	Bantuan Pendidikan Educational Assistance	1 Sekolah Dasar, 1 Universitas, 30 UMKM, 1 Sanggar tari, dan ± 1.000 orang. 1 Elementary School, 1 University, 30 MSME, 1 Dance Studio, and ± 1,000 people.	Mendukung program pemerintah 5 destinasi pariwisata super prioritas dalam bentuk renovasi sekolah dasar, peningkatan kompetensi mahasiswa, pendampingan UMKM, pelestarian budaya tari, sarana air bersih, penyambungan listrik gratis, lapak UMK, pelatihan peternak, bantuan Pull box, penghijauan mangrove dan program kompor induksi, dan sebagainya. Supporting government programs for 5 priority tourism destinations in the form of elementary school renovation, increasing student competence, MSME assistance, preservation of dance culture, clean water facilities, free electricity connection, MSE stalls, breeder training, Pull box assistance, reforestation of mangroves and induction cooker program, etc.
	Sosialisasi Program dan Kebijakan TJSL Kementerian BUMN Dissemination of Ministry of SOEs CSER Programs and Policies	353 orang 353 people	Pembentukan forum TJSL BUMN sebagai wadah pelaksanaan program TJSL BUMN yang terkoordinir dan perumusan komitmen program TJSL tahun 2022 Formation of the SOE CSER forum as a forum for the implementation of coordinated SOE CSER programs and the formulation of commitments to the 2022 CSER program
	Bantuan TIK Berupa Komputer, infocus dan screen proyektor ICT assistance in the form of computers, infocus and screen projectors	10 lembaga dibawah serikat guru Tangerang dan 2.000 siswa 10 institutions under the Tangerang teachers' union and 2,000 students	Mendapatkan kemudahan akses dalam proses belajar dan mengajar di lembaga Pendidikan Gaining easy access to the learning and teaching process in educational institutions
	Bantuan penyediaan armada bus untuk pemudik Assistance by providing buses for travelers	2.000 Pemudik 2,000 travelers	Membantu masyarakat untuk memperoleh akses mobilisasi mudik ke kampung halaman Helping the community to access mobilization for going home to their hometown
	Bantuan penyediaan sembako murah Assistance by providing cheap groceries	12.000 orang 12,000 people	Masyarakat mendapatkan kemudahan dalam penyediaan kebutuhan pokok berupa berupa sembako dengan setengah harga pasar The community receives basic needs in the form of groceries at half the market price
	Bantuan Pendidikan Vokasi Pondok Pesantren Islamic Boarding School Vocational Education Assistance	78 Guru, 390 santri, 4.550 siswa 78 teachers, 390 students, 4,550 students	Pelatihan yang diberikan kepada tenaga pendidik dapat diterapkan keahliannya dalam mengajar pelajaran vokasi kepada anak didiknya The training provided to educators so they can apply their expertise in teaching vocational lessons to their students
	Bantuan penyediaan sembako murah Assistance by providing cheap groceries	8.000 Orang 8,000 People	Masyarakat mendapatkan kemudahan dalam penyediaan kebutuhan pokok berupa sembako dengan setengah harga pasar The community receives basic needs in the form of groceries at half the market price

No	Nama Program Program Name	TPB SDG	Anggaran (Rp) Budget (Rp)	Realisasi (Rp) Realization (Rp)	Lokasi Location
8	• Penyelenggaraan Rakor TJSL BUMN Tahun 2022 di Batu 2022 SOE CSER Coordination Meeting in Batu	16	742.795.350	74.279.535	Batu
	• Program kolaborasi TJSL BUMN Jatiluhur Jatiluhur SOE CSER collaboration program		2.050.000.000	50.000.000	Jawa Barat
9	• Program Rehabilitasi penanaman Mangrove Nasional Kerja sama 3 Kementerian National Mangrove Planting Rehabilitation Program in Collaboration with 3 Ministries	14	3.800.000.000	4.298.727.438	Diseluruh wilayah Indonesia sesuai *One Map Mangrove* KLHK
	• Program Kolaborasi TJSL BUMN Sertifikasi Halal Untuk RPH dan Dapur Umum Pondok Pesantren Halal Certification SOE CSER Collaboration Program for RPH and Islamic Boarding School Public Kitchens		4.284.000.000	50.000.000	Banten, Jawa Barat
10	• Program Kolaborasi pengelolaan sampah di Toba Waste Management Collaborative Program in Toba	12	438.142.000	43.800.000	Pulau Samosir
	• Program Pendidikan Perguruan Tinggi Bagi Putra Putri TNI Polri Higher Education Program for Sons and Daughters of TNI Polri		6.250.000.000	280.000.000	Jawa Timur, Kepulauan Riau
11	Program Kolaborasi pengelolaan sampah di Likupang Waste Management Collaborative Program in Likupang	12	1.016.924.000	50.000.000	Likupang
12	Program Kolaborasi pengelolaan sampah di Bajo Waste Management Collaborative Program in Bajo	12	418.200.000	150.000.000	Bajo
13	Kuliah Umum tokoh nasional di Unsoed Public Lecture by national figures at Unsoed	4	1.262.727.675	857.202.850	Purwokerto

(dalam Rupiah) | (in Rupiah)

	Jenis Bantuan Type of Assistance	**Jumlah Penerima Manfaat** Number of Beneficiaries	**Keterangan Dampak yang diberikan bagi penerima manfaat** Impact Given to Beneficiaries
	Diskusi Program TJSL BUMN: pembahasan progress vokasi Ponpes Jatim, Pengurangan kemiskinan ekstrim dan *progress* komite TJSL tahun 2022 SOE CSER Program Discussion: discussion of East Java Islamic Boarding School vocational progress, extreme poverty reduction and CSER committee progress in 2022	100 Orang	Menyusun perencanaan untuk pencapaian program kolaborasi vokasi Ponpes Jatim, Komitmen bersama TJSL BUMN tahun 2022 agar terlaksana sesuai target. Diskusi rencana pelaksanaan program pengurangan kemiskinan eksterm dalam konteks kolaborasi. Develop a plan for the achievement of the East Java Islamic Boarding School vocational collaboration program, a joint commitment to TJSL BUMN in 2022 so that it is carried out according to the target. Discussion on the implementation plan for the extreme poverty reduction program in the context of collaboration.
	Bantuan penanaman dan Comdev Mangrove Planting Comdev Mangrove assistance	171,5 Ha 171.5 Ha	Membantu Pemerintah menyukseskan Program Rehabilitasi 600.000 Ha Kawasan Mangrove Nasional Periode 2021 – 2024. Assisting the Government to achieve the 600,000 Ha Rehabilitation Program for National Mangrove Areas for the 2021 – 2024 period.
	Penyediaan 35 tong sampah terpilah, bantuan alat kerja kegiatan daur ulang sampah dan sosialisasi pemilahan sampah kepada masyarakat di sekitar danau Toba Providing 35 segregated trash bins, assistance with work tools for waste recycling activities and socialization on waste sorting to the communities around Lake Toba	173 Orang 173 People	Pembentukan sistem pengelolaan sampah secara digital dan untuk menciptakan ketahanan pangan dimasyarakat Formation of a digital waste management system, and to create food security in the community
	Pembangunan rumah Bhakti BUMN, hibah motor pengangkut sampah untuk TPS 3R, penyediaan tempat sampah pilah 50 unit, pembangunan sport swafoto, renovasi bangunan PAUD dan hibah mobil pintar, kampanye gerakan bersih pantai Construction of the SOE Bhakti house, donation of motorbikes for garbage collection for TPS 3R, provision of 50 sorting bins, construction of selfie sports, renovation of PAUD buildings and grants of smart cars, campaign for clean beaches	220 Orang 220 People	Menguatkan TPS 3R *eksisting*, dan mengintegrasikan pengelolaan sampah untuk menciptakan ekonomi sirkuler Strengthening the existing TPS 3R, and integrating waste management to create a circular economy
	Motor 3 roda sebanyak 3 unit, biodigester 1 unit, pembangunan Gedung bank sampah, penanaman pohon disekitar lokasi bank sampah 3 units of 3 wheel motorbikes, 1 biodigester, construction of a garbage bank building, tree planting around the waste bank location	95 orang 95 People	Pembentukan bank sampah terpadu dan penciptaan ekonomi sirkuler melalui pengelolaan sampah organik Formation of an integrated waste bank and creation of a circular economy through organic waste management
	Bantuan penyelenggaraan kuliah umum yang dihadiri oleh Menteri BUMN Assistance by holding public lectures attended by the Minister of SOEs	4.000 mahasiswa *offline* dan 1.000 Mahasiswa *online* 4,000 offline students and 1,000 online students	Memberikan wawasan bagi generasi muda sebagai calon pemimpin yang memiliki pengetahuan luas dengan pemahaman digital di era disrupsi Providing insight for the younger generation as future leaders with extensive knowledge and digital understanding in the era of disruption

No	Nama Program Program Name	TPB SDG	Anggaran (Rp) Budget (Rp)	Realisasi (Rp) Realization (Rp)	Lokasi Location
14	Bakti BUMN untuk bunaken SOE Service in Bunaken	16	1.140.000.000	741.000.000	Bunaken
15	Pelaksanaan kegiatan Pasar Murah Rakyat BUMN dan Bazar UMK di Solok Implementation of SOE People's Cheap Market activities and MSE Bazaar in Solok	8	917.243.513	685.228.863	Solok
16	Program Belawan PENTING (Peduli Stunting) Belawan PENTING Program (Care for Stunting)		912.193.020	701.977.320	Medan Belawan
17	Kampung Nelayan Maju kerja sama dengan KKP Maju Fishermen's Village in collaboration with KKP	12	1.638.839.000	258.872.657	Jayapura
18	Gerakan Menanam Satu Juta Pohon di Ciwidey, Bandung Movement to Plant One Million Trees in Ciwidey, Bandung		961.903.000	74.754.000	Ciwidey
19	Bhakti BUMN sertifikasi Guru Bhakti SOE Teacher Certification	4	1.011.000.000	30.000.000	Jawa Barat, Lampung, Maluku, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan NTT
20	Program Kolaborasi pengelolaan sampah untuk Jatiluhur Collaborative waste management program for Jatiluhur	12	960.000.000	65.000.000	Jatiluhur
21	Bhakti BUMN bantuan pendidikan untuk putra – putri TNI Polri Bhakti SOE educational assistance for the sons and daughters of the Indonesian National Armed Forces and Police	4	13.000.000.000	280.000.000	Kepuluan Riau dan Jawa Timur
22	Program kerja sama Penyaluran PUMK dengan BRI PUMK distribution cooperation program with BRI	8	79.782.062.832	79.782.062.832	Seluruh wilayah Kerja Pelindo

(dalam Rupiah) | (in Rupiah)

Jenis Bantuan Type of Assistance	Jumlah Penerima Manfaat Number of Beneficiaries	Keterangan Dampak yang diberikan bagi penerima manfaat Impact Given to Beneficiaries
Penanaman terumbu karang,konservasi tukik, penanaman pohon, pengecetan rumah nelayan, bersih pantai dan upacara kemerdekaan di bawah laut dan pelabuhan Planting coral reefs, conserving hatchlings, planting trees, painting fishermen's houses, cleaning beaches and a sea and harbor independence ceremony	328 Orang 328 People	Menanamkan nilai, budaya dan aturan dalam masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, melestarikan habitat laut, konservasi dan rehabilitasi habitat yang mulai punah dan berkontribusi menjaga keseimbangan ekosistem Instilling values, culture and rules in society to keep the environment clean, preserve marine habitats, conserve and rehabilitate habitats that are becoming extinct and contribute to maintaining the balance of the ecosystem
Bantuan Paket Sembako dan bantuan penyelenggaraan Bazar UMKM Food Package Assistance and assistance in organizing the MSME Bazaar	4.000 ibu-ibu, 40 millenial dan 50 UMKM 4,000 mothers, 40 millennials and 50 MSMEs	Masyarakat mendapatkan kemudahan dalam penyediaan kebutuhan pokok berupa berupa sembako dengan setengah harga pasar The community receives basic needs in the form of groceries at half the market price
Pemberian 126 Paket makanan Distribution of 126 food packages	96 anak dan 30 Baduta 96 children and 30 children under 2 years old	Membantu program pemerintah untuk pengentasan stunting nasional dengan menjadi bapak asuh anak stunting Helping government programs to eradicate national stunting by becoming a foster parent for stunted children
Pembangunan Shelter dan bak sampah di Pulau Kosong dan Pembangunan Gapura dan bak sampah di Kayo pulau Construction of shelters and trash bins on Pulau Kosong and construction of gates and trash bins on Kayo Island	624 orang 624 people	Mendukung Program Pemerintah pembangunan kampung Nelayan Maju. Supporting the Government's Program for the Development of Advanced Fishermen's Villages.
Bantuan bibit kopi Coffee seed assistance	Kelompok tani Dusun I Cibolang Dusun I Cibolang farmer group	Mendukung modeling industri kopi berbasis korporasi petani Supporting coffee industry modeling based on farmer corporations
Pelatihan dan sertifikasi Pendidikan Education training and certification	2022 Guru 2,022 Teachers	Membantu guru mendapatkan sertifikasi gratis Helping teachers get free certification
Edukasi dan pelatihan pengelolaan eceng gondok, membuat shelter pengeloaal eceng gondok dan pendampingan kelompok tani Education and training on water hyacinth management, building water hyacinth management shelters and assisting farming groups	50 Orang 50 People	Mengendalikan hama eceng gondok di waduk jatiluhur dan menciptakan pemanfaatan eceng gondok menjadi pupuk biogas serta kerajinan tangan sebagai tambahan ekonomi bagi masyarakat Controlling water hyacinth pests in the Jatiluhur reservoir and creating water hyacinth as biogas fertilizer, and handicrafts as an economic addition to the community
Beasiswa Tabungan Pendidikan Education Savings Scholarship	53 Orang 53 People	Mendukung Program dukungan Pendidikan perguruan tinggi bagi putra – putri TNI dan Polri Supporting the Higher Education support program for the sons and daughters of the Indonesian National Armed Forces and Police
Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil Micro and Small Business Funding	138 Kecamatan di Indonesia 138 Districts in Indonesia	Membantu permodalan usaha mikro dan kecil di 138 kecamatan di Indonesia Helping micro and small business capital in 138 sub-districts in Indonesia

No	Nama Program Program Name	TPB SDG	Anggaran (Rp) Budget (Rp)	Realisasi (Rp) Realization (Rp)	Lokasi Location
23	Program pengelolaan sampah di Pulau Doom Waste management program on Pulau Doom	12	1.566.200.000	1.566.200.000	Pulau Doom, Sorong
24	Program inkubasi usaha Pandu Gedor ekspor dengan PT Sarinah Pandu Gedor export business incubation program with PT Sarinah	8	1.000.0000.000	700.000.000	Jakarta, Benoa

Total jumlah Program kolaborasi adalah 24 Program, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Prioritas Bidang Lingkungan: terdapat 9 program.
2. Program Prioritas Bidang Pendidikan: terdapat 6 program.
3. Program Prioritas Bidang Pengembangan UMK: terdapat 5 program.
4. Program Non-Prioritas lingkungan: terdapat 4 program.

The total number of collaboration programs covered 24 programs, with details as follows:

1. Priority Programs in the Environmental Sector: 9 programs.
2. Priority Programs in the Education Sector: 6 programs.
3. MSE Development Priority Program: 5 programs.
4. Environmental Non-Priority Programs: 4 programs.

(dalam Rupiah) | (in Rupiah)

	Jenis Bantuan Type of Assistance	Jumlah Penerima Manfaat Number of Beneficiaries	Keterangan Dampak yang diberikan bagi penerima manfaat Impact Given to Beneficiaries
	Membentuk fasilitas pemprosesan sampah organik, membentuk 20 bank sampah unit, melatih dan memberdayakan 1.000 orang. Establishing organic waste processing facilities, 20 unit waste banks, training and empowering 1,000 people.	1.000 Orang 1,000 People	Terbentuknya Lembaga pemberdayaan sampah terintegrasi yang dapat menyelesaikan 600 ton sampah/tahun Establishing an integrated waste empowerment institution that can complete 600 tons of waste per year
	Pemberian pelatihan dan pengembangan UMK dan memberi kesampatan untuk bertemu investor baru Providing MSE training and development and providing opportunities to meet new investors	100 UMK 100 MSEs	Meningkatkan jumlah UMK Pelindo naik kelas Increasing the number of Pelindo MSE to reach the next grade

PENCAPAIAN TJSL TAHUN 2022
CSER Achievements in 2022

AWARDING



Indonesia TJSL Awards 2022 in Port Services Sector Industry

Penyelenggara:
Organizer
The Iconomics

AWARDING

Winner of TrenAsia ESG Excellence 2022 for Transportation Infrastructure Category for Action

Penyelenggara:
Organizer
TrenAsia



Indonesia Best TJSL Awards 2022

Penyelenggara:
Organizer
Warta Ekonomi



TJSL PEMENUHAN PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-06/MBU/09/2022

TJSL Fulfillment of Soe Minister Regulation Number PER-06/MBU/09/2022

Perseroan telah merancang strategi keberlanjutan yang komprehensif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, melalui penerapan program TJSL yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perseroan. Perseroan senantiasa menyusun dan mengimplementasikan program-program TJSL yang mampu membawa manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Penyusunan rencana kerja dan anggaran program TJSL Perseroan berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2022 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

The Company has designed a comprehensive sustainability strategy to support the achievement of sustainable development goals, through the implementation of a more integrated, targeted, measurable and accountable TJSL program and is part of the Company's business approach. The Company always compiles and implements CSR programs that are able to bring optimal benefits to all stakeholders. The preparation of the work plan and budget for the Company's TJSL program is guided by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-6/ MBU/09/2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/04/2022 Concerning Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises.

TJSL PEMENUHAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 16 /SEOJK.04/2021

TJSL Fulfillment of Financial Services Authority Circular Number 16/ SEOJK.04/2021

Selain menyusun Laporan TJSL sesuai dengan Standar Kementerian BUMN dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2022 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagai bentuk pemenuhan kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, Perseroan juga telah menyusun Laporan Keberlanjutan Perseroan Tahun 2022 yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan ini. Laporan Keberlanjutan ini merupakan laporan berkala yang mengungkapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yang disusun dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/ SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta Pedoman Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI).

In addition to compiling the TJSL Report in accordance with the Standards of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-6/ MBU/09/2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/04/2022 Concerning Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises, as a form of fulfilling the Company's compliance with the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions , Issuers and Public Companies, the Company has also prepared the Company's 2022 Sustainability Report which is presented separately from this Annual Report. This Sustainability Report is a periodic report that discloses the Company's Social and Environmental Responsibility which was prepared with reference to the Financial Services Authority Circular Letter Number 16/SEOJK.04/2021 Concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies and Sustainability Reporting Guidelines (GRI Standards).

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility Related to The Environment

KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Kerusakan lingkungan merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini. Untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif kerusakan lingkungan, Indonesia sudah memiliki berbagai perangkat dan regulasi terkait lingkungan. Terdapat beberapa hal yang hendak dicapai regulasi tersebut di antaranya menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Becermin pada dampak negatif kerusakan lingkungan, maka seruan untuk turut mewujudkan kelestarian lingkungan, termasuk di dalamnya memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi, mengemuka. Tak hanya bagi pemerintah dan masyarakat, kelestarian lingkungan juga menjadi tanggung jawab pelaku dunia usaha sebagai pemegang perizinan berusaha, baik perseorangan maupun badan usaha, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kontribusi pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan semakin penting jika operasional usahanya berdampak langsung bagi lingkungan. Untuk mendapatkan hasil terbaik, korporasi perlu bersinergi dengan pemangku kepentingan yang lain, terutama pemerintah dan masyarakat, guna mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan lestari. Sebagai bagian dari emiten di Tanah Air, Pelindo berkomitmen untuk turut serta menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan untuk menopang terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Keuangan Berkelanjutan bagi emiten adalah kegiatan operasi perusahaan yang dijalankan dengan memperhatikan keselarasan antara aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.

Komitmen dan dukungan Pelindo untuk mewujudkan kelestarian lingkungan merujuk pada berbagai regulasi di bidang lingkungan antara lain, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta turunannya; Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2007 tentang Energi; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air; dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES IN THE ENVIRONMENTAL SECTOR

Environmental damage is one of the major problems facing Indonesia today. To prevent or reduce the negative impact of environmental damage, Indonesia already has various tools and regulations related to the environment. There are several things that the regulation wants to achieve, including ensuring the survival of living things and ecosystem sustainability, preserving environmental functions, and anticipating global environmental issues.

Reflecting on the negative impact of environmental damage, the call to participate in realizing environmental sustainability, including repairing the damage that has occurred, surfaced. Not only for the government and society, environmental sustainability is also the responsibility of business actors as holders of business licenses, both individuals and business entities, as stipulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 22 of 2021 concerning Implementation of Environmental Protection and Management.

The contribution of business actors to environmental sustainability is even more important if their business operations have a direct impact on the environment. To get the best results, corporations need to synergize with other stakeholders, especially the government and society, in order to create a better and more sustainable environment. As part of issuers in the country, Pelindo is committed to participating in preserving the environment, while increasing the carrying capacity of the environment to support the realization of sustainable development. Sustainable Finance for issuers is a company›s operational activities carried out by considering harmony between economic, environmental and social aspects.

Pelindo›s commitment and support for realizing environmental sustainability refers to various regulations in the environmental sector, including Law No. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment and its derivatives; Law of the Republic of Indonesia No. 30 of 2007 concerning Energy; Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 101 of 2014 concerning Hazardous and Toxic Waste Management; Republic of Indonesia Government Regulation No. 27 of 2012 concerning Environmental Permits; Government Regulation No. 20 of 1990 concerning Control of Water Pollution; Decree of the State Minister for the Environment Number 111 of 2003 concerning Guidelines Concerning Licensing Requirements and Procedures as well as Guidelines for the Study of Discharge of Wastewater into Water or Water Sources; and Regulation of the

Hidup No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air. Berdasarkan komitmen tersebut, Pelindo telah melaksanakan beberapa aktivitas terkait pelestarian lingkungan dan pengelolaan lingkungan.

PENGELOLAAN BAHAN BAKU/MATERIAL

Kegiatan operasional Pelindo membutuhkan kertas untuk kegiatan administrasi perkantoran, juga kertas tisu untuk kamar kecil. Oleh karena bahan dasar pembuatan kertas adalah bubur kayu, maka Perseroan berkomitmen untuk menghemat penggunaan kertas sehingga turut andil dalam mengurangi penebangan pohon sebagai bahan baku kertas. Komitmen itu diwujudkan dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini, seperti WhatsApp, email, dan sebagainya sebagai sarana komunikasi dan korespondensi. Penggunaan kertas masih dimungkinkan untuk sejumlah keperluan khusus, seperti pembuatan dokumen kontrak dan sejenisnya. Per 31 Desember 2022, penggunaan kertas tercatat sebanyak 7.788 rim, naik dibanding tahun 2021 yang mencapai 1.641 rim. Walau kertas termasuk bahan baku terbarukan dan bisa didaur ulang, namun Perseroan tidak menggunakan hasil daur ulang dari limbah kertas tersebut.

PENGELOLAAN ENERGI

Pelindo menggunakan dua sumber energi utama untuk menjalankan operasional usaha, yaitu listrik dan bahan bakar minyak (BBM), yang keduanya dipasok atau diperoleh dari pihak ketiga. Kedua jenis energi dipakai dalam operasional pelabuhan, seperti pada alat bongkar muat maupun kegiatan administrasi perkantoran. Sebagian besar energi listrik Pelindo dipasok oleh PT Perusahaan Listrik Negara, dan sebagian di antaranya dipasok oleh PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI) --Anak Perusahaan yang dibentuk Perseroan bekerja sama dengan PT Haleyora Power yang merupakan Anak Perusahaan PT PLN. Oleh karena ketersediaan listrik dan BBM yang kian terbatas karena termasuk dalam sumber energi tak terbarukan berbahan baku fosil –termasuk pembangkit listrik yang didominasi batu bara, maka Perseroan berkomitmen untuk menggunakan listrik dan BBM secara efisien.

Kebijakan efisiensi energi listrik dan BBM yang diambil Pelindo pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan konservasi energi BBM dengan melakukan elektrifikasi.
2. Pemanfaatan EBT Pembangkit Tenaga Surya untuk PJU
3. Penggunaan BBM bio diesel B30 pada peralatan B/M

PENGELOLAAN AIR

Pelindo menyadari bahwa akses terhadap air bersih sangat penting bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia, dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu hak asasi manusia. Perseroan berupaya untuk mengelola penggunaan air semaksimal mungkin agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi.

State Minister for the Environment No. 01 of 2010 concerning the Management of Water Pollution. Based on this commitment, Pelindo has carried out several activities related to environmental preservation and environmental management.

RAW MATERIAL MANAGEMENT

Pelindo›s operational activities require paper for office administration activities, as well as tissue paper for restrooms. Because the basic material for making paper is wood pulp, the Company is committed to reducing the use of paper so that it contributes to reducing the cutting of trees as a raw material for paper. This commitment is realized by utilizing the latest information technology, such as WhatsApp, email, and so on as a means of communication and correspondence. The use of paper is still possible for a number of special purposes, such as making contract documents and the like. As of December 31, 2022, there were 7,788 reams of paper used, an increase compared to 2021 which reached 1,641 reams. Even though paper is a renewable raw material and can be recycled, the Company does not use recycled paper waste.

ENERGY MANAGEMENT

Pelindo uses two main energy sources to run its business operations, namely electricity and fuel oil (BBM), both of which are supplied or obtained from third parties. Both types of energy are used in port operations, such as loading and unloading equipment and office administration activities. Most of Pelindo›s electrical energy is supplied by PT Perusahaan Listrik Negara, and some of it is supplied by PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI) -- a subsidiary company formed by the company in collaboration with PT Haleyora Power, which is a subsidiary of PT PLN. Due to the increasingly limited availability of electricity and fuel because they are included in non-renewable energy sources made from fossil fuels – including power plants which are dominated by coal, the Company is committed to using electricity and fuel efficiently.

The electricity and fuel efficiency policies adopted by Pelindo in 2022 are as follows:

1. Conserving fuel energy by electrification.
2. Utilization of EBT Solar Power Plants for PJU
3. Use of B30 bio-diesel fuel in B/M equipment

WATER MANAGEMENT

Pelindo realizes that access to clean water is very important for human life and welfare, and is recognized by the United Nations (UN) as one of human rights. The company strives to manage water use as much as possible so as not to have a negative impact on the environment and the communities around which the company operates.

Bagi Perusahaan, air bersih merupakan salah satu kebutuhan penting. Selain untuk kepentingan domestik perkantoran, seperti untuk minum, mandi, cuci, dan sebagainya. Adapun sumber air yang digunakan Perseroan antara lain dipasok dengan memanfaatkan fasilitas pengelolaan air bersih dengan teknologi *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO). Sistem ini menggunakan air laut yang dimurnikan dan disuling untuk kebutuhan non-konsumsi seperti kebutuhan sanitasi dan kebutuhan penunjang operasional lainnya termasuk kebutuhan air untuk kapal. Dengan pemanfaatan air laut sebagai air baku, Perseroan mengurangi ketergantungan penggunaan air tanah ataupun air bersih dari sumber lainnya sehingga turut melestarikan air tanah dan air permukaan.

For the Company, clean water is an important need. In addition to domestic office needs, such as for drinking, bathing, washing, and so on. The water sources used by the Company, among others, are supplied by utilizing clean water management facilities with Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) technology. This system uses purified and distilled sea water for non-consumption needs such as sanitation needs and other operational support needs including water needs for ships. By utilizing seawater as raw water, the Company reduces dependence on the use of groundwater or clean water from other sources, thereby conserving groundwater and surface water.

Sejalan dengan prinsip efisiensi, Pelindo mengeluarkan himbauan tentang perlunya menggunakan air secara bijaksana. Sebab, pengolahan air dengan teknologi SWRO membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga prinsip penghematan air tetap relevan untuk dilakukan. Di sisi lain, sumber air bersih yang lain, seperti air tanah semakin terbatas karena pengambilan yang semakin masif untuk berbagai keperluan seperti industrialisasi, pemukiman dan sebagainya. Adapun air baku yang diolah PDAM semakin terbatas karena semakin banyak yang terkena polusi Selain menerbitkan himbauan, penghematan air juga dilakukan dengan melakukan pengecekan secara berkala instalasi air sehingga bisa dilakukan perbaikan apabila terjadi kebocoran.

In line with the principle of efficiency, Pelindo issued an appeal regarding the need to use water wisely. This is because water treatment using SWRO technology requires quite a large amount of money so that the principle of saving water remains relevant. On the other hand, other sources of clean water, such as groundwater, are increasingly limited due to increasingly massive extraction for various purposes such as industrialization, settlements and so on. The raw water that is processed by the PDAM is increasingly limited because more and more are exposed to pollution. In addition to issuing an appeal, saving water is also carried out by periodically checking the water installation so that repairs can be made if a leak occurs.

PENGELOLAAN EMISI

Emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan salah satu isu utama warga dunia. Hal itu terjadi karena emisi merupakan salah satu pemicu terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim yang berdampak negatif bagi kehidupan di bumi. Pelindo sebagai bagian dari BUMN berkomitmen untuk berkontribusi dengan penurunan emisi gas rumah kaca dengan melakukan pengelolaan emisi dengan baik. Apalagi dalam menjalankan operasional usaha, Perseroan menghasilkan emisi dari penggunaan listrik, BBM, dan perjalanan dinas dengan pesawat terbang.

Sepanjang tahun 2022, Pelindo menghasilkan emisi GRK langsung dari penggunaan BBM sebesar 108.260.100 kg CO2eq, turun dibandingkan tahun 2021, yang mencapai 111.075.900 kg CO2eq. Sedangkan emisi gas rumah kaca tidak langsung dari penggunaan listrik dihitung dengan mengalikan konsumsi listrik (dalam Kwh per tahun) dengan *average grid emission factor* yang dikeluarkan Kementerian ESDM merujuk RUPTL PLN 2015-2024 yaitu sebesar 0,934 kgCO2/Kwh (2017). Emisi gas rumah kaca tidak langsung dari penggunaan energi listrik yang disumbang Pelindo selama tahun 2022 adalah sebesar 1.199.366.909 kgCO2eq, naik dibandingkan tahun 2021, yang mencapai 504.298.306 kgCO2eq. Adapun emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya dihitung dengan kalkulator emisi karbon yang dikeluarkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil International (International Civil Aviation Organization/ICAO). Emisi dihitung berdasarkan kelas kabin (ekonomi dan premium/bisnis) dan jarak perjalanan antara bandara keberangkatan dan tujuan.

EMISSION MANAGEMENT

Greenhouse gas (GHG) emissions are one of the main issues of the world›s citizens. This happens because emissions are one of the triggers for global warming and climate change which have a negative impact on life on earth. Pelindo as part of BUMN is committed to contributing to reducing greenhouse gas emissions by managing emissions properly. Moreover, in carrying out business operations, the Company generates emissions from the use of electricity, fuel, and official travel by airplane.

Throughout 2022, Pelindo produced direct GHG emissions from fuel use of 108,260,100 kg CO2eq, a decrease compared to 2021, which reached 111,075,900 kg CO2eq. Meanwhile, indirect greenhouse gas emissions from electricity use are calculated by multiplying electricity consumption (in Kwh per year) with the average grid emission factor issued by the Ministry of Energy and Mineral Resources referring to the 2015-2024 PLN RUPTL, which is 0.934 kgCO2/Kwh (2017). Indirect greenhouse gas emissions from the use of electrical energy contributed by Pelindo during 2022 amounted to 1,199,366,909 kgCO2eq, an increase compared to 2021, which reached 504,298,306 kgCO2eq. Other indirect greenhouse gas emissions are calculated using a carbon emission calculator issued by the International Civil Aviation Organization (ICAO). Emissions are calculated based on cabin class (economy and premium/business) and travel distance between departure and destination airports.

Selain melakukan pengukuran kualitas udara, Perseroan juga melakukan berbagai kebijakan dan kegiatan yang mendukung terciptanya udara bersih, antara lain:

1. Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau.
2. Melakukan penanaman pohon di area kegiatan usaha.
3. Menyimpan genset sebagai energi cadangan di tempat yang khusus.
4. Penyediaan tempat parkir untuk para karyawan dan tamu.
5. Menyediakan ruangan khusus untuk merokok, seperti ruang tambahan khusus untuk merokok di luar gedung dan taman di sekitar gedung.
6. Mewajibkan kendaraan yang masuk Terminal telah diwajibkan lolos emisi gas buang.
7. Mewajibkan kendaraan yang masuk Terminal telah diwajibkan memiliki sertifikat layak jalan/KIR.
8. Melakukan uji petik terhadap emisi yang dihasilkan kendaraan yang masuk ke Terminal.
9. Pada pelabuhan dengan penumpukan muatan curah kering, Perseroan memasang pagar keliling, sprinkler, penyapuan areal terminal dan prosedur pencucian truk barang curah yang meninggalkan kawasan pelabuhan.

In addition to measuring air quality, the Company also carries out various policies and activities that support the creation of clean air, including:

1. Maintaining Green Open Spaces.
2. Planting trees in the area of business activity.
3. Keep the generator as a backup energy in a special place.
4. Provision of parking spaces for employees and guests.
5. Provide a special room for smoking, such as a special additional room for smoking outside the building and the garden around the building.
6. Requires vehicles entering the Terminal to pass exhaust emissions.
7. Requires vehicles entering the Terminal to have a roadworthy certificate/KIR.
8. Conducting sampling tests on emissions produced by vehicles entering the Terminal.
9. At ports where dry bulk loads are piled up, the Company installs perimeter fences, sprinklers, sweeps the terminal area and procedures for washing bulk goods trucks leaving the port area.

PENGELOLAAN LIMBAH

Pengoperasian jasa kepelabuhan oleh Pelindo menghasilkan limbah padat, limbah cair, dan limbah yang masuk kategori B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Pelindo senantiasa memastikan bahwa pengelolaan limbah diproses sesuai dengan baku mutu masing-masing jenis limbah serta peraturan yang ditetapkan Pemerintah.

Limbah Padat/Sampah

Limbah padat atau sampah yang berasal dari kegiatan operasional Pelindo, baik dari area gedung perkantoran maupun area operasi terminal, dikelola dengan penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Pengkategorian limbah padat dibagi berdasarkan sifat dan jenis masing-masing limbah, yaitu limbah organik, limbah non-organik, dan limbah kertas. Limbah yang berupa sampah organik akan diproses menjadi kompos, sementara sampah non-organik dan sampah kertas akan didaur ulang dan dikirim ke *landfill* melalui pengangkutan sampah secara rutin dari wadah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan diproses ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan menunjuk pihak ketiga sebagai pengelola.

Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Sebagai entitas yang menghasilkan limbah kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari kegiatan perkantoran dan operasionalnya, maka Pelindo berkomitmen menerapkan pengelolaan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Adapun limbah B3 yang dihasilkan Perseroan antara lain seperti toner, cartridge, kain majun, oli bekas genset, bangkai lampu, dan sebagainya.

WASTE MANAGEMENT

The operation of port services by Pelindo produces solid waste, liquid waste, and waste that is categorized as B3 (Hazardous and Toxic Materials). Pelindo always ensures that waste management is processed in accordance with the quality standards for each type of waste and the regulations set by the Government.

Solid Waste/Garbage

Solid waste or garbage originating from Pelindo›s operational activities, both from the office building area and the terminal operating area, is managed by implementing 3R (Reduce, Reuse, Recycle). The categorization of solid waste is divided based on the nature and type of each waste, namely organic waste, non-organic waste, and paper waste. Waste in the form of organic waste will be processed into compost, while non-organic waste and paper waste will be recycled and sent to landfills through routine waste transportation from the container to the Temporary Disposal Site (TPS) and processed to the Final Processing Site (TPA) by appointing a third party as manager.

B3 Waste (Hazardous and Toxic Materials)

As an entity that generates waste in the category of Hazardous and Toxic Materials (B3) from its office and operational activities, Pelindo is committed to implementing responsible management and in accordance with Republic of Indonesia Government Regulation No. 101 of 2014 concerning Hazardous and Toxic Waste Management. The B3 waste produced by the Company includes toner, cartridges, rags, used generator oil, lamp carcasses, and so on.

Pengelolaan Limbah Kapal

Dalam mendukung pengelolaan limbah B3 secara lebih komprehensif di lingkungan operasi Perseroan, Pelindo telah menerapkan dan mengembangkan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Kapal di *Reception Facilities* (RF). Sejak tahun 2020, Perseroan mengembangkan inisiatif ini melalui Program Manajemen Limbah Kapal Terpadu di Pelabuhan Tanjung Priok yang bertujuan untuk mengurangi dampak pencemaran dari limbah yang berasal dari kapal sampai ke level yang aman bagi manusia dan lingkungan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Ship Waste Management

In supporting a more comprehensive management of B3 waste in the Company›s operating environment, Pelindo has implemented and developed a B3 Waste Treatment Facility from Ships in the Reception Facilities (RF). Since 2020, the Company has developed this initiative through the Integrated Ship Waste Management Program at Tanjung Priok Port which aims to reduce the impact of pollution from waste originating from ships to a level that is safe for humans and the environment in accordance with applicable rules and regulations.

Pengelolaan Limbah Cair

Pemantauan dan pengelolaan limbah cair dilakukan untuk mencegah pelepasan air limbah yang membahayakan badan air dan ekosistem di sekitarnya. Pelepasan limbah cair yang dihasilkan berasal dari kegiatan toilet, *pantry*, dan kegiatan operasional di terminal. Untuk mendukung pengelolaan limbah cair tersebut, Perseroan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga kualitas air limbah yang dibuang ke badan air memenuhi baku mutu yang ditetapkan pemerintah.

Instalasi pengelolaan limbah cair yang dikelola Perseroan dipantau dan dievaluasi secara berkala, baik dari segi kualitas maupun volume. Pemantauan dan penilaian kualitas pelepasan air sebelum dilepas ke badan air dilakukan dengan menunjuk laboratorium dengan menggunakan metode SNI terkait pengambilan sampel air limbah dan uji analisa air limbah sesuai baku mutu. Air limbah yang dilepas ke badan air tidak digunakan kembali oleh organisasi lain.

Liquid Waste Management

Liquid waste monitoring and management is carried out to prevent the release of waste water which endangers water bodies and the surrounding ecosystem. The resulting release of liquid waste comes from toilet, pantry and operational activities at the terminal. To support the management of the liquid waste, the Company has a Wastewater Treatment Plant (IPAL) so that the quality of the wastewater discharged into water bodies meets the quality standards set by the government.

The liquid waste management installation managed by the Company is regularly monitored and evaluated, both in terms of quality and volume. Monitoring and evaluating the quality of water released before it is released into water bodies is carried out by appointing a laboratory using the SNI method regarding wastewater sampling and wastewater analysis tests according to quality standards. Wastewater released into water bodies is not reused by other organizations.

KEANEKARAGAMAN HAYATI

Upaya melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati merupakan salah satu perhatian Pelindo. Keanekaragaman hayati adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, maupun ekosistem, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Terjaganya keanekaragaman hayati akan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Misalnya, bisa menjadi sumber pangan, sumber plasma nutfah, sumber pendapatan dan sebagainya.

Sesuai dengan komitmen melindungi keanekaragaman hayati, Perseroan memastikan pada tahun pelaporan tidak ada area operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Dengan demikian, operasional Pelindo tidak berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati.

Di sisi lain, kepedulian Perseroan terhadap konservasi keanekaragaman hayati dilakukan dengan melakukan program pelestarian spesies flora dan fauna tertentu, sebagaimana disampaikan dalam kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selama tahun 2022, Pelindo melakukan penanaman pohon mangrove sebanyak 215.193 batang di area seluas 170,2 hektare.

BIODIVERSITY

Efforts to protect and preserve biodiversity are one of Pelindo›s concerns. Biodiversity is the wealth or forms of life on earth, both plants, animals, microorganisms, the genetics they contain, as well as ecosystems, as well as ecological processes that are built into the living environment. Maintaining biodiversity will provide many benefits for life. For example, it can be a source of food, a source of germplasm, a source of income and so on.

In accordance with the commitment to protect biodiversity, the Company ensures that in the reporting year there are no operational areas that are close or located in conservation areas or have high biodiversity. Thus, Pelindo›s operations will not have a negative impact on biodiversity.

On the other hand, the Company›s concern for biodiversity conservation is carried out by carrying out programs to preserve certain species of flora and fauna, as stated in the Social and Environmental Responsibility activities. During 2022, Pelindo planted 215,193 mangrove trees in an area of 170.2 hectares.

SERTIFIKASI ATAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Sampai dengan 31 Desember 2022, Pelindo telah memperoleh berbagai sertifikasi terkait pengelolaan lingkungan. Informasi sertifikasi dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

CERTIFICATION ON ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

As of December 31, 2022, Pelindo has obtained various related certifications management of the environment. Certification information can be seen in the Profile Chapter Company in this Annual Report.

BIAYA YANG DIKELUARKAN

Untuk mendukung terciptanya lingkungan yang lebih baik dan lestari, Pelindo mengalokasikan biaya lingkungan yang digunakan untuk berbagai keperluan terkait lingkungan pada tahun 2022 sebesar Rp31.756.676.567 miliar, naik dibandingkan tahun 2021, yang mencapai Rp10.093.277.060.

COST INCURRED

To support the creation of a better and more sustainable environment, Pelindo allocates environmental costs to be used for various environmental-related purposes in 2022 in the amount of Rp31,756,676,567 billion, increase compared to 2021, which reached Rp10,093,277,060.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

Corporate Social Responsibility Related to Consumer Responsibility

KOMITMEN DAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KONSUMEN

Pelindo berkomitmen untuk senantiasa berupaya memberikan layanan terbaik untuk konsumen. Berbagai upaya yang telah dilakukan Perseroan antara lain melakukan inovasi dalam pelayanan, membuka saluran pengaduan dan secepatnya memberikan solusi terbaik, serta melakukan survei kepuasan konsumen untuk mendapatkan respons atas kualitas dan layanan, sekaligus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas apabila terdapat kekurangan. Apabila semua upaya tersebut bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya, maka tingkat penerimaan dan kepercayaan kepada Pelindo akan semakin meningkat, yang pada gilirannya akan mendongkrak citra Perseroan. Pelindo juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip kesetaraan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, yaitu tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, warna kulit, pandangan politik, dan sebagainya, merupakan hak konsumen yang dijunjung tinggi Pelindo.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITMENT AND ACTIVITIES RELATED TO CONSUMER

Pelindo is committed to always trying to provide the best service for consumers. The various efforts that have been made by the Company include innovating in services, opening complaint channels and providing the best solutions as soon as possible, as well as conducting consumer satisfaction surveys to obtain responses on quality and service, as well as being committed to improving quality when there are deficiencies. If all these efforts can be realized as well as possible, then the level of acceptance and trust in Pelindo will increase, which in turn will boost the Company›s image. Pelindo is also committed to implementing the principle of equality in providing services to consumers, namely not discriminating against ethnicity, religion, race, skin color, political views, and so on, which is a consumer right that Pelindo upholds.

PENINGKATAN LAYANAN KEPADA KONSUMEN

Pelindo memastikan mitra bisnis dan pelanggan dapat dengan mudah memperoleh informasi secara jelas terkait jasa dan layanan yang diberikan oleh Perseroan. Hal tersebut menjadi bagian dari komitmen Perseroan dalam menghadirkan pelayanan berkualitas sehingga kepuasan dan kepercayaan pelanggan pada Perseroan dapat diraih dan dipelihara dengan baik.

SERVICE IMPROVEMENT TO CONSUMER

Pelindo ensures that business partners and customers can easily obtain clear information regarding the services provided by the Company. This is part of the Company›s commitment to providing quality services so that customer satisfaction and trust in the Company can be achieved and maintained properly.

Mitra atau pelanggan yang membutuhkan informasi bisa membuka *website* resmi Pelindo. Selain itu, sesuai dengan kemajuan teknologi terkini, Perseroan juga menyediakan *e-service* sebagai *web* portal untuk memenuhi kebutuhan layanan dan pembayaran jasa kepelabuhanan. Terdapat enam fitur layanan dalam *E-service,* yakni *e-registration, e-booking, e-tracking/ tracing, e-payment, e-billing* dan *e-care*.

Selain itu, Pelindo menyadari bahwa harapan konsumen/ pelanggan terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, misalnya terkait modernisasi layanan di pelabuhan, kelengkapan sarana dan prasarana di pelabuhan, dan sebagainya. Untuk menjawab harapan konsumen tersebut, Perseroan secara konsisten menghadirkan berbagai inovasi dan pengembangan layanan. Inovasi dan pengembangan yang dilakukan Perseroan tidak semata-mata terkait produk dan layanan, tetapi juga dilakukan dalam bidang pemasaran, distribusi, dan lain-lain.

Inovasi dan pengembangan produk dan layanan yang dilakukan Pelindo selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan PEO untuk standardisasi proses tata naskah;
2. Implementasi ERP (SAP) untuk standardisasi proses keuangan dan SDM;
3. Sentralisasi IT *Service Desk*;
4. Penyusunan Peraturan Direksi dan SOP IT;
5. Dan lain – lain.

Selain fokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas dari fasilitas jasa serta mutu pelayanan, Perseroan juga menaruh perhatian pada upaya menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan melalui berbagai kegiatan seperti *Customer Engagement* dan *Customer Retention* dengan mengacu pada *key customer* yang telah ditetapkan. Kegiatan *Customer Engagement* yang diselenggarakan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:
1. *Coffee Morning;*
2. *Customer site visit;*
3. *Customer gatherings;*
4. *Customer port visit;*
5. *Customer of the years;*
6. *Customer courtesy call/direct mailing*;
7. Strategi/apresiasi lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan *Key Account Relationship*; dan
8. *Marketing Outlook* 2022.

PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN

Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen/ pelanggan, Pelindo menyediakan berbagai sarana penyampaian keluhan yaitu:
1. Datang langsung ke *customer service*.
2. Penyampaian melalui surat, telepon dan surat elektronik.
3. W*eb* portal *E-Service.*

Sedangkan untuk masing-masing Regional terdapat saluran pengaduan sebagai berikut:
1. Regional 1:
   Telp: (061) 41000055 ext. 4242, (0811) 6094242
   Email: customercare_regional1@pelindo.co.id

Partners or customers who need information can open the official Pelindo website. In addition, in accordance with the latest technological advances, the Company also provides e-services as a web portal to meet the needs for services and payment for port services. There are six service features in E-service, namely e-registration, e-booking, e-tracking/tracing, e-payment, e-billing and e-care.

In addition, Pelindo realizes that consumer/customer expectations continue to evolve according to the demands of the times, for example related to modernization of services at ports, completeness of facilities and infrastructure at ports, and so on. To answer these consumer expectations, the Company consistently presents various innovations and service developments. The innovation and development carried out by the Company are not solely related to products and services, but are also carried out in the areas of marketing, distribution and others.

Product and service innovation and development carried out by Pelindo in 2022 are as follows:
1. Developing a PEO to standardize the drafting process;
2. Implementation of ERP (SAP) to standardize financial and HR processes;
3. Centralization of IT Service Desk;
4. Preparation of Directors› Regulations and IT SOPs;
5. And others.

In addition to focusing on efforts to improve the quality of service facilities and service quality, the Company also pays attention to efforts to establish good relationships with customers through various activities such as Customer Engagement and Customer Retention with reference to predetermined key customers. Customer Engagement activities organized by the Company include the following:
1. Coffee Morning;
2. Customer site visits;
3. Customer gatherings;
4. Customer port visits;
5. Customer of the year;
6. Customer courtesy call/direct mailing;
7. Other strategies/appreciations used to support Key Account Relationship activities; And
8. Marketing Outlook 2022.

HANDLING OF CUSTOMER COMPLAINTS

To provide the best service to consumers/customers, Pelindo provides various means of submitting complaints, namely:

1. Come directly to customer service.
2. Submission by letter, telephone and electronic mail.
3. Web Portal E-Services.

Meanwhile, complaint channels for each Region are as follows:

1. Region 1:
   Tel: (061) 41000055 ext. 4242, (0811) 6094242
   Email: customercare_regional1@pelindo.co.id

2. Regional 2:
   Email: hub.pelanggan@pelindo.com
3. Regional 3:
   Telp: (0811) 3117698
   Email: servicedesk@pelindo.co.id
4. Regional 4:
   Telp: (0822) 55114410
   Web: https://customerportal.pelindo.co.id/

BIAYA YANG DIKELUARKAN

Pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap konsumen dilaksanakan oleh masing-masing regional atau *subholding* sehingga tidak terdapat biaya yang dikeluarkan secara langsung oleh Perseroan.

2. Region 2:
   Email: hub.pelanggan@pelindo.com
3. Region 3:
   Tel: (0811) 3117698
   Email: servicedesk@pelindo.co.id
4. Region 4:
   Tel: (0822) 55114410
   Web: https://customerportal.pelindo.co.id/

COST INCURRED

Social responsibility for consumers is carried out by each regional or subholding so there are no costs incurred directly by the Company.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility Related to Social Community Development

KEGIATAN DAN BIAYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Keberadaan Pelindo sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak sekadar mencari laba sebesar-besarnya, namun terdapat nilai-nilai luhur di dalamnya. Nilai-nilai itu antara lain turut berkontribusi dalam memberdayakan masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi. Program TJSL BUMN adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES AND COSTS IN SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT

The existence of Pelindo as a State-Owned Enterprise (BUMN) is not just seeking maximum profit, but there are noble values in it. These values, among others, contribute to empowering the communities in which the company operates. The SOE TJSL program is an activity that is the company›s commitment to sustainable development by providing benefits to the economy, social, environment and law and governance with principles that are more integrated, directed, measurable and accountable and are part of the company›s business approach.

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

Sesuai dengan regulasi terbaru, Pelindo menyelenggarakan Program TJSL BUMN berupa Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya. Untuk penyaluran dana PUMK pada tahun 2022 sebesar Rp79.837.062.832 atau sebesar 100,07% dari RKA tahun 2022 sebesar Rp79.782.062.832 atau 273,14% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp29.229.700.000. Program-program yang dilaksanakan antara lain, Program Pelatihan dan Sertifikasi UMK, Program Keikutsertaan Pameran UMK, serta Program Bantuan Peningkatan Kapasitas UMK.

MICRO AND SMALL BUSINESS FUNDING PROGRAM

In accordance with the latest regulations, Pelindo organizes the SOE TJSL Program in the form of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) as well as Assistance and/or Other Activities. For distribution of PUMK funds in 2022 amounting to Rp79,837,062,832 or 100.07% of the 2022 RKA of Rp79,782,062,832 or 273.14% of the 2021 realization of Rp29,229,700,000. The programs implemented included the UMK Training and Certification Program, the UMK Exhibition Participation Program, and the UMK Capacity Building Assistance Program.

PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Sampai dengan 31 Desember 2022 Pelindo telah melaksanakan program pengembangan pendidikan dengan penyaluran dana sebesar Rp29.319.181.195,00 atau 100,96% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp29.040.000.000,00 dan155,24% dari realisasi 2021 pada periode yang sama. Program-program yang dilaksanakan antara lain:

1. Program Pelatihan dan Sertifikasi Pendidikan/Pelatihan;
2. Program Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas;
3. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan, Program Bina Olahraga BUMN;
4. Program Beasiswa Pelindo;
5. Dukungan Pembangunan Nasional untuk Pendidikan;
6. Program Pelatuhan K3 Komunitas Pelabuhan (CSV), dan
7. Program Mahasiswa Magang.

EDUCATIONAL DEVELOPMENT PROGRAM

As of December 31, 2022 Pelindo, has implemented an education development program with a distribution of funds amounting to Rp29,319,181,195.00 or 100.96% of the 2022 budget of Rp29,040,000,000.00 and 155.24% of the 2021 realization in the same period. The programs implemented include:

1. Education/Training Training and Certification Program;
2. Capacity Building Program for Persons with Disabilities;
3. Education Quality Improvement Program, SOE Sports Development Program;
4. Pelindo Scholarship Program;
5. National Development Support for Education;
6. Port Community K3 Training Program (CSV), and
7. Student Internship Program.

PROGRAM PERBAIKAN KESEHATAN

Sampai dengan 31 Desember 2022 Pelindo telah melaksanakan program perbaikan kesehatan dengan penyaluran dana sebesar Rp5.856.906.736,00 atau 71,05% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp8.243.378.947,00 dan 21,62% dari realisasi 2021 pada periode yang sama. Program-program yang dilaksanakan antara lain, Pelindo Peduli COVID-19 dan program Peningkatan Kesehatan dan Imunitas.

HEALTH IMPROVEMENT PROGRAM

As of December 31, 2022 Pelindo, has carried out a health improvement program by distributing funds amounting to Rp5,856,906,736.00 or 71.05% of the 2022 budget of Rp8,243,378,947.00 and 21.62% of the 2021 realization in the same period. The programs implemented include Pelindo Cares for COVID-19 and the Health and Immunity Improvement Program.



PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY



08

Lampiran

Apendix

REFERENSI SILANG SEOJK NO. 16 /SEOJK.04/2021: BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Cross-Reference No. 16/SEOJK.04/2021: Format and Completing the Annual Report of Issuers or Public Companies

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
Ketentuan Umum General Terms	
Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: In this Financial Services Authority Circular Letter what is meant by:	
a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik. The Annual Report is a report on the board of directors and board of commissioners accountability in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) fiscal year to the general meeting of shareholders prepared based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning the Annual Report of issuers or public companies.	
b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Issuers are parties who make public offerings.	
c. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Public Company is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the Financial Services Authority.	
d. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik A Public Company is an Issuer that has made a public offering of equity securities or a Publically-listed Company	
e. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. A Sustainability Report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business.	
f. Direksi: Board of Directors:	
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan » for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the Board of Directors as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan mengenai badan hukum tersebut. » for an Issuer or a Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that carries out the management of the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	
g. Dewan Komisaris: Board of Commissioners:	
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan » for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut. » 2) for the Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	
h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS: General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS:	
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan » for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; and	
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut. » 2) for an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that has authority that is not given to any other body that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the legislation and/or articles of association governing the legal entity. .	
Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. The Annual Report of Issuers or Public Companies is an important source of information for investors or shareholders as one of the basic considerations in making investment decisions and a means of supervision of Issuers or Public Companies.	
Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Along with the development of the capital market and the increasing need for information disclosure by investors or shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to present quality, accurate, and accountable information through the Annual Reports of Issuers or Public Companies.	
Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Annual Reports that are prepared regularly and informatively can provide convenience for investors or shareholders and stakeholders in obtaining the required information.	
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. This Financial Services Authority Circular is a guideline for Issuers or Public Companies that must be applied in preparing Annual Reports and Sustainability Reports.	
Bentuk Laporan Report Format	
Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik. The Annual Report is presented in the form of printed and electronic documents.	
Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik. The Annual Report is presented in the form of a printed document, printed on light colored paper, of good quality, A4 size, bound, and can be reproduced with good quality.	
Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami. The Annual Report may present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams by including clear titles and/or descriptions, so that they are easy to read and understand.	
Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam portable document format (PDF). The Annual Report presented in the form of an electronic document is the Annual Report converted into a portable document format (PDF).	
Isi Laporan Tahunan Annual Report Contents	
Laporan Tahunan paling sedikit memuat: The Annual Report shall at least contain:	
a. ikhtisar data keuangan penting; overview of important financial data;	
b. informasi saham (jika ada); stock information (if any);	

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
c. laporan Direksi; report of the Board of Directors;	
d. laporan Dewan Komisaris; report of the Board of Commissioners;	
e. profil Emiten atau Perusahaan Publik; profile of the Issuer or Public Company;	
f. analisis dan pembahasan manajemen; management analysis and discussion;	
g. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; governance of Issuers or Public Companies;	
h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;	
i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan audited annual financial report; and	
j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. statement letter of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding their responsibility for the Annual Report.	
Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Annual Report Contents	
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: Summary of Important Financial Data Summary of important financial data containing financial information that is presented in the form of a comparison for 3 (three) fiscal years or since starting its business if the Issuer or Public Company has carried out its business activities for less than 3 (three) years, at least containing:	
» pendapatan/penjualan; » income/sales;	40
» laba bruto; » gross profit;	41
» laba (rugi); » profit (loss);	41
» jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; » the amount of profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	42
» total laba (rugi) komprehensif; » total comprehensive profit (loss);	43
» jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; » total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	43
» laba (rugi) per saham; » earning (loss) per share;	43
» jumlah aset; » total assets;	38
» jumlah liabilitas; » total liabilities;	39
» jumlah ekuitas; » total equity;	40
» rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; » ratio of profit (loss) to total assets;	45
» rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; » ratio of profit (loss) to equity;	45
» rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; » ratio of profit (loss) to revenue/sales;	45
» rasio lancar; » current ratio;	45
» rasio liabilitas terhadap ekuitas; » ratio of liabilities to equity;	45
» rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan » ratio of liabilities to total assets; and	45

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
» informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya. » other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and the type of industry.	46
b. Informasi Saham Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Stock Information Stock information for a Public Company shall at least contain:	
» saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: » shares that have been issued for each quarterly period presented in the form of a comparison for the last 2 (two) fiscal years, at least containing:	
c. jumlah saham yang beredar; number of shares outstanding;	49
d. kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed;	
e. harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan the highest, lowest, and closing share prices based on prices on the stock exchange where the shares are listed; and	
f. volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. trading volume on the stock exchange where the shares are listed.	
Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on a stock exchange;	
dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: in the event of a corporate actions that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in number 1) shall be added with at least an explanation regarding:	
a. tanggal pelaksanaan aksi korporasi; the date of implementation of the corporate action;	
b. rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; the ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares;	
c. jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; the number of outstanding shares before and after the corporate action;	49-50
d. jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan the number of convertible securities exercised (if any); and	
e. harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; the share price before and after the corporate action;	
dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan in the event of a temporary suspension of share trading (suspension) and/or delisting of shares in the fiscal year, the reasons for the suspension and/or delisting of shares shall be explained; and	
dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut. in the event that the temporary suspension of share trading as referred to in number 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, it explains the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/or cancellation of the share listing (delisting).	N/A
Laporan Direksi Board of Directors' Report	
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' report shall at least contain a brief description of:	
a. kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: performance of the Issuer or Public Company, at least containing:	
» strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; » strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;	63-65

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
» peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; » role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;	63
» proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; » process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;	63
» perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan » comparison between the results achieved and those targeted by the Issuer or Public Company; and	65
» kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; » obstacles faced by Issuers or Public Companies;	66-67
b. gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan description of the business prospects of the Issuer or Public Company; and	67-69
c. penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. implementation of the governance of Issuers or Public Companies.	69-73
Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Commissioners' report shall at least contain a brief description of:	
a. penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; evaluation of the performance of the Board of Directors regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;	77-80
b. pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and	80-81
c. pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. views on the implementation of governance of the Issuer or Public Company.	81-84
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: The profile of the Issuer or Public Company contains at least the following information:	
a. nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; name of the Issuer or Public Company, including if there is a change in name, the reason for the change, and the effective date of the name change in the fiscal year;	92-93
b. akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: access to Issuers or Public Companies including branch offices or representative offices that enable the public to obtain information about Issuers or Public Companies, including:	94-97
» alamat; » address;	
» nomor telepon; » telephone number;	
» alamat surat elektronik; dan » e-mail address; and	
» alamat situs web; » website address;	
c. riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief history of the Issuer or Public Company;	99-100
d. visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan; vision and mission of the Issuer or Public Company as well as the corporate culture or corporate values;	101-102
e. kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the fiscal year, as well as types of goods and/or services produced;	103-107
f. wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area or area for the implementation of operational activities or the range of the company's operational activities.	108

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
g.	struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;	110-111
h.	daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;	109
i.	profil Direksi, paling sedikit memuat: Directors' profile, at least containing:	
	» nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; » name and position in accordance with the duties and responsibilities;	
	» foto terbaru; » recent photograph;	
	» usia; » age;	
	» kewarganegaraan; » nationality;	
	» riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; » education history and/or certification;	
	» riwayat jabatan, meliputi informasi: » position history, including information on:	
j.	dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; the legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned;	
k.	rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	112-124
l.	pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
	» hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan » affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and	
	» perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; » changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;	

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
a. profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: profile of the Board of Commissioners, at least containing:	
» nama dan jabatan; » name and position;	
» foto terbaru; » recent photograph;	
» usia; » age;	
» kewarganegaraan; » nationality;	
» riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; » education history and/or certification;	
» riwayat jabatan, meliputi informasi: » position history, including information on:	
b. dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners;	
c. dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned;	
d. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	125-141
e. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
» hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; » affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter;	
» pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan » statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner has served more than 2 (two) terms; and	
» perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; » changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;	
dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; in the event that there is a change in the composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that occurs after the fiscal year ends up to the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the last and previous composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;	
jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Disclosure of information can be presented in tabular form.	142-144

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: names of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the fiscal year, which consists of information regarding:	
a. pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company;	
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares of the Issuer or Public Company. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and	
c. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; community shareholder group, namely the group of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company;	
Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. The above information can be presented in tabular form.	
persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; the percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;	145-146
Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.	
jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: number of shareholders and percentage of ownership at the end of the fiscal year based on classification:	
a. kepemilikan institusi lokal; ownership in local institutions;	
b. kepemilikan institusi asing; ownership in foreign institutions;	
c. kepemilikan individu lokal; dan local individual ownership; and	
d. kepemilikan individu asing; foreign individual ownership;	
informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; information regarding the majority and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, up to the individual owner, which is presented in the form of a schematic or chart;	146
nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. the name of the subsidiary, associate, joint venture company where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company; For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.	148-169
kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the fiscal year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, dividends shares, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);	172-173

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);	174-177
informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: 20) information on the use of a public accountant (AP) and a public accounting firm (KAP) services and their networks/associations/alliances include:	
a. nama dan alamat; name and address;	
b. periode penugasan; assignment period;	
c. informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; information on audit and/or non-audit services provided;	
d. biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year; and	178
e. dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan in the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and	
Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/aliances can be presented in tabular form.	
nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP	179
Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Analysis and Discussion	
Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: Management analysis and discussion contains analysis and discussion of financial statements and other important information with an emphasis on material changes that occurred in the fiscal year, which at least contains:	
tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a review of operations per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding:	
a. produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; production, which includes the process, capacity, and development;	254-261
b. pendapatan/penjualan; dan income/sales; and	261-265
c. profitabilitas; profitability;	261-265
kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: comprehensive financial performance which includes a comparison of financial performance in the last 2 (two) fiscal years, an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes, at least regarding:	
a. aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; current assets, non-current assets, and total assets;	280-294
b. liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; current liabilities, long term liabilities, and total liabilities;	294-304
c. ekuitas; equity;	305
d. pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan income/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and	310-322
e. arus kas; cash flows;	323-325
kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; ability to pay debts or obligations by presenting the relevant ratio calculations;	325-328
tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; collectibility level of the Issuer's or Public Company's receivables by presenting the relevant ratio calculations;	328-329

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; capital structure and management policies on the capital structure with the basis for determining the said policy;	329-330
bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: discussion of material ties for capital goods investment with an explanation that at least contains:	
a. tujuan dari ikatan tersebut; the purpose of the bond;	331-332
b. sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; the expected source of funds to fulfill the commitment;	
c. mata uang yang menjadi denominasi; dan the currency in which it is denominated; and	
d. langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; steps that are planned by the Issuer or Public Company to protect the risk from the related foreign currency position;	
bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: discussion of capital goods investments realized in the last fiscal year, at least contains:	
a. jenis investasi barang modal; type of capital goods investment;	332-334
b. tujuan investasi barang modal; dan the purpose of capital goods investment; and	
c. nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; the total of capital goods investments;	
informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); information and material facts occurring after the date of the accountant's report (if any);	334
prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; the business prospects of the Issuer or Public Company are related to the conditions of the industry, the general economy and the international market accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources;	335-339
perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: comparison between the target/projection at the beginning of the fiscal year with the results achieved (realization), regarding:	
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	344-345
b. laba (rugi); profit (loss);	344-345
c. struktur modal (capital structure); atau capital structure; or	345
d. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	340-351
target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: 11) targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding:	
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	353
b. laba (rugi); profit (loss);	353
c. struktur modal (capital structure); capital structure;	354
d. kebijakan dividen; atau dividend policy; or	354
e. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	352-358
aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; marketing aspects of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share;	248-253

KETERANGAN DESCRIPTION		HALAMAN PAGE
uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: description of dividends for the last 2 (two) fiscal years, at least:		359-360
a.	kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income;	
b.	tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends;	
c.	jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan the amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and	
d.	jumlah dividen per tahun yang dibayar; the amount of dividends paid annually;	
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Disclosure of information can be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.		
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: 14) realization of the use of proceeds from the public offering, provided that:		360
a.	dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan in the event that during the fiscal year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the fiscal year; and	
b.	dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; in the event that there is a change in the use of funds as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change;	

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: material information (if any), regarding investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, which occurred during the fiscal year, at least containing :	
a. tanggal, nilai, dan objek transaksi; date, value, and object of the transaction;	
b. nama pihak yang melakukan transaksi; name of the party conducting the transaction;	
c. sifat hubungan afiliasi (jika ada); nature of the affiliation relationship (if any);	
d. penjelasan mengenai kewajaran transaksi; explanation of the fairness of the transaction;	
e. pemenuhan ketentuan terkait; dan compliance with related provisions; and	
f. dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: in the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:	
pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); dan (1) a statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; and	
peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); (2) the role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle;	361-369
untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; g) for affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out to generate operating income. and run regularly, repeatedly, and/or continuously;	
Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added.	
untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; h) for disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;	
dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this shall be disclosed;	
perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan changes in the provisions of laws and regulations that have a significant effect on Issuers or Public Companies and their impact on financial statements (if any); and	369
perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). changes in accounting policies, reasons and impact on financial statements (if any).	369-370

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Issuer or Public Company Governance	
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The governance of the Issuer or Public Company shall at least contain a brief description of:	
a. RUPS, paling sedikit memuat: GMS, at least contains:	424-440
» Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: » Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year include:	
Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan (1) resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year realized in the fiscal year; and	
Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; (2) resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have not been realized and the reasons for not realizing them;	
b. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;	440-458
Direksi, paling sedikit memuat: The Board of Directors, at least contains:	
Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; a. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form.	463-464
b. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors;	462
c. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;	466-487
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: training and/or competency development of members of the Board of Directors:	486-489
» kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan » policies for training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and	
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); » training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);	
e. penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: the Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain:	500-501
» prosedur penilaian kinerja; dan » performance appraisal procedures; and	
» kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan » the criteria used are performance achievements during the fiscal year, are competence and attendance at meetings; and	
f. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. in the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.	

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The Board of Commissioners, at least contains:	
a. tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	502-503
b. pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris; a statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter for the Board of Commissioners;	504
c. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at the GMS;	508-531
Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.	
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:	530-534
» kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan » policy on competency training and/or development of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and	
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); » competency training and/or development attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);	
e. penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing:	535-552
» prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; » procedures for implementing performance appraisals;	
» kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan » criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings; and	
» pihak yang melakukan penilaian; dan » party conducting the assessment; and	
f. penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: » Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:	552
» prosedur penilaian kinerja; dan » performance appraisal procedures; and	
» kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; » the criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings;	
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: 4) The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:	
a. prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and	557
b. prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:	557-558
» prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; » procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	
» struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan » the remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and	

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
» besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. » the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form.	558-560
Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: The sharia supervisory board, for Issuers or Public Companies that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, shall at least contain:	N/A
a. nama; name;	
b. dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; legal basis for the appointment of the sharia supervisory board;	
c. periode penugasan dewan pengawas syariah; period of assignment of the sharia supervisory board;	
d. tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan duties and responsibilities of the sharia supervisory board; and	
e. frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; frequency and method of providing advice and suggestions as well as supervising the fulfillment of sharia principles in the capital market to Issuers or Public Companies;	
Komite audit, paling sedikit memuat: The audit committee, at least contains:	
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	565-567
b. usia; age;	
c. kewarganegaraan; nationality;	
d. riwayat pendidikan; educational history;	
e. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; » legal basis for appointment as committee member;	
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan » concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee as well as other positions (if any); and	
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; » work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
f. periode dan masa jabatan anggota komite audit; period and term of office of the audit committee members;	
g. pernyataan independensi komite audit; statement of independence of the audit committee;	568
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	569
i. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in those meetings; and	569-572
j. pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit; the implementation of the audit committee's activities for the fiscal year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;	572

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: 7) the nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing:	
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	
b. usia; age;	
c. kewarganegaraan; nationality;	
d. riwayat pendidikan; educational history;	
e. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	575-578
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; » legal basis for appointment as committee member;	
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
f. periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	
g. pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	579
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	579-580
i. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	573
j. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); a statement that it has a guideline or charter;	574
k. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;	580-583
l. uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan brief description of the implementation of activities in the fiscal year; and	584
m. dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: in the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:	
» alasan tidak dibentuknya komite; dan » reasons for not forming the committee; and	
» pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; » the party carrying out the nomination and remuneration function;	
komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least containing:	
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	
b. usia; age;	
c. riwayat pendidikan; educational history;	
d. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; » legal basis for appointment as committee member;	588-590
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan » concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; » work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
e. periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	

KETERANGAN DESCRIPTION		HALAMAN PAGE
f.	pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	591
g.	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any); and	591-592
h.	uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	585
i.	pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; a statement that the committee has had guidelines or charters;	586
j.	kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting; and	592-595
k.	uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; a brief description of the committee's activities for the fiscal year;	596
Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: Corporate secretary, at least contains:		
a.	nama; name;	600
b.	domisili; domicile;	
c.	riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	
	» dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan » legal basis for appointment as company secretary; and	
	» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; » work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
d.	riwayat pendidikan; educational history;	
e.	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan training and/or competency improvement followed during the fiscal year; and	601
f.	uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; a brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary for the fiscal year;	602-603
Unit audit internal, paling sedikit memuat: Internal audit unit, at least contains:		
a.	nama kepala unit audit internal; name of the head of the internal audit unit;	604
b.	riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	
	» dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan » legal basis for the appointment as head of the internal audit unit; and	
	» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; » work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
c.	kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); qualification or certification as an internal audit profession (if any);	
d.	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; training and/or competency improvement to be followed during the fiscal year;	605-615
e.	struktur dan kedudukan unit audit internal; structure and position of the internal audit unit;	603-604
f.	uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	615-616
g.	pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan a statement that the internal audit unit has had guidelines or charters; and	615
h.	uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; a brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the fiscal year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;	622-626

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the internal control system implemented by the Issuer or Public Company, at least containing:	
a. pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations;	642-644
b. tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan review of the effectiveness of the internal control system; and	647
c. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	647
sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least contains:	
a. gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; general description of the risk management system of the Issuer or Public Company;	649-651
b. jenis risiko dan cara pengelolaannya; types of risks and how to manage them;	651-655
c. tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan review of the effectiveness of the Issuer's or Public Company's risk management system; and	656
d. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	656
perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain:	658-664
a. pokok perkara/gugatan; subject matter/claim;	
b. status penyelesaian perkara/gugatan; dan status of settlement of cases/claims; and	
c. pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; effect on the condition of the Issuer or Public Company;	
informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); 14) information on administrative sanctions/sanctions imposed on Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities for the fiscal year (if any);	665
informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: 15) information regarding the code of ethics of the Issuer or Public Company includes:	
a. pokok-pokok kode etik; main points of the code of ethics;	671-672
b. bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan form of socialization of the code of ethics and its enforcement efforts; and	673
c. pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; a statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of Issuers or Public Companies;	672-673
uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP); 16) a brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or program employee stock ownership (ESOP);	676
Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain:	
a. jumlah saham dan/atau opsi; number of shares and/or options;	

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
b. jangka waktu pelaksanaan; implementation period;	
c. persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan requirements for eligible employees and/or management; and	
d. harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; exercise price or determination of exercise price;	
uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a brief description of the information disclosure policy regarding:	
a. kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan a) share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and	676
b. pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; implementation of the policy;	
uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company, at least containing:	
a. cara penyampaian laporan pelanggaran; method of submitting a violation report;	676-677
b. perlindungan bagi pelapor; protection for whistleblowers;	677-678
c. penanganan pengaduan; complaint handling;	678-679
d. pihak yang mengelola pengaduan; dan party managing the complaint; and	682-683
e. hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: result of complaint handling, at least:	683-684
» jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan » number of complaints received and processed in the fiscal year; and	
» tindak lanjut pengaduan; » follow-up on complaints;	
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, this matter is disclosed.	
uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:	
a. program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in Issuers or Public Companies; and	685-689
b. pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies;	689-690
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy are explained.	
penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: implementation of the Public Company governance guidelines for Issuers issuing equity securities or Public Companies, including:	692-705
a. pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau a statement regarding the recommendations that have been implemented; and/or	
b. penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). explanation of recommendations that have not been implemented, along with reasons and alternative implementations (if any).	
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.	

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik Social and Environmental Responsibility of Issuers or Public Companies	
Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: The information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, at at least includes:	716-756
a. penjelasan strategi keberlanjutan; explanation of the sustainability strategy;	
b. ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental);	
c. profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief profile of the Issuer or Public Company;	
d. penjelasan Direksi; explanation of the Board of Directors;	
e. tata kelola keberlanjutan; sustainability governance;	
f. kinerja keberlanjutan; sustainability performance;	
g. verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; written verification from an independent party, if any;	
h. lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan feedback sheet for readers, if any; and	
tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya; the response of the Issuer or Public Company to the previous year's report feedback;	
Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as contained in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	
informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat: information on the Sustainability Report in number 1) can:	
a. diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau disclosed in other relevant sections outside the social and environmental responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the section related to the Directors' Report; and/or	
b. merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik; refers to other sections outside the social and environmental responsibility section by still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company;	
Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan; The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report;	
Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must:	
a. memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan contains all the information as referred to in number 1); and	

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
b. disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	
Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the social and environmental responsibility section contains information that information on social and environmental responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report; and	
Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Submission of the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be submitted together with the Annual Report.	
Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Audited Annual Financial Report	
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek. The annual financial reports contained in the Annual Report are prepared in accordance with financial accounting standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The said annual financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulates the periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities company.	
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report Statements of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding the responsibilities of the Annual Report are prepared in accordance with the format of Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report as contained in the Appendix I which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.	

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia
dan entitas anaknya/ Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia
and its subsidiaries

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Consolidated financial statements
as of December 31, 2022 for the year then ended
with independent auditor's report

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBISIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Daftar Isi / ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Direksi		*Directors' Statement*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1-3	*Consolidated Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4-6	*Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	7	*Consolidated Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	8	*Consolidated Statement of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	9-255	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

****

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/*Name* : Arif Suhartono
   Alamat kantor/*Office address* : Pelabuhan Indonesia (Persero)
   Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok,
   Jakarta 14310, Indonesia
   Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/*Residential address/in accordance with personal identity card* : Jl. Tunas Kelapa Raya/167 RT/RW 005/007 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
   Nomor telepon/*Telephone number* : 62-21-4301080
   Jabatan/*Title* : Direktur Utama/*President Director*
2. Nama/*Name* : Mega Satria
   Alamat kantor/*Office address* : Pelabuhan Indonesia (Persero)
   Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok,
   Jakarta 14310, Indonesia
   Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/*Residential address/in accordance with personal identity card* : Jl. Senayan Blok HH 11/4 RT/RW 003/015 Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
   Nomor telepon/*Telephone number* : 62-21-4301080
   Jabatan/*Title* : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/ *Finance and Risk Management Director*

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
   b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anaknya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DIRECTOR'S STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES

We, the undersigned:

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2022 and for the year then ended.*
2. *The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries, and*
   b. *The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.*
4. *We are responsible for the Company and its subsidiaries' internal control system.*

This statement is made truthfully.

Jakarta, 30 April 2023 / *April 30, 2023*

METERAI TEMPEL
10000
BD5AJX672949173

Arif Suhartono
Direktur Utama/*President Director*

Mega Satria
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/
Finance and Risk Management Director

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01294/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 01294/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023

The Shareholder and the Boards of Commissioners and Directors
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2022, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01294/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (lanjutan)

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal-hal paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01294/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (continued)

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying consolidated financial statements.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01294/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Akuntansi Lindung Nilai Arus Kas

Penjelasan atas hal audit utama:

Grup memiliki eksposur terhadap risiko mata uang asing dari pendapatan dan utang obligasi dalam mata uang Dolar AS karena mata uang fungsional Grup adalah Rupiah. Pada tanggal 1 Januari 2022, Grup menetapkan beberapa hubungan lindung nilai arus kas antara pendapatan kontraktual dan non-kontraktualnya dalam mata uang Dolar AS di masa yang akan datang dengan utang obligasi dalam mata uang Dolar AS yang ada sebagai instrumen lindung nilai. Tujuannya adalah untuk melindungi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang atas pendapatan yang diterima dalam mata uang Dolar AS dengan utang obligasi yang ada dalam mata uang Dolar AS. Kami menganggap ini sebagai hal audit utama dalam audit tahun berjalan karena kompleksitas yang terkait dengan penerapan akuntansi lindung nilai. Penilaian item lindung nilai dan instrumen lindung nilai, serta penilaian efektivitas lindung nilai dan cadangan lindung nilai melibatkan model kuantitatif yang kompleks dan pertimbangan signifikan yang terkait dengan asumsi dan akuntansi lindung nilai. Disamping itu, perlakuan akuntansi tersebut menghasilkan dampak yang signifikan terhadap saldo-saldo Grup sebagai akibat dari pemilihan untuk menerapkan akuntansi lindung nilai.

Pengungkapan terkait lindung nilai arus kas disajikan dalam Catatan 2u, 24 dan 47 atas laporan keuangan konsolidasian.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01294/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (continued)

Key audit matters (continued)

Cash Flow Hedge Accounting

Description of the key audit matter:

The Group is exposed to foreign currency risk from revenue and bonds payable in US Dollars because the Group's functional currency is Rupiah. On January 1, 2022, the Group designated several cash flow hedge relationships between its future US Dollar contractual and non-contractual revenues with its existing US Dollar bonds payables as hedging instrument. The objective is to hedge the risk of exchange rate fluctuation on revenue received in US Dollars with the existing bonds payable in US Dollars. We consider this as the key audit matter in the current year audit of the consolidated financial statements due to the complexities associated with the application of hedge accounting. The valuation of underlying hedged items and hedging instruments, and the assessment of hedge effectiveness and hedge reserve balances involve complex quantitative models and significant judgement associated with assumptions and hedge accounting. Furthermore, the accounting treatment results in a significant impact to the Group balances that arise as a result of the election to apply hedge accounting.

The disclosures related to the cash flow hedge are presented in Notes 2u, 24 and 47 to the consolidated financial statements.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01294/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Akuntansi Lindung Nilai Arus Kas (lanjutan)

Respons audit:

Kami memeroleh pemahaman tentang strategi manajemen risiko dan tujuan dilakukannya lindung nilai arus kas, serta memeroleh dokumentasi penetapan hubungan lindung nilai arus kas yang dibuat oleh manajemen dan ahli eksternal yang ditunjuk oleh Grup. Kami menilai independensi, kualifikasi dan obyektivitas dari ahli eksternal manajemen tersebut. Kami mengevaluasi apakah penerapan akuntansi lindung nilai arus kas telah sesuai dengan kriteria kualifikasian dan prinsip-prinsip lainnya dalam akuntansi untuk lindung nilai arus kas sesuai dengan PSAK 71: Instrumen Keuangan. Kami menguji asumsi utama yang digunakan dalam model dan membandingkannya dengan informasi yang diperoleh dari sumber input, analisis historis, informasi yang tersedia untuk umum dan pengetahuan industri. Kami menguji akurasi aritmetika dari model yang digunakan dalam penilaian efektivitas serta penerapan *lower-of-test*. Kami juga mengevaluasi kecukupan pengungkapan mengenai hal ini di dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2022 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan konsolidasian terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01294/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (continued)

Key audit matters (continued)

Cash Flow Hedge Accounting (continued)

Audit response:

We obtained an understanding of the risk management strategy and objective in conducting a cash flow hedge and obtained documentation of the cash flow hedge relationships designation prepared by the management and the external expert engaged by the Group. We assessed the independence, qualification and objectivity of the external management's expert. We evaluated whether the cash flow hedge accounting application is in compliance with the qualifying criteria and other principles in accounting for cash flow hedge in accordance with PSAK 71: Financial Instruments. We tested the key assumptions used in the model and compared them with the information obtained from input sources, historical analysis, publicly available information and industry knowledge. We tested the arithmetical accuracy of the model used for effectiveness assessment as well as the application of lower-of-test. We also evaluated adequacy of disclosures on this matter in the accompanying consolidated financial statements.

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2022 Annual Report ("The Annual Report") other than the accompanying consolidated financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01294/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (lanjutan)

Informasi lain (lanjutan)

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01294/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (continued)

Other information (continued)

Our opinion on the accompanying consolidated financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying consolidated financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01294/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01294/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements (continued)

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01294/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01294/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.*

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01294/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01294/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01294/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01294/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01294/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01294/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Moch. Dadang Syachruna
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0697/*Public Accountant Registration No. AP.0697*

30 April 2023/*April 30, 2023*

01294

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2022
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	**Catatan/ *Notes***	**31 Desember 2021/ *December 31, 2021***	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	13.597.640.823	4,44,45,46	12.922.388.587	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	3.943.051.999	5,44,45,46	5.718.525.973	*Short-term investments*
Piutang usaha - neto		6		*Trade receivables - net*
Pihak ketiga	1.130.425.885	45,46	1.238.825.470	*Third parties*
Pihak berelasi	319.681.316	44	277.437.076	*Related parties*
Piutang lain-lain - neto		7		*Other receivables – net*
Pihak ketiga	54.645.010	45,46	126.988.519	*Third parties*
Pihak berelasi	392.181.781	44	1.153.378.016	*Related parties*
Uang muka dan beban dibayar di muka	225.480.260	8	258.677.724	*Advances and prepaid expenses*
Pendapatan masih akan diterima		9		*Accrued revenues*
Pihak ketiga	543.670.248	45,46	297.585.161	*Third parties*
Pihak berelasi	107.559.957	44	33.383.321	*Related parties*
Persediaan	276.990.511	10	217.674.563	*Inventories*
Pajak dibayar di muka	972.176.643	23a	1.080.535.298	*Prepaid taxes*
Aset lancar lainnya	56.662.961	46	55.194.659	*Other current assets*
Total Aset Lancar	**21.620.167.394**		**23.380.594.367**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Investasi jangka panjang	4.118.791.190	11	3.751.638.877	*Long-term investment*
Properti investasi - neto	1.233.319.427	12	873.433.978	*Investment properties - net*
Aset tetap - neto	45.033.835.147	13	46.300.182.922	*Fixed assets - net*
Aset kerjasama operasi - neto	379.887.734	14	408.013.146	*Joint operation assets - net*
Aset hak-guna - neto	453.988.347	16	452.002.189	*Right-of-use assets - net*
Aset pajak tangguhan	632.879.439	23f	587.268.838	*Deferred tax assets*
Aset takberwujud - neto	42.546.542.738	15	38.760.454.848	*Intangible assets - net*
Taksiran tagihan restitusi pajak	1.109.658.955	23a	750.660.351	*Estimated claims for tax refund*
Aset tidak lancar lainnya	1.221.507.535	17,46	964.824.984	*Other non-current assets*
Total Aset Tidak Lancar	**96.730.410.512**		**92.848.480.133**	***Total Non-current Assets***
TOTAL ASET	**118.350.577.906**		**116.229.074.500**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2022
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman bank jangka pendek	105.361.831	18,46	138.493.774	*Short-term bank loans*
Utang usaha		19		*Trade payables*
Pihak ketiga	976.563.635	45,46	1.338.142.064	*Third parties*
Pihak berelasi	1.092.012.208	44	1.926.350.211	*Related parties*
Pendapatan diterima di muka jangka pendek	1.594.355.077	20	1.298.045.484	*Short-term unearned revenues*
Utang pajak	1.025.273.741	23b	578.540.987	*Taxes payable*
Beban akrual	5.273.585.288	21,46	3.699.192.020	*Accrued expenses*
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang				*Current maturities of long-term liabilities*
Utang obligasi	8.637.804.928	24,45,46	-	*Bonds payable*
Utang bank	152.606.159	25,45,46	2.255.771.149	*Bank loans*
Liabilitas sewa	49.907.726	16	76.345.578	*Lease liabilities*
Liabilitas jangka pendek lainnya		22		*Other current liabilities*
Pihak ketiga	855.825.793	46	1.182.432.796	*Third parties*
Pihak berelasi	185.307.298	44	1.066.277.651	*Related parties*
Total Liabilitas Jangka Pendek	**19.948.603.684**		**13.559.591.714**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar				*Long-term liabilities - net of current maturities*
Utang obligasi	34.116.829.197	24,46,47	40.176.176.480	*Bonds payable*
Utang bank	7.678.666.058	25,46,47	6.633.174.189	*Bank loans*
Liabilitas sewa	385.228.086	16,46,47	257.540.134	*Lease liabilities*
Utang lembaga keuangan non-bank		26		*Loan from non-bank financial institution*
Pihak ketiga	584.328.133	46	476.290.919	*Third parties*
Pihak berelasi	1.160.435.133	44	949.751.736	*Related parties*
Liabilitas pajak tangguhan	231.128.682	23f	105.071.621	*Deferred tax liabilities*
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	4.544.771.276	27	4.495.055.535	*Long-term unearned revenue*
Liabilitas jangka panjang lainnya	1.126.588.038	28,44,46	962.389.202	*Other long-term liabilities*
Liabilitas imbalan kerja	5.769.306.844	29	6.560.923.531	*Employee benefit liabilities*
Total Liabilitas Jangka Panjang	**55.597.281.447**		**60.616.373.347**	***Total Non-current Liabilities***
TOTAL LIABILITAS	**75.545.885.131**		**74.175.965.061**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2022
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES AND EQUITY (continued)***
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				***Equity attributable to owners of the parent entity***
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing untuk saham Seri A Dwiwarna dan Seri B				*Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount) per share for Series A Dwiwarna and Series B shares, respectively*
Modal dasar - 156.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, terdiri dari: 1 saham seri A Dwiwarna dan 155.999.999 saham Seri B dan 33.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, terdiri dari: 1 saham seri A Dwiwarna dan 32.999.999 saham Seri B				*Authorized capital - 156,000,000 shares as of December 31, 2022, consist of: 1 Series A Dwiwarna share and 155,999,999 Series B shares and 33,000,000 shares as of December 31, 2021, consist of: 1 Series A Dwiwarna share and 32,999,999 Series B shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 40.575.584 saham pada tanggal 31 Desember 2022, terdiri dari: 1 saham Seri A Dwiwarna dan 40.575.583 saham Seri B dan 8.457.067 saham pada tanggal 31 Desember 2021, terdiri dari: 1 saham seri A Dwiwarna dan 8.475.066 saham Seri B	40.575.584.000	30	8.475.067.000	*Issued and fully paid - 40,575,584 shares as of December 31, 2022 consists of: 1 Series A Dwiwarna share and 40,575,583 Series B shares and 8,457,067 shares as of December 31, 2021, consist of 1 Series A Dwiwarna share and 8,475,066 Series B shares*
Modal donasi	26.825.982	31	26.825.982	*Donated capital*
Tambahan modal disetor	(33.358.048.450)	32	(1.128.322.898)	*Additional paid-in capital*
Komponen ekuitas lainnya	1.466.121		1.466.121	*Other equity component*
Selisih nilai transaksi dengan pihak nonpengendali	836.905.071	1b,33	836.072.934	*Difference in value of transactions with non-controling interest*
Saldo laba				*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya	31.900.794.522		29.925.514.788	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	4.915.321.447		4.434.909.230	*Unappropriated*
Penghasilan komprehensif lain	(3.774.159.697)		(2.062.503.591)	*Other comprehensive income*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - neto	**41.124.688.996**		**40.509.029.566**	***Equity attributable to owners of the parent entity - net***
Kepentingan nonpengendali	1.680.003.779	36	1.544.079.873	*Non-controlling interests*
Ekuitas - neto	**42.804.692.775**		**42.053.109.439**	***Equity - net***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**118.350.577.906**		**116.229.074.500**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2022
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,*			
	2022	**Catatan/ Notes**	**2021**	
Pendapatan operasi	29.700.604.135	37	28.814.806.337	*Operating revenues*
Pendapatan konstruksi	2.397.701.575	38	3.195.512.405	*Construction revenues*
Beban operasi	(23.154.429.191)	39	(22.541.521.255)	*Operating expenses*
Beban konstruksi	(2.397.701.575)	38	(3.195.512.405)	*Construction expenses*
Pendapatan operasi lainnya - neto	568.645.497	40	266.912.544	*Other operating income - net*
LABA USAHA	**7.114.820.441**		**6.540.197.626**	***INCOME FROM OPERATIONS***
Pendapatan keuangan	380.490.270	41	407.775.884	*Finance income*
Beban keuangan	(2.571.042.968)	42	(2.540.082.866)	*Finance costs*
Bagian laba entitas asosiasi	302.615.692	43	255.107.588	*Equity in income of associates*
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	**5.226.883.435**		**4.662.998.232**	***INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX***
Beban pajak final	(488.229.302)	23d	(487.671.869)	*Final tax expense*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	**4.738.654.133**		**4.175.326.363**	***INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN				***CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)***
Kini	(958.337.498)	23d,23e	(847.733.176)	*Current*
Tangguhan	128.153.222	23d,23f	(151.447.911)	*Deferred*
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITY	**3.908.469.857**		**3.176.145.276**	***INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Item that will not be reclassified to profit or loss***
Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto setelah pajak	823.295.840	35	94.351.746	*Remeasurements of defined benefit plans - net off tax*
Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	87.470.875	35	(47.180.224)	*Change in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income*
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				***Item that will be reclassified to profit or loss***
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	198.045.650	1e,35	13.379.913	*Exchange differences due to financial statements translation*
Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	(2.820.468.471)	35	-	*Effective portion of gains and losses on hedging instrument in relation to cash flow hedge*
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITY	**2.196.813.751**		**3.236.696.711**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,*			
	2022	**Catatan/ Notes**	**2021**	
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***INCOME (LOSS) FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	3.772.545.951		3.292.133.734	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	135.923.906	2c	(115.988.458)	*Non-controlling interests*
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY*	**3.908.469.857**		**3.176.145.276**	***INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT***
Penyesuaian atas laba *merging entity*:				*Adjustment of merging entity's profit:*
Pemilik entitas induk	-		(2.280.313.686)	*Owner of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali	-	2c	130.572.397	*Non-controlling interests*
	-		(2.149.741.289)	
LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***INCOME FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	3.772.545.951		1.011.820.048	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	135.923.906	2c	14.583.939	*Non-controlling interests*
LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY*	**3.908.469.857**		**1.026.403.987**	***INCOME FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,*			
	2022	**Catatan/ Notes**	**2021**	
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	2.060.889.845		3.351.776.051	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	135.923.906	2c,36	(115.079.340)	*Non-controlling interests*
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY*	**2.196.813.751**		**3.236.696.711**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT***
Penyesuaian atas laba komprehensif lainnya *merging entity*:				*Adjustment of merging entity's other comprehensive income:*
Pemilik entitas induk	-		(2.170.608.365)	*Owner of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali	-	2c	129.586.062	*Non-controlling interests*
	-		(2.041.022.303)	
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	2.060.889.845		1.181.167.686	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	135.923.906	2c	14.506.722	*Non-controlling interests*
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY*	**2.196.813.751**		**1.195.674.408**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT***
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	92.976	2v	81.136	***BASIC EARNINGS PER SHARE*** *(full amount)*
LABA PER SAHAM DILUSIAN (nilai penuh)	91.783	2v	80.095	***DILUTED EARNINGS PER SHARE*** *(full amount)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2022
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

		Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Equity attributable to owners of the parent entity*														
										Penghasilan komprehensif lain/*Other comprehensive income*						
	Catatan/ *Notes*	Modal Saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid share capital*	Modal Donasi/ *Donation Capital*	Tambahan modal Disetor/ *Additional paid-in Capital*	Komponen Ekuitas Lainnya/ *Other Equity Component*	Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali/ *Difference in value of transactions with non-controlling interest*	Ekuitas *merging entities*/ *Equity merging entities*	Saldo laba/*Retained earnings*		Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ *Exchange difference due to financial statement translation*	Pengukuran kembali program imbalan pasti/ *Remeasurements of defined benefit plans*	Perubahan nilai wajar aset keuangan melalui penghasilan komprehensif lain/ *Changes in fair value of financial assets through other comprehensive income*	Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas/ *Effective portion of gains and losses on hedging instrument in cash flow hedge*	Neto/ *Net*	Kepentingan nonpengendali/ *Non-controlling interests*	Ekuitas - neto/ *Equity - net*	
								Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*							
Saldo per 31 Desember 2020		**1.444.029.000**	**26.825.982**	**(205.004.707)**	**-**	**836.072.934**	**21.516.406.212**	**15.021.058.681**	**993.019.548**	**291.374.572**	**(1.303.892.031)**	**(107.028.761)**	**-**	**38.512.861.430**	**1.761.969.888**	**40.274.831.318**	***Balance as of December 31, 2020***
Penambahan modal berdasarkan penetapan nilai definitif	1f,32	-	-	32.100.516.121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.100.516.121	-	32.100.516.121	*Additional capital based on determination of definitive value*
Pembagian dividen kas	34	-	-	-	-	-	-	-	(560.000.000)	-	-	-	-	(560.000.000)	-	(560.000.000)	*Distribution of cash dividend*
Cadangan umum	34	-	-	-	-	-	-	624.857.249	(624.857.249)	-	-	-	-	-	-	-	*General reserve*
Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	1f,32	-	-	(33.312.976.996)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(33.312.976.996)	-	(33.312.976.996)	*Difference arising from business combination of entites under common control*
Penghasilan komprehensif lain	35	-	-	-	-	-	-	-	-	13.379.913	93.442.628	(47.180.224)	-	59.642.317	909.118	60.551.435	*Other comprehensive income*
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	3.292.133.734	-	-	-	-	3.292.133.734	(115.988.458)	3.176.145.276	*Income for the year*
Laba proforma *merging entity*		-	-	-	-	-	676.401.829	-	-	-	-	-	-	676.401.829	(65.629.646)	610.772.183	*Proforma income from merging entity*
Pembalikan proforma ekuitas *merging entity*		7.031.038.000	-	289.142.684	1.466.121	-	(22.192.808.041)	14.279.598.858	1.334.613.197	-	(1.002.599.688)	-	-	(259.548.869)	(37.181.029)	(296.729.898)	*Reversal of proforma equity merging entity*
Saldo per 31 Desember 2021		**8.475.067.000**	**26.825.982**	**(1.128.322.898)**	**1.466.121**	**836.072.934**	**-**	**29.925.514.788**	**4.434.909.230**	**304.754.485**	**(2.213.049.091)**	**(154.208.985)**	**-**	**40.509.029.566**	**1.544.079.873**	**42.053.109.439**	***Balance as of December 31, 2021***
Penambahan modal berdasarkan penetapan nilai definitif	1f,32	32.100.517.000	-	(32.100.517.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Additional capital based on determination of definitive value*
Pembagian dividen kas	34	-	-	-	-	-	-	-	(1.316.854.000)	-	-	-	-	(1.316.854.000)	-	(1.316.854.000)	*Distribution of cash dividend*
Cadangan umum	34	-	-	-	-	-	-	1.975.279.734	(1.975.279.734)	-	-	-	-	-	-	-	*General reserve*
Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	1f,32	-	-	(129.208.552)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(129.208.552)	-	(129.208.552)	*Difference arising from business combination of entites under common control*
Selisih nilai transaksi dengan pihak nonpengendali	33	-	-	-	-	832.137	-	-	-	-	-	-	-	832.137	-	832.137	*Difference in value of transactions with non-controlling interest*
Penghasilan komprehensif lain	35	-	-	-	-	-	-	-	-	198.045.650	823.295.840	87.470.875	(2.820.468.471)	(1.711.656.106)	-	(1.711.656.106)	*Other comprehensive income*
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	3.772.545.951	-	-	-	-	3.772.545.951	135.923.906	3.908.469.857	*Income for the year*
Saldo per 31 Desember 2022		**40.575.584.000**	**26.825.982**	**(33.358.048.450)**	**1.466.121**	**836.905.071**	**-**	**31.900.794.522**	**4.915.321.447**	**502.800.135**	**(1.389.753.251)**	**(66.738.110)**	**(2.820.468.471)**	**41.124.688.996**	**1.680.003.779**	**42.804.692.775**	***Balance as of December 31, 2022***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW
For the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,*			
	2022	**Catatan/ Notes**	**2021**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	31.671.281.588		30.056.470.288	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya	(14.592.877.976)		(14.481.551.070)	*Payment to contractors, suppliers and others*
Pembayaran kepada karyawan	(5.662.070.239)		(5.661.556.853)	*Payment to employees*
Pembayaran pajak penghasilan	(1.396.604.110)		(1.319.862.044)	*Payment for income taxes*
Penghasilan bunga	132.629.570		156.818.218	*Interest received*
Penerimaan pajak	949.549.254		1.078.288.509	*Tax receipt*
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**11.101.908.087**		**9.828.607.048**	***Net Cash Provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan dividen	366.126.855		322.271.932	*Receipt of dividend*
Laba (rugi) penjualan aset tetap	37.117.004		(1.969.868)	*Gain (loss) on disposal assets*
Perolehan aset tetap dan aset takberwujud	(6.511.011.701)		(6.908.699.330)	*Acquisition of fixed assets and intangible assets*
Pencairan investasi jangka pendek	2.245.190.808		5.742.520.260	*Withdrawal of short-term investments*
Penyertaan saham	(395.591.435)		(2.674.308.254)	*Investment in shares*
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(4.258.168.469)**		**(3.520.185.260)**	***Net Cash Used in Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Setoran modal	-		1.201.500.000	*Capital injection*
Pembayaran pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya	(4.221.618.857)		(4.345.416.914)	*Payment of bank loans and other financial institution*
Penerimaan pinjaman	1.983.144.166		1.611.983.309	*Receipt of loans*
Pembayaran bunga	(2.512.723.161)		(2.752.569.073)	*Interest payment*
Pembayaran liabilitas sewa	(138.892.333)	16	(162.741.729)	*Payments of lease liabilities*
Pembayaran dividen	(1.316.854.000)	34	(560.000.000)	*Payment of dividend*
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	**(6.206.944.185)**		**(5.007.244.407)**	***Net Cash Used in Financing Activities***
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**636.795.433**		**1.301.177.381**	***NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	38.456.803		8.154.416	*Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**12.922.388.587**	4	**11.613.056.790**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**13.597.640.823**	4	**12.922.388.587**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2022
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (dahulu "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II" atau "Pelindo II") ("Perusahaan" atau "PT Pelabuhan Indonesia (Persero)") pada awalnya didirikan sebagai Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 15 Tahun 1983 juncto PP No. 5 Tahun 1985. Perum Pelabuhan II merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Berdasarkan PP No. 57 Tahun 1991, Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 3 tanggal 1 Desember 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 tanggal 17 Juni 1993. Sejak terbentuknya Kementerian BUMN pada tahun 1998, Perusahaan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta No.2 Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., tanggal 9 Februari 2022 tentang perubahan struktur permodalan dan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-0014773.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022.

Berdasarkan Akta No. 09 tanggal 21 Agustus 2019, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (formerly "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II" or "Pelindo II") ("the Company" or "PT Pelabuhan Indonesia (Persero)") was initially established as Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II based on Government Regulation No. 15 of 1983 as amended by Government Regulation No. 5 of 1985. Perum Pelabuhan II was a State-Owned Enterprise ("SOE") under the supervision of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

Based on PP No. 57 of 1991, Perum Pelabuhan II underwent a transfer of form to become a Limited Liability Company (Persero). As a follow-up to the PP, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established based on Deed of Notary Imas Fatimah, S.H., No. 3 dated December 1, 1992. This establishment deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by Decree no. C2-4754.HT.01.01. TH.93 dated June 17, 1993. Since the formation of the Ministry of SOE in 1998, the Company has been under the guidance of the Ministry of BUMN. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently based on Notarial Deed No.2 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated February 9, 2022 regarding changes in capital structure and changes to the Articles of Association of the Company. The Deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-0014773.AH.01.02 Tahun 2022 dated March 1, 2022.

Based on the Notarial Deed No. 09 dated August 21, 2019, the Government of the Republic of Indonesia which in this case represented by the Minister of SOEs to changes the type of shares which originally without series, changed to be consisted of Series A Dwiwarna shares and Series B shares.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Selain lingkup usaha tersebut di atas, Perusahaan dapat pula mendirikan dan menjalankan usaha lain yang memiliki hubungan dengan usaha kepelabuhanan.

Saat ini, Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Grup") bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi jasa kepelabuhanan, logistik, jasa informasi teknologi, jasa pengerukan, jasa kepelatihanan dan lainnya.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia.

Entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") melakukan penggabungan ke dalam Perusahaan, dengan Perusahaan sebagai perusahaan hasil penggabungan (Catatan 1g).

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

The Company's purposes and objectives are managing and operating port services and optimizing resource utilization owned by the Company to produce competitive and high quality goods and/or services to gain profits in order to increase the Company's value by applying the limited liability company principles.

Other than the above-mentioned scope of activities, the Company may establish and manage other businesses related to port business.

Currently, the Company and its subsidiaries (collectively referred to hereafter as "the Group") are involved in several businesses consisting of port services, logistic, information technology services, dredging services, training services and others.

The Company's head office is located at Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia.

The Company's parent and ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

On October 1, 2021, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") and Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") merged to the Company, with the Company as the surviving entity (Note 1g).

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Sehubungan dengan penggabungan tersebut di atas, Perusahaan mengelola 4 (empat) Regional yang terdiri dari:

Regional 1
Untuk menjalankan kegiatan operasinya, Regional 1 memiliki 13 (tiga belas) pelabuhan cabang. Wilayah kerja cabang-cabang operasional pelabuhan adalah sebagai berikut:

Cabang Kelas Utama	Belawan	*Prime Class Branch*
Cabang Kelas I	Dumai	*Class I Branches*
Cabang Kelas II-A	Pekanbaru	*Class II-A Branches*
Cabang Kelas II-B	Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, dan/*and* Kuala Tanjung	*Class II-B Branches*
Cabang Kelas III	Batam, dan/*and* Sibolga	*Class III Branches*
Cabang Kelas IV	Malahayati, Lhokseumawe, dan/*and* Tanjung Balai Asahan	*Class IV Branches*
Cabang Kelas V	Tembilahan dan/*and* Gunung Sitoli	*Class V Branches*

Regional 2
Regional 2 mengelola 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan yang terdiri dari:

Cabang Pelabuhan Utama	Tanjung Priok, Banten dan/*and* Panjang	*Main Port Branches*
Cabang Pelabuhan Madya	Teluk Bayur, Pontianak, Palembang, Bengkulu, Jambi dan/*and* Cirebon	*Medium Port Branches*
Cabang Pelabuhan Pratama	Pangkal Balam, Sunda Kelapa dan/*and* Tanjung Pandan	*Small Port Branches*

Regional 3
Regional 3 mengelola 3 (tiga) kantor regional yang meliputi 19 (sembilan belas) Terminal Pelabuhan (Cabang) yang terdiri dari:

Sub-regional	Cabang/*Branch*	*Sub-region*
Jawa		*Java*
Cabang Kelas Utama	Tanjung Perak (Kalimas dan/*and* GSN)	*Prime Class Branch*
Cabang Kelas I B	Tanjung Emas	*Class I Branch*
Cabang Kelas II A	Gresik	*Class II A Branch*
Cabang Kelas III B	Tanjung Tembaga, Tegal dan/*and* Kalianget	*Class III B Branch*
Bali Nusra		*Bali Nusra*
Cabang Kelas II B	Benoa	*Class II B Branch*
Cabang Kelas III A	Lembar	*Class III A Branch*
Cabang Kelas III B	Labuan Bajo, Bima, Celukan Bawang Maumere, Badas, Waingapu, Kalabahi dan/*and* Ende Ippi	*Class III B Branch*

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

In relation to the merger as mentioned above, the Company manages 4 (four) Regions as follows:

Region 1
In providing its services, Region 1 has 13 (thirteen) port branches. Work areas of operational branches of port are as follows:

Region 2
Region 2 manages 12 (twelve) Port Branches as follows:

Region 3
Region 3 manages 3 (three) regional offices which includes 19 (nineteen) Port Terminals (Branches) as follows:

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Regional 3 (lanjutan)
Regional 3 mengelola 3 (tiga) kantor regional yang meliputi 19 (sembilan belas) Terminal Pelabuhan (Cabang) yang terdiri dari (lanjutan):

Sub-regional	Cabang/*Branch*	
Kalimantan		*Kalimantan*
Cabang Kelas II A	Kotabaru	*Class II A Branch*
Cabang Kelas II B	Batulicin	*Class II B Branch*
Cabang Kelas III B	Pulang Pisau	*Class III B Branch*

Regional 4
Regional 4 mengelola 22 (dua puluh dua) cabang yang terdiri dari:

Cabang Kelas Utama	Makassar	*Main Branch*
Cabang Kelas Satu	Balikpapan, Samarinda, Bitung, Sorong, Ambon, Jayapura	*First Class Branch*
Cabang Kelas Dua	Tarakan, Pantoloan, Ternate, Kendari dan/*and* Bontang	*Second Class Branch*
Cabang Kelas Tiga	Nunukan, Parepare, Biak, Manokwari, Merauke, dan/*and* Tanjung Redep	*Third Class Branch*
Cabang Kelas Empat	Gorontalo, Tolitoli, Fakfak dan/*and* Manado	*Fourth Class Branch*

Berikut adalah ketentuan kepelabuhanan dan perizinan signifikan sehubungan dengan operasional pelabuhan:

a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tanggal 7 Mei 2008.
b. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, tanggal 20 Oktober 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015.
c. Surat Menteri Perhubungan No. HK.003/1/11. Phb 2011 tanggal 6 Mei 2011 perihal Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran terhadap PT Pelabuhan Indonesia I, II, II dan IV (Persero).
d. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.
e. Peraturan Menteri Perhubungan No. 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 121 Tahun 2018.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

Region 3 (continued)
Region 3 manages 3 (three) regional offices which includes 19 (nineteen) Port Terminals (Branches) as follows (continued):

Region 4
Region 4 manages 22 (twenty two) branches as follows:

The following are significant port regulations and permits in relation to port operations:

a. Act No. 17 Tahun 2008 regarding Shipping dated May 7, 2008.
b. Government Regulation No. 61 Tahun 2009 regarding Port dated October 20, 2009, as amended by Government Regulation No. 64 Year 2015.
c. Minister of Transportation's Letter No. HK.003/1/11. Phb 2011 dated May 6, 2011 regarding the application of Act No. 17 Tahun 2008 for Shipping Affairs for PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero).
d. Government Regulation No. 15 Tahun 2016 regarding Type and Tariff on Non-Tax Revenues types that apply to the Ministry of Transportation.
e. Regulation of the Minister of Transportation No. 72 Tahun 2017 on Types, Structures, Classes, and Mechanisms for Determining Port Services Rates as amended by the Regulation of the Minister of Transportation No. 121 Tahun 2018.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Berikut adalah ketentuan kepelabuhanan dan perizinan signifikan sehubungan dengan operasional pelabuhan: (lanjutan)

f. Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 166 Tahun 2015.
g. Peraturan Menteri Perhubungan No. 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
h. Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
i. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.KP 133 Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Sebagai Badan Usaha Pelabuhan ("BUP").
j. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 936 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai BUP
k. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1121 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.
l. Keputusan Menteri Perhubungan No. 10/1/30-Pelabuhan/PMDN/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan ("BUP").

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

The following are significant port regulations and permits in relation to port operations: (continued)

f. Regulation of the Minister of Transportation No. 15 Tahun 2015 on Concessions and Other Forms of Cooperation between the Government and Business Entity Ports Sector as amended by the Regulation of the Minister of Transportation No. 166 Tahun 2015.
g. Regulation of the Minister of Transporation No. 57 Tahun 2020 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Transportation No. 51 Tahun 2015 concerning the Operation of Seaports.
h. Regulation of the Minister of Transportation No. 77 Tahun 2016 on Implementation Guidelines Type and Tariff for Non Tax Revenue that apply At the Directorate General of Sea Transportation.
i. Decree of the Minister of Transportation of Republic Indonesia No.KP 133 Tahun 2011 dated March 2, 2011 regarding issuance of business permit to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as a Port Operation Entity ("BUP").
j. Decision of Minister of Transportation No. KP 936 Tahun 2012 regarding the Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as BUP
k. Decision of Minister of Transportation No. KP 1121 Tahun 2012 regarding Granting of Permit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to Conduct Pilotage Service on Sea Port and Certain Special Terminal.
l. Decree of Minister of Transportation No. 10/1/30-Pelabuhan/PMDN/2018 regarding the Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) as Port Operation Entity ("BUP").

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Berikut adalah ketentuan kepelabuhanan dan perizinan signifikan sehubungan dengan operasional pelabuhan: (lanjutan)

m. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 603 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.
n. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 27 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan.
o. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 730 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.
p. Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelolaan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ("NIB") kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditetapkan tanggal 25 September 2018.
q. Perjanjian konsesi (Catatan 48).

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

The following are significant port regulations and permits in relation to port operations: (continued)

m. Decree of Minister of Transportation No. KP 603 Tahun 2012 regarding Granting of Permit to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) to Conduct Pilotage Service on Sea Port and Certain Special Terminal.
n. Decision of Minister of Transportation No. KP 27 Tahun 2011 regarding the Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) as Port Operation Entity.
o. Decision of Minister of Transportation No. KP 730 Tahun 2012 regarding Granting of Permit to PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) to Conduct Pilotage Service on Sea Port and Certain Special Terminal.
p. The Government of the Republic of Indonesia c.q OSS Organizing Management Institution based on the provisions of Article 24 paragraph 1 of government regulation number 24 year 2018 concerning electronic integrated business licensing services ("NIB") to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which are set on September 25, 2018.
q. Concession agreement (Note 48).

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-206/MBU/09/2022 tanggal 20 September 2022, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan,S.H.,M.Kn No. 15 tanggal 17 Oktober 2022, Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan diantaranya menetapkan perubahan nomenklatur serta susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut (Catatan 51):

1. GENERAL (continued)

b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees

Board of Commissioners and Directors

Based on The Decree of The Minister of SOEs No. SK-206/MBU/09/2022 dated September 20, 2022 which stated on Notarial Deed Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn. No.15 dated October 17, 2022, the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company stipulated among other changes of nomenclature and the Board of Commisioners and Directors as folllows (Note 51):

31 Desember 2022		***December 31, 2022***
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Plt. Komisaris Utama/ Independen	Marsetio	*Acting President/Independent Commissioner*
Komisaris	Arif Toha Tjahjagama	*Commissioner*
Komisaris	Didi Sumedi	*Commissioner*
Komisaris	Sudung Situmorang	*Commissioner*
Komisaris Independen	Antonius Rainier Haryanto	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Heru Sukanto	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Muchtar Luthfi Mutty	*Independent Commissioner*
Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Arif Suhartono	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Hambra	*Vice President Director*
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Mega Satria	*Director of Finance and Risk Management*
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	Ihsanuddin Usman	*Director of Human Resources and General Affair*
Direktur Strategi	Prasetyo	*Strategy Director*
Direktur Investasi	Boy Robyanto	*Investment Director*
Direktur Pengelola	Putut Sri Muljanto	*Managing Director*

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 dan No. SK-335/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan,S.H.,M.Kn No.08 dan No. 09 tanggal 6 Oktober 2021, Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan diantaranya menetapkan perubahan nomenklatur serta susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Based on The Decree of The Minister of SOEs No. SK-334/MBU/10/2021 and No.SK-335/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 which stated on Notarial Deed Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn. No.08 and No. 09 dated October 6, 2021, the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company stipulated among other changes of nomenclature and the Board of Commisioners and Directors as folllows:

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees (continued)

Board of Commissioners and Directors (continued)

31 Desember 2021		***December 31, 2021***
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Plt. Komisaris Utama/ Independen	Marsetio	*Acting President/Independent Commissioner*
Komisaris	Raden Agus Haryoto Purnomo	*Commissioner*
Komisaris	Didi Sumedi	*Commissioner*
Komisaris	Sudung Situmorang	*Commissioner*
Komisaris Independen	Antonius Rainer Haryanto	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Heru Sukanto	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Muchtar Luthfi Mutty	*Independent Commissioner*
Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Arif Suhartono	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Hambra	*Vice President of Director*
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Mega Satria	*Director of Finance and Risk Management*
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	Ihsanuddin Usman	*Director of Human Resources and General Affair*
Direktur Strategi	Prasetyo	*Strategy Director*
Direktur Keuangan	Boby Robyanto	*Investment Director*
Direktur Pengelola	Putut Sri Muljanto	*Managing Director*

Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan

Susunan Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Audit Committee and Corporate Secretary

The Company's Audit Committee and Corporate Secretary as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Heru Sukanto	*Head*
Wakil Ketua	Didi Sumedi	*Deputy Head*
Anggota	Ahmad Zakie Mubarok	*Member*
Anggota	Sofia Chairunnisa	*Member*
Sekretaris Perusahaan	Ali Mulyono	***Corporate Secretary***

Karyawan

Total karyawan tetap Grup pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebanyak 9.790 dan 10.109 karyawan (tidak diaudit).

Employees

Total permanent employees of the Group as of December 31, 2022 and 2021 are 9,790 and 10,109 employees, respectively (unaudited).

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries, Associates and Joint Operation

As of December 31, 2022 and 2021, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows:

Nama Perusahaan/ *Company name*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business activities*	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ Dec 31, 2022	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ Dec 31, 2021	Tahun pendirian/ *Year of establishment*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ Dec 31, 2022	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ Dec 31, 2021
Kepemilikan langsung/ *Direct ownership*							
PT PelindoTerminal Petikemas ("SPTP")	Surabaya	Penyelenggaraan dan pengusahaan jasa maritim/ *Provision and operation of maritime services*	99,997%	100,00%	2013	14.978.153.302	150.288.574
PT Pelindo Jasa Maritim ("SPJM")	Makassar	Penyelenggaraan dan pengusahaan jasa maritim/ *Provision and operation of maritime services*	99,995%	99,90%	2021	4.824.128.424	125.153.051
PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT")	Medan	Pelayanan jasa terminal non-petikemas/ *Non-container terminal services*	99,988%	99,90%	2021	4.483.925.777	149.135.356
PT Pelindo Solusi Logistik ("SPSL")	Jakarta	Jasa logistik/*Logistic services*	99,988%	99,90%	2021	19.171.437.957	83.154.426
PT Prima Husada Cipta Medan ("PHCM")	Medan	Layanan jasa kesehatan/ *Health care services*	99,69%	99,70%	2016	59.751.417	71.146.634
PT Electronic Data Interchange Indonesia ("EDII")	Jakarta	Sistem informasi/ *Information system*	51,00%	51,00%	1995	48.170.376	63.663.137
PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")	Jakarta	Investasi pasar modal dan konsultan bisnis/ *Investment in stock exchange and business consultant*	99,00%	99,00%	2017	1.083.767.903	1.035.473.853
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS")	Jakarta	Sistem informasi/ *Information system*	99,00%	99,00%	2012	256.625.377	163.124.440
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia ("PMLI")	Jakarta	Jasa pelatihan dan pendidikan maritim dan logistik/*Maritime and logistic education services*	99,00%	99,00%	2013	144.527.982	93.462.940
PT Pelindo Daya Sejahtera ("PDS")	Surabaya	Layanan penyedia jasa tenaga kerja/ *Human resources services*	90,00%	90,00%	2008	357.487.370	210.558.102
PT Prima Multi Terminal ("PMT")	Medan	Terminal petikemas dan konvensional/ *Container and multicargo terminal*	97,73%	55,00%	2014	3.705.299.176	3.713.797.403
Kepemilikan Tidak Langsung/*Indirect Ownership*							
Dimiliki melalui/*Owned through* SPTP							
PT IPC Terminal Petikemas ("IPC TPK")	Jakarta	Terminal petikemas dan konvensional/ *Container and multicargo terminal*	99,00%	99,00%	2013	1.504.100.163	1.389.731.399
PT Prima Terminal Petikemas ("PTP1")	Medan	Layanan terminal petikemas/ *Container port services*	100,00%	70,00%	2013	3.128.596.698	3.206.686.441
PT Terminal Teluk Lamong ("TTL")	Surabaya	Layanan terminal petikemas dan curah kering/ *Container And dry bulk port services*	99,50%	99,50%	2013	767.009.334	797.343.088
PT Terminal Petikemas Surabaya ("TPS")	Surabaya	Layanan terminal petikemas/ *Container port services*	99,50%	99,50%	1999	2.444.133.471	2.651.990.612
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia ("BJTI")	Surabaya	Layanan terminal petikemas/ *Container port services*	96,84%	96,84%	2002	5.073.110.916	4.310.583.419
PT Kaltim Kariangau Terminal ("KKT")	Balikpapan	Layanan terminal petikemas/ *Container port service*	50,00%	50,00%	2012	193.975.803	160.170.950

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

As of December 31, 2022 and 2021, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows: (continued)

Nama Perusahaan/ *Company name*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business activities*	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ Dec 31, 2022	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ Dec 31, 2021	Tahun pendirian/ *Year of establishment*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ Dec 31, 2022	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ Dec 31, 2021
Kepemilikan Tidak Langsung/*Indirect Ownership* (lanjutan/*continued*)							
Dimiliki melalui/*Owned through* SPJM							
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia ("JPPI")	Jakarta	Jasa peralatan pelabuhan/*Port equipment services*	99,00%	99,00%	2012	227.340.873	225.749.31
PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("JAI")[ii]	Jakarta	Penyedia jasa transportasi laut/ *Ship transportation services provider*	76,89%	76,89%	2013	1.488.208.065	1.449.715.963
PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI")	Jakarta	Penyedia energi listrik dan air bersih/ *Electricity provider and treated water*	55,00%	55,00%	2012	182.774.864	191.234.589
PT Pengerukan Indonesia ("Rukindo")	Jakarta	Pengerukan alur/ *Dredging*	99,91%	99,93%	1991	381.249.720	430.624.904
PT Pelindo Marine Service ("PMS")	Surabaya	Layanan jasa kapal/ *Shipping services*	98,23%	98,23%	2011	2.136.902.988	1.670.790.972
PT Equiport Inti Indonesia ("EII")	Makassar	Jasa pemeliharaan/ *Maintenance services*	99,29%	99,29%	2012	105.766.256	115.512.217
Dimiliki melalui/*Owned through* SPMT							
PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTPR")	Jakarta	Terminal petikemas dan konvensional/ *container and multicargo terminal*	99,00%	99,00%	2013	1.338.970.877	1.275.310.698
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IKT") [ii]	Jakarta	Terminal kendaraan/ *Car terminal*	71,28%	71,28%	2012	2.191.828.371	1.960.929.214
PT Terminal Curah Semarang ("TCS")	Semarang	Jasa pelayanan curah cair dan gas/*Liquid bulk and gas services*	100,00%	00,00%	2015	373.224	847.354
Dimiliki melalui/*Owned through* SPSL							
PT Akses Pelabuhan Indonesia ("API")	Jakarta	Penyertaan saham pada proyek Jalan Tol/*Investment in Toll and access Road Project*	99,79%	99,79%	2014	12.501.180.421	3.287.110.395
PT Menara Maritim Indonesia ("MMI")	Jakarta	Jasa pengelola properti/*Building management service*	99,99%	99,99%	2018	988.445.644	713.773.830
PT Prima Pengembangan Kawasan ("PPK")	Medan	Pengembangan kawasan/*Region developer*	90,00%	90,00%	2015	902.622.818	900.317.677
PT Prima Indonesia Logistik ("PIL")	Medan	Jasa logistik/*Logistic service*	99,67%	99,67%	2014	331.280.719	358.829.673
PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")	Jakarta	Jasa logistik/*Logistic services*	99,00%	99,00%	2002	908.266.379	865.710.890
PT Nusantara Terminal Services ("NTS")	Makassar	Bongkar muat/*Loading unloading*	99,16%	99,16%	2013	90.774.652	79.401.311

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

As of December 31, 2022 and 2021, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows: (continued)

Nama Perusahaan/ *Company name*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business activities*	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ Dec 31, 2022	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ Dec 31, 2021	Tahun pendirian/ *Year of establishment*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ Dec 31, 2022	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ Dec 31, 2021
Kepemilikan Tidak Langsung/*Indirect Ownership* (lanjutan/*continued*)							
Dimiliki melalui/*Owned through* PDS							
PT Tanjung Emas Daya Sejahtera ("TEDS")	Surabaya	Kegiatan tally/ *Tally activity*	99,00%	99,00%	2014	25.971.645	20.843.815
Dimiliki melalui/*Owned through* TTL							
PT Lamong Energi Indonesia ("LEGI")	Surabaya	Penyediaan energi/ *Energy provider*	99,00%	99,00%	2014	189.725.126	179.967.734
Dimiliki melalui/*Owned through* TPS							
PT Pelindo 3 Terminal Peti Kemas	Surabaya	Jasa terminal petikemas/ *Container port services*	99,00%	99,00%	2016	675.207	671.120
Dimiliki melalui/*Owned through* BJTI							
PT Berkah Manyar Sejahtera ("BMS")	Surabaya	Layanan terminal/ *Port services*	60,00%	60,00%	2012	1.896.823.463	1.291.838.128
PT Pelindo Properti Indonesia ("PPI3")	Surabaya	Pengelolaan properti/ *Property management*	99,93%	99,93%	2014	198.754.433	172.213.748
PT Berkah Industri Mesin Angkat ("BIMA")	Surabaya	Jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan pelabuhan/ *Port equipment equipment maintenance and repair service*	90,00%	90,00%	2015	234.022.019	202.830.021
Dimiliki melalui/*Owned through* PMS							
PT Alur Pelayaran Barat Surabaya ("APBS")	Surabaya	Jasa pengerukan, reklamasi dan pengelolaan alur pelayaran/ *Dredging, reclamation service and management of shipping channel*	93,00%	93,00%	2014	555.094.927	586.152.148
PT Pelindo Energi Logistik ("PEL")	Surabaya	Perdagangan jasa/ *Trading services*	98,90%	98,90%	2014	611.636.947	494.780.481
PT Berkah Multi Cargo ("BMC")	Surabaya	Jasa angkutan multi moda/ *Multi-modal transportation services*	99,80%	99,80%	2015	117.567.958	115.931.443
Dimiliki melalui/*Owned through* API							
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP") (Catatan 1d/*Note 1d*)	Jakarta	Operasi jalan tol/ *Toll road operation*	100,00%	100,00%	2006	12.443.904.147	10.807.877.590
Dimiliki melalui/*Owned through* PIL							
PT Prima Multi Peralatan ("PMP")	Medan	Jasa pemeliharaan dan perbaikan/ *Equipment maintenance and repair services*	99,00%	99,00	2019	67.850.590	67.512.708

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

As of December 31, 2022 and 2021, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows: (continued)

Nama Perusahaan/ *Company name*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business activities*	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ Dec 31, 2022	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ Dec 31, 2021	Tahun pendirian/ *Year of establishment*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ Dec 31, 2022	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ Dec 31, 2021
Kepemilikan Tidak Langsung/*Indirect Ownership* (lanjutan/*continued*)							
Dimiliki melalui/*Owned through* NTS							
PT Intan Sejahtera Utama ("ISMA")	Makassar	Penyediaan jasa ketenagakerjaan/ *Employment services provider*	99,60%	99,60%	2019	60.384.324	30.695.642
Entitas asosiasi/*Associate entities*							
PT Rumah Sakit Pelabuhan ("RSP") [k]	Jakarta	Rumah sakit/ *Hospital*	32,88%	32,88%	1999	576.419.708	704.687.910
PT Ambang Barito Nusapersada ("Ambapers")	Banjarmasin	Pengelolaan alur pelayanan Sungai Barito/*Management of Shipping Barito River*	40,00%	40,00%	2004	176.137.893	129.159.146
PT Jasa Marga Bali Tol ("JBT")	Bali	Pengelolaan jalan tol/ *Toll road operator*	13,86%	13,86%	2011	1.909.164.000	1.827.452.099
PT Pelindo Husada Citra ("PHC")	Surabaya	Layanan jasa kesehatan/ *Health care services*	31,73%	31,73%	1999	450.973.393	492.692.215
PT Jakarta International Container Terminal ("JICT") (Catatan 49e/ *Note 49e)* [v]	Jakarta	Terminal petikemas/ *Container terminal*	51,00%	48,90%	1999	17.437.073.372	16.811.477.500
Dimiliki melalui/*Owned through* IPC TPK							
PT New Priok Container Terminal One ("NPCT1") (Catatan 49c/ *Note 49c*) [l]	Jakarta	Terminal petikemas/ *Container terminal*	51,00%	51,00%	2014	12.637.252.244	3.725.893.761
Dimiliki melalui/*Owned through* BJTI							
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera ("BKMS")	Surabaya	Pengelolaan kawasan industri JIIPE/*JIIPE industrial estate management*	40,00%	40,00%	2012	8.068.040.527	7.111.460.493
PT Terminal Nilam Utara ("TNU")	Surabaya	Layanan terminal curah cair dan gas/ *Liquid and gas bulk terminal service*	40,00%	40,00%	2013	383.033.880	392.687.318
PT Energi Manyar Sejahtera ("EMS")	Surabaya	Jasa pembangkit listrik/ *Power plant service*	30,00%	30,00%	2015	1.101.762	1.101.761
PT Prima Citra Nutrisi ("PCN")	Surabaya	Layanan jasa katering/ *Catering service*	30,00%	30,00%	2016	13.462.006	11.471.348
Dimiliki melalui/*Owned through* PEL							
PT Lamong Nusantara Gas ("LNG")	Surabaya	Pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian Terminal LNG Jawa Timur/ *Development, management and operation of LNG terminal in East Java*	49,00%	49,00%	2019	148.980.961	148.731.767

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

As of December 31, 2022 and 2021, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows: (continued)

Nama Perusahaan/ *Company name*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business activities*	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ Dec 31, 2022	% Kepemilikan/*Ownership percent* 31 Des/ Dec 31, 2021	Tahun pendirian/ *Year of establishment*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ Dec 31, 2022	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ Dec 31, 2021
Kepemilikan Tidak Langsung/*Indirect Ownership* (lanjutan/*continued*)							
Dimiliki melalui/*Owned through* PIL							
PT Prima Tangki Indonesia ("PTI")	Medan	Perdagangan dan pergudangan/ *Trading and warehousing*	20,00%	20,00%	2013	216.768.273	212.849.468
Operasi Bersama/*Joint Operation*							
Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja ("TPK Koja") (Catatan/ *Note* 49d)	Jakarta	Terminal petikemas/ *Container terminal*	54,91%	54,91%	1994	3.898.747.344	3.641.898.183
Manajemen Kerjasama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Koja ("MKO MTKI")	Gresik	Terminal kendaraan/ *Car terminal*	45,00%	45,00%	2015	2.751.810	3.048.669

i) Laporan keuangan NPCT1 tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan IPC TPK, karena IPC TPK tidak memiliki pengendalian atas NPCT1.

ii) Pada bulan Desember 2017, JAI menerbitkan saham baru sebanyak 1.215.506.500 saham atau 23% dari modal ditempatkan dan disetor JAI setelah penawaran umum perdana saham JAI di Bursa Efek Indonesia.

iii) Pada bulan Juli 2018, IKT menerbitkan saham baru sebanyak 509.147.700 saham atau 28% dari modal ditempatkan dan disetor IKT setelah penawaran umum perdana saham IKT di Bursa Efek Indonesia.

iv) Pada bulan Agustus 2020, Perusahaan melakukan penjualan saham RSP kepada PT Pertamina Bina Medika IHC sebesar 67% sehingga kepemilikan saham Perusahaan menjadi sebesar 32,88%, dan oleh karenanya, laporan keuangan RSP tidak dikonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian ini sejak pengendalian telah beralih ke PBM IHC.

v) Pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan mengakuisisi saham JICT dari Hutchison Ports Jakarta Pte Ltd (HPJ) sebanyak 9.300.917 lembar saham sehingga kepemilikan saham JICT oleh Perusahaan menjadi sebesar 51%. Laporan keuangan JICT tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perusahaan karena Perusahaan tidak memiliki pengendalian atas JICT.

i) The financial statements of NPCT1 is not consolidated into IPC TPK's financial statements, due to IPC TPK has no control over NPCT1.

ii) On December 2017, JAI issued new shares of 1,215,506,500 shares or 23% of JAI's issued and paid-up capital subsequent to the initial public offering at Indonesia Stock Exchange.

iii) On July 2018, IKT issued new shares of 509,147,700 shares or 28% of IKT's issued and paid-up capital subsequent to the initial public offering at Indonesia Stock Exchange.

iv) On August 2020, the Company sold shares of RSP to PT Pertamina Bina Medika IHC by 67%, bringing the Company's share ownership to 32.88%, and therefore, the financial statements of RSP have not been consolidated in the consolidated financial statements since control has been transferred to PBM IHC.

v) On March 30, 2022, the Company acquired JICT shares from Hutchison Ports Jakarta Pte Ltd (HPJ) *amounting to 9,300,917 shares, therefore, JICT shares ownership by the Company amounting to 51%. The financial statements of JICT is not consolidated into the Company's financial statements due to the Company has no control over JICT.*

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru

SPTP

Pada tanggal 3 Januari 2022, saham-saham milik Perusahaan berikut dialihkan kepada SPTP:

- Saham BJTI sebanyak 1.079.138 lembar saham atau setara dengan 96,84% dengan nilai nominal Rp1.079.138.000.000 (nilai penuh).
- Saham TPS sebanyak 254.489.274 lembar saham atau setara dengan 99,50% dengan nilai nominal Rp127.244.637.000 (nilai penuh).
- Saham TTL sebanyak 134.325 lembar saham atau setara dengan 99,50% dengan nilai nominal Rp134.325.000.000 (nilai penuh).
- Saham PTP1 sebanyak 855.724.000 lembar saham atau setara dengan 70,00% dengan nilai nominal Rp855.724.000.000 (nilai penuh).
- Saham KKT sebanyak 125 lembar saham atau setara dengan 50,00% dengan nilai nominal Rp62.500.000 (nilai penuh).
- Saham IPC TPK sebanyak 24.750 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp24.750.000.000 (nilai penuh).

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian BUMN melalui suratnya No. S-1048/MBU/12/2021 pada tanggal 30 Desember 2021. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, SPTP menerbitkan 1.079.138 saham baru, 127.244 saham baru, 134.325 saham baru, 855.724 saham baru, 62 saham baru dan 24.750 saham baru untuk Perusahaan dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing sebagai kompensasi pengalihan saham BJTI, TPS, TTL, PTP1, KKT dan IPC TPK dari Perusahaan kepada SPTP.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares

SPTP

On January 3, 2022, the following shares owned by the Company were transferred to SPTP:

- *BJTI shares amounting to 1,079,138 shares or equivalent to 96.84% with nominal value of Rp1,079,138,000,000 (full amount).*
- *TPS shares amounting to 254,489,274 shares or equivalent to 99.50% with nominal value of Rp127,244,637,000 (full amount).*
- *TTL shares amounting to 134,325 shares or equivalent to 99.50% with nominal value of Rp134,325,000,000 (full amount).*
- *PTP1 shares amounting to 855,724,000 shares or equivalent to 70.00% with nominal value of Rp855,724,000,000 (full amount).*
- *KKT shares amounting to 125 shares or equivalent to 50.00% with nominal value of Rp62,500,000 (full amount).*
- *IPC TPK shares amounting to 24,750 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp24,750,000,000 (full amount).*

The transfer of shares has been approved by the Ministry of SOE through its letter No. S-1048/MBU/12/2021 on December 30, 2021. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

In relation to such transfer of right of shares, SPTP issued 1,079,138 new shares, 127,244 new shares, 134,325 new shares, 855,724 new shares, 62 new shares and 24,750 new shares for the Company with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of BJTI, TPS, TTL, PTP1, KKT and IPC TPK shares from the Company to SPTP, respectively.

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

SPTP (lanjutan)

Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Januari 2022.

Menindaklanjuti surat Kementerian BUMN di atas, berdasarkan Akta No. 8 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, tanggal 27 April 2022, SPTP melakukan penerbitan 5.041.993 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp5.041.993.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan sebagai kompensasi penyesuaian nilai wajar saham entitas anak yang dialihkan dari Perusahaan ke SPTP. Nilai wajar saham entitas anak didasarkan pada laporan KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan, penilai independen, tanggal 31 Maret 2022. Akta tersebut telah diberitahunkan kepada oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0232830 Tahun 2022 tanggal 27 April 2022.

Pengalihan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dengan demikian, transaksi pengalihan saham tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan.

SPJM

Pada tanggal 3 Januari 2022, saham-saham milik Perusahaan berikut dialihkan kepada SPJM:

- Saham JAI sebanyak 4.063.504.600 lembar saham atau setara dengan 76,89% dengan nilai nominal Rp406.350.460.000 (nilai penuh).
- Saham JPPI sebanyak 2.475.000 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp24.750.000.000 (nilai penuh).
- Saham EII sebanyak 28.050 lembar saham atau setara dengan 99,29% dengan nilai nominal Rp28.050.000.000 (nilai penuh).

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

SPTP (continued)

The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by The Ministry of Law and Human Rights dated January 3, 2022.

To follow up the letter from the Ministry of SOE above, based on Deed No. 8 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, dated April 27, 2022, SPTP performed issuance of 5,041,993 new shares with nominal value of Rp5,041,993,000 which taken fully by the Company as a compensation for fair value adjustment of the subsidiaries' shares that were transferred from the Company to SPTP. The fair value of subsidiaries' shares were based on KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan report, an independent appraisal, dated March 31, 2022. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.03-0232830 Tahun 2022 dated April 27, 2022.

The transfers of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 38 (Revised 2012) concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore, the transfers of shares is recognized using the pooling of interest method.

SPJM

On January 3, 2022, the following shares owned by the Company were transferred to SPJM:

- *JAI shares amounting to 4,063,504,600 shares or equivalent to 76.89% with nominal value of Rp406,350,460,000 (full amount).*
- *JPPI shares amounting to 2,475,000 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp24,750,000,000 (full amount).*
- *EII shares amounting to 28,050 shares or equivalent to 99.29% with nominal value of Rp28,050,000,000 (full amount).*

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

SPJM (lanjutan)

Pada tanggal 3 Januari 2022, saham-saham milik Perusahaan berikut dialihkan kepada SPJM: (lanjutan)

- Saham EPI sebanyak 2.400.000 lembar saham atau setara dengan 55,00% dengan nilai nominal Rp24.000.000.000 (nilai penuh).
- Saham PMS sebanyak 305.000.000 lembar saham atau setara dengan 98,23% dengan nilai nominal Rp305.000.000.000 (nilai penuh).
- Saham Rukindo sebanyak 611.622 lembar saham atau setara dengan 99,91% dengan nilai nominal Rp611.622.000.000 (nilai penuh).

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian BUMN melalui suratnya No. S-1050/MBU/12/2021 pada tanggal 30 Desember 2021. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, SPJM menerbitkan 406.350 saham baru, 24.750 saham baru, 28.050 saham baru, 24.000 saham baru, 305.000 saham baru dan 611.622 saham baru untuk Perusahaan dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing sebagai kompensasi pengalihan saham JAI, JPPI, EII, EPI, PMS dan Rukindo dari Perusahaan kepada SPJM.

Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Januari 2022.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

SPJM (continued)

On January 3, 2022, the following shares owned by the Company were transferred to SPJM: (continued)

- *EPI shares amounting to 2,400,000 shares or equivalent to 55.00% with nominal value of Rp24,000,000,000 (full amount).*
- *PMS shares amounting to 305,000,000 shares or equivalent to 98.23% with nominal value of Rp305,000,000,000 (full amount).*
- *Rukindo shares amounting to 611,622 shares or equivalent to 99.91% with nominal value of Rp611,622,000,000 (full amount).*

The transfer of shares has been approved by the Ministry of SOE through its letter No. S-1050/MBU/12/2021 on December 30, 2021. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

In relation to such transfer of right of shares, SPJM issued 406,350 new shares, 24,750 new shares, 28,050 new shares, 24,000 new shares, 305,000 new shares and 611,622 new shares for the Company with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of JAI, JPPI, EII, EPI, PMS and Rukindo shares from the Company to SPJM, respectively.

The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by The Ministry of Law and Human Rights dated January 3, 2022.

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

SPJM (lanjutan)

Menindaklanjuti surat Kementerian BUMN di atas, berdasarkan Akta No. 7 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, tanggal 27 April 2022, SPJM melakukan penerbitan 1.318.372 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp1.318.372.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan sebagai kompensasi penyesuaian nilai wajar saham entitas anak yang dialihkan dari Perusahaan ke SPJM. Nilai wajar saham entitas anak didasarkan pada laporan KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan, penilai independen, tanggal 31 Maret 2022. Akta tersebut telah diberitahunkan kepada oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0232879 tanggal 27 April 2022.

Pengalihan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dengan demikian, transaksi pengalihan saham tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan.

SPMT

Pada tanggal 3 Januari 2022, saham-saham milik Perusahaan berikut dialihkan kepada SPMT:

- Saham IKT sebanyak 1.296.144.749 lembar saham atau setara dengan 71,28% dengan nilai nominal Rp129.614.474.900 (nilai penuh).
- Saham PTPR sebanyak 24.750 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp24.750.000.000 (nilai penuh).

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian BUMN melalui surat No. S-1049/MBU/12/2021 pada tanggal 30 Desember 2021. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

SPJM (continued)

To follow up the letter from the Ministry of SOE above, based on Deed No. 7 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, dated April 27, 2022, SPJM performed issuance of 1,318,372 new shares with nominal value of Rp1,318,372,000 which taken fully by the Company as a compensation for fair value adjustment of the subsidiaries' shares that were transferred from the Company to SPJM. The fair value of subsidiaries' shares were based on KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan report, an independent appraisal, dated March 31, 2022. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.03-0232879 Tahun 2022 dated April 27, 2022.

The transfers of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 38 (Revised 2012) concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore, the transfers of shares is recognized using the pooling of interest method.

SPMT

On January 3, 2022, the following shares owned by the Company were transferred to SPMT:

- *IKT shares amounting to 1,296,144,749 shares or equivalent to 71.28% with nominal value of Rp129,614,474,900 (full amount).*
- *PTPR shares amounting to 24,750 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp24,750,000,000 (full amount).*

The transfer of shares has been approved by the Ministry of SOE through its letter No. S-1049/MBU/12/2021 on December 30, 2021. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

SPMT (lanjutan)

Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, SPMT menerbitkan 129.614 saham baru dan 24.750 saham baru untuk Perusahaan dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing sebagai kompensasi pengalihan saham IKT dan PTPR dari Perusahaan kepada SPMT.

Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Januari 2022.

Menindaklanjuti surat Kementerian BUMN di atas, berdasarkan Akta No. 9 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, tanggal 27 April 2022, SPMT melakukan penerbitan 1.151.941 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp1.151.941.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan sebagai kompensasi penyesuaian nilai wajar saham entitas anak yang dialihkan dari Perusahaan ke SPMT. Nilai wajar saham entitas anak didasarkan pada laporan KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan, penilai independen, tanggal 31 Maret 2022. Akta tersebut telah diberitahunkan kepada oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0002173 Tahun 2022 tanggal 27 April 2022.

Pengalihan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 38 (Revisi 2012) tentang “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”, dengan demikian, transaksi pengalihan saham tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

SPMT (continued)

In relation to such transfer of right of shares, SPMT issued 129,614 new shares and 24,750 new shares for the Company with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of IKT and PTPR shares from the Company to SPMT, respectively.

The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by The Ministry of Law and Human Rights dated January 3, 2022.

To follow up the letter from the Ministry of SOE above, based on Deed No. 9 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, dated April 27, 2022, SPMT performed issuance of 1,151,941 new shares with nominal value of Rp1,151,941,000 which taken fully by the Company as a compensation for fair value adjustment of the subsidiaries’ shares that were transferred from the Company to SPMT. The fair value of subsidiaries’ shares were based on KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan report, an independent appraisal, dated March 31, 2022. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.03-0002173 Tahun 2022 dated April 27, 2022.

The transfers of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 38 (Revised 2012) concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore, the transfers of shares is recognized using the pooling of interest method.

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

SPSL

Pada tanggal 28 Februari 2022, saham-saham milik Perusahaan berikut dialihkan kepada SPSL:

- Saham MTI sebanyak 34.283.150 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp17.141.575.000 (nilai penuh).
- Saham NTS sebanyak 60.240 lembar saham atau setara dengan 99,16% dengan nilai nominal Rp60.240.000.000 (nilai penuh).
- Saham PIL sebanyak 204.820 lembar saham atau setara dengan 99,67% dengan nilai nominal Rp204.820.000.000 (nilai penuh).
- Saham PPK sebanyak 759.000 lembar saham atau setara dengan 90,00% dengan nilai nominal Rp759.000.000.000 (nilai penuh).
- Saham PLI (dahulu SPSL) sebanyak 101.898 lembar saham atau setara dengan 99,90% dengan nilai nominal Rp101.898.000.000 (nilai penuh).

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian BUMN melalui suratnya No. S-133/MBU/02/2022 pada tanggal 25 Februari 2022. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, SPSL menerbitkan 1.714.157 saham baru, 6.024.000 saham baru, 20.482.000 saham baru, 75.900.000 saham baru dan 10.189.800 saham baru untuk Perusahaan dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham masing-masing sebagai kompensasi pengalihan saham MTI, NTS, PIL, PPK dan PLI dari Perusahaan kepada SPSL.

Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 1 Maret 2022.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

SPSL

On February 28, 2022, the following shares owned by the Company were transferred to SPSL:

- *MTI shares amounting to 34,283,150 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp17,141,575,000 (full amount).*
- *NTS shares amounting to 60,240 shares or equivalent to 99.16% with nominal value of Rp60,240,000,000 (full amount).*
- *PIL shares amounting to 204,820 shares or equivalent to 99.67% with nominal value of Rp204,820,000,000 (full amount).*
- *PPK shares amounting to 759,000 shares or equivalent to 90.00% with nominal value of Rp759,000,000,000 (full amount).*
- *PLI (formerly SPSL) shares amounting to 101,898 shares or equivalent to 99.90% with nominal value of Rp101,898,000,000 (full amount).*

The transfer of shares has been approved by the Ministry SOE through its letter No. S-133/MBU/02/2022 on February 25, 2022. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

In relation to such transfer of right of shares, SPSL issued 1,714,157 new shares, 6,024,000 new shares, 20,482,000 new shares, 75,900,000 new shares and 10,189,800 new shares for the Company with nominal value of Rp10,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of MTI, NTS, PIL, PPK and PLI shares from the Company to SPSL, respectively.

The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by The Ministry of Law and Human Rights dated March 1, 2022.

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

SPSL (lanjutan)

Menindaklanjuti surat Kementerian BUMN di atas, berdasarkan Akta No. 6 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, tanggal 27 April 2022, SPSL melakukan penerbitan 77.270.475 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp772.704.750 yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan sebagai kompensasi penyesuaian nilai wajar saham entitas anak yang dialihkan dari Perusahaan ke SPSL. Nilai wajar saham entitas anak didasarkan pada laporan KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan, penilai independen, tanggal 31 Maret 2022. Akta tersebut telah diberitahunkan kepada oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0232765 tanggal 27 April 2022.

Pengalihan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dengan demikian, transaksi pengalihan saham tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan.

PTP1

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 26 Juli 2022 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, SPTP mengakuisisi saham seluruh PTP1 milik PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Hutama Karya (Persero) masing-masing sebanyak 183.370.000 saham dengan nilai pembelian masing-masing sebesar Rp187.954.250. Dengan demikian, kepemilikan SPTP pada PTP1 mengalami peningkatan dari 70,00% menjadi 100,00%. Akta tersebut telah diberitahunkan kepada oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.09-0036981 tanggal 26 Juli 2022.

SPTP telah melakukan pembayaran atas pengalihan saham tersebut kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Hutama Karya (Persero) masing-masing pada tanggal 25 Juli 2022.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

SPSL (continued)

To follow up the letter from the Ministry of SOE above, based on Deed No. 6 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, dated April 27, 2022, SPSL performed issuance of 77,270,475 new shares with nominal value of Rp772,704,750 which taken fully by the Company as a compensation for fair value adjustment of the subsidiaries' shares that were transferred from the Company to SPSL. The fair value of subsidiaries' shares were based on KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan report, an independent appraisal, dated March 31, 2022. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.03-0232765 Tahun 2022 dated April 27, 2022.

The transfers of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 38 (Revised 2012) concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore, the transfers of shares is recognized using the pooling of interest method.

PTP1

Based on deed No. 10 dated July 26, 2022 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, SPTP acquired all PTP1 shares owned by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and PT Hutama Karya (Persero) amounting to 183,370,000 shares, respectively, with purchase price of Rp187,954,250, respectively. Therefore, SPTP ownerships in PTP1 increased from 70.00% to 100.00%. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.09-0036981 Tahun 2022 dated July 26, 2022.

SPTP has made payment of the shares transfer to PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and PT Hutama Karya (Persero) on July 25, 2022.

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

PTP1 (lanjutan)

Pengalihan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah penambahan aset neto di PTP1 diakui sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

PTP1 (continued)

The transfers of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 38 (Revised 2012) concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control". The difference between the consideration paid and the carrying amount of the net assets in CTP is recognized as part of the "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2022, with calculation as follows:

	Nilai yang diakui pada saat transaksi/ *Amount recognized on transaction*	
Peningkatan aset neto	302.382.814	*Increase in net assets*
Imbalan yang dialihkan	375.908.500	*Consideration paid*
Tambahan modal disetor	**(73.525.686)**	***Additional paid-in capital***

PMT

Berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler PMT tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penambahan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, para pemegang saham PMT menyetujui diantaranya:

- Menerima dan menyetujui penambahan modal dasar dari semula Rp3.177.000.000 yang terbagi atas 3.177.000 saham menjadi Rp9.001.395.800 yang terbagi atas 56.077.000 saham, dengan rincian:
  - Saham seri A sejumlah 3.177.000 saham dengan nilai nominal Rp3.177.000.000 (Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham).
  - Saham seri B sejumlah 52.900.000 saham dengan nilai nominal Rp5.824.395.800 (Rp110.102 (nilai penuh) per saham).

PMT

Based on the resolution of PMT's Circular Shareholders meeting dated October 24, 2022 concerning Capital Increase and Amendment to the Company's Articles of Association, PMT's shareholders approved among others:

- *Received and approved the increase in authorized capital from the original Rp3,177,000,000 divided into 3,177,000 shares to Rp9,001,395,800 divided into 56,077,000 shares, with details:*
  - *Series A shares totaling 3,177,000 shares with a nominal value of Rp3,177,000,000 (Rp1,000,000 (full amount) per share).*
  - *Series B shares totaling 52,900,000 shares with a nominal value of Rp5,824,395,800 (Rp110,102 (full amount) per share).*

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

PMT (lanjutan)

Berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler PMT tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penambahan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, para pemegang saham PMT menyetujui diantaranya: (lanjutan)

- Menerima dan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp1.467.360.000 yang terbagi atas 1.467.360 saham menjadi sebesar Rp4.504.361.049 yang terbagi atas 2 klasifikasi saham:
  - Saham seri A (saham preferen) sejumlah 1.467.360 saham dengan nilai nominal Rp1.467.360.000 yang memiliki hak prioritas untuk menerima tahapan pembayaran dividen terlebih dahulu dari saham seri B.
  - Saham seri B (saham biasa) sejumlah 27.583.523 saham dengan nilai nominal Rp3.037.001.049, yang seluruhnya diambil oleh Perusahaan dan dibayarkan dengan cara konversi pinjaman menjadi modal sebesar Rp466.878.000 dan setoran tunai sebesar Rp2.570.123.049.

- Menerima dan menyetujui pemberian hak put option kepada PT PP (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dimana saham seri A yang dimiliki PT PP (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan dibeli oleh Perusahaan dengan harga nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham ketika berdasarkan hasil valuasi penilai independen sudah mencapai harga nominal tersebut dan tidak lebih dari 7,5% diatas nominal.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

PMT (continued)

Based on the resolution of PMT's Circular Shareholders meeting dated October 24, 2022 concerning Capital Increase and Amendment to the Company's Articles of Association, PMT's shareholders approved among others: (continued)

- *Received and approved the increase in issued and paid-up capital from the original Rp1,467,360,000 divided into 1,467,360 shares to Rp4,504,361,049 divided into 2 classifications of shares:*
  - *Series A shares (preferred shares) amounting to 1,467,360 shares with a nominal value of Rp1,467,360,000 which have priority rights to receive dividend payment tranches in advance of series B shares.*
  - *Series B shares (ordinary shares) totaling 27,583,523 shares with a nominal value of Rp3,037,001,049, all of which were subscribed by the Company and paid by way of conversion of loan into capital amounting to Rp466,878,000 and cash deposit amounting to Rp2,570,123,049.*

- *Received and approved the granting of put option rights to PT PP (Persero) Tbk and PT Waskita Karya (Persero) Tbk, where the Series A shares owned by PT PP (Persero) Tbk and PT Waskita Karya (Persero) Tbk will be purchased by the Company with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share when the shares reach that value based on independent appraisal valuation and not more thatn 7.5% above.*

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

PMT (lanjutan)

Penerbitan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Selisih sebesar Rp55.682.866 yang timbul atas perubahan nilai buku investasi setelah penerbitan saham baru dicatat sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022.

TCS

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 Desember 2022 dari Yatiningsih, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, SPMT mengakuisisi seluruh saham TCS milik BJTI dan PT Andahanesa Abadi masing-masing sebanyak 1.020 lembar saham dan 980 lembar saham dengan nilai pembelian masing-masing sebesar Rp153.897 dan Rp147.862. Dengan demikian, SPMT memiliki 100% saham TCS. Akta tersebut telah diberitahunkan kepada oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.09-0088699 tanggal 19 Desember 2022.

SPMT telah melakukan pembayaran atas pengalihan saham tersebut kepada BJTI dan PT Andahanesa Abadi masing-masing pada tanggal 5 Desember 2022 dan 6 Desember 2022.

CTP

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat pada tanggal 21 Juli 2021 dan Akta Jual Beli Saham yang diaktakan dengan akta Notaris Ny. Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn, No. 1 tanggal 1 Oktober 2021, API membeli saham CTP yang dimiliki oleh PT Waskita Toll Road (entitas dibawah pengendalian yang sama dan tidak bersifat sementara) sebanyak 1.386.131 lembar saham yang mewakili 55,00% kepemilikan saham di CTP dengan harga beli sebesar Rp2.445.141.067 sehingga kepemilikan API pada CTP mengalami peningkatan dari 45,00% menjadi 100,00%.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

PMT (continued)

The issuance of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 38 (Revised 2012) concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control". The difference amounting to Rp55,682,866 resulting from changes in book value of investment after issuance of new shares is recognized as part of the "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2022.

TCS

Based on Deed No. 10, dated December 5, 2022, of Yatiningsih, S.H., M.H., Notary in Surabaya, SPMT acquired all TCS shares owned by BJTI and PT Andahanesa Abadi amounting to 1,020 shares and 980 shares, respectively, with purchase price of Rp153,897 and Rp147,862, respectively. Therefore, SPMT owned 100% TCS shares. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.09-0088699, dated December 19, 2022.

SPMT has made payment of the shares transfer to BJTI and PT Andahanesa Abadi on December 5, 2022 and December 6, 2022, respectively.

CTP

Based on the Conditional Sales and Purchase Agreement on July 21, 2021 and The Deed of Shares Sales and Purchase which notarized by the Notarial Deed of Ny. Hastuti Nainggolan S.H., M.Kn, No. 1 dated October 1 2021, API acquired CTP's shares which owned by PT Waskita Toll Road (an entity under common control and is not temporary) amounted to 1,386,131 shares represents 55.00% shares ownership in CTP at a purchase price of Rp2,445,141,067 which made API's ownership in CTP increased from 45.00% to 100.00%.

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

CTP (lanjutan)

API telah melakukan pembayaran atas pengalihan saham tersebut kepada PT Waskita Toll Road pada tanggal 14 Oktober 2021.

Pembelian saham CTP sebesar 55,00% tersebut di atas oleh API memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dengan demikian, transaksi penambahan kepemilikan di CTP tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah penambahan aset neto di CTP diakui sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

CTP (continued)

API has made payment of the shares transfer to PT Waskita Toll Road on October 14, 2021.

The acquisition of 55.00% CTP's shares by API meet the criteria of business combination entities under common control as described in PSAK 38 (Revised 2012) concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore, the increase in ownership of CTP transaction is recognized using the pooling of interest method. The difference between the consideration paid and the carrying amount of the net assets in CTP is recognized as part of the "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position, with calculation as follows:

	Nilai yang diakui pada saat transaksi/ *Amount recognized on transaction*	
Total nilai tercatat aset neto	2.256.810.554	*Total carrying amount of net assets*
55,00% dari total nilai tercatat aset neto	1.241.245.805	*55.00% of total carrying amount of net assets*
Peningkatan aset neto	**1.241.245.805**	***Increase in net assets***
Imbalan yang dialihkan	2.445.141.067	*Consideration paid*
Tambahan modal disetor	**(1.203.895.262)**	***Additional paid-in capital***

e. Mata Uang Pelaporan

Mata uang fungsional Grup adalah Rupiah, kecuali TPK Koja, NPCT1 dan JICT dalam Dolar Amerika Serikat.

Mata uang penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup adalah Rupiah.

e. Reporting Currency

The Group's functional currency is Rupiah, except TPK Koja, NPCT1 and JICT which are in United States Dollar.

The presentation currency of the Group's consolidated financial statements is in Rupiah.

1. UMUM (lanjutan)

f. Penjabaran dalam Mata Uang Penyajian

Sehubungan dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup, laporan keuangan TPK Koja, NPCT1 dan JICT dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan cara sebagai berikut:

- Aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan;
- Penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan
- Seluruh hasil dari selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya.

Mutasi akun selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

f. Translation into Presentation Currency

In preparing the consolidated financial statements of the Group, financial statements of TPK Koja, NPCT1 and JICT were translated to Rupiah currency based on the following:

- *Assets and liabilities were translated using the prevailing rates at reporting date;*
- *Income and expenses were translated using the average exchange rate; and*
- *All resulting exchange differences were recognized in other comprehensive income.*

Movement for exchange differences due to financial statements translation account are as follows:

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	**31 Desember 2021/ *December 31, 2021***	
Saldo awal	304.754.485	291.374.572	*Beginning balance*
Efek penjabaran - neto	198.045.650	13.379.913	*Effect due to translation - net*
Saldo akhir	**502.800.135**	**304.754.485**	***Ending balance***

g. Penggabungan

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("Pelindo II") pada tanggal 1 Oktober 2021 mengatur diantaranya sebagai berikut:

g. Merger

Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia No. 101 Year 2021 regarding the Merger of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") and Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") into Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("Pelindo II") on October 1, 2021, stipulating among others:

1. UMUM (lanjutan)

g. Penggabungan (lanjutan)

- Kegiatan pengusahaan di Pelabuhan yang telah diselenggarakan beserta aset pengusahaan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV selanjutnya diselenggarakan dan dimiliki atau dikuasai oleh Pelindo II;
- Pelindo II wajib melakukan penyesuaian terhadap perizinan, konsesi dan dokumen hukum paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal penggabungan;
- Nilai kekayaan definitif Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV yang digabungkan ke dalam Pelindo II ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri BUMN.

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 5 tanggal 1 Oktober 2021 dari notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV setuju dan sepakat untuk menggabungkan diri dengan Pelindo II, dimana Pelindo II sebagai entitas yang melanjutkan kegiatan usaha. Rancangan penggabungan telah disetujui oleh pemegang saham masing-masing perusahaan pada tanggal yang sama sebagai berikut:

- Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo I No. 1 tanggal 1 Oktober 2021.
- Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo II No. 2 tanggal 1 Oktober 2021.
- Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo III No. 3 tanggal 1 Oktober 2021.
- Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo IV No. 4 tanggal 1 Oktober 2021.

1. GENERAL (continued)

g. Merger (continued)

- *Port operational activities that have been carried out along with the operational assets owned or controlled by Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV are subsequently managed and owned or controlled by Pelindo II;*
- *Pelindo II is required to make adjustments to permits, concessions and legal documents no later than 2 (two) years since the date of merger;*
- *The definitive net assets value of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV which are combined into Pelindo II are determined by the Minister of Finance based on the proposal of the Minister of SOE.*

Based on the Deed of Merger No. 5 dated October 1, 2021 from the notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV agreed to merge with Pelindo II, where Pelindo II as the surviving entity. The plan design of merger was approved by the shareholders of each company on the same date as follows:

- *Statement of the Decree of the Minister of SOE as Pelindo I General Shareholders Meeting (GSM) No. 1 on October 1, 2021.*
- *Statement of the Decree of the Minister of SOE as Pelindo II General Shareholders Meeting (GSM) No. 2 on October 1, 2021.*
- *Statement of the Decree of the Minister of SOE as Pelindo III General Shareholders Meeting (GSM) No. 3 on October 1, 2021.*
- *Statement of the Decree of the Minister of SOE as Pelindo IV General Shareholders Meeting (GSM) No. 4 on October 1, 2021.*

1. UMUM (lanjutan)

g. Penggabungan (lanjutan)

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 5 tersebut, seluruh pihak menyetujui penggabungan dengan kondisi diantaranya sebagai berikut:

1. Semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas dari Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV beralih kepada Pelindo II.
2. Semua izin, konsesi, fasilitas, lisensi, persetujuan dan pemanfaatan yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang kepada Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV beralih ke Pelindo II.
3. Sejak tanggal efektif, seluruh aset dan liabilitas yang dimiliki oleh Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV beralih ke Pelindo II.
4. Seluruh pekerja Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV akan menjadi pekerja Pelindo II mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja dan Berita Acara Kesepakatan antara Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV dengan para pengurus serikat pekerja Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV tanggal 24 Juni 2021.

Komposisi modal saham Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV sebelum dan setelah penggabungan adalah sebagai berikut (nominal penuh):

1. GENERAL (continued)

g. Merger (continued)

Based on the Deed of Merger No. 5, all parties agreed to the merger with the following conditions among others:

1. *All operations, businesses, and activities of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV are transferred to Pelindo II.*
2. *All permits, concessions, facilities, licenses, approvals and utilizations that have been granted by the authorities to Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV are transferred to Pelindo II.*
3. *Since the effective date, all assets and liabilities owned by Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV are transferred to Pelindo II.*
4. *All Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV workers will become Pelindo II workers in accordance with the provisions of the laws and regulations regarding labor and the Minutes of Agreement between Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV with the management of the Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV labor union on June 24, 2021.*

The composition of the share capital of Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV before and after the merger are as follows (full amount):

Sebelum Penggabungan		***Before Merger***
Pelindo I		***Pelindo I***
Modal Dasar	Rp6.800.000.000	*Authorized capital*
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp1.700.000.000	*Issued and fully-paid capital*
Pelindo II		***Pelindo II***
Modal Dasar	Rp4.000.000.000	*Authorized capital*
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp1.444.029.000	*Issued and fully-paid capital*
Pelindo III		***Pelindo III***
Modal Dasar	Rp3.200.000.000	*Authorized capital*
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp2.218.953.000	*Issued and fully-paid capital*
Pelindo IV		***Pelindo IV***
Modal Dasar	Rp10.000.000.000	*Authorized capital*
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp3.112.085.000	*Issued and fully-paid capital*
Setelah Penggabungan		***After Merger***
Pelindo II		***Pelindo II***
Modal Dasar	Rp33.000.000.000	*Authorized capital*
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp8.475.067.000	*Issued and fully-paid capital*

1. UMUM (lanjutan)

g. Penggabungan (lanjutan)

Saham Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV memiliki nilai nominal saham yang sama, yaitu sebesar Rp1.000 per saham. Sehubungan penggabungan, Pelindo II akan menerbitkan saham baru kepada Negara Republik Indonesia sesuai dengan jumlah saham yang sebelumnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia pada Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV. Hal ini merupakan nilai sementara atas Pelindo II dimana nilai definitif atas Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV yang digabung ke dalam Pelindo II akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri BUMN.

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 5 tersebut, dinyatakan bahwa tanggal efektif penggabungan adalah pada saat terbitnya Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pelindo II sehubungan penggabungan, yaitu melalui suratnya No. AHU-AH.01.10-0014401 tanggal 1 Oktober 2021. Dengan efektifnya penggabungan ini, maka Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV selaku perusahaan yang menggabungkan diri menjadi bubar demi hukum sejak tanggal tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah menyajikan dampak dari penggabungan tersebut.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 7 tanggal 1 Oktober 2021, pemegang saham Perusahaan menyetujui diantaranya perubahan Anggaran Dasar, logo dan nama Perusahaan dari sebelumnya Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia atau disingkat PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-0053936.AH.01.02 tanggal 1 Oktober 2021.

1. GENERAL (continued)

g. Merger (continued)

The shares of Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV have the same nominal value, which is Rp1,000 per share. In connection with the merger, Pelindo II will issue new shares to the Republic of Indonesia in accordance with the number of shares previously owned by the Republic of Indonesia in Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV. This is a temporer value for Pelindo II where the definitive value for Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV which are merged into Pelindo II will be determined by the Minister of Finance based on the proposal of the Minister of SOEs.

Based on the above Deed of Merger No. 5, it is stated that the effective date of the merger is the date of issuance of the Receipt Notification of the Merger of the Entities from the Minister of Law and Human Rights of Pelindo II in connection with the merger, which is through its letter No. AHU-AH.01.10-0014401 dated October 1, 2021. With the commencement of this merger, Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV as the merging entities are dissolved by law since that date.

The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2021 and for the year then ended, have presented the effects of the merger.

Based on the Deed of General Meeting of Shareholders Decision No. 7 dated October 1, 2021, the shareholders approved among others the changes of Article of Association, logo and name of the Company from Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II to Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia or abbreviated PT Pelabuhan Indonesia (Persero). This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-0053936.AH.01.02 *dated October 1, 2021.*

1. UMUM (lanjutan)

g. Penggabungan (lanjutan)

Pengalihan aset dan liabilitas Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke Pelindo II dicatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Berdasarkan PSAK No. 38, pengalihan aset, liabilitas, saham dan/atau instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual yang berada dalam Grup yang sama.

Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan.

Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan konsolidasian selama penggabungan terjadi disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode penyajian paling awal.

Penggabungan tersebut di atas menggunakan nilai buku mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 56/PMK.010/2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang Perubahan kedua atas PMK No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilan Usaha serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-21/PJ/2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilan Usaha.

1. GENERAL (continued)

g. Merger (continued)

The transfer of assets and liabilities of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV to Pelindo II are recorded based on the pooling of interest method in accordance with PSAK No. 38 (Revised 2012), "Business Combination of Entities Under Common Control".

Based on PSAK No. 38, the transfer of assets, liabilities, shares and/or other ownership instruments between entities under common control will not result in a profit or loss for the Company or individual entities that are in the same group.

Because of restructuring transactions between entities under common control do not change the economic substance of the ownership of the assets, liabilities, shares or other ownership instruments that are exchanged, the transferred assets or liabilities must be recorded at their book value using the pooling of interest method.

In applying the pool of interests method, the components of the consolidated financial statements during the merger occurred are presented as if the merger had occurred since the beginning of the earliest presentation period.

Such merger as mentioned above is using book value which based on Regulation of The Minister of Finance of The Republic of Indonesia (PMK) No. 56/PMK.010/2021 dated June 4, 2021 regarding Second Amendment on PMK No. 52/PMK.010/2017 regarding The Use of Book Value on Transfer of Assets in relation to Merger, Consolidation, Expansion or Business Takeover and General Director of Tax Regulation No. PER-21/PJ/2021 dated December 9, 2021 regarding Amendment on General Director of Tax Regulation No. PER-03/PJ/2021 regarding Procedures of Proposal and Issuance on Using Book Value for The Use of Book Value on Transfer of Assets in relation to Merger, Consolidation, Expansion or Business Takeover.

1. UMUM (lanjutan)

g. Penggabungan (lanjutan)

Sesuai dengan peraturan tersebut, manajemen akan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan persetujuan pengggunaan nilai buku atas pengalihan aset Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke Perusahaan. Manajemen berkeyakinan dapat memenuhi semua persyaratan yang dipersyaratkan oleh peraturan tersebut untuk menggunakan nilai buku untuk tujuan perpajakan sehubungan dengan transaksi penggabungan.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020/31Desember 2019 telah disajikan kembali untuk mencerminkan dampak penggabungan Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke dalam Perusahaan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode pelaporan. Penyesuaian bagian kepentingan Perusahaan atas aset neto Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV, disajikan pada "Ekuitas *Merging Entity*" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019. Laba neto dari entitas yang bergabung dicatat sebagai "Laba Proforma *Merging Entity*" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2020.

Sehubungan dengan telah ditetapkan PP No. 101 tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penggabungan Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II) (Catatan 1f) serta Surat Direksi Perusahaan (dahulu Pelindo II) tanggal 24 November 2021 tentang Usulan Nilai Kekayaan Definitif Perusahaan, Menteri BUMN menyampaikan usulan nilai kekayaan definitif kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui suratnya No. S-956/MBU/12/2021 tanggal 14 Desember 2021. Usulan nilai kekayaan definitif Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV yang digabungkan ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II) masing-masing sebesar Rp13.373.078.900.000 (nilai penuh), Rp17.323.408.459.305 (nilai penuh) dan Rp8.435.066.761.955 (nilai penuh) berdasarkan laporan KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan, penilai independen, tanggal 23 September 2021.

1. GENERAL (continued)

g. Merger (continued)

In accordance with the regulation, management will submit proposal to General Director of Tax to obtain approval for using book value on the transfers of assets of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV to the Company. Management believes that it can fulfill all requirements as required by such regulation for using book value for tax purposes in relation to the merger.

The consolidated statements of financial position as of December 31, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 have been restated as if the effect of merger of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV into the Company had occurred since the beginning of the reporting period. The adjustment of the Company's interest in the net assets of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV is presented in "Merging Entity Equity" in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019. Net income from entities merged are recorded as "Proforma Income from Merging Entity" in the 2020 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

In relation to the establishment of PP No. 101 Year 2021 dated October 1, 2021 regarding the merger of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV to the Company (formerly Pelindo II) (Note 1f) and the Company's (formerly Pelindo II) Directors Letter dated November 24, 2021 regarding Proposal of Definitive Net Assets Value of the Company, the Minister of SOE delivered proposal of definitive net assets value to Minister of Finance of the Republic of Indonesia through its letter No. S-956/MBU/12/2021 dated December 14, 2021. Such proposed definitive net assets value of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV which were merged into the Company (formerly Pelindo II) amounting to Rp13,373,078,900,000 (full amount), Rp17,323,408,459,305 (full amount) and Rp8,435,066,761,955 (full amount) based on the report of KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan, independent appraisal, dated September 23, 2021.

1. UMUM (lanjutan)

g. Penggabungan (lanjutan)

Berdasarkan usulan Menteri BUMN tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusannya No.527/KMK.6/2021 tanggal 29 Desember 2021, menetapkan nilai kekayaan definitif Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV yang digabungkan ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II) masing-masing sebesar Rp13.373.078.900.000 (nilai penuh), Rp17.323.408.459.305 (nilai penuh) dan Rp8.435.066.761.955 (nilai penuh).

Berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Nomor S-38/MBU/01/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Perubahan Struktur Permodalan dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, yang telah diaktakan oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., notaris di Jakarta, melalui Akta Nomor 2 tanggal 9 Februari 2022, pemegang saham Perusahaan menyetujui diantaranya:

- Peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi Rp156.000.000.000.000 (nilai penuh) yang terbagi atas 156.000.000 lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).
- Pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 39.131.555 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) sehingga seluruhnya berjumlah Rp39.131.555.000.000 (nilai penuh) yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.
- Penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan sebesar Rp39.131.555.000.000 (nilai penuh):
  - Sebesar Rp13.378.078.900.000 (nilai penuh) sebagai akibat penggabungan Pelindo I ke dalam Perusahaan.
  - Sebesar Rp17.323.408.459.305 (nilai penuh) sebagai akibat penggabungan Pelindo III ke dalam Perusahaan.
  - Sebesar Rp8.435.066.761.955 (nilai penuh) sebagai akibat penggabungan Pelindo IV ke dalam Perusahaan.
  - Sebesar Rp878.740 (nilai penuh) merupakan setoran modal Negara Republik Indonesia yang berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan Perusahaan.

1. GENERAL (continued)

g. Merger (continued)

Based on the proposal of the Minister of SOE as mentioned, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through its Decision No.527/KMK.6/2021 dated December 29, 2021 established the definitive net assets value of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV which were merged into the Company (formerly Pelindo II) amounting to Rp13,373,078,900,000 (full amount), Rp17,323,408,459,305 (full amount) and Rp8,435,066,761,955 (full amount).

Based on the decision of the Minister of SOE as the GMS Number S-38/MBU/01/2022 dated January 12, 2022 regarding Changes of Capital Structure and Changes of the Company's Article of Association, which has been notarized by Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., notary in Jakarta, through Deed No. 2 dated February 9, 2022, the Company's shareholder approved among others:

- *Increase of the Company's authorized capital to Rp156,000,000,000,000 (full amount) divided into 156,000,000 shares, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount).*
- *Issuance/placement of unused shares (portfolio) amounting to 39,131,555 shares, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) totalling to Rp39,131,555,000,000 (full amount) which all taken by the State of The Republic of Indonesia.*
- *Additional capital by the State of The Republic of Indonesia to the Company's shares amounting to Rp39,131,555,000,000 (full amount):*
  - *Amounting to Rp13,378,078,900,000 (full amount) as a result of the merger of Pelindo I to the Company.*
  - *Amounting to Rp17,323,408,459,305 (full amount) as a result of the merger of Pelindo III to the Company.*
  - *Amounting to Rp8,435,066,761,955 (full amount) as a result of the merger of Pelindo IV to the Company.*
  - *Amounting to Rp878,740 (full amount) is a capital injection by the State of The Republic of Indonesia arising from the capitalization of part of the Company's reserves..*

1. UMUM (lanjutan)

g. Penggabungan (lanjutan)

Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014773.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022.

h. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 30 April 2023. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut.

1. GENERAL (continued)

g. Merger (continued)

The Deed of changes in Article of Association as mentioned above has obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia Number AHU-0014773.AH.01.02.Tahun 2022 dated March 1, 2022

h. Completion of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia and its subsidiaries as of December 31, 2022 and for the year then ended are completed and authorized for issuance on April 30, 2023. The Company's Directors who signed the Directors' statement are responsible for the fair preparation and presentation of such consolidated financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia or DSAK IAI) and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan" or " OJK").

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes to the consolidated financial statements herein.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2b dibawah ini.

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Grup akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Grup menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup:

Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual

Amendemen PSAK 22 Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements (continued)

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2b.

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

All figures in the consolidated financial statements are rounded to and expressed in thousands of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

b. Changes in Accounting Principles

The Group made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2022, including the following revised standards that have affected the consolidated financial statements of the Group:

Amendments to PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks

The amendments to PSAK 22 Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks clarify the interactions between PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 and the Conceptual Framework of Financial Reporting.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual (lanjutan)

Secara umum Amendemen PSAK 22 ini:
- Menambahkan deskripsi terkait "liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK 30" yang dinyatakan dalam paragraf 21A-21C.
- Mengubah paragraf 23 dengan mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang diakui pada tanggal akuisisi.
- Menambahkan paragraf 23A terkait definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Mengganggu - Biaya Pemenuhan Kontrak

Amendemen PSAK 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari:
- biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan;
- alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

Amendemen ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan dan amendemen ini tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Grup pada saat diadopsi untuk pertama kali.

Penyesuaian Tahunan 2020 – PSAK 71: Instrumen Keuangan

Amendemen ini mengklarifikasi biaya yang diperhitungkan entitas dalam mengevaluasi apakah persyaratan yang dimodifikasi dari suatu liabilitas keuangan menyebabkan penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Biaya tersebut hanya mencakup yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk *fee* yang dibayarkan atau diterima baik oleh peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in Accounting Principles (continue)

Amendments to PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks (continued)

In general, the Amendments to PSAK 22:
- *Add a description regarding "liabilities and contingent liabilities within the scope of PSAK 57 or ISAK 30" stated in paragraphs 21A-21C.*
- *Amend paragraph 23 by clarifying the contingent liabilities recognized at the acquisition date.*
- *Add paragraph 23A regarding the definition of a contingent asset and its accounting treatment.*

Amendments to PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts - Contract Fulfillment Costs

The amendments to PSAK 57 provide that costs to fulfill a contract consist of costs that are directly related to the contract. Costs that are directly related to the contract consist of:

- *incremental costs to fulfill the contract, and;*
- *allocation of other costs that are directly related to fulfilling the contract.*

Amendments to PSAK 57 are effective on January 1, 2022 with earlier application permitted and are not expected to have any impact to the financial reporting of the Group upon first-time adoption.

2020 Annual Improvements – PSAK 71: Financial Instruments

The amendment clarifies the fees that an entity includes when assessing whether the modified terms of a financial liability required derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability. These fees include only those paid or received between the borrower and the lender, including fees paid or received by either the borrower or lender on the other's behalf.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Penyesuaian Tahunan 2020 – PSAK 71: Instrumen Keuangan (lanjutan)

Amendemen ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan namun tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Grup pada saat diadopsi untuk pertama kali.

Penyesuaian Tahunan 2020 – PSAK 73: Sewa

Amendemen terhadap Contoh Ilustrasi 13 yang merupakan bagian dari PSAK 73 menghilangkan dari contoh ilustrasi penggantian perbaikan properti sewaan oleh pesewa untuk mengatasi potensi kebingungan mengenai perlakuan insentif sewa yang mungkin timbul karena cara insentif sewa diilustrasikan dalam contoh tersebut.

Amendemen ini diterapkan secara prospektif terhadap pengukuran nilai wajar pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan pertama yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan namun amendemen ini tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Grup pada saat diadopsi untuk pertama kali.

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak. Kendali diperoleh bila Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan kemampuan mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, *investor* mengendalikan *investee* jika dan hanya jika *investor* memiliki seluruh hal berikut ini:

i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi *investor* kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in Accounting Principles (continued)

2020 Annual Improvements – PSAK 71: Financial Instruments (continued)

The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2022 with earlier adoption permitted but not expected to have any impact to the financial reporting of the Group upon first-time adoption.

2020 Annual Improvements - PSAK 73: Leases

The amendment to Illustrative Example 13 accompanying PSAK 73 removes from the example the illustration of the reimbursement of leasehold improvements by the lessor in order to resolve any potential confusion regarding the treatment of lease incentives that might arise because of how lease incentives are illustrated in that example.

The amendment prospectively to fair value measurements on or after the beginning of the first annual reporting period beginning on or after January 1, 2022 with earlier adoption permitted but not expected to have any impact to the financial reporting of the Group upon first-time adoption.

c. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the Group controls an investee if and only if the Group has all of the following:

i) Power over the investee, that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities of the investee,

ii) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
iii) The ability to use its power over the investee to affect its returns.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Bila Grup tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

Grup menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh kendali sampai tanggal Grup tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain ("PKL") diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of Consolidation (continued)

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

i) The contractual arrangement with the other vote holders of the investee,
ii) Rights arising from other contractual arrangements, and
iii) The Group's voting rights and potential voting rights.

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relation to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

d. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Grup menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" (Catatan 1d dan 1e).

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang dapat diatribusikan ke aset tertentu dikapitalisasi ke aset dalam penyelesaian dan aset takberwujud dan selisih kurs yang diakui di dalam penghasilan komprehensif lain sebagai bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (nilai penuh):

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of Consolidation (continued)

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other component of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

d. Foreign Currency Transactions and Balances

The Group applied PSAK No. 10 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" (Note 1d and 1e).

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional currency and presentation currency. Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made.

At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, except for foreign exchange difference that can be attributed to qualifying assets which are capitalized to construction in progress and intangible assets and foreign exchange difference recognized in other comprehensive income as effective portion of gains and losses on hedging instruments in relation to cash flow hedge.

Below are the major exchange rates used for translation as of December 31, 2022 and 2021 (full amount):

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	**31 Desember 2021/ *December 31, 2021***	
Dolar Amerika Serikat (USD) 1	15.731	14.269	*United States Dollar (USD) 1*
Euro Eropa (EUR) 1	16.712	16.126	*European Euro (EUR) 1*
Dolar Singapura (SGD) 1	11.659	10.533	*Singapore Dollar (SGD) 1*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 44.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

f. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan, dimana selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat aset neto entitas yang diakuisisi diakui sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepentingan tersebut, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai investasi jangka pendek.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Transactions with Related Parties

The company and subsidiaries have transactions with related parties as defined in PSAK 7.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

Significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 44.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the consolidated financial statements are unrelated parties.

f. Business Combinations Entities Under Common Control

Business combinations under common control are accounted for using the pooling-of-interests method, whereby the difference between the considerations transferred and the book value of the net assets of the acquiree is recognized as part of "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position.

In applying the said pooling-of-interest method, the components of the financial statements of the combining entities are presented as if the combination has occurred since the beginning of the period of the combining entity become under common control.

g. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in the statements of consolidated financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with a maturity of 3 months or less, that are readily convertible to a known amount of cash and subject to an insignificant risk of changes in value.

Time deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year are presented as short-term investments.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Persediaan

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dan identifikasi khusus. Persediaan terdiri dari suku cadang kapal dan *crane*, bahan bakar, alat tulis kantor, obat dan alat-alat medis.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan.

i. Beban Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya, dan disajikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar sesuai sifatnya masing-masing.

j. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Grup memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Ventura bersama adalah salah satu tipe pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto ventura bersama. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh signifikan adalah serupa dengan hal-hal yang diperlukan dalam menentukan kendali atas entitas anak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Inventory

Inventory was recorded using the weighted average method and specific identification. Inventories consists of ship and crane spare part, fuels, office supplies, medicine and medical instruments.

Allowance for inventory obsolence is defined based on analysis of inventory condition on the date of reporting of financial position.

i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited, and are presented as current asset or non-current asset based on their nature.

j. Investment in Associates

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies.

A joint venture is a type of joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the joint venture. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

The considerations made in determining significant influence are similar to those necessary to determine control over subsidiaries.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

j. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Investasi Grup pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investasi awalnya diakui pada harga perolehan. Nilai tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Grup atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal perolehan. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi dan tidak diamortisasi maupun diuji secara individual untuk penurunan nilai.

Laba rugi konsolidasian mencerminkan bagian dari Grup atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Perubahan PKL dari entitas asosiasi disajikan sebagai bagian dari PKL Grup. Selain itu, bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, Grup mengakui bagiannya atas perubahan, jika sesuai, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan kepentingan dalam entitas asosiasi.

Gabungan bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi disajikan pada muka laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (sebagai laba atau rugi) di luar laba usaha dan mencerminkan laba atau rugi setelah pajak dan kepentingan nonpengendali pada entitas anak dari entitas asosiasi.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Grup.

Setelah penerapan metode ekuitas, Grup menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Grup dalam entitas asosiasi. Grup menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Grup menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Investment in Associates (continued)

The Group's investment in its associate is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group's share of net assets of the associate since the acquisition date. Goodwill relating to the associate is included in the carrying amount of the investment and is neither amortized nor tested for impairment individually.

The consolidated profit or loss reflects the Group's share of the results of operations of the associate. Any change in OCI of the associate is presented as part of the Group's OCI. In addition, when there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Group recognizes its share of any changes, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the extent of the interest in the associate.

The aggregate of the Group's share of profit or loss of an associate is shown on the face of the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (as profit or loss) outside operating profit and represents profit or loss after tax and NCI in the subsidiaries of the associate.

The financial statements of the associate are prepared for the same reporting period of the Group.

After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Group's investment in its associate. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in associate and its carrying value, and recognizes the amount in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

j. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, Grup mengukur dan mengakui bagian investasi tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan investasi diakui pada laba rugi.

k. Properti Investasi

Properti investasi merupakan properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) yang dikuasai Grup untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi tersebut.

Perusahaan telah memilih model biaya untuk mencatat properti investasinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis properti investasi yang berupa bangunan fasilitas pelabuhan (10 - 50 tahun) dan jalan dan bangunan (10 - 40 tahun).

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Investment in Associates (continued)

Upon loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

k. Investment Properties

Investment properties represents properties (land or building - or part of a building - or both) held by the Group to earn rental or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.

Investment properties are stated at cost including transaction cost less accumulated depreciation and any impairment in value, if any. The carrying amount includes the cost of replacement of an existing investment property in the year such costs are incurred, if the recognition criteria are met and does not include the cost of daily use of the investment property.

The Company has chosen the cost model to record for its investment properties.

Depreciation is computed using the straight-line basis over the estimated useful lifes of investment properties which consist of building and port facilities (10 - 50 years) and road and building (10 - 40 years).

Investment properties are derecognized when either it has been disposed of or when it is permanently withdrawn from use and no future benefit is expected from its disposal. Any gains or losses on the retirement or disposal of investment properties are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the period of retirement or disposal.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

I. Aset Tetap

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

Jenis Aset	Tahun/*Years*	*Type of Assets*
Bangunan fasilitas pelabuhan	2 - 50	*Building and port facilities*
Kapal	4 - 20	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	2 - 20	*Port equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	2 - 50	*Port facility installation*
Jalan dan bangunan	2 - 50	*Road and building*
Peralatan	3 - 25	*Equipment*
Kendaraan	4 - 5	*Vehicles*
Emplasemen	3 - 50	*Emplacement*

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Fixed Assets

All fixed assets are initially recognized at cost which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for the assets to be capable of operating in the manner intended by management.

After to initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Depreciation of fixed assets start when it is available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the assets as follows:

The carrying amounts of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the year in which the asset is derecognized.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

I. Aset Tetap (lanjutan)

Pada akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi dan disesuaikan secara prospektif jika terjadi perubahan.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi serta manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya. Dalam beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki umur manfaat yang terbatas, dalam hal ini disusutkan dengan cara yang mencerminkan manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut.

Biaya perbaikan yang signifikan diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba pada saat terjadinya.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

Aset kerjasama operasi merupakan kegiatan kerjasama yang meliputi pemanfaatan aset dari para pihak atas suatu kegiatan operasi yang didasarkan pada perjanjian kontraktual. Aset kerjasama operasi dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Fixed Assets (continued)

At the end of reporting period, the residual values, useful lifes and methods of depreciation of assets are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of reporting period.

Land is stated at cost and not depreciated.

If the cost of land includes the costs of site dismantlement, removal and restoration and the benefits from the site dismantlement, removal and restoration is limited, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs. In some cases, the land itself may have a limited useful life, in which case it is depreciated in a manner that reflects the benefits to be derived from it.

The cost of major repairs is recognized as the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the profit or loss as incurred.

Major spare parts and stand-by equipments are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations during more than one year.

Joint operation assets are joint activities that include utilization of the assets from the parties for operational activities that is based on contractual agreements. Joint operation assets are stated at cost less accumulated depreciation and are depreciated using the straight-line method over the estimated useful lifes of similar fixed assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Sewa

Grup menilai pada saat insepsi kontrak apabila kontrak tersebut adalah, atau mengandung sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Grup sebagai Penyewa

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Aset hak-guna

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Jika kepemilikan aset pendasar sewa beralih ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka penyusutan aset hak-guna dihitung menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak-guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Lease

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Group as Lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

Right-of-use assets

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

If ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.The right-of-use assets are also assessed for impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran pinalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek dan sewa dengan aset bernilai rendah

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa yang jangka waktu sewanya pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi beli). Grup juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa dengan aset bernilai rendah untuk sewa yang aset pendasarnya dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Lease (continued)

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). The Group also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value underlying assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai Pesewa

Sewa yang dalam pengaturannya Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui sebagai bagian dari pendapatan usaha pada laba rugi karena sifatnya. Biaya langsung awal yang terjadi dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa.

n. Pengaturan bersama

Grup merupakan pihak dalam pengaturan bersama apabila terdapat pengaturan kontraktual yang memberikan pengendalian bersama atas aktivitas relevan kepada Grup dan minimal satu pihak lainnya. Pengendalian bersama diuji dengan prinsip yang sama dengan penilaian pengendalian atas anak perusahaan.

Grup mengklasifikasikan kepentingannya dalam pengaturan bersama sebagai berikut:
- Ventura bersama: ketika Grup memiliki hak hanya pada aset neto dari pengaturan bersama
- Operasi bersama: ketika Grup memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas yang terkait dengan pengaturan bersama.

Dalam melakukan penilaian klasifikasi kepentingan dalam pengaturan bersama, Grup mempertimbangkan hal-hal berikut:
- struktur pengaturan bersama
- bentuk hukum pengaturan bersama apabila dibentuk melalui kendaraan terpisah
- persyaratan pengaturan kontraktual
- ketika relevan, fakta dan keadaan lain (termasuk semua perjanjian kontraktual lainnya).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Lease (continued)

The Group as Lessor

Leases in which the Group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in other operating income in the profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income.

n. Joint arrangements

The Group is a party to a joint arrangement when there is a contractual arrangement that confers joint control over the relevant activities of the arrangement to the Group and at least one other party. Joint control is assessed under the same principles as control over subsidiaries.

The Group classifies its interests in joint arrangements as either:
- *Joint ventures: where the Group has rights to only the net assets of the joint arrangement*
- *Joint operations: where the Group has both the rights to assets and obligations for the liabilities of the joint arrangement.*

In assessing the classification of interests in joint arrangements, the Group considers:
- *the structure of the joint arrangement*
- *the legal form of joint arrangements structured through a separate vehicle*
- *the contractual terms of the joint arrangement agreement*
- *any other facts and circumstances (including any other contractual arrangements).*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

n. Pengaturan bersama (lanjutan)

Grup mencatat kepentingannya dalam operasi bersama dengan mengakui hak atas aset, kewajiban atas liabilitas, pendapatan dan beban sesuai dengan ketentuan hak dan kewajiban dalam ketentuan kontraktual.

o. Aset Takberwujud

Aset takberwujud Grup terdiri dari aset hak konsesi, piranti lunak dan biaya ditangguhkan.

Aset takberwujud diakui jika Grup kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

Aset takberwujud diamortisasi selama umur manfaat ekonomi aset dan dievaluasi apabila terdapat indikasi adanya penurunan nilai untuk aset takberwujud. Periode dan metode amortisasi untuk aset takberwujud direviu setidaknya setiap akhir tahun tutup buku**.**

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat: i) dilepaskan; atau ii) ketika tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan dari penggunaan atau penjualan aset tersebut.

Aset Hak Konsesi

Grup telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK 22).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Joint arrangements (continued)

The Group accounts for its interests joint operations by recognising its share of assets, liabilities, revenues and expenses in accordance with its contractually conferred rights and obligations.

o. Intangible Assets

Intangible assets of the Group consist of concession rights asset, software and deferred charges.

Intagible assets are recognized if the Group will obtain useful economic benefit from the intangible assets and the cost of assets can be reliably measured.

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, the intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and impairment loss, if any.

An intangible asset is amortized over the asset's useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method for an intangible asset are reviewed at least at each financial year end.

An intangible asset shall be derecognize: i) on disposal; or ii) when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

Concession Rights Assets

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan terminal pelabuhan dan alur pelayaran yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian terminal pelabuhan dan alur pelayaran. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi terminal pelabuhan dan alur pelayaran diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ("OP") tanpa syarat.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Intangible Assets (continued)

Concession Rights Assets (continued)

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

The Group records for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are port terminal and shipping channel concession rights which are amortized over the remaining concession period from the date of operation of the port terminal and shipping channel. During the construction period, the accumulated port terminal and shipping channel construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ("OP") for no consideration.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Aset konsesi yang diberikan kepada Grup dapat dipindahkan dengan persetujuan Pemerintah/OP. Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/OP pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Selain itu, Grup mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" (PSAK 34) dan PSAK 23, "Pendapatan", untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Grup menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Grup diakui pada nilai wajar.

Kontrak konstruksi meliputi seluruh biaya konstruksi pembangunan aset konsesi - terminal pelabuhan dan alur pelayaran yang meliputi biaya pembangunan dermaga, pengadaan tanah dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

Grup mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset takberwujud dimana Grup menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Grup mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Intangible Assets (continued)

Concession Rights Assets (continued)

Concession asset which granted to the Group are transferrable with approval from the Government/OP. These concession assets will be transferred to the Government/OP at the end of the concession period and, at such time, all accounts related to the concession rights assets will be derecognized.

In addition, the Group recognizes and measures construction revenue in accordance with PSAK 34 (Revised 2010), "Construction Contracts" (PSAK 34) and PSAK 23, "Revenue", for the services it performs. When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

Construction contract comprehends all cost directly attributable to the construction of concession assets - port terminal and shipping channel which includes cost of port development, land acquisition and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required, plus the cost of borrowing directly used for financing the construction of concession asset. Borrowing costs are capitalized until the construction is completed and operated.

The Group recognizes construction services and increased capacity of concession asset as intangible assets which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. During the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance with the contract.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

Aset konsesi diamortisasi selama masa konsesi dengan menggunakan metode garis lurus.

Provisi Pemeliharaan Terminal

Dalam pengoperasian terminal, Grup mempunyai kewajiban untuk menyerahkan aset pada akhir masa konsesi kepada OP dalam kondisi baik, antara lain dengan melakukan pemeliharaan secara berkala. Provisi pemeliharaan terminal diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini.

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya-biaya sehubungan dengan perolehan sistem perangkat lunak yang mempunyai masa manfaat 4-5 tahun, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

p. Kapitalisasi Biaya Pinjaman

Grup menerapkan PSAK No. 26 (Revisi 2011), "Biaya Pinjaman".

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Grup sehubungan dengan pinjaman dana.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Intangible Assets (continued)

Concession Rights Assets (continued)

Construction cost is the value of the construction contract.

The concession assets are amortized over the concession period using straight line method.

Provision for Terminal Maintenance

In operating terminal, the Group has the obligation to transfer assets to OP at the end of concession period in good condition, among others by performing regular maintenance. The estimated net provision for terminal maintenance is discounted to its present value that reflects current provision.

Software

Software represents expenses relating to systems software cost, which benefits extend over a period of 4-5 years, are deferred and amortized over the periods benefited using the straight-line method.

p. Capitalization of Borrowing Cost

The Group implemented PSAK No. 26 (Revised 2011), "Borrowing Costs".

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction and production of the qualifying assets are capitalized as a part of the related assets. Otherwise, borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

p. Kapitalisasi Biaya Pinjaman (lanjutan)

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai maksudnya.

q. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka atas pemakaian lahan dan bangunan diamortisasi selama masa kontrak pemakaian dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian tidak lancar atas pendapatan diterima di muka disajikan sebagai bagian dari "liabilitas jangka panjang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

r. Pendapatan dan Beban

Grup mengadopsi PSAK 72 “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan” dengan menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan, dan berapa banyak pendapatan yang harus diakui. Standar ini menyediakan model lima langkah (*5-steps model*) tunggal berbasis prinsip untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan, sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Capitalization of Borrowing Cost (continued)

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are completed for their intended use.

q. Unearned Revenues

Unearned revenues from usage of land and buildings are amortized over the usage term using the straight-line method. The non-current portion of unearned revenues is shown as part of "long term liabilities" in the consolidated statements of financial position.

r. Revenue and Expenses

The Group adopted PSAK 72 “Revenue from Contracts with Customers” by providing a comprehensive framework for determining how, when and how much revenue should be recognized. This standard provides a principle-based, single 5-step model for revenue determination and recognition to be applied to all contracts with customers, as follows:

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

r. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Selain itu, dalam mengadopsi PSAK 72, Grup juga memilih untuk menerapkan panduan praktis untuk tidak memperhitungkan dampak komponen pembiayaan ketika periode antara pembayaran untuk barang atau jasa yang dijanjikan dan pengalihan untuk barang atau layanan tersebut kepada pelanggan kurang dari satu tahun.

Di bawah ini adalah ringkasan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan Grup untuk pendapatan pelayanan terminal petikemas, pengusahaan tanah, bangunan, air & listrik, pelayanan jasa terminal, pelayanan jasa kapal, jasa logistik, pelayanan kesehatan, pendapatan pas pelabuhan, pengusahaan peralatan, pelayanan jaringan & konsultasi sistem informasi, pelayanan jasa barang, jasa keuangan, pendapatan dan pendapatan jasa lain-lain.

Pendapatan dari pemberian jasa diakui pada saat terjadinya penyerahan jasa kepada pengguna. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan jasa diakui pada saat jasa telah selesai dilakukan dan berita acara diterbitkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Revenue and Expenses (continued)

4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).

In addition, in adopting PSAK 72, the Group has also chosen to apply practical guidance not to take into account the impact of the financing component when the period between payment for the goods or services promised and the transfer for the goods or services to the customer is less than one year.

Below is a summary of the Group's revenue recognition accounting policies for revenue from container services, land, building, water & electricity, terminal services, vessel services, logistic services, medical services, port entry fee, equipment services, network services and consultant of information system, cargo services, financial services, cleaning services and other services.

Revenue from service provision is recognized when the service is rendered to the user. Revenue is recognized when it is probable that economic benefits will be obtained by the Group and the amount can be measured reliably regardless of when the payment is made. Service revenues are recognized when the services are completed and the minutes are issued.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

r. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Grup menilai pengaturan pendapatannya terhadap kriteria tertentu untuk menentukan apakah ia bertindak sebagai prinsipal atau agen. Grup bertindak sebagai prinsipal jika menanggung dampak manfaat dan risiko signifikan terkait dengan penjualan barang dan jasa.

Fitur yang mengindikasikan bahwa Grup bertindak sebagai prinsipal mencakup:

a. Grup mempunyai tanggung jawab utama menyediakan barang atau jasa untuk pelanggan, atau memenuhi pesanan, misalnya Grup bertanggungjawab untuk penerimaan atas produk dan jasa yang dipesan atau dibeli oleh pelanggan;
b. Grup mempunyai risiko persediaan sebelum atau setelah pesanan pelanggan, selama pengiriman atau pengembalian;
c. Grup mempunyai kebebasan untuk menentukan harga baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya menyediakan barang dan jasa tambahan; dan
d. Grup menanggung risiko kredit pelanggan atas jumlah yang dapat diterima dari pelanggan.

Grup telah melakukan analisa atas transaksi penjualan dan menyimpulkan bahwa Grup bertindak sebagai prinsipal pada semua perjanjian pendapatan.

Pengakuan Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama tahun berjalan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan dari aset atau peningkatan liabilitas yang menyebabkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan pembagian kepada pemilik ekuitas. Beban diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Revenue and Expenses (continued)

The Group assesses its revenue arrangements against certain criteria to determine whether it is acting as principal or agent. The Group acts as the principal if it bears the impact of significant benefits and risks associated with the sale of goods and services.

Features that indicate that the Group is acting as a principal include:

a. The Group has the main responsibility of providing goods or services to customers, or fulfilling orders, for example, the Group is responsible for receiving products and services ordered or purchased by customers;
b. The Group is subject to inventory risk before or after a customer order, during delivery or return;
c. The Group has the freedom to determine prices either directly or indirectly, for example providing additional goods and services; and
d. The Group bears the credit risk of the customers for the amounts it can receive from the customers.

The Group has analyzed the sales transaction and concluded that the Group acts as the principal in all revenue agreements.

Expenses Recognition

Expenses represent decreases in economic benefits during the year in the form of cash outflows or decreases from assets or increases in liabilities that cause a decrease in equity, other than those related to distributions to owners of equity. Expenses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when incurred.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

s. Perpajakan

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46: Pajak Penghasilan.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Grup beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak penghasilan kini terkait dengan pos-pos yang diakui secara langsung di ekuitas diakui dalam ekuitas dan bukan dalam laporan laba rugi. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam SPT sehubungan dengan situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku tunduk pada interpretasi dan menetapkan ketentuan yang sesuai.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Grup juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini".

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Taxation

Final Tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final tax is scoped out from PSAK 46: Income Tax.

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income.

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the statement of profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Corporate Income Tax - Current" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. The Group also presented interest/penalty, if any, as part of "Corporate Income Tax - Current".

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if filed an objection, when the result of the objection is determined.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Grup menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Grup mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Taxation (continued)

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Group reassesses unrecognized deferred tax assets. The Group recognizes a previous unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period operations, except to the extent that they relate to the items that previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statements of financial position, except if they are for different legal entities, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

Sesuai dengan ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas pajak yang mengandung ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan ditentukan dengan mempertimbangkan apakah diperlakukan secara terpisah atau bersamaan, penggunaan asumsi tentang pemeriksaan atas perlakuan pajak tidak pasti oleh otoritas perpajakan, pertimbangan apakah besar kemungkinan Otoritas Pajak akan menerima perlakuan pajak tidak pasti dan penilaian kembali pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan jika terjadi perubahan fakta dan keadaan.

Jika penerimaan perlakuan pajak dimungkinkan oleh Otoritas Pajak, pengukuran tersebut sejalan dengan pengisian pajak penghasilan. Jika penerimaan perlakuan pajak oleh Otoritas Pajak tidak memungkinkan, Grup menggunakan jumlah pajak dengan menggunakan metode yang memberikan prediksi resolusi yang lebih baik (yaitu jumlah yang paling mungkin atau nilai yang diharapkan).

Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa interpretasi tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

t. Imbalan Kerja

Imbalan Pascakerja

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (Program Pensiun) untuk semua karyawan tetapnya yang telah memenuhi kriteria dan liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai yang ditentukan berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang berlaku.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Taxation (continued)

Uncertainty over Income Tax

In accordance with ISAK 34: Uncertainty Over Income Tax Treatments which is effective on January 1, 2019, stated that the recognition and measurement of tax assets and liabilities that contain uncertainty over income tax are determined by considering whether to be treated separately or together, the assumptions used in the examination of tax treatments by the Tax Authorities, consideration the probability that the Tax Authorities will accept uncertain tax treatment and re-consideration or estimation if there is a change in facts and circumstances.

If the acceptance of the tax treatment by the Tax Authorities is probable, the measurement is in line with income tax fillings. If the acceptance of the tax treatment by the Tax Authorities is not possible, the Group measures its tax balances using the method that provides the better predict of resolution (i.e. most likely amount or expected value).

Accordingly, management believes that the interpretation did not have a significant impact on the consolidated financial statements.

t. Employee Benefits

Post-Employment Benefits

The Company has a defined contribution retirement plan (Pension Plan) covering all of its qualified permanent employees and an unfunded employee benefit liability determined in accordance with the existing Collective Labor Agreement (CLA).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai tersebut dihitung dengan membandingkan imbalan yang akan diterima oleh karyawan pada usia normal pensiun dari Program Pensiun dengan imbalan sesuai dengan KKB, setelah dikurangi dengan akumulasi kontribusi pemberi kerja dan hasil pengembangannya. Jika bagian pemberi kerja pada imbalan Program Pensiun kurang dari imbalan yang diharuskan oleh KKB, Perusahaan akan mencadangkan kekurangan tersebut.

Perusahaan memberikan imbalan kerja lainnya, seperti imbalan kesehatan dan uang penghargaan. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan memenuhi masa kerja tertentu. Estimasi biaya imbalan ini diakru sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Kewajiban imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*.

Beban untuk imbalan kerja berdasarkan KKB/UU/imbalan kesehatan pascakerja ditentukan dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Laba atau rugi aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi total 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (*present value of the defined benefit obligation*) pada tanggal tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Employee Benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

The unfunded employee benefit liability is calculated by comparing the benefit that will be received by an employee at normal pension age from the Pension Plan with the benefit as stipulated in the CLA, after deducting the accumulated employer contribution and the related investment results. If the employer-funded portion of the Pension Plan benefit is less than the benefit as required by the CLA, the Company reserves for such shortfall.

The Company also provides other post-employment benefits, such as healthcare benefits and service pay to their retirees. The entitlement to these benefits are usually based on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The estimation costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to defined benefit pension plans.

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at end of the reporting period less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and prior service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected-unit-credit method.

The costs of providing employee benefits under the CLA/Law/post-retirement healthcare benefits plan are determined using the projected-unit-credit method. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the present value of the defined benefit obligation at that date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundangkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

PP 35/2021 mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan tidak tetap), alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat memengaruhi manfaat imbalan minimum yang harus diberikan kepada karyawan. Penerapan peraturan tersebut tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memilki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini.

Keuntungan atau kerugian yang melebihi ketentuan 10% diakui selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Lebih lanjut, biaya jasa lalu yang terjadi ketika Perusahaan memperkenalkan program imbalan pasti atau terjadinya perubahan atas imbalan yang terhutang dari program yang berlaku saat ini harus diamortisasi selama periode sampai imbalan tersebut telah menjadi hak karyawan *(vested)*.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya termasuk cuti besar yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan. Perkiraan beban ini dihitung dan diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode yang diterapkan dalam menghitung kewajiban imbalan pascakerja. Kewajiban ini dihitung minimum satu tahun sekali oleh aktuaris independen. Imbalan jangka panjang lainnya yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Employee Benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

On February 2, 2021, the Government promulgated Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja), which aims to create the widest possible employment opportunities.

PP 35/2021 regulates the work agreement for a certain period (non-permanent employees), outsourcing, working time, rest time and termination of employment, which can affect the minimum benefits that must be provided to employees. The implementation of the new regulation did not result in major changes to the Group's accounting policy and had no material impact on the amounts reported for the current.

These gains or losses in excess of the 10% threshold are amortized on a straight-line basis over the average of remaining working period of the employees estimates. Further, past service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

Other long term employment benefits included the long services leave benefit which is determined in compliance with the Company's Regulation. The expected costs of these benefits are calculated and recognized over the year of employment, using the method which is applied in calculating obligation for post-employment benefits. These obligations are calculated on a minimum once a year by an independent actuary. Other long term employment benefits that are vested, are recognized as expense immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Program Iuran Pasti

Program iuran pasti merupakan program imbalan pascakerja, dimana entitas membayar iuran tetap kepada suatu entitas terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum ataupun konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut. Kewajiban untuk membayar iuran secara regular merupakan biaya imbalan kerja karyawan untuk periode dimana jasa diberikan oleh pekerja.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") menerbitkan siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 24: Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS 19 *Employee Benefits*. Siaran pers tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam *IFRS Intepretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service IAS 19*. Grup telah menerapkan siaran pers tersebut dan dengan demikian merubah kebijakan akuntansi terkait atribusi imbalan kerja pada periode jasa dari kebijakan yang diterapkan sebelumnya.

Pada tahun-tahun sebelumnya, Grup mengatribusikan imbalan berdasarkan formula imbalan program imbalan pasti berdasarkan masa kerja sejak tanggal pekerja memberikan jasa hingga usia pensiun. Berdasarkan siaran pers Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") di bulan April 2022, Grup telah mengubah kebijakan akuntansinya untuk mengatribusikan imbalan berdasarkan program tersebut, yaitu dari tanggal ketika jasa pekerja pertama kali menghasilkan imbalan dalam program sampai dengan tanggal ketika jasa pekerja selanjutnya tidak akan menghasilkan jumlah imbalan yang material dibawah program tersebut. Namun, perubahan tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan dan telah dibebankan pada periode berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Employee Benefits (continued)

Defined Contribution Plans

A defined contribution plan is a post-employment benefit plan in which the entity pays fixed contributions into a separate entity and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts. Obligations for the regular contributions constitute employee benefit costs for the period during which services are rendered by employees.

Changes in Accounting Policy

In April 2022, the Institute of Indonesia Chartered Accountants' Accounting Standard Board ("DSAK IAI") issued a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with PSAK 24: Imbalan Kerja which was adopted from IAS 19 Employee Benefits. The press release conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the IFRS Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service IAS 19. The Company has adopted the said press release and accordingly changed its accounting policy regarding attribution of benefits to periods of service previously applied.

In prior years, the Group attribute benefits under the defined benefit plan's benefit formula to periods of service from the date when employees provide their services until their retirement age. Based on the press release of the Board of Financial Accounting Standard ("DSAK") in April 2022, the Group change the policy for attributing benefits under the plan to the date when employee service first leads to benefits under the plan until the date when further employee service will lead to no material amount of further benefits under the plan. However, the impact is not material to the financial statements and charged to current period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Grup telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 72, seperti diungkapkan pada Catatan 2r.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau NWPKL, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pengukuran Selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas), dan
- NWLR.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72, as disclosed in Note 2r.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Subsequent Measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- *Financial assets at amortized cost (debt instruments),*
- *Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),*
- *Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and*
- *FVTPL.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, investasi jangka panjang, aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya.

Aset keuangan pada NWPKL (instrumen utang)

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di PKL. Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.*

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost includes cash and cash equivalents, short-term investment, trade receivables, other receivables, accrued revenues, long-term investments, other current assets and other non-current assets.

Financial assets at FVOCI (debt instruments)

For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada NWPKL (instrumen utang) (lanjutan)

Instrumen utang Grup yang diukur pada NWPKL termasuk investasi pada instrumen utang dengan kuotasi yang termasuk dalam aset keuangan tidak lancar lainnya.

Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif setelah pelepasan (instrumen ekuitas).

Pada pengakuan awal, Grup dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang takterbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 50 dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah direklasifikasi ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Grup memilih untuk mengklasifikasi secara takterbatalkan investasi ekuitas yang tidak terdaftar di bursa masuk dalam kategori ini.

Aset Keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR")

Aset keuangan pada NWLR tercatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Kategori ini termasuk instrumen derivatif dan investasi ekuitas yang diperdagangkan di bursa efek yang mana oleh Grup diklasifikasikan secara takterbatalkan pada NWPKL. Dividen atas investasi ekuitas yang tercatat di bursa diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at FVOCI (debt instruments) (continued)

The Group's debt instruments at FVOCI includes investments in quoted debt instruments included under other non-current financial assets.

Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments).

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 50 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognized as other income in the profit or loss when the right of payment has been established.

The Group elected to classify irrevocably its non-listed equity investments under this category.

Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL")

Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the statement of profit or loss.

This category includes derivative instruments and listed equity investments which the Group had not irrevocably elected to classify at FVOCI. Dividends on listed equity investments are recognized as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset Keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR") (lanjutan)

Derivatif melekat dalam kontrak hibrida, dengan liabilitas keuangan atau kontrak utama non-keuangan, dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik ekonomi dan risiko tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya; instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hibrida ini tidak diukur pada NWLR. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan baik dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan, atau reklasifikasi aset keuangan diluar dari kategori NWLR.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir
  Atau
- Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan '*pass-through*', dan salah satu dari (a) Grup telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL") (continued)

A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial liability or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at FVTPL. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss. Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the FVTPL category.

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired*
  Or
- *The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan '*pass-through*', Grup mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Grup masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Grup tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Grup tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutannya. Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Grup.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Grup untuk membayar kembali.

Penurunan Nilai

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual dan akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Grup atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition (continued)

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

Impairment

For certain categories of financial assets, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Group's past experience of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual, liabilitas jangka pendek lainya, utang bank, liabilitas jangka panjang lainnya, utang obligasi, utang lembaga keuangan non-bank dan liabilitas sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Impairment (continued)

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Group designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as short-term bank loans, trade payables, accrued expenses, other current liability, bank loans, other long term liabilities, bonds payable, loan from non-bank financial institution and lease liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman)

(i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akusisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

(ii) Utang dan Akrual

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, biaya masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings)

(i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

(ii) Payables and Accruals

Liabilities for current trade and other accounts payable, accrued expenses and short-term employee benefits liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

v. Instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup menggunakan instrumen keuangan berupa utang obligasi untuk melakukan lindung nilai atas risiko mata uang asing.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

v. Financial instruments and hedge accounting

Initial Recognition and Measurement

The Group uses financial instruments in the form of bonds payable to hedge its foreign currency risk.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

v. Instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, lindung nilai diklasifikasikan sebagai lindung nilai arus kas ketika melakukan lindung nilai atas eksposur terhadap variabilitas dalam arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang diakui atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi atau risiko mata uang asing dalam komitmen pasti yang tidak diakui.

Pada saat insepsi hubungan lindung nilai, Grup secara formal menetapkan dan mendokumentasikan hubungan lindung nilai yang mana ingin diterapkan akuntansi lindung nilai dan tujuan serta strategi manajemen risiko untuk melakukan lindung nilai.

Dokumentasi mencakup identifikasi instrumen lindung nilai, item lindung nilai, sifat risiko yang dilindung nilai dan bagaimana Grup akan menilai apakah hubungan lindung nilai memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai (termasuk analisis sumber ketidakefektifan lindung nilai dan bagaimana rasio lindung nilai. ditentukan). Hubungan lindung nilai memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai jika memenuhi semua persyaratan efektivitas berikut:

- Ada 'hubungan ekonomik' antara item lindung nilai dan instrumen lindung nilai.
- Pengaruh risiko kredit tidak 'mendominasi perubahan nilai' yang dihasilkan dari hubungan ekonomik tersebut.
- Rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai adalah rasio yang sama yang dihasilkan dari kuantitas item lindung nilaian yang aktual digunakan oleh Grup melindungi nilai sejumlah kuantitas instrumen lindung nilaian yang secara aktual digunakan oleh Grup untuk melindungi sejumlah kuantitas item lindung nilaian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Financial instruments and hedge accounting (continued)

Initial Recognition and Measurement (continued)

For the purpose of hedge accounting, hedges are classified as cash flow hedges when hedging the exposure to variability in cash flows that is either attributable to a particular risk associated with a recognized asset or liability or a highly probable forecast transaction or the foreign currency risk in an unrecognized firm commitment.

At the inception of a hedge relationship, the Group formally designates and documents the hedge relationship to which it wishes to apply hedge accounting and the risk management objective and strategy for undertaking the hedge.

The documentation includes identification of the hedging instrument, the hedged item, the nature of the risk being hedged and how the Group will assess whether the hedging relationship meets the hedge effectiveness requirements (including the analysis of sources of hedge ineffectiveness and how the hedge ratio is determined). A hedging relationship qualifies for hedge accounting if it meets all of the following effectiveness requirements:

- *There is 'an economic relationship' between the hedged item and the hedging instrument.*
- *The effect of credit risk does not 'dominate the value changes' that result from that economic relationship.*
- *The hedge ratio of the hedging relationship is the same as that resulting from the quantity of the hedged item that the Group actually hedges and the quantity of the hedging instrument that the Group actually uses to hedge that quantity of hedged item.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

v. Instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Lindung nilai atas arus kas

Grup menggunakan utang obligasi sebagai lindung nilai dari eksposur risiko mata uang asing dalam pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang.

Bagian yang efektif atas perubahan nilai wajar instrumen keuangan yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas, diakui sebagai "Penghasilan komprehensif lain" pada bagian ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas bagian yang tidak efektif diakui langsung sebagai laba atau rugi. Jumlah akumulasi keuntungan atau kerugian dalam ekuitas dibebankan sebagai laba atau rugi komprehensif ketika unsur yang dilindungi nilainya mempengaruhi laba neto. Ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau ketika suatu lindung nilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai, akumulasi keuntungan maupun kerugian yang ada pada ekuitas saat itu dibebankan sebagai laba atau rugi.

Cadangan lindung nilai atas arus kas disesuaikan dengan jumlah yang lebih rendah antara keuntungan atau kerugian kumulatif dari instrumen lindung nilai dan perubahan kumulatif nilai wajar dari item lindung nilaian.

w. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun pelaporan, yang disesuaikan untuk mengasumsikan konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif.

Pada tahun 2022 dan 2021, laba per saham dihitung menggunakan total rata-rata tertimbang saham yang beredar setelah terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali (Catatan 1g).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Financial instruments and hedge accounting (continued)

Initial Recognition and Measurement (continued)

Cash flow hedges

The Group uses bonds payable to hedge its exposure to foreign currency risk for revenues to be received in the future.

The effective portion of changes in the fair value of the financial instruments that are designated and qualified as cash flow hedges are recognized in "Other comprehensive income" and reported to equity. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognized immediately in profit or loss. Amounts accumulated in equity are recycled to profit or loss in the periods in which the hedged item will affect net profit. When a hedging instrument expires, or when a hedge no longer meets the criteria for hedge accounting, any cumulative gain or loss existing in equity at that time is charged to profit or loss.

The cash flow hedge reserve is adjusted to the lower of the cumulative gain or loss on the hedging instrument and the cumulative change in fair value of the hedged item.

w. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the income for the year attributable to the owners of the parent entity by the weighted-average number of shares outstanding during the year.

Diluted earning per share is calculated by dividing profit for the year attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the reporting year, adjusted to assume conversion of all potential dilutive ordinary shares.

On 2022 and 2021, earnings per share is computed using total weighted-average number of shares after the event of business combination of entities under common control (Note 1g).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

x. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

y. Informasi Segmen

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk atau jasa tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk atau jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup *item-item* yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perusahaan dan Entitas Anak dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

z. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

x. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

y. Segment Information

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products or services (business segment), or in providing products or services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. Segments are determined before intra-group balances and intra-group transactions are eliminated as part of consolidation process.

z. Impairment of Non-Financial Assets

The Group assesses at reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

aa. Klasifikasi Lancar dan Tak Lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,

ii) dimiliki terutama untuk tujuan diperdagangkan,

iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau

iv) kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,

ii) dimiliki terutama untuk tujuan diperdagangkan,

iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau

iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

ab. Standar Akuntansi yang Telah Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Grup namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Grup pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Grup masih diestimasi pada tanggal 30 April 2023:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Classification of Current and Non-Current Assets

The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

i) expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,

ii) held primarily for the purpose of trading,

iii) expected to be realised within 12 months after the reporting period, or

iv) cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

A liability is current when it is:

i) expected to be settled in the normal operating cycle,

ii) held primarily for the purpose of trading,

iii) due to be settled within 12 months after the reporting period, or

iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

ab. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Group's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Group when they become effective, and the impact to the consolidated financial position and performance of the Group is still being estimated as of April 30, 2023:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

ab. Standar Akuntansi yang Telah Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan

Amendemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan *item-item* tersebut, dan biaya untuk memproduksi *item-item* tersebut, dalam laba rugi.

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan diterapkan secara retrospektif untuk aset tetap yang tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal dari periode sajian paling awal dimana entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.

Amendemen tersebut diperkirakan tidak akan berdampak material terhadap pelaporan keuangan Grup.

Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan Tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Amendemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan,
- hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan hakya untuk menangguhkan liabilitas, dan
- hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ab. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2023

Amendments to PSAK 16: Fixed Assets - Proceeds before Intended Use

The amendments prohibit entities to deduct from the cost of an item of fixed assets, any proceeds from selling items produced while bringing that asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Instead, an entity recognizes the proceeds from selling such items, and the costs of producing those items, in the profit or loss.

The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023 and shall be applied retrospectively to items of property, plant and equipment made available for use on or after the beginning of the earliest period presented when the entity first applies the amendment.

The amendments are not expected to have a material impact on the financial reporting of the Group.

Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements – Classification of a Liability as current or non-current

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- *what is meant by a right to defer settlement,*
- *the right to defer must exist at the end of the reporting period,*
- *classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and*
- *only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

aa. Standar Akuntansi yang Telah Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 (lanjutan)

Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan Tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang (lanjutan)

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan diterapkan secara retrospektif.

Amendemen tersebut diekspektasikan tidak akan berdampak material terhadap pelaporan keuangan Grup.

Amendemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Amendemen ini memberikan panduan dan contoh untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amendemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas dengan persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Amendemen ini berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 dengan penerapan dini diperkenankan. Grup saat ini sedang menilai dampak dari amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pengungkapan kebijakan akuntansi Grup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2023 (continued)

Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements – Classification of a Liability as current or non-current (continued)

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023 and shall be applied retrospectively.

The amendments are not expected to have a material impact on the financial reporting of the Group.

Amendment of PSAK 1: Presentation of financial statement - Disclosure of accounting policies

This amendments provides guidance and examples to help entities apply materiality judgements to accounting policy disclosures. The amendment aim to help entities provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities to disclose their 'significant' accounting policies with a requirement to disclose their 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

The amendments are effective on or after January 1, 2023 with earlier application permitted. The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's accounting policy disclosures.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

aa. Standar Akuntansi yang Telah Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 (lanjutan)

Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi

Amendemen tersebut memperkenalkan definisi 'estimasi akuntansi' dan mengklarifikasi perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amendemen tersebut juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

Amendemen tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 dan berlaku untuk perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi yang terjadi pada atau setelah awal periode tersebut. Penerapan dini diperkenankan. Grup saat ini sedang menilai dampak dari amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Grup.

Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal

Amendemen ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya sebagai contoh dari transaksi sewa, untuk mengeliminasi perbedaan praktik saat ini atas transaksi tersebut dan transaksi lain yang serupa.

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dengan penerapan dini diperkenankan. Grup saat ini sedang menilai dampak dari amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Grup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2023 (continued)

Amendment of PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors – Definition of Accounting Estimates

The amendments introduces a definition of 'accounting estimates' and clarify the distinction between changes in accounting estimates and changes in accounting policies and the correction of errors. Also, they clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.

The amendments are effective on or after 1 January 2023 and apply to changes in accounting policies and changes in accounting estimates that occur on or after the start of that period. Earlier application is permitted. The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

Amendment of PSAK 46: Income Taxes Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction

This amendment proposes that entities recognize deferred tax assets and liabilities at the time of initial recognition, for example from a lease transaction, to eliminate differences in current practice for such transactions and similar transactions.

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023 with early adoption permitted. The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

aa. Standar Akuntansi yang Telah Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024

Amendemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amendemen ini mengklarifikasi bahwa hanya kovenan yang harus dipatuhi entitas pada atau sebelum tanggal pelaporan yang akan memengaruhi klasifilasi liabilitas sebagai lancar atau tidak lancar.

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 dengan penerapan dini diperkenankan.

Entitas menerapkan amendemen PSAK 1 (Oktober 2020) tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang pada periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25. Jika entitas menerapkan amendemen PSAK 1 (Oktober 2020) pada periode yang lebih awal setelah terbitnya amendemen PSAK 1 (Desember 2022) tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan, maka entitas juga menerapkan amendemen PSAK 1 (Desember 2022) pada periode tersebut. Jika entitas menerapkan amendemen PSAK 1 (Oktober 2020) untuk periode sebelumnya, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

Grup saat ini sedang menilai dampak dari amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Grup.

Amendemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik

Amendemen PSAK 73 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2024

Amendment of PSAK 1: Non-current Liabilities with Covenants

This amendment clarifies that only covenants with which entities must comply on or before the reporting date will affect a liability's classification as current or non-current.

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024 with early adoption permitted.

Entities apply retrospectively amendments to PSAK 1 (October 2020) regarding the classification of a liability as current or non-current for financial reporting starting on or after January 1, 2024 in accordance with PSAK 25. If entities apply the amendments to PSAK 1 (October 2020) in a period that earlier after the issuance of the amendment to PSAK 1 (December 2022) regarding non-current liabilities with covenants, entities also apply the amendment to PSAK 1 (December 2022) in that period. If entities apply the amendments to PSAK 1 (October 2020) for the previous period, the entity shall disclose this fact.

The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

Amendment to PSAK 73: Lease Liability in a Sale and Leaseback

The amendment to PSAK 73 Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

aa. Standar Akuntansi yang Telah Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 (lanjutan)

Amendemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik (lanjutan)

Amendemen berlaku secara retrospektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan. Grup saat ini sedang menilai dampak dari amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Grup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2024 (continued)

Amendment to PSAK 73: Lease Liability in a Sale and Leaseback (continued)

The amendment applies retrospectively to annual reporting periods beginning on or after 1 January 2024. Earlier application is permitted. The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting periods.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

Judgements

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Nilai tercatat neto utang pajak penghasilan badan pada 31 Desember 2022 adalah sebesar RpNihil (2021: Rp31.109.540). Penjelasan lebih rinci mengenai pajak penghasilan diungkapkan dalam Catatan 23.

Tagihan dan Keberatan atas Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan dikembalikan oleh Kantor Pajak. Nilai tercatat atas tagihan dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak Grup pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp267.298.234 (2021: Rp30.334.916). Penjelasan lebih lanjut atas akun ini diungkapkan pada Catatan 23.

Opsi pembaruan dan penghentian dalam kontrak - Grup sebagai penyewa

Grup menentukan masa sewa sesuai masa sewa yang tidak dapat terbatalkan, ditambah dengan setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika cukup pasti untuk mengeksekusi, atau setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut.

Grup memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan terminasi. Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah secara wajar akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa. Grup mempertimbangkan semua faktor relevan yang membentuk insentif ekonomi untuk melakukan pembaruan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan, Grup menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan yang berada dalam kendalinya dan mempengaruhi kemampuannya untuk menjalankan atau tidak menggunakan opsi untuk memperbarui atau untuk mengakhiri.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgements (continued)

Judgement is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. The net carrying amount of corporate income tax payable as of December 31, 2022 was RpNil (2021: Rp31,109,540). Further details regarding taxation are disclosed in Note 23.

Claims for Tax Refund and Tax Assessments Under Appeal

Based on the tax regulations currently enacted, the management judged if the amounts recorded under the above account are recoverable and refundable by the Tax Office. The carrying amount of the Group's claims for tax refund and tax assessments under appeal as of December 31, 2022 was Rp267,298,234 (2021: Rp30,334,916). Further explanations regarding this account are provided in Note 23.

Lease term of contracts with renewal and termination options - the Group as lessee

The Group determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Group has several lease contracts that include extension and termination options. The Group applies judgement in evaluating whether it is reasonably certain to exercise the option to renew or terminate the lease or not. The Group considers all relevant factors that create an economic incentive for them to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Group reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Opsi pembaruan dan penghentian dalam kontrak - Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Pengungkapan lebih lanjut mengenai sewa terdapat pada Catatan 16.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari setiap entitas dalam Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi sebagian besar pendapatan, biaya dan pendanaan masing-masing entitas.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2u.

Bila Grup memutuskan bahwa tidak terdapat bukti obyektif atas penurunan nilai pada evaluasi individual atas piutang usaha, baik yang nilainya signifikan maupun tidak, Grup menyertakannya dalam kelompok piutang usaha dengan risiko kredit yang serupa karakteristiknya dan melakukan evaluasi kolektif atas penurunan nilai. Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas masa depan atas kelompok piutang usaha tersebut karena merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan untuk melunasi jumlah terutang.

Arus kas masa depan pada kelompok piutang usaha yang dievaluasi secara kolektif untuk penurunan nilai diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian historis bagi piutang usaha dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dengan piutang usaha pada kelompok tersebut. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 6.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgements (continued)

Lease term of contracts with renewal and termination options - the Group as lessee (continued)

Further disclosures of leases are made in Note 16.

Determination of functional currency

The functional currency of each entity within the Group is the currency from the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that mainly influence the revenues, costs and financing of each of the respective entities.

Classification of financial assets and financial liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by complying the definition set forth in PSAK No. 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2u.

If the Group determine that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed trade receivables, whether significant or not, the Group includes them in a group of trade receivables with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. The characteristics chosen are relevant to the estimation of future cash flows for companys of such trade receivables by being indicative of the customers' ability to pay all amounts due.

Future cash flows in a company of trade receivables that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for the trade receivables with credit risk characteristics similar to those in the company. Further details are disclosed in Note 6.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Perjanjian konsesi jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

Otoritas Pelabuhan ("OP") memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan proyek, hak untuk memasuki, mengakses dan menggunakan area konsesi dengan tujuan melaksanakan proyek dengan tanpa membatasi hak OP dalam menjalankan wewenangnya, sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan hukum yang berlaku (Catatan 48).

Pada akhir masa konsesi jasa, Grup harus menyerahkan terminal pelabuhan dan alur pelayaran kepada OP bebas dari setiap bentuk pembebanan, termasuk tanah reklamasi, aset tidak bergerak dan aset bergerak yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian terminal pelabuhan dan alur pelayaran.

Grup berpendapat bahwa Perjanjian Konsesi memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

Grup diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama tahun berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Grup mengakui pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi masing-masing sebesar Rp2.397.701.575 dan Rp3.195.512.405.

Grup mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi atas aset konsesi sesuai dengan PSAK 34. Grup mengukur pendapatan konstruksi atas aset konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima tanpa marjin.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgements (continued)

Service concession arrangement

ISAK 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. ISAK 16 provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as fixed assets, but should recognize a financial asset and/or an intangible asset.

Port Authority ("OP") granted the rights to the Company, including the right to implement the project, the right to enter, access and use the concession area with the objective of implementing the project without limiting the right of OP in running its authority, in accordance with the Concession Agreement and applicable law (Note 48).

Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the port terminal and shipping channel free of any form of charges, inluding reclamation land, non-removable assets and movable assets therein directly related to, and in connection with, the operation of the port terminal and shipping channel.

The Group has made judgement that the Concession Agreement qualifies under the intangible asset model, wherein the concession asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 19, "Intangible Assets".

The Group is required by ISAK 16 to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession assets made during the year in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. For the year ended December 31, 2022 dan 2021, the Group recognized construction revenue amounting to Rp2,397,701,575 and Rp3,195,512,405, respectively.

The Group recognizes construction revenue of concession asset and construction costs of concession asset in accordance with PSAK 34. The Group measures construction revenue at the fair value of the consideration received or to be received without margin.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Kerugian Kredit Ekpektasian untuk Aset Keuangan

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian berdasarkan kerugian kredit ekpektasian sepanjang kepemilikan aset pada tanggal pelaporan. Grup telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, Grup menerapkan metode yang disederhanakan. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi itu, Grup menilai kembali peringkat kredit eksternal dari instrumen utang. Selain itu, Grup menganggap bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika pembayaran kontrak lebih dari 30 hari tunggakan.

Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Provisi atas penurunan nilai piutang usaha dan piutang lain-lain, dihitung berdasarkan kondisi terkini dan tingkat ketertagihan historis piutang usaha. Provisi ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan taksiran. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat provisi penurunan nilai piutang diungkapkan pada Catatan 6 dan 7.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgements (continued)

Expected Credit Loss for Financial Assets

For trade receivables and contract assets, the Group applies practical guidelines in calculating expected credit losses. Accordingly, the Group does not identify changes in credit risk, but rather measures the allowance for losses based on expected credit losses as long as the assets hold at the reporting date. The Group has established a provisioning matrix based on historical data on credit losses, adjusted for specific forward-looking factors related to customers and the economic environment.

For debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, the Group applies the simplified method. At each reporting date, the Group evaluates whether a debt instrument is considered to have low credit risk using all available information without undue cost or effort. In conducting this evaluation, the Group reassesses the external credit rating of the debt instrument. In addition, the Group considers that there has been a significant increase in credit risk when the contract payment is more than 30 days in arrears.

The Group evaluates whether there is objective evidence that trade receivables are impaired at the end of each reporting period. Provision for impairment of trade and other receivables is calculated based on the current condition and historical collectibility of trade receivables. These provisions are adjusted periodically to reflect actual and estimated results. Details of the nature and carrying amount of provision for impairment of receivables are disclosed in Notes 6 and 7.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penurunan nilai aset keuangan

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL atas piutang usaha. Tarif provisi didasarkan pada hari yang lewat jatuh tempo untuk mengelompokan pelanggan ke segmen yang memiliki pola kerugian serupa. Matriks provisi awalnya berdasarkan tarif *default* yang diamati Grup secara historis. Grup akan mengkalibrasi matriks tersebut untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi kedepan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama tahun depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah *default* di sektor usaha Grup, tingkat *default* historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tarif *default* yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi ke depan dianalisa kembali.

Penilaian korelasi antara tingkat *default* yang dapat diamati secara historis, taksiran kondisi ekonomi dan ECL adalah estimasi yang signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan taksiran kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili aktual *default* pelanggan yang sebenarnya di masa depan.

Estimasi masa manfaat aset tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Impairment of financial assets

The Group uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns. The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the Group's industry sector, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

Estimate useful lifes of fixed assets

The useful life of each of the item of the Group's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to usage, obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi masa manfaat aset tetap (lanjutan)

Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2l. Tidak terdapat perubahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

Penurunan nilai aset nonkeuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2h, 2j, 2l, 2o, 10, 12, 13, 14, 15 dan 17.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya belum dapat dipastikan dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 23.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Estimate useful lifes of fixed assets (continued)

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

Estimated useful lifes of fixed assets are disclosed in Note 2l. There is no change in the estimated useful lifes of fixed assets during the year.

Impairment of non-financial assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of the Group's operations.

Further details are disclosed in Notes 2h, 2j, 2l, 2o, 10, 12, 13, 14, 15 and 17.

Income tax

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of taxable income. Further details are disclosed in Note 23.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba fiskal pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2s dan 23.

Imbalan kerja karyawan

Penentuan provisi dan liabilitas imbalan kerja karyawan dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo liabilitas imbalan kerja karyawan masing-masing sebesar Rp5.769.306.844 dan Rp6.560.923.531 (Catatan 29).

Penyusutan aset hak-guna

Biaya perolehan aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset hak-guna antara 1 (satu) sampai dengan 33 (tiga puluh tiga) tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Notes 2s and 23.

Employee benefits

The determination of the employee benefits provision and liability is dependent on the selection of certain assumptions used by an actuary in calculating such amounts. Actual results that differ from the Management's assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the management's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of employee benefits liability. As of December 31, 2022, and 2021, employee benefits liability amounted to Rp5,769,306,844 and Rp6,560,923,531, respectively (Note 29).

Depreciation of right-of-use assets

The costs of right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lifes. Management estimates the useful lifes of these leased assets to be within 1 (one) to 33 (thirty three) years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage could impact the economic useful lifes and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Sewa - Memperkirakan suku bunga pinjaman tambahan

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Grup menggunakan suku bunga pinjaman tambahan (IBR) untuk mengukur liabilitas sewa. IBR adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Grup untuk meminjam dengan syarat yang sama, dan dengan jaminan serupa, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkup ekonomi yang serupa.

Oleh karena itu, IBR mencerminkan apa yang 'harus dibayar' oleh Perusahaan, yang memerlukan estimasi ketika tidak tersedianya tingkat suku bunga yang dapat diobservasi atau ketika perlu disesuaikan untuk mencerminkan syarat dan ketentuan dari sewa. Grup mengestimasi IBR menggunakan *input* yang dapat diamati (seperti tingkat suku bunga pasar) jika tersedia dan diperlukan untuk membuat estimasi-spesifik entitas tertentu.

Amortisasi aset hak konsesi

Grup melakukan amortisasi hak aset konsesi selama masa konsesi dengan menggunakan metode garis lurus.

Provisi pemeliharaan aset konsesi

Provisi pemeliharaan aset konsesi ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi pengeluaran yang diperlukan untuk pemeliharaan sehubungan dengan kewajiban penyerahan aset kepada OP dalam kondisi baik pada akhir masa konsesi.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Leases - Estimating the incremental borrowing rate

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its incremental borrowing rate (IBR) to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment.

The IBR therefore reflects what the Group 'would have to pay', which requires estimation when no observable rates are available or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease. The Group estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to make certain entity-specific estimates.

Amortization of concession assets

The Group decided to amortized concession assets using straight line method over the concession period.

Provision for concession assets maintenance

Provision for concession assets maintenance will be recorded periodically based on the estimated provision needed for maintenance in relation to the obligation to transfer assets to OP in good condition at the end of concession period.

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Kas	39.387.247	42.703.201	*Cash on hand*
Bank	6.321.179.839	4.727.772.682	*Cash in banks*
Deposito berjangka	7.237.073.737	8.151.912.704	*Time deposits*
Total kas dan setara kas	**13.597.640.823**	**12.922.388.587**	***Total cash and cash equivalents***

a. Kas / *a. Cash on hand*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Rupiah	39.387.247	42.703.201	*Rupiah*

b. Bank / *b. Cash in banks*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Rupiah:			***Rupiah:***
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	306.183.071	368.088.278	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	61.649.190	36.918.896	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	58.413.072	58.890.818	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Bank Permata Tbk	736.496	1.151.216	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank OCBC NISP Tbk	551.757	1.130.734	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	408.410	5.293.298	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Bukopin Tbk	345.391	356.120	*PT Bank Bukopin Tbk*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	1.642.267	7.738.149	*Others (each below Rp2 billion)*
Pihak berelasi (Catatan 44a)	4.394.220.513	3.725.987.853	*Related parties (Note 44a)*
Subtotal	4.824.150.167	4.205.555.362	*Sub-total*
Dolar AS:			***US Dollar:***
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.431.311	63.333	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	17.585	16.806	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Permata Tbk	8.383	1.442.617	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank DBS Indonesia	-	1.200.001	*PT Bank DBS Indonesia*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	376.916	680.254	*Others (each below Rp2 billion)*
Pihak berelasi (Catatan 44a)	1.495.195.477	518.814.309	*Related parties (Note 44a)*
Subtotal	1.497.029.672	522.217.320	*Sub-total*
Total bank	**6.321.179.839**	**4.727.772.682**	***Total cash in banks***

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)*

c. Deposito berjangka / ***c. Time deposits***

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Rupiah:			***Rupiah:***
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	474.600.000	577.710.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Bank Muamalat Indonesia	93.000.000	-	*PT Bank Muamalat Indonesia*
PT Bank Permata Tbk	45.000.000	54.000.000	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank BTPN Syariah Tbk	45.000.000	10.000.000	*PT Bank BTPN Syariah Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	15.100.000	9.100.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara*
PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta	10.000.000	15.000.000	*PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta*
PT Bank Bukopin Tbk	5.500.000	75.400.000	*PT Bank Bukopin Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	2.000.000	-	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	24.000.000	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Mega Syariah	-	10.000.000	*PT Bank Mega Syariah*
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	-	10.000.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara*
PT Bank BRI Agroniaga Tbk	-	6.000.000	*PT Bank BRI Agroniaga Tbk*
PT Bank BTPN Tbk	-	5.000.000	*PT Bank BTPN Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	1.119.691	*PT Bank Pembagunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Mayapada International Tbk	-	1.000.000	*PT Bank Mayapada International Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	1.000.000	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
Pihak berelasi (Catatan 44a)	6.377.884.801	7.190.688.390	*Related parties (Note 44a)*
Subtotal	7.068.084.801	7.990.018.081	*Sub-total*
Dolar AS:			***US Dollar:***
Pihak berelasi (Catatan 44a)	168.988.936	161.894.623	*Related parties (Note 44a)*
Total deposito berjangka	**7.237.073.737**	**8.151.912.704**	***Total time deposits***

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2022	**2021**	
Rupiah	1,80% - 6,00%	2,25% - 5,27%	*Rupiah*
Dolar AS	0,20% - 4,25%	0,10% - 3,00%	*US Dollar*

5. INVESTASI JANGKA PENDEK / *5. SHORT-TERM INVESTMENTS*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Deposito berjangka			***Time deposits***
Rupiah:			*Rupiah:*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Bukopin Tbk	20.000.000	-	*PT Bank Bukopin Tbk*
Pihak berelasi (Catatan 44b)	1.667.500.000	1.650.000.000	*Related parties (Note 44b)*
Dolar AS:			*US Dollar:*
Pihak berelasi (Catatan 44b)	2.255.550.108	4.068.327.340	*Related parties (Note 44b)*
Total deposito berjangka	3.943.050.108	5.718.327.340	*Total time deposits*
Efek yang diperdagangkan	1.891	198.633	*Marketable securities*
Total investasi jangka pendek	**3.943.051.999**	**5.718.525.973**	***Total short-term investments***

Deposito berjangka merupakan deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun serta tidak dijadikan jaminan.

Time deposits represent deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year and were not used as collateral.

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2022	**2021**	
Rupiah	2,90% - 6,05%	2,25% - 6,25%	*Rupiah*
Dolar AS	0,30% - 4,15%	0,20% - 0,75%	*US Dollar*

Efek yang diperdagangkan merupakan instrumen keuangan dalam bentuk reksadana pasar uang.

Marketable securities represent financial instrument in money market mutual funds.

6. PIUTANG USAHA / *6. TRADE RECEIVABLES*

a. Berdasarkan pelanggan / *a. By customer*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Pihak ketiga			*Third parties*
Swasta	1.929.970.138	2.106.160.953	*Private*
Perorangan	11.689.593	9.376.284	*Individuals*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(811.233.846)	(876.711.767)	*Allowance for impairment*
Pihak ketiga - neto	1.130.425.885	1.238.825.470	*Third parties - net*
Pihak berelasi (Catatan 44c)	644.413.405	561.954.236	*Related parties (Note 44c)*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(324.732.089)	(284.517.160)	*Allowance for impairment*
Pihak berelasi - neto	319.681.316	277.437.076	*Related parties - net*
Total piutang usaha - neto	**1.450.107.201**	**1.516.262.546**	***Total trade receivables - net***

6. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *6. TRADE RECEIVABLES (continued)*

b. Berdasarkan mata uang / *b. By currency*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Rupiah	2.501.225.677	2.587.659.966	*Rupiah*
Dolar AS	84.847.459	89.831.507	*US Dollar*
Total	**2.586.073.136**	**2.677.491.473**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(1.135.965.935)	(1.161.228.927)	*Allowance for impairment*
Neto	**1.450.107.201**	**1.516.262.546**	***Net***

c. Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut: / *c. Movements in the allowance for impairment of trade receivable, are as follows:*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Saldo awal	1.161.228.927	1.165.003.761	*Beginning balance*
Penyisihan	57.355.739	122.259.579	*Allowance for impairment*
Pemulihan	(82.618.731)	(126.034.413)	*Reversal*
Saldo akhir	**1.135.965.935**	**1.161.228.927**	***Ending balance***

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang usaha cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha. Manajemen juga berkeyakinan bahwa tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.

As of December 31, 2022 and 2021, management believes that the allowance for impairment of trade receivable is adequate to cover possible losses on uncollectible trade receivables. Management also believes that there are no significant concentrations of credit risk on receivables from third parties.

Tabel berikut menyajikan analisis umur piutang usaha.

The following table presents the aging analysis of trade receivables.

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Belum jatuh tempo	263.711.508	540.601.210	*Not yet overdue*
Lewat jatuh tempo			*Overdue*
1-90 hari	949.936.337	914.452.235	*1-90 days*
91-180 hari	217.120.498	145.965.228	*91-180 days*
Lebih dari 180 hari	1.155.304.793	1.076.472.800	*More than 180 days*
Subtotal	2.586.073.136	2.677.491.473	*Sub-total*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(1.135.965.935)	(1.161.228.927)	*Allowance for impairment*
Neto	**1.450.107.201**	**1.516.262.546**	***Net***

7. PIUTANG LAIN-LAIN / *7. OTHER RECEIVABLES*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Pihak ketiga			*Third parties*
Swasta	105.476.103	185.862.939	*Private*
Perorangan	7.022.243	10.838.039	*Individuals*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(57.853.336)	(69.712.459)	*Allowance for impairment*
Pihak ketiga - neto	54.645.010	126.988.519	*Third parties - net*
Pihak berelasi (Catatan 44d)	420.385.729	1.242.292.898	*Related parties (Note 44d)*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(28.203.948)	(88.914.882)	*Allowance for impairment*
Pihak berelasi - neto	392.181.781	1.153.378.016	*Related parties - net*
Piutang lain-lain - neto	**446.826.791**	**1.280.366.535**	***Other receivables - net***

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

The movement in the allowance for impairment of other receivable are as follows:

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Saldo awal	158.627.341	152.347.840	*Beginning balance*
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan	(72.570.057)	6.279.501	*Allowance (recovery) for the year*
Saldo akhir	**86.057.284**	**158.627.341**	***Ending balance***

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan masing-masing piutang pada akhir tahun pelaporan, manajemen Grup berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Based on review of the status of each individual other receivable accounts at the end of the reporting year, the Group's management believes that the allowance for impairment loss is adequate to cover possible losses from uncollectible other receivables.

8. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA / *8. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Uang muka			***Advances***
Operasional	101.992.677	67.420.878	*Operational*
Lain-lain	16.008.986	1.518.015	*Others*
Subtotal	118.001.663	68.938.893	*Sub-total*
Beban dibayar di muka			***Prepaid expenses***
Asuransi	28.623.299	44.471.527	*Insurance*
Pegawai	26.794.822	52.374.591	*Employees*
Sewa	17.120.962	42.059.099	*Rental*
Umum	9.824.532	14.060.826	*General*
Pemeliharaan	1.007.221	12.008.540	*Maintenance*
Lain-lain	24.107.761	24.764.248	*Others*
Subtotal	107.478.597	189.738.831	*Sub-total*
Total	**225.480.260**	**258.677.724**	***Total***

9. PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA / *9. ACCRUED REVENUES*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Pihak ketiga	543.670.248	297.585.161	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 44e)	107.559.957	33.383.321	*Related parties (Note 44e)*
Total	**651.230.205**	**330.968.482**	***Total***

10. PERSEDIAAN / *10. INVENTORIES*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Suku cadang	212.364.275	176.273.424	*Spareparts*
Bahan bakar	67.065.664	42.728.088	*Fuels*
Alat tulis dan barang cetakan	188.794	643.761	*Stationaries and printings*
Obat, bahan, dan alat medis	288.194	331.907	*Medicines, materials, and medical equipment*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	4.467.560	6.182.313	*Others (each below Rp1 billion)*
Total	284.374.487	226.159.493	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan persediaan usang	(7.383.976)	(8.484.930)	*Allowance for inventory obsolence*
Neto	**276.990.511**	**217.674.563**	***Net***

Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut:

The movements are the allowance for inventory obsolence is as follows:

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Saldo awal	8.484.930	5.842.591	*Beginning balance*
Penyisihan tahun berjalan	693.962	2.642.339	*Allowance for the year*
Pemulihan tahun berjalan	(1.794.916)	-	*Recovery for the year*
Saldo akhir	**7.383.976**	**8.484.930**	***Ending balance***

11. INVESTASI JANGKA PANJANG / *11. LONG-TERM INVESTMENT*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Investasi pada entitas asosiasi	3.483.541.212	3.109.069.141	*Investment in associates*
Investasi pada penyertaan saham	35.239.244	82.207.761	*Investment in share of stocks*
Investasi pada surat utang	600.010.734	560.361.975	*Investment in bonds*
Total	**4.118.791.190**	**3.751.638.877**	***Total***

11. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan) / *11. LONG-TERM INVESTMENT (continued)*

a. Investasi pada entitas asosiasi / *a. Investment in associates*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Metode ekuitas			***Equity method***
BKMS	1.238.232.578	1.073.791.573	*BKMS*
JICT (Catatan 49g & 49h)	1.029.969.681	1.023.072.772	*JICT (Note 49g & 49h)*
NPCT1 (Catatan 49c & 49e)	483.859.214	359.887.918	*NPCT1 (49c & 49e)*
PHC	96.292.473	120.306.580	*PHC*
LNG	72.322.343	71.941.751	*LNG*
RSP	46.976.836	35.894.180	*RSP*
TNU	30.975.946	38.577.798	*TNU*
Ambapers	29.483.810	26.548.330	*Ambapers*
PTI	21.977.341	19.026.070	*PTI*
JBT	13.911.836	28.229.200	*JBT*
PCN	2.186.625	2.084.440	*PCN*
EMS	330.529	330.529	*EMS*
NWPKL			***FVOCI***
PBM IHC	417.022.000	288.750.000	*PBM IHC*
PT Djakarta Llyod	-	20.628.000	*PT Djakarta Llyod*
Total	**3.483.541.212**	**3.109.069.141**	***Total***

Perubahan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut: / *The movements of investments in associates are as follows:*

	31 Desember/*December 31,* 2022					
	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Harga perolehan/ *Cost*	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ *Accumulated equity in net income (loss) of associates*	Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	
Metode ekuitas						***Equity method***
Dimiliki melalui Perusahaan						*Owned through the Company*
JICT	51,00%	249.961.243	289.367.055	490.641.383	1.029.969.681	*JICT*
PHC	31,73%	45.060.000	51.716.789	(484.316)	96.292.473	*PHC*
RSP	32,88%	13.706.360	32.446.516	823.960	46.976.836	*RSP*
Ambapers	40,00%	6.000.000	23.401.854	81.956	29.483.810	*Ambapers*
JBT	13,86%	131.048.000	(117.082.973)	(53.191)	13.911.836	*JBT*
Portek Indonesia	49,00%	2.670.500	(2.670.500)	-	-	*Portek Indonesia*
Dimiliki melalui BJTI						*Owned through the BJTI*
BKMS	40,00%	800.000.000	438.187.227	45.351	1.238.232.578	*BKMS*
TNU	40,00%	68.500.000	(37.524.054)	-	30.975.946	*TNU*
PCN	30,00%	1.500.000	686.625	-	2.186.625	*PCN*
EMS	30,00%	300.000	30.529	-	330.529	*EMS*
Dimiliki melalui IPC TPK						*Owned through IPC TPK*
NPCT1	51,00%	173.770.056	280.432.975	29.656.183	483.859.214	*NPCT1*
Dimiliki melalui PMS						*Owned through the PMS*
LNG	49,00%	71.050.000	1.272.343	-	72.322.343	*LNG*
Dimiliki melalui PIL						*Owned through the PIL*
PTI	20,00%	18.000.000	3.977.341	-	21.977.341	*PTI*
NWPKL						***FVOCI***
Dimiliki melalui Perusahaan						*Owned through the Company*
PBM IHC	6,00%	288.750.000	-	128.272.000	417.022.000	*PBM IHC*
PT Djakarta Llyod	2,90%	20.628.000	-	(20.628.000)	-	*PT Djakarta Lloyd*
Total		**1.890.944.159**	**964.241.727**	**628.355.326**	**3.483.541.212**	***Total***

11. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan) / *11. LONG-TERM INVESTMENT (continued)*

a. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan) / *a. Investment in associates (continued)*

Perubahan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut: (lanjutan) / *The movements of investments in associates are as follows: (continued)*

	31 Desember/*December 31,* 2021					
	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	**Harga perolehan/ *Cost***	**Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ *Accumulated equity in net income (loss) of associates***	**Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income***	**Nilai tercatat/ *Carrying value***	
Metode ekuitas						***Equity method***
Dimiliki melalui Perusahaan						*Owned through the Company*
JICT	48,90%	108.289.249	559.896.301	354.887.222	1.023.072.772	*JICT*
PHC	31,73%	45.060.000	75.915.104	(668.524)	120.306.580	*PHC*
RSP	32,88%	13.706.360	22.236.037	(48.217)	35.894.180	*RSP*
JBT	13,86%	131.048.000	(102.804.955)	(13.845)	28.229.200	*JBT*
Ambapers	40,00%	6.000.000	20.361.307	187.023	26.548.330	*Ambapers*
Portek Indonesia	49,00%	2.670.500	(2.670.500)	-	-	*Portek Indonesia*
Dimiliki melalui BJTI						*Owned through the BJTI*
BKMS	40,00%	800.000.000	273.685.226	106.347	1.073.791.573	*BKMS*
TNU	40,00%	68.500.000	(29.922.202)	-	38.577.798	*TNU*
PCN	30,00%	1.500.000	584.440	-	2.084.440	*PCN*
EMS	30,00%	300.000	30.529	-	330.529	*EMS*
Dimiliki melalui IPC TPK						*Owned through IPC TPK*
NPCT1	51,00%	173.770.056	156.461.679	29.656.183	359.887.918	*NPCT1*
Dimiliki melalui PMS						*Owned through PMS*
LNG	49,00%	71.050.000	891.751	-	71.941.751	*LNG*
Dimiliki melalui PIL						*Owned through PIL*
PTI	20,00%	18.000.000	1.026.070	-	19.026.070	*PTI*
NWPKL						***FVOCI***
Dimiliki melalui Perusahaan						*Owned through the Company*
PBM IHC	6,00%	288.750.000	-	-	288.750.000	*PBM IHC*
PT Djakarta Llyod	2,90%	20.628.000	-	-	20.628.000	*PT Djakarta Lloyd*
Total		**1.749.272.165**	**975.690.787**	**384.106.189**	**3.109.069.141**	***Total***

b. Investasi pada saham / *b. Investment in share of stock*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	**31 Desember 2021/ *December 31, 2021***	
NWLR			*FVTPL*
PT Astra International Tbk	14.250.000	14.250.000	*PT Astra International Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	7.428.876	6.394.820	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bumi Serpong Damai Tbk	4.217.832	4.630.446	*PT Bumi Serpong Damai Tbk*
PT Buyung Poetra Sembada Tbk	1.236.000	2.172.000	*PT Buyung Poetra Sembada Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	15.304.818	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	11.920.020	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bukit Asam Tbk	-	9.015.086	*PT Bukit Asam Tbk*
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	-	2.992.240	*PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk*
PT Medco Energi Internasional Tbk	-	2.342.535	*PT Medco Energi Internasional Tbk*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	8.106.536	13.185.796	*Others (each below Rp2 billion)*
Total	**35.239.244**	**82.207.761**	***Total***

11. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan) / *11. LONG-TERM INVESTMENT (continued)*

c. Investasi pada surat utang / *c. Investment in bonds*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	57.277.510	-	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Medco Power Indonesia	50.512.500	51.906.614	*PT Medco Power Indonesia*
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	20.834.400	-	*PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	5.175.000	-	*PT Kereta Api Indonesia (Persero)*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	466.211.324	508.455.361	*Others (each below Rp2 billion)*
Total	**600.010.734**	**560.361.975**	***Total***

12. PROPERTI INVESTASI / *12. INVESTMENT PROPERTIES*

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022/ *Year Ended December 31, 2022*

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	576.010.187	248.478.858	-	-	824.489.045	*Land*
Bangunan fasilitas pelabuhan	700.131.110	2.061.247	-	-	702.192.357	*Port facilities*
Jalan dan bangunan	28.074.591	-	-	148.195.359	176.269.950	*Roads and buildings*
Total	**1.304.215.888**	**250.540.105**	**-**	**148.195.359**	**1.702.951.352**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	(416.980.942)	(20.750.821)		-	(437.731.763)	*Port facilities*
Jalan dan bangunan	(12.274.158)	(482.441)	-	(17.616.753)	(30.373.352)	*Roads and buildings*
Total	**(429.255.100)**	**(21.233.262)**	**-**	**(17.616.753)**	**(468.105.115)**	***Total***
Dikurangi:						*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(1.526.810)	-	-	-	(1.526.810)	*Allowance for impairment*
Nilai buku neto	**873.433.978**				**1.233.319.427**	***Net book value***

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021/ *Year Ended December 31, 2021*

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	553.013.673	5.873	-	22.990.641	576.010.187	*Land*
Bangunan fasilitas pelabuhan	693.909.905	6.221.205	-	-	700.131.110	*Port facilities*
Jalan dan bangunan	28.074.591	-	-	-	28.074.591	*Roads and buildings*
Total	**1.274.998.169**	**6.227.078**	**-**	**22.990.641**	**1.304.215.888**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	(395.931.577)	(21.049.365)	-	-	(416.980.942)	*Port facilities*
Jalan dan bangunan	(11.649.846)	(624.312)	-	-	(12.274.158)	*Roads and buildings*
Total	**(407.581.423)**	**(21.673.677)**	**-**	**-**	**(429.255.100)**	***Total***
Dikurangi:						*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	-	-	-	(1.526.810)	(1.526.810)	*Allowance for impairment*
Nilai buku neto	**867.416.746**				**873.433.978**	***Net book value***

Beban penyusutan properti investasi dicatat sebagai bagian dari beban operasi.

Depreciation expenses of investment properties are recorded as part of operating expenses.

12. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp12.128.281.665 dan Rp12.039.576.321, yang ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas properti investasi.

12. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

The fair value of investment properties as of December 31, 2022 and 2021 are calculated amounting to Rp12,128,281,665 and Rp12,039,576,321, respectively, which determined based on Sales Value of Tax Object (NJOP) of the investment properties.

13. ASET TETAP / *13. FIXED ASSETS*

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022/
Year *Ended December 31, 2022***

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition Costs***
Tanah	3.403.711.516	6.848.233	-	333.372.921	3.743.932.670	*Land*
Bangunan fasilitas pelabuhan	19.113.857.430	58.521.316	(2.614.969)	1.597.239.099	20.767.002.876	*Port facilities*
Kapal	5.945.716.876	1.131.369	(5.828.290)	(182.153.862)	5.758.866.093	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	16.712.741.883	31.934.176	(152.712.503)	57.246.988	16.649.210.544	*Port equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	3.498.893.462	38.151.166	(1.193.710)	140.513.578	3.676.364.496	*Port installation*
Jalan dan bangunan	5.779.160.164	254.628.539	(6.007.112)	238.968.220	6.266.749.811	*Roads and buildings*
Peralatan	1.669.392.356	46.793.573	(26.010.299)	(155.020.326)	1.535.155.304	*Equipment*
Kendaraan	178.116.172	3.552.476	(4.002.888)	144.009	177.809.769	*Vehicles*
Emplasemen	662.029.394	763.729	-	(8.271.946)	654.521.177	*Emplacement*
Subtotal	**56.963.619.253**	**442.324.577**	**(198.369.771)**	**2.022.038.681**	**59.229.612.740**	***Sub-total***
Aset dalam penyelesaian	7.933.244.086	1.516.684.153	(27.116.331)	(2.742.998.528)	6.679.813.380	*Construction in progress*
Total	**64.896.863.339**	**1.959.008.730**	**(225.486.102)**	**(720.959.847)**	**65.909.426.120**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	(4.401.196.283)	(1.063.910.949)	1.570.254	(96.218.802)	(5.559.755.780)	*Port facilities*
Kapal	(2.332.572.149)	(159.853.661)	5.484.195	(2.876.666)	(2.489.818.281)	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	(7.428.092.453)	(736.070.333)	144.492.420	(170.464.097)	(8.190.134.463)	*Port equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	(1.154.558.120)	(173.308.240)	830.814	2.425.057	(1.324.610.489)	*Port-installation*
Jalan dan bangunan	(1.693.743.550)	(90.397.111)	3.889.623	18.468.704	(1.761.782.334)	*Roads and buildings*
Peralatan	(1.199.778.545)	(129.120.835)	24.201.233	146.645.735	(1.158.052.412)	*Equipment*
Kendaraan	(117.378.975)	(9.155.247)	3.251.447	(10.860.159)	(134.142.934)	*Vehicles*
Emplasemen	(205.674.269)	(24.994.148)	-	7.190.837	(223.477.580)	*Emplacement*
Total	**(18.532.994.344)**	**(2.386.810.524)**	**183.719.986**	**(105.689.391)**	**(20.841.774.273)**	***Total***
Dikurangi:						*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(63.686.073)	-	9.023.472	20.845.901	(33.816.700)	*Allowance for impairment*
Nilai buku neto	**46.300.182.922**				**45.033.835.147**	***Net book value***

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021/
Year *Ended December 31, 2021***

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition Costs***
Tanah	3.321.174.108	49.458.238	-	33.079.170	3.403.711.516	*Land*
Bangunan fasilitas pelabuhan	18.145.061.821	77.741.877	(589.348)	891.643.080	19.113.857.430	*Port facilities*
Kapal	5.644.336.695	32.627.057	(3.343.767)	272.096.891	5.945.716.876	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	16.031.236.158	577.169.837	(16.607.812)	120.943.700	16.712.741.883	*Port equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	2.937.873.881	71.809.367	-	489.210.214	3.498.893.462	*Port installation*
Jalan dan bangunan	5.801.563.436	116.301.487	(2.355.484)	(136.349.275)	5.779.160.164	*Roads and buildings*
Peralatan	1.458.075.401	33.843.992	(6.648.513)	184.121.476	1.669.392.356	*Equipment*
Kendaraan	192.995.218	1.279.568	(11.471.022)	(4.687.592)	178.116.172	*Vehicles*
Emplasemen	550.609.196	4.386.607	(878.000)	107.911.591	662.029.394	*Emplacement*
Subtotal	**54.082.925.914**	**964.618.030**	**(41.893.946)**	**1.957.969.255**	**56.963.619.253**	***Sub-total***
Aset dalam penyelesaian	6.023.457.792	4.404.300.132	(7.981.912)	(2.486.531.926)	7.933.244.086	*Construction in progress*
Total	**60.106.383.706**	**5.368.918.162**	**(49.875.858)**	**(528.562.671)**	**64.896.863.339**	***Total***

13. ASET TETAP (lanjutan) / *13. FIXED ASSETS (continued)*

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021/
Year *Ended December 31, 2021***

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	(3.742.590.535)	(664.737.328)	462.049	5.669.531	(4.401.196.283)	*Port facilities*
Kapal	(2.050.939.452)	(288.699.894)	3.276.892	3.790.305	(2.332.572.149)	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	(5.815.145.155)	(1.590.715.301)	13.178.426	(35.410.423)	(7.428.092.453)	*Port equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	(988.819.802)	(151.473.698)	-	(14.264.620)	(1.154.558.120)	*Port-installation*
Jalan dan bangunan	(1.497.185.498)	(203.020.416)	1.458.778	5.003.586	(1.693.743.550)	*Roads and buildings*
Peralatan	(987.292.760)	(222.793.381)	6.488.338	3.819.258	(1.199.778.545)	*Equipment*
Kendaraan	(141.203.612)	(10.523.923)	8.862.822	25.485.738	(117.378.975)	*Vehicles*
Emplasemen	(185.401.183)	(23.054.196)	97.517	2.683.593	(205.674.269)	*Emplacement*
Total	**(15.408.577.997)**	**(3.155.018.137)**	**33.824.822**	**(3.223.032)**	**(18.532.994.344)**	***Total***
Dikurangi:						*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(119.202.784)	-	48.128.344	7.388.367	(63.686.073)	*Allowance for Impair*
Nilai buku neto	**44.578.602.925**				**46.300.182.922**	***Net book value***

Beban penyusutan aset tetap dicatat sebagai bagian dari beban operasi.

Depreciation expense of fixed assets are recorded as part of operating expenses.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Grup mengasuransikan aset tetap sebagai berikut:

As of December 31, 2022 and 2021, the Group insured its fixed assets as follows:

31 Desember 2022 / *December 31, 2022*

Perusahaan Asuransi/ *Insurance Company*	**Risiko Asuransi/ *Insurable Risk***	**Nilai Pertanggungan Asuransi/*Insurance Coverage Amount***
PT Asuransi Kredit Indonesia PT Asuransi Tri Pakarta PT Asuransi Ramayana PT MS Amlin PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Shipowners Mutual Protection Indemnity Association PT Asuransi Central Asia PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk PT Asuransi FPG Indonesia PT Asuransi Wahana Tata PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Risiko kebakaran, *property all risk, industrial all risk* dan risiko lainnya/ *Risk of fire, property all risk, industrial all risk and other risks*	Rp46.585.743.730; USD547.000.000

31 Desember 2021 / *December 31, 2021*

Perusahaan Asuransi/ *Insurance Company*	**Risiko Asuransi/ *Insurable Risk***	**Nilai Pertanggungan Asuransi/*Insurance Coverage Amount***
PT Asuransi Kredit Indonesia PT Asuransi FPG Indonesia PT Asuransi Ramayana PT MS Amlin PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Shipowners Mutual Protection Indemnity Association PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Risiko kebakaran, *property all risk, industrial all risk* dan risiko lainnya/ *Risk of fire, property all risk, industrial all risk and other risks*	Rp46.550.371.671; USD528.000.000

13. ASET TETAP (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang diasuransikan.

Reklasifikasi pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk reklasifikasi aset tetap menjadi properti investasi sebesar Rp126.582.190, reklasifikasi aset dalam penyelesaian menjadi aset takberwujud sebesar Rp34.148.365, reklasifikasi aset tetap menjadi aset takberwujud sebesar Rp822.386.523, reklasifikasi aset tidak lancar lainnya menjadi aset tetap sebesar Rp150.272.583 dan reklasifikasi aset takberwujud menjadi aset tetap sebesar Rp111.884.648.

Reklasifikasi pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk reklasifikasi aset dalam penyelesaian menjadi aset tidak lancar lainnya sebesar Rp331.589.436, reklasifikasi aset tetap menjadi properti investasi sebesar Rp22.990.641 dan reklasifikasi aset tetap menjadi aset takberwujud sebesar Rp173.982.594.

Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap

Pada tahun 2022 dan 2021, Grup menjual dan menghapusbukukan beberapa aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2022/*Year 2022*

Penjualan aset tetap/*Sale of fixed assets*

Entitas/*Entity*	Nilai pelepasan/*Sales value*	Nilai buku/*Book value*	Laba (rugi) penjualan/*Gain (loss) on sales*	Persetujuan pemegang saham/Dewan Komisaris/*Shareholders/Board of Commissioners Approval*
Perusahaan/ *The Company*	1.549.243	2.385.969	(836.726)	No. 101/DK/PI/XII-2022 tanggal 19 Desember 2022 dan 54/DKP/PI.II/IX-2021 tanggal 15 September 2021/ *No. 101/DK/PI/XII-2022 dated December 19, 2022 and No. 54/DKP/PI.II/IX-2021 dated September 15, 2021*
Perusahaan/ *The Company*	1.839.654	1.075.161	764.493	SK Menteri no. S-546/MBU/07/ 2021 tanggal 30 Juli 2021, 54/DKP/PI.II/IX-2021 tanggal 15 September 2021/ *Minesterial Decree No. S-546/MBU/07/2021 dated July 30, 2021 and 54/DKP/PI.II/IX-2021 dated September 15, 2021*
Perusahaan/ The Company	6.690.122	6.253.210	436.911	SK Menteri No. S-724/MBU/09/2021 tanggal 23 September 2021/ *Minesterial Decree No. S-724/MBU/09/2021 dated September 23, 2021*
Total	**10.079.019**	**9.714.340**	**364.678**	

13. *FIXED ASSETS (continued)*

In management's opinion, the above insurance coverage is adequate to cover any possible losses that may arise from such risks.

Reclassification as of December 31, 2022 includes reclassification of assets into investment property amounting to Rp126,582,190, reclassification of assets under construction into intangible assets amounting to Rp34,148,365, reclassification of assets into intangible assets amounting to Rp822,386,523, reclassification of other non-current assets to assets amounting to Rp150,272,585 and reclassification of intangible assets to assets amounting to Rp111,884,648.

Reclassification as of December 31, 2021 includes reclassification of property, plant and equipment into other current assets amounting to Rp331,589,436, reclassification of property and equipment amounting to Rp22,990,641 and reclassification of assets into intangible assets amounting to Rp173,982,594.

Sale and Write-off of Fixed Assets

In 2022 and 2021, the Group sold and written-off several fixed assets with details as follows:

13. ASET TETAP (lanjutan) / *13. FIXED ASSETS (continued)*

Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap (lanjutan) / *Sale and Write-off of Fixed Assets (continued)*

Tahun 2022/*Year 2022 (*lanjutan/*continued)*

Penghapusan aset tetap/*Write-off of fixed assets*

Entitas/*Entity*	Nilai buku/*Book value*	Rugi penghapusan/ *Loss on disposals*	Persetujuan pemegang saham/Dewan Komisaris/*Shareholders/Board of Commissioners Approval*
Perusahaan/ *The Company*	520.468	(520.468)	Surat Menteri No. S-546/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021/ *Minesterial Decree No. S-546/MBU/07/2021 dated July 30, 2021*
BJTI	2.955.783	(2.955.783)	No.KU.03.02/22/12/1/PAPU/KUPP/PLTP-22 tanggal 22 Desember 2022/ *No. KU.03.02/22/12/1/PAPU/KUPP/PLTP-22 dated December 22, 2022*
EDII	401.274	(401.274)	No.2632/D01/KU.280/09/2022 tanggal 21 September 2022/ *No. 2632/D01/KU.280/09/2022 dated September 21, 2022*
Perusahaan/ *The Company*	1.057.920	(1.057.920)	SK Menteri No. S-724/MBU/09/2021 tanggal 23 September 2021/ *Minesterial Decree No. S-724/MBU/09/2021 dated September 23, 2021*
Total	**4.935.445**	**(4.935.445)**	

Tahun 2021/*Year 2021*

Penjualan aset tetap/*Sale of fixed assets*

Entitas/*Entity*	Nilai pelepasan/*Sales value*	Nilai buku/ *Book value*	Laba penjualan/*Gain on sales*	Persetujuan pemegang saham/Dewan Komisaris/*Shareholders/Board of Commissioners Approval*
Perusahaan/ *The Company*	3.521.883	3.148.632	373.251	No. 45/DK/PI.II/VII.2020 tanggal 31 Juli 2020/ *No. 45/DK/PI.II/ VII.2020 dated July 31, 2020*
Perusahaan/ *The Company*	11.005.302	7.428.218	3.577.084	No. UM.186/08/S/CMSR-2021 tanggal 13 Agustus 2021 dan SK Menteri No. S-722/MBU/09/2021 tanggal 23 September 2021/ *No. UM.186/08/S/CMSR-2021 dated August 13, 2021 and SK Menteri No. S-722/MBU/09/2021 dated September 23, 2021*
Perusahaan/ *The Company*	154.255	2.899	151.356	No. 45/DK/PI.II/VII.2020 tanggal 31 Juli 2020/*No. 45/DK/PI.II/ VII.2020 dated July 31, 2020*
PTP	6.763.000	3.546.690	3.216.310	No. SK.46/KU.202/DUT-2021 tanggal 10 September 2021, No. UM.186/08/S/CMSR-2021 tanggal 13 Agustus 2021 dan No. SK Menteri No. S-722/MBU/09/2021 Tanggal 23 September 2021/ *No. SK.46/KU.202/DUT-2021 dated September 10, 2021, No. UM.186/08/S/CMSR-2021 dated August 13, 2021 and No. Ministerial Decree No. S-722/MBU/09/2021 dated September 23, 2021*
Total	**21.444.440**	**14.126.439**	**7.318.001**	

13. ASET TETAP (lanjutan) / *13. FIXED ASSETS (continued)*

Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap (lanjutan) / ***Sale and Write-off of Fixed Assets (continued)***

Tahun 2021/*Year 2021 (*lanjutan/*continued)*

Penghapusan aset tetap/*Write-off of fixed assets*

Entitas/*Entity*	Nilai buku/*Book value*	Rugi penjualan/ *Loss on disposals*	Persetujuan pemegang saham/Dewan Komisaris/*Shareholders/Board of Commissioners Approval*
Perusahaan/ *The Company*	2.844.376	(2.844.376)	No. KU.61/151/DK/PP.I/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020/ *No. KU.61/151/DK/PP.I/VII/2020 date July 27, 2020*
Perusahaan/ *The Company*	1.965.207	(1.965.207)	No. UM.186/08/S/CMSR-2021 tanggal 13 Agustus 2021 dan SK Menteri No. S-722/MBU/09/2021 tanggal 23 September 2021/*No. UM.186/08/S/CMSR-2021 dated August 13, 2021 and Ministerial Decree No. S-722/MBU/09/2021 dated September 23, 2021*
Perusahaan/ *The Company*	690.727	(690.727)	No. SK.3/KU.202/DUT-2021 tanggal 9 Februari 2021, No. SK.014/KU.202/DUT-2020 tanggal 13 April 2020 dan No. SK Menteri S-623/MBU/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021/ *No. SK.3/KU.202/DUT-2021 dated February 9, 2021, No. SK.014/KU.202/DUT-2020 dated April 13, 2020 and No. Ministerial Decree S-623/MBU/08/*2021 dated August 25, 2021
PII	39.474	(39.474)	No. 003/DK-PII/Eksternal/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020/*No. 003/DK-PII/Eksternal/X/2020 dated October 12, 2020*
SPSL	10.992	(10.992)	No. DK/26/11/1/PPI-2021 tanggal 26 November 2021/*No. DK/26/11/1/PPI-2021 dated November 26, 2021*
Total	**5.550.776**	**(5.550.776)**	

Aset dalam Penyelesaian / ***Construction in Progress***

Aset dalam penyelesaian terdiri dari: / *Construction in progress consists of:*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Bangunan fasilitas pelabuhan	5.053.381.370	5.773.342.376	*Port facilities*
Emplasemen	465.103.753	564.691.967	*Emplacement*
Jalan dan bangunan	397.044.977	781.678.607	*Roads and buildings*
Kapal	333.792.155	324.424.550	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	188.442.169	204.236.990	*Port equipment*
Peralatan	113.439.856	138.923.954	*Equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	90.024.952	138.882.469	*Port installation*
Lainnya	38.584.148	7.063.173	*Others*
Total	**6.679.813.380**	**7.933.244.086**	***Total***

13. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam Penyelesaian (lanjutan)

Persentase penyelesaian dan taksiran jangka waktu penyelesaian atas aset dalam penyelesaian yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022

Jenis aset	Persentase penyelesaian/ *Percentage of Completion*	Target penyelesaian/ *Target of completion*	*Type of assets*
Pekerjaan peninggian, perkuatan, dan pendalaman dermaga	9,11% - 94,62%	2023 - 2025	*Elevation, reinforcement and dredging of dock project*
Pekerjaan pembangunan kapal	80,4% - 82,88%	2023	*Construction of ship*
Pekerjaan perkuatan lapangan penumpukan	16,58% - 93,10%	2023	*Construction of yard*
Bangunan dan alat fasilitas pelabuhan	6,37% - 95,00%	2023 - 2026	*Building and port equipment facilities*
Instalasi fasilitas pelabuhan	10,00% - 92,18%	2023	*Port facility installation*

31 Desember 2021

Jenis aset	Persentase penyelesaian/ *Percentage of Completion*	Target penyelesaian/ *Target of completion*	*Type of assets*
Pekerjaan peninggian, perkuatan, dan pendalaman dermaga	4,00% - 91,00%	2022	*Elevation, reinforcement and dredging of dock project*
Pekerjaan pembangunan kapal	2,00% - 65,00%	2022	*Construction of ship*
Pekerjaan perkuatan lapangan penumpukan	3,00% - 87,00%	2022	*Construction of yard*
Bangunan dan alat fasilitas pelabuhan	10,00% - 92,00%	2021-2024	*Building and port equipment facilities*
Instalasi fasilitas pelabuhan	16,00% - 67,00%	2022	*Port facility installation*

Biaya perolehan aset dalam penyelesaian tersebut di atas termasuk beban pinjaman yang dikapitalisasi sebesar Rp47.306.746 dan Rp89.535.918 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

13. FIXED ASSETS (continued)

Construction in Progress (continued)

The percentages of completion and estimated completion periods of significant construction in progress as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

December 31, 2022

December 31, 2021

Cost of construction in progress includes capitalized borrowing cost amounting to Rp47,306,746 and Rp89,535,918 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively.

14. ASET KERJASAMA OPERASI

Aset kerjasama operasi merupakan aset yang diserahkan untuk dikelola oleh TPK Koja dan MKO MTKI masing-masing berdasarkan perjanjian kontraktual dengan PT Hutchison Ports Indonesia (Catatan 49d) dan PT Maspion Industrial Estate, dengan rincian sebagai berikut:

14. JOINT OPERATION ASSETS

Jointly controlled assets represent assets that are transferred to be managed by TPK Koja dan MKO MTKI based on contractual agreement with PT Hutchison Ports Indonesia (Note 49e) and PT Maspion Industrial Estate, respectively, with details as follow:

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022/
*Year ended December 31, 2022***

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Bangunan fasilitas pelabuhan	772.669.489	-	-	-	772.669.489	*Port facilities*
Alat fasilitas pelabuhan	87.538.706	-	-	(1.113.947)	86.424.759	*Port equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	10.504.447	-	-	-	10.504.447	*Port installation*
Jalan dan bangunan	1.082.111	-	-	-	1.082.111	*Roads and buildings*
Peralatan	1.535.821	-	-	-	1.535.821	*Equipment*
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	*Emplacement*
Total	**877.861.094**	**-**	**-**	**(1.113.947)**	**876.747.147**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	(402.256.954)	(20.516.614)	-	-	(422.773.568)	*Port facilities*
Alat fasilitas pelabuhan	(59.719.821)	(5.985.692)	-	48.541	(65.656.972)	*Port equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	(4.810.046)	(323.210)	-	-	(5.133.256)	*Port installation*
Jalan dan bangunan	(429.977)	(56.894)	-	-	(486.871)	*Roads and buildings*
Peralatan	(1.505.107)	-	-	-	(1.505.107)	*Equipment*
Emplasemen	(1.065.576)	(177.596)	-	-	(1.243.172)	*Emplacement*
Total	**(469.787.481)**	**(27.060.006)**	**-**	**48.541**	**(496.798.946)**	***Total***
Dikurangi:						*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(60.467)	-	-	-	(60.467)	*Allowance for impairment*
Nilai buku neto	**408.013.146**				**379.887.734**	***Net book value***

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021/
*Year ended December 31, 2021***

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Bangunan fasilitas pelabuhan	772.669.489	-	-	-	772.669.489	*Port facilities*
Alat fasilitas pelabuhan	86.424.760	1.113.946	-	-	87.538.706	*Port equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	10.504.447	-	-	-	10.504.447	*Port installation*
Jalan dan bangunan	1.082.111	-	-	-	1.082.111	*Roads and buildings*
Peralatan	1.535.821	-	-	-	1.535.821	*Equipment*
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	*Emplacement*
Total	**876.747.148**	**1.113.946**	**-**	**-**	**877.861.094**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	(381.740.341)	(20.516.613)	-	-	(402.256.954)	*Port facilities*
Alat fasilitas pelabuhan	(53.685.589)	(6.034.232)	-	-	(59.719.821)	*Port equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	(4.429.943)	(380.103)	-	-	(4.810.046)	*Port installation*
Jalan dan bangunan	(415.644)	(14.333)	-	-	(429.977)	*Roads and buildings*
Peralatan	(1.470.518)	(34.589)	-	-	(1.505.107)	*Equipment*
Emplasemen	(887.980)	(177.596)	-	-	(1.065.576)	*Emplacement*
Total	**(442.630.015)**	**(27.157.466)**	**-**	**-**	**(469.787.481)**	***Total***
Dikurangi:						*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	-	(60.467)	-	-	(60.467)	*Allowance for impairment*
Nilai buku neto	**434.117.133**				**408.013.146**	***Net book value***

15. ASET TAKBERWUJUD / *15. INTANGIBLE ASSETS*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Aset hak konsesi	42.332.482.771	39.317.534.983	*Concession rights assets*
Piranti lunak	1.386.093.582	1.332.014.102	*Software application*
Sertifikasi	143.041.164	143.041.164	*Certification*
Lisensi	93.784.038	93.309.813	*License*
Aset takberwujud lainnya	104.379.824	300.537.663	*Other intangible assets*
Aset dalam penyelesaian	1.649.219.115	72.392.067	*Construction in progress*
Subtotal	45.709.000.494	41.258.829.792	*Sub-total*
Akumulasi amortisasi dan penyisihan penurunan nilai	(3.162.457.756)	(2.498.374.944)	*Accumulated amortization allowance for impairment*
Neto	**42.546.542.738**	**38.760.454.848**	***Net***

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, aset takberwujud tidak dijaminkan.

As of December 31, 2022 and 2021, intangible assets are not pledged as collateral.

Aset hak konsesi

Concession rights assets

Aset hak konsesi merupakan aset yang dibangun berdasarkan hak yang diberikan oleh Otoritas Pelabuhan kepada Perusahaan untuk membangun dan mengoperasikan terminal pelabuhan dan jalan tol Cibitung - Cilincing berdasarkan Perjanjian Konsesi (Catatan 48).

Concession rights assets represent assets which were constructed based on the right granted by Port Authority to the Company to develop and operate port terminal and the Cibitung - Cilincing toll road based on Concession Agreement (Note 48).

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, persentase rata-rata penyelesaian pembangunan terminal pelabuhan dan konstruksi jalan tol masih dalam konstruksi adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2022 and 2021, the average percentage completion of port and toll road construction are as follows:

Terminal Pelabuhan dan Jalan Tol/ *Port Terminal and Toll Road*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*
Kalibaru	69,79%	97,78%
Kijing	95,62%	92,60%
Teluk Lamong	100,00%	94,00%
Manyar Gresik	91,00%	95,00%
Makassar New Port	94,00%	79,71%
Cibitung-Cilincing Toll Road	98,80%	92,15%

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam aset hak konsesi pembangunan terminal pelabuhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Borrowing costs capitalized for the concession assets of port terminal for the year ended December 31, 2022 and 2021 are as follows:

Terminal Pelabuhan dan Jalan Tol/ *Port Terminal and Toll Road*	2022	2021
Kalibaru	143.445.657	198.224.721
Kijing	240.350.899	119.624.272
Makassar New Port	256.123.548	90.437.248
Teluk Lamong	-	26.115.965
Cibitung-Cilincing Toll Road	404.690.477	511.684.405
Manyar Gresik	15.136.177	-

15. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset hak konsesi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan aplikasi *Port Wide Solution* untuk pelayanan *car terminal*, *container terminal* dan pergudangan beserta *Annual Technical Support (ATS)* dan *change request*, aplikasi piranti lunak yang berlisensi yang digunakan untuk proses pertukaran data secara elektronik *(electronic data interchange)*, aplikasi bidang operasional, ERP (sistem informasi keuangan, personalia, teknik), pengembangan *Port Community System/Inaportnet*, aplikasi *dash board system* untuk menyajikan informasi mengenai performansi operasional, integrasi antar sistem, integrasi *autogate* dan VGM untuk sistem operasi terminal.

15. INTANGIBLE ASSETS (continued)

The Group's management believes that there was no impairment in the value of concession rights assets as of December 31, 2022 and 2021.

Software

Software application represents cost incurred for the development of Port Wide Solution application for car terminal services, container terminal services and warehouse and Annual Technical Support (ATS) and change request, licensed software application used for electronic data interchange, operational application, ERP (finance, human resources, technical information system), development of Port Community System/ Inaportnet, dash board system application to present information regarding operational performance, system integration, autogate integration and VGM for terminal operating system.

16. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA

Mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

16. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES

The movements in right-of-use assets are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022/ *Year ended December 31, 2022*					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Harga perolehan						***Acquisition Costs***
Bangunan fasilitas pelabuhan	203.669.947	206.935.857	(127.177.711)	-	283.428.093	*Port facilities*
Kapal	119.407.557	38.428.227	(9.805.647)	-	148.030.137	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	25.697.627	986.764	(24.930.117)	-	1.754.274	*Port equipment*
Peralatan	98.735.557	587.533	(96.284.686)	-	3.038.404	*Equipments*
Tanah	173.665.160	31.991.371	(16.710.105)	-	188.946.426	*Lands*
Kendaraan	36.365.322	42.604.722	(2.054.734)	-	76.915.310	*Vehicles*
Subtotal	**657.541.170**	**321.534.474**	**(276.963.000)**	**-**	**702.112.644**	***Subtotal***
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	(71.811.896)	(21.496.959)	97.243	-	(93.211.612)	*Port facilities*
Kapal	(84.619.316)	(19.067.430)	4.117.793	-	(99.568.953)	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	(18.432.755)	(13.422.030)	30.100.511	-	(1.754.274)	*Port equipment*
Peralatan	(10.742.429)	(4.442.654)	13.729.196	-	(1.455.887)	*Equipment*
Tanah	(3.576.677)	(9.760.737)	6.263.523	-	(7.073.891)	*Lands*
Kendaraan	(16.355.908)	(28.703.772)	-	-	(45.059.680)	*Vehicles*
Subtotal	**(205.538.981)**	**(96.893.582)**	**54.308.266**	**-**	**(248.124.297)**	***Subtotal***
Nilai buku bersih	**452.002.189**				**453.988.347**	***Net book value***

16. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (lanjutan) / *16. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES (continued)*

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021/ *Year ended December 31, 2021*

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga perolehan						***Acquisition Costs***
Bangunan fasilitas pelabuhan	194.592.564	9.077.383	-	-	203.669.947	*Port facilities*
Kapal	119.407.557	-	-	-	119.407.557	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	23.224.766	2.472.861	-	-	25.697.627	*Port equipment*
Peralatan	113.513.905	-	(14.778.348)	-	98.735.557	*Equipments*
Tanah	174.268.831	-	(603.671)	-	173.665.160	*Lands*
Kendaraan	3.471.137	34.222.799	(1.328.614)	-	36.365.322	*Vehicles*
Subtotal	**628.478.760**	**45.773.043**	**(16.710.633)**	**-**	**657.541.170**	***Subtotal***
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	(23.243.659)	(48.568.237)	-	-	(71.811.896)	*Port facilities*
Kapal	(55.621.215)	(28.998.101)	-	-	(84.619.316)	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	(12.629.956)	(5.802.799)	-	-	(18.432.755)	*Port equipment*
Peralatan	(18.154.093)	(5.584.463)	12.996.127	-	(10.742.429)	*Equipment*
Tanah	(674.450)	(3.224.583)	322.356	-	(3.576.677)	*Lands*
Kendaraan	(2.134.626)	(15.195.717)	974.435	-	(16.355.908)	*Vehicles*
Subtotal	**(112.457.999)**	**(107.373.900)**	**14.292.918**	**-**	**(205.538.981)**	***Subtotal***
Nilai buku bersih	**516.020.761**				**452.002.189**	***Net book value***

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut: / *The detail of lease liabilities is as follows:*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Liabilitas sewa			*Lease liabilities*
Bagian lancar	49.907.726	76.345.578	*Current portion*
Bagian jangka panjang	385.228.086	257.540.134	*Long-term portion*
Total	**435.135.812**	**333.885.712**	***Total***

Jumlah yang diakui dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut: / *Amount recognized in statement of cash flow is as follows:*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2022	**2021**	
Beban penyusutan aset hak-guna	96.893.582	107.373.900	*Depreciation of right-of-use assets*
Bunga atas liabilitas sewa	30.313.025	35.293.846	*Interest on lease liabilities*
Total	**127.206.607**	**142.667.746**	***Total***
Jumlah kas keluar untuk:			*Total cash outflow for:*
Pembayaran liabilitas sewa	106.561.367	126.329.193	*Payment of lease liabilities*
Pembayaran bunga	32.330.966	36.412.536	*Payment of interests*
Total	**138.892.333**	**162.741.729**	***Total***

16. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (lanjutan) / *RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES (continued)*

Beberapa transaksi sewa mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Grup sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Grup. Grup mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan. Grup mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Grup.

Some leases contain extension options exercisable by the Group before the end of the non-cancellable contract period. The extension options held are exercisable only by the Group. The Group assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Group reassesses this assessment if there is a significant event or significant change in circumstances within its control.

Ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut:

Summary of component of changes in the liabilities arising from leases is as folllow:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2022	**2021**	
Liabilitas sewa			*Lease liabilities*
Saldo awal	333.885.712	394.725.914	*Beginning balance*
Penambahan selama tahun berjalan	321.534.474	45.773.043	*Additions during the year*
Arus kas	(138.892.333)	(162.741.729)	*Cash flow*
Perubahan non-kas	38.288.643	56.128.484	*Non-cash change*
Terminasi kontrak	(119.680.684)	-	*Contract termination*
Saldo akhir	**435.135.812**	**333.885.712**	***Ending balance***

Berdasarkan penilaian manajemen Grup, tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset hak-guna pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Based on the evaluation of the Group's management, there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in value of right-of-use assets as of December 31, 2022 and 2021.

17. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA / *OTHER NON-CURRENT ASSETS*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	**31 Desember 2021/ *December 31, 2021***	
Uang muka pembelian aset tetap	535.957.148	259.168.931	*Advances for purchase of fixed assets*
Piutang perluasan kawasan industri	124.811.321	127.000.000	*Receivable for expansion of industrial estate*
Pajak final dibayar di muka	113.836.681	126.924.148	*Prepaid final tax*
Piutang pemulihan investasi	80.303.277	64.838.387	*Receivable investment recovery*
Jaminan pelaksanaan	37.000.000	69.777.240	*Performance guarantee*
Goodwill	42.266.304	32.550.784	*Goodwill*
Uang jaminan	34.422.211	31.684.181	*Guarantee*
Biaya transaksi pinjaman sindikasi	29.506.875	-	*Syndicated loan transaction fee*
Piutang pajak	28.361.374	29.340.959	*Tax receivables*
Aset tetap tidak produktif	9.922.943	130.179.339	*Unproductive fixed assets*
Aset tetap belum dimanfaatkan	-	25.493.693	*Fixed assets not utilized*
Aset lain-lain	557.351.735	254.667.895	*Other assets*
Dikurangi:			*Less:*
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	(372.232.334)	(186.800.573)	*Accumulated depreciation and impairment*
Total	**1.221.507.535**	**964.824.984**	***Total***

17. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Uang muka pembelian aset tetap terutama merupakan uang muka atas pengadaan kapal, pembangunan Terminal Kalibaru dan pembangunan proyek *Bali Maritime Tourism Hub* (BMTH) di Benoa, Bali.

Piutang perluasan kawasan industri
Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman antara BJTI dengan BKMS No. KKS.005-00/II/BJTI-2020 tanggal 26 Februari 2020, BJTI menyetujui untuk memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp200.000.000 dalam rangka perluasan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan. Jangka waktu pinjaman adalah 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut. Bunga pinjaman sebesar 9,5% per tahun yang dibayar setiap bulan dan akan dikenakan denda jika melewati jatuh tempo. Sampai dengan 31 Desember 2022, BKMS telah melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp200.000.000 dan dibayar sebagian oleh BKMS sehingga saldo pinjaman per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp124.811.321 dan Rp127.000.000.

Pajak final dibayar di muka merupakan pajak final atas pembangunan dan pengoperasian Terminal Petikemas 1, Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok yang dibayarkan di muka oleh SPSL kepada NPCT1 (Catatan 49c).

Piutang pemulihan investasi adalah piutang atas laba neto TPK Koja yang belum didistribusikan ke Perusahaan.

Jaminan pelaksanaan merupakan bank garansi kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sehubungan dengan jaminan pelaksanaan pembangunan terminal Kalibaru dan Kijing (Catatan 48a).

Goodwill terutama merupakan *goodwill* yang timbul dari transaksi akuisisi 45,00% kepemilikan saham di CTP (dahulu MTDX) senilai Rp31.407.481 pada tahun 2015.

Uang jaminan diantaranya merupakan jaminan instalasi listrik di Tanjung Priok, bank garansi, telepon, jaringan internet dan mesin fotokopi.

Biaya transaksi pinjaman sindikasi merupakan beban ditangguhkan atas pinjaman sindikasi ke PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang belum efektif sampai pada tanggal laporan keuangan konsolidasian.

17. OTHER NON-CURRENT ASSETS (continued)

Advances for purchase of fixed assets mainly represent advances for ship procurement, construction of the Kalibaru Terminal and construction for Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) in Benoa, Bali.

Receivable for expansion of industrial estate
According to the Loan Facility Agreement between BJTI and BKMS No. KKS.005-00/II/BJTI-2020 dated February 26, 2020, BJTI agreed to provide a loan facility amounting to Rp200,000,000 for the purpose of the extension of industrial estate facilities which is integrated with the port. The loan period is 5 years from the signing date of the agreement. The loan interest is at 9.5% which is paid monthly and will be charged with penalty if it passes the due date. Until December 31, 2022, BKMS has withdrawn the loan amounting to Rp200,000,000 and partially paid by BKMS, therefore, with the loan balance as of December 31, 2022, and 2021 amounting to Rp124,811,321 and Rp127,000,000, and respectively.

Prepaid final tax represents the final tax for the construction and operation of Container Terminal 1, Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port which was paid in advance by SPSL to NPCT1 (Note 49c).

Investment recovery receivables represents receivables from net income of TPK Koja which has not been distributed to the Company.

Performance bond represents bank guarantee to the Port Authority Tanjung Priok in relation to the development of Kalibaru terminal and Kijing Terminal (Notes 48a).

Goodwill mainly represents goodwill arising from acquisition of 45.00% shares ownership in CTP (formerly MTDX) amounting to Rp31,407,481 in 2015.

Security deposits represents among others electricity deposits at Tanjung Priok, bank guarantee, deposits for telephone, internet connection and photocopy machine.

Syndicated loan transaction fee represent deferred charges on syndicated loans to PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk which have not yet been effective until the date of the consolidated financial statements.

17. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Piutang pajak merupakan piutang kelebihan pembayaran pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Aset tetap tidak produktif merupakan aset tetap yang tidak dapat dioperasikan lagi dalam kegiatan operasional Grup, yang sebagian besar terdiri atas kapal, dan alat-alat fasilitas pelabuhan seperti *transtainer, Rubber Tired Gantry Crane (RTGC), forklift, reach stacker,* dan *harbour mobile crane*.

Aset lain-lain terutama merupakan biaya yang ditangguhkan dari pengerukan kolam, peralatan *vessel traffic service,* relokasi aset dan perbaikan kapal keruk.

17. OTHER NON-CURRENT ASSETS (continued)

Tax receivables represents overpayment of Tax of Land and Building (PBB) and Value Added Tax (VAT).

Unproductive fixed assets are fixed assets that cannot be operated anymore in the Group's operational activities, which mostly consist of ships and port facilities such as transtainer, Rubber Tired Gantry Crane (RTGC), forklift, reach stacker, and harbour mobile crane.

Other assets mainly represents deferred charge for dredging, vessel traffic service equipment, asset relocation and dredges repairment.

18. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

Pinjaman bank jangka pendek terdiri dari:

18. SHORT-TERM BANK LOANS

Short-term bank loans consist of:

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Rupiah			***Rupiah***
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank OCBC NISP Tbk	2.255.302	5.196.855	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
Pihak berelasi (Catatan 44f)	103.106.529	133.296.919	*Related party (Note 44f)*
Total	**105.361.831**	**138.493.774**	***Total***

EDII

Pada tanggal 13 November 2012, EDII memperoleh fasilitas dari PT Bank OCBC NISP ("Bank OCBC") dimana atas perjanjian tersebut diperpanjang berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 152/BBL-GSH-COMM/PPP/XI/2022 tanggal 28 November 2022. Adapun fasilitas yang diberikan adalah Fasilitas Rekening Koran sebesar Rp4.000.000 dengan suku bunga 10,25% per tahun; Fasilitas Bank Garansi Rp10.000.000 dan Fasilitas *Demand Loan* sebesar Rp10.000.000 dengan suku bunga 10,25% per tahun *floating*.

Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2023. Saldo terutang atas penggunaan fasilitas Bank OCBC per 31 Desember 2022 adalah Fasilitas Rekening Koran sebesar Rp2.255.301 jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2023 dan Fasilitas Bank Garansi sebesar Rp322.775.

EDII

On November 13, 2012, EDII obtained a facility from PT Bank OCBC NISP ("Bank OCBC") which the agreement was extended based on Amendment to Loan Agreement No. 152/BBL-GSH-COMM/PPP/XI/2022 on November 28, 2022. The facilities provided are Current Account Facility of Rp4,000,000 with an interest rate of 10.25% p.a; Bank Guarantee facility of Rp10,000,000 and Demand Loan Facility of Rp10,000,000 with an interest rate of 10.25% p.a floating.

This agreement expires on December 10, 2023. The outstanding balance of the use of Bank OCBC facilities as of December 31, 2022 is the Current Account Facility of Rp2,255,301 due on December 10, 2023 and the Bank Guarantee Facility of Rp322,775.

19. UTANG USAHA / *19. TRADE PAYABLES*

a. Berdasarkan pemasok / *a. Based on suppliers*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Pihak ketiga			*Third parties*
Swasta	968.720.686	1.333.914.474	*Private*
Perorangan	7.842.949	4.227.590	*Individuals*
Subtotal - pihak ketiga	976.563.635	1.338.142.064	*Subtotal - third parties*
Pihak berelasi (Catatan 44g)	1.092.012.208	1.926.350.211	*Related parties (Note 44g)*
Total	**2.068.575.843**	**3.264.492.275**	***Total***

b. Berdasarkan mata uang / *b. By currency*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Rupiah	2.044.081.525	2.949.116.000	*Rupiah*
Dolar AS	24.494.318	315.376.275	*US Dollar*
Total	**2.068.575.843**	**3.264.492.275**	***Total***

20. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PENDEK / *20. SHORT-TERM UNEARNED REVENUES*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Sewa kuartalan (Catatan 49c dan 49d)	683.682.059	695.543.951	*Quarterly rent (Notes 49c and 49d)*
Pelayanan jasa pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	402.204.627	172.666.515	*Land, building, water and electricity services*
Uang untuk diperhitungkan			*Advances from customers*
Pihak ketiga	292.643.156	130.044.647	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 44h)	8.286.359	8.064.950	*Related parties (Note 44h)*
Pendapatan diterima di muka jangka pendek - lainnya	36.400.194	66.976.899	*Other short-term unearned revenues*
Subtotal	1.423.216.395	1.073.296.962	*Sub-total*
Bagian lancar pendapatan diterima di muka jangka panjang (Catatan 27)	171.138.682	224.748.522	*Current portion of long-term unearned revenue (Note 27)*
Total	**1.594.355.077**	**1.298.045.484**	***Total***

Uang untuk diperhitungkan merupakan penerimaan uang di muka dari pelanggan yang akan memperoleh pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik dari Grup.

Advances from customers represents advances received from customers who will receive ship services, goods services, container services and logistic services from the Group.

21. BEBAN AKRUAL / *21. ACCRUED EXPENSES*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Pegawai	1.543.094.665	1.536.062.485	*Employees*
Kerjasama mitra usaha	1.023.263.751	708.323.183	*Partnership*
Umum	662.233.036	417.036.376	*General*
Pemeliharaan	449.258.262	167.675.465	*Maintenance*
Bunga	379.603.334	351.739.853	*Interest*
Bahan	239.342.300	206.967.006	*Material*
Asuransi	30.272.043	41.050.044	*Insurance*
Biaya konsesi	40.277.983	26.989.964	*Concession fee*
Lain-lain	906.239.914	243.347.644	*Others*
Total	**5.273.585.288**	**3.699.192.020**	***Total***

Beban akrual - umum terutama merupakan akrual beban pelatihan dan pendidikan.

Accrued expenses - general mainly represents accrued expenses for training and education.

Beban akrual - pegawai terutama merupakan beban akrual untuk biaya bonus dan tantiem.

Accrued expenses - employees mainly represents accrued expenses for employee's bonus and directors' tantiem.

Beban akrual - kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi atas kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan *lift on* dan *lift off* di pelabuhan serta beban pegawai nonorganik.

Accrued expenses - the partnership expenses mainly represents the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners for providing loading and unloading activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports and outsourcing expenses.

Beban akrual - biaya konsesi merupakan biaya konsesi yang harus dibayarkan kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan Perjanjian Konsesi (Catatan 48a).

Accrued expenses - concession fee represents concession fee to be paid to Port Authority in accordance with Concession Agreement (Note 48a).

22. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA / *22. OTHER CURRENT LIABILITIES*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Pihak ketiga	855.825.793	1.182.432.796	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 44i dan 44j)	185.307.298	1.066.277.651	*Related parties (Note 44i and 44j)*
Total	**1.041.133.091**	**2.248.710.447**	***Total***

Rincian liabilitas jangka pendek lainnya pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Details of other current liabilities as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Uang titipan dari pelanggan			***Deposit from customers***
Pihak ketiga			*Third parties*
Swasta	280.341.599	462.031.106	*Private*
Lain-lain	37.919.696	63.994.238	*Others*
Pihak berelasi (Catatan 44i)	75.209.277	65.132.074	*Related parties (Note 44i)*
Subtotal	393.470.572	591.157.418	*Sub-total*

22. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA (lanjutan)

Rincian liabilitas jangka pendek lainnya pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

22. OTHER CURRENT LIABILITIES (continued)

Details of other current liabilities as of December 31, 2022 and 2021 are as follows: (continued)

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	**31 Desember 2021/ *December 31, 2021***	
Liabilitas jangka pendek lainnya			***Other current liabilities***
Pihak ketiga	537.564.498	656.407.452	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 44j)	110.098.021	1.001.145.577	*Related parties (Note 44j)*
Subtotal	647.662.519	1.657.553.029	*Sub-total*
Total	**1.041.133.091**	**2.248.710.447**	***Total***

Uang titipan - swasta terutama merupakan sisa uang pengguna jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik yang belum dibayarkan kembali kepada pelanggan atau akan diperhitungkan dengan pelayanan berikutnya.

Deposit from customers - private mainly represents remaining deposits from customers for ship services, goods services, container services and logistic services which have not been settled with the customer or will be taken into account with subsequent services.

Uang titipan - lain-lain terutama merupakan uang titipan yang berasal dari gaji bulanan pegawai untuk iuran jamsostek, asuransi dan koperasi pegawai.

Deposit from customers - others mainly represents deposit from employee monthly salary for jamsostek contribution, insurance and employee co-operatives.

Liabilitas jangka pendek lainnya - pihak ketiga terutama merupakan utang yang timbul dari penerimaan uang jaminan penyediaan listrik.

Other current liabilites - third party mainly represents payables from deposits received for electricity provision.

23. PERPAJAKAN / *23. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid taxes*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	**31 Desember 2021/ *December 31, 2021***	
Perusahaan			*The Company*
Pajak Pertambahan Nilai	154.235.105	199.195.000	*Value Added Tax*
Pajak penghasilan	159.117.505	176.154.037	*Income taxes*
Subtotal	313.352.610	375.349.037	*Sub-total*
Entitas anak			*Subsidiaries*
Pajak Pertambahan Nilai	524.525.927	659.421.104	*Value Added Tax*
Pajak penghasilan	134.298.106	45.765.157	*Income taxes*
Subtotal	658.824.033	705.186.261	*Sub-total*
Total	**972.176.643**	**1.080.535.298**	***Total***

Taksiran tagihan restitusi pajak / *Estimated claims for tax refund*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	**31 Desember 2021/ *December 31, 2021***	
Perusahaan			*The Company*
Pajak Pertambahan Nilai			*Value Added Tax*
2021	5.441.845	15.951.762	*2021*
Pajak penghasilan			*Income tax*
2022	593.658.018	-	*2022*
2021	178.467.687	178.619.622	*2021*
2020	-	176.820.302	*2020*
2019	-	198.549.998	*2019*
Subtotal	777.567.550	569.941.684	*Sub-total*
Entitas anak			*Subsidiaries*
Pajak Pertambahan Nilai			*Value Added Tax*
2022	94.869.273	-	*2022*
2021	54.509.697	-	*2021*
2020	16.401.295	42.809.039	*2020*
2019	73.216.764	33.168.340	*2019*
Pajak penghasilan	93.094.376	104.741.288	*Income tax*
Subtotal	332.091.405	180.718.667	*Sub-total*
Total	**1.109.658.955**	**750.660.351**	***Total***

23. PERPAJAKAN (lanjutan) / *23. TAXATION (continued)*

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Perusahaan			*The Company*
PPh badan (Pasal 29)			*Corporate Income Tax (Article 29)*
2021	-	31.110.482	*2021*
Pajak Pertambahan Nilai	248.557.423	100.043.709	*Value Added Tax*
Pajak penghasilan			*Income taxes*
Pasal 4(2)	49.651.601	43.240.495	*Article 4(2)*
Pasal 15	-	1.033.210	*Article 15*
Pasal 21	59.464.194	52.552.284	*Article 21*
Pasal 22	306.414	579.935	*Article 22*
Pasal 23/26	11.191.059	7.244.313	*Article 23/26*
Pasal 25	-	11.063.467	*Article 25*
Lainnya	2.861.827	103.171	*Others*
Subtotal	372.032.518	246.971.066	*Sub-total*
Entitas anak			*Subsidiaries*
PPh badan (Pasal 29)			*Corporate Income Tax (Article 29)*
2022	387.288.280	-	*2022*
2021	4.390	155.530.522	*2021*
2020	-	393.636	*2020*
Pajak Pertambahan Nilai	139.893.953	82.375.379	*Value Added Tax*
Pajak penghasilan			*Income taxes*
Pasal 4(2)	14.261.967	24.789.201	*Article 4(2)*
Pasal 15	1.626.972	356.918	*Article 15*
Pasal 21	59.710.349	39.415.682	*Article 21*
Pasal 22	336.066	946.457	*Article 22*
Pasal 23/26	24.082.450	15.319.754	*Article 23/26*
Pasal 25	12.533.946	11.344.250	*Article 25*
Lainnya	13.502.850	1.098.122	*Others*
Subtotal	653.241.223	331.569.921	*Sub-total*
Total	**1.025.273.741**	**578.540.987**	***Total***

23. PERPAJAKAN (lanjutan) / *23. TAXATION (continued)*

c. Pajak penghasilan badan / *c. Corporate income tax*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran laba pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before corporate income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the year ended December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2022	**2021**	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	4.738.654.133	4.175.326.363	*Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income*
Dikurangi:			*Less:*
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan badan	2.630.034.200	1.518.136.481	*Income before corporate income tax of subsidiaries*
Laba Perusahaan sebelum pajak pajak penghasilan badan - Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang berahir 30 September 2021	-	1.824.197.972	*Income before corporate income tax - The Company (formerly Pelindo I Pelindo III and Pelindo IV) - - Ninth-month periods ended September 30, 2021*
Laba kena pajak final	2.974.191.968	1.490.582.034	*Income subject to final tax*
Rugi sebelum pajak penghasilan badan - Perusahaan	(865.572.035)	(657.590.124)	*Loss before corporate income tax expenses - the Company*
Beda temporer:			*Temporary differences:*
Penyisihan imbalan kerja karyawan	282.215.912	(224.559.118)	*Provision for employee benefits*
Bonus	383.584.100	134.670.333	*Bonus*
Penyisihan penurunan nilai	18.457.408	18.922.257	*Allowance for impairment*
Penyusutan dan amortisasi	(669.152.231)	(304.049.903)	*Depreciation and amortization*
Beda permanen:			*Permanent differences:*
Beban-beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	670.311.201	995.693.873	*Expenses that are not deductible for tax purposes*
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	(1.029.884.530)	(694.208.181)	*Income subject to final income tax*
Beban berkaitan pajak penghasilan final	827.839.493	916.090.756	*Expenses related to final income tax*
Beban umum	328.225.826	302.540.841	*General expenses*
Beban kesejahteraan karyawan	117.214.128	25.106.265	*Employees social welfare expenses*
Lainnya	40.560.348	42.335.315	*Others*
Subtotal	967.038.833	1.212.542.438	*Sub-total*
Taksiran laba pajak	**103.799.620**	**554.952.314**	***Estimated taxable income***

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan badan dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan badan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

23. TAXATION (continued)

c. Corporate income tax (continued)

Reconciliation between corporate income tax expenses and the theoretical tax amount on profit before corporate income tax using the applicable tax rate are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2022	**2021**	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	4.738.654.133	4.175.326.363	*Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income*
Dikurangi:			*Less:*
Pendapatan kena pajak final	3.484.410.122	3.152.428.151	*Income subject to final tax*
Laba sebelum pajak penghasilan badan	1.254.244.011	1.022.898.212	*Income before corporate income tax expenses*
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	275.933.682	225.037.607	*Income tax calculated at applicable rate*
Dampak perbedaan permanen:			*Effect of permanent differences:*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	(209.938.623)	349.262.951	*Non deductible expenses*
Penyesuaian	-	(424.435.442)	*Adjustment*
Beban pajak penghasilan badan - Perusahaan	**65.995.059**	**149.865.116**	***Corporate income tax expense - The Company***
Beban pajak penghasilan badan - Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021	**-**	**291.207.982**	***Corporate income tax expense - The Company (formerly Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV) - Nine-month periods ended September 30, 2021***
Beban pajak penghasilan badan - Perusahaan	**65.995.059**	**441.073.098**	***Corporate income tax expense - The Company***
Beban pajak penghasilan badan - entitas anak	**764.189.217**	**558.107.989**	***Corporate income tax expense - subsidiaries***
Total	**830.184.276**	**999.181.087**	***Total***

Untuk tujuan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, Perusahaan melakukan perhitungan taksiran laba (rugi) pajak secara tahunan.

For the purpose of filling the annual corporate income tax return, the Company calculate the taxable income (loss) on annual basis.

Perhitungan taksiran penghasilan kena pajak pada tahun 2022 akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2022.

The calculation of estimated taxable income for the year 2022 will be used as a basis in filling the Annual Corporate Income Tax Return for the year 2022.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Rincian beban pajak penghasilan dan final adalah sebagai berikut:

23. TAXATION (continued)

d. The details of Income tax expenses and final tax expenses are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2022	**2021**	
Beban pajak final			*Final tax expense*
Perusahaan	333.173.903	367.537.823	*The Company*
Entitas anak	155.055.399	120.134.046	*Subsidiaries*
Total	**488.229.302**	**487.671.869**	***Total***
Beban pajak penghasilan badan			*Corporate income tax expense*
Kini			*Current*
Perusahaan	22.835.916	122.089.510	*The Company*
Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021	-	127.579.628	*The Company (formerly Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV) - Nine-month periods ended September 30, 2021*
Entitas anak	935.501.582	598.064.038	*Subsidiaries*
Subtotal	958.337.498	847.733.176	*Sub-total*
Tangguhan			*Deferred*
Perusahaan	43.159.143	(39.974.294)	*The Company*
Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021	-	259.781.683	*The Company (formerly Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV) - Nine-month periods ended September 30, 2021*
Entitas anak	(171.312.365)	(68.359.478)	*Subsidiaries*
Subtotal	(128.153.222)	151.447.911	*Sub-total*
Total	**830.184.276**	**999.181.087**	***Total***

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Perhitungan beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan dan taksiran lebih bayar dan kurang bayar pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

23. TAXATION (continued)

e. The calculation of current income tax expense - current year and estimated overpayment and underpayment of corporate income tax are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2022	**2021**	
Taksiran laba kena pajak			*Estimated taxable income*
Perusahaan	103.799.620	554.952.314	*The Company*
Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021	-	579.907.401	*The Company (formerly Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV) - Nine-month periods ended September 30, 2021*
Entitas anak	4.252.279.916	2.718.472.900	*Subsidiaries*
Jumlah taksiran penghasilan kena pajak	4.356.079.536	3.853.332.615	*Total estimated taxable income*
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan			*Corporate income tax expense - current*
Perusahaan	22.835.916	122.089.510	*The Company*
Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021	-	127.579.628	*The Company (formerly Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV) - Nine-month periods ended September 30, 2021*
Entitas anak	935.501.582	598.064.038	*Subsidiaries*
Jumlah beban pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	958.337.498	847.733.176	*Corporate income tax expense per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka			*Less prepaid income tax*
Perusahaan	413.888.075	238.114.067	*The Company*
Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021	-	123.816.365	*The Company (formerly Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV) - Nine-month periods ended September 30, 2021*
Entitas anak	792.606.003	236.414.394	*Subsidiaries*
Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka	1.206.494.078	598.344.826	*Total prepaid income tax*

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Perhitungan beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan dan taksiran lebih bayar dan kurang bayar pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

23. TAXATION (continued)

e. The calculation of current income tax expense - current year and estimated overpayment and underpayment of corporate income tax are as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2022	**2021**	
Taksiran utang pajak penghasilan - Pasal 29			*Estimated income tax payable - Article 29*
Perusahaan	-	-	*The Company*
Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021	-	31.109.540	*The Company (formerly Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV) - Nine-month periods ended September 30, 2021*
Entitas anak	387.288.280	155.530.522	*Subsidiaries*
Total	**387.288.280**	**186.640.062**	***Total***
Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan			*Estimated claims for tax refund*
Perusahaan	593.658.018	116.024.558	*The Company*
Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021	-	62.595.063	*The Company (formerly Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV) - Nine-month periods ended September 30, 2021*
Entitas anak	41.786.840	27.202.474	*Subsidiaries*
Total	**635.444.858**	**205.822.095**	***Total***

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas-entitas di dalam Grup menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, entities within the Group calculates and pays tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

23. TAXATION (continued)

f. Pajak tangguhan

f. Deferred taxes

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets (liabilities) are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022/ *Year Ended December 31, 2022*					
		Dibebankan pada/*Charged to*				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive income*	*Ekuitas/ Equity*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Aset Pajak Tangguhan						***Deferred Tax Assets***
Perusahaan						*The Company*
Liabilitas imbalan kerja	1.507.790.375	62.087.501	(224.584.339)	(177.557.418)	1.167.736.119	*Employess benefit liabilites*
Cadangan beban pegawai	55.089.940	93.335.281	-	(55.089.940)	93.335.281	*Reserve for employee expense*
Penyisihan penurunan nilai piutang	191.845.572	4.060.630	-	(16.621.991)	179.284.211	*Provision for impairment of receivables*
Penyusutan dan amortisasi	(1.319.415.061)	(147.213.491)	-	280.158.570	(1.186.469.982)	*Depreciation and amortization*
Subtotal	435.310.826	12.269.921	(224.584.339)	30.889.221	253.885.629	*Sub-total*
Entitas anak	151.958.012	269.100.988	-	(42.065.190)	378.993.810	*Subsidiaries*
Total	**587.268.838**	**281.370.907**	**(224.584.339)**	**(11.175.967)**	**632.879.439**	***Total***
Liabilitas Pajak Tangguhan						***Deferred Tax Liabilities***
Entitas anak	(105.071.621)	(127.083.810)	1.026.749	-	(231.128.682)	*Subsidiaries*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021/ *Year Ended December 31, 2021*					
		Dibebankan pada/*Charged to*				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive income*	*Ekuitas/ Equity*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Aset Pajak Tangguhan						***Deferred Tax Assets***
Perusahaan						*The Company*
Liabilitas imbalan kerja	1.370.114.018	(49.471.682)	26.413.898	160.734.141	1.507.790.375	*Employess benefit liabilites*
Cadangan beban pegawai	116.634.828	17.587.496	-	(79.132.384)	55.089.940	*Reserve for employee expense*
Penyisihan penurunan nilai piutang	224.235.926	(29.798)	-	(32.360.556)	191.845.572	*Provision for impairment of receivables*
Penyusutan dan amortisasi	(1.304.318.831)	(139.664.760)	-	124.568.530	(1.319.415.061)	*Depreciation and amortization*
Lain-lain	113.631.549	(70.167.093)	-	(43.464.456)	-	*Others*
Subtotal	520.297.490	(241.745.837)	26.413.898	130.345.275	435.310.826	*Sub-total*
Entitas anak	233.260.931	(50.533.859)	(29.951.750)	(817.310)	151.958.012	*Subsidiaries*
Total	**753.558.421**	**(292.279.696)**	**(3.537.852)**	**129.527.965**	**587.268.838**	***Total***
Liabilitas Pajak Tangguhan						***Deferred Tax Liabilities***
Entitas anak	(117.774.083)	14.250.352	1.398.640	(2.946.530)	(105.071.621)	*Subsidiaries*

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak

Perusahaan

1. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2015

Pada tanggal 20 April 2017, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") pajak penghasilan badan tahun 2015 sebesar Rp805.287.733.

Pada tanggal 18 Juli 2017, Perusahaan mengajukan keberatan ke DJP atas SKPKB tersebut. Sebagai hasil keberatan Perusahaan tersebut, pada tanggal 22 Desember 2017, diterbitkan SKPKB revisi sebesar Rp614.304.124.

Pada tanggal 20 Maret 2018, Perusahaan mengajukan banding ke pengadilan pajak atas SKPKB tersebut.

Pada tanggal 26 Juli 2019, pengadilan pajak menolak pengajuan banding yang diajukan oleh Perusahaan dan menetapkan sanksi administrasi sebesar Rp614.304.124. Pada tanggal 22 Agustus 2019 dan 5 Desember 2019, Perusahaan melakukan pembayaran masing-masing sebesar Rp614.304.124 dan mencatatnya sebagai aset tidak lancar lainnya.

Pada tanggal 17 Oktober 2019, Perusahaan mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Pada tanggal 4 Mei 2021, Perusahaan menerima hasil Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutuskan mengabulkan permohonan peninjauan kembali serta membatalkan surat keputusan Direktur Jendral Pajak tentang keberatan wajib pajak atas SKPKB PPh tahun pajak 2015 dan menetapkan jumlah PPh lebih bayar untuk masa Januari - Desember 2015 adalah sebesar Rp377.838.436, memerintahkan untuk mengembalikan seluruh PPh kurang bayar sebesar Rp614.304.124 berikut sanksi administrasi sebesar Rp614.304.124. Pada tanggal 5 Agustus 2021, Perusahaan telah menerima pengembalian sebesar Rp992.142.560.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter

The Company

1. Tax assessment for fiscal year 2015

On April 20, 2017, the Company received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on corporate income tax for 2015 amounting to Rp805,287,733.

On July 18, 2017, the Company has filed an objection to the DJP for the SKPKB. As a result of the Company's objection, on December 22, 2017, the Company received a revised SKPKB amounting to Rp614,304,124.

On March 20, 2018, the Company has filed an appeal to the tax court for the SKPKB.

On July 26, 2019, the tax court rejected the Company's appeal and imposed an administrative penalty of Rp614,304,124. As a result, on August 22, 2019 and December 5, 2019, the Company made payments of Rp614,304,124, respectively and recorded as other non-current assets.

On October 17, 2019, the Company filed a judicial review to the Supreme Court.

On May 4, 2021, the Company received the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia which decided to grant the request for a judicial review and cancel the decision letter from the Director General of Taxes regarding the taxpayer's objection to the SKPKB PPh for the 2015 tax year and determined the amount of overpaid income tax for the period January - December 2015 is amounting to Rp377,838,436, ordered to return all underpaid income tax of Rp614,304,124 including administrative sanctions amounting to Rp614,304,124. On August 5, 2021, the Company has received a refund of Rp992,142,560.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

2. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2018

Pada tanggal 22 Oktober 2020, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Lebih Bayar ("SKPLB") sebesar Rp171.961.012 atas lebih bayar pajak penghasilan badan tahun pajak 2018. Perusahaan telah menerima pengembalian lebih bayar PPh badan 2018 pada tanggal 8 Januari 2021.

3. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2019

Regional IV (ex. Pelindo IV)

Pada 27 April 2020, Perusahaan melaporkan lebih bayar pajak penghasilan badan 2019 sebesar Rp49.937.711. Pemeriksaan pajak telah dimulai tanggal 14 Januari 2021, namun Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian 2019 pada 9 April 2021 yang mengubah lebih bayar pajak penghasilan 2019 menjadi Rp71.958.443.

Pada tanggal 28 Oktober 2021, Perusahaan menerima SKPLB sebesar Rp46.291.415 atas pajak penghasilan badan tahun 2019. Selisih antara penyajian kembali lebih bayar pajak penghasilan 2019 dengan SKPLB adalah sebesar Rp25.667.030 yang dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian.

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perusahaan telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp25.215.774. Selisih antara SKPLB dengan pengembalian pajak yang diterima sebesar Rp21.075.639 dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian 31 Desember 2022.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

The Company (continued)

2. Tax assessment for fiscal year 2018

On October 22, 2020, the Company received an Assessment Letter of Overpayment ("SKPLB") amounting to Rp171,961,012 for the overpayment of corporate income tax for the 2018 fiscal year. The Company has received the refund of the 2018 corporate income tax overpayment on January 8, 2021.

3. Tax assessment for fiscal year 2019

Regional IV (ex. Pelindo IV)

On April 27, 2020, the Company submitted overpayment of corporate income tax 2019 amounting to Rp49,937,711. The tax audit has been started on January 14, 2021, but the Company restated the 2019 consolidated financial statement on April 9, 2021 which adjusted the overpayment of income tax 2019 to Rp71,958,443.

On October 28, 2021, the Company received SKPLB related to corporate income tax for year 2019 amounting to Rp46,291,415. The difference between restatement of overpayment of income tax 2019 with SKPLB amounting to Rp25,667,030 recorded as part of income tax expense on the consolidated statement of profit loss and other comprehensive income.

On March 31, 2022, the Company received a tax refund amounting Rp25,215,774, the difference between SKPLB with tax refund received amounting Rp21,075,639 recorded as part of income tax expense on the consolidated statement of profit loss and other comprehensive income for the period ended December 31, 2022.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

3. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2019 (lanjutan)

Regional II (ex. Pelindo II)

Pada tanggal 21 April 2021, Perusahaan menerima SKPKB atas pajak penghasilan badan tahun 2019 sebesar Rp126.924.148. Pada tanggal 19 Mei 2021, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas pokok dan sanksi bunga serta mencatat aset tidak lancar lainnya.

Pada tanggal 15 Juli 2021, Perusahaan mengajukan keberatan atas SKPKB PPh badan 2019. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-00706/KEB/PJ/WPJ.19/2022 tanggal 7 Juli 2022, memutuskan menolak keberatan Perusahaan.

Pada tanggal 16 September 2022, Perusahaan mengajukan banding ke pengadilan pajak. Hingga penerbitan laporan ini, pengajuan banding oleh Perusahaan masih dalam proses sidang di pengadilan.

4. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2020

Regional II (ex. Pelindo II)

Pada tanggal 28 Juni 2022, Perusahaan menerima SKPLB sebesar Rp92.435.704 atas lebih bayar pajak penghasilan badan (ex. Pelindo II) tahun pajak 2020 dari yang diajukan sebesar Rp96.483.977. Atas selisih nilai yang diajukan dengan nilai yang disetujui oleh fiskus sebesar Rp4.048.272 telah dicatat pada laporan laba rugi tahun 2022.

Regional III (ex. Pelindo III)

Pada tanggal 22 April 2022, Perusahaan menerima SKPLB sebesar Rp49.182.325 atas lebih bayar pajak penghasilan badan (ex. Pelindo III) tahun pajak 2020. Seluruh pengajuan lebih bayar Perusahaan disetujui oleh fiskus.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

The Company (continued)

3. Tax assessment for fiscal year 2019 (continued)

Regional II (ex. Pelindo II)

On April 21, 2021, the Company received SKPKB for the 2019 corporate income tax amounting to Rp126,924,148. On May 19, 2021, the Company has paid the principal and interest penalties and recorded the underpayment in other non-current assets.

On July 15, 2021, the Company filed an objection to the 2019 corporate income tax SKPKB. Based on the Decree of the Director General of Taxes No. KEP-00706/KEB/PJ/WPJ.19/2022 dated July 7, 2022, decided to reject the Company's objection.

On September 16, 2022, the Company filed an appeal to the tax court. Until the issuance of the report, the Company's appeal is still in the process of being heard in court.

4. Tax assessment for fiscal year 2020

Regional II (ex. Pelindo II)

On June 28, 2022, the Company received SKPLB amounting to Rp92,435,704 for overpayment of corporate income tax (ex. Pelindo II) for fiscal year 2020 from the amount submitted of Rp96,483,977. The difference between the amount submitted and the amount approved by the tax authorities amounting to Rp4,048,272 has been recorded in the 2022 income statement.

Regional III (ex. Pelindo III)

On April 22, 2022, the Company received SKPLB amounting to Rp49,182,325 for the overpayment of corporate income tax (ex. Pelindo III) for the 2020 fiscal year. The Company's overpayment applications were approved by the tax authorities.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

4. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2020 (lanjutan)

Regional IV (ex. Pelindo IV)

Pada tanggal 30 April 2021, Perusahaan melaporkan lebih bayar pajak penghasilan badan (ex. Pelindo IV) 2020 sebesar Rp39.043.430.

Pada tanggal 22 April 2022, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") sebesar Rp37.244.098 atas pajak penghasilan badan (ex. Pelindo IV) tahun 2020.

Pada tanggal 22 Agustus 2022, Perusahaan telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp30.395.852 selisih antara nilai lebih bayar yang dilaporkan dengan pengembalian pajak yang diterima sebesar Rp8.647.578 dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian 31 Desember 2022.

5. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2021

Regional IV (ex. Pelindo IV)

Pada tanggal 26 April 2022 dan 1 November 2021, Perusahaan melaporkan lebih bayar pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai sebesar Rp16.573.211 dan Rp5.441.845. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, proses pemeriksaan oleh kantor pajak masih berlangsung.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

The Company (continued)

4. Tax assessment for fiscal year 2020 (continued)

Regional IV (ex. Pelindo IV)

On April 30, 2021, the Company submitted overpayment of corporate income tax (ex. Pelindo IV) 2020 amounting to Rp39,043,430.

On April 22, 2022, the Company received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") related to corporate income tax (ex. Pelindo IV) for year 2020 amounting to Rp37,244,098.

On August 22, 2022, the Company received a tax refund amounting Rp30,395,852, the difference between the reported overpayment value with the tax refund received amounting Rp8,647,578 recorded as part of income tax expense on the consolidated statement of profit loss and other comprehensive income for the period ended December 31, 2022.

5. Tax assessment for fiscal year 2021

Regional IV (ex. Pelindo IV)

On April 26, 2022 and November 1, 2021, the Company submitted overpayment of corporate income tax and value added tax amounting to Rp16,573,211 and Rp5,441,845. Until the completion date of the consolidated financial statements, the audit from tax office is still on process.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

IPC TPK

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2020

Pada tanggal 18 Mei 2022, IPC TPK menerima surat ketetapan pajak lebih bayar ("SKPLB") atas pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2020 dengan jumlah yang disetujui sebesar Rp22.138.083 dari yang diajukan sebesar Rp12.232.653. Atas kelebihan tersebut terlebih dahulu dikompensasikan ke utang pajak sebesar Rp837.382, sehingga nilai penerimaan lebih bayar pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2020 adalah sebesar Rp21.300.701 dan sudah diterima oleh IPC TPK pada tanggal 31 Mei 2022. Selisih antara jumlah yang diajukan dengan jumlah yang disetujui senilai Rp9.068.048 telah dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

PTP1

Pada tanggal 4 Februari 2022, PTP1 menerima SKPLB atas PPN untuk masa pajak Desember 2019 dan Desember 2020 masing-masing sebesar Rp111.137.216 dan Rp8.764.186.

Kemudian, PTP1 juga menerima SKPKB atas PPN untuk berbagai masa pajak di tahun 2019 dan 2020 dengan nilai pokok kurang bayar sebesar Rp119.901.402 dan denda sebesar Rp89.926.051.

PTP1 telah menerima pencairan restitusi tersebut pada tanggal 24 Februari 2022 dan 2 Maret 2022 dengan nilai masing-masing sebesar Rp8.764.186 dan Rp111.137.216. Untuk pembayaran atas nilai SKPKB telah dibayarkan pada tanggal 28 April 2022 dengan nilai pembayaran sejumlah Rp88.554.088 yang dicatat sebagai penambah klaim restitusi pajak pertambahan nilai.

Atas terbitnya SKPLB dan SKPKB tersebut, PTP1 mengajukan banding ke pengadilan pajak pada tanggal 7 Februari 2023. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, pengajuan banding tersebut masih dalam proses di pengadilan pajak.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

IPC TPK

Tax assessment for fiscal year 2020

On May 18, 2022, IPC TPK received tax overpayment letter ("SKPLB") for fiscal year 2020, with agreed amount is Rp22,138,083 from proposed amount of Rp12,232,653. The amount had been compensated to tax expenses amounted to Rp837,382, thus the overpaid nominal of income tax for fiscal year 2020 is amounted Rp21,300,701 and had been received by the IPC TPK on May 31, 2022. The difference between the proposed amount and agreed amount with nominal Rp9,068,048 had been recorded in the current year's proft or loss and other comprehensive income statement.

PTP1

On February 4, 2022, PTP1 received SKPLB regarding VAT for tax period in December 2019 and December 2020, each amounting Rp111,137,216 and Rp8,764,186.

Furthermore, PTP1 also received SKPKB regarding VAT for various tax period in 2019 and 2020 with principal amount was Rp119,901,402 and penalty amount was Rp89,926,051.

PTP1 had been received the SKPLB disbursement on February 24, 2022 and March 2, 2022, each amounting Rp8,764,186 and Rp111,137,216. For payment of SKPKB had been paid on April 28, 2022 with amount paid was Rp88,554,088 and recorded as additional in claim for restitution of VAT.

For the issuance of the SKPLB and SKPKB, PTP1 had filed an appeal to tax court on February 7, 2023. Until the issuance date of this report, the appeal was still being proceed at the tax court.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

PTPR

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2020

Pada tanggal 22 Juli 2022, PTPR menerima SKPLB atas PPh Badan tahun fiskal 2020 sebesar Rp22.158.342. Selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan PTPR sebesar Rp1.421.158 telah dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini. Pada tanggal 11 Agustus 2022, PTPR telah menerima pengembalian lebih bayar tersebut sebesar Rp21.426.306 setelah dikompesasikan dengan utang pajak penghasilan pasal 21 dan 23 sebesar Rp732.036.

SPSL

Pada tanggal 8 November 2022, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak ("SKPKB") atas Penghasilan Badan, SKPKB atas Pajak Pertambahan Nilai, dan SKPKB atas Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2017 masing-masing sebesar USD5.177.601, Rp59.140.947, dan Rp431.493. Pada tanggal 31 Desember 2022. SPSL telah mencatat kekurangan bayar pajak sebagai pajak dibayar dimuka sebesar Rp140.374.086 pada laporan posisi keuangan tahun berjalan.

Disamping itu, SPSL juga menerima Surat Tagihan Pajak ("STP") atas Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2017 sebesar Rp431.493.

Atas terbitnya SKPKB dan STP tersebut SPSL mengajukan banding ke pengadilan pajak pada tanggal 6 Februari 2023. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, pengajuan banding tersebut masih dalam proses di pengadilan pajak

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

PTPR

Tax assessment for fiscal year 2020

On July 22, 2022, PTPR received SKPLB on Corporate Income Tax ("CIT") for fiscal years 2020 amounting to Rp22,158,342. The difference of the tax assessment with the PTPR's record amounting to Rp1,421,158 has been recorded as part of current tax expense. On August 11, 2022, the PTPR has received this overpayment asssessment amounting to Rp21,426,306 after being compensated with income tax payable of article tax 21 and 23 amounting to Rp732,036.

SPSL

On November 8, 2022, the Directorate General of Taxes issued Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") for the Company corporate income tax, SKPKB for the Company value-added tax, SKPKB for the Company income tax article 21 for fiscal year 2017 amounted to USD5,177,601, Rp59,140,947, dan Rp431,493, respectively. On December 31, 2022, SPSL has recorded tax underpayment as prepaid tax amounted Rp140,374,086, respectively in the current year financial statement position.

Furthermore, SPSL also received Tax Collection Notices ("STP") for the Company value-added tax for fiscal year 2017 as amounted Rp431,493.

For the issuance of the SKPKB and STP, SPSL had filed an appeal the tax court on February 6, 2023. Until the issuance date of this report, the appeal was still being proceed at the tax court.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

MTI

Pada tanggal 18 Agustus dan 14 Oktober 2022, MTI menerima SKPLB atas Pajak Penghasilan pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun fiskal 2020 dengan jumlah yang disetujui masing-masing sebesar Rp2.543.627 dan Rp3.236.955 dari yang diajukan masing-masing sebesar Rp2.564.466 dan Rp3.309.401.

Disamping itu, pada tanggal 18 Agustus 2022, MTI menerima SKPKB atas Pajak Penghasilan pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun fiskal 2020 masing-masing sebesar Rp24.392 dan Rp16.641. MTI juga menerima surat tagihan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai tahun fiskal 2020 sebesar Rp98.386.

Pada tanggal 1 November 2022, MTI telah mencatat pengembalian lebih bayar setelah dikurangi kurang bayar serta tagihan pajak dengan total pengembalian sebesar Rp5.641.164 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

PIL

Pada tanggal 21 Februari 2022, PIL (Entitas Anak SPSL) menerima SKBLB atas PPN tahun 2020 setelah dikurangi kurang bayar dan tagihan pajak PPN masa Januari sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp11.251.244 dari yang diajukan sebesar Rp12.502.408. PIL telah mencatat beban atas selisih tersebut sebesar Rp1.251.161 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2021.

API

Pada tanggal 16 Desember 2022, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") atas Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2021 sebesar Rp4.910.070. Namun atas kelebihan tersebut terlebih dahulu dikompensasi ke SKPKB Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai masing-masing sebesar Rp99.245, Rp40.500 dan Rp118.981. Sehingga dana yang akan diterima oleh API sebesar Rp4.651.344.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

MTI

On August 18 and October 14, 2022, MTI received an SKPLB for Income Tax Article 23 and Value-Added Tax for the fiscal year 2020 with approved amuonted to Rp2,543,627 and Rp3,236,955 from proposed amounted Rp2,564,466 and Rp3,309,401, respectively.

Furthermore, on August 18, 2022, MTI received SKPKB for Income Tax Article 23 and Value-Added Tax for the fiscal year 2020 amounted to Rp24,392 dan Rp16,641, respectively. MTI also received tax collection notices for Value-Added Tax fiscal year 2020 amounted to Rp98,386.

On November 1, 2022, MTI has recorded the tax overpayment after compensated with the tax underpayment and tax collection notices with total tax refund amounted to Rp5,641,164 in the current year's statement of profit or loss and other comprehensive income.

PIL

On February 21, 2022, PIL (a Subsidiary of SPSL) received a SKPLB of VAT for fiscal year 2020 after deducting tax underpayment and tax collection notices of VAT for the period January to December 2020 with approved amounted to Rp11,251,244 from proposed amount of Rp12,502,408. PIL has recorded the tax expense amounted to Rp1,251,161 in the statement of profit or loss and other comprehensive income fiscal year 2021.

API

In December 16, 2022, the Directorate General of Taxes issued Assessment Letter of Overpayment ("SKPLB") for the corporate income tax for fiscal year 2021 amounted to Rp4,910,070. However for the overpayment tax, API compensated to SKPKB for the income tax article 21, income tax article 23 and value tax added amounted to Rp99,245, Rp40,500 and Rp118,981, respectively. Then overpayment amount will received by API amounted to Rp4,651,344.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

NTS

Pada tanggal 22 April 2022, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB Penghasilan Badan, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4(2) tahun 2020 masing-masing sebesar Rp1.098.117, Rp1.543.392, Rp22.972, Rp63.271 dan Rp2.987.

Pada tanggal 22 April 2022, NTS juga menerima STP untuk Pajak Penghasilan Pasal 15 dan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2020 masing-masing sebesar Rp100 dan Rp39.169.

NTS telah lunas membayar kekurangan pajak di atas dengan nilai total Rp2.770.008 pada tanggal 18 Mei 2022.

Rukindo

Pada tahun 2022, Rukindo mencatat lebih bayar atas PPN masa Januari sampai Desember sebesar Rp6.167.909. Atas lebih bayar tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa jumlah lebih bayar yang disetujui adalah sebesar Rp5.983.564 yang sudah diterima oleh Rukindo pada bulan Agustus 2022. Selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan Rukindo sebesar Rp184.346 telah dicatat sebagai bagian dari beban operasi lainnya.

JAI

Pada tahun 2020, JAI mencatat lebih bayar atas PPN masa Januari sampai Desember sebesar Rp17.707.446. Atas lebih bayar tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa jumlah lebih bayar yang disetujui adalah sebesar Rp17.208.810 yang sudah diterima oleh JAI pada bulan Februari 2022. Selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan JAI sebesar Rp498.636 telah dicatat sebagai bagian dari beban operasi lainnya.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

NTS

On April 22, 2022, the Directorate General of Taxes issued SKPKB for the Company corporate income tax, Tax Underpayment Assessment Letter for the Company value-added tax, Tax Underpayment Assessment Letter for the Company income tax article 21, Tax Underpayment Assessment Letter for the Company income tax article 23, and Tax Underpayment Assessment Letter for the Company income tax article 4(2) amounted to Rp1,098,117, Rp1,543,392, Rp22,972, Rp63,271 and Rp2,987, respectively.

On April 22, 2022, NTS also received STP for 2020's income tax article 15 and value-added tax amounted to Rp100 and Rp39,169, respectively.

NTS already fully paid the underpayment taxes abovementioned amounted to Rp2,770,008 on May 18, 2022.

Rukindo

In 2022, Rukindo recorded an overpayment of VAT for the January to December period of Rp6,167,909. For this overpayment, the Directorate General of Taxes stated that the amount of the approved overpayment was Rp5,983,564 which had been received by Rukindo in August 2022. The difference in the results of the tax audit with Rukindo's records was Rp184,346 have been recorded as part of other operating expenses.

JAI

In 2020, JAI recorded an overpayment of VAT for the January to December period amounted Rp17,707,446. For this overpayment, the Directorate General of Taxes stated that the approved overpayment amounted to Rp17,208,810 which had been received by JAI in February 2022. The difference in the results of the tax audit with JAI's records amounted Rp498,636 has been recorded as part of other operating expenses.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

SPJM

Pada tahun 2022, SPJM mencatat lebih bayar atas PPN masa Mei, Juni, dan Agustus sebesar Rp73.457.760. Atas lebih bayar tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa jumlah lebih bayar yangg disetujui adalah sebesar Rp68.979.179 yang sudah diterima oleh SPJM pada bulan Desember 2022. Selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan SPJM sebesar Rp4.478.581 telah dicatat sebagai bagian dari beban operasi lainnya.

BMS

Pada tanggal 19 Agustus 2022, BMS telah menerima Surat Ketetapan Pajak yang menyetujui lebih bayar pajak pertambahan nilai periode Desember 2020 sejumlah Rp12.169.961. Lebih bayar pajak tersebut sudah diterima oleh BMS pada tanggal 19 Agustus 2022.

Pada tanggal 20 Juni 2022, BMS menerima SKPLB pajak penghasilan badan tahun 2020 sebesar Rp125.114.460 dari tagihan lebih bayar pajak Rp800.908. Selisih senilai Rp675.794 diperhitungkan dengan kurang bayar pajak pertambahan nilai periode Maret 2016. BMS tidak setuju dengan keputusan ini dan telah mengajukan banding senilai Rp675.794.

BIMA

Pada tanggal 1 Juli 2022, BIMA telah menerima Surat Ketetapan Pajak yang menyetujui lebih bayar pajak pertambahan nilai periode Mei - Desember 2020 sejumlah Rp7.157.879 dari tagihan lebih bayar pajak Rp7.170.274. Selisih senilai Rp12.396 dibebankan sebagai beban pajak.

Pada tanggal 30 Juni 2022, BIMA telah menerima Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang menyetujui lebih bayar pajak pertambahan nilai periode Januari - Desember 2021 dan periode Januari - Maret 2022 sejumlah Rp15.434.007 dari tagihan lebih bayar pajak Rp15.090.337. Selisih senilai Rp343.670 disajikan sebagai tagihan pajak.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

SPJM

In 2022, SPJM recorded an overpayment of VAT for the May, June, and August period amounted Rp73,457,760. For this overpayment, the Directorate General of Taxes stated that the approved overpayment amounted to Rp68,979,179 which had been received by SPJM in December 2022. The difference in the results of the tax audit with SPJM's records amounted Rp4.478,581 has been recorded as part of other operating expenses.

BMS

On August 19, 2022, BMS receiving Tax Assessment Letter approving the overpayment of value added tax for the period of December 2020 amounting to Rp12,169,961. The overpayment was received by BMS on August 19, 2022.

On June 20, 2022, BMS has received SKPLB of corporate income tax 2020 amounted to Rp125,114,460 out of Rp800,908 claim for tax refund. The difference of Rp675,794 is calculated by underpayment of value added tax for the period March 2016. BMS disagreed with this decision and has submitted an appeal letter amounting to Rp675,794.

BIMA

On July 1, 2022, BIMA receiving Tax Assessment Letter approving the overpayment of value added tax for the period of May - December 2020 amounting to Rp7,157,879 out of Rp7,170,274 claim for tax refund. The difference amounting to Rp12,396 was charged to tax expense.

On June 30, 2022, BIMA received Refund of Overpayment Tax approving the overpayment of value added tax for the period of January - December 2021 and period of January - March 2022 amounting to Rp15,434,007 out of Rp15,090,337 claim for tax refund. The difference amounting to Rp343,670 was presented as estimated claim for tax refund.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia menandatangani UU No.7/2021 tentang "Harmonisasi Peraturan Perpajakan", yang menerapkan, antara lain, tarif pajak penghasilan badan sebagai berikut:
   - Sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 (sebelumnya 20% yang diatur dalam Perppu No.1 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020) dan
   - Perusahaan Terbuka dalam negeri dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif di atas.

23. TAXATION (continued)

h. On October 29, 2021, the President of the Republic of Indonesia signed UU No.7/2021 regarding "Harmonization of Tax Regulation", which applies, among others, the corporate income tax rate as follows:
   - *22% effective starting fiscal year 2022 (previously 20% as stipulated in Perppu No.1 Year 2020 dated March 31, 2020) and*
   - *Resident publicly-listed companies in Indonesia whose at least 40% or more of the total paid-up shares or other equity instruments are listed for trading in the Indonesia stock exchanges and meet certain requirements in accordance with the government regulations, can apply tariff of 3% lower than tariff as stated above.*

24. UTANG OBLIGASI

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, rincian dari utang obligasi adalah sebagai berikut:

24. BONDS PAYABLE

As of December 31, 2022 and 2021, the details of bonds payable are as follows:

			31 Desember/*December 31*, 2022				
Obligasi/ *Bonds*	**Pokok Utang/ *Debt Principal***	**Penerbit/ *Issuer***	**Total/ *Total***	**Diskonto dan Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi/ *Unamortized Discount and Transaction Cost***	**Neto/ *Net***	**Jangka Pendek/ *Current***	**Jangka Panjang/ *Non-current***
Senior Notes, Penerbitan Tahun 2015/ *Issued in 2015*	USD1.058.375.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II)/ *the Company (formerly Pelindo II)*	16.649.297.125	(56.502.824)	16.592.794.301	-	16.592.794.301
Senior Notes Penerbitan Tahun 2015/ *Issued in 2015*	USD 468.850.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II)/ *the Company (formerly Pelindo II)*	7.375.479.350	(128.462.209)	7.247.017.141	-	7.247.017.141
Senior Notes Penerbitan Tahun 2014/ *Issued in 2014*	USD 491.859.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo III)/ *the Company (formerly Pelindo III)*	7.737.433.929	(15.463.015)	7.721.970.914	-	7.721.970.914
Senior Notes Penerbitan Tahun 2018/ *Issued in 2018*	USD500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo III)/ *the Company (formerly Pelindo III)*	7.865.500.000	(7.476.391)	7.858.023.609	7.858.023.609	-
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri C/ *Year 2016 Tranche C*	Rp400.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I)/ *the Company (formerly Pelindo I)*	400.000.000	(132.700)	399.867.300	399.867.300	-
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri D/ *Year 2016 Tranche D*	Rp50.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I)/ *the Company (formerly Pelindo I)*	50.000.000	(81.279)	49.918.721	-	49.918.721
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri A/ *Year 2018 Tranche A*	Rp380.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV)/ *the Company (formerly Pelindo IV)*	380.000.000	(85.981)	379.914.019	379.914.019	-
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri B/*Year 2018 Tranche B*	Rp1.820.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV)/ *the Company (formerly Pelindo IV)*	1.707.297.043	(1.302.648)	1.705.994.395	-	1.705.994.395
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri C/*Year 2018 Tranche C*	Rp800.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV)/ *the Company (formerly Pelindo IV)*	800.000.000	(866.275)	799.133.725	-	799.133.725
	Total/*Total*		**42.965.007.447**	**(210.373.322)**	**42.754.634.125**	**8.637.804.928**	**34.116.829.197**

24. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, rincian dari utang obligasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

24. BONDS PAYABLE (continued)

As of December 31, 2022 and 2021, the details of bonds payable are as follows: (continued)

			31 Desember/*December 31*, 2021				
Obligasi/ *Bonds*	**Pokok Utang/ *Debt Principal***	**Penerbit/ *Issuer***	**Total/ *Total***	**Diskonto dan Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi/ *Unamortized Discount and Transaction Cost***	**Neto/ *Net***	**Jangka Pendek/ *Current***	**Jangka Panjang/ *Non-current***
Senior Notes, Penerbitan Tahun 2015/ *Issued in 2015*	USD1.100.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II)/ *the Company (formerly Pelindo II)*	15.695.900.000	(78.890.126)	15.617.009.874	-	15.617.009.874
Senior Notes Penerbitan Tahun 2015/ *Issued in 2015*	USD500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II)/ *the Company (formerly Pelindo II)*	7.134.500.000	(131.298.845)	7.003.201.155	-	7.003.201.155
Senior Notes Penerbitan Tahun 2014/ *Issued in 2014*	USD500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo III)/ *the Company (formerly Pelindo III)*	7.134.505.000	(24.281.765)	7.110.223.235	-	7.110.223.235
Senior Notes Penerbitan Tahun 2018/ *Issued in 2018*	USD500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo III)/ *the Company (formerly Pelindo III)*	7.134.505.000	(29.844.283)	7.104.660.717	-	7.104.660.717
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri C/ *Year 2016 Tranche C*	Rp400.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I)/ *the Company (formerly Pelindo I)*	400.000.000	(398.100)	399.601.900	-	399.601.900
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri D/*Year 2016 Tranche D*	Rp50.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I)/ *the Company (formerly Pelindo I)*	50.000.000	(104.501)	49.895.499	-	49.895.499
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri A/ *Year 2018 Tranche A*	Rp380.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV)/ *the Company (formerly Pelindo IV)*	380.000.000	(208.812)	379.791.188	-	379.791.188
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri B/ *Year 2018 Tranche B*	Rp1.820.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV)/ *the Company (formerly Pelindo IV)*	1.714.511.341	(1.722.857)	1.712.788.484	-	1.712.788.484
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri C/ *Year 2018 Tranche C*	Rp800.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV)/ *the Company (formerly Pelindo IV)*	800.000.000	(995.572)	799.004.428	-	799.004.428
Total/*Total*			**40.443.921.341**	**(267.744.861)**	**40.176.176.480**	**-**	**40.176.176.480**

24. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

24. BONDS PAYABLE (continued)

Other information in relation to bonds payables as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

Obligasi/ *Bonds*	Peringkat/ *Rating*	Wali Amanat/ *Trustee*	Tempat Pencatatan/*Listed*	Tanggal Terbit/*Issue Date*	Jatuh Tempo/ *Due Date*	Periode Pembayaran Bunga/*Interest Payment Period*	Tingkat Bunga per Tahun/ *Interest Rate per Annum*
Senior Notes, USD1.100.000.000, Pelindo II, Penerbitan Tahun 2015/ *Issued in 2015 i)*	Baa3, BBB (Moody's Investors Service, Inc. dan/*and* (Fitch Ratings Inc.)	The Bank of New York Mellon Corporation	Singapore Exchange Securities Trading Limited	5 Mei 2015/ *May 5, 2015*	5 Mei 2025/ *May 5, 2025*	Setengah tahunan/ *Semi-Annually*	4,250%
Senior Notes, USD500.000.000, Pelindo II, Penerbitan Tahun 2015/ *Issued in 2015 i)*	Baa3, BBB (Moody's Investors Service, Inc. dan/*and* (Fitch Ratings Inc.)	The Bank of New York Mellon Corporation	Singapore Exchange Securities Trading Limited	5 Mei 2015/ *May 5, 2015*	5 Mei 2045/ May 5, 2045	Setengah tahunan/ *Semi-Annually*	5,375%
Senior Notes USD500.000.000, Penerbitan Tahun 2014/ *Issued in 2014 i)*	BBB-, BBB-, Baa3 *stable* (Fitch Rating, Standard and Poors, dan/*and* Moody's Investor Service)	The Bank of New York Mellon Corporation	Singapore Exchange Securities Trading Limited	1 Oktober 2014/ *October 1, 2014*	1 Oktober 2024/ *October 1, 2024*	Setengah tahunan/*Semi-Annually*	4,875%
Senior Notes USD500.000.000, Penerbitan Tahun 2018/ *Issued in 2018 i)*	BBB-, BBB-, Baa3 *stable* (Fitch Rating, Standard and Poors, dan/*and* Moody's Investor Service)	The Bank of New York Mellon Corporation	Singapore Exchange Securities Trading Limited	2 Mei 2018/ *May 2, 2018*	2 Mei 2023/ *May 2, 2023*	Setengah tahunan/*Semi-Annually*	4,500%
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri C/ *Year 2016 Tranche C* ii)	idAA-/*Stable* (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	21 Juni 2016/ *June 21, 2016*	21 Juni 2023/ *June 21, 2023*	3 (tiga) bulanan/ *Quarterly*	9,250%
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri D/ *Year 2016 Tranche D* ii)	idAA-/*Stable* (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	21 Juni 2016/ *June 21, 2016*	21 Juni 2026/ *June 21, 2026*	3 (tiga) bulanan/ *Quarterly*	9,500%
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri A/ *Year 2018 Tranche A* i)	AA (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	4 Juli 2018/ *July 4, 2018*	4 Juli 2023/ *July 4, 2023*	3 (tiga) bulanan/ *Quarterly*	8,000%
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri B/ *Year 2018 Tranche B* i)	AA (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	4 Juli 2018/ *July 4, 2018*	4 Juli 2025/ *July 4, 2025*	3 (tiga) bulanan/ *Quarterly*	9,150%
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri C/ *Year 2018 Tranche C* i)	AA (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	4 Juli 2018/ *July 4, 2018*	4 Juli 2028/ *July 4, 2028*	3 (tiga) bulanan/ *Quarterly*	9,350%

Jaminan

i) Tidak dijamin

ii) Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan (dahulu Pelindo I) baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 KUHP.

Collateral

i) Unsecured

ii) These bonds are not guaranteed by special collaterals, but are guaranteed by all the Company's (formerly Pelindo I) assets, both moving and immovable goods, both existing and existing in the future to become collateral for bondholders in accordance with the provisions in articles 1131 and 1132 of the KUHP.

24. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi digunakan untuk melunasi pinjaman dan rencana ekspansi Perusahaan serta tujuan umum Perusahaan. Perusahaan juga diharuskan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu.

Lindung nilai arus kas

Proporsi dari Senior Notes USD1.100.000.000 Penerbitan Tahun 2015, Senior Notes USD500.000.000 Penerbitan Tahun 2015 dan Senior Notes USD500.000.000 Penerbitan Tahun 2014 telah memenuhi kriteria dan berlaku efektif sebagai lindung nilai arus kas. Oleh karenanya, rugi selisih kurs dari proporsi Senior Notes tersebut dalam mata uang asing dicatat sebagai penghasilan komprehensif lain - neto sebesar Rp2.820.468.471 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Penghasilan komprehensif lain tersebut akan terealisasi ke laba rugi hingga tahun 2024, 2025 dan 2045 sesuai dengan jatuh tempo dari masing-masing Senior Notes tersebut. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, penghasilan komprehensif lain tersebut telah terealisasi ke laba rugi sebesar Rp131.422.241.

24. BONDS PAYABLE (continued)

Proceeds from the bond offering were used to refinance loan and will be used for the Company's expansion plan and the Company's general purposes. The Company must also maintain certain financial ratios.

Cash flow hedge

Proportions of Senior Notes USD1,100,000,000 Issued in 2015, Senior Notes USD500,000,000 Issued in 2015 and Senior Notes USD500,000,000 Issued in 2014 are designated as effective cash flow hedges. Therefore, the losses on foreign exchange of proportions of Senior Notes denominated in foreign currency were reported in other comprehensive income - net amounting to Rp2,820,468,471 for the year ended December 31, 2022. Such other comprehensive income will be recycled to profit or loss until 2024, 2025 and 2045 in accordance with the maturity of each Senior Notes. For the year ended December 31, 2022, such other comprehensive income has been recycled to profit or loss amounted to Rp131,422,241.

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG / *25. LONG-TERM BANK LOANS*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	*31 Desember 2021/ December 31, 2021*	
Utang bank jangka panjang	7.831.272.217	8.888.945.338	*Long-term bank loans*
Bagian lancar	(152.606.159)	(2.255.771.149)	*Current portion*
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian lancar	**7.678.666.058**	**6.633.174.189**	***Long-term bank loans, net of current portion***

31 Desember 2022	Bagian lancar/ *Current portion*	Bagian jangka panjang/*Long term portion*	Total	*December 31, 2022*
Entitas Anak				***Subsidiaries***
PTP1				***PTP1***
Bilateral				*Bilateral*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	55.259.147	1.019.918.076	1.075.177.223	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Pinjaman Bank Sindikasi				*Syndicated Bank Loans*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.205.138	428.294.981	451.500.119	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Indonesia Infrastructure Finance	23.205.138	428.294.981	451.500.119	*PT Indonesia Infrastructure Finance*
BMS				***BMS***
Bilateral				*Bilateral*
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	5.767.279	454.461.565	460.228.844	*PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk*
Subtotal	**107.436.702**	**2.330.969.603**	**2.438.406.305**	***Sub-total***

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan) / *25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)*

31 Desember 2022	Bagian lancar/ *Current portion*	Bagian jangka panjang/*Long term portion*	Total	*December 31, 2022*
CTP				***CTP***
Pinjaman Bank Sindikasi				*Syndicated Bank Loans*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	12.085.466	1.400.637.983	1.412.723.449	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.657.250	1.339.248.405	1.350.905.655	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT CIMB Niaga Tbk	8.063.089	934.373.568	942.436.657	*PT CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.257.124	840.964.004	848.221.128	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	4.049.709	469.023.952	473.073.661	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	1.613.436	186.953.337	188.566.773	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Bank DKI	1.612.568	186.866.462	188.479.030	*PT Bank DKI*
Subtotal	**46.338.642**	**5.358.067.711**	**5.404.406.353**	***Sub-total***
Total pokok utang	**153.775.344**	**7.689.037.314**	**7.842.812.658**	***Total principal of loans***
Dikurangi:				*Less:*
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(1.169.185)	(10.371.256)	(11.540.441)	*Unamortized costs of loans*
Total	**152.606.159**	**7.678.666.058**	**7.831.272.217**	***Total***

31 Desember 2021	Bagian lancar/ *Current portion*	Bagian jangka panjang/ *Long term portion*	Total	*December 31, 2021*
Entitas Anak				***Subsidiaries***
PTP1				***PTP1***
Bilateral				*Bilateral*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.094.628.442	-	1.094.628.442	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Pinjaman Bank Sindikasi				*Syndicated Bank Loans*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	416.948.060	-	416.948.060	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Indonesia Infrastructure Finance	416.948.060	-	416.948.060	*PT Indonesia Infrastructure Finance*
Subtotal	**1.928.524.562**	**-**	**1.928.524.562**	***Sub-total***
PMT				***PMT***
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	-	417.173.318	417.173.318	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
Pinjaman Bank Sindikasi				*Syndicated Bank Loans*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	102.399.640	536.936.991	639.336.631	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	102.399.640	536.936.991	639.336.631	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	102.399.640	536.936.991	639.336.631	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Subtotal	**307.198.920**	**2.027.984.291**	**2.335.183.211**	***Sub-total***
CTP				***CTP***
Pinjaman Bank Sindikasi				*Syndicated Bank Loans*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.828.625	1.154.067.760	1.159.896.385	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT CIMB Niaga Tbk	4.031.545	798.245.821	802.277.366	*PT CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.628.562	718.455.262	722.083.824	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6.042.733	1.196.461.130	1.202.503.863	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	2.024.854	400.921.157	402.946.011	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	806.718	159.730.163	160.536.881	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Bank DKI	806.284	159.644.269	160.450.553	*PT Bank DKI*
Subtotal	**23.169.321**	**4.587.525.562**	**4.610.694.883**	***Sub-total***

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan) / *25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)*

31 Desember 2021	Bagian lancar/ *Current portion*	Bagian jangka panjang/ *Long term portion*	Total	*December 31, 2021*
PIL				***PIL***
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	15.960.034	28.694.454	44.654.488	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Total pokok utang	**2.274.852.837**	**6.644.204.307**	**8.919.057.144**	***Total principal of loans***
Dikurangi:				*Less:*
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(19.081.688)	(11.030.118)	(30.111.806)	*Unamortized costs of loans*
Total	**2.255.771.149**	**6.633.174.189**	**8.888.945.338**	***Total***

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

Fasilitas Pinjaman/ *Credit Facility*	Kreditur/ *Creditor*	Jadwal Pembayaran/ *Repayment Schedule*	Jangka Waktu (Tahun)/ *Period (Year)*	Tingkat Bunga/ *Interest Rates*	Jaminan/ *Collateral*
PMT					
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2016-2026)	10	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah marjin 3,25%/ *Interest rate of 3 months average JIBOR plus margin 3.25%*	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut/ *The facility is guaranteed with collateral as follows:* *1.* Tanah dan bangunan serta benda-benda lain yang melekat di atas tanah Terminal Multipurpose ("TMP") dan diikat dengan *Security Coverage Ratio* minimal 120% dari limit fasilitas kredit/ *Land and buildings and other objects attached to the land of the Multipurpose Terminal and bound with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit facility limit.* *2.* Jaminan fidusia atas Fasilitas Pelabuhan berikut seluruh peralatan dan perlengkapan Fasilitas Pelabuhan terkait dengan TMP dengan *Security Coverage Ratio* minimal 120% dari limit kredit/ *Fiduciary guarantee for Port Facilities along with all Port Facility equipment related to TMP with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit limit.* *3.* Jaminan fidusia seluruh hasil klaim atas bank garansi dan asuransi terhadap proyek pembangunan infrastruktur TMP dengan *Security Coverage Ratio* 100% dari nilai bank garansi dan klaim asuransi/ *Fiduciary guarantee of all results of claims for bank guarantees and insurance on infrastructure development projects of TMP with a Security Coverage Ratio of 100% of the value of bank guarantees and insurance claims.* *4.* Pengalihan (*cessie*) atas rekening penampungan/ *Transfer (cessie) of escrow accounts*

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2022 and 2021 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ *Credit Facility*	Kreditur/ *Creditor*	Jadwal Pembayaran/ *Repayment Schedule*	Jangka Waktu (Tahun)/ *Period (Year)*	Tingkat Bunga/ *Interest Rates*	Jaminan/ *Collateral*
PMT (lanjutan/*continued*)					
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2016-2026)	10	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah marjin 3,25%/ *Interest rate of 3 months average JIBOR plus margin 3.25%*	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut/ *The facility is guaranteed with collateral as follows:* 1. Tanah dan bangunan serta benda-benda lain yang melekat di atas tanah Terminal Multipurpose ("TMP") dan diikat dengan *Security Coverage Ratio* minimal 120% dari limit fasilitas kredit/ *Land and buildings and other objects attached to the land of the Multipurpose Terminal and bound with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit facility limit.* 2. Jaminan fidusia atas Fasilitas Pelabuhan berikut seluruh peralatan dan perlengkapan Fasilitas Pelabuhan terkait dengan TMP dengan *Security Coverage Ratio* minimal 120% dari limit kredit/ *Fiduciary guarantee for Port Facilities along with all Port Facility equipment related to TMP with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit limit.* 3. Jaminan Fidusia seluruh hasil klaim atas bank garansi dan asuransi terhadap proyek pembangunan infrastruktur TMP dengan *Security Coverage Ratio* 100% dari nilai bank garansi dan klaim asuransi/ *Fiduciary guarantee of all results of claims for bank guarantees and insurance on infrastructure development projects of TMP with a Security Coverage Ratio of 100% of the value of bank guarantees and insurance claims.* 4. Pengalihan (*cessie*) atas rekening penampungan/ *Transfer (cessie) of escrow accounts*

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2022 and 2021 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ *Credit Facility*	Kreditur/ *Creditor*	Jadwal Pembayaran/ *Repayment Schedule*	Jangka Waktu (Tahun)/ *Period (Year)*	Tingkat Bunga/ *Interest Rates*	Jaminan/ *Collateral*
PMT (lanjutan/*continued*)					
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2016-2026)	10	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah marjin 3,25%/ *Interest rate of 3 months average JIBOR plus margin 3.25%*	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut/ *The facility is guaranteed with collateral as follows:* 1. Tanah dan bangunan serta benda-benda lain yang melekat di atas tanah Terminal Multipurpose ("TMP") dan diikat dengan *Security Coverage Ratio* minimal 120% dari limit fasilitas kredit/ *Land and buildings and other objects attached to the land of the Multipurpose Terminal and bound with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit facility limit.* 2. Jaminan fidusia atas fasilitas pelabuhan berikut seluruh peralatan dan perlengkapan fasilitas pelabuhan terkait dengan TMP dengan *Security Coverage Ratio* minimal 120% dari limit kredit/ *Fiduciary guarantee for Port Facilities along with all Port Facility equipment related to TMP with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit limit.* 3. Jaminan fidusia seluruh hasil klaim atas bank garansi dan asuransi terhadap proyek pembangunan infrastruktur TMP dengan *Security Coverage Ratio* 100% dari nilai bank garansi dan klaim asuransi/ *Fiduciary guarantee of all results of claims for bank guarantees and insurance on infrastructure development projects of TMP with a Security Coverage Ratio of 100% of the value of bank guarantees and insurance claims.* 4. Pengalihan (*cessie*) atas rekening penampungan/ *Transfer (cessie) of escrow accounts*

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2022 and 2021 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ *Credit Facility*	Kreditur/ *Creditor*	Jadwal Pembayaran/ *Repayment Schedule*	Jangka Waktu (Tahun)/ *Period (Year)*	Tingkat Bunga/ *Interest Rates*	Jaminan/ *Collateral*
PMT (lanjutan/*continued*)					
Fasilitas Kredit/ *Credit Facility Agreement*	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Beberapa cicilan/*several installment* (2018-2031)	13	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah marjin 4,25%/ *Interest rate of 3 months average JIBOR plus margin 4.25%*	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut/ *The facility is guaranteed with collateral as follows:* 1. Hak tanggungan untuk seluruh tanah dan bangunan serta benda-benda lain di atas tanah Terminal Multipurpose Kuala Tanjung/ *Mortgage rights for all land and buldings as well as other objects on the land of Kuala Tanjung Multipurpose Terminal* 2. Jaminan fidusia atas seluruh fasilitas Terminal Multipurpose Kuala Tanjung dan seluruh peralatan serta perlengkapan fasilitas pelabuhan terkait dengan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung/ *Fiduciary guarantee for all Kuala Tanjung Multipurpose Terminal facilities and all port facilities and equipment related to Kuala Tanjung Multipurpose Terminal* 3. Hak tanggungan untuk seluruh tanah dan bangunan serta benda-benda lain yang melekat di atas tanah Terminal Multipurpose Kuala Tanjung/ *Mortgage rights for all land and buildings as well as other objects attached to the land of Kuala Tanjung Multipurpose Terminal* 4. Pengalihan *(cessie)* atas rekening penampungan/ *Transfer (cessie) of escrow accounts* 5. Gadai deposito atas rekening *debt service reserve account (DSRA)/ Pawn of time deposits on the debt service reserve account (DSRA).* 6. Surat pernyataan dan kesanggupan *(Letter of Undertaking)* dari para pemegang saham Debitur yang menyatakan bahwa Proyek TMP tidak akan dalam keadaan cidera janji./ *Letter of undertaking from the shareholders of the Debt or stating that the TMP Project will not be in a state of default.*

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2022 and 2021 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ *Credit Facility*	Kreditur/ *Creditor*	Jadwal Pembayaran/ *Repayment Schedule*	Jangka Waktu (Tahun)/ *Period (Year)*	Tingkat Bunga/ *Interest Rates*	Jaminan/ *Collateral*
PTP1					
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2018-2030)	12	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah marjin 3,85%/ *Interest rate of 3 months average JIBOR plus margin 3.85%*	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut/ *The facility is guaranteed with collateral as follows:* 1. Fidusia atas hasil klaim/*proceed* atas jaminan pembayaran *(bank guarantee)* dan/atau SBLC dan/atau asuransi atas proyek/ *Fiduciary over the results of claims/proceed for bank guarantees and/or SBLC and/or insurance for the project.* 2. Fidusia atas peralatan dan perlengkapan terminal petikemas BICT Fase II atas nama PTP1 yang dibiayai oleh kreditur sindikasi/ *Fiduciary on BICT Phase II container terminal equipment and supplies on behalf of PTP1 financed by syndicated creditors.* 3. Seluruh agunan tersebut wajib diasuransikan dengan mencantumkan *banker's clause* dengan nama agen jaminan atau nama kreditur sindikasi sebagai tertanggung oleh perusahaan asuransi rekanan kreditur sindikasi/ *All collateral must be insured by including the banker's clause with the name of the collateral agent or the name of the syndicated creditor as insured by the syndicated creditor's partner insurance company.*
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Indonesia Infrastructure Finance	Beberapa cicilan/*several installment* (2018-2030)	12	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah marjin 3,85%/ *Interest rate of 3 months average JIBOR plus margin 3.85%*	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut/ *The facility is guaranteed with collateral as follows:* 1. Fidusia atas hasil klaim/*proceed* atas jaminan pembayaran *(bank guarantee)* dan/atau SBLC dan/atau asuransi atas proyek/ *Fiduciary over the results of claims/proceed for bank guarantees and/or SBLC and/or insurance for the project.* 2. Fidusia atas peralatan dan perlengkapan terminal petikemas BICT Fase II atas nama PTP1 yang dibiayai oleh kreditur sindikasi/ *Fiduciary on BICT Phase II container terminal equipment and supplies on behalf of PTP1 financed by syndicated creditors.* 3. Seluruh agunan tersebut wajib diasuransikan dengan mencantumkan *banker's clause* dengan nama agen jaminan atau nama kreditur sindikasi sebagai tertanggung oleh perusahaan asuransi rekanan kreditur sindikasi/ *All collateral must be insured by including the banker's clause with the name of the collateral agent or the name of the syndicated creditor as insured by the syndicated creditor's partner insurance company.*

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2022 and 2021 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ *Credit Facility*	Kreditur/ *Creditor*	Jadwal Pembayaran/ *Repayment Schedule*	Jangka Waktu (Tahun)/ *Period (Year)*	Tingkat Bunga/ *Interest Rates*	Jaminan/ *Collateral*
PTP1 (lanjutan/*continued*)					
Fasilitas Kredit Bilateral/ *Bilateral Credit Facility*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2015-2030)	15	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah marjin 3,35%/ *Interest rate of 3 months average JIBOR plus margin 3.35%*	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut/ *The facility is guaranteed with collateral as follows:* 1. Tanah, bangunan dermaga dan container yard serta benda-benda lain yang melekat di atas tanah Terminal Petikemas Belawan Fase II dan dan diikat dengan *Security Coverage Ratio* minimal 120% dari limit fasilitas kredit/ *Land, jetty buildings and container yards as well as other objects attached to the land of the Belawan Container Terminal Phase II and bound with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit facility limit.* 2. Seluruh hasil klaim atas garansi dan asuransi terhadap proyek pembangunan infrastruktur Dermaga dan Terminal Petikemas BICT II/ *All results of claims for guarantees and insurance on infrastructure development projects of Jetty and BICT II.*
BMS					
Fasilitas Kredit Bilateral/ *Bilateral Credit Facility*	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2022-2029)	7	2,95% per tahun dengan JIBOR (selama periode konstruksi) dan 2,65% per tahun + JIBOR (setelah periode konstruksi selesai)/ *2.95% per annum with JIBOR (during the construction period) and 2.65% per annum + JIBOR (after the construction period is completed)*	Pinjaman ini dijamin oleh Rekening Penampungan dan *debt service reserve account* (DSRA)/ *This loan is guaranteed by Escrow Account and debt service reserve account (DSRA).*
PIL					
Fasilitas Kredit Bilateral/ *Bilateral Credit Facility*	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2017-2025)	8	9,50% per tahun untuk 3 (tiga) bulan pertama dan setara 17,50% per tahun untuk bulan berikutnya/ *9.50% per annum for the first 3 (three) months and equivalent 17.50% per annum for the remaining months.*	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan dengan aset tetap berupa dua unit *Harbor Mobile Crane* (HMC) yang didanai berdasarkan akta fidusia dengan nilai pengikatan Rp103.299.200/ *The loan is pledged as collateral for the fixed assets of the two units of Harbor Mobile Cranes (HMC) which are funded based on a fiduciary deed with a binding value of Rp103,299,200.*

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2022 and 2021 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ *Credit Facility*	Kreditur/ *Creditor*	Jadwal Pembayaran/ *Repayment Schedule*	Jangka Waktu (Tahun)/ *Period (Year)*	Tingkat Bunga/ *Interest Rates*	Jaminan/ *Collateral*
CTP					
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2019-2034)	15	*Tranche A construction period ATD+4.15% (min equiv. 6.8%) Stage B construction period ATD+6.19% (min equiv. of 9%)*	Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API/ *This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API.*
Pinjaman Bank Sindikasi/ Syndicated loan	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2019-2034)	15	*Tranche A construction period ATD+4.15% (min equiv. 6.8%) Stage B construction period ATD+6.19% (min equiv. of 9%)*	Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API/ *This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API.*
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2019-2034)	15	*Tranche A construction period ATD+4.15% (min equiv. 6.8%) Stage B construction period ATD+6.19% (min equiv. of 9%)*	Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API/ *This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API.*
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2019-2034)	15	*Tranche A construction period ATD+4.15% (min equiv. 6.8%) Stage B construction period ATD+6.19% (min equiv. of 9%)*	Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API/ *This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API.*
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank Pan Indonesia Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2019-2034)	15	*Tranche A construction period ATD+4.15% (min equiv. 6.8%) Stage B construction period ATD+6.19% (min equiv. of 9%)*	Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API/ *This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API.*
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2019-2036)	15	*Reference Rate + Margin Eqv 10.50% untuk Tranche A1 dan A2 , dan Reference Rate + Margin eqv 12.50% untuk trance B*	Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API/ *This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API.*

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2022 and 2021 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ *Credit Facility*	Kreditur/ *Creditor*	Jadwal Pembayaran/ *Repayment Schedule*	Jangka Waktu (Tahun)/ *Period (Year)*	Tingkat Bunga/ *Interest Rates*	Jaminan/ *Collateral*
CTP (lanjutan/*continued*)					
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank DKI	Beberapa cicilan/*several installment* (2019-2036)	15	*Reference Rate + Margin Eqv 10.50% untuk Tranche A1 dan A2 , dan Reference Rate + Margin eqv 12.50% untuk trance B*	Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API/ *This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API.*

Sesuai dengan perjanjian pinjaman, fasilitas-fasilitas tersebut mengharuskan Grup untuk memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya persyaratan rasio keuangan.

Based on the loan agreement, the facilities requires the Group to comply to certain requirement, among others financial ratios as stipulated in the Loan Agreement.

Pada tanggal 31 Desember 2022, PTP1 tidak memenuhi sebagian persyaratan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman sehingga PTP1 mengirimkan surat pengesampingan atas tidak terpenuhinya persyaratan rasio keuangan tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 10 November 2022 dan 7 Desember 2022, PTP1 telah memperoleh surat pengesampingan atas tidak terpenuhinya persyaratan rasio keuangan tersebut.

As of December 31, 2022, PTP1 did not comply to several financial ratio covenants as stipulated in the loan agreement so that PTP1 sent the waiver letter on the incompliance of financial ratio covenant until December 31, 2022. On November 10, 2022 and December 7, 2022, PTP1 has obtained waiver letters for non-fulfillment of the financial ratio requirements.

Pada tanggal 31 Desember 2021, PTP1 tidak memenuhi sebagian persyaratan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman dan belum memperoleh surat pengesampingan atas tidak terpenuhinya persyaratan rasio keuangan tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Sesuai dengan perjanjian pinjaman, tidak terpenuhinya persyaratan rasio keuangan tersebut dapat menyebabkan pinjaman menjadi jatuh tempo, dan oleh karenanya seluruh saldo pinjaman terutang PTP1 disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Pada tanggal 22 Februari 2022 dan 16 Maret 2022, PTP1 telah memperoleh surat pengesampingan atas tidak terpenuhinya persyaratan rasio keuangan tersebut masing-masing untuk fasilitas pinjaman bilateral dan sindikasi.

As of December 31, 2021, PTP1 did not comply to several financial ratio covenants as stipulated in the loan agreement and not yet received waiver letter on the incompliance of financial ratio covenant until December 31, 2021. In accordance with the loan agreement, incompliance of financial ratio covenants may lead to the loan became due, and therefore, all the outstanding loan facility of PTP1 are presented as current liabilities. On February 22, 2022 and March 16, 2022, PTP1 has obtained waiver letters for non-fulfillment of the financial ratio requirements for bilateral and syndicated loan facilities, respectively.

26. UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK

26. LOAN FROM NON-BANK FINANCIAL INSTITUTION

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Rupiah			***Rupiah***
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Indonesia Infrastruktur Finance	584.328.133	476.290.919	*PT Indonesia Infrastruktur Finance*
Pihak berelasi			*Related parties*
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.160.435.133	949.751.736	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
Total	**1.744.763.266**	**1.426.042.655**	***Total***

CTP

Berdasarkan Akta Notaris Perjanjian Kredit Sindikasi No. 45 tanggal 21 Desember 2018 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta yang dinyatakan kembali berdasarkan akta Pernyataan Kembali atas Akta Notaris Perjanjian Kredit Sindikasi No.30 tanggal 26 Februari 2019 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta. CTP telah menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk ("SMI") dan lembaga keuangan perbankan lainnya (Catatan 25).

Sesuai keputusan Kreditur Sindikasi untuk partisipasi dalam pembiayaan sindikasi CTP untuk keperluan Kredit Investasi pembiayaan pembangunan memiliki limit fasilitas kredit investasi sebesar Rp7.404.162.000 dengan jangka waktu maksimum 180 bulan sejak Penandatanganan Perjanjian Kredit termasuk *Grace Period* dengan suku bunga masa konstruksi adalah *Reference Rate + Margin eqv*. 10,50% untuk *tranche* A1 dan A2, dan *Reference Rate + Margin eqv*. 12,50% untuk *tranche* B yang bersifat Subordinasi.

Berdasarkan Pemberitahuan Pernyataan Penundukan Diri tertanggal 22 Oktober 2019, dinyatakan bahwa PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") selaku kreditur baru telah bergabung dengan pola incremental option dan telah menjadi salah satu kreditur untuk fasilitas *tranche* B dalam Perjanjian Kredit dengan limit pinjaman Rp521.248.000.

CTP

Based on the Syndicated Credit Agreement Notarial Deed No. 45 dated December 21, 2018 by Ariani L. Rachim, S.H., a Notary in Jakarta which was restated based on the deed of Restatement of the Syndicated Credit Agreement Notarial Deed No.30 dated February 26, 2019 by Ariani L. Rachim, S.H., a Notary in Jakarta. CTP entered into a Loan Syndicated with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk ("SMI") and other banking financial institution (Note 25).

In accordance with the decision of the Syndicated Creditor for participation in the syndicated financing of CTP for the purpose of development financing investment has an Investment Credit facility limit of Rp7,404,162,000 with a maximum period of 180 months from the Signing of the Credit Agreement including Grace Period with the construction interest rate is the Reference Rate + Margin eqv. 10.50% for tranche A1 and A2, and the Reference Rate + Margin eqv. 12.50% for tranche B which is Subordinated.

Based on the Notification of Self-Submission Statement dated October 22, 2019, it was stated that PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") as a new creditor had joined the incremental option pattern and had become one of the creditors for tranche B facilities in the Credit Agreement with a loan limit of Rp521,248,000.

26. UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK (lanjutan)

CTP (lanjutan)

Perjanjian Kredit Sindikasi telah mengalami Perubahan Pertama Terhadap Akta Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 31 Tanggal 26 Februari 2019 pada tanggal 17 Desember 2019 dengan merubah limit fasilitas kredit investasi menjadi sebesar Rp7.321.248.000.

Berdasarkan surat Agen Fasilitas nomor SSK/3.2/4425 tanggal 29 Desember 2021 perihal Penyesuaian Keputusan Para Kreditur Sindikasi atas Permohonan Penyesuaian Ketentuan Fasilitas Kredit CTP, terdapat penyesuaian tingkat suku bunga fasilitas kredit sebagai berikut:

- Tranche A masa konstruksi dari ATD+4,94% (equiv. 7,48%) menjadi ATD+4,15% (min equiv. sebesar 6,8%) masa operasi dari ATD+4,69% (equiv 7,23%) menjadi ATD+3,90% (min equiv. sebesar 6,55%) dan

- Tranche B masa konstruksi dari ATD+6,94% (equiv.9,48%) menjadi ATD+6,19% (min equiv. sebesar 9%) masa operasi dari ATD+6,69% (equiv. 9,23%) menjadi ATD+5,94% (min equiv. sebesar 9%).

Saldo Utang CTP kepada IIF pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp584.328.133 dan Rp476.290.919. Sedangkan, saldo Utang CTP kepada SMI pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.160.435.133 dan Rp949.751.736.

26. LOAN FROM NON-BANK FINANCIAL INSTITUTION (continued)

CTP (continued)

The Syndicated Credit Agreement has amended the First Amendment to the Restatement of the Syndicated Credit Agreement Number 31 dated February 26, 2019 on December 17, 2019 by changing the investment credit facility limit to Rp7,321,248,000 .

Based on the Facility Agent's letter number SSK/3.2/4425 dated December 29, 2021 regarding the Adjustment of the Syndicated Creditors' Decision on the Application for Adjustment to CTP's Credit Facility Provisions, there is an adjustment to the interest rate of the credit facility as follows:

- *Tranche A construction period from ATD+4.94% (equiv. 7.48%) to ATD+4.15% (min equiv. 6.8%) operating period from ATD+4.69% (equiv 7 .23%) to ATD+3.90% (min equiv. of 6.55%) and*

- *Tranche B construction period from ATD+6.94% (equiv.9.48%) to ATD+6.19% (min equiv. 9%) operating period from ATD+6.69% (equiv. 9, 23%) to ATD+5.94% (min equiv. of 9%).*

The balance of CTP's payable to IIF as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp584,328,133 and Rp476,290,919, respectively. Meanwhile, the balance of CTP payable to SMI as of December 31, 2022 and 2021 amounted to IDR 1,160,435,133 and IDR 949,751,736, respectively.

27. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PANJANG

27. LONG-TERM UNEARNED REVENUE

	31 Desember 2022/ ***December 31, 2022***	**31 Desember 2021/** ***December 31, 2021***	
Premium JICT (Catatan 49e)	1.968.510.521	1.967.827.813	*JICT Premium (Note 49f)*
Sewa diterima di muka - NPCT1 (Catatan 49c)	1.170.100.949	1.151.689.282	*Advance rental fee - NPCT1 (Note 49d)*
Sewa tanah dan/atau bangunan	1.147.399.530	1.142.652.587	*Land rental and/or building*
Premium TPK Koja (Catatan 49d)	429.898.958	457.634.375	*TPK Koja Premium (Note 49e)*
Total	4.715.909.958	4.719.804.057	*Total*
Bagian lancar (Catatan 20)	(171.138.682)	(224.748.522)	*Current portion (Note 20)*
Total bagian jangka panjang	**4.544.771.276**	**4.495.055.535**	***Total long-term portion***

28. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA / *28. OTHER LONG-TERM LIABILITIES*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Pihak ketiga			*Third parties*
Sea Terminal Management and Service Pte. Ltd., Singapura	254.635.841	230.970.700	*Sea Terminal Management and Services Pte. Ltd., Singapura*
Provisi pemeliharaan terminal	400.217.319	264.880.104	*Provison for terminal maintenance*
Provisi pemeliharaan jalan tol	2.387.365	-	*Provison for toll road maintenance*
Subtotal pihak ketiga	657.240.525	495.850.804	*Subtotal third parties*
Pihak berelasi (Catatan 44k)	469.347.513	466.538.398	*Related parties (Notes 44k)*
Total	**1.126.588.038**	**962.389.202**	***Total***

Utang kepada Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd. ("STMS"), merupakan pinjaman sebesar USD15.096.000 yang diperoleh dan digunakan untuk setoran modal IPC TPK di NPCT1 berikut bunga terhutang (Catatan 49j).

Payable to Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd. ("STMS"), represents loan amounting to USD15,096,000 which was obtained and used by IPC TPK for acquisition of share capital in NPCT1 including the interest payable (Note 49j).

Provisi pemeliharaan terminal dan jalan tol merupakan provisi atas pemeliharaan terminal dan beban bunga terkait penerapan ISAK 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa (Catatan 15).

Provison for terminal and toll road maintenance represents provision for terminal maintenance and interest expense related to the application of ISAK 16 concerning Service Concession Arrangements (Note 15).

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA / *29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES*

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Grup mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen, Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan, Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra, PT Tower Watson Purbajaga, Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal, PT Emerald Delta Consulting, Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial dan Amran Nangasan, Kantor Konsultan Aktuaria Riana dan Rekan (dahulu PT Padma Radya Aktuaria), Kantor Konsultan Aktuaria Nandi dan Sutama dan Kantor Konsultan Aktuaria Hanung Budiarto dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

As of December 31, 2022 and 2021, the Group recorded employee benefits liabilities based on actuarial computations performed by independent actuaries, Actuarial Consultant Yusi dan Rekan, Actuarial Consultant Arya Bagiastra, PT Tower Watson Purbajaga, Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal, PT Emerald Delta Consulting, Actuarial Consultant Tubagus Syafrial dan Amran Nangasan, Actuarial Consultant Riana dan Rekan (formerly PT Padma Raya Aktuaria), Actuarial Consultant Nandi dan Sutama and Actuarial Consultant Hanung Budiarto using the "Projected Unit Credit" method.

Berikut adalah asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam laporan aktuaris independen:

The basic assumptions used by the independent actuaries are as follows:

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Tingkat diskonto	5,52% - 7,44%	3,49% - 7,64%	*Discount rate*
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	2,00% - 10,00%	0,00% -6,00%	*Salary increase projection rate*
Tingkat mortalitas	TMI 2019 & TMI IV 2019	TMI 2019 & TMI III 2019	*Mortality rate*
Tingkat cacat tetap	1-10% dari tabel amortisasi/ *of amortization table*	1-10%	*Permanent disability rate*
Tingkat pengunduran diri	1,00% untuk karyawan dibawah 30-40 tahun akan menurun sampai 0% pada usia 46-56 tahun/ *1.00% for employees under 30-40 years old will decrease to 0% at 46-56 years old*		*Level of resignation*
Usia pensiun normal	56 tahun/*years*	55-58 tahun/*years*	*Normal pension age*

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)*

Liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The employee benefit liabilities are as follows:

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Perusahaan			***The Company***
Program pensiun	641.600.368	635.994.743	*Pension program*
Program penghargaan masa bhakti	963.637.236	906.174.293	*Gratuity and compensation benefits*
Program kesehatan pensiunan	3.318.712.560	4.126.658.787	*Pension healthcare program*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	383.941.290	434.967.735	*Other long-term employee benefits*
Subtotal	5.307.891.454	6.103.795.558	*Sub-total*
Entitas anak			***Subsidiaries***
Program pensiun, penghargaan masa bhakti dan imbalan pasca-kerja lainnya	461.415.390	457.127.973	*Pension program, gratuity and compensation benefits and other post-benefits program*
Total	**5.769.306.844**	**6.560.923.531**	***Total***

a. Program Pensiun / *a. Pension Program*

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan pensiun untuk karyawan tetap yang dipekerjakan pada tahun 2001 dan sebelumnya dan dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan ("DP4") dan untuk yang dipekerjakan sejak tahun 2004 dikelola oleh Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3").

The Company has a pension benefit plan covering permanent employees hired in and before 2001 and managed by Dana Pensiun Pelabuhan dan Pengerukan ("DP4") and for employees hired with permanent status since 2004 managed by Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3").

Liabilitas imbalan kerja dan pencadangan biaya imbalan kerja atas program pensiun ini adalah sebagai berikut:

Employee benefits liabilities and employee benefits expenses for the pension program are as follows:

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Nilai kini liabilitas	1.611.410.819	1.684.814.603	*Present value of liabilities*
Nilai wajar aset program	(1.166.992.320)	(1.237.653.038)	*Fair value of plan assets*
Defisit program	444.418.499	447.161.565	*Deficit in plan*
Dampak batas atas aset	197.181.869	188.833.178	*Effect of asset ceiling*
Liabilitas yang diakui	**641.600.368**	**635.994.743**	***Recognized liabilities***

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)*

a. Program Pensiun (lanjutan) / *a. Pension Program (continued)*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2022	**2021**	
Biaya jasa kini	54.771.504	54.124.291	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	(35.849.616)	*Past service cost*
Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti – neto:			*Net Interest on the net defined benefit liability (asset)- net:*
- Bunga obligasi	29.758.706	32.828.047	*Bond interest -*
- Bunga aset	(34.469.739)	(20.648.588)	*Asset interest -*
- Bunga aset *ceiling*	4.711.033	-	*Ceiling asset interst -*
- Bunga atas kewajiban imbalan pasti	75.767.639	84.830.258	*Interest on the defined - benefit obligation*
- Pendapatan bunga atas aset program	(47.457.823)	(26.929.634)	*Interest income on plan assets -*
- Bunga atas dampak batas aset	8.193.913	-	*Interest on the impact of the - asset limit*
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang	-	709.880	*Remeasurement of other long term employee benefits*
Beban yang diakui	**91.275.233**	**89.064.638**	***Recognized expense***

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	**31 Desember 2021/ *December 31, 2021***	
Liabilitas awal tahun	635.994.743	1.036.144.809	*Liabilities at beginning of year*
Aplikasi IFRIC IAS 19	(19.375.565)	-	*Application of IFRIC IAS 19*
Beban yang diakui dalam laba rugi	91.275.233	89.064.638	*Expense recognized in profit or loss*
Penghasilan komprehensif lain	54.002.635	257.136.910	*Other comprehensive income*
Iuran pemberi kerja	(86.243.420)	(439.091.114)	*Employer's contributions*
Pembayaran manfaat	(34.053.258)	(307.260.500)	*Benefits payment*
Liabilitas akhir tahun	**641.600.368**	**635.994.743**	***Liabilities at end of year***

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	**31 Desember 2021/ *December 31, 2021***	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	1.684.814.603	1.722.106.388	*Present value of liabilities - beginning of year*
Aplikasi IFRIC IAS 19	(25.381.984)	-	*Application of IFRIC IAS 19*
Biaya jasa kini	54.771.504	54.124.291	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	(35.849.616)	*Past service cost*
Iuran peserta program	843.839	1.975.813	*Plan participants' contributions*
Bunga atas kewajiban imbalan pasti	75.767.639	84.830.258	*Interest on the defined benefit obligation*
Bunga aset	29.758.706	32.828.047	*Asset interest*
Pembayaran manfaat	(176.938.478)	(175.886.478)	*Benefits payment*
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(32.225.010)	685.900	*Actuarial loss (gain)*
Nilai kini liabilitas akhir tahun	**1.611.410.819**	**1.684.814.603**	***Present value of liabilities - end of year***

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)*

a. Program Pensiun (lanjutan) / *a. Pension Program (continued)*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Nilai wajar aset program awal tahun	1.237.653.038	685.961.579	*Fair value of program assets - beginning of year*
Pendapatan bunga atas aset program	47.457.823	26.929.634	*Interest income on plan asset*
Iuran pemberi kerja	86.243.420	718.212.070	*Employer's contributions*
Iuran peserta program	843.839	1.975.814	*Plan participants' contributions*
Pembayaran manfaat	(142.885.218)	(147.746.934)	*Benefits payment*
Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas/aset imbalan pasti- neto	(29.330.638)	(32.841.112)	*The return on plan assets, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability/asset*
Imbal hasil ekspektasian aset program	34.469.739	20.648.588	*The expected return on plan assets*
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(67.459.683)	(35.486.601)	*Actuarial gain (loss)*
Nilai wajar aset program akhir tahun	**1.166.992.320**	**1.237.653.038**	***Fair value of program assets - end of year***

Aset program yang dimiliki oleh Grup adalah sebagai berikut:

- Aset Tetap 46,49%
- Reksa Dana 34,29%
- Investasi Saham 2,88%
- Surat Utang Negara 7,37%
- Deposito berjangka 0,18%
- Penyertaan langsung 5,44%
- Syariah 3,35%
  - Pasar uang syariah 20%
  - Pendapatan tetap syariah 80%

Plan assets owned by the Group is as follows:

- *Fixed assets 46.49%*
- *Mutual funds 34.29%*
- *Investment in shares 2.88%*
- *State bonds 7.37%*
- *Time deposits 0.18%*
- *Direct investment 5.44%*
- *Sharia 3.35%*
  - *Sharia money market 20%*
  - *Sharia fixed income 80%*

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefit liabilities in the consolidated statements of financial position based on the maturity date as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Jatuh tempo <= 1 tahun	584.363.267	644.859.810	*Maturity <= 1 year*
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	371.234.614	355.084.278	*Maturity > 1 year and <= 5 years*
Jatuh tempo > 5 tahun	2.625.280.853	2.502.166.185	*Maturity > 5 years*
Total	**3.580.878.734**	**3.502.110.273**	***Total***

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)*

a. Program Pensiun (lanjutan) / *a. Pension Program (continued)*

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2022 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2022:

	Kenaikan/ *Increase*	Penurunan/ *Decrease*	
Nilai kini liabilitas	(82.869.488)	96.115.001	*Present value of liabilities*
Biaya jasa kini	(5.666.472)	4.268.612	*Current service cost*

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2022 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2022:

	Kenaikan/ *Increase*	Penurunan/ *Decrease*	
Nilai kini liabilitas	72.550.114	(63.319.159)	*Present value of liabilities*
Biaya jasa kini	5.861.450	(4.186.975)	*Current service cost*

b. Penghargaan masa bhakti / *b. Gratuity and compensation benefits*

Manfaat yang diperhitungkan dalam penghargaan masa bhakti mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Dana Pensiun. Peserta adalah seluruh pegawai tetap perusahaan dengan definisi gaji yang meliputi gaji merit dan tunjangan perumahan. Program ini tidak didanai.

Benefits that are calculated in the gratuity and compensation benefits refer to the Collective Labor Agreement and the Regulations of the Pension Fund. Participants are all permanent employees of the company with the salary definition including merit pay and housing allowance. This program is not funded.

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Nilai kini liabilitas	963.637.236	906.174.293	*Present value of liabilities*
Nilai wajar aset program	-	-	*Fair value of plan assets*
Liabilitas yang diakui	**963.637.236**	**906.174.293**	***Recognized liabilities***

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2022	**2021**	
Biaya jasa kini	56.089.763	56.432.013	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	11.298.037	*Past service cost*
Biaya bunga	55.457.218	53.251.768	*Interest cost*
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang	-	(171.220)	*Remeasurement of long-term benefits*
Beban yang diakui	**111.546.981**	**120.810.598**	***Recognized expense***

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)*

b. Penghargaan masa bhakti (lanjutan) / *b. Gratuity and compensation benefits (continued)*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Liabilitas awal tahun	906.174.293	849.857.115	*Liabilities at beginning of year*
Beban yang diakui dalam laba rugi	111.546.981	120.810.598	*Expense recognized in profit or loss*
Penghasilan komprehensif lain	(5.423.264)	(10.304.590)	*Other comprehensive income*
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(48.660.774)	(54.188.830)	*Current year benefit payment*
Liabilitas akhir tahun	**963.637.236**	**906.174.293**	***Liabilities at end of year***

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	906.174.293	849.857.115	*Present value of liabilities - beginning of year*
Biaya jasa kini	56.089.763	56.432.013	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	11.298.037	*Past service cost*
Biaya bunga	55.457.218	53.251.768	*Interest cost*
Pembayaran manfaat dari pemberi kerja	(48.660.774)	(54.188.830)	*Payment of benefits from the employer*
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(5.423.264)	(10.475.810)	*Actuarial gain (loss)*
Nilai kini liabilitas akhir tahun	**963.637.236**	**906.174.293**	***Present value of liabilities - end of year***

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefit liabilities in the consolidated statements of financial position based on the maturity date as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Jatuh tempo <= 1 tahun	41.411.641	39.540.818	*Maturity <= 1 year*
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	337.191.119	266.485.402	*Maturity > 1 year and <= 5 years*
Jatuh tempo > 5 tahun	4.328.045.387	4.317.065.814	*Maturity > 5 years*
Total	**4.706.648.147**	**4.623.092.034**	***Total***

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2022 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2022:

	Kenaikan/ *Increase*	Penurunan/ *Decrease*	
Nilai kini liabilitas	(72.906.895)	84.105.334	*Present value of liabilities*
Biaya jasa kini	(5.259.590)	6.170.579	*Current service cost*

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)*

b. Penghargaan masa bhakti (lanjutan) / *b. Gratuity and compensation benefits (continued)*

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2022 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2022:

	Kenaikan/ *Increase*	Penurunan/ *Decrease*	
Nilai kini liabilitas	81.660.204	(71.976.321)	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	5.997.466	(5.191.340)	Current service cost

c. Program kesehatan pensiunan / *c. Pension healthcare program*

Perusahaan memberikan imbalan kerja berupa program kesehatan pensiunan dan keluarga. Program tersebut berupa bantuan pengobatan dari Perusahaan dalam jumlah tertentu dan telah terdaftar di Perusahaan. Program ini tidak didanai.

The Company also provides long term post-employment benefits in form of healthcare program for pensioners and family. The program is in the form of medical assistance from the Company in certain amounts and after registering with the Company. This program is not funded.

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Nilai kini liabilitas	3.318.712.560	4.126.658.787	*Present value of liabilities*
Nilai wajar aset program	-	-	*Fair value of plan assets*
Liabilitas yang diakui	**3.318.712.560**	**4.126.658.787**	***Recognized liabilities***

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2022	**2021**	
Biaya jasa:			*Service cost:*
- Biaya jasa kini	104.587.487	98.088.541	*Current service cost -*
- Biaya jasa lalu	-	30.653.883	*Past service cost -*
Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti – neto:			*Net Interest on the net defined benefit liability (asset) – net:*
- Bunga atas kewajiban imbalan pasti	183.255.911	188.608.522	*Interest on the defined - benefit obligation*
- Bunga obligasi	90.945.250	96.769.824	*Bond interest -*
Beban yang diakui	**378.788.648**	**414.120.770**	***Recognized expense***

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)*

c. Program kesehatan pensiunan (lanjutan) / *c. Pension healthcare program (continued)*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Liabilitas awal tahun	4.126.658.787	4.300.395.029	*Liabilities at beginning of year*
Aplikasi IFRIC IAS 19	772.559	-	*Application of IFRIC IAS 19*
Beban yang diakui dalam laba rugi	378.788.648	414.120.770	*Expense recognized in profit or loss*
Penghasilan komprehensif lain	(1.063.155.721)	(443.197.282)	*Other comprehensive income*
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(124.351.713)	(144.659.730)	*Current year benefit payment*
Liabilitas akhir tahun	**3.318.712.560**	**4.126.658.787**	***Liabilities at end of year***

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	4.126.658.787	4.300.395.029	*Present value of liabilities - beginning of year*
Aplikasi IFRIC IAS 19	772.559	-	*Application of IFRIC IAS 19*
Biaya jasa kini	104.587.487	98.088.541	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	30.653.883	*Past service cost*
Bunga atas kewajiban imbalan pasti	274.201.161	285.378.346	*Interest on the defined benefit obligation*
Pembayaran manfaat	(208.798.557)	(144.659.730)	*Benefit paid*
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(978.708.877)	(443.197.282)	*Actuarial loss (gain)*
Nilai kini liabilitas akhir tahun	**3.318.712.560**	**4.126.658.787**	***Present value of liabilities - end of year***

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefit liabilities in the consolidated statements of financial position based on the maturity date as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Jatuh tempo <= 1 tahun	90.994.133	128.566.903	*Maturity <= 1 year*
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	627.265.306	654.383.410	*Maturity > 1 year and <= 5 years*
Jatuh tempo > 5 tahun	7.255.897.622	7.116.887.187	*Maturity > 5 years*
Total	**7.974.157.061**	**7.899.837.500**	***Total***

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects:

	Kenaikan/ *Increase*	Penurunan/ *Decrease*	
Nilai kini liabilitas	(467.621.915)	612.630.635	*Present value of liabilities*
Biaya jasa kini	(24.636.418)	34.880.656	*Current service cost*

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa imbalan cuti besar merupakan manfaat yang diperhitungkan mengacu kepada Peraturan Perusahaan. Peserta adalah seluruh pegawai tetap perusahaan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus dan diberikan bantuan cuti besar sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap. Program ini tidak didanai.

29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

d. Other long-term employee benefits

Other long-term permanent employee benefits are in the form of long service leave benefits that are calculated in reference to the Company's Regulation. Participants include all employees that have worked at least 6 (six) years of continuous service and given assistance amounting to 1 (one) time the regular income. This program is not funded.

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	**31 Desember 2021/ *December 31, 2021***	
Nilai kini liabilitas	383.958.216	435.094.715	*Present value of liabilities*
Nilai wajar aset program	(16.926)	(126.980)	*Fair value of plan assets*
Liabilitas yang diakui	**383.941.290**	**434.967.735**	***Recognized liabilities***

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2022	**2021**	
Biaya jasa kini	34.049.867	33.051.683	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	(11.851.704)	*Past service cost*
Bunga atas kewajiban imbalan pasti	19.783.906	22.053.494	*Interest on the defined benefit obligation*
Bunga obligasi	1.837.332	1.715.347	*Bond interest*
Pendapatan bunga atas aset program	(8.258)	(318.177)	*Interest income on plan assets*
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang	(27.349.354)	13.065.965	*Remeasurement of long-term benefits*
Beban yang diakui	**28.313.493**	**57.716.608**	***Recognized expense***

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	**31 Desember 2021/ *December 31, 2021***	
Liabilitas awal tahun	434.967.735	339.690.519	*Liabilities at beginning of year*
Aplikasi IFRIC IAS 19	(55.156.686)	-	*Application of IFRIC IAS 19*
Beban yang diakui dalam laba rugi	28.313.493	57.716.608	*Expense recognized in profit or loss*
Beban (penghasilan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(6.261.553)	80.997.185	*Expenses (income) that recognized in other comprehensive incomes*
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(17.921.699)	(43.436.577)	*Current year benefit payment*
Liabilitas akhir tahun	**383.941.290**	**434.967.735**	***Liabilities at end of year***

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)*

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan) / *d. Other long-term employee benefits (continued)*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	435.094.715	344.049.107	*Present value of liabilities - beginning of year*
Aplikasi IFRIC IAS 19	(55.156.686)	-	*Application of IFRIC IAS 19*
Biaya jasa kini	34.049.867	33.051.683	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	(11.851.704)	*Past service cost*
Bunga atas kewajiban imbalan pasti	19.783.906	22.053.494	*Interest on the defined benefit obligation*
Bunga obligasi	1.837.332	1.715.347	*Bond interest*
Pembayaran manfaat	(18.035.447)	(47.240.420)	*Benefits payment*
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(33.615.471)	93.317.208	*Actuarial loss (gain)*
Nilai kini liabilitas akhir tahun	**383.958.216**	**435.094.715**	***Present value of liabilities - end of year***

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Nilai wajar aset program awal tahun	126.980	4.358.587	*Fair value of program assets - beginning of year*
Pendapatan bunga atas aset program	8.258	318.177	*Interest income on program assets*
Iuran pemberi kerja	-	18.000.000	*Employer's contributions*
Pembayaran manfaat dari aset program	(113.747)	(21.803.843)	*Benefit paid by plan asset*
Imbal hasil atas aset program tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto	(4.565)	(745.941)	*The return on plan assets, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset)*
Nilai wajar aset program akhir tahun	**16.926**	**126.980**	***Fair value of program assets - end of year***

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefit liabilities in the consolidated statements of financial position based on the maturity date as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Jatuh tempo <= 1 tahun	63.595.287	48.250.931	*Maturity <= 1 year*
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	166.258.175	204.354.197	*Maturity > 1 year and <= 5 years*
Jatuh tempo > 5 tahun	1.423.190.288	1.702.323.949	*Maturity > 5 years*
Total	**1.653.043.750**	**1.954.929.077**	***Total***

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)*

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan) / *d. Other long-term employee benefits (continued)*

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2022 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2022:

	Kenaikan/ *Increase*	Penurunan/ *Decrease*	
Nilai kini liabilitas	(19.985.805)	22.283.199	*Present value of liabilities*
Biaya jasa kini	(24.443.118)	(19.281.296)	*Current service cost*

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2022 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2022:

	Kenaikan/ *Increase*	Penurunan/ *Decrease*	
Nilai kini liabilitas	21.679.649	(19.770.018)	*Present value of liabilities*
Biaya jasa kini	(19.349.755)	(22.536.587)	*Current service cost*

e. Program pensiun iuran pasti / *e. Defined contribution plan*

Grup menyediakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang dipekerjakan sejak tahun 2002. Iuran program tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (”DPLK”) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Dana Pensiun Pelindo Purnakarya (”DP3”), dan DPLK PT Asuransi Jiwasraya. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, iuran program yang dibayarkan Grup masing-masing sebesar Rp31.061.140 dan Rp28.291.615.

The Group provides a defined contribution pension plan for employees hired with permanent status since 2002. The contribution plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan (“DPLK”) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Dana Pensiun Pelindo Purnakarya (”DP3”), and DPLK PT Asuransi Jiwasraya. For the year ended December 31, 2022 and 2021, the contribution plans established by the Group amounted to Rp31,061,140 and Rp28,291,615, respectively.

30. MODAL SAHAM / *30. SHARE CAPITAL*

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah:

The Shareholders of the Company as of December 31, 2022 are as follows:

Pemegang saham	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Number of Shares Issued and Fully Paid*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Nominal/ *Amount*	*Shareholders*
Negara Republik Indonesia	40.575.584	100,00%	40.575.584.000	*Republic of Indonesia*

30. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah:

Pemegang saham	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Number of Shares Issued and Fully Paid*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Nominal/ *Amount*	*Shareholders*
Negara Republik Indonesia	8.475.067	100,00%	8.475.067.000	*Republic of Indonesia*

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham yang telah diaktakan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2008 dari Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., modal dasar Perusahaan sebesar Rp4.000.000.000 terdiri dari 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.009.958.000 atau sebanyak 1.009.958 saham.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 58 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan sebagai berikut:

1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp7.652.976.
2) Penambahan penyertaan modal negara tersebut berasal dari pengalihan barang milik negara Kementerian Perhubungan berupa dermaga beton hasil kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan Sintete-Sambas, Kalimantan Barat, yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2011 tersebut di atas, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang tertuang dalam Risalah RUPSLB No. RIS-269/MBU/S/2012 tanggal 18 Juli 2012 dengan keputusan sebagai berikut:

1) Menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (*portepel*) sebesar 7.653 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham sebesar Rp7.653.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.

30. SHARE CAPITAL (continued)

The Shareholders of the Company as of December 31, 2021 are as follows:

Based on General Meeting of Shareholders held on August 15, 2008 that was notarized through Notarial Deed No. 2 of Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., the Company's authorized capital amounted to Rp4,000,000,000 divided into 4,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp1,009,958,000 divided into 1,009,958 shares.

Based on the Regulation of Government of The Republic of Indonesia No. 58 Year 2011 dated December 22, 2011 about Additional Participation Capital of The Republic of Indonesia in the Company as follows:

1) The additional share capital of the government amounted to Rp7,652,976.
2) Additional share capital by the government came from the transfer of concrete jetty owned by Ministry of Transportation as a result of port development activities in Sintete-Sambas, West Kalimantan, provided by Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (State Revenue and Expenditure Budget) in 2005.

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 58 Year 2011, the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company was conducted as stipulated in the Minutes of Meeting No. RIS-269/MBU/S/2012 dated July 18, 2012 with decision as follows:

1) Approved the disbursement/placement of shares that were still in portfolio of 7,653 shares with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share amounting to Rp7,653,000, which was fully taken by the Republic of Indonesia.

30. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2011 tersebut di atas, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang tertuang dalam Risalah RUPSLB No. RIS-269/MBU/S/2012 tanggal 18 Juli 2012 dengan keputusan sebagai berikut: (lanjutan)

2) Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan sebesar Rp7.653.000 melalui:
   a) Sebesar Rp7.652.976 merupakan penambahan penyertaan modal negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan;
   b) Sebesar Rp24 berasal dari kapitalisasi cadangan Perusahaan sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana dalam surat No. 020/LA-PL.II/V/12 tanggal 25 Mei 2012.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 03 tanggal 2 Agustus 2013, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000 yang berasal dari pengalihan seluruh modal saham milik Negara RI pada Rukindo dalam rangka restrukturisasi Rukindo.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut, maka modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan yang semula sebesar Rp1.017.611.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang di aktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H. M.Kn. No. 09 tanggal 21 Agustus 2019, Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

30. SHARE CAPITAL (continued)

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 58 Year 2011, the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company was conducted as stipulated in the Minutes of Meeting No. RIS-269/MBU/S/2012 dated July 18, 2012 with decision as follows: (continued)

2) Approved additional paid-in capital of the Company owned by the Republic of Indonesia amounting to Rp7,653,000 through:
   a) Rp7,652,976 as additional share capital of the government as stated in Government Regulation No. 58 Year 2011 regarding Additional Capital contribution by the Government of the Republic of Indonesia into the Company's share capital;
   b) Rp24 taken from the Company's reserve capitalization as stated in the 2011 financial statements audited by KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan through letter No. 020/LA-PL.II/V/12 dated May 25, 2012.

Based on the Deed of Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of the Company as notarized in the Notarial Deed No. 03 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated August 2, 2013, the Government of the Republic of Indonesia which in this case was represented by the Minister of SOEs increased its investment in the Company by Rp426,418,000 which was derived from the transfer of the entire share capital owned by the Republic of Indonesia in Rukindo for restructuring of Rukindo.

With the additional capital contribution by the Republic of Indonesia, the issued and fully paid capital of the Company changed from Rp1,017,611,000 to Rp1,444,029,000.

Based on Minister of SOEs Decree Statement as The General Meeting of Shareholders of the Company, which was notarized on Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No. 09 dated August 21, 2019, The Government of the Republic Indonesia , in this case represented by the Minister of SOEs, changed the types of shares that were originally without series became consisted of Series A Dwiwarna Shares and Series B shares.

30. MODAL SAHAM (lanjutan)

Dengan adanya perubahan jenis saham tersebut, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp4.000.000.000 yang terdiri dari 4.000.000 lembar saham dan terbagi atas satu lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 3.999.999 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh). Modal yang telah di ambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak Rp1.444.029.000 yang terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 1.444.028 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perusahaan melakukan penggabungan dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I (“Pelindo I”), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III (“Pelindo III”) dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV (“Pelindo IV”), dengan Perusahaan sebagai perusahaan hasil penggabungan (Catatan 1g).

Dengan adanya penggabungan tersebut, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp33.000.000.000 yang terdiri dari 33.000.000 lembar saham dan terbagi atas satu lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 32.999.999 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh). Modal yang telah di ambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak Rp8.475.067.000 yang terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 8.475.066 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Negara No. S-38/MBU/01/2022 yang diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 02 tanggal 9 Februari 2022, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan struktur permodalan dan perubahan Anggaran Dasar.

30. SHARE CAPITAL (continued)

With the changes in types of shares, Company’s authorized capital of the Company is Rp4,000,000,000 consisting of 4,000,000 shares and divided into one Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 3,999,999 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount). The capital that has been taken part and fully paid by The Republic of Indonesia as much as Rp1,444,029,000 consisting of one Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 1,444,028 Series B share, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount).

On October 1, 2021, the Company merged with Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I (“Pelindo I”), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III (“Pelindo III”) and Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV (“Pelindo IV”), with the Company as the surviving entity (Note 1g).

With such merger, the Company’s authorized capital of the company is Rp33,000,000,000 consisting of 33,000,000 shares and divided into one Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 32,999,999 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount). The capital that has been taken part and fully paid by The Republic of Indonesia as much as Rp8,475,067,000 consisting of one Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 8,475,066 Series B share, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount).

Based on Minister of SOEs Decree Statement as No. S-38/MBU/01/2022 which was notarized on Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No. 02 dated February 9, 2022, The Government of the Republic Indonesia , in this case represented by the Minister of SOEs, changed the company’s capital structure and Articles of Association.

30. MODAL SAHAM (lanjutan)

Dengan adanya perubahan struktur permodalan tersebut, modal dasar perseroan adalah Rp156.000.000.000 yang terbagi atas 156.000.000 (nilai penuh) lembar saham dan terbagi atas satu lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 155.999.999 saham Seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh). Modal yang telah diambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak Rp40.575.584.000 yang terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 40.575.583 saham seri B, masing-masing dengan nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-0014773.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022.

30. SHARE CAPITAL (continued)

With the changes in capital structure, Company's authorized capital of the Company is Rp156,000,000,000 consisting of 156,000,000 shares and divided into one Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 155,999,999 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount). The capital that has been taken part and fully paid by The Republic of Indonesia as much as Rp40,575,584,000 consisting of one Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 40,575,583 Series B share, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount).

The amendment to the Company's Articles of Association has obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-0014773.AH.01.02.Year 2022 dated March 1, 2022.

31. MODAL DONASI

Pada tahun 1997, Perusahaan memperoleh modal donasi berupa tanah dan gedung CDC dari Yayasan Sekar Laut masing-masing sebesar Rp1.820.092 dan Rp23.957.447.

Pada tahun 2009, Perusahaan memperoleh modal donasi berupa gedung stasiun pandu dari Pemerintah Daerah Cilegon sebesar Rp1.048.443.

31. DONATED CAPITAL

In 1997, the Company received donated capital in the form of land and CDC building from Yayasan Sekar Laut amounting to Rp1,820,092 and Rp23,957,447, respectively.

In 2009, the Company received donated capital in form of pilotage station building from the Local Government of Cilegon amounting to Rp1,048,443.

32. TAMBAHAN MODAL DISETOR / *32. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	**31 Desember 2021/ *December 31, 2021***	
Penambahan modal berdasarkan penetapan nilai definitif (catatan 1g)	-	32.100.517.000	*Additional capital based on determination of definitive value (Note 1g)*
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali			*Difference in value of business combination transaction of entities und common control*
PHC	239.860.000	239.860.000	*PHC*
RSP	134.385.547	134.385.547	*RSP*
BMS	38.697.264	38.697.264	*BMS*
APBS	33.152.625	33.152.625	*APBS*
MMI	(8.565.613)	(8.565.613)	*MMI*
ILCS	(21.792.779)	(21.792.779)	*ILCS*
PMS	(34.886.436)	(34.886.436)	*PMS*
PMT (Catatan 1d)	(55.682.866)	-	*PMT (Note 1d)*
PTP1 (Catatan 1d)	(73.525.686)	-	*PTP1 (Note 1d)*
Rukindo	(317.597.475)	(317.597.475)	*Rukindo*
TPS	(514.813.986)	(514.813.986)	*TPS*
CTP (Catatan 1d)	(1.203.895.262)	(1.203.895.262)	*CTP (Note 1d)*
Transaksi penggabungan entitas sepengendali (Catatan 1g)	(32.100.517.000)	(32.100.517.000)	*Merger transactions of entities under common control (Note 1g)*
Pengalihan barang milik negara			*Transfer of government's assets*
Fasilitas Pelabuhan Dumai	414.128.745	414.128.745	*Dumai Port Facility*
2 (dua) unit kapal tunda di Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Lhokseumawe	53.560.436	53.560.436	*2 (two) units of tugboat in Malahayati and Lhokseumawe Port*
Dermaga Gunung Sitoli	37.991.647	37.991.647	*Gunung Sitoli Jetty*
Fasilitas Pelabuhan Gunung Sitoli	19.203.989	19.203.989	*Gunung Sitoli Port Facility*
3 (tiga) unit forklift 3 ton dan 3 (tiga) unit forklift 5 ton di Pelabuhan Malahayait	1.686.300	1.686.300	*3 (three) unit of 3 ton forklift and 3 (three) unit of 5 ton forklift in Malahayati Port*
1 (satu) unit forklift 3 ton dan 1 (satu) unit forklift 5 ton di Pelabuhan Gunung Sitoli	562.100	562.100	*1 (one) unit of 3 ton forklift and 1 (one) unit of 5 ton forklift in Gunung Sitoli Port*
Total	**(33.358.048.450)**	**(1.128.322.898)**	***Total***

32. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

a. Penambahan modal berdasarkan penetapan nilai definitif sebesar Rp32.100.517.000 merupakan selisih nilai kekayaan definitif Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV sejumlah Rp39.131.554.121 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2021 dengan nilai modal saham Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV pada saat penggabungan ke dalam Perusahaan, yaitu sebesar Rp7.031.038.000 (Catatan 1g). Penambahan modal tersebut akan dicatat sebagai modal saham pada saat telah disetujui dalam RUPS dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

   Transaksi penggabungan tersebut di atas menimbulkan selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali sebesar Rp32.100.517.000 sesuai dengan metode penyatuan kepemilikan (Catatan 1g).

b. Pada tanggal 2 Agustus 2013, Perusahaan menerima pengalihan seluruh saham Rukindo milik Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan nilai pengalihan sebesar Rp426.418.000. Atas pengalihan tersebut, Perusahaan memiliki 100% saham Rukindo.

   Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset neto Rukindo pada tanggal pengalihan	108.820.525	*Net assets of Rukindo as of transfer date*
Nilai pengalihan	426.418.000	*Transfer amount*
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	**(317.597.475)**	***Difference arising from business combination of entites under common control***

32. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

a. Additional capital based on determination of definitive value amounting to Rp32,100,517,000 represents difference of definitive net assets value of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV totalling to Rp39,131,554,121, which have been determined by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia on December 29, 2021, with the share capital of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV at the time of merger to the Company, which amounting to Rp7,031,038,000 (Note 1g). The additional capital will be recorded as share capital upon approval of GMS and upon approval from the Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia.

   The merger transaction as stated above created the difference in value of business combination transaction of entities under common control amounting to Rp32,100,517,000 in accordance with the pooling of interest method (Note 1g).

b. On August 2, 2013, the Company received the transfer of all of Rukindo's shares owned by the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp426,418,000. After the transfer, the Company owned 100% shares of Rukindo.

   Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference arising from business combination of entites under common control as part of paid in capital account is as follows:

32. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

c. Berdasarkan Perjanjian Pengambilan Saham Bersyarat pada tanggal 30 Juni 2020, PBM IHC melakukan pengambilalihan 103.166 lembar saham RSP yang dimiliki oleh Perusahaan (67%) senilai Rp167.500.000 dengan mekanisme sebagai berikut:

- PBM IHC menerbitkan sejumlah 584.372 lembar saham baru kepada Perusahaan yang mewakili 2% saham di PBM IHC senilai Rp96.250.000. Sehingga PBM IHC memperoleh sebanyak 59.282 lembar saham RSP milik Perusahaan (38,5%).
- PBM IHC melakukan pembelian sejumlah 43.884 lembar saham RSP milik Perusahaan (28,5%) dengan mekanisme jual beli saham senilai Rp71.250.000.

PBM IHC telah melakukan penyetoran kas kepada Perusahaan pada tanggal 7 Agustus 2020 sejumlah Rp71.250.000.

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham mengenai perubahan anggaran dasar RSP tanggal 7 Agustus 2020 telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 September 2020.

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset neto RSP pada tanggal pengalihan	33.114.453	*Net assets of RSP as of transfer date*
Nilai pengalihan	167.500.000	*Transfer amount*
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	**(134.385.547)**	***Difference arising from business combination of entites under common control***

32. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

b. Based on Decision-Shares Conditional Agreement on June 30, 2020, PBM IHC takeover 103,166 RSP shares owned by the Company (67%) worth Rp167,500,000 by using the following mechanism:

- *PBM IHC issued 584,372 new shares to the Company which represent 2% of the shares of PBM IHC amounting to Rp96,250,000. Therefore, PBM IHC acquired 59,282 RSP shares of the Company (38.5%).*
- *PBM IHC purchased a total of 43,884 RSP shares owned by the Company (28.5%) with a share sale and purchase mechanism worth Rp71,250,000.*

PBM IHC have transferred cash to the Company amounted Rp71,250,000 on August 7, 2020 to the Company.

The Deed of Shareholder Decree Statement regarding the amendment to the RSP's articles of association dated August 7, 2020 has been notified to and received by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on September 4, 2020.

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference arising from business combination of entites under common control as part of paid in capital account is as follows:

32. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

d. Berdasarkan akta jual beli saham tanggal 9 Oktober 2020, Perusahaan mengakuisisi kepemilikan saham PT Multimedia Nusantara pada ILCS sebanyak 4.900.000 lembar saham atau setara dengan 49% porsi kepemilikan saham ILCS dengan nilai pengalihan sebesar Rp49.200.000.

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset neto ILCS pada tanggal pengalihan	27.407.221
Nilai pengalihan	49.200.000
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	**(21.792.779)**

e. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat MMI No. 54 tanggal 16 April 2021, SPSL mengakuisisi kepemilikan saham PT PP Properti Tbk pada MMI sebanyak 656.250.000 lembar saham atau setara dengan 21,13% porsi kepemilikan saham MMI dengan nilai pengalihan sebesar Rp70.087.500.

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset neto MMI pada tanggal pengalihan	61.521.887
Nilai pengalihan	70.087.500
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	**(8.565.613)**

f. Tambahan modal disetor pada BMS merupakan selisih antara nilai nominal saham dengan setoran modal saham yang diterima dari UEPN masing-masing sebesar Rp38.697.264 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

32. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

d. Based on share sales purchase agreement dated October 9, 2020, the Company acquired the share ownership of PT Multimedia Nusantara in ILCS of 4,900,000 shares or equivalent to 49% of the share ownership of ILCS with transfer value of Rp49,200,000.

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference arising from business combination of entites under common control as part of paid in capital account is as follows:

Net assets of ILCS as of transfer date	
Transfer amount	
Difference arising from business combination of entites under common control	

e. Based on the Decision of the Meeting Deed of MMI No. 54 dated April 16, 2021, SPSL acquired the share ownership of PT PP Properti Tbk in MMI of 656,250,000 shares or equivalent to 21.13% of the share ownership of MMI with transfer value of Rp70,087,500.

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference arising from business combination of entites under common control as part of paid in capital account is as follows:

Net assets of MMI as of transfer date	
Transfer amount	
Difference arising from business combination of entites under common control	

f. Paid in capital of BMS represents the difference between the par value and the capital contribution received from UEPN amounting to Rp38,697,264 as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

32. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

g. Tambahan modal disetor APBS merupakan selisih antara nilai nominal saham dengan setoran modal saham yang diterima dari Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV masing-masing sebesar Rp33.152.625 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

h. Tambahan modal disetor PEL merupakan nominal pembelian saham kembali milik PEL dan reklasifikasi dari bagian non pengendali atas pembelian saham kembali oleh PEL. Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 24 Mei 2018 oleh Notaris Amanda Mirza Ervariana, BJTI membeli 1% saham treasuri PEL sehingga saldo saldo tambahan modal disetor pada 31 Desember 2020 sebesar Rp3.885.488. Pada tahun berjalan, PEL mendapatkan persetujuan atas penurunan modal dasar atas saham treasuri PEL, sehingga saldo tambahan modal disetor pada 31 Desember 2021 adalah nihil.

i. Tambahan modal disetor PMS merupakan selisih antara nilai nominal saham milik APBS yang dibeli oleh PMS dari Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV dan PT Gerbang Samudra Utama dengan setoran modal saham sebesar masing-masing Rp29.236.335 dan Rp29.223.425 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

j. Tambahan modal disetor TPS sebesar Rp514.813.986 merupakan selisih antara nilai nominal saham milik TPS yang dibeli oleh Perusahaan dari P&O Dover (Holdings) Limited dengan setoran modal saham.

k. Tambahan modal disetor PHC merupakan selisih antara nilai nominal saham milik PHC yang dibeli oleh PBM IHC dari Perusahaan dengan setoran modal saham Rp239.860.000 pada tanggal 31 Desember 2020.

l. Tambahan modal disetor PTP1 merupakan selisih antara nilai buku investasi PTP1 pada tanggal pengalihan dengan nilai pembelian saham yang dibeli oleh SPTP.

Aset neto PTP1 pada tanggal pengalihan	302.382.814
Nilai pengalihan	375.908.500
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	**(73.525.686)**

32. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

g. Paid in capital of APBS represents the difference between the par value and the capital contribution received from Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV amounting to Rp33,152,625 as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

h. Paid in capital of PEL represents the shares buy-back transactions of PEL and reclassification of the non-controlling interest that forms part of the shares buy back by PEL. Based on Notarial Deed No. 2 dated May 24, 2018 by Notary Amanda Mirza Ervariana, BJTI purchases 1% of PEL's treasury shares so that the additional balance of paid-in capital as of December 31, 2020 is Rp3,885,488, respectively. During the year, PEL received approval for a decrease in authorized capital for the PEL's treasury shares, so that the additional balance of paid-in capital as of December 31, 2021 is nil.

i. Paid in capital of PMS represents the difference between the par value owned by APBS which was purchased by PMS from Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV and PT Gerbang Samudra Utama with the capital contribution received amounting to Rp29,236,335 and Rp29,223,425 as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

j. Paid in capital of TPS amounting to Rp514,813,986 represents the difference between the par value owned by TPS which was purchased by the Company from P&O Dover (Holdings) Limited with the capital contribution received.

k. Paid in capital of PHC represents the difference between the par value owned by PHC which was purchased by the PBM IHC from the Company with the capital contribution received amounting to Rp239,860,000 as of December 31, 2020.

l. paid-in capital of PTP1 represents the difference between the book value of PTP1's investment and the purchase value of shares purchased by SPTP.

Net assets of PTP1 as of transfer date
Transfer amount
Difference arising from business combination of entites under common control

32. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

m. Tambahan modal disetor PMT merupakan Selisih yang timbul perubahan nilai buku investasi setelah penerbitan saham baru dicatat sebagai tambahan modal disetor. Berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler PMT tanggal 24 Oktober 2022, para pemegang saham PMTmenyetujui:

- Penambahan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp1.467.360.000 yang terbagi atas 1.467.360 saham menjadi sebesar Rp4.504.361.049 sejumlah 27.583.523 saham dengan nilai nominal Rp3.037.001.049, yang seluruhnya diambil oleh Perusahaan.

- Pemberian hak put option kepada PP dan Waskita, dimana saham seri A yang dimiliki PP dan Waskita akan dibeli oleh Perusahaan dengan harga nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).

n. Tambahan modal disetor yang berasal dari pengalihan barang milik negara merupakan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah ("PP") No. 10 Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp527.133.217 yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011.

Rincian Barang Milik Negara yang dialihkan tersebut adalah sebagai berikut:

Fasilitas Pelabuhan Dumai	414.128.745
2 (dua) unit kapal tunda di Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Lhokseumawe	53.560.436
Dermaga Gunung Sitoli	37.991.647
Fasilitas Pelabuhan Gunung Sitoli	19.203.989
3 (tiga) unit forklift 3 ton dan 3 (tiga) unit forklift 5 ton di Pelabuhan Malahayati	1.686.300
1 (satu) unit forklift 3 ton dan 1 (satu) unit forklift 5 ton di Pelabuhan Gunung Sitoli	562.100
Total	**527.133.217**

32. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

m. Paid-in capital of PMT represents the difference arising from the change in book value of investment after the issuance of new shares is recorded as additional paid-in capital.ased on the resolution of PMT's Circular GMS dated October 24, 2022, PMT's shareholders approved

- *Increase in issued and paid-up capital from the original Rp1,467,360,000 divided into 1,467,360 shares to Rp4,504,361,049 totaling 27,583,523 shares with a nominal value of Rp3,037,001,049, all of which were subscribed by the Company.*

- *Granting put option rights to PP and Waskita, where series A shares owned by PP and Waskita will be purchased by the Company at a nominal price of Rp1,000,000 (full amount).*

n. Additional paid-in capital arise from transfer of government's assets represents additional capital investment from the Republic of Indonesia which stipulated through Government Regulation ("PP") No. 10 Year 2019 dated February 22, 2019 amounting to Rp527,133,217 resulting from the transfer of Government's Assets under the Ministry of Transportation which provided from the Indonesian State Budget Year 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 and 2011.

The details of the transferred Government's Assets are as follows:

Dumai Port Facility
2 (two) units of tugboat in Malahayati and Lhokseumawe Port
Gunung Sitoli Jetty
Gunung Sitoli Port Facility
3 (three) unit of 3 ton forklift and 3 (three) unit of 5 ton forklift in Malahayati Port
1 (one) unit of 3 ton forklift and 1 (one) unit of 5 ton forklift in Gunung Sitoli Port
Total

33. SELISIH NILAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK NONPENGENDALI

Rincian selisih nilai transaksi dengan pihak nonpengendali adalah sebagai berikut:

33. DIFFERENCE IN VALUE OF TRANSACTIONS WITH NON-CONTROLLING INTEREST

The details of difference in value of transactions with non-controlling interest are as follows:

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	***31 Desember 2021/ December 31, 2021***	
Penawaran saham perdana IKT	565.027.539	565.027.539	*Initial public offering of IKT*
Penawaran saham perdana JAI	271.045.395	271.045.395	*Initial public offering of JAI*
Peningkatan kepemilikan saham TCS	832.137	-	*Increase in share ownership of TCS*
Total	**836.905.071**	**836.072.934**	***Total***

Penurunan kepemilikan saham Perusahaan sehubungan dengan penawaran saham perdana di IKT dan JAI tidak disertai dengan hilangnya pengendalian.

The decrease in company ownership in connection with the initial public offerings in IKT and JAI which is not accompanied by loss of control.

34. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM

Berikut merupakan rincian pembagian dividen dan pembentukan cadangan umum pada tahun 2022:

34. DIVIDEND AND GENERAL RESERVE

The following represents details of dividend distribution and general reserve in 2022:

Perusahaan/ *The Company*	**Rapat Umum Pemegang Saham/*General Meeting of Shareholders***	**Pembagian Dividen/*Dividend Distribution***	**Cadangan Umum/*General Reserve***	**Tanggal Pembayaran Dividen/ *Date of Dividend Payment***
Perusahaan (dahulu Pelindo I,II,III,IV) *(formerly Pelindo I,II,III,IV)*	Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No.02 tanggal 18 Mei 2022/*General Meeting of Shareholders (GMS) as outlined in the Minutes of the GMS of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. 02 dated May 18, 2022*	40,00% dari laba neto atau Rp1.316.854.000/ *40.00% of net income or amounted to Rp1,316,854,000*	60,00% dari laba neto atau sebesar Rp1.975.279.734/ *60.00% of net income or amounted to Rp1,975,279,734*	16 Juni 2022/ *June 16, 2022*

Berikut merupakan rincian pembagian dividen dan pembentukan cadangan umum pada tahun 2021:

The following represents details of dividend distribution and general reserve in 2021:

Perusahaan/ *The Company*	**Rapat Umum Pemegang Saham/*General Meeting of Shareholders***	**Pembagian Dividen/*Dividend Distribution***	**Cadangan Umum/*General Reserve***	**Tanggal Pembayaran Dividen/ *Date of Dividend Payment***
Perusahaan (dahulu Pelindo I)/ *The Company (formerly Pelindo I)*	Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. 10 tanggal 16 September 2021/*General Meeting of Shareholders (GMS) as outlined in the Minutes of the GMS of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. 10 dated September 16, 2021*	-	100,00% dari laba neto atau sebesar Rp309.298.348/ *100.00% of net income or amounted to Rp309,298,348*	-
Perusahaan (dahulu Pelindo II)/ *The Company (formerly Pelindo II)*	Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah dilaksanakan tanggal 10 Mei 2021 dan telah diaktakan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 01 tanggal 1 Juli 2021 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H./ *General Meeting of Shareholders of the Company which was held on May 10, 2021 and was notarized through Notarial Deed No. 01 on July 1, 2021 of Nanda Fauz Iwan, S.H.*	47,26% dari laba neto atau Rp560.000.000/ *47.26% of net income or amounted to Rp560,000,000*	52,74% dari laba neto atau sebesar Rp624.857.249/ *52.74% of net income or amounted to Rp624,857,249*	3 Juni 2021/ *June 3, 2021*

34. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM (lanjutan)

Berikut merupakan rincian pembagian dividen dan pembentukan cadangan umum pada tahun 2021: (lanjutan)

34. DIVIDEND AND GENERAL RESERVE (continued)

The following represents details of dividend distribution and general reserve in 2021: (continued)

Perusahaan/ *The Company*	Rapat Umum Pemegang Saham/*General Meeting of Shareholders*	Pembagian Dividen/*Dividend Distribution*	Cadangan Umum/*General Reserve*	Tanggal Pembayaran Dividen/ *Date of Dividend Payment*
Perusahaan (dahulu Pelindo III)/ *The Company (formerly Pelindo III)*	Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 5 Agustus 2021/*Annual General Meeting of Shareholders on August 5, 2021*	-	100,00% dari laba neto atau sebesar Rp1.205.564.000/ *100.00% of net income or amounted to Rp1,205,564,000*	-
Perusahaan (dahulu Pelindo IV)/ *The Company (formerly Pelindo IV)*	Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 10 Mei 2021/ *Annual General Meeting of Shareholders on May 10, 2021*	-	100,00% dari laba neto atau sebesar Rp279.970.727/ *100.00% of net income or amounted to Rp279,970,727*	-

35. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

35. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	*31 Desember 2021/ December 31, 2021*	
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			***Item that wil not be reclassified to profit or loss***
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(1.389.753.251)	(2.212.905.575)	*Remeasurement of defined benefit plans*
Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(66.738.110)	(154.208.985)	*Change in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income*
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			***Item that will be reclassified to profit or loss***
Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	(2.820.468.471)	-	*Effective portion of gains and losses on hedging instrument in cash flow hedges*
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	502.800.135	304.610.969	*Exchange difference due to financial statements translation*
Total	**(3.774.159.697)**	**(2.062.503.591)**	***Total***

Selisih kurs penjabaran laporan keuangan terutama merupakan penjabaran laporan keuangan JICT, NPCT1 dan TPK Koja yang mata uang fungsionalnya adalah Dolar Amerika Serikat.

Exchange difference due to financial statements translation mainly represents translation of financial statements of JICT, NPCT1 and TPK Koja which functional currency is United States Dollar.

36. KEPENTINGAN NONPENGENDALI / *36. NON-CONTROLLING INTERESTS*

	Aset Neto/*Net Assets*		Laba (Rugi) Neto/ *Net Income (Loss)*		
	31 Desember/ *December 31,*	31 Desember/ *December 31,*	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2022	2021	2022	2021	
BJTI	462.406.181	435.077.121	27.329.060	15.518.409	*BJTI*
PTP1	315.597.771	315.597.771	-	(39.199.884)	*PTP1*
IKT	294.896.513	238.342.114	56.554.399	12.691.442	*IKT*
PMT	203.492.958	240.559.565	(37.066.607)	(131.869.901)	*PMT*
JAI	153.894.814	135.675.953	18.218.861	15.124.847	*JAI*
PMS	124.272.635	63.682.361	60.590.274	13.214.497	*PMS*
EPI	56.500.933	54.724.011	1.776.922	4.891.099	*EPI*
KKT	36.522.483	32.801.635	3.720.848	1.414.112	*KKT*
PDS	17.523.553	13.455.278	4.068.275	3.112.232	*PDS*
TPS	13.288.411	10.705.555	2.582.856	3.820.347	*TPS*
MTI	6.483.180	5.614.188	868.992	63.940	*MTI*
TTL	4.929.027	4.210.531	718.496	930.082	*TTL*
PIL	955.795	871.763	84.032	49.330	*PIL*
EII	602.414	454.874	147.540	80.836	*EII*
NTS	500.900	466.525	34.375	31.491	*NTS*
PHCM	157.283	143.935	13.348	59.727	*PHCM*
EDII	(12.021.072)	(8.303.307)	(3.717.765)	(15.011.946)	*EDII*
Total	**1.680.003.779**	**1.544.079.873**	**135.923.906**	**(115.079.340)**	***Total***

37. PENDAPATAN OPERASI / *37. OPERATING REVENUES*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2022	2021	
Pelayanan terminal petikemas	12.927.659.143	12.828.726.516	*Container services*
Pelayanan jasa kapal	5.090.014.199	5.625.502.132	*Vessel services*
Pelayanan jasa terminal	4.499.450.059	3.930.598.686	*Terminal services*
Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	3.787.257.944	3.556.019.099	*Land, building, water and electricity services*
Kerjasama dan *fee for services*	1.233.329.761	1.082.564.914	*Partnership and fee for services*
Pelayanan jasa barang	515.398.786	245.628.403	*Cargo services*
Pendapatan pas pelabuhan dan terminal	441.126.796	246.352.980	*Port and terminal entry fee*
Jasa maritim dan pengerukan	405.778.070	464.343.904	*Marine and dredging services*
Pengusahaan peralatan	370.796.897	347.645.520	*Equipment services*
Jasa logistik	159.334.977	196.604.847	*Logistic services*
Pelayanan jaringan dan konsultasi sistem informasi	155.363.848	128.555.195	*Network services and consultant of information system*
Pelayanan kesehatan	16.448.305	56.969.167	*Medical services*
Lain-lain	98.645.350	105.294.974	*Others*
Total	**29.700.604.135**	**28.814.806.337**	***Total***

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak ada transaksi dari satu pelanggan dengan total penjualan kumulatif yang melebihi 10% dari total pendapatan konsolidasian.

During the year ended as of December 31, 2022 and 2021, there were no sales made from any single customer with a cumulative amount exceeding 10% of the total consolidated revenue.

38. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perusahaan dalam pembangunan terminal Kalibaru, Kijing, Teluk Lamong, Manyar Gresik, Kuala Tanjung, Belawan Fase II, Makassar New Port, Alur Pelayaran Barat Surabaya dan Jalan Tol Cibitung - Cilincing. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya yang mana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset.

38. CONSTRUCTION REVENUES AND EXPENSES

Construction revenue is the compensation of the service recognized by the Company for construction of Kalibaru, Kijing, Teluk Lamong, Manyar Gresik, Kuala Tanjung, Belawan Phase II, Makassar New Port, Alur Pelayaran Barat Surabaya and Cibitung - Cilincing Toll Road. Construction revenue is measured using cost method, where all costs are directly attributable to the acquiring cost of the assets.

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2022	**2021**	
Pendapatan konstruksi	2.397.701.575	3.195.512.405	*Construction revenues*
Beban konstruksi	(2.397.701.575)	(3.195.512.405)	*Construction expenses*

39. BEBAN OPERASI

39. OPERATING EXPENSES

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2022	**2021**	
Kerja sama mitra usaha	6.550.559.411	6.594.578.809	*Partnership*
Pegawai	5.801.903.082	5.776.773.548	*Employee*
Penyusutan dan amortisasi	3.567.862.133	3.199.471.975	*Depreciation and amortization*
Umum	3.309.282.651	3.311.181.821	*General*
Bahan bakar dan bahan habis pakai	2.367.251.451	1.858.083.842	*Fuels and supplies*
Pemeliharaan	1.030.572.335	1.205.821.148	*Maintenance*
Asuransi	433.675.572	381.095.875	*Insurance*
Administrasi kantor	93.322.556	214.514.237	*Office administration*
Total	**23.154.429.191**	**22.541.521.255**	***Total***

Kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi seperti perusahaan-perusahaan operator fasilitas pelabuhan yang menyediakan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan *lift on* dan *lift off* di pelabuhan.

The partnership expenses mainly represent the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners such as port facilities' management companies for providing loading and unloading activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports.

Beban umum terutama merupakan beban jasa konsultan, penyisihan penurunan nilai piutang, kontribusi kepada pihak lain, imbalan kerja, perjalanan dinas, pendidikan dan pelatihan dan pemasaran.

General expenses mainly consist of consultants, allowance for impairment of receivables, contribution to the other parties, employee benefits, business travelling, education and training and marketing expenses.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak ada transaksi dari satu pemasok dengan total pembelian kumulatif yang melebihi 10% dari total pendapatan konsolidasian.

During the year ended as of December 31, 2022 and 2021, there were no purchase made from any single supplier with a cumulative amount exceeding 10% of the total consolidated revenue.

40. PENDAPATAN OPERASI LAINNYA - NETO / *40. OTHER OPERATING INCOME - NET*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2022	**2021**	
Amortisasi premium (Catatan 49e dan 49f)	161.033.845	146.997.708	*Amortization of premium (Notes 49e & 49f)*
Keuntungan dari transaksi peningkatan kepemilikan saham pada entitas asosiasi	141.671.533	-	*Gain from transaction of shares ownership increase in associates*
Pendapatan denda	92.212.745	164.990.708	*Income from penalties*
Efek penyesuaian IFRIC 19	82.855.722	-	*Effect of IFRIC 19 adjustment*
Penerimaan aset *build, operate, transfer*	26.537.083	219.657.600	*Receive of build, operate, transer assets*
Rugi penghapusan aset tetap – neto	(748.245)	(1.969.868)	*Loss on disposal of fixed assets – net*
Beban denda	(34.792.709)	(88.995.349)	*Expenses from penalties*
Rugi selisih kurs – neto	(182.036.994)	(274.562.559)	*Loss on foreign exchange – net*
Lain-lain – neto	281.912.517	100.794.304	*Others – net*
Total	**568.645.497**	**266.912.544**	***Total***

41. PENDAPATAN KEUANGAN / *41. FINANCE INCOME*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2022	**2021**	
Pendapatan bunga deposito	247.860.700	249.312.805	*Interest income from deposits*
Pendapatan jasa giro	104.501.094	67.687.570	*Interest income on current account*
Pendapatan bunga pinjaman	28.128.476	90.775.509	*Interest income from loan*
Total	**380.490.270**	**407.775.884**	***Total***

42. BEBAN KEUANGAN / *42. FINANCE COSTS*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2022	**2021**	
Beban bunga, amortisasi diskonto dan biaya transaksi	2.036.128.007	1.982.981.503	*Interest expenses, amortization of discount and transaction cost*
Beban bunga pinjaman bank	391.025.313	461.005.512	*Interest expense from bank loans*
Beban bunga provisi konsesi	96.208.028	56.089.251	*Provision interest expenses*
Beban bunga sewa	30.313.025	33.358.003	*Lease intersest expenses*
Beban administrasi bank	17.345.775	4.738.635	*Bank administration charges*
Beban lain-lain	22.820	1.909.962	*Other expenses*
Total	**2.571.042.968**	**2.540.082.866**	***Total***

43. BAGIAN LABA ENTITAS ASOSIASI / *43. EQUITY IN INCOME OF ASSOCIATES*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2022	**2021**	
BKMS	164.502.001	90.170.663	*BKMS*
NPCT1	105.093.768	56.314.207	*NPCT1*
JICT	62.413.034	75.292.403	*JICT*
RSP	10.210.479	28.714.581	*RSP*
Ambapers	3.040.547	10.105.662	*Ambapers*
PTI	2.951.271	-	*PTI*
LNG	380.592	456.096	*LNG*
PCN	102.185	157.451	*PCN*
TNU	(7.601.852)	(9.921.272)	*TNU*
JBT	(14.278.018)	(21.612.324)	*JBT*
PHC	(24.198.315)	25.430.121	*PHC*
Total	**302.615.692**	**255.107.588**	***Total***

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI / *44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES*

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap berelasi jika entitas tersebut, antara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengendalikan atau mengendalikan bersama, atau memiliki pengaruh signifikan atas Grup dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Entitas juga dianggap berelasi jika entitas tersebut sepengendalian dengan Grup.

In the normal course of business, the Group enters into transactions with related parties. Entities are considered to be related if, among these, the Company has the ability, directly or indirectly, to control or jointly control or have significant influence over these entities in making financial and operating decisions. Entities are also considered to be related if they are under common control with the Group.

Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan merupakan pihak berelasi.

The Government of the Republic of Indonesia is the controlling shareholder of the Company. All entities that are owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia and also entities where the Republic of Indonesia has significant influence are related parties.

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat hubungan berelasi

Nature of relationship with related parties

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows:

Sifat relasi/ *Nature of relationship*	Nama pihak berelasi/ *Name of related party*	Jenis transaksi/ *Nature of transaction*
Pemegang saham/ *Controlling Shareholder*	Negara Republik Indonesia	Jasa konsesi/ *Concession service*
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government-related entity*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan dan pinjaman/ *Banking services and loans*
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ *Banking services*
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ *Banking services*
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jasa perbankan dan pinjaman/ *Banking services and loans*
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Jasa Perbankan/ *Banking services*
	PT Bank Mandiri Taspen	Jasa perbankan/ *Banking services*
	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Jasa perbankan/ *Banking services*
	PT Wika Haka Joint Operation	Jasa Pembangunan/ *Construction services*
	PT Pertamina (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)Tbk	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Jasa Klasifikasi dan Registrasi Kapal/ *Ship classification and registration services*
	PT Sucofindo (Persero)	Jasa pemeriksaan/ *Inspection services*
	PT Brantas Abipraya (Persero)	Jasa pembangunan/ *Construction services*
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Jasa Pembangunan/ *Construction services*
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penjualan jasa/*Sales*
	PT Semen Padang (Persero)	Penjualan jasa/*Sales*

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Nature of relationship with related parties (continued)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ ***Nature of relationship***	**Nama pihak berelasi/** ***Name of related party***	**Jenis transaksi/** ***Nature of transaction***
Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/ *Government-related entity (continued)*	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT Nusantara Regas	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT Pertamina Patra Niaga	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	Koperasi Karyawan TPK KOJA	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	Koperasi Pegawai Maritim	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan ("DP4")	Jasa pensiun/ *Pension services*
	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Jasa pembangunan/ *Construction services*
	PT Hutama Karya (Persero)	Jasa pembangunan/ *Construction services*
	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	Direktorat Jenderal Pajak	Perpajakan/*Taxation*
	Badan Layanan Umum Sekretariat Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Pinjaman/*Loan*
	PT Nindya Karya (Persero)	Jasa pembangunan/ *Construction services*
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Jasa pembangunan/ *Construction services*

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Nature of relationship with related parties (continued)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ ***Nature of relationship***	**Nama pihak berelasi/** ***Name of related party***	**Jenis transaksi/** ***Nature of transaction***
Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/ *Government-related entity (continued)*	Koperasi Pegawai PT Pelindo III	Alih daya/ *Outsourcing*
	PT Surveyor Indonesia	Jasa Pemeriksaan/ *Inspection services*
	PT Danareksa (Persero)	Jasa Keuangan/ *Financial services*
	PT Sarana Bandar Nasional	Jasa Bongkar muat/ *Unloading services*
	BPKD Provinsi DKI Jakarta	Penjualan jasa/*Sales*
	PT Yodya Karya (Persero)	Konsultan/ *Consultant*
	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Jasa pembangunan/ *Construction services*
	PT Krakatau Engineering Amarta Karya (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT Indonesia Power	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT Jasa Marga Tollroad Maintenance	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pinjaman/*Loan*
	PT Virama Karya (Persero)	Jasa pembangunan/ *Construction services*
	PT Bukit Asam Tbk	Penjualan jasa/*Sales*

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Nature of relationship with related parties (continued)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ ***Nature of relationship***	**Nama pihak berelasi/** ***Name of related party***	**Jenis transaksi/** ***Nature of transaction***
Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/*Government-related entity (continued)*	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Penjualan jasa/*Sales*
	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Penjualan jasa/*Sales*
	PT Dharma Lautan Nusantara	Penjualan jasa/*Sales*
	Tentara Nasional Indonesia	Penjualan jasa/*Sales*
	Instansi Pemerintah	Penjualan jasa/*Sales*
	BPJS Kesehatan	Penjualan jasa/*Sales*
	PT BNI Life Insurance	Penjualan jasa/*Sales*
	PT Pertamina Trans Kontinental	Penjualan jasa/*Sales*
	PT Semen Tonasa	Penjualan Jasa/*Sales*
	PT Pupuk Sriwidjaya Palembang	Penjualan Jasa/*Sales*
	Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3")	Jasa Pensiun/*Pension services*
	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Penjualan Jasa/*Sales*
	PT Petrokimia Gresik	Penjualan jasa/*Sales*
	PT Prima Citra Nutrindo	Jasa Boga/*Catering*
	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Penjualan jasa/*Sales*
	PT PP Presisi Tbk	Jasa pembangunan/ *Construction services*
	PT Bukit Prima Bahari	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Nature of relationship with related parties (continued)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ ***Nature of relationship***	**Nama pihak berelasi/** ***Name of related party***	**Jenis transaksi/** ***Nature of transaction***
Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/*Government-related entity (continued)*	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Pinjaman/*Loan*
	PT Taspen (Persero)	Penjualan jasa/*Sales*
	BPJS Ketenagakerjaan	Penjualan jasa/*Sales*
	Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut	Penjualan jasa/*Sales*
	PT Daya Radar Utama	Penjualan jasa/*Sales*
	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Penjualan Jasa/*Sales*
	PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	Lembaga Manajemen Aset Negara	Piutang pembebasan Lahan/ *Land acquisition receivables*
	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	Penjualan jasa/*Sales*
	PT Asuransi Kredit Indonesia	Jasa asuransi/*Insurance services*
	PT Asuransi Jiwasraya	Jasa asuransi/*Insurance services*
	PT Pertamina Hulu Energi	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT Waskita Beton Precast Tbk	Jasa Pembangunan/ *Construction services*
	PT Asuransi Jasa Indonesia	Jasa Asuransi/*Insurance services*
	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Jasa Pembangunan/ *Construction services*
	PT Berdikari (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT Terminal Nilam Utara	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	PT Jawa Satu Power	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Nature of relationship with related parties (continued)

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ ***Nature of relationship***	**Nama pihak berelasi/** ***Name of related party***	**Jenis transaksi/** ***Nature of transaction***
Entitas asosiasi/*Associate entities*	JICT	Sewa dan royalti/ *Rental and royalty*
	NPCT1	Investasi/*Investment*
	RSP	Jasa Kesehatan/*Health services*
	PHC	Jasa Kesehatan/*Health service*
	KSO TPK KOJA	Penjualan/*Sales*
	BKMS	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ *Sales and operational activities*
	Ambapers	Penjualan jasa/*Sales*

Transaksi dengan pihak berelasi

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:

a. Kas dan setara kas (Catatan 4)

Transactions with related parties

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows:

a. Cash and cash equivalents (Note 4)

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*		**31 Desember 2021/ *December 31, 2021***		
	Total/ *Total*	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	**Total/ *Total***	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	
Bank					***Cash in banks***
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.450.226.104	2,07	1.721.811.595	1,48	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.724.537.132	1,46	1.779.033.646	1,53	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	137.311.483	0,12	174.633.653	0,15	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesa Tbk	73.129.253	0,06	36.472.548	0,03	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	9.016.541	0,01	13.369.930	0,01	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
Lain-lain	-	-	666.481	0,00	*Others*
Total	**4.394.220.513**	**3,72**	**3.725.987.853**	**3,20**	***Total***
Dolar AS					*US Dollar*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.478.727.324	1,25	483.014.687	0,42	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9.588.955	0,01	20.050.440	0,02	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.829.657	0,01	14.460.745	0,01	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	49.541	0,00	-	-	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Lain-lain	-	-	1.288.437	0,00	*Others*
Total	**1.495.195.477**	**1,27**	**518.814.309**	**0,45**	***Total***

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

a. Kas dan setara kas (Catatan 4) (lanjutan)

a. *Cash and cash equivalents (Note 4) (continued)*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*		31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		
	Total/ *Total*	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	**Total/ *Total***	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	
Deposito Berjangka					***Time Deposits***
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.441.799.450	2,06	2.576.448.731	2,22	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.269.942.345	1,07	865.288.338	0,74	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.160.768.887	0,98	2.594.189.481	2,23	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.032.310.000	0,87	944.053.995	0,81	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	463.064.119	0,39	210.707.845	0,18	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen	10.000.000	0,01	-	-	*PT Bank Mandiri Taspen*
Total	**6.377.884.801**	**5,38**	**7.190.688.390**	**6,18**	***Total***
Dolar AS					*US Dollar*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	79.720.239	0,07	71.755.009	0,06	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	77.470.447	0,07	69.797.720	0,06	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.798.250	0,01	20.341.894	0,01	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Total	**168.988.936**	**0,15**	**161.894.623**	**0,13**	***Total***

) dari total aset** — *) from total assets***

b. Investasi jangka pendek (Catatan 5)

b. *Short-term investment (Note 5)*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*		31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		
	Total/ *Total*	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	**Total/ *Total***	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	
Deposito berjangka					***Time deposits***
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.052.500.000	0,89	1.500.000.000	1,29	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	615.000.000	0,52	-	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	150.000.000	0,13	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Dolar AS					*US Dollar*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.736.427.108	1,47	4.066.665.000	3,50	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	519.123.000	0,44	-	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	1.662.340	0,00	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Total	**3.923.050.108**	**3,32**	**5.718.327.340**	**4,92**	***Total***

) dari total aset** — *) from total assets***

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

c. Piutang usaha (Catatan 6)

44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

c. Trade receivables (Note 6)

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*		31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		
	Total/ *Total*	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	**Total/ *Total***	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	
PT Pertamina Trans Kontinental	186.892.251	0,16	75.374.971	0,06	*PT Pertamina Trans Kontinental*
PT Pembangkitan Jawa Bali	81.055.047	0,07	82.669.137	0,07	*PT Pembangkitan Jawa Bali*
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	77.330.943	0,07	76.672.740	0,07	*PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)*
PT Djakarta Lloyd (Persero)	61.088.111	0,05	79.004.800	0,07	*PT Djakarta Lloyd (Persero)*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	37.605.527	0,03	37.665.788	0,03	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Petrokimia Gresik	32.354.443	0,03	31.723.908	0,03	*PT Petrokimia Gresik*
PT Pertamina Patra Niaga	25.444.746	0,02	4.963.270	0,00	*PT Pertamina Patra Niaga*
PT Terminal Nilam Utara	12.053.974	0,01	82.507	0,00	*PT Terminal Nilam Utara*
PT Jawa Satu Power	11.412.148	0,01	3.971.709	0,00	*PT Jawa Satu Power*
PT Berdikari (Persero)	10.859.875	0,01	-	-	*PT Berdikari (Persero)*
PT Bahtera Adhiguna	10.300.147	0,01	8.852.657	0,01	*PT Bahtera Adhiguna*
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	9.593.112	0,01	2.541.070	0,00	*PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)*
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	9.061.653	0,01	7.814.283	0,01	*PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)*
PT Perikanan Nusantara (Persero)	8.327.660	0,01	8.162.920	0,01	*PT Perikanan Nusantara* (Persero)
Tentara Nasional Indonesia	7.165.459	0,01	9.591.555	0,01	*Indonesian Armed Forces*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	6.093.250	0,01	5.051.236	0,00	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Dharma Lautan Nusantara	5.650.682	0,00	4.030.797	0,00	*PT Dharma Lautan Nusantara*
PT Semen Padang (Persero)	5.100.009	0,00	7.045.334	0,01	*PT Semen Padang (Persero)*
PT Semen Tonasa	4.235.056	0,00	3.589.727	0,00	*PT Semen Tonasa*
PT PP Presisi Tbk	4.203.201	0,00	10.528.088	0,01	*PT PP Presisi Tbk*
PT Pertamina (Persero)	3.750.749	0,00	18.087.764	0,02	*PT Pertamina (Persero)*
PT Bukit Prima Bahari	2.306.689	0,00	1.285.432	0,00	*PT Bukit Prima Bahari*
PT Pertamina Hulu Energi	1.885.037	0,00	-	-	*PT Pertamina Hulu Energi*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1.761.863	0,00	2.452.945	0,00	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk*
BPJS Ketenagakerjaan	1.301.141	0,00	115.145	0,00	*BPJS Ketenagakerjaan*
PT Kawasan Berikat Nusantara	1.180.620	0,00	1.166.210	0,00	*PT Kawasan Berikat Nusantara*
BPJS Kesehatan	1.082.366	0,00	383.936	0,00	*BPJS Kesehatan*
PT Daya Radar Utama	991.081	0,00	10.366.520	0,01	*PT Daya Radar Utama*
PCN	53.653	0,00	10.205.118	0,01	*PCN*
PT Bukit Asam Tbk	5.311	0,00	714.416	0,00	*PT Bukit Asam Tbk*
PT Pupuk Sriwidjaya Palembang	5.303	0,00	10.176.645	0,01	*PT Pupuk Sriwidjaya Palembang*
Lain-lain	24.262.298	0,02	47.663.608	0,04	*Others*
Subtotal	644.413.405	0,54	561.954.236	0,48	*Sub-total*
Dikurangi:					*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(324.732.089)	(0,27)	(284.517.160)	(0,24)	*Allowance for impairment*
Total	**319.681.316**	**0,27**	**277.437.076**	**0,24**	***Total***

) dari total aset** — *) from total assets***

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

d. Piutang lain-lain (Catatan 7)

d. Other receivables (Note 7)

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*		31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		
	Total/ *Total*	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	**Total/ *Total***	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	
BKMS	196.458.486	0,17	201.989.952	0,17	*BKMS*
LMAN	142.604.259	0,12	151.822.082	0,13	*LMAN*
JICT	16.457.437	0,01	73.637.145	0,06	*JICT*
Perum Pengangkutan				-	*Perum Pengangkutan*
Penumpang Djakarta	11.989.210	0,01	11.989.210	0,01	*Penumpang Djakarta*
PT Djakarta Lloyd (Persero)	10.594.266	0,01	4.926.238	0,00	*PT Djakarta Lloyd (Persero)*
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	8.826.829	0,01	-	-	*PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*
PT Terminal Nilam Utara	2.833.149	0,00	-	-	*PT Terminal Nilam Utara*
PT Semen Indonesia (Persero)	2.601.775	0,00	-	-	*PT Semen Indonesia (Persero)*
PT Asuransi Kredit Indonesia	1.732.395	0,00	-	-	*PT Asuransi Kredit Indonesia*
NPCT1	99.549	0,00	478.095	0,00	*NPCT1*
PT Adhi Karya (Persero)	63.593	0,00	-	-	*PT Adhi Karya (Persero)*
Direktorat Jenderal Pajak	-	-	674.223.612	0,58	*Directorate General of Taxes*
Kementerian Perhubungan					*Kementerian Perhubungan*
Direktorat Perhubungan Laut	-	-	52.267.802	0,04	*Direktorat Perhubungan Laut*
Instansi Pemerintah	-	-	2.508.645	0,00	*Government Institutions*
Tentara Nasional Indonesia	-	-	934.500	0,00	*Indonesia Armed Forces*
RSP	-	-	150.595	0,00	*RSP*
Lain-lain	26.124.781	0,02	67.365.022	0,06	*Others*
Subtotal	420.385.729	0,35	1.242.292.898	1,05	*Sub-total*
Dikurangi:					*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(28.203.948)	(0,02)	(88.914.882)	(0,08)	*Allowance for impairment*
Total	**392.181.781**	0,33	**1.153.378.016**	**0,97**	***Total***

) dari total aset** ***) *from total assets

Piutang dari Lembaga Manajemen Aset Negara ("LMAN") merupakan dana talangan yang telah dibayarkan oleh CTP kepada pemilik lahan dan akan diganti oleh LMAN sesuai dengan amendemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Cibitung-Cilincing dimana CTP menyediakan dana talangan dengan nilai maksimum sebesar Rp4.560.709.011. Piutang ini digunakan sebagai jaminan atas utang bank (Catatan 25).

Receivables from the State Assets Management Body ("LMAN") represent bailout funds that have been paid by CTP to land owners and will be reimbursed to LMAN in accordance with the Toll Operation Cibitung-Cilincing Toll Road Agreement amendments where CTP provides funding with a maximum of Rp4,560,709,011. These receivables used as collateral for bank loan (Note 25).

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

e. Pendapatan masih akan diterima (Catatan 9)

44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

e. Accrued revenues (Note 9)

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*		31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		
	Total/ *Total*	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	**Total/ *Total***	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	
PT Pertamina (Persero)	44.085.855	0,04	-	-	*PT Pertamina (Persero)*
PT Indonesia Power	23.021.589	0,02	17.731.187	0,02	*PT Indonesia Power*
PT Pertamina Patra Niaga	13.558.963	0,01	3.060.456	0,00	*PT Pertamina Patra Niaga*
JICT	345.929	0,00	1.410.041	0,00	*JICT*
BPJS Kesehatan	-	-	576.545	0,00	*BPJS Kesehatan*
Lainnya	26.547.621	0,02	10.605.092	0,01	*Others*
Total	**107.559.957**	**0,09**	**33.383.321**	**0,03**	***Total***

) dari total aset* — ***) *from total assets

f. Pinjaman bank jangka pendek (Catatan 18)

f. Short-term bank loans (Note 18)

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*		31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		
	Total/ *Total*	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	**Total/ *Total***	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	103.106.529	0,14	133.296.919	0,18	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*

) dari total liabilitas — **) *from total liabilities*

Kredit Non-Sindikasi

Berdasarkan Akta Notaris Perjanjian Kredit Non-Sindikasi No. 83 tanggal 22 Maret 2019 oleh Ariani L. Rachim, S.H., notaris di Jakarta, CTP telah menandatangani Perjanjian Kredit Non-Sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. CTP memperoleh fasilitas kredit maksimum sebesar Rp1.920.000.000 yang terbagi menjadi 2 (dua) *tranche*.

Fasilitas kredit maksimum pada *tranche* I dan *tranche* II masing-masing adalah sebesar Rp890.000.000 dan Rp1.030.000.000. Fasilitas kredit tersebut ditujukan untuk pembiayaan dana talangan tanah pembebasan lahan tol ruas Cibitung-Cilincing.

Non-Syndicated Loan

Based on the Non-Syndicated Credit Agreement Notarial Deed No. 83 dated March 22, 2019 by Ariani L. Rachim, S.H., a notary in Jakarta, CTP entered into a Non-Syndicated Loan with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with a maximum credit facility of Rp1,920,000,000, divided in 2 (two) tranches.

Maximum credit facilities for tranche I and II amounted to Rp890,000,000, and Rp1,030,000,000. The credit facility is intended to finance land bailout funds for land acquisition for the Cibitung-Cilincing toll road section.

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

f. Pinjaman bank jangka pendek (Catatan 18) (lanjutan)

Kredit Non-Sindikasi (lanjutan)

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2021 (2 tahun setelah tanggal perjanjian). Denda 2% akan dihitung untuk semua saldo yang belum dibayar baik untuk pokok dan bunga.

Selain itu, CTP juga diwajibkan untuk mematuhi *negative covenant* antara lain:

a. Mengubah bentuk, status badan hukum, dan lingkup kegiatan usaha debitur, dan investasi serta penyertaan bidang lain;
b. Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset Perusahaan dan *go public*;
c. Mengubah susunan pemegang saham
d. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang;
e. Melunasi dan atau membayar hutang kepada pemegang saham;
f. Melakukan pembagian dividen;
g. Mengalihkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit; dan
h. Mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Pada tanggal 5 Agustus 2022, para pihak sepakat untuk mengubah jumlah maksimum fasilitas kredit menjadi Rp1.494.685.000 dengan rincian sebagai berikut:

- *Tranche* I: Rp890.000.000
- *Tranche* II: Rp604.685.000

Para pihak juga sepakat untuk mengubah jangka waktu perjanjian menjadi 23 April 2023 dan suku bunga menjadi 7,25% per tahun.

44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

f. Short-term bank loans (Note 18) (continued)

Non-Syndicated Loan (continued)

This loan is subject to fixed interest rate of 8.50% per annum which shall mature in 2021 (2 years after the agreement date). A 2% penalty shall be calculated for all unpaid balances for both principal and interest.

In addition, CTP is required to adhere to the following negative covenants, among others:

a. Change the form, status of legal entity, and scope of business activities, and investment and participation in other fields;
b. Conduct mergers, acquisitions, sale of Company assets and go public;
c. Change the composition of shareholders;
d. Be bound as guarantor of debt;
e. Pay off and or pay debts to shareholders;
f. Declare dividends;
g. Transfer to another party, in part or in whole of the rights and obligations arising in connection with the credit facility; and
h. Declare bankruptcy.

On August 5, 2022, both parties agreed to amend the maximum credit facility to become Rp1,494,685,000 with each tranche as follows:

- *Tranche I: Rp890,000,000*
- *Tranche II: Rp604,685,000*

Both parties also agreed to change the maturity of the agreement to be on April 23, 2023 and the fixed interest rate to become 7.25% per annum.

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

f. Pinjaman bank jangka pendek (Catatan 18) (lanjutan)

f. Short-term bank loans (Note 18) (continued)

Beban bunga yang diakui untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp16.516.834 dan Rp11.543.099, yang dikapitalisasi ke aset dalam hak pengusahaan jalan tol (Catatan 15).

Interest expenses recognized for the year ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp16,516,834 and Rp11,543,099, respectively, which were all capitalized to toll road access rights during the period (Note 15).

g. Utang usaha (Catatan 19)

g. Trade payable (Note 19)

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*		31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		
	Total/ *Total*	Persentase (%)*/ *Percentage (%)**	Total/ *Total*	Persentase (%)*/ *Percentage (%)**	
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	864.094.284	1,14	976.412.332	1,32	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	51.388.396	0,07	532.060.366	0,72	*PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*
PT Waskita Beton Precast	39.704.746	0,05	111.703.005	0,15	*PT Waskita Beton Precast*
PT Jasa Marga Tollroad Maintenance	22.995.319	0,03	6.476.575	0,01	*PT Jasa Marga Tollroad Maintenance*
RSP	21.947.420	0,03	4.254.408	0,01	*RSP*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	10.800.841	0,01	6.800.078	0,01	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk*
Koperasi Pegawai Pelindo III	6.388.546	0,01	4.234.597	0,01	*Koperasi Pegawai Pelindo III*
Koperasi Pegawai Maritim	4.778.047	0,01	6.647.447	0,01	*Koperasi Pegawai Maritim*
PT Pertamina Trans Kontinental	3.931.110	0,01	-	-	*PT Pertamina Trans Kontinental*
PT Pertamina Patra Niaga	3.778.502	0,00	31.818.091	0,04	*PT Pertamina Patra Niaga*
Instansi Pemerintah	2.597.226	0,00	-	-	*Goverment Institution*
BKMS	2.294.563	0,00	30.050.713	0,04	*BKMS*
JICT	2.135.352	0,00	10.470.631	0,01	*JICT*
DP4	2.117.598	0,00	-	-	*DP4*
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	2.047.567	0,00	6.258.858	0,01	*PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)*
PT Yodya Karya	1.677.099	0,00	-	-	*PT Yodya Karya*
BPJS Ketenagakerjaan	1.567.265	0,00	-	-	*BPJS Ketenagakerjaan*
DP3 Dana Pensiun	1.408.640	0,00	-	-	*DP3 Dana Pensiun*
PT BNI Life Insurance	1.156.648	0,00	-	-	*PT BNI Life Insurance*
PT Pertamina (Persero)	1.012.396	0,00	14.693.889	0,02	*PT Pertamina (Persero)*
Wika Haka Joint Operation	-	-	80.051.325	0,11	*Wika Haka Joint Operation*
PT Brantas Abipraya (Persero)	-	-	8.957.552	0,01	*PT Brantas Abipraya (Persero)*
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	-	-	17.947.428	0,02	*PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	-	-	8.933.314	0,01	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	-	-	7.811.099	0,01	*PT Adhi Karya (Persero Tbk)*
PT Virama Karya (Persero)			5.187.290	0,01	*PT Virama Karya (Persero)*
PT Hutama Karya (Persero)			4.879.340	0,01	*PT Hutama Karya (Persero)*
PT Danareksa (Persero)	-	-	2.205.000	0,00	*PT Danareksa (Persero)*
Koperasi Karyawan TPK KOJA	-	-	1.939.442	0,00	*Koperasi Karyawan TPK KOJA*
PT Nusantara Regas	-	-	1.208.076	0,00	*PT Nusantara Regas*
PT Sarana Bandar Nasional	-	-	1.116.513	0,00	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Surveyor Indonesia	-	-	858.959	0,00	*PT Surveyor Indonesia*
PT Sucofindo	-	-	677.848	0,00	*PT Sucofindo*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-	-	327.651	0,00	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
BPKD Provinsi DKI Jakarta	-	-	42.369	0,00	*BPKD Provinsi DKI Jakarta*
PT Djakarta Lloyd (Persero)	-	-	11.845	0,00	*PT Djakarta Lloyd (Persero)*
Lain-lain	44.190.643	0,07	42.314.170	0,06	*Others*
Total	**1.092.012.208**	**1,43**	**1.926.350.211**	**2,60**	***Total***

****) dari total liabilitas**

*****) from total liabilities***

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

h. Uang untuk diperhitungkan (Catatan 20)

h. *Advances from customer (Note 20)*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*		31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		
	Total/ *Total*	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	**Total/ *Total***	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	
PT Pertamina Trans Kontinental	3.183.827	0,00	-	-	*PT Pertamina Trans Kontinental*
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero)	575.387	0,00	-	-	*PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	405.336	0,00	446.500	0,00	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Pertamina (Persero)	101.018	0,00	2.437.195	0,00	*PT Pertamina (Persero)*
PHC	63.661	0,00	3.833	0,00	*PHC*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	48.593	0,00	756.582	0,00	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Semen Padang	35.619	0,00	-	-	*PT Semen Padang*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8.867	0,00	109.939	0,00	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Pertaminal Patra Niaga	-	0,00	1.143.325	0,00	*PT Pertamina Patra Niaga*
Lain-lain	3.864.051	0,01	3.167.576	0,00	*Others*
Total	**8.286.359**	**0,01**	**8.064.950**	**0,00**	***Total***

****) dari total liabilitas** *****) from total liabilities***

i. Uang titipan pelanggan (Catatan 22)

i. *Deposits from customer (Note 22)*

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*		31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		
	Total/ *Total*	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	**Total/ *Total***	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	
BPJS Ketenagakerjaan	10.928.576	0,01	3.109.284	0,00	*BPJS Ketenagakerjaan*
PT Pertamina Trans Kontinental	6.843.520	0,01	3.560.808	0,00	*PT Pertamina Trans Kontinental*
PT BNI Life Insurance	6.476.284	0,01	3.875.958	0,01	*PT BNI Life Insurance*
BPJS Kesehatan	6.349.579	0,01	945.333	0,00	*BPJS Kesehatan*
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	5.394.034	0,01	-	-	*PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)*
PT Pertamina (Persero)	4.925.638	0,01	14.599.698	0,02	*PT Pertamina (Persero)*
PT Hutama Karya (Persero)	2.330.595	0,00	-	-	*PT Hutama Karya (Persero)*
DP4	2.157.999	0,00	1.754.067	0,00	*DP4*
TNI & Polri	989.182	0,00	144.496	0,00	*TNI & Polri*
PT Asuransi Kredit Indonesia	597.895	0,00	3.914.953	0,01	*PT Asuransi Kredit Indonesia*
PT Taspen (Persero)	323.100	0,00	937.111	0,00	*PT Taspen (Persero)*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	-	-	5.000.000	0,01	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
PT Semen Tonasa	-	-	729.601	0,00	*PT Semen Tonasa*
Instansi Pemerintah	-	-	9.017	0,00	*Government Institutions*
Lain-lain	27.892.875	0,04	26.551.747	0,04	*Others*
Total	**75.209.277**	**0,10**	**65.132.073**	**0,09**	***Total***

****) dari total liabilitas** *****) from total liabilities***

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

j. Liabilitas jangka pendek lainnya (Catatan 22)

44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

j. Other current liabilities (Notes 22)

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*		31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		
	Total/ *Total*	Persentase (%)*/ *Percentage (%)**	Total/ *Total*	Persentase (%)*/ *Percentage (%)**	
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	31.666.118	0,04	31.666.118	0,04	*PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)*
PHC	24.857.416	0,03	36.392.787	0,05	*PHC*
DP3	13.807.186	0,02	-	-	*DP3*
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	12.023.798	0,02	291.159.220	0,39	*PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	9.237.116	0,01	128.776.800	0,17	*PT Waskita Karya (Persero)Tbk*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	-	-	152.794.803	0,21	*PT Wijaya Karya (Persero)Tbk*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	-	-	142.416.505	0,19	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
JICT	-	-	40.759.607	0,05	*JICT*
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	-	-	35.240.734	0,05	*PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk*
PT Brantas Abipraya (Persero)	-	-	25.187.500	0,03	*PT Brantas Abipraya (Persero)*
Instansi Pemerintah	-	-	5.826.282	0,01	*Government Institutions*
PT Krakatau Engineering Amarta Karya (Persero)	-	-	5.165.084	0,01	*PT Krakatau Engineering Amarta Karya (Persero)*
PT Nindya Karya (Persero)	-	-	3.795.525	0,01	*PT Nindya Karya (Persero)*
PT Virama Karya (Persero)	-	-	2.652.991	0,00	*PT Virama Karya (Persero)*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)	-	-	463.709	0,00	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-	-	329.150	0,00	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Sucofindo	-	-	272.727	0,00	*PT Sucofindo*
Lain-lain	18.506.387	0,02	98.246.035	0,13	*Others*
Total	**110.098.021**	**0,14**	**1.001.145.577**	**1,34**	***Total***

****) dari total liabilitas** *****) from total liabilities***

Liabilitas jangka pendek lainnya kepada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) merupakan kekurangan pembayaran kompensasi atas pemindahan dan pengosongan Galangan III DKB ke Pulau Batam berdasarkan Surat Perjanjian No.HK.566/27/11/PI.II-11 dan No. 024/ Kontr/I/DKB/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

Other current liabilites to PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) represents a shortage of payment of compensation to DKB for the removal and emptying of Galangan III in Batam Island based on Letter Agreement No. HK.566/27/11/PI.II-11 and No. 024/Kontr/I/DKB/2011 dated August 15, 2011.

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

k. Liabilitas jangka panjang lainnya (Catatan 28)

k. Other long-term liabilities (Notes 28)

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*		31 Desember 2021/ *December 31, 2021*		
	Total/ *Total*	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	**Total/ *Total***	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	
BLU Set-BPJT	464.538.398	0,61	466.538.398	0,63	*BLU Set-BPJT*
PT PLN	4.626.619	0,01	-	0,00	*PT PLN*
Lain-lain	182.496	0,00	-	0,00	*Others*
Total	**469.347.513**	**0,62**	**466.538.398**	**0,63**	***Total***

****) dari total liabilitas** *****) from total liabilities***

Utang kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Badan Layanan Umum Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol ("BLU Set-BPJT") merupakan pinjaman biaya pergantian atas pembelian tanah untuk proyek jalan tol Cibitung-Cilincing.

Payable to the Ministry of Public Works and Public Housing - Badan Layanan Umum Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol ("BLU Set-BPJT") represents a loan for replacement costs for the purchase of land for the Cibitung-Cilincing toll road project.

l. Remunerasi personil manajemen kunci

l. Key management personnel remuneration

Total gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya yang dibayar atau diakru untuk Dewan Komisaris dan Direksi Grup adalah sebesar Rp583.432.215 dan Rp526.692.113 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Total salaries and other short-term benefits paid to or accrued for the Group's Boards of Commissioners and Directors amounted to Rp583,432,215 and Rp526,692,113, for the year ended December 31, 2022 and 2021.

45. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

45. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

		31 Desember 2022/*December 31, 2022*		
		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ *In foreign currencies (full amount)*	**Setara dalam Rupiah/ *Equivalent in Rupiah***	
Aset				***Assets***
Kas dan setara kas	USD	105.906.720	1.666.018.608	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	USD	143.382.500	2.255.550.108	*Short-term investments*
Piutang usaha	USD	5.393.647	84.847.459	*Trade receivables*
Total aset			**4.006.416.175**	***Total assets***

45. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

45. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

		31 Desember 2022/*December 31, 2022*		
		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ *In foreign currencies (full amount)*	**Setara dalam Rupiah/ *Equivalent in Rupiah***	
Liabilitas				***Liabilities***
Utang usaha	USD	1.557.073	24.494.318	*Trade payables*
Utang obligasi	USD	2.519.084.000	39.419.805.966	*Bonds payables*
Liabilitas jangka panjang lainnya	USD	16.186.882	254.635.841	*Other long-term liabilities*
Total liabilitas			**39.698.936.125**	***Total liabilities***
Liabilitas neto			**35.692.519.950**	***Net liabilities***

		31 Desember 2021/*December 31, 2021*		
		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ *In foreign currencies (full amount)*	**Setara dalam Rupiah/ *Equivalent in Rupiah***	
Aset				***Assets***
Kas dan setara kas	USD	47.943.930	684.111.943	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	USD	285.116.500	4.068.327.340	*Short-term investments*
Piutang usaha	USD	6.295.571	89.831.507	*Trade receivables*
Total aset			**4.842.270.790**	***Total assets***
Liabilitas				***Liabilities***
Utang obligasi	USD	2.600.000.000	37.099.410.000	*Bonds payables*
Utang usaha	USD	22.102.199	315.376.275	*Trade payables*
Liabilitas jangka panjang lainnya	USD	16.186.888	230.970.700	*Other long-term liabilities*
Total liabilitas			**37.645.756.975**	***Total liabilities***
Liabilitas neto			**32.803.486.185**	***Net liabilities***

Untuk memitigasi risiko akibat selisih aset dan liabilitas valuta asing tersebut, Grup telah melakukan transaksi lindung nilai (Catatan 24)

To mitigate the risk arising from the gap between assets and liabilities in foreign currencies, the Group has entered into hedging transactions (Note 24).

46. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat, yang juga merefleksikan nilai wajarnya, dari instrumen keuangan Grup:

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The following table sets out the carrying values, which also reflects the estimated fair values, of the Group's financial instruments:

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	**31 Desember 2021/ *December 31, 2021***	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Kas dan setara kas	13.597.640.823	12.922.388.587	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	3.943.051.999	5.718.525.973	*Short-term investments*
Piutang usaha - neto	1.450.107.201	1.516.262.546	*Trade receivables - net*
Piutang lain-lain - neto	446.826.791	1.280.366.535	*Other receivables - net*
Pendapatan masih akan diterima	631.230.205	330.968.482	*Accrued revenues*
Aset lancar lainnya	56.662.961	55.194.659	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	1.189.307.537	964.824.984	*Other non-current assets*
Total	**21.314.827.517**	**22.788.531.766**	***Total***
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Pinjaman bank jangka pendek	105.361.831	138.493.774	*Short-term bank loans*
Utang usaha	2.068.575.843	3.264.492.275	*Trade payables*
Beban akrual	5.301.273.233	3.699.192.020	*Accrued expenses*
Liabilitas jangka pendek lainnya	1.041.133.091	2.248.710.447	*Other current liabilities*
Utang bank jangka panjang	7.695.163.379	6.633.174.190	*Long-term bank loan*
Utang obligasi	42.754.634.125	40.176.176.480	*Bonds payable*
Utang lembaga keuangan non-bank	1.744.763.266	1.429.042.655	*Loan from non-bank financial institution*
Liabilitas jangka panjang lainnya	1.123.733.722	962.389.202	*Other non-current liabilities*
Liabilitas sewa	435.135.812	333.885.712	*Lease liabilities*
Total	**62.269.774.302**	**58.885.556.755**	***Total***

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi.

Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced or liquidation sale.

Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat, baik karena jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

46. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Grup menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pengungkapan setiap aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek yang mencakup, antara lain, kas dan setara kas, investasi jangka pendek - deposito berjangka, investasi jangka pendek - aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, investasi jangka panjang - entitas asosiasi, pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual dan liabilitas jangka pendek lainnya, dianggap mendekati jumlah tercatatnya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.
- Investasi jangka pendek - efek yang diperdagangkan dan investasi jangka panjang - penyertaan saham dinyatakan pada nilai wajarnya dengan menggunakan kuotasi harga pasar. Investasi jangka panjang - surat utang dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi harga dari surat berharga yang sejenis pada tanggal pelaporan.
- Nilai wajar aset keuangan tidak lancar lainnya dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari aset tersebut karena tidak ada jangka waktu pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.
- Estimasi nilai wajar utang obligasi, liabilitas sewa, utang bank dan liabilitas jangka panjang lainnya ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk instrumen dengan syarat, risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

The Group determined the fair value measurement for disclosure purposes of each financial asset and financial liability based on the following methods and assumptions:

- *The fair value of current financial assets and current financial liabilities which includes, among others, cash and cash equivalents, short-term investments - time deposits, short-term investments – financial assets measured at fair value through profit or losses, trade receivables, other receivables, accrued revenues, long-term investments - associates, short-term bank loans, trade payables, accrued expenses and other current liabilities, are considered to approximate their carrying amounts as a result of insignificant discounting.*
- *Short-term investments - marketable securities and long-term investments - investment in share of stocks are presented at fair value using market price quotation. Long-term investments - bonds are presented at fair value by reference to similar bond price at reporting date.*
- *The fair values of other non-current financial assets are carried at historical cost because their fair values cannot be reliably measured. It is not practical to estimate the fair values of such assets because there are no fixed repayment terms although these are not expected to be settled within 12 months after the consolidated statement of financial position date.*
- *The estimated fair values of bonds payable, lease liability, bank loans and other long-term liabilities are determined by discounting the future cash flows using market interest rates for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.*

46. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi nilai wajar bersifat *judgemental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Grup akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

- Tingkat 1 : Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- Tingkat 2 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.
- Tingkat 3 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang tidak dapat diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, hirarki nilai wajar Grup untuk aset yang nilai wajarnya diungkapkan adalah sebagai berikut:

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Fair value estimation is judgemental and involving various boundaries, including:

- *Fair value presented are not considering the impact of future currency fluctuation.*
- *Fair value estimation are not always indicating value that the Group will record at the time of sales/termination of financial assets and liabilities.*

- *Level 1 : Fair value measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2 : Fair value measured based on valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly.*
- *Level 3 : Fair value measured based on valuation techniques for which any inputs which have a significant effect on the recorded fair values that are not based on observable market data (unobservable inputs)*

As of December 31, 2022 and 2021, fair value hierarchy of the Group for assets which fair value were disclosed are as follows:

	31 Desember 2022/*December 31, 2022*				
	Total/ *Total*	**Tingkat 1/ *Level 1***	**Tingkat 2/ *Level 2***	**Tingkat 3/ *Level 3***	
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					***Assets for which fair value are disclosed***
Aset tidak lancar					***Non-current Assets***
Properti investasi (Catatan 12)	12.128.281.665	-	12.128.281.665	-	*Investment properties (Note 12)*

	31 Desember 2021/*December 31, 2021*				
	Total/ *Total*	**Tingkat 1/ *Level 1***	**Tingkat 2/ *Level 2***	**Tingkat 3/ *Level 3***	
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					***Assets for which fair value are disclosed***
Aset tidak lancar					***Non-current Assets***
Properti investasi (Catatan 12)	12.019.855.155	-	12.019.855.155	-	*Investment properties (Note 12)*

46. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022, tidak terdapat pengalihan antara pengukuran nilai wajar Tingkat 1 dan Tingkat 2 dan tidak ada pengalihan dari Tingkat 3 pengukuran nilai wajar.

Tidak terdapat aset dan liabilitas lain yang diukur dan diungkapkan berdasarkan nilai wajar selain yang telah dijelaskan di atas.

47. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup terpengaruh terhadap risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga atas arus kas, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Grup menerapkan manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut dengan melakukan evaluasi atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk Grup. Pengelolaan risiko tersebut memberikan keyakinan kepada Grup bahwa aktivitas keuangan dikelola secara pruden sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite*.

Grup menerapkan kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Grup. Eksposur Grup terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang obligasi dalam mata uang USD.

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

As of December 31, 2022, there is no transfer between measurement of fair value of Level 1 and Level 2 and no transfer from Level 3 fair value measurements.

No other assets and liabilities have been measured and disclosed based on fair value other than above explained.

47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group is exposed to foreign exchange risk, interest rate risk of cashflow, credit risk and liquidity risk. The Group applies risk management for such risks by evaluating the financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Group. Such risk management provides assurance to the Group that prudent financial activities are managed according to appropriate policies and procedures and financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and risk appetite.

The Group applies policies for managing each of these risks which is summarized below.

Foreign currency risk

Foreign currency risk is a risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in foreign currency exchange rates used by the Group. Exposure of the Group against exchange rate fluctuations is mainly derived from debt arising from bonds payable denominated in USD.

47. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing yang ada pada saat ini diungkapkan pada Catatan 45. Berikut ini adalah analisis sensitivitas efek 1% perubahan kurs mata uang asing terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain dianggap tetap:

47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Foreign currency risk (continued)

The current exposure to the foreign currency risk is disclosed in Note 45. Sensitivity analysis of a 1% fluctuation in the foreign exchange rates to profit after tax with other variance considered as constant is as follow:

	(Kenaikan) penurunan nilai tukar mata uang/ *(Increases) decreases on foreign exchange rates*	**Dampak/ *Effect***	
Perubahan kurs mata uang asing 2022	(+)100bps	(356.925.200)	*Fluctuation in the foreign exchange rates 2022*
	(-)100bps	356.925.200	
Perubahan kurs mata uang asing 2021	(+)100bps	(328.034.762)	*Fluctuation in the foreign exchange rates 2021*
	(-)100bps	328.034.762	

Dalam mengelola risiko nilai tukar mata uang asingnya, Grup menggunakan utang obligasi sebagai lindung nilai dari eksposur risiko mata uang asing dalam pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang.

In managing its foreign currency risk, the Group uses bond payables to hedge its exposure to foreign currency risk for revenues to be received in the future.

Risiko suku bunga atas arus kas

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas.

Saat ini, Grup tidak mempunyai kebijakan formal untuk lindung nilai atas risiko suku bunga. Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survei di perbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat berdasarkan jatuh tempo dari aset dan liabilitas Grup yang terekspos terhadap risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2022.

Cash flows interest rate risk

Cash flows interest rate risk is a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Loans at variable rates are exposed to cash flows risk.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures. Measures taken by management in anticipation of interest rate risk is to evaluate by periodically comparing fixed rates to floating interest rates in line with relevant changes in interest rates in the market. Management also conducts a survey on banks to obtain an estimate of the relevant interest rates.

The following table presents the carrying amount by maturity of the Group's assets and liabilities exposed to interest rate risk as of December 31, 2022.

47. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko suku bunga atas arus kas (lanjutan)

Cash flows interest rate risk (continued)

	Suku bunga mengambang/ *Floating interest rate*		Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate*			
	≤ 1 tahun/ *≤ 1 year*	> 1 tahun/ *> 1 year*	≤ 1 tahun/ *≤ 1 year*	> 1 tahun/ *> 1 year*	Total	
Aset						***Assets***
Kas dan setara kas	13.597.640.823	-	-	-	13.597.640.823	*Cash and cash equivalent*
Investasi jangka pendek	-	-	3.943.051.999	-	3.943.051.999	*Short-term investments*
Total aset	**13.597.640.823**	**-**	**3.943.051.999**	**-**	**17.540.692.822**	***Total assets***
Liabilitas						***Liabilities***
Pinjaman bank jangka pendek	-	-	105.361.831	-	105.361.831	*Short-term bank loan*
Liabilitas jangka pendek lainnya	-	-	1.041.133.091	-	1.041.133.091	*Other current liabilities*
Utang bank jangka panjang	-	-	147.649.279	7.695.163.379	7.842.812.658	*Long-term bank loan*
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	-	-	869.097.883	869.097.883	*Other long-term liabilities*
Liabilitas sewa			49.907.726	385.228.086	435.135.812	*Lease liabilities*
Obligasi	-	-	8.637.804.928	34.116.829.197	42.754.634.125	*Bonds*
Total liabilitas	**-**	**-**	**9.981.856.855**	**43.066.318.545**	**53.048.175.400**	***Total liabilities***

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Grup mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Grup dan melakukan pemantauan atas posisi piutang pelanggan secara teratur.

Grup memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, investasi jangka pendek, piutang usaha dan piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset lain-lain.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk.

The Group manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, providing limits or ceiling to a third party who will engage in credit trade with the Group and monitoring the outstanding trade receivables on a regular basis.

The Group is exposed to credit risk primarily from deposits with banks, short-term investments, trade and other receivables, accrued revenues and other assets.

47. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

Credit risk exposure relating to assets in the consolidated statements of financial position is as follow:

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Kas dan setara kas	13.597.640.823	12.922.388.587	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	3.943.051.999	5.718.525.973	*Short-term investments*
Piutang usaha - neto	1.450.107.201	1.516.262.546	*Trade receivables - net*
Piutang lain-lain - neto	446.826.791	1.280.366.535	*Other receivables - net*
Pendapatan masih akan diterima	651.230.205	330.968.482	*Accrued revenues*
Aset lancar lainnya	56.662.961	55.194.659	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	1.221.507.535	964.824.984	*Other non-current assets*
Total	**21.367.027.515**	**22.788.531.766**	***Total***

Salah satu risiko kredit utama yang dihadapi oleh Grup adalah kredit yang diberikan kepada pelanggan. Untuk meringankan risiko kredit ini, Grup memiliki kebijakan dimana Grup melakukan verifikasi kredit untuk memastikan bahwa pelanggan yang diberikan kredit oleh Grup memiliki sejarah kredit yang baik dan dapat dipercaya. Selain itu, saldo piutang Grup dipantau secara berkala untuk mengurangi kemungkinan piutang yang tak tertagih.

One of the main credit risk faced by the Group is credit granted to customers. To mitigate this credit risk, the Group has a policy in which the Group performs credit verification to ensure that customers who are granted credit by the Group have a good credit history and are trustworthy. In addition, the Group's receivables balances are monitored regularly to reduce the possibility of uncollectible receivables.

Tabel berikut ini menyajikan analisis umur piutang usaha:

The following table presents the aging analysis of trade receivables:

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Belum jatuh tempo	263.711.508	540.601.210	*Not yet overdue*
Lewat jatuh tempo			*Overdue*
1-90 hari	949.936.337	914.452.235	*1-90 days*
91-180 hari	217.120.498	145.965.228	*91-180 days*
Lebih dari 180 hari	1.155.304.793	1.076.472.800	*More than 180 days*
Subtotal	2.586.073.136	2.677.491.473	*Sub-total*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(1.135.965.935)	(1.161.228.927)	*Allowance for impairment*
Neto	**1.450.107.201**	**1.516.262.546**	***Net***

Risiko piutang usaha yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai untuk mengalami penurunan nilai adalah kecil karena pelanggan yang diberi kredit memiliki sejarah dan jejak kredit yang baik dengan Grup. Penyisihan khusus mungkin dibuat jika piutang dianggap tak tertagih menurut penilaian Grup.

The risk of trade receivables that are neither past due nor impaired to be impaired is small because customers who are granted credit have a good credit history and track record with the Group. Specific allowance may be made if receivables are deemed uncollectible in the Group's judgement.

47. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang dapat terjadi dimana pendapatan jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek.

Mengingat bahwa kebutuhan dana Grup saat ini cukup signifikan sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas pengembangan atau perluasan bisnis, maka dalam mengelola risiko likuiditas, Grup terus menerus memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas agar memadai untuk membiayai kebutuhan operasional Grup.

Selain itu, Grup juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka panjang dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk inisiatif penempatan dan penggalangan dana yang meliputi pinjaman bank, penerbitan ekuitas pasar modal dan ekuitas utang.

Tabel berikut ini menunjukan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Grup berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk that occurs when short-term revenue cannot cover short-term expenditure.

Given that funding requirements of the Group are currently significant as a result of increased activity in development or expansion of business, in managing liquidity risk, the Group continues to monitor and maintain levels of adequacy of cash and cash equivalents to finance the operational needs of the Group.

In addition, the Group also regularly evaluates cash flow projections and actual cash to cope with the impact of fluctuations in cash flow, including the maturity schedule of long-term liabilities and continue to examine the condition of financial markets for placement and fund-raising initiatives, including bank loans, issuance of equity and debt securities.

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments.

	2022					
	< 1 tahun/ *< 1 year*	**1 - 2 tahun/ *1 - 2 years***	**2 - 3 tahun/ *2 - 3 years***	**> 3 tahun/ *> 3 years***	**Jumlah/ *Total***	
Pinjaman bank jangka pendek	105.361.831	-	-	-	105.361.831	*Short-term bank loan*
Utang usaha	2.068.575.843	-	-	-	2.068.575.843	*Trade payables*
Beban akrual	5.273.585.288	-	-	-	5.273.585.288	*Accrued expenses*
Liabilitas jangka pendek lainnya	1.041.133.091	-	-	-	1.041.133.091	*Other short-term liabilities*
Utang obligasi	8.637.804.928	-	24.314.765.215	9.802.063.981	42.754.634.124	*Bonds payable*
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	-	-	1.126.588.038	1.126.588.038	*Other Long-term liabilities*
Liabilitas sewa	49.907.726	-	-	385.228.086	435.135.812	*Lease liabilities*
Total	**17.176.368.707**	**-**	**24.314.765.215**	**11.313.880.105**	**52.805.014.027**	***Total***

48. PERJANJIAN KONSESI

a) Pembangunan dan Pengoperasian

Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian konsesi dengan Otoritas Pelabuhan sehubungan dengan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dimana Perusahaan diberi hak untuk membangun dan mengoperasikan pelabuhan dalam area konsesi. Perusahaan diwajibkan untuk membayar biaya konsesi kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam setiap perjanjian konsesi dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada saat perjanjian konsesi berakhir, Perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan aset yang berada di atas area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian konsesi.

48. CONCESSION AGREEMENTS

a) Construction and Operation

The Company entered into several concession agreement with Port Authority in relation to construction and operation of port where the Company is granted the rights to construct and operate port within concession area. The Company is obliged to pay concession fee to the Port Authority in accordance with the set rate in each of concession agreement in form of Non Tax State Income. At the end of the concession agreement, the Company is obliged to transfer the assets on concession area to the Port Authority in accordance with the terms stipulated in concession agreement.

Area Konsesi/ ***Concession Area***	**Pihak yang Terkait dengan Perjanjian/** ***Parties Related to Agreement***	**Tanggal Perjanjian/** ***Date of Agreement***	**Jangka Waktu Perjanjian/** ***Agreement Periods***	**Tarif Konsesi/** ***Concession Rate***
Kalibaru	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok/ *The Company and Tanjung Priok Port Authority*	31 Agustus/ *August* 2012	70 tahun/*years*	0,5% dari pendapatan kotor/ *0.5% of gross revenue*
Kijing	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Pontianak/ *The Company and Pontianak Port Authority*	12 Juli/*July* 2018	69 tahun/*years*	2,5% dari pendapatan kotor/ *2.5% of gross revenue*
Kuala Tanjung	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung/ *The Company and Kuala Tanjung Port Authority*	23 Januari/ *January* 2015	69 tahun/*years*	2,5% dari pendapatan kotor/ *2.5% of gross revenue*
Belawan Fase 2	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Belawan/ *The Company and Belawan Port Authority*	4 April/*April* 2014	70 tahun/*years*	0,5% dari pendapatan kotor/ *0.5% of gross revenue*
Alur Pelayaran Barat Surabaya	Perusahaan dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia/ *The Company and Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia*	8 Mei/*May* 2014	25 tahun/*years*	3,5% dari pendapatan kotor/ *3.5% of gross revenue*

48. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

a) Pembangunan dan Pengoperasian (lanjutan)

Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian konsesi dengan Otoritas Pelabuhan sehubungan dengan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dimana Perusahaan diberi hak untuk membangun dan mengoperasikan pelabuhan dalam area konsesi. Perusahaan diwajibkan untuk membayar biaya konsesi kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam setiap perjanjian konsesi dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada saat perjanjian konsesi berakhir, Perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan aset yang berada di atas area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian konsesi. (lanjutan)

48. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

a) Construction and Operation (continued)

The Company entered into several concession agreement with Port Authority in relation to construction and operation of port where the Company is granted the rights to construct and operate port within concession area. The Company is obliged to pay concession fee to the Port Authority in accordance with the set rate in each of concession agreement in form of Non Tax State Income. At the end of the concession agreement, the Company is obliged to transfer the assets on concession area to the Port Authority in accordance with the terms stipulated in concession agreement. (continued)

Area Konsesi/ ***Concession Area***	**Pihak yang Terkait dengan Perjanjian/** ***Parties Related to Agreement***	**Tanggal Perjanjian/** ***Date of Agreement***	**Jangka Waktu Perjanjian/** ***Agreement Periods***	**Tarif Konsesi/** ***Concession Rate***
Teluk Lamong	Perusahaan dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia/ *The Company and Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia*	19 Mei/*May* 2015	72 tahun/*years*	2,5% dari pendapatan kotor/ *2.5% of gross revenue*
Makassar New Port	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Makassar/ *The Company and Makassar Port Authority*	19 Mei/*May* 2015	70 tahun/*years*	2,5% dari pendapatan kotor/ *2.5% of gross revenue*
Jalan Tol Cibitung-Cilincing	CTP dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ *CTP and Ministry of Public Works and Human Settlements*	29 Januari/ *January* 2017	50 tahun/*years*	-
Kendari New Port	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Kendari/ *The Company and Kendari Port Authority*	25 November/ *November* 2022	67 tahun/*years* dan/*and* 11 bulan/*months*	2,5% dari pendapatan kotor/ *2.5% of gross revenue*

48. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

b) Pelabuhan yang Diusahakan Perusahaan

Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian konsesi dengan Otoritas Pelabuhan sehubungan dengan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang diusahakan oleh Perusahaan yang mencakup pemberian hak dari Otoritas Pelabuhan kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan di area konsesi yang diusahakan oleh Perusahaan sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Perusahaan diwajibkan untuk membayar biaya konsesi kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam setiap perjanjian konsesi dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada saat berakhirnya perjanjian konsesi ini, seluruh aset Perusahaan di dalam area konsesi, termasuk tanah yang berstatus hak pengelolaan atas nama dan/atau tanah yang tercatat sebagai aset Perusahaan, tetap menjadi aset dan hak pengelolaan dan/atau tanah Perusahaan.

48. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

b) Port Operated by The Company

The Company entered into several concession agreement with Port Authority in relation to operational activities at port that was operated by the Company which includes granting rights from the Port Authority to the Company to perform operation on providing and/or servicing of port services on operated concession area in accordance with Law No. 17 Year 2008 of Sailing. The Company is obliged to pay concession fee to the Port Authority in accordance with the set rate in each of concession agreement in form of Non Tax State Income. At the end of Concession Agreement, all the Company's assets in the concession area, including landrights and/or land recorded as the Company's assets, will remain assets and landrights and/or land of the Company.

Area Konsesi/ ***Concession Area***	**Pihak yang Terkait dengan Perjanjian/** ***Parties Related to Agreement***	**Tanggal Perjanjian/** ***Date of Agreement***	**Jangka Waktu Perjanjian/** ***Agreement Periods***	**Tarif Konsesi/** ***Concession Rate***
Tanjung Priok	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok/ *The Company and Tanjung Priok Port Authority*	11 November/ *November* 2015	50 tahun/*years*	2,5% dari pendapatan kotor/ *2.5% of gross revenue*
Belawan	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Belawan/ *The Company and Belawan Port Authority*	9 November/ *November* 2015	30 tahun/*years*	2,5% dari pendapatan kotor/ *2.5% of gross revenue*
Tanjung Perak	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak/ *The Company and Tanjung Perak Port Authority*	9 November/ *November* 2015	30 tahun/*years*	2,5% dari pendapatan kotor/ *2.5% of gross revenue*
Makassar	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Makassar/ *The Company and Makassar Port Authority*	9 November/ *November* 2015	30 tahun/*years*	2,5% dari pendapatan kotor/ *2.5% of gross revenue*
Gresik	BMS dan Otoritas Pelabuhan Gresik/*BMS and Gresik Port Authority*	15 Desember/ *December* 2017	76 tahun/*years*	2,75% dari pendapatan kotor/ *2.75% of gross revenue*

48. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

c) Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP BMN)

Perusahaan memiliki sebidang tanah seluas 36.333m2 yang terletak di Keluarahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tanah tersebut digunakan untuk area pembangunan fasilitas penunjang operasional dan dermaga curah cair Terminal *Multipurpose* Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo. Pada tanggal 31 Desember 2020, tanah tersebut diklasifikasikan sebagai aset tetap oleh Perusahaan.

Pada tanggal 29 September 2021, Perusahaan menerima surat Menteri BUMN No. S-747/MBU/09/2021 tentang Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Tanah di Terminal *Multipurpose* Pelabuhan Labuan Bajo. Berdasarkan surat tersebut, Perusahaan diharuskan melakukan pelepasan hak atas tanah kepada Negara Republik Indonesia c.q Kementerian Perhubungan dalam rangka pemanfaatan barang milik negara melalui penerbitan konsesi. Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perusahaan melakukan reklasifikasi aset tanah Labuan Bajo ke aset takberwujud sebesar Rp79.905.949.

Pada tanggal 8 November 2021, Perusahaan mengadakan Perjanjian KSP BMN dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan berhak mengoperasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan di area Pelabuhan Labuan Bajo dengan jangka waktu selama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak perjanjian tersebut ditandatangani. Perusahaan diwajibkan untuk membayar Rp171.000 dan setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 2,95%, dari total sebesar Rp19.005.671 selama 50 tahun serta keuntungan Bagi Hasil Perjanjian sebesar 16,81% dari Arus Kas Bersih Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi.

48. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

c) Utilization Cooperation of State Property (KSP-BMN)

The Company owns a parcel of land of 36,333m2 located in Wae Kelambu, Komodo District, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province. The land is used for the construction of operational support facilities and a liquid bulk dock at the Wae Kelambu Multipurpose Terminal at Labuan Bajo Port. As of December 31, 2020, the land is classified as fixed asset by the Company.

On September 29, 2021, the Company received a letter from the Minister of SOE No. S-747/MBU/09/2021 regarding Approval for The Write-off of Land Fixed Assets at Labuan Bajo Multipurpose Port. Based on the letter, the Company is obliged to release the land rights to the Republic of Indonesia c.q the Ministry of Transportation in relation to utilization of state property through the issuance of concessions. On October 1, 2021, the Company reclassified the land assets of Labuan Bajo to intangible assets amounting to Rp79,905,949.

On November 8, 2021, the Company entered into KSP BMN agreement with the Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation. Based on the agreement, the company has the right to operate and carry out port service activities and port-related services in Labuan Bajo Port area for a period of 50 (fifty) years from the date of the signing of the agreement. The Company is obliged to pay Rp171,000 and an annual increase of 2.95%, totaling Rp19,005,671 for 50 years as well as a Profit Sharing Agreement of 16.81% of the Net Cash Flow from Operating Activities and Investing Activities.

48. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

d) Perjanjian Penugasan Kuala Tanjung

Pada tanggal 13 Februari 2015, sebagaimana telah digantikan dan diandendum masing-masing pada tanggal 10 Februari 2016 dan tanggal 20 Maret 2017, Perusahaan dan PMT menandatangani perjanjian untuk pembangunan, pembiayaan dan pengelolaan terminal multipurpose Kuala Tanjung serta pemanfaatan dan pengelolaan lahan. Berdasarkan perjanjian, PMT diharuskan untuk melakukan pembayaran kompensasi sebesar persentase tertentu dari pendapatan kotor pengelolaan terminal multipurpose Kuala Tanjung kepada Pelindo. Perjanjian tersebut berlaku selama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan 12 Februari 2065.

e) Perjanjian Penugasan Belawan Fase 2

Pada tanggal 31 Oktober 2014, sebagaimana telah digantikan pada tanggal 18 Mei 2018, Perusahaan dan PTP1 menandatangani perjanjian untuk pembangunan dan pengelolaan terminal petikemas Belawan Fase 2. Berdasarkan perjanjian, PTP1 diharuskan untuk melakukan pembayaran kompensasi sebesar persentase tertentu dari pendapatan kotor pengelolaan terminal petikemas Belawan Fase 2 kepada Pelindo. Perjanjian tersebut berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan 30 Oktober 2044.

48. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

d) Kuala Tanjung Assignment Agreement

On February 13, 2015, as replaced and amended on February 10, 2016 and March 20, 2017, respectively, the Company and PMT signed agreement for construction, financing, and operation of Kuala Tanjung multipurpose terminal and land utilisation and management. Based on agreement, PMT is obliged to pay compensation of certain percentage of gross revenue from the operation of Kuala Tanjung multipurpose terminal. The agreement is valid for 50 (fifty) years since February 13, 2015 until February 12, 2065.

e) Belawan Phase 2 Assignment Agreement

On October 31, 2014, as replaced on May 18, 2018, the Company and PTP1 signed agreement for construction and operation of Belawan Phase 2 container terminal. Based on agreement, PTP1 is obliged to pay compensation of certain percentage of gross revenue from the operation of Belawan Phase 2 container terminal. The agreement is valid for 30 (thirty) years since October 31, 2014 until October 30, 2044.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA

a) Perjanjian Pelaksanaan Proyek - SPSL

Perusahaan mendirikan SPSL pada tanggal 5 November 2012. Berdasarkan Surat Perusahaan No. TS.12/1/11/PI.II-13 tanggal 22 Februari 2013, Perusahaan menginstruksikan SPSL untuk mempersiapkan dokumen perjanjian pengalihan (novasi) pekerjaan pembangunan Terminal Kalibaru dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) selaku kontraktor dari Perusahaan kepada SPSL. SPSL juga diminta untuk menunjuk konsultan yang diperlukan dan pelaksanaan *advisory* yang saat ini dilaksanakan oleh Perusahaan akan dialihkan kepada SPSL dimana pembebanan seluruh biaya konsultan diambil dari *proceed* yang akan diterima dari mitra Terminal Kalibaru. Perusahaan kemudian juga mengirimkan Surat No. KU.26/26/13/PI.II-13 tanggal 16 April 2013 yang menginstruksikan SPSL agar segera memproses pekerjaan *Technical*, *Legal*, *Financial*, *Tax* dan *Insurance Advisor*.

Pada tanggal 30 Mei 2013, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Proyek Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 dan No. HK.566/5/20/PPI-13 ("PIA"), dimana Perusahaan memberikan kepada SPSL hak untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok.

PIA berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Konsesi tertanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Perusahaan dengan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak tanggal dipenuhinya persyaratan dokumen teknis, dokumen finansial serta jaminan pelaksanaan oleh Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. Inilah yang menjadi dasar hukum SPSL menandatangani COA. Transaksi ini masuk ke dalam kategori sewa keuangan berdasarkan PSAK 73.

Sesuai dengan PIA, Perusahaan dan SPSL selanjutnya harus mengidentifikasi perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perusahaan dan pihak ketiga sehubungan dengan proyek untuk dinovasikan kepada PSL. Seluruh hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian yang ada akan dinovasikan kepada SPSL.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS

a) Project Implementation Agreement - SPSL

The Company established SPSL on November 5, 2012. Based on Letter of the Company No. TS.12/1/11/PI.II-13 dated February 22, 2013, the Company instructed SPSL to prepare the documents for the assignment (novation) agreement on the construction work of Kalibaru Terminal from PT Pembangunan Perumahan (Persero) as the Company's contractor to SPSL. SPSL was also asked to appoint consultants as required and the implementation of advisory services which is currently under contracts with the Company shall be assigned to SPSL in which the consultants' fees shall be taken from proceeds that will be received from the partner of Kalibaru Terminal. The Company then sent Letter No. KU.26/26/13/PI.II-13 dated April 16, 2013 in which it instructed SPSL to process the Technical, Legal, Financial, Tax and Insurance Advisor works.

On May 30, 2013, the Company and SPSL signed Project Implementation Agreement for Kalibaru Terminal, Tanjung Priok Port, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 and No. HK.566/5/20/PPI-13 ("PIA"), in which the Company granted to SPSL the rights to develop and operate Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port.

The PIA is valid until the expiration of the term of the Concession Agreement dated August 31, 2012 entered into between the Company and the Port Authority of Tanjung Priok Port, which is 70 (seventy) years from the date of fulfillment of the requirement on technical documents, financial documents and implementation guarantee by the Company and the Port Authority of Tanjung Priok Port. This is the legal basis on which SPSL entered into the COA. This transaction is classified as finance lease based on PSAK 73.

In accordance with the PIA, the Company and SPSL shall then identify the existing agreements signed by the Company and the third parties concerning the project implementation for assignment (novation) to SPSL. All rights and obligations under the existing agreements will be novated to SPSL.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

a) Perjanjian Pelaksanaan Proyek – SPSL (lanjutan)

Pada tanggal 6 Agustus 2018, novasi tidak jadi dilaksanakan dan diganti menjadi sewa/*site lease* yang dituangkan dalam perjanjian perubahan PIA dan telah mengalami beberapa perubahan terakhir pada tanggal 23 Desember 2020 mengenai perubahan nilai dan jangka waktu sewa.

Pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian Perubahan (Amendemen) Kelima tentang Pelaksanaan Proyek Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok No. KS.01/30/9/1/KRJ/UT/PI.II-21 dan No. PJK-621-30092021-001, yang mengatur mengenai:

- pengubahan Skema Kerja Sama yang sebelumnya Bangun Kelola Serah menjadi s*ite lease*/sewa;
- jangka waktu yang sebelumnya 70 (tujuh puluh) tahun menjadi 23 (dua puluh tiga) tahun;
- jangka waktu kerjasama terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2043; dan
- besaran biaya sewa lokasi per tahun sejumlah Rp236.000.000 (belum termasuk PPN) dibayarkan setiap triwulan di setiap awal bulan berjalan.

b) Perjanjian Pengelolaan Proyek - SPSL

- Pada tanggal 24 Februari 2014, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian Manajemen Proyek untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap 1 Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.566/24/2/2/PI.II-14 dan No. PPI-06-1-000495 (“PMA”), dimana Perusahaan menunjuk SPSL untuk menangani manajemen proyek yang akan melaksanakan kontrak-kontrak pekerjaan pembangunan terminal Kalibaru, diantaranya manajemen proyek atas kontrak-kontrak pekerjaan konstruksi serta verifikasi dan evaluasi atas pembayaran pekerjaan konstruksi dan pengawasan. PMA berlaku sampai dengan selesainya proyek. Tidak ada pendapatan untuk SPSL atas penyediaan jasa ini.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a) Project Implementation Agreement – SPSL (continued)

As of August 6, 2018, the novation was not carried out and was changed to a lease/site lease as outlined in the PIA amendment agreement and has undergone several changes recently on December 23, 2020 regarding changes in the value and term of the lease.

On September 30, 2021, the Company and SPSL signed the Fifth Amendment Agreement regarding the Executor of the Kalibaru Terminal Project, Tanjung Priok Port No. KS.01/30/9/1/KRJ/UT/PI.II-21 and No. PJK-621-30092021-001, which regulates:

- *changing the Cooperation Scheme which was previously Build Manage Handover to site lease;*
- *the previous period of 70 (seventy) years to 23 (twenty three) years;*
- *the cooperation period is from October 1, 2020 to September 30, 2043; and*
- *the annual rental fee is Rp236,000,000 (excluding VAT) and is carried out on a quarterly basis at the beginning of the current month.*

b) Project Management Agreement - SPSL

- *On February 24, 2014, the Company and SPSL signed Project Management Agreement on the Construction Work for the Kalibaru Utara Container Terminal Phase 1 at the Port of Tanjung Priok No. HK.566/24/2/2/PI.II-14 and No. PPI-06-1-000495 (“PMA”), in which the Company appointed SPSL as a project management company to carry out the contractual works of Kalibaru terminal development, among others, the project management of construction works contracts and verification and evaluation on payment of construction and supervision works. The PMA is valid until the end of the project. There is no profit for SPSL for providing this service.*

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

b) Perjanjian Pengelolaan Proyek – SPSL (lanjutan)

Pada tanggal 9 Oktober 2020, Perusahaan dan SPSL menandatangani Berita Acara No. PD.05.01/9/10/2/MPS/TEK/PI.II-20 dan No. BAC-400-09102020-012 tentang Kesepakatan Bersama Rencana Pembaruan Manajemen Proyek Untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru Utara Tahap 1 Pelabuhan Tanjung Priok.

Adapun maksud dalam Berita Acara ini adalah kesepakatan bersama untuk melakukan pembaruan terhadap PMA karena PIA telah mengalami perubahan skema kerja sama sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap PMA. Maka, Perusahaan dan SPSL bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Baru yang akan menggantikan PMA.

- Pada tanggal 18 Desember 2020, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I di Pelabuhan Tanjung Priok No.PD.05.01/18/12/1/MPS/TEK/PI.II-20 dan No.PJK-621-18122020-006.

  Adapun maksud dari perjanjian adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Perusahaan dan SPSL dalam pelaksanaan kerjasama manajemen proyek pembangunan Terminal Kalibaru I Pelabuhan Tanjung Priok.

- Pada tanggal 29 April 2019, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat No. KS.01/29/4/1/KRJ/UT/PI.II-19 dan No. PJK-KJG-06-29042019-010.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b) Project Management Agreement- SPSL (continued)

On October 9, 2020, the Company and SPSL signed the Minutes No.PD.05.01/9/10/2/MPS/TEK/PI.II-20 and No. BAC-400-09102020-012 concerning Mutual Agreement on Project Management Renewal Plan for Construction Work on Phase 1 of North Kalibaru Container Terminal at Tanjung Priok Port.

The intention in this Minutes is a mutual agreement to make updates to PMA because PIA has undergone a change in the cooperation scheme so that adjustments need to be made to PMA. So, the Company and SPSL agreed to make a New Cooperation Agreement that would replace PMA.

- *On December 18, 2020, the Company and SPSL agreed on the Agreement on the Construction of Phase I of the North Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port No. PD.05.01/18/12/1/MPS/TEK/PI.II-20 and No.PJK-621-18122020-006.*

  The purpose of the agreement is to provide a legal basis and certainty for the Company and SPSL in performing of cooperation in the management of the Kalibaru I Terminal construction project at the Port of Tanjung Priok.

- *On April 29, 2019, the Company and SPSL agreed on the Agreement on the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan No. KS.01/29/ 4/1/KRJ/UT/PI.II-19 and No. PJK-KJG-06-29042019-010.*

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

b) Perjanjian Pengelolaan Proyek – SPSL (lanjutan)

- Pada tanggal 23 Oktober 2020, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat No. KS.02/23/10/1/ MPS/TEK/PI.II-2020 dan No.PJK-621-23102020-009.

  Adapun maksud dari perjanjian adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Perusahaan dan SPSL dalam pelaksanaan kerjasama pembangunan dan pengembangan terminal Kijing pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat.

- Pada tanggal 29 September 2021, Perusahaan dan SPSL menandatangani perjanjian Kerjasama Khusus Manajemen Proyek Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I Periode 2021 sampai dengan 2022 Pelabuhan Tanjung Priok No. PD.05.01/29/9/10/MPS/TEK/PI.II-21 dan No. PJK-621-29092021-006.

  Jangka waktu perjanjian ini adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalander sejak Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) ditandatangani dengan total biaya pelaksanaan sebesar Rp20.314.227 (termasuk PPN).

- Pada tanggal 29 September 2021, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat No.PD.05.01/29/9/12/ HPS/TEK/PI.II-21 dan No.PJK-621-29092021-013. Jangka waktu perjanjian adalah selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalander terhitung sejak Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) senilai Rp18.437.391 (belum termasuk PPN).

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b) Project Management Agreement - SPSL (continued)

- *On October 23, 2020, the Company and SPSL agreed on the Agreement on the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan No. KS.02/23/10/ 1/MPS/TEK/PI.II-2020 and No. PJK-621-23102020-009.*

  The purpose of the agreement is to provide a legal basis and certainty for the Company and SPSL in performing construction and development cooperation of Kijing terminal Pontianak port in West Kalimantan.

- *On September 29, 2021, Company and SPSL signed a Special Cooperation Agreement for the Management of the North Kalibaru Terminal Development Phase I for the 2021 to 2022 of Tanjung Priok Port No. PD.05.01/29/9/10/MPS/TEK/PI.II-21 and No. PJK-621-29092021-006.*

  The term of agreement is 365 (three hundred and sixty five) calendar days since the Minutes of Work Start (BAMK) is signed with a total cost of Rp20,314,227 (including VAT).

- *On September 29, 2021, the Company and SPSL agreed on the Agreement on the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan No. PD.05.01/29/9/12/HPS/ TEK/PI.II-21 and No. PJK-621-29092021-013. The term of the agreement is 365 (three hundred and sixty five) calendar days starting from the Minutes of Starting Work (BAMK) amounted to Rp18,437,391 (excluding VAT).*

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1

Berdasarkan PIA (Catatan 49a), pada tanggal 9 Juni 2014, SPSL dan NPCT1, menandatangani Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas 1, Pelabuhan Priok Baru (COA) dimana SPSL menunjuk NPCT1 untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Petikemas 1 selama jangka waktu sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah beroperasinya dermaga 850 meter dan NPCT1 harus melakukan pembayaran sewa di muka dan biaya sewa kuartalan kepada SPSL.

Pembayaran sewa di muka sebesar USD100.000.000 harus dibayarkan dalam beberapa tahap, yaitu USD30.000.000 setelah tanggal mulai COA, USD40.000.000 setelah penyerahan dermaga 450 meter dan USD30.000.000 setelah penyerahan dermaga 850 meter. Berdasarkan Perjanjian Perubahan Kedua terhadap COA tanggal 24 Desember 2014 ("SAA"), USD30.000.000 akan dibayarkan setelah penyelesaian area lapangan tambahan CY 570 meter. SPSL harus melakukan penyerahan dermaga 450 meter dan dermaga 850 meter kepada NPCT1 masing-masing pada tanggal 31 Juli 2015 dan 31 Desember 2015.

Biaya sewa kuartalan harus dibayarkan pada awal setiap kuartal, yaitu sejumlah USD7.000.000 per kuartal untuk periode beroperasinya dermaga 450 meter sampai dengan beroperasinya dermaga 850 meter dan USD14.000.000 per kuartal untuk periode setelahnya. Pada tanggal 17 September 2014, SPSL menerima pembayaran pertama atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD30.000.000 dari NPCT1 dan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dalam laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 27).

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c) Construction and Operation Agreement - NPCT1

Based on PIA (Note 49a), on June 9, 2014, SPSL and NPCT1, entered into Construction and Operation Agreement - Container Terminal 1, New Priok Port (COA) through which SPSL appointed NPCT1 to develop and operate Container Terminal 1 for the period of 25 (twenty five) years after the commencement of operation of 850 meters quay and NPCT1 shall pay advance site rent and quarterly site rent to SPSL.

The advance rental fee of USD100,000,000 shall be paid in several stages, which consist of USD30,000,000 after the commencement date, USD40,000,000 after the handover of 450 meters quay and USD30,000,000 after the handover of 850 meters quay. Based on the Second Amendment Agreement to the COA dated December 24, 2014 ("SAA"), the final USD30,000,000 will be paid after the completion of additional yard area CY 570 meters. SPSL shall handover the 450 meters quay and the 850 meters quay to NPCT1 on July 31, 2015 and December 31, 2015, respectively.

The quarterly site rent shall be paid at the beginning of each quarter amounting to USD7,000,000 each quarter for the period after the commencement of operation of 450 meters quay up to the commencement of operation of 850 meters quay and USD14,000,000 each quarter for the period thereafter. On September 17, 2014, SPSL received the first payment of advance rental fee amounting to USD30,000,000 from NPCT1 and are recorded as unearned revenue in the consolidated statement of financial position (Note 27).

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1 (lanjutan)

Penyerahan dermaga 450 meter tidak terjadi pada tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana tercantum dalam SAA. Pada tanggal 1 Agustus 2015, SPSL menerima *Liquidated Damages Notice* dari NPCT1 sehubungan dengan keterlambatan ini. Melalui surat tanggal 26 Agustus 2015, SPSL menyampaikan bahwa keterlambatan penyerahan tidak mengakibatkan NPCT1 mengalami keterlambatan dalam melakukan konstruksinya sehingga hal tersebut bukan merupakan *Liquidated Damage Event*.

Selain itu, penyerahan dermaga 850 meter yang seharusnya dilakukan pada tanggal 31 Desember 2015 dan pekerjaan pengerukan tertentu yang seharusnya diselesaikan SPSL pada tanggal 31 Januari 2016, juga tidak terjadi. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, SPSL tidak menerima *Liquidated Damages Notice* dari NPCT1 sehubungan dengan keterlambatan tersebut.

Dermaga 450 meter dan 850 meter telah diserahkan oleh SPSL kepada NPCT1 masing-masing pada tanggal 23 Juni 2016 dan 16 Oktober 2016.

Pada tanggal 24 Juni 2016, SPSL menerima pembayaran kedua atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD40.000.000 dari NPCT1. Pada tanggal 31 Desember 2016, dermaga 850 meter belum mulai beroperasi sehingga pembayaran pertama dan kedua atas sewa diterima di muka masing-masing sebesar USD30.000.000 dan USD40.000.000 tersebut dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dalam laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 27).

Pada tanggal 18 Agustus 2016, dermaga 450 meter telah mulai beroperasi secara komersial.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c) Construction and Operation Agreement - NPCT1 (continued)

The handover of 450 meters quay did not occur on July 31, 2015 as stated in the SAA. On August 1, 2015, SPSL received a Liquidated Damages Notice from NPCT1 in relation to the delay. Through a letter dated August 26, 2015, SPSL responded by stating that the delay in handover did not cause a delay to NPCT1's construction hence it is not a Liquidated Damage Event.

In addition, the handover of 850 meters quay which should have occurred on December 31, 2015 and certain dredging works which should have been completed by SPSL on January 31, 2016, did not occur as well. As of the date of completion of the consolidated financial statements, the Company has not received any Liquidated Damages Notice from NPCT1 in relation to these delays.

450 meters and 850 meters quays have been handed over by SPSL to NPCT1 on June 23, 2016 and October 16, 2016, respectively.

On June 24, 2016, SPSL received the second payment of advance rental fee amounting to USD40,000,000 from NPCT1. As of December 31, 2016, commencement of operation of 850 meters quay has not yet occurred hence first and second payment of advance site rent amounting to USD30,000,000 and USD40,000,000, respectively, are recorded as unearned revenue in the consolidated statement of financial position (Note 27).

On August 18, 2016, 450 meters quay has started its commercial operation.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1 (lanjutan)

Pada tanggal 13 Desember 2016, SPSL dan NPCT1 menandatangani Surat Persetujuan (LOA) dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Penyediaan akses oleh SPSL kepada NPCT1 atas area tertentu pada dermaga 850 meter;
- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasi komersial dermaga 450 meter, yaitu tanggal 18 Agustus 2016;
- Pemberitahuan Konfirmasi Pekerjaan Lokasi untuk Dermaga 850 meter diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2016 dengan beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan;
- SPSL akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan:
  - Perkuatan sisi utara tanggal 16 Maret 2017;
  - Penyediaan dan pemasangan *variable speed water drive* dan pressure tank dan peralatan terkait tanggal 16 Maret 2017;
  - Pengerukan hingga kedalaman -16m LWS tanggal 31 Mei 2017;
  - Penyelesaian fase kedua dari area *common gate* tanggal 16 Oktober 2017;
  - Penyelesaian hal-hal penting yang belum diselesaikan yang diidentifikasi oleh ahli teknik independen tanggal 16 Maret 2017.
- Kesepakatan bahwa tanggung jawab pemeliharaan area infrastruktur konsesi akan menyesuaikan dengan laporan ahli teknik independen;
- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasional dermaga 850 meter paling lambat tanggal 16 Maret 2017;
- Jika SPSL *Undertaking* belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, NPCT1 akan memperhitungkan pengurangan 25% dari pembayaran sewa kuartalan USD14.000.000 pada pembayaran sewa kuartalan berikutnya;

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c) Construction and Operation Agreement - NPCT1 (continued)

On December 13, 2016, SPSL and NPCT1 signed a Letter of Acceptance (LOA) which regulates items as follows:

- *Provision of access to certain areas within 850 meters quay from SPSL to NPCT1;*
- *Agreement on the date of commencement of operations of 450 meters quay, which was August 18, 2016;*
- *Site Works Confirmation Notice for 850 meters quay was issued on October 16, 2016 with note on certain outstanding works;*
- *SPSL will complete the following works within the time specified for each item:*
  - *Strengthening of north side by March 16, 2017;*
  - *Supplying and installing variable speed water drive and pressure tank and associated equipment by March 16, 2017;*
  - *Dredging to a depth of -16m LWS by May 31, 2017;*
  - *Completion of the second phase of the common gate area by October 16, 2017;*
  - *Completion of major outstanding items identified by the independent engineer by March 16, 2017.*
- *Agreement that the maintenance responsibility of concession area infrastructure will be in accordance with the independent engineer's report;*
- *Agreement that the date of commencement of operations of 850 meters quay will be no later than March 16, 2017;*
- *If SPSL Undertakings have not been completed on the predetermined dates, NPCT1 will be credited with 25% of quarterly site rent USD14,000,000 on the next payment of quarterly site rent;*

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1 (lanjutan)

Pada tanggal 13 Desember 2016, SPSL dan NPCT1 menandatangani Surat Persetujuan (LOA) dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut: (lanjutan)

- Jika terdapat salah satu SPSL *Undertaking* belum diselesaikan pada tanggal 16 Oktober 2017, NPCT1 hanya akan melakukan pembayaran atas sewa kuartalan dermaga 450 meter, yaitu USD7.000.000 sampai dengan tanggal dimana seluruh SPSL *Undertaking* telah diselesaikan.

Pada tanggal 16 Januari 2018, SPSL dan NPCT1 menandatangani Nota Kesepakatan dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- SPSL akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan:
- Jalan akses keluar sisi timur area CGA tanggal 15 Desember 2017;
- Pengoperasian *Go-live* atas sistem IT tanggal 31 Desember 2017;
- Pengoperasian *Go-live* OCR di CGA tanggal 31 Januari 2018;
- Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi selatan di CGA tanggal 31 Januari 2018;
- Jalan akses masuk di sisi barat CGA tanggal 28 Februari 2018;
- Tambahan area *buffer* untuk parkir truk di sisi barat CGA tanggal 30 April 2018;
- Penyediaan fasilitas untuk petikemas *reefer* dan *cooling room* tanggal 30 April 2018;
- Pekerjaan perbaikan jalan akses keluar (lapangan penumpukan behandle sisi utara di CGA) tanggal 30 April 2018;
- Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi utara di CGA tanggal 31 Mei 2018;
- Penyediaan fasilitas inspeksi untuk mendukung kegiatan bea dan cukai di CGA tanggal 31 Maret 2019.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c) Construction and Operation Agreement - NPCT1 (continued)

On December 13, 2016, SPSL and NPCT1 signed a Letter of Acceptance (LOA) which regulates items as follows: (continued)

- *If any one of the SPSL Undertakings has not been completed by October 16, 2017, NPCT1 will pay quarterly site rent only on the 450 meters quay, which is USD7,000,000 until the date that all SPSL Undertakings have been completed.*

On January 16, 2018, SPSL and NPCT1 signed Memorandum of Agreement which regulates items as follows:

- *SPSL will complete the following works within the time specified for each item:*
- *East area exit access road of CGA by December 15, 2017;*
- *Go-live IT system operation by December 31, 2017;*
- *Go-live OCR operation at CGA by January 31, 2018;*
- *Reparation of behandle south side dockyard at CGA by January 31, 2018;*
- *Entry access road west side CGA by February 28, 2018;*
- *Additional buffer area for trucks park at west side of CGA by April 30, 2018;*
- *Facility provision for reefer container and cooling room by April 30, 2018;*
- *Reparation work of exit access road (north side behandle dockyard at CGA) by April 30, 2018;*
- *Reparation of north side behandle dockyard at CGA by May 31, 2018;*
- *Inspection facilities provision to support custom activities at CGA March 31, 2019.*

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1 (lanjutan)

Pada tanggal 16 Januari 2018, SPSL dan NPCT1 menandatangani Nota Kesepakatan dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut: (lanjutan)

- Jika pekerjaan tersebut di atas belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, SPSL akan dikenakan pembayaran terhadap setiap pekerjaan sebesar USD5.000/hari kerja.

- Kesepakatan dalam Surat Keputusan mengenai pengurangan pembayaran sewa dicabut.

SPSL telah berhasil menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diminta dalam MOA sebelum batas waktu yang ditentukan, walaupun masih terdapat 2 (dua) *item* yang sampai dengan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian belum digunakan karena terdapat kendala administrasi yang perlu diselesaikan antara Perusahaan dengan kontraktor pelaksana pekerjaan.

Pada tanggal 18 Agustus 2020, telah disepakati bersama antara SPSL dan PP terkait kelanjutan 2 (dua) *item* pekerjaan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian, dimana jangka waktu pelaksanaan untuk 2 *item* pekerjaan akan berakhir pada tanggal 18 Mei 2022.

Pada tanggal 2 November 2020, SPSL membuat kesepakatan bersama dengan NPCT1 (SMA) mengenai sewa lokasi dimuka/*Advance Site Rent* (ASR) yang menjelaskan NPCT1 menyetujui untuk membayar kepada SPSL beberapa bagian dari sewa lokasi di muka (ASR) sebesar USD23.500.000 meskipun penyerahan CY 57 meter belum dipenuhi oleh SPSL. Sesuai dengan ketentuan SMA, SPSL diharuskan mengirimkan pemberitahuan kepada NPCT1 tentang dimulainya pelaksanaan pembangunan CY 57 meter. Pada tanggal 20 April 2020, pembangunan CY 57 meter telah dilanjutkan kembali dan ditargetkan selesai pada bulan Mei 2022.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c) Construction and Operation Agreement - NPCT1 (continued)

On January 16, 2018, SPSL and NPCT1 signed Memorandum of Agreement which regulates items as follows: (continued)

- *If the above works have not been completed on the predetermined dates, SPSL will pay USD5,000/day for each work.*

- *Agreement on the Letter of Acceptance regarding reduction of rental payment has been waived.*

SPSL has succeeded in completing all requested work within the MOA before the specified time limit, although there are still 2 (two) items that have not been used until completion of the consolidated financial statements because there are administrative constraints that need to be resolved between the Company and the contractor implementing the work.

On 18 August 2020, it was mutually agreed between the SPSL and PP regarding the continuation of 2 (two) work items as outlined in the Agreement Letter, where the implementation period for 2 work items will end on May 18, 2022.

On November 2, 2020, SPSL entered into a joint agreement with NPCT1 (SMA) regarding Advance Site Rent (ASR) which explained that NPCT1 agreed to pay SPSL some part of the upfront location lease (ASR) of USD23,500,000 despite submission CY 57 meters has not been fulfilled by SPSL. In accordance with SMA regulations, SPSL is required to send a notification to NPCT1 regarding the commencement of the construction of the 57 meter CY. On April 20, 2020, the construction of the 57 meter CY has been resumed and is targeted for completion in May 2022.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1 (lanjutan)

Pada tanggal 29 Desember 2020, SPSL telah menerima ASR tersebut sebesar USD23.500.000 yang dicatat pada pendapatan diterima di muka.

Pada tanggal 30 Desember 2021, SPSL dan NPCT1 telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan tentang Serah Terima Area 57 Meter yang diantaranya menjelaskan bahwa NPCT1 telah menerima penyerahan Area 57 Meter sesuai *Site Work Confirmation Notice* (SWCN) yang diterbitkan oleh *Independent Engineer* (IE), biaya sewa *Quarterly Site Rent* (QSR) dibebaskan dari reduksi 11% menjadi sebesar USD14.000.000 (nilai penuh) mulai tanggal 27 Desember 2021, dan SPSL akan menerbitkan tagihan untuk sisa ASR sebesar USD6.500.000. Pada tanggal 2 Februari 2022, SPSL telah menerima sisa ASR sebesar USD6.500.000 tersebut.

d) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja

Perjanjian Induk Kerjasama Operasi Koja antara Perusahaan dan HPI (Catatan 1c) mengatur syarat-syarat yang menjadi dasar operasional Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK Koja).

Aspek keuangan penting yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk Amendemennya adalah sebagai berikut:

- Bagian investasi dari Partisipan yang dicantumkan dalam Perjanjian yang telah diubah adalah sebagai berikut:

Perusahaan	54,91%	
HPI	45,09%	

- Nilai investasi dari kedua Partisipan tergantung pada audit atas investasi yang dilakukan oleh auditor independen.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c) Construction and Operation Agreement - NPCT1 (continued)

On December 29, 2020, SPSL received ASR amounting to USD23,500,000 which was recorded as unearned income.

On December 30, 2021, SPSL and NPCT1 has signed Minutes of Agreement regarding Handover 57 Meter area which among others explain that NPCT1 has received the handover of 57 Meters Area according to Site Work Confirmation Notice (SWCN) issued by Independent Engineer (IE), Quarterly Site Rent (QSR) rental fee is free from reduction 11% which has full value of USD14,000,000 (full amount) from December 27, 2021, and SPSL will issue a bill for the remaining ASR amounting to USD6,500,000. On February 2, 2022, SPSL has received such remaining ASR amounting to USD6,500,000.

d) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja

The Master Cooperation Agreement between the Company and HPI (Note 1c) sets out the terms and conditions under which Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK Koja) is operating.

The principal financial aspects of this Agreement including its amendments are as follows:

- *The investment proportion of the Participants is specified in the revised Agreement as follows:*

The Company	54,91%	
HPI	45,09%	

- *Investments by the Participants are subject to audit by an independent auditor.*

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

Aspek keuangan penting yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk Amendemennya adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- Aset tetap yang diserahkan oleh Partisipan untuk dipergunakan dalam operasional terminal dimiliki secara langsung oleh Partisipan dan dicatat dalam masing-masing pembukuannya.
- Partisipan berhak atas pengembalian dana penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh masing-masing Partisipan yang digunakan dalam operasi dan berhak menerima laba sesuai dengan investasi dari Partisipan.
- Laba yang dapat dibagikan kepada Partisipan ditentukan setelah pengurangan biaya operasional, royalti, biaya bank dan dana penyusutan aset tetap dari pendapatan.
- Royalti akan dibayarkan kepada Perusahaan apabila arus petikemas tahunan yang dihasilkan melebihi target minimum tahunan yang ditetapkan.
- Jika ada pengeluaran modal baru, kedua belah pihak sepakat untuk membiayai belanja modal sesuai dengan persentase investasi Partisipan berdasarkan audit investasi tahun sebelumnya.
- Partisipan berhak untuk menerima dana penyusutan dan pembagian laba berdasarkan hasil audit investasi yang berlaku.

Pada tanggal 30 Maret 2021, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2020.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

The principal financial aspects of this Agreement including its amendments are as follows: (continued)

- *Fixed assets provided by the Participants for use in the operations of the terminal are owned directly by the Participants and are recorded in their respective accounting records.*
- *The Participants are entitled to reimburse depreciation funds from fixed assets owned by the respective Participants used in operation and shall receive profit based on the investments made by the Participants.*
- *Profit distributable to the Participants is determined by deducting operating expenses, royalties, bank administration charges and depreciation funds from revenue.*
- *Royalties will be paid to the Company if the annual container throughput exceeds the minimum annual target.*
- *If there are new capital expenditures, both parties agreed to finance the capital expenditures in accordance with the investment percentages of the Participants based on the prior year investment audit.*
- *The Participants have the right to receive depreciation funds and distribution of profit based on prevailing investment audit result.*

On March 30, 2021, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and the remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of KSO TPK Koja's 2020 net income.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2020 dimana Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2020 sebesar USD0,35 juta atau setara dengan Rp4,92 miliar untuk Perusahaan dan USD0,21 juta atau setara dengan Rp3,03 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2020 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Pada tanggal 24 Mei 2022, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2021 dan 2022.

Pada tanggal 14 Desember 2022, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2021 dimana Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2021 sebesar USD4,98 juta atau setara dengan Rp78,39 miliar untuk Perusahaan dan USD4,01 juta atau setara dengan Rp63,06 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2021 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan HPI mengadakan Revisi atas Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Terminal Petikemas III Tanjung Priok (Revisi Perjanjian) dimana Perusahaan dan HPI sepakat untuk memperpanjang kerjasama pengoperasian Terminal Petikemas III Tanjung Priok sampai dengan tanggal 26 Maret 2039. Revisi Perjanjian ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Revisi Perjanjian tersebut, TPK Koja akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD8.750.000, sedangkan royalti tidak lagi dibayarkan oleh TPK Koja kepada Perusahaan.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

On December 31, 2021, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2020 whereby the Participants approved the outstanding return of investment for the year 2020 of USD0.35 million or equivalent to Rp4.92 billion for the Company and USD0.21 million or equivalent to Rp3.03 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2020 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

On May 24, 2022, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and the remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of KSO TPK Koja's 2021 and 2022 net income.

On December 14, 2022, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2021 whereby the Participants approved the outstanding return of investment for the year 2021 of USD4.98 million or equivalent to Rp78.39 billion for the Company and USD4.01 million or equivalent to Rp63.06 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2021 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

On August 5, 2014, the Company and HPI entered into a Revised Cooperation Agreement for the Management of Tanjung Priok Container Terminal III (Revised Agreement), whereby the Company and HPI agreed to extend the cooperation for operating Terminal Petikemas III Tanjung Priok until March 26, 2039. The Revised Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. In consideration to the Revised Agreement, TPK Koja will have to pay quarterly rent fee amounting to USD8,750,000 to the Company, while royalty will no longer be paid by TPK Koja to the Company.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan HPI telah melakukan perubahan terhadap Revisi Perjanjian di atas dimana pada akhir masa perjanjian, seluruh aset yang dimiliki HPI dan bagian HPI dalam aset bersama serta pekerjaan modal akan dialihkan kepada Perusahaan tanpa adanya pembebanan.

Sehubungan dengan Revisi Perjanjian tersebut, KSO TPK Koja akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD8,75 juta, sedangkan royalti tidak lagi dibayarkan oleh KSO TPK Koja kepada Perusahaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, KSO TPK Koja telah mencatat sewa kuartalan tersebut masing-masing sebesar USD35.453.601 (setara dengan Rp520,76 miliar) dan USD35.600.202 (setara dengan Rp510,37 miliar).

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan tersebut masing-masing sebesar USD35.000.000 (setara dengan Rp514,88 miliar) dan USD35.368.082 (setara dengan Rp506,70 miliar).

Dalam Revisi Perjanjian tersebut, Perusahaan berhak memperoleh pembayaran premium sebesar USD50.000.000 dari HPI sehubungan dengan dilanjutkannya kerjasama antara Perusahaan dan HPI untuk pengelolaan TPK Koja. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah mencatat pendapatan yang berasal dari amortisasi premium masing-masing sebesar Rp27.735.417. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 saldo yang belum diamortisasi atas premium tersebut masing-masing sebesar Rp457.634.375 dan Rp485.369.791 dan dicatat sebagai bagian dari akun pendapatan diterima di muka pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

On June 22, 2015, the Company and HPI has amended the Revised Agreement mentioned above where at the end of the agreement period, all of the HPI's assets and HPI's interest in the joint assets and the capital works will be transferred to the Company free of encumbrances.

In consideration to the Revised Agreement, KSO TPK Koja will have to pay quarterly rent fee to the Company amounting to USD8.75 million, while royalty will no longer be paid by KSO TPK Koja to the Company. For the year ended December 31, 2022 and 2021, KSO TPK Koja has recorded for quarterly rent amounting to USD35,453,601 (equivalent to Rp520.76 billion) and USD35,600,202 (equivalent to Rp510.37 billion), respectively.

For the years ended December 31, 2022 and 2021, the Company has recorded revenue from these quarterly rentals of USD35,000,000 (equivalent to Rp514.88 billion) and USD35,368,082 (equivalent to Rp506.70 billion) respectively.

In the Revised Agreement, the Company has the right to obtain payment of premium amounting to USD50,000,000 from HPI in relation to the continuing cooperation between the Company and HPI for the management of TPK Koja. For the year ended December 31, 2022 and 2021, the Company has recorded revenue from amortisation of premium amounting to Rp27,735,417. As of December 31, 2022 dan 2021 the balance of unamortized premium amounted to Rp457,634,375 and Rp485,369,791 respectively, and was recorded as part of unearned revenue account in the consolidated statements of financial position.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

e) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT

Pada tanggal 27 Maret 1999, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok ("Perjanjian Pemberian Kuasa") dimana Perusahaan menunjuk dan memberikan kuasa pada JICT untuk pengoperasian dan pemeliharaan properti yang telah dikuasakan (mencakup terminal kontainer, fasilitas pendukung terminal kontainer dan utilitas) sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian. Periode perjanjian adalah 20 (dua puluh) tahun sejak 27 Maret 1999, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Sehubungan dengan pemberian kuasa kepada JICT tersebut, JICT akan membayar royalti kepada Perusahaan sebesar 10% dari pendapatan kotor terminal kontainer secara bulanan. Disamping itu, JICT juga akan membayar kepada Perusahaan atas sewa peralatan dan tenaga kerja yang ditempatkan Perusahaan di JICT.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan JICT mengadakan Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa - Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok (Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa) dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Pemberian Kuasa sampai dengan tanggal 26 Maret 2039. Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi.

Sehubungan dengan Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, JICT akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD21.250.000 (Catatan 49f), sedangkan royalti, sewa peralatan berupa 4 (empat) RTGC dan penempatan tenaga kerja tidak lagi dibayarkan oleh JICT kepada Perusahaan. Perjanjian jasa dan teknis "*know how*" yang terdapat pada Perjanjian Pemberian Kuasa akan diakhiri. Berdasarkan Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, kegiatan usaha dan aset Terminal 2 akan dialihkan dari JICT kepada Perusahaan (Catatan 49i).

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

e) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT

On March 27, 1999, the Company and JICT entered into Authorization Agreement for The Operation and Maintenance of Container Terminal in Tanjung Priok Seaport ("Authorization Agreement") whereby the Company appointed and confered authorization on JICT for the operation and maintenance of the authorization property (including container terminal, container terminal support facilities and utilities) as defined in the agreement. The authorization period is 20 (twenty) years from March 27, 1999, unless terminated earlier in accordance with the provisions of the agreement. In consideration of the granting of the authorization to JICT, JICT will pay monthly royalties to the Company calculated at 10% of the preceding month container terminal gross revenue. Moreover, JICT will also pay to the Company for equipment rental and Company's employee secondment in JICT.

On August 5, 2014, the Company and JICT entered into an Amended Authorization Agreement - Jakarta International Container Terminal, Port of Tanjung Priok (Amended Authorization Agreement), whereby the Company and JICT agreed to extend the Authorization Agreement until March 26, 2039. The Amended Authorization Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent.

In consideration to the Amended Authorization Agreement, JICT will have to pay quarterly rent to the Company fee amounting to USD21,250,000 (Note 49f), while royalty, equipment rental of 4 (four) RTGCs and secondment of employee will no longer be paid by JICT to the Company. As for the technical "know-how" and services agreement in Authorization Agreement, they will be terminated. Based on the Amended Authorization Agreement, Terminal 2 assets and business will be transferred from JICT to the Company (Note 49i).

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

e) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT (lanjutan)

Berdasarkan Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, Perusahaan akan menerima pembayaran premium sebesar USD200.000.000 dari HPJ (Catatan 49h).

Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Perubahan terhadap Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa dimana jumlah premium yang dibayarkan oleh HPJ kepada Perusahaan diubah menjadi sebesar USD215.000.000. Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa ini perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diatur dalam surat Menteri BUMN dan surat Menteri Perhubungan di bawah.

Pada tanggal 9 Juni 2015, Perusahaan menerima surat dari Menteri BUMN tentang Kerjasama Pengelolaan/Pengoperasian JICT dan TPK Koja dimana Menteri BUMN secara prinsip menyetujui rencana kerjasama usaha pengelolaan/pengoperasian JICT dan TPK Koja, dengan kepemilikan minimal di JICT sebesar 51%, dengan persyaratan sebagai berikut:

- Memperhatikan surat Menteri Perhubungan No. HK.201/3/4 Phb 2014 tanggal 18 September 2014, terkait dengan pemisahan fungsi operator dan regulator sesuai UU No. 17 Tahun 2008.
- Melaksanakan surat Wakil Menteri BUMN kepada Direktur Utama BUMN No. S-645/MBU/WK/10/2014 tanggal 9 Oktober 2014 hal penyampaian Hasil Panja Aset BUMN dan Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait kerjasama BUMN.

Pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan dan HPJ telah menandatangani Pokok-Pokok Perjanjian menyepakati ketentuan-ketentuan utama yang diusulkan untuk diatur lebih lanjut dalam perjanjian - perjanjian perubahan terhadap amendemen perjanjian perpanjangan JICT saat ini dan dokumen-dokumen turunan yang relevan dari perjanjian perpanjangan JICT saat ini.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

e) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT (continued)

Based on the Amended Authorization Agreement, the Company will receive payment of premium from HPJ amounting to USD200,000,000 (Note 49h).

On June 22, 2015, the Company and JICT entered into Amendment Agreement to the Amended Authorization Agreement which changed the amount of premium to be paid by HPJ to the Company amounting to USD215,000,000. The Amended Authorization Agreement needs to have adjustments to be in accordance with Law No. 17 Year 2008 of Shipping as regulated in the letter of the Minister of SOEs and letter of the Minister of Transportation below.

On June 9, 2015, the Company received a letter from the Minister of SOE regarding Cooperation of Management/ Operation of JICT and TPK Koja whereas the Minister of SOEs principally agrees with the plan of cooperation of JICT and TPK Koja management/operation, with minimum percentage of ownership of 51%, with requirements as follows:

- *To comply with the letter from Minister of Transportation No. HK.201/3/4 Phb 2014 dated September 18, 2014, related to the separation of operator and regulator functions in accordance with UU No. 17 Year 2008.*
- *To execute letter of Vice Minister of SOE Enterprise to President Director of SOE No. S-645/MBU/WK/10/2014 dated October 9, 2014 regarding result of Assets Working Committee of SOE and Decision of Constitutional Court, especially related to State Owned Enterprises cooperation.*

On September 30, 2021, the Company and HPJ have entered into the Heads of Agreement pursuant to which have agreed on the proposed key terms to be further stipulated in amendment of agreements to the existing extension agreements of JICT and the relevant derivatives documents to the existing extension agreements of JICT.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

e) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT (lanjutan)

Pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan dan JICT telah menandatangani Amendemen terhadap Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa, diantaranya mengatur pengalihan aset Terminal 2 dimana pada tanggal pengalihan, kepemilikan dan penguasaan aset Terminal 2 akan dialihkan dari JICT ke Perusahaan sesuai dengan Akta Pengalihan. Berdasarkan amendemen tersebut, nilai aset Terminal 2 akan didasarkan pada nilai barang sisa *(scrap value) sebagaimana* ditentukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Perusahaan.

f) Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas lainnya - JICT

Pada tanggal 27 Maret 1999, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas ("Perjanjian Penggunaan") dimana Perusahaan mengizinkan dan memberikan hak kepada JICT untuk menggunakan dan menyewa properti berikut dengan semua perbaikan yang telah dilakukan oleh JICT sejak tanggal efektif Perjanjian Pemanfaatan.

Atas pemberian hak Penggunaan oleh Perusahaan, JICT setuju untuk membayar biaya bulanan yang ditetapkan dalam Perjanjian tersebut, dihitung sebesar 5% dari pendapatan kotor.

Berdasarkan amendemen Perjanjian Pemanfaatan - Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 5 Agustus 2014 (sebagaimana telah diubah), ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan dan JICT, antara lain menyetujui JICT atas biaya sendiri, wajib membayar dan melunasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Perusahaan tetap memiliki hak kepemilikan properti tersebut. Jangka waktu perjanjian adalah 20 (dua puluh tahun) dari 27 Maret 1999, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

e) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT (continued)

On March 30, 2022, the Company and JICT have entered into Amendment to the Amended Authorization Agreement, among others stipulated the transfer of Terminal 2 Assets in which at the date of transfer, the ownerships and the authority of Terminal 2 assets will be transferred from JICT to the Company in accordance with the Deed of Transfer. Based on the amendment, the value of Terminal 2 assets will be based on scrap value as determined by the independent appraisal appointed by the Company.

f) Utilization Agreement of Land Under HPL Owned by the Company, Port Facilities Building and Other Container Port Supporting Facilities - JICT

On March 27, 1999, the Company and JICT entered into an Agreement on Utilization of The HPL Land, Port Buildings Facility, and The Container Terminal Support Facility ("Utilization Agreement") whereby the Company granted and conferred the right to utilise and rent to JICT the properties together with all improvements held by JICT commencing from the effective date of the Utilization Agreement.

In consideration of the granting of the utilization right by the Company, JICT agreed to pay a monthly fee defined in these Agreement, calculated at 5% of gross revenue.

Based on amendment agreement to Utilisation Agreement - Jakarta International Container Terminal, Port of Tanjung Priok dated August 5, 2014 (as amended), signed on March 30, 2022, the Company and JICT, agreed to, among others, JICT at its owned expense, shall duly pay and discharge PBB (Tax on Land and Building).

The Company retained the rights of the properties ownership. The utilization period is 20 (twenty years) from March 27, 1999, unless terminated earlier in accordance with the provisions of the agreement.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

f) Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas lainnya - JICT (lanjutan)

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan JICT mengadakan Amendemen Perjanjian Penggunaan dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Penggunaan sampai dengan tanggal berakhirnya Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa. Amendemen Perjanjian Penggunaan ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Amendemen Perjanjian Penggunaan tersebut, JICT akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD21.250.000 sedangkan kompensasi 5% dari pendapatan kotor JICT tidak lagi dibayarkan oleh JICT kepada Perusahaan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan tersebut masing-masing sebesar USD89.446.718.

Pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan dan JICT telah menandatangani Amendemen Perjanjian Penggunaan, diantaranya mengatur mengenai kewajiban pembayaran PBB, kewajiban-kewajiban JICT dan biaya pemeliharaan.

g) Amendemen Perjanjian Pemegang Saham - JICT

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JICT tanggal 24 November 2015, para pemegang saham JICT setuju antara lain:

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

f) Utilization Agreement of Land Under HPL Owned by the Company, Port Facilities Building and Other Container Port Supporting Facilities - JICT (continued)

On August 5, 2014, the Company and JICT entered into an Amended Utilization Agreement whereby the Company and JICT agreed to extend the Utilization Agreement until the date of termination of Amended Authorization Agreement. The Amended Utilization Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. In consideration to the Amended Utilization Agreement, JICT will have to pay quarterly rent fee to the Company amounting to USD21,250,000 while compensation of 5% of JICT's gross revenue will no longer be paid by JICT to the Company.

For the year ended December 31, 2022 and 2021 the Company has recorded revenue from quarterly rent fee amounting to USD89,446,718, respectively.

On March 30, 2022, the Company and JICT have entered into Amendment to the Utilization Agreement, among others stipulated the obligation of PBB payment, JICT's obligations and maintenance expenses.

g) Amended Shareholders Agreement - JICT

Based on the Circular Resolution of Shareholders in Lieu of An Extraordinary General Meeting of Shareholders of JICT dated November 24, 2015, the shareholders of JICT agreed among others:

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

g) Amendemen Perjanjian Pemegang Saham - JICT (lanjutan)

- Bergantung pada persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk meningkatkan modal dasar JICT dari Rp221.450.406 yang terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A dan 442.900.812 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham masing-masing Rp500 (nilai penuh) menjadi Rp230.489.198 yang terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A dan 460.978.396 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham masing-masing Rp500 (nilai penuh).
- Bergantung pada persetujuan BKPM, untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh JICT dari Rp221.450.406 yang terbagi atas 442.900.812 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh) menjadi Rp230.489.198 yang terbagi atas 460.978.396 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh).

Pada tanggal 7 Desember 2015, BKPM telah menyetujui perubahan modal JICT tersebut di atas. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan belum melakukan penyetoran atas tambahan setoran modal tersebut di atas. Di samping itu, peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut di atas belum memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan, HPJ, Kopegmar dan JICT telah menandatangani Amendemen terhadap Amendemen Perjanjian Pemegang Saham, diantaranya mengatur pengalihan saham JICT yang dimiliki HPJ kepada Perusahaan sebanyak 9.300.917 saham dengan harga pembelian sebesar USD1. Dengan demikian, kepemilikan Perusahaan di JICT menjadi 51,00% dari sebelumnya 48,90%.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

g) Amended Shareholders Agreement - JICT (continued)

- *Subject to approval from the Capital Investment Coordinating Board (BKPM), to increase JICT's authorized capital from Rp221,450,406 divided into 1 (one) A Series share and 442,900,812 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) to become Rp230,489,198 divided into 1 (one) A Series share and 460,978,396 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount).*
- *Subject to approval from BKPM, to increase JICT's issued and paid-up capital from Rp221,450,406 divided into 442,900,812 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) to become Rp230,489,198 divided into 460,978,396 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount).*

On December 7, 2015, BKPM has already approved the above mentioned JICT's capital changes. Until the completion of the consolidated financial statements, the Company has not paid the additional paid-in capital as mentioned above. Moreover, the increase of authorized capital and issued and paid up capital has not received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

On March 30, 2022, the Company and JICT have entered into Amendment to the Amended Shareholder Agreement, among others stipulated the transfer of JICT shares owned by HPJ to the Company amounting to 9,300,917 shares with purchase price of USD1. Therefore, the ownerships of the Company in JICT became 51.00% from previously 48.90%.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

g) Amendemen Perjanjian Pemegang Saham - JICT (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas JICT No. 11 tanggal 30 Mei 2022, para pemegang saham telah menyetujui pengalihan saham tersebut di atas serta perubahan anggaran dasar JICT. Akta tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 31 Mei 2022.

h) Perjanjian Pembayaran Premium - JICT

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan HPJ mengadakan Perjanjian Pembayaran Premium dimana HPJ sepakat untuk melakukan pembayaran premium kepada Perusahaan sebesar USD200.000.000 sebagai imbalan atas tetap dilanjutkannya kerja sama usaha patungan Perusahaan dengan HPJ. Perjanjian ini berlaku efektif pada saat setiap dari persyaratan pendahuluan pada Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa telah dipenuhi (Catatan 49e). Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan HPJ mengadakan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pembayaran Premium dimana jumlah premium yang dibayarkan oleh HPJ diubah menjadi sebesar USD215.000.000. Dalam keadaan tertentu dimana terjadinya pengakhiran secara lebih awal atas Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa, maka premium harus dibayarkan kembali oleh Perusahaan kepada HPJ secara pro-rata. Pada tanggal 2 Juli 2015, Perusahaan telah menerima pembayaran premium tersebut.

Pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan dan HPJ sepakat mengenai tambahan premium sebesar USD17.940.000 yang harus dibayarkan oleh HPJ kepada Pelindo dengan ketentuan sebagai berikut:

1) *Milestone* pertama sebesar USD8.940.000 pada saat penandatanganan amendemen-amendemen tersebut di atas.
2) *Milestone* kedua sebesar USD9.000.000 setelah yang lebih awal terjadi antara: (i) merger yang disepakati dan pengalihan saham yang diusulkan menjadi efektif secara hukum dan pengalihan atas aset Terminal 2 telah seluruhnya selesai; atau (ii) 10 tahun setelah penandatanganan amendemen-amendemen tersebut.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

g) Amended Shareholders Agreement - JICT (continued)

Based on Deed of Decision of General Meeting of Shareholder of JICT No. 11 dated May 30, 2022, the shareholders agreed to such transfer of shares as mentioned above and amendmend of the JICT's article of association. The Deed has been notified to and approved by the Ministry of Law and Human Rights dated May 31, 2022.

h) Premium Payment Agreement - JICT

On August 5, 2014, the Company and HPJ entered into a Premium Payment Agreement, whereby HPJ agreed to pay premium to the Company amounting to USD200,000,000 as consideration for continuing the joint venture of the Company with HPJ. The Premium Payment Agreement will commence on the date on each of the condition precedent in the Authorization Agreement has been satisfied (Note 49e). On June 22, 2015, the Company and HPJ entered into Amendment Agreement to Premium Payment Agreement in which the amount of premium to be paid by HPJ was amended to USD215,000,000. In certain circumstances leading to early termination of the Amended Authorization Agreement, the premium shall be repaid by the Company to HPJ using a pro-rate basis. On July 2, 2015, the Company has received payment of the premium.

On March 30, 2022, the Company and HPJ agreed on additional premium of USD17,940,000 which should be paid by HPJ to the Company with terms as follows:

1) First milestone of USD8,940,000 at the signing of the above amendments.

2) Second milestone of USD9,000,000 after the earlier one occurs between: (i) the agreed merger and proposed share transfer become legally effective and the transfer of Terminal 2 assets is fully completed; or (ii) 10 years after the signing of the amendments.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

h) Perjanjian Pembayaran Premium - JICT (lanjutan)

Perusahaan telah menerima pembayaran premium milestone pertama sebesar USD8.940.000 pada bulan April 2022 yang diamortisasi selama sisa masa Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa, yaitu sampai dengan 2039.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah mencatat pendapatan yang berasal dari amortisasi premium masing-masing sebesar Rp89.446.718. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 saldo yang belum di amortisasi atas premium tersebut masing-masing sebesar Rp1.967.827.812 dan Rp2.027.458.958, dan dicatat sebagai bagian dari akun pendapatan diterima di muka pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

i) Perjanjian Pengalihan Aset - JICT

Pada tanggal 14 Desember 2015, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Pengalihan Aset Terminal 2 dari JICT kepada Perusahaan dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk melakukan pengalihan aset-aset milik JICT yang terdapat di Terminal 2 kepada Perusahaan pada tanggal perjanjian ini. Atas pengalihan aset-aset tersebut, Perusahaan diharuskan melakukan pembayaran sebesar USD2.816.526, yang akan dibayarkan kepada JICT menggunakan mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 November 2015, yaitu sebesar Rp38.980.720.

Pada tanggal 30 Mei 2022, Perusahaan dan JICT telah menandatangani Amendemen Perjanjian Pengalihan Aset, diantaranya disepakati bahwa aset Terminal 2 belum dapat dialihkan secara fisik oleh JICT kepada Perusahaan berdasarkan Akta Pengalihan tanggal 14 Desember 2015 tersebut di atas karena Perusahaan belum melakukan pembayaran sebagaimana dipersyaratkan dalam Akta Pengalihan tersebut. Juga disepakati bahwa pengalihan aset Terminal 2 akan didasarkan pada *scrap value* sebesar Rp20,23 miliar sebagaimana ditentukan oleh penilai independen. Perusahaan telah melakukan pembayaran atas pengalihan aset Terminal 2 tersebut kepada JICT di tanggal 24 Juni 2022.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

h) Premium Payment Agreement - JICT (continued)

The Company has received the first milestone premium payment of USD8,940,000 on April 2022 which is amortized over the remaining period of the Amendment of Authorization Agreement, which is until 2039.

For the year ended December 31, 2022 and 2021, the Company has recorded revenue from amortisation of premium amounting to Rp89,446,718, respectively. As of December 31, 2022 and 2021, the balance of unamortized premium amounted to Rp1,967,827,812 and Rp2,027,458,958, respectively, and was recorded as part of unearned revenue account in the consolidated statements of financial position.

i) Assets Transfer Agreement - JICT

On December 14, 2015, the Company and JICT entered into Terminal 2 Assets Transfer from JICT to the Company Agreement where the Company and JICT agreed to transfer assets owned by JICT at Terminal 2 to the Company on the date of this agreement. For the transfer of the assets, the Company is obliged to make payment amounting to USD2,816,526, which will be paid to JICT in Rupiah using BI middle rate as of November 30, 2015, amounted to Rp38,980,720.

On May 30, 2022, the Company and JICT have entered into Amendment to Asset Transfer Agreement, among others agreed that the transfer of Terminal 2 Assets can not be transferred physically from JICT to the Company based on the Assets Transfer Agreement dated December 14, 2015 as mentioned above because the Company has not paid as required in the Asset Transfer Agreement. It is also agreed that the transfer of Terminal 2 assets will be based on scrap value of Rp20.23 billion as determined by the independent appraisal. The Company has paid the Terminal 2 asset transfer to JICT on June 24, 2022.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

j) Perjanjian Pemegang Saham IPC TPK dan STMS

Pada tanggal 19 April 2014, IPC TPK dan Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura ("STMS") menandatangani Perjanjian Pemegang Saham untuk Terminal Petikemas 1 dan Perjanjian Perubahannya pada tanggal 11 September 2014 dimana IPC TPK dan STMS akan mendirikan perusahaan dengan jumlah saham sebesar 1.000 saham yang terbagi menjadi 510 saham seri A yang dimiliki IPC TPK dan 490 saham seri B yang dimiliki STMS.

Perusahaan tersebut didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian sehubungan dengan pembangunan dan pengoperasian Terminal Petikemas 1 dan kegiatan lain sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana disetujui oleh IPC TPK dan STMS.

Jika dalam suatu tahun buku, Perusahaan tersebut memiliki laba yang tersedia untuk didistribusikan maka distribusi akan dilakukan pertama untuk STMS hingga pengembalian modal yang diperbolehkan telah tercapai dan kedua dibagikan secara proporsional kepada STMS dan IPC TPK sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing. Syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian.

Kepemilikan saham IPC TPK pada Perusahaan yang didirikan tidak diikuti dengan pengendalian dan karenanya laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan IPC TPK.

Perusahaan yang didirikan sehubungan dengan perjanjian tersebut di atas bernama PT New Priok Container Terminal One berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Mei 2014.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

j) Shareholders Agreement IPC TPK and STMS

On April 19, 2014, IPC TPK and Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapore ("STMS") signed a Shareholders Agreement for Container Terminal 1 and the Amendment Agreement on September 11, 2014, wherein IPC TPK and STMS will establish a company with total shares amounting to 1,000 shares comprising of 510 series A Shares held by IPC TPK and 490 series B Shares held by STMS.

The company was set up to operate based on the Construction and Operation Agreement in connection with the operation and development of Container Terminal 1 and other activities in accordance with applicable law as agreed by IPC TPK and STMS.

If, in respect of any financial year, the Company has profit available for distribution then distribution will be made first for STMS until permitted equity return has been achieved and secondly distributed proportionally to STMS and IPC TPK in accordance with their respective ownerships. Other term and conditions are stipulated in the agreement.

IPC TPK's ownership in the Company established is not followed by control and therefore, the company's financial statements are not consolidated in the IPC TPK's financial statements.

The company established in relation to the above agreement namely PT New Priok Container Terminal One based on Deed No. 33 dated May 28, 2014.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

k) Perjanjian Pinjaman - Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura

Pada tanggal 19 April 2014, IPC TPK dan Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., (STMS) menandatangani Perjanjian Pinjaman dimana STMS memberikan fasilitas pinjaman kepada IPC TPK untuk kepentingan pembayaran Saham Seri A pada NPCT1 sebesar USD15.096.000 dengan tingkat bunga tahunan 7%.

Fasilitas tersebut akan dibayarkan kembali melalui pengurangan modal pada NPCT1, dengan IPC TPK dan STMS sebagai pemegang sahamnya, dan dari dividen yang dapat dibagikan kepada IPC TPK. Seluruh bunga akan dibayarkan dari dividen IPC TPK.

Pada tanggal 11 September 2014, IPC TPK dan STMS menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman tertanggal 19 April 2014 untuk mengatur mengenai dilakukannya pembebanan bunga setiap tahun.

Pada tanggal 10 November 2016, IPC TPK dan STMS menandatangani kesepakatan untuk merevisi tingkat bunga periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018 menjadi 0%.

Pada tanggal 31 Desember 2018, IPC TPK dan STMS menandatangani kesepakatan untuk memperpanjang revisi tingkat bunga periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 menjadi 0%, lalu pada tanggal 31 Desember 2020, IPC TPK dan STMS kembali menandatangani kesepakatan untuk memperpanjang pengenaan bunga 0% untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022. Kemudian, pada tanggal 1 Januari 2023, IPC TPK dan STMS kembali menandatangani kesepakatan untuk memperpanjang pengenaan bunga 0% untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

k) Loan Agreement - Sea Terminal Management & Services Pte. Ltd., Singapore

On April 19, 2014, IPC TPK and Sea Terminal Management & Services Pte. Ltd. (STMS) signed a Loan Agreement where STMS provides loan facilities to IPC TPK for the purpose of A Series Shares payments in NPCT1 amounting to USD15,096,000 with annual interest rate of 7%.

The facility will be repaid through reduction of capital in NPCT1, with IPC TPK and STMS as shareholders, and from dividends which can be distributed to IPC TPK. All interest will be paid from IPC TPK dividends.

On September 11, 2014, IPC TPK and STMS signed the Agreement Amendments to the Loan Agreement dated April 19, 2014 regarding interests that was to be charged per annum.

On November 10, 2016, IPC TPK and STMS signed an agreement to revise interest rate for period from January 1, 2016 to December 31, 2018 to become 0%.

As of December 31, 2018, IPC TPK and STMS signed an agreement to revise interest rate for period from January 1, 2019 to December 31, 2020 to become 0%, then on December 31, 2020, IPC TPK and STMS re-signed the agreement to prolong the 0% interest period from January 1, 2021 to December 31, 2022. On January 1, 2023 IPC TPK and STMS re-signed the agreement to prolong the 0% interest period from January 1, 2023 to December 31, 2024.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

I) Perjanjian Penggunaan Tanah - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood)

Pada tanggal 2 Maret 2012, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Indofood atas penggunaan bagian tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik Perusahaan sesuai Surat Perjanjian No. HK.566/2/18/C.Tpk-12. Perjanjian ini mencakup pengelolaan tanah seluas 329.833 m^2 berlokasi di Jl. Sindang laut dan Jl. Raya Cilincing, Jakarta Utara dan berlaku selama 22 (dua puluh dua) tahun sampai dengan 31 Desember 2033.

Perjanjian kerjasama tersebut telah disetujui oleh Menteri Negara BUMN melalui surat No. S-505/MBU/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Persetujuan Optimalisasi Tanah Perusahaan yang digunakan oleh Indofood.

Pendapatan yang diperoleh Perusahaan atas penggunaan lahan tersebut adalah sebesar Rp1.041.059.197 yang dibayar secara periodik selama 5 (lima) kali pembayaran dan pelunasan pembayaran ke 5 (lima) selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan setelah perjanjian ditandatangani. Perusahaan juga memperoleh pendapatan tambahan atas pengoperasian dermaga/*jetty* sebesar Rp104.260 per tahun yang dibayarkan setiap awal tahun selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah nota tagihan diterima oleh Indofood.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, jumlah pembayaran yang telah diterima oleh Perusahaan adalah sebesar Rp1.041.059.197. Pada tanggal 31 Desember 2022 and 2021, saldo yang belum diamortisasi atas penggunaan bagian tanah HPL masing-masing adalah sebesar Rp495,77 miliar dan Rp536,67 miliar (sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2).

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

I) Land Usage Agreement - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indoofod)

On March 2, 2012, the Company entered into an agreement with Indoofod for the use of a parcel of land under Rights to Manage (HPL) owned by the Company with Agreement No. HK.566/2/18/C.Tpk-12. The Agreement included land management with area of 329,833 m^2 which located at Jl. Sindang Laut and Jl. Raya Cilincing, North Jakarta and is valid for 22 (twenty two) years until December 31, 2033.

The agreement has been approved by the Minister of SOE through the letter No. S-505/MBU/2011 dated October 5, 2011 regarding Approval of Optimalization of the Company's Land which is used by Indofood.

Revenue earned by the Company from the usage of land amounted to Rp1,041,059,197 and paid periodically for 5 (five) terms, the fifth payment will be settled at the latest 36 (thirty six) months after the agreement was signed. The Company also earned an additional revenue from jetty operations amounting to Rp104,260 annually which will be paid at the latest 7 (seven) work days after the invoice is received by Indofood.

Until December 31, 2022, the payment received by the Company amounted to Rp1,041,059,197. As of December 31, 2022, and 2021, the balance of unamortized use of a parcel of HPL land amounted to Rp495.77 billion and Rp536.67 billion, respectively, (before deducted by final income tax article 4(2)).

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

m) Perjanjian Pembangunan Dermaga Makassar New Port (MNP) Tahap I

Perusahaan mengadakan Perjanjian Pembangunan Dermaga MNP Tahap IA dengan detail pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Perjanjian pekerjaan Paket A mengenai pekerjaan reklamasi dan pembangunan dermaga MNP senilai Rp326.868.365 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk berdasarkan Akta No. 3 dari Grace Dameria Tiorina, S.H., M.Kn., Notaris di Cibubur, tanggal 3 Juni 2015 dengan jangka waktu selama 725 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

- Perjanjian pekerjaan ini terakhir diubah dengan Addendum III No. 15/HK.301/ 7/PI.IV-2018 tanggal 12 Juli 2018 menjadi senilai Rp345.785.871 dengan jangka waktu selama 1.227 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

- Perjanjian pekerjaan Paket B mengenai pekerjaan reklamasi, pengerukan, lapangan kontainer dan *causeway* MNP senilai Rp1.076.779.375 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Bumi Karsa (KSO) berdasarkan Akta No. 22 dari Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, tanggal 05 September 2016 dengan jangka waktu selama 830 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

- Perjanjian pekerjaan ini terakhir diubah dengan Addendum II No. 1/HK.301/ 3/PI.IV-2019 tanggal 15 Februari 2019 menjadi senilai Rp1.119.939.158 dengan jangka waktu selama 1.022 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

m) Construction Agreement of Makassar New Port (MNP) Quay Phase I

The Company entered into a Construction Agreement of MNP Quay Phase IA, with details of work as follows:

- *Agreement of work Package A regarding reclamation and construction of MNP Quay amounted to Rp326,868,365 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk based on Deed No. 3 from Grace Dameria Tiorina, S.H., M.Kn., Notary from Cibubur, dated June 3, 2015 with 725 calendar days period since the agreement was signed.*

- *This agreement of work was last amended through Addendum III No. 15/HK.301/ 7/PI.IV-2018 dated July 12, 2018 with changes on the agreement amount into Rp345,785,871 and agreement period into 1,227 calendar days since the agreement was signed.*

- *Agreement of work Package B regarding reclamation of dredging work, container yard, and causeway of MNP amounted to Rp1,076,779,375 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Bumi Karsa (KSO) based on Deed No. 22 from Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notary in Makassar, dated 05 September 2016 with period of 830 calendar days since the agreement was signed.*

- *This agreement of work was last amended through Addendum II No. 1/HK. 301/3/PI. IV-2019 dated February 15, 2019 with changes on the agreement amount into Rp1,119,939,158 and agreement period into 1,022 calendar days since from the agreement was signed.*

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

m) Perjanjian Pembangunan Dermaga Makassar New Port (MNP) Tahap I (lanjutan)

- Perjanjian pekerjaan Paket C mengenai pekerjaan pembangunan *breakwater* MNP senilai Rp226.725.699 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Bumi Karsa (KSO) berdasarkan Akta No. 22 dari Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, tanggal 30 September 2016 dengan jangka waktu selama 600 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

- Perjanjian pekerjaan ini terakhir diubah dengan Addendum IV No. 3/HK.301/ 13/PI.IV-2019 tanggal 13 September 2019 dengan jangka waktu menjadi selama 1.160 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

- Perjanjian pekerjaan Paket D mengenai pekerjaan bangunan fasilitas serta mekanikal dan elektrikal MNP senilai Rp258.089.700 dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta No. 30 dari Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, tanggal 31 Januari 2018 dengan jangka waktu selama 390 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

- Perjanjian pekerjaan ini terakhir diubah dengan Addendum V No. 9/HK.301/10/ PI.IV-2020 tanggal 04 September 2020 menjadi senilai Rp283.679.319 dengan jangka waktu selama 1.066 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

m) Construction Agreement of Makassar New Port (MNP) Quay Phase I (continued)

- *Agreement of work Package C regarding construction work of MNP breakwater amounted to Rp226,725,699 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Bumi Karsa (KSO) based on Deed No. 22 from Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notary in Makassar, dated 30 September 2016 with period of 600 calendar days since from the agreement was signed.*

- *This agreement of work was last amended through Addendum IV No. 3/HK.301/ 13/PI.IV-2019 dated September 13, 2019 with changes on the agreement period into 1,160 calendar days since the agreement was signed.*

- *Agreement of work Package D regarding construction of facility building including mechanical and electrical of MNP amounted to Rp258,089,700 with PT Adhi Karya (Persero) Tbk based on Deed No. 30 from Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notary in Makassar, dated January 31, 2018 with period of 390 calendar days since from the agreement was signed.*

- *This agreement of work was last amended through Addendum V No. 9/HK.301/ 10/PI.IV-2020 dated September 04, 2020 with changes on agreement amount into Rp283,679,319 and agreement period into 1,066 calendar days since the agreement was signed.*

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

n. Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas Palaran Pelabuhan Samarinda

Pada tanggal 20 Juli 2007, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama pembangunan dan pengoperasian Terminal Petikemas Palaran Pelabuhan Samarinda dengan Pemerintah Kota Samarinda dan PT Pelabuhan Samudera Palaran. Perjanjian ini berjangka waktu selama 50 tahun sejak masa uji coba, yaitu 3 tahun sejak ditandatanginya perjanjian.

Dalam perjanjian, Perusahaan mendapatkan *management fee/compensation fee* sebesar 10% dari total pendapatan kotor dari hasil pengoperasian Terminal Petikemas Palaran. Selain itu, Perusahaan juga menerima bagi hasil keuntungan sebesar persentase tertentu dari pendapatan kotor hasil pengoperasian Terminal Petikemas Palaran yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini.

Pada akhir perjanjian, Perusahaan berhak memperoleh kepemilikan bangunan infrastruktur Terminal Petikemas Palaran dari PT Pelabuhan Samudera Palaran.

o. Perjanjian Pinjaman Biaya Pergantian Proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing

Berdasarkan Akta Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk Penggantian Pembelian Tanah dalam Rangka Pengusahaan Jalan Tol Ruas Cibitung-Cilincing antara Badan Layanan Umum - Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dan CTP dari Notaris Ny. Trie Sulistiowarni, S.H., No. 2 tanggal 4 Februari 2013, CTP memperoleh pinjaman untuk penggantian pembelian tanah dengan batas maksimal biaya pergantian Rp288.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Seksi I: Cibitung - Telaga Asih sebesar Rp11.519.488.
2. Seksi II: Telaga Asih - Tembalang sebesar Rp87.445.713.
3. Seksi III: Tembalang - Tarumajaya sebesar Rp118.906.715.
4. Seksi IV: Tarumajaya - Cilincing sebesar Rp70.128.083.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

n. Cooperation Agreement for The Construction and Operation of The Palaran Container Terminal Samarinda Port

On July 20, 2007, the Company entered into a cooperation agreement for the construction and operation of the Palaran Container Terminal, Samarinda Port with the Samarinda City Government and PT Pelabuhan Samudera Palaran. This agreement has a term of 50 years from the trial period, which was 3 years since the contract signing.

In this agreement, the Company received the management fee/compensation fee amounting to 10% of gross revenue of operating Palaran Container Terminal. In addition, the Company also received the profit sharing at certain percentage from gross revenue of operating Palaran Container Terminal as regulated in this agreement.

At the end of the agreement, the Company has the right to acquire ownership of the Palaran Container Terminal infrastructure building from PT Pelabuhan Samudera Palaran.

o. Loan Agreement for Cibitung-Cilincing Toll Road Project Replacement Cost

Based on the Notarial Deed No. 2 dated February 4, 2013 by Mrs. Trie Sulistiowarni, S.H., a Notary in Jakarta , CTP has signed an agreement with Ministry of Public Works & Human Settlements - Public Service Agencies Secretariat of Toll Road Regulatory Body ("BLU Set-BPJT"). CTP obtained expense reimbursement loan on the purchase of land for Cibitung-Cilincing tol project for a maximum expense reimbursement amount of Rp288,000,000, with the following details:

1. Section 1: Cibitung - Telaga Asih amounting to Rp11,519,488.
2. Section 2: Telaga Asih - Tembalang amounting to Rp87,445,713.
3. Section 3: Tembalang - Tarumajaya amounting to Rp118,906,715.
4. Section 4: Tarumajaya - Cilincing amounting to Rp70,128,083.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

o. Perjanjian Pinjaman Biaya Pergantian Proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing (lanjutan)

Jangka waktu pinjaman adalah sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah. Nilai tambah pinjaman (bunga) sebesar tingkat bunga Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") ditambah 1%. Nilai tambah diperhitungkan setiap bulan dan wajib dibayar setiap 3 (tiga) bulan. Denda tunggakan pembayaran nilai tambah sebesar 2% per bulan dari nilai tambah yang tertunggak.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp466.538.398.

p. Perjanjian Konstruksi dan Penggunaan Infrastruktur BMS dan PT Freeport Indonesia (PTFI)

Pada tanggal 3 September 2021, BMS dan PT Freeport Indonesia ("PTFI") mengadakan perjanjian konstruksi dan penggunaan infrastruktur dimana BMS merancang, mengadakan, membangun, menguji dan melakukan uji kelayakan operasi atas pekerjaan sipil pada infrastruktur BMS sesuai dengan desain final, yang terdiri dari dermaga, trestle, jembatan, dan SWI (*sea water intake*), yang pelaksanaannya sesuai jadwal konstruksi yang tertuang di jadwal perjanjian, yaitu Desember 2021 - November 2022 untuk SWI, Desember 2021 - Desember 2022 untuk *trestle* dan jembatan, dan Desember 2021 - April 2023 untuk dermaga.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

o. Loan Agreement for Cibitung-Cilincing Toll Road Project Replacement Cost (continued)

The term of the loan is from the date the agreement was signed until the completion of the land acquisition process. The added value of the loan (interest) is the interest rate of the Deposit Insurance Corporation ("LPS") plus 1%. Value added is calculated every month and must be paid every 3 (three) months. The penalty for arrears in payment of value added is 2% per month of the value added in arrears.

As of December 31, 2022 and 2021, the outstanding balance of the payable amounting to Rp466,538,398, respectively.

p. BMS and PT Freeport Indonesia (PTFI) Infrastructure Construction and Use Agreement

On September 3, 2021, BMS and PT Freeport Indonesia ("PTFI") entered into Construction and Ulitisation Agreement where BMS is responsible for designing, procuring, constructing, testing, and conducting operational feasibility tests on civil works on BMS infrastructure, such as the wharf, trestle, bridge, and SWI (sea water intake), which will be put into operation according to the agreement construction schedule, which is December 2021 to November 2022 for the SWI, December 2021 to December 2022 for the trestle and bridge, and December 2021 to April 2023 for the wharf.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

p. Perjanjian Konstruksi dan Penggunaan Infrastruktur BMS dan PT Freeport Indonesia (PTFI) (lanjutan)

Beberapa ketentuan penting dalam perjanjian ini antara lain:

1. *Lease term* untuk perjanjian ini adalah 40 tahun terdiri dari 20 tahun jangka waktu awal ditambah 10 tahun perpanjangan pertama dan 10 tahun perpanjangan kedua.
2. Terdapat penalti yang akan dikenakan apabila PTFI membatalkan sewa pada 10 tahun awal dalam jangka waktu awal 20 tahun.
3. Pembatalan perjanjian harus disetujui kedua belah pihak atau tidak dapat dibatalkan sepihak saja, serta wajib memberikan pemberitahuan tertulis 180 hari sebelum tanggal pembatalan.
4. BMS membangun dermaga, trestle, jembatan, dan SWI (*sea water intake*). Freeport membangun alat-alat untuk menunjang operasionalnya seperti, *conveyer*, pipa, dan alat bongkar muat.

Terdapat 3 arus kas masuk yang diterima oleh BMS atas proyek ini:

- *Capacity payment* merupakan kas yang diterima oleh BMS karena memberikan hak eksklusif penggunaan infrastruktur kepada PTFI, di mana *capacity payment* dapat diterima setelah sertifikat penerimaan akhir diterbitkan, estimasi pada April 2023. BMS akan menerima sebesar USD7.936.000 per tahunnya selama 20 tahun, untuk 10 tahun perpanjangan pertama BMS akan menerima USD9.920.000/tahun, masa perpanjangan 10 tahun kedua adalah USD12.400.000/tahun. Apabila PTFI melakukan pembatalan sewa selama masa sewa 10 tahun (dalam jangka waktu sewa 20 tahun) maka akan dikenakan denda sesuai Perjanjian Konstruksi pasal 14.8.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

p. BMS and PT Freeport Indonesia (PTFI) Infrastructure Construction and Use Agreement (continued)

The following are key points in this agreement:

1. *The lease term for this agreement is 40 years, which includes a 20-year initial term plus ten years for the first and ten years for the second extensions.*
2. *If PTFI terminates the lease during the first ten years of the initial 20-year term, a penalty will be applied.*
3. *The agreement cannot be canceled unilaterally, and written notice must be received 180 days before the cancellation date. Both parties must agree to the cancellation.*
4. *BMS will build the wharf, bridge, trestle, and SWI (sea water intake).*

There are 3 cash inflows received by BMS for this project:

- *In exchange for granting PTFI exclusive use of infrastructure, BMS will receive capacity payments once the final acceptance certificate is issued in April 2023. BMS will earn USD7,936,000 annually for the next twenty years, USD9,920,000 annually for the first ten-year extension, and USD12,400,000 annually for the second 10 year extension. If PTFI terminates the lease within the initial ten years, Article 14.8 of the Construction and Use Agreement about the penalty will apply (within the 20 year lease duration).*

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

p. Perjanjian Konstruksi dan Penggunaan Infrastruktur BMS dan PT Freeport Indonesia (PTFI) (lanjutan)

- *Milestone I* yaitu kas yang diterima atas pencapaian pembangunan tahun pertama sebesar 12% dari keseluruhan biaya konstruksi yang dikeluarkan pada periode 12 bulan sejak tanggal 3 September 2021. *Milestone II* yaitu kas yang diterima atas pencapaian pembangunan tahun kedua sebesar 12% dari keseluruhan biaya konstruksi yang dikeluarkan BMS untuk periode 24 bulan sejak 3 September 2021. Sampai dengan periode November 2022, BMS telah menerima *milestone payment* sebesar Rp55 miliar atas *Milestone I* yang dengan progres penyelesaian telah mencapai 70,476%. Apabila BMS mengalami keterlambatan dalam penyerahan akhir aset di mana tidak sesuai dengan jadwal konstruksi, maka akan dikenakan denda sebesar Rp700 juta per hari, maksimal Rp63 miliar (Perjanjian Konstruksi pasal 4.2.3).

- Kompensasi sebesar Rp36 miliar, merupakan kompensasi tambahan untuk biaya konstruksi. BMS telah menerima kompensasi ini pada tanggal 30 September 2022.

q. Perjanjian Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing

CTP menunjuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian No. 007/KONTRAK/WK-CTP/VII/2017 sebagai kontraktor pembangunan jalan tol Cibitung - Cilincing dengan nilai kontrak Rp5.591.934.626 (termasuk PPN).

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

p. BMS and PT Freeport Indonesia (PTFI) Infrastructure Construction and Use Agreement (continued)

- *Milestone I is the cash payment of 12% of total construction expenses incurred over a 12-month period beginning on September 3, 2021, for the first year's construction. Milestone II is the payment for the second year's construction of 12% of BMS's total construction expenses for a period of 24 months beginning September 3, 2021. BMS has received Rp55 billion for Milestone I on November 17, 2022, according to the construction progress up to 70.476% by November 2022. BMS will be penalized Rp700 million per day, up to a maximum of Rp63 billion, if the final handover of assets is delayed and not in accordance with the construction schedule (Construction and Use Agreement article 4.2.3).*

- *The additional compensation for construction costs is Rp36 billion. This payment has been received by BMS on September 30, 2022.*

q. Construction Agreement of Cibitung-Cilincing Toll Road

CTP appointed PT Waskita Karya (Persero) Tbk based on Agreement No. 007/KONTRAK/WK-CTP/VII/2017 as a construction contractor for the Cibitung - Cilincing toll road with a contract value of Rp5,591,934,626 (including VAT).

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

q. Perjanjian Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing (lanjutan)

Perjanjian ini telah mengalami beberapa addendum dengan addendum yang terakhir yaitu addendum XV pada tanggal 30 September 2021 dengan nilai kontrak Rp8.638.699.442 (termasuk PPN) dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai dari tanggal ditandatangani kontrak yakni 7 Juli 2017 sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir yang terbagi menjadi 4 seksi, yaitu seksi I Interchange Cibitung sampai dengan Interchange Telaga Asih (STA -0+440 s/d STA 2+700), seksi II Interchange Telaga Asih sampai dengan Interchange Tambelang (STA 2+700 s/d STA 13+140), seksi III Interchange Tambelang sampai dengan Interchange Tarumajaya (STA 13+140 s/d STA 27+150), dan seksi IV Interchange Tarumajaya sampai dengan Interchange Cilincing (STA 27+150 s/d STA 34+385).

CTP juga menunjuk PT Waskita Beton Precast Tbk berdasarkan Perjanjian No. CTP-ADM-XII-2017-WBP-00001 tanggal 23 Desember 2017 sebagai kontraktor pembangunan jalan tol Cibitung - Cilincing (STA 30+200 s/d STA 32+800) dengan nilai kontrak Rp635.173.781 (termasuk PPN).

Berdasarkan Adendum V Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing dengan PT Waskita Beton Precast Tbk (STA 30+200 s/d 32+800) No. CTP-ADM-XI-2020-WBP-0000006 tanggal 25 November 2020 nilai kontrak menjadi Rp422.155.854 (termasuk PPN).

Berdasarkan Adendum VII Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing dengan PT Waskita Beton Precast Tbk (STA 30+200 s/d 32+800) No. CTP-ADM-V-2021-WBP-0000008 tanggal 31 Mei 2021 jangka waktu pelaksanaan menjadi 1.369 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2021.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

q. Construction Agreement of Cibitung-Cilincing Toll Road (continued)

This agreement has been amended several times, the latest addendum of which is addendum XV dated September 30, 2021 with a contract value of Rp8,638,699,442 (including VAT) with the exercise period from the date of signing which was on July 7, 2017 until the signing of Final Hand Over which divided into 4 sections, which are section I Interchange Cibitung - Interchange Telaga Asih (STA - 0+440 s/d STA 2+700), section II Interchange Telaga Asih - Interchange Tambelang (STA 2+700 s/d STA 13+140), section III Interchange Tambelang - Interchange Tarumajaya (STA 13+140 s/d STA 27+150), dan section IV Interchange Tarumajaya - Interchange Cilincing (STA 27+150 s/d STA 34+385).

CTP appointed PT Waskita Beton Precast Tbk based on Agreement No. CTP- ADM-XII-2017-WBP-00001 dated on December 23, 2017, as a construction contractor for the Cibitung - Cilincing toll road (STA 30+200 s/d STA 32+800) with a contract value of Rp635,173,781 (including VAT).

Based on Addendum V of the Contract for construction of Cibitung - Cilincing toll road with PT Waskita Beton Precast Tbk (STA 30+200 s/d 32+800) No. CTP-ADM-XI-2020-WBP-0000006 dated November 25, 2020, the contract value is Rp422,155,854 (including VAT).

Based on Addendum VII of the Contract for construction of Cibitung - Cilincing toll road with PT Waskita Beton Precast Tbk (STA 30+200 s/d 32+800) No. CTP-ADM-V-2021-WBP-0000008 dated May 31, 2021, the period of execution of the work is 1,369 calender days commencing from December 21, 2017 up to September 30, 2021.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

r. Perjanjian Kerjasama Khusus Pembangunan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH)

Pada tanggal 27 Mei 2022, Perusahaan membuat kesepakatan bersama dengan SPSL mengenai pelaksanaan kerjasama khusus pembangunan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang menjelaskan perjanjian dengan jenis kontrak biaya tambah imbalan jasa sebesar Rp18.186.625 di area Pelabuhan Benoa, Bali. Perusahaan menyetujui melakukan pembayaran secara bertahap kepada SPSL dengan *management fee* sebesar 15% dari komponen biaya langsung non personil dan biaya penunjang lainnya setiap akhir triwulan. Jangka waktu perjanjian ini selama satu tahun dan dapat dilakukan perpanjangan berdasarkan kesepakatan.

s. Perjanjian Proyek Pembangunan Pelindo Tower dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Barang dan Jasa Kontraktor Terintegrasi Rancang Bangun (*Design and Build*) Proyek Pembangunan Pelindo Tower tanggal 6 Desember 2018 antara MMI dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk ("PP"), MMI mempekerjakan PP untuk melaksanakan proyek pembangunan Maritime Tower. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 730 hari. Nilai kontrak adalah sebesar Rp664,29 miliar (termasuk PPN) yang akan dibayarkan berdasarkan progres fisik pekerjaan setiap bulan.

Pada tanggal 20 Desember 2018, MMI telah melakukan pembayaran uang muka kepada PP sebesar Rp60,39 miliar belum termasuk PPN dan disajikan sebagai uang muka pembangunan aset tetap dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

r. Bali Maritime Tourism Hub Construction Special Cooperation Agreement

On May 27, 2022, the Company entered into a joint agreement with SPSL regarding the implementation of a special cooperation in the development of Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) which explained that agreement with the cost plus fee contract of Rp18,186,625 in the Benoa Port Area, Bali. The Company agreed to make incremental payments to SPSL with a management fee 15% of non-personnel direct cost component and other support cost every end of the quarter. The ter of this agreement is one year and can be extended under the agreement.

s. Construction of Pelindo Tower Agreement with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

Based on Procurement Agreement on Integrated Design and Build of Goods and Contractor Services for Pelindo Tower Construction Project dated December 6, 2018, between MMI and PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk ("PP"), MMI engaged PP to conduct the construction of Maritime Tower. The period of work is 730 days. The contract price is Rp664.29 billion (including VAT) which shall be paid based on monthly physical progress.

On December 20, 2018, MMI paid advances to PP amounting to Rp60.39 billion excluding VAT and presented as advance for construction of fixed assets in the consolidated statement of financial position.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

s. Perjanjian Proyek Pembangunan Pelindo Tower dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (lanjutan)

Berdasarkan addendum tanggal 26 November 2020, MMI dan PP sepakat untuk menambah dan mengubah beberapa pasal dalam perjanjian diantaranya, jangka waktu perjanjian adalah selama 730 hari dengan penyerahan pekerjaan selambat-lambatnya 31 Desember 2020, diperpanjang menjadi 993 hari dengan penyerahan pekerjaan selambat-lambatnya 31 Agustus 2021, serta nilai pekerjaan berubah dari Rp664,29 miliar (termasuk PPN) menjadi Rp706,13 miliar (termasuk PPN).

Berdasarkan addendum No. tanggal 16 Agustus 2021, MMI dan PP sepakat untuk menambah dan mengubah beberapa pasal dalam perjanjian, diantaranya, jangka waktu perjanjian adalah selama 993 hari dengan penyerahan pekerjaan selambat-lambatnya 31 Agustus 2021, diperpanjang menjadi 1.023 hari dengan penyerahan pekerjaan selambat-lambatnya 30 September 2021.

t. Garongkong

Pada tanggal 14 Juni 2022, Perusahaan dan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan melakukan perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan barang milik negara bersifat khusus dalam rangka penyediaan infrastruktur pada kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas II Garongkong.

Ketentuan-ketentuan penting dalam Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- Perusahaan berhak mengoperasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan di area pelabuhan Garongkong dengan skema Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara.
- Perusahaan diharuskan untuk membayar kontribusi tetap sebesar Rp2,66 miliar per tahun yang selanjutnya naik setiap tahun sebesar 5%, dan melakukan pembayaran pembagian keuntungan sebesar 5,25% dari pendapatan. Perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan investasi awal dengan total sebesar Rp739,83 miliar selama 9 tahun pertama.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

s. Construction of Pelindo Tower Agreement with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (continued)

Based on addendum dated November 26, 2020, MMI and PP agreed to add and change several articles in the agreement, among others, the term of agreement is 730 days with the handover of the construction work not later than December 31, 2020, extended to 993 days with the handover not later than August 31, 2021, and the contract price change from Rp664.29 billion (including VAT) to Rp706.13 billion (including VAT).

Based on addendum No. dated August 16, 2021, MMI and PP agreed to add and change several articles in the agreement, among others, the term of agreement is 993 days with the handover of the construction work not later than August 31, 2021, extended to 1,023 days with the handover not later than September 30, 2021.

t. Garongkong

On June 14, 2022, the Company and Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation entered into a cooperation agreement regarding the use of special state property in the context of providing infrastructure at the unit management office of class II Garongkong port .

Important provisions in the Agreement are as follows:

- *The company has the right to operate and carry out port service activities in the Garongkong port area under the State Property Utilization Cooperation scheme.*
- *The Company is required to pay a fixed contribution amounting to Rp2.66 billion per annum which will increase by 5% annualy, and makes a profit sharing payment of 5.25% from the revenues. The Company is also required to make an initial investment totaling Rp739.83 billionfor the first 9 years.*

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

t. Garongkong (lanjutan)

- Jangka waktu perjanjian adalah selama 50 tahun, terhitung sejak 14 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan secara tertulis oleh Perusahaan kepada Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

u. Perjanjian Pembiayaan – Fasilitas Pinjaman *Term Loan* dan *Term Financing Al Musyarakah*

Berdasarkan Akta Perjanjian Ketentuan Umum Pembiayaan No. 19 tanggal 23 Desember 2022 dari Notaris Julius Purnawan, SH, MSi, notaris di Jakarta, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Ketentuan Pembiayaan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BTPN Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Term Loan dan Term Financing Al Musyarakah sebesar maksimal USD750.000.000 dengan opsi akordion sebesar USD250.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

t. Garongkong (continued)

- *The term of the agreement is 50 years, starting from June 14, 2022 and can be extended based on a written application by the Company to the Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation no later than 3 months before the end of the agreement period.*

u. Financing Agreement – Term Loan and Term Financing Al Musyarakah

Based on the Deed of Agreement on General Provisions for Financing No. 19 dated December 23, 2022 from Notary Julius Purnawan, SH, MSi, notary in Jakarta, the Company has signed a Financing Provisions Agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BTPN Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

The company obtained Al Musyarakah Term Loan and Term Financing facilities maximum amounting USD750,000,000 with accordion option amounting USD250,000,000, with the following details:

Agen Pinjaman Sindikasi/ *Syndicated Loan Agent*	**Fasilitas A/ *Facility A***	**Fasilitas B/ *Facility B***
Fasilitas Konvensional/*Conventional Facilities*		
PT Bank BTPN Tbk	USD 166.675.000	USD 83.325.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	USD 166.675.000	USD 83.325.000
PT Bank OCBC NISP Tbk	USD 99.990.000	USD 50.010.000
Fasilitas *Musyarakah/ Musyarakah Facility*		
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	USD 66.660.000	USD 33.340.000
Total	**USD 500.000.000**	**USD 250.000.000**

Fasilitas Konvensional yang diberikan oleh para kreditur awal terdiri dari:

- Fasilitas Konvensional A: fasilitas pinjaman berjangka dengan komitmen, dan
- Fasilitas Konvensional B: fasilitas pinjaman berjangka tanpa komitmen.

Conventional facilities provided by the initial lenders consist of:

- *Conventional Facility A: committed term loan facility, and*
- *Conventional Facility B: uncommitted term loan facility.*

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

u. Perjanjian Pembiayaan – Fasilitas Pinjaman *Term Loan* dan *Term Financing Al Musyarakah* (lanjutan)

Fasilitas Musyarakah yang diberikan oleh peserta Musyarakah awal terdiri dari:

- Fasilitas Musyarakah A: fasilitas pembiayaan berjangka *al musyarakah* dengan komitmen, dan
- Fasilitas Musyarakah B: fasilitas pembiayaan berjangka *al musyarakah* tanpa komitmen.

Perusahaan akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan Fasilitas untuk general corporate purpose, termasuk pembiayaan investasi maupun pembiayaan kembali pinjaman yang telah ada.

Berdasarkan surat permohonan No. KU.02.07/12/4/3/SKKS/KUMR/PLND-23 dan No. KU.02.07/12/4/4/SKKS/KUMR/PLND-23 pada tanggal 12 April 2023 , Perusahaan mengajukan permohonan penarikan Fasilitas Konvensional term loan dengan Komitmen senilai USD433.340.000 dan penarikan Fasilitas Pembiayaan Sindikasi Syariah dengan Komitmen senilai USD66.660.000.

Pada tanggal 26 April 2023 , Perusahaan memperoleh Distribusi Penarikan Fasilitas Kredit Konvensional dan Fasilitas Musyarakah seri A (dengan komitmen) senilai USD500.000.000.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

u. Financing Agreement – Term Loan and Term Financing Al Musyarakah (continued)

Musyarakah facilities provided by the initial Musyarakah participants consist of:

- *Musyarakah Facility A: comitted term financing al musyarakah, and*
- *Musyarakah Facility B: uncommitted term financing al musyarakah.*

The Company will use all the amount borrowed by it based on the facility for general corporate purpose, including investment financing and refinancing existing loans.

Based on application letter No. KU.02.07/12/4/3/SKKS/KUMR/PLND-23 and No.KU.02.07/12/4/4/SKKS/KUMR/PLND-23 on April 12, 2023, the Company submitted an application for withdrawal of the Conventional Term Facility loan with a Commitment of USD433,340,000 and withdrawal of the Sharia Syndicated Financing Facility with a Commitment of USD66,660,000.

On April 26, 2023, the Company obtained a Series of Withdrawal Distribution of Conventional Credit Facility and Musyarakah Facility (with commitment) amounted USD500,000,000.

50. PERKARA HUKUM

a) Gugatan dari Sapriadi dkk atas tuntutan ganti rugi atas pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung

Sapriadi dkk mengajukan gugatan kepada Perusahaan dengan nomor register 95/Pdt.G/2021/PN.KIS di Pengadilan Negeri Kisaran. Gugatan tersebut berkaitan dengan keberatan penggugat atas nilai ganti rugi tanah yang diberikan oleh Perusahaan atas pengadaan tanah untuk pembangunan Terminal Multipurpose pada Pelabuhan Kuala Tanjung.

Pada tanggal 8 Maret 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, memutus perkara tersebut, dengan amar putusan:

a. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
b. Menghukum Penggugat untuk membayar baya perkara sejumlah Rp2.024.

Penggugat kemudian mengajukan upaya hukum Banding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 5 April 2022.

Kemudian, penggugat menyampaikan Kontra Memori Banding melalui kepanitraan Pengadilan Negeri kisaran kepada Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 2 Juni 2022.

Pada tanggal 7 September 2022, perkara telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan nomor register 415/Pdt/2022/PT MDN dengan amar putusan yang intinya menerima permohonan banding, yang mana menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 95/Pdt.G/2021/PN Kis.

Atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi sebagaimana Relaas Pemberitahuan pernyataan kasasi dari Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Oktober 2022.

Perusahaan telah menyampaikan kontra memori kasasi pada tanggal 9 November 2022.

50. LAWSUIT

a) The lawsuit from Sapriadi et al to claim for compensation for the construction of the Kuala Tanjung Port

Sapriadi et al filed a lawsuit against the Company with registration number 95/Pdt.G/2021/PN.KIS at the Kisaran District Court. The lawsuit regarding to the plaintiff's objection to the value of land compensation provided by the Company for land acquisition for the construction of the Multipurpose Terminal at the Port of Kuala Tanjung.

On March 8, 2022, the Panel of Judges at the Kisaran District Court decided on this case, with the verdict:

a. Declare that the plaintiff's lawsuit is unacceptable (Niet Ontvankelijke Verklaard);

b. Punish the Plaintiff to pay court fees in the amount of Rp2,024.

The plaintiff then submitted an appeal as referred to in the Relaas Notice of Appeal Statement on April 5, 2022.

Then, the plaintiff submitted a Counter Memorandum of Appeal through the Partnership of the District Court to the Medan High Court on June 2, 2022.

On September 7, 2022, the case was decided by the Panel of Judges of the Medan High Court with register number 415/Pdt/2022/PT MDN with a decision which basically accepted the appeal, which upheld the decision of the Kisaran District Court number 95/Pdt.G/2021/PN Kis.

Based on the High Court's decision, the plaintiff filed a cassation as referred to in the Notification Release of the cassation statement from the Medan District Court on October 24, 2022.

The Company has submitted a counter cassation memorandum on November 9, 2022.

50. PERKARA HUKUM (lanjutan)

b) Gugatan dari Ramadhan Abadi atas tuntutan ganti rugi atas pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung

Ramadhan Abadi mengajukan gugatan kepada Perusahaan dengan register no 82/Pdt.G/2021/PN.KIS di Pengadilan Negeri Kisaran. Gugatan tersebut berkaitan dengan keberatan penggugat atas nilai ganti rugi yang diberikan oleh Perusahaan atas penggantian pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Terminal Multipurpose pada Pelabuhan Kuala Tanjung. Gugatan tersebut ditetapkan berdasarkan Penetapan Konsinyasi Pengadilan Negeri Kisaran No. 23/Pdt.P.Kos/2021/PN.Kis.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah memutus Perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Kis Tanggal Putusan tgl 8 Maret 2022 dengan Amar Putusan:

a. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
b. Menghukum pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.034;

Pada tanggal 1 April 2022, penggugat mengajukan Upaya Hukum Banding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding.

Kontra Memori Banding Telah disampaikan melalui kepanitraan Pengadilan Negeri kisaran kepada Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 2 Juni 2022.

Perkara telah diputus oleh Majelis Hakim pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan nomor register perkara 277/Pdt/2022/PT MDN, dengan amar putusan yang pada intinya menerima permohonan banding yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 82/Pdt.G/2021/PN Kis.

Penggugat kemudian mengajukan upaya hukum Kasasi sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan kasasi dari Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 September 2022.

Perusahaan telah menyampaikan kontra memori kasasi pada tanggal 10 Oktober 2022.

50. LAWSUIT (continued)

b) Lawsuit from Ramadhan Abadi over demands for compensation for the construction of Kuala Tanjung Port

Ramadhan Abadi filed a lawsuit against the Company with register no 82/Pdt.G/2021/PN.KIS at the Kisaran District Court. The lawsuit relates to the plaintiff's objection to the value of compensation given by the Company for compensation for land acquisition for the benefit of the construction of the Multipurpose Terminal at the Port of Kuala Tanjung. The lawsuit was determined based on the Kisaran District Court Consignment Decree No. 23/Pdt.P.Kos/2021/PN.Kis.

The Panel of Judges at the Kisaran District Court has decided on Case Number 82/Pdt.G/2022/PN Kis Decision Date March 8, 2022 with the Decision Verdict:

a. Declare that the plaintiff's lawsuit is unacceptable (Niet Ontvankelijke Verklaard);
b. Punish the Plaintiff to pay court fees in the amount of Rp2,034;

On April 1, 2022 the Plaintiff filed an Appeal as referred to in the Relaas Notification of Statement of Appeal.

Counter Memorandum of Appeal It has been submitted through the partnership of the District Court to the Medan High Court on June 2, 2022.

The case was decided by the Panel of Judges of the Medan High Court on August 1, 2022 with case register number 277/Pdt/2022/PT MDN, with a decision which essentially accepted the appeal request which upheld the Kisaran District Court decision number 82/Pdt.G/2021/PN Kis.

The plaintiff then filed an appeal for cassation in accordance with the release of the notification of the cassation statement from the Medan District Court on September 14, 2022.

The Company has submitted a counter cassation memorandum on October 10, 2022.

50. PERKARA HUKUM (lanjutan)

c) Gugatan dari PT Artha Sempana tentang pemberian Hak Penggunaan Lahan

Gugatan dari PT Artha Sempana yang meminta pembatalan atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.128/HPL/DA/86 tanggal 18 Desember 1986 tentang pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Perusahaan atas tanah seluas 592.771 m2 di Pelabuhan Sunda Kelapa.

Pada tahun 2019, PT Artha Sempana mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr dengan pokok gugatan pembatalan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 128/HPL/DA/86 pada tanggal 18 Desember 1986 yang berisi pemberian HPL kepada Perusahaan atas tanah seluas 592.771 m2 di Pelabuhan Sunda Kelapa dan permintaan ganti kerugian tarhadap lahan yang dikuasai oleh PT Artha Sempana apabila Perusahaan ingin menguasai lahan tersebut.

Pada tanggal 23 April 2019, Direktur Utama Perusahaan menerbitkan Surat Kuasa khusus kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selaku Jaksa Pengacara Negara dengan nomor surat KP.20.04/23/4/1/LGI/UT/PI.II-19 tanggal 23 April 2019.

Pada tanggal 24 November 2021, Perusahaan menerima salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 450/Pdt/2021/PT.DKI, yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Juni 2020.

Pada tanggal 17 Oktober 2022, Perusahaan menerima Salinan Putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi No. 3200K/Pdt/2022 yang amar putusannya menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat sehingga Putusan telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) (Perusahaan menang).

50. LAWSUIT (continued)

c) Lawsuit from PT Artha Sempana regarding the granting of Land Use Rights

Lawsuit from PT Artha Sempana requesting cancellation of Minister of Home Affairs Decree No.128/HPL/DA/86 dated December 18, 1986 regarding the granting of Land Management Rights (HPL) to the Company over a land area of 592,771 m2 in Sunda Kelapa Port.

In 2019, PT Artha Sempana filed a lawsuit with the North Jakarta District Court No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr with the principal claim for canceling the Decree of the Minister of Home Affairs No. 128/HPL/DA/86 on December 18, 1986 which contained the granting of HPL to the Company for a land area of 592,771 m2 in Sunda Kelapa Port and a request for compensation for land controlled by PT Artha Sempana if the Company wants to control the land.

On April 23, 2019, the President Director of the Company issued a special Power of Attorney to the North Jakarta District Attorney's Head as State Attorney Attorney with letter number KP.20.04/23/4/1/LGI/UT/PI.II-19 dated April 23, 2019.

On November 24, 2021, the Company received a copy of the DKI Jakarta High Court Decision No. 450/Pdt/2021/PT.DKI, which in essence strengthens the North Jakarta District Court Decision No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr dated June 18, 2020.

On October 17, 2022, the Company received a copy of the Supreme Court's decision at cassation level no. 3200K/Pdt/2022 whose ruling rejected the Cassation Application from the Cassation Appellant/Plaintiff so that the Decision has permanent legal force (In Kracht Van Gewijsde) (the Company wins).

50. PERKARA HUKUM (lanjutan)

d) Gugatan dari PT Resources Alam Indonesia tentang sertifikat HPL

Perkara dengan No. 151/Pdt.G/2017/PN.Plg., di Pengadilan Negeri Palembang terkait gugatan perdata dari PT Resources Alam Indonesia yang menuntut pembatalan Sertifikat HPL No. 88/Sungai Selincah atas nama Perusahaan yang diklaim tumpang tindih dengan Sertifikat HGB No. 100/Sei Selincah atas nama PT Resources Alam Indonesia yang telah berakhir jangka waktunya.

Pengadilan Negeri Palembang dalam Putusan No. 151/Pdt.G/2017/PN.Plg., dalam amarnya menyatakan diantaranya menyatakan sertifikat HPL No. 88/Sungai Selincah atas nama Perusahaan cacat yuridis atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memerintahkan Perusahaan membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp25.000 per tahun sejak terbitnya sertipikat HPL No. 88/Sungai Selincah sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusan banding No. 80/Pdt/2018/PT.Plg dalam amarnya telah menyatakan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 151/Pdt.G/2017/PN/Plg.

Mahkamah Agung dalam putusan di tingkat Kasasi No. 2225K/Pdt/2019 dalam amar putusan telah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Perusahaan).

Perusahaan mengajukan Upaya Hukum Luar biasa Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi No. 2225K/Pdt/2019.

Perusahaan telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali No. 210PK/PDT/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang pada intinya menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Perusahaan menang).

50. LAWSUIT (continued)

d) Lawsuit from PT Resources Alam Indonesia regarding the HPL certificate

Case with No. 151/Pdt.G/2017/PN.Plg., in Palembang Public Court about civil suit from PT Resources Alam Indonesia demanded the cancellation of Right to Operate (HPL) certificate No .88/Sungai Selincah registered under the name of the Company which is claimed to be overlapped with HGB certificate No. 100/Sei Selincah registered under the name of PT Resources Alam Indonesia which terms has been terminated.

The Palembang Public Court in Decision No. 151/Pdt.G/2017/PN.Plg. in its ruling stated that among others certificates of HPL No. 88/Sungai Selincah registered under the name of the Company is a juridical defective or no binding legal force, ordering the Company to pay compensation to the plaintiff in the amount of Rp25,000 per year since the issuance of certificate of HPL No. 88/Sungai Selincah until the decision has permanent legal force.

Palembang High Court on the appeal decision No. 80/Pdt/2018/PT.Plg has decided to strengthen the Decision of Palembang Public Court No. 151/Pdt.G/2017/PN/Plg.

Supreme Court in the decision at cassation level No. 2225K/Pdt/2019 has rejected the application for cassation from the cassation applicant (the Company).

The Company filed an extraordinary legal action review of the decision of the Supreme Court of Cassation No. 2225K/Pdt/2019.

The Company has received a copy of the Supreme Court's Decision No. 210PK/PDT/2021 dated December 15, 2021, which essentially received a request for reconsideration from the petitioner for review petition (the Company wins).

50. PERKARA HUKUM (lanjutan)

e) Gugatan dari Siti Hawa binti Umar dkk tentang sengketa kepemilihan tanah di Kotawaringin Barat

Gugatan yang diajukan oleh Siti Hawa Binti Umar, dkk di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan nomor register 13/Pdt.G/2022/PN.Pbu terkait dengan sengketa kepemilikan tanah dengan seluas 14.150 M^2 yang terletak di Sungai Kalap/ Sungai Kumai RT.12, kelurahan Kumai Hulu, kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Majelis Hakim PN Pangkalan Bun telah memutus perkara No. 13/Pdt.G/2022/PN.Pbu tanggal 6 Oktober 2022 dengan Amar Putusan:

Dalam eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Dalam subjek kasus:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagian tanah terletak di Sungai Kumai Rt.18, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas 14.150 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kumai;
   - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
   - Sebelah Utara berbatasan dengan Perusahaan;
   - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Ahli Waris dan KPC;

   belum terbayar oleh Tergugat I;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan batal sebagian Perjanjian Penyerahan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi atas sebagian bidang tanah seluas 14,150 m2 dari total keseluruhan seluas seluas 273.728 m2;
5. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan sisa sebagian tanah seluas 14.150 meter2 yang dikuasai kepada Para Penggugat (Ahli Waris) Alm. Muhammad bin Mat Amin secara suka rela tanpa dibebani kewajiban apa pun untuk digunakan secara bebas;

50. LAWSUIT (continued)

e) Lawsuit from Siti Hawa bint Umar et al regarding disputes over land ownership in West Kotawaringin

The lawsuit filed by Siti Hawa Binti Umar, DKK at the Pangkalan Bun District Court with register number 13/Pdt.G/2022/PN.Pbu is related to a land ownership dispute with an area of 14,150 M2 which is located in Sungai Kalap/ Sungai Kumai RT. 12, Kumai Hulu sub-district, Kumai sub-district, West Kotawaringin Regency.

The Panel of Judges for the Pangkalan Bun District Court has decided on case Number 13/Pdt.G/2022/PN.Pbu on October 6, 2022 with the following verdict:
In exception:
- *Rejected the exceptions of Defendant I, Defendant III, Defendant IV and Defendant V;*

In subject of the case:
1. *Partially granted the Plaintiff's lawsuit;*
2. *Declare that part of the land is located in Sungai Kumai RT.18, Kumai Hulu Village, Kumai District, Kotawaringin Barat Regency, Central Kalimantan Province, with an area of 14,150 m2 with the following boundaries:*
   - *To the east it is bordered by Kumai River;*
   - *West side is bordered by Road;*
   - *North side is bordered by the Company;*
   - *South side is bordered by Land owners by heirs and KPC;*

   has not been paid by the defendant I;
3. *Declare that Defendant I has defaulted;*
4. *Declare the cancellation of part of the land acquisition agreement with compensation for a portion of the land area of 14.150 m2 out of a total area of 273,728 m2;*
5. *Punish by ordering Defendant I to voluntarily return the remaining portion of the land area of 14,150 meters2 which owned to the Plaintiffs (Heirs) of the late Muhammad bin Mat Amin without being burdened with any obligation to use it by free;*

50. PERKARA HUKUM (lanjutan)

e) Gugatan dari Siti Hawa binti Umar dkk tentang sengketa kepemilihan tanah di Kotawaringin Barat (lanjutan)

6. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Penilaian Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh untuk Lokasi Pelabuhan CPO milik Perusahaan Cabang Kumai yang terletak di Sungai Kalap/Sungai Kumai, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor: 295.580.42/PAN-PT/2000;
7. Menyatakan Sertifikat HPL No.5 Tahun 2001 atas nama Tergugat I (Perusahaan) yang diterbitkan oleh Tergugat III tidak memiliki nilai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Perusahaan telah menyatakan Banding sebagai Akta pernyataan Banding pada tanggal 20 Oktober 2022 dan telah menyampaikan memori banding pada tanggal 25 Oktober 2022.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah memutus Perkara Nomor 97/PDT/2022/PT.PLK tanggal 15 Desember 2022 dengan amar putusan yang pada intinya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun nomor 13/Pdt.G/2022/P.Pbu yang dimohonkan banding tersebut.

Atas Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 97/PDT/2022/PT.PLK tanggal 15 Desember 2022, Siti Hawa Binti Umar, dkk mengajukan upaya hukum kasasi melalui Paniteria Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 2 Januari 2023.

f) Gugatan dari PT Kapuas Prima Coal Tbk

Penggugat mengajukan gugatan kepada Perusahaan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 37/Pdt.G/2022/PN.Pbu terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum atas sengketa kepemilikan tanah dengan seluas 3.029 m^2/0,39 Ha yang terletak di Jalan CPO Pelabuhan Kalap, RT 018, Kumai Hulu, Kumai, Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

50. LAWSUIT (continued)

e) Lawsuit from Siti Hawa bint Umar et al regarding disputes over land ownership in West Kotawaringin (continued)

6. Declare legally valid Minutes of Assessment of Compensation for Land, Buildings and Growing Planting for the CPO Port Location of the Company Kumai Branch located on the Kalap River/Kumai River, Kumai Hulu Village, Kumai District, West Kotawaringin Regency, Number: 295.580.42/PAN-PT/2000;
7. Declare the HPL Certificate No. 5 Year 2001 on behalf of Defendant I (the Company) issued by Defendant III has no binding legal force value;
8. Punish Defendant I to submit and comply with the contents of this decision;
9. Rejecting the Plaintiff's claim for other than and the rest;

The Company has stated the Appeal as a Deed of Appeal statement on October 20, 2022 and has submitted a memory of appeal on October 25, 2022.

The Panel of Judges of the Palangka Raya High Court has decided on Case Number 97/PDT/2022/PT.PLK dated December 15, 2022 with a decision which essentially cancels the decision of the Pangkalan Bun District Court number 13/Pdt.G/2022/P.Pbu which is being appealed.

Based on the Decision of the Palangka Raya High Court Number 97/PDT/2022/PT.PLK dated December 15, 2022, Siti Hawa Binti Umar, et al filed an appeal through the Pangkalan Bun District Court Committee on January 2, 2023.

f) The lawsuit filed by PT Kapuas Prima Coal Tbk

The plaintiff has filed a lawsuit to Pangkalan Bun District Court Number 37/Pdt.G/2022/PN.Pbu related to an Act Against Law a land ownership dispute with an area of 3,029 m^2/0.39 Ha which located on Jalan CPO Pelabuhan Kalap, RT 018, Kumai Hulu, Kumai, West Kotawaringin, Central Kalimantan Province.

50. PERKARA HUKUM (lanjutan)

f) Gugatan dari PT Kapuas Prima Coal Tbk (lanjutan)

Pada 27 Oktober 2022, telah dibacakan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pbu yang amar putusanya menyatakan Perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan penyerobotan tanah milik penggugat dengan luas 0,39 Ha. Atas putusan tersebut, Perusahaan menyampaikan upaya hukum banding.

Pada 26 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah memutus Perkara Nomor 102/PDT/2022/PT PLK dengan amar Putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pbu yang dimohonkan banding tersebut.

Pada tanggal 5 Januari 2023, penggugat mengajukan upaya hukum kasasi melalui Paniteria Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

g) Gugatan dari Ibrahim L Dg Sitaba

Penggugat mengajukan gugatan kepada Perusahaan di Pengadilan Negeri Makassar terkait dengan klaim tanah milik Perusahaan yang terletak di Kelurahan Ujung Tanah berdasarkan sertifikat HPL No. 1. Penggugat klaim atas 14,57 Ha berdasarkan Surat “Simana Boetaja Tanae” dari Hoofd Van Landreate Makassar, Cap Crown tanggal 27/09/1858 an. Ipadjallo, Persil No.24, dvv III, Kohir No. 9 CI (Lampok Camboko). Tanah tersebut merupakan tanah milik adat a.n. Ipadjallo. Penggugat mempermasalahkan tanah seluas 5 Ha yang disewakan ke Pertamina, menurut Penggugat tanah tersebut merupakan bagian dari luasan 14,57 Ha.

Pada 7 Juli 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri makassar memutus Perkara Nomor 358/Pdt.G/2019/PN.Mks dengan amar putusan:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp2.886.

50. LAWSUIT (continued)

f) The lawsuit filed by PT Kapuas Prima Coal Tbk (continued)

On October 27, 2022, has been read the Decision of the Pangkalan Bun District Court Number 37/Pdt.G/2022/PN Pbu dated which in stated that the Company had conducted illegal act by expropriating land belonging to PT Kapuas Prima Coal Tbk with an area of 0.39 Ha. Based on this decision, the Company submitted an appeal.

On December 26, 2022, the Panel of Judges of the Palangka Raya High Court has decided on Case Number 102/PDT/2022/PT PLK with a ruling that cancels the decision of the Pangkalan Bun District Court number 37/Pdt.G/2022/PN Pbu which the appeal was filed for.

On January 5, 2023, the plaintiff filed a cassation through the Pangkalan Bun District Court Committee.

g) The lawsuit by Ibrahim L Dg Sitaba

The plaintiff has filed a lawsuit to the Makassar District Court is related to land claims owned by the Company which is located in Ujung Tanah Village based on HPL certificate No. 1. The Plaintiff claims on 14.57 Ha are based on Letter "Simana Boetaja Tanae" from Hoofd Van Landreate Makassar, Stamp Crown dated 27/09/1858 an. Ipadjallo, Persil No. 24, dvv III, Kohir No. 9 CI (Lampok Camboko). The land is owned by customary land on behalf of Ipadjallo. The Plaintiff disputed the 5 Ha land that was leased to Pertamina which according to the Plaintiff the land was part of an area of 14.57 Ha.

On 7 July 2020, the Makassar District Court Panel of Judges decided on Case Number 358/Pdt.G/2019/PN.Mks with the verdict:

- *Rejecting the plaintiff's lawsuit in its entirety;*
- *Punish the plaintiff to pay court fees incurred in this case which until now has been estimated at Rp2,886.*

50. PERKARA HUKUM (lanjutan)

g) Gugatan dari Ibrahim L Dg Sitaba (lanjutan)

Pada 14 Desember 2020, penggugat mengajukan banding dan Perkara telah diputus pada Tingkat Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 346/PDT/2020/PT MKS dengan amar putusan:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 358/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 7 Juli 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.

Pada tanggal 10 Februari 2021, penggugat mengajukan kasasi dan Perusahaan sudah menyerahkan kontra memori kasasi pada tanggal 1 April 2021.

Pada 21 April 2022, Mahkamah Agung telah memutus perkara tingkat Kasasi Nomor 1664K/PDT/2022 yang pada amar putusannya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Salinan putusan resmi telah diterima oleh kuasa hukum Perusahaan pada tanggal 27 Juli 2022.

Pada 6 Desember 2022, penggugat mengajukan upaya Hukum Luar Biasa PK sebagaimana Relaas pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Makassar. Perusahaan telah menyampaikan Kontra memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Januari 2023.

h) Gugatan dari Makis Sasambe/ PT Dian Osiania

Penggugat mengajukan gugatan kepada Perusahaan terkait kerugian yang dialami penggugat atas rusaknya kapal milik penggugat yang diklaim akibat dari kegiatan tergugat dengan nomor perkara 384/pdt.G/2017/PN.Mnd.

Pada 22 Maret 2018, Pengadilan Negeri Manado telah memutuskan perkara nomor 384/pdt.G/2017/PN.Mnd dengan amar putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklijke Verklaard).

50. LAWSUIT (continued)

g) The lawsuit by Ibrahim L Dg Sitaba (continued)

On December 14, 2020, the plaintiff filed an appeal and the case was decided at the Makassar High Court with Number 346/PDT/2020/PT MKS with the verdict:

- *Received the original Appellant's appeal from the Plaintiff;*
- *Strengthening the decision of the Makassar District Court Number 358/Pdt.G/2019/PN Mks dated July 7, 2020 which is being appealed;*
- *Sentenced the plaintiff's original appellant to pay the costs of the case at both court levels which at the appeal level was set at Rp150.*

On February 10, 2021, the plaintiff filed an appeal and the Company has submitted a counter cassation memorandum on April 1, 2021.

On April 21, 2022, The Supreme Court has decided on the cassation case Number 1664K/PDT/2022 that rejected the cassation request from the Cassation Appellant. The copy of the official decision was received by the Company's attorney on July 27, 2022.

On December 6, 2022, the plaintiff filed an Extraordinary PK Remedy according to the Relaas notification from the Makassar District Court. The Company has submitted a Judicial Review Counter memory on January 5, 2023.

h) The lawsuit by Makis Sasambe/PT Dian Osiania

The plaintiff has filed a lawsuit the Company regarding the loss suffered by the plaintiff due to the damage to the plaintiff's ship claimed as a result of the activities of the defendant with case number 384/pdt.G/2017/PN.Mnd.

On March 22, 2018, the Manado District Court decided case number 384/pdt.G/2017/PN.Mnd with a ruling declaring the plaintiff's claim unacceptable (Niet On Vanklijke Verklaard).

50. PERKARA HUKUM (lanjutan)

h) Gugatan dari Makis Sasambe/ PT Dian Osiania (lanjutan)

Pada 17 Januari 2019, penggugat mengajukan upaya hukum banding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado telah memutus Perkara Nomor 176/PDT/2018/PT MND dengan amar putusan:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.

Pada 12 Juni 2019, penggugat mengajukan Memori Kasasi dan menunggu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

50. LAWSUIT (continued)

h) The lawsuit by Makis Sasambe/PT Dian Osiania (continued)

On January 17 2019, the plaintiff filed an appeal. The Panel of Judges of the Manado High Court decided on Case Number 176/PDT/2018/PT MND with the following verdict:

- *Declare that the lawsuit was unacceptable (Niet Ontvankelijke Verklaard);*
- *Penalize the plaintiff's to pay court costs at the appeal level which is Rp150.*

On June 12, 2019, the plaintiff filed a Memorandum of Cassation and is waiting for the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Cassation Decision.

51. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-34/MBU/02/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan,S.H.,M.Kn No.11 tanggal 14 Maret 2023, Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan diantaranya menetapkan perubahan nomenklatur serta susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

51. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

a. Based on The Decree of The Minister of SOEs No. SK-34/MBU/02/2023 dated February 22, 2023 which notarized through Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn., No. 11 dated March 14, 2023, the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company stipulated among other changes of nomenclature and the Board of Commisioners and Directors as folllows:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Sudung Situmorang	*President Commissioner*
Komisaris	Arif Toha Tjahjagama	*Commissioner*
Komisaris	Didi Sumedi	*Commissioner*
Komisaris	Jodi Mahardi	*Commissioner*
Komisaris Independen	Heru Sukanto	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Muchtar Luthfi Mutty	*Independent Commissioner*
Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Arif Suhartono	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Hambra	*Vice President Director*
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Mega Satria	*Director of Finance and Risk Management*
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	Ihsanuddin Usman	*Director of Human Resources and General Affair*
Direktur Strategi	Prasetyo	*Strategy Director*
Direktur Investasi	Boy Robyanto	*Investment Director*
Direktur Pengelola	Putut Sri Muljanto	*Managing Director*

51. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

b. Pada tanggal 8 Februari 2023, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI) tentang Layanan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Ruang lingkup perjanjian ini adalah pengelolaan dana PPIP karyawan Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perusahaan berhak menentukan usia pensiun normal dan mengubah pilihan paket investasi, serta berhak menerima pemberitahuan mengenai hasil pengelolaan dana setiap bulan.

- Perusahaan juga dapat menyampaikan perubahan dan penambahan daftar rincian data karyawan dan jumlah iuran, serta karyawan Perusahaan memperoleh manfaat perlindungan jiwa dengan uang pertanggungan jiwa senilai Rp10.000.000 dan tidak dikenakan premi dan/atau biaya apapun.

- Perusahaan diwajibkan untuk menyetorkan iuran untuk dan atas nama karyawan Perusahaan serta daftar rincian data karyawan dan jumlah iuran kepada DPLK BNI.

c. Berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 30 Januari 2023, oleh Notaris Nanda Fauz Iwan SH., M.Kn., Perusahaan mengalihkan seluruh saham Perusahaan di PMT yang terdiri dari 807.048 lembar saham Seri A dan 27.583.523 lembar saham Seri B yang mewakili 97,73% kepemilikan Perusahaan di PMT kepada SPTP.

Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, SPTP menerbitkan 3.244.571 saham baru untuk Perusahaan dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham sebagai kompensasi pengalihan saham PMT dari Perusahaan kepada SPTP.

51. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

b. On February 8, 2023, the Company entered into a cooperation agreement with Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI) regarding Defined Contribution Pension Program Services (PPIP).

The scope of this agreement is the management of PPIP funds of the Company's employee, with the following conditions:

- *The Company has the right to determine the normal retirement age and change the choice of investment packages, and has the right to receive notifications about the results of fund management on monthly basis.*

- *The Companies can also submit changes and additions to the list of employee data and the amount of contributions, and the Company's employees receive life protection benefits with a sum of life insurance amounting to Rp10,000,000 and are not subject to any premiums and/or fees.*

- *The Company are required to deposit contributions for and on behalf of the Company's employees as well as a detailed list of employee data and the amount of contributions to DPLK BNI.*

c. Based on Notarial Deed No. 10 dated January 30, 2023 by Notary Nanda Fauz Iwan SH., M.Kn., the Company transferred all of the Company's shares in PMT consisting of 807,048 Series A shares and 27,583,523 Series B shares representing 97.73% of the Company's ownership in PMT to SPTP.

In relation to such transfer of right of shares, SPTP issued 3,244,571 new shares for the Company with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of PMT from the Company to SPTP.

51. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

c. Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian BUMN melalui suratnya No. S-38/MBU/01/2023 pada tanggal 27 Januari 2023. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 1 Februari 2023.

d. Pada tanggal 21 Maret 2023, PTP1 telah melakukan pelunasan seluruh fasilitas kredit sindikasi dari PT Indonesia Infrastructure Finance dan Bank Mandiri (Catatan 25).

e. Pada tanggal 18 April 2023, PTP1 telah melakukan pelunasan seluruh fasilitas kredit investasi dari Bank Mandiri (Catatan 25).

f. Pada tanggal 27 April 2023, Perusahaan telah melakukan pelunasan utang obligasi global Senior Notes, penerbitan tahun 2018 (Catatan 24), dan biaya bunga sejumlah USD511.250.000 menggunakan fasilitas kredit sindikasi dari Bank Mandiri sebesar USD500.000.000 (Catatan 49u).

51. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

c. The transfer of shares has been approved by the Ministry of State-Owned Entity (SOE) through its letter No. S-1048/MBU/12/2021 on January 27, 2023. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by The Ministry of Law and Human Rights dated February 1, 2023.

d. On March 21, 2023, PTP1 has repaid all the syndicated credit facilities from PT Indonesia Infrastructure Finance and Bank Mandiri (Note 25).

e. On April 18, 2023, PTP1 has repaid the all investment credit facility from Bank Mandiri (Note 25).

f. On April 27, 2023, the Company has repaid the global Senior Notes, Issued in 2018 (Note 24), and interest, amounted to USD511,250,000 using syndicated credit facility from Bank Mandiri of USD500,000,000 (Note 49u).

52. INFORMASI SEGMEN

Informasi yang menyangkut segmen usaha Grup adalah sebagai berikut:

52. SEGMENT INFORMATION

Information concerning the Group's business segments is as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2022					
	Operasi Kepelabuhanan/ *Port Operation*	**Jasa Lainnya/ *Other Services***	**Total Sebelum Eliminasi/*Total Before Elimination***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Total/ *Total***	
Pendapatan operasi segmen						*Segment operating revenues*
Pendapatan operasi eksternal	26.781.758.791	2.918.845.344	29.700.604.135	-	29.700.604.135	*External operating revenues*
Pendapatan operasi antar segmen	8.981.833.109	2.018.437.644	11.000.270.753	(11.000.270.753)	-	*Inter-segment operating revenues*
Total pendapatan operasi segmen					29.700.604.135	*Total segment operating revenues*
Beban operasi	(29.756.772.868)	(4.038.359.251)	(33.795.132.119)	10.640.702.928	(23.154.429.191)	*Operating expenses*
Pendapatan operasi lainnya - neto	372.153.179	193.379.261	565.532.440	3.113.057	568.645.497	*Other operating income - net*
Laba usaha					**7.114.820.441**	***Operating income***
Pendapatan keuangan	759.759.720	42.360.298	802.120.018	(421.629.748)	380.490.270	*Finance income*
Beban keuangan	(2.723.614.361)	(685.118.179)	(3.408.732.540)	837.689.572	(2.571.042.968)	*Finance costs*
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	3.194.119.075	(256.639.058)	2.937.480.017	(2.634.864.325)	302.615.692	*Equity in income of associates and joint control entity - net*
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan					**5.226.883.435**	***Income before final tax and corporate income tax***
Beban pajak final	(375.850.289)	(112.379.013)	(488.229.302)	-	(488.229.302)	*Final tax expense*
Laba sebelum pajak penghasilan badan					**4.738.654.133**	***Income before corporate income tax***
Pajak penghasilan badan						***Corporate income tax***
Kini	(898.369.096)	(59.968.402)	(958.337.498)	-	(958.337.498)	*Current*
Tangguhan	43.164.362	84.988.860	128.153.222	-	128.153.222	*Deferred*
Laba tahun berjalan					**3.908.469.857**	***Income for the year***
Posisi keuangan						***Financial position***
Aset segmen	134.500.471.592	25.724.382.172	160.224.853.764	(41.874.275.858)	118.350.577.906	*Segment assets*
Liabilitas segmen	71.737.725.596	21.366.079.896	93.103.805.492	(17.557.920.361)	75.545.885.131	*Segment liabilities*
Penyusutan dan amortisasi segmen	3.701.971.300	335.928.632	4.037.899.932	(470.037.799)	3.567.862.133	*Segment depreciation and amortization*

52. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen usaha Grup adalah sebagai berikut: (lanjutan)

52. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Group's business segments is as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2021					
	Operasi Kepelabuhanan/ *Port Operation*	**Jasa Lainnya/ *Other Services***	**Total Sebelum Eliminasi/*Total Before Elimination***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Total/ *Total***	
Pendapatan operasi segmen						*Segment operating revenues*
Pendapatan operasi eksternal	28.353.022.778	461.783.559	28.814.806.337	-	28.814.806.337	*External operating revenues*
Pendapatan operasi antar segmen	5.399.655.411	1.317.551.756	6.717.207.167	(6.717.207.167)	-	*Inter-segment operating revenues*
Total pendapatan operasi segmen					28.814.806.337	*Total segment operating revenues*
Beban operasi	(27.346.746.497)	(1.649.297.717)	(28.996.044.214)	6.454.522.959	(22.541.521.255)	*Operating expenses*
Pendapatan operasi lainnya - neto	2.079.228.416	(39.558.040)	2.039.670.376	(1.772.757.832)	266.912.544	*Other operating income - net*
Laba usaha					**6.540.197.626**	***Operating income***
Pendapatan keuangan	587.319.404	5.235.434	592.554.838	(184.778.954)	407.775.884	*Finance income*
Beban keuangan	(3.357.351.484)	(78.509.211)	(3.435.860.695)	895.777.829	(2.540.082.866)	*Finance costs*
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	1.626.599.275	-	1.626.599.275	(1.371.491.687)	255.107.588	*Equity in income of associates and joint control entity - net*
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan					**4.662.998.232**	***Income before final tax and corporate income tax***
Beban pajak final	(473.745.661)	(13.926.208)	(487.671.869)	-	(487.671.869)	*Final tax expense*
Laba sebelum pajak penghasilan badan					**4.175.326.363**	***Income before corporate income tax***
Pajak penghasilan badan						***Corporate income tax***
Kini	(821.369.756)	(26.363.420)	(847.733.176)	-	(847.733.176)	*Current*
Tangguhan	(150.992.261)	(455.650)	(151.447.911)	-	(151.447.911)	*Deferred*
Laba tahun berjalan					**3.176.145.276**	***Income for the year***
Posisi keuangan						***Financial position***
Aset segmen	140.129.226.645	2.199.514.469	142.328.741.114	(26.099.666.614)	116.229.074.500	*Segment assets*
Liabilitas segmen	89.713.731.935	2.036.440.753	91.750.172.688	(17.574.207.627)	74.175.965.061	*Segment liabilities*
Penyusutan dan amortisasi segmen	4.161.043.395	71.865.183	4.232.908.578	(1.033.436.603)	3.199.471.975	*Segment depreciation and amortization*

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year then Ended December 31,*		
	2022	**2021**	
Pendapatan Operasi			***Operating Revenues***
Regional 1	3.854.214.067	3.397.814.392	*Region 1*
Regional 2	11.584.512.249	11.598.172.973	*Region 2*
Regional 3	9.123.938.134	9.906.466.364	*Region 3*
Regional 4	5.137.939.685	3.912.352.608	*Region 4*
Total	**29.700.604.135**	**28.814.806.337**	***Total***

52. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *52. SEGMENT INFORMATION (continued)*

Informasi yang menyangkut segmen usaha Grup adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Information concerning the Group's business segments is as follows: (continued)

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Aset tidak lancar			***Non-current asset***
Regional 1	14.719.906.514	13.646.983.523	*Region 1*
Regional 2	42.940.361.555	41.600.903.896	*Region 2*
Regional 3	27.859.314.239	26.490.572.342	*Region 3*
Regional 4	11.210.828.204	11.110.020.372	*Region 4*
Total	**96.730.410.512**	**92.848.480.133**	***Total***

53. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS / *53. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION*

Aktivitas non-kas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, adalah sebagai berikut:

Non-cash of investing activities for the year ended December 31, 2022 and 2021, are as follow:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year then Ended December 31,*		
	2022	**2021**	
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	38.288.643	45.773.043	*Addition of right-of-use assets through lease liabilities*
Kapitalisasi biaya pinjaman ke aset tetap	47.306.74	89.535.918	*Capitalization of borrowing costs*
Penambahan aset tetap melalui penambahan utang	933.015.517	159.270.441	*Acquisition of fixed assets through payable*
Penambahan aset tetap melalui uang muka	248.304.048	172.467.503	*Acquisition of fixed assets through advance*
Penambahan aset tetap melalui kapitalisasi bunga pinjaman	325.254.601	86.962.770	*Acquisition of fixed assets through interest capitalization*

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movement of liabilities arising from financing activities in the consolidated statement of cash flows are as follows:

			Non- arus kas/*Non-cash flow*			
	1 Januari 2022/ *January 1, 2022*	**Arus kas/ *Cash flow***	**Selisih kurs/ *Foreign exchange difference***	**Lainnya/ *Others***	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Pinjaman bank jangka pendek	138.493.774	(33.131.943)	-	-	105.361.831	*Short-term bank loans*
Utang bank	8.888.945.339	(1.046.132.681)	-	-	7.842.812.658	*Bank loan*
Utang obligasi	40.176.176.480	(1.272.889.596)	3.851.347.241	-	42.754.634.125	*Bonds payable*
Dividen	-	(1.316.854.000)	-	1.316.854.000	-	*Dividend*
Liabilitas sewa	333.885.712	(252.615.339)	-	353.865.439	435.135.812	*Lease liabilities*
Total	**49.537.501.305**	**(3.921.623.559)**	**3.851.347.241**	**1.670.719.439**	**51.137.944.426**	***Total***

54. HAL LAINNYA

COVID-19

Operasi Grup telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia meliputi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Dampak pandemi ini terhadap Grup belum memberikan pengaruh signifikan. Pengaruh lebih lanjut yang signifikan dari pandemi ini, bila ada, akan direfleksikan dalam pelaporan keuangan Grup di periode-periode berikutnya.

Kondisi peperangan di Ukraina

Invasi Rusia ke Ukraina menimbulkan tantangan yang luas. Mengingat situasi yang sedang berkembang, ada banyak faktor dan peristiwa yang tidak atau belum dapat diketahui yang dapat berdampak material terhadap operasi Grup. Peristiwa terkait kondisi peperangan di Ukraina ini telah dan terus berdampak pada harga komoditas, rantai pasokan, risiko kredit termasuk yang terkait dengan piutang, perdagangan komoditas, perbendaharaan, dan faktor lainnya. Salah satu dari faktor-faktor ini, secara individu atau agregat, dapat berdampak material terhadap pendapatan, arus kas, dan kondisi keuangan Grup.

Grup telah dan mungkin terus menilai dampak yang disebabkan oleh kondisi peperangan di Ukraina terhadap operasi Grup. Pengaruh lebih lanjut yang signifikan dari Peperangan ini, bila ada, akan direfleksikan dalam pelaporan keuangan Grup di periode-periode berikutnya.

54. OTHER MATTER

COVID-19

The Group's operation has and may continue to be impacted by the outbreak of Covid-19 pandemic. The effects of Covid-19 pandemic to the global and Indonesian economy include lower economic growth, decline in capital markets, increase in credit risk, depreciation of foreign currency exchange rates and disruption of business operation. The effects of the pandemic to the Group are not significant. Further significant impact of the pandemic, if any, will be reflected in the Group's financial reporting in the subsequent periods.

The war in Ukraine

Russia's recent invasion of Ukraine poses wide-ranging challenges. Given the evolving situation, there are many unknown factors and events that could materially impact to the Group operations. These events related to the war in Ukraine have and continue to impact commodity prices, our supply chain, credit risks including those related to receivables, commodity trading, treasury and other factors. Any of these factors, individually or in aggregate, could have a material effect on the Group earnings, cash flows and financial condition.

The Group has and may continue to assess the impact of the war in Ukraine to the Group operations. Further significant impact of the War, if any, will be reflected in the Group's financial reporting in the subsequent periods.

2022
Annual Report
Laporan Tahunan

Solid Integration

Towards a National Maritime Economic Gateway

Integrasi Kuat Menuju Gerbang Ekonomi Maritim Nasional

PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok
Jakarta Utara, 14310, Indonesia
T: +62 31 3298631 - 37
E: info@pelindo.co.id

pelindo.co.id